



SALINAN

**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 134 TAHUN 2022

TENTANG

PEMUTAKHIRAN RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 21 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional, Pemerintah telah menetapkan Peraturan Presiden Nomor 108 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2023;
 - b. bahwa dalam rangka mendukung terwujudnya perekonomian nasional berdasarkan demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, dan untuk menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional, telah disusun Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2023 yang termuat dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2023;
 - c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 30 Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional, perlu dilakukan pemutakhiran Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2023 berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2023;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Presiden tentang Pemutakhiran Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2023;

Mengingat: . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

-2-

- Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 208, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6827);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6056);
4. Peraturan Presiden Nomor 108 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2023 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 174);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : PERATURAN PRESIDEN TENTANG PEMUTAKHIRAN RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2023.

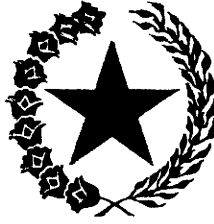
Pasal 1

Dokumen pemutakhiran Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2023 merupakan bagian dari dokumen sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 108 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2023, yang telah dimutakhirkan berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2023.

Pasal 2

- (1) Pemutakhiran Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2023 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, memuat pemutakhiran:
- a. Narasi;
 - b. Matriks Pembangunan yang memuat Prioritas Nasional, Program Prioritas, Kegiatan Prioritas, dan Proyek Prioritas dengan penjabaran sasaran, indikator, target, dan alokasi pendanaannya serta instansi pelaksana; dan
 - c. Matriks Proyek Prioritas Strategis/*Major Project* yang memuat Proyek Prioritas Strategis/*Major Project* pada Prioritas Nasional beserta alokasi pendanaannya.

(2) Ketentuan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

-3-

- (2) Ketentuan mengenai Narasi Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2023 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Presiden ini.
- (3) Ketentuan mengenai Matriks Pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Presiden ini.
- (4) Ketentuan mengenai Matriks Proyek Prioritas Strategis/*Major Project* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Presiden ini.

Pasal 3

- (1) Dokumen pemutakhiran Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2023 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 digunakan oleh:
 - a. Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, sebagai instrumen pengendalian pelaksanaan rencana pembangunan nasional;
 - b. menteri/kepala lembaga, untuk melakukan perubahan Rencana Kerja Kementerian/Lembaga Tahun 2023; dan
 - c. pemerintah daerah, sebagai pedoman pelaksanaan dan perubahan dokumen rencana pembangunan daerah Tahun 2023.
- (2) Perubahan Rencana Kerja Kementerian/Lembaga Tahun 2023 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 4

Peraturan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

-4-

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Presiden ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 31 Desember 2022

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

JOKO WIDODO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 31 Desember 2022

**MENTERI SEKRETARIS NEGARA
REPUBLIK INDONESIA,**

ttd.

PRATIKNO

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2022 NOMOR 242

Salinan sesuai dengan aslinya
**KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA
REPUBLIK INDONESIA**

Deputi Bidang Perundang-undangan dan
Administrasi Hukum,



[Handwritten signature]
Silvanna Djaman



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN I
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 134 TAHUN 2022
TENTANG
PEMUTAKHIRAN RENCANA KERJA PEMERINTAH
TAHUN 2023

NARASI
RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2023



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

**PEMUTAKHIRAN NARASI
RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2023**

No.	Perihal Perubahan	Pemutakhiran RKP Tahun 2023
1	Perubahan alinea kedua dalam halaman I.2	Melalui RKP Tahun 2023 pemerintah berkomitmen untuk memberikan arahan pada (1) kebijakan prioritas nasional yang komprehensif dan sistematis, (2) kerangka pendanaan, (3) kerangka kelembagaan, (4) kerangka regulasi, serta (5) kerangka evaluasi dan pengendalian, dalam melaksanakan pembangunan nasional. Penyusunan RKP mengacu pada regulasi yang tertuang dalam Undang-Undang (UU) No. 25/2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) dan Peraturan Pemerintah (PP) No. 17/2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional. RKP Tahun 2023 telah ditetapkan melalui Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 108 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2023. Sesuai Pasal 7 pada Perpres tersebut, dilakukan pemutakhiran RKP Tahun 2023 dengan berdasarkan Undang-Undang APBN yang telah ditetapkan melalui UU Nomor 28 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2023.
2	Perubahan alinea kedua dalam halaman II.3	Dari 14 indikator sasaran PN 1, sebanyak tujuh indikator telah tercapai, yaitu indikator penjaminan akurasi pendataan stok sumber daya ikan dan pemanfaatan; nilai devisa pariwisata; kontribusi produk domestik bruto (PDB) pariwisata; penyediaan lapangan kerja per tahun; pertumbuhan ekspor industri pengolahan; pertumbuhan ekspor riil barang dan jasa; serta rasio perpajakan terhadap PDB. Sementara itu, tujuh indikator lainnya belum tercapai, yaitu porsi energi baru dan terbarukan (EBT) dalam bauran energi nasional; skor pola pangan harapan; rasio kewirausahaan nasional; pertumbuhan PDB pertanian; pertumbuhan PDB industri pengolahan; kontribusi PDB industri pengolahan; dan pertumbuhan investasi (PMTB).
3	Perubahan alinea ketiga dalam halaman II.3	Dari enam indikator sasaran PN 2, sebanyak satu indikator telah tercapai, yaitu laju pertumbuhan produk domestik regional bruto (PDRB) Kawasan Timur Indonesia (KTI). Sementara itu, lima indikator lainnya belum tercapai, namun sebagian besar kinerjanya sudah di atas 90 persen. Kelima indikator tersebut adalah Indeks Pembangunan Manusia (IPM) KTI; persentase penduduk miskin KTI; IPM Kawasan Barat Indonesia (KBI); laju pertumbuhan PDRB KBI; dan persentase penduduk miskin KBI.
4	Perubahan alinea keempat dalam halaman II.3	Dari 24 indikator sasaran PN 3, 13 indikator telah tercapai, yaitu angka kelahiran total (<i>Total Fertility Rate</i> /TFR) (per wanita usia subur usia 15-49 tahun); persentase cakupan kepemilikan Nomor Induk Kependudukan (NIK); proporsi penduduk yang tercakup dalam Program Jaminan Sosial; Angka Kematian Ibu (AKI); insidensi tuberkulosis; prevalensi obesitas pada penduduk umur >18 tahun; persentase merokok penduduk usia 10-18 tahun; rata-rata lama sekolah penduduk usia 15 tahun ke atas; Indeks Perlindungan Anak (IPA); persentase rumah tangga miskin dan rentan yang memiliki aset produktif; persentase angkatan kerja berpendidikan menengah ke atas; jumlah Perguruan Tinggi (PT) yang masuk ke dalam <i>World Class University</i> (PT) Top 300; dan jumlah PT yang masuk ke dalam <i>World Class University</i> (PT) Top 500. Sementara itu, tujuh indikator lainnya belum tercapai, namun sebagian besar kinerjanya sudah di atas 90 persen, yaitu proporsi rumah tangga miskin dan rentan yang memperoleh bantuan sosial pemerintah; prevalensi <i>stunting</i> (pendek dan sangat pendek) pada balita; harapan lama sekolah; Indeks Pembangunan Gender (IPG); Indeks



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

No.	Perihal Perubahan	Pemutakhiran RKP Tahun 2023
		Pembangunan Pemuda (IPP); proporsi pekerja yang bekerja pada bidang keahlian menengah dan tinggi; serta peringkat <i>Global Innovation Index</i> .
5	Perubahan alinea pertama dalam halaman II.4	Dari tujuh indikator sasaran PN 4, sebanyak empat indikator telah tercapai, yaitu Indeks Capaian Revolusi Mental; Indeks Pembangunan Kebudayaan; Indeks Pembangunan Masyarakat (IPMas); dan nilai budaya literasi. Sementara itu, tiga indikator lainnya belum tercapai, namun kinerjanya sudah di atas 90 persen, yaitu Indeks Kerukunan Umat Beragama; Indeks Pembangunan Keluarga; dan median usia kawin pertama perempuan.
6	Perubahan alinea kedua dalam halaman II.4	Dari sepuluh indikator sasaran PN 5, sebanyak empat indikator telah tercapai, yaitu penurunan rasio fatalitas kecelakaan jalan per 10.000 kendaraan terhadap angka dasar tahun 2010; persentase pemenuhan kebutuhan air baku; persentase rute pelayaran yang saling terhubung (<i>loop</i>); dan jumlah kota metropolitan dengan sistem angkutan umum massal perkotaan yang dibangun dan dikembangkan. Sementara itu, enam indikator lainnya belum tercapai, namun sebagian besar kinerjanya sudah di atas 90 persen, yaitu rumah tangga yang menempati hunian layak dan terjangkau; persentase luas daerah irigasi premium yang dimodernisasi; waktu tempuh pada jalan lintas utama pulau; rasio elektrifikasi; rata-rata pemenuhan kebutuhan (konsumsi) listrik; dan persentase populasi yang dijangkau oleh jaringan bergerak pitalebar (4G).
7	Perubahan alinea ketiga dalam halaman II.4	Indikator yang telah tercapai yaitu Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH). Sementara itu, indikator lainnya yang belum tercapai yaitu penurunan potensi kehilangan PDB akibat dampak bencana dan iklim terhadap total PDB.
8	Perubahan alinea keempat dalam halaman II.4	Dari delapan indikator sasaran PN 7, sebanyak enam indikator telah tercapai. Keenam indikator tersebut adalah Indeks Demokrasi Indonesia; tingkat kepercayaan masyarakat terhadap konten informasi publik terkait kebijakan dan program prioritas pemerintah; Indeks Pengaruh dan Peran Indonesia di Dunia Internasional; persentase instansi pemerintah dengan Indeks Reformasi Birokrasi kategori baik ke atas (K/L); persentase instansi pemerintah dengan Indeks Reformasi Birokrasi kategori baik ke atas (provinsi); dan persentase ancaman terhadap keselamatan segenap bangsa di seluruh wilayah NKRI yang dapat diatasi. Sementara itu, satu indikator lainnya belum tercapai yaitu persentase instansi pemerintah dengan Indeks Reformasi Birokrasi kategori baik ke atas (kabupaten/kota).
9	Perubahan alinea kedua dalam halaman II.6	Aktivitas perdagangan dunia mengalami peningkatan tajam pada tahun 2021 jika dibandingkan dengan tahun 2020, karena didorong oleh pemulihan permintaan global pada tahun 2021. Hal ini tecermin dari peningkatan yang tinggi pada <i>Baltic Dry Index</i> (BDI). Namun, gangguan rantai pasok yang melanda dunia menyebabkan perlambatan aktivitas perdagangan dunia yang terjadi sejak Oktober 2021. Aktivitas perdagangan dunia pada tahun 2022 menunjukkan peningkatan hingga bulan Mei, sebelum kembali mengalami penurunan akibat masih berlanjutnya konflik Rusia dan Ukraina. Volume perdagangan dunia pada tahun 2021 meningkat 9,7 persen, setelah berkontraksi 5,2 persen pada tahun 2020 ¹ . Di sisi lain, <i>Purchasing Managers' Index</i> (PMI), baik <i>Manufacturing</i> maupun <i>Services</i> mampu bertahan di zona ekspansi di atas level 50 sepanjang tahun 2021 dan semester I tahun 2022, sementara pada semester II tahun 2022 menunjukkan tanda penurunan.

¹ *Trade Statistics and Outlook* WTO (Oktober 2022)



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

No.	Perihal Perubahan	Pemutakhiran RKP Tahun 2023
10	Perubahan Gambar 2.3 dalam halaman II.7	<p style="text-align: center;">Gambar 2.3 <i>Baltic Dry Index (BDI)</i></p> <p style="text-align: center;">Sumber: Bloomberg, IHS Markit, November 2022.</p>
11	Perubahan Gambar 2.4 dalam halaman II.7	<p style="text-align: center;">Gambar 2.4 PMI Global</p> <p style="text-align: center;">Sumber: Bloomberg, IHS Markit, November 2022.</p>
12	Perubahan alinea pertama dalam halaman II.7	<p>Volatilitas pasar keuangan global pada tahun 2021 menurun dibandingkan tahun 2020, tecermin dari penurunan <i>Chicago Board Option Exchange's Volatility Index (CBOE VIX Index)</i> yang mendekati level prapandemi. Namun, pada awal tahun 2022, volatilitas pasar keuangan global kembali meningkat. Hal ini terlihat dari adanya peningkatan CBOE VIX Index yang dipicu oleh meningkatnya ketidakpastian global akibat perang Rusia dan Ukraina. Setelah mengalami penurunan pada tahun 2020, kondisi pasar saham global meningkat tajam pada tahun 2021 yang tecermin dari peningkatan <i>Morgan Stanley Capital International All Country World Index (MSCI ACWI Index)</i>. Namun pada tahun 2022, pasar saham global kembali turun, dengan terjadinya penurunan MSCI ACWI Index seiring kekhawatiran investor terhadap perkembangan varian baru COVID-19 serta kebijakan pengurangan stimulus dan pengetatan suku bunga oleh berbagai negara dalam upaya pengendalian inflasi yang semakin meningkat.</p>
13	Perubahan Gambar 2.5 dalam halaman II.7	<p style="text-align: center;">Gambar 2.5 CBOE VIX dan MSCI ACWI Index</p>



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

No.	Perihal Perubahan	Pemutakhiran RKP Tahun 2023
14	Perubahan Gambar 2.6 dalam halaman II.7	<p style="text-align: center;">Gambar 2.6 <i>Monetary Base (Persen, yoy)</i></p>
15	Perubahan alinea kedua dalam halaman II.7	<p>Bank sentral utama dunia, seperti The Fed, Bank of Japan, dan European Central Bank mempertahankan suku bunganya di level rendah pada tahun 2021, sehingga terjadi peningkatan <i>monetary base</i> dan likuiditas global. Namun, hingga akhir Oktober tahun 2022, <i>monetary base</i> menunjukkan penurunan, dipicu oleh sikap The Fed yang memutuskan untuk mengurangi pembelian aset serta menaikkan suku bunga. Keputusan The Fed disebabkan oleh tekanan inflasi yang semakin tinggi serta pemulihan pada pasar tenaga kerja Amerika Serikat. Tekanan inflasi yang tinggi juga mendorong sebagian besar bank sentral dunia melakukan kebijakan menaikkan suku bunga.</p>
16	Perubahan alinea pertama dalam halaman II.8	<p>Harga-harga komoditas mengalami peningkatan yang tinggi, seiring dengan pemulihan ekonomi global pada tahun 2021. Pemulihan permintaan global juga disertai dengan bergesernya fokus kebutuhan energi menuju energi yang lebih ramah lingkungan. Peningkatan harga logam, tidak hanya dipicu oleh pemulihan ekonomi, tetapi juga dorongan penggunaan energi bersih dan hijau secara global yang mendorong tingginya permintaan. Harga <i>Crude Palm Oil</i> (CPO) mengalami penurunan pada semester II tahun 2022, setelah meningkat tinggi dipicu oleh terbatasnya jumlah pasokan. Sementara itu, harga minyak mentah masih tetap tinggi, utamanya disebabkan oleh konflik Rusia dan Ukraina. Dampak konflik tersebut terus meluas dan memicu sanksi antara Rusia dan negara-negara lain khususnya Eropa dan Amerika Serikat.</p>
17	Perubahan Gambar 2.7 dalam halaman II.8	<p style="text-align: center;">Gambar 2.7 <i>Harga Komoditas Internasional</i></p> <p style="text-align: center;">Sumber: World Bank Commodities Price Data, November 2022.</p>
18	Perubahan alinea pertama dalam halaman II.9	<p>Dari sisi moneter, pada tahun 2020 dan 2021 bank sentral di beberapa negara menetapkan kebijakan moneter yang akomodatif melalui penurunan suku bunga dan <i>quantitative easing</i> untuk menahan dampak pandemi COVID-19. Seiring pemulihan ekonomi yang terjadi pada tahun 2021 serta tekanan inflasi yang persisten pada tahun 2022, beberapa bank sentral negara mulai melakukan normalisasi suku bunga. Peningkatan inflasi dan</p>



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

No.	Perihal Perubahan	Pemutakhiran RKP Tahun 2023																																															
		pemulihan pada pasar tenaga kerja mendorong bank sentral untuk menaikkan suku bunga pada tahun 2022.																																															
19	Perubahan Tabel 2.2 dalam halaman II.9	<p style="text-align: center;">Tabel 2.2 Kebijakan Suku Bunga Negara Dunia</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: center;">Negara</th> <th style="text-align: center;">November 2022 (Persen)</th> <th style="text-align: center;">Kenaikan Suku Bunga Selama Pandemi COVID-19</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>Rusia</td><td style="text-align: center;">7,50</td><td style="text-align: center;">9 kali</td></tr> <tr><td>Korea Selatan</td><td style="text-align: center;">3,25</td><td style="text-align: center;">9 kali</td></tr> <tr><td>Inggris</td><td style="text-align: center;">3,00</td><td style="text-align: center;">8 kali</td></tr> <tr><td>Amerika Serikat (AS)</td><td style="text-align: center;">4,00</td><td style="text-align: center;">6 kali</td></tr> <tr><td>Filipina</td><td style="text-align: center;">5,00</td><td style="text-align: center;">6 kali</td></tr> <tr><td>India</td><td style="text-align: center;">5,90</td><td style="text-align: center;">4 kali</td></tr> <tr><td>Malaysia</td><td style="text-align: center;">2,75</td><td style="text-align: center;">4 kali</td></tr> <tr><td>Indonesia</td><td style="text-align: center;">5,25</td><td style="text-align: center;">4 kali</td></tr> <tr><td>European Union</td><td style="text-align: center;">2,00</td><td style="text-align: center;">3 kali</td></tr> <tr><td>Vietnam</td><td style="text-align: center;">6,00</td><td style="text-align: center;">2 kali</td></tr> <tr><td>Cina</td><td style="text-align: center;">2,75</td><td style="text-align: center;">Belum Ada Kenaikan</td></tr> <tr><td>Jepang</td><td style="text-align: center;">(0,10)</td><td style="text-align: center;">Belum Ada Kenaikan</td></tr> </tbody> </table> <p>Sumber: CEIC, November 2022. Catatan: Angka dalam kurung "(x,x)" bernilai negatif.</p>	Negara	November 2022 (Persen)	Kenaikan Suku Bunga Selama Pandemi COVID-19	Rusia	7,50	9 kali	Korea Selatan	3,25	9 kali	Inggris	3,00	8 kali	Amerika Serikat (AS)	4,00	6 kali	Filipina	5,00	6 kali	India	5,90	4 kali	Malaysia	2,75	4 kali	Indonesia	5,25	4 kali	European Union	2,00	3 kali	Vietnam	6,00	2 kali	Cina	2,75	Belum Ada Kenaikan	Jepang	(0,10)	Belum Ada Kenaikan								
Negara	November 2022 (Persen)	Kenaikan Suku Bunga Selama Pandemi COVID-19																																															
Rusia	7,50	9 kali																																															
Korea Selatan	3,25	9 kali																																															
Inggris	3,00	8 kali																																															
Amerika Serikat (AS)	4,00	6 kali																																															
Filipina	5,00	6 kali																																															
India	5,90	4 kali																																															
Malaysia	2,75	4 kali																																															
Indonesia	5,25	4 kali																																															
European Union	2,00	3 kali																																															
Vietnam	6,00	2 kali																																															
Cina	2,75	Belum Ada Kenaikan																																															
Jepang	(0,10)	Belum Ada Kenaikan																																															
20	Perubahan Tabel 2.3 dalam halaman II.11	<p style="text-align: center;">Tabel 2.3 Pertumbuhan PDB Sisi Permintaan Tahun 2021–2022 (Persen, <i>yoy</i>)</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th rowspan="2" style="text-align: center;">Uraian</th> <th colspan="2" style="text-align: center;">2021¹⁾</th> <th colspan="3" style="text-align: center;">2022</th> </tr> <tr> <th style="text-align: center;">Realisasi Pertumbuhan</th> <th style="text-align: center;">Sumber Pertumbuhan</th> <th style="text-align: center;">RPJMN²⁾</th> <th style="text-align: center;">Outlook Pertumbuhan³⁾</th> <th style="text-align: center;">Sumber Pertumbuhan³⁾</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>Pertumbuhan PDB</td><td style="text-align: center;">3,7</td><td style="text-align: center;">3,7</td><td style="text-align: center;">5,4–5,7</td><td style="text-align: center;">5,4</td><td style="text-align: center;">5,4</td></tr> <tr><td>Konsumsi Rumah Tangga dan LNPR</td><td style="text-align: center;">2,0</td><td style="text-align: center;">1,1</td><td style="text-align: center;">5,2–5,4</td><td style="text-align: center;">4,8</td><td style="text-align: center;">2,5</td></tr> <tr><td>Konsumsi Pemerintah</td><td style="text-align: center;">4,2</td><td style="text-align: center;">0,3</td><td style="text-align: center;">4,5–4,6</td><td style="text-align: center;">(3,4)</td><td style="text-align: center;">(0,3)</td></tr> <tr><td>Investasi (PMTB)</td><td style="text-align: center;">3,8</td><td style="text-align: center;">1,2</td><td style="text-align: center;">5,8–6,2</td><td style="text-align: center;">4,1</td><td style="text-align: center;">1,3</td></tr> <tr><td>Ekspor Barang dan Jasa</td><td style="text-align: center;">24,0</td><td style="text-align: center;">4,7</td><td style="text-align: center;">3,9–4,2</td><td style="text-align: center;">17,7</td><td style="text-align: center;">4,1</td></tr> <tr><td>Impor Barang dan Jasa</td><td style="text-align: center;">23,3</td><td style="text-align: center;">(3,4)</td><td style="text-align: center;">4,4–4,6</td><td style="text-align: center;">15,6</td><td style="text-align: center;">3,0</td></tr> </tbody> </table> <p>Sumber: 1) Badan Pusat Statistik (BPS), 2022; 2) RPJMN 2020–2024; dan 3) Prakiraan Kementerian PPN/Bappenas, November 2022</p>	Uraian	2021 ¹⁾		2022			Realisasi Pertumbuhan	Sumber Pertumbuhan	RPJMN ²⁾	Outlook Pertumbuhan ³⁾	Sumber Pertumbuhan ³⁾	Pertumbuhan PDB	3,7	3,7	5,4–5,7	5,4	5,4	Konsumsi Rumah Tangga dan LNPR	2,0	1,1	5,2–5,4	4,8	2,5	Konsumsi Pemerintah	4,2	0,3	4,5–4,6	(3,4)	(0,3)	Investasi (PMTB)	3,8	1,2	5,8–6,2	4,1	1,3	Ekspor Barang dan Jasa	24,0	4,7	3,9–4,2	17,7	4,1	Impor Barang dan Jasa	23,3	(3,4)	4,4–4,6	15,6	3,0
Uraian	2021 ¹⁾			2022																																													
	Realisasi Pertumbuhan	Sumber Pertumbuhan	RPJMN ²⁾	Outlook Pertumbuhan ³⁾	Sumber Pertumbuhan ³⁾																																												
Pertumbuhan PDB	3,7	3,7	5,4–5,7	5,4	5,4																																												
Konsumsi Rumah Tangga dan LNPR	2,0	1,1	5,2–5,4	4,8	2,5																																												
Konsumsi Pemerintah	4,2	0,3	4,5–4,6	(3,4)	(0,3)																																												
Investasi (PMTB)	3,8	1,2	5,8–6,2	4,1	1,3																																												
Ekspor Barang dan Jasa	24,0	4,7	3,9–4,2	17,7	4,1																																												
Impor Barang dan Jasa	23,3	(3,4)	4,4–4,6	15,6	3,0																																												
21	Perubahan alinea pertama dalam halaman II.11	<p>Secara keseluruhan, pertumbuhan ekonomi Indonesia pada tahun 2022 diperkirakan meningkat sebesar 5,4 persen, sejalan dengan akselerasi konsumsi masyarakat dan investasi, di tengah tetap terjaganya belanja fiskal pemerintah dan tingginya potensi ekspor. Optimisme ekonomi tahun 2022 didorong oleh aktivitas ekonomi yang terus meningkat sejalan dengan percepatan vaksinasi, pembukaan ekonomi yang semakin luas, dan stimulus kebijakan yang berlanjut. Meski demikian, target pemulihan tersebut masih dihadapkan pada risiko penyebaran varian baru COVID-19, <i>permanent scar</i> yang dialami oleh dunia usaha dan sosial, normalisasi</p>																																															



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

No.	Perihal Perubahan	Pemutakhiran RKP Tahun 2023																																																																																																					
		kebijakan baik fiskal dan moneter, serta gangguan rantai pasok, dan krisis energi																																																																																																					
22	Perubahan alinea kedua dalam halaman II.11	Keberhasilan pengendalian COVID-19 dan kebijakan penanganannya akan menjadi kunci peningkatan keyakinan masyarakat serta dunia usaha yang kemudian dapat meningkatkan komponen pertumbuhan. Konsumsi masyarakat diperkirakan meningkat dengan tumbuh sebesar 4,8 persen, ditopang oleh terkendalinya penyebaran COVID-19 seiring dengan tercapainya imunitas massal dan berangsur pulihnya mobilitas masyarakat. Kinerja ekspor barang dan jasa juga tetap akan menjadi sumber pertumbuhan ekonomi dengan masih akan tingginya permintaan dan harga komoditas global, dengan pertumbuhan sebesar 17,7 persen. Investasi pada tahun 2022 diperkirakan akan meningkat dan tumbuh sebesar 4,1 persen, sebagai kunci peningkatan kapasitas produktif perekonomian. Konsumsi pemerintah diperkirakan berkontraksi sebesar 3,4 persen, dipicu oleh mulai berkurangnya program stimulus dan belanja penanganan pandemi seiring dengan kondisi pandemi yang mengarah ke endemi.																																																																																																					
23	Perubahan Tabel 2.4 dalam halaman II.12	<p style="text-align: center;">Tabel 2.4 Pertumbuhan PDB Sisi Lapangan Usaha Tahun 2021–2022 (Persen, <i>yoy</i>)</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th rowspan="2" style="text-align: center;">Uraian</th> <th colspan="2" style="text-align: center;">2021¹⁾</th> <th colspan="3" style="text-align: center;">2022</th> </tr> <tr> <th style="text-align: center;">Realisasi Pertumbuhan</th> <th style="text-align: center;">Sumber Pertumbuhan</th> <th style="text-align: center;">RPJMN²⁾</th> <th style="text-align: center;">Outlook Pertumbuhan³⁾</th> <th style="text-align: center;">Sumber Pertumbuhan³⁾</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Pertumbuhan PDB</td> <td style="text-align: center;">3,7</td> <td style="text-align: center;">3,7</td> <td style="text-align: center;">5,4–5,7</td> <td style="text-align: center;">5,4</td> <td style="text-align: center;">5,4</td> </tr> <tr> <td>Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan</td> <td style="text-align: center;">1,8</td> <td style="text-align: center;">0,2</td> <td style="text-align: center;">3,7–3,8</td> <td style="text-align: center;">1,6^{a)}</td> <td style="text-align: center;">0,2</td> </tr> <tr> <td>Pertambangan dan Penggalian</td> <td style="text-align: center;">4,0</td> <td style="text-align: center;">0,3</td> <td style="text-align: center;">1,9–1,9</td> <td style="text-align: center;">3,5^{a)}</td> <td style="text-align: center;">0,3</td> </tr> <tr> <td>Industri Pengolahan</td> <td style="text-align: center;">3,4</td> <td style="text-align: center;">0,7</td> <td style="text-align: center;">5,2–5,5</td> <td style="text-align: center;">4,9^{a)}</td> <td style="text-align: center;">1,0</td> </tr> <tr> <td>Pengadaan Listrik dan Gas</td> <td style="text-align: center;">5,5</td> <td style="text-align: center;">0,1</td> <td style="text-align: center;">5,2–5,2</td> <td style="text-align: center;">7,7^{a)}</td> <td style="text-align: center;">0,1</td> </tr> <tr> <td>Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang</td> <td style="text-align: center;">5,0</td> <td style="text-align: center;">0,0</td> <td style="text-align: center;">4,3–4,4</td> <td style="text-align: center;">3,8^{a)}</td> <td style="text-align: center;">0,0</td> </tr> <tr> <td>Konstruksi</td> <td style="text-align: center;">2,8</td> <td style="text-align: center;">0,3</td> <td style="text-align: center;">5,8–6,1</td> <td style="text-align: center;">2,1^{a)}</td> <td style="text-align: center;">0,2</td> </tr> <tr> <td>Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor</td> <td style="text-align: center;">4,7</td> <td style="text-align: center;">0,6</td> <td style="text-align: center;">5,6–6,0</td> <td style="text-align: center;">5,2^{a)}</td> <td style="text-align: center;">0,7</td> </tr> <tr> <td>Transportasi dan Pergudangan</td> <td style="text-align: center;">3,2</td> <td style="text-align: center;">0,1</td> <td style="text-align: center;">7,1–7,4</td> <td style="text-align: center;">17,3^{a)}</td> <td style="text-align: center;">0,6</td> </tr> <tr> <td>Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum</td> <td style="text-align: center;">3,9</td> <td style="text-align: center;">0,1</td> <td style="text-align: center;">6,1–6,3</td> <td style="text-align: center;">12,0^{a)}</td> <td style="text-align: center;">0,3</td> </tr> <tr> <td>Informasi dan Komunikasi</td> <td style="text-align: center;">6,8</td> <td style="text-align: center;">0,4</td> <td style="text-align: center;">7,7–8,8</td> <td style="text-align: center;">7,3^{a)}</td> <td style="text-align: center;">0,5</td> </tr> <tr> <td>Jasa Keuangan dan Asuransi</td> <td style="text-align: center;">1,6</td> <td style="text-align: center;">0,1</td> <td style="text-align: center;">6,4–6,9</td> <td style="text-align: center;">1,6^{a)}</td> <td style="text-align: center;">0,1</td> </tr> <tr> <td><i>Real Estate</i></td> <td style="text-align: center;">2,8</td> <td style="text-align: center;">0,1</td> <td style="text-align: center;">5,0–5,0</td> <td style="text-align: center;">1,9^{a)}</td> <td style="text-align: center;">0,1</td> </tr> <tr> <td>Jasa Perusahaan</td> <td style="text-align: center;">0,7</td> <td style="text-align: center;">0,0</td> <td style="text-align: center;">8,4–8,4</td> <td style="text-align: center;">7,7^{a)}</td> <td style="text-align: center;">0,1</td> </tr> <tr> <td>Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib</td> <td style="text-align: center;">(0,3)</td> <td style="text-align: center;">(0,0)</td> <td style="text-align: center;">4,8–5,1</td> <td style="text-align: center;">2,8^{a)}</td> <td style="text-align: center;">0,1</td> </tr> </tbody> </table>	Uraian	2021 ¹⁾		2022			Realisasi Pertumbuhan	Sumber Pertumbuhan	RPJMN ²⁾	Outlook Pertumbuhan ³⁾	Sumber Pertumbuhan ³⁾	Pertumbuhan PDB	3,7	3,7	5,4–5,7	5,4	5,4	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	1,8	0,2	3,7–3,8	1,6 ^{a)}	0,2	Pertambangan dan Penggalian	4,0	0,3	1,9–1,9	3,5 ^{a)}	0,3	Industri Pengolahan	3,4	0,7	5,2–5,5	4,9 ^{a)}	1,0	Pengadaan Listrik dan Gas	5,5	0,1	5,2–5,2	7,7 ^{a)}	0,1	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	5,0	0,0	4,3–4,4	3,8 ^{a)}	0,0	Konstruksi	2,8	0,3	5,8–6,1	2,1 ^{a)}	0,2	Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	4,7	0,6	5,6–6,0	5,2 ^{a)}	0,7	Transportasi dan Pergudangan	3,2	0,1	7,1–7,4	17,3 ^{a)}	0,6	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	3,9	0,1	6,1–6,3	12,0 ^{a)}	0,3	Informasi dan Komunikasi	6,8	0,4	7,7–8,8	7,3 ^{a)}	0,5	Jasa Keuangan dan Asuransi	1,6	0,1	6,4–6,9	1,6 ^{a)}	0,1	<i>Real Estate</i>	2,8	0,1	5,0–5,0	1,9 ^{a)}	0,1	Jasa Perusahaan	0,7	0,0	8,4–8,4	7,7 ^{a)}	0,1	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib	(0,3)	(0,0)	4,8–5,1	2,8 ^{a)}	0,1
Uraian	2021 ¹⁾			2022																																																																																																			
	Realisasi Pertumbuhan	Sumber Pertumbuhan	RPJMN ²⁾	Outlook Pertumbuhan ³⁾	Sumber Pertumbuhan ³⁾																																																																																																		
Pertumbuhan PDB	3,7	3,7	5,4–5,7	5,4	5,4																																																																																																		
Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	1,8	0,2	3,7–3,8	1,6 ^{a)}	0,2																																																																																																		
Pertambangan dan Penggalian	4,0	0,3	1,9–1,9	3,5 ^{a)}	0,3																																																																																																		
Industri Pengolahan	3,4	0,7	5,2–5,5	4,9 ^{a)}	1,0																																																																																																		
Pengadaan Listrik dan Gas	5,5	0,1	5,2–5,2	7,7 ^{a)}	0,1																																																																																																		
Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	5,0	0,0	4,3–4,4	3,8 ^{a)}	0,0																																																																																																		
Konstruksi	2,8	0,3	5,8–6,1	2,1 ^{a)}	0,2																																																																																																		
Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	4,7	0,6	5,6–6,0	5,2 ^{a)}	0,7																																																																																																		
Transportasi dan Pergudangan	3,2	0,1	7,1–7,4	17,3 ^{a)}	0,6																																																																																																		
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	3,9	0,1	6,1–6,3	12,0 ^{a)}	0,3																																																																																																		
Informasi dan Komunikasi	6,8	0,4	7,7–8,8	7,3 ^{a)}	0,5																																																																																																		
Jasa Keuangan dan Asuransi	1,6	0,1	6,4–6,9	1,6 ^{a)}	0,1																																																																																																		
<i>Real Estate</i>	2,8	0,1	5,0–5,0	1,9 ^{a)}	0,1																																																																																																		
Jasa Perusahaan	0,7	0,0	8,4–8,4	7,7 ^{a)}	0,1																																																																																																		
Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib	(0,3)	(0,0)	4,8–5,1	2,8 ^{a)}	0,1																																																																																																		



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

No.	Perihal Perubahan	Pemutakhiran RKP Tahun 2023					
		Uraian	2021 ¹⁾		2022		
		Realisasi Pertumbuhan	Sumber Pertumbuhan	RPJMN ²⁾	Outlook Pertumbuhan ³⁾	Sumber Pertumbuhan ³⁾	
24	Perubahan Tabel 2.4 dalam halaman II.13	Jasa Pendidikan	0,1	0,0	5,2-5,2	1,3 ^{a)}	0,0
		Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	10,5	0,1	7,6-8,0	2,0 ^{a)}	0,0
		Jasa Lainnya	2,1	0,0	9,3-9,5	7,8 ^{a)}	0,1
<p>Sumber: 1) BPS, 2022; 2) RPJMN Tahun 2020-2024; 3) Prakiraan Kementerian PPN/Bappenas, November 2022. Keterangan: a) Terdapat penyesuaian angka <i>outlook</i> pertumbuhan 2022 dari sasaran pertumbuhan pada Pemutakhiran RKP Tahun 2022 berdasarkan perkembangan perekonomian terkini hingga November 2022.</p>							
25	Perubahan alinea ketiga dalam halaman II.14	<p>Kinerja Neraca Pembayaran Indonesia (NPI) tahun 2021 mencatatkan surplus tinggi mencapai US\$13,5 miliar. Capaian tersebut dikontribusikan oleh surplus neraca transaksi berjalan sebesar US\$3,5 miliar atau 0,3 persen dari PDB. Surplus pada neraca transaksi berjalan tersebut menjadi capaian yang sangat penting sejak surplus terakhir dicapai pada tahun 2011. Selain itu, neraca transaksi modal dan finansial juga turut berkontribusi mencatat surplus sebesar US\$12,4 miliar.</p>					
26	Perubahan alinea keempat dalam halaman II.14	<p>Selanjutnya, kinerja transaksi berjalan yang mengalami surplus pada tahun 2021 didorong oleh surplus tinggi pada neraca barang mencapai US\$43,8 miliar, meningkat signifikan dibandingkan tahun 2020 sebesar US\$28,3 miliar. Kinerja positif neraca barang terakselerasi di tengah fenomena <i>commodity supercycle</i> yang mendorong harga komoditas internasional meningkat. Lebih lanjut, neraca pendapatan sekunder juga berkontribusi positif dengan mencatat surplus sebesar US\$6,3 miliar. Adapun kenaikan surplus neraca berjalan lebih jauh masih tertahan oleh meningkatnya defisit neraca jasa-jasa mencapai US\$14,6 miliar, sejalan dengan masih tertekannya neraca jasa perjalanan dan kenaikan defisit jasa transportasi. Selain itu, neraca pendapatan primer juga masih persisten mengalami defisit mencapai US\$32,0 miliar, seiring dengan meningkatnya imbal hasil investasi yang masuk ke dalam perekonomian domestik.</p>					
27	Perubahan alinea pertama dalam halaman II.15	<p>Neraca transaksi modal dan finansial juga menunjukkan kinerja positif sepanjang tahun 2021. Kinerja positif tersebut didorong oleh surplus yang meningkat pada investasi langsung dan investasi portofolio yang masing-masing mencapai US\$17,4 miliar dan US\$5,1 miliar yang mana capaian keduanya meningkat dibandingkan dengan tahun 2020. Positifnya kinerja investasi langsung dan investasi portofolio mencerminkan keyakinan investor terhadap prospek pemulihan ekonomi Indonesia sepanjang tahun 2021 meskipun masih dalam kondisi tekanan pandemi COVID-19 terutama varian Delta pada triwulan III tahun 2021. Perkembangan tersebut kemudian mendorong cadangan devisa meningkat mencapai US\$144,9 miliar atau setara dengan pembiayaan 8 (delapan) bulan impor.</p>					



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

No.	Perihal Perubahan	Pemutakhiran RKP Tahun 2023																																										
28	Perubahan Tabel 2.5 dalam halaman II.15	<p style="text-align: center;">Tabel 2.5 Neraca Pembayaran Indonesia Tahun 2021–2022 (US\$ Miliar)</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: center;">Uraian</th> <th style="text-align: center;">2021¹⁾</th> <th style="text-align: center;">Outlook 2022²⁾</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Neraca Pembayaran Secara Keseluruhan</td> <td style="text-align: center;">13,5</td> <td style="text-align: center;">(12,2)</td> </tr> <tr> <td>Neraca Transaksi Berjalan</td> <td style="text-align: center;">3,5</td> <td style="text-align: center;">3,2</td> </tr> <tr> <td>(% PDB)</td> <td style="text-align: center;">0,3</td> <td style="text-align: center;">0,3</td> </tr> <tr> <td>Neraca Perdagangan Barang</td> <td style="text-align: center;">43,8</td> <td style="text-align: center;">52,1</td> </tr> <tr> <td>Neraca Perdagangan Jasa</td> <td style="text-align: center;">(14,6)</td> <td style="text-align: center;">(18,5)</td> </tr> <tr> <td>Neraca Pendapatan Primer</td> <td style="text-align: center;">(32,0)</td> <td style="text-align: center;">(36,4)</td> </tr> <tr> <td>Neraca Pendapatan Sekunder</td> <td style="text-align: center;">6,3</td> <td style="text-align: center;">6,0</td> </tr> <tr> <td>Neraca Modal dan Finansial</td> <td style="text-align: center;">12,4</td> <td style="text-align: center;">(13,8)</td> </tr> <tr> <td>Investasi Langsung</td> <td style="text-align: center;">17,4</td> <td style="text-align: center;">13,7</td> </tr> <tr> <td>Investasi Portofolio</td> <td style="text-align: center;">5,1</td> <td style="text-align: center;">(9,7)</td> </tr> <tr> <td>Investasi Lainnya</td> <td style="text-align: center;">(10,4)</td> <td style="text-align: center;">(17,8)</td> </tr> <tr> <td>Posisi Cadangan Devisa</td> <td style="text-align: center;">144,9</td> <td style="text-align: center;">132,7</td> </tr> <tr> <td>- dalam bulan impor</td> <td style="text-align: center;">8,0</td> <td style="text-align: center;">5,6</td> </tr> </tbody> </table> <p style="font-size: small;">Sumber: 1) Bank Indonesia, 2021; 2) Prakiraan Kementerian PPN/Bappenas, November 2022. Keterangan: Terdapat penyesuaian angka <i>outlook</i> 2022 dari sasaran pada Pemutakhiran RKP Tahun 2022 berdasarkan perkembangan perekonomian terkini hingga November 2022. Catatan: Angka dalam kurung "(x,x)" bernilai negatif.</p>	Uraian	2021 ¹⁾	Outlook 2022 ²⁾	Neraca Pembayaran Secara Keseluruhan	13,5	(12,2)	Neraca Transaksi Berjalan	3,5	3,2	(% PDB)	0,3	0,3	Neraca Perdagangan Barang	43,8	52,1	Neraca Perdagangan Jasa	(14,6)	(18,5)	Neraca Pendapatan Primer	(32,0)	(36,4)	Neraca Pendapatan Sekunder	6,3	6,0	Neraca Modal dan Finansial	12,4	(13,8)	Investasi Langsung	17,4	13,7	Investasi Portofolio	5,1	(9,7)	Investasi Lainnya	(10,4)	(17,8)	Posisi Cadangan Devisa	144,9	132,7	- dalam bulan impor	8,0	5,6
Uraian	2021 ¹⁾	Outlook 2022 ²⁾																																										
Neraca Pembayaran Secara Keseluruhan	13,5	(12,2)																																										
Neraca Transaksi Berjalan	3,5	3,2																																										
(% PDB)	0,3	0,3																																										
Neraca Perdagangan Barang	43,8	52,1																																										
Neraca Perdagangan Jasa	(14,6)	(18,5)																																										
Neraca Pendapatan Primer	(32,0)	(36,4)																																										
Neraca Pendapatan Sekunder	6,3	6,0																																										
Neraca Modal dan Finansial	12,4	(13,8)																																										
Investasi Langsung	17,4	13,7																																										
Investasi Portofolio	5,1	(9,7)																																										
Investasi Lainnya	(10,4)	(17,8)																																										
Posisi Cadangan Devisa	144,9	132,7																																										
- dalam bulan impor	8,0	5,6																																										
29	Perubahan alinea kedua dalam halaman II.15	<p>Pada tahun 2022, NPI diperkirakan menghadapi tekanan ketidakpastian dunia terutama dampak dari perang Rusia-Ukraina yang menjalar dari isu geopolitik menjadi krisis ekonomi, pangan, dan sosial. Lebih lanjut, berbagai sanksi ekonomi dari Blok Barat kepada Rusia membuat ketidakpastian dunia semakin tinggi, di antaranya menyebabkan rantai pasok dunia terganggu dan mendorong terjadinya kelangkaan bahan baku produksi di berbagai negara produsen industri. Hal tersebut berimplikasi pada kenaikan harga-harga di dunia yang pada akhirnya meningkatkan inflasi secara signifikan. Konsekuensinya, berbagai bank sentral di negara maju meningkatkan suku bunga untuk mengendalikan inflasi dan kebijakan ini berdampak kepada negara-negara berkembang termasuk Indonesia karena menyebabkan tekanan pada neraca modal dan finansial melalui <i>capital outflow</i>. Meskipun demikian, kinerja perdagangan Indonesia diperkirakan masih akan kuat sehingga mampu menahan pendalaman defisit kinerja NPI secara keseluruhan, tecermin dari tren surplus neraca transaksi berjalan yang masih berlanjut.</p>																																										
30	Perubahan alinea pertama dalam halaman II.16	<p>Berdasarkan perkembangan isu strategis di tingkat global dan domestik, <i>outlook</i> NPI tahun 2022 relatif masih kuat di tengah situasi ketidakpastian dunia yang tinggi. Neraca secara keseluruhan akan defisit pada kisaran US\$12,2 miliar. Kinerja tersebut dikontribusikan oleh keberlanjutan surplus neraca transaksi berjalan sekitar US\$3,2 miliar atau setara dengan 0,3 persen dari PDB. Perkembangan neraca barang masih akan tinggi mencapai sebesar US\$52,1 miliar, seiring dengan fenomena <i>commodity supercycle</i> yang masih berlanjut meskipun sedikit mengalami perlambatan. Neraca jasa-jasa akan mengalami defisit sekitar US\$18,5 miliar. Sementara neraca pendapatan primer masih akan menjadi komponen yang menyumbang defisit paling tinggi pada neraca transaksi berjalan mencapai kisaran US\$36,4 miliar, sejalan dengan pembayaran imbal hasil</p>																																										



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

No.	Perihal Perubahan	Pemutakhiran RKP Tahun 2023
		investasi langsung dan investasi portofolio. Adapun neraca pendapatan sekunder akan mencapai sekitar US\$6,0 miliar.
31	Perubahan alinea kedua dalam halaman II.16	Selanjutnya, neraca transaksi modal dan finansial akan mengalami defisit dengan prakiraan mencapai sekitar US\$13,8 miliar. Kondisi tersebut utamanya diakibatkan oleh fenomena <i>capital outflow</i> di tengah kenaikan suku bunga di negara-negara maju sehingga investasi portofolio mengalami defisit pada kisaran US\$9,7 miliar. Sementara itu, investasi langsung akan mencapai surplus pada kisaran US\$13,7 miliar, sejalan dengan target investasi langsung serta berbagai proyek strategis nasional yang ditawarkan kepada investor dalam rangka mendorong penguatan integrasi ekonomi domestik dan daya saing nasional. Adapun cadangan devisa diperkirakan mencapai sekitar US\$132,7 miliar atau setara dengan pembiayaan impor selama 5,6 bulan.
32	Perubahan alinea kedua dalam halaman II.17	Pada tahun 2022, fokus APBN diarahkan untuk mendukung pemulihan ekonomi dan reformasi struktural. Pendapatan negara dan hibah diperkirakan mencapai Rp2.436,9 triliun. Penerimaan perpajakan pada tahun 2022 diperkirakan sebesar Rp1.924,9 triliun atau 10,3 persen PDB. Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) diperkirakan mencapai Rp510,9 triliun atau 2,7 persen PDB. Belanja negara diperkirakan mencapai Rp3.169,1 triliun atau 17,0 persen PDB, dengan belanja pemerintah pusat diperkirakan sebesar Rp2.370,0 triliun atau 12,7 persen PDB serta belanja TKD diperkirakan mencapai Rp799,1 triliun atau 4,3 persen PDB. Program PC-PEN tetap dilakukan dan direncanakan dialokasikan sebesar Rp455,6 triliun, yang direncanakan terbagi dalam tiga klaster, yaitu (a) penanganan kesehatan sebesar Rp122,5 triliun; (b) perlindungan masyarakat sebesar Rp154,8 triliun; dan (c) penguatan pemulihan ekonomi sebesar Rp178,3 triliun.
33	Perubahan alinea ketiga dalam halaman II.17	Dengan pendapatan dan belanja negara tersebut, defisit anggaran pada tahun 2022 ditargetkan mencapai 3,9 persen PDB atau sebesar Rp732,2 triliun. Pembiayaan anggaran masih didominasi oleh pembiayaan utang sebesar Rp757,6 triliun, pembiayaan investasi sebesar negatif Rp154,2 triliun dan SAL sekitar Rp127,3 triliun.



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

No.	Perihal Perubahan	Pemutakhiran RKP Tahun 2023																														
34	Perubahan Tabel 2.6 dalam halaman II.17	<p style="text-align: center;">Tabel 2.6 Gambaran APBN (Persen PDB)</p> <table border="1" style="width: 100%;"><thead><tr><th style="text-align: center;">Uraian</th><th style="text-align: center;">Realisasi 2021</th><th style="text-align: center;">2022 <i>Outlook</i></th></tr></thead><tbody><tr><td>Pendapatan Negara dan Hibah</td><td style="text-align: center;">11,9</td><td style="text-align: center;">13,0</td></tr><tr><td>Penerimaan Perpajakan</td><td style="text-align: center;">9,1</td><td style="text-align: center;">10,3</td></tr><tr><td>PNBP</td><td style="text-align: center;">2,7</td><td style="text-align: center;">2,7</td></tr><tr><td>Belanja Negara</td><td style="text-align: center;">16,4</td><td style="text-align: center;">17,0</td></tr><tr><td>Belanja Pemerintah Pusat</td><td style="text-align: center;">11,8</td><td style="text-align: center;">12,7</td></tr><tr><td>TKD</td><td style="text-align: center;">4,6</td><td style="text-align: center;">4,3</td></tr><tr><td>Keseimbangan Primer</td><td style="text-align: center;">(2,5)</td><td style="text-align: center;">(1,8)</td></tr><tr><td>Surplus / (Defisit)</td><td style="text-align: center;">(4,6)</td><td style="text-align: center;">(3,9)</td></tr><tr><td>Rasio Utang</td><td style="text-align: center;">40,7</td><td style="text-align: center;">41,3</td></tr></tbody></table> <p style="font-size: small;">Sumber: Kementerian Keuangan, 2022 dan <i>Outlook</i> Kementerian Keuangan untuk Tahun 2022 berdasarkan Laporan Pemerintah tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Semester Pertama oleh Kementerian Keuangan, diolah.</p> <p style="font-size: x-small;">Catatan: Angka dalam kurung "(x,x)" bernilai negatif.</p>	Uraian	Realisasi 2021	2022 <i>Outlook</i>	Pendapatan Negara dan Hibah	11,9	13,0	Penerimaan Perpajakan	9,1	10,3	PNBP	2,7	2,7	Belanja Negara	16,4	17,0	Belanja Pemerintah Pusat	11,8	12,7	TKD	4,6	4,3	Keseimbangan Primer	(2,5)	(1,8)	Surplus / (Defisit)	(4,6)	(3,9)	Rasio Utang	40,7	41,3
Uraian	Realisasi 2021	2022 <i>Outlook</i>																														
Pendapatan Negara dan Hibah	11,9	13,0																														
Penerimaan Perpajakan	9,1	10,3																														
PNBP	2,7	2,7																														
Belanja Negara	16,4	17,0																														
Belanja Pemerintah Pusat	11,8	12,7																														
TKD	4,6	4,3																														
Keseimbangan Primer	(2,5)	(1,8)																														
Surplus / (Defisit)	(4,6)	(3,9)																														
Rasio Utang	40,7	41,3																														
35	Perubahan alinea keempat dalam halaman II.18	<p>Pada triwulan II-2022, inflasi tahunan (<i>yoy</i>) April-Juni tercatat 3,47 persen, 3,55 persen, dan 4,35 persen, mengalami tren peningkatan hingga melampaui rentang sasaran tahun 2022 pada realisasi bulan Juni. Peningkatan inflasi tahunan disebabkan oleh <i>base effect</i> inflasi 2021 yang rendah, kenaikan harga komoditas pangan dan energi global akibat konflik geopolitik Rusia dan Ukraina, disertai kenaikan permintaan seiring dengan periode bulan Ramadan dan HBKN Idul Fitri.</p>																														
36	Penambahan alinea setelah alinea keempat dalam halaman II.18	<p>Sepanjang triwulan III-2022, inflasi tahunan (<i>yoy</i>) melanjutkan tren peningkatan dan berada di atas rentang sasaran tahun 2022. Pada Juli-September secara berturut-turut tingkat inflasi mencapai 4,94 persen, 4,69 persen, dan 5,95 persen. Kenaikan tersebut dipengaruhi oleh berlanjutnya kenaikan harga komoditas pangan dan energi serta konflik Rusia dan Ukraina yang belum selesai, kebijakan proteksionisme pangan di beberapa negara, dan kebijakan Zero COVID-19 di Cina yang semakin mendisrupsi rantai pasok global. Tekanan inflasi semakin tinggi dengan diberlakukannya penyesuaian harga BBM bersubsidi pada awal September 2022. Memasuki triwulan IV-2022, inflasi tahunan (<i>yoy</i>) pada Oktober menunjukkan penurunan mencapai 5,71 persen meskipun masih tinggi berada di luar rentang sasaran 2022, hal ini didukung oleh penurunan harga sejumlah komoditas pangan seiring dengan musim panen serta langkah-langkah pengendalian harga yang ditempuh oleh pemerintah pusat dan daerah, Bank Indonesia, dan mitra strategis lainnya melalui Tim Pengendali Inflasi Pusat (TPIP) dan Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID).</p>																														
37	Perubahan alinea kelima dalam halaman II.18	<p>Inflasi tahun 2022 dihadapkan pada sejumlah risiko kenaikan, di antaranya (a) tren lonjakan inflasi global; (b) kenaikan harga komoditas energi dan pangan global; (c) kebijakan <i>Administered Prices</i>: penyesuaian harga BBM bersubsidi, tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Tarif Tenaga Listrik (TTL), serta kebijakan cukai tembakau; (d) pelemahan nilai tukar Rupiah yang dapat mendorong kenaikan <i>imported inflation</i>; (e) faktor cuaca dan permasalahan struktural inflasi (seperti pola tanam, logistik, pengelolaan pascapanen, dan lain-lain); serta (f) tren musiman, kenaikan harga pada</p>																														



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

No.	Perihal Perubahan	Pemutakhiran RKP Tahun 2023
		<p>saat HBKN. Di sisi lain, terdapat potensi penurunan inflasi sejalan dengan semakin agresifnya normalisasi kebijakan moneter The Fed dan bank sentral di beberapa negara yang kemudian direspon Bank Indonesia dengan menaikkan suku bunga acuan <i>BI-7 Day Reverse Repo Rate</i> (BI7DRR). Mempertimbangkan faktor-faktor tersebut, pada tahun 2022 inflasi diperkirakan sebesar 5,7 persen (<i>yoy</i>), lebih tinggi dari tahun 2021, dan melampaui batas atas sasaran inflasi yang ditetapkan yaitu sebesar 2,0-4,0 persen (<i>yoy</i>).</p>
38	Penambahan alinea setelah alinea pertama dalam halaman II.19	<p>Presiden RI dalam Rakornas Pengendalian Inflasi tahun 2022, menyampaikan arahan kepada K/L/D untuk (a) memperkuat identifikasi sumber tekanan inflasi di daerah melalui pemanfaatan data makro dan mikro serta data detail; (b) memperluas kerja sama antardaerah (KAD) guna mengurangi disparitas pasokan dan harga antarwilayah melalui peran TPID dan TPID dalam mengidentifikasi wilayah surplus dan defisit serta menjadi fasilitator untuk mendorong kerja sama antardaerah dalam pengendalian inflasi; (c) menurunkan biaya transportasi dengan memanfaatkan fasilitasi distribusi perdagangan antardaerah dan termasuk menurunkan harga tiket pesawat dengan menambah jumlah pesawat; (d) mengoptimalkan penggunaan anggaran belanja tidak terduga untuk mendukung upaya pengendalian inflasi daerah; serta (e) mempercepat penyerapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) untuk mendukung pertumbuhan ekonomi daerah.</p>
39	Perubahan Gambar 2.13 dalam halaman II.19	<p style="text-align: center;">Gambar 2.13 Perkembangan Inflasi Bulanan (Persen, <i>yoy</i>)</p>
40	Perubahan Gambar 2.14 dalam halaman II.19	<p style="text-align: center;">Gambar 2.14 Perkembangan Inflasi Berdasarkan Komponen (Persen, <i>yoy</i>)</p>



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

No.	Perihal Perubahan	Pemutakhiran RKP Tahun 2023
41	Penambahan alinea setelah alinea keempat dalam halaman II.19	<p>Tekanan terhadap nilai tukar Rupiah berlanjut pada triwulan III-2022 sejalan dengan meningkatnya ketidakpastian di pasar keuangan global dipengaruhi pengetatan kebijakan moneter yang semakin agresif di berbagai negara, terutama Amerika Serikat (AS) untuk merespons tekanan inflasi dan perlambatan ekonomi global. Kondisi ini mendorong aliran modal asing keluar dan berdampak pada pelemahan Rupiah. Hingga triwulan III-2022, nilai tukar Rupiah secara rata-rata mencapai Rp14.607 per US\$, atau melemah sebesar 2,09 persen terhadap rata-rata di periode yang sama pada tahun 2021.</p> <p>Memasuki triwulan IV-2022, pelemahan nilai tukar Rupiah berlanjut utamanya dipengaruhi oleh pergerakan <i>Fed Funds Rate</i> (FFR) yang diperkirakan terus meningkat di tahun 2023. Hal ini berdampak pada penguatan dollar AS dan pelemahan mata uang negara-negara berkembang termasuk Indonesia. Per 24 November nilai tukar Rupiah mencapai Rp15.687 per US\$ atau terdepresiasi sebesar 9,98 persen (<i>ytd</i>).</p>
42	Perubahan alinea pertama dalam halaman II.20	<p>Pada tahun 2022 nilai tukar Rupiah diperkirakan tetap terkendali pada kisaran Rp14.950 per US\$, berada pada rentang Rp14.600-15.000 per US\$ ditopang oleh kondisi fundamental perekonomian domestik yang terjaga.</p>
43	Perubahan Gambar 2.15 dalam halaman II.20	<p style="text-align: center;">Gambar 2.15 Perkembangan Nilai Tukar Rupiah terhadap US\$ (Rp/US\$)</p> <p style="text-align: center;">■ USD-IDR (Rp/US\$)</p>
44	Perubahan alinea kedua dalam halaman II.20	<p>Respons kebijakan moneter ditempuh Bank Indonesia dengan meningkatkan suku bunga acuan BI7DRR secara bertahap dari semula dipertahankan pada level 3,50 persen hingga Juli 2022, menjadi 3,75 persen, 4,25 persen, 4,75 persen, dan 5,25 persen pada periode Agustus-November 2022 sebagaimana hasil Rapat Dewan Gubernur (RDG). Keputusan menaikkan BI7DRR secara bertahap merupakan langkah yang tepat mempertimbangkan (a) tekanan inflasi global dan domestik yang tinggi sehingga menyebabkan inflasi jauh berada di atas rentang sasaran inflasi nasional 2022 yaitu 2,0-4,0 persen (<i>yoy</i>); (b) semakin tingginya ketidakpastian ekonomi global akibat berlanjutnya perang Rusia-Ukraina, kebijakan proteksionisme pangan, krisis energi, dan Zero COVID-19 Policy di Cina yang semakin mendisrupsi rantai pasok global; (c) urgensi untuk tetap menjaga momentum pertumbuhan ekonomi domestik supaya tetap kuat di tengah perlambatan ekonomi dunia; serta (d) perlunya menjaga likuiditas perekonomian tetap memadai untuk mendukung pertumbuhan ekonomi. Bank Indonesia kedepannya diperkirakan akan kembali meningkatkan suku bunga acuan secara bertahap, seiring dengan</p>



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

No.	Perihal Perubahan	Pemutakhiran RKP Tahun 2023																										
		pengetatan kebijakan moneter The Fed yang semakin agresif dengan tetap memperhatikan kondisi makroekonomi dan keuangan domestik.																										
45	Perubahan alinea kelima dalam halaman II.20	<p>Pada tahun 2021 hingga awal tahun 2022, kondisi pasar modal domestik mencatatkan kinerja yang sangat positif, bahkan lebih baik dibanding kinerja bursa saham Malaysia, Singapura, dan Filipina. Kinerja positif tersebut tecermin dari peningkatan pertumbuhan indeks harga saham gabungan yang tinggi, pertumbuhan jumlah investor yang meningkat pesat, serta penghimpunan dana yang mencapai rekor tertinggi selama ini. Per 21 Oktober 2022, Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) berada di level 7.017,77 atau tumbuh sebesar 5,83 persen (<i>ytd</i>). Sementara itu, kapitalisasi pasar saham mencapai Rp9.311,24 triliun atau meningkat sebesar 12,83 persen (<i>yoy</i>). Capaian tersebut salah satunya didukung oleh adanya peningkatan jumlah investor pasar modal yang signifikan di sepanjang tahun 2022. Per 31 Agustus 2022, jumlah investor sebanyak 9,54 juta atau meningkat sebesar 27,38 persen dibandingkan Desember 2021 yang tercatat hanya sebesar 7,49 juta. Jika dibandingkan dengan jumlah investor tahun 2017, jumlah ini meningkat hampir sembilan kali lipat per Agustus 2022, <i>yield</i> obligasi pemerintah dengan tenor 10 tahun sempat mengalami perbaikan dan nilainya relatif terus menurun sepanjang tahun 2021 dan mulai meningkat kembali pada awal 2022.</p>																										
46	Perubahan Gambar 2.16 dalam halaman II.21	<p style="text-align: center;">Gambar 2.16 Perkembangan Yield Government Bonds</p> <table border="1"><caption>Data for Gambar 2.16: Perkembangan Yield Government Bonds</caption><thead><tr><th>Month</th><th>Yield</th></tr></thead><tbody><tr><td>Des-20</td><td>7,541</td></tr><tr><td>Feb-21</td><td>7,550</td></tr><tr><td>Apr-21</td><td>7,580</td></tr><tr><td>Jun-21</td><td>7,600</td></tr><tr><td>Agu-21</td><td>7,550</td></tr><tr><td>Okt-21</td><td>7,450</td></tr><tr><td>Des-21</td><td>7,336</td></tr><tr><td>Feb-22</td><td>7,350</td></tr><tr><td>Apr-22</td><td>7,250</td></tr><tr><td>Jun-22</td><td>7,200</td></tr><tr><td>Agu-22</td><td>7,250</td></tr><tr><td>Okt-22</td><td>7,358</td></tr></tbody></table>	Month	Yield	Des-20	7,541	Feb-21	7,550	Apr-21	7,580	Jun-21	7,600	Agu-21	7,550	Okt-21	7,450	Des-21	7,336	Feb-22	7,350	Apr-22	7,250	Jun-22	7,200	Agu-22	7,250	Okt-22	7,358
Month	Yield																											
Des-20	7,541																											
Feb-21	7,550																											
Apr-21	7,580																											
Jun-21	7,600																											
Agu-21	7,550																											
Okt-21	7,450																											
Des-21	7,336																											
Feb-22	7,350																											
Apr-22	7,250																											
Jun-22	7,200																											
Agu-22	7,250																											
Okt-22	7,358																											
47	Perubahan Gambar 2.17 dalam halaman II.21	<p style="text-align: center;">Gambar 2.17 Perkembangan IHSG</p> <table border="1"><caption>Data for Gambar 2.17: Perkembangan IHSG</caption><thead><tr><th>Month</th><th>IHSG</th></tr></thead><tbody><tr><td>Des-20</td><td>6,325,41</td></tr><tr><td>Feb-21</td><td>6,300,00</td></tr><tr><td>Apr-21</td><td>6,000,00</td></tr><tr><td>Jun-21</td><td>6,100,00</td></tr><tr><td>Agu-21</td><td>6,200,00</td></tr><tr><td>Okt-21</td><td>6,500,00</td></tr><tr><td>Des-21</td><td>6,600,00</td></tr><tr><td>Feb-22</td><td>6,800,00</td></tr><tr><td>Apr-22</td><td>7,100,00</td></tr><tr><td>Jun-22</td><td>7,000,00</td></tr><tr><td>Agu-22</td><td>7,200,00</td></tr><tr><td>Okt-22</td><td>7,017,77</td></tr></tbody></table>	Month	IHSG	Des-20	6,325,41	Feb-21	6,300,00	Apr-21	6,000,00	Jun-21	6,100,00	Agu-21	6,200,00	Okt-21	6,500,00	Des-21	6,600,00	Feb-22	6,800,00	Apr-22	7,100,00	Jun-22	7,000,00	Agu-22	7,200,00	Okt-22	7,017,77
Month	IHSG																											
Des-20	6,325,41																											
Feb-21	6,300,00																											
Apr-21	6,000,00																											
Jun-21	6,100,00																											
Agu-21	6,200,00																											
Okt-21	6,500,00																											
Des-21	6,600,00																											
Feb-22	6,800,00																											
Apr-22	7,100,00																											
Jun-22	7,000,00																											
Agu-22	7,200,00																											
Okt-22	7,017,77																											
48	Perubahan alinea kedua dalam halaman II.21	<p>Penyaluran kredit perlahan terus mengalami peningkatan hingga tumbuh sebesar 10,71 persen pada triwulan II-2022. Jika ditinjau lebih lanjut berdasarkan lapangan usaha penerima kredit, sebagian besar kredit disalurkan kepada sektor industri pengolahan (23,4 persen) dan perdagangan besar dan eceran (23,0 persen). Selanjutnya, kredit perbankan juga disalurkan kepada UMKM, melalui Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang telah disalurkan sebesar Rp263,79 triliun (63,45 persen dari target tahun</p>																										



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

No.	Perihal Perubahan	Pemutakhiran RKP Tahun 2023																		
		2022 sebesar Rp373,13 triliun) dan diberikan kepada 4,99 juta debitur per Agustus 2022. Berbeda dengan kredit non-UMKM, penyaluran KUR didominasi oleh sektor perdagangan, yaitu sebesar 43,9 persen per Agustus tahun 2022.																		
49	Perubahan alinea ketiga dalam halaman II.21	Sementara itu, dari sisi penghimpunan dana, per Juli 2022, pertumbuhan Dana Pihak Ketiga (DPK) tercatat sedikit mengalami penurunan dan sudah berada di bawah level <i>double digit</i> . Namun demikian, penghimpunan DPK mayoritas berada pada Kelompok Bank berdasarkan Modal Inti 4 (KBMI 4) yaitu 51,5 persen dari total DPK dan KBMI 3 (24,9 persen dari total DPK). Tingginya pertumbuhan DPK masih mencerminkan perilaku berjaga-jaga (<i>precautionary</i>) masyarakat dalam menghadapi pandemi. Di sisi lain, dalam menghadapi pertumbuhan DPK yang tinggi, perbankan terlihat masih meminimalisir risiko. Hal tersebut tecermin dari pergerakan portofolio investasi perbankan yang cenderung memilih berinvestasi pada <i>risk-free asset</i> seperti obligasi daripada menyalurkan kredit ke sektor riil.																		
50	Perubahan Gambar 2.18 dalam halaman II.22	<p style="text-align: center;">Gambar 2.18 Pertumbuhan Kredit dan DPK</p> <table border="1"><thead><tr><th>Month</th><th>Pertumbuhan Kredit (%YoY)</th><th>Pertumbuhan DPK (%YoY)</th></tr></thead><tbody><tr><td>Sept 2021</td><td>2.5</td><td>8.0</td></tr><tr><td>Des 2021</td><td>5.0</td><td>12.0</td></tr><tr><td>Mar 2022</td><td>6.0</td><td>6.0</td></tr><tr><td>Jun 2022</td><td>10.5</td><td>9.0</td></tr><tr><td>Jul 2022</td><td>10.5</td><td>8.5</td></tr></tbody></table>	Month	Pertumbuhan Kredit (%YoY)	Pertumbuhan DPK (%YoY)	Sept 2021	2.5	8.0	Des 2021	5.0	12.0	Mar 2022	6.0	6.0	Jun 2022	10.5	9.0	Jul 2022	10.5	8.5
Month	Pertumbuhan Kredit (%YoY)	Pertumbuhan DPK (%YoY)																		
Sept 2021	2.5	8.0																		
Des 2021	5.0	12.0																		
Mar 2022	6.0	6.0																		
Jun 2022	10.5	9.0																		
Jul 2022	10.5	8.5																		
51	Perubahan Gambar 2.19 dalam halaman II.22	<p style="text-align: center;">Gambar 2.19 Rasio Kredit Bermasalah</p> <table border="1"><thead><tr><th>Month</th><th>Rasio Kredit Bermasalah</th></tr></thead><tbody><tr><td>Sept 2021</td><td>3.2</td></tr><tr><td>Des 2021</td><td>3.0</td></tr><tr><td>Mar 2022</td><td>3.0</td></tr><tr><td>Jun 2022</td><td>2.85</td></tr><tr><td>Jul 2022</td><td>2.9</td></tr></tbody></table>	Month	Rasio Kredit Bermasalah	Sept 2021	3.2	Des 2021	3.0	Mar 2022	3.0	Jun 2022	2.85	Jul 2022	2.9						
Month	Rasio Kredit Bermasalah																			
Sept 2021	3.2																			
Des 2021	3.0																			
Mar 2022	3.0																			
Jun 2022	2.85																			
Jul 2022	2.9																			
52	Perubahan alinea pertama dalam halaman II.22	Sejalan dengan itu, kinerja sektor keuangan syariah terjaga positif hingga pertengahan 2022. Kondisi tersebut tecermin pada peningkatan total aset jasa keuangan syariah (tidak termasuk saham) per Juli 2022 yang mencapai angka Rp2.178,07 triliun atau tumbuh 14,19 persen (<i>yoY</i>). Perkembangan positif sektor perbankan syariah, pasar modal syariah dan industri keuangan non-bank (IKNB) syariah didukung oleh pemulihan ekonomi yang berdampak pada peningkatan kualitas fungsi intermediasi perbankan termasuk ke sektor UMKM, peningkatan inovasi digital, serta meningkatnya literasi masyarakat terkait instrumen investasi termasuk Surat Berharga Syariah Negara (SBSN).																		



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

No.	Perihal Perubahan	Pemutakhiran RKP Tahun 2023																														
53	Perubahan Tabel 2.7 dalam halaman II.22	<p style="text-align: center;">Tabel 2.7 <i>Outlook</i> Pencapaian Sasaran dan Indikator Pembangunan Tahun 2022 (Persen)</p> <table border="1"><thead><tr><th>Uraian</th><th>2021¹⁾</th><th><i>Outlook</i> 2022²⁾</th></tr></thead><tbody><tr><td colspan="3">Sasaran Pembangunan</td></tr><tr><td>Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) (%)</td><td>6,49</td><td>5,86^{a)}</td></tr><tr><td>Tingkat Kemiskinan (%)</td><td>9,71</td><td>8,5–9,0</td></tr><tr><td>Rasio Gini (nilai)</td><td>0,381</td><td>0,376–0,378</td></tr><tr><td>IPM (nilai)</td><td>72,29</td><td>72,73^{b)}</td></tr><tr><td>Penurunan Emisi GRK</td><td>26,02</td><td>26,87</td></tr><tr><td colspan="3">Indikator Pembangunan</td></tr><tr><td>Nilai Tukar Petani (NTP)</td><td>104,64</td><td>103–105</td></tr><tr><td>Nilai Tukar Nelayan (NTN)</td><td>104,69</td><td>104–106</td></tr></tbody></table> <p>Sumber: 1) Capaian indikator pembangunan tahun 2021 merupakan perhitungan BPS, sementara khusus penurunan Emisi GRK merupakan perhitungan Kementerian PPN/Bappenas; 2) Prakiraan Kementerian PPN/Bappenas, November 2022.</p> <p>Keterangan: a) Angka realisasi, b) Terdapat penyesuaian angka <i>outlook</i> IPM 2022 dari sasaran IPM pada Pemutakhiran RKP Tahun 2022 berdasarkan rilis beberapa data ekonomi terbaru hingga November 2022.</p>	Uraian	2021 ¹⁾	<i>Outlook</i> 2022 ²⁾	Sasaran Pembangunan			Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) (%)	6,49	5,86 ^{a)}	Tingkat Kemiskinan (%)	9,71	8,5–9,0	Rasio Gini (nilai)	0,381	0,376–0,378	IPM (nilai)	72,29	72,73 ^{b)}	Penurunan Emisi GRK	26,02	26,87	Indikator Pembangunan			Nilai Tukar Petani (NTP)	104,64	103–105	Nilai Tukar Nelayan (NTN)	104,69	104–106
Uraian	2021 ¹⁾	<i>Outlook</i> 2022 ²⁾																														
Sasaran Pembangunan																																
Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) (%)	6,49	5,86 ^{a)}																														
Tingkat Kemiskinan (%)	9,71	8,5–9,0																														
Rasio Gini (nilai)	0,381	0,376–0,378																														
IPM (nilai)	72,29	72,73 ^{b)}																														
Penurunan Emisi GRK	26,02	26,87																														
Indikator Pembangunan																																
Nilai Tukar Petani (NTP)	104,64	103–105																														
Nilai Tukar Nelayan (NTN)	104,69	104–106																														
54	Perubahan alinea ketiga dalam halaman II.23	Memasuki tahun 2022, seiring dengan tren beralihnya status pandemi menjadi endemi serta kelanjutan proses pemulihan perekonomian, TPT mengalami penurunan sebesar 0,63 poin persentase menjadi 5,86 persen. Agar peluang para pencari kerja mendapatkan kembali pekerjaannya dapat meningkat, Program Kartu Prakerja akan dilanjutkan dengan skema “semi-bantuan sosial” pada semester I dan dilanjutkan dengan pelaksanaan sesuai desain awal Kartu Prakerja sebagai sarana peningkatan keahlian dan produktivitas tenaga kerja pada semester II. Selain itu, sebagaimana diamanatkan dalam UU No. 11/2020 tentang Cipta Kerja, pada Februari 2022 pemerintah bersama-sama dengan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan mulai menjalankan program Jaminan Kehilangan Pekerjaan.																														
55	Perubahan alinea ketiga dalam halaman II.24	Kondisi ketimpangan setelah bulan September 2020 mengalami perbaikan secara perlahan. Hal ini terjadi karena kondisi perekonomian Indonesia yang semakin membaik jika dibandingkan pada masa awal pandemi. Pada bulan Maret 2021, berdasarkan data BPS, rasio gini berada pada level 0,384 atau menurun sebanyak 0,001 dari bulan September 2020. Kemudian, rasio gini berhasil turun di angka 0,381 pada bulan September 2021 atau turun sebesar 0,003 dibandingkan dengan kondisi 6 bulan sebelumnya. Namun demikian, kondisi rasio gini pada bulan Maret 2022 mengalami kenaikan menjadi 0,384. Hal ini karena kecepatan pulih kelompok masyarakat berpendapatan tinggi lebih cepat dibandingkan dengan masyarakat berpenghasilan rendah dan menengah.																														
56	Perubahan alinea kedua dalam halaman II.25	Pada tahun 2022, aktivitas perekonomian diprakirakan terus mendekati kondisi normal seiring dengan dilakukannya upaya penanganan pandemi COVID-19 yang semakin kuat dan semakin meluasnya program vaksinasi kepada masyarakat, dengan <i>outlook</i> pertumbuhan ekonomi sebesar 5,4 persen. Adapun program dan kegiatan pemerintah pada tahun 2022 masih terus difokuskan untuk mempercepat pemulihan ekonomi. Sementara itu, aksi pembangunan rendah karbon juga terus diperkuat agar berjalan optimal untuk mengurangi <i>trade-off</i> dari aktivitas ekonomi yang semakin kuat.																														

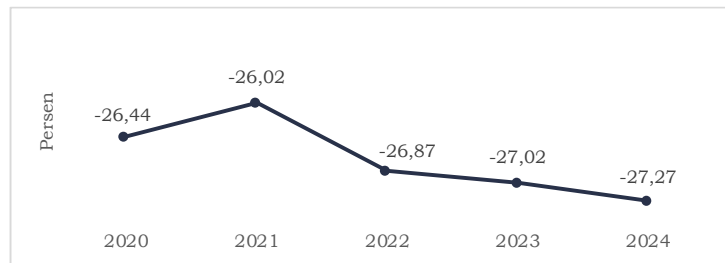


**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

No. Perihal Perubahan Pemutakhiran RKP Tahun 2023

57 Perubahan gambar 2.20 dalam halaman II.25

Gambar 2.20
Proyeksi Potensi Penurunan Emisi GRK (Kumulatif)



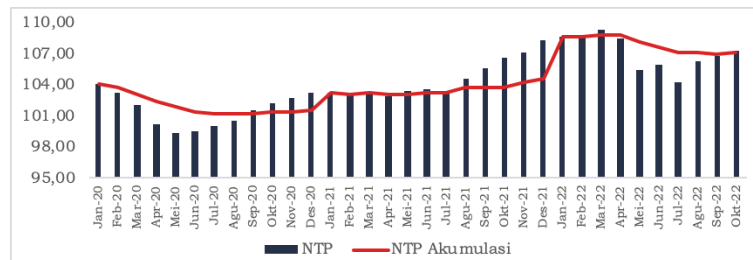
Sumber: Hasil Analisis dan Proyeksi Kementerian PPN/Bappenas, November 2022.

58 Perubahan alinea ketiga dalam halaman II.25

Proses pemulihan aktivitas ekonomi dan sosial di tahun 2022 diproyeksikan akan berdampak pada meningkatnya emisi GRK di tahun tersebut. Namun, dengan semakin luasnya upaya penerapan pembangunan rendah karbon sebagai tulang punggung ekonomi hijau, maka diproyeksikan penurunan emisi GRK akan dapat menguat dari 26,02 persen pada tahun 2021 menjadi 26,87 persen pada tahun 2022. Beberapa penguatan aksi pembangunan rendah karbon dilakukan melalui upaya aksi restorasi gambut dan reforestasi, serta perluasan penerapan energi terbarukan.

59 Perubahan Gambar 2.21 dalam halaman II.26

Gambar 2.21
Perkembangan Nilai Tukar Petani



Sumber: BPS, November 2022 (diolah).

60 Perubahan alinea kedua dalam halaman II.26

Pada tahun 2022, NTN Januari-Oktober 2022 mencapai 106,73 atau mengalami pertumbuhan sebesar 2,28 persen dibandingkan NTN tahun 2021 pada periode yang sama, yaitu 104,35. Dengan tren pertumbuhan tersebut, diharapkan NTN hingga akhir tahun 2022 mampu mencapai target yang telah ditetapkan senilai 104–106.

61 Perubahan Gambar 2.22 dalam halaman II.26

Gambar 2.22
Perkembangan Nilai Tukar Nelayan



Sumber: BPS dan KKP, November 2022 (tahun dasar 2018=100).



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

No.	Perihal Perubahan	Pemutakhiran RKP Tahun 2023
62	Perubahan alinea kedua dalam halaman II.27	Memasuki tahun 2022, Wilayah Jawa-Bali dihadapkan pada tantangan peningkatan kasus COVID-19 varian Omicron. Namun, dampak ekonomi akibat peningkatan kasus akibat varian Omicron diperkirakan tidak seberat dampak dari varian Delta. Wilayah Jawa-Bali diperkirakan dapat tumbuh sebesar 5,5 persen, sejalan dengan membaiknya ekspor, permintaan domestik, dan investasi. Peningkatan ekspor diperkirakan sejalan dengan membaiknya aktivitas perdagangan dunia, sementara peningkatan permintaan domestik didukung oleh adanya peningkatan keyakinan konsumen, pemulihan aktivitas wisatawan nusantara, meluasnya program vaksinasi, berlanjutnya program bantuan sosial, serta pelonggaran pembatasan kegiatan masyarakat. Peningkatan kinerja investasi didorong oleh berlanjutnya berbagai pembangunan PSN, di antaranya Tol Serang-Panimbang, Tol Serpong-Balaraja, Tol Jogja-Bawen, Tol Gedebage-Tasikmalaya-Cilacap, Kawasan Industri Terpadu Batang, dan Pelabuhan Patimban. Perbaikan kinerja perekonomian juga diharapkan turut mendorong penurunan tingkat kemiskinan menjadi 8,1–8,7 persen. Membaiknya kinerja perekonomian Wilayah Jawa-Bali tahun 2022 mampu menurunkan tingkat pengangguran menjadi 6,6 persen.
63	Perubahan alinea keempat dalam halaman II.27	Pada 2022, pertumbuhan Wilayah Sumatera diperkirakan akan didorong oleh peningkatan permintaan komoditas primer, seiring dengan pemulihan ekonomi global dan proyeksi harga yang tetap tinggi untuk minyak kelapa sawit, karet olahan, minyak mentah, dan batu bara. Berlanjutnya proyek infrastruktur, seperti pembangunan jalan Tol Trans Sumatera, pengembangan kawasan industri dan kawasan ekonomi khusus, serta realisasi investasi swasta, diperkirakan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi Sumatera sebesar 4,5 persen. Membaiknya kondisi perekonomian yang diiringi oleh perbaikan akurasi data dan perluasan program-program perlindungan sosial diharapkan dapat mencapai target penurunan kemiskinan hingga 9,0–9,5 persen di Sumatera. Prospek pertumbuhan ekonomi tersebut dapat menurunkan TPT Wilayah Sumatera menjadi 5,4 persen.
64	Perubahan alinea kedua dalam halaman II.28	Wilayah Kalimantan pada tahun 2022 diperkirakan akan tumbuh sebesar 4,6 persen yang didorong oleh beroperasinya Pelabuhan Kijing, pengembangan kawasan sentra produksi pangan (<i>food estate</i>), pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN), pembangunan kawasan industri hijau, dan berlanjutnya hilirisasi olahan tambang. Aktivitas ekonomi tersebut diharapkan berdampak secara inklusif sehingga menyumbang pada penurunan kemiskinan di Wilayah Kalimantan menjadi 5,2–5,8 persen. Prospek pertumbuhan ekonomi tersebut dapat menurunkan TPT Wilayah Kalimantan menjadi 5,0 persen.
65	Perubahan alinea keempat dalam halaman II.28	Pada Tahun 2022, Wilayah Nusa Tenggara diperkirakan tumbuh sebesar 5,2 persen yang sejalan dengan arah pemulihan ekonomi. Ekspor tembaga dari Nusa Tenggara Barat (NTB) diperkirakan tetap solid seiring dengan tetap kuatnya permintaan dari Cina sebagai mitra dagang utama. Pertumbuhan ekonomi tersebut juga sejalan dengan dilaksanakannya proyek investasi pemerintah dan swasta, antara lain proyek jalan tol, hotel di sejumlah destinasi wisata, revitalisasi Bandara Komodo, serta proyek hilirisasi pertambangan tembaga. Dampak dari berbagai kebijakan tersebut diharapkan dapat menyumbang pada penurunan kemiskinan ke kondisi awal sebelum pandemi yaitu di kisaran angka 15,0–15,9 persen. Seiring dengan pemulihan ekonomi di Wilayah Nusa Tenggara, TPT di wilayah tersebut pun menurun menjadi 3,1 persen.



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

No.	Perihal Perubahan	Pemutakhiran RKP Tahun 2023																																							
66	Perubahan alinea keenam dalam halaman II.28	Wilayah Sulawesi, Maluku, dan Papua pada tahun 2022 diperkirakan tumbuh masing-masing sebesar 6,9; 14,8; dan 7,3 persen. Pertumbuhan Sulawesi didorong oleh prospek permintaan negara mitra dagang utama, khususnya Cina, yang diperkirakan akan terus meningkat, baik untuk tembaga maupun besi baja. Hilirisasi di Morowali yang dapat meningkatkan nilai tambah dan produktivitas masih berlanjut seiring dengan konstruksi usaha industri logam dasar, serta barang logam bukan mesin dan peralatannya. Perbaikan konsumsi, peningkatan kinerja ekspor komoditas utama, serta rencana pengembangan lumbung ikan nasional diperkirakan mampu mendorong pertumbuhan Wilayah Maluku. Sementara, pertumbuhan ekonomi Papua diperkirakan akan didorong oleh perbaikan pada sektor pertambangan. Selain kegiatan ekonomi, Sulawesi, Maluku dan Papua merupakan wilayah-wilayah dengan tingkat pemutakhiran data yang masih rendah. Dengan adanya perbaikan akurasi data penyaluran bantuan pemerintah diharapkan dapat menurunkan angka kemiskinan masing-masing menjadi 9,2–9,8 persen, 12,0–12,5 persen, dan 23,5–24,0 persen. Berbagai perbaikan aktivitas ekonomi di Wilayah Sulawesi, Maluku, dan Papua mampu menyerap tenaga kerja dan menurunkan TPT di wilayah tersebut masing-masing menjadi 4,1 persen, 5,7 persen, dan 3,4 persen. Untuk mendukung proses pemulihan ekonomi di berbagai wilayah di Indonesia, upaya strategis ketenagakerjaan diarahkan pada program peningkatan keahlian tenaga kerja melalui reformasi sistem pendidikan dan pelatihan vokasi, penguatan sistem informasi pasar kerja, dan penguatan sistem perlindungan sosial pekerja.																																							
67	Perubahan alinea ketiga dalam halaman II.29	Proses pemulihan ekonomi di tahun 2022, meskipun diawali dengan munculnya varian Omicron COVID-19, TPT menurun menjadi 5,86 persen pada tingkat nasional. TPT untuk wilayah Sumatera menurun menjadi 5,4 persen, Jawa-Bali 6,6 persen, Nusa Tenggara 3,1 persen, Kalimantan 5,0 persen, Sulawesi 4,1 persen, Maluku 5,7 persen, dan Papua 3,4 persen.																																							
68	Perubahan Tabel 2.8 dalam halaman II.29	<p style="text-align: center;">Tabel 2.8 Pembangunan Wilayah Tahun 2021–2022</p> <table border="1"><thead><tr><th>Wilayah</th><th>2021^{a)}</th><th>Outlook 2022^{b)}</th></tr></thead><tbody><tr><td colspan="3">Sumatera</td></tr><tr><td>Pertumbuhan Ekonomi (%)</td><td>3,2</td><td>4,5^{d)}</td></tr><tr><td>Tingkat Kemiskinan (%)</td><td>9,8^{c)}</td><td>9,0–9,5^{d)}</td></tr><tr><td>Tingkat Pengangguran (%)</td><td>5,6</td><td>5,4^{a)}</td></tr><tr><td colspan="3">Jawa-Bali</td></tr><tr><td>Pertumbuhan Ekonomi (%)</td><td>3,5</td><td>5,5^{d)}</td></tr><tr><td>Tingkat Kemiskinan (%)</td><td>9,0^{c)}</td><td>8,1–8,7^{d)}</td></tr><tr><td>Tingkat Pengangguran (%)</td><td>7,4</td><td>6,6^{a)}</td></tr><tr><td colspan="3">Nusa Tenggara</td></tr><tr><td>Pertumbuhan Ekonomi (%)</td><td>2,4</td><td>5,2^{d)}</td></tr><tr><td>Tingkat Kemiskinan (%)</td><td>17,2^{c)}</td><td>15,0–15,9^{d)}</td></tr><tr><td>Tingkat Pengangguran (%)</td><td>3,4</td><td>3,1^{a)}</td></tr></tbody></table>	Wilayah	2021 ^{a)}	Outlook 2022 ^{b)}	Sumatera			Pertumbuhan Ekonomi (%)	3,2	4,5 ^{d)}	Tingkat Kemiskinan (%)	9,8 ^{c)}	9,0–9,5 ^{d)}	Tingkat Pengangguran (%)	5,6	5,4 ^{a)}	Jawa-Bali			Pertumbuhan Ekonomi (%)	3,5	5,5 ^{d)}	Tingkat Kemiskinan (%)	9,0 ^{c)}	8,1–8,7 ^{d)}	Tingkat Pengangguran (%)	7,4	6,6 ^{a)}	Nusa Tenggara			Pertumbuhan Ekonomi (%)	2,4	5,2 ^{d)}	Tingkat Kemiskinan (%)	17,2 ^{c)}	15,0–15,9 ^{d)}	Tingkat Pengangguran (%)	3,4	3,1 ^{a)}
Wilayah	2021 ^{a)}	Outlook 2022 ^{b)}																																							
Sumatera																																									
Pertumbuhan Ekonomi (%)	3,2	4,5 ^{d)}																																							
Tingkat Kemiskinan (%)	9,8 ^{c)}	9,0–9,5 ^{d)}																																							
Tingkat Pengangguran (%)	5,6	5,4 ^{a)}																																							
Jawa-Bali																																									
Pertumbuhan Ekonomi (%)	3,5	5,5 ^{d)}																																							
Tingkat Kemiskinan (%)	9,0 ^{c)}	8,1–8,7 ^{d)}																																							
Tingkat Pengangguran (%)	7,4	6,6 ^{a)}																																							
Nusa Tenggara																																									
Pertumbuhan Ekonomi (%)	2,4	5,2 ^{d)}																																							
Tingkat Kemiskinan (%)	17,2 ^{c)}	15,0–15,9 ^{d)}																																							
Tingkat Pengangguran (%)	3,4	3,1 ^{a)}																																							



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

No.	Perihal Perubahan	Pemutakhiran RKP Tahun 2023																																																					
		Wilayah	2021 ^{a)}	Outlook 2022 ^{b)}																																																			
69	Perubahan Tabel 2.8 dalam halaman II.30	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: left;">Wilayah</th> <th style="text-align: center;">2021^{a)}</th> <th style="text-align: center;">Outlook 2022^{b)}</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="3">Kalimantan</td> </tr> <tr> <td>Pertumbuhan Ekonomi (%)</td> <td style="text-align: center;">3,2</td> <td style="text-align: center;">4,6^{d)}</td> </tr> <tr> <td>Tingkat Kemiskinan (%)</td> <td style="text-align: center;">5,8^{c)}</td> <td style="text-align: center;">5,2–5,8^{d)}</td> </tr> <tr> <td>Tingkat Pengangguran (%)</td> <td style="text-align: center;">5,6</td> <td style="text-align: center;">5,0^{a)}</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Sulawesi</td> </tr> <tr> <td>Pertumbuhan Ekonomi (%)</td> <td style="text-align: center;">5,7</td> <td style="text-align: center;">6,9^{d)}</td> </tr> <tr> <td>Tingkat Kemiskinan (%)</td> <td style="text-align: center;">10,0^{c)}</td> <td style="text-align: center;">9,2–9,8^{d)}</td> </tr> <tr> <td>Tingkat Pengangguran (%)</td> <td style="text-align: center;">5,0</td> <td style="text-align: center;">4,1^{a)}</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Maluku</td> </tr> <tr> <td>Pertumbuhan Ekonomi (%)</td> <td style="text-align: center;">9,4</td> <td style="text-align: center;">14,8^{d)}</td> </tr> <tr> <td>Tingkat Kemiskinan (%)</td> <td style="text-align: center;">12,2^{c)}</td> <td style="text-align: center;">12,0–12,5^{d)}</td> </tr> <tr> <td>Tingkat Pengangguran (%)</td> <td style="text-align: center;">6,0</td> <td style="text-align: center;">5,7^{a)}</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Papua</td> </tr> <tr> <td>Pertumbuhan Ekonomi (%)</td> <td style="text-align: center;">10,3</td> <td style="text-align: center;">7,3^{d)}</td> </tr> <tr> <td>Tingkat Kemiskinan (%)</td> <td style="text-align: center;">26,1^{c)}</td> <td style="text-align: center;">23,5–24,0</td> </tr> <tr> <td>Tingkat Pengangguran (%)</td> <td style="text-align: center;">3,8</td> <td style="text-align: center;">3,4^{a)}</td> </tr> </tbody> </table>			Wilayah	2021 ^{a)}	Outlook 2022 ^{b)}	Kalimantan			Pertumbuhan Ekonomi (%)	3,2	4,6 ^{d)}	Tingkat Kemiskinan (%)	5,8 ^{c)}	5,2–5,8 ^{d)}	Tingkat Pengangguran (%)	5,6	5,0 ^{a)}	Sulawesi			Pertumbuhan Ekonomi (%)	5,7	6,9 ^{d)}	Tingkat Kemiskinan (%)	10,0 ^{c)}	9,2–9,8 ^{d)}	Tingkat Pengangguran (%)	5,0	4,1 ^{a)}	Maluku			Pertumbuhan Ekonomi (%)	9,4	14,8 ^{d)}	Tingkat Kemiskinan (%)	12,2 ^{c)}	12,0–12,5 ^{d)}	Tingkat Pengangguran (%)	6,0	5,7 ^{a)}	Papua			Pertumbuhan Ekonomi (%)	10,3	7,3 ^{d)}	Tingkat Kemiskinan (%)	26,1 ^{c)}	23,5–24,0	Tingkat Pengangguran (%)	3,8	3,4 ^{a)}
Wilayah	2021 ^{a)}	Outlook 2022 ^{b)}																																																					
Kalimantan																																																							
Pertumbuhan Ekonomi (%)	3,2	4,6 ^{d)}																																																					
Tingkat Kemiskinan (%)	5,8 ^{c)}	5,2–5,8 ^{d)}																																																					
Tingkat Pengangguran (%)	5,6	5,0 ^{a)}																																																					
Sulawesi																																																							
Pertumbuhan Ekonomi (%)	5,7	6,9 ^{d)}																																																					
Tingkat Kemiskinan (%)	10,0 ^{c)}	9,2–9,8 ^{d)}																																																					
Tingkat Pengangguran (%)	5,0	4,1 ^{a)}																																																					
Maluku																																																							
Pertumbuhan Ekonomi (%)	9,4	14,8 ^{d)}																																																					
Tingkat Kemiskinan (%)	12,2 ^{c)}	12,0–12,5 ^{d)}																																																					
Tingkat Pengangguran (%)	6,0	5,7 ^{a)}																																																					
Papua																																																							
Pertumbuhan Ekonomi (%)	10,3	7,3 ^{d)}																																																					
Tingkat Kemiskinan (%)	26,1 ^{c)}	23,5–24,0																																																					
Tingkat Pengangguran (%)	3,8	3,4 ^{a)}																																																					
<p>Sumber: Badan Pusat Statistik dan Kementerian PPN/Bappenas. Keterangan: a) Angka realisasi; b) Prakiraan Kementerian PPN/Bappenas, November 2022; c) Perhitungan Bappenas berdasarkan Susenas September 2021; dan d) Terdapat penyesuaian angka <i>outlook</i> 2022 dari sasaran pada Pemutakhiran RKP Tahun 2022 berdasarkan perkembangan perekonomian terkini hingga November 2022.</p>																																																							
70	Perubahan alinea ketiga dalam halaman II.31	<p>Dari sisi moneter-fiskal, normalisasi kebijakan moneter yang semakin agresif sebagai respons atas tingginya tekanan inflasi disertai kontraksi kebijakan fiskal sebagai upaya menurunkan defisit anggaran telah menyebabkan ketatnya likuiditas global. Kondisi tersebut menyebabkan aliran modal keluar (<i>capital outflow</i>) dari negara-negara berkembang (<i>emerging markets</i>) sehingga berdampak pada pelemahan nilai tukar mata uang di beberapa negara. Perkembangan pada akhir 2022, Bank Sentral Amerika Serikat telah menaikkan <i>The Fed Fund Rate</i> sebanyak 3,0 persen poin dan mengumumkan kemungkinan untuk menaikkan kembali suku bunga acuan lebih lanjut di tahun 2023. Sementara itu, Bank Sentral Eropa, Korea, Norwegia, Rusia, dan Selandia Baru sudah menaikkan suku bunga yang disebabkan oleh tekanan inflasi seiring dengan lonjakan harga energi dan pangan global, peningkatan aktivitas ekonomi, serta indikasi munculnya risiko stabilitas keuangan.</p>																																																					
71	Perubahan alinea kelima dalam halaman II.31	<p>Dengan berbagai perkembangan tersebut, pertumbuhan ekonomi dunia diperkirakan mengalami perlambatan pada tahun 2022, setelah mengalami rebound di tahun 2021. International Monetary Fund (IMF, Oktober 2022) kembali menurunkan prakiraan pertumbuhan ekonomi global menjadi sebesar 3,2 persen dari 2,7 persen pada tahun 2022, dipicu oleh tekanan inflasi yang tinggi di berbagai negara, pengetatan kondisi keuangan global, serta perang Rusia dan Ukraina yang berkepanjangan. Lembaga internasional lain, World Bank dan Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) memproyeksikan pertumbuhan ekonomi global pada tahun 2022 masing-masing sebesar 2,9 dan 3,0 persen.</p>																																																					



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

No.	Perihal Perubahan	Pemutakhiran RKP Tahun 2023																																																																																										
72	Perubahan Gambar 2.23 dalam halaman II.31	<p style="text-align: center;">Gambar 2.23 Pertumbuhan Ekonomi Global (Persen, <i>yo-y</i>)</p> <table border="1"><caption>Data for Gambar 2.23: Pertumbuhan Ekonomi Global (Persen, yo-y)</caption><thead><tr><th>Tahun</th><th>Pertumbuhan (%)</th></tr></thead><tbody><tr><td>1980</td><td>2,0</td></tr><tr><td>1981</td><td>2,0</td></tr><tr><td>1982</td><td>0,5</td></tr><tr><td>1983</td><td>2,5</td></tr><tr><td>1984</td><td>4,5</td></tr><tr><td>1985</td><td>3,5</td></tr><tr><td>1986</td><td>3,5</td></tr><tr><td>1987</td><td>3,5</td></tr><tr><td>1988</td><td>4,5</td></tr><tr><td>1989</td><td>3,5</td></tr><tr><td>1990</td><td>3,0</td></tr><tr><td>1991</td><td>2,5</td></tr><tr><td>1992</td><td>2,0</td></tr><tr><td>1993</td><td>2,0</td></tr><tr><td>1994</td><td>3,0</td></tr><tr><td>1995</td><td>3,0</td></tr><tr><td>1996</td><td>3,5</td></tr><tr><td>1997</td><td>3,5</td></tr><tr><td>1998</td><td>2,5</td></tr><tr><td>1999</td><td>3,5</td></tr><tr><td>2000</td><td>4,5</td></tr><tr><td>2001</td><td>2,5</td></tr><tr><td>2002</td><td>2,5</td></tr><tr><td>2003</td><td>4,0</td></tr><tr><td>2004</td><td>5,0</td></tr><tr><td>2005</td><td>5,0</td></tr><tr><td>2006</td><td>5,5</td></tr><tr><td>2007</td><td>5,5</td></tr><tr><td>2008</td><td>3,0</td></tr><tr><td>2009</td><td>3,0</td></tr><tr><td>2010</td><td>5,5</td></tr><tr><td>2011</td><td>4,0</td></tr><tr><td>2012</td><td>3,5</td></tr><tr><td>2013</td><td>3,5</td></tr><tr><td>2014</td><td>3,5</td></tr><tr><td>2015</td><td>3,5</td></tr><tr><td>2016</td><td>3,5</td></tr><tr><td>2017</td><td>3,5</td></tr><tr><td>2018</td><td>3,5</td></tr><tr><td>2019</td><td>3,0</td></tr><tr><td>2020</td><td>-1,5</td></tr><tr><td>2021</td><td>5,5</td></tr><tr><td>2022</td><td>3,0</td></tr><tr><td>2023</td><td>2,5</td></tr></tbody></table> <p>Sumber: WEO IMF, Oktober 2022.</p>	Tahun	Pertumbuhan (%)	1980	2,0	1981	2,0	1982	0,5	1983	2,5	1984	4,5	1985	3,5	1986	3,5	1987	3,5	1988	4,5	1989	3,5	1990	3,0	1991	2,5	1992	2,0	1993	2,0	1994	3,0	1995	3,0	1996	3,5	1997	3,5	1998	2,5	1999	3,5	2000	4,5	2001	2,5	2002	2,5	2003	4,0	2004	5,0	2005	5,0	2006	5,5	2007	5,5	2008	3,0	2009	3,0	2010	5,5	2011	4,0	2012	3,5	2013	3,5	2014	3,5	2015	3,5	2016	3,5	2017	3,5	2018	3,5	2019	3,0	2020	-1,5	2021	5,5	2022	3,0	2023	2,5
Tahun	Pertumbuhan (%)																																																																																											
1980	2,0																																																																																											
1981	2,0																																																																																											
1982	0,5																																																																																											
1983	2,5																																																																																											
1984	4,5																																																																																											
1985	3,5																																																																																											
1986	3,5																																																																																											
1987	3,5																																																																																											
1988	4,5																																																																																											
1989	3,5																																																																																											
1990	3,0																																																																																											
1991	2,5																																																																																											
1992	2,0																																																																																											
1993	2,0																																																																																											
1994	3,0																																																																																											
1995	3,0																																																																																											
1996	3,5																																																																																											
1997	3,5																																																																																											
1998	2,5																																																																																											
1999	3,5																																																																																											
2000	4,5																																																																																											
2001	2,5																																																																																											
2002	2,5																																																																																											
2003	4,0																																																																																											
2004	5,0																																																																																											
2005	5,0																																																																																											
2006	5,5																																																																																											
2007	5,5																																																																																											
2008	3,0																																																																																											
2009	3,0																																																																																											
2010	5,5																																																																																											
2011	4,0																																																																																											
2012	3,5																																																																																											
2013	3,5																																																																																											
2014	3,5																																																																																											
2015	3,5																																																																																											
2016	3,5																																																																																											
2017	3,5																																																																																											
2018	3,5																																																																																											
2019	3,0																																																																																											
2020	-1,5																																																																																											
2021	5,5																																																																																											
2022	3,0																																																																																											
2023	2,5																																																																																											
73	Perubahan alinea kelima dalam halaman II.32	<p>Selain itu, ekspor barang dan jasa Indonesia pada tahun 2023 diprakirakan tumbuh positif, namun tidak sebesar tahun 2022. Pertumbuhan ekspor barang diprakirakan lebih rendah pada tahun 2023 disebabkan oleh (a) pertumbuhan negara mitra yang diprakirakan positif namun lebih rendah dibandingkan tahun 2022; (b) pertumbuhan harga komoditas yang diprakirakan tidak setinggi di tahun 2022; dan (c) eskalasi politik Eropa Timur yang dapat mengganggu ketidakstabilan <i>supply-demand</i> beberapa komoditas penting seperti minyak bumi dan gandum. Sementara itu, risiko penyebaran COVID-19 masih akan memperlambat aktivitas perdagangan jasa yang sudah mulai pulih seiring pembukaan <i>border</i> di beberapa destinasi wisata. Pada tahun 2023, walaupun perekonomian negara mitra dagang diprakirakan semakin pulih seiring dengan tingkat vaksinasi yang semakin tinggi, besaran dampaknya terhadap peningkatan ekspor Indonesia masih dibayang-bayangi oleh proteksionisme yang mungkin akan tetap tinggi. Beberapa produk komoditas Indonesia diprakirakan masih akan mengalami hambatan ekspor di beberapa negara akibat isu lingkungan dan <i>sustainability</i> yang akan semakin meningkat. Sementara itu, kinerja ekspor non-komoditas masih terkendala berbagai permasalahan di dalam negeri, di antaranya terkait dengan isu produktivitas dan daya saing, akses bahan baku domestik dan impor, kemampuan inovasi, akses pembiayaan dan investasi, akses pasar dan <i>buyer</i>, serta integrasi program fasilitasi promosi ekspor antar kementerian/lembaga.</p>																																																																																										
74	Perubahan alinea pertama dalam halaman II.33	<p>Upaya peningkatan produktivitas di semua sektor ekonomi melalui agenda transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan diharapkan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi mencapai 5,3–5,5 persen pada tahun 2023. Tingkat pertumbuhan ekonomi tersebut akan meningkatkan GNI per kapita (<i>Atlas Method</i>) menjadi US\$4.760–4.770 pada tahun 2023, mampu mempertahankan posisi Indonesia pada kategori <i>upper-middle income countries</i>.</p>																																																																																										



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

No.	Perihal Perubahan	Pemutakhiran RKP Tahun 2023			
75	Perubahan Tabel 2.9 dalam halaman II.33	Tabel 2.9 Sasaran Ekonomi Makro Tahun 2023			
		Uraian	2021	2022 <i>Outlook</i>	2023 RPJMN Sasaran
Perkiraan Besaran-Besaran Pokok					
Pertumbuhan PDB (% <i>yoy</i>)					
		3,7	5,4	6,0–6,3	5,3–5,5
Laju inflasi, Indeks Harga Konsumen (IHK) (% <i>yoy</i>): Akhir Periode					
		1,87	5,7	2,8	2,0–4,0
Neraca Pembayaran					
Cadangan Devisa (US\$ miliar)					
		144,9	132,7 ^{a)}	146,8	129,8–134,4
- dalam bulan impor					
		8,0	5,6 ^{a)}	6,8	5,3–5,3
Defisit Neraca Transaksi Berjalan (% PDB)					
		0,3	0,3 ^{a)}	(1,9)	0,1–(0,0)
Keuangan Negara					
Penerimaan Perpajakan (% PDB)					
		9,1	10,3 ^{a)}	10,5–11,7	9,6 ^{b)}
Keseimbangan Primer (% PDB)					
		(2,5)	(1,8) ^{a)}	0,2–0,0	(0,7) ^{b)}
Surplus/Defisit APBN (% PDB)					
		(4,6)	(3,9) ^{a)}	(1,6)–(1,7)	(2,8) ^{b)}
Stok Utang Pemerintah (% PDB)					
		40,7	41,3 ^{a)}	28,9–29,6	40,6 ^{b)}
PMTB/Investasi					
Pertumbuhan Investasi (PMTB) (%)					
		3,8	4,1	7,2–7,8	6,1–6,3
Nilai Realisasi PMA dan PMDN (Rp Triliun)					
		901,0	968,4	1294,1	1.200–1.300
Nilai Realisasi PMA dan PMDN Industri Pengolahan (Rp Triliun)					
		325,4	352,5	573,2	396–420



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

No.	Perihal Perubahan	Pemutakhiran RKP Tahun 2023				
76	Perubahan Tabel 2.9 dalam halaman II.34	Uraian	2021	2022 <i>Outlook</i>	2023 RPJMN Sasaran	
		Target Pembangunan				
		Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	6,49	5,86 ^{d)}	4,0–4,6	5,3–6,0
		Tingkat Kemiskinan (%)	9,71	8,5–9,0	7,0–7,5	7,5–8,5
		Rasio Gini (nilai)	0,381	0,376–0,378	0,374–0,377	0,375–0,378
		Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	72,29	72,73 ^{d)}	74,77 ^{d)}	73,31–73,49
		Penurunan Emisi GRK	26,02	26,87	26,80	27,02
		Indikator Pembangunan				
		Nilai Tukar Petani (NTP)	104,64	103–105	104	105–107
		Nilai Tukar Nelayan (NTN)	104,69	104–106	106	107–108
		Sumber: Kementerian PPN/Bappenas, November 2022.				
		Keterangan: a) <i>Outlook</i> Kementerian Keuangan untuk Tahun 2022 berdasarkan Laporan Pemerintah tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Semester Pertama oleh Kementerian Keuangan, b) Angka Proyeksi Kementerian PPN/Bappenas, c) Angka realisasi 2022, dan d) Terdapat penyesuaian angka <i>outlook</i> 2022 dari sasaran pada Pemutakhiran RKP Tahun 2022 berdasarkan perkembangan perekonomian terkini hingga November 2022.				
77	Perubahan alinea pertama dalam Halaman II.34	Stabilitas makro ekonomi tahun 2023 diupayakan tetap mendukung proses pemulihan pascapandemi COVID-19. Tingkat inflasi dijaga stabil pada rentang 2,0–4,0 persen (<i>yoy</i>) dan nilai tukar Rupiah diperkirakan berada pada rentang Rp14.900,00–Rp15.400 per US\$.				
78	Perubahan alinea pertama dalam halaman II.36	Dari sisi pengeluaran (Tabel 2.10), pertumbuhan ekonomi pada tahun 2023 diharapkan akan mampu tumbuh 5,3–5,5 persen. Investasi dan ekspor diharapkan menjadi motor penggerak pertumbuhan ekonomi tahun 2023 untuk meningkatkan kapasitas produktif perekonomian Indonesia. Tren investasi hijau akan semakin menguat pada tahun 2023 seiring dengan adanya komitmen global untuk mencapai pembangunan rendah karbon. Pemulihan ekonomi hijau pasca COVID-19 mulai menjadi arah kebijakan di berbagai negara. Berdasarkan arah kebijakan tersebut, investasi (PMTB) diperkirakan tumbuh sebesar 6,1–6,3 persen, dengan target realisasi PMA dan PMDN sebesar Rp1.200–1.300 triliun pada tahun 2023. Untuk mencapai target tersebut, strategi akan diarahkan melalui (i) peningkatan investasi skala besar yang menyerap tenaga kerja banyak; (ii) peningkatan investasi pada sektor industri pengolahan; dan (iii) pengintegrasian sistem perizinan di tingkat pusat pada sistem <i>Online Single Submission-Risk Based Approach</i> (OSS-RBA) dan implementasi sistem perizinan melalui sistem <i>Online Single Submission</i> (OSS) di daerah.				



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

No.	Perihal Perubahan	Pemutakhiran RKP Tahun 2023																												
79	Perubahan Tabel 2.10 dalam halaman II.36	<p style="text-align: center;">Tabel 2.10 Sasaran Pertumbuhan PDB Sisi Pengeluaran Tahun 2023 (Persen, <i>yoy</i>)</p> <table border="1"><thead><tr><th>Uraian</th><th>RPJMN^{a)}</th><th>Sasaran 2023^{b)}</th><th>Sumber Pertumbuhan</th></tr></thead><tbody><tr><td>Pertumbuhan PDB</td><td>6,0–6,3</td><td>5,3–5,5</td><td>5,3–5,5</td></tr><tr><td>Konsumsi Rumah Tangga dan LNPRT</td><td>5,7–5,9</td><td>5,2–5,4</td><td>2,8–2,9</td></tr><tr><td>Konsumsi Pemerintah</td><td>4,8–5,1</td><td>0,8–1,3</td><td>0,1–0,1^{c)}</td></tr><tr><td>Investasi (Pembentukan Modal Tetap Bruto/PMTB)</td><td>7,2–7,8</td><td>6,1–6,3</td><td>1,9–2,0</td></tr><tr><td>Ekspor Barang dan Jasa</td><td>5,3–5,6</td><td>5,3–6,6</td><td>1,4–1,7</td></tr><tr><td>Impor Barang dan Jasa</td><td>5,0–5,1</td><td>7,1–7,5</td><td>1,5–1,6</td></tr></tbody></table> <p>Sumber: Kementerian PPN/Bappenas, November 2022. Keterangan: a) RPJMN Tahun 2020–2024; b) Perhitungan Kementerian PPN/Bappenas dan Kemenkeu, 2022. c) Perbedaan angka desimal dalam <i>range</i> terjadi pada dua hingga empat angka di belakang koma.</p>	Uraian	RPJMN ^{a)}	Sasaran 2023 ^{b)}	Sumber Pertumbuhan	Pertumbuhan PDB	6,0–6,3	5,3–5,5	5,3–5,5	Konsumsi Rumah Tangga dan LNPRT	5,7–5,9	5,2–5,4	2,8–2,9	Konsumsi Pemerintah	4,8–5,1	0,8–1,3	0,1–0,1 ^{c)}	Investasi (Pembentukan Modal Tetap Bruto/PMTB)	7,2–7,8	6,1–6,3	1,9–2,0	Ekspor Barang dan Jasa	5,3–5,6	5,3–6,6	1,4–1,7	Impor Barang dan Jasa	5,0–5,1	7,1–7,5	1,5–1,6
Uraian	RPJMN ^{a)}	Sasaran 2023 ^{b)}	Sumber Pertumbuhan																											
Pertumbuhan PDB	6,0–6,3	5,3–5,5	5,3–5,5																											
Konsumsi Rumah Tangga dan LNPRT	5,7–5,9	5,2–5,4	2,8–2,9																											
Konsumsi Pemerintah	4,8–5,1	0,8–1,3	0,1–0,1 ^{c)}																											
Investasi (Pembentukan Modal Tetap Bruto/PMTB)	7,2–7,8	6,1–6,3	1,9–2,0																											
Ekspor Barang dan Jasa	5,3–5,6	5,3–6,6	1,4–1,7																											
Impor Barang dan Jasa	5,0–5,1	7,1–7,5	1,5–1,6																											
80	Perubahan alinea kedua dalam halaman II.36	<p>Konsumsi masyarakat juga diperkirakan tumbuh positif mencapai 5,2–5,4 persen, didorong oleh peningkatan aktivitas masyarakat seiring dengan terkendalinya penanganan pandemi COVID-19. Peningkatan aktivitas masyarakat tersebut akan mendorong peningkatan daya beli masyarakat. Tingkat inflasi yang tetap terkendali juga mendorong masyarakat untuk melakukan aktivitas konsumsi. Selain itu, membaiknya perekonomian juga mendorong tumbuh positifnya konsumsi pemerintah. Konsumsi pemerintah diperkirakan tumbuh pada kisaran 0,8–1,3 persen, sehingga tetap dapat memberi dorongan pada pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan konsumsi pemerintah didukung oleh kebijakan fiskal yang akomodatif, meski di saat yang bersamaan defisit fiskal akan kembali dijaga di bawah 3 persen terhadap PDB.</p>																												
81	Perubahan alinea ketiga dalam halaman II.36	<p>Ekspor barang dan jasa diperkirakan akan tetap tumbuh tinggi pada kisaran 5,3–6,6 persen. Pemulihan permintaan global serta optimisme pemulihan ekonomi yang terus berlanjut menjadi faktor pendorong tetap tingginya pertumbuhan ekspor. Sementara itu, impor barang dan jasa diperkirakan akan tumbuh 7,1–7,5 persen, mencerminkan aktivitas ekonomi domestik yang menguat. Hal ini didorong oleh peningkatan kebutuhan bahan baku/penolong untuk industri pengolahan, barang modal untuk investasi, serta konsumsi dalam negeri.</p>																												



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

No.	Perihal Perubahan	Pemutakhiran RKP Tahun 2023																																																																												
82	Perubahan Tabel 2.11 dalam halaman II.37	<p style="text-align: center;">Tabel 2.11 Sasaran Pertumbuhan PDB Sisi Lapangan Usaha Tahun 2023 (Persen, <i>yoy</i>)</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: center;">Uraian</th> <th style="text-align: center;">RPJMN^{a)}</th> <th style="text-align: center;">Sasaran 2023^{b)}</th> <th style="text-align: center;">Sumber Pertumbuhan</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Pertumbuhan PDB</td> <td style="text-align: center;">6,0–6,3</td> <td style="text-align: center;">5,3–5,5</td> <td style="text-align: center;">5,3–5,5</td> </tr> <tr> <td>Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan</td> <td style="text-align: center;">3,9–4,0</td> <td style="text-align: center;">3,2–3,6</td> <td style="text-align: center;">0,4–0,4^{c)}</td> </tr> <tr> <td>Pertambangan dan Penggalian</td> <td style="text-align: center;">2,0–2,1</td> <td style="text-align: center;">3,0–3,2</td> <td style="text-align: center;">0,2–0,2^{c)}</td> </tr> <tr> <td>Industri Pengolahan</td> <td style="text-align: center;">7,1–7,5</td> <td style="text-align: center;">5,3–5,6</td> <td style="text-align: center;">1,1–1,1^{c)}</td> </tr> <tr> <td>Pengadaan Listrik dan Gas, dan Air Bersih</td> <td style="text-align: center;">5,5–6,0</td> <td style="text-align: center;">5,6–5,9</td> <td style="text-align: center;">0,1–0,1^{c)}</td> </tr> <tr> <td>Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang</td> <td style="text-align: center;">4,7–4,8</td> <td style="text-align: center;">3,8–4,0</td> <td style="text-align: center;">0,0–0,0^{c)}</td> </tr> <tr> <td>Konstruksi</td> <td style="text-align: center;">6,4–6,7</td> <td style="text-align: center;">6,6–6,7</td> <td style="text-align: center;">0,6–0,6^{c)}</td> </tr> <tr> <td>Perdagangan besar dan eceran, dan Reparasi Mobil dan Sepeda Motor</td> <td style="text-align: center;">6,2–6,7</td> <td style="text-align: center;">5,0–5,4</td> <td style="text-align: center;">0,7–0,7^{c)}</td> </tr> <tr> <td>Transportasi dan Pergudangan</td> <td style="text-align: center;">7,5–7,9</td> <td style="text-align: center;">7,8–8,0</td> <td style="text-align: center;">0,3–0,3^{c)}</td> </tr> <tr> <td>Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum</td> <td style="text-align: center;">6,5–6,7</td> <td style="text-align: center;">5,5–6,0</td> <td style="text-align: center;">0,2–0,2^{c)}</td> </tr> <tr> <td>Informasi dan Komunikasi</td> <td style="text-align: center;">8,9–9,4</td> <td style="text-align: center;">7,6–7,9</td> <td style="text-align: center;">0,5–0,5^{c)}</td> </tr> <tr> <td>Jasa Keuangan</td> <td style="text-align: center;">7,1–7,7</td> <td style="text-align: center;">3,4–3,6</td> <td style="text-align: center;">0,1–0,1^{c)}</td> </tr> <tr> <td><i>Real Estate</i></td> <td style="text-align: center;">5,3–5,3</td> <td style="text-align: center;">3,4–3,8</td> <td style="text-align: center;">0,1–0,1^{c)}</td> </tr> <tr> <td>Jasa Perusahaan</td> <td style="text-align: center;">8,5–8,7</td> <td style="text-align: center;">4,7–4,9</td> <td style="text-align: center;">0,1–0,1^{c)}</td> </tr> <tr> <td>Administrasi Pemerintahan dan Jaminan Sosial Wajib</td> <td style="text-align: center;">5,2–5,5</td> <td style="text-align: center;">2,8–3,0</td> <td style="text-align: center;">0,1–0,1^{c)}</td> </tr> <tr> <td>Jasa Pendidikan</td> <td style="text-align: center;">5,5–5,6</td> <td style="text-align: center;">2,5–2,8</td> <td style="text-align: center;">0,1–0,1^{c)}</td> </tr> <tr> <td>Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial</td> <td style="text-align: center;">8,4–8,5</td> <td style="text-align: center;">8,7–8,9</td> <td style="text-align: center;">0,1–0,1^{c)}</td> </tr> <tr> <td>Jasa Lainnya</td> <td style="text-align: center;">9,6–9,6</td> <td style="text-align: center;">7,6–7,7</td> <td style="text-align: center;">0,1–0,1^{c)}</td> </tr> </tbody> </table> <p style="font-size: small;">Sumber: Kementerian PPN/Bappenas, November 2022 Keterangan: a) RPJMN Tahun 2020–2024; b) Perhitungan Kementerian PPN/Bappenas dan Kemenkeu, 2022; dan c) Perbedaan angka desimal dalam <i>range</i> terjadi pada dua hingga empat angka di belakang koma.</p>	Uraian	RPJMN ^{a)}	Sasaran 2023 ^{b)}	Sumber Pertumbuhan	Pertumbuhan PDB	6,0–6,3	5,3–5,5	5,3–5,5	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	3,9–4,0	3,2–3,6	0,4–0,4 ^{c)}	Pertambangan dan Penggalian	2,0–2,1	3,0–3,2	0,2–0,2 ^{c)}	Industri Pengolahan	7,1–7,5	5,3–5,6	1,1–1,1 ^{c)}	Pengadaan Listrik dan Gas, dan Air Bersih	5,5–6,0	5,6–5,9	0,1–0,1 ^{c)}	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	4,7–4,8	3,8–4,0	0,0–0,0 ^{c)}	Konstruksi	6,4–6,7	6,6–6,7	0,6–0,6 ^{c)}	Perdagangan besar dan eceran, dan Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	6,2–6,7	5,0–5,4	0,7–0,7 ^{c)}	Transportasi dan Pergudangan	7,5–7,9	7,8–8,0	0,3–0,3 ^{c)}	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	6,5–6,7	5,5–6,0	0,2–0,2 ^{c)}	Informasi dan Komunikasi	8,9–9,4	7,6–7,9	0,5–0,5 ^{c)}	Jasa Keuangan	7,1–7,7	3,4–3,6	0,1–0,1 ^{c)}	<i>Real Estate</i>	5,3–5,3	3,4–3,8	0,1–0,1 ^{c)}	Jasa Perusahaan	8,5–8,7	4,7–4,9	0,1–0,1 ^{c)}	Administrasi Pemerintahan dan Jaminan Sosial Wajib	5,2–5,5	2,8–3,0	0,1–0,1 ^{c)}	Jasa Pendidikan	5,5–5,6	2,5–2,8	0,1–0,1 ^{c)}	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	8,4–8,5	8,7–8,9	0,1–0,1 ^{c)}	Jasa Lainnya	9,6–9,6	7,6–7,7	0,1–0,1 ^{c)}
Uraian	RPJMN ^{a)}	Sasaran 2023 ^{b)}	Sumber Pertumbuhan																																																																											
Pertumbuhan PDB	6,0–6,3	5,3–5,5	5,3–5,5																																																																											
Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	3,9–4,0	3,2–3,6	0,4–0,4 ^{c)}																																																																											
Pertambangan dan Penggalian	2,0–2,1	3,0–3,2	0,2–0,2 ^{c)}																																																																											
Industri Pengolahan	7,1–7,5	5,3–5,6	1,1–1,1 ^{c)}																																																																											
Pengadaan Listrik dan Gas, dan Air Bersih	5,5–6,0	5,6–5,9	0,1–0,1 ^{c)}																																																																											
Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	4,7–4,8	3,8–4,0	0,0–0,0 ^{c)}																																																																											
Konstruksi	6,4–6,7	6,6–6,7	0,6–0,6 ^{c)}																																																																											
Perdagangan besar dan eceran, dan Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	6,2–6,7	5,0–5,4	0,7–0,7 ^{c)}																																																																											
Transportasi dan Pergudangan	7,5–7,9	7,8–8,0	0,3–0,3 ^{c)}																																																																											
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	6,5–6,7	5,5–6,0	0,2–0,2 ^{c)}																																																																											
Informasi dan Komunikasi	8,9–9,4	7,6–7,9	0,5–0,5 ^{c)}																																																																											
Jasa Keuangan	7,1–7,7	3,4–3,6	0,1–0,1 ^{c)}																																																																											
<i>Real Estate</i>	5,3–5,3	3,4–3,8	0,1–0,1 ^{c)}																																																																											
Jasa Perusahaan	8,5–8,7	4,7–4,9	0,1–0,1 ^{c)}																																																																											
Administrasi Pemerintahan dan Jaminan Sosial Wajib	5,2–5,5	2,8–3,0	0,1–0,1 ^{c)}																																																																											
Jasa Pendidikan	5,5–5,6	2,5–2,8	0,1–0,1 ^{c)}																																																																											
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	8,4–8,5	8,7–8,9	0,1–0,1 ^{c)}																																																																											
Jasa Lainnya	9,6–9,6	7,6–7,7	0,1–0,1 ^{c)}																																																																											
83	Perubahan alinea pertama dalam halaman II.37 dan alinea pertama dalam halaman II.38	<p>Di sisi lapangan usaha, subsektor industri diperkirakan dapat mengalami pemulihan secara bertahap, baik dari sisi rantai pasok dan akses pasar seiring dengan semakin membaiknya kondisi ekonomi global dan domestik. Pada tahun 2023, sektor industri pengolahan diperkirakan tumbuh sebesar 5,3–5,6 persen. Faktor-faktor pendorong pertumbuhan industri pengolahan pada tahun 2023 antara lain (i) pemulihan industri makanan dan minuman seiring dengan peningkatan mobilitas dan pemulihan daya beli masyarakat; (ii) pemulihan daya beli masyarakat terutama untuk produk makanan, minuman, tekstil dan pakaian jadi, serta produk-produk tahan lama (<i>durable</i>); (iii) peningkatan permintaan terhadap produk industri pengolahan, baik permintaan dalam negeri maupun luar negeri; (iv) dukungan belanja pemerintah dan pemerintah daerah untuk produk dalam negeri, termasuk untuk kendaraan bermotor listrik berbasis baterai; (v) peningkatan utilisasi produksi; (vi) kestabilan rantai pasok untuk menjamin ketersediaan bahan baku; (vii) operasionalisasi Kawasan Industri (KI) dan <i>Smelter</i>; (viii) peningkatan efisiensi sejalan dengan adopsi teknologi dalam proses produksi; (ix) penguatan rantai pasok dan produk industri halal; serta (x) peningkatan penerapan ekonomi sirkular sebagai bagian dari transisi penerapan industri hijau.</p>																																																																												



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

No.	Perihal Perubahan	Pemutakhiran RKP Tahun 2023
84	Perubahan alinea kedua dalam halaman II.38	Sektor pertanian yang mampu bertahan dan tumbuh positif selama pandemi COVID-19, diperkirakan akan terakselerasi dengan pertumbuhan pada kisaran 3,2–3,6 persen. Pertumbuhan sektor pertanian didorong oleh berlanjutnya kebijakan pengembangan <i>Food Estate</i> (FE) serta program Gerakan 3 Kali Ekspor (Grati eks) Pertanian dalam upaya meningkatkan investasi dan ekspor produk sektor pertanian. Sementara itu, sektor konstruksi diperkirakan akan tumbuh tinggi pada kisaran 6,6–6,7 persen, didukung oleh pembangunan infrastruktur Ibu Kota Nusantara pada 2023 dan berlanjutnya pembangunan infrastruktur prioritas lainnya. Sektor pertambangan akan meningkat pada kisaran 3,0–3,2 persen, seiring dengan peningkatan produksi pertambangan non-migas dan operasionalisasi KI yang memerlukan logam dasar. Sektor perdagangan akan pulih dan diperkirakan tumbuh pada kisaran 5,0–5,4 persen, didorong oleh semakin pulihnya aktivitas ekonomi dan daya beli masyarakat serta semakin kuatnya peran UMKM. Sementara itu, sektor informasi dan komunikasi diperkirakan akan tumbuh sebesar 7,6–7,9 persen, didorong oleh tren digitalisasi, peningkatan konsumsi digital, serta peningkatan kebutuhan SDM Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK).
85	Perubahan alinea ketiga dalam halaman II.38	Peningkatan produktivitas di sektor pariwisata akan didorong oleh pertumbuhan sektor penyediaan akomodasi dan makan minum sejalan dengan pemulihan mobilitas masyarakat. Sektor penyediaan akomodasi dan makan minum akan meningkat pada kisaran 5,5–6,0 persen, didukung oleh pelaksanaan <i>event</i> dan <i>Meeting, Incentive, Convention, and Exhibition</i> (MICE) internasional, beserta pelaksanaan festival nasional sebagai pendorong kunjungan wisatawan mancanegara dan wisatawan nusantara. Penambahan jalur dan frekuensi penerbangan, dan perbaikan kebijakan visa termasuk untuk bisnis/investor dan MICE juga diharapkan dapat meningkatkan kunjungan wisatawan mancanegara.
86	Perubahan alinea kedua dalam halaman II.39	Peningkatan produktivitas dan transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan di sektor pariwisata dan ekonomi kreatif akan dilaksanakan melalui strategi (i) perluasan penerapan protokol kesehatan dan standar layanan yang baik; (ii) pengembangan pola perjalanan yang mudah diakses; (iii) penguatan rantai pasok dan pemasaran pariwisata dan ekonomi kreatif; (iv) peningkatan diversifikasi atraksi di 5 Destinasi Super Prioritas dengan dukungan investasi pariwisata, <i>event</i> dan MICE; (v) penguatan desa wisata melalui penguatan narasi, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, dan diversifikasi produk dan layanan; (vi) percepatan digitalisasi usaha dan produk kreatif; (vii) <i>scaling-up start-up</i> ekonomi kreatif dan digital yang didukung akses pembiayaan berbasis HKI; (viii) <i>upskilling</i> dan <i>reskilling</i> SDM pariwisata serta ekonomi kreatif dan digital; (ix) penguatan ekspor gastronomi melalui “ <i>Indonesia Spice Up The World</i> ”; (x) perluasan Gerakan Bangga Buatan Indonesia; (xi) pengembangan kota/klaster kreatif; (xii) penguatan ekosistem perfilman; serta (xiii) pengembangan program Bangga Berwisata di Indonesia (BBWI).
87	Perubahan alinea ketiga dalam halaman II.39	Pada tahun 2023, ketidakpastian global diperkirakan akan berangsur-angsur membaik dan kondusif seiring dengan meredanya ketegangan isu geopolitik dan progres transisi pandemi COVID-19 menuju fase endemi. Hal tersebut diharapkan dapat mendorong aktivitas perdagangan internasional serta tingkat likuiditas global yang lebih tinggi. Sektor pariwisata akan semakin menggeliat didorong pelonggaran yang terus dilakukan termasuk berakhirnya penerapan protokol kesehatan, yang didukung kuat oleh jumlah penduduk yang divaksinasi lengkap telah mencapai target. Perkembangan berbagai proyek strategis juga diharapkan memperkuat perkembangan daya saing nasional terutama dalam mendorong integrasi



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

No.	Perihal Perubahan	Pemutakhiran RKP Tahun 2023																																										
		<p>ekonomi domestik. Tingkat perdagangan dan investasi juga diprakirakan akan meningkat seiring dengan kebijakan hilirisasi ekspor yang semakin meningkat serta kondisi pasar keuangan yang kondusif dan fundamental ekonomi yang semakin kuat sehingga akan semakin banyak mengundang investor. Lebih lanjut, reformasi birokrasi dan reformasi kelembagaan yang terus didorong pemerintah akan semakin memantik perkembangan investasi yang lebih tinggi di Indonesia.</p>																																										
88	Perubahan Tabel 2.12 dalam halaman II.40	<p style="text-align: center;">Tabel 2.12 Neraca Pembayaran Indonesia Tahun 2023 (US\$ Miliar)</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: center;">Uraian</th> <th style="text-align: center;">RPJMN¹⁾</th> <th style="text-align: center;">Sasaran²⁾</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Neraca Pembayaran Secara Keseluruhan</td> <td style="text-align: center;">-</td> <td style="text-align: center;">(2,9)–1,7</td> </tr> <tr> <td>Neraca Transaksi Berjalan</td> <td style="text-align: center;">(30,0)</td> <td style="text-align: center;">1,9–(0,2)</td> </tr> <tr> <td>(% PDB)</td> <td style="text-align: center;">(1,9)</td> <td style="text-align: center;">0,1–(0,0)</td> </tr> <tr> <td>Barang</td> <td style="text-align: center;">7,5</td> <td style="text-align: center;">40,4–44,9</td> </tr> <tr> <td>Jasa-jasa</td> <td style="text-align: center;">(4,9)</td> <td style="text-align: center;">(15,7)–(15,1)</td> </tr> <tr> <td>Pendapatan Primer</td> <td style="text-align: center;">(40,6)</td> <td style="text-align: center;">(33,4)–(31,7)</td> </tr> <tr> <td>Pendapatan Sekunder</td> <td style="text-align: center;">8,0</td> <td style="text-align: center;">6,1–6,3</td> </tr> <tr> <td>Neraca Transaksi Modal dan Finansial</td> <td style="text-align: center;">38,0</td> <td style="text-align: center;">(3,3)–3,5</td> </tr> <tr> <td>Investasi Langsung</td> <td style="text-align: center;">27,4</td> <td style="text-align: center;">14,0–15,0</td> </tr> <tr> <td>Investasi Portofolio</td> <td style="text-align: center;">20,0</td> <td style="text-align: center;">(8,0)–(4,1)</td> </tr> <tr> <td>Investasi Lainnya</td> <td style="text-align: center;">(9,5)</td> <td style="text-align: center;">(9,3)–(7,4)</td> </tr> <tr> <td>Posisi Cadangan Devisa</td> <td style="text-align: center;">146,8</td> <td style="text-align: center;">129,8–134,4</td> </tr> <tr> <td>- Dalam bulan impor</td> <td style="text-align: center;">6,8</td> <td style="text-align: center;">5,3–5,3</td> </tr> </tbody> </table> <p style="font-size: small;">Sumber: 1) RPJMN Tahun 2020–2024; 2) Prakiraan Kementerian PPN/Bappenas, November 2022. Catatan: Angka dalam kurung “(x,x)” bernilai negatif.</p>	Uraian	RPJMN ¹⁾	Sasaran ²⁾	Neraca Pembayaran Secara Keseluruhan	-	(2,9)–1,7	Neraca Transaksi Berjalan	(30,0)	1,9–(0,2)	(% PDB)	(1,9)	0,1–(0,0)	Barang	7,5	40,4–44,9	Jasa-jasa	(4,9)	(15,7)–(15,1)	Pendapatan Primer	(40,6)	(33,4)–(31,7)	Pendapatan Sekunder	8,0	6,1–6,3	Neraca Transaksi Modal dan Finansial	38,0	(3,3)–3,5	Investasi Langsung	27,4	14,0–15,0	Investasi Portofolio	20,0	(8,0)–(4,1)	Investasi Lainnya	(9,5)	(9,3)–(7,4)	Posisi Cadangan Devisa	146,8	129,8–134,4	- Dalam bulan impor	6,8	5,3–5,3
Uraian	RPJMN ¹⁾	Sasaran ²⁾																																										
Neraca Pembayaran Secara Keseluruhan	-	(2,9)–1,7																																										
Neraca Transaksi Berjalan	(30,0)	1,9–(0,2)																																										
(% PDB)	(1,9)	0,1–(0,0)																																										
Barang	7,5	40,4–44,9																																										
Jasa-jasa	(4,9)	(15,7)–(15,1)																																										
Pendapatan Primer	(40,6)	(33,4)–(31,7)																																										
Pendapatan Sekunder	8,0	6,1–6,3																																										
Neraca Transaksi Modal dan Finansial	38,0	(3,3)–3,5																																										
Investasi Langsung	27,4	14,0–15,0																																										
Investasi Portofolio	20,0	(8,0)–(4,1)																																										
Investasi Lainnya	(9,5)	(9,3)–(7,4)																																										
Posisi Cadangan Devisa	146,8	129,8–134,4																																										
- Dalam bulan impor	6,8	5,3–5,3																																										
89	Perubahan alinea pertama dalam halaman II.40	<p>Dengan kondisi tersebut, Indonesia diprakirakan akan mengalami stabilitas eksternal yang relatif tetap kuat pada tahun 2023 di tengah masih tingginya ketidakpastian dunia. Neraca secara keseluruhan diprakirakan mencapai US\$(2,9)–1,7 miliar. Capaian tersebut akan ditopang oleh neraca transaksi berjalan yang akan mengalami sedikit penurunan menjadi sekitar US\$1,9–(0,2) miliar atau setara dengan 0,1–(0,0) persen dari PDB. Sementara itu, transaksi modal dan finansial akan mencapai kisaran US\$(3,3)–3,5 miliar. Perkembangan tersebut kemudian akan mendorong cadangan devisa mencapai sekitar US\$129,8–134,4 miliar yang cukup untuk membiayai 5,3–5,3 bulan impor serta berada di atas standar kecukupan internasional.</p>																																										
90	Perubahan alinea kedua dalam halaman II.40	<p>Postur makro fiskal 2023 diarahkan konsolidatif dengan mempertimbangkan defisit kembali pada maksimal 3 persen PDB, namun pelaksanaannya tetap akomodatif mendukung pementapan <i>recovery</i> dan transformasi ekonomi. Berdasarkan arah kebijakan tersebut, kebijakan fiskal tahun 2023 diuraikan sebagai berikut</p>																																										
91	Perubahan poin (i) alinea ketiga dalam halaman II.40	<p>(i) Pendapatan Negara dan Hibah</p> <p>Pendapatan negara dan hibah ditargetkan mencapai 11,7 persen dari PDB, yang terdiri dari penerimaan perpajakan sebesar 9,6 persen dari PDB dan PNPB sebesar 2,1 persen dari PDB.</p>																																										



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

No.	Perihal Perubahan	Pemutakhiran RKP Tahun 2023																														
92	Perubahan poin (ii) alinea kedua dalam halaman II.41	<p>(ii) Belanja Negara</p> <p>Pada tahun 2023, belanja negara ditargetkan mencapai 14,5 persen PDB, terdiri dari belanja pemerintah pusat sebesar 10,7 persen PDB dan TKD sebesar 3,9 persen PDB. Kebijakan belanja negara diarahkan untuk meningkatkan kualitas belanja (<i>spending better</i>) agar lebih efisien dan produktif, yang dilaksanakan melalui</p> <ol style="list-style-type: none">(1) mendukung peningkatan kualitas SDM Indonesia yang terampil, produktif, dan berdaya saing, melalui: (a) peningkatan kualitas pendidikan, (b) transformasi sistem kesehatan, dan (c) akselerasi reformasi menuju sistem perlindungan sosial sepanjang hayat dan adaptif;(2) mendorong percepatan pembangunan infrastruktur pendukung transformasi ekonomi;(3) meningkatkan ketepatan sasaran penyaluran program bansos dan subsidi;(4) meningkatkan efektivitas implementasi reformasi birokrasi;(5) melanjutkan efisiensi belanja barang yang bersifat nonprioritas;(6) meningkatkan sinkronisasi dan penajaman belanja bantuan pemerintah;(7) mengantisipasi dan memitigasi risiko fiskal dalam pelaksanaan APBN, bencana, dan kegiatan mendesak lainnya;(8) memperkuat keterkaitan antara berbagai program prioritas dalam RKP dengan kebijakan di belanja pemerintah pusat;(9) meningkatkan kualitas layanan publik di daerah dan untuk mengatasi kesenjangan kemampuan keuangan antar pemerintah pusat dan daerah, serta antar daerah dan daerah dalam melaksanakan pembangunan;(10) meningkatkan kapasitas fiskal daerah melalui pengurangan <i>vertical imbalance</i> serta upaya penanganan eksternalitas negatif dan perbaikan lingkungan antara lain melalui penguatan kebijakan Dana Bagi Hasil Perkebunan Sawit.																														
93	Perubahan Tabel 2.13 dalam halaman II.42	<p style="text-align: center;">Tabel 2.13 Sasaran Fiskal Tahun 2023 (Persen PDB)</p> <table border="1"><thead><tr><th>Uraian</th><th>RPJMN^{a)}</th><th>Sasaran^{b)}</th></tr></thead><tbody><tr><td>Pendapatan Negara dan Hibah</td><td>12,8–14,1</td><td>11,7</td></tr><tr><td>Penerimaan Perpajakan</td><td>10,5–11,7</td><td>9,6</td></tr><tr><td>PNBP</td><td>2,2–2,3</td><td>2,1</td></tr><tr><td>Belanja Negara</td><td>14,3–15,8</td><td>14,5</td></tr><tr><td>Belanja Pemerintah Pusat</td><td>9,4–10,7</td><td>10,7</td></tr><tr><td>TKD</td><td>4,9–5,1</td><td>3,9</td></tr><tr><td>Keseimbangan Primer</td><td>0,2–0,0</td><td>(0,7)</td></tr><tr><td>Surplus/Defisit</td><td>(1,6)–(1,7)</td><td>(2,8)</td></tr><tr><td>Rasio Utang</td><td>28,9–29,6</td><td>40,6^{c)}</td></tr></tbody></table> <p>Sumber: Kementerian PPN/Bappenas 2022.</p> <p>Keterangan: a) RPJMN Tahun 2020–2024; b) Laporan Panitia Kerja Asumsi Dasar, Pendapatan, Defisit dan Pembiayaan dalam rangka Pembicaraan Tingkat I/Pembahasan RUU Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2023 beserta Nota Keuangannya; c) Angka Proyeksi Kementerian PPN/Bappenas.</p> <p>Catatan: Angka dalam kurung "(x,y)" bernilai negatif.</p>	Uraian	RPJMN ^{a)}	Sasaran ^{b)}	Pendapatan Negara dan Hibah	12,8–14,1	11,7	Penerimaan Perpajakan	10,5–11,7	9,6	PNBP	2,2–2,3	2,1	Belanja Negara	14,3–15,8	14,5	Belanja Pemerintah Pusat	9,4–10,7	10,7	TKD	4,9–5,1	3,9	Keseimbangan Primer	0,2–0,0	(0,7)	Surplus/Defisit	(1,6)–(1,7)	(2,8)	Rasio Utang	28,9–29,6	40,6 ^{c)}
Uraian	RPJMN ^{a)}	Sasaran ^{b)}																														
Pendapatan Negara dan Hibah	12,8–14,1	11,7																														
Penerimaan Perpajakan	10,5–11,7	9,6																														
PNBP	2,2–2,3	2,1																														
Belanja Negara	14,3–15,8	14,5																														
Belanja Pemerintah Pusat	9,4–10,7	10,7																														
TKD	4,9–5,1	3,9																														
Keseimbangan Primer	0,2–0,0	(0,7)																														
Surplus/Defisit	(1,6)–(1,7)	(2,8)																														
Rasio Utang	28,9–29,6	40,6 ^{c)}																														



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

No.	Perihal Perubahan	Pemutakhiran RKP Tahun 2023
94	Perubahan alinea kedua dalam halaman II.42	Di tengah risiko perlambatan ekonomi dunia akibat tingginya inflasi, kebijakan pengendalian inflasi tahun 2023 diarahkan pada upaya menjaga 4K (keterjangkauan harga, ketersediaan pasokan, kelancaran distribusi, serta efektivitas komunikasi) yang mendukung upaya peningkatan daya saing perekonomian pascapandemi COVID-19.
95	Perubahan alinea kedua dalam halaman II.43	Selanjutnya, untuk mitigasi risiko peningkatan ketidakpastian pasar keuangan global yang berasal dari normalisasi kebijakan moneter The Fed dan sejumlah negara Advanced Economies (AEs) pada tahun 2023, maka kebijakan nilai tukar Rupiah diarahkan pada bauran kebijakan moneter yang selaras dengan kebijakan fiskal, makroprudensial, sektor keuangan, dan sektor riil (terutama ekspor). Bauran kebijakan stabilisasi nilai tukar Rupiah dilakukan dengan cara (i) memperkuat <i>triple intervention</i> di pasar valas; (ii) memperkuat strategi operasi moneter untuk memperkuat efektivitas <i>stance</i> kebijakan moneter akomodatif; (iii) menjaga inflasi pada tingkat yang rendah dan stabil; (iv) menetapkan tingkat suku bunga BI7DRR yang optimal untuk menjangkar ekspektasi inflasi dan mendukung pemulihan ekonomi nasional; (v) mendorong akselerasi transmisi kebijakan moneter melalui akselerasi pendalaman pasar uang dan pasar valas sesuai <i>Blueprint</i> Pendalaman Pasar Uang (BPPU) 2025; (vi) pengembangan ekonomi keuangan inklusif pada UMKM dan ekonomi keuangan syariah; (vii) mendorong percepatan digitalisasi ekonomi dan keuangan nasional; serta (viii) memperkuat kebijakan internasional dengan memperluas kerja sama <i>cross border payment connectivity</i> , fasilitasi penyelenggaraan promosi investasi dan perdagangan di sektor prioritas. Upaya-upaya tersebut ditempuh untuk menjaga stabilitas nilai tukar Rupiah sesuai dengan fundamentalnya dan mekanisme pasar.
96	Perubahan alinea keenam dalam halaman II.43	Prospek pemulihan ekonomi tahun 2023 yang relatif positif di seluruh wilayah diperkirakan dapat menurunkan TPT wilayah Sumatera pada kisaran 4,6–5,1 persen, Jawa-Bali 5,9–6,3 persen, Nusa Tenggara 2,5–2,8 persen, Kalimantan 4,2–4,4 persen, Sulawesi 3,7–4,0 persen, Maluku 5,1–5,3 persen, dan Papua 2,7–3,2 persen.
97	Perubahan alinea keenam dalam halaman II.44 dan alinea pertama halaman II.45	Untuk mengantisipasi dan mendorong upaya pemulihan ekonomi Indonesia di tengah pandemi COVID-19, terdapat beberapa strategi yang dilakukan oleh pemerintah guna optimalisasi pertumbuhan perekonomian yang berkualitas dan berkesinambungan sehingga diharapkan dapat mendorong pengurangan angka rasio gini ke depannya sesuai target yang diproyeksikan. Intervensi kebijakan afirmasi terhadap kelompok berpenghasilan 40 persen ke bawah diwujudkan melalui (1) menyempurnakan pengembangan registrasi sosial-ekonomi di provinsi masing-masing; (2) peningkatan akurasi penargetan bantuan sosial; (3) integrasi dan penyederhanaan program serta penyaluran bantuan sosial secara digital, cepat, dan responsif kebencanaan; (4) penguatan kelembagaan pelatihan vokasi di provinsi disertai pemenuhan kebutuhan pasar kerja melalui perluasan lapangan kerja; (5) penguatan permodalan bagi pelaku UMKM sebagai salah satu penggerak utama ekonomi kelompok menengah; (6) penguatan kebijakan fiskal untuk redistribusi yang merata, yang utamanya ditujukan untuk kelompok berpenghasilan tinggi; (7) peningkatan daya beli masyarakat terutama kelas menengah ke bawah melalui reformasi perlindungan sosial; dan (8) reformasi agraria bagi petani yang tidak memiliki lahan di kabupaten/kota.



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

No.	Perihal Perubahan	Pemutakhiran RKP Tahun 2023
98	Perubahan alinea kelima dalam halaman II.46	Pada tahun 2023, NTP dijaga pada kisaran 105-107. Dengan nilai NTP tersebut, menunjukkan adanya kestabilan kesejahteraan petani. Kebijakan untuk menjaga NTP pada nilai 105-107 diarahkan pada kegiatan-kegiatan produktivitas pangan dan pertanian serta penciptaan nilai tambah pertanian melalui (1) jaminan ketersediaan sarana produksi peningkatan Indeks Pertanaman (IP); (2) penguatan peran penyuluh pertanian dan modernisasi pertanian (pertanian presisi, pertanian digital); (3) pembentukan korporasi petani dan nelayan; (4) <i>food estate</i> (kawasan sentra produksi pangan); (5) efisiensi distribusi pangan melalui penguatan konektivitas produksi (jalan usaha tani) dan sistem logistik pangan; (6) pertanian regeneratif, rendah karbon, dan berketahanan iklim; (7) standarisasi proses dan produk pertanian serta penyediaan sarana produksi karantina; (8) transformasi sistem pangan lokal dan perkotaan serta pengembangan pertanian keluarga; (9) percepatan transformasi platform <i>e-commerce</i> pertanian/rantai pasok <i>online</i> ; (10) pengolahan primer produksi pangan dan pertanian, dan regenerasi petani; serta (11) revitalisasi kesehatan lahan dengan pengembangan teknologi pemupukan organik berasal dari bahan nabati, hewani darat dan laut.
99	Perubahan alinea kedua dalam halaman II.47	Pada tahun 2023, rata-rata pertumbuhan ekonomi Kawasan Timur Indonesia (KTI) diperkirakan akan lebih tinggi dibandingkan dengan Kawasan Barat Indonesia (KBI). Akselerasi pertumbuhan ekonomi KTI merupakan kontribusi dari membaiknya kinerja pertambangan, dampak program hilirisasi pertambangan yang mampu meningkatkan produktivitas dan nilai tambah, mulai beroperasinya Kawasan Industri (KI)/Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) baru, operasionalisasi smelter baru, implementasi program lumbung ikan nasional, serta kinerja <i>food estate</i> . Harga komoditas internasional, khususnya baja dan besi yang diproyeksikan akan tetap tinggi, berperan dalam mendorong pertumbuhan ekonomi KTI. Pertumbuhan ekonomi di Wilayah KTI diperkirakan sebesar 6,4–6,9 persen, sementara di KBI pertumbuhan diperkirakan sebesar 5,0–5,2 persen.
100	Perubahan alinea ketiga dalam halaman II.47	Pertumbuhan ekonomi Nusa Tenggara pada 2023 diperkirakan mencapai 5,8–6,2 persen, didorong oleh peningkatan produksi tembaga, peningkatan ekspor konsentrat tembaga sebagai hasil program hilirisasi, serta peningkatan sektor pariwisata yang didukung oleh beroperasinya KEK Mandalika, terminal <i>multipurpose</i> Labuan Bajo, serta pembangunan infrastruktur Bandara Komodo. Sejalan dengan target pertumbuhan tersebut, tingkat kemiskinan diperkirakan akan menurun hingga 13,8–14,8 persen dan tingkat pengangguran menurun hingga 2,5–2,8 persen.
101	Perubahan alinea keempat dalam halaman II.47	Ekonomi Wilayah Kalimantan diperkirakan tumbuh 5,2–5,5 persen. Pertumbuhan wilayah ini didukung oleh keberlanjutan proyek pengembangan kawasan sentra produksi pangan (<i>food estate</i>) Kalimantan Tengah, pengembangan kawasan industri hijau, proyek pembangunan infrastruktur pendukung IKN, operasionalisasi Pelabuhan Kijing, dan pengembangan Kawasan Industri yang termasuk dalam Proyek Strategis Nasional (PSN) di antaranya KI Landak, KI Ketapang, KI Jorong, KI Tanah Kuning, serta proyek hilirisasi sektor energi termasuk biodiesel. Peningkatan ekspor minyak kelapa sawit, kayu, dan batu bara seiring dengan pemulihan ekonomi global diperkirakan juga memberikan kontribusi dalam pertumbuhan ekonomi Kalimantan. Kegiatan ekonomi ini diperkirakan dapat juga menyumbang pada penurunan angka kemiskinan hingga di angka 4,3–5,1 persen. Keberlanjutan proyek di Wilayah Kalimantan diperkirakan akan meningkatkan penciptaan lapangan kerja



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

No.	Perihal Perubahan	Pemutakhiran RKP Tahun 2023
		baru di wilayah tersebut dan mampu menurunkan TPT hingga pada kisaran 4,2–4,4 persen.
102	Perubahan alinea kelima dalam halaman II.47	Pertumbuhan ekonomi di Wilayah Sulawesi pada tahun 2023 diproyeksikan mencapai 7,4–8,0 persen. Selanjutnya, TPT diproyeksikan menurun pada kisaran 3,7–4,0 persen. Mulai beroperasinya KI Bantaeng, KI Morowali, KI Konawe, KEK Palu, KEK Likupang, KEK Bitung, operasionalisasi smelter, dan peningkatan harga komoditas baja dan besi serta produk turunannya, merupakan faktor yang mendukung tingkat pertumbuhan ekonomi dan penurunan angka pengangguran. Selain dari aktivitas kegiatan ekonomi, perbaikan data dan perluasan cakupan registrasi sosial ekonomi untuk meningkatkan akurasi penargetan program-program perlindungan sosial diharapkan dapat menurunkan angka kemiskinan menjadi 8,3–8,8 persen.
103	Perubahan alinea pertama dalam halaman II.48	Implementasi program lumbung ikan nasional, peningkatan produksi feronikel, dan pembangunan pabrik bahan baku baterai kendaraan listrik diperkirakan akan terus mendorong pertumbuhan ekonomi Maluku pada tahun 2023. Pertumbuhan ekonomi diperkirakan mencapai sebesar 10,9–11,8 persen. Pertumbuhan ekonomi yang tinggi tersebut ditargetkan dapat menyumbang pada penurunan angka kemiskinan menjadi sebesar 10,6–11,4 persen dan menurunkan angka TPT pada kisaran 5,1–5,3 persen.
104	Perubahan alinea kedua dalam halaman II.48	Pertumbuhan ekonomi Papua tahun 2023 diperkirakan akan mencapai 7,2–7,8 persen, didorong oleh perbaikan kinerja dan produktivitas pertambangan tembaga dan emas. Peningkatan investasi seiring dengan implementasi Proyek Strategis Nasional, di antaranya KEK Sorong, KI Teluk Bintuni, pembangunan Bandara Siboru Fakfak, Bandara Nabire Baru dan Pelabuhan Internasional Seget di Kabupaten Sorong juga menjadi faktor pendorong pertumbuhan ekonomi Papua. Sejalan dengan hal tersebut, perbaikan penyaluran program-program perlindungan sosial yang diiringi oleh perbaikan infrastruktur dasar diharapkan dapat menurunkan angka kemiskinan di angka 22,0–23,6 persen. Penguatan perekonomian di Papua diperkirakan mampu menurunkan TPT di wilayah tersebut hingga pada kisaran 2,7–3,2 persen.
105	Perubahan alinea ketiga dalam halaman II.48	Meskipun pertumbuhan KBI diproyeksikan lebih rendah dibandingkan KTI, pertumbuhan tersebut tetap menjadi pengungkit pertumbuhan ekonomi karena kontribusinya yang besar terhadap pertumbuhan ekonomi nasional. Pertumbuhan ekonomi Sumatera diperkirakan akan didorong oleh adanya peningkatan volume ekspor seiring dengan tetap tingginya harga komoditas CPO dan batu bara. Hal ini didukung oleh adanya komitmen perjanjian perdagangan <i>Regional Comprehensive Economic Partnership</i> (RCEP) yang berpotensi untuk meningkatkan hubungan perdagangan dan kerja sama Indonesia dengan Cina, Jepang, Korea Selatan, dan Australia. Beroperasinya beberapa KI/KEK, berlanjutnya pembangunan proyek jalan Tol Trans Sumatera, dan peningkatan investasi swasta dalam proses hilirisasi industri, juga akan berkontribusi dalam pertumbuhan ekonomi Sumatera. Pertumbuhan ekonomi diperkirakan tumbuh sebesar 4,5–4,8 persen pada tahun 2023. Aktivitas ekonomi ini diharapkan dapat juga berdampak secara inklusif untuk seluruh penduduk terutama penduduk miskin dan rentan sehingga dapat menyumbang pada penurunan kemiskinan sebesar 8,2–8,6 persen. TPT di Wilayah Sumatera pun diperkirakan menurun menjadi 4,6–5,1 persen.



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

No.	Perihal Perubahan	Pemutakhiran RKP Tahun 2023
106	Perubahan alinea keempat dalam halaman II.48	<p>Sementara itu, ekonomi Wilayah Jawa-Bali pada tahun 2023 diprakirakan tumbuh 5,2–5,4 persen. Pertumbuhan ekonomi Pulau Jawa ditopang oleh beberapa faktor, termasuk dilanjutkannya proyek infrastruktur strategi yang mendorong peningkatan investasi, seperti operasionalisasi KI Terpadu Batang, pengembangan KEK Lido, KEK Gresik, dan KEK Singhasari. Peningkatan efisiensi sistem logistik mendorong meningkatnya permintaan barang dan jasa di pasar domestik maupun pasar dunia. Perekonomian di Bali diprakirakan akan mulai pulih perlahan, didorong oleh peningkatan kunjungan wisatawan nusantara dan relaksasi perjalanan internasional seiring dengan meredanya pandemi COVID-19. Peningkatan aktivitas ekonomi yang terus didukung oleh perbaikan dan penguatan program-program afirmasi diharapkan dapat menurunkan kemiskinan di Wilayah Jawa-Bali menjadi 6,9–7,6 persen. Peningkatan aktivitas ekonomi ini pun diprakirakan akan mampu menurunkan TPT di Wilayah Jawa-Bali hingga pada kisaran 5,9–6,3 persen. Untuk mendukung proses pemulihan ekonomi di berbagai wilayah di Indonesia, upaya strategis ketenagakerjaan diarahkan pada program peningkatan keahlian tenaga kerja melalui revitalisasi pendidikan vokasi dan pelatihan vokasi, pembangunan sistem informasi pasar kerja yang terintegrasi, dan penguatan sistem perlindungan sosial bagi para pekerja.</p>



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

No. Perihal
Perubahan

Pemutakhiran RKP Tahun 2023

107 Perubahan
Tabel 2.14
dalam halaman
II.49

Tabel 2.14
Sasaran Pembangunan Wilayah Tahun 2023

Wilayah	RPJMN ^{a)}	2023 ^{b)}
Sumatera		
Pertumbuhan Ekonomi (%)	6,0	4,5–4,8
Tingkat Kemiskinan (%)	7,76 ^{c)}	8,2–8,6
Tingkat Pengangguran (%)	3,6	4,6–5,1
Jawa-Bali		
Pertumbuhan Ekonomi (%)	5,9	5,2–5,4
Tingkat Kemiskinan (%)	6,50 ^{c)}	6,9–7,6
Tingkat Pengangguran (%)	4,1	5,9–6,3
Nusa Tenggara		
Pertumbuhan Ekonomi (%)	6,0	5,8–6,2
Tingkat Kemiskinan (%)	12,75 ^{c)}	13,8–14,8
Tingkat Pengangguran (%)	2,1	2,5–2,8
Kalimantan		
Pertumbuhan Ekonomi (%)	6,7	5,2–5,5
Tingkat Kemiskinan (%)	3,72 ^{c)}	4,3–5,1
Tingkat Pengangguran (%)	3,4	4,2–4,4
Sulawesi		
Pertumbuhan Ekonomi (%)	7,6	7,4–8,0
Tingkat Kemiskinan (%)	7,74 ^{c)}	8,3–8,8
Tingkat Pengangguran (%)	3,5	3,7–4,0
Maluku		
Pertumbuhan Ekonomi (%)	7,3	10,9–11,8
Tingkat Kemiskinan (%)	9,45 ^{c)}	10,6–11,4
Tingkat Pengangguran (%)	4,6	5,1–5,3
Papua		
Pertumbuhan Ekonomi (%)	6,6	7,2–7,8
Tingkat Kemiskinan (%)	18,67 ^{c)}	22,0–23,6
Tingkat Pengangguran (%)	2,5	2,7–3,2

Sumber: Kementerian PPN/Bappenas, November 2022.

Keterangan: a) Pertumbuhan ekonomi merupakan rata-rata tahun 2020–2024, sementara tingkat pengangguran merupakan target 2024 pada RPJMN Tahun 2020–2024; b) Prakiraan Kementerian PPN/Bappenas, November 2022; c) *Trajectory* RPJMN Tahun 2020–2024 di tahun 2023.

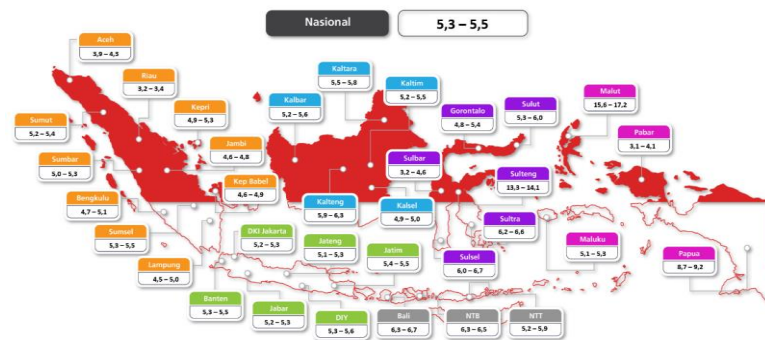


**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

No.	Perihal Perubahan	Pemutakhiran RKP Tahun 2023
-----	-------------------	-----------------------------

108 Perubahan Gambar 2.24 dalam halaman II.50

Gambar 2.24
Pertumbuhan Ekonomi Per Provinsi Tahun 2023



Sumber: Kementerian PPN/Bappenas, November 2022.

109 Perubahan alinea pertama dalam halaman II.50

Untuk mencapai sasaran pertumbuhan ekonomi tahun 2023, dibutuhkan investasi Rp6.591,6-6.702,9 triliun, yang bersumber dari investasi pemerintah, BUMN, dan swasta. Dari total kebutuhan investasi, sekitar 87,1-88,3 persen dipenuhi oleh dunia usaha swasta dan masyarakat. Sementara itu, investasi pemerintah dan BUMN diprakirakan akan berkontribusi masing-masing pada kisaran 5,0-5,1 dan 6,7-7,8 persen dari total investasi yang dibutuhkan.

110 Perubahan Tabel 2.15 dalam halaman II.50

Tabel 2.15
Kebutuhan Investasi Tahun 2023 (Persen)

Uraian	Share (Persen)	Nilai (triliun)
(1) Investasi Pemerintah	5,0-5,1	329,4-341,3
(2) Investasi BUMN	6,7-7,8	441,1-525,0
(3) Investasi Swasta	88,3-87,1	5.821,1-5.836,6
Total Kebutuhan Investasi		6.591,6-6.702,9

Sumber: Kementerian PPN/Bappenas, November 2022.

111 Perubahan alinea pertama dalam halaman II.51

Untuk memenuhi kebutuhan investasi pada tahun 2023, dibutuhkan sumber pembiayaan yang dapat diperoleh dari instrumen pembiayaan investasi seperti kredit perbankan, penerbitan saham, penerbitan obligasi, dana internal BUMN, serta dana internal masyarakat. Dana internal masyarakat merupakan penyumbang terbesar dalam sumber pembiayaan dalam negeri, yaitu sebesar 75,7-72,8 persen dari total pembiayaan investasi.

112 Perubahan Tabel 2.16 dalam halaman II.51

Tabel 2.16
Sumber Pembiayaan Investasi Tahun 2023 (Persen)

Uraian	Share (Persen)
Kredit Perbankan	6,4-7,2
Penerbitan Saham	1,2-1,2
Penerbitan Obligasi	12,3-13,7
Dana Internal BUMN	4,4-5,2
Dana Internal Masyarakat	75,7-72,8

Sumber: Kementerian PPN/Bappenas, November 2022.



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

No.	Perihal Perubahan	Pemutakhiran RKP Tahun 2023						
113	Perubahan alinea kedua dalam halaman II.52	Penjelasan rinci terhadap masing-masing Proyek Investasi BUMN ini dituangkan dalam dokumen Rencana Investasi Prioritas BUMN Tahun 2023 yang menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2023.						
114	Perubahan alinea ketiga dalam halaman II.52	Tahun 2023 merupakan tahun untuk akselerasi pertumbuhan ekonomi dalam mendorong transformasi ekonomi. Akselerasi pertumbuhan ekonomi salah satunya didorong oleh tumbuhnya investasi untuk meningkatkan kapasitas produktif perekonomian. Untuk meningkatkan kapasitas produktif perekonomian, dengan keberlanjutan proyek prioritas BUMN maupun dengan adanya proyek prioritas BUMN baru, dan juga didorong oleh kebijakan strategis baik dari sisi pemerintah maupun BUMN, diharapkan investasi BUMN diproyeksikan dapat berkontribusi lebih tinggi sebesar Rp441,0-Rp525,0 triliun.						
115	Perubahan alinea keempat dalam halaman II.52	Saat ini, terdapat 119 proyek investasi BUMN yang mendukung <i>Major Project</i> pada RKP Tahun 2023 berasal dari kelanjutan proyek pada RKP Tahun 2022 dan penambahan usulan proyek dari BUMN dan Kementerian BUMN terkait, dengan total jumlah BUMN yang terlibat sebanyak 61 BUMN dan total nilai investasi sebesar Rp290,51 triliun. Proyek Prioritas BUMN juga mendukung pencapaian 12 dari 17 Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (<i>Sustainable Development Goals/SDGs</i>) yaitu: Tanpa Kemiskinan; Tanpa Kelaparan; Kehidupan Sehat dan Sejahtera; Air Bersih dan Sanitasi Layak; Energi Bersih dan Terjangkau; Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi; Industri, Inovasi dan Infrastruktur; Berkurangnya Kesenjangan; Kota dan Permukiman yang Berkelanjutan; Konsumsi dan Produksi yang Bertanggung Jawab; Ekosistem Daratan; serta Kemitraan untuk Mencapai Tujuan.						
116	Perubahan Gambar 2.25 dalam halaman II.52	<p style="text-align: center;">Gambar 2.25 Gambaran Umum Proyek Prioritas BUMN</p> <table border="1"><caption>Gambaran Umum Proyek Prioritas BUMN</caption><tbody><tr><td>119 Proyek Prioritas</td><td>61 BUMN</td><td>290,51 T Total Investasi BUMN</td></tr><tr><td>12 dari 17 SDGs yang didukung</td><td>5,20% Kontribusi PDB</td><td></td></tr></tbody></table> <p>Sumber: BUMN terkait, proyeksi awal Kementerian PPN/Bappenas. Catatan: Data proyek BUMN per tanggal 30 November 2022.</p>	119 Proyek Prioritas	61 BUMN	290,51 T Total Investasi BUMN	12 dari 17 SDGs yang didukung	5,20% Kontribusi PDB	
119 Proyek Prioritas	61 BUMN	290,51 T Total Investasi BUMN						
12 dari 17 SDGs yang didukung	5,20% Kontribusi PDB							



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

No.	Perihal Perubahan	Pemutakhiran RKP Tahun 2023																								
117	Perubahan Gambar 2.26 dalam halaman II.53	<p style="text-align: center;">Gambar 2.26 Kontribusi BUMN dalam Prioritas Nasional</p> <table border="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <thead> <tr> <th></th> <th>Total Investasi 2023</th> <th>Juml. Proyek</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>PN1</td> <td>Rp 63,98 T</td> <td>44</td> </tr> <tr> <td>PN2</td> <td>Rp 6,86 T</td> <td>12</td> </tr> <tr> <td>PN3</td> <td>Rp 2,16 T</td> <td>4</td> </tr> <tr> <td>PN4</td> <td>Rp 1,56 T</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>PN5</td> <td>Rp 215,95 T</td> <td>58</td> </tr> </tbody> </table> <p style="text-align: center; font-size: small;">Sumber: BUMN terkait, proyeksi awal Kementerian PPN/Bappenas. Catatan: Data proyek BUMN per tanggal 30 November 2022.</p>		Total Investasi 2023	Juml. Proyek	PN1	Rp 63,98 T	44	PN2	Rp 6,86 T	12	PN3	Rp 2,16 T	4	PN4	Rp 1,56 T	1	PN5	Rp 215,95 T	58						
	Total Investasi 2023	Juml. Proyek																								
PN1	Rp 63,98 T	44																								
PN2	Rp 6,86 T	12																								
PN3	Rp 2,16 T	4																								
PN4	Rp 1,56 T	1																								
PN5	Rp 215,95 T	58																								
118	Perubahan alinea pertama dalam halaman II.53	<p>Proyek Prioritas BUMN dilakukan secara merata pada seluruh pulau di Indonesia. Pada tahun 2023, terdapat 14 Proyek Prioritas BUMN yang dilaksanakan di Pulau Sumatera dan Kepulauan Riau dengan total investasi tahun 2023 sekitar Rp77,86 triliun. Di Pulau Jawa, terdapat 51 Proyek Prioritas BUMN dengan total investasi sekitar Rp72,51 triliun pada tahun 2023, 18 Proyek Prioritas BUMN di Pulau Kalimantan dengan total investasi tahun 2023 sekitar Rp37,61 triliun. Lima Proyek Prioritas BUMN di Pulau Sulawesi dan Maluku dengan total investasi tahun 2023 sekitar Rp5,47 triliun, 9 Proyek Prioritas BUMN di Pulau Bali dan Nusa Tenggara dengan total investasi tahun 2023 sekitar Rp8,36 triliun, dan 1 Proyek Prioritas BUMN di Pulau Papua dengan total investasi tahun 2023 sekitar Rp0,40 triliun. Selain itu, terdapat 21 proyek yang dilaksanakan lintas wilayah di Indonesia dengan total nilai investasi tahun 2023 sebesar Rp88,64 triliun.</p>																								
119	Perubahan Gambar 2.27 dalam halaman II.53	<p style="text-align: center;">Gambar 2.27 Sebaran Proyek Prioritas BUMN di Seluruh Indonesia</p> <table border="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <thead> <tr> <th>Wilayah</th> <th>Jumlah Proyek</th> <th>Total Investasi (Rp T)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Kalimantan</td> <td>18</td> <td>37,61</td> </tr> <tr> <td>Sulawesi & Maluku</td> <td>5</td> <td>5,47</td> </tr> <tr> <td>Papua</td> <td>1</td> <td>0,40</td> </tr> <tr> <td>Sumatera & Kep. Riau</td> <td>14</td> <td>77,86</td> </tr> <tr> <td>Jawa</td> <td>51</td> <td>72,51</td> </tr> <tr> <td>Bali & Nusa Tenggara</td> <td>9</td> <td>8,36</td> </tr> <tr> <td>Lintas Wilayah</td> <td>21</td> <td>88,64</td> </tr> </tbody> </table> <p style="font-size: x-small;">Mencakup: 25 Provinsi, 55 Kabupaten/Kota</p> <p style="text-align: center; font-size: small;">Sumber: BUMN terkait, proyeksi awal Kementerian PPN/Bappenas. Catatan: Data proyek BUMN per tanggal 30 November 2022.</p>	Wilayah	Jumlah Proyek	Total Investasi (Rp T)	Kalimantan	18	37,61	Sulawesi & Maluku	5	5,47	Papua	1	0,40	Sumatera & Kep. Riau	14	77,86	Jawa	51	72,51	Bali & Nusa Tenggara	9	8,36	Lintas Wilayah	21	88,64
Wilayah	Jumlah Proyek	Total Investasi (Rp T)																								
Kalimantan	18	37,61																								
Sulawesi & Maluku	5	5,47																								
Papua	1	0,40																								
Sumatera & Kep. Riau	14	77,86																								
Jawa	51	72,51																								
Bali & Nusa Tenggara	9	8,36																								
Lintas Wilayah	21	88,64																								



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

No.	Perihal Perubahan	Pemutakhiran RKP Tahun 2023
120	Perubahan alinea pertama dalam halaman II.54	Prioritas Nasional 1 bertujuan untuk memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan. Kebijakan pembangunan pada PN 1 diarahkan untuk mendukung pemulihan aktivitas produksi, serta peningkatan nilai tambah dan produktivitas dengan mengoptimalkan keterkaitan antara sektor primer, sekunder, dan tersier. Untuk itu, terdapat 44 Proyek Prioritas BUMN dengan total nilai investasi sebesar Rp63,98 triliun yang mendukung terlaksananya sasaran dan indikator pembangunan pada PN 1.
121	Perubahan alinea kedua dalam halaman II.54	Prioritas Nasional 2 bertujuan mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan. Kebijakan pembangunan wilayah pada PN 2 diarahkan untuk menumbuhkan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru di luar Jawa, mempercepat pemulihan dampak pandemi COVID-19, melanjutkan transformasi sosial ekonomi, mengoptimalkan keunggulan kompetitif wilayah, dan meningkatkan pemerataan kualitas hidup antarwilayah. Terdapat 12 Proyek Prioritas BUMN dengan total nilai investasi sebesar Rp6,86 triliun yang mendukung <i>Major Project</i> pada PN 2.
122	Perubahan alinea ketiga dalam halaman II.54	Prioritas Nasional 3 bertujuan untuk meningkatkan sumber daya manusia berkualitas dan berdaya saing. Pembangunan SDM pada tahun 2023 akan ditekankan pada Reformasi Sistem Kesehatan Nasional, Reformasi Sistem Perlindungan Sosial, Percepatan Penurunan Kematian Ibu dan <i>Stunting</i> , Pembangunan <i>Science Technopark</i> (Optimalisasi <i>Triple Helix</i> di 4 <i>Major Universitas</i>), serta Pendidikan dan Pelatihan Vokasi untuk Industri 4.0. Untuk mencapai sasaran dan indikator yang akan diwujudkan dalam rangka meningkatkan sumber daya manusia berkualitas dan berdaya saing, terdapat 4 Proyek Prioritas BUMN dengan total nilai investasi sebesar Rp2,16 triliun yang mendukung <i>Major Project</i> pada PN 3.
123	Perubahan alinea kelima dalam halaman II.54	Prioritas Nasional 5 bertujuan untuk memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar. Pembangunan infrastruktur tahun 2023 akan mendukung pemulihan ekonomi dan reformasi struktural melalui program prioritas pada pengembangan Infrastruktur Pelayanan Dasar, Infrastruktur Ekonomi, Infrastruktur Perkotaan, Energi dan Ketenagalistrikan, serta Transformasi Digital. Untuk mencapai sasaran dan indikator yang akan diwujudkan dalam rangka memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar, terdapat 58 Proyek Prioritas BUMN dengan total nilai investasi sebesar Rp215,95 triliun yang mendukung <i>Major Project</i> pada PN 5.



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

No.	Perihal Perubahan	Pemutakhiran RKP Tahun 2023				
124	Perubahan Tabel 2.17 dalam halaman II.54	Tabel 2.17 Daftar Jumlah Proyek Investasi BUMN dalam <i>Major Project</i>				
		PN	No.	<i>Major Project</i>	Jumlah Proyek Investasi BUMN	Nilai Proyek (Rp Triliun)
		PN 1	1	Akselerasi Pengembangan Energi Terbarukan dan Konservasi Energi	7 proyek	0,94
			2	Destinasi Pariwisata Prioritas	13 proyek	24,74
			3	Industri 4.0 pada 7 Subsektor Industri Prioritas	10 proyek	5,09
			4	Kawasan Industri Prioritas dan Smelter	7 proyek	31,64
			5	Penguatan Jaminan Usaha Serta 350 Korporasi Petani dan Nelayan	3 proyek	0,21
			6	Lain-lain di luar <i>Major Project</i> ¹	4 proyek	1,36
			7	Pembangunan Ibu Kota Nusantara	9 proyek	2,51
		8	Pembangunan Wilayah Batam-Bintan	1 proyek	2,65	
PN 2	9	Pemulihan Pasca Bencana: Kota Palu dan Sekitarnya, Pulau Lombok dan Sekitarnya, serta Kawasan Pesisir Selat Sunda	1 proyek	0,20		
	10	Lain-lain di luar <i>Major Project</i> ¹	1 proyek	1,50		



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

No.	Perihal Perubahan	Pemutakhiran RKP Tahun 2023				
125	Perubahan Tabel 2.17 dalam halaman II.55	PN	No.	Major Project	Jumlah Proyek Investasi BUMN	Nilai Proyek (Rp Triliun)
		PN 3	11	Reformasi Sistem Kesehatan Nasional	4 proyek	2,16
		PN 4	12	Lain-lain di luar Major Project ¹⁾	1 proyek	1,56
			13	Akses Air Minum Perpipaan (10 Juta Sambungan Rumah)	4 proyek	6,27
			14	Infrastruktur Jaringan Gas Kota untuk 4 Juta Sambungan Rumah	1 proyek	1,24
			15	Jalan Tol Trans Sumatera Aceh – Lampung	1 proyek	11,29
			16	Jaringan Pelabuhan Utama Terpadu	5 proyek	4,45
			17	KA Kecepatan Tinggi Pulau Jawa (Jakarta-Semarang dan Jakarta-Bandung)	1 proyek	0,88
			18	Pembangunan dan Pengembangan Kilang Minyak	10 proyek	79,58
		PN 5	19	Penyediaan Tenaga Listrik: Pembangkit Listrik 27.000 MW, Transmisi 19.000 kms dan Gardu Induk 38.000 MVA	13 proyek	81,33
			20	Rumah Susun Perkotaan (1 Juta)	4 proyek	1,20
			21	Transformasi Digital	4 proyek	9,11
			22	Sistem Angkutan Umum Massal di 6 Wilayah Metropolitan: Jakarta, Surabaya, Bandung, Semarang, dan Makassar	2 proyek	10,39
			24	Pengamanan Pesisir 5 Perkotaan Pantura Jawa	1 proyek	0,34
			25	Lain-lain di luar Major Project ¹⁾	12 proyek	9,87
				Total	119 proyek	290,51

Keterangan:

¹⁾ Proyek yang mendukung Prioritas Nasional namun tidak terkait dengan Major Project tertentu.

Catatan: Data proyek BUMN per tanggal 30 November 2022

126¹⁾ Penambahan alinea, Gambar 2.27.A dan Tabel 2.17.A setelah Tabel 2.17 dalam halaman II.55

Selain proyek-proyek prioritas BUMN dalam RKP tahun 2023, terdapat beberapa proyek prioritas BUMN lainnya yang sedang dilaksanakan ataupun direncanakan untuk beberapa tahun ke depan. Diantaranya yaitu, PT Dirgantara Indonesia (PT DI) dalam pengembangan pesawat N219 dan N219 Amphibi (N219A) serta PT Kilang Pertamina Internasional yang merencanakan proyek *Refinery Development Master Plan (RDMP)* Plaju di tahun 2026.

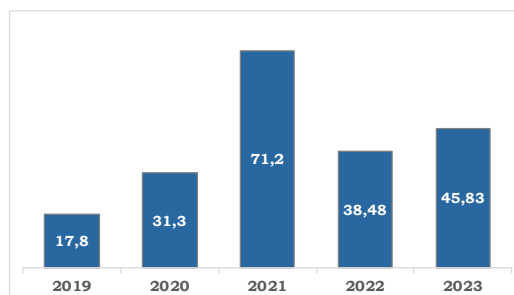
PT Dirgantara Indonesia (PT DI) saat ini mengembangkan pesawat N219 dan N219 Amphibi (N219A) sebagai upaya untuk meningkatkan kemampuan produksi dalam negeri untuk pesawat komersial. Pemerintah menggunakan N219 dan N219A sebagai salah satu *flagship* dalam rangka menginisiasi pelaksanaan Transformasi Ekonomi Indonesia, melalui strategi industrialisasi yang mencakup pembangunan industri dalam negeri yang memiliki kandungan teknologi tinggi sekaligus berbasis SDM terampil. Pengembangan pesawat N219 dan N219A dapat mendukung pelaksanaan strategi 1 yaitu menciptakan SDM yang berdaya saing (termasuk



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

No.	Perihal Perubahan	Pemutakhiran RKP Tahun 2023
		<p>pengembangan dan pemanfaatan teknologi) dan strategi 2 yaitu Produktivitas Sektor Ekonomi yang berkaitan dengan industrialisasi. Penggunaan pesawat ini di dalam negeri juga dapat mendukung strategi 5 Integrasi Ekonomi Domestik, khususnya dalam penyediaan moda transportasi untuk distribusi produk dalam negeri, barang dan jasa, serta talenta untuk menjangkau daerah terpencil, pulau-pulau kecil, dan daerah perbatasan.</p> <p>Dukungan pemerintah untuk pengembangan pesawat N219 dan N219A diberikan dalam bentuk penyusunan Peta Jalan Ekosistem Industri Kedirgantaraan 2022-2045 yang mencakup empat pilar yaitu Industri Pesawat Terbang, Industri Komponen dan Rantai Pasok, <i>Maintenance, Repair, Overhaul</i>, dan Purnajual, serta Jasa Penerbangan dan Kebandarudaraan, serta penyiapan payung hukum untuk menggerakkan ekosistem dalam empat pilar tersebut. Pemerintah juga berencana menyediakan pendanaan tambahan untuk melengkapi kebutuhan anggaran untuk mendukung peningkatan kapasitas dan <i>final assembly line</i>. Alokasi anggaran yang disediakan Pemerintah mencakup Penyertaan Modal Negara sebesar Rp543 miliar untuk PT DI, serta melengkapi investasi yang dibutuhkan proyek N219A.</p> <p>Berbagai dukungan pemerintah ini diharapkan dapat mendorong komersialisasi dan pengiriman pertama produk N219 kepada konsumen pada tahun 2024 dan penyelesaian <i>design</i> N219A pada tahun 2024. Pemerintah juga akan mendukung komersialisasi N219 dan N219A melalui <i>pilot project</i> yang akan dilaksanakan dalam rangka Transformasi Ekonomi Kepulauan Riau dimana 2 jenis pesawat tersebut digunakan untuk menghubungkan konektivitas antar pulau di provinsi tersebut.</p> <p>Sebagai salah satu proyek strategis BUMN, RDMP Plaju merupakan proyek investasi BUMN yang direncanakan akan dilaksanakan <i>Engineering Procurement and Construction</i> (EPC) di tahun 2026 dengan tujuan meningkatkan efisiensi energi dan meningkatkan produk bensin dengan kapasitas yang lebih tinggi. Saat ini proyek RDMP Plaju masih dalam tahapan penyelesaian <i>pre-feasibility study</i> dan ditargetkan selesai di tahun 2028 dengan nilai investasi keseluruhan sebesar US\$2,00 miliar.</p> <p>Selain investasi yang dilakukan langsung oleh BUMN dalam mendukung Prioritas Nasional, Pemerintah juga melakukan investasi ke BUMN melalui Penanaman Modal Negara (PMN). PMN pada tahun 2023 direncanakan sebesar Rp45,83 triliun. PMN tersebut terdiri dari Rp42,81 triliun secara tunai dan Rp3,02 triliun non-tunai.</p>

Gambar 2.27.A
Penyertaan Modal Negara Tahun 2019 – 2023 (Rp Triliun)



Sumber: Buku II Nota Keuangan APBN 2023 dan Kementerian BUMN.



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

No. Perihal Perubahan Pemutakhiran RKP Tahun 2023

Tabel 2.17.A
Penyaluran PMN ke BUMN di Tahun 2023

No.	BUMN	Penggunaan PMN	Alokasi (Rp Triliun)
A PMN Tunai			
1	PT Utama Karya (Persero)	Mendukung pembangunan Jalan Tol Trans Sumatera (JTTS) tahap I dan II untuk ruas Betung-Tempino-Jambi dan Ruas Rengat-Pekanbaru	28,9
2	PT Perusahaan Listrik Negara (Persero)	Mendukung proyek sektor transmisi dan distribusi termasuk pelaksanaan program listrik desa	10,0
3	PT LEN Industri (Persero)		1,75
	- PT Dirgantara Indonesia (PTDI)	Peningkatan kapasitas produksi pesawat CN 235, N219, dan peremajaan fasilitas pendukung produksi	0,54
	- Di luar PTDI	Mendukung pencapaian target prioritas pembangunan bidang pertahanan dan keamanan	1,21
4	Perum LPPNPI	Menjaga keberlanjutan perusahaan dalam menjamin keselamatan penerbangan serta kebutuhan untuk menjamin <i>availability</i> dan <i>reliability</i> fasilitas navigasi penerbangan	0,65
5	PT Sarana Multigriya Finansial	Mendukung program Kredit Pembiayaan Rumah (KPR) Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP)	1,50
Total PMN Tunai			42,81
B PMN Non-Tunai			
6	PT Rajawali Nusantara Indonesia (Persero)	Konversi piutang dana investasi (RDI), Subsidiary Loan Agreement (SLA), dan eks-BPPN untuk mendapatkan alternatif pendanaan yang lebih murah sehingga mengurangi ketergantungan impor, menjaga stabilitas harga pangan, dan meningkatkan Produk Domestik Bruto (PDB)	2,56
7	PT LEN Industri (Persero)	Konversi piutang RDI dan SLA untuk mendukung pencapaian target prioritas pembangunan bidang pertahanan dan keamanan	0,45
Total PMN Non-Tunai			3,02

Sumber: Buku II Nota Keuangan Beserta APBN Tahun Anggaran 2023

127 Perubahan alinea pertama dalam halaman II.55

Investasi memiliki peran penting bagi perekonomian Indonesia. Dalam lima tahun terakhir, kontribusi investasi dalam Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) terhadap PDB rata-rata mencapai 31,65 persen. Pemulihan ekonomi Indonesia di tahun 2021 pun salah satunya didorong oleh investasi. Pertumbuhan PMTB terus menunjukkan tren yang positif sejak triwulan II-2021 didorong oleh tingkat kepercayaan investor yang membaik. Sehingga, sampai dengan triwulan III-2022 pertumbuhan PMTB mampu mencapai 4,05 persen dan nilainya sudah lebih tinggi dibandingkan periode yang sama di tahun 2019. Hal tersebut menandakan kinerja investasi mulai pulih ke level sebelum pandemi.



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

No.	Perihal Perubahan	Pemutakhiran RKP Tahun 2023																																																
128	Penambahan alinea setelah alinea pertama dalam halaman II.55	<p>Berdasarkan subkomponennya, realisasi PMTB di Indonesia masih didominasi oleh subkomponen Bangunan, yang secara kumulatif hingga triwulan III-2022 mencapai 72,96 persen terhadap total PMTB. Sementara itu, subkomponen Mesin dan Peralatan serta subkomponen Kendaraan menyusul di peringkat kedua dan ketiga dengan proporsi masing-masing sebesar 12,53 persen dan 5,52 persen. Meskipun demikian, subkomponen Mesin dan Peralatan hingga triwulan III-2022 mampu mencatatkan pertumbuhan yang tinggi, yakni mencapai 24,04 persen (<i>c-to-c</i>). Hal ini menandakan kualitas investasi yang semakin mengarah ke sektor produktif.</p>																																																
129	Perubahan Gambar 2.28 dalam halaman II.56	<p style="text-align: center;">Gambar 2.28 Perkembangan Realisasi PMTB per Sub Komponen Tahun 2018-2022 (Rp Triliun)</p> <table border="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <caption>Data for Gambar 2.28: Perkembangan Realisasi PMTB per Sub Komponen (Rp Triliun)</caption> <thead> <tr> <th>Tahun</th> <th>Bangunan</th> <th>Peralatan Lainnya</th> <th>Mesin dan Perlengkapan</th> <th>Kendaraan</th> <th>CBR</th> <th>Produk Kekayaan Intelektual</th> <th>Total</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2018</td> <td>2550,27</td> <td>201,83</td> <td>369,43</td> <td>180,62</td> <td></td> <td></td> <td>3.444,30</td> </tr> <tr> <td>2019</td> <td>2687,30</td> <td>193,52</td> <td>387,01</td> <td>189,75</td> <td></td> <td></td> <td>3.597,66</td> </tr> <tr> <td>2020</td> <td>2585,62</td> <td>168,22</td> <td>342,34</td> <td>195,07</td> <td></td> <td></td> <td>3.419,17</td> </tr> <tr> <td>2021</td> <td>2645,50</td> <td>187,89</td> <td>382,27</td> <td>197,33</td> <td></td> <td></td> <td>3.549,21</td> </tr> <tr> <td>s.d TW III-2022</td> <td>1322,09</td> <td>214,79</td> <td>97,16</td> <td>86,35</td> <td></td> <td></td> <td>2.721,16</td> </tr> </tbody> </table> <p style="text-align: center;">Sumber: BPS, 2022.</p>	Tahun	Bangunan	Peralatan Lainnya	Mesin dan Perlengkapan	Kendaraan	CBR	Produk Kekayaan Intelektual	Total	2018	2550,27	201,83	369,43	180,62			3.444,30	2019	2687,30	193,52	387,01	189,75			3.597,66	2020	2585,62	168,22	342,34	195,07			3.419,17	2021	2645,50	187,89	382,27	197,33			3.549,21	s.d TW III-2022	1322,09	214,79	97,16	86,35			2.721,16
Tahun	Bangunan	Peralatan Lainnya	Mesin dan Perlengkapan	Kendaraan	CBR	Produk Kekayaan Intelektual	Total																																											
2018	2550,27	201,83	369,43	180,62			3.444,30																																											
2019	2687,30	193,52	387,01	189,75			3.597,66																																											
2020	2585,62	168,22	342,34	195,07			3.419,17																																											
2021	2645,50	187,89	382,27	197,33			3.549,21																																											
s.d TW III-2022	1322,09	214,79	97,16	86,35			2.721,16																																											
130	Perubahan alinea pertama dalam halaman II.56	<p>Berdasarkan sektor institusi, sebagian besar investasi PMTB tahun 2018 dilakukan oleh swasta, baik sektor non-finansial maupun sektor finansial, yakni sebesar 67,00 persen, dan investasi rumah tangga sebesar 15,80 persen. Sementara itu, peranan investasi pemerintah dan BUMN terhadap total investasi PMTB masing-masing hanya pada kisaran 8,56 persen dan 7,09 persen. Hal ini menunjukkan bahwa investasi swasta sangat penting dalam membangun perekonomian yang kokoh.</p>																																																
131	Perubahan alinea kedua dalam halaman II.56	<p>Sejalan dengan perkembangan PMTB, realisasi investasi berupa Penanaman Modal Asing (PMA) dan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) pun terus menunjukkan peningkatan. Pada periode Januari-September 2022, pertumbuhan nilai realisasi PMA dan PMDN tercatat sebesar 35,34 persen (<i>yoy</i>), atau setara dengan 21,52 persen dari PMTB. Dalam perkembangannya, kontribusi PMDN terhadap total realisasi PMA dan PMDN pun semakin meningkat, dari 45,63 persen pada tahun 2018 menjadi 46,29 persen pada periode sampai dengan triwulan III-2022.</p>																																																



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

No.	Perihal Perubahan	Pemutakhiran RKP Tahun 2023																								
132	Perubahan Gambar 2.29 dalam halaman II.56	<p style="text-align: center;">Gambar 2.29 Realisasi Investasi (PMA dan PMDN) Indonesia Tahun 2018-2022 (Rp Triliun)</p> <table border="1" style="margin: 10px auto; border-collapse: collapse;"> <caption>Data for Gambar 2.29: Realisasi Investasi (Rp Triliun)</caption> <thead> <tr> <th>Tahun</th> <th>PMDN</th> <th>PMA</th> <th>Total</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2018</td> <td>328,60</td> <td>392,72</td> <td>721,32</td> </tr> <tr> <td>2019</td> <td>386,50</td> <td>423,13</td> <td>809,63</td> </tr> <tr> <td>2020</td> <td>413,54</td> <td>412,79</td> <td>826,33</td> </tr> <tr> <td>2021</td> <td>447,06</td> <td>453,96</td> <td>901,02</td> </tr> <tr> <td>s.d TW III-2022</td> <td>413,10</td> <td>479,30</td> <td>892,40</td> </tr> </tbody> </table> <p style="text-align: center;">Sumber: Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal, 2022.</p>	Tahun	PMDN	PMA	Total	2018	328,60	392,72	721,32	2019	386,50	423,13	809,63	2020	413,54	412,79	826,33	2021	447,06	453,96	901,02	s.d TW III-2022	413,10	479,30	892,40
Tahun	PMDN	PMA	Total																							
2018	328,60	392,72	721,32																							
2019	386,50	423,13	809,63																							
2020	413,54	412,79	826,33																							
2021	447,06	453,96	901,02																							
s.d TW III-2022	413,10	479,30	892,40																							
133	Perubahan alinea pertama dalam halaman II.57	<p>Dilihat berdasarkan sektornya, pertumbuhan investasi PMA dan PMDN di sektor sekunder (industri pengolahan) menunjukkan kenaikan cukup tinggi sampai dengan triwulan III-2022, yakni mencapai 54,77 persen (<i>c-to-c</i>). Hal ini menandakan kualitas investasi yang semakin baik, karena investasi di sektor ini diharapkan mampu memberikan dampak lebih besar bagi perekonomian. Secara lebih khusus, investasi terbesar di sektor sekunder sampai dengan triwulan III-2022 adalah sektor industri logam dasar, barang logam, bukan mesin dan peralatannya sebesar Rp135,64 triliun, atau tumbuh 62,01 persen (<i>c-to-c</i>); sektor industri makanan sebesar Rp66,64 triliun, atau tumbuh 32,49 persen (<i>c-to-c</i>); dan sektor industri kimia dan farmasi sebesar Rp61,25 triliun, atau tumbuh 94,47 persen (<i>c-to-c</i>).</p>																								
134	Perubahan Gambar 2.30 dalam halaman II.57	<p style="text-align: center;">Gambar 2.30 Top 5 Sektor Industri dengan Realisasi Investasi Tertinggi Periode Januari-September Tahun 2022 (Rp Triliun)</p> <table border="1" style="margin: 10px auto; border-collapse: collapse;"> <caption>Data for Gambar 2.30: Top 5 Sektor Industri (Rp Triliun)</caption> <thead> <tr> <th>Sektor</th> <th>Jan-Sep 2021</th> <th>Jan-Sep 2022</th> <th>Perubahan (%)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Industri Logam Dasar, Barang Logam, Bukan Mesin dan Peralatannya</td> <td>83,72</td> <td>135,64</td> <td>+62,01%</td> </tr> <tr> <td>Industri Makanan</td> <td>50,30</td> <td>66,64</td> <td>+32,49%</td> </tr> <tr> <td>Industri Kimia Dan Farmasi</td> <td>31,50</td> <td>61,25</td> <td>+94,47%</td> </tr> <tr> <td>Industri Kendaraan Bermotor dan Alat Transportasi Lain</td> <td>19,39</td> <td>17,91</td> <td>-7,62%</td> </tr> <tr> <td>Industri Kertas dan Percetakan</td> <td>14,46</td> <td>27,11</td> <td>+87,45%</td> </tr> </tbody> </table> <p style="text-align: center;">Sumber: Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal, 2022.</p>	Sektor	Jan-Sep 2021	Jan-Sep 2022	Perubahan (%)	Industri Logam Dasar, Barang Logam, Bukan Mesin dan Peralatannya	83,72	135,64	+62,01%	Industri Makanan	50,30	66,64	+32,49%	Industri Kimia Dan Farmasi	31,50	61,25	+94,47%	Industri Kendaraan Bermotor dan Alat Transportasi Lain	19,39	17,91	-7,62%	Industri Kertas dan Percetakan	14,46	27,11	+87,45%
Sektor	Jan-Sep 2021	Jan-Sep 2022	Perubahan (%)																							
Industri Logam Dasar, Barang Logam, Bukan Mesin dan Peralatannya	83,72	135,64	+62,01%																							
Industri Makanan	50,30	66,64	+32,49%																							
Industri Kimia Dan Farmasi	31,50	61,25	+94,47%																							
Industri Kendaraan Bermotor dan Alat Transportasi Lain	19,39	17,91	-7,62%																							
Industri Kertas dan Percetakan	14,46	27,11	+87,45%																							
135	Perubahan alinea kedua dalam halaman II.57	<p>Tingginya realisasi investasi pada tahun 2021 dan 2022 turut memberikan dampak positif bagi penyerapan tenaga kerja di Indonesia. Pada tahun 2021, investasi swasta di Indonesia berhasil menciptakan 1,2 juta lapangan pekerjaan, yang terdiri dari 627 ribu lapangan pekerjaan yang dihasilkan oleh aktivitas PMDN dan 581 ribu lapangan pekerjaan yang dihasilkan oleh aktivitas PMA. Sampai dengan triwulan III-2022, total penyerapan tenaga kerja dari total realisasi PMA dan PMDN telah mencapai 965 ribu orang, lebih besar dibandingkan periode yang sama tahun 2021 yaitu sebesar 912 ribu orang.</p>																								



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

No.	Perihal Perubahan	Pemutakhiran RKP Tahun 2023																												
136	Perubahan Gambar 2.31 dalam halaman II.57	<p style="text-align: center;">Gambar 2.31 Penyerapan Tenaga Kerja Berdasarkan Jenis Investasi (PMA dan PMDN) 2018 – 2022 (Ribu Orang)</p> <table border="1" style="margin: 10px auto; border-collapse: collapse;"> <caption>Data for Gambar 2.31: Penyerapan Tenaga Kerja Berdasarkan Jenis Investasi (Ribu Orang)</caption> <thead> <tr> <th>Tahun</th> <th>PMDN</th> <th>PMA</th> <th>Total</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2018</td> <td>469,72</td> <td>490,37</td> <td>960,09</td> </tr> <tr> <td>2019</td> <td>520,17</td> <td>513,66</td> <td>1.033,84</td> </tr> <tr> <td>2020</td> <td>611,34</td> <td>545,03</td> <td>1.156,36</td> </tr> <tr> <td>2021</td> <td>626,66</td> <td>581,23</td> <td>1.207,89</td> </tr> <tr> <td>s.d TW III-2022</td> <td>554,81</td> <td>410,31</td> <td>965,12</td> </tr> </tbody> </table> <p style="text-align: center;">Sumber: Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal, 2022.</p>	Tahun	PMDN	PMA	Total	2018	469,72	490,37	960,09	2019	520,17	513,66	1.033,84	2020	611,34	545,03	1.156,36	2021	626,66	581,23	1.207,89	s.d TW III-2022	554,81	410,31	965,12				
Tahun	PMDN	PMA	Total																											
2018	469,72	490,37	960,09																											
2019	520,17	513,66	1.033,84																											
2020	611,34	545,03	1.156,36																											
2021	626,66	581,23	1.207,89																											
s.d TW III-2022	554,81	410,31	965,12																											
137	Perubahan alinea pertama dalam halaman II.58	<p>Dari aspek spasial, mayoritas proyek investasi PMA dan PMDN sampai dengan triwulan III-2022 masih berada di pulau Jawa, yaitu 117.289 proyek dari total 190.837 proyek investasi, dengan total nilai investasi mencapai Rp426,63 triliun. Selanjutnya, disusul oleh pulau Sumatera dengan 31.320 proyek bernilai investasi Rp186,05 triliun, lalu Sulawesi dan Maluku dengan 13.531 proyek bernilai investasi Rp162,87 triliun. Sedangkan untuk wilayah dengan realisasi investasi terendah pada tahun 2022 adalah Papua dengan 1.660 proyek bernilai investasi Rp17,05 triliun.</p>																												
138	Menghapus alinea kedua dalam halaman II.58	(dihapus)																												
139	Perubahan Gambar 2.32 dalam halaman II.58	<p style="text-align: center;">Gambar 2.32 Sebaran Spasial Investasi PMA dan PMDN Tahun 2022</p> <table border="1" style="margin: 10px auto; border-collapse: collapse;"> <caption>Data for Gambar 2.32: Sebaran Spasial Investasi PMA dan PMDN Tahun 2022</caption> <thead> <tr> <th>Wilayah</th> <th>Proyek</th> <th>PMA (T)</th> <th>PMDN (T)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Jawa</td> <td>117.289</td> <td>208.62</td> <td>218.01</td> </tr> <tr> <td>Sumatera</td> <td>31.320</td> <td>81.93</td> <td>104.12</td> </tr> <tr> <td>Kalimantan</td> <td>14.559</td> <td>33.82</td> <td>54.28</td> </tr> <tr> <td>Sulawesi & Maluku</td> <td>13.531</td> <td>143.28</td> <td>19.59</td> </tr> <tr> <td>Bali & Nusa Tenggara</td> <td>12.478</td> <td>11.93</td> <td>14.82</td> </tr> <tr> <td>Papua</td> <td>1.660</td> <td>14.72</td> <td>2.33</td> </tr> </tbody> </table> <p style="text-align: center;">Sumber: Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal, 2022.</p>	Wilayah	Proyek	PMA (T)	PMDN (T)	Jawa	117.289	208.62	218.01	Sumatera	31.320	81.93	104.12	Kalimantan	14.559	33.82	54.28	Sulawesi & Maluku	13.531	143.28	19.59	Bali & Nusa Tenggara	12.478	11.93	14.82	Papua	1.660	14.72	2.33
Wilayah	Proyek	PMA (T)	PMDN (T)																											
Jawa	117.289	208.62	218.01																											
Sumatera	31.320	81.93	104.12																											
Kalimantan	14.559	33.82	54.28																											
Sulawesi & Maluku	13.531	143.28	19.59																											
Bali & Nusa Tenggara	12.478	11.93	14.82																											
Papua	1.660	14.72	2.33																											
140	Penghapusan alinea ketiga dalam halaman II.58	(dihapus)																												



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

No.	Perihal Perubahan	Pemutakhiran RKP Tahun 2023
141	Perubahan alinea pertama dalam halaman II.59	Kinerja investasi diharapkan dapat terus terjaga sepanjang tahun 2022, dan berlanjut pada tahun 2023. Pada tahun 2023, pertumbuhan ekonomi Indonesia ditargetkan mencapai 5,3-5,5 persen dengan salah satu sumber pertumbuhannya adalah investasi yang ditargetkan tumbuh sebesar 6,1-6,3 persen. Untuk mencapai angka pertumbuhan tersebut, investasi swasta/masyarakat diharapkan dapat berkontribusi sekitar 87,08-88,31 persen atau senilai Rp5.821,14-Rp5.836,62 triliun, dari total kebutuhan investasi tahun 2023 yang mencapai Rp6.591,58-Rp6.702,93 triliun.
142	Penambahan alinea, Gambar 2.32.A, Gambar 2.32.B, Tabel 2.17.B, dan Gambar 2.32.C setelah alinea pertama dalam halaman II.59	<p>Peran penting investasi swasta dalam mendorong pertumbuhan ekonomi diharapkan tercermin dari besaran penanaman modal asing (PMA) maupun dalam negeri (PMDN). Pada tahun 2023, realisasi PMA dan PMDN ditargetkan mencapai Rp1.200-Rp1.300 triliun, atau setara dengan 19,42-20,96 persen PMTB. Porsi realisasi PMA dan PMDN terhadap PMTB di tahun 2023 tersebut lebih tinggi dibandingkan periode 5 (lima) tahun sebelumnya, yang memiliki rata-rata sebesar 15,55 persen.</p> <p>Potensi keterlibatan peran investasi swasta dalam mendorong pertumbuhan ekonomi tahun 2023 yang sedemikian besar tersebut utamanya akan diarahkan pada percepatan realisasi proyek-proyek investasi swasta yang dapat meningkatkan produktivitas perekonomian sekaligus mendorong inklusivitas, seperti investasi pada sektor industri pengolahan terutama yang berorientasi ekspor dan/atau mengubah kompleksitas ekspor nasional, investasi pada sektor digital dan berbasis teknologi, serta investasi yang memberikan efek pengganda bagi perekonomian.</p>

(3) Data Proyek Investasi Swasta yang Terindikasi Mendukung PN dan MP di Tahun 2023

Dari total target realisasi PMA dan PMDN sebesar Rp1.200-Rp1.300 triliun, terdapat beberapa proyek investasi swasta yang mendukung Prioritas Nasional dan *Major Project*, yang selanjutnya disebut Proyek Prioritas Investasi Swasta. Proses identifikasi ini bertujuan agar proyek investasi swasta tidak hanya berperan dalam mendorong perekonomian nasional, namun juga selaras dengan arah kebijakan pembangunan yang direncanakan Pemerintah pada tahun 2023.

Pada tahun 2023, terdapat 89 Proyek Prioritas Investasi Swasta yang mendukung Prioritas Nasional Tahun 2023, terutama Prioritas Nasional 1 (PN 1) dan Prioritas Nasional 5 (PN 5). Proyek-proyek tersebut melibatkan 82 badan usaha milik swasta dengan prakiraan total nilai investasi mencapai Rp1.229,44 triliun. Kontribusi Proyek Prioritas Investasi Swasta diprakirakan sekitar 14,25 persen terhadap PDB.

Gambar 2.32.A
Gambaran Umum Proyek Prioritas Swasta Teridentifikasi



Sumber: Hasil identifikasi Kementerian PPN/Bappenas.

Catatan: *Data Proyek Prioritas Investasi Swasta per 18 Desember 2022; **Perhitungan Indikatif.



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

No.	Perihal Perubahan	Pemutakhiran RKP Tahun 2023
-----	-------------------	-----------------------------

Gambar 2.32.B

Kontribusi Swasta dalam Prioritas Nasional

Kontribusi Swasta dalam Prioritas Nasional



Sumber: Hasil identifikasi Kementerian PPN/Bappenas.

Catatan: *Data Proyek Prioritas Investasi Swasta per tanggal 18 Desember 2022.

Pada PN 1 - Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas Dan Berkeadilan, terdapat 85 Proyek Prioritas Investasi Swasta dengan prakiraan total nilai investasi sebesar Rp1.215,41 triliun. Proyek-proyek pada PN ini akan mendukung percepatan transisi menuju Energi Baru dan Terbarukan (EBT), percepatan dan optimalisasi Kawasan Ekonomi Khusus (KEK), Kawasan Industri (KI) dan smelter, serta peningkatan produktivitas di sektor industri pengolahan dan pariwisata. Proyek investasi pada PN 1 juga mencakup proyek hulu minyak dan gas yang dapat mendukung ketersediaan energi untuk aktivitas sektor ekonomi. Dari 85 Proyek Prioritas Investasi Swasta, terdapat 39 proyek yang teridentifikasi mendukung *Major Project* di PN 1 dengan prakiraan total nilai investasi sebesar Rp1.044,26 triliun.

Pada PN 5 - Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar, terdapat 4 Proyek Prioritas Investasi Swasta dengan total nilai investasi sebesar Rp14,03 triliun. Proyek-proyek pada PN ini akan mendukung arah kebijakan pembangunan konektivitas dalam mendukung produktivitas untuk transformasi ekonomi serta pembangunan infrastruktur TIK sebagai bagian dari transformasi digital. Dari 4 Proyek Prioritas Investasi Swasta, terdapat 2 proyek yang teridentifikasi mendukung *Major Project* di PN 5 dengan prakiraan total nilai investasi sebesar Rp3,43 triliun.



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

No. Perihal Perubahan Pemutakhiran RKP Tahun 2023

Tabel 2.17.B
Daftar Jumlah Proyek Prioritas Investasi Swasta dalam *Major Project*

PN	No.	Major Project	Jumlah Proyek Prioritas Investasi Swasta*	Nilai Proyek (Rp triliun)
PN 1	1	Akselerasi Pengembangan Energi Terbarukan dan Konservasi Energi	7 proyek	5,36
	2	Destinasi Pariwisata Prioritas	4 proyek	0,21
	3	Industri 4.0 pada 7 Subsektor Industri Prioritas	12 proyek	12,89
	4	Kawasan Industri Prioritas dan Smelter	16 proyek	1.025,80
	5	Lain-lain di luar Proyek Prioritas Strategis (<i>Major Project</i>) ¹	46 proyek	171,15
PN 5	6	Transformasi Digital	2 proyek	3,43
	7	Lain-lain di luar Proyek Prioritas Strategis (<i>Major Project</i>) ¹	2 proyek	10,60
Total			89 proyek	1.229,44**

Keterangan:

¹) Proyek yang mendukung Prioritas Nasional namun tidak terkait dengan Proyek Prioritas Strategis (*Major Project*) tertentu

Catatan:

*Hasil pemetaan Proyek Prioritas Investasi Swasta untuk setiap Proyek Prioritas Strategis (*Major Project*) terdapat pada Matriks Proyek Prioritas Strategis (*Major Project*) dalam Lampiran III, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Rencana Investasi Swasta Prioritas.

**Data Proyek Prioritas investasi Swasta per 18 Desember 2022

Dalam mendukung pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan merata, Proyek Prioritas Investasi Swasta yang teridentifikasi mendukung Prioritas Nasional akan dilaksanakan di berbagai wilayah Indonesia. Sebaran spasial Proyek Prioritas Investasi Swasta tahun 2023 adalah: (1) 25 proyek yang dilaksanakan di Pulau Sumatera dengan total nilai investasi sebesar Rp15,62 triliun; (2) 22 proyek di Pulau Jawa dengan total nilai investasi sebesar Rp58,47 triliun; (3) 10 proyek di Pulau Kalimantan dengan total nilai investasi sebesar Rp957,04 triliun; (4) 23 proyek di Pulau Sulawesi dan Maluku dengan total nilai investasi sebesar Rp184,56 triliun; (5) 3 proyek di Pulau Bali dan Nusa Tenggara dengan total nilai investasi sebesar Rp170,0 miliar, serta (6) 3 proyek yang dilaksanakan lintas wilayah dengan total nilai investasi sebesar Rp5,34 triliun.

Gambar 2.32.C
Sebaran Proyek Prioritas Investasi Swasta di Seluruh Indonesia



Sumber: Hasil identifikasi Kementerian PPN/Bappenas.

Catatan: *Data Proyek Prioritas Investasi Swasta per 18 Desember 2022.



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

No.	Perihal Perubahan	Pemutakhiran RKP Tahun 2023
		<p>Terdapat beberapa proyek prioritas swasta yang menjadi fokus percepatan. Di antara proyek-proyek tersebut adalah proyek pembangunan industri kimia terintegrasi dan proyek pengembangan dan pengelolaan kawasan industri.</p> <p>Salah satu perusahaan yang bergerak di bidang industri kimia saat ini sedang mengadakan proyek pembangunan industri petrokimia terintegrasi sebagai upaya memenuhi kebutuhan plastik nasional yang terus meningkat. Proyek ini ditargetkan selesai pada tahun 2027 dengan total investasi sebesar Rp65,80 triliun. Produk yang dihasilkan berupa Etilen dan turunannya dengan estimasi total kapasitas sebesar 5,93 juta ton per tahun. Pembangunan industri petrokimia terintegrasi turut mendukung Prioritas Nasional 1 Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas Dan Berkeadilan serta <i>Major Project</i> Kawasan Industri Prioritas dan Smelter. Dengan dukungan ini, diharapkan proyek industri petrokimia terintegrasi dapat turut mendukung kebijakan dan strategi pembangunan untuk beberapa tahun ke depan.</p> <p>Proyek industri petrokimia terintegrasi akan memberikan beberapa dampak terhadap perekonomian Indonesia, antara lain penghematan devisa negara, peningkatan PDB, dan penyerapan tenaga kerja. Penghematan devisa melalui substitusi plastik impor diestimasikan mencapai US\$6 miliar per tahun. Proyek ini juga akan memiliki dampak langsung terhadap PDB sebesar Rp41 triliun. Selain itu, proyek ini diestimasikan akan menyerap tenaga kerja sebesar 25.000 pekerja selama pembangunan proyek dan 830 pekerja tetap setelah pembangunan selesai.</p> <p>Proyek prioritas swasta berikutnya adalah proyek pengembangan dan pengelolaan kawasan industri yang akan menampung perusahaan industri pengolahan logam dan komposit, industri baterai kendaraan listrik, industri panel surya, dan industri petrokimia dalam lahan seluas 10.000 hektar. Konstruksi utama kawasan industri ini ditargetkan selesai pada tahun 2024, dan pengembangan kawasan industri ditargetkan selesai pada tahun 2029. Total investasi proyek pengembangan dan pengelolaan kawasan industri ini diestimasikan sebesar Rp1.953,60 triliun. Dukungan pemerintah untuk pengembangan dan pengelolaan kawasan industri ini diberikan dalam bentuk penetapan proyek dalam Proyek Strategis Nasional (PSN) berdasarkan Permenko Perekonomian No.9/2022.</p> <p>Pengembangan dan pengelolaan kawasan industri 10.000 hektar ini turut mendukung Prioritas Nasional 1 Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas Dan Berkeadilan serta <i>Major Project</i> Kawasan Industri Prioritas dan Smelter. Proyek ini beserta perusahaan di dalamnya ditargetkan akan melibatkan sekitar 100.000 pekerja selama masa konstruksi dan sekitar 60.000 pekerja pada fase operasi. Selain itu, proyek ini turut melibatkan beberapa proyek energi hijau seperti PLTA 10 GW dan panel surya 10 GW sebagai sumber energi terbarukan bagi perusahaan di kawasan industri.</p>



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

No. Perihal Perubahan Pemutakhiran RKP Tahun 2023

143 Perubahan Tabel 2.18 dalam halaman II.63

Tabel 2.18
Target Pengembangan Wilayah Sumatera Per Provinsi Tahun 2023 (Persen)

Indikator	Target Tahun 2023									
	Aceh	Sumut	Sumbang	Riau	Jambi	Sumsel	Bengkulu	Lampung	Kep. Babel	Kep. Riau
Pertumbuhan Ekonomi ^{a)}	3,9–4,3	5,2–5,4	5,0–5,3	3,2–3,4	4,6–4,8	5,3–5,5	4,7–5,1	4,5–5,0	4,6–4,9	4,9–5,3
Tingkat Kemiskinan ^{b)}	13,71–14,00	7,25–7,50	4,65–6,00	6,00–6,50	6,25–6,50	10,85–11,00	12,95–13,50	9,68–10,20	3,48–3,50	4,35–5,00
Tingkat Pengangguran Terbuka ^{b)}	4,9–5,3	5,2–5,9	5,4–6,0	3,9–4,3	3,8–3,8	4,1–4,6	3,0–3,5	3,6–4,3	3,8–4,4	7,9–8,2

Sumber: Kementerian PPN/Bappenas, 2022.

Keterangan: a) Target tahun 2023 merupakan *assessment* Kementerian PPN/Bappenas dengan mempertimbangkan dampak COVID-19 dan angka realisasi pertumbuhan ekonomi kuartal III-2022 dan b) Target tahun 2023 merupakan hasil proyeksi Kementerian PPN/Bappenas setelah mempertimbangkan dampak COVID-19 dan *assessment* terakhir pertumbuhan ekonomi wilayah.

144 Perubahan Tabel 2.19 dalam halaman II.65

Tabel 2.19
Target Pengembangan Wilayah Jawa-Bali Per Provinsi Tahun 2023 (Persen)

Indikator	Target Tahun 2023						
	DKI Jakarta	Jawa Barat	Jawa Tengah	D. I. Yogyakarta	Jawa Timur	Banten	Bali
Pertumbuhan Ekonomi ^{a)}	5,2–5,3	5,2–5,3	5,1–5,3	5,3–5,6	5,4–5,5	5,3–5,5	6,3–6,7
Tingkat Kemiskinan ^{b)}	3,00–3,50	5,64–6,25	9,35–10,00	10,51–11,00	8,65–9,50	3,95–5,00	1,90–2,00
Tingkat Pengangguran Terbuka ^{b)}	7,0–7,0	8,1–8,2	4,6–5,3	3,1–3,3	4,2–4,7	8,0–8,2	3,5–4,2

Sumber: Kementerian PPN/Bappenas, 2022.

Keterangan: a) Target tahun 2023 merupakan *assessment* Kementerian PPN/Bappenas dengan mempertimbangkan dampak COVID-19 dan angka realisasi pertumbuhan ekonomi kuartal III-2022 dan b) Target tahun 2023 merupakan hasil proyeksi Kementerian PPN/Bappenas setelah mempertimbangkan dampak COVID-19 dan *assessment* terakhir pertumbuhan ekonomi wilayah.

145 Perubahan Tabel 2.20 dalam halaman II.67

Tabel 2.20
Target Pengembangan Wilayah Nusa Tenggara Per Provinsi Tahun 2023 (Persen)

Indikator	Target Tahun 2023	
	Nusa Tenggara Barat	Nusa Tenggara Timur
Pertumbuhan Ekonomi ^{a)}	6,3–6,5	5,2–5,9
Tingkat Kemiskinan ^{b)}	11,85–13,00	15,56–16,50
Tingkat Pengangguran Terbuka ^{b)}	2,2–2,6	2,8–3,1

Sumber: Kementerian PPN/Bappenas, 2022.

Keterangan: a) Target tahun 2023 merupakan *assessment* Kementerian PPN/Bappenas dengan mempertimbangkan dampak COVID-19 dan angka realisasi pertumbuhan ekonomi kuartal III-2022 dan b) Target tahun 2023 merupakan hasil proyeksi Kementerian PPN/Bappenas setelah mempertimbangkan dampak COVID-19 dan *assessment* terakhir pertumbuhan ekonomi wilayah.



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

No.	Perihal Perubahan	Pemutakhiran RKP Tahun 2023																																		
146	Perubahan Tabel 2.21 dalam halaman II.69	<p style="text-align: center;">Tabel 2.21 Target Pengembangan Wilayah Kalimantan Per Provinsi Tahun 2023 (Persen)</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th rowspan="2" style="text-align: left;">Indikator</th> <th colspan="5" style="text-align: center;">Target Tahun 2023</th> </tr> <tr> <th style="text-align: center;">Kalimantan Barat</th> <th style="text-align: center;">Kalimantan Tengah</th> <th style="text-align: center;">Kalimantan Selatan</th> <th style="text-align: center;">Kalimantan Timur</th> <th style="text-align: center;">Kalimantan Utara</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Pertumbuhan Ekonomi^{a)}</td> <td style="text-align: center;">5,2-5,6</td> <td style="text-align: center;">5,9-6,3</td> <td style="text-align: center;">4,9-5,0</td> <td style="text-align: center;">5,2-5,5</td> <td style="text-align: center;">5,5-5,8</td> </tr> <tr> <td>Tingkat Kemiskinan^{b)}</td> <td style="text-align: center;">5,25-6,00</td> <td style="text-align: center;">3,85-4,50</td> <td style="text-align: center;">3,44-4,00</td> <td style="text-align: center;">4,11-5,30</td> <td style="text-align: center;">4,31-6,00</td> </tr> <tr> <td>Tingkat Pengangguran Terbuka^{b)}</td> <td style="text-align: center;">4,2-4,4</td> <td style="text-align: center;">3,6-3,6</td> <td style="text-align: center;">3,9-4,0</td> <td style="text-align: center;">5,1-5,7</td> <td style="text-align: center;">4,0-4,2</td> </tr> </tbody> </table> <p>Sumber: Kementerian PPN/Bappenas, 2022.</p> <p>Keterangan: a) Target tahun 2023 merupakan <i>assessment</i> Kementerian PPN/Bappenas dengan mempertimbangkan dampak COVID-19 dan angka realisasi pertumbuhan ekonomi kuartal III-2022 dan b) Target tahun 2023 merupakan hasil proyeksi Kementerian PPN/Bappenas setelah mempertimbangkan dampak COVID-19 dan <i>assessment</i> terakhir pertumbuhan ekonomi wilayah.</p>	Indikator	Target Tahun 2023					Kalimantan Barat	Kalimantan Tengah	Kalimantan Selatan	Kalimantan Timur	Kalimantan Utara	Pertumbuhan Ekonomi ^{a)}	5,2-5,6	5,9-6,3	4,9-5,0	5,2-5,5	5,5-5,8	Tingkat Kemiskinan ^{b)}	5,25-6,00	3,85-4,50	3,44-4,00	4,11-5,30	4,31-6,00	Tingkat Pengangguran Terbuka ^{b)}	4,2-4,4	3,6-3,6	3,9-4,0	5,1-5,7	4,0-4,2					
Indikator	Target Tahun 2023																																			
	Kalimantan Barat	Kalimantan Tengah	Kalimantan Selatan	Kalimantan Timur	Kalimantan Utara																															
Pertumbuhan Ekonomi ^{a)}	5,2-5,6	5,9-6,3	4,9-5,0	5,2-5,5	5,5-5,8																															
Tingkat Kemiskinan ^{b)}	5,25-6,00	3,85-4,50	3,44-4,00	4,11-5,30	4,31-6,00																															
Tingkat Pengangguran Terbuka ^{b)}	4,2-4,4	3,6-3,6	3,9-4,0	5,1-5,7	4,0-4,2																															
147	Perubahan Tabel 2.22 dalam halaman II.70	<p style="text-align: center;">Tabel 2.22 Target Pengembangan Wilayah Sulawesi Per Provinsi Tahun 2023 (Persen)</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th rowspan="2" style="text-align: left;">Indikator</th> <th colspan="6" style="text-align: center;">Target Tahun 2023</th> </tr> <tr> <th style="text-align: center;">Sulawesi Utara</th> <th style="text-align: center;">Sulawesi Tengah</th> <th style="text-align: center;">Sulawesi Selatan</th> <th style="text-align: center;">Sulawesi Tenggara</th> <th style="text-align: center;">Gorontalo</th> <th style="text-align: center;">Sulawesi Barat</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Pertumbuhan Ekonomi^{a)}</td> <td style="text-align: center;">5,3-6,0</td> <td style="text-align: center;">13,3-14,1</td> <td style="text-align: center;">6,0-6,7</td> <td style="text-align: center;">6,2-6,6</td> <td style="text-align: center;">4,8-5,4</td> <td style="text-align: center;">3,2-4,6</td> </tr> <tr> <td>Tingkat Kemiskinan^{b)}</td> <td style="text-align: center;">5,83-6,50</td> <td style="text-align: center;">8,85-9,50</td> <td style="text-align: center;">7,75-8,00</td> <td style="text-align: center;">9,15-10,00</td> <td style="text-align: center;">12,87-14,00</td> <td style="text-align: center;">9,51-10,00</td> </tr> <tr> <td>Tingkat Pengangguran Terbuka^{b)}</td> <td style="text-align: center;">6,1-6,2</td> <td style="text-align: center;">2,7-2,8</td> <td style="text-align: center;">4,1-4,4</td> <td style="text-align: center;">3,0-3,2</td> <td style="text-align: center;">2,2-2,6</td> <td style="text-align: center;">2,0-2,2</td> </tr> </tbody> </table> <p>Sumber: Kementerian PPN/Bappenas, 2022.</p> <p>Keterangan: a) Target tahun 2023 merupakan <i>assessment</i> Kementerian PPN/Bappenas dengan mempertimbangkan dampak COVID-19 dan angka realisasi pertumbuhan ekonomi kuartal III-2022 dan b) Target tahun 2023 merupakan hasil proyeksi Kementerian PPN/Bappenas setelah mempertimbangkan dampak COVID-19 dan <i>assessment</i> terakhir pertumbuhan ekonomi wilayah.</p>	Indikator	Target Tahun 2023						Sulawesi Utara	Sulawesi Tengah	Sulawesi Selatan	Sulawesi Tenggara	Gorontalo	Sulawesi Barat	Pertumbuhan Ekonomi ^{a)}	5,3-6,0	13,3-14,1	6,0-6,7	6,2-6,6	4,8-5,4	3,2-4,6	Tingkat Kemiskinan ^{b)}	5,83-6,50	8,85-9,50	7,75-8,00	9,15-10,00	12,87-14,00	9,51-10,00	Tingkat Pengangguran Terbuka ^{b)}	6,1-6,2	2,7-2,8	4,1-4,4	3,0-3,2	2,2-2,6	2,0-2,2
Indikator	Target Tahun 2023																																			
	Sulawesi Utara	Sulawesi Tengah	Sulawesi Selatan	Sulawesi Tenggara	Gorontalo	Sulawesi Barat																														
Pertumbuhan Ekonomi ^{a)}	5,3-6,0	13,3-14,1	6,0-6,7	6,2-6,6	4,8-5,4	3,2-4,6																														
Tingkat Kemiskinan ^{b)}	5,83-6,50	8,85-9,50	7,75-8,00	9,15-10,00	12,87-14,00	9,51-10,00																														
Tingkat Pengangguran Terbuka ^{b)}	6,1-6,2	2,7-2,8	4,1-4,4	3,0-3,2	2,2-2,6	2,0-2,2																														
148	Perubahan Tabel 2.23 dalam halaman II.72	<p style="text-align: center;">Tabel 2.23 Target Pengembangan Wilayah Maluku Per Provinsi Tahun 2023 (Persen)</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th rowspan="2" style="text-align: left;">Indikator</th> <th colspan="2" style="text-align: center;">Target Tahun 2023</th> </tr> <tr> <th style="text-align: center;">Maluku</th> <th style="text-align: center;">Maluku Utara</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Pertumbuhan Ekonomi^{a)}</td> <td style="text-align: center;">5,1-5,3</td> <td style="text-align: center;">15,6-17,2</td> </tr> <tr> <td>Tingkat Kemiskinan^{b)}</td> <td style="text-align: center;">14,78-15,50</td> <td style="text-align: center;">4,64-5,70</td> </tr> <tr> <td>Tingkat Pengangguran Terbuka^{b)}</td> <td style="text-align: center;">6,1-6,3</td> <td style="text-align: center;">3,7-3,9</td> </tr> </tbody> </table> <p>Sumber: Kementerian PPN/Bappenas, 2022.</p> <p>Keterangan: a) Target tahun 2023 merupakan <i>assessment</i> Kementerian PPN/Bappenas dengan mempertimbangkan dampak COVID-19 dan angka realisasi pertumbuhan ekonomi kuartal III-2022 dan b) Target tahun 2023 merupakan hasil proyeksi Kementerian PPN/Bappenas setelah mempertimbangkan dampak COVID-19 dan <i>assessment</i> terakhir pertumbuhan ekonomi wilayah.</p>	Indikator	Target Tahun 2023		Maluku	Maluku Utara	Pertumbuhan Ekonomi ^{a)}	5,1-5,3	15,6-17,2	Tingkat Kemiskinan ^{b)}	14,78-15,50	4,64-5,70	Tingkat Pengangguran Terbuka ^{b)}	6,1-6,3	3,7-3,9																				
Indikator	Target Tahun 2023																																			
	Maluku	Maluku Utara																																		
Pertumbuhan Ekonomi ^{a)}	5,1-5,3	15,6-17,2																																		
Tingkat Kemiskinan ^{b)}	14,78-15,50	4,64-5,70																																		
Tingkat Pengangguran Terbuka ^{b)}	6,1-6,3	3,7-3,9																																		
149	Perubahan alinea pertama dalam halaman II.73	<p>Pengembangan Wilayah Papua difokuskan pada (1) mempercepat pembangunan kesejahteraan dengan pendekatan berbasis tujuh wilayah adat yaitu Laa Pago, Saireri, Tabi, Mee Pago, Anim Ha, Bomberay, dan Domberay melalui penyediaan pelayanan dasar serta perluasan akses di bidang pendidikan, kesehatan, dan peningkatan kesempatan kerja bagi Orang Asli Papua; (2) memfasilitasi transformasi ekonomi wilayah khususnya melalui hilirisasi komoditas unggulan pertanian; (3) mengoptimalkan pelaksanaan otonomi khusus berlandaskan pendekatan budaya dan kondisi sosio-ekologis Wilayah Papua; (4) memperkuat kerja sama dan kemitraan antardaerah melalui pendekatan berbasis wilayah adat; (5) mengoptimalkan sistem nilai dan norma dalam wilayah adat untuk</p>																																		



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

No.	Perihal Perubahan	Pemutakhiran RKP Tahun 2023
		<p>memfasilitasi aktivitas sosial ekonomi serta pergerakan penduduk dan barang; serta (6) memperkuat peran distrik sebagai pusat data informasi dan pengetahuan, pusat pelayanan dasar, pusat pemberdayaan masyarakat adat, pusat inovasi dan kewirausahaan, pusat pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan, serta pusat pertumbuhan daerah. Untuk itu, strategi percepatan pertumbuhan dan transformasi Wilayah Papua sebagai berikut</p> <ol style="list-style-type: none">(1) melanjutkan pembangunan jaringan infrastruktur yang terintegrasi antara pusat-pusat produksi rakyat dengan pusat-pusat pertumbuhan wilayah, seperti KEK Sorong dan KI Teluk Bintuni, dengan terus mendorong percepatan operasionalisasi kawasan, realisasi investasi, dan kerja sama dengan pemerintah daerah;(2) mempercepat pengembangan kawasan perkotaan pada kawasan yang potensial untuk dikembangkan, termasuk pembangunan Kota Baru Sorong dan kota sedang Jayapura yang ditujukan sebagai penggerak ekonomi wilayah serta pusat pelayanan dasar dan ekonomi dengan fokus pada pengembangan transportasi publik perkotaan, air minum dan sanitasi, drainase, serta pengelolaan sampah dan limbah yang aman;(3) mempercepat pembangunan dan pengembangan kawasan di Ibu Kota Provinsi di Provinsi Papua Selatan, Papua Tengah, Papua Pegunungan, dan Papua Barat Daya yang merupakan Daerah Otonom Baru (DOB) pemekaran Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat;(4) mendorong produktivitas komoditas unggulan pertanian, perkebunan, peternakan, kelautan dan perikanan seperti sagu, kopi, kakao, pala, kenaf, sapi, kelapa, perikanan tangkap, dan perikanan budi daya dalam rangka penyiapan basis industri manufaktur dan industri jasa, serta pengembangan sentra produksi pangan (<i>food estate</i>) di Merauke;(5) mendorong ekonomi kemaritiman di DPP Raja Ampat dan Destinasi Pariwisata Pengembangan Biak-Teluk Cendrawasih dengan mempercepat pengembangan sentra kelautan perikanan terpadu dan pariwisata bahari;(6) mempercepat pengembangan kapasitas dan keterampilan hidup pemuda Papua untuk mendukung pengembangan kegiatan ekonomi lokal melalui peningkatan keterampilan sumber daya manusia, kewirausahaan, pelatihan vokasi, pengembangan pusat-pusat keahlian ketenagakerjaan (<i>skill development center</i>), serta pengembangan kreativitas dan inovasi pemuda asli Papua;(7) meningkatkan pelayanan perizinan investasi dan memperkuat forum kerja sama, pengembangan sumber pembiayaan alternatif dan investasi daerah, serta penataan regulasi daerah dan harmonisasi regulasi pusat-daerah regional Wilayah Papua;(8) meningkatkan kepastian hukum hak atas tanah adat/ulayat serta peningkatan daya dukung lingkungan dan kawasan konservasi untuk pembangunan rendah karbon;(9) mempercepat proses penyusunan dan penetapan rencana tata ruang baik RTRW maupun RDTR sebagai acuan pemberian kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang melalui pemberian bimbingan teknis kepada pemerintah daerah.
150	Perubahan alinea kedua dalam halaman II.73 dan alinea pertama dalam halaman II.74	<p>Selanjutnya, untuk strategi pemerataan intrawilayah Papua sebagai berikut</p> <ol style="list-style-type: none">(1) memberikan pelayanan kesehatan yang berkualitas dan merata serta membudayakan hidup sehat dan bersih di masyarakat, dalam rangka menuju Papua Sehat melalui percepatan peningkatan upaya kesehatan masyarakat, akses, kualitas, dan tata kelola pelayanan kesehatan; serta pemenuhan tenaga kesehatan secara merata di wilayah Papua;(2) memberikan pelayanan pendidikan yang berkualitas untuk membentuk pribadi unggul, kreatif, inovatif, berkarakter, dan mampu



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

No.	Perihal Perubahan	Pemutakhiran RKP Tahun 2023														
		<p>bekerja sama, dalam rangka menuju Papua Cerdas melalui percepatan peningkatan akses dan kualitas pelayanan pendidikan serta pemenuhan tenaga pendidik secara merata di Wilayah Papua;</p> <p>(3) meningkatkan kompetensi, kreativitas, dan inovasi dalam pengembangan potensi ekonomi lokal yang berdaya saing, dalam rangka menuju Papua Produktif melalui peningkatan daya saing tenaga kerja dan kesempatan kerja; peningkatan daya saing industri, perdagangan, dan realisasi investasi pada sektor-sektor unggulan daerah; penguatan pelaksanaan perlindungan sosial untuk kehidupan yang adil dan merata; serta pengembangan pemerataan kawasan ekonomi;</p> <p>(4) memperluas cakupan dan meningkatkan kualitas penerapan SPM di bidang sosial, perumahan rakyat, dan trantibumlinmas terutama di lokasi afirmatif seperti daerah tertinggal dan kawasan perbatasan dengan memperluas cakupan dan kualitas pelayanan dasar, serta terus melakukan kebijakan pengembangan <i>mobile health services</i> dan sekolah alam dengan pendekatan <i>culture based learning</i>;</p> <p>(5) mempercepat pembangunan daerah tertinggal serta kawasan perbatasan termasuk kampung dengan pendekatan pembangunan berbasis wilayah adat dan distrik;</p> <p>(6) meningkatkan tata kelola dan kapasitas pemerintah daerah dan kampung (aparatur, kelembagaan, dan keuangan) melalui penyelarasan kualitas dan kuantitas ASN dengan sektor unggulan kewilayahan Papua serta peningkatan pendapatan daerah, kualitas belanja dan pengelolaan keuangan daerah yang efisien, produktif, dan akuntabel;</p> <p>(7) mengoptimalkan, fungsi dan peran GWPP, dalam memperkuat sinergi pusat-daerah, peningkatan daya saing dan inovasi daerah;</p> <p>(8) mengoptimalkan perencanaan dan pengelolaan Dana Otonomi Khusus Papua melalui koordinasi penyusunan rencana aksi percepatan pembangunan Papua 2023-2024;</p> <p>(9) mewujudkan iklim investasi yang kondusif melalui penguatan keamanan dan ketertiban.</p>														
151	Perubahan Tabel 2.24 dalam halaman II.74	<p style="text-align: center;">Tabel 2.24 Target Pengembangan Wilayah Papua Per Provinsi Tahun 2023 (Persen)</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; margin-left: auto; margin-right: auto;"> <thead> <tr> <th rowspan="2" style="width: 40%;">Indikator</th> <th colspan="2" style="width: 60%;">Target Tahun 2023</th> </tr> <tr> <th style="width: 20%;">Papua Barat</th> <th style="width: 20%;">Papua</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Pertumbuhan Ekonomi^{a)}</td> <td style="text-align: center;">3,1–4,1</td> <td style="text-align: center;">8,7–9,2</td> </tr> <tr> <td>Tingkat Kemiskinan^{b)}</td> <td style="text-align: center;">17,05–19,00</td> <td style="text-align: center;">23,45–25,00</td> </tr> <tr> <td>Tingkat Pengangguran Terbuka^{b)}</td> <td style="text-align: center;">5,1–5,3</td> <td style="text-align: center;">2,1–2,7</td> </tr> </tbody> </table> <p style="font-size: small; margin-top: 5px;">Sumber: Kementerian PPN/Bappenas, 2022.</p> <p style="font-size: x-small; margin-top: 5px;">Keterangan: a) Target tahun 2023 merupakan <i>assessment</i> Kementerian PPN/Bappenas dengan mempertimbangkan dampak COVID-19 dan angka realisasi pertumbuhan ekonomi kuartal III-2022 dan b) Target tahun 2023 merupakan hasil proyeksi Kementerian PPN/Bappenas setelah mempertimbangkan dampak COVID-19 dan <i>assessment</i> terakhir pertumbuhan ekonomi wilayah.</p>	Indikator	Target Tahun 2023		Papua Barat	Papua	Pertumbuhan Ekonomi ^{a)}	3,1–4,1	8,7–9,2	Tingkat Kemiskinan ^{b)}	17,05–19,00	23,45–25,00	Tingkat Pengangguran Terbuka ^{b)}	5,1–5,3	2,1–2,7
Indikator	Target Tahun 2023															
	Papua Barat	Papua														
Pertumbuhan Ekonomi ^{a)}	3,1–4,1	8,7–9,2														
Tingkat Kemiskinan ^{b)}	17,05–19,00	23,45–25,00														
Tingkat Pengangguran Terbuka ^{b)}	5,1–5,3	2,1–2,7														
152	Perubahan alinea keenam dalam halaman II.76 dan alinea pertama dalam halaman II.77	<p>Kebijakan TKD pada tahun 2023 secara umum diarahkan untuk</p> <p>(1) meningkatkan sinergi kebijakan fiskal pusat dan daerah serta harmonisasi belanja pusat dan daerah;</p> <p>(2) memperkuat kualitas pengelolaan TKD yang terarah, terukur, akuntabel, dan transparan;</p> <p>(3) meningkatkan kemampuan perpajakan daerah (<i>local taxing power</i>) dengan tetap menjaga iklim investasi, kemudahan berusaha, dan kesejahteraan masyarakat;</p>														



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

No.	Perihal Perubahan	Pemutakhiran RKP Tahun 2023
		(4) mendorong pemanfaatan instrumen pembiayaan untuk mengatasi keterbatasan kapasitas fiskal dan kebutuhan percepatan pembangunan melalui (a) pemanfaatan <i>creative financing</i> (pinjaman daerah, penerbitan obligasi daerah, dan/atau KPBU); (b) melakukan <i>integrated funding</i> (kerja sama pembangunan antardaerah, hibah daerah, sinergi belanja pusat, TKD, dan APBD); dan (c) pengembangan pembiayaan berkelanjutan.
153	Perubahan alinea kedua dalam halaman II.77	Penggunaan TKD diarahkan untuk mendukung sektor-sektor prioritas, seperti kesehatan, pendidikan, dan infrastruktur, dengan tujuan pemerataan layanan khususnya pemenuhan SPM, perbaikan infrastruktur publik, dan pencapaian prioritas nasional. Selain itu, pemerintah akan mengalihkan alokasi program, kegiatan, dan anggaran kementerian yang telah menjadi urusan pemerintah daerah, sebagaimana diatur dalam UU Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (HKPD), kepada pemerintah daerah secara bertahap.
154	Perubahan alinea ketiga dalam halaman II.77	<p>Dana Bagi Hasil adalah bagian dari TKD yang dialokasikan berdasarkan persentase atas pendapatan tertentu dalam APBN dan kinerja tertentu, yang dibagikan kepada daerah penghasil dengan tujuan untuk mengurangi ketimpangan fiskal antara pemerintah dan daerah, serta kepada daerah nonpenghasil dalam rangka menanggulangi eksternalitas negatif dan/atau meningkatkan pemerataan dalam satu wilayah. Arah kebijakan DBH TA 2023 adalah</p> <ul style="list-style-type: none">(a) melanjutkan kebijakan DBH <i>earmarked</i> (DBH CHT dan DBH DR) untuk sektor-sektor prioritas dengan perluasan dan fleksibilitas penggunaan sesuai peraturan perundangan;(b) mendukung upaya pelestarian lingkungan serta penguatan penerimaan negara melalui kebijakan pengalokasian dan penyaluran DBH berdasarkan kinerja daerah;(c) meningkatkan akurasi perencanaan APBD melalui alokasi DBH berdasarkan realisasi T-1 sesuai ketentuan perundang-undangan;(d) pengalokasian DBH menerapkan persentase pembagian baru sesuai UU HKPD serta lebih memperhatikan keadilan distribusi alokasi TKD untuk daerah penghasil, daerah berbatasan, daerah pengolah, serta daerah lainnya dalam 1 wilayah provinsi;(e) penambahan jenis DBH lainnya yaitu DBH perkebunan sawit, antara lain untuk dukungan infrastruktur termasuk jalan dan industri sawit di daerah;(f) memperkuat proses transparansi dalam penghitungan DBH.
155	Perubahan alinea keempat dalam halaman II.77 dan alinea pertama dalam halaman II.78	<p>Dana Alokasi Umum adalah bagian dari TKD yang dialokasikan dengan tujuan mengurangi ketimpangan kemampuan keuangan dan layanan publik antardaerah. Arah kebijakan DAU TA 2023 adalah sebagai berikut</p> <ul style="list-style-type: none">(a) penguatan keuangan daerah melalui kebijakan pagu DAU berdasarkan UU No. 1/2022 tentang Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah (HKPD);(b) peningkatan pemerataan keuangan daerah dan mendorong peningkatan PAD melalui kebijakan formula DAU yang didasarkan pada satuan biaya, target layanan, potensi pendapatan dan karakteristik daerah (antara lain populasi, luas wilayah, Indeks Kemahalan Konstruksi, karakteristik kepulauan, pariwisata, ketahanan pangan, konservasi hutan) serta mempertimbangkan kebutuhan dasar penyelenggaraan pemerintahan daerah;(c) meningkatkan layanan publik daerah di bidang pendidikan, kesehatan, dan pekerjaan umum, serta mendukung pendanaan kelurahan melalui



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

No.	Perihal Perubahan	Pemutakhiran RKP Tahun 2023
		kebijakan penggunaan DAU yang ditentukan penggunaannya (<i>earmarked</i>); (d) meningkatkan kualitas belanja daerah melalui asistensi kepada pemda mengenai pengelolaan DAU sesuai ketentuan perundang-undangan.
156	Penambahan alinea setelah alinea pertama dalam halaman II.78	Dana Alokasi Umum didorong untuk meningkatkan kinerja pengelolaan belanja APBD di antaranya melalui penyaluran DAU berbasis kinerja anggaran.
157	Perubahan alinea ketiga dalam halaman II.78	Dana Alokasi Khusus Fisik digunakan untuk mendukung pembangunan/pengadaan sarana dan prasarana layanan publik daerah. Arah kebijakan DAK Fisik TA 2023, adalah (a) mendorong percepatan penyediaan infrastruktur pelayanan dasar serta tematik tertentu dengan tujuan: (i) pencapaian Prioritas Nasional (PN); (ii) percepatan pembangunan daerah; (iii) mengurangi kesenjangan layanan publik antardaerah; dan (iv) mendorong pertumbuhan perekonomian daerah. (b) mempertajam implementasi konsep tematik berbasis pendekatan holistik, integratif dan spasial dalam rangka pencapaian <i>outcome</i> yang optimal; (c) meningkatkan kualitas perencanaan, penganggaran, dan pelaksanaan DAK Fisik melalui optimalisasi pemanfaatan sistem informasi dalam proses perencanaan, penganggaran, penyaluran, pelaporan, serta pemantauan dan evaluasi DAK Fisik; (d) meningkatkan akuntabilitas pengelolaan DAK Fisik melalui penguatan alokasi dan penyaluran berbasis kinerja serta penguatan kualitas pengawasan; (e) memperkuat sinergi pendanaan DAK Fisik dengan kegiatan yang didukung oleh APBD, APBN, maupun sumber pendanaan lainnya; (f) menentukan kebijakan DAK Fisik yang terintegrasi antara satu bidang dengan bidang lainnya; (g) pemerintah dalam pengelolaan DAK Fisik untuk mempercepat pembangunan daerah, dilaksanakan dengan mengimplementasikan kebijakan afirmatif pada pengalokasian DAK Fisik.
158	Perubahan alinea ketiga dalam halaman II.79	Dana Alokasi Khusus Nonfisik digunakan untuk mendukung operasionalisasi layanan publik daerah. Kebijakan DAK Nonfisik TA 2023 diarahkan untuk (a) melanjutkan penguatan fokus kegiatan DAK Nonfisik yang berdampak langsung pada pertumbuhan ekonomi; (b) melanjutkan penguatan bidang pendidikan melalui (i) penerapan unit <i>cost</i> majemuk bagi dana BOS, BOP PAUD, dan BOP Pendidikan Kesetaraan; (ii) perluasan sasaran tunjangan guru dengan penambahan output guru PPPK untuk Dana TPG, Tamsil Guru, dan TKG; dan (iii) pengalokasian DAK Nonfisik berbasis kinerja untuk Dana BOS Kinerja dan Dana BOP Kinerja; (c) penguatan bidang kesehatan melalui (i) penyaluran langsung Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Puskesmas dari RKUN ke Rekening Puskesmas dan (ii) peningkatan kualitas dan ketepatan data pelayanan UKM di tingkat puskesmas dengan menambahkan rincian menu Insentif Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM);



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

No.	Perihal Perubahan	Pemutakhiran RKP Tahun 2023
		(d) Dana Alokasi Khusus Nonfisik bersifat penugasan sesuai prioritas nasional.
159	Perubahan alinea keempat dalam halaman II.79	Penjabaran arah kebijakan tersebut dituangkan dalam kelompok DAK Nonfisik untuk mendukung operasionalisasi layanan pendidikan dan kesehatan, serta kelompok DAK Nonfisik yang mendukung pertumbuhan ekonomi sesuai dengan prioritas nasional atau amanat regulasi lainnya.
160	Penambahan alinea setelah alinea keempat dalam halaman II.79	DAK Nonfisik terdiri dari (a) Bantuan Operasional Satuan Pendidikan yang terdiri dari (i) Bantuan Operasional Sekolah (BOS), (ii) Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP), dan (iii) BOP Pendidikan Kesetaraan; (b) Tunjangan Guru ASND yang terdiri dari Tunjangan Profesi Guru (TPG) dan Tambahan Penghasilan (Tamsil) Guru ASND dan Tunjangan Khusus Guru (TKG) ASND di Daerah Khusus; (c) BOP Museum dan Taman Budaya; (d) Bantuan Operasional Kesehatan (BOK); (e) Bantuan Operasional Keluarga Berencana (BOKB); (f) Dana Peningkatan Kapasitas Koperasi dan UMK; (g) Dana Pelayanan Kepariwisata; (h) Dana Bantuan Biaya Layanan Pengolahan Sampah; (i) Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak; (j) Dana Fasilitas Penanaman Modal; (k) Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian; dan (l) Dana Penguatan Kapasitas Kelembagaan Sentra IKM.
161	Perubahan alinea kelima dalam halaman II.79	Hibah Daerah digunakan untuk mendukung pembangunan fisik dan/atau layanan publik daerah tertentu yang didasarkan pada perjanjian antara pemerintah dan pemerintah daerah. Kebijakan Hibah Daerah TA 2023 diarahkan untuk (a) mendukung penyediaan layanan dasar umum pada bidang perhubungan, pembangunan sarana air minum, pengelolaan sanitasi, irigasi, pertanian, lingkungan hidup, dan jalan daerah; (b) sinkronisasi dan sinergi pendanaan untuk mendukung penyediaan infrastruktur daerah; (c) menguatkan peran Hibah Daerah dalam mendukung penanganan kondisi bencana serta sebagai instrumen antisipatif atas perubahan kondisi perekonomian; (d) menguatkan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Hibah serta peningkatan koordinasi dengan K/L dan pemda untuk mempercepat pelaksanaan kegiatan, penyaluran hibah kepada daerah dan mengoptimalkan <i>output</i> .
162	Perubahan alinea kedua dalam halaman II.80	Jenis Hibah Daerah TA 2023 antara lain (a) Hibah Daerah yang bersumber dari Pinjaman Luar Negeri, yaitu: (i) <i>Integrated Participatory Development and Management of Irrigation Project (IPDMIP)</i> ; (ii) <i>Mass Rapid Transit (MRT) Project</i> ; (iii) <i>Rural Empowerment and Agricultural Development Scalling Up Initiative (READ-SI)</i> ; (iv) <i>The Development of Integrated Farming System at Upland Areas Project (UPLAND)</i> ; (v) Hibah Air Minum Berbasis Kinerja/ <i>National Urban Water Supply Project (NUWSP)</i> . (b) Hibah Daerah yang bersumber dari Hibah Luar Negeri, yaitu



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

No.	Perihal Perubahan	Pemutakhiran RKP Tahun 2023
		<ul style="list-style-type: none">(i) Hibah Air Minum Berbasis Kinerja Bantuan Pemerintah Australia;(ii) Instalasi Pengolahan Air Limbah untuk Kota Palembang/<i>Palembang City Sewerage Project (PCSP)</i>;(iii) <i>Bio Carbon Fund Initiative for Sustainable Forest Landscape (Bio CF ISFL)</i>. <p>(c) Hibah Dalam Negeri yang Dihilangkan, yaitu:</p> <ul style="list-style-type: none">(i) <i>Nationwide Water Hibah Program</i>;(ii) Hibah Sanitasi (Air Limbah Setempat);(iii) Hibah Jalan Daerah.
163	Perubahan alinea ketiga dalam halaman II.80	<p>Dana Otonomi Khusus merupakan bagian dari TKD yang dialokasikan kepada daerah tertentu untuk mendanai pelaksanaan otonomi khusus sebagaimana ditetapkan dalam undang-undang mengenai Otonomi Khusus. Arah kebijakan Dana Otsus TA 2023 adalah sebagai berikut</p> <ul style="list-style-type: none">(a) meningkatkan kualitas pengelolaan Dana Otsus dengan mengacu kepada Rencana Induk Percepatan Pembangunan Papua (RIPPP) Tahun 2022-2041 dan Rencana Aksi Percepatan Pembangunan Papua (RAPPP) Tahun 2023-2024 dengan target dan capaian keluaran yang jelas dan terukur serta disinergikan dengan sumber penerimaan di luar penerimaan Otsus;(b) meningkatkan kinerja penggunaan Dana Otsus Aceh melalui perbaikan pengaturan tata kelola;(c) Dana Otsus Aceh untuk tahun keenam belas sampai dengan tahun kedua puluh dialokasikan setara dengan 1 persen dari Pagu DAU sebagaimana diatur dalam UU No. 11/2006 tentang Pemerintahan Aceh; dan(d) pembangunan sistem informasi pengelolaan Dana Otsus yang terintegrasi dengan prinsip interoperabilitas antarsistem elektronik dalam rangka pertukaran data, informasi atau layanan sistem pemerintahan berbasis elektronik.
164	Perubahan alinea ketiga dalam halaman II.81	<p>Pemanfaatan penerimaan daerah dalam rangka Otsus Papua terdiri atas (a) tambahan DBH sumber daya alam pertambangan minyak bumi dan gas alam sebesar selisih antara 70 persen (tujuh puluh persen) dengan persentase DBH sumber daya alam pertambangan minyak bumi dan gas alam bagian daerah sesuai UU No. 1/2022; (b) Dana Otsus sebesar 2,25 persen (dua koma dua puluh lima persen) dari plafon alokasi DAU Nasional; dan (c) Dana Tambahan Infrastruktur yang ditujukan untuk pendanaan pembangunan infrastruktur perhubungan, energi listrik, air bersih, telekomunikasi, dan sanitasi lingkungan (besaran DTI ditetapkan antara Pemerintah Pusat dengan Dewan Perwakilan Rakyat berdasarkan usulan provinsi pada setiap tahun anggaran). Pengalokasian Dana Otsus Papua dilakukan berdasarkan kewilayahan, kependudukan, kesulitan geografis, indikator capaian pembangunan, serta kinerja pengelolaan. Selain kebijakan pemanfaatan tersebut, arah kebijakan umum Dana Otsus provinsi di Wilayah Papua dalam meningkatkan penatakelolaan adalah sebagai berikut</p> <ul style="list-style-type: none">(a) menetapkan pengalokasian Dana Otsus Papua sebesar 2,25 persen dari pagu DAU Nasional, hal ini sesuai dengan UU No. 2/2021 tentang Perubahan Kedua Atas UU No. 21/2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua;(b) mengarahkan penggunaan Dana Otsus Papua dalam bentuk 1 persen <i>block grant</i> dan 1,25 persen <i>performance based grant</i> berdasarkan kinerja penggunaan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;(c) meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan di Wilayah Papua dengan mengacu pada Rencana Induk Percepatan Pembangunan Papua (RIPPP) Tahun 2022-2041 dan Rencana Aksi Percepatan Pembangunan



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

No.	Perihal Perubahan	Pemutakhiran RKP Tahun 2023
		<p>Papua (RAPPP) Tahun 2023-2024 yang dapat menjadi pedoman dalam penyusunan arah kebijakan belanja pemerintah; menggunakan sistem informasi pengelolaan Dana Otsus yang terintegrasi berbasis prinsip interoperabilitas; serta mempertimbangkan hasil sinkronisasi, harmonisasi, evaluasi, dan koordinasi percepatan pembangunan dan pelaksanaan Otsus di Wilayah Papua oleh Badan Pengarah Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua/ Badan Pengarah Papua; dan</p> <p>(d) meningkatkan pengawasan pelaksanaan Dana Otsus dengan melibatkan Aparat Pengawas Intern Pemerintah dan masyarakat.</p>
165	Perubahan alinea kedua dalam halaman II.82	<p>Dana Keistimewaan DIY adalah bagian dari TKD yang dialokasikan untuk mendukung urusan keistimewaan DIY sebagaimana ditetapkan dalam undang-undang mengenai keistimewaan Yogyakarta. Arah kebijakan Dana Keistimewaan DIY TA 2023 sebagai berikut</p> <p>(a) melanjutkan peningkatan kualitas perencanaan penggunaan Dana Keistimewaan yang mengacu kepada Rencana Induk yang selaras dengan program/kebijakan belanja pemerintah yang relevan;</p> <p>(b) melanjutkan penguatan sinergi kegiatan antara belanja K/L dengan belanja Dana Keistimewaan;</p> <p>(c) melanjutkan peningkatan pemantauan dan evaluasi dalam mendukung efektivitas dan akuntabilitas penyelenggaraan Dana Keistimewaan DIY;</p> <p>(d) membangun sistem informasi tata kelola Dana Keistimewaan yang terintegrasi antara SIKD dengan APBD.</p>
166	Penambahan alinea setelah alinea kedua dalam halaman II.82	<p>Arah kebijakan Dana Keistimewaan meliputi peningkatan pemantauan dan evaluasi dalam mendukung efektivitas dan akuntabilitas penyelenggaraan Dana Keistimewaan yang diselaraskan dengan prioritas nasional, prioritas daerah, dan pencapaian target <i>outcome</i> pusat-daerah, dengan mempertimbangkan kebutuhan dan prioritas pembangunan masing-masing kabupaten/kota di DIY. Sinergi kegiatan antara belanja K/L dengan belanja Dana Keistimewaan, dilakukan dengan memperhatikan (1) penguatan dan pemberdayaan masyarakat berlandaskan budaya dan adat; (2) penguatan tata kelola pemerintahan yang partisipatif, transparan, akuntabel, dan adil dengan mengutamakan pelayanan prima; serta (3) pencapaian ketahanan sosial, budaya, dan ekonomi masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan dan kemajuan daerah.</p>
167	Perubahan alinea ketiga dalam halaman II.82 dan alinea pertama dalam halaman II.83	<p>Dana Desa (DD) adalah bagian dari TKD yang diperuntukkan bagi desa dengan tujuan untuk mendukung pendanaan penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pemberdayaan masyarakat, dan kemasyarakatan. Arah kebijakan Dana Desa TA 2023 adalah sebagai berikut</p> <p>(a) penyempurnaan kebijakan penganggaran DD dengan memperhatikan</p> <p>(i) kebutuhan masing-masing desa sesuai dengan kewenangan desa;</p> <p>(ii) <i>performance based</i> dalam melaksanakan pengelolaan DD dan dukungan desa dalam menyinergikan penggunaan DD sesuai kebijakan dan prioritas nasional melalui penilaian kinerja desa dalam penghitungan alokasi kinerja.</p> <p>(b) pengalokasian DD berdasarkan formula dan pengalokasian sebagian DD secara terpisah pada tahun anggaran berjalan berdasarkan kriteria tertentu.</p> <p>(c) penentuan fokus penggunaan DD yang disinkronisasikan dengan prioritas nasional, utamanya untuk</p>



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

No.	Perihal Perubahan	Pemutakhiran RKP Tahun 2023
		<ul style="list-style-type: none"> (i) program pemulihan ekonomi, yaitu perlindungan sosial dan penanganan kemiskinan ekstrem maksimal 25 persen; (ii) bantuan permodalan kepada BUMDes untuk menggerakkan perekonomian desa; (iii) penggunaan sebagian DD untuk dana operasional pemerintah desa; (iv) dukungan program sektor prioritas di desa termasuk penanganan <i>stunting</i>, mendukung ketahanan pangan dan hewani termasuk pembangunan lumbung pangan desa dan pariwisata skala desa sesuai dengan potensi dan karakteristik desa.
168	Penambahan alinea setelah alinea pertama dalam halaman II.83	<p>Arah kebijakan penggunaan DD juga meliputi arahan pemanfaatan DD untuk peningkatan produktivitas melalui diversifikasi ekonomi desa, peningkatan produksi pertanian bernilai tinggi dan berkualitas ekspor, intensifikasi pertanian, perluasan kesempatan dan lapangan kerja yang layak, serta peningkatan kapasitas masyarakat desa melalui pelatihan vokasional dan manajerial. Selain itu, penggunaan DD juga diarahkan untuk memperkuat dukungan fasilitas ekonomi dan lingkungan perdesaan terutama bagi desa tertinggal dan berkembang melalui pembangunan/rehabilitasi pasar desa dan sarana prasarana kelompok usaha masyarakat desa, pembangunan sistem pembuangan dan daur ulang sampah, serta penguatan ketahanan bencana. Terakhir, penggunaan DD diarahkan untuk meningkatkan akses pelayanan dasar desa terutama untuk fasilitas kesehatan dan jaringan air bersih dan sanitasi, serta elektrifikasi melalui energi baru terbarukan berkelanjutan berskala desa. Pertimbangan arah kebijakan DD tersebut menyesuaikan dengan tema dan arah kebijakan RKP 2023 yang telah dibahas melalui hasil forum <i>multilateral meeting</i> dana desa. Untuk memperbaiki mekanisme penyaluran DD dilakukan dengan (i) memisahkan penyaluran DD <i>earmarked</i> dan <i>non-earmarked</i> berdasarkan kinerja pelaksanaan; (ii) melanjutkan penyaluran DD secara langsung dari RKUN ke RKD; (iii) melanjutkan pemberian <i>reward</i> penyaluran DD dalam dua tahap kepada desa berstatus mandiri; dan (iv) melanjutkan penerapan sanksi berupa penghentian penyaluran DD jika terdapat desa bermasalah atau kepala desa menyalahgunakan DD.</p>
169	Penambahan alinea sebelum alinea pertama dalam halaman III.16	<p>Lebih lanjut, dalam rangka mendukung capaian Prioritas Nasional (PN), pemerintah menyusun kebijakan Proyek Strategis Nasional (PSN) sesuai Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 9 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan Daftar Proyek Strategis Nasional yang terdiri dari 200 proyek dan 12 program, dengan rincian PN 1 didukung 26 proyek dan 6 program, PN 2 didukung 7 proyek dan 2 program, PN 3 didukung 3 proyek, PN 5 didukung 163 proyek dan 4 program, serta PN 7 didukung 1 proyek.</p>
170	Perubahan Infografis Sasaran Pembangunan dalam halaman III.10	



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

No. Perihal Perubahan Pemutakhiran RKP Tahun 2023

171 Perubahan Infografis Tema RKP Tahun 2023 dalam halaman III.10



172 Perubahan Infografis Strategi Pembangunan Tahun 2023 dalam halaman III.11





PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

No. Perihal Perubahan Pemutakhiran RKP Tahun 2023

173 Perubahan Infografis Major Project Kawasan Industri Prioritas dan Smelter dalam halaman III.18



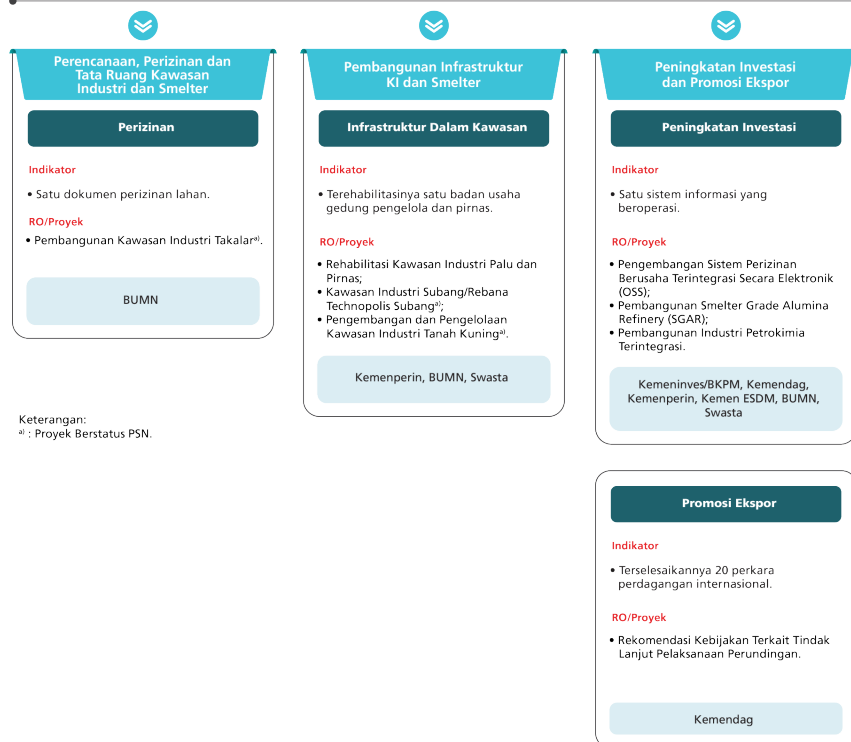
Major Project Kawasan Industri Prioritas dan Smelter (1 dari 2)

Impact/Outcome

- Meningkatkan pertumbuhan PDB industri pengolahan menjadi 5,4-6,0% dan kontribusi PDB industri pengolahan menjadi 20,6%;
- Tercapainya realisasi PMA dan PMDN industri pengolahan sebesar Rp508,8 - 574 triliun (2023);
- Meningkatnya jumlah tenaga kerja industri pengolahan menjadi 21,70 juta orang (2023);
- 14 kawasan industri prioritas (2023);
- Beroperasinya 31 smelter.

Output MP

- Meningkatnya jumlah tenaga kerja industri pengolahan mencapai 22,5 Juta orang (2024);
- Tercapainya nilai realisasi PMA dan PMDN industri pengolahan sebesar Rp646,1 triliun (2024);
- Pembangunan 14 kawasan industri dan 31 smelter;
- Dukungan termasuk penyiapan SDM terampil melalui kerja sama vokasi antara K/L, badiklat, industri dan pemma;
- Melakukan fasilitas penyusunan RTR/RDTR di sekitar kawasan industri.



Keterangan:
²⁾ : Proyek Berstatus PSN.



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

No. Perihal
Perubahan

Pemutakhiran RKP Tahun 2023



Major Project Kawasan Industri Prioritas dan Smelter (2 dari 2)

Impact/Outcome

- Meningkatkan pertumbuhan PDB industri pengolahan menjadi 5,4-6,0% dan kontribusi PDB industri pengolahan menjadi 20,6%;
- Tercapainya realisasi PMA dan PMDN industri pengolahan sebesar Rp508,8 - 574 triliun (2023);
- Meningkatnya jumlah tenaga kerja industri pengolahan menjadi 21,70 juta orang (2023);
- 14 kawasan industri prioritas (2023);
- Beroperasinya 31 smelter.

Output MP

- Meningkatnya jumlah tenaga kerja industri pengolahan mencapai 22,5 Juta orang (2024);
- Tercapainya nilai realisasi PMA dan PMDN industri pengolahan sebesar Rp646,1 triliun (2024);
- Pembangunan 14 kawasan industri dan 31 smelter;
- Dukungan termasuk penyiapan SDM terampil melalui kerja sama vokasi antara K/L, badiklat, industri dan pemda;
- Melakukan fasilitas penyusunan RTR/RDTR di sekitar kawasan industri.



**Fasilitasi Kemitraan Usaha
dan Penyediaan SDM**

Penyediaan SDM

Indikator

- Penyerapan mahasiswa dan lulusan DI s/d S1 kerja sama dengan Industri sebanyak 10.754 orang.

RO/Proyek

- Mahasiswa dan Lulusan Program DII, DIII dan DIV Reguler;
- Mahasiswa dan Lulusan Program DI Kerjasama Industri.

Kemenperin



**Harmonisasi Regulasi
dan Lainnya**

Harmonisasi Regulasi

Indikator

- Satu dokumen rekomendasi kebijakan.

RO/Proyek

- Rekomendasi Kebijakan Ekspor Produk Industri dan Pertambangan;
- Tingkat Implementasi P3DN dan Peningkatan TKDN pada Subsektor Pertambangan Mineral;
- Industri Smelter Logam Besi yang termonitor dan terevaluasi perkembangannya.

Kemendag, Kemenperin,
Kemen ESDM



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

No. Perihal
Perubahan

Pemutakhiran RKP Tahun 2023

174 Perubahan
Infografis Major
Project
Pengelolaan
Terpadu UMKM
(1 dari 3) dalam
halaman III.19



Major Project Pengelolaan Terpadu UMKM (1 dari 6)

Impact/Outcome

- Rasio kredit UMKM terhadap total kredit perbankan meningkat dari 19,89% pada tahun 2019 menjadi 21,44% di tahun 2023 dan 22,00% pada tahun 2024;
- Pertumbuhan wirasaha meningkat dari 1,71% pada tahun 2019 menjadi 2,74% pada tahun 2023 dan 2,90% pada tahun 2024;
- Mendukung kontribusi koperasi terhadap PDB sebesar 5,40% pada tahun 2023 dan 5,50% pada tahun 2024;
- Mendukung kontribusi UMKM terhadap ekspor nonmigas sebesar 16,4% pada tahun 2023 dan 17% pada tahun 2024.

Output MP

- Jumlah kredit UMKM mencapai Rp1.470.716 miliar pada tahun 2023 dan Rp1.589.319 miliar pada tahun 2024;
- Tercetaknya 1.453.731 wirasaha di tahun 2023 dan 1.495.890 wirasaha di tahun 2024 di 10 lokasi MP Pengelolaan Terpadu UMKM (Provinsi Aceh, Jawa Tengah, Nusa Tenggara Timur, Kalimantan Timur, Sulawesi Utara, Sumatera Utara, D.I. Yogyakarta, Bali, Kalimantan Selatan, dan Sulawesi Selatan);
- Terbangunnya 10 rumah produksi bersama/factory sharing;
- Terwujudnya peningkatan kapasitas usaha dan akses pasar untuk 10 koperasi pengelola Rumah Produksi Bersama.



Aceh		Jawa Tengah	
<p>Penyediaan Akses Bahan Baku dan Ruang/Alat Produksi Bersama</p> <p>Indikator</p> <ul style="list-style-type: none"> • Terbangunnya 1 rumah produksi bersama/factory sharing. <p>RO/Proyek</p> <ul style="list-style-type: none"> • Industri Aneka dan IKM Kimia, Sandang, dan Kerajinan yang Mengikuti Program Restrukturisasi Mesin/Peralatan. <p>Kemendag, Kemenperin</p>	<p>Perluasan Akses Pasar dan Kemitrausahaan</p> <p>Indikator</p> <ul style="list-style-type: none"> • Terlaksananya dukungan fasilitasi factory sharing untuk 1 koperasi. <p>RO/Proyek</p> <ul style="list-style-type: none"> • Dukungan Fasilitasi Factory Sharing. <p>Kemen KUKM, Kemen ATR/BPN, Kemeninves/BKPM, Kemendag, Kemenperin, KPPU</p>	<p>Penyediaan Akses Bahan Baku dan Ruang/Alat Produksi Bersama</p> <p>Indikator</p> <ul style="list-style-type: none"> • Terbangunnya 1 rumah produksi bersama/factory sharing. <p>RO/Proyek</p> <ul style="list-style-type: none"> • IKM Pangan, Furnitur dan Bahan Bangunan yang Mengikuti Program Restrukturisasi Mesin/Peralatan. <p>Kemendag, Kemenperin</p>	<p>Perluasan Akses Pasar dan Kemitrausahaan</p> <p>Indikator</p> <ul style="list-style-type: none"> • Terlaksananya dukungan fasilitasi factory sharing untuk 1 koperasi. <p>RO/Proyek</p> <ul style="list-style-type: none"> • Dukungan Fasilitasi Factory Sharing. <p>Kemen KUKM, Kemen ATR/BPN, Kemeninves/BKPM, Kemenkominfo, Kemendag, Kemenperin, KPPU</p>
<p>Kurasi dan Standardisasi Produk</p> <p>Indikator</p> <ul style="list-style-type: none"> • Terlaksananya fasilitasi dan pembinaan standardisasi dan sertifikasi produk untuk 1.358 UMKM. <p>RO/Proyek</p> <ul style="list-style-type: none"> • Usaha Mikro yang mendapat Fasilitasi dan Pembinaan Standardisasi dan Sertifikasi Produk. <p>Kemen KUKM, Kemenag, Kemendag</p>	<p>Penyediaan Akses Pembiayaan</p> <p>Indikator</p> <ul style="list-style-type: none"> • Terlaksananya penyaluran dana bergulir kepada 1 koperasi. <p>RO/Proyek</p> <ul style="list-style-type: none"> • Koperasi Penerima Dana Bergulir dan Fasilitasi Inkubator Wirasaha. <p>Kemen KUKM, Kemendes PDTT</p>	<p>Kurasi dan Standardisasi Produk</p> <p>Indikator</p> <ul style="list-style-type: none"> • Terlaksananya fasilitasi dan pembinaan standardisasi dan sertifikasi produk untuk 1.358 UMKM. <p>RO/Proyek</p> <ul style="list-style-type: none"> • Usaha Mikro yang Mendapat Fasilitasi dan Pembinaan Standardisasi dan Sertifikasi Produk. <p>Kemen KUKM, BSN, Kemenag, Kemendag</p>	<p>Penyediaan Akses Pembiayaan</p> <p>Indikator</p> <ul style="list-style-type: none"> • Terlaksananya penyaluran dana bergulir kepada 1 koperasi. <p>RO/Proyek</p> <ul style="list-style-type: none"> • Koperasi Penerima Dana Bergulir dan Fasilitasi Inkubator Wirasaha. <p>Kemen KUKM, Kemendes PDTT</p>
<p>Pendampingan SDM UMKM</p> <p>Indikator</p> <ul style="list-style-type: none"> • Terlaksananya pelatihan bagi 80 UMKM sektor prioritas. <p>RO/Proyek</p> <ul style="list-style-type: none"> • Usaha Mikro Sektor Prioritas yang menerima Pelatihan. <p>Kemen KUKM, BSN, Kemen ATR/BPN, Kemendes PDTT, Kemnaker, Kemen PPPA, Kemendikbudristek, Kemenperin</p>	<p>Regulasi dan Pendataan UMKM</p> <p>Indikator</p> <ul style="list-style-type: none"> • Terwujudnya sistem informasi terintegrasi data tunggal UMKM. <p>RO/Proyek</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pendataan Lengkap KUMKM. <p>Kemen KUKM, Kemenperin</p>	<p>Pendampingan SDM UMKM</p> <p>Indikator</p> <ul style="list-style-type: none"> • Terlaksananya pelatihan bagi 60 UMKM sektor prioritas. <p>RO/Proyek</p> <ul style="list-style-type: none"> • Usaha Mikro Sektor Prioritas yang menerima Pelatihan. <p>Kemen KUKM, BSN, Kemen ATR/BPN, Kemendes PDTT, Kemnaker, Kemen PPPA, Kemendikbudristek, Kemenperin</p>	<p>Regulasi dan Pendataan UMKM</p> <p>Indikator</p> <ul style="list-style-type: none"> • Terwujudnya sistem informasi terintegrasi data tunggal UMKM. <p>RO/Proyek</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pendataan Lengkap KUMKM. <p>Kemen KUKM, Kemenperin</p>



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

No. Perihal
Perubahan

Permutakhiran RKP Tahun 2023



Impact/Outcome

- Rasio kredit UMKM terhadap total kredit perbankan meningkat dari 19,89% pada tahun 2019 menjadi 21,44% di tahun 2023 dan 22,00% pada tahun 2024;
- Pertumbuhan wirasaha meningkat dari 1,71% pada tahun 2019 menjadi 2,74% pada tahun 2023 dan 2,90% pada tahun 2024;
- Mendukung kontribusi koperasi terhadap PDB sebesar 5,40% pada tahun 2023 dan 5,50% pada tahun 2024;
- Mendukung kontribusi UMKM terhadap ekspor nonmigas sebesar 16,4% pada tahun 2023 dan 17% pada tahun 2024.

Output MP

- Jumlah kredit UMKM mencapai Rp1.470.716 miliar pada tahun 2023 dan Rp1.589.319 miliar pada tahun 2024;
- Tercetaknya 1.453.731 wirasaha di tahun 2023 dan 1.495.890 wirasaha di tahun 2024 di 10 lokasi MP Pengelolaan Terpadu UMKM (Provinsi Aceh, Jawa Tengah, Nusa Tenggara Timur, Kalimantan Timur, Sulawesi Utara, Sumatera Utara, D.I. Yogyakarta, Bali, Kalimantan Selatan, dan Sulawesi Selatan);
- Terbangunnya 10 rumah produksi bersama/factory sharing;
- Terwujudnya peningkatan kapasitas usaha dan akses pasar untuk 10 koperasi pengelola Rumah Produksi Bersama.

Nusa Tenggara Timur

Penyediaan Akses Bahan Baku dan Ruang/Alat Produksi Bersama

Indikator

- Terbangunnya 1 rumah produksi bersama/factory sharing.

RO/Proyek

- IKM Pangan, Furnitur dan Bahan Bangunan yang Mengikuti Program Restrukturisasi Mesin/Peralatan.

Kemendag, Kemenperin

Perluasan Akses Pasar dan Kemitrausahaan

Indikator

- Terlaksananya dukungan fasilitasi factory sharing untuk 1 koperasi.

RO/Proyek

- Dukungan Fasilitasi Factory Sharing.

Kemen KUKM, Kemen ATR/BPN, Kemeninves/BKPM, Kemenkominfo, Kemendag, Kemenperin, KPPU

Kalimantan Timur

Penyediaan Akses Bahan Baku dan Ruang/Alat Produksi Bersama

Indikator

- Terbangunnya 1 rumah produksi bersama/factory sharing.

RO/Proyek

- IKM Pangan, Furnitur dan Bahan Bangunan yang Mengikuti Program Restrukturisasi Mesin/Peralatan.

Kemendag, Kemenperin

Perluasan Akses Pasar dan Kemitrausahaan

Indikator

- Terlaksananya dukungan fasilitasi factory sharing untuk 1 koperasi.

RO/Proyek

- Dukungan Fasilitasi Factory Sharing.

Kemen KUKM, Kemen ATR/BPN, Kemeninves/BKPM, Kemendag, Kemenperin, KPPU

Kurasi dan Standardisasi Produk

Indikator

- Terlaksananya fasilitasi dan pembinaan standarisasi dan sertifikasi produk untuk 1.358 UMKM.

RO/Proyek

- Usaha Mikro yang mendapat Fasilitasi dan Pembinaan Standarisasi dan Sertifikasi Produk.

Kemen KUKM, BSN, Kemenag, Kemendag

Penyediaan Akses Pembiayaan

Indikator

- Terlaksananya penyaluran dana bergulir kepada 1 koperasi.

RO/Proyek

- Koperasi Penerima Dana Bergulir dan Fasilitasi Inkubator Wirasaha.

Kemen KUKM, Kemendes PDTT

Kurasi dan Standardisasi Produk

Indikator

- Terlaksananya fasilitasi dan pembinaan standarisasi dan sertifikasi produk untuk 1.358 UMKM.

RO/Proyek

- Usaha Mikro yang Mendapat Fasilitasi dan Pembinaan Standarisasi dan Sertifikasi Produk.

Kemen KUKM, BSN, Kemenag, Kemendag

Penyediaan Akses Pembiayaan

Indikator

- Terlaksananya penyaluran dana bergulir kepada 1 koperasi.

RO/Proyek

- Koperasi Penerima Dana Bergulir dan Fasilitasi Inkubator Wirasaha.

Kemen KUKM, Kemendes PDTT

Pendampingan SDM UMKM

Indikator

- Terlaksananya pelatihan bagi 60 UMKM sektor prioritas.

RO/Proyek

- Usaha Mikro Sektor Prioritas yang menerima Pelatihan.

Kemen KUKM, BSN, Kemen ATR/BPN, Kemendes PDTT, Kemaker, Kemen PPPA, Kemendikbudristek, Kemenperin

Regulasi dan Pendataan UMKM

Indikator

- Terwujudnya sistem informasi terintegrasi data tunggal UMKM.

RO/Proyek

- Pendataan Lengkap KUMKM.

Kemen KUKM, Kemenperin

Pendampingan SDM UMKM

Indikator

- Terlaksananya pelatihan bagi 60 UMKM sektor prioritas.

RO/Proyek

- Usaha Mikro Sektor Prioritas yang menerima Pelatihan.

Kemen KUKM, BPOM, Kemen ATR/BPN, Kemendes PDTT, Kemaker, Kemen PPPA, Kemendikbudristek, Kemenperin

Regulasi dan Pendataan UMKM

Indikator

- Terwujudnya sistem informasi terintegrasi data tunggal UMKM.

RO/Proyek

- Pendataan Lengkap KUMKM.

Kemen KUKM, Kemenperin



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

No. Perihal
Perubahan

Pemutakhiran RKP Tahun 2023

175 Perubahan
Infografis Major
Project
Pengelolaan
Terpadu UMKM
(2 dari 3) dalam
halaman III.20



Major Project Pengelolaan Terpadu UMKM (3 dari 6)

Impact/Outcome

- Rasio kredit UMKM terhadap total kredit perbankan meningkat dari 19,89% pada tahun 2019 menjadi 21,44% di tahun 2023 dan 22,00% pada tahun 2024;
- Pertumbuhan wirausaha meningkat dari 1,71% pada tahun 2019 menjadi 2,74% pada tahun 2023 dan 2,90% pada tahun 2024;
- Mendukung kontribusi koperasi terhadap PDB sebesar 5,40% pada tahun 2023 dan 5,50% pada tahun 2024;
- Mendukung kontribusi UMKM terhadap ekspor nonmigas sebesar 16,4% pada tahun 2023 dan 17% pada tahun 2024.

Output MP

- Jumlah kredit UMKM mencapai Rp1.470.716 miliar pada tahun 2023 dan Rp1.589.319 miliar pada tahun 2024;
- Tercetaknya 1.453.731 wirausaha di tahun 2023 dan 1.495.890 wirausaha di tahun 2024 di 10 lokasi MP Pengelolaan Terpadu UMKM (Provinsi Aceh, Jawa Tengah, Nusa Tenggara Timur, Kalimantan Timur, Sulawesi Utara, Sumatera Utara, D.I. Yogyakarta, Bali, Kalimantan Selatan, dan Sulawesi Selatan);
- Terbangunnya 10 rumah produksi bersama/factory sharing;
- Terwujudnya peningkatan kapasitas usaha dan akses pasar untuk 10 koperasi pengelola Rumah Produksi Bersama.



Sulawesi Utara

Penyediaan Akses Bahan Baku dan Ruang/Alat Produksi Bersama

Indikator

- Terbangunnya 1 rumah produksi bersama/factory sharing.

RO/Proyek

- Prasarana Pascapanen Tanaman Perkebunan.

Kemendag, Kemenperin, Kementan

Perluasan Akses Pasar dan Kemitrausahaan

Indikator

- Terlaksananya dukungan fasilitasi factory sharing untuk 1 koperasi.

RO/Proyek

- Dukungan Fasilitasi Factory Sharing.

Kemen KUKM, Kemen ATR/BPN, Kemeninves/BKPM, Kemendag, Kemenperin, KPPU



Sumatera Utara

Penyediaan Akses Bahan Baku dan Ruang/Alat Produksi Bersama

Indikator

- Terbangunnya 1 rumah produksi bersama/factory sharing.

RO/Proyek

- UKM/Sentra yang Difasilitasi Pengembangan Factory Sharing.

Kemen KUKM, Kemendag

Perluasan Akses Pasar dan Kemitrausahaan

Indikator

- Terlaksananya dukungan fasilitasi factory sharing untuk 1 koperasi.

RO/Proyek

- Dukungan Fasilitasi Factory Sharing.

Kemen KUKM, Kemen ATR/BPN, Kemeninves/BKPM, Kemenkominfo, Kemendag, KPPU

Kurasi dan Standardisasi Produk

Indikator

- Terlaksananya fasilitasi dan pembinaan standarisasi dan sertifikasi produk untuk 1.358 UMKM.

RO/Proyek

- Usaha Mikro yang Mendapat Fasilitasi dan Pembinaan Standarisasi dan Sertifikasi Produk.

Kemen KUKM, BSN, Kemenag, Kemendag

Penyediaan Akses Pembiayaan

Indikator

- Terlaksananya penyaluran dana bergulir kepada 1 koperasi.

RO/Proyek

- Koperasi Penerima Dana Bergulir dan Fasilitasi Inkubator Wirausaha.

Kemen KUKM, Kemendes PDDT

Kurasi dan Standardisasi Produk

Indikator

- Terlaksananya fasilitasi dan pembinaan standarisasi dan sertifikasi produk untuk 1.358 UMKM.

RO/Proyek

- Usaha Mikro yang Mendapat Fasilitasi dan Pembinaan Standarisasi dan Sertifikasi Produk.

Kemen KUKM, BSN, Kemenag, Kemendag

Penyediaan Akses Pembiayaan

Indikator

- Terlaksananya penyaluran dana bergulir kepada 1 koperasi.

RO/Proyek

- Koperasi Penerima Dana Bergulir dan Fasilitasi Inkubator Wirausaha.

Kemen KUKM, Kemendes PDDT

Pendampingan SDM UMKM

Indikator

- Terlaksananya pelatihan bagi 60 UMKM sektor prioritas.

RO/Proyek

- Usaha Mikro Sektor Prioritas yang menerima Pelatihan.

Kemen KUKM, BPOM, Kemen ATR/BPN, Kemendes PDDT, Kemnaker, Kemen PPPA, Kemendikbudristek, Kemenperin

Regulasi dan Pendataan UMKM

Indikator

- Terwujudnya sistem informasi terintegrasi data tunggal UMKM.

RO/Proyek

- Pendataan Lengkap KUMKM.

Kemen KUKM, Kemenperin

Pendampingan SDM UMKM

Indikator

- Terlaksananya pelatihan bagi 60 UMKM sektor prioritas.

RO/Proyek

- Usaha Mikro Sektor Prioritas yang menerima Pelatihan.

Kemen KUKM, BPOM, BSN, Kemen ATR/BPN, Kemendes PDDT, Kemnaker, Kemen PPPA, Kemendikbudristek, Kemenperin

Regulasi dan Pendataan UMKM

Indikator

- Terwujudnya sistem informasi terintegrasi data tunggal UMKM.

RO/Proyek

- Pendataan Lengkap KUMKM.

Kemen KUKM



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

No. Perihal
Perubahan

Pemutakhiran RKP Tahun 2023



Major Project Pengelolaan Terpadu UMKM (4 dari 6)

Impact/Outcome

- Rasio kredit UMKM terhadap total kredit perbankan meningkat dari 19,89% pada tahun 2019 menjadi 21,44% di tahun 2023 dan 22,00% pada tahun 2024;
- Pertumbuhan wirausaha meningkat dari 1,71% pada tahun 2019 menjadi 2,74% pada tahun 2023 dan 2,90% pada tahun 2024;
- Mendukung kontribusi koperasi terhadap PDB sebesar 5,40% pada tahun 2023 dan 5,50% pada tahun 2024;
- Mendukung kontribusi UMKM terhadap ekspor nonmigas sebesar 16,4% pada tahun 2023 dan 17% pada tahun 2024.

Output MP

- Jumlah kredit UMKM mencapai Rp1.470.716 miliar pada tahun 2023 dan Rp1.589.319 miliar pada tahun 2024;
- Tercetaknya 1.453.731 wirausaha di tahun 2023 dan 1.495.890 wirausaha di tahun 2024 di 10 lokasi MP Pengelolaan Terpadu UMKM (Provinsi Aceh, Jawa Tengah, Nusa Tenggara Timur, Kalimantan Timur, Sulawesi Utara, Sumatera Utara, D.I. Yogyakarta, Bali, Kalimantan Selatan, dan Sulawesi Selatan);
- Terbangunnya 10 rumah produksi bersama/factory sharing;
- Terwujudnya peningkatan kapasitas usaha dan akses pasar untuk 10 koperasi pengelola Rumah Produksi Bersama.



DI Yogyakarta

Penyediaan Akses Bahan Baku dan Ruang/Alat Produksi Bersama

Indikator

- Terbangunnya 1 rumah produksi bersama/factory sharing.

RO/Proyek

- UKM/Sentra yang Difasilitasi Pengembangan Factory Sharing.

Kemen KUKM, Kemendag

Penyediaan Akses Pembiayaan

Indikator

- Terlaksananya penyaluran dana bergulir kepada 1 koperasi.

RO/Proyek

- Koperasi Penerima Dana Bergulir dan Fasilitas Inkubator Wirausaha.

Kemen KUKM, Kemendes PDTT

Kurasi dan Standardisasi Produk

Indikator

- Terlaksananya fasilitasi dan pembinaan standarisasi dan sertifikasi produk untuk 1.358 UMKM.

RO/Proyek

- Usaha Mikro yang mendapat Fasilitasi dan Pembinaan Standarisasi dan Sertifikasi Produk.

Kemen KUKM, BSN, Kemenag, Kemendag

Regulasi dan Pendataan UMKM

Indikator

- Terwujudnya sistem informasi terintegrasi data tunggal UMKM.

RO/Proyek

- Sistem Informasi Terintegrasi Data Tunggal UMKM.

Kemen KUKM

Perluasan Akses Pasar dan Kemitrausahaan

Indikator

- Terlaksananya dukungan fasilitasi factory sharing untuk 1 koperasi.

RO/Proyek

- Dukungan Fasilitasi Factory Sharing.

Kemen KUKM, Kemen ATR/BPN, Kemeninves/BKPM, Kemendag, KPPU

Pendampingan SDM UMKM

Indikator

- Terlaksananya pelatihan bagi 60 UMKM sektor prioritas.

RO/Proyek

- Usaha Mikro Sektor Prioritas yang menerima Pelatihan.

Kemen KUKM, BPOM, BSN, Kemen ATR/BPN, Kemendes PDTT, Kemnaker, Kemen PPPA, Kemendikbudristek, Kemendag, Kemenperin



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

No. Perihal Perubahan Pemutakhiran RKP Tahun 2023

176 Perubahan Infografis Major Project Pengelolaan Terpadu UMKM (3 dari 3) dalam halaman III.21



Major Project Pengelolaan Terpadu UMKM (5 dari 6)

Impact/Outcome

- Rasio kredit UMKM terhadap total kredit perbankan meningkat dari 19,89% pada tahun 2019 menjadi 21,44% di tahun 2023 dan 22,00% pada tahun 2024;
- Pertumbuhan wirausaha meningkat dari 1,71% pada tahun 2019 menjadi 2,74% pada tahun 2023 dan 2,90% pada tahun 2024;
- Mendukung kontribusi koperasi terhadap PDB sebesar 5,40% pada tahun 2023 dan 5,50% pada tahun 2024;
- Mendukung kontribusi UMKM terhadap ekspor nonmigas sebesar 16,4% pada tahun 2023 dan 17% pada tahun 2024.

Output MP

- Jumlah kredit UMKM mencapai Rp1.470.716 miliar pada tahun 2023 dan Rp1.589.319 miliar pada tahun 2024;
- Tercetaknya 1.453.731 wirausaha di tahun 2023 dan 1.495.890 wirausaha di tahun 2024 di 10 lokasi MP Pengelolaan Terpadu UMKM (Provinsi Aceh, Jawa Tengah, Nusa Tenggara Timur, Kalimantan Timur, Sulawesi Utara, Sumatera Utara, D.I. Yogyakarta, Bali, Kalimantan Selatan, dan Sulawesi Selatan);
- Terbangunnya 10 rumah produksi bersama/factory sharing;
- Terwujudnya peningkatan kapasitas usaha dan akses pasar untuk 10 koperasi pengelola Rumah Produksi Bersama.



Bali		Kalimantan Selatan	
<p>Penyediaan Akses Bahan Baku dan Ruang/Alat Produksi Bersama</p> <p>Indikator</p> <ul style="list-style-type: none"> • Terbangunnya 1 rumah produksi bersama/factory sharing. <p>RO/Proyek</p> <ul style="list-style-type: none"> • UKM/Sentra yang Difasilitasi Pengembangan Factory Sharing. <p>Kemen KUKM, Kemendag, Kementan</p>	<p>Penyediaan Akses Pembiayaan</p> <p>Indikator</p> <ul style="list-style-type: none"> • Terlaksananya penyaluran dana bergulir kepada 1 koperasi. <p>RO/Proyek</p> <ul style="list-style-type: none"> • Koperasi Penerima Dana Bergulir dan Fasilitas Inkubator Wirausaha. <p>Kemen KUKM, Kemendes PDDT</p>	<p>Penyediaan Akses Bahan Baku dan Ruang/Alat Produksi Bersama</p> <p>Indikator</p> <ul style="list-style-type: none"> • Terbangunnya 1 rumah produksi bersama/factory sharing. <p>RO/Proyek</p> <ul style="list-style-type: none"> • UKM/Sentra yang Difasilitasi Pengembangan Factory Sharing. <p>Kemen KUKM, Kemendag</p>	<p>Penyediaan Akses Pembiayaan</p> <p>Indikator</p> <ul style="list-style-type: none"> • Terlaksananya penyaluran dana bergulir kepada 1 koperasi. <p>RO/Proyek</p> <ul style="list-style-type: none"> • Koperasi Penerima Dana Bergulir dan Fasilitas Inkubator Wirausaha. <p>Kemen KUKM, Kemendes PDDT</p>
<p>Kurasi dan Standardisasi Produk</p> <p>Indikator</p> <ul style="list-style-type: none"> • Terlaksananya fasilitasi dan pembinaan standarisasi dan sertifikasi produk untuk 1.358 UMKM. <p>RO/Proyek</p> <ul style="list-style-type: none"> • Usaha Mikro yang Mendapat Fasilitasi dan Pembinaan Standarisasi dan Sertifikasi Produk. <p>Kemen KUKM, BSN, Kemenag, Kemendag</p>	<p>Regulasi dan Pendataan UMKM</p> <p>Indikator</p> <ul style="list-style-type: none"> • Terwujudnya sistem informasi terintegrasi data tunggal UMKM. <p>RO/Proyek</p> <ul style="list-style-type: none"> • Sistem Informasi Terintegrasi Data Tunggal UMKM. <p>Kemen KUKM</p>	<p>Kurasi dan Standardisasi Produk</p> <p>Indikator</p> <ul style="list-style-type: none"> • Terlaksananya fasilitasi dan pembinaan standarisasi dan sertifikasi produk untuk 1.358 UMKM. <p>RO/Proyek</p> <ul style="list-style-type: none"> • Usaha Mikro yang mendapat Fasilitasi dan Pembinaan Standarisasi dan Sertifikasi Produk. <p>Kemen KUKM, BSN, Kemenag, Kemendag</p>	<p>Regulasi dan Pendataan UMKM</p> <p>Indikator</p> <ul style="list-style-type: none"> • Terwujudnya sistem informasi terintegrasi data tunggal UMKM. <p>RO/Proyek</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pendataan Lengkap KUMKM. <p>Kemen KUKM</p>
<p>Perluasan Akses Pasar dan Kemitrausahaan</p> <p>Indikator</p> <ul style="list-style-type: none"> • Terlaksananya dukungan fasilitasi factory sharing untuk 1 koperasi. <p>RO/Proyek</p> <ul style="list-style-type: none"> • Dukungan Fasilitasi Factory Sharing. <p>Kemen KUKM, Kemen ATR/BPN, Kemeninves/BKPM, Kemendag, KPPU</p>	<p>Pendampingan SDM UMKM</p> <p>Indikator</p> <ul style="list-style-type: none"> • Terlaksananya pelatihan bagi 60 UMKM sektor prioritas. <p>RO/Proyek</p> <ul style="list-style-type: none"> • Usaha Mikro Sektor Prioritas yang menerima Pelatihan. <p>Kemen KUKM, BPOM, BSN, Kemen ATR/BPN, Kemendes PDDT, Kemnaker, Kemen PPPA, Kemendikbudristek, Kemenperin</p>	<p>Perluasan Akses Pasar dan Kemitrausahaan</p> <p>Indikator</p> <ul style="list-style-type: none"> • Terlaksananya dukungan fasilitasi factory sharing untuk 1 koperasi. <p>RO/Proyek</p> <ul style="list-style-type: none"> • Dukungan Fasilitasi Factory Sharing. <p>Kemen KUKM, Kemen ATR/BPN, Kemeninves/BKPM, Kemendag, KPPU</p>	<p>Pendampingan SDM UMKM</p> <p>Indikator</p> <ul style="list-style-type: none"> • Terlaksananya pelatihan bagi 60 UMKM sektor prioritas. <p>RO/Proyek</p> <ul style="list-style-type: none"> • Usaha Mikro Sektor Prioritas yang menerima Pelatihan. <p>Kemen KUKM, BPOM, BSN, Kemen ATR/BPN, Kemendes PDDT, Kemnaker, Kemen PPPA, Kemendikbudristek, Kemenperin</p>



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

No. Perihal
Perubahan

Pemutakhiran RKP Tahun 2023



Major Project Pengelolaan Terpadu UMKM (6 dari 6)

Impact/Outcome

- Rasio kredit UMKM terhadap total kredit perbankan meningkat dari 19,89% pada tahun 2019 menjadi 21,44% di tahun 2023 dan 22,00% pada tahun 2024;
- Pertumbuhan wirausaha meningkat dari 1,71% pada tahun 2019 menjadi 2,74% pada tahun 2023 dan 2,90% pada tahun 2024;
- Mendukung kontribusi koperasi terhadap PDB sebesar 5,40% pada tahun 2023 dan 5,50% pada tahun 2024;
- Mendukung kontribusi UMKM terhadap ekspor nonmigas sebesar 16,4% pada tahun 2023 dan 17% pada tahun 2024.

Output MP

- Jumlah kredit UMKM mencapai Rp1.470.716 miliar pada tahun 2023 dan Rp1.589.319 miliar pada tahun 2024;
- Tercetaknya 1.453.731 wirausaha di tahun 2023 dan 1.495.890 wirausaha di tahun 2024 di 10 lokasi MP Pengelolaan Terpadu UMKM (Provinsi Aceh, Jawa Tengah, Nusa Tenggara Timur, Kalimantan Timur, Sulawesi Utara, Sumatera Utara, D.I. Yogyakarta, Bali, Kalimantan Selatan, dan Sulawesi Selatan);
- Terbangunnya 10 rumah produksi bersama/factory sharing;
- Terwujudnya peningkatan kapasitas usaha dan akses pasar untuk 10 koperasi pengelola Rumah Produksi Bersama.



Sulawesi Selatan

Penyediaan Akses Bahan Baku dan Ruang/Alat Produksi Bersama

Indikator

- Terbangunnya 1 rumah produksi bersama/factory sharing.

RO/Proyek

- UKM/Sentra Yang difasilitasi Pengembangan Factory Sharing.

Kemen KUKM, Kemen KP, Kemendag

Perluasan Akses Pasar dan Kemitrausahaan

Indikator

- Terlaksananya dukungan fasilitasi factory sharing untuk 1 koperasi.

RO/Proyek

- Dukungan Fasilitasi Factory Sharing.

Kemen KUKM, Kemen ATR/BPN, Kemeninves/BKPM, Kemen PUPR, Kemendag, KPPU

Kurasi dan Standardisasi Produk

Indikator

- Terlaksananya fasilitasi dan pembinaan standardisasi dan sertifikasi produk untuk 1.358 UMKM.

RO/Proyek

- Usaha Mikro yang mendapat Fasilitasi dan Pembinaan Standardisasi dan Sertifikasi Produk.

Kemen KUKM, BSN, Kemenag, Kemendag

Penyediaan Akses Pembiayaan

Indikator

- Terlaksananya penyaluran dana bergulir kepada 1 koperasi.

RO/Proyek

- Koperasi Penerima Dana Bergulir dan Fasilitasi Inkubator Wirausaha.

Kemen KUKM, Kemendes PDTT

Pendampingan SDM UMKM

Indikator

- Terlaksananya pelatihan bagi 60 UMKM sektor prioritas.

RO/Proyek

- Usaha Mikro Sektor Prioritas yang menerima Pelatihan;
- Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) - Tematik Penguatan Destinasi Pariwisata Proritas (DAK).

Kemen KUKM, BPOM, BSN, Pemda, Kemen ATR/BPN, Kemendes PDTT, Kemnaker, Kemen PPPA, Kemendikbudristek, Kemenperin

Regulasi dan Pendataan UMKM

Indikator

- Terwujudnya sistem informasi terintegrasi data tunggal UMKM.

RO/Proyek

- Pendataan Lengkap KUMKM.

Kemen KUKM



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

No.	Perihal Perubahan	Pemutakhiran RKP Tahun 2023
-----	-------------------	-----------------------------

177 Perubahan Infografis Major Project Food Estate (Kawasan Sentra Produksi Pangan) (1 dari 2) dalam halaman III.22



Impact/Outcome

- Meningkatnya ketersediaan beras (2023: 45,4 juta ton, 2024: 46,84 juta ton nasional);
- Produksi Jagung (2023: 34,12 juta ton, 2024: 35,27 juta ton nasional);
- Peningkatan Nilai Tukar Petani (baseline 2020: 101,65; 2023: 105 – 107, 2024: 105, nasional);
- Peningkatan Nilai Tambah Tenaga Kerja Pertanian (2023: Rp 57 juta/orang/tahun, 2024: Rp59,8 juta/orang/tahun, nasional);
- Tercapainya produksi padi 356,9 ribu ton GKG (2023) di Kalimantan Tengah (2024: 501,3 ribu ton GKG);
- Meningkatnya luas tanam padi 38.000 ha pada tahun 2023 dan terbangunnya Kawasan Food Estate seluas 148.000 ha pada tahun 2024 di Kalimantan Tengah.

Output MP

- Meningkatnya produktivitas 5,3% per tahun (pemenuhan target ditujukan khusus di lokus Kalimantan Tengah);
- Meningkatnya indeks pertanaman (IP) 5% per tahun (pemenuhan target ditujukan khusus di lokus Kalimantan Tengah);
- Terbangunnya Kawasan Food Estate seluas 148.000 ha pada tahun 2024 (Kalimantan Tengah).



Kalimantan Tengah

Geospasial

Indikator

- Tersedianya kawasan untuk Food Estate di Kalimantan Tengah.

RO/Proyek

- Peta Tematik Pertanahan dan Ruang;
- SHAT Non Sistematis Kategori 3;
- PBT Non Sistematis Kategori 3;
- Jembatan yang dikembangkan di Kawasan Transmigrasi Mendukung Ketahanan Pangan;
- Lahan yang dibuka untuk Pembangunan Kawasan Transmigrasi Mendukung Ketahanan Pangan;
- Jembatan yang dibangun di Kawasan Transmigrasi Mendukung Ketahanan Pangan;
- Jalan Non- Status yang dikembangkan di Kawasan Transmigrasi Mendukung Ketahanan Pangan;
- Jalan - Tematik Pengembangan Food Estate;
- Bantuan Catu Pangan untuk Transmigran dalam Mendukung Ketahanan Pangan (Food Estate)*;
- Bantuan Sarana Produksi Pertanian di Satuan Permukiman dan Pusat SKP Pada Kawasan Transmigrasi yang Mendukung Food Estate*;
- Irigasi - Tematik Pengembangan Food Estate;
- Pertanian - Tematik Pengembangan Food Estate;
- Kehutanan - Tematik Pengembangan Food Estate.

Kemen ATR/BPN, Kemendes PDTT, Pemda

Off Farm

Indikator

- Meningkatnya Nilai Tambah Pertanian di Kalimantan Tengah.

RO/Proyek

- Sarana Pascapanen Tanaman Perkebunan;
- Prasarana Pascapanen Tanaman Perkebunan.

Kementan

Sumatera Utara

Geospasial

Indikator

- Tersedianya kawasan untuk Food Estate di Sumatera Utara.

RO/Proyek

- Peta Tematik Pertanahan dan Ruang;
- SHAT Non Sistematis Kategori 3;
- PBT Non Sistematis Kategori 3;
- Jalan - Tematik Pengembangan Food Estate;
- Irigasi - Tematik Pengembangan Food Estate;
- Pertanian - Tematik Pengembangan Food Estate;
- Kehutanan - Tematik Pengembangan Food Estate.

Kemen ATR/BPN, Pemda

On Farm

Indikator

- Meningkatnya produktivitas pertanian di kawasan Food Estate Sumatera Utara.

RO/Proyek

- Areal Pengendalian OPT Hortikultura;
- Optimasi Lahan*.

Kementan

Keterangan:
*): Proyek Berstatus PSN.



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

No. Perihal
Perubahan

Pemutakhiran RKP Tahun 2023



Major Project Food Estate (Kawasan Sentra Produksi Pangan) (2 dari 3)

Impact/Outcome

- Meningkatnya ketersediaan beras (2023: 45,4 juta ton, 2024: 46,84 juta ton nasional);
- Produksi Jagung (2023: 34,12 juta ton, 2024: 35,27 juta ton nasional);
- Peningkatan Nilai Tukar Petani (baseline 2020: 101,65; 2023: 105 – 107, 2024: 105, nasional);
- Peningkatan Nilai Tambah Tenaga Kerja Pertanian (2023: Rp 57 juta/orang/tahun, 2024: Rp59,8 juta/orang/tahun, nasional);
- Tercapainya produksi padi 356,9 ribu ton GKG (2023) di Kalimantan Tengah (2024: 501,3 ribu ton GKG);
- Meningkatnya luas tanam padi 38.000 ha pada tahun 2023 dan terbangunnya Kawasan *Food Estate* seluas 148.000 ha pada tahun 2024 di Kalimantan Tengah.

Output MP

- Meningkatnya produktivitas 5,3% per tahun (pemenuhan target ditujukan khusus di lokus Kalimantan Tengah);
- Meningkatnya indeks pertanaman (IP) 5% per tahun (pemenuhan target ditujukan khusus di lokus Kalimantan Tengah);
- Terbangunnya Kawasan *Food Estate* seluas 148.000 ha pada tahun 2024 (Kalimantan Tengah).



Sumatera Selatan

Geospasial

Indikator

- Tersedianya kawasan untuk *Food Estate* di Sumatera Selatan.

RO/Proyek

- Peta Tematik Pertanahan dan Ruang;
- Irigasi - Tematik Pengembangan *Food Estate*;
- Pertanian - Tematik Pengembangan *Food Estate*;

Kemen ATR/BPN, Pemda

On Farm

Indikator

- Meningkatnya produktivitas pertanian di kawasan *Food Estate* Sumatera Selatan.

RO/Proyek

- Kawasan Padi;
- Benih sumber padi yang dihasilkan;
- Areal Pengendalian OPT Tanaman Pangan^{a)};
- Areal Penanganan DPI.

Kementan

Keterangan:

^{a)} : Proyek Berstatus PSN.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

No.	Perihal Perubahan	Pemutakhiran RKP Tahun 2023
-----	-------------------	-----------------------------

178 Perubahan Infografis *Major Project Food Estate* (Kawasan Sentra Produksi Pangan) (2 dari 2) dalam halaman III.23

Impact/Outcome

- Meningkatnya ketersediaan beras (2023: 45,4 juta ton, 2024: 46,84 juta ton nasional);
- Produksi Jagung (2023: 34,12 juta ton, 2024: 35,27 juta ton nasional);
- Peningkatan Nilai Tukar Petani (baseline 2020: 101,65; 2023: 105 – 107, 2024: 105, nasional);
- Peningkatan Nilai Tambah Tenaga Kerja Pertanian (2023: Rp 57 juta/orang/tahun, 2024: Rp59,8 juta/orang/tahun, nasional);
- Tercapainya produksi padi 356,9 ribu ton GKG (2023) di Kalimantan Tengah (2024: 501,3 ribu ton GKG);
- Meningkatnya luas tanam padi 38.000 ha pada tahun 2023 dan terbangunnya Kawasan *Food Estate* seluas 148.000 ha pada tahun 2024 di Kalimantan Tengah.

Output MP

- Meningkatnya produktivitas 5,3% per tahun (pemenuhan target ditujukan khusus di lokus Kalimantan Tengah);
- Meningkatnya indeks pertanaman (IP) 5% per tahun (pemenuhan target ditujukan khusus di lokus Kalimantan Tengah);
- Terbangunnya Kawasan *Food Estate* seluas 148.000 ha pada tahun 2024 (Kalimantan Tengah).



<p>Nusa Tenggara Timur</p> <p>Geospasial</p> <p>Indikator</p> <ul style="list-style-type: none"> • Tersedianya kawasan untuk <i>Food Estate</i> di Nusa Tenggara Timur. <p>RO/Proyek</p> <ul style="list-style-type: none"> • Peta Tematik Pertanahan dan Ruang; • SHAT Non Sistematis Kategori 1; • PBT Non Sistematis Kategori 1; • Jalan - Tematik Pengembangan <i>Food Estate</i>; • Irigasi - Tematik Pengembangan <i>Food Estate</i>; • Pertanian - Tematik Pengembangan <i>Food Estate</i>; • Kehutanan - Tematik Pengembangan <i>Food Estate</i>. <p>Kemen ATR/BPN, Pemda</p>	<p>Papua</p> <p>Geospasial</p> <p>Indikator</p> <ul style="list-style-type: none"> • Tersedianya kawasan untuk <i>Food Estate</i> di Papua. <p>RO/Proyek</p> <ul style="list-style-type: none"> • Peta Tematik Pertanahan dan Ruang; • Jalan - Tematik Pengembangan <i>Food Estate</i>; • Irigasi - Tematik Pengembangan <i>Food Estate</i>; • Pertanian - Tematik Pengembangan <i>Food Estate</i>; • Kehutanan - Tematik Pengembangan <i>Food Estate</i>. <p>Kemen ATR/BPN, Pemda</p>
<p>On Farm</p> <p>Indikator</p> <ul style="list-style-type: none"> • Meningkatnya produktivitas pertanian di kawasan <i>Food Estate</i> Nusa Tenggara Timur. <p>RO/Proyek</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kawasan Padi; • Kawasan Jagung; • Benih sumber padi yang dihasilkan; • Benih sumber jagung yang dihasilkan; • Areal Pengendalian OPT Tanaman Pangan^{*)}; • Areal Penanganan DPI; • Kawasan Kelapa^{*)}. <p>Kementan</p>	<p>On Farm</p> <p>Indikator</p> <ul style="list-style-type: none"> • Meningkatnya Produktivitas Pertanian di kawasan <i>Food Estate</i> Papua. <p>RO/Proyek</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kawasan Padi; • Benih sumber padi yang dihasilkan; • Areal Pengendalian OPT Tanaman Pangan^{*)}; • Areal Penanganan DPI; • Optimasi Lahan^{*)}; • Kawasan Kelapa. <p>Kementan</p>

Keterangan:
*) : Proyek Berstatus PSN.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

No. Perihal
Perubahan

Pemutakhiran RKP Tahun 2023

179 Perubahan
Infografis *Major
Project
Destinasi
Pariwisata
Prioritas (1 dari
2) dalam
halaman III.24*



Major Project Destinasi Pariwisata Prioritas (1 dari 3)

Impact/Outcome

- Meningkatnya kontribusi sektor pariwisata dalam PDB menjadi 4,10% (2023);
- Meningkatnya devisa sektor pariwisata sebesar 2,07-5,95 miliar US\$ (2023);
- Meningkatnya jumlah wisatawan nusantara menjadi 1.200-1.400 juta perjalanan (2023);
- Meningkatnya jumlah wisatawan mancanegara menjadi 3,5-7,4 juta kunjungan (2023);
- Meningkatnya jumlah tenaga kerja pariwisata 21,93 juta orang (2023);
- Terbangunnya infrastruktur dasar dan aksesibilitas kunci untuk 5 Destinasi Pariwisata Super Prioritas (DPSP); dan
- Peningkatan proporsi kunjungan wisatawan di 5 DPSP terhadap total kunjungan wisatawan menjadi sebesar 32%.

Output MP

- Meningkatnya kontribusi PDB sektor pariwisata 4,50% tahun 2024;
- Meningkatnya devisa sektor pariwisata sebesar 7,38-13,08 miliar US\$ tahun 2024;
- Meningkatnya jumlah wisatawan nusantara menjadi 1.250-1.500 juta perjalanan pada tahun 2024;
- Meningkatnya jumlah wisatawan mancanegara menjadi 9,5-14,3 juta kunjungan pada tahun 2024;
- Meningkatnya jumlah tenaga kerja pariwisata 22,08 juta orang pada tahun 2024.



<p>Perintisan Destinasi Pariwisata</p> <p>Pengembangan Atraksi (Alam, Budaya, Buatan)</p> <p>Indikator</p> <ul style="list-style-type: none"> • Terlaksananya pengembangan diversifikasi atraksi mendukung DPP. <p>RO/Proyek</p> <ul style="list-style-type: none"> • Destinasi Wisata Alam Prioritas, Wisata Alam <i>Science, Academic, Voluntary, Education</i> yang Dikembangkan^{a)}; • Warisan Budaya yang Dilindungi; • Sarana Prasarana Wisata Bahari^{a)}. <p>Kemendag, Kemen KP, Kemen LHK, Kemenpora, Kemendikbudristek, Pemda</p>	<p>Pembangunan Jalan di DPP</p> <p>Pembangunan Sarana Prasarana Konektivitas Jalan, Darat, dan KA</p> <p>Indikator</p> <ul style="list-style-type: none"> • Terbangunnya aksesibilitas darat menuju kawasan DPP. <p>RO/Proyek</p> <ul style="list-style-type: none"> • Peningkatan Jalur KA lintas Kisanan-Rantau Prapat Tahap I (Kisanan-Mambangmuda); • Reaktivasi Jalur Kereta Api Antara Stasiun Semarang Tawang-Pelabuhan Tanjung Mas; • Pembangunan Jalan Tol Solo - Yogyakarta - Kulonprogo^{a)}; • Pembangunan Jalan Tol Yogyakarta - Bawen^{a)}. <p>Kemenhub, BUMN, Pemda</p>	<p>Pembangunan Bandara dan Pelabuhan</p> <p>Pembangunan Sarana Prasarana Konektivitas Laut</p> <p>Indikator</p> <ul style="list-style-type: none"> • Terbangunnya aksesibilitas laut menuju kawasan DPP. <p>RO/Proyek</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pembangunan Pelabuhan Penyeberangan Salawati Kab. Raja Ampat Tahap II - SBSN; • Pembangunan Pelabuhan Penyeberangan Batanta Kab. Raja Ampat Tahap II - SBSN; • Pembangunan Pelabuhan Penyeberangan Teluk dalam Tahap V; • Pemenuhan Kapal Pemburu Cepat (PN). <p>Kemenhub, POLRI</p>
--	---	--

Keterangan:
^{a)} : Proyek Berstatus PSN.

Pembangunan Sarana Prasarana Konektivitas Udara

Indikator

- Terbangunnya aksesibilitas udara menuju kawasan DPP.

RO/Proyek

- Pengembangan Bandar Udara DEO Sorong, Papua Barat - PN;
- Pengembangan Bandar Udara Matahora - PN;
- Pengembangan Bandar Udara Morotai - PN.

Kemenhub



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

No. Perihal
Perubahan

Pemutakhiran RKP Tahun 2023

180 Perubahan
Infografis *Major
Project*
Destinasi
Pariwisata
Prioritas (2 dari
2) dalam
halaman III.25



Major Project Destinasi Pariwisata Prioritas (2 dari 3)

Impact/Outcome

- Meningkatnya kontribusi sektor pariwisata dalam PDB menjadi 4,10% (2023);
- Meningkatnya devisa sektor pariwisata sebesar 2,07-5,95 miliar US\$ (2023);
- Meningkatnya jumlah wisatawan nusantara menjadi 1.200-1.400 juta perjalanan (2023);
- Meningkatnya jumlah wisatawan mancanegara menjadi 3,5-7,4 juta kunjungan (2023);
- Meningkatnya jumlah tenaga kerja pariwisata 21,93 juta orang (2023);
- Terbangunnya infrastruktur dasar dan aksesibilitas kunci untuk 5 Destinasi Pariwisata Super Prioritas (DPSP); dan
- Peningkatan proporsi kunjungan wisatawan di 5 DPSP terhadap total kunjungan wisatawan menjadi sebesar 32%.

Output MP

- Meningkatnya kontribusi PDB sektor pariwisata 4,50% tahun 2024;
- Meningkatnya devisa sektor pariwisata sebesar 7,38-13,08 miliar US\$ tahun 2024;
- Meningkatnya jumlah wisatawan nusantara menjadi 1.250-1.500 juta perjalanan pada tahun 2024;
- Meningkatnya jumlah wisatawan mancanegara menjadi 9,5-14,3 juta kunjungan pada tahun 2024;
- Meningkatnya jumlah tenaga kerja pariwisata 22,08 juta orang pada tahun 2024.



**Pembangunan Desa Wisata
dan Fasilitas BUMDes**

**Pengembangan Desa dan BUMDes
Berbasis Pariwisata**

Indikator

- Terlaksananya 59 kegiatan pengembangan kepariwisataan berbasis desa wisata.

RO/Proyek

- Sarana Prasarana Desa Wisata yang Dibangun untuk Mendukung Destinasi Pariwisata^{a)};
- Desa Wisata di Destinasi Pariwisata di Wilayah Destinasi I yang dikembangkan^{a)};
- Desa Wisata di Wilayah Destinasi II yang dikembangkan.

Kemendes PDTT, Kemenparekraf



**Pembangunan Amenitas
Kawasan Pariwisata**

Pengembangan Amenitas Pariwisata

Indikator

- Terbangunnya sarana dan prasarana amenities pariwisata yang memenuhi standar sebanyak 5 unit di kawasan Badan Otorita Pariwisata.

RO/Proyek

- Amenitas Wisata yang Dibangun/dikembangkan.

Kemendes PDTT, Kemenparekraf

Keterangan:

^{a)} : Proyek Berstatus PSN.



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

No. Perihal
Perubahan

Pemutakhiran RKP Tahun 2023



Major Project Destinasi Pariwisata Prioritas (3 dari 3)

Impact/Outcome

- Meningkatnya kontribusi sektor pariwisata dalam PDB menjadi 4,10% (2023);
- Meningkatnya devisa sektor pariwisata sebesar 2,07-5,95 miliar US\$ (2023);
- Meningkatnya jumlah wisatawan nusantara menjadi 1.200-1.400 juta perjalanan (2023);
- Meningkatnya jumlah wisatawan mancanegara menjadi 3,5-7,4 juta kunjungan (2023);
- Meningkatnya jumlah tenaga kerja pariwisata 21,93 juta orang (2023);
- Terbangunnya infrastruktur dasar dan aksesibilitas kunci untuk 5 Destinasi Pariwisata Super Prioritas (DPSP); dan
- Peningkatan proporsi kunjungan wisatawan di 5 DPSP terhadap total kunjungan wisatawan menjadi sebesar 32%.

Output MP

- Meningkatnya kontribusi PDB sektor pariwisata 4,50% tahun 2024;
- Meningkatnya devisa sektor pariwisata sebesar 7,38-13,08 miliar US\$ tahun 2024;
- Meningkatnya jumlah wisatawan nusantara menjadi 1.250-1.500 juta perjalanan pada tahun 2024;
- Meningkatnya jumlah wisatawan mancanegara menjadi 9,5-14,3 juta kunjungan pada tahun 2024;
- Meningkatnya jumlah tenaga kerja pariwisata 22,08 juta orang pada tahun 2024.



**Pembangunan dalam
Wilayah dan Kawasan**

Pengembangan Infrastruktur Wilayah

Indikator

- Terlaksananya penataan infrastruktur yang mendukung kawasan pariwisata.

RO/Proyek

- *Be Creative District (BCD)* yang Dikembangkan;
- Penataan Kawasan Destinasi Wisata Danau Toba, Borobudur, Wakatobi, dan Bromo-Tengger-Semeru;
- Pengembangan Kawasan Pariwisata TanaMori;
- Warisan Geologi dan Geopark Nasional yang Ditetapkan;
- Kabupaten/Kota Kreatif yang Dikembangkan;
- Akses Internet;
- Amenitas dan Aksesibilitas yang Dikembangkan di Kawasan Otoritatif Badan Otorita Danau Toba, Badan Otorita Borobudur, dan Badan Otorita Labuan Bajo Flores*.

Kemen ESDM, Kemenkominfo
Kemenparekraf/Badan Pariwisata dan
Ekonomi Kreatif, Kemen PUPR, POLRI,
BUMN, Swasta, Pemda

**Pengembangan Usaha Pariwisata
dan Ekonomi Kreatif**

Indikator

- Terlaksananya 27 kegiatan promosi pengembangan usaha pariwisata dan ekonomi kreatif di 3 kawasan Badan Otorita Pariwisata.

RO/Proyek

- Produk Wisata dan Kegiatan (Events) di Kawasan Badan Otorita Danau Toba, Badan Otorita Borobudur dan Badan Otorita Labuan Bajo Flores yang Dipromosi dan Dipublikasikan;
- Bahan Rumusan Skema Insentif bagi Industri kreatif Kuliner, Kriya, Desain Interior, Arsitektur, Desain Komunikasi Visual, Desain Produk dan Fesyen;
- Industri Kecil dan Menengah serta Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) - Tematik Penguatan Destinasi Pariwisata Prioritas;
- Usaha Mikro Sektor Prioritas yang menerima Pelatihan.

Kemenparekraf, Kemen KUKM, Pemda

**Peningkatan Kapasitas SDM Pariwisata
dan Ekonomi Kreatif**

Indikator

- Terlaksananya pengembangan dan peningkatan kapasitas SDP pariwisata dan ekonomi kreatif untuk 32 UMKM di 3 kawasan Badan Otorita Pariwisata.

RO/Proyek

- Sertifikasi Kompetensi Tenaga Kerja;
- Standardisasi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Anak dalam PHAPL yang Ramah Anak.

Kemenparekraf, Kemenaker, Kemen PPA,
Kemen LHK

**Penguatan Kelembagaan, Regulasi,
Investasi, dan Pemasaran**

Indikator

- Terbentuknya peraturan presiden untuk dokumen ITMP mendukung DPP.

RO/Proyek

- *Investment Project Ready to Offer (IPRO)* pada Destinasi Pariwisata Prioritas;
- Rencana Induk Destinasi Pariwisata Prioritas (ITMP);
- Potensial Investor yang Difasilitasi Badan Otorita Danau Toba, Borobudur, dan Labuan Bajo Flores.

Kemeninves/BKPM, Kemenparekraf

Keterangan:
*) : Proyek Berstatus PSN.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

No. Perihal
Perubahan Pemutakhiran RKP Tahun 2023

181 Perubahan
Infografis Major
Project
Akselerasi
Pengembangan
Energi
Terbarukan dan
Konservasi
Energi dalam
halaman III.26

Major Project Akselerasi Pengembangan Energi Terbarukan dan Konservasi Energi (1 dari 2)

Impact/Outcome

- Meningkatnya porsi energi baru terbarukan dalam bauran energi nasional menjadi 17,9% pada 2023 dan menuju 23% pada 2024;
- Tercapainya intensitas energi primer sebesar Rp135,2 SBM/miliar pada tahun 2023 dan Rp133,8 SBM/miliar pada tahun 2024;
- Penurunan emisi GRK sektor energi sebesar 12,8% pada tahun 2023 dan 13,2% pada tahun 2024 terhadap *baseline* (BAU).

Output MP

- Pembangunan PLT ET 1,8 gigawatt (lokasi tersebar sesuai RUPTL 2021-2030);
- Pembangunan PLTS Terpadu daerah 3T sebanyak 12 unit, dan 2 unit PLTS Atap di Gedung K/L;
- Tersedianya 1 rekomendasi volume *biofuel* untuk domestik;
- Tersusunnya Standar Kinerja Energi Minimum (SKEM) dan label hemat energi pada peralatan pemanfaat energi.

Pembangunan Aneka Energi Terbarukan

Pembangunan PLT Air

Indikator

- Terbangunnya PLT air 409,3 MW.

RO/Proyek

- PLTMH;
- Pembangunan Pembangkit Listrik Terbarukan: Pembangunan PLT Air;
- Pembangunan Pembangkit Listrik Terbarukan: Pembangunan PLT Minihidro.

Kemen ESDM, BUMN, Swasta

Pembangunan PLT Surya

Indikator

- Terbangunnya PLT surya 1.308 MW.

RO/Proyek

- PLTS Terpadu;
- PLTS Atap K/L;
- Infrastruktur Energi Terbarukan – Tematik Peningkatan Konektivitas dan Elektrifikasi di Daerah Afirmasi;
- Pembangunan Pembangkit Listrik Terbarukan: Pembangunan PLT Surya.

Kemen ESDM, KPPPA, Kemenpora, Pemda, BUMN, Swasta

Pembangunan Bioenergi

Pembangunan PLT Bioenergi

Indikator

- Terbangunnya PLT bioenergi 87 MW.

RO/Proyek

- Monitoring TKDN Bidang Bioenergi;
- Pembangunan Pembangkit Listrik Terbarukan: Pembangunan PLT Biomassa;
- Pembangunan Pabrik BioCNG Kapasitas 210 MMBTU/Hari di PKS Mayang PTPN IV;
- Penanaman Biomassa untuk mendukung Rencana Proyek Strategis: *New Factory* dan Komersialisasi Produk Biomassa;
- Pembangunan Pabrik Serbuk Kayu (*Cofiring*).

Kemen ESDM, BUMN, Swasta

Pembangunan Riset dan Inovasi

Indikator

- 4 Peta Data (470 MW).

RO/Proyek

- Peta Potensi EBT dalam Rangka Percepatan Investasi PLT Bayu, Hidro dan Biomassa;
- Diklat Masyarakat Bidang EBTKE;
- Diklat Industri Bidang EBTKE;
- Sertifikasi Kompetensi Tenaga Teknik Sektor Ketenagalistrikan dan EBTKE.

Kemen ESDM

Pembangunan Greenfuel

Indikator

- Volume biofuel untuk domestik 10,65 juta KL.

RO/Proyek

- Volume Biofuel untuk Domestik;
- *Green Diesel Bio Refinery* Revamping RU IV Cilacap (*Phase 2*)¹⁾;
- Pengembangan Pabrik Katalis Merah Putih PT Katalis Sinergi Indonesia²⁾;
- Surat Tanda Daftar Budidaya (STDB) Sawit Rakyat;
- Pendanaan untuk Volume Penyaluran Selisih Harga Biodiesel (PN);
- Pembangunan Pabrik Biodiesel Kapasitas 1500 Ton RBDPO/Hari di KEK Sei Mangke.

Kemen ESDM, Kementan, Kemenkeu, BUMN

Keterangan:
a) : Proyek Berstatus PSN.



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

No. Perihal
Perubahan

Pemutakhiran RKP Tahun 2023



**Major Project Akselerasi Pengembangan
Energi Terbarukan dan Konservasi Energi** (2 dari 2)

Impact/Outcome

- Meningkatnya porsi energi baru terbarukan dalam bauran energi nasional menjadi 17,9% pada 2023 dan menuju 23% pada 2024;
- Tercapainya intensitas energi primer sebesar Rp135,2 SBM/miliar pada tahun 2023 dan Rp133,8 SBM/miliar pada tahun 2024;
- Penurunan emisi GRK sektor energi sebesar 12,8% pada tahun 2023 dan 13,2% pada tahun 2024 terhadap *baseline* (BAU).

Output MP

- Pembangunan PLT ET 1,8 gigawatt (lokasi tersebar sesuai RUPTL 2021-2030);
- Pembangunan PLTS Terpadu daerah 3T sebanyak 12 unit, dan 2 unit PLTS Atap di Gedung K/L;
- Tersedianya 1 rekomendasi volume *biofuel* untuk domestik;
- Tersusunnya Standar Kinerja Energi Minimum (SKEM) dan label hemat energi pada peralatan pemanfaat energi.



**Pembangunan
Panas Bumi**

Pembangunan PLT Panas Bumi

Indikator

- Terbangunnya PLTP 20 MW.

RO/Proyek

- Penawaran Wilayah Panas Bumi;
- Penetapan Wilayah Panas Bumi;
- Monitoring TKDN Bidang Panas Bumi;
- Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi;
- Pembangunan Pembangkit Listrik Terbarukan: Pembangunan PLT Panas Bumi.

Kemen ESDM, BUMN, Swasta

**Peningkatan Kualitas Data
Panas Bumi**

Indikator

- 3 Rekomendasi keprospekan.

RO/Proyek

- Rekomendasi Keprospekan Sumber Daya dan Cadangan Panas Bumi.

Kemen ESDM



**Konservasi
Energi**

Standar/Regulasi

Indikator

- 1 Rekomendasi Kebijakan/ 0,8 SBM/Miliar Rupiah

RO/Proyek

- Penurunan Intensitas Energi Final;
- Standar Kinerja Energi Minimum (SKEM) dan Label Hemat Energi pada Peralatan Pemanfaat Energi;
- Reduksi Gas Rumah Kaca (GRK) Sektor ESDM
- Kendaraan Listrik Hasil Konversi.

Kemen ESDM



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

No. Perihal
Perubahan

Pemutakhiran RKP Tahun 2023

182 Perubahan
Infografis *Major Project* Wilayah Adat Papua: Wilayah Adat Laa Pago dan Wilayah Adat Domberay dalam halaman III.27



Major Project Wilayah Adat Papua:
Wilayah Adat Laa Pago dan Wilayah Adat Domberay (1 dari 2)

Impact/Outcome

- Meningkatnya rata-rata IPM di Wilayah Adat Laa Pago sebesar 50,2-50,7 dan rata-rata IPM di Wilayah Adat Domberay sebesar 64,3-64,8 pada tahun 2023;
- Meningkatnya rata-rata IPM di Wilayah Adat Laa Pago sebesar 51,2-51,7 dan rata-rata IPM di Wilayah Adat Domberay sebesar 65,0-65,5 pada tahun 2024.

Output MP

- Pengembangan 8 Bandara;
- Pembangunan 2 Pelabuhan Penyeberangan;
- Pembangunan Jalan Trans Papua Merauke-Sorong 20,7 km;
- Penugasan Khusus Tenaga Kesehatan Provinsi Papua dan Papua Barat 200 orang;
- Perluasan Kawasan Sagu (300 ha), Kopi (100 ha), dan Kakao (100 ha).



Pengembangan Kawasan

Infrastruktur Kawasan

Indikator

- Terbangunnya air baku di KEK Sorong sepanjang 10,3 km.

RO/Proyek

- Air Baku KEK Sorong yang Dibangun;
- Sarana Perumahan yang Dibangun di Kawasan Transmigrasi;
- Jalan Non-Status yang Dibangun di Kawasan Transmigrasi.

Kemen PUPR,
Kemendes PDTT

Produksi Komoditas

Indikator

- Terlaksananya perluasan kawasan sagu hingga 300 ha, kawasan kopi hingga 100 ha, dan kawasan kakao hingga 100 ha.

RO/Proyek

- Kawasan Sagu;
- Kawasan Kopi;
- Kawasan Kakao.

Kementan,
Kemendes PDTT

Kampung Terpadu

Indikator

- Terlaksananya peningkatan kapasitas 714 kelompok masyarakat melalui Transformasi Ekonomi Kampung Terpadu (TEKAD).

RO/Proyek

- Kelompok Masyarakat yang Ditingkatkan Kapasitasnya Melalui Transformasi Ekonomi Kampung Terpadu (TEKAD).

Kemendes PDTT

Industri

Indikator

- Terfasilitasinya 1 kegiatan dalam pengembangan industri di Teluk Bintuni.

RO/Proyek

- Fasilitas Investor dalam Rangka Peningkatan dan Pengembangan Industri Petrokimia di Teluk Bintuni;
- Wirausaha Industri yang Mendapatkan Pelatihan Kewirausahaan dan Teknis Produksi Melalui Dana Dekonsentrasi;
- IKM yang Mendapatkan Pendampingan, Penerapan Sertifikasi Produk Melalui Dana Dekonsentrasi.

Kemenperin

Pariwisata

Indikator

- Terbangunnya 1 unit sarana prasarana desa wisata.

RO/Proyek

- Sarana Prasarana Desa Wisata yang Dibangun untuk Mendukung Destinasi Pariwisata.

Kemendes PDTT

Infrastruktur Pendukung

Energi dan TIK

Indikator

- Terbangunnya BTS 4G/Lastmile di 191 titik/lokasi.

RO/Proyek

- BTS 4G / Lastmile Papua dan Papua Barat;
- Pemasangan Sambungan Baru Listrik Bagi Rumah Tangga Belum Berlistrik yang Tidak Mampu atau Berada di Daerah 3T;
- Pengadaan Sarana Pendukung Teknologi dan Media Baru Siaran Radio Prioritas Nasional (PN).

Kemen ESDM,
Kemenkominfo, LPP RI

Infrastruktur Jalan

Indikator

- Terbangunnya Jalan Trans Papua Merauke-Sorong sepanjang 20,7 km.

RO/Proyek

- Pembangunan Jalan Trans Papua Merauke-Sorong (MP) - JALAN AMBUNI - KARUAN;
- Transportasi Perdesaan - Tematik Peningkatan Konektivitas dan Elektrifikasi di Daerah Afirmasi.

Kemen PUPR, Pemda

Infrastruktur Bandar Udara

Indikator

- Terlaksananya pengembangan 8 bandara.

RO/Proyek

- Pengembangan Bandar Udara Anggi;
- Pengembangan Bandar Udara Wamena Tahap III;
- Pengembangan Bandar Udara Rendani.

Kemenhub

Infrastruktur Pelabuhan

Indikator

- Terbangunnya 2 pelabuhan penyeberangan.

RO/Proyek

- Pembangunan Pelabuhan Penyeberangan Salawati Kab. Raja Ampat Tahap II;
- Pembangunan Pelabuhan Penyeberangan Batanta Kab. Raja Ampat Tahap II.

Kemenhub

Angkutan Udara Perintis

Indikator

- Tersedianya 82 layanan angkutan udara perintis.

RO/Proyek

- Angkutan Udara Perintis;
- Angkutan BBM;
- Angkutan Kargo Perintis (MP).

Kemenhub

Keterangan:
a) : Target merupakan alokasi se-wilayah Papua
b) : Target merupakan target nasional



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

No. Perihal
Perubahan

Pemutakhiran RKP Tahun 2023



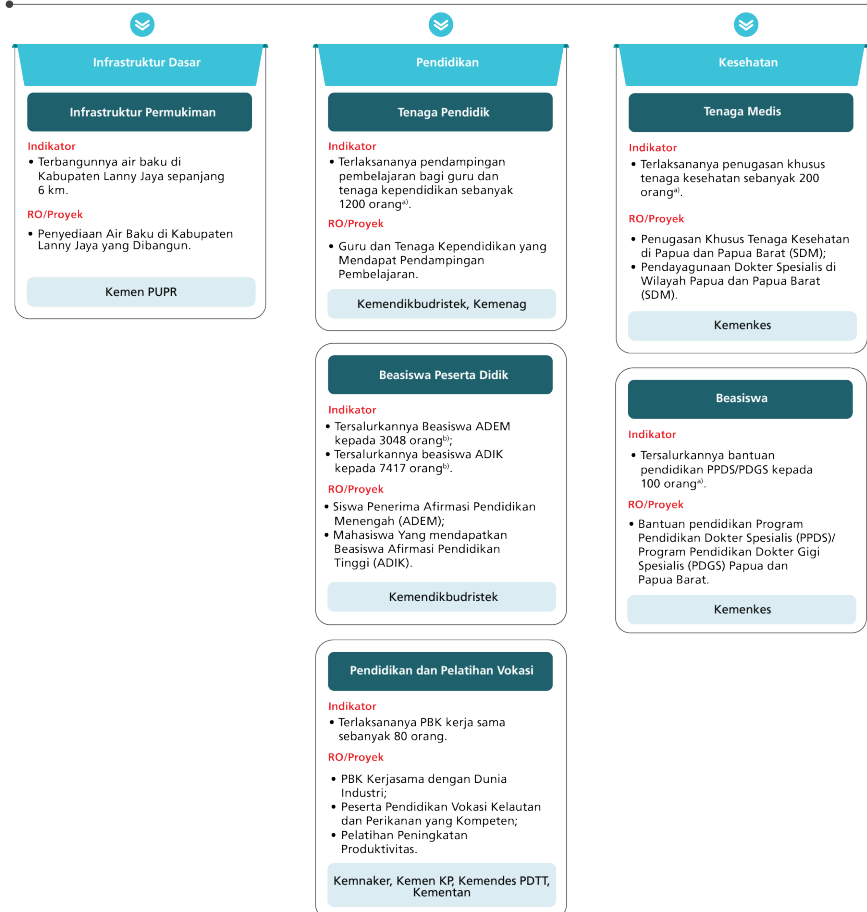
Major Project Wilayah Adat Papua:
Wilayah Adat Laa Pago dan Wilayah Adat Domberay (2 dari 2)

Impact/Outcome

- Meningkatnya rata-rata IPM di Wilayah Adat Laa Pago sebesar 50,2-50,7 dan rata-rata IPM di Wilayah Adat Domberay sebesar 64,3-64,8 pada tahun 2023;
- Meningkatnya rata-rata IPM di Wilayah Adat Laa Pago sebesar 51,2-51,7 dan rata-rata IPM di Wilayah Adat Domberay sebesar 65,0-65,5 pada tahun 2024.

Output MP

- Pengembangan 8 Bandara;
- Pembangunan 2 Pelabuhan Penyeberangan;
- Pembangunan Jalan Trans Papua Merauke-Sorong 20,7 km;
- Penugasan Khusus Tenaga Kesehatan Provinsi Papua dan Papua Barat 200 orang;
- Perluasan Kawasan Sagu (300 ha), Kopi (100 ha), dan Kakao (100 ha).



Keterangan:
a) : Target merupakan alokasi se-wilayah Papua
b) : Target merupakan target nasional



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

No. Perihal
Perubahan Pemutakhiran RKP Tahun 2023

183 Perubahan
Infografis Major
Project
Pembangunan
Ibu Kota
Nusantara
dalam halaman
III.28



Impact/Outcome

Peningkatan Laju Pertumbuhan PDRB Wilayah Kalimantan 5,2 - 5,5% pada tahun 2023 dan 5,40% pada tahun 2024 (baseline 2019: 4,96%).

Output MP

- Rehabilitasi hutan dan lahan di IKN dan DAS sekitarnya;
- Pemulihan ekosistem area IKN;
- Konservasi kawasan Ibu Kota Nusantara (IKN) dengan nilai keanekaragaman hayati tinggi;
- Terlaksananya pelepasan kawasan hutan pembangunan IKN;
- Terlaksananya pengamanan Ibu Kota Negara;
- Pemetaan / penilaian potensi dan kompetensi ASN;
- Tersusunnya dokumen sanksi administratif pelanggaran pemanfaatan ruang di IKN;
- Tersusunnya materi teknis dan Ranperda (PK/Revisi) RTRW Prov/Kab/Kota hasil bimbingan teknis di Pulau Kalimantan - Provinsi Kalimantan Timur;
- Terpetakannya bidang tanah bersertifikat yang akan dibangun di kawasan IKN;
- Tersusunnya dokumen kebijakan untuk mendukung penyelenggaraan telekomunikasi di IKN;
- Tersusunnya standar instrument pengelolaan hutan berkelanjutan di IKN;
- Tersusunnya dokumen rencana induk, studi perencanaan teknis, OBC untuk pembangunan infrastruktur konektivitas di IKN;
- Tersusunnya hasil analisis dan konsep fasilitas pelayanan kesehatan di IKN;
- Terlaksananya pembangunan gedung dan penataan kawasan IKN;
- Terbangunnya infrastruktur jalan dan jembatan untuk mendukung konektivitas di IKN;
- Terbangunnya Bendungan Sepaku Semoi;
- Terbangunnya Jaringan Interkoneksi (listrik);
- Terbangunnya Jaringan Transmisi Tegangan Tinggi;
- Terbangunnya Infrastruktur ICT di Kawasan Ibu Kota Negara;
- Terbangunnya Jaringan Telekomunikasi di Ibu Kota Negara;
- Terbangunnya Infrastruktur Gas Bumi di IKN;
- Terlaksananya Pembangunan SPAM IKN;
- Terbangunnya sistem pengelolaan sanitasi di IKN;
- Terbangunnya infrastruktur air baku;
- Terlaksananya pelatihan berbasis kompetensi oleh unit pelayanan teknis pusat;
- Tersusunnya rekomendasi kebijakan pengawalan/pengendalian desain sistem pertahanan dan keamanan, serta infrastruktur TIK di Ibu Kota Negara Baru;
- Tersusunnya peta peluang investasi proyek prioritas strategis yang siap ditawarkan di Ibu Kota Negara (IKN) bidang infrastruktur, jasa kawasan, manufaktur, dan sumber daya alam.



Penyiapan Regulasi dan Kebijakan

Regulasi dan Kebijakan

Indikator

- Jumlah dokumen regulasi, rekomendasi kebijakan, dan NSPK yang disusun.

RO/Proyek

- Sanksi Administratif Pelanggaran Pemanfaatan Ruang di IKN;
- Rekomendasi Kebijakan untuk Mendukung Penyelenggaraan Telekomunikasi di IKN;
- Standar Instrumen Pengelolaan Hutan Berkelanjutan (IKN);
- Rekomendasi Kebijakan Pengawalan/Pengendalian Desain Sistem Pertahanan Ibu Kota Negara Baru;
- Rekomendasi Kebijakan Pengawalan/Pengendalian Desain Sistem Keamanan Ibu Kota Negara Baru;
- Rekomendasi Kebijakan Pengawalan/Pengendalian Pembangunan Infrastruktur Teknologi, Informasi dan Komunikasi di Ibukota Negara Baru;
- Fasilitasi Legislasi Rancangan Peraturan Kepala Otorita IKN;
- Rekomendasi Penataan Ulang Penggunaan BMN oleh K/L (Asset Rearrangement) di Jakarta (PN);
- Rekomendasi Transaksi Pemanfaatan Barang Milik Negara Pada Ibu Kota Negara Lama (PN).

Kemenkeu, Kemen ATR/BPN, Kemenkominfo, Kemen LHK, Kemenko Polhukam

Perencanaan dan Penyiapan Lahan

Penyiapan lahan

Indikator

- Luas lahan IKN yang siap bangun, Luas ruang hijau di IKN.

RO/Proyek

- Luas Kawasan Hutan yang dilepaskan untuk IKN;
- Rehabilitasi Hutan dan Lahan di IKN dan DAS sekitarnya;
- Pemulihan Ekosistem Area IKN;
- Kawasan Ibu Kota Negara (IKN) dengan nilai keanekaragaman hayati tinggi;
- SHAT PTSL Kategori 3 - Provinsi Kalimantan Timur.

Kemen LHK, Kemen ATR/BPN

Perencanaan Kawasan dan Infrastruktur

Indikator

- Jumlah dokumen studi, rencana, materi teknis, serta rencana teknis kawasan dan infrastruktur.

RO/Proyek

- Materi Teknis dan Ranperda (PK/Revisi) RTRW Prov/Kab/Kota Hasil Bimbingan Teknis di Pulau Kalimantan;
- Studi Penyesuaian KA Bandara Sultan Aji Muhammad Sepinggang Balikpapan - KIPP dengan Rencana Pengembangan Kawasan Strategis Nasional IKN;
- Penyusunan OBC rencana penyelenggaraan KA Bandara Sepinggang - KPIP dan Pengembangan KA perkotaan Balikpapan - IKN Phase 2;
- Penyusunan OBC Rencana Penyelenggaraan KA Antarkota Trans Kalimantan Segmen Simpang Petung - Balikpapan - Samarinda;
- Peta Peluang Investasi Proyek Prioritas Strategis yang Siap Ditawarkan di Ibu Kota Negara (IKN) Bidang Infrastruktur;
- Dokumen Perencanaan Teknis Bidang Sarana dan Prasarana (Dukungan IKN) (Prioritas Nasional) - Pusat;
- Sistem Transportasi Ibukota Nusantara - Provinsi Kalimantan Timur;
- Koordinasi Penyiapan Analisis dan Konsep Fasilitas Pelayanan Kesehatan di IKN.

Kemen ATR/BPN, Kemenhub, Kemenkes, Kemen Investasi/BKPM

Keterangan:
a) : Proyek Berstatus PSN



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

No. Perihal
Perubahan

Pemutakhiran RKP Tahun 2023



Impact/Outcome

Peningkatan Laju Pertumbuhan PDRB Wilayah Kalimantan 5,2 - 5,5% pada tahun 2023 dan 5,40% pada tahun 2024 (baseline 2019: 4,96%).

Output MP

- Rehabilitasi hutan dan lahan di IKN dan DAS sekitarnya;
- Pemulihan ekosistem area IKN;
- Konservasi kawasan Ibu Kota Nusantara (IKN) dengan nilai keanekaragaman hayati tinggi;
- Terlaksananya pelepasan kawasan hutan pembangunan IKN;
- Terlaksananya pengamanan Ibu Kota Negara;
- Pemetaan / penilaian potensi dan kompetensi ASN;
- Tersusunnya dokumen sanksi administratif pelanggaran pemanfaatan ruang di IKN;
- Tersusunnya materi teknis dan Ranperda (PK/Revisi) RTRW Prov/Kab/Kota hasil bimbingan teknis di Pulau Kalimantan - Provinsi Kalimantan Timur;
- Terpetaknya bidang tanah bersertifikat yang akan dibangun di kawasan IKN;
- Tersusunnya dokumen kebijakan untuk mendukung penyelenggaraan telekomunikasi di IKN;
- Tersusunnya standar instrument pengelolaan hutan berkelanjutan di IKN;
- Tersusunnya dokumen rencana induk, studi perencanaan teknis, OBC untuk pembangunan infrastruktur konektivitas di IKN;
- Tersusunnya hasil analisis dan konsep fasilitas pelayanan kesehatan di IKN;
- Terlaksananya pembangunan gedung dan penataan kawasan IKN;
- Terbangunnya infrastruktur jalan dan jembatan untuk mendukung konektivitas di IKN;
- Terbangunnya Bendungan Sepaku Semoi;
- Terbangunnya Jaringan Interkoneksi (listrik);
- Terbangunnya Jaringan Transmisi Tegangan Tinggi;
- Terbangunnya Infrastruktur ICT di Kawasan Ibu Kota Negara;
- Terbangunnya Jaringan Telekomunikasi di Ibu Kota Negara;
- Terbangunnya Infrastruktur Gas Bumi di IKN;
- Terlaksananya Pembangunan SPAM IKN;
- Terbangunnya sistem pengelolaan sanitasi di IKN;
- Terbangunnya infrastruktur air baku;
- Terlaksananya pelatihan berbasis kompetensi oleh unit pelayanan teknis pusat;
- Tersusunnya rekomendasi kebijakan pengawalan/pengendalian desain sistem pertahanan dan keamanan, serta infrastruktur TIK di Ibu Kota Negara Baru;
- Tersusunnya peta peluang investasi proyek prioritas strategis yang siap ditawarkan di Ibu Kota Negara (IKN) bidang infrastruktur, jasa kawasan, manufaktur, dan sumber daya alam.




Pengembangan Kawasan dan SDM

Pengamanan	Infrastruktur	SDM
<p>Indikator</p> <ul style="list-style-type: none"> • Jumlah layanan pengamanan di kawasan IKN. <p>RO/Proyek</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pengamanan Ibu Kota Negara (IKN) (PN). <p>POLRI</p>	<p>Indikator</p> <ul style="list-style-type: none"> • Jumlah unit infrastruktur terbangun di kawasan IKN. <p>RO/Proyek</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pembangunan Gedung dan Penataan Kawasan IKN-Kab. Penajam Paser Utara; • Pembangunan SPAM IKN Provinsi Kalimantan Timur; • Pembangunan Bendungan Sepaku Semoi^{a)}; • Dukungan Infrastruktur IKN - Jalan Bypass Pasar Sepaku: Paket Jalan Shortcut Pasar Sepaku (IKN); • Sistem Pengelolaan Sanitasi IKN - Provinsi Kalimantan Timur; • Pembangunan Jaringan Interkoneksi (listrik); • Jaringan Transmisi Tegangan Tinggi; • Pembangunan Infrastruktur ICT di Kawasan Ibu Kota Negara; • Pembangunan Jaringan Telekomunikasi di Ibu Kota Negara; • Intake dan Jaringan Pipa Transmisi Sungai Sepaku Kab. Penajam Paser Utara yang dibangun (IKN); • Prasarana air baku IKN yang dibangun; • Dukungan Infrastruktur IKN - Dermaga Logistik Ibu Kota Negara (IKN); • Dukungan Infrastruktur IKN - Jalan Bypass Pasar Sepaku: Paket Jalan Shortcut Pasar Sepaku (IKN); • Dukungan Infrastruktur IKN - Jembatan Pulau Balang Bentang Pendek; • Dukungan Pertamina Group dalam Penyediaan Infrastruktur Gas Bumi di IKN. <p>Kemen PUPR, Kemenhub, BUMN, Kemen LHK</p>	<p>Indikator</p> <ul style="list-style-type: none"> • Jumlah program pemetaan dan peningkatan kapasitas SDM. <p>RO/Proyek</p> <ul style="list-style-type: none"> • Instansi Pemerintah yang Menerima Pendampingan Penataan Arsip Persiapan Pemindahan IKN; • Pemetaan/Penilaian Potensi dan Kompetensi ASN; • PBK UPTP - Kota Samarinda; • PBK Provinsi Kalimantan Timur. <p>ANRI, BKN, Kemnaker</p>

Keterangan:
a) : Proyek Berstatus PSN



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

No.	Perihal Perubahan	Pemutakhiran RKP Tahun 2023
184	Perubahan Infografis Major Project Reformasi Sistem Perlindungan Sosial dalam halaman III.29	<div style="text-align: center;">  <p>Major Project Reformasi Sistem Perlindungan Sosial</p> </div> <div style="text-align: center; background-color: #00728f; color: white; padding: 5px; border-radius: 10px; margin: 10px 0;">Impact/Outcome</div> <ul style="list-style-type: none"> Penurunan angka tingkat kemiskinan menjadi 7,5-8,5% di tahun 2023 dan 6-7% di tahun 2024; Penurunan angka penduduk miskin ekstrem menjadi 1,5-2,0% di tahun 2023 dan 0-1% di tahun 2024. <div style="text-align: center; background-color: #00728f; color: white; padding: 5px; border-radius: 10px; margin: 10px 0;">Output MP</div> <ul style="list-style-type: none"> Cakupan 100% daerah melaksanakan Registrasi Sosial Ekonomi di tahun 2022, 2023, dan 2024; Terbangunnya skema digitalisasi bantuan sosial; Terbangunnya skema perlindungan sosial adaptif untuk penanganan bencana; Cakupan 70% desa/kelurahan menggunakan digitalisasi monografi desa/kelurahan untuk perencanaan penganggaran berbasis bukti; Penyelenggaraan layanan terpadu penanggulangan kemiskinan di 300 kabupaten/kota tahun 2023 dan 514 kabupaten/kota tahun 2024; Meningkatnya cakupan instansi yang mendapatkan pemahaman program jaminan sosial tenaga kerja; Peningkatan cakupan kepesertaan program jaminan sosial sebesar 13,3 juta peserta; Penyaluran program sembako bagi 15,6 juta KPM di tahun 2023 dan 2024; Penyaluran program keluarga harapan bagi 10 juta KPM di tahun 2023 dan 2024.
<div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="width: 30%; border: 1px solid #ccc; padding: 5px; background-color: #e6f2ff;"> <div style="text-align: center; background-color: #00728f; color: white; padding: 5px; border-radius: 10px; margin-bottom: 5px;">Peningkatan Cakupan Data dari Desa/Kelurahan</div> <p>Indikator</p> <ul style="list-style-type: none"> Terbangunnya data registrasi sosial ekonomi di 514 kabupaten/kota. <p>RO/Proyek</p> <ul style="list-style-type: none"> Pendampingan Desa; Sistem Informasi Terintegrasi Data Tunggal UMKM; Publikasi/Laporan Pendataan Awal Registrasi Sosial Ekonomi. <p style="text-align: center; background-color: #00728f; color: white; padding: 2px 5px; border-radius: 5px;">Kemendes PDTT, Kemendagri, Kemen KUKM, Kemensos, BPS</p> </div> <div style="width: 30%; border: 1px solid #ccc; padding: 5px; background-color: #e6f2ff;"> <div style="text-align: center; background-color: #00728f; color: white; padding: 5px; border-radius: 10px; margin-bottom: 5px;">Integrasi dan Perluasan Kepesertaan</div> <p>Indikator</p> <ul style="list-style-type: none"> Meningkatnya cakupan instansi atau wadah/kelompok pekerja yang mendapatkan pemahaman program jaminan sosial tenaga kerja sebesar 600 lembaga. <p>RO/Proyek</p> <ul style="list-style-type: none"> Instansi Pengguna Pegawai Non-PNS dan Wadah/Kelompok Pekerja Bukan Penerima Upah yang Mendapatkan Pemahaman Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja. <p style="text-align: center; background-color: #00728f; color: white; padding: 2px 5px; border-radius: 5px;">Kemnaker, Kemenko PMK</p> </div> <div style="width: 30%; border: 1px solid #ccc; padding: 5px; background-color: #e6f2ff;"> <div style="text-align: center; background-color: #00728f; color: white; padding: 5px; border-radius: 10px; margin-bottom: 5px;">Perluasan Pilihan KPM dan Pengembangan Skema Penyaluran</div> <p>Indikator</p> <ul style="list-style-type: none"> Meningkatnya Data Terpadu Kesejahteraan Sosial yang padan dengan data administrasi kependudukan sebesar 100%. <p>RO/Proyek</p> <ul style="list-style-type: none"> Data Terpadu Kesejahteraan Sosial; Rekomendasi Pengembangan Desa Digital melalui <i>Smart Village</i>; Literasi Digital. <p style="text-align: center; background-color: #00728f; color: white; padding: 2px 5px; border-radius: 5px;">Kemensos, Kemendes PDTT, Kemenkominfo, Kemenkeu</p> </div> </div>		
<div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="width: 30%; border: 1px solid #ccc; padding: 5px; background-color: #e6f2ff;"> <div style="text-align: center; background-color: #00728f; color: white; padding: 5px; border-radius: 10px; margin-bottom: 5px;">Pengelolaan Data</div> <p>Indikator</p> <ul style="list-style-type: none"> Meningkatnya kabupaten/Kota yang menyelenggarakan layanan pengaduan penanggulangan kemiskinan di 514 kabupaten/kota. <p>RO/Proyek</p> <ul style="list-style-type: none"> Kabupaten/Kota yang Mengembangkan SLRT; Desa/Kelurahan yang Menyelenggarakan Puskesos. <p style="text-align: center; background-color: #00728f; color: white; padding: 2px 5px; border-radius: 5px;">Kemensos, Kemenkes, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kota/Kabupaten, Pemerintah Desa/Kelurahan</p> </div> <div style="width: 30%; border: 1px solid #ccc; padding: 5px; background-color: #e6f2ff;"> <div style="text-align: center; background-color: #00728f; color: white; padding: 5px; border-radius: 10px; margin-bottom: 5px;">Integrasi Data Jaminan Sosial</div> <p>Indikator</p> <ul style="list-style-type: none"> Meningkatnya cakupan kepesertaan program jaminan sosial sebesar 13,3 juta peserta. <p>RO/Proyek</p> <ul style="list-style-type: none"> Cakupan Penduduk yang Menjadi Penerima Bantuan Iuran (PBI) dalam JKN/KIS; Nelayan yang Diidentifikasi Identitasnya dalam Rangka Perlindungan Nelayan; Pelayanan Koneksitas <i>Warehouse</i> Berbasis NIK Nasional. <p style="text-align: center; background-color: #00728f; color: white; padding: 2px 5px; border-radius: 5px;">Kemenkes, Kemen KP, Kemendagri</p> </div> <div style="width: 30%; border: 1px solid #ccc; padding: 5px; background-color: #e6f2ff;"> <div style="text-align: center; background-color: #00728f; color: white; padding: 5px; border-radius: 10px; margin-bottom: 5px;">Integrasi dan Transformasi Program Bantuan Sosial</div> <p>Indikator</p> <ul style="list-style-type: none"> Tersalurkannya bantuan sosial sembako kepada 10 juta keluarga. <p>RO/Proyek</p> <ul style="list-style-type: none"> Keluarga yang Mendapat Bantuan Sosial Bersyarat; KPM yang Memperoleh Bantuan Sosial Pangan Sembako; Penyediaan Elpiji 3 kg yang Tepat Sasaran bagi Masyarakat, Usaha Mikro, Nelayan, dan Petani Sasaran; Siswa Madrasah MI/MTs/MA Penerima PIP; Siswa SD/SMP/SMA yang Mendapatkan Program Indonesia Pintar. <p style="text-align: center; background-color: #00728f; color: white; padding: 2px 5px; border-radius: 5px;">Kemensos, Kemen ESDM, Kemendikbudristek, Kemeng, Kemen PUPR</p> </div> </div>		
<div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="width: 30%; border: 1px solid #ccc; padding: 5px; background-color: #e6f2ff;"> <div style="text-align: center; background-color: #00728f; color: white; padding: 5px; border-radius: 10px; margin-bottom: 5px;">Sinkronisasi dan Integrasi Data untuk Penargetan Perlindungan Sosial</div> <p>Indikator</p> <ul style="list-style-type: none"> Terlaksananya pembangunan <i>Data Center</i> Nasional di 2 titik/lokasi. <p>RO/Proyek</p> <ul style="list-style-type: none"> Daerah yang Menerapkan Sistem Informasi Keuangan Daerah dalam SIPD Bidang Perencanaan Anggaran; Sistem Informasi Bidang Kebencanaan; <i>Data Center</i> Nasional. <p style="text-align: center; background-color: #00728f; color: white; padding: 2px 5px; border-radius: 5px;">Kemendagri, BNPB, Kemenkominfo, Kemensos, Kemen LHK</p> </div> <div style="width: 30%; border: 1px solid #ccc; padding: 5px; background-color: #e6f2ff;"> <div style="text-align: center; background-color: #00728f; color: white; padding: 5px; border-radius: 10px; margin-bottom: 5px;">Penguatan Sistem Pendukung</div> <p>Indikator</p> <ul style="list-style-type: none"> Meningkatnya cakupan akses internet di 7.474 titik/lokasi. <p>RO/Proyek</p> <ul style="list-style-type: none"> Akses Internet; Sumber Daya Manusia yang Dikelola. <p style="text-align: center; background-color: #00728f; color: white; padding: 2px 5px; border-radius: 5px;">Kemensos, Kemenkominfo, Kementan, Kemenkes, Kemendes PDTT, BKKB, Kemen LHK</p> </div> </div>		



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

No. Perihal
Perubahan

Pemutakhiran RKP Tahun 2023

185 Perubahan
Infografis Major
Project
Reformasi
Sistem
Kesehatan
Nasional dalam
halaman III.30



Major Project Reformasi Sistem Kesehatan Nasional

Impact/Outcome

- Menurunnya insidensi tuberkulosis menjadi 211/100.000 penduduk pada tahun 2023 dan 190/100.000 penduduk pada tahun 2024;
- Puskesmas tanpa dokter menjadi 0% pada tahun 2023 dan tahun 2024;
- Tercapainya pemenuhan 42 RS Rujukan Nasional pada tahun 2023 dan tahun 2024;
- Meningkatnya jumlah kab/kota eliminasi malaria menjadi 385 kab/kota pada tahun 2023 dan 405 kab/kota pada tahun 2024;
- Meningkatnya cakupan imunisasi dasar lengkap pada anak usia 12-23 bulan menjadi 75% pada tahun 2023 dan 90% pada tahun 2024;
- Meningkatnya puskesmas dengan jenis tenaga kesehatan sesuai standar sebanyak 71% puskesmas pada tahun 2023 dan 83% puskesmas pada tahun 2024;
- Meningkatnya ketersediaan minimal 4 dokter spesialis dasar dan 3 dokter spesialis lainnya di 85% RSUD kab/kota pada tahun 2023 dan 90% RSUD kab/kota pada tahun 2024;
- Terakreditasinya 90% FKTP dan 95% RS pada tahun 2023 dan 100% FKTP dan 100% RS pada tahun 2024;
- Terwujudnya integrasi dan digitalisasi sistem informasi surveilans menjadi 90% pada tahun 2023 dan 100% pada tahun 2024.

Output MP

- Cakupan TB *Treatment Coverage* menjadi 90% pada tahun 2023 dan 2024;
- Kab/kota dengan API Malaria < 1.000 penduduk menjadi 495 kab/kota pada tahun 2023 dan 500 kab/kota pada tahun 2024;
- Kab/kota mencapai 80% imunisasi dasar lengkap menjadi 471 kab/kota pada tahun 2023 dan 488 kab/kota pada tahun 2024;
- Jumlah dokter *pasca internsip* dan lulusan dokter spesialis yang didayagunakan sebanyak 800 dokter dan 660 dokter spesialis pada tahun 2023 serta 1.000 dokter dan 660 dokter spesialis pada tahun 2024;
- Jumlah FKTP dan RS memenuhi persyaratan survei akreditasi sebanyak 6.110 FKTP dan 1.169 RS pada tahun 2023 serta 5.706 FKTP dan 991 RS pada tahun 2024;
- Jumlah bahan baku obat dan obat 10 terbesar yang diproduksi dalam negeri sebanyak 14 molekul pada tahun 2023 dan 20 molekul pada tahun 2024;
- RS milik pemerintah daerah yang memenuhi Sarana, Prasarana, dan Alat (SPA) sesuai standar menjadi 95% pada tahun 2023 dan 100% pada tahun 2024;
- Rekomendasi surveilans faktor risiko dan penyakit berbasis laboratorium yang dimanfaatkan sebesar 95% pada tahun 2023 dan 100% pada tahun 2024;
- Belanja kesehatan promotif preventif dalam JKN menjadi 12% pada tahun 2023 dan 15% pada tahun 2024;
- Jumlah sistem data kesehatan Indonesia yang terstandar dan terintegrasi menjadi 200 sistem pada tahun 2023 dan 300 sistem pada tahun 2024.



Pendidikan dan Penempatan
Tenaga Kesehatan

- Indikator**
- Jumlah dokter *pasca internsip* dan lulusan dokter spesialis yang didayagunakan sebanyak 800 dokter dan 660 dokter spesialis pada tahun 2023 serta 1.000 dokter dan 660 dokter spesialis pada tahun 2024.
- RO/Proyek**
- Pendayagunaan Dokter Spesialis;
 - Penugasan Khusus Tenaga Kesehatan Secara Tim dan Individu.

Kemendes, KemenPAN RB, BKN

Kemandirian Farmasi dan Alat Kesehatan

- Indikator**
- Jumlah bahan baku obat dan obat 10 terbesar yang diproduksi dalam negeri sebanyak 14 molekul pada tahun 2023 dan 20 molekul pada tahun 2024.
- RO/Proyek**
- Promosi Pemanfaatan Alat Kesehatan Dalam Negeri;
 - Industri Bahan Baku Obat yang Memproduksi 10 Molekul Obat Sesuai Kebutuhan Dalam Negeri.

Kemendes, Kemenperin, BPOM, BUMN

Inovasi Pembiayaan Kesehatan

- Indikator**
- Belanja kesehatan promotif preventif dalam JKN menjadi 12% pada tahun 2023 dan 15% pada tahun 2024.
- RO/Proyek**
- *Review* dan Evaluasi Tarif INA CBG dan Kapitasi pada Program JKN;
 - Peningkatan Kerja Sama Pemerintah dan Swasta dalam Mendukung Pelayanan dan Pembiayaan Kesehatan.

Kemendes, BPJS Kesehatan

Peningkatan Kapasitas RS dan
Pelayanan Kesehatan di Daerah
Tertinggal, Perbatasan, dan Kepulauan

- Indikator**
- Jumlah RS memenuhi persyaratan survei akreditasi sebanyak 1.169 RS pada tahun 2023 serta 991 RS pada tahun 2024;
 - RS milik pemerintah daerah yang memenuhi Sarana, Prasarana, dan Alat (SPA) sesuai standar menjadi 95% pada tahun 2023 dan 100% pada tahun 2024.
- RO/Proyek**
- Peningkatan Kapasitas dan Penyediaan Sarpras dan Alat RS termasuk RS TNI dan Polri;
 - Peningkatan Kualitas Pelayanan RS *Holdng* BUMN.

Kemendes, Kemhan, Polri, Kemenhub, Kemen ESDM, Kemenkominfo, BUMN, Pemda

Penguatan Keamanan dan Ketahanan
Kesehatan

- Indikator**
- Rekomendasi surveilans faktor risiko dan penyakit berbasis laboratorium yang dimanfaatkan sebesar 95% pada tahun 2023 dan 100% pada tahun 2024.
- RO/Proyek**
- Surveilans dan Deteksi Dini Penyakit Infeksi *Emerging*;
 - Penyediaan Sarana Pendukung Surveilans di Laboratorium termasuk Lab POM.

Kemendes, Kementan, BPOM, BRIN, Pemda

Digitalisasi dan Pemberdayaan Masyarakat

- Indikator**
- Jumlah sistem data kesehatan Indonesia yang terstandar dan terintegrasi menjadi 200 sistem pada tahun 2023 dan 300 sistem pada tahun 2024.
- RO/Proyek**
- Integrasi dan Pengembangan Sistem Data Kesehatan;
 - Pemberdayaan Masyarakat Germas di Berbagai Tatanan.

Kemendes, BUMN

Penguatan Fasilitas Kesehatan
Tingkat Pertama (FKTP)

- Indikator**
- Jumlah FKTP memenuhi persyaratan survei akreditasi sebanyak 6.110 FKTP pada tahun 2023 serta 5.706 FKTP pada tahun 2024.
- RO/Proyek**
- Akreditasi Puskesmas dan FKTP swasta;
 - Pemenuhan Peningkatan Standar SPA Puskesmas;
 - Penguatan Sistem Kesehatan.

Kemendes, Pemda

Pengendalian Penyakit dan
Perluasan Imunisasi

- Indikator**
- Cakupan TB *treatment coverage* menjadi 90% pada tahun 2023 dan 2024;
 - Kab/kota dengan API Malaria < 1.000 penduduk menjadi 495 kab/kota pada tahun 2023 dan 500 kab/kota pada tahun 2024;
 - Kab/kota mencapai 80% imunisasi dasar lengkap menjadi 471 kab/kota pada tahun 2023 dan 488 kab/kota pada tahun 2024.
- RO/Proyek**
- Penyediaan Obat dan Perbekalan Kesehatan Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit;
 - Paket Penyediaan Vaksin Imunisasi Rutin Dasar dan Lanjutan.

Kemendes, BPOM, Kemnaker, Kemen PUPR, Pemda



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

No. Perihal
Perubahan

Pemutakhiran RKP Tahun 2023

186 Perubahan
Infografis *Major
Project*
Pendidikan dan
Pelatihan
Vokasi untuk
Industri 4.0
dalam halaman
III.31

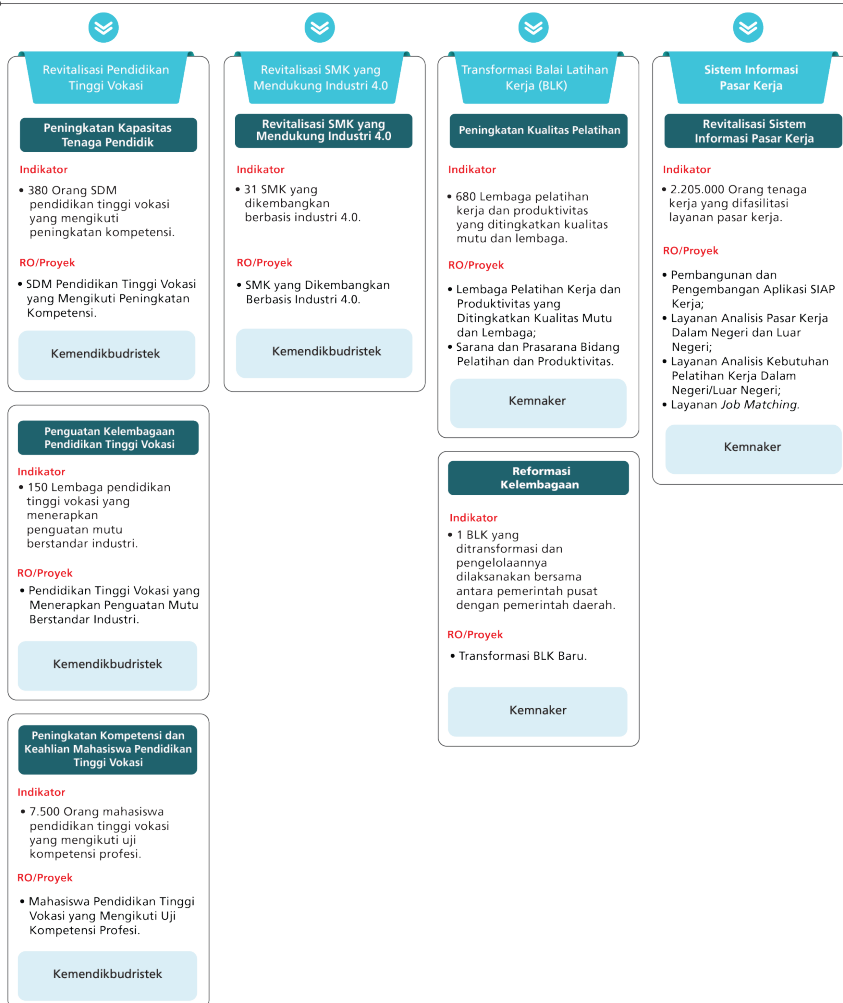


Impact/Outcome

- Meningkatnya proporsi pekerja yang bekerja pada bidang keahlian menengah dan tinggi menjadi 43,00% pada tahun 2023 dan 43,10% pada tahun 2024;
- Meningkatnya lulusan pendidikan vokasi yang mendapatkan pekerjaan dalam 1 tahun setelah kelulusan menjadi 36,29% pada tahun 2023 dan 37,31% pada tahun 2024.

Output MP

- Jumlah mahasiswa pendidikan tinggi vokasi yang bersertifikat kompetensi 7.500 orang pada tahun 2023;
- Jumlah SMK yang dikembangkan berbasis industri 4.0 31 SMK pada tahun 2023;
- Jumlah BLK yang ditransformasi 1 BLK pada tahun 2023 dan 1 BLK pada tahun 2024.





PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

No. Perihal Pematkhiran RKP Tahun 2023
Perubahan

187 Perubahan
Infografis Major
Project
Percepatan
Penurunan
Kematian Ibu
dan *Stunting*
dalam halaman
III.32



Impact/Outcome

- Menurunkan angka prevalensi *stunting* pada balita menjadi 17,5% tahun 2023 dan 14% pada tahun 2024;
- Menurunkan angka prevalensi *wasting* (kurus dan sangat kurus) pada balita sebesar 7,3% tahun 2023 dan 7% pada tahun 2024;
- Menurunkan Angka Kematian Ibu (AKI) hingga 194 tahun 2023 dan 183 tahun 2024 per 100.000 kasus kelahiran hidup.

Output MP

- Persentase imunisasi dasar lengkap pada anak usia 12-23 bulan sebesar 75% tahun 2023 dan 90% di tahun 2024;
- Persentase cakupan peserta KB aktif Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) sebesar 27,57% tahun 2023 dan 28,39% di tahun 2024;
- Persentase cakupan persalinan di fasilitas pelayanan kesehatan sebesar 93% tahun 2023 dan 95% di tahun 2024;
- Jumlah kabupaten/kota yang mencapai 80% imunisasi dasar lengkap anak usia 0-11 bulan sebesar 471 tahun 2023 dan 488 tahun 2024;
- Persentase tingkat putus pakai pemakaian kontrasepsi (*Drop Out/DO*) sebesar 21,59% tahun 2023 dan 20% di tahun 2024;
- Persentase ibu hamil Kurang Energi Kronis (KEK) sebesar 11,5% pada 2023 dan 10% pada 2024;
- Persentase bayi usia kurang dari 6 bulan mendapat air susu ibu (ASI) eksklusif sebesar 55% pada tahun 2023 dan 80% pada tahun 2024;
- Persentase balita yang dipantau pertumbuhan dan perkembangannya sebesar 80% pada tahun 2023 dan 90% pada tahun 2024.



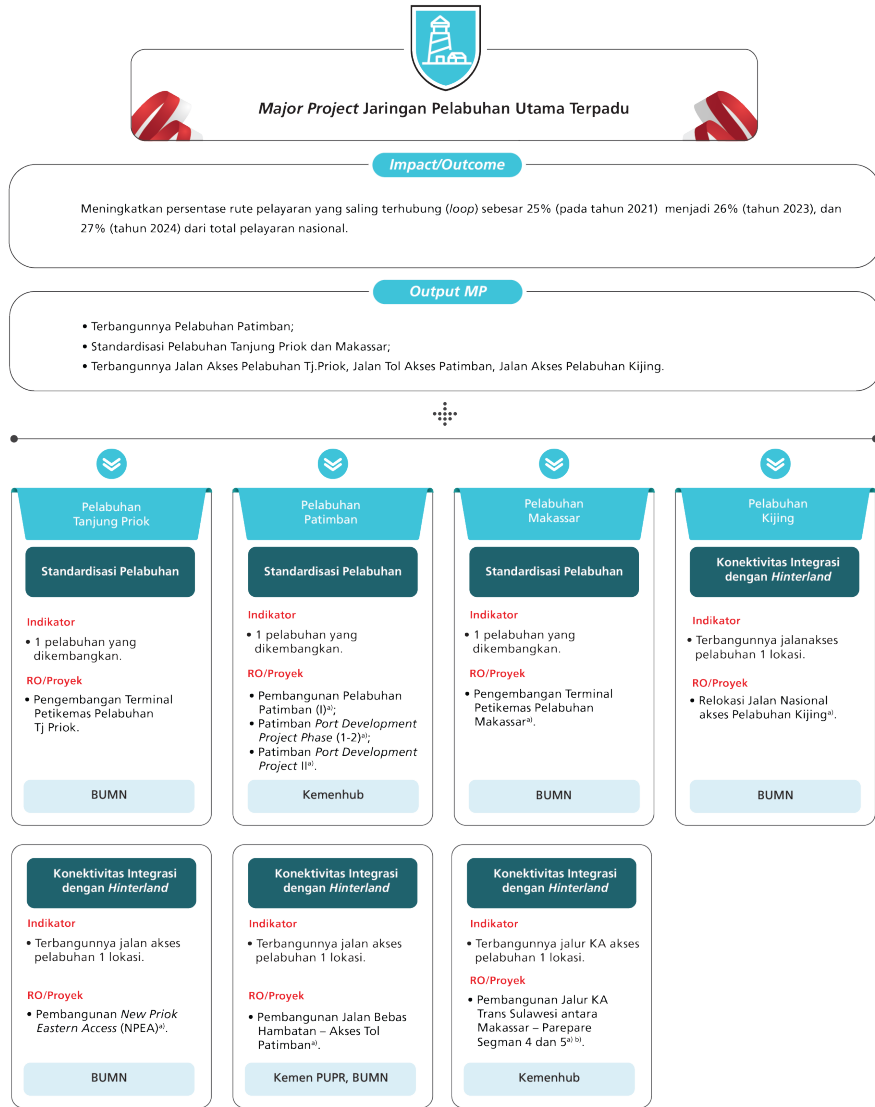
Pemenuhan Intervensi Spesifik <i>Stunting</i>	Pemenuhan Intervensi Sensitif <i>Stunting</i> pada Sasaran Prioritas	Penguatan Kapasitas Pelayanan Kesehatan Maternal
<p>Indikator</p> <ul style="list-style-type: none">• Persentase ibu hamil kurang energi kronis (KEK) sebesar 11,5% pada 2023;• Persentase bayi usia kurang dari 6 bulan mendapat air susu ibu (ASI) eksklusif sebesar 55% pada 2023;• Persentase balita yang dipantau pertumbuhan dan perkembangannya sebesar 80% pada 2023. <p>RO/Proyek</p> <ul style="list-style-type: none">• Ibu Hamil KEK dan Balita Kurus yang Mendapat Makanan Tambahan;• Suplementasi Gizi Mikro Balita Kurus;• Penyediaan dan Konsumsi Tablet Tambah Darah untuk Ibu Hamil dan Remaja Putri;• Surveilans Gizi dan Kesehatan Ibu dan Anak. <p>Kemendes</p>	<p>Indikator</p> <ul style="list-style-type: none">• 10 juta keluarga yang mendapat bantuan sosial bersyarat;• 170.080 sambungan rumah (SR) air minum berbasis masyarakat;• 601.085 orang mendapatkan pelatihan dan <i>refreshing</i> dalam rangka percepatan penurunan <i>stunting</i>. <p>RO/Proyek</p> <ul style="list-style-type: none">• Keluarga yang Mendapat Bantuan Sosial Bersyarat;• KPM yang Memperoleh Bantuan Sosial Pangan;• Pembangunan Infrastruktur Air Minum Berbasis Masyarakat;• Keluarga dengan Baduta yang Mendapatkan Fasilitas dan Pembinaan 1.000 HPK;• Pelatihan dan <i>Refreshing</i> dalam Rangka Percepatan Penurunan <i>Stunting</i>;• Pemberdayaan Kampung KB dalam Rangka Penurunan <i>Stunting</i>. <p>Kemendes, Kemensos, Kementerian PUPR, BKKBN, Kemendagri, Kemendes PDDT, Kemendikbudristek, Kemen KP, Kemenkominfo, BPOM, BNPP, BRIN, Kemenag, Kemen PPPA</p>	<p>Indikator</p> <ul style="list-style-type: none">• Persentase cakupan peserta KB aktif metode kontrasepsi jangka panjang (MKJP) sebesar 27,57% tahun 2023;• Persentase cakupan persalinan di fasilitas pelayanan kesehatan sebesar 93% tahun 2023;• Persentase tingkat putus pakai pemakaian kontrasepsi (<i>Drop Out/DO</i>) sebesar 21,59% tahun 2023. <p>RO/Proyek</p> <ul style="list-style-type: none">• Skrining Layak Hamil bagi PUS di Kab/Kota Lokus AKI AKB;• Bimtek Peningkatan Pelayanan KB Pasca Persalinan;• Pembinaan RS PONEK;• Pembinaan Operasi <i>Sectio Caesaria</i> Darurat dalam Waktu <30 menit untuk RS;• Peningkatan Kapasitas Surveilans gizi dan KIA untuk Nakes/NonNakes;• Faskes yang Terpenuhi Ketersediaan Alat/Obat Kontrasepsi (Alokon);• Penguatan Penurunan Angka Kematian Ibu, Bayi, dan Intervensi <i>Stunting</i>. <p>Kemendes, BKKBN, Kemendagri, Kemen PPPA, Pemda</p>



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

No. Perihal
Perubahan Pemutakhiran RKP Tahun 2023

188 Perubahan
Infografis *Major Project Jaringan Pelabuhan Utama Terpadu* dalam halaman III.33



a) Proyek Berstatus PSN
b) Pelaksanaan Setelah Tahun 2024



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

No. Perihal Perubahan Pemutakhiran RKP Tahun 2023

189 Perubahan Infografis Major Project Transformasi Digital (1 dari 4) dalam halaman III.34



Major Project Transformasi Digital (1 dari 4)

Impact/Outcome

- 99,5% Desa berpenduduk yang mendapatkan akses jaringan *mobile broadband* pada 2023 dan 100% desa berpenduduk yang mendapatkan akses jaringan *mobile broadband* pada 2024;
- 90% Sekolah terlayani internet dengan tujuan menunjang pembelajaran pada tahun 2024;
- 100% Standardisasi dan integrasi data dan sistem fasilitas pelayanan kesehatan pada Platform Satu Sehat.

Output MP

Pembangunan baru 332 BTS USO 4G pada tahun 2023 dan tersedianya 9.568 BTS USO 4G *On Air* pada 2024.



Akses dan Infrastruktur

Penyediaan Akses Internet Cepat

Indikator

- 6.764 Titik/lokasi BTS operasional.

RO/Proyek

- OM BTS 4G *Lastmile*;
- OM BTS 4G *Lastmile* Papua dan Papua Barat;
- OM Akses Internet Papua dan Papua Barat;
- Rekomendasi Penguatan Pemenuhan Akses dan Konsumsi Listrik pada Masyarakat;
- Rekomendasi Kebijakan Bidang Telekomunikasi dan Informatika.

Kemenkominfo,
Kemen ESDM, Kemenko
Polhukam

Pengembangan Penyiaran Digital

Indikator

- 50 Unit penyiaran digital.

RO/Proyek

- *Digital Broadcasting System* (DBS);
- Sistem Infrastruktur Penyiaran Digital;
- Dukungan Ekosistem Siaran Layanan TV Digital.

Kemenkominfo, TVRI

Frekuensi dan Perangkat TIK

Indikator

- 1 Laboratorium BBPPT.

RO/Proyek

- Pembangunan Sistem Monitoring Frekuensi Radio (SMFR);
- Pengembangan Infrastruktur SIMS;
- Rekomendasi Kebijakan yang Mendukung Optimalisasi Penyediaan Spektrum Frekuensi Radio untuk *Broadband*.

Kemenkominfo



Layanan Pemerintahan

Pusat Data Nasional

Indikator

- 2 Titik/lokasi pusat data nasional.

RO/Proyek

- *Data Center* Nasional;
- *Data Center* Swasta.

Kemenkominfo,
Kemenkes, Swasta

Penerapan SPBE Terintegrasi

Indikator

- 30 Sistem informasi cloud.

RO/Proyek

- Instansi Pusat yang menerapkan Aplikasi Kearsipan Berbagi Pakai Berbasis Elektronik (Srikandi);
- Penyelenggaraan Aplikasi Generik Berbasis Cloud Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)(Baru,Pengembangan, Operasional, dan Pemeliharaan);
- *Prototipe Cloud Services* SPBE.

ANRI, Kemenkominfo,
BPPT

Pelayanan Publik Berbasis Elektronik (E-Services) yang Terintegrasi

Indikator

- 1 Rancangan portal pelayanan publik.

RO/Proyek

- Rancangan Portal Pelayanan Publik;
- Fasilitasi Pembentukan Data Kelahiran dan Kematian yang Terintegrasi Antar Lembaga;
- *Core Tax System*;
- Sistem perizinan pusat-daerah yang terintegrasi.

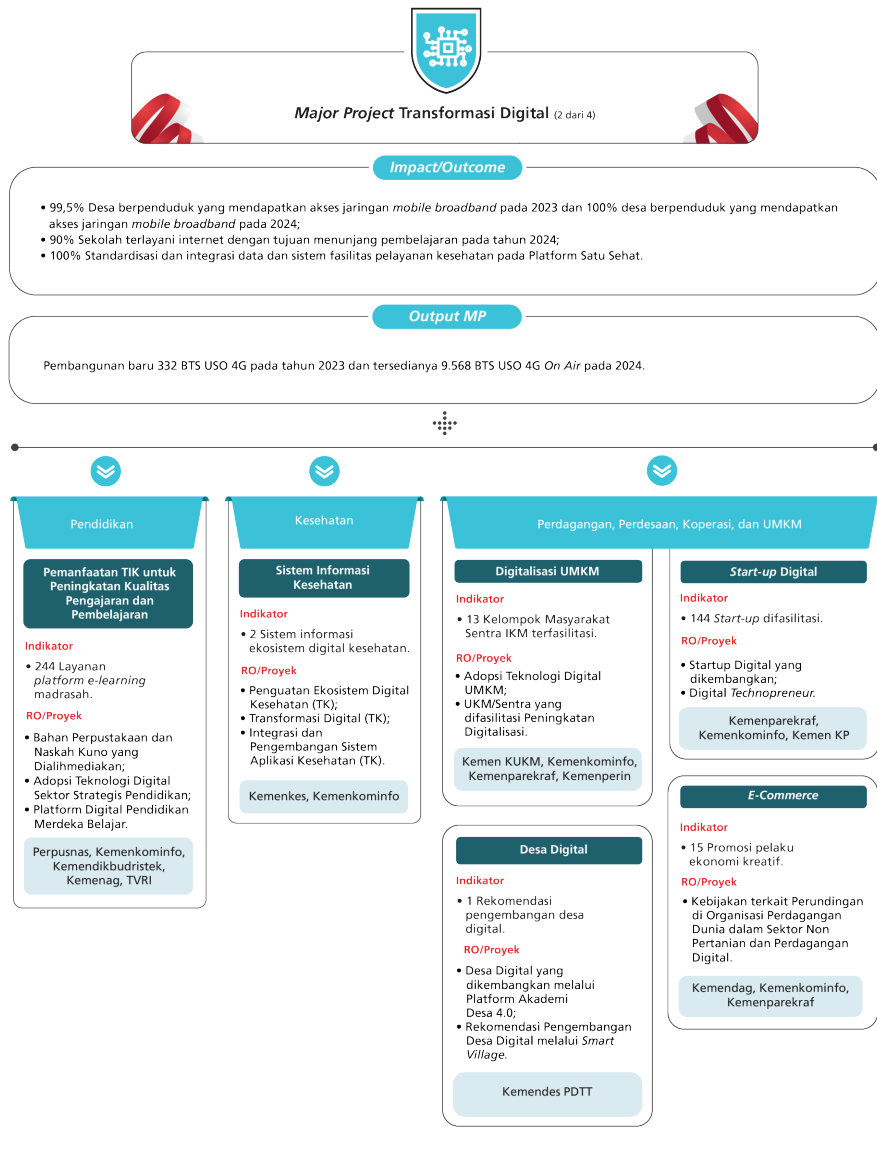
Kemen PAN-RB, Kemendagri,
Kemenkeu, Kemen KP,
Kemenkominfo



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

No. Perihal Perubahan
Pemutakhiran RKP Tahun 2023

190 Perubahan Infografis Major Project Transformasi Digital (2 dari 4) dalam halaman III.34





**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

No. Perihal
Perubahan

Pemutakhiran RKP Tahun 2023

191 Perubahan
Infografis *Major
Project
Transformasi
Digital (3 dari 4)*
dalam halaman
III.34



Major Project Transformasi Digital (3 dari 4)

Impact/Outcome

- 99,5% Desa berpenduduk yang mendapatkan akses jaringan *mobile broadband* pada 2023 dan 100% desa berpenduduk yang mendapatkan akses jaringan *mobile broadband* pada 2024;
- 90% Sekolah terlayani internet dengan tujuan menunjang pembelajaran pada tahun 2024;
- 100% Standardisasi dan integrasi data dan sistem fasilitas pelayanan kesehatan pada Platform Satu Sehat.

Output MP

Pembangunan baru 332 BTS USO 4G pada tahun 2023 dan tersedianya 9.568 BTS USO 4G On Air pada 2024.



Digitalisasi Bantuan Sosial

Digitalisasi dan Integrasi Pelaksanaan Bantuan Sosial Secara Bertahap

Indikator

- 1 Sistem dan teknologi informasi kesejahteraan sosial.

RO/Proyek

- Data Terpadu Kesejahteraan Sosial;
- Sistem dan Teknologi Informasi Kesejahteraan Sosial.

Kemensos



Industri 4.0

Pengembangan Ekosistem Inovasi, Infrastruktur Digital dan Insentif Investasi Teknologi

Indikator

- 136 Industri terfasilitasi.

RO/Proyek

- Industri Sektor Elektronika yang terfasilitasi menuju Industri 4.0 melalui Pendampingan;
- Lembaga/Komunitas /Asosiasi yang mendapat fasilitasi dalam rangka pengembangan ekosistem ekonomi digital;
- Investasi Himbara untuk Pengembangan Digital (IT);
- Pemberdayaan Industri Kecil dan Menengah Dalam Rangka Penerapan Making Indonesia 4.0.

Kemendikbud, Kemenperin, Kemenkominfo



Literasi Digital Masyarakat

Peningkatan Literasi Masyarakat

Indikator

- 5.500.000 Orang.

RO/Proyek

- Literasi Digital.

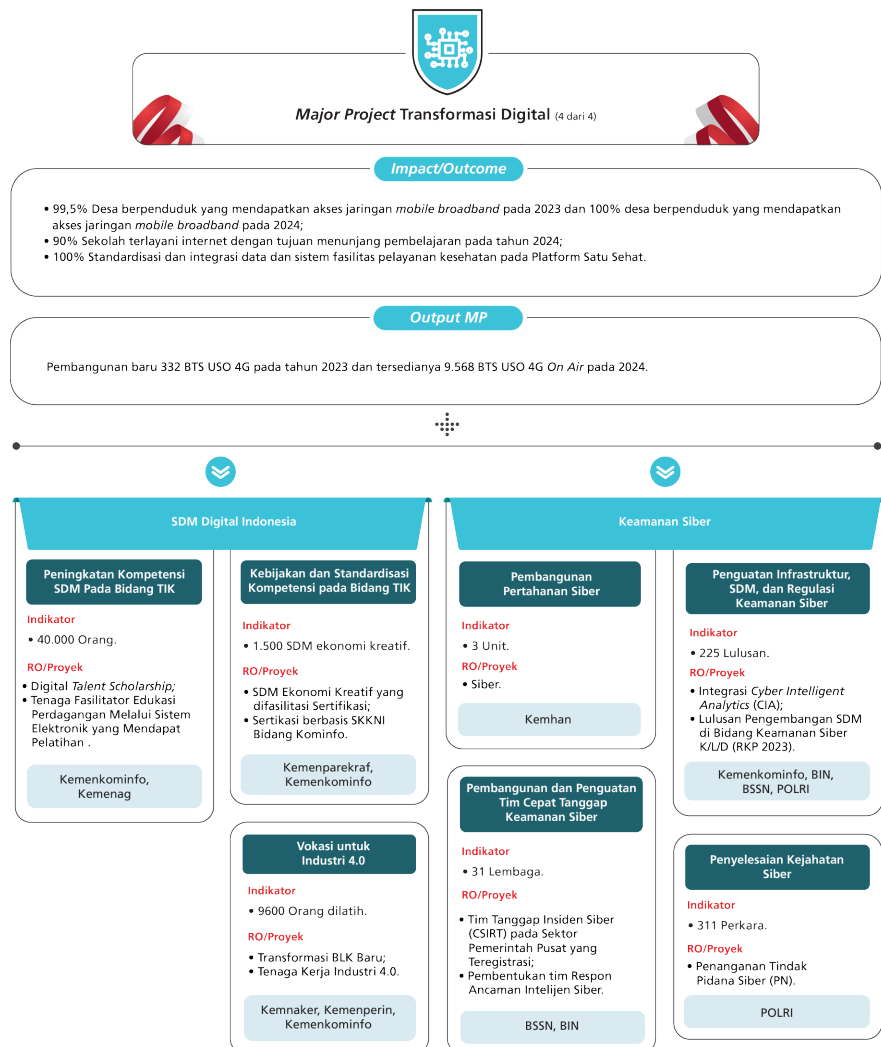
Kemenkominfo



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA


No. Perihal Perubahan Pemutakhiran RKP Tahun 2023

192 Perubahan Infografis Major Project Transformasi Digital (4 dari 4) dalam halaman III.35





PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

No.	Perihal Perubahan	Pemutakhiran RKP Tahun 2023
193	Perubahan Infografis <i>Major Project</i> Pembangunan Fasilitas Pengolahan Limbah B3 dalam halaman III.36	<div style="text-align: center;"><p>Major Project Pembangunan Fasilitas Pengolahan Limbah B3</p></div> <div style="text-align: center;">Impact/Outcome</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin: 5px 0;">Mendukung pencapaian target Indeks Kualitas Lingkungan Hidup menuju 69,48 di tahun 2023 dan 69,74 di tahun 2024.</div> <div style="text-align: center;">Output MP</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin: 5px 0;"><ul style="list-style-type: none">• Meningkatkan kapasitas terpasang pengolahan limbah B3 sebesar ±4.680 ton pada tahun 2023;• Jumlah pembangunan fasilitas pengolahan limbah B3 dari sumber fasilitas pelayanan kesehatan sebanyak 10 unit pada tahun 2023 dan 11 unit pada tahun 2024;• Jumlah pembangunan fasilitas pengolahan limbah B3 terpadu sebanyak 1 unit pada tahun 2023 dan 2 unit pada tahun 2024;• Penambahan kapasitas pengolahan limbah B3 dari sumber fasilitas pelayanan kesehatan sejumlah ±19 ribu ton di tahun 2024;• Penambahan kapasitas pengolahan limbah B3 dari sumber industri dan usaha/kegiatan lainnya sejumlah ±2 juta ton di tahun 2024.</div> <div style="display: flex; justify-content: space-around; margin: 10px 0;"><div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: 45%;"><div style="text-align: center;">Fasilitas Pengolahan Limbah B3 Medis dari Fasyankes</div><div style="text-align: center; background-color: #004a7c; color: white; padding: 5px;">Pembangunan Fasilitas Pengolahan Limbah B3 Medis</div><div><p>Indikator</p><ul style="list-style-type: none">• 10 fasilitas pengolahan limbah B3 dari fasyankes yang dibangun (unit).<p>RO/Proyek</p><ul style="list-style-type: none">• Pembangunan Fasilitas Pengolahan Limbah B3 dari Fasyankes.<div style="text-align: center; background-color: #004a7c; color: white; padding: 5px;">Kemen LHK</div></div></div><div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: 45%;"><div style="text-align: center;">Fasilitas Pengolahan Limbah B3 Terpadu</div><div style="text-align: center; background-color: #004a7c; color: white; padding: 5px;">Pembangunan Fasilitas Pengolahan Limbah B3 Terpadu</div><div><p>Indikator</p><ul style="list-style-type: none">• 3 fasilitas pengolahan limbah B3 terpadu yang dibangun (unit).<p>RO/Proyek</p><ul style="list-style-type: none">• Persiapan Pembangunan Fasilitas Pengelolaan Limbah B3 dan Sampah Spesifik secara Terpadu.<div style="text-align: center; background-color: #004a7c; color: white; padding: 5px;">Kemen LHK</div></div></div></div> <div style="display: flex; justify-content: space-around; margin: 10px 0;"><div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: 45%;"><div style="text-align: center; background-color: #004a7c; color: white; padding: 5px;">Enablers</div><div><p>Indikator</p><ul style="list-style-type: none">• 340 daerah yang dilakukan Fasilitas dan Pembinaan Pemerintah Daerah dalam rangka penyehatan lingkungan di (prov/kab/kota).<p>RO/Proyek</p><ul style="list-style-type: none">• Fasilitas dan Pembinaan Pemerintah Daerah dalam rangka penyehatan lingkungan;• Data dan Informasi Publik Penyehatan Lingkungan;• Bantuan Peralatan/Sarana Penyehatan Lingkungan.<div style="text-align: center; background-color: #004a7c; color: white; padding: 5px;">Kemenkes</div></div></div><div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: 45%;"><div style="text-align: center; background-color: #004a7c; color: white; padding: 5px;">Enablers</div><div><p>Indikator</p><ul style="list-style-type: none">• 1 rekomendasi kebijakan pengelolaan limbah B3 di sektor industri (kebijakan).<p>RO/Proyek</p><ul style="list-style-type: none">• Kebijakan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya Beracun (B3) di Sektor Industri.<div style="text-align: center; background-color: #004a7c; color: white; padding: 5px;">Kemenperin</div></div></div></div>
194	Perubahan alinea kedua dalam halaman IV.3	Untuk mendukung peningkatan pengelolaan kemaritiman, perikanan, dan kelautan, tantangan yang dihadapi pada fokus peningkatan produktivitas di antaranya (1) masih perlunya penataan Wilayah Pengelolaan Perikanan (WPP) dari aspek pendataan stok perikanan dan perizinan untuk usaha perikanan; (2) produktivitas perikanan, baik perikanan tangkap maupun budi daya masih belum optimal akibat usaha perikanan yang ada cenderung tersebar dan berskala kecil, dengan menggunakan teknologi tradisional, serta sarana dan prasarana pendukung yang ada belum memadai; (3) kurangnya ketersediaan bahan baku yang berkualitas untuk industri pengolahan yang belum didukung dengan rantai dingin yang terintegrasi dari hulu ke hilir sehingga distribusi produk perikanan masih terkendala; serta (4) masih belum optimalnya pemanfaatan jasa kelautan non perikanan. Sedangkan tantangan pada fokus inklusif meliputi



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

No.	Perihal Perubahan	Permutakhiran RKP Tahun 2023
		kapasitas SDM kelautan dan perikanan yang masih perlu ditingkatkan, minimnya literasi finansial, akses pendanaan dan perlindungan usaha yang masih rendah, dan kelembagaan usaha kelautan dan perikanan yang masih lemah.
195	Perubahan alinea keempat dalam halaman IV.3 dan alinea pertama dalam halaman IV.4	<p>Untuk mendukung peningkatan nilai tambah, lapangan kerja, dan investasi di sektor riil, dan industrialisasi, beberapa sektor utama yang akan didorong adalah industri, pariwisata, dan investasi. Tantangan yang dihadapi sektor industri dan pariwisata adalah berbagai risiko baik di tingkat global maupun dalam negeri di tahun 2022. Pemulihan industri pengolahan berlangsung lebih cepat, namun menghadapi tantangan perlu ditingkatkannya produktivitas, risiko berlanjutnya gangguan rantai pasok global, peningkatan harga bahan baku sebagai dampak peningkatan harga komoditas, serta percepatan revitalisasi industri bernilai tambah tinggi. Pada fokus peningkatan nilai tambah yang berkelanjutan, tantangan di sektor industri pengolahan adalah percepatan pembangunan ekosistem untuk produksi dan adopsi kendaraan bermotor listrik berbasis baterai. Sementara itu pada fokus inklusif, tantangan yang dihadapi oleh sektor industri pengolahan yaitu masih perlu ditingkatkannya penggunaan produk-produk industri pengolahan dalam negeri dan aktivitas industri pengolahan di luar Pulau Jawa. Tantangan terkait pemulihan di sektor pariwisata berkaitan dengan prosesnya yang berjalan bertahap. Pembukaan Bali di tahun 2022 menjadi tonggak untuk peningkatan aksesibilitas yang disertai dengan kesiapan pengelolaan risiko dari pergerakan wisatawan.</p> <p>Tantangan pemulihan tersebut juga berkaitan dengan perlunya peningkatan aspek berkelanjutan di sektor pariwisata yang masih difokuskan pada efektivitas penanganan kasus COVID-19, serta konsistensi penerapan standar <i>Cleanliness, Health, Safety and Environmental sustainability</i> (CHSE) di destinasi dan industri pariwisata. Keberhasilan pemulihan pariwisata akan berdampak positif bagi peningkatan produktivitas di sektor-sektor terkait dalam rantai pasoknya, serta perluasan peluang yang lebih inklusif bagi partisipasi usaha pariwisata berbasis masyarakat.</p> <p>Selanjutnya, tantangan yang dihadapi oleh sektor investasi pada fokus produktivitas di antaranya (1) Proses penyesuaian UU No. 11/2020 tentang Cipta Kerja (UUCK) berpotensi berpengaruh pada kepercayaan investor karena adanya putusan Mahkamah Konstitusi yang menyatakan UUCK adalah inkonstitusional bersyarat dan diberikan waktu 2 tahun untuk memperbaikinya, (2) tantangan berikutnya soal status lahan dan juga kemudahan perizinan, serta (3) fasilitas dan juga insentif yang tepat sasaran diperlukan dalam menarik investor. Selain itu perlu dilakukan langkah-langkah yang efektif dalam menarik minat investor dan tidak hanya menjadi sebatas minat namun dapat menjadi sebuah realisasi investasi. Tren ekonomi dunia yang mengarah pada ekonomi hijau juga menjadi tantangan baru untuk menentukan arah kebijakan yang mengadopsi pemahaman tentang <i>Green Economy</i>.</p>
196	Perubahan alinea ketiga dalam halaman IV.4	Untuk penguatan pilar pertumbuhan dan daya saing ekonomi, tantangan yang dihadapi pada fokus produktivitas di antaranya (1) normalisasi kebijakan (pengetatan likuiditas) yang diambil oleh bank sentral khususnya Federal Reserve berpotensi memengaruhi kondisi likuiditas dan aliran modal ke Indonesia, (2) risiko kredit yang juga belum sepenuhnya pulih sehingga berpotensi mengurangi penyaluran kredit atau pembiayaan kepada dunia usaha dan pembiayaan APBN, (3) masih rendahnya rasio perpajakan terhadap PDB yang disebabkan belum tergalinya potensi pajak dan kondisi perekonomian yang belum sepenuhnya pulih serta tingkat kepatuhan wajib pajak yang masih belum optimal, (4) belum optimalnya



**PRESIDEN
REPUBLIC INDONESIA**

No.	Perihal Perubahan	Pemutakhiran RKP Tahun 2023
		<p>kebijakan alokasi TKD dalam mendukung pertumbuhan ekonomi daerah, (5) terbatasnya kemampuan UMKM untuk mengadopsi teknologi bagi pengembangan usahanya, dan (6) keandalan dan pemerataan konektivitas untuk mendukung tingginya arus pengiriman barang. Selanjutnya, tantangan pada fokus inklusif yaitu (1) transformasi digital pada sektor keuangan; (2) ketimpangan antara inklusi dengan literasi keuangan; (3) banyaknya kasus penipuan dan pelanggaran perlindungan konsumen; (4) kurang efektifnya kinerja logistik yang menyebabkan tingginya variasi harga bahan pokok dan barang penting; (5) akselerasi ekonomi digital yang ditandai transaksi perdagangan yang minim mobilitas berbasis <i>e-commerce</i>; (6) belum termanfaatkannya secara optimal sarana perdagangan yang sudah dibangun; serta (7) semakin dinamis dan berkembangnya komoditas baru dalam ekonomi digital, seperti adanya <i>crypto currencies</i> dan munculnya <i>metaverse</i>. Tantangan yang dihadapi pada fokus berkelanjutan di antaranya (1) belum optimalnya pembiayaan hijau dan (2) belum optimalnya penerapan pariwisata berkelanjutan. Berbagai upaya dilakukan untuk mencapai sasaran-sasaran pembangunan nasional salah satunya melalui subsidi, baik energi maupun non-energi. Kebijakan subsidi menjadi bagian dari kebijakan belanja negara di tahun 2023 yang diarahkan untuk mencapai sasaran pembangunan nasional dan sebagai upaya percepatan transformasi ekonomi.</p>

197 Perubahan
Tabel 4.1 dalam
halaman IV.5

Tabel 4.1
Sasaran, Indikator, dan Target
PN 1 Memperkuat Ketahanan Ekonomi
untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan

No.	Sasaran/Indikator	Baseline 2019	Realisasi		Target		
			2020	2021	2022	2023	2024
1.	Meningkatnya daya dukung dan kualitas sumber daya ekonomi sebagai modalitas bagi pembangunan ekonomi yang berkelanjutan						
1.1	Porsi EBT dalam bauran energi nasional (%)	9,18	11,20	11,70	15,70	17,90	~23,00
1.2	Skor Pola Pangan Harapan (PPH) (nilai)	87,90	86,30	87,20	92,40	94,00	95,20
1.3	Pengelolaan dan pemanfaatan Wilayah Pengelolaan Perikanan (WPP) secara berkelanjutan (WPP)	11	11	11	11	11	11
2.	Meningkatnya nilai tambah, lapangan kerja, investasi, ekspor, dan daya saing perekonomian						
2.1	Rasio kewirausahaan nasional (%)	3,27	2,93	2,89	3,18 ^{b)}	3,21 ^{b)}	3,23 ^{b)}
2.2	Pertumbuhan PDB pertanian (%) ^{a)}	3,61	1,77	1,84	3,60–3,80	3,2–3,6	4,00–4,10
2.3	Pertumbuhan PDB perikanan (%)	5,81	0,73	5,45	4,00–6,00	5,00–6,00	8,71
2.4	Pertumbuhan PDB industri pengolahan (9.2.1) (%)	3,8	-2,93	3,39	5,30–5,70	5,30–5,60	8,10
2.5	Kontribusi PDB industri pengolahan (9.2.1) ^{a)} (%)	19,70	19,87	19,25	19,90	20,60	21,00
2.6	Nilai devisa pariwisata (8.9.1) ^{c)a)} (miliar US\$)	19,7	3,38	0,52	0,86–1,71	2,07–9,05	7,38–13,08



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

No.	Perihal Perubahan	Pemutakhiran RKP Tahun 2023								
198	Perubahan Tabel 4.1 dalam halaman IV.6	No.	Sasaran/Indikator	<i>Baseline</i> 2019	Realisasi		Target			
					2020	2021	2022	2023	2024	
		2.7	Kontribusi PDB pariwisata (8.9.1) ^{a)} (%)	4,97	2,24	2,40 ^{b)}	3,60	4,10	4,50	
		2.8	Penyediaan lapangan kerja per tahun (juta orang)	2,47	-0,30	2,60	2,6–3,1	2,7–3,1 ^{e)}	2,7–3,0	
		2.9	Pertumbuhan investasi (PMTB) (%)	4,4	-4,9	3,8	5,4–6,3	6,1–6,3	5,8–7,7	
		2.10	Pertumbuhan ekspor industri pengolahan (%)	-2,60	3,61	35,11	8,45	11,18	10,10	
		2.11	Pertumbuhan ekspor riil barang dan jasa (%)	-0,9	-7,7	24,0	5,1–5,5	5,3–6,6	6,2	
		2.12	Rasio perpajakan terhadap PDB (17.1.1) ^{a)} (%)	9,76	8,33	9,12 ^{c)}	9,55	9,60 ^{b)}	10,22–10,71 ^{d)}	
		<p>Sumber: Dokumen RPJMN Tahun 2020-2024; Rencana Strategis K/L Tahun 2020-2024; Pemutakhiran RKP 2022;</p> <p>Keterangan: a) Indikator nasional yang sesuai dengan indikator global untuk <i>Sustainable Development Goals</i> (SDGs); b) Penyesuaian target Rasio Kewirausahaan Nasional sesuai dengan hasil <i>exercise</i> Kementerian PPN/Bappenas berdasarkan capaian 2020-2021 yang kurang dari target akibat pandemi COVID-19; c) Angka Realisasi LKPP <i>Audited</i>; d) Angka Proyeksi Kementerian PPN/Bappenas; e) Angka target tahun 2023 masih dalam perhitungan; f) Indikator pertumbuhan PDB pertanian sama dengan pertumbuhan PDB pertanian, kehutanan, dan perikanan; g) Angka Proyeksi Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Baparekraf; serta h) Angka berdasarkan UU No.28/2022 tentang APBN tahun 2023.</p>								
		199	Perubahan Tabel 4.2 dalam halaman IV.7	Tabel 4.2 Sasaran, Indikator, dan Target PP dari PN 1 Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan						
				No.	Sasaran/Indikator	<i>Baseline</i> 2019	Realisasi		Target	
							2020	2021	2022	2023
PP 1. Pemenuhan Kebutuhan Energi dengan Mengutamakan Peningkatan Energi Baru Terbarukan (EBT)										
Meningkatnya pemenuhan kebutuhan energi dengan mengutamakan peningkatan Energi Baru Terbarukan (EBT)										
1.1	Kapasitas terpasang pembangkit EBT (gigawatt) - kumulatif			10,29	10,50	11,15	13,91	14,31	19,20	
1.2	Pemanfaatan <i>biofuel</i> untuk domestik (juta kilo liter)			6,39	8,40	9,30	9,60	10,65	17,40	
PP 2. Peningkatan kuantitas/ketahanan air untuk mendukung pertumbuhan ekonomi										
Meningkatnya kuantitas/ketahanan air untuk mendukung pertumbuhan ekonomi										
2.1	Produktivitas air (<i>water productivity</i>) (kg/m ³) ^{g)}			N/A ^{h)}	3,34 ¹⁾	3,51 ¹⁾	3,57 ¹⁾	3,63	3,67 ¹⁾	



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

No.	Perihal Perubahan	Pemutakhiran RKP Tahun 2023					
No.	Sasaran/Indikator	<i>Baseline</i> 2019	<i>Realisasi</i>		<i>Target</i>		
			2020	2021	2022	2023	2024
PP 3. Peningkatan ketersediaan, akses, dan kualitas konsumsi pangan							
Meningkatnya ketersediaan, akses, dan kualitas konsumsi pangan							
3.1	Nilai Tukar Petani (NTP)	100,90	101,65	104,64	103,00–105,00	105,00–107,00	105,00
3.2	Angka Kecukupan Energi (AKE) (kkal/kapita/hari)	2.138,00	2.125,00	2.143,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
3.3	Angka Kecukupan Protein (AKP) (gram/kapita/hari)	62,87	62,05	62,28	57,00	57,00	57,00
3.4	<i>Prevalence of Undernourishment (PoU)</i> (%)	7,63	8,34	8,49	5,50	5,20	5,00
3.5	<i>Food Insecurity Experience Scale (FIES)</i> (%)	5,42	5,12	4,79	4,50	4,20	4,00
PP 4. Peningkatan pengelolaan kemaritiman, perikanan, dan kelautan							
Meningkatnya pengelolaan kemaritiman, perikanan, dan kelautan							
4.1	Konservasi kawasan kelautan (14.5.1)a) (juta ha)	23,14	24,11	28,41	25,10	29,10	30,00
4.2	Proporsi tangkapan jenis ikan yang berada dalam batasan biologis yang aman (14.4.1)a) (%)	52,87	51,78	51,93 ^{e)}	≤72	≤76	≤80
4.3	Produksi perikanan (juta ton)	22,76	21,83	21,84 ^{e)}	29,42	30,58	32,75
4.4	Produksi garam (juta ton)	2,85	1,37	1,09	2,60	2,00	3,40
4.5	Nilai Tukar Nelayan	100,23	100,22	104,69	104,00–106,00	107,00–108,00	107,00
PP 5. Penguatan kewirausahaan, Usaha Mikro, Kecil Menengah (UMKM) dan koperasi							
Menguatnya kewirausahaan, Usaha Mikro, Kecil Menengah (UMKM) dan koperasi							
5.1	Rasio kredit UMKM terhadap total kredit perbankan (%) (8.10.1) ^{e) d)}	19,89 ¹⁾	19,67	21,02	20,88	21,44	22,00



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

No.	Perihal Perubahan	Pemutakhiran RKP Tahun 2023					
No.	Sasaran/Indikator	<i>Baseline</i> 2019	Realisasi		Target		
			2020	2021	2022	2023	2024
201	Perubahan Tabel 4.2 dalam halaman IV.9						
5.2	Pertumbuhan wirausaha (%)	1,71 ¹⁾	-7,17	0,08	2,57 ^{b)}	2,74 ^{b)}	2,90 ^{b)}
5.3	Kontribusi koperasi terhadap PDB (%)	5,54	6,20	6,20	5,30	5,40	5,50
PP 6. Peningkatan nilai tambah, lapangan kerja, dan investasi di sektor riil, dan industrialisasi							
Meningkatnya nilai tambah, lapangan kerja, dan investasi di sektor riil, dan industrialisasi							
6.1	Pertumbuhan PDB industri pengolahan nonmigas (%)	4,34	-2,52	3,67	5,30– 5,70	5,50– 5,90	8,40
6.2	Kontribusi PDB industri pengolahan nonmigas (%)	17,58	17,88	17,36	18,00– 18,10	18,80	18,90
6.3	Nilai tambah ekonomi kreatif (triliun rupiah)	1.153,4	1.134,9	1.191,0	1.236,0	1.279,0	1.347,0
6.4	Jumlah tenaga kerja industri pengolahan (juta orang)	18,90	17,48	18,69	20,90	21,70	22,50
6.5	Kontribusi tenaga kerja di sektor industri terhadap total pekerja (9.2.2) ^{a)} (%)	14,96	13,61	14,30	15,00	15,50	15,70
6.6	Jumlah tenaga kerja pariwisata (8.9.2) ^{a)} (juta orang)	20,8	20,4	21,2	21,64	21,93	22,08
6.7	Jumlah tenaga kerja ekonomi kreatif (juta orang)	19,50	19,39	21,90	22,29	22,59	22,74
6.8	Nilai realisasi PMA dan PMDN (triliun rupiah)	809,6	826,3	901,0	968,4	1.200– 1.300	1.239,3
6.9	Nilai realisasi PMA dan PMDN industri pengolahan (triliun rupiah)	215,9	272,9	325,4	352,5	396– 420	646,1
6.10	Pertumbuhan PDB pertanian, peternakan, perburuan dan jasa pertanian (%)	3,31	2,13	1,08	3,60– 3,80	3,60– 3,80	3,60– 3,80



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

No.	Perihal Perubahan	Pemutakhiran RKP Tahun 2023					
No.	Sasaran/Indikator	<i>Baseline</i> 2019	Realisasi		Target		
			2020	2021	2022	2023	2024
202	Perubahan Tabel 4.2 dalam halaman IV.10						
PP 7. Peningkatan ekspor bernilai tambah tinggi dan penguatan Tingkat Kandungan Dalam Negeri (TKDN)							
Meningkatnya ekspor bernilai tambah tinggi dan penguatan Tingkat Kandungan Dalam Negeri (TKDN)							
7.1	Neraca perdagangan barang (miliar US\$)	3,5	28,3	43,8	31,4– 31,7 ¹⁾	40,4– 44,9	15,0 ²⁾
7.2	Pertumbuhan ekspor nonmigas (%)	-4,3	-0,6	41,5	0,8– 1,2 ¹⁾	1,2– 3,7	9,8 ²⁾
7.3	Jumlah wisatawan mancanegara (8.9.1) ^{a)} (juta kunjungan)	16,11	4,05	1,56	1,8– 3,6	3,5– 7,4	9,5– 14,3
7.4	Jumlah kunjungan wisatawan nusantara (juta perjalanan) ^{b)}	722,16	524,60	603,02	633– 703	1.200– 1.400	1.250– 1.500
7.5	Pertumbuhan ekspor produk industri berteknologi tinggi (%) ^{c)}	-8,2	2,4	37,7	8,2– 10,1 ¹⁾	8,5– 10,7	11,5
PP 8. Penguatan pilar pertumbuhan dan daya saing ekonomi							
Menguatnya pilar pertumbuhan dan daya saing ekonomi							
8.1	Kontribusi sektor jasa keuangan/PDB (%)	4,24	4,51	4,34	4,55– 4,56	4,15– 4,21	4,57– 4,58
8.2	Skor <i>logistic performance index</i> (skor)	3,15	3,15	3,15	3,4 ¹⁾	3,4 ²⁾	3,5 ²⁾
8.3	Rasio M2/PDB (%)	44,7	46,4	48,0	48,3– 49,4	48,2– 48,9	50,7– 51,4
8.4	Peringkat <i>travel and tourism development index</i> (peringkat)	40	N/A ^{b)}	32	N/A ^{b)}	29–34	N/A ^{b)}
8.5	Pembaruan sistem inti administrasi perpajakan (<i>core tax administration system</i>) (%)	0	1,97	29	66 ^{d)}	96 ^{d)}	100



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

No.	Perihal Perubahan	Pemutakhiran RKP Tahun 2023							
203	Perubahan Tabel 4.2 dalam halaman IV.11	No.	Sasaran/Indikator	<i>Baseline</i> 2019	Realisasi		Target		
					2020	2021	2022	2023	2024
		8.6	Imbal hasil (<i>yield</i>) surat berharga negara (%)	7,30	6,99	6,37	menu- run	menu- run	menu- run
		8.7	Rasio TKDD yang berbasis kinerja terhadap TKDD meningkat (%)	10,38	26,05	26,18	28,94	31,94	34,94
8.8	Penyediaan data ekonomi dan sosial yang berkualitas (<i>database</i>) ^l	5 ^k	8 ^k	6 ^k	6 ^k	8	8		
<p>Sumber: Dokumen RPJMN Tahun 2020-2024; Rencana Strategis K/L Tahun 2020-2024; Pemutakhiran RKP 2022; l) Target Pemutakhiran RKP 2022; dan 2) Target Pemutakhiran RPJMN 2020-2024.</p> <p>Keterangan: a) Indikator nasional yang sesuai dengan indikator global untuk <i>Sustainable Development Goals</i> (SDGs); b) Penyesuaian target Pertumbuhan Wirausaha sesuai dengan hasil <i>exercise</i> Kementerian PPN/Bappenas berdasarkan capaian 2020 – 2021 yang kurang dari target akibat pandemi COVID-19; c) Angka dalam kurung pada indikator menunjukkan indikator SDGs; d) Indikator pada level KP yang baru diusulkan untuk naik menjadi indikator level PP; e) Angka realisasi 2021 sementara; f) Indikator baru ada pada tahun 2020/data belum rilis; g) Angka realisasi 2021 dan target 2023 masih dikonfirmasi; h) Indikator baru pada level PP; i) Perhitungan menggunakan metodologi baru menggunakan teknologi <i>Mobile Positioning Data</i> (MPD); j) Berdasarkan hasil <i>Trilateral Meeting</i> Renja Kementerian Keuangan TA 2022; k) Merupakan angka target dan realisasi indikator pada level KP; dan l) Data TTDI terbit 2 tahun sekali pada tahun ganjil.</p>									
204	Perubahan alinea pertama dalam halaman IV.11	<p>(1) pada PP Pemenuhan Kebutuhan Energi dengan Mengutamakan Peningkatan EBT, transisi menuju energi rendah karbon yang mendukung fokus produktivitas dilaksanakan melalui berbagai strategi yaitu (a) optimalisasi penambahan kapasitas terpasang PLT EBT terutama di daerah defisit listrik melalui mobilisasi berbagai skema pendanaan dan insentif fiskal, (b) peningkatan kualitas cadangan migas dan potensi EBT secara masif sebagai bentuk dukungan penurunan risiko (<i>derisking</i>) dan pemenuhan energi nasional dengan pelibatan berbagai pemangku kepentingan, (c) optimalisasi produksi <i>biofuel</i> disertai kebijakan <i>demand management</i> dalam negeri, serta (d) pengembangan energi baru terutama <i>Dimethyl Ether</i> (DME) dan <i>green hydrogen</i>. Sedangkan strategi yang mendukung fokus inklusif dalam transisi energi rendah karbon, antara lain (a) penyelesaian segala hambatan dan permasalahan pembangunan PLT energi terbarukan (ET) <i>on-grid</i> yang sudah termuat dalam RUPTL PLN 2021-2030, serta pembangunan PLT ET <i>off-grid</i> untuk daerah 3T, (b) restrukturisasi subsidi energi fosil ke subsidi EBT secara bertahap, dan (c) penguatan kewenangan Pemda dalam pengelolaan EBT skala kecil. Sementara itu, strategi lain dalam pemenuhan kebutuhan energi untuk mendukung fokus pembangunan berkelanjutan yang dilakukan adalah (a) fasilitasi dan implementasi perjanjian jual beli listrik dengan harga beli EBT yang berkeadilan, (b) pengembangan teknologi penyimpanan energi, dan (c) mempercepat implementasi penggunaan Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai (KBLBB) termasuk kebijakan pendukungnya.</p>							
205	Perubahan alinea kedua dalam halaman IV.12	<p>(3) pada PP Peningkatan Ketersediaan, Akses, dan Kualitas Konsumsi Pangan, strategi yang dilakukan pada fokus peningkatan produktivitas yaitu (a) peningkatan ketersediaan pangan dengan mengutamakan dari produksi dalam negeri guna mengurangi ketergantungan impor terutama kedelai, pengawalan produksi, produksi pangan yang beragam, pengembangan kawasan sentra produksi pangan, peningkatan produktivitas komoditas pertanian, penyediaan sarana produksi peningkatan Indeks Pertanaman (IP), perbaikan kualitas dan penguatan sistem perbenihan tanaman, dan Ekosistem pengembangan padi hibrida untuk mengatasi stagnasi produktivitas padi; (b) pemanfaatan digital dan pertanian presisi dalam sistem pertanian hulu-hilir serta penguatan data</p>							



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

No.	Perihal Perubahan	Pemutakhiran RKP Tahun 2023
		<p>petani; dan (c) mendorong terciptanya sumber daya manusia pertanian yang berdaya saing dengan penguatan kelembagaan pertanian (korporasi petani), peningkatan peran penyuluh pertanian dan modernisasi pertanian untuk menarik minat petani muda dan efisiensi tenaga kerja pertanian. Selanjutnya, strategi yang dilakukan pada fokus inklusif di antaranya (a) penguatan tata kelola sistem pangan dengan penguatan sistem logistik pangan nasional dan transformasi sistem pangan yang berkelanjutan; (b) peningkatan kualitas konsumsi pangan dengan percepatan peningkatan nilai Pola Pangan Harapan (PPH) dan peningkatan konsumsi sayur dan buah; serta (c) pengembangan pertanian keluarga. Pada fokus berkelanjutan, strategi yang dilakukan yaitu menjaga keberlanjutan sumber daya pertanian dengan upaya konservasi lahan produktif, budi daya rendah karbon, penerapan pertanian regeneratif, penerapan prinsip ekonomi sirkular, dan peningkatan layanan dan fungsi karantina nasional yang terintegrasi dalam kelembagaan satu atap dengan berbasis sarana dan prasarana sistem ketertelusuran.</p>
206	Perubahan alinea ketiga dalam halaman IV.12	<p>(4) PP Peningkatan Pengelolaan Kemaritiman, Perikanan dan Kelautan dilaksanakan melalui pengelolaan yang berkelanjutan baik dari aspek ekonomi, sosial dan lingkungan. Strategi yang dilakukan pada fokus produktivitas mencakup (a) penguatan kelembagaan pengelola WPP, penguatan data stok sumber daya ikan, dan penataan perizinan usaha perikanan; (b) pemberian bantuan sarana dan prasarana produksi kepada nelayan, pembudidaya, pengolah dan pemasar, serta pengembangan usaha perikanan berbasis sentra dalam bentuk klaster kawasan tambak udang dan bandeng, kampung perikanan budidaya, dan kampung nelayan; (c) penyediaan sarana dan prasarana perikanan termasuk pelabuhan perikanan ramah lingkungan dan pasar ikan bertaraf internasional; (d) penguatan sistem logistik ikan melalui peningkatan ketelusuran produk, penyediaan sarana dan prasarana rantai dingin, sistem resi gudang untuk produk perikanan, serta penguatan jaminan mutu dan keamanan produk kelautan dan perikanan sehingga tercipta rantai pasok produk kelautan dan perikanan bernilai tinggi yang lebih efisien dan berkelanjutan dari hulu ke hilir; (e) penguatan penerapan teknologi dan pendataan, serta penumbuhan iklim inovasi di sektor kelautan dan perikanan penguatan kelembagaan usaha; serta (f) pemanfaatan jasa kelautan, termasuk garam, wisata bahari dan pengelolaan Benda Muatan Kapal Tenggelam (BMKT). Adapun strategi pada fokus inklusif meliputi penguatan kelembagaan usaha kelautan dan perikanan melalui pengembangan korporasi, perlindungan dan penyuluhan bagi pelaku usaha kelautan dan perikanan termasuk digitalisasi usaha kelautan dan perikanan.</p>
207	Perubahan alinea kedua dalam halaman IV.13	<p>(6) pada PP Peningkatan Nilai Tambah, Lapangan Kerja, dan Investasi di Sektor Riil, dan Industrialisasi, strategi yang mendukung fokus produktivitas mencakup (a) perbaikan rantai pasok dan <i>reskilling</i> dan <i>upskilling</i> tenaga kerja; (b) peningkatan lokalisasi produk dan bahan baku impor; (c) akselerasi hilirisasi komoditas mineral dan batu bara melalui pembangunan smelter dan infrastruktur pendukung; (d) pengembangan pertambangan rakyat yang bernilai tambah; (e) peningkatan kualitas dan inovasi produk yang didukung komersialisasi hasil riset dan penguatan infrastruktur kualitas; (f) penguatan ekosistem pemampu industri bernilai tambah dan berteknologi tinggi, termasuk industri kedirgantaraan; (g) percepatan pembangunan infrastruktur, amenities dan atraksi di 5 Destinasi Pariwisata Super Prioritas dengan dukungan investasi, <i>event</i>, dan <i>meeting, incentive, conference and exhibition</i>; (h) <i>scaling-up start-up</i> ekonomi kreatif dan digital yang didukung akses pembiayaan berbasis</p>



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

No.	Perihal Perubahan	Pemutakhiran RKP Tahun 2023
208	Perubahan alinea ketiga dalam halaman IV.13	<p>HKI dan investasi; (i) akselerasi pengembangan industri perfilman melalui berbagai skema pendanaan dan insentif fiskal; (j) penguatan ekosistem industri berbasis konten, terutama film; (k) harmonisasi dan simplifikasi peraturan yang menghambat investasi di level pusat dan daerah sesuai dengan UU No.11/2020 tentang Cipta Kerja untuk meningkatkan kepercayaan investor dan menjamin kepastian usaha; (l) percepatan penyelesaian isu status lahan, penyusunan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR); (m) penguatan peran satgas investasi melalui pendampingan dan penyelesaian permasalahan investasi; (n) pengintegrasian sistem perizinan di tingkat pusat pada sistem OSS RBA dan implementasi sistem perizinan melalui sistem OSS di daerah; (o) peningkatan investasi skala besar dan menyerap tenaga kerja, utamanya pada sektor industri pengolahan; (p) penyusunan peta potensi daerah guna efektif mendukung promosi investasi kepada investor; (q) peningkatan investasi yang berbasis ekspor dan sektor teknologi informasi dan komunikasi; (r) peningkatan efektivitas dan ketepatan sasaran insentif untuk investor, serta (s) penguatan hilirisasi komoditas pertanian, didukung dengan perbaikan kualitas dan kuantitas produksi dan penguatan sistem perbenihan melalui penyediaan sarana pengujian kemurnian benih dan pengembangan <i>nursery</i> perkebunan serta penguatan yurisdiksi berkelanjutan. Selanjutnya strategi yang mendukung fokus inklusif yakni (a) pengembangan produk dan industri halal sesuai Master Plan Industri Halal; (b) penguatan desa wisata; (c) fasilitasi peningkatan kualifikasi produk untuk dapat dicantumkan dalam <i>e-catalogue</i>; (d) percepatan penyiapan dan peningkatan investasi utamanya di kawasan industri di luar Jawa, dan (e) revitalisasi infrastruktur ekonomi kreatif termasuk klaster/kota kreatif dan regenerasi kota warisan. Selanjutnya strategi yang mendukung fokus berkelanjutan yakni (a) investasi terkait dengan pengembangan KBLBB dan ekosistem KBLBB; (b) mendorong industri dalam ekosistem KBLBB termasuk di dalamnya industri baterai dan produksi kendaraan bermotor dalam negeri; (c) peningkatan konsistensi penerapan CHSE di destinasi dan industri pariwisata; dan (d) fasilitasi kemudahan investasi hijau. Khusus untuk pemulihan pariwisata, strategi yang akan dilaksanakan yaitu (a) penambahan kemudahan aksesibilitas melalui penambahan frekuensi penerbangan dan moda transportasi lainnya; (b) perbaikan kebijakan visa kunjungan termasuk untuk tujuan bisnis/investasi dan MICE; (c) pengembangan wisata medis; dan (d) fasilitasi peningkatan wisatawan nusantara melalui penyelenggaraan <i>event</i> dan kerja sama insentif.</p> <p>(7) pada PP Peningkatan Ekspor Bernilai Tambah Tinggi dan Penguatan TKDN, peningkatan produktivitas perekonomian melalui ekspor barang dan jasa utamanya dilakukan dengan meningkatkan ekspor produk manufaktur dan jasa melalui Gerakan “Ayo Ekspor” serta meningkatkan partisipasi dalam rantai nilai global (<i>Global Value Chain/GVC</i>). Dalam rangka mendukung fokus produktivitas, strategi yang dilaksanakan mencakup (a) promosi perdagangan yang berfokus pada produk olahan bernilai tambah, (b) penguatan konektivitas domestik dan logistik ekspor; (c) peningkatan ekspor ekonomi kreatif dan digital, (d) penguatan ekspor gastronomi melalui “<i>Indonesia Spice Up the World</i>”, serta (e) pemanfaatan teknologi digital dan <i>online channel (e-commerce)</i>. Dalam rangka mendukung fokus inklusif, strategi yang dilaksanakan mencakup (a) penyiapan ekosistem dan infrastruktur ekspor, (b) penguatan informasi ekspor melalui integrasi layanan informasi dan intelijen ekspor menuju <i>one-stop service export</i>, (c) fasilitasi UKM produsen untuk berpartisipasi dalam GVC, (d) diversifikasi pembiayaan ekspor, (e) redesain program pendidikan dan pelatihan ekspor yang berfokus pada kebutuhan</p>



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

No.	Perihal Perubahan	Pemutakhiran RKP Tahun 2023
		eksportir, dan (f) pengembangan program Bangga Berwisata di Indonesia (BBWI).
209	Perubahan alinea kedua dalam halaman IV.14	(8) pada PP Penguatan Pilar Pertumbuhan dan Daya Saing Ekonomi, strategi yang mendukung fokus produktivitas meliputi (a) penguatan regulasi sektor keuangan; (b) peningkatan penyaluran kredit atau pembiayaan kepada sektor riil (termasuk pada UMKM); (c) perluasan penerapan industri 4.0 dan digitalisasi; (d) peningkatan efisiensi dan penguatan ekosistem logistik melalui <i>National Logistic Ecosystem</i> (NLE) yang didukung integrasi transportasi dan perdagangan antarpulau antardaerah; (e) peningkatan perencanaan dan pemanfaatan sarana prasarana perdagangan dalam negeri; (f) penyiapan ekosistem untuk perdagangan komoditas baru, seperti <i>crypto</i> dan <i>metaverse</i> ; (g) penguatan kebijakan <i>asymmetric fiscal incentive</i> dalam rangka peningkatan nilai tambah ekonomi; (h) penggalan potensi dengan ekstensifikasi dan intensifikasi untuk penguatan basis pemajakan; (i) reformasi administrasi perpajakan (<i>coretax system</i>); (j) peningkatan kepatuhan wajib pajak; serta (k) peningkatan kualitas pengelolaan Transfer ke Daerah (TKD berbasis kinerja). Dalam rangka mendukung fokus inklusif, strategi yang dilaksanakan meliputi (a) peningkatan edukasi, literasi, serta digitalisasi sektor keuangan dengan tetap memerhatikan aspek perlindungan konsumen; (b) perluasan basis investor ritel; (c) penguatan ketahanan dan kesehatan industri jasa keuangan; (d) integrasi data pasokan antarpulau/antardaerah; (e) redesain program edukasi perlindungan konsumen yang lebih bersifat <i>multi-channel</i> ; (f) penguatan teknologi informasi untuk peningkatan efisiensi logistik nasional dan dunia usaha; (g) penerapan pajak layanan digital dalam rangka meningkatkan penerimaan negara; (h) peningkatan ketersediaan data dan informasi statistik terkait perkembangan ekonomi dan sosial; (i) pelaksanaan sensus pertanian 2023 untuk menyediakan data pokok pertanian nasional; dan (j) penguatan pembinaan statistik sektoral untuk mendorong integrasi dan sinkronisasi kegiatan statistik yang sesuai dengan kaidah Satu Data Indonesia. Dalam rangka mendukung fokus berkelanjutan, strategi yang dilaksanakan meliputi (a) peningkatan pembiayaan hijau dan berkelanjutan termasuk percepatan pembiayaan ekosistem KBLBB serta (b) perluasan penerapan pariwisata berkelanjutan.



PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

No. Perihal Perubahan Pemutakhiran RKP Tahun 2023

210 Perubahan Infografis Major Project Akselerasi Pengembangan Energi Terbarukan dan Konservasi Energi dalam halaman IV.15

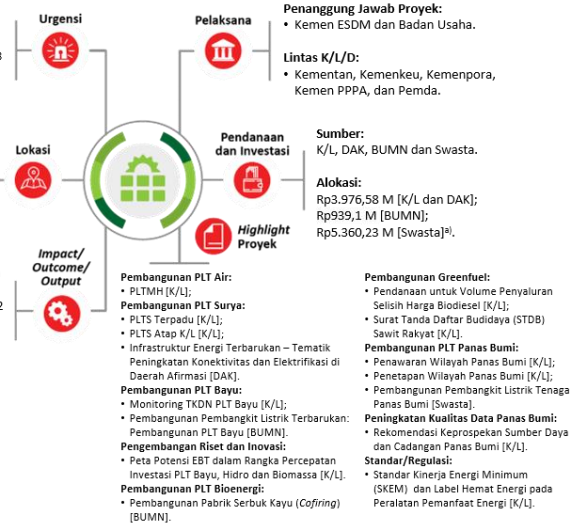
MP Akselerasi Pengembangan Energi Terbarukan dan Konservasi Energi

- Target porsi bauran energi terbarukan dalam bauran energi primer nasional mencapai 23% di tahun 2025 (RUEN). Sampai dengan tahun 2021, capaian porsi bauran energi terbarukan dalam bauran energi primer nasional baru mencapai 12,2%;
Potensi energi terbarukan di Indonesia mencapai 419,3 gigawatt. Pemanfaatan energi terbarukan sampai dengan tahun 2021 baru mencapai 12,4 gigawatt;
Indonesia memiliki perkebunan sawit rakyat mencapai 5,8 juta ha. Indonesia merupakan negara penghasil minyak sawit terbesar di dunia;
Intensitas energi final (indikator konservasi energi) ditargetkan turun 1%/tahun sampai dengan tahun 2025 (KEN dan RUEN);
Pengurangan emisi GRK sektor energi ditargetkan mencapai 116 juta ton CO2.

- Pusat;
Tersebar 34 provinsi.

- Meningkatnya porsi energi baru terbarukan dalam bauran energi nasional menjadi 17,9 persen pada 2023 dan menuju 23 persen pada 2024;
Tercapainya intensitas energi primer sebesar 135,2 SBM/Miliar rupiah pada tahun 2023 dan 133,8 SBM/Miliar rupiah pada tahun 2024;
Penurunan emisi GRK sektor energi sebesar 12,8 persen pada tahun 2023 dan 13,2 persen pada tahun 2024 terhadap baseline (BAU).

Keterangan: a) Data Proyek Prioritas Investasi Swasta per 24 November 2022.



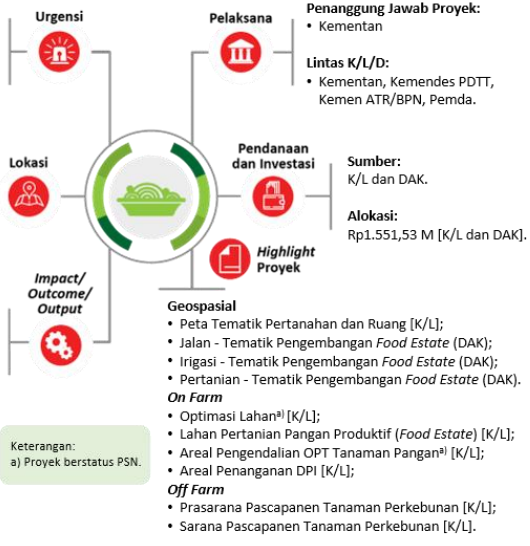
211 Perubahan Infografis Major Project Food Estate (Kawasan Sentra Produksi Pangan) dalam halaman IV.15

MP Food Estate (Kawasan Sentra Produksi Pangan)

- Adanya kemungkinan dampak pandemi COVID-19 yang berpengaruh buruk terhadap ketahanan pangan sebagaimana peringatan dini Food and Agriculture Organization (FAO) kepada seluruh pemimpin negara;
Sebelum pandemi, diperkirakan sekitar 820 juta orang di dunia telah menderita akibat kekurangan pangan;
Adanya peningkatan jumlah penduduk disertai dengan peningkatan jumlah kebutuhan pangan.

7 lokasi Food Estate Banyuwangi, Belu, Humbang Hasundutan, Kapuas, Merauke, Pulang Pisau, dan Sumba Tengah.

- Meningkatkan ketersediaan beras (2023: 45,4 juta ton, nasional; 2024: 46,84 juta ton, nasional);
Produksi jagung (2023: 34,12 juta ton, 2024: 35,27 juta ton, nasional);
Peningkatan Nilai Tukar Petani (2023: 105-107; 2024: 105, nasional);
Peningkatan Nilai Tambah Tenaga Kerja Pertanian (2023: Rp57 juta/orang/tahun, 2024: Rp59,8 juta/orang/tahun, nasional);
Meningkatnya produktivitas 5,3% per tahun di Kalimantan Tengah;
Tercapainya produksi padi 356,9 ribu ton GKG (2023) di Kalimantan Tengah (2024: 501,3 ribu ton GKG);
Meningkatnya indeks pertanaman (IP) 5% per tahun di Kalimantan Tengah;
Meningkatnya luas tanam padi 38.000 ha pada tahun 2023 dan terbangunnya Kawasan Food Estate seluas 148.000 ha pada tahun 2024 di Kalimantan Tengah.



Keterangan: a) Proyek berstatus PSN.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

No. Perihal Perubahan Pemutakhiran RKP Tahun 2023

212 Perubahan Infografis Major Project Integrasi Pelabuhan Perikanan dan Fish Market Bertaraf Internasional dalam halaman IV.16

MP Integrasi Pelabuhan Perikanan dan Fish Market Bertaraf Internasional

- Produktivitas perikanan tangkap masih rendah, hal ini ditunjukkan oleh tingkat pemanfaatan sumber daya ikan di 11 wilayah pengelolaan perikanan (WPP) yang belum optimal. Produksi perikanan tangkap laut tahun 2019 mencapai 7,8 juta ton (62,3% MSY). Batas optimal pemanfaatan sumber daya ikan adalah 80% MSY (FAO, 1995);
- Pada tahun 2019, ekspor perikanan baru mencapai 4,94 miliar US\$, atau berada di posisi 15 negara-negara eksportir produk perikanan. Untuk masuk ke dalam 5 besar eksportir produk perikanan, nilai ekspor produk perikanan perlu ditingkatkan, setidaknya mencapai >USD8 miliar. Terdapat hambatan nontarif ekspor perikanan antara lain berupa keamanan produk pangan/sertifikasi produk;
- Infrastruktur pelabuhan perikanan tangkap belum memiliki fasilitas yang memadai sesuai standar internasional yang berdampak pada mutu dan nilai tambah hasil tangkapan yang didaratkan.

Kab. Minahasa Utara, Kab. Rokan Hilir, Provinsi Maluku.

Urgensi

Lokasi

Impact/ Outcome/ Output

Pelaksana

Pendanaan dan Investasi

Highlight Proyek

Penanggung Jawab Proyek:

- Kemen KP (untuk Minahasa Utara dan Rokan Hilir) dan Kemenhub (untuk Maluku).

Lintas K/L/D:

- Kemen ESDM, Kemen ATR/BPN dan Pemda.

Sumber: K/L dan DAK.

Alokasi: Rp81,00 M [K/L dan DAK].

Pembangunan Infrastruktur pendukung (jalan, air, listrik)

- Data Lokasi Indikatif Pengadaan Tanah - Provinsi Maluku [K/L];
- Rekomendasi Pengendalian Pembangunan Jaringan Transmisi [K/L].

Pembangunan pelabuhan perikanan dan pasar ikan

- Rekomendasi Kebijakan Pendampingan Major Project [K/L];
- Pelabuhan Perikanan yang terintegrasi dan bertaraf internasional yang dikembangkan [K/L].

Penguatan armada kapal, sistem logistik dan industri pengolahan

- Tematik Penguatan Kawasan Sentra Produksi Pangan (Pertanian, Perikanan, dan Hewan) [DAK];
- Alat penangkapan ikan dan/atau alat bantu penangkapan ikan bantuan yang tersalurkan [K/L];
- Sarana penangkapan ikan yang tersalurkan [K/L].

Penguatan data stok perikanan

- Lembaga Pengelola Perikanan Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia [WPPNRI] yang operasional [K/L].

213 Perubahan Infografis Major Project Penguatan Jaminan Usaha Serta 350 Korporasi Petani dan Nelayan dalam halaman IV.16

MP Penguatan Jaminan Usaha Serta 350 Korporasi Petani dan Nelayan

- Belum terintegrasinya 1.029 klaster komoditas pertanian berbasis produksi pertanian dengan akses pasar;
- Akses sumber daya produktif rendah: akses KUR untuk sektor pertanian hanya 23%;
- Adanya keterbatasan nelayan untuk mengakses skema perkreditan, permodalan, teknologi, dan pasar.

150 Klaster Korporasi di Provinsi: Aceh, Bali, Banten, Bengkulu, Provinsi D.I. Yogyakarta, Gorontalo, Jambi, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, Kepulauan Bangka Belitung, Kepulauan Riau, Lampung, Maluku, Maluku Utara, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Papua, Papua Barat, Riau, Sulawesi Barat, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Utara, Sumatera Barat, Sumatera Selatan dan Sumatera Utara

Urgensi

Lokasi

Impact/ Outcome/ Output

Pelaksana

Pendanaan dan Investasi

Highlight Proyek

Penanggung Jawab Proyek:

- Kementerian dan Kemen KP.

Lintas K/L/D:

- Kementerian, Kemen KP, BUMN, Pemda.

Sumber: K/L, DAK, dan BUMN.

Alokasi: Rp7.518,12 M [K/L dan DAK]; Rp213,14 M [BUMN].

Penerapan Good Agricultural Practices and Precision Farming/Agro Maritim 4.0

- Model Pertanian Modern [K/L];
- Pengembangan Ekosistem Pertanian Berbasis Digital (Agriculture Ecosystem 4.0) [BUMN];
- Pertanian - Tematik Penguatan Kawasan Sentra Produksi Pangan (Pertanian, Perikanan, dan Hewan) [DAK];
- Kelautan dan Perikanan - Tematik Penguatan Kawasan Sentra Produksi Pangan (Pertanian, Perikanan, dan Hewan) [DAK];
- Sarana produksi dan usaha di Kampung Perikanan Budidaya yang dikembangkan (MP Korporasi) [K/L].

Fasilitasi Pengolahan

- Prasarana Pengolahan Tanaman Perkebunan [K/L].

Penguatan Kelembagaan Petani dan Nelayan

- Lembaga yang tereduksi akses pembiayaan, investasi, jaringan pemasaran dan ekspor [K/L];
- Kelompok Usaha Bersama (KUB) yang Meningkatkan Kapasitas Kelembagaannya (MP Korporasi) [K/L].



PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

No.	Perihal Perubahan	Pemutakhiran RKP Tahun 2023
214	<p>Perubahan Infografis Major Project Revitalisasi Tambak di Kawasan Sentra Produksi Udang dan Bandeng dalam halaman IV.17</p>	<p align="center">MP Revitalisasi Tambak di Kawasan Sentra Produksi Udang dan Bandeng</p> <p>Urgensi</p> <ul style="list-style-type: none"> Udang merupakan komoditas utama perikanan Indonesia. Pada tahun 2019 nilai ekspor udang nasional mencapai 1,72 miliar US\$ (34,83 persen total ekspor perikanan nasional) dengan negara tujuan utama AS dan Jepang; Indonesia adalah negara produsen udang terbesar kedua setelah Cina. Pada tahun 2018, produksi udang Indonesia mencapai 908 ribu ton atau 11,8% produksi udang dunia; Bandeng merupakan komoditas unggulan dengan pasar domestik; Potensi lahan budi daya air payau Indonesia sebesar 2,96 juta hektar baru dimanfaatkan sekitar 756,92 ribu ha, atau 25,58% (2018); Pemanfaatan lahan budi daya masih dilakukan secara tradisional, sehingga rata-rata produktivitas lahan hanya mencapai 1,5 ton/ha/tahun. <p>Lokasi</p> <p>Banten, Pantai Utara Jabar, Pantai Utara Jateng, Pantai Utara Jatim, Sulsel, Lampung, dan NTB.</p> <p>Peningkatan produksi ikan budi daya 9,48 juta ton pada 2023 dan 10,32 pada 2024;</p> <p>Peningkatan kesejahteraan pembudi daya ikan (Nilai Tukar Pembudi Daya Ikan 104 pada tahun 2023 dan 105 pada tahun 2024);</p> <p>Nilai ekspor hasil perikanan 7,66 miliar US\$ pada tahun 2023 dan 8,0 miliar US\$ pada 2024 (udang menyumbang 35-40%);</p> <p>Jumlah kluster kawasan sentra produksi perikanan budi daya komoditas unggulan (termasuk kluster udang) sebanyak 50 kawasan di tahun 2024.</p> <p>Pelaksana</p> <p>Penanggung Jawab Proyek:</p> <ul style="list-style-type: none"> Kemen KP, Pemda. <p>Lintas K/L/D:</p> <ul style="list-style-type: none"> Kemen PUPR dan Kemen ATR/BPN. <p>Pendanaan dan Investasi</p> <p>Sumber: K/L dan DAK.</p> <p>Alokasi: Rp396,55 M (K/L dan DAK)</p> <p>Highlight Proyek</p> <p>Pembangunan Infrastruktur Kolam dan Saluran Irigasi Tambak</p> <ul style="list-style-type: none"> Sarana Kawasan dan Kesehatan ikan yang disalurkan ke masyarakat [K/L]; Kluster Kawasan di Lokasi Major Project Revitalisasi Tambak Udang dan Bandeng [K/L]; Irigasi Perikanan yang Dikelola secara Partisipatif (PITAP)[K/L]; Tematik Penguatan Kawasan Sentra Produksi Pangan (Pertanian, Perikanan, dan Hewan) [DAK]; Prasarana Produksi Perikanan Budidaya di UPT [K/L]; Daerah Irigasi Glapan yang Direhabilitasi [K/L]. <p>Pengembangan Benih dan Induk Berkualitas Tinggi</p> <ul style="list-style-type: none"> Benih Udang yang Disalurkan ke Masyarakat [K/L]; Benih Ikan Air Payau yang Disalurkan ke Masyarakat [K/L]. <p>Penguatan Perizinan dan Pemasaran</p> <ul style="list-style-type: none"> SHAT Non Sistematis Kategori 4 [K/L]; SHAT Non Sistematis Kategori 5 [K/L]; PBT Non Sistematis Kategori 4 [K/L]; PBT Non Sistematis Kategori 5 [K/L]; Promosi Produk Kelautan dan Perikanan Skala Internasional [K/L]. <p>Impact/Outcome/Output</p>
215	<p>Perubahan Infografis Major Project Pengelolaan Terpadu UMKM dalam halaman IV.17</p>	<p align="center">MP Pengelolaan Terpadu UMKM</p> <p>Urgensi</p> <ul style="list-style-type: none"> UMKM berkontribusi pada 57% PDB Nasional serta menyerap 57% dari total jumlah pekerja; Pelaksanaan program pengembangan UMKM tersebar di berbagai K/L, dan belum terintegrasi dengan baik; UMKM menghadapi kendala pada berbagai aspek usaha di antaranya bahan baku, proses produksi, pembiayaan, pemasaran, teknologi, dan SDM; UMK yang menjalin kemitraan, termasuk berjejaring dalam rantai nilai global masih rendah, yaitu sebesar 7%; Kontribusi ekspor UMKM masih sebesar 14% terhadap total ekspor Indonesia. <p>Lokasi</p> <p>Provinsi Aceh, Provinsi Jawa Tengah, Provinsi Nusa Tenggara Timur, Provinsi Kalimantan Timur, Provinsi Sulawesi Utara, Provinsi Sumatera Utara, Provinsi DI Yogyakarta, Provinsi Bali, Provinsi Kalimantan Selatan, dan Provinsi Sulawesi Selatan.</p> <p>Rasio kredit UMKM terhadap total kredit perbankan meningkat dari 19,89% pada tahun 2019 menjadi 21,44% di tahun 2023 dan 22,00% pada tahun 2024;</p> <p>Pertumbuhan wirausaha meningkat dari 1,71% pada tahun 2019 menjadi 2,74% pada tahun 2023 dan 2,90% pada tahun 2024;</p> <p>Mendukung kontribusi koperasi terhadap PDB sebesar 5,40% pada tahun 2023 dan 5,50% pada tahun 2024;</p> <p>Mendukung kontribusi UMKM terhadap ekspor nonmigas sebesar 16,4% pada tahun 2023 dan 17% pada tahun 2024;</p> <p>Terbangunnya 10 Rumah Produksi Bersama/Factory Sharing;</p> <p>Terwujudnya peningkatan kapasitas usaha dan akses pasar untuk 10 akses pengelola Rumah Produksi Bersama</p> <p>Pelaksana</p> <p>Penanggung Jawab Proyek:</p> <ul style="list-style-type: none"> Kemen KUMK <p>Lintas K/L/D:</p> <ul style="list-style-type: none"> BPOM, BSN, Kemenag, Kemen ATR/BPN, Kemendes PDDT, Kemeninves/BKPM, Kemen KP, Kemnaker, Kemenkominfo, Kemen PUPR, Kemen PPPA, Kemendikbudristek, Kemendag, Kemenperin, Kementan, dan KPPU dan Pemda. <p>Pendanaan dan Investasi</p> <p>Sumber: K/L</p> <p>Alokasi: Rp1.397,34 M [K/L]</p> <p>Highlight Proyek</p> <p>Penyediaan Akses Bahan Baku dan Ruang/Alat Produksi Bersama</p> <ul style="list-style-type: none"> UKM/Sentra yang Difasilitasi Pengembangan Factory Sharing [K/L]. <p>Kurasi dan Standardisasi Produk</p> <ul style="list-style-type: none"> Usaha Mikro yang Mendapat Fasilitasi dan Pembinaan Standardisasi dan Sertifikasi Produk [K/L]. <p>Pendampingan SDM UMKM</p> <ul style="list-style-type: none"> Usaha Mikro Sektor Prioritas yang Menerima Pelatihan [K/L]. <p>Perluasan Akses Pasar dan Kemitrausahaan</p> <ul style="list-style-type: none"> Dukungan Fasilitasi Factory Sharing [K/L]. <p>Penyediaan Akses Pembiayaan</p> <ul style="list-style-type: none"> Koperasi Penerima Dana Bergulir dan Fasilitas Inkubator Wirausaha [K/L]. <p>Regulasi dan Pendataan UMKM</p> <ul style="list-style-type: none"> Pendataan Lengkap KUMKM [K/L]. <p>Impact/Outcome/Output</p>



PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

No.	Perihal Perubahan	Pemutakhiran RKP Tahun 2023
216	<p>Perubahan Infografis <i>Major Project</i> Industri 4.0 pada 7 Subsektor Industri Prioritas dalam halaman IV.18</p>	<p>MP Industri 4.0 pada 7 Subsektor Industri Prioritas</p> <ul style="list-style-type: none"> Kontribusi PDB industri menurun menjadi <20% dengan rata-rata pertumbuhan PDB yang lebih rendah dari pertumbuhan nasional; Produktivitas tenaga kerja industri meningkat namun dalam laju lebih rendah dari pertumbuhan produktivitas di negara lain; Kontribusi ekspor industri Indonesia lebih rendah dibandingkan dengan negara seajar; dan Potensi pemanfaatan teknologi digital untuk meningkatkan efisiensi dan produktivitas industri sangat besar. <p>Terbuka untuk 34 provinsi dengan fokus pada 7 subsektor prioritas (industri tekstil, industri makanan dan minuman, industri kimia, industri farmasi, industri elektronika, industri otomotif, dan industri alat kesehatan).</p> <ul style="list-style-type: none"> Meningkatkan pertumbuhan PDB industri pengolahan nonmigas menjadi 8,40% dan kontribusi PDB industri pengolahan non migas menjadi 18,90% (2024); Meningkatkan pertumbuhan ekspor produk industri pengolahan menjadi 11,18%(2023); Meningkatnya rerata Indonesia <i>Industry 4.0 Readiness Index</i> menjadi ≥ 3.0 (2023); Meningkatnya perusahaan dengan nilai Indonesia <i>Industry 4.0 Readiness Index</i> menjadi ≥ 3.0 sebanyak 52 perusahaan (2023). <p>Keterangan: a) Data Proyek Prioritas Investasi Swasta per 24 November 2022.</p> <p>Urgensi</p> <p>Lokasi</p> <p>Impact/ Outcome/ Output</p> <p>Pelaksana</p> <p>Pendanaan dan Investasi</p> <p>Highlight Proyek</p> <p>Penanggung Jawab Proyek: • Kemenperin.</p> <p>Lintas K/L/D: • Kemeninves/BKPM, Kemen KP, Kemenparekraf, Kemendag, BSN, KPPU, Badan Usaha dan Swasta.</p> <p>Sumber: K/L, BUMN, dan Swasta.</p> <p>Alokasi: Rp356,42 M [K/L]; Rp5.086,96 M [BUMN]; Rp12.889,30 M [Swasta]^{a)}.</p> <p>Harmonisasi Peraturan dan Kebijakan • Kebijakan Penurunan Hambatan Akses Pasar [K/L].</p> <p>Perbaikan Alur Aliran Material • Perbaikan Rantai Pasok di Industri Minuman, Hasil Tembakau dan Bahan Penyegar [K/L].</p> <p>Pembentukan Ekosistem Inovasi dan Adopsi Teknologi • Pendampingan Penerapan Industri 4.0 di Sektor Industri Makanan, Hasil Laut dan Perikanan [K/L].</p> <p>Pemberdayaan UMKM • UMKM yang Difasilitasi dalam Inkubator Bisnis [K/L].</p> <p>Penerapan Standar Berkelanjutan • Pembangunan Pabrik Kendaraan Listrik [Swasta]; • Pembangunan Pabrik Baterai Kendaraan Listrik [Swasta].</p> <p>Peningkatan Investasi dan Promosi Ekspor • Pembangunan Pabrik Petrokimia [Swasta]; • Pembangunan Pabrik Semikonduktor [Swasta]; • Pembangunan Fasilitas Produksi Kimia Dasar <i>Intermediate</i> dan Bahan Baku Obat (BBO) [BUMN]; • Pembangunan Pabrik Methanol Papua Barat [BUMN].</p>
217	<p>Perubahan Infografis <i>Major Project</i> Kawasan Industri Prioritas dan Smelter dalam halaman IV.18</p>	<p>MP Kawasan Industri Prioritas dan Smelter</p> <ul style="list-style-type: none"> Nilai kontribusi PDB industri pengolahan menurun dibawah nilai 20%, dengan rata-rata pertumbuhan PDB yang lebih rendah dari pertumbuhan nasional; Tingginya ketergantungan impor di mana sekitar 71% impor Indonesia adalah bahan baku dan produk antara untuk industri; Kontribusi ekspor industri Indonesia lebih rendah dibandingkan dengan negara seajar; Masih rendahnya investasi yang mendukung hilirisasi sumber daya alam, termasuk mineral; dan Kebutuhan peningkatan aktivitas ekonomi bernilai tambah tinggi dalam bentuk kawasan industri dan smelter di luar Pulau Jawa. <p>Kawasan Industri 14 kawasan industri yang terletak di Provinsi: Sumatera Utara, Kep. Riau (2), Riau, Kep. Bangka Belitung, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Utara, Sulawesi Tengah, Sulawesi Selatan, Maluku Utara, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Banten.</p> <p>Smelter Smelter terletak di Provinsi: (2) Nusa Tenggara Barat, (3) Kalimantan Tengah, (8) Kalimantan Barat, (1) Kalimantan Selatan, (6) Maluku Utara, (1) Sulawesi Selatan, (4) Sulawesi Tengah, (7) Sulawesi Tenggara, dan Jawa Timur.</p> <ul style="list-style-type: none"> Meningkatkan pertumbuhan PDB industri pengolahan menjadi 5,4–6,0% dan kontribusi PDB industri pengolahan menjadi 20,6%; Tercapainya realisasi PMA dan PMDN industri pengolahan sebesar 508,8–574 triliun (2023) dan Rp646,1 triliun (2024); Meningkatnya jumlah tenaga kerja industri pengolahan menjadi 21,70 juta orang (2023) dan 22,5 juta orang (2024); Beroperasinya 14 Kawasan Industri Prioritas (2023); Beroperasinya 31 Smelter. <p>Keterangan: a) Proyek berstatus PSN dan b) Data Proyek Prioritas Investasi Swasta per 24 November 2022.</p> <p>Urgensi</p> <p>Lokasi</p> <p>Impact/ Outcome/ Output</p> <p>Pelaksana</p> <p>Pendanaan dan Investasi</p> <p>Highlight Proyek</p> <p>Penanggung Jawab Proyek: • Kemenperin, Kemen ESDM, Pemda, Badan Usaha dan Swasta.</p> <p>Lintas K/L/D: • Kemenperin, Kemeninves/BKPM, Kemendag, Kemen ESDM, Pemda, Badan Usaha, dan Swasta.</p> <p>Sumber: K/L, BUMN, dan Swasta.</p> <p>Alokasi: Rp173,40 M [K/L]; Rp31.639,69 M [BUMN]; Rp1.025.802,08 M [Swasta]^{b)}.</p> <p>Perizinan • Pembangunan Kawasan Industri Takalar^{a)} [BUMN].</p> <p>Infrastruktur Dalam Kawasan • Rehabilitasi Kawasan Industri Palu dan Pimas [K/L]; • Kawasan Industri Subang/Rebana <i>Technopolis</i> Subang^{a)} [BUMN]; • Pengembangan dan Pengelolaan Kawasan Industri Tanah Kuning^{a)} [Swasta].</p> <p>Peningkatan Investasi • Pengembangan Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (OSS) [K/L]; • Pembangunan Smelter Grade Alumina <i>Refinery</i> (SGAR) [BUMN]; • Pembangunan Industri Petrokimia Terintegrasi [Swasta].</p> <p>Promosi Ekspor • Rekomendasi Kebijakan terkait Tindak Lanjut Pelaksanaan Perundingan [K/L].</p> <p>Penyediaan SDM • Mahasiswa dan Lulusan Program Di Kerjasama Industri [K/L].</p> <p>Harmonisasi Regulasi • Tingkat implementasi P3DN dan Peningkatan TKDN pada Subsektor Pertambangan Mineral [K/L].</p>



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

No.	Perihal Perubahan	Pemutakhiran RKP Tahun 2023
218	Perubahan Infografis Major Project Destinasi Pariwisata Prioritas dalam halaman IV.19	<p>MP Destinasi Pariwisata Prioritas</p> <ul style="list-style-type: none">• Belum tercapainya pembangunan pariwisata berkualitas yang berkelanjutan;• Keterbatasan infrastruktur dasar dan konektivitas, serta daya dukung lingkungan yang kurang berkelanjutan;• Keterbatasan jumlah dan kualitas SDM pariwisata serta kesiapan industri pariwisata dan masyarakat; dan• Belum optimalnya investasi di bidang pariwisata. <p>Destinasi Pariwisata Prioritas yang berlokasi di 11 Provinsi (termasuk Kabupaten/Kota di dalamnya), yaitu (1) Provinsi Sumatera Utara, (2) Provinsi DI Yogyakarta, (3) Provinsi Jawa Tengah, (4) Provinsi Nusa Tenggara Barat, (5) Provinsi Nusa Tenggara Timur, (6) Provinsi Sulawesi Utara, (7) Provinsi Sulawesi Tenggara, (8) Provinsi Papua Barat, (9) Provinsi Jawa Timur, (10) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, dan (11) Provinsi Maluku Utara.</p> <ul style="list-style-type: none">• Meningkatnya kontribusi PDB sektor pariwisata menjadi 4,10% di tahun 2023 dan 4,50% tahun 2024;• Meningkatnya devisa sektor pariwisata sebesar 2,07–5,95 miliar USD di tahun 2023 dan 7,38–13,08 miliar tahun 2024;• Meningkatnya jumlah wisatawan nusantara menjadi 1.200–1.400 juta perjalanan di tahun 2023 dan 1.250–1.500 juta perjalanan pada tahun 2024;• Meningkatnya jumlah wisatawan mancanegara menjadi 3,5–7,4 juta kunjungan di tahun 2023 dan 9,5–14,3 juta kunjungan pada tahun 2024;• Meningkatnya jumlah tenaga kerja pariwisata 21,93 juta orang di tahun 2023 dan 22,08 juta orang pada tahun 2024;• Terbangunnya infrastruktur dasar dan aksesibilitas kunci untuk 5 Destinasi Pariwisata Super Prioritas (DPSP);• Peningkatan proporsi kunjungan wisatawan di 5 DPSP terhadap total kunjungan wisatawan menjadi sebesar 32%. <p>Keterangan: a) Proyek berstatus PSN dan b) Data Proyek Prioritas Investasi Swasta per 24 November 2022.</p> <p>Urgensi</p> <p>Lokasi</p> <p>Impact/ Outcome/ Output</p> <p>Pelaksana</p> <p>Penanggung Jawab Proyek: • Kemenparekraf.</p> <p>Lintas K/L/D: • Kemendes PDDT, Kemen KUKM, Kemen ESDM, Kemeninves/BKPM, Kemen KP, Kemnaker, Kemenkominfo, Kemen LHK, Kemen PUPR, Kemen PPPA, Kemenpora, Kemendikbudristek, Kemendag, Kemenhub, dan POLRI, Pemda, Badan Usaha, dan Swasta.</p> <p>Sumber: K/L, DAK, BUMN, dan Swasta</p> <p>Alokasi: Rp3.520,14 M [K/L dan DAK]; Rp24.736,82 M [BUMN]; Rp209,30 M [Swasta]¹⁾.</p> <p>Highlight Proyek</p> <p>Pengembangan Atraksi (Alam, Budaya, Buatan) • Destinasi Wisata Alam Science, Academic, Voluntary, Education yang Dikembangkan [K/L]¹⁾</p> <p>Pengembangan Sarana Prasarana Konektivitas Jalan, Darat, dan KA • Peningkatan Jalur KA lintas Kisaran-Rantau Prapat Tahap I (Kisaran-Mambangmuda) [K/L]</p> <p>Pengembangan Sarana Prasarana Konektivitas Laut • Pembangunan Pelabuhan Penyeberangan Salawati Kab. Raja Ampat Tahap II - SBSN [K/L]</p> <p>Pengembangan Sarana Prasarana Konektivitas Udara • Pengembangan Bandar Udara DEO Sorong, Papua Barat - PN [K/L]</p> <p>Pengembangan Desa dan BUMDes Berbasis Pariwisata • Sarana Prasarana Desa Wisata yang Dibangun untuk Mendukung Destinasi Pariwisata¹⁾ [K/L]</p> <p>Pengembangan Amenitas Pariwisata • Amenitas Wisata yang Dibangun/ dikembangkan [K/L]</p> <p>Pengembangan Infrastruktur Wilayah • Pengembangan Kawasan Pariwisata TanaMori [Swasta]</p> <p>Peningkatan Kapasitas SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif • Sertifikasi Kompetensi Tenaga Kerja [K/L]</p> <p>Pengembangan Usaha Pariwisata dan Ekonomi Kreatif • Industri Kecil dan Menengah serta Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) - Tematik Penguatan Destinasi Pariwisata Prioritas [DAK]</p> <p>Penguatan Kelembagaan, Regulasi, Investasi, dan Pemasaran • Investment Project Ready to Offer (IPRO) pada Destinasi Pariwisata Prioritas [K/L]</p>
219	Perubahan alinea pertama dalam halaman IV.19	<p>Kerangka regulasi yang dibutuhkan untuk mendukung pencapaian PN Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan.</p> <ol style="list-style-type: none">(1) Rancangan Undang-Undang tentang Perkoperasian;(2) Rancangan Peraturan Presiden tentang Rencana Induk Destinasi Pariwisata Nasional Raja Ampat;(3) Rancangan Peraturan Presiden tentang Rencana Induk Destinasi Pariwisata Nasional Labuan Bajo;(4) Rancangan Peraturan Presiden tentang Rencana Induk Destinasi Pariwisata Nasional Bromo-Tengger-Semeru;(5) Rancangan Peraturan Presiden tentang Rencana Induk Destinasi Pariwisata Nasional Wakatobi;(6) Rancangan Peraturan Presiden tentang Rencana Induk Destinasi Pariwisata Nasional Toba;(7) Rancangan Peraturan Presiden tentang Rencana Induk Destinasi Pariwisata Nasional Borobudur-Yogyakarta-Prambanan;(8) Rancangan Peraturan Presiden tentang Industri Digital;(9) Peraturan Presiden Tentang Transformasi Ekonomi Bali; dan(10) Rancangan Peraturan Presiden tentang Strategi Nasional Perlindungan Konsumen.



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

No. Perihal
Perubahan

Pemutakhiran RKP Tahun 2023

220 Perubahan
Tabel 4.3 dalam
halaman IV.21

Tabel 4.3
Sasaran, Indikator dan Target
PN 2 Mengembangkan Wilayah untuk
Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan

No.	Sasaran/Indikator	Baseline 2019	Realisasi		Target		
			2020	2021	2022	2023	2024
1	Meningkatnya pertumbuhan ekonomi dan tingkat kesejahteraan masyarakat di Kawasan Timur Indonesia (KTI)						
1.1	Laju pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) KTI (%/tahun) ^{a)}	3,86	-0,82	4,86	5,79–6,15	6,4–6,9	7,90
1.2	IPM KTI (nilai min–maks) ^{b)}	60,84–76,61	60,44–76,24	60,62–76,88	62,06–78,11	62,54–78,18	63,94–79,25
1.3	Persentase penduduk miskin KTI (%) ^{c)}	11,60	11,99	11,62	10,97	9,4–10,2	7,13
2	Terjaganya pertumbuhan ekonomi dan tingkat kesejahteraan masyarakat di Kawasan Barat Indonesia (KBI)						
2.1	Laju pertumbuhan PDRB KBI (%/tahun) ^{a)}	5,23	-2,30	3,43	4,99–5,33	5,0–5,2	6,30
2.2	IPM KBI (nilai min–maks) ^{b)}	69,57–80,76	69,69–80,77	69,90–81,11	70,51–82,99	70,48–82,43	71,90–84,23
2.3	Persentase penduduk miskin KBI (%) ^{c)}	8,61	9,74	9,23	8,64	7,3–7,9	6,33

Sumber: Kementerian PPN/Bappenas, 2022.

Keterangan: a) Angka tahun 2020 dan 2021 merupakan angka realisasi (BPS, diolah). Angka tahun 2022 merupakan angka sasaran dalam dokumen pemutakhiran RKP 2022. Angka tahun 2023 merupakan *assessment* Kementerian PPN/Bappenas dengan mempertimbangkan dampak COVID-19 dan angka realisasi pertumbuhan ekonomi kuartal III-2022. Angka tahun 2024 merupakan angka sasaran yang mengacu pada dokumen RPJMN 2020–2024; b) Angka tahun 2020 dan 2021 adalah angka realisasi (BPS). Angka tahun 2022 merupakan angka sasaran dalam dokumen pemutakhiran RKP 2022. Angka 2023 merupakan *assessment* Kementerian PPN/Bappenas dengan mempertimbangkan dampak COVID-19 dan *assessment* terakhir pertumbuhan ekonomi wilayah. Angka tahun 2024 adalah indikator RPJMN 2020–2024; c) Angka tahun 2020 dan 2021 merupakan angka realisasi pada tahun tersebut (BPS, diolah). Angka tahun 2022 merupakan angka sasaran dalam dokumen pemutakhiran RKP 2022. Angka 2023 merupakan *assessment* Kementerian PPN/Bappenas berdasarkan *outlook* tingkat kemiskinan dengan mempertimbangkan dampak COVID-19. Angka tahun 2024 adalah target yang ingin dicapai pada tahun 2024. Jumlah digit untuk semua angka menyesuaikan dengan target nasional.



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

No. Perihal Perubahan Pemutakhiran RKP Tahun 2023

221 Perubahan Tabel 4.4 dalam halaman IV.22

Tabel 4.4
Indikator Pembangunan Kewilayahan

No.	Indikator	Baseline 2019	Realisasi		Target		
			2020	2021	2022	2023	2024
1	Rasio pertumbuhan investasi kawasan (KEK/KI/DPP/KPBPB) terhadap pertumbuhan investasi wilayah (nilai)	N/A ^{a)}	-0,29 ^{b)}	-0,34 ^{b)}	>1	>1	>1
2	Jumlah kawasan pusat pertumbuhan yang difasilitasi dan dikembangkan						
	Destinasi Pariwisata Prioritas (DPP) (jumlah destinasi)	10 ^{c)}	10	10	10	10	10 (kumulatif)
	Destinasi Pariwisata Pengembangan dan Revitalisasi (jumlah destinasi)	N/A ^{d)}	9	9	9	9	9 (kumulatif)
	KEK berbasis pariwisata dan industri (kawasan)	15 (kumulatif nasional)	12	14	14 (kumulatif)	18 (kumulatif)	18 (kumulatif)
	KI Prioritas dan KI Pengembangan (jumlah KI)	8 (kumulatif nasional)	5	11	11 (kumulatif)	15 (kumulatif)	27 (kumulatif)
	Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas (jumlah KPBPB)	2	2	2	2	2	2
3	Persentase pengembangan sektor unggulan per tahun ^{e)}						
	Kelapa Sawit (%)	9,9	-2,9	2,4	5,9	N/A ^{f)}	6,0
	Kakao (%)	-4,3	-1,9	-2,0	2,5	2,6	2,7
	Kopi (%)	-0,5	1,3	1,6	1,5	1,5	1,5
	Kelapa (%)	-0,01	-1,2	1,5	0,7	0,9	0,9
	Tebu (%)	2,6	11,0	13,5	6,0	1,5	1,5
	Karet (%)	-9,1	-12,6	8,2	0,9	1,9	1,9
	Lada (%)	-0,7	0,7	1,0	0,1	0,1	0,4
	Pala (%)	-7,7	-0,3	0,5	0,1	0,1	0,1
	Cengkeh (%)	7,5	0,01	0,1	0,1	0,1	0,1
	Perikanan Tangkap (%) ^{g)}	-0,4	-4,7	3,5**	22,8	1,4	12,2
	Perikanan Budidaya (%) ^{g)}	-1,6	-3,8	-1,6**	40,6	5,1	4,8
	Garam (%) ^{g)}	5,6	-51,9	-20,4**	138,5	-23,1	70,0



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

No.	Perihal Perubahan	Pemutakhiran RKP Tahun 2023							
		No.	Indikator	Baseline 2019	Realisasi		Target		
				2020	2021	2022	2023	2024	
222	Perubahan Tabel 4.4 dalam halaman IV.23	4	Jumlah Wilayah Metropolitan (WM) di luar Jawa yang direncanakan (WM)	3	3	3	3	3	
		5	Jumlah WM di luar Jawa yang dikembangkan (WM)	3	3	6	6	6	
		6	Jumlah WM di Jawa yang ditingkatkan kualitasnya (WM)	1	2	2	4	4	4
		7	Luas area pembangunan Ibu Kota Nusantara (ha)	N/A ^{b)}	N/A ^{b)}	N/A ^{b)}	6.671 ¹⁾	6.671 ¹⁾	6.671 ¹⁾
		8	Jumlah Kota Besar, Sedang, Kecil yang dikembangkan sebagai Pusat Kegiatan Nasional (PKN)/Pusat Kegiatan Wilayah (PKW) (kota)	20	11	52	52	52	52 ¹⁾
		9	Jumlah Kota Baru yang dibangun (kota)	11 ^{k)}	4	4	4	4	4
		10	Jumlah Peninjauan Kembali Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (RTRWN) yang diselesaikan (dokumen Peninjauan Kembali)	0	0	1*	1	0	0
		11	Jumlah Perpres Rencana Tata Ruang Pulau/Kepulauan yang diselesaikan (revisi) (materi teknis dan RPerpres)	1	1	3	6	3	0
		12	Jumlah Rencana Detail Tata Ruang di Ibu Kota Nusantara (IKN) (jumlah materi teknis dan Rancangan Peraturan)	0	2	2*	1	5	0
		13	Jumlah Dokumen Harmonisasi RPerpres Rencana Tata Ruang (RTR) Kawasan Strategis Nasional (KSN) Ibu Kota Nusantara yang diselesaikan (dokumen)	0	0	0*	1 ¹⁾	0	0
		14	Jumlah Dokumen Fasilitasi Legislasi Rancangan Peraturan Kepala Otorita IKN (dokumen harmonisasi ranperka badan otorita RDTR IKN)	0	0	1	4	5	0



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

No.	Perihal Perubahan	Pemutakhiran RKP Tahun 2023							
No.	Indikator	<i>Baseline</i> 2019	Realisasi		Target				
			2020	2021	2022	2023	2024		
223	Perubahan Tabel 4.4 dalam halaman IV.24	15	Rata-rata nilai indeks desa untuk mengukur perkembangan status desa (nilai)	56,52 (Mandiri 1.444; Berkembang 54.291; Tertinggal 19.152)	58,71	60,05	61,00	61,50	62,05 (Mandiri 6.444; Berkembang 59.291; Tertinggal 9.152)
		16	Persentase kemiskinan perdesaan (%)	12,60	13,20	12,53	11,20–11,70	10,80–11,20	9,90–10,40
		17	Jumlah Badan Usaha Milik (BUM) Desa yang dikembangkan (BUM Desa)	1272	245	503	500	3350	6200
		18	Jumlah Badan Usaha Milik (BUM) Desa Bersama yang dikembangkan (BUM Desa Bersama)	65	1	8	72	126	180
		19	Rata-rata nilai indeks perkembangan 62 Kawasan Perdesaan Prioritas Nasional (KPPN) (nilai)	51,10	61, 32 ^{m)}	61,32 ^{m)}	55,66	58,40	58,70
		20	Rata-Rata Nilai Indeks Perkembangan 52 Kawasan Transmigrasi yang direvitalisasi (nilai)	46,55	48,74 ⁿ⁾	51,85 ⁿ⁾	53,12	55,31	57,50
		21	Jumlah kecamatan lokasi prioritas perbatasan negara yang ditingkatkan kesejahteraan dan tata kelolanya (kecamatan)	187	222 ^{o)}	56 ^{o)}	112 ^{p)}	176 ^{p)}	222
		22	Rata-rata nilai Indeks Pengelolaan Kawasan Perbatasan (IPKP) di 18 Pusat Kegiatan Strategis Nasional (PKSN) (nilai)	0,42	0,43 ^{o)}	0,45 ^{o)}	0,47	0,50	0,52
		23	Jumlah daerah tertinggal (kabupaten)	62	62	62 ^{q)}	62 ^{q)}	62 ^{q)}	37 (terentaskan 25 kabupaten)
		24	Persentase penduduk miskin di daerah tertinggal (%)	25,85	25,32	25,5	24,3–24,8	24,0–24,5	23,5–24,0



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

No.	Perihal Perubahan	Pemutakhiran RKP Tahun 2023					
No.	Indikator	<i>Baseline</i> 2019	Realisasi		Target		
			2020	2021	2022	2023	2024
224	Perubahan Tabel 4.4 dalam halaman IV.25						
25	Rata-rata IPM di daerah tertinggal (nilai)	58,91	59,02	59,33	60,7–61,2	61,5–62	62,2–62,7
26	Persentase pelayanan publik yang berhasil dipulihkan (%)	N/A ^{†)}	29	42	50	75	100
27	Jumlah daerah yang memiliki Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Prima berbasis elektronik (kabupaten/kota)	159	22 ^{§)}	84 ^{¶)}	74	76	76
28	Jumlah daerah dengan penerimaan daerah meningkat (daerah)	313	17	257	409	455	542
29	Jumlah daerah dengan realisasi belanjanya berkualitas (daerah)	102	218	494	318	475	542
30	Persentase capaian SPM di daerah (%)	74,24	66,05 ^{u)}	69,55 ^{v)}	82,85	90,90	100
31	Jumlah luasan data geospasial dasar skala 1:5.000 yang diakuisisi (km ²)	49.728 (nasional)	4.903	0	0	366.702 ^{w)}	1.120.802 ^{w)}
32	Cakupan peta RBI skala 1:5.000 (km ²)	40.216 (nasional)	17.956,79	13.207	0	1.805 ^{w)}	991.046 ^{w)}
33	Jumlah kesepakatan teknis batas wilayah administrasi desa/kelurahan yang dihasilkan (kesepakatan)	0	209	4.339	4.000	4.000	4.000
34	Jumlah layanan data <i>center</i> jaringan informasi geospasial nasional beroperasi (layanan)	1	1	1	1	1	1
35	Jumlah daerah yang melaksanakan Kesepakatan dan Perjanjian Kerja Sama Daerah (daerah)	9	14	34	51	46	86
36	Persentase jumlah daerah yang memiliki indeks inovasi tinggi (%)	12	34,25 ^{x)}	65,13	24	30	36
37	Jumlah daerah yang melakukan deregulasi/ harmonisasi dan penyesuaian Perda Pajak Dan Retribusi Daerah (PDRD) dalam rangka memberikan kemudahan investasi (daerah)	34	50	192	318	426	542



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

No.	Perihal Perubahan	Pemutakhiran RKP Tahun 2023							
		No.	Indikator	Baseline 2019	Realisasi		Target		
				2020	2021	2022	2023	2024	
225	Perubahan Tabel 4.4 dalam halaman IV.26	38	Luas cakupan bidang tanah bersertipikat yang terdigitasi dan memiliki georeferensi yang baik (ha)	17.817.153,60 (kumulatif)	24.279.103,73 (kumulatif)	2.240.576 (4.481.153 Bidang)	2.443.986 (4.887.971 Bidang)	2.426.354 (4.852.708 Bidang)	10.274.866
		39	Luas cakupan peta dasar pertanahan (ha)	33.972.698,12 (kumulatif)	35.721.146,84 (kumulatif)	1.532.250	2.022.250	2.524.043 ⁹⁾	7.110.790
		40	Jumlah kantor wilayah dan kantor pertanahan yang menerapkan pelayanan pertanahan modern berbasis digital (satker)	0	156	82	90	62	492 (kumulatif)
		41	Panjang kawasan hutan yang dilakukan perapatan batas (km)	3.179	1.339	2.386,37	2.906,47	519	5.000
		42	Terbentuk dan operasional lembaga Bank Tanah (lembaga)	0	0	0	1	1	1
		43	Jumlah provinsi yang mendapatkan sosialisasi untuk penetapan peraturan perundangan terkait tanah adat/ulayat (provinsi)	10	3	33	33	10	33
		44	Jumlah materi teknis yang dihasilkan dari bimbingan teknis peninjauan kembali/ penyusunan Rencana Tata Ruang (materi teknis dan Raperda RTR)	59 (nasional)	25	26	51	47	42
		45	Jumlah materi teknis yang dihasilkan dari bantuan teknis penyusunan materi Teknis RDTR (materi Teknis dan Ranperkada RDTR)	15 (nasional)	9	0*	0	19	5
		46	Jumlah materi teknis yang dihasilkan dari bantuan teknis penyusunan RDTR Kawasan Tematik Arahkan Prioritas Nasional (KI/KEK/KSPN/KRB/ KPPN) (Materi Teknis dan Ranperkada RDTR)	13 (nasional)	5	16*	12	0	10
		47	Jumlah materi teknis yang dihasilkan dari bimbingan teknis Penyusunan RDTR (materi teknis dan Ranperkada RDTR)	99	25	81	182	96	313



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

No.	Perihal Perubahan	Pemutakhiran RKP Tahun 2023							
		No.	Indikator	Baseline 2019	Realisasi		Target		
				2020	2021	2022	2023	2024	
226	Perubahan Tabel 4.4 dalam halaman IV.27	48	Jumlah pelaksanaan dan pendampingan persetujuan substansi teknis RTR Provinsi/Kabupaten/Kota (Persetujuan Substansi)	36	40	38	48	54	43
		49	Jumlah RPerpres RTR KSN yang diselesaikan (materi teknis dan RPerpres)	12	0	1	1	6	2
		50	Jumlah RPerpres RDTR Kawasan Perbatasan Negara yang diselesaikan (materi teknis dan RPerpres)	4 (nasional)	3	2	0	7	2

Sumber: Kementerian PPN/Bappenas, 2022

Keterangan: a) Nilai *baseline* rasio investasi kawasan (KEK/KI/DPP/KPBPB) tidak tercantum dalam RPJMN 2020-2024, selain itu *baselinenya* bernilai N/A juga dikarenakan ketidakterdediaan data yang mengakibatkan belum dapat dilakukannya perhitungan rasio investasi kawasan; b) Perhitungan realisasi rasio pertumbuhan investasi kawasan hanya dilakukan pada Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) dan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas (KPBPB); c) Jumlah DPP yang difasilitasi; d) Destinasi Pariwisata Pengembangan baru masuk dalam RPJMN 2020-2024, sehingga tahun 2019 belum terdapat ditentukan nilai *baselinenya*; e) Angka sangat sementara. Merupakan perhitungan awal yang didapat dari sektor Kementerian PPN/Bappenas untuk dikordinasikan dan dimutakhirkan kembali bersama sektor di Kementerian PPN/Bappenas; f) Intervensi tidak lagi berlanjut di tahun anggaran 2023; g) Angka *baseline* 2019, realisasi 2020, realisasi 2021 untuk perikanan tangkap dan perikanan budidaya mengacu pada pemutakhiran data perikanan yang telah divalidasi pada satu data KKP (statistik.kkp.go.id) yang diakses 4 November 2022. Angka *baseline* 2019, realisasi 2020, realisasi 2021 untuk garam disesuaikan dengan Laporan Kinerja KKP Tahun 2021 rilis Februari 2022 dan Kelautan dan Perikanan Dalam Angka 2022, KKP rilis Januari 2022; h) Proses pengkajian, perencanaan, dan penyiapan regulasi sehingga belum dilakukan pembangunan; i) Sesuai dengan Tahap I di dalam Lampiran II UU No. 3/2022 tentang Ibu Kota Negara; j) Sesuai dengan lampiran IV Peraturan Presiden No. 18/2020 tentang RPJMN 2020-2024; k) Tahap perencanaan (penyusunan Materi Teknis RDTR); l) Angka target 2022 termutakhir dari dokumen perpres pemutakhiran RKP Tahun 2022, penentuan target belum selesai di tahun 2021 karena menunggu disahkannya UU IKN, kegiatan perlu dilanjutkan ke 2022; m) Jika mengacu pada pemutakhiran keterangan yang termuat adalah Rata-rata Pengukuran IPKP Tahun 2020 dari 36 KPPN dari total 62 KPPN; n) Sesuai Surat Kepala Biro Perencanaan dan Kerja Sama, Kemendes PDTT No. 132/PRC.04.01/III/ 2022 tanggal 31 Maret 2022; o) Sesuai Surat Kepala Biro Perencanaan dan Kerjasama BNPP No. PRC/30.04/2416/XI/2021 tanggal 16 November 2021 dan Surat Kepala Biro Perencanaan dan Kerjasama BNPP No. HMS.65/1705/VI/2022 tanggal 21 Juni 2022; p) Jumlah kecamatan lokasi prioritas (lokpri) yang difokuskan pembangunannya berdasarkan Rancangan Perpres Rencana Induk (Renduk) Pengelolaan Batas Wilayah Negara dan Kawasan Perbatasan (PBWNKP) Tahun 2020-2024. Progres pembangunan berdasarkan laporan capaian PBWNKP yang dirilis BNPP (Badan Nasional Pengelola Perbatasan); q) Sesuai PP No. 78/2014 tentang Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal, evaluasi dan penetapan daerah tertinggal dilakukan setiap lima tahun, yaitu pada akhir pelaksanaan RPJMN, sehingga jumlah daerah tertinggal untuk tahun 2021-2023 tidak mengalami perubahan atau tetap 62 kabupaten; r) *Baseline* N/A karena ketika terjadi bencana belum dimungkinkan untuk dilakukan pengukuran kerusakan serta kerugian antara kondisi sebelum dan sesudah; s) Setelah adanya pemotongan anggaran akibat COVID-19, target diturunkan menjadi level provinsi; t) Rekapitulasi Perkembangan Pelaksanaan Prioritas Nasional Triwulan IV TA. 2021 pada lingkup Kemendagri; u) Rekapitulasi capaian penerapan SPM yang disampaikan oleh Ditjen Bina Bangda Kemendagri, pada Desember 2021; v) Rekapitulasi capaian penerapan SPM yang disampaikan oleh Ditjen Bina Bangda Kemendagri, pada Mei 2022; w) Kegiatan dilaksanakan dengan skema pembiayaan Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha Milik Negara (KPBUMN). Alokasi anggaran sepenuhnya berasal dari investasi BUMN; x) Sesuai SK Menteri Dalam Negeri Nomor 100-4672 Tahun 2020 tentang Indeks Inovasi Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota 2020; y) Target ini merupakan target luas Peta Bidang Tanah (PBT) pada pelaksanaan PTSL, yang didalamnya mencakup peta dasar pertanahan; *) Hingga TW III; **) Data Sementara.



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

No. Perihal
Perubahan

Pemutakhiran RKP Tahun 2023

227 Perubahan
Tabel 4.5 dalam
halaman IV.28

Tabel 4.5
Sasaran, Indikator dan Target PP pada
PN 2 Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan
dan Menjamin Pemerataan

No.	Sasaran/Indikator	Baseline 2019	Realisasi		Target		
			2020	2021	2022	2023	2024
PP 1. Pembangunan Wilayah Sumatera							
Terjaganya pertumbuhan ekonomi dan tingkat kesejahteraan masyarakat di Wilayah Sumatera							
1.1	Laju pertumbuhan PDRB Wilayah Sumatera (%/tahun) ^{a)}	4,55	-1,20	3,18	4,43- 4,74	4,5- 4,8	5,60
1.2	IPM Provinsi di Wilayah Sumatera (nilai min-maks) ^{b)}	69,57- 75,48	69,69- 75,59	69,90- 75,79	70,51- 76,91	70,48- 77,01	71,90- 78,19
1.3	Persentase penduduk miskin Wilayah Sumatera (%) ^{c)}	9,82	10,22	9,75	9,13	8,2- 8,6	7,06
PP 2. Pembangunan Wilayah Jawa-Bali							
Terjaganya pertumbuhan ekonomi dan tingkat kesejahteraan masyarakat di Wilayah Jawa-Bali							
2.1	Laju pertumbuhan PDRB Wilayah Jawa-Bali (%/tahun) ^{a)}	5,47	-2,68	3,52	5,20- 5,55	5,2- 5,4	6,30



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

No.	Perihal Perubahan	Pemutakhiran RKP Tahun 2023								
228	Perubahan Tabel 4.5 dalam halaman IV.29	No.	Sasaran/Indikator	<i>Baseline</i> 2019	<i>Realisasi</i>		<i>Target</i>			
					2020	2021	2022	2023	2024	
		2.2	IPM Provinsi di Wilayah Jawa-Bali (nilai min-maks) ^{b)}	71,50– 80,76	71,71– 80,77	72,14– 81,11	73,26– 82,99	73,05– 82,43	74,60– 84,23	
		2.3	Persentase penduduk miskin Wilayah Jawa-Bali (%) ^{c)}	8,16	9,56	9,03	8,45	6,9– 7,6	6,05	
		PP 3. Pembangunan Wilayah Nusa Tenggara								
		Meningkatnya pertumbuhan ekonomi dan tingkat kesejahteraan masyarakat di Wilayah Nusa Tenggara								
		3.1	Laju pertumbuhan PDRB Wilayah Nusa Tenggara (%/tahun) ^{a)}	4,47	-0,71	2,39	5,12– 5,47	5,8– 6,2	5,10	
		3.2	IPM Provinsi di Wilayah Nusa Tenggara (nilai min-maks) ^{b)}	65,23– 68,14	65,19– 68,25	65,28– 68,65	66,87– 70,20	66,63– 69,59	68,35– 71,91	
		3.3	Persentase penduduk miskin Wilayah Nusa Tenggara (%) ^{c)}	17,38	17,81	17,22	16,75	13,8– 14,8	10,69	
		PP 4. Pembangunan Wilayah Kalimantan								
		Meningkatnya pertumbuhan ekonomi dan tingkat kesejahteraan masyarakat di Wilayah Kalimantan								
		4.1	Laju pertumbuhan PDRB Wilayah Kalimantan (%/tahun) ^{a)}	4,96	-2,28	3,18	5,22– 5,52	5,2– 5,5	5,40	
		4.2	IPM Provinsi di Wilayah Kalimantan (nilai min-maks) ^{b)}	67,65– 76,61	67,66– 76,24	67,90– 76,88	69,60– 78,11	68,91– 78,18	71,22– 79,25	
		4.3	Persentase penduduk miskin Wilayah Kalimantan (%) ^{c)}	5,81	6,16	5,84	5,15	4,3– 5,1	2,91	
		PP 5. Pembangunan Wilayah Sulawesi								
		Meningkatnya pertumbuhan ekonomi dan tingkat kesejahteraan masyarakat di Wilayah Sulawesi								
		5.1	Laju pertumbuhan PDRB Wilayah Sulawesi (%/tahun) ^{a)}	6,95	0,23	5,67	6,58– 7,07	7,4– 8,0	6,90	
		5.2	IPM Provinsi di Wilayah Sulawesi (nilai min-maks) ^{b)}	65,73– 72,99	66,11– 72,93	66,36– 73,30	67,72– 74,48	67,73– 74,45	69,41– 75,83	
		5.3	Persentase penduduk miskin Wilayah Sulawesi (%) ^{c)}	10,06	10,41	10,04	9,58	8,3– 8,8	6,48	
		PP 6. Pembangunan Wilayah Maluku								
Meningkatnya pertumbuhan ekonomi dan tingkat kesejahteraan masyarakat di Wilayah Maluku										
6.1	Laju pertumbuhan PDRB Wilayah Maluku (%/tahun) ^{a)}	5,79	1,98	9,41	6,66– 6,99	10,9– 11,8	6,00			



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

No.	Perihal Perubahan	Pemutakhiran RKP Tahun 2023								
		No.	Sasaran/Indikator	Baseline 2019	Realisasi		Target			
229	Perubahan Tabel 4.5 dalam halaman IV.30	6.2	IPM Provinsi di Wilayah Maluku (nilai min-maks) ^{b)}	68,70- 69,45	68,49- 69,49	68,76- 69,71	70,92- 71,08	70,71- 71,18	72,25- 72,33	
		6.3	Persentase penduduk miskin Wilayah Maluku (%) ^{c)}	13,24	13,45	12,20	12,19	10,6- 11,4	8,21	
		PP 7. Pembangunan Wilayah Papua								
		Meningkatnya pertumbuhan ekonomi dan tingkat kesejahteraan masyarakat di Wilayah Papua								
		7.1	Laju pertumbuhan PDRB Wilayah Papua (%/tahun) ^{a)}	-10,69	1,40	10,29	5,92- 6,26	7,2- 7,8	6,00	
		7.2	IPM Provinsi di Wilayah Papua (nilai min-maks) ^{b)}	60,84- 64,70	60,44- 65,09	60,62- 65,26	62,06- 65,92	62,54- 66,55	63,94- 67,24	
		7.3	Persentase penduduk miskin Wilayah Papua (%) ^{c)}	25,43	25,65	26,12	23,84	22,0- 23,6	16,29	
Sumber: Kementerian PPN/Bappenas, 2022.										
Keterangan: a) Angka tahun 2020 dan 2021 merupakan angka realisasi (BPS, diolah). Angka tahun 2022 merupakan angka sasaran dalam dokumen pemutakhiran RKP 2022. Angka 2023 merupakan <i>assessment</i> Kementerian PPN/Bappenas dengan mempertimbangkan dampak COVID-19 dan angka realisasi pertumbuhan ekonomi kuartal III-2022. Angka tahun 2024 merupakan angka sasaran yang mengacu pada dokumen RPJMN 2020-2024; b) Angka tahun 2020 dan 2021 adalah angka realisasi (BPS). Angka tahun 2022 merupakan angka sasaran dalam dokumen pemutakhiran RKP 2022. Angka 2023 merupakan <i>assessment</i> Kementerian PPN/Bappenas dengan mempertimbangkan dampak COVID-19 dan <i>assessment</i> terakhir pertumbuhan ekonomi wilayah. Angka tahun 2024 adalah indikator RPJMN 2020-2024; c) Angka tahun 2020 dan 2021 merupakan angka realisasi pada tahun tersebut (BPS, diolah). Angka tahun 2022 merupakan angka sasaran dalam dokumen pemutakhiran RKP 2022. Angka 2023 merupakan <i>assessment</i> Kementerian PPN/Bappenas berdasarkan <i>outlook</i> tingkat kemiskinan dengan mempertimbangkan dampak COVID-19. Angka tahun 2024 adalah target yang ingin dicapai pada tahun 2024. Jumlah digit untuk semua angka menyesuaikan dengan target nasional.										
230	Perubahan alinea ketiga dalam halaman IV.32 dan alinea pertama dalam halaman IV.33	Upaya untuk Pembangunan Wilayah Sumatera akan didukung dengan lima KP sebagai berikut:								
		(1)	Pengembangan Kawasan Strategis yang difokuskan pada KEK Arun Lhokseumawe dan KPBPB Sabang yang berlokasi di Provinsi Aceh; KI/KEK Sei Mangkei dan DPP Danau Toba dan sekitarnya yang berlokasi di Provinsi Sumatera Utara; KI Bintang <i>Aerospace</i> , KI/KEK Galang Batang, Destinasi Pariwisata Pengembangan Batam-Bintan, KPBPB Batam-Bintan-Karimun, KEK Nongsa, serta KEK Batam Aero <i>Technic</i> yang berlokasi di Provinsi Kepulauan Riau; KI Sadai dan DPP Bangka Belitung/KEK Tanjung Kelayang yang berlokasi di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung; KI Tenayan yang berlokasi di Provinsi Riau serta Destinasi Pariwisata Pengembangan Padang-Bukittinggi yang berlokasi di Provinsi Sumatera Barat;							
		(2)	Pengembangan Sektor Unggulan akan difokuskan pada peningkatan produktivitas kakao, karet, kelapa, kopi, pala, lada, tebu, cengkeh, pengembangan perikanan tangkap serta perikanan budidaya. Pengembangan sektor unggulan perikanan budi daya dilakukan dengan melakukan revitalisasi dan pengembangan tambak udang dan bandeng, memberikan calon induk unggul ikan air tawar, ikan air payau, udang, serta benih ikan air tawar, udang, ikan air payau, ikan air laut serta pemberian sarana produksi usaha yang akan disalurkan kepada masyarakat;							
		(3)	Pengembangan Kawasan Perkotaan yang difokuskan di 2 wilayah metropolitan (WM Medan dan WM Palembang), 5 kota besar (Padang, Pekanbaru, Batam, Jambi, Bandar Lampung), 12 kota sedang (Banda Aceh, Lhokseumawe, Langsa, Pematangsiantar, Gunungsitoli, Dumai, Bukittinggi, Tanjungpinang, Bengkulu, Lubuklinggau, Prabumulih, Pangkalpinang) dan 3 kota kecil (Sabang, Sibolga, Solok);							
		(4)	Pembangunan Daerah Tertinggal, Kawasan Perbatasan, Perdesaan, dan Transmigrasi yang difokuskan pada pengembangan ekonomi PKSN Sabang, PKSN Bengkalis, dan PKSN Ranai, dengan mengutamakan pembangunan infrastruktur pada PKSN Sabang dan PKSN Bengkalis; penanganan terhadap 36 kecamatan lokasi prioritas							



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

No.	Perihal Perubahan	Pemutakhiran RKP Tahun 2023
		<p>perbatasan negara di Wilayah Sumatera; revitalisasi 12 kawasan transmigrasi yang terdiri atas 3 kawasan transmigrasi di Provinsi Aceh (Kawasan Transmigrasi Ketapang Nusantara di Kabupaten Aceh Tengah, Kawasan Transmigrasi Samar Kilang di Kabupaten Bener Meriah, Kawasan Transmigrasi Selaut di Kabupaten Simeuleu), 1 kawasan transmigrasi di Provinsi Sumatera Barat (Kawasan Transmigrasi Lunang Silaut di Kabupaten Pesisir Selatan), 3 kawasan transmigrasi di Provinsi Sumatera Selatan (Kawasan Transmigrasi Parit Rambutan di Kabupaten Ogan Ilir, Kawasan Transmigrasi Telang di Kabupaten Banyuasin, dan Kawasan Transmigrasi Kikim di Kabupaten Lahat), 1 kawasan transmigrasi di Provinsi Jambi (Kawasan Transmigrasi Bathin III Ulu di Kabupaten Bungo), 1 kawasan transmigrasi di Provinsi Bengkulu (Kawasan Transmigrasi Lagita di Kabupaten Bengkulu Utara), 1 kawasan transmigrasi di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Kawasan Transmigrasi Batu Betumpang di Kabupaten Bangka Selatan), dan 2 kawasan transmigrasi di Provinsi Lampung (Kawasan Transmigrasi Rawa Pitu di Kabupaten Tulang Bawang dan Kawasan Transmigrasi Mesuji di Kabupaten Mesuji); pembangunan 14 Kawasan Perdesaan Prioritas Nasional (KPPN) yang pada tahun 2023 difokuskan pada 4 KPPN yaitu KPPN Aceh Timur, KPPN Samosir, KPPN Bintan dan KPPN Bangka Selatan; pengentasan 3.097 desa tertinggal dan peningkatan 1.156 desa berkembang menjadi desa mandiri; serta 7 kabupaten daerah tertinggal yang dipercepat pembangunannya dengan fokus intervensi pada 5 kabupaten di tahun 2023 seperti pada Tabel 4.6; dan</p> <p>(5) Kelembagaan dan Keuangan Daerah yang difokuskan pada peningkatan capaian rata-rata penerapan SPM daerah (khususnya bidang perumahan rakyat, sosial, dan pekerjaan umum) peningkatan kualitas dan kompetensi SDM ASN yang selaras dengan sektor unggulan dan arah pembangunan kewilayahan Sumatera, penguatan GWPP pada fungsi pembinaan dan pengawasan kinerja pemerintah kabupaten/kota termasuk pengoptimalan pemanfaatan dana otonomi khusus Aceh untuk mendorong peningkatan kesejahteraan rakyat, peningkatan pendapatan daerah, kualitas belanja dan pengelolaan keuangan daerah yang efisien, produktif, dan akuntabel, peningkatan inovasi dan kemandirian daerah, kerja sama antardaerah, penataan dan harmonisasi regulasi, percepatan sertifikasi tanah, penyelesaian sengketa dan konflik pertanahan, operasionalisasi layanan pertanahan modern berbasis digital, percepatan penyusunan dan penetapan RTR KSN, RTRW Provinsi/Kabupaten/Kota, RDTR Kabupaten/Kota dan RDTR Kawasan Perbatasan Negara (KPN), serta percepatan penyediaan peta dasar skala besar.</p>
231	Perubahan alinea ketiga dalam halaman IV.34 dan alinea pertama dalam halaman IV.35	<p>Upaya untuk Pembangunan Wilayah Jawa-Bali akan didukung dengan lima KP sebagai berikut:</p> <p>(1) Pengembangan Kawasan Strategis yang difokuskan pada DPP Borobudur dan sekitarnya yang berlokasi di Provinsi Jawa Tengah dan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY); KEK Kendal dan KI Terpadu Batang yang berlokasi di Provinsi Jawa Tengah; KEK Singhasari, KEK Gresik, DPP Bromo-Tengger-Semeru, dan Destinasi Pariwisata Pengembangan Banyuwangi yang berlokasi di Provinsi Jawa Timur; KI Pancapuri dan KEK Tanjung Lesung yang berlokasi di Provinsi Banten; KI Subang dan KEK Lido yang berlokasi di Provinsi Jawa Barat; Destinasi Pariwisata Pengembangan Ujung Kulon-Halimun-Bandung-Pangandaran yang berlokasi di Provinsi Banten dan Provinsi Jawa Barat; serta Revitalisasi Destinasi Pariwisata Bali yang berlokasi di Provinsi Bali;</p>



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

No.	Perihal Perubahan	Pemutakhiran RKP Tahun 2023
		<p>(2) Pengembangan Sektor Unggulan akan difokuskan pada peningkatan produktivitas, pala, cengkeh, kopi, tebu, kelapa, kakao, garam, pengembangan perikanan tangkap dan perikanan budidaya. Pengembangan perikanan budidaya dilakukan dengan melakukan revitalisasi dan pengembangan kluster tambak udang dan bandeng, memberikan calon induk unggul udang, ikan air tawar, ikan air payau dan benih udang, ikan air laut, ikan air tawar, ikan air payau, dan kepiting, serta sarana produksi usaha yang akan disalurkan kepada masyarakat;</p> <p>(3) Pengembangan Kawasan Perkotaan yang difokuskan pada 5 Wilayah Metropolitan yaitu WM Jakarta, WM Bandung, WM Semarang, WM Surabaya, WM Denpasar; Kota Baru Maja; 3 kota besar (Serang, Surakarta, dan Malang) dan 11 kota sedang (Cilegon, Sukabumi, Cirebon, Tegal, Pekalongan, Magelang, Yogyakarta, Kediri, Batu, Pasuruan, dan Probolinggo);</p> <p>(4) Pembangunan Daerah Tertinggal, Kawasan Perbatasan, Perdesaan, dan Transmigrasi yang difokuskan pada 5 KPPN pada tahun 2023 yaitu KPPN Banyuwangi, KPPN Buleleng, KPPN Magelang, KPPN Pandeglang, dan KPPN Pamekasan dari total 8 KPPN; percepatan pembangunan 197 desa tertinggal menjadi desa berkembang dan peningkatan 2.893 desa berkembang menjadi desa mandiri; dan</p> <p>(5) Kelembagaan dan Keuangan Daerah yang difokuskan pada peningkatan rata-rata capaian penerapan SPM daerah (khususnya bidang perumahan rakyat, trantibumlinmas, dan pekerjaan umum), peningkatan kualitas dan kompetensi SDM ASN yang selaras dengan sektor unggulan dan arah pembangunan kewilayahan Jawa-Bali, penguatan GWPP pada fungsi pembinaan dan pengawasan kinerja pemerintah kabupaten/kota termasuk pengoptimalan pelaksanaan kebijakan Dana Keistimewaan D.I. Yogyakarta berlandaskan Grand Design Dana Keistimewaan D.I. Yogyakarta 2022–2042, peningkatan pendapatan daerah, kualitas belanja dan pengelolaan keuangan daerah yang efisien, produktif, dan akuntabel, inovasi dan kemandirian daerah, kerja sama antardaerah, penataan dan harmonisasi regulasi, percepatan sertifikasi tanah, penyelesaian sengketa dan konflik pertanahan, operasionalisasi layanan pertanahan modern berbasis digital, percepatan penyusunan dan penetapan RTR KSN, RTRW Provinsi/Kabupaten/Kota, dan RDTR Kabupaten/Kota, serta percepatan penyediaan peta dasar skala besar.</p>
232	Perubahan alinea pertama dalam halaman IV.36 dan alinea pertama dalam halaman IV.37	<p>Dalam rangka mewujudkan tercapainya sasaran PP Pembangunan Wilayah Nusa Tenggara, kawasan yang diprioritaskan untuk mempercepat pertumbuhan dan pemerataan Wilayah Nusa Tenggara dapat dilihat pada Gambar 4.6. Upaya untuk Pembangunan Wilayah Nusa Tenggara akan didukung dengan lima KP sebagai berikut:</p> <p>(1) Pengembangan Kawasan Strategis yang difokuskan pada DPP Labuan Bajo yang berlokasi di Provinsi Nusa Tenggara Timur dan DPP Lombok-Mandalika/KEK Mandalika yang berlokasi di Provinsi Nusa Tenggara Barat;</p> <p>(2) Pengembangan Sektor Unggulan difokuskan pada peningkatan produktivitas kopi, kelapa, kakao, tebu, garam, dan perikanan budidaya yang berlokasi di Provinsi Nusa Tenggara Timur dan Nusa Tenggara Barat. Pengembangan perikanan budidaya dilakukan dengan memberikan benih ikan air laut dan ikan air tawar, melakukan revitalisasi dan pengembangan kluster tambak udang dan bandeng, serta memberikan sarana produksi usaha yang disalurkan kepada masyarakat. Pengembangan komoditas cengkeh juga akan didorong</p>



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

No.	Perihal Perubahan	Pemutakhiran RKP Tahun 2023
		<p>melalui keterlibatan berbagai pihak dan integrasi sumber pendanaan non-APBN;</p> <p>(3) Pengembangan Kawasan Perkotaan yang difokuskan pada Kota Besar (Mataram) dan Kota Sedang (Kupang);</p> <p>(4) Pembangunan Daerah Tertinggal, Kawasan Perbatasan, Perdesaan, dan Transmigrasi yang difokuskan pada pengembangan ekonomi kawasan perbatasan khususnya PKS N Atambua di Kabupaten Belu dan PKS N Kefamenanu di Kabupaten Timor Tengah Utara, termasuk pembangunan infrastrukturnya; serta penanganan terhadap 24 kecamatan lokasi prioritas perbatasan negara di Wilayah Nusa Tenggara; 5 kawasan transmigrasi yang direvitalisasi yang terdiri atas 2 kawasan transmigrasi di Provinsi Nusa Tenggara Barat (Kawasan Transmigrasi Tambora di Kabupaten Bima dan Kawasan Transmigrasi Labangka di Kabupaten Sumbawa) dan 3 kawasan transmigrasi di Provinsi Nusa Tenggara Timur (Kawasan Transmigrasi Kobalima Timur/Tanyu Manu di Kabupaten Malaka, Kawasan Transmigrasi Ponu di Kabupaten Timor Tengah Utara dan Kawasan Transmigrasi Melolo di Kabupaten Sumba Timur); 3 KPPN yang difokuskan untuk dikembangkan pada tahun 2023 yaitu KPPN Dompu, KPPN Manggarai Barat, dan KPPN Lombok Utara dari total KPPN sejumlah 7 KPPN; 1.079 desa tertinggal yang dipercepat pembangunannya menjadi desa berkembang, dan peningkatan 143 desa berkembang menjadi desa mandiri; serta 14 kabupaten daerah tertinggal yang dipercepat pembangunannya dengan fokus intervensi pada 7 kabupaten di tahun 2023 seperti pada Tabel 4.7; dan</p> <p>(5) Kelembagaan dan Keuangan Daerah yang difokuskan pada peningkatan rata-rata capaian penerapan SPM daerah (khususnya bidang perumahan rakyat, sosial, pekerjaan umum), peningkatan kualitas dan kompetensi SDM ASN yang selaras dengan sektor unggulan dan arah pembangunan kewilayahan Nusa Tenggara, penguatan GWPP pada fungsi pembinaan dan pengawasan kinerja pemerintah kabupaten/kota, peningkatan pendapatan daerah, kualitas belanja dan pengelolaan keuangan daerah yang efisien, produktif, dan akuntabel, peningkatan inovasi dan kemandirian daerah, kerja sama antardaerah, penataan dan harmonisasi regulasi, percepatan sertifikasi tanah, penyelesaian sengketa dan konflik pertanahan, operasionalisasi layanan pertanahan modern berbasis digital, percepatan penyusunan dan penetapan RTR KSN, RTRW Provinsi/Kabupaten/Kota, dan RDTR Kabupaten/Kota, serta percepatan penyediaan peta dasar skala besar.</p>
233	Perubahan alinea pertama dalam halaman IV.38 dan alinea pertama dalam halaman IV.39	<p>Dalam rangka mewujudkan tercapainya sasaran PP Pembangunan Wilayah Kalimantan, kawasan yang diprioritaskan untuk mempercepat pertumbuhan dan pemerataan Kawasan Kalimantan dapat dilihat pada Gambar 4.7. Upaya untuk Pembangunan Wilayah Kalimantan akan didukung dengan lima KP sebagai berikut:</p> <p>(1) Pengembangan Kawasan Strategis yang difokuskan pada KEK Maloy Batuta Trans Kalimantan dan Destinasi Pariwisata Pengembangan Derawan-Berau yang berlokasi di Provinsi Kalimantan Timur; KI Ketapang dan Destinasi Pariwisata Pengembangan Sambas-Singkawang yang berlokasi di Provinsi Kalimantan Barat; KI Tanah Kuning yang berlokasi di Provinsi Kalimantan Utara; serta KI Surya Borneo yang berlokasi di Provinsi Kalimantan Tengah;</p> <p>(2) Pengembangan Sektor Unggulan akan difokuskan pada peningkatan produktivitas karet, kelapa, lada, kopi, serta perikanan budidaya. Perikanan budidaya dikembangkan dengan memberikan calon induk unggul ikan air tawar, benih ikan air tawar dan sarana produksi usaha</p>



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

No.	Perihal Perubahan	Pemutakhiran RKP Tahun 2023
		<p>yang disalurkan ke masyarakat. Pengembangan komoditas kakao juga akan didorong melalui keterlibatan berbagai pihak dan integrasi sumber pendanaan non-APBN;</p> <p>(3) Pengembangan Kawasan Perkotaan dengan fokus pada pembangunan Ibu Kota Nusantara dan kota besar yang menjadi wilayah mitra (Balikpapan dan Samarinda), pengembangan WM Banjarmasin, pembangunan Kota Baru Tanjung Selor, pengembangan kota besar (Pontianak) dan tiga kota sedang (Singkawang, Palangkaraya, Tarakan);</p> <p>(4) Pembangunan Daerah Tertinggal, Kawasan Perbatasan, Perdesaan, dan Transmigrasi yang difokuskan pada pengembangan ekonomi kawasan perbatasan negara di 6 PKSN yaitu PKSN Paloh Aruk, PKSN Jagoi Babang, PKSN Nunukan, PKSN Long Midang, PKSN Tou Lumbis, dan PKSN Long Nawang, dengan mengutamakan pembangunan infrastruktur pada PKSN Paloh Aruk, PKSN Long Nawang, dan PKSN Nunukan; serta penanganan terhadap 35 kecamatan lokasi prioritas perbatasan Wilayah Kalimantan, 9 kawasan transmigrasi yang direvitalisasi yang terdiri atas 3 kawasan transmigrasi di Provinsi Kalimantan Barat (Kawasan Transmigrasi Rasau Jaya di Kabupaten Kubu Raya, Kawasan Transmigrasi Gerbang Mas Perkasa dan Kawasan Transmigrasi Subah di Kabupaten Sambas), 1 kawasan transmigrasi di Provinsi Kalimantan Tengah (Kawasan Transmigrasi Belantikan Raya di Kabupaten Lamandau), 1 kawasan transmigrasi di Provinsi Kalimantan Selatan (Kawasan Transmigrasi Cahaya Baru di Kabupaten Barito Kuala), 2 kawasan transmigrasi di Provinsi Kalimantan Timur (Kawasan Transmigrasi Kerang di Kabupaten Paser dan Kawasan Transmigrasi Maloy Kaliorang di Kabupaten Kutai Timur), dan 2 kawasan transmigrasi di Provinsi Kalimantan Utara (Kawasan Transmigrasi Salim Batu di Kabupaten Bulungan dan Kawasan Transmigrasi Seimenggaris di Kabupaten Nunukan); 1 kawasan transmigrasi yang mendukung pengembangan food estate yaitu Kawasan Transmigrasi Lamunti Dadahup di Kabupaten Kapuas, Provinsi Kalimantan Tengah sesuai direktif Presiden dalam rangka penguatan ketahanan pangan nasional; pengembangan 11 KPPN yang pada tahun 2023 difokuskan pada 2 KPPN yaitu KPPN Berau dan KPPN Barito Kuala; 1.460 desa tertinggal yang dipercepat pembangunannya menjadi desa berkembang dan peningkatan 232 desa berkembang menjadi desa mandiri; dan</p> <p>(5) Kelembagaan dan Keuangan Daerah yang difokuskan pada peningkatan rata-rata capaian penerapan SPM daerah (khususnya bidang perumahan rakyat, trantibumlinmas, dan pekerjaan umum), peningkatan kualitas dan kompetensi SDM ASN yang selaras dengan sektor unggulan dan arah pembangunan kewilayahan Kalimantan, penguatan GWPP pada fungsi pembinaan dan pengawasan kinerja pemerintah kabupaten/kota, peningkatan pendapatan daerah, kualitas belanja, dan pengelolaan keuangan daerah yang efisien, produktif, dan akuntabel, peningkatan inovasi dan kemandirian daerah, kerja sama antardaerah, penataan dan harmonisasi regulasi, percepatan sertifikasi tanah, penyelesaian sengketa dan konflik pertanahan, operasionalisasi layanan pertanahan modern berbasis digital, percepatan penyusunan dan penetapan RTRW Provinsi/Kabupaten/Kota, RDTR Kabupaten/Kota, dan RDTR Ibu Kota Nusantara, serta percepatan penyediaan peta dasar skala besar.</p>



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

No.	Perihal Perubahan	Pemutakhiran RKP Tahun 2023
234	Perubahan alinea kedua dalam halaman IV.39 dan alinea pertama dalam halaman IV.40	<p>Dalam rangka mewujudkan tercapainya sasaran PP Pembangunan Wilayah Sulawesi, kawasan yang diprioritaskan untuk mempercepat pertumbuhan dan pemerataan Wilayah Sulawesi dapat dilihat pada Gambar 4.8. Upaya untuk Pembangunan Wilayah Sulawesi akan didukung dengan KP sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"><li data-bbox="521 846 1406 1068">(1) Pengembangan Kawasan Strategis yang difokuskan pada KEK/KI Palu yang berlokasi di Provinsi Sulawesi Tengah; KEK Bitung sebagai pusat industrialisasi/hilirisasi komoditas unggulan wilayah dan DPP Manado-Likupang/KEK Likupang yang berlokasi di Provinsi Sulawesi Utara; KI Takalar dan Destinasi Pariwisata Pengembangan Toraja-Makassar-Selayar yang berlokasi di Provinsi Sulawesi Selatan; serta DPP Wakatobi di Provinsi Sulawesi Tenggara sebagai kawasan pariwisata unggulan;<li data-bbox="521 1073 1406 1295">(2) Pengembangan Sektor Unggulan akan difokuskan pada peningkatan produktivitas lada, pala, cengkeh, kakao, kopi, kelapa, garam, tebu, dan perikanan budidaya. Perikanan budidaya dikembangkan dengan melakukan revitalisasi dan pengembangan kawasan tambak udang dan bandeng, memberikan calon induk unggul ikan air payau, benih ikan air tawar, ikan air payau, ikan air laut, udang, dan kepiting, serta sarana produksi usaha dan perbenihan ikan yang disalurkan kepada masyarakat;<li data-bbox="521 1300 1406 1438">(3) Pengembangan Kawasan Perkotaan yang difokuskan pada pengembangan wilayah metropolitan (WM Makassar dan WM Manado); lima kota sedang (Gorontalo, Palu, Parepare, Palopo, dan Kendari); dan satu kawasan perkotaan kecil, yaitu Pusat Kegiatan Wilayah (PKW) Mamuju;<li data-bbox="521 1443 1406 2313">(4) Pembangunan Daerah Tertinggal, Kawasan Perbatasan, Perdesaan, dan Transmigrasi yang difokuskan pada pengembangan ekonomi PKSN Melonguane dan PKSN Tahuna, termasuk pembangunan infrastrukturnya; serta penanganan terhadap 15 kecamatan lokasi prioritas perbatasan negara di Wilayah Sulawesi; revitalisasi 18 kawasan transmigrasi yang terdiri atas 4 kawasan transmigrasi di Provinsi Gorontalo (Kawasan Transmigrasi Sumalata di Kabupaten Gorontalo Utara, Kawasan Transmigrasi Pulubala di Kabupaten Gorontalo, Kawasan Transmigrasi Paguyuman Pantai dan Kawasan Transmigrasi Pawonsari di Kabupaten Boalemo), 6 kawasan transmigrasi di Provinsi Sulawesi Tengah (Kawasan Transmigrasi Palolo di Kabupaten Sigi, Kawasan Transmigrasi Bungku di Kabupaten Morowali, Kawasan Transmigrasi Air Terang di Kabupaten Buol, Kawasan Transmigrasi Tampo Lore di Kabupaten Poso, Kawasan Transmigrasi Padauloyo di Kabupaten Tojo Una-Una, dan Kawasan Transmigrasi Bahari Tomini Raya di Kabupaten Parigi Moutong), 2 kawasan transmigrasi di Provinsi Sulawesi Barat (Kawasan Transmigrasi Tobadak di Kabupaten Mamuju Tengah dan Kawasan Transmigrasi Sarudu Baras di Kabupaten Pasang Kayu), 3 kawasan transmigrasi di Provinsi Sulawesi Tenggara (Kawasan Transmigrasi Tinanggea di Kabupaten Konawe Selatan, Kawasan Transmigrasi Mutiara di Kabupaten Muna, dan Kawasan Transmigrasi Asinua-Routa di Kabupaten Konawe), dan 3 kawasan transmigrasi di Provinsi Sulawesi Selatan (Kawasan Transmigrasi Bekkae/Gilireng di Kabupaten Wajo, Kawasan Transmigrasi Masamba di Kabupaten Luwu Utara, dan Kawasan Transmigrasi Mahalona di Kabupaten Luwu Timur); pengembangan 16 KPPN yang pada tahun 2023 difokuskan pada 2 KPPN yaitu KPPN Minahasa Utara dan KPPN Pinrang; 1.043 desa tertinggal yang dipercepat pembangunannya menjadi desa berkembang dan peningkatan 507 desa berkembang menjadi desa mandiri; serta 3 kabupaten daerah tertinggal yang dipercepat



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

No.	Perihal Perubahan	Pemutakhiran RKP Tahun 2023
		<p>pembangunannya dan menjadi fokus intervensi di tahun 2023 seperti pada Tabel 4.8; dan</p> <p>(5) Kelembagaan dan Keuangan Daerah yang difokuskan pada peningkatan rata-rata capaian penerapan SPM daerah (khususnya bidang perumahan rakyat, sosial, dan trantibumlinmas) peningkatan kualitas dan kompetensi SDM ASN yang selaras dengan sektor unggulan dan arah pembangunan kewilayahan Sulawesi, penguatan GWPP pada fungsi pembinaan dan pengawasan kinerja pemerintah kabupaten/kota, Peningkatan pendapatan daerah, kualitas belanja, dan pengelolaan keuangan daerah yang efisien, produktif, dan akuntabel, peningkatan inovasi dan kemandirian daerah, kerja sama antardaerah, penataan dan harmonisasi regulasi, percepatan sertifikasi tanah, penyelesaian sengketa dan konflik pertanahan, operasionalisasi layanan pertanahan modern berbasis digital, percepatan penyusunan dan penetapan RTR KSN, RTRW Provinsi/Kabupaten/Kota, dan RDTR Kabupaten/Kota, serta percepatan penyediaan peta dasar skala besar.</p>
235	Perubahan alinea pertama dalam halaman IV.41 dan alinea pertama dalam halaman IV.42	<p>Dalam rangka mewujudkan tercapainya sasaran PP Pembangunan Wilayah Maluku, kawasan yang diprioritaskan untuk mempercepat pertumbuhan dan pemerataan Wilayah Maluku dapat dilihat pada Gambar 4.9. Upaya untuk Pembangunan Wilayah Maluku akan didukung dengan lima KP sebagai berikut:</p> <p>(1) Pengembangan Kawasan Strategis yang difokuskan pada KI Teluk Weda dan DPP Morotai/KEK Morotai yang berlokasi di Provinsi Maluku Utara;</p> <p>(2) Pengembangan Sektor Unggulan akan difokuskan pada peningkatan produktivitas cengkeh, pala, kelapa, pengembangan perikanan tangkap, dan perikanan budidaya. Perikanan tangkap dikembangkan melalui pemberian bantuan sarana pengembangan usaha nelayan dan perikanan budidaya dikembangkan melalui pemberian benih ikan air laut serta sarana produksi usaha dan perbenihan ikan yang akan disalurkan ke masyarakat;</p> <p>(3) Pengembangan Kawasan Perkotaan yang difokuskan pada pembangunan pusat pertumbuhan baru dilakukan melalui pembangunan satu kota baru (Sofifi), dan pengembangan dua kota sedang (Ternate dan Ambon), serta satu kota kecil (Tual);</p> <p>(4) Pembangunan Daerah Tertinggal, Kawasan Perbatasan, Perdesaan, dan Transmigrasi yang difokuskan pada pengembangan ekonomi kawasan perbatasan negara di 2 PKSN yaitu PKSN Daruba dan PKSN Saumlaki, dengan mengutamakan pembangunan infrastruktur pada PKSN Daruba; pemenuhan pelayanan dasar, infrastruktur dasar, konektivitas wilayah, dan tata kelola di 29 kecamatan lokasi prioritas perbatasan negara di Wilayah Maluku; revitalisasi 3 kawasan transmigrasi yang terdiri atas 1 kawasan transmigrasi di Provinsi Maluku (Kawasan Transmigrasi Kobisonta di Kabupaten Maluku Tengah) dan 2 kawasan transmigrasi di Provinsi Maluku Utara (Kawasan Transmigrasi Mangole di Kabupaten Kepulauan Sula dan Kawasan Transmigrasi Pulau Morotai di Kabupaten Pulau Morotai), pengembangan 2 KPPN yang pada tahun 2023 difokuskan pada 1 KPPN yaitu KPPN Morotai; 675 desa tertinggal yang dipercepat pembangunannya menjadi desa berkembang dan peningkatan 39 desa berkembang menjadi desa mandiri; serta 8 kabupaten daerah tertinggal yang dipercepat pembangunannya dengan fokus intervensi pada 6 kabupaten di tahun 2023 seperti pada Tabel 4.9; dan</p> <p>(5) Kelembagaan dan Keuangan Daerah yang difokuskan pada peningkatan rata-rata capaian penerapan SPM daerah (khususnya</p>



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

No.	Perihal Perubahan	Pemutakhiran RKP Tahun 2023
		<p>bidang sosial, perumahan rakyat, dan trantibumlinmas), peningkatan kualitas dan kompetensi SDM ASN yang selaras dengan sektor unggulan dan arah pembangunan kewilayahan Maluku, penguatan GWPP pada fungsi pembinaan dan pengawasan kinerja pemerintah kabupaten/kota, peningkatan pendapatan daerah, kualitas belanja, dan pengelolaan keuangan daerah yang efisien, produktif, dan akuntabel, peningkatan inovasi daerah dan kemandirian daerah, kerja sama antardaerah, penataan dan harmonisasi regulasi, percepatan sertifikasi tanah, penyelesaian sengketa dan konflik pertanahan, operasionalisasi layanan pertanahan modern berbasis digital, percepatan penyusunan dan penetapan RTR Kepulauan, RTR KSN, RTRW Provinsi/Kabupaten/Kota, RDTR Kabupaten/Kota, dan RDTR KPN, serta percepatan penyediaan peta dasar skala besar.</p>
236	Perubahan alinea pertama dalam halaman IV.43 dan alinea pertama dalam halaman IV.44	<p>Dalam rangka mewujudkan tercapainya sasaran PP Pembangunan Wilayah Papua, kawasan yang diprioritaskan untuk mempercepat pertumbuhan dan pemerataan Wilayah Papua dapat dilihat pada Gambar 4.10 dan Upaya Pembangunan Wilayah Papua akan didukung dengan lima KP sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"><li data-bbox="526 1229 1403 1401">(1) Pengembangan Kawasan Strategis melalui fasilitasi investasi pengembangan KI Teluk Bintuni, fasilitasi penyelesaian masalah strategis KEK Sorong, dan pengembangan DPP Raja Ampat yang berlokasi di Provinsi Papua Barat; serta pengembangan Destinasi Pariwisata Pengembangan Biak-Teluk Cendrawasih yang berlokasi di Provinsi Papua;<li data-bbox="526 1406 1403 1577">(2) Pengembangan Sektor Unggulan akan difokuskan pada peningkatan produktivitas sagu, kopi, kakao, pala, dan perikanan budidaya melalui pemberian sarana produksi usaha yang disalurkan kepada masyarakat. Pengembangan komoditas perikanan tangkap, sapi dan kenaf juga akan didorong melalui keterlibatan berbagai pihak dan integrasi sumber pendanaan non-APBN;<li data-bbox="526 1582 1403 1658">(3) Pengembangan Kawasan Perkotaan yang difokuskan pada pembangunan satu kota baru (Sorong) dan satu kota sedang (Jayapura);<li data-bbox="526 1663 1403 2222">(4) Pembangunan Daerah Tertinggal, Kawasan Perbatasan, Perdesaan, dan Transmigrasi yang difokuskan pada pengembangan ekonomi kawasan perbatasan negara di 3 PKSN yaitu PKSN Jayapura, PKSN Tanah Merah, dan PKSN Merauke; pembangunan infrastruktur dasar, konektivitas wilayah, dan tata kelola di 27 kecamatan lokasi prioritas perbatasan negara di Wilayah Papua; revitalisasi 5 kawasan transmigrasi yang terdiri atas 2 kawasan transmigrasi di Provinsi Papua Barat (Kawasan Transmigrasi Werianggi Werabur di Kabupaten Teluk Wondama dan Kawasan Transmigrasi Bomberay-Tomage di Kabupaten Fak-Fak), 1 kawasan transmigrasi di Provinsi Papua (Kawasan Transmigrasi Senggi di Kabupaten Keerom), dan 2 kawasan transmigrasi di Provinsi Papua Selatan (Kawasan Transmigrasi Salor dan Kawasan Transmigrasi Muting/Jagebob di Kabupaten Merauke); pengembangan 4 KPPN yang pada tahun 2023 difokuskan pada 2 KPPN yaitu KPPN Kota Jayapura dan KPPN Raja Ampat; percepatan pembangunan 2.449 kampung tertinggal menjadi kampung berkembang, dan peningkatan 30 kampung berkembang menjadi kampung mandiri; serta 30 kabupaten daerah tertinggal yang dipercepat pembangunannya dengan fokus intervensi pada 23 kabupaten di tahun 2023 seperti pada Tabel 4.10; dan<li data-bbox="526 2227 1403 2303">(5) Kelembagaan dan Keuangan Daerah yang difokuskan pada peningkatan rata-rata capaian penerapan SPM daerah (khususnya bidang sosial, trantibumlinmas, dan perumahan rakyat), peningkatan

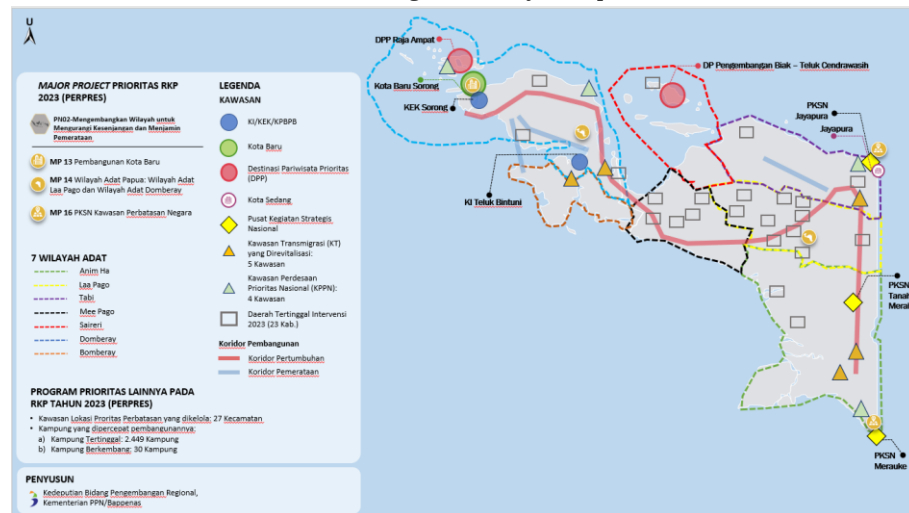


**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

No.	Perihal Perubahan	Pemutakhiran RKP Tahun 2023
		<p>kualitas dan kompetensi SDM ASN yang selaras dengan sektor unggulan dan arah pembangunan kewilayahan Papua, penguatan GWPP pada fungsi pembinaan dan pengawasan kinerja pemerintah kabupaten/kota termasuk pengoptimalan pengelolaan Dana Otonomi Khusus Papua bagi pelayanan publik dan pengembangan ekonomi, peningkatan pendapatan daerah, kualitas belanja, dan pengelolaan keuangan daerah yang efisien, produktif, dan akuntabel, peningkatan inovasi dan kemandirian daerah, kerja sama antardaerah, penataan dan harmonisasi regulasi), percepatan sertifikasi tanah, penyelesaian sengketa dan konflik pertanahan, operasionalisasi layanan pertanahan modern berbasis digital, percepatan penyusunan dan penetapan RTR Pulau, RTR KSN, RTRW Provinsi/Kabupaten/Kota, RDTR Kabupaten/Kota, dan RDTR KPN, serta percepatan penyediaan peta dasar skala besar.</p>

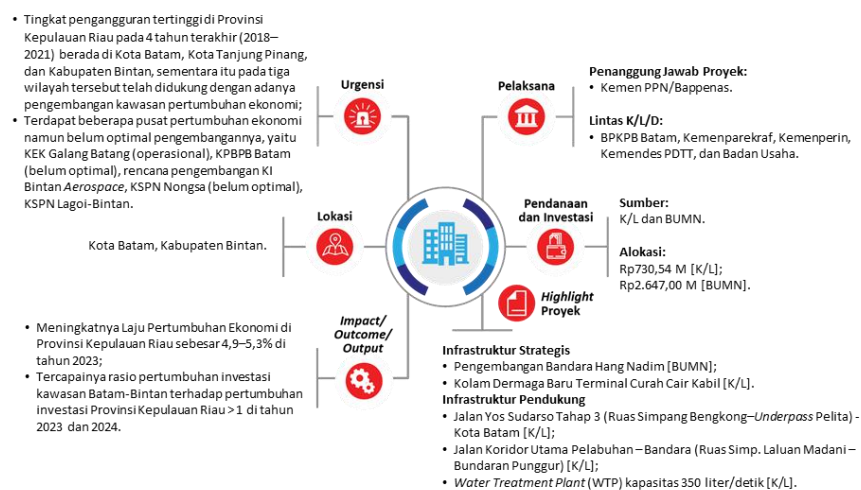
237 Perubahan Gambar 4.10 dalam halaman IV.44

Gambar 4.10
Peta Pembangunan Wilayah Papua



238 Perubahan Infografis Major Project Pembangunan Wilayah Batam-Bintan dalam halaman IV.45

MP Pembangunan Wilayah Batam-Bintan





PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

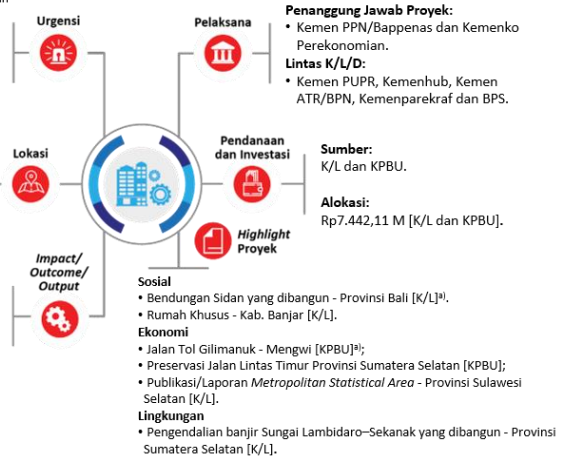
No. Perihal Perubahan Pemutakhiran RKP Tahun 2023

239 Perubahan Infografis Major Project Pengembangan Wilayah Metropolitan (WM): Palembang, Denpasar, Banjarmasin, Makassar dalam halaman IV.45

MP Pengembangan Wilayah Metropolitan (WM): Palembang, Denpasar, Banjarmasin, Makassar

- Peningkatan jumlah penduduk perkotaan;
 - Pada tahun 2045, 67,1% penduduk Indonesia diproyeksikan tinggal di perkotaan atau 220 juta jiwa;
 - Kenaikan 1% penduduk perkotaan hanya meningkatkan PDB sebesar 1,4%;
 - Kontribusi jumlah penduduk dan PDRB WM;
 - Sekitar seperempat penduduk Indonesia tinggal di 10 WM dan kontribusi PDRB WM hampir setengah PDB Nasional tanpa migas.
 - WM Palembang: Kota Palembang, Kab. Banyuasin, Kab. Ogan Ilir, Kab. Ogan Komering Ilir (Provinsi Sumatera Selatan);
 - WM Denpasar: Kota Denpasar, Kab. Badung, Kab. Gianyar, Kab. Tabanan (Provinsi Bali);
 - WM Banjarmasin: Kota Banjarmasin, Kota Banjarbaru, Kab. Banjar, Kab. Barito Kuala, Kab. Tanah Laut (Provinsi Kalimantan Selatan);
 - WM Makassar: Kota Makassar, Kab. Takalar, Kab. Maros, Kab. Gowa (Provinsi Sulawesi Selatan).
- Meningkatkan Indeks Kota Berkelanjutan (IKB) Wilayah Metropolitan sebesar 2% menjadi 50,69 (Skenario Rendah) di tahun 2023 dan 4% menjadi 51,87 (Skenario Rendah) di tahun 2024.

Keterangan:
a) Proyek berstatus PSN.

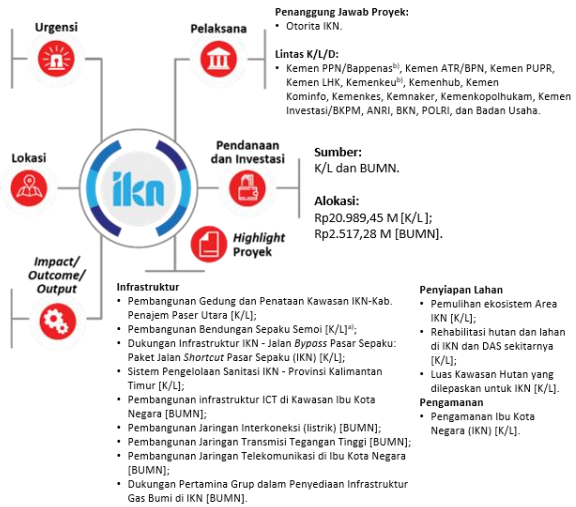


240 Perubahan Infografis Major Project Pembangunan Ibu Kota Nusantara dalam halaman IV.46

MP Pembangunan Ibu Kota Nusantara

- Kesenjangan KBI dan KTI: Kontribusi PDRB Pulau Jawa dan Sumatera mendominasi dengan angka 79,30% dari PDB Indonesia.
- Kab. Penajam Paser Utara, Kab. Kutai Kartanegara, Kota Samarinda, Kota Balikpapan (Provinsi Kalimantan Timur).
- Peningkatan Laju Pertumbuhan PDRB Wilayah Kalimantan 5,2–5,5% pada tahun 2023 dan 5,40% pada tahun 2024 (baseline 2019: 4,96%)

Keterangan:
a) Proyek berstatus PSN;
b) Koordinasi perencanaan dan penganggaran IKN.





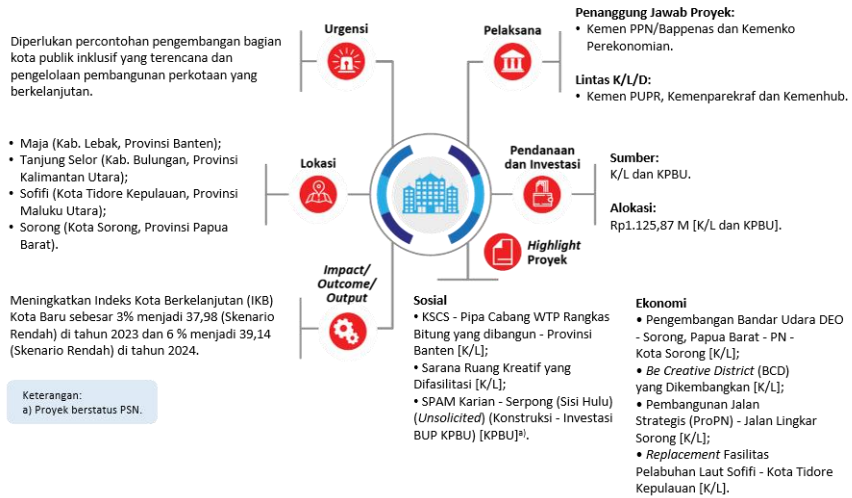
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

No. Perihal
Perubahan

Pemutakhiran RKP Tahun 2023

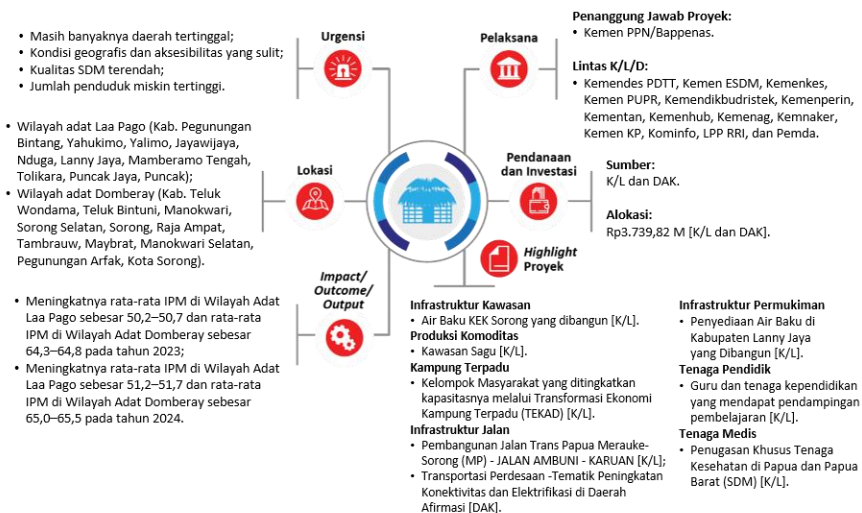
241 Perubahan
Infografis *Major Project*
Pembangunan
Kota Baru:
Maja, Tanjung
Selor, Sofifi dan
Sorong dalam
halaman IV.46

MP Pembangunan Kota Baru: Maja, Tanjung Selor, Sofifi, dan Sorong



242 Perubahan
Infografis *Major Project* Wilayah
Adat Papua:
Wilayah Adat
Laa Pago dan
Wilayah Adat
Domberay
dalam halaman
IV.47

MP Wilayah Adat Papua:
Wilayah Adat Laa Pago dan Wilayah Adat Domberay





PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

No. Perihal Perubahan Pemutakhiran RKP Tahun 2023

243 Perubahan Infografis Major Project Pemulihan Pascabencana: Kota Palu dan Sekitarnya, Pulau Lombok dan Sekitarnya, serta Kawasan Pesisir Selat Sunda dalam halaman IV.47

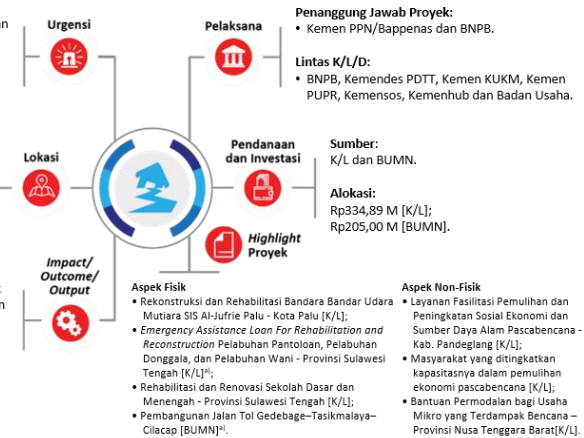
MP Pemulihan Pascabencana: Kota Palu dan Sekitarnya, Pulau Lombok dan Sekitarnya, serta Kawasan Pesisir Selat Sunda

- Berbagai Kementerian/Lembaga memiliki kegiatan pascabencana namun sampai saat ini belum mengajukan prioritas intervensi kegiatan untuk setiap sektornya;
- Masih minimnya manajemen penanganan pascabencana lintas sektor pembangunan;
- Belum tuntasnya target pemulihan di wilayah pascabencana sesuai dengan target dalam RPJMN 2020-2024.

- Provinsi Sulawesi Tengah (Kota Palu dan Kab. Donggala);
- Provinsi NTB;
- Provinsi Banten (Kab. Serang dan Kab. Pandeglang).

Memulihkan pelayanan publik yang terdampak akibat bencana sampai dengan 75% pada tahun 2023 dan 100% pada Tahun 2024 hingga berfungsi untuk melakukan pelayanan masyarakat.

Keterangan:
a) Proyek berstatus PSN.



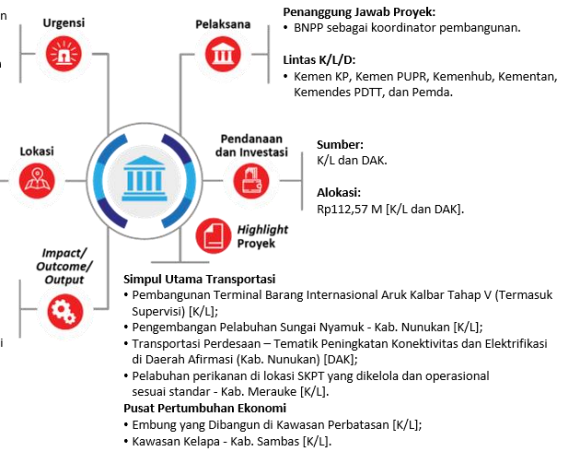
244 Perubahan Infografis Major Project PKSN Kawasan Perbatasan Negara dalam halaman IV.48

MP PKSN Kawasan Perbatasan Negara

- Mendorong pengembangan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan;
- Belum optimalnya aktivitas ekonomi di wilayah perbatasan negara sehingga perlu pengembangan pusat-pusat pertumbuhan baru di kawasan perbatasan negara;
- Mendorong pengembangan kawasan perbatasan sebagai beranda depan negara.

- PKSN Paloh Aruk (Provinsi Kalimantan Barat, Kabupaten Sambas);
- PKSN Nunukan (Provinsi Kalimantan Utara, Kabupaten Nunukan);
- PKSN Atambua (Provinsi NTT, Kabupaten Belu);
- PKSN Kefamenanu (Provinsi NTT, Kabupaten Timor Tengah Utara);
- PKSN Jayapura (Provinsi Papua, Kota Jayapura);
- PKSN Merauke (Provinsi Papua, Kabupaten Merauke).

- Meningkatnya rata-rata nilai Indeks Pengelolaan Kawasan Perbatasan (IPKP) pada 18 PKSN menjadi 0,50 di Tahun 2023;
- Meningkatnya rata-rata nilai Indeks Pengelolaan Kawasan Perbatasan (IPKP) PKSN Paloh Aruk menjadi 0,50 di tahun 2023 dan 0,52 di tahun 2024;
- Meningkatnya rata-rata nilai Indeks Pengelolaan Kawasan Perbatasan (IPKP) PKSN Atambua menjadi 0,46 di tahun 2023 dan 0,48 di tahun 2024;
- Meningkatnya rata-rata nilai Indeks Pengelolaan Kawasan Perbatasan (IPKP) PKSN Jayapura menjadi 0,43 di tahun 2023 dan 0,45 di tahun 2024.





PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

No.	Perihal Perubahan	Pemutakhiran RKP Tahun 2023
245	Perubahan Infografis Major Project Manajemen Aset Lahan dalam Pemberdayaan Masyarakat (Reforma Agraria) dalam halaman IV.48	<p style="text-align: center;">MP Manajemen Aset Lahan dalam Pemberdayaan Masyarakat (Reforma Agraria)</p> <ul style="list-style-type: none">Urgensi<ul style="list-style-type: none">Adanya ketimpangan kepemilikan dan penguasaan tanah yang tinggi berpotensi menimbulkan konflik di masyarakat;Pemberian sertipikat tanah kepada masyarakat yang telah dilakukan secara masif belum secara signifikan mengurangi ketimpangan pemilikan lahan karena pemberian sertipikat tanah selama ini lebih banyak sebagai jaminan hukum terhadap tanah yang telah dikuasai masyarakat (Legalitas Aset Tanah);Kesejahteraan masyarakat pemilik tanah masih rendah.Lokasi<ul style="list-style-type: none">Bali, Bengkulu, Jambi, Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, Banten, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Utara, Sulawesi Tengah, dan Sumatera Utara.Pendanaan dan Investasi<ul style="list-style-type: none">Penanggung Jawab Proyek:<ul style="list-style-type: none">Kemen ATR/BPN.Lintas K/L/D:<ul style="list-style-type: none">Kemendes PDPT, Kemen KUKM, Kementan, KKP, dan KSP.Sumber: K/L.Alokasi: Rp116,46 M [K/L].Impact/Outcome/Output<ul style="list-style-type: none">Penyelesaian Sengketa dan Konflik Tanah<ul style="list-style-type: none">Surat Keputusan Penyelesaian Konflik Pertanahan [K/L].Penyusunan Peta Bidang Tanah<ul style="list-style-type: none">PBT Redistribusi Tanah [K/L].Redistribusi Tanah<ul style="list-style-type: none">SHAT Redistribusi Tanah [K/L].Pemanfaatan dan Penggunaan Aset<ul style="list-style-type: none">Penataan Kelembagaan Penerima Akses Reforma Agraria Tahun ke 2 [K/L].Koordinasi Kelembagaan melalui GTRA (Gugus Tugas Reforma Agraria)Data GTRA Provinsi [K/L].Pendidikan, Pelatihan dan Pendampingan Usaha<ul style="list-style-type: none">Usaha Mikro yang DifasilitasiPendampingan untuk Peningkatan Usaha (KUR, SHAT) [K/L].Dukungan Modal/Keuangan Mikro, Infrastruktur, dan Teknologi Tepat Guna<ul style="list-style-type: none">Prasarana Pascapanen Tanaman Perkebunan - Kab. Minahasa Selatan [K/L].Pemasaran dan Interkoneksi dengan Dunia Usaha<ul style="list-style-type: none">Fasilitasi Pengembangan BUM Desa [K/L].
246	Perubahan alinea pertama dalam halaman IV.49	<p>Kerangka regulasi yang dibutuhkan untuk mendukung PN 2 Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan adalah:</p> <ol style="list-style-type: none">Rancangan Undang-Undang tentang Perkotaan;Rancangan Undang-Undang tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Jakarta Perubahan Undang-Undang No. 29 tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta sebagai Ibu Kota Negara Kesatuan Republik Indonesia;Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara;Revisi Peraturan Presiden No. 45 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Perkotaan Denpasar, Badung, Gianyar, dan Tabanan (Sarbagita);Revisi Peraturan Presiden No. 58 Tahun 2014 tentang Kawasan Borobudur dan Sekitarnya;Rancangan Peraturan Presiden tentang Pembagian Wilayah Ibu Kota Nusantara;Rancangan Peraturan Presiden tentang Pemindahan Lembaga Negara, Aparatur Sipil Negara, Perwakilan Negara Asing, dan Perwakilan Organisasi/Lembaga Internasional;Rancangan Peraturan Presiden Republik Indonesia tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Subak-Bali <i>Landscape</i>;Rancangan Peraturan Presiden Republik Indonesia tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Ekosistem Leuser;Revisi Peraturan Presiden No. 3 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Pulau Kalimantan;Rancangan Peraturan Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara tentang Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) WP IKN Selatan;Rancangan Peraturan Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara tentang Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) WP IKN Utara;Rancangan Peraturan Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara tentang Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) WP IKN Simpang Samboja;Rancangan Peraturan Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara tentang Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) WP IKN Kuala Samboja;



**PRESIDEN
REPUBLIC INDONESIA**

No.	Perihal Perubahan	Pemutakhiran RKP Tahun 2023
		(15) Rancangan Peraturan Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara tentang Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) WP IKN Muara Jawa.
247	Perubahan alinea keempat dalam halaman IV.51	<p>(2) Reformasi sistem perlindungan sosial, yang difokuskan pada penyempurnaan penyelenggaraan program bantuan dan jaminan sosial yang lebih akurat, terintegrasi, dan adaptif dengan strategi yang terdiri dari</p> <ul style="list-style-type: none">(a) perluasan cakupan kepesertaan jaminan sosial akan difokuskan kepada sektor informal dalam Jaminan Sosial Ketenagakerjaan melalui mekanisme kolaboratif dan pemberian subsidi iuran (PBI) bagi pekerja miskin dan tidak mampu;(b) perluasan akses pelayanan dan penguatan tata kelola kelembagaan antarpengyelenggara jaminan sosial dan pemangku kepentingan terkait;(c) peningkatan keterlibatan aktif serta kapasitas pemerintah daerah dalam melakukan pemutakhiran, perluasan, dan transformasi data penduduk miskin dan rentan menjadi registrasi sosial-ekonomi melalui monografi desa/kelurahan digital secara berkala untuk meningkatkan ketepatan sasaran program, termasuk dalam penghapusan kemiskinan ekstrem;(d) penguatan integrasi dan digitalisasi penyaluran program bantuan sosial;(e) pengembangan mekanisme graduasi terintegrasi program-program bantuan sosial;(f) perluasan asesmen dan penjangkauan rehabilitasi sosial yang terintegrasi terhadap kelompok rentan, seperti anak, lanjut usia, penyandang disabilitas, pekerja sektor informal, korban bencana, penduduk terdampak pandemi COVID-19, korban perdagangan manusia, korban penyalahgunaan Narkotika, Alkohol, Psikotropika, dan Zat Adiktif lainnya (NAPZA), penderita HIV/AIDS, dan kelompok rentan lainnya;(g) pengembangan perlindungan sosial yang adaptif terhadap bencana, termasuk bencana pandemi;(h) transformasi subsidi energi (LPG 3 kg dan listrik) menjadi bantuan sosial agar program lebih efektif, tepat sasaran, dan adaptif; dan(i) integrasi dan peningkatan kesinambungan data, pemantauan dan evaluasi, serta pengembangan skema pembiayaan program perlindungan sosial yang berkesinambungan.
248	Perubahan alinea kelima dalam halaman IV.51 dan alinea pertama dalam halaman IV.52	<p>(3) Meningkatkan pelayanan kesehatan menuju cakupan kesehatan semesta, dengan fokus pada</p> <ul style="list-style-type: none">(a) peningkatan kesehatan ibu dan anak, KB dan kesehatan reproduksi, serta pelayanan kesehatan usia lanjut melalui penguatan sistem rujukan maternal, pendampingan ibu hamil dengan risiko tinggi, penguatan kapasitas pelayanan antenatal, neonatal, persalinan, pascapersalinan dan kegawatdaruratan maternal dan neonatal, revitalisasi pelayanan KB dan kesehatan reproduksi melalui pengembangan akses ke poskesdes dan Pelayanan KB di RS (PKBRS), perluasan jangkauan di wilayah khusus dan sasaran khusus serta Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE), pendampingan kesehatan reproduksi berdasarkan siklus hidup untuk mengurangi risiko "4 terlalu" serta penggunaan KB pasca persalinan;(b) percepatan penurunan <i>stunting</i> dan <i>wasting</i> melalui peningkatan kualitas dan cakupan intervensi spesifik antara lain perbaikan gizi remaja putri, ibu hamil, dan balita, pendampingan pemerintah



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

No.	Perihal Perubahan	Pemutakhiran RKP Tahun 2023
		<p>daerah dan keluarga melalui satgas <i>stunting</i> dan tim pendamping keluarga, peningkatan kualitas pelayanan posyandu, penyediaan data intervensi, serta penajaman sasaran intervensi sensitif dengan fokus pada daerah dengan jumlah dan prevalensi balita <i>stunting</i> tinggi;</p> <p>(c) pengendalian penyakit melalui pencegahan dan penemuan kasus penyakit menular seperti TB, HIV/AIDS, kusta, malaria dan penyakit tropis terabaikan, skrining atau deteksi dini faktor risiko dan penyakit tidak menular dan pembudayaan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat, serta tata laksana kasus secara komprehensif;</p> <p>(d) pencegahan Kejadian Luar Biasa (KLB) penyakit melalui penguatan dan perluasan cakupan imunisasi dasar lengkap, penambahan antigen baru, register imunisasi, peningkatan kapasitas laboratorium dalam deteksi dini dan respons KLB, serta pemenuhan sarana prasarana terutama rantai dingin dan tenaga imunisasi;</p> <p>(e) pementapan reformasi sistem kesehatan nasional melalui penguatan ketahanan kesehatan, inovasi pendidikan tenaga kesehatan melalui peningkatan kuota mahasiswa dan academic health system untuk percepatan produksi tenaga kesehatan, serta inovasi pendayagunaannya melalui salah satunya beasiswa wajib penempatan, perluasan kuota ASN tenaga kesehatan dan redistribusi tenaga kesehatan, inovasi pemerataan fasilitas pelayanan kesehatan berkualitas melalui penyediaan puskesmas di setiap kecamatan, pembangunan Rumah Sakit (RS) Pratama terutama di daerah sulit akses serta pengembangan RS Rujukan Nasional dan RS dengan layanan unggulan secara merata dan digitalisasi pelayanan kesehatan serta percepatan akreditasi dengan melibatkan pemerintah daerah, peningkatan kemandirian farmasi dan alat kesehatan, serta penguatan pengawasan obat dan makanan; dan</p> <p>(f) peningkatan kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional.</p>
249	Perubahan alinea keempat dalam halaman IV.53 dan alinea pertama dalam halaman IV.54	<p>(6) Mengentaskan kemiskinan. Penguatan akses penduduk miskin dan rentan terhadap aset produktif, pemberdayaan usaha, dan akses pembiayaan untuk mendukung akselerasi peningkatan ekonomi bagi penduduk miskin dan rentan, serta menghapus kemiskinan ekstrem, melalui</p> <p>(a) peningkatan keberantaraan akses pasar bagi pelaku usaha miskin dan rentan melalui pendampingan inkubasi bisnis dan akses permodalan;</p> <p>(b) peningkatan akses penduduk miskin dan rentan pada aset produktif, termasuk lahan, pendampingan pada reforma agraria dan perhutanan sosial;</p> <p>(c) peningkatan dukungan yang inklusif bagi kelompok penduduk miskin dan rentan, termasuk anak, penyandang disabilitas, lansia, korban perdagangan manusia, korban penyalahgunaan NAPZA, penderita HIV/AIDS, korban bencana termasuk penduduk terdampak pandemi COVID-19 dan kelompok rentan lainnya untuk memperoleh akses pemenuhan kebutuhan dasar dan peningkatan pendapatan; dan</p> <p>(d) pengurangan kemiskinan ekstrem secara khusus didorong melalui perencanaan dan pemberdayaan kolaboratif di tingkat desa/kelurahan melalui Digitalisasi Monografi Desa/Kelurahan dan Registrasi Sosial-Ekonomi. Menindaklanjuti arahan Bapak Presiden dalam pidato kenegaraan tanggal 16 Agustus 2022, pelaksanaan pendataan awal Regsosek dilakukan oleh BPS di</p>



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

No.	Perihal Perubahan	Pemutakhiran RKP Tahun 2023
		tahun 2022 di seluruh wilayah kabupaten/kota dan hasil pendataan akan disampaikan kepada Bappenas tahun 2023.
250	Perubahan alinea kedua dalam halaman IV.54	<p>(7) Meningkatkan produktivitas dan daya saing, melalui</p> <ul style="list-style-type: none">(a) reformasi pendidikan vokasi dan pelatihan vokasi sesuai kebutuhan pasar kerja melalui reorientasi dari <i>supply-driven</i> menjadi <i>demand-driven (link and match)</i> dengan strategi dan pendekatan yang komprehensif, terintegrasi, serta terkoordinasi sebagaimana diatur dalam Perpres No. 68/2022 tentang Revitalisasi Pendidikan Vokasi dan Pelatihan Vokasi agar kualitas lulusan pendidikan vokasi dan pelatihan vokasi memiliki tingkat produktivitas, keterampilan, dan daya saing yang tinggi dalam memasuki dunia kerja;(b) pengembangan sistem informasi pasar kerja yang kredibel dan berkelas dunia;(c) peningkatan kualitas lulusan perguruan tinggi melalui pengembangan prodi yang adaptif dan transformasi kurikulum dan pembelajaran yang berorientasi kompetensi dan mampu menjawab kebutuhan masa depan;(d) penguatan pembinaan dan pengembangan perguruan tinggi swasta dalam rangka peningkatan kualitas dan daya saing pendidikan tinggi;(e) penguatan kapabilitas riset dan inovasi melalui dukungan sarana dan prasarana strategis, peningkatan kompetensi dan kualifikasi SDM iptek (dosen, peneliti, dan perekayasa), serta penguatan ekosistem riset dan inovasi khususnya jaringan dengan industri di antaranya melalui kerja sama inovasi <i>Triple-Helix</i> di <i>Science Techno Park (STP)</i>;(f) pemfokusan kegiatan penelitian dan pengembangan untuk pencapaian target <i>flagship</i> Prioritas Riset Nasional 2020–2024 serta mendukung penanganan pandemi COVID-19 dan pemulihan ekonomi; dan(g) perbaikan pembinaan olahraga di antaranya melalui penguatan pembinaan atlet <i>elite</i> jangka panjang melalui penyelenggaraan <i>training centre</i>, mendorong penyusunan regulasi desain olahraga di daerah, penyelenggaraan <i>event</i> olahraga internasional, mendorong penataan dan pengembangan wadah serta peningkatan kualitas pembinaan atlet usia muda melalui satuan pendidikan di daerah serta memfokuskan pembinaan olahraga prestasi dan olahraga pendidikan sesuai dengan Desain Besar Olahraga Nasional.



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

No.	Perihal Perubahan	Pemutakhiran RKP Tahun 2023					
251	Perubahan Tabel 4.11 dalam halaman IV.55	Tabel 4.11 Sasaran, Indikator, dan Target PN 3 Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing					
No.	Sasaran/Indikator	Baseline 2019	Realisasi		Target		
			2020	2021	2022	2023	2024
1	Terkendalinya pertumbuhan penduduk dan menguatnya tata kelola kependudukan						
1.1	Angka Kelahiran Total (<i>Total Fertility Rate/ TFR</i>) (per wanita usia subur usia 15-49 tahun)	2,28 ¹⁾	2,40 ²⁾	2,24 ³⁾	2,21	2,19	2,10
1.2	Persentase cakupan kepemilikan Nomor Induk Kependudukan (NIK) (%)	95,17 ⁴⁾	99,11 ⁵⁾	99,21 ⁵⁾	99,00	99,00	100,00
2	Meningkatnya perlindungan sosial bagi seluruh penduduk						
2.1	Proporsi penduduk yang tercakup dalam program perlindungan sosial (%)						
2.1.1	Proporsi penduduk yang tercakup dalam program jaminan sosial (%)	83,61 ⁶⁾	82,07 ⁶⁾	86,96 ⁶⁾	87,00	91,00	98,00
2.1.2	Proporsi rumah tangga miskin dan rentan yang memperoleh bantuan sosial pemerintah (%)	58,60 ⁴⁾	65,10 ⁴⁾	64,31 ⁴⁾	75,00	78,00	80,00
3	Terpenuhnya layanan dasar bidang kesehatan dan pendidikan						
3.1	Angka Kematian Ibu (AKI) (per 100.000 kelahiran hidup)	305 ¹⁾	230 ^{a)}	217 ^{b)}	205	194	183
3.2	Angka Kematian Bayi (AKB) (per 1.000 kelahiran hidup)	24,00 ²⁾	20,6 ^{a)}	19,50 ^{b)}	18,60	17,6	16,00
3.3	Prevalensi <i>stunting</i> (pendek dan sangat pendek) pada balita (%)	27,67 ⁷⁾	24,10 ^{a)}	24,37 ⁷⁾	18,40	17,50	14
3.4	Insidensi <i>tuberculosis</i> (per 100.000 penduduk)	312 ⁸⁾	301 ⁸⁾	354 ⁸⁾	231	211	190
3.5	Jumlah kabupaten/kota yang mencapai eliminasi malaria (kabupaten/kota)	285 ⁹⁾	320 ⁹⁾	347 ⁹⁾	365	385	405



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

No.	Perihal Perubahan	Pemutakhiran RKP Tahun 2023					
No.	Sasaran/Indikator	<i>Baseline</i> 2019	<i>Realisasi</i>		<i>Target</i>		
			2020	2021	2022	2023	2024
252	Perubahan Tabel 4.11 dalam halaman IV.56						
3.6	Jumlah kabupaten/kota dengan eliminasi kusta (kabupaten/kota)	368 ⁹⁾	401 ⁹⁾	415 ⁹⁾	458	482	514
3.7	Prevalensi obesitas pada penduduk umur > 18 tahun (%)	21,80 ¹⁰⁾	21,80 ^{a)}	21,80 ^{b)}	21,80	21,80	21,80
3.8	Persentase merokok penduduk usia 10–18 tahun (%)	9,10 ¹⁰⁾	9,10 ^{a)}	9,00 ^{b)}	8,90	8,80	8,70
3.9	Nilai rata-rata hasil PISA:						
3.9.1	Membaca	371 ¹¹⁾	N/A ¹¹⁾	N/A ¹¹⁾	394	394	396
3.9.2	Matematika	379 ¹¹⁾	N/A ¹¹⁾	N/A ¹¹⁾	385	385	388
3.9.3	Sains	396 ¹¹⁾	N/A ¹¹⁾	N/A ¹¹⁾	399	399	402
3.10	Rata-rata lama sekolah penduduk usia 15 tahun ke atas (tahun)	8,75 ⁴⁾	8,90 ⁴⁾	8,97 ⁴⁾	9,13	9,24	9,36
3.11	Harapan lama sekolah (tahun)	12,95 ⁴⁾	12,98 ⁴⁾	13,08 ⁴⁾	13,57	13,22	13,30
4	Meningkatnya kualitas anak, perempuan, dan pemuda						
4.1	Indeks Perlindungan Anak (IPA)	62,72 ¹²⁾	66,89 ¹²⁾	66,10 ¹²⁾	69,87	71,66	73,49
4.2	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	91,07 ¹³⁾	91,06 ¹³⁾	91,27 ¹³⁾	91,11– 91,35	91,17 –91,44	91,24– 91,54
4.3	Indeks Pembangunan Pemuda (IPP)	52,67 ¹⁴⁾	51,00 ¹⁴⁾	53,33 ¹⁴⁾	55,61	56,65	57,67
5	Meningkatnya aset produktif bagi rumah tangga miskin dan rentan						
5.1	Persentase rumah tangga miskin dan rentan yang memiliki aset produktif (%)	30,40 ⁴⁾	31,85 ⁴⁾	35,83 ⁴⁾	36,00	38,00	40,00
6	Meningkatnya produktivitas dan daya saing						
6.1	Persentase angkatan kerja berpendidikan menengah ke atas (%)	43,72 ¹⁵⁾	44,35 ¹⁵⁾	45,69 ¹⁵⁾	46,87	48,00	49,75
6.2	Jumlah PT yang masuk ke dalam <i>world class university</i> (PT):						



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

No.	Perihal Perubahan	Pemutakhiran RKP Tahun 2023							
253	Perubahan Tabel 4.11 dalam halaman IV.57	No.	Sasaran/Indikator	<i>Baseline</i> 2019	<i>Realisasi</i>		<i>Target</i>		
					2020	2021	2022	2023	2024
		6.2.1	Top 200	0 ¹⁶⁾	0 ¹⁶⁾	0 ¹⁶⁾	0	0	1
		6.2.2	Top 300	1 ¹⁶⁾	1 ¹⁶⁾	1 ¹⁶⁾	1	1	2
		6.2.3	Top 500	2 ¹⁶⁾	2 ¹⁶⁾	2 ¹⁶⁾	2	2	3
		6.3	Proporsi pekerja yang bekerja pada bidang keahlian menengah dan tinggi (%)	40,60 ¹⁵⁾	40,02 ¹⁵⁾	40,39 ¹⁵⁾	41,92	43,00	43,10
6.4	Peringkat <i>Global Innovation Index</i>	85 ¹⁷⁾	85 ¹⁷⁾	87 ¹⁷⁾	80–85	75–80	75–80		

Sumber: 1) Survei Penduduk Antar Sensus (SUPAS), 2015; 2) Survei Demografi Kesehatan Indonesia (SDKI) 2017; 3) Pendataan Keluarga (PK), 2021; 4) Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas), 2019, 2020, 2021; 5) Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK), 2020; 6) Dewan Jaminan Sosial Nasional, 2019, 2020; 7) Studi Status Gizi Indonesia (SSGI), 2019 & 2021; 8) *Global Tuberculosis Report, 2020-2022*; 9) Kemenkes, 2018, 2019, 2020, TW IV 2021; 10) Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas), 2018; 11) *Programme for International Student Assessment (PISA)*, 2018 dilaksanakan setiap 3 tahun sekali (2015, 2018, dan pelaksanaan tahun 2021 diundur ke tahun 2022); 12) Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA), 2019, 2020, 2021; 13) BPS, 2019, 2020, 2021; 14) Diolah dari Susenas KOR dan Sakernas, 2021 serta Susenas MSBP, 2021; 15) Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas), 2019, 2020, 2021; 16) QS *World University Rankings*, 2019–2021; 17) INSEAD-WIPO *Global Innovation Index Report*, 2019-2021.

Keterangan: a) Merupakan angka target 2020 dalam Perpres Pemutakhiran RKP 2021; b) Merupakan angka target 2021 dalam Perpres Pemutakhiran RKP 2022.



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

No.	Perihal Perubahan	Pemutakhiran RKP Tahun 2023								
254	Perubahan Tabel 4.12 dalam halaman IV.61	No.	Sasaran/Indikator	<i>Baseline</i> 2019	<i>Realisasi</i>		<i>Target</i>			
					2020	2021	2022	2023	2024	
		3.14	Persentase rumah sakit terakreditasi (%)	70 ¹²⁾	88,00 ¹²⁾	88,40 ¹²⁾	95	95	100	
		3.15	Persentase puskesmas dengan jenis tenaga kesehatan sesuai standar (%)	23 ¹²⁾	39,60 ¹²⁾	48,86 ¹²⁾	65	71	83	
		3.16	Persentase RSUD kab/kota memiliki 4 dokter spesialis dasar & 3 dokter spesialis lainnya (%)	61,70 ¹²⁾	69,77 ²⁾	75,31 ¹²⁾	80	85	90	
		3.17	Persentase obat memenuhi syarat (%)	78,60 ¹³⁾	90,60 ¹³⁾	95,21 ¹³⁾	92,25	96	97	
		3.18	Persentase makanan memenuhi syarat (%)	76 ¹³⁾	79,68 ¹³⁾	85,59 ¹³⁾	83	86	88	
		PP 4. Peningkatan Pemerataan Layanan Pendidikan Berkualitas								
		Meningkatnya pemerataan layanan pendidikan berkualitas								
		4.1	Rasio Angka Partisipasi Kasar (APK) 20 persen termiskin dan 20 persen terkaya (rasio)							
		4.1.1	SMA/SMK/MA Sederajat	0,77 ³⁾	0,77 ³⁾	0,76	0,81	0,82	0,83	
		4.1.2	Pendidikan Tinggi	0,18 ³⁾	0,28 ³⁾	0,29 ³⁾	0,30	0,31	0,32	
		4.2	Proporsi anak di atas batas kompetensi minimal dalam tes PISA (%)							
		4.2.1	Membaca	30,10 ¹⁴⁾	N/A ¹⁴⁾	N/A ¹⁴⁾	33,00	33,00	34,10	
		4.2.2	Matematika	28,10 ¹⁴⁾	N/A ¹⁴⁾	N/A ¹⁴⁾	30,00	30,00	30,90	
		4.2.3	Sains	40,00 ¹⁴⁾	N/A ¹⁴⁾	N/A ¹⁴⁾	42,60	42,60	44,00	
		4.3	Proporsi anak di atas batas kompetensi minimal dalam asesmen kompetensi (%)							
		4.3.1	Literasi	53,20 ¹⁵⁾	53,20 ¹⁵⁾	52,54 ²³⁾	55,43	58,31	61,20	
4.3.2	Numerasi	22,90 ¹⁵⁾	22,90 ¹⁵⁾	32,29 ²³⁾	35,67	39,41	43,54			



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

No.	Perihal Perubahan	Pemutakhiran RKP Tahun 2023								
255	Perubahan Tabel 4.12 dalam halaman IV.62	No.	Sasaran/Indikator	Baseline 2019	Realisasi		Target			
					2020	2021	2022	2023	2024	
		4.4	Tingkat penyelesaian pendidikan (%)							
		4.4.1	SD/MI/ sederajat	95,48 ¹⁶⁾	96,00 ¹⁶⁾	97,37	97,93	98,41	98,94	
		4.4.2	SMP/MTs/ sederajat	85,23 ¹⁶⁾	87,89 ¹⁶⁾	88,88	90,54	91,08	93,33	
		4.4.3	SMA/SMK/MA/ sederajat	58,33 ¹⁶⁾	63,95 ¹⁶⁾	65,94	69,08	69,68	71,71	
		4.5	Persentase anak kelas 1 SD/MI/SDLB yang pernah mengikuti Pendidikan Anak Usia Dini (%)	63,30 ³⁾	62,48 ³⁾	61,93	62,74	63,55	64,38	
		4.6	Angka Partisipasi Kasar (APK) Pendidikan Tinggi (PT) (%)	30,28 ³⁾	30,85 ³⁾	31,19 ¹⁾	31,52	31,89	32,28	
		PP 5. Peningkatan Kualitas Anak, Perempuan, dan Pemuda								
		Menguatnya perlindungan anak dan perempuan dari kekerasan, pemberdayaan perempuan di ekonomi, politik, dan ketenagakerjaan, serta partisipasi pemuda dalam kegiatan sosial kemasyarakatan, organisasi, berwirausaha, dan pencegahan perilaku berisiko								
5.1	Persentase perempuan umur 20-24 tahun yang menikah sebelum 18 tahun (%)	10,82 ³⁾	10,35 ³⁾	9,23 ³⁾	9,44	9,08	8,74			
5.2	Prevalensi anak usia 13-17 tahun yang pernah mengalami kekerasan sepanjang hidupnya (%)	Laki-laki 61,70 Perempuan 62,00 ¹⁷⁾	Menu-run ^{d)}	Laki-laki 34,00 Perempuan 41,05 ^{d)}	menu-run	menu-run	menu-run			
5.3	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	75,24 ¹⁸⁾	75,57 ¹⁸⁾	76,26 ¹⁸⁾	75,57-76,73	75,60-77,18	79,16-81,21			
5.4	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Perempuan (%)	51,89 ¹⁹⁾	53,13 ¹⁹⁾	53,34 ¹⁹⁾	53,76	54,38	55,00			
5.5	Prevalensi kekerasan terhadap perempuan usia 15-64 tahun di 12 bulan terakhir (%)	9,40 ²⁰⁾	menu-run ^{d)}	8,70 ²⁰⁾	menu-run	menu-run	menu-run			
5.6	Persentase pemuda (16-30 tahun) yang mengikuti kegiatan sosial kemasyarakatan dalam tiga bulan terakhir (%)	81,36 ²¹⁾	81,36 ^{d)}	70,49 ²¹⁾	mening-kat	mening-kat	82,58 ^{b)}			



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

No.	Perihal Perubahan	Pemutakhiran RKP Tahun 2023								
256	Perubahan Tabel 4.12 dalam halaman IV.63	No.	Sasaran/Indikator	<i>Baseline</i> 2019	<i>Realisasi</i>		<i>Target</i>			
					2020	2021	2022	2023	2024	
		5.7	Persentase pemuda berumur 16–30 tahun yang mengikuti kegiatan organisasi dalam tiga bulan terakhir (%)	6,36 ²¹⁾	6,36 ²⁾	4,84 ²¹⁾	mening- kat	mening- kat	6,72	
		5.8	Persentase pemuda (16–30 tahun) yang bekerja dengan status berusaha sendiri dan dibantu buruh (tetap dan tidak tetap) dalam jenis jabatan <i>white collar</i> (%)	0,47 ¹⁹⁾	0,44 ¹⁹⁾	0,41 ¹⁹⁾	0,45	0,50	0,55	
		5.9	Proporsi pemuda usia 16–30 tahun yang mengalami masalah kesehatan sehingga mengganggu kegiatan/aktivitas sehari-hari selama satu bulan terakhir dalam kelompok usia 16–30 tahun (%)	8,78 ³⁾	8,58	10,23	N/A*	7,05	6,87	
		PP 6. Pengentasan Kemiskinan								
		Memperluas akses aset produktif bagi rumah tangga miskin dan rentan								
		6.1	Persentase rumah tangga miskin dan rentan yang mengakses pendanaan usaha (%)	23 ³⁾	21,60 ³⁾	20,55 ³⁾	40	45	50	
		6.2	Jumlah rumah tangga yang memperoleh akses kepemilikan tanah (rumah tangga)	668. 040 ²²⁾	290. 902	444. 147	419. 935	261. 136	201. 890	
		PP 7. Peningkatan Produktivitas dan Daya Saing								
Meningkatnya produktivitas dan daya saing										
7.1	Jumlah lulusan pelatihan vokasi (juta orang)	0,78 ^{24a)}	5,94 ^{24b)}	6,45 ^{24c)}	3,30 ^{24d)}	2,60	2,80			
7.2	Persentase lulusan pendidikan vokasi yang mendapatkan pekerjaan dalam 1 tahun setelah kelulusan (%)	42,76 ¹⁹⁾	40,46 ¹⁹⁾	34,34 ¹⁹⁾	35,30	36,29	37,31			
7.3	Persentase lulusan PT yang langsung bekerja dalam jangka waktu 1 tahun setelah kelulusan (%)	44,02 ¹⁹⁾	58,21 ¹⁹⁾	58,39 ¹⁹⁾	59,71	60,71	61,71			
7.4	Jumlah prototipe dari perguruan tinggi (prototipe)	94 ²⁵⁾	22	13	219	231	243			
7.5	Jumlah produk inovasi dari <i>tenant</i> Perusahaan Pemula Berbasis Teknologi (PPBT) yang dibina (produk)	143 ²⁵⁾	158 ²⁵⁾	139 ²⁶⁾	400	550	600			



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

No. Perihal
Perubahan

Pemutakhiran RKP Tahun 2023

257 Perubahan
Tabel 4.12
dalam halaman
IV.65

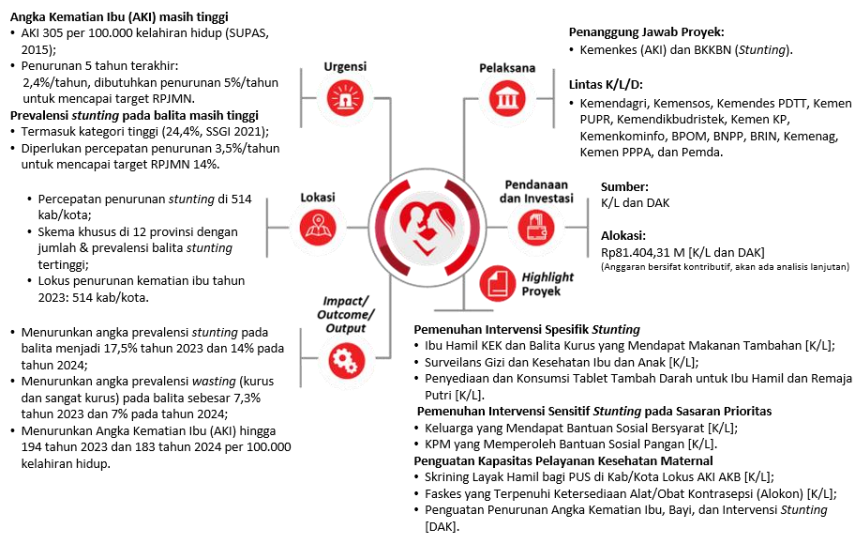
No.	Sasaran/Indikator	Baseline 2019	Realisasi		Target		
			2020	2021	2022	2023	2024
7.15	Peringkat pada Asian Games	4 ³⁵ⁱ⁾	N/A ³⁶ⁱ⁾	N/A ³⁶ⁱ⁾	N/A ³⁶ⁱ⁾	12	N/A ³⁶ⁱ⁾
7.16	Peringkat pada Asian Para Games	5 ^{37j)}	N/A ³⁶ⁱ⁾	N/A ³⁶ⁱ⁾	N/A ³⁶ⁱ⁾	8	N/A ³⁶ⁱ⁾

Sumber: 1) Kemensos, 2019, 2020, 2021; 2) Kementerian PPN/Bappenas, 2019, 2020, 2021; 3) Susenas, 2019, 2020, 2021, 2022; 4) Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) Kemendagri, 2020; 5) Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN), 2019, 2020, 2021; 6) BPJS Ketenagakerjaan, 2019, 2020, 2021; 7) SDKI, 2017; 8) Perhitungan BKKBN, 2020; 9) Pendataan Keluarga (PK), 2021; 10) Riskesdas, 2018; 11) Studi Status Gizi Indonesia (SSGI), 2021; 12) Kemenkes, 2018, 2019, 2020, TW IV 2021; 13) BPOM, 2019-2021; 14) *Programme for International Student Assessment (PISA)*, 2018 dilaksanakan setiap 3 tahun sekali (2015, 2018, dan pelaksanaan tahun 2021 diundur ke tahun 2022); 15) Asesmen Kompetensi Siswa Indonesia (AKSI), 2016; 16) Susenas 2019 dan 2020 berdasarkan metode perhitungan UNESCO Institute for Statistics; 17) Survei Nasional Pengalaman Hidup Anak dan Remaja (SNPHAR), 2018 (*baseline*) dan 2021; 18) BPS, 2019, 2020, 2021; 19) Sakernas, 2019, 2020, 2021; 20) Survei Pengalaman Hidup Perempuan Nasional (SPHPN), 2016 (*baseline*) dan 2021; 21) Susenas, Modul Sosial Budaya dan Pendidikan, 2018, 2021; 22) Kementerian ATR/BPN, 2019; 23) Asesmen Nasional 2021, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi; 24a) Tanpa Kartu Prakerja; 24b) Realisasi pelaksanaan pelatihan vokasi pada 13 Kementerian/Lembaga (430.870 orang) dan Kartu Prakerja (5,5 juta orang); 24c) Realisasi pelaksanaan pelatihan vokasi pada 11 Kementerian/Lembaga (515.442 orang) dan Kartu Prakerja (5,93 juta orang); 24d) Revisi target dengan rincian 2,7 juta penerima Kartu Prakerja skema "semi-bantuan sosial", 100 ribu penerima Kartu Prakerja skema peningkatan keahlian, dan 500 ribu dilaksanakan Kementerian/Lembaga; 25) Kemenristekdikti/BRIN, 2017-2018; 26) BRIN, 2022; 27) KemenkumHAM, 2018; 28) Diyen Kekayaan Intelektual, Kementerian Hukum dan HAM; 29) Kemenristekdikti, LIPI, BPPT, 2018; 30) Kemendikbudristek dan BRIN, 2022; 31) KNAPP, 2018; 32) Perhitungan Kementerian PPN/Bappenas; 33) Kemenristekdikti dan LPNK IPTEK, 2019; 34) LPNK IPTEK, 2020; 35) Asian Games, 2018; 36) Tidak dipertandingkan pada tahun dimaksud; 37) Asian Para Games, 2018.

Keterangan: a) pemutakhiran (data realisasi); b) pemutakhiran target; c) pemutakhiran metode perhitungan dengan data pembilang jumlah peserta pekerja formal dan informal di BPJS Ketenagakerjaan dan data penyebut jumlah penduduk bekerja semesta berdasarkan segmentasi PPU, PBPU, dan Jasa Konstruksi; d) merupakan target 2020 dalam Perpres Pemutakhiran RKP 2021; e) merupakan target 2021 dalam Perpres Pemutakhiran RKP 2022; f) SNPHAR 2021; g) *baseline* sesuai Susenas MSBP, 2018 (data tersedia tiga tahunan); N/A* Indikator bukan merupakan indikator program prioritas pada RKP Tahun 2022; N/A** Data tidak tersedia karena indikator baru diaplikasikan dalam RPJMN 2020-2024 di tahun 2020.

258 Perubahan
Infografis Major
Project
Percepatan
Penurunan
Kematian Ibu
dan Stunting
dalam halaman
IV.66

MP Percepatan Penurunan Kematian Ibu dan Stunting





PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

No.	Perihal Perubahan	Pemutakhiran RKP Tahun 2023
-----	-------------------	-----------------------------

259 Perubahan Infografis Major Project Pembangunan Science Technopark (Optimalisasi Triple Helix di 4 Major Universitas) dalam halaman IV.66

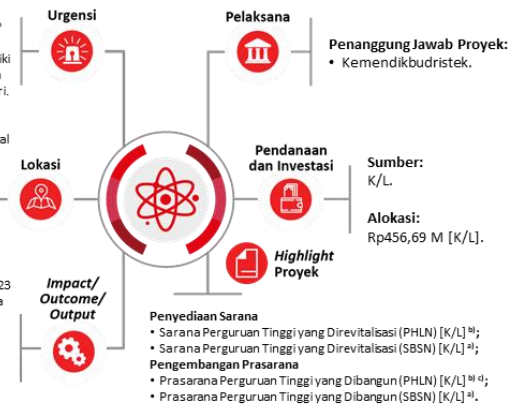
MP Pembangunan Science Technopark
(Optimalisasi Triple Helix di 4 Major Universitas)

- Kinerja inovasi Indonesia belum berkembang, ditandai stagnasi pencapaian *Global Innovation Index* (GII) Indonesia tahun 2021 yang hanya berada di peringkat ke-87 dari 132 ekonomi negara di dunia. Padahal, di era *knowledge economy* kapabilitas adopsi iptek dan penciptaan inovasi menjadi penghalang utama pertumbuhan ekonomi;
- Pemusatan komersialisasi direncanakan dilakukan di STP. Namun berdasarkan penilaian Tingkat Maturitas di 22 STP tahun 2019 oleh Kemendikbudristek, hanya 10 STP saja yang berada pada Tingkat Madya. Indonesia belum memiliki KST Tingkat Utama yaitu STP yang berfungsi secara penuh mengelola riset menuju inovasi yang diadopsi oleh industri. Hal ini karena keterbatasan fasilitas, lemahnya SDM pengelola, dan kurangnya kemitraan dengan industri;
- Pandemi COVID-19 menuntun adanya kemampuan nasional untuk memanfaatkan hasil riset menjadi produk inovasi yang siap diproduksi di industri.

Institut Teknologi Bandung; Institut Pertanian Bogor; Universitas Indonesia; Universitas Gadjah Mada.

- Terbangunnya 5 gedung STP di IPB, ITB, UI, UGM pada tahun 2023 dan terbangunnya 7 gedung STP di IPB, ITB, UI, UGM pada tahun 2024;
- Pembangunan sarana inkubator bagi *tenant* sebesar 75%;
- Pemenuhan instalasi STP sebesar 65%;
- Pengembangan STP ITB, IPB, UI, dan UGM sebesar 100%.

Keterangan:
a) Lokasi: ITB dan UI;
b) Lokasi: UGM;
c) Lokasi: Pusat (Proyek PRIME SteP, termasuk IPB).



260 Perubahan Infografis Major Project Pendidikan dan Pelatihan Vokasi untuk Industri 4.0 dalam halaman IV.67

MP Pendidikan dan Pelatihan Vokasi untuk Industri 4.0

Kebutuhan tenaga kerja terampil, kreatif, inovatif, dan adaptif belum dapat dipenuhi dengan baik

- Sakernas, 2021: Pekerja masih didominasi lulusan SMP ke bawah (54,66%);
- Sakernas 2021: Proporsi pekerja pada bidang keahlian menengah dan tinggi di Indonesia hanya sekitar 41,92%.

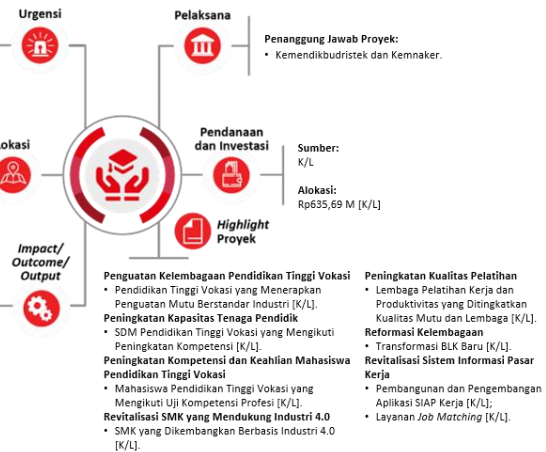
Industri 4.0 merupakan salah satu megatren global yang harus diadopsi untuk meningkatkan daya saing Indonesia

- Angkatan kerja harus memiliki keahlian yang bisa memanfaatkan teknologi dalam industri 4.0 secara maksimal;
- Pendidikan dan pelatihan vokasi berbasis kebutuhan pasar kerja menjadi upaya utama untuk memastikan penyediaan keahlian angkatan kerja ini.

Diarahkan untuk fokus pada pengembangan wilayah prioritas, KEK, dan KI yang mendukung 6 subsektor industri, yaitu (1) makanan dan minuman; (2) tekstil dan pakaian; (3) otomotif; (4) kimia; (5) elektronik; dan (6) alat kesehatan dan farmasi.

Lokasi RO: pusat dan 34 provinsi.

- Meningkatnya proporsi pekerja yang bekerja pada bidang keahlian menengah dan tinggi menjadi 43,00% pada tahun 2023 dan 43,10% tahun 2024;
- Meningkatnya lulusan pendidikan vokasi yang mendapatkan pekerjaan dalam 1 tahun setelah kelulusan menjadi 36,29% pada tahun 2023 dan 37,31% tahun 2024.





PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

No. Perihal Perubahan Pemutakhiran RKP Tahun 2023

261 Perubahan Infografis Major Project Reformasi Sistem Perlindungan Sosial dalam halaman IV.67

MP Reformasi Sistem Perlindungan Sosial

Ketepatan sasaran program bantuan sosial masih rendah
Maret 2021, sekitar 1,9 juta rumah tangga miskin ekstrem tidak menerima program sembako, meningkat sebanyak 100 ribu dari September 2020 (Susenas, Maret 2021).

Angka kemiskinan ekstrem masih tinggi

- Penduduk miskin ekstrem meningkat sekitar 1,3 juta orang selama pandemi COVID-19;
• September 2021, angka kemiskinan ekstrem sebesar 3,73% dari total penduduk Indonesia (Susenas, September 2021);
• Cakupan program jaminan sosial masih terbatas
• Cakupan perserta Jaminan Kesehatan Nasional tahun 2021 sebesar 86,96%.

- Lokasi penghapusan kemiskinan ekstrem: 514 kabupaten/kota;
• Lokasi perluasan Registrasi Sosial Ekonomi dan Digitalisasi Monografi Desa/Kelurahan: 514 kabupaten/kota.

- Penurunan angka tingkat kemiskinan menjadi 7,5-8,5% di tahun 2023 dan 6-7% di tahun 2024;
• Penurunan angka penduduk miskin ekstrem menjadi 1,5-2,0% di tahun 2023 dan 0-1% di tahun 2024.

Keterangan:
a) MP Reformasi Sistem Perlindungan Sosial juga didukung oleh APBD dan APBDes



Penanggung Jawab Proyek:

- Kemiskinan ekstrem (Kemenko PMK); Ketepatan sasaran penerima bantuan sosial (Kemensos, Kemendagri, Kemendes PDTT); Perencanaan dan penganggaran berbasis bukti (Bappenas dan Kemenkeu); Pendataan awal seluruh wilayah pada tahun 2022 dan pengeloaan data Regsosek pada tahun 2023 untuk kemudian data tersebut diserahkan ke Bappenas (BPS); dan Pemanfaatan data Regsosek untuk perencanaan penganggaran di daerah (Kemendagri dan Kemendes PDTT).

- Kementan, Kemendes, Kemendikbudristek, Kemeng. Kemenkominfo, Kementan, BNPB, Kemen KP, Kemen ESDM, Kemen KUKM, Kemnaker, BKKBN, Kemen LHK, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kota/Kabupaten, Pemerintah Desa/Kelurahan.

Sumber: K/L²⁾

Alokasi: Rp 141.402,61 M [K/L]

- Integrasi dan Transformasi Program Bantuan Sosial
• Keluarga yang Mendapat Bantuan Sosial Bersyarat [K/L];
• KPM yang Memperoleh Bantuan Sosial Pangan Sembako [K/L];
• Siswa SD/SMP/SMA yang Mendapatkan Program Indonesia Pintar [K/L].
Pengeolaan Data
• Desa/Kelurahan yang Menyelenggarakan Puskesmas [K/L dan APBDes];
• Kabupaten/Kota yang Mengembangkan SLRT [K/L].
Peningkatan Cakupan Data dari Desa/Kelurahan
• Publikasi Laporan Pendataan Awal Registrasi Sosial Ekonomi [K/L].

- Integrasi Data Jaminan Sosial
• Cakupan Penduduk yang Menjadi Penerima Bantuan Iuran (PIB) dalam IKN/KIS [K/L];
• Pelayanan Konektas Warehouse Berbasis NIK Nasional [K/L].
Sinkronisasi dan Integrasi Data untuk Penargetan Perlindungan Sosial
• Data Center Nasional [APBN].
Integrasi dan Perluasan Kepesertaan
• Instansi Pengguna Pegawai Non-PNS dan Wadah/Kelompok Pekerja Bukan Penerima Upah yang Mendapatkan Pemahaman Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja [K/L].
Perluasan pilihan KPM dan Pengembangan Skema Penyaluran
• Data Terpadu Kesejahteraan Sosial [K/L].

262 Perubahan Infografis Major Project Reformasi Sistem Kesehatan Nasional dalam halaman IV.68

MP Reformasi Sistem Kesehatan Nasional

Pencapaian target pembangunan kesehatan masih belum optimal

- Kasus baru TB tertinggi ke-2 di dunia;
• 152 kab/kota belum eliminasi malaria;
• Cakupan imunisasi masih <80%;
• Faktor risiko penyakit tidak menular tinggi.

Pandemi COVID-19 menunjukkan kerentanan sistem kesehatan nasional

- Pencegahan lemah (screening test dan tracing masih terbatas, sistem surveilans belum terintegrasi dan belum real-time, kapasitas pengujian di laboratorium lemah);
• Fasilitas kesehatan, kefarmasian, dan alat kesehatan tidak siap;
• Kapasitas tenaga kesehatan terbatas;
• Pembiayaan kesehatan belum efisien.

- Pelaksanaan di seluruh wilayah Indonesia (34 provinsi dan 514 kab/kota);
• Pada area reformasi tertentu fokus pada daerah dengan kriteria seperti tenaga kesehatan kurang;
• Kebijakan afirmasi penyediaan pelayanan kesehatan di daerah dengan keterbatasan akses.

- Menurunnya insidensi tuberkulosis menjadi 211/100.000 penduduk pada tahun 2023 dan 190/100.000 penduduk pada tahun 2024;
• Puskesmas tanpa dokter menjadi 0% pada tahun 2023 dan tahun 2024;
• Tercapainya pemenuhan 42 RS Rujukan Nasional pada tahun 2023 dan tahun 2024;
• Meningkatnya jumlah kab/kota eliminasi malaria menjadi 385 kab/kota pada tahun 2023 dan 405 kab/kota pada tahun 2024;
• Meningkatnya cakupan imunisasi dasar lengkap pada anak usia 12-23 bulan menjadi 75% pada tahun 2023 dan 90% pada tahun 2024;
• Meningkatnya puskesmas dengan jenis tenaga kesehatan sesuai standar sebanyak 71% puskesmas pada tahun 2023 dan 83% puskesmas pada tahun 2024;
• Meningkatnya ketersediaan minimal 4 dokter spesialis dasar dan 3 dokter spesialis lainnya di 85 RSUD kab/kota pada tahun 2023 dan 90% RSUD kab/kota pada tahun 2024;
• Terakreditasi 90% PKTP dan 95% RS pada tahun 2023 serta 100% FKTP dan 100% RS pada tahun 2024;
• Terwujudnya integrasi dan digitalisasi sistem informasi surveilans menjadi 90% pada tahun 2023 dan 100% pada tahun 2024.



Penanggung Jawab Proyek:

- Kemenkes

Lintas K/L/D:

- BRIN, Kemhan, POLRI, BPOM, Kementan, Kemen ESDM, Kemenhub, Kemenkominfo, Kemen PUPR, Kemnaker, Kemperin; KemenPAN RB, BKN, BPJS Kesehatan, Badan Usaha, dan Pemda.

Sumber: K/L, DAK, dan BUMN.

Alokasi: Rp23.277,53 M [K/L dan DAK Fisik]; Rp2.161,25 M [BUMN].

- Pendidikan dan Penempatan Tenaga Kesehatan
• Pendayagunaan Dokter Spesialis [K/L].
Peningkatan Kapasitas RS dan Pelayanan Kesehatan di Daerah Tertinggal, Perbatasan, dan Kepulauan
• Peningkatan Kualitas Pelayanan RS Holding BUMN [BUMN].
Penguatan Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP)
• Akreditasi Puskesmas dan FKTP swasta [K/L];
• Penguatan Sistem Kesehatan [DAK].
Kemandirian Farmasi dan Alat Kesehatan
• Industri Bahan Baku Obat yang Memproduksi 10 Molekul Obat Sesuai Kebutuhan Dalam Negeri [K/L].

- Penguatan Keamanan dan Ketahanan Kesehatan
• Surveilans dan Deteksi Dini Penyakit Infeksi Emergeng [K/L].
Pengendalian Penyakit dan Perluasan Imunisasi
• Paket Penyediaan Vaksin Imunisasi Rutin Dasar dan Lanjutan [K/L].
Inovasi Pembiayaan Kesehatan
• Peningkatan Kerja Sama Pemerintah dan Swasta dalam Mendukung Pelayanan dan Pembiayaan Kesehatan [K/L].
Digitalisasi dan Pemberdayaan Masyarakat
• Integrasi dan Pengembangan Sistem Data Kesehatan [K/L].

263 Perubahan alinea pertama dalam halaman IV.68

Kerangka kelembagaan yang dibutuhkan dalam mendukung pelaksanaan PN Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing.

- (1) Pembentukan Gugus Tugas Registrasi Sosial Ekonomi (Regsosek);
(2) Pembentukan Tim Koordinasi Nasional Revitalisasi Pendidikan Vokasi dan Pelatihan Vokasi (TKNV); dan
(3) Pembentukan Tim Koordinasi Daerah Revitalisasi Pendidikan Vokasi dan Pelatihan Vokasi (TKDV).



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

No.	Perihal Perubahan	Pemutakhiran RKP Tahun 2023
264	Perubahan alinea kedua dalam halaman IV.68	<p>Kerangka regulasi yang dibutuhkan dalam mendukung pelaksanaan PN Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing.</p> <ol style="list-style-type: none">(1) Rancangan Peraturan Menteri PPN tentang Pembentukan Gugus Tugas Registrasi Sosial Ekonomi (Regsossek); dan(2) Rancangan PP tentang Pengamanan Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan.
265	Perubahan alinea pertama dalam halaman IV.69	<p>Revolusi mental dan pembangunan kebudayaan pada RKP Tahun 2023 difokuskan pada penguatan modal sosial dan budaya dalam rangka mendukung peningkatan produktivitas untuk transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Modal sosial dan budaya mampu membangun relasi sosial yang harmonis, serta memperkuat solidaritas dan daya rekat masyarakat untuk saling tolong-menolong, kerja sama, gotong royong, dan kolaborasi antarwarga dalam upaya percepatan pemulihan ekonomi pascapandemi COVID-19. Pada masa pandemi, ketahanan sosial budaya masyarakat Indonesia mengalami peningkatan. Berdasarkan Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK), Dimensi Ketahanan Sosial Budaya meningkat dari 73,55 pada tahun 2019 menjadi 74,01 pada tahun 2020. Hal ini menandakan bahwa masyarakat Indonesia memiliki kemampuan yang baik dalam mengembangkan dan memanfaatkan nilai, pengetahuan, dan praktik budaya dalam menghadapi pandemi COVID-19. Apabila dilihat dari kondisi keluarga Indonesia, saat ini berada pada kategori keluarga berkembang. Hal tersebut dapat dilihat dari capaian Indeks Pembangunan Keluarga (I Bangga) yang berada pada rentang 40-70, tepatnya pada tahun 2021 sebesar 54,01 atau meningkat dibanding tahun 2020 yang capaiannya sebesar 53,94. Indeks Pembangunan Keluarga merupakan ukuran program pembangunan keluarga yang ditunjukkan melalui dimensi ketenteraman, kemandirian dan kebahagiaan keluarga, serta menggambarkan peran dan fungsi keluarga.</p>
266	Perubahan alinea kedua dalam halaman IV.69	<p>Revolusi mental dan pembangunan kebudayaan pada tahun 2023 masih menghadapi sejumlah tantangan. Dalam upaya penguatan gerakan revolusi mental dan pembinaan ideologi Pancasila, menghadapi tantangan antara lain (1) belum optimalnya aktualisasi nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara; (2) penyelenggaraan tata kelola pemerintahan untuk penguatan budaya birokrasi yang bersih, melayani, dan <i>responsive</i> belum optimal; (3) proses internalisasi nilai-nilai esensial revolusi mental melalui pendidikan agama dan pendidikan karakter kurang optimal; (4) belum optimalnya peran keluarga dalam pengasuhan berbasis hak anak, penyiapan kehidupan berkeluarga bagi remaja, pendewasaan usia perkawinan untuk mencegah perkawinan anak, layanan konseling keluarga, serta penguatan perawatan jangka panjang bagi lansia untuk memperkuat sistem sosial keluarga dan masyarakat; (5) masih terbatasnya pembentukan Gugus Tugas Gerakan Nasional Revolusi Mental (GNRM) di K/L, dan kabupaten/kota serta pelaksanaan lima program GNRM di tingkat daerah; serta (6) kurangnya daya tarik koperasi sebagai pondasi ekonomi kerakyatan yang belum adaptif dengan perkembangan zaman, sehingga diperlukan modernisasi koperasi untuk meningkatkan citra koperasi sebagai lembaga ekonomi yang dikelola secara profesional dalam mewujudkan kemandirian ekonomi.</p>



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

No.	Perihal Perubahan	Pemutakhiran RKP Tahun 2023
267	Perubahan alinea ketiga dalam halaman IV.70	<p>Untuk itu, pada tahun 2023 revolusi mental dan pembangunan kebudayaan diarahkan sebagai berikut</p> <p>(1) Memperkuat pelaksanaan gerakan nasional revolusi mental dan pembinaan ideologi Pancasila melalui</p> <ul style="list-style-type: none">(a) penguatan pendidikan karakter yang mendorong tumbuhnya nilai integritas, etos kerja, gotong royong, dan budi pekerti, serta jiwa nasionalisme dan patriotisme peserta didik dengan upaya (i) perluasan pengajaran dan pembelajaran dengan penguatan pendidikan karakter, dan peningkatan pemahaman terkait cinta lingkungan, dan pembangunan berkelanjutan; (ii) peningkatan kualitas pendidikan agama, pendidikan moral, dan budi pekerti; serta (iii) pengembangan integrasi nilai-nilai karakter unggul dalam kegiatan kokurikuler dan ekstrakurikuler di satuan pendidikan;(b) penguatan pendidikan kewargaan, wawasan kebangsaan dan bela negara untuk menumbuhkan jiwa nasionalisme dan patriotisme;(c) peningkatan budaya kerja pelayanan publik yang ramah, cepat, efektif, efisien, dan terpercaya melalui penerapan penguatan budaya kerja ASN;(d) penerapan disiplin, <i>reward</i>, dan <i>punishment</i> dalam birokrasi melalui upaya penegakan disiplin dan penerapan kebijakan manajemen penghargaan ASN berbasis kinerja;(e) peningkatan kualitas keluarga dalam rangka pembentukan karakter melalui (i) Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) pembangunan keluarga; (ii) pengasuhan berbasis hak anak dan perlindungan anak dari tindak kekerasan; (iii) peningkatan kualitas remaja, promosi pendewasaan usia perkawinan, dan penyiapan kehidupan berkeluarga bagi remaja, serta edukasi kepada keluarga yang memiliki remaja, termasuk remaja dengan kebutuhan khusus; (iv) penyediaan layanan konseling keluarga; dan (v) peningkatan kapasitas keluarga lansia dalam pendampingan pelayanan ramah lansia sebagai upaya penguatan fungsi dan nilai keluarga;(f) penguatan peran gugus tugas serta pusat-pusat perubahan revolusi mental di K/L dan daerah untuk menginternalisasikan nilai esensial revolusi mental beserta kelima program GNRM di masyarakat dan memperkuat jejaring pelaksanaan GNRM dalam melaksanakan kegiatan yang sesuai dengan nilai-nilai esensial revolusi mental; serta(g) penguatan gerakan ekonomi kerakyatan melalui perluasan Program Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri dan Gerakan Bangga Buatan Indonesia, serta modernisasi koperasi yang meliputi (i) penguatan kelembagaan koperasi; (ii) pengadopsian teknologi; (iii) peningkatan kapasitas SDM perkoperasian melalui pendidikan dan pelatihan; (iv) fasilitasi akses pembiayaan, kemitraan dan pemasaran; serta (v) penciptaan wirausaha baru yang inovatif dan berdaya saing.
268	Perubahan poin (2) alinea keempat dalam halaman IV.70 dan alinea pertama dalam halaman IV.71	<p>(2) Memperkuat pemajuan kebudayaan untuk mengembangkan nilai luhur budaya bangsa dan meningkatkan kesejahteraan rakyat melalui (a) pengembangan dan pemanfaatan cagar budaya dan warisan budaya tak benda dalam rangka mendukung peningkatan produktivitas untuk transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan berbasis kebudayaan; (b) pengembangan ekosistem budaya rempah dari hulu ke hilir untuk memperkuat diplomasi dan meneguhkan Indonesia sebagai poros maritim dunia; (c) pengembangan sarana prasarana kebudayaan, meliputi revitalisasi museum, taman budaya, sanggar, dan kelompok seni budaya, serta pemanfaatan gedung pemerintah yang tidak terpakai</p>



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

No.	Perihal Perubahan	Pemutakhiran RKP Tahun 2023							
		<p>sebagai pusat kegiatan seni budaya; (d) pengembangan manajemen talenta nasional seni budaya; (e) penguatan peran pemerintah daerah dalam pengembangan ekosistem seni dan budaya lokal, termasuk fasilitasi pelaku seni budaya di daerah; (f) pengembangan media baru berbasis Teknologi Informasi (TI) untuk memperluas wahana ekspresi budaya, termasuk penyediaan platform pendukung proses berkarya bagi para seniman, pelaku budaya, dan pekerja kreatif; dan (g) penataan dan digitalisasi arsip persiapan pemindahan IKN di K/L untuk menjaga kelestarian arsip dan dapat menjadi sumber pembelajaran di masa depan.</p>							
269	Perubahan tabel 4.13 dalam halaman IV.72	No.	Sasaran/Indikator	Baseline 2019	Realisasi		Target		
					2020	2021	2022	2023	2024
		2	Meningkatnya pemajuan kebudayaan untuk meningkatkan peran kebudayaan dalam pembangunan						
		2.1	Indeks Pembangunan Kebudayaan (nilai)	55,91	54,65	51,90	59,71	61,20	62,70
		3	Meningkatnya kualitas kehidupan masyarakat dan daya rekat sosial						
		3.1	Indeks Pembangunan Masyarakat (nilai)	0,61 (2018)	0,62 ^{a)}	0,63 ^{a)}	0,64	0,65	0,65
		4	Menguatnya moderasi beragama untuk mewujudkan kerukunan umat dan membangun harmoni sosial dalam kehidupan masyarakat						
		4.1	Indeks Kerukunan Umat Beragama (nilai)	73,83	67,46	72,39	74,70	75,00	75,80
		5	Meningkatnya ketahanan keluarga untuk memperkuat karakter bangsa						
		5.1	Indeks Pembangunan Keluarga (nilai)	53,57 (2018)	53,94	54,01	57,00	59,00	61,00
		5.2	Median Usia Kawin Pertama Perempuan (tahun)	21,80 (2017)	20,70	20,70	22,00	22,10	22,10
		6	Meningkatnya budaya literasi untuk mewujudkan masyarakat berpengetahuan, inovatif, dan kreatif						
		6.1	Nilai Budaya Literasi (nilai)	59,11	61,63	54,29	65,70	68,37	71,04
<p>Sumber: Kementerian PPN/Bappenas, Kemenko PMK, Kemendikbudristek, Kemenag, BKKBN, BPS, BPIP, 2019-2022.</p> <p>Keterangan: a) Berdasarkan angka proyeksi.</p>									



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

No.	Perihal Perubahan	Pemutakhiran RKP Tahun 2023																																																																																																																																																													
270	Perubahan tabel 4.14 dalam halaman IV.74	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th rowspan="2">No.</th> <th rowspan="2">Sasaran/Indikator</th> <th rowspan="2">Baseline 2019</th> <th colspan="3">Realisasi</th> <th colspan="2">Target</th> </tr> <tr> <th>2020</th> <th>2021</th> <th>2022</th> <th>2023</th> <th>2024</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="8">Meningkatnya peran dan ketahanan keluarga dalam rangka pembentukan karakter</td> </tr> <tr> <td>1.11</td> <td>Indeks Kerentanan Keluarga (nilai)</td> <td>12,29</td> <td>11,92</td> <td>10,95</td> <td>11,00</td> <td>10,50</td> <td>10,00</td> </tr> <tr> <td>1.12</td> <td>Indeks Karakter Remaja (nilai)</td> <td>N/A</td> <td>79,60</td> <td>72,97</td> <td>68,92</td> <td>69,42</td> <td>69,92</td> </tr> <tr> <td colspan="8">PP 2. Meningkatkan Pemajuan dan Pelestarian Kebudayaan untuk Memperkuat Karakter dan Memperteguh Jati Diri Bangsa, Meningkatkan Kesejahteraan Rakyat, dan Memengaruhi Arah Perkembangan Peradaban Dunia</td> </tr> <tr> <td colspan="8">Terbangunnya ekosistem kebudayaan untuk mendukung pemajuan kebudayaan</td> </tr> <tr> <td>2.1</td> <td>Nilai Dimensi Warisan Budaya (nilai)</td> <td>43,89</td> <td>41,00</td> <td>46,63</td> <td>52,11</td> <td>54,85</td> <td>57,60</td> </tr> <tr> <td>2.2</td> <td>Nilai Dimensi Ekspresi Budaya (nilai)</td> <td>37,14</td> <td>35,82</td> <td>27,13</td> <td>38,19</td> <td>38,60</td> <td>39,01</td> </tr> <tr> <td>2.3</td> <td>Nilai Dimensi Ekonomi Budaya (nilai)</td> <td>33,79</td> <td>26,96</td> <td>20,69</td> <td>43,52</td> <td>46,76</td> <td>50,00</td> </tr> <tr> <td colspan="8">PP 3. Memperkuat Moderasi Beragama untuk Mengukuhkan Toleransi, Kerukunan, dan Harmoni Sosial</td> </tr> <tr> <td colspan="8">Menguatnya pemahaman dan pengamalan nilai ajaran agama yang toleran, inklusif, dan moderat di kalangan umat beragama</td> </tr> <tr> <td>3.1</td> <td>Indeks Kepuasan Layanan Ibadah Haji (nilai)</td> <td>85,91</td> <td>N/A^{b)}</td> <td>N/A^{b)}</td> <td>85,97</td> <td>85,99</td> <td>86,00</td> </tr> <tr> <td>3.2</td> <td>Indeks Kepuasan Layanan KUA (nilai)</td> <td>77,28</td> <td>78,00^{c)}</td> <td>78,90</td> <td>82,00</td> <td>83,00</td> <td>84,00</td> </tr> <tr> <td>3.3</td> <td>Nilai Dimensi Toleransi (nilai)</td> <td>72,37</td> <td>64,15</td> <td>68,72</td> <td>72,29</td> <td>72,59</td> <td>73,39</td> </tr> <tr> <td>3.4</td> <td>Nilai Dimensi Kesenjangan (nilai)</td> <td>73,72</td> <td>69,54</td> <td>75,03</td> <td>76,23</td> <td>76,53</td> <td>77,33</td> </tr> <tr> <td>3.5</td> <td>Nilai Dimensi Kerja Sama (nilai)</td> <td>75,40</td> <td>68,68</td> <td>73,41</td> <td>75,86</td> <td>76,16</td> <td>76,96</td> </tr> <tr> <td colspan="8">PP 4. Peningkatan Budaya Literasi, Inovasi, dan Kreativitas Bagi Terwujudnya Masyarakat Berpengetahuan dan Berkarakter</td> </tr> <tr> <td colspan="8">Meningkatnya akses dan kualitas infrastruktur literasi untuk mewujudkan masyarakat berpengetahuan, inovatif, dan kreatif</td> </tr> <tr> <td>4.1</td> <td>Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (nilai)</td> <td>10,12</td> <td>12,93</td> <td>13,54</td> <td>13,00</td> <td>15,00</td> <td>15,00</td> </tr> </tbody> </table> <p>Sumber: Kementerian PPN/Bappenas, Kemenko PMK, Kemendikbudristek, Kemenag, Perpunas, BKKBN, BPS, BPIP, 2019-2022.</p> <p>Keterangan: a) Berdasarkan angka proyeksi, b) Tahun 2020 dan 2021, Ibadah Haji tidak dilaksanakan akibat pandemi COVID-19, dan c) Survei hanya dilakukan di Pulau Jawa akibat pandemi COVID-19.</p>	No.	Sasaran/Indikator	Baseline 2019	Realisasi			Target		2020	2021	2022	2023	2024	Meningkatnya peran dan ketahanan keluarga dalam rangka pembentukan karakter								1.11	Indeks Kerentanan Keluarga (nilai)	12,29	11,92	10,95	11,00	10,50	10,00	1.12	Indeks Karakter Remaja (nilai)	N/A	79,60	72,97	68,92	69,42	69,92	PP 2. Meningkatkan Pemajuan dan Pelestarian Kebudayaan untuk Memperkuat Karakter dan Memperteguh Jati Diri Bangsa, Meningkatkan Kesejahteraan Rakyat, dan Memengaruhi Arah Perkembangan Peradaban Dunia								Terbangunnya ekosistem kebudayaan untuk mendukung pemajuan kebudayaan								2.1	Nilai Dimensi Warisan Budaya (nilai)	43,89	41,00	46,63	52,11	54,85	57,60	2.2	Nilai Dimensi Ekspresi Budaya (nilai)	37,14	35,82	27,13	38,19	38,60	39,01	2.3	Nilai Dimensi Ekonomi Budaya (nilai)	33,79	26,96	20,69	43,52	46,76	50,00	PP 3. Memperkuat Moderasi Beragama untuk Mengukuhkan Toleransi, Kerukunan, dan Harmoni Sosial								Menguatnya pemahaman dan pengamalan nilai ajaran agama yang toleran, inklusif, dan moderat di kalangan umat beragama								3.1	Indeks Kepuasan Layanan Ibadah Haji (nilai)	85,91	N/A ^{b)}	N/A ^{b)}	85,97	85,99	86,00	3.2	Indeks Kepuasan Layanan KUA (nilai)	77,28	78,00 ^{c)}	78,90	82,00	83,00	84,00	3.3	Nilai Dimensi Toleransi (nilai)	72,37	64,15	68,72	72,29	72,59	73,39	3.4	Nilai Dimensi Kesenjangan (nilai)	73,72	69,54	75,03	76,23	76,53	77,33	3.5	Nilai Dimensi Kerja Sama (nilai)	75,40	68,68	73,41	75,86	76,16	76,96	PP 4. Peningkatan Budaya Literasi, Inovasi, dan Kreativitas Bagi Terwujudnya Masyarakat Berpengetahuan dan Berkarakter								Meningkatnya akses dan kualitas infrastruktur literasi untuk mewujudkan masyarakat berpengetahuan, inovatif, dan kreatif								4.1	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (nilai)	10,12	12,93	13,54	13,00	15,00	15,00
No.	Sasaran/Indikator	Baseline 2019				Realisasi			Target																																																																																																																																																						
			2020	2021	2022	2023	2024																																																																																																																																																								
Meningkatnya peran dan ketahanan keluarga dalam rangka pembentukan karakter																																																																																																																																																															
1.11	Indeks Kerentanan Keluarga (nilai)	12,29	11,92	10,95	11,00	10,50	10,00																																																																																																																																																								
1.12	Indeks Karakter Remaja (nilai)	N/A	79,60	72,97	68,92	69,42	69,92																																																																																																																																																								
PP 2. Meningkatkan Pemajuan dan Pelestarian Kebudayaan untuk Memperkuat Karakter dan Memperteguh Jati Diri Bangsa, Meningkatkan Kesejahteraan Rakyat, dan Memengaruhi Arah Perkembangan Peradaban Dunia																																																																																																																																																															
Terbangunnya ekosistem kebudayaan untuk mendukung pemajuan kebudayaan																																																																																																																																																															
2.1	Nilai Dimensi Warisan Budaya (nilai)	43,89	41,00	46,63	52,11	54,85	57,60																																																																																																																																																								
2.2	Nilai Dimensi Ekspresi Budaya (nilai)	37,14	35,82	27,13	38,19	38,60	39,01																																																																																																																																																								
2.3	Nilai Dimensi Ekonomi Budaya (nilai)	33,79	26,96	20,69	43,52	46,76	50,00																																																																																																																																																								
PP 3. Memperkuat Moderasi Beragama untuk Mengukuhkan Toleransi, Kerukunan, dan Harmoni Sosial																																																																																																																																																															
Menguatnya pemahaman dan pengamalan nilai ajaran agama yang toleran, inklusif, dan moderat di kalangan umat beragama																																																																																																																																																															
3.1	Indeks Kepuasan Layanan Ibadah Haji (nilai)	85,91	N/A ^{b)}	N/A ^{b)}	85,97	85,99	86,00																																																																																																																																																								
3.2	Indeks Kepuasan Layanan KUA (nilai)	77,28	78,00 ^{c)}	78,90	82,00	83,00	84,00																																																																																																																																																								
3.3	Nilai Dimensi Toleransi (nilai)	72,37	64,15	68,72	72,29	72,59	73,39																																																																																																																																																								
3.4	Nilai Dimensi Kesenjangan (nilai)	73,72	69,54	75,03	76,23	76,53	77,33																																																																																																																																																								
3.5	Nilai Dimensi Kerja Sama (nilai)	75,40	68,68	73,41	75,86	76,16	76,96																																																																																																																																																								
PP 4. Peningkatan Budaya Literasi, Inovasi, dan Kreativitas Bagi Terwujudnya Masyarakat Berpengetahuan dan Berkarakter																																																																																																																																																															
Meningkatnya akses dan kualitas infrastruktur literasi untuk mewujudkan masyarakat berpengetahuan, inovatif, dan kreatif																																																																																																																																																															
4.1	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (nilai)	10,12	12,93	13,54	13,00	15,00	15,00																																																																																																																																																								
271	Penghapusan subbab 4.1.4.5 dalam halaman IV.75	(dihapus)																																																																																																																																																													
272	Perubahan alinea kedua dalam halaman IV.77	Selain itu, dalam upaya penyelenggaraan keselamatan transportasi, tantangan yang dihadapi pada moda jalan adalah terbatasnya ketersediaan data terpadu sebagai basis perencanaan keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ), tingginya rasio fatalitas kecelakaan di jalan raya, serta kejadian kecelakaan akibat pelanggaran lalu lintas khususnya <i>Over Dimension Over Load</i> (ODOL), masih banyaknya daerah rawan kecelakaan (<i>blackspot</i>) yang belum tertangani secara baik, terpadu, dan komprehensif, serta lambatnya penanganan bagi korban kecelakaan. Pada moda transportasi perkeretaapian masih terdapat isu terbatasnya kemampuan penanganan kebutuhan pemeliharaan, perawatan, dan pengoperasian prasarana maupun keselamatan perjalanan perkeretaapian. Pada moda																																																																																																																																																													



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

No.	Perihal Perubahan	Pemutakhiran RKP Tahun 2023
		<p>transportasi laut dan penyeberangan, masih kerap terjadi kecelakaan kapal pada jalur utama maupun <i>feeder</i> pelayaran akibat keterbatasan spesifikasi kapal, sarana navigasi, fasilitas keselamatan pelayaran, dan rendahnya kepatuhan terhadap standar keselamatan dan kelaikan pelayaran. Demikian pula dengan moda transportasi udara yang masih terkendala dalam keterbatasan sistem navigasi. Penyelenggaraan pencarian dan pertolongan pada peristiwa kecelakaan dan bencana dihadapkan pada kendala terbatasnya jumlah dan kualitas sarana, prasarana dan SDM pencarian dan pertolongan.</p>
273	Perubahan alinea kedua dalam halaman IV.79	<p>Arah kebijakan untuk penyelenggaraan keselamatan dan keamanan transportasi serta pencarian dan pertolongan, yaitu (1) Mendorong pelaksanaan Peraturan Presiden (Perpres) No. 1/2022 tentang Rencana Umum Nasional Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (RUNK LLAJ), yang di dalamnya termasuk penetapan Rencana Aksi Keselamatan (RAK) LLAJ oleh Kementerian/Lembaga serta Pemerintah Daerah, pelaksanaan integrasi data dan sistem informasi Keselamatan LLAJ, penanganan daerah rawan kecelakaan (<i>blackspot</i>) secara terpadu melalui penanganan infrastruktur jalan dan penyediaan perlengkapan fasilitas keselamatan jalan, serta penetapan waktu respons penanganan kegawatdaruratan sejak terjadinya kecelakaan; (2) Meningkatkan ketersediaan fasilitas sarana dan prasarana keselamatan dan keamanan transportasi antara lain pemenuhan kebutuhan <i>Infrastructure Maintenance and Operation</i> (IMO) prasarana perkeretaapian, penyediaan sarana bantu navigasi pelayaran, penyediaan dan modernisasi sistem monitoring fasilitas <i>Surveillance</i> dan navigasi penerbangan terintegrasi; serta (3) meningkatkan kuantitas dan kompetensi SDM serta pemenuhan ketersediaan dan kelayakan sarana dan prasarana di bidang pencarian dan pertolongan.</p>
274	Perubahan alinea ketiga dalam halaman IV.79	<p>Arah kebijakan pembangunan konektivitas dalam mendukung produktivitas untuk transformasi ekonomi antara lain (1) melanjutkan pembangunan jalan tol, jalan baru dan pembangunan jalur kereta api ganda maupun jalur baru pada koridor utama angkutan penumpang dan logistik, termasuk kereta api cepat untuk penumpang antar kota-kota besar di Pulau Jawa, serta pembangunan akses jalan dan kereta api ke simpul transportasi (pelabuhan, bandara, terminal) dengan memperhatikan aspek kemanfaatan; (2) menyediakan konektivitas multimoda mendukung kawasan prioritas (<i>food estate</i>, industri dan pariwisata); (3) melakukan standarisasi pelabuhan utama meliputi infrastruktur, fasilitas dan kinerja pelabuhan utama simpul angkutan domestik, integrasi pelabuhan dan kawasan industri serta reformasi tarif jasa pelabuhan; (4) melanjutkan pembangunan bandara baru, peningkatan kapasitas bandara primer dan jaringan <i>hub and spoke</i> penerbangan, serta pembangunan bandara perairan (<i>waterbase airport</i>) untuk mendukung destinasi pariwisata kepulauan; (5) melaksanakan pembangunan pelabuhan penyeberangan baru maupun lanjutan serta peningkatan kapasitas pelabuhan penyeberangan; (6) menyediakan infrastruktur dan layanan transportasi layanan transportasi di wilayah 3T, termasuk keperintisan meliputi darat, kereta api, laut, dan udara, serta program tol laut bersubsidi dan jembatan udara; (7) meningkatkan infrastruktur konektivitas milik daerah dalam mendukung prioritas nasional, melalui optimalisasi peran APBD, pemanfaatan skema DAK dan program hibah untuk penanganan jalan daerah, rehabilitasi prasarana pelabuhan yang melayani angkutan penumpang dan barang; serta (8) melakukan optimalisasi pemanfaatan infrastruktur yang sudah terbangun dan sinkronisasi antar infrastruktur lainnya.</p>



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

No.	Perihal Perubahan	Pemutakhiran RKP Tahun 2023
275	Perubahan alinea keempat dalam halaman IV.79 dan alinea pertama dalam halaman IV.80	Arah kebijakan pembangunan infrastruktur perkotaan difokuskan pada pengembangan sistem angkutan umum massal di wilayah metropolitan, terutama dalam penataan beberapa aspek yang selaras dengan prinsip pembangunan mobilitas perkotaan, yaitu (1) dalam aspek kelembagaan, pemerintah daerah di suatu wilayah metropolitan didorong untuk mengembangkan kelembagaan pengelola transportasi perkotaan yang memiliki kewenangan perencanaan, pengelolaan, dan pengoperasian angkutan umum lintas wilayah administrasi; (2) dalam aspek perencanaan, pemerintah daerah di wilayah metropolitan didorong agar menyusun Rencana Mobilitas Perkotaan (RMP) terpadu sebagai dasar pembangunan angkutan massal perkotaan yang berbasis wilayah fungsional dengan berfokus pada aksesibilitas pusat kegiatan sosial dan ekonomi; (3) dalam aspek pendanaan, dikembangkan skema pendanaan pembangunan sistem angkutan umum massal perkotaan yang memastikan tanggung jawab kepada pemerintah daerah, mengoptimalkan partisipasi badan usaha, serta memberikan ruang bagi dukungan pendanaan pemerintah pusat dengan tetap menjamin kepemilikan (<i>ownership</i>) serta keberlanjutan pengelolaan dan pengoperasian oleh pemerintah daerah; (4) mengembangkan angkutan komuter meliputi <i>Mass Rapid Transit</i> (MRT), <i>Light Rapid Transit</i> (LRT), Kereta Rel Listrik (KRL), dan layanan <i>Bus Rapid Transit</i> (BRT) di wilayah perkotaan; (5) melaksanakan program dukungan penyelenggaraan angkutan umum massal melalui skema <i>Buy the Service</i> (BTS) dan <i>Public Service Obligation</i> (PSO); serta (6) mendorong penguatan infrastruktur TIK dengan teknologi terbaru dan mekanisme pemakaian bersama infrastruktur pasif dalam mendukung pengembangan kota cerdas (<i>smart city</i>).
276	Perubahan alinea kedua dalam halaman IV.80	Arah kebijakan pembangunan energi dan ketenagalistrikan dalam mendukung transisi energi untuk menuju sistem energi rendah karbon mencakup (1) mengembangkan infrastruktur energi dan ketenagalistrikan termasuk pemanfaatan energi terbarukan dan pengembangan konservasi energi untuk mencapai akses universal dan mendukung pertumbuhan ekonomi hijau; (2) menyediakan subsidi, stimulus tarif listrik, dan bantuan penyediaan akses listrik untuk meringankan beban kelompok masyarakat tidak mampu dan/atau berada di daerah 3T, serta mengembangkan kebijakan tarif yang berkelanjutan; (3) memperluas pemanfaatan tenaga listrik (<i>electrification</i>) untuk sektor transportasi (<i>e-vehicle</i> dan <i>charging station</i>), rumah tangga, dan industri; (4) mendorong implementasi kebijakan harga beli listrik dari energi terbarukan dan mengoptimalkan insentif fiskal dan non fiskal yang ada termasuk dana transfer daerah dan penerapan perdagangan karbon (<i>carbon trade</i>); (5) melakukan percepatan pembangunan infrastruktur minyak dan gas bumi seperti ruas pipa transmisi dan distribusi gas bumi serta pengembangan dan pembangunan kilang minyak; (6) optimalisasi pemerataan akses BBM dan gas bumi melalui pelaksanaan BBM satu harga; dan (7) mengintegrasikan pembangunan infrastruktur energi dan ketenagalistrikan di antara para pelaku (pemerintah pusat, daerah, serta badan usaha) maupun antar sektor (seperti industri dan teknologi), termasuk melalui dana transfer daerah.



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

No. Perihal
Perubahan

Pemutakhiran RKP Tahun 2023

277 Perubahan
Tabel 4.15
dalam halaman
IV.81

Tabel 4.15
Sasaran, Indikator, dan Target
PN 5 Memperkuat Infrastruktur untuk
Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar

No.	Sasaran/Indikator	Baseline 2019	Realisasi			Target	
			2020	2021	2022	2023	2024
1	Meningkatnya penyediaan infrastruktur layanan dasar						
1.1	Rumah tangga yang menempati hunian layak dan terjangkau (%)	56,51	59,54	60,90	65,10	67,88	70 ¹⁾
1.2	Penurunan rasio fatalitas kecelakaan jalan per 10.000 kendaraan terhadap angka dasar tahun 2010 (%)	53	59	60	62	63	65
1.3	Persentase luas daerah irigasi yang dimodernisasi (kumulatif, %)	0	0	0	0,06	0,50	0,80
1.4	Persentase pemenuhan kebutuhan air baku (kumulatif, %)	64,52	65,34	66,81	67,67	68,50	69,50
2	Meningkatnya konektivitas untuk mendukung kegiatan ekonomi dan akses menuju pelayanan dasar						
2.1	Waktu tempuh pada jalan lintas utama pulau (jam/100 km)	2,30	2,16	2,22	2,09	2,08	1,90
2.2	Persentase rute pelayaran yang saling terhubung (<i>loop</i>) (%)	23	24	25	26	26	27
2.3	Kondisi jalur KA sesuai standar <i>Track Quality Index</i> (TQI) kategori 1 dan 2 (%)	81,50	82,83	90,36	91	91,16	94
2.4	Persentase capaian <i>On Time Performance</i> (OTP) transportasi udara (%)	85,73	86	87	88	89	90
3	Meningkatnya layanan infrastruktur perkotaan						
3.1	Jumlah kota metropolitan dengan sistem angkutan umum massal perkotaan yang dibangun dan dikembangkan (kota)	1	6 (berlan- jut)	6 (berlan- jut)	6 (berlan- jut)	6 (berlan- jut)	6
3.2	Persentase rumah tangga yang menempati hunian layak dan terjangkau di perkotaan (%)	61,09	64,64	64,64	68,20	70,77	73



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

No.	Perihal Perubahan	Pemutakhiran RKP Tahun 2023							
No.	Sasaran/ Indikator	Baseline 2019	Realisasi			Target			
			2020	2021	2022	2023	2024		
278	Perubahan Tabel 4.16 dalam halaman IV.84	1.10	Persentase rumah tangga yang menempati hunian dengan akses sanitasi (air limbah domestik) layak dan aman (%)	77,4 layak termasuk 7,49 aman	79,53 layak, termasuk 7,64 aman	80,29 layak, termasuk 7,25 aman	82,07 layak, termasuk 11,5 aman	86,03 layak, termasuk 13 aman	90 layak, termasuk 15 aman
		1.11	Persentase rumah tangga yang masih mempraktikkan buang air besar sembarangan (BABS) di tempat terbuka (%)	7,61	6,19	5,69	2,98	1,49	0
		1.12	Persentase rumah tangga yang menempati hunian dengan akses sampah yang dikelola dengan baik di perkotaan (%)	59,08 penangan dan 1,55 pengurangan (2016)	54,85 penangan dan 0,88 pengurangan (2019)	54,85 penangan dan 0,88 pengurangan (2019)	75,28 penangan dan 9,13 pengurangan	77,64 penangan dan 14,57 pengurangan	80 penangan dan 20 pengurangan
		Meningkatnya layanan keselamatan dan keamanan transportasi							
		1.13	Rata-rata waktu tanggap pencarian dan pertolongan (menit)	28	27,50	27	26	25,50	25
		Meningkatnya layanan pengelolaan air tanah dan air baku berkelanjutan							
		1.14	Jumlah kabupaten/kota yang terpenuhi kebutuhan air bakunya secara berkelanjutan (kab/kota)	88	91	94	95	96	97
		Meningkatnya optimalisasi waduk multiguna dan modernisasi irigasi							
		1.15	Volume tampungan air per kapita (m ³ /kapita)	57,21	56,52	58,11	58,34	61,98	66,34
		1.16	Persentase luas sawah beririgasi (%)	41,70	41,85	42,31	43,48	43,57	44,04
		1.17	Luas daerah irigasi yang dimodernisasi (hektar)	0	0	0	1.462	11.956	11.956
		PP 2. Infrastruktur Ekonomi							
		Meningkatnya konektivitas wilayah							
		2.1	Persentase kondisi mantap jalan nasional/provinsi/kabupaten/kota (%)	92/68/ 57	90/68/ 57	92/71/ 67	91/72/ 62	93/73/ 63	97/75/ 65



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

No.	Perihal Perubahan	Pemutakhiran RKP Tahun 2023					
No.	Sasaran/ Indikator	Baseline 2019	Realisasi			Target	
			2020	2021	2022	2023	2024
279	Perubahan Tabel 4.16 dalam halaman IV.85						
2.2	Panjang jalan tol baru yang terbangun dan/ atau beroperasi (km)	1.461 ^{a)}	246	339,80	327,70	415	2.500 ^{b)}
2.3	Panjang jalan baru yang terbangun (km)	3.387 ^{a)}	255,50	811,62	503	490	3.000 ^{b)}
2.4	Panjang jaringan KA yang terbangun (kumulatif) (km)	6.164	6.325	6.466	6.565	6.724	7.451
2.5	Jumlah pelabuhan utama yang memenuhi standar (lokasi)	1	1 (berlan- jut)	2 (berlan- jut)	3 (berlan- jut)	4 (berlan- jut)	7
2.6	Jumlah rute subsidi tol laut (rute)	14	21	32	35	35	25
2.7	Jumlah pelabuhan penyeberangan baru yang dibangun (lokasi)	24 (22 selesai, 2 berlanjut) ^{a)}	9 (berlan- jut)	13 (3 selesai, 10 berlan- jut)	8 (4 selesai, 4 berlan- jut)	4 (berlan- jut)	36 ^{b)}
2.8	Jumlah bandara baru yang dibangun (kumulatif) (lokasi)	15 ^{a)}	7 (berlan- jut)	10 (berlan- jut)	10 (berlan- jut)	12 (berlan- jut)	21 ^{b)}
2.9	Jumlah rute jembatan udara (rute)	35	28	39	42	41	43
PP 3. Infrastruktur Perkotaan							
Meningkatnya layanan infrastruktur perkotaan							
3.1	Jumlah kota yang dibangun perlintasan tidak sebidang kereta api/ <i>flyover</i> / <i>underpass</i> (kota)	3	0	5 (berlan- jut)	5 (berlan- jut)	5 (berlan- jut)	6
3.2	Jumlah sistem angkutan umum massal di perkotaan besar lainnya yang dikembangkan (kota)	1	1 (berlan- jut)	1	6 (berlan- jut)	6 (berlan- jut)	6
3.3	Jumlah kawasan di permukiman kumuh perkotaan yang ditangani melalui peremajaan kota (kawasan)	0	0	0	5	6	10
PP 4. Energi dan Ketenagalistrikan							
Meningkatnya akses dan pasokan energi dan tenaga listrik yang merata, andal, dan efisien							
4.1	Jumlah produksi tenaga listrik (GWh)	275. 900,00	272. 420,00	210. 601,00 ^{c)}	382. 696,10	406. 325	431. 281,20



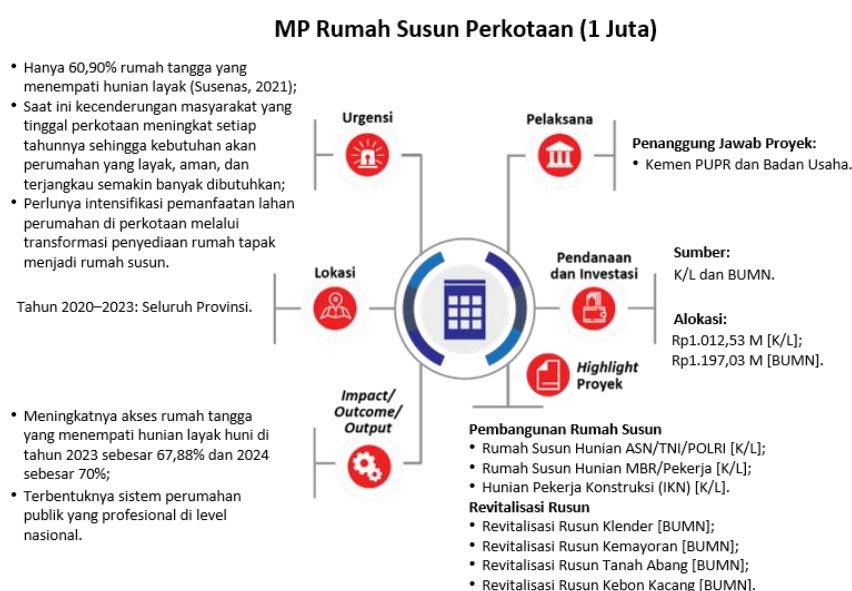
**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

No.	Perihal Perubahan	Pemutakhiran RKP Tahun 2023							
		No.	Sasaran/ Indikator	Baseline 2019	Realisasi		Target		
280	Perubahan Tabel 4.16 dalam halaman IV.86	4.2	Penurunan emisi CO ₂ pembangkit (juta ton)	3,88	8,78	10,37	5,36	5,91	6,07
		4.3	Jumlah pengguna listrik (ribu rumah tangga-kumulatif)	75.705	78.663	81.530	81.217	83.219	85.216
		4.4	Jumlah sambungan rumah jaringan gas kota (kumulatif, sambungan rumah)	537.936 ^{a)}	673.222	848.097	1.288.870	1.688.874	4.010.445
		4.5	Jumlah kapasitas kilang minyak-kumulatif (Barrel per Calendar Day/BPCD)	1.151.000	1.151.000	1.151.000	1.176.000	1.176.000	1.276.000
		PP 5. Transformasi Digital							
Meningkatnya pembangunan dan pemanfaatan infrastruktur TIK, serta kontribusi sektor informasi dan komunikasi dalam pertumbuhan ekonomi									
5.1	Persentase rata-rata pertumbuhan sektor TIK (%)	9,42	10,58	6,83	9,80–10,00	8,80	8,80		
5.2	Persentase pengguna internet (%)	64,80	73,70	73,70	79,20	80,70	82,30		
5.3	Proporsi individu yang menguasai/memiliki telepon genggam (%)	63,53	62,84	57,48	73	74	75,70		

Sumber: Kementerian PPN/Bappenas 2022, 1) Susenas 2019; 2) RPJMN 2020–2024.

Keterangan: a) kumulatif 2015–2019; b) kumulatif 2020–2024; c) Realisasi TW III 2021.

281 Perubahan Infografis *Major Project* Rumah Susun Perkotaan (1 Juta) dalam halaman IV.87





PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

No.	Perihal Perubahan	Pemutakhiran RKP Tahun 2023
282	<p>Perubahan Infografis <i>Major Project</i> Akses Air Minum Perpipaan (10 Juta Sambungan Rumah) dalam halaman IV.88</p>	<p align="center">MP Akses Air Minum Perpipaan (10 Juta Sambungan Rumah)</p> <p>Akses air minum jaringan perpipaan merupakan sistem penyediaan air minum yang lebih menjamin layanan dan kualitas air minum untuk masyarakat. Hingga tahun 2021, baru 19,06% rumah tangga di Indonesia yang memiliki akses air minum perpipaan. Kondisi ini mengalami penurunan sebesar 1,63% dari tahun 2020 (20,69%). Dengan demikian, diperlukan percepatan penyediaan air minum melalui <i>Major Project</i> Akses Air Minum Perpipaan (10 juta sambungan rumah).</p> <p>Tersebar pada seluruh provinsi.</p> <p>Urgensi</p> <p>Lokasi</p> <p>Impact/ Outcome/ Output</p> <ul style="list-style-type: none"> Meningkatkan jumlah rumah tangga yang memiliki akses air minum perpipaan dari 19,06% di tahun 2021 menjadi 28,01% di tahun 2023 dan 30,45% di tahun 2024; Meningkatkan kesehatan dan kualitas sumber daya manusia melalui akses air minum aman yang memenuhi standar kesehatan dengan target sebesar 14,22% di tahun 2023 dan 15% di tahun 2024. <p>Keterangan: a) Proyek Berstatus PSN.</p> <p>Pelaksana</p> <p>Penanggung Jawab Proyek:</p> <ul style="list-style-type: none"> Kemen PUPR. <p>Lintas K/L/D:</p> <ul style="list-style-type: none"> Kemendagri, Kemenkes, Kemen ESDM, Pemda, dan Badan Usaha. <p>Sumber:</p> <ul style="list-style-type: none"> K/L, DAK, KPBU, dan BUMN. <p>Alokasi:</p> <ul style="list-style-type: none"> Rp7.568,92 M [K/L, DAK, dan KPBU]; Rp6.267,32 M [BUMN]. <p>Highlight Proyek</p> <p>Pengembangan SPAM Kab./Kota</p> <ul style="list-style-type: none"> Pembangunan SPAM Kabupaten/Kota [K/L]; Peningkatan SPAM Kabupaten/Kota [K/L]; Perluasan SPAM Kabupaten/Kota [K/L]; Infrastruktur Air Minum Berbasis Masyarakat [K/L]; Air Minum - Tematik Pengentasan Permukiman Kumuh Terpadu [DAK]. <p>Pengembangan SPAM Regional</p> <ul style="list-style-type: none"> Pembangunan SPAM Regional [K/L]; Peningkatan SPAM Regional [K/L]; Perluasan SPAM Regional [K/L]; SPAM Jatiluhur I [KPBU & BUMN]³⁾; SPAM Karian Serpong [KPBU & BUMN]³⁾. <p>Pengembangan Air Baku</p> <ul style="list-style-type: none"> Jaringan Transmisi Air Baku dari Bendungan Ladongi Kabupaten Kolaka Timur yang dibangun (Tahap II) [K/L]; Air Baku KEK Sorong yang dibangun [K/L].
283	<p>Perubahan Infografis <i>Major Project</i> Akses Sanitasi (Air Limbah Domestik) Layak dan Aman (90% Rumah Tangga) dalam halaman IV.88</p>	<p align="center">MP Akses Sanitasi (Air Limbah Domestik) Layak dan Aman (90% Rumah Tangga)</p> <p>Perlu adanya penyediaan sanitasi yang terkelola dengan aman untuk mencegah penyebaran penyakit dan meningkatkan kesehatan lingkungan;</p> <p>Persentase rumah tangga yang masih mempraktikkan Buang Air Besar Sembarangan (BABS) di tempat terbuka 1,49% (tahun 2023) dan 0% (tahun 2024);</p> <p>Prevalensi <i>stunting</i> (pendek dan sangat pendek) pada balita 17,5% (tahun 2023).</p> <p>Tersebar di seluruh kab/kota di Indonesia.</p> <p>Urgensi</p> <p>Lokasi</p> <p>Impact/ Outcome/ Output</p> <p>Meningkatkan jumlah rumah tangga yang menempati hunian dengan akses sanitasi layak dan aman mencapai 86,03% pada tahun 2023 dan 90% Rumah Tangga pada tahun 2024.</p> <p>Pelaksana</p> <p>Penanggung Jawab Proyek:</p> <ul style="list-style-type: none"> Kemen PUPR. <p>Lintas K/L/D:</p> <ul style="list-style-type: none"> Kemendagri; Kemenkes; Kemen LHK; dan Pemda. <p>Sumber:</p> <ul style="list-style-type: none"> K/L dan DAK. <p>Alokasi:</p> <ul style="list-style-type: none"> Rp4.103,19 M [K/L dan DAK]. <p>Highlight Proyek</p> <p>SPALD Terpusat</p> <ul style="list-style-type: none"> SPALD-T Skala Permukiman [K/L]; <p>SPALD Setempat</p> <ul style="list-style-type: none"> SPALD-S Skala Kota [K/L]; Sanitasi - Tematik Pengentasan Permukiman Kumuh Terpadu [DAK]; <p>Kelembagaan</p> <ul style="list-style-type: none"> Pembinaan dan Pengawasan Pengembangan Sanitasi [K/L].



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

No.	Perihal Perubahan	Pemutakhiran RKP Tahun 2023
284	Perubahan Infografis <i>Major Project</i> Pemulihan 4 DAS Kritis dalam halaman IV.89	<p>MP Pemulihan 4 DAS Kritis</p> <ul style="list-style-type: none">• 24,3 juta hektar lahan kritis yang berdampak pada kualitas dan kuantitas sumber daya air;• Kualitas air sungai DAS kritis tercemar berat-sedang;• Monitoring kualitas air di DAS kritis masih rendah dan konvensional;• Frekuensi banjir di DAS kritis meningkat. <p>Lokasi</p> <ul style="list-style-type: none">• DAS Ciliwung-Cisadane: DKI Jakarta;• DAS Citarum: Jawa Barat• DAS Asahan Toba: Sumatera Utara. <p>Urgensi</p> <p>Pelaksana</p> <p>Penanggung Jawab Proyek:</p> <ul style="list-style-type: none">• Kemen PUPR. <p>Lintas K/L/D:</p> <ul style="list-style-type: none">• Kemendagri. <p>Sumber:</p> <p>K/L.</p> <p>Alokasi:</p> <p>Rp1.239,92 M [K/L].</p> <p>Impact/ Outcome/ Output</p> <ul style="list-style-type: none">• Pembangunan bangunan pengendali banjir 6 unit;• Pembangunan pengendali banjir 2,95 km. <p>Bangunan Pengendali Banjir</p> <ul style="list-style-type: none">• Pompa Ancol Sentiong yang dibangun [K/L];• <i>Groundsill</i> Cipamingkis yang dibangun (Tahap II) [K/L]. <p>Pengendalian Banjir</p> <ul style="list-style-type: none">• Pengendalian banjir Sungai Ciliwung yang dibangun [K/L];• Sudetan Ciliwung-KBT yang dibangun [K/L];• Pengendali Banjir Sungai Binanga Siguluan, Aek Sigumbang, dan Aek Limbong yang dibangun [K/L];• Pengendalian banjir Sungai Aek Silang yang dibangun [K/L]. <p>Pemeliharaan</p> <ul style="list-style-type: none">• Kegiatan Citarum Harum yang dilaksanakan [K/L].
285	Perubahan Infografis <i>Major Project</i> 18 Waduk Multiguna dalam halaman IV.89	<p>MP 18 Waduk Multiguna</p> <ul style="list-style-type: none">• 59% bendungan eksisting hanya memiliki fungsi tunggal;• Volume tampungan berkurang 19% akibat sedimentasi;• Rendahnya efisiensi pemanfaatan air irigasi;• Adanya pusat kegiatan ekonomi (KI, KEK, KSPN, dll) baru yang membutuhkan air. <p>Lokasi</p> <ul style="list-style-type: none">• Waduk Mbay: NTT• Waduk Pelosika: Sulawesi Tenggara• Waduk Riam Kiwa: Kalimantan Selatan• Waduk Jenelata: Sulawesi Selatan• Waduk Matenggeng: Jawa Barat• DI Komerling: Sumatera Selatan• DI Rentang: Jawa Barat• IPDMIP & SIMURP: tersebar <p>Urgensi</p> <p>Pelaksana</p> <p>Penanggung Jawab Proyek:</p> <ul style="list-style-type: none">• Kemen PUPR. <p>Lintas K/L/D:</p> <ul style="list-style-type: none">• Kementan dan Kemendagri. <p>Sumber:</p> <p>K/L.</p> <p>Alokasi:</p> <p>Rp3.105,60 M [K/L].</p> <p>Impact/ Outcome/ Output</p> <ul style="list-style-type: none">• Terlaksananya konstruksi bendungan di 4 lokasi;• Terlaksananya tahapan modernisasi irigasi di 2 Daerah Irigasi (DI Kedung Putri dan DI Pamukkulu). <p>Konstruksi</p> <ul style="list-style-type: none">• Bendungan Mbay yang dibangun [K/L]^{a)};• Pelosika <i>Multipurpose Dam Construction Project</i> yang dilaksanakan [K/L];• Riam Kiwa <i>Multipurpose Dam Construction Project</i> yang dilaksanakan [K/L];• Jenelata <i>Dam Construction Project</i> yang dilaksanakan [K/L]; <p>Perencanaan/Persiapan</p> <ul style="list-style-type: none">• Matenggeng <i>Multipurpose Dam Development Sub Project</i> (ESP KOICA) [K/L]; <p>Infrastruktur Irigasi</p> <ul style="list-style-type: none">• IPDMIP yang dilaksanakan [K/L];• SIMURP yang dilaksanakan [K/L];• RIMP yang dilaksanakan [K/L];• KIP yang dilaksanakan [K/L];• Daerah Irigasi Komerling yang dibangun [K/L];• Daerah Irigasi Komerling yang direhabilitasi [K/L] <p>Pendukung</p> <ul style="list-style-type: none">• Pendukung IPDMIP [K/L];• Pendukung SIMURP [K/L]; <p>Keterangan:</p> <p>a) Proyek Berstatus PSN.</p>



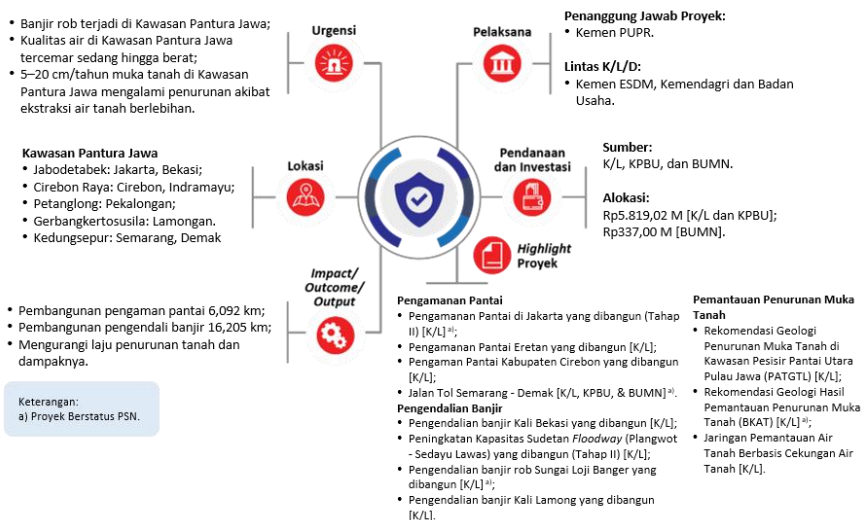
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

No. Perihal
Perubahan

Pemutakhiran RKP Tahun 2023

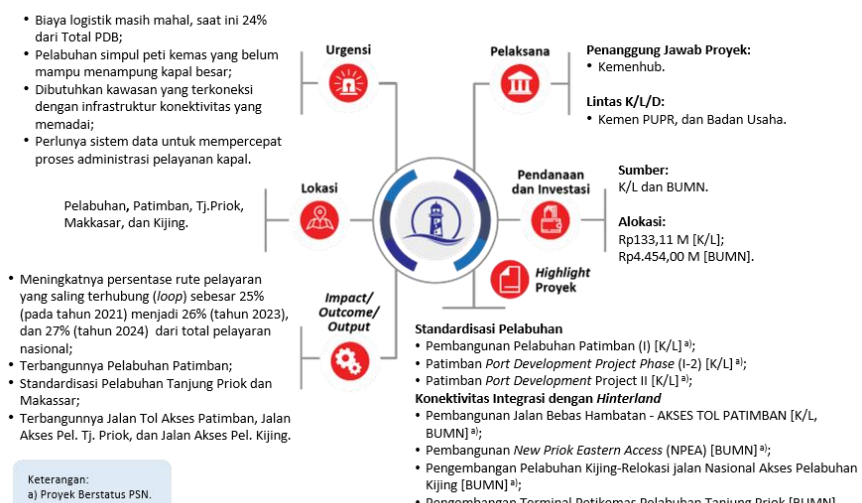
286 Perubahan
Infografis Major
Project
Pengamanan
Pesisir 5
Perkotaan
Pantura Jawa
dalam halaman
IV.90

MP Pengamanan Pesisir 5 Perkotaan Pantura Jawa



287 Perubahan
Infografis Major
Project Jaringan
Pelabuhan
Utama Terpadu
dalam halaman
IV.90

MP Jaringan Pelabuhan Utama Terpadu





PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

No.	Perihal Perubahan	Pemutakhiran RKP Tahun 2023
288	<p>Perubahan Infografis <i>Major Project Kereta Api Makassar-Pare Pare</i> dalam halaman IV.91</p>	<p>MP Kereta Api Makassar-Pare Pare</p> <ul style="list-style-type: none">• Mendorong penurunan biaya logistik;• Mendukung efisiensi waktu perjalanan angkutan barang maupun penumpang. <p>Prov. Sulawesi Selatan.</p> <p>Urgensi</p> <p>Pelaksana</p> <p>Penanggung Jawab Proyek: • Kemenhub.</p> <p>Lokasi</p> <p>Pendanaan dan Investasi</p> <p>Sumber: K/L.</p> <p>Alokasi: Rp520,11 M [K/L].</p> <p>Impact/ Outcome/ Output</p> <p>Operasional dan Pemeliharaan</p> <ul style="list-style-type: none">• Penyelenggaraan Layanan Kereta Api Perintis lintas Makassar - Parepare [K/L]^{a)};• Kewajiban Pembayaran atas Ketersediaan Layanan (<i>Availability Payment</i>) (Dukungan/Pendamping KPBU) [K/L]^{a)}. <p>Konstruksi</p> <ul style="list-style-type: none">• Pembangunan Prasarana Perkeretaapian untuk Mendukung Pengoperasian Kereta Api Makassar - Pare Pare antara Mandai - Palanro [K/L]^{a)}. <p>Keterangan: a) Proyek Berstatus PSN.</p>
289	<p>Perubahan Infografis <i>Major Project KA Kecepatan Tinggi Pulau Jawa (Jakarta – Semarang dan Jakarta – Bandung)</i> dalam halaman IV.91</p>	<p>MP KA Kecepatan Tinggi Pulau Jawa (Jakarta – Semarang dan Jakarta – Bandung)</p> <p>Mendukung efisiensi waktu perjalanan, terutama angkutan penumpang.</p> <p>DKI Jakarta dan Jawa Barat.</p> <p>Urgensi</p> <p>Pelaksana</p> <p>Penanggung Jawab Proyek: • Kemenhub dan Badan Usaha.</p> <p>Lokasi</p> <p>Pendanaan dan Investasi</p> <p>Sumber: BUMN.</p> <p>Alokasi: Rp884,00 M [BUMN].</p> <p>Impact/ Outcome/ Output</p> <p>Konstruksi</p> <ul style="list-style-type: none">• Pembangunan <i>High Speed Railway</i> Jakarta–Bandung [BUMN]^{a)}. <p>Keterangan: a) Proyek Berstatus PSN.</p>



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

No.	Perihal Perubahan	Pemutakhiran RKP Tahun 2023
-----	-------------------	-----------------------------

290 Perubahan Infografis Major Project Jalan Tol Trans Sumatera Aceh-Lampung dalam halaman IV.92

MP Jalan Tol Trans Sumatera Aceh-Lampung

- Backbone konektivitas utama kondisinya kurang efisien dengan waktu tempuh rata-rata >2,5 jam per 100 Km;
- Biaya logistik yang relatif mahal (24% dari PDB).

Tahap Konstruksi

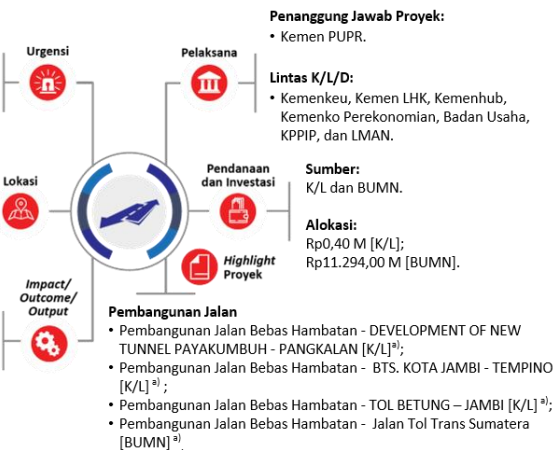
- Ruas Binjai-Langsa, Kuala Tanjung-Tebing Tinggi-Parapat, Indrapura-Kisaran, Pekanbaru-Padang, dan Kayu Agung-Palembang-Betung.

Tahap Penyiapan

- Ruas Betung-Tempino-Jambi dan Jambi-Rengat.

- Menurunkan waktu tempuh pada jalur lintas utama pulau pada tahun 2023 menjadi 2,08/100 km;
- Menurunkan waktu tempuh Aceh-Lampung dari 48 jam menjadi 30 jam pada tahun 2024; Target 2023: 37 jam.

Keterangan:
a) Proyek Berstatus PSN.



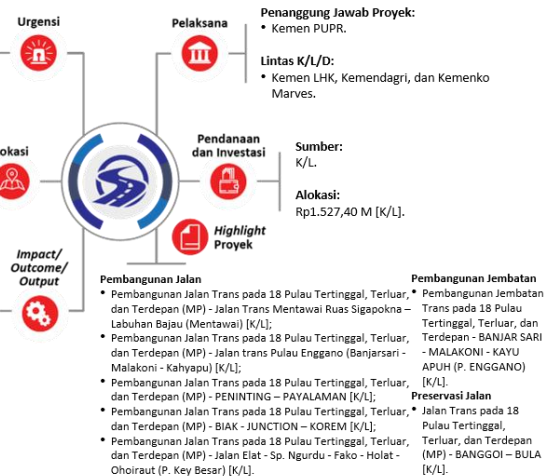
291 Perubahan Infografis Major Project Jalan Trans Pada 18 Pulau Tertinggal, Terluar, dan Terdepan dalam halaman IV.92

MP Jalan Trans Pada 18 Pulau Tertinggal, Terluar, dan Terdepan

- Infrastruktur konektivitas di wilayah tertinggal, terpencil, dan terdepan yang masih terbatas baik dari aspek kualitas dan kapasitas;
- Biaya transportasi di wilayah 3T yang relatif mahal.

Provinsi Maluku (Kei Besar, Buru, Seram); Provinsi Maluku Utara (Morotai); Provinsi Sumatera Barat (Mentawai); Provinsi Sumatera Utara (Nias); Provinsi Bengkulu (Enggano); dan Provinsi Papua (Biak).

- Persentase kondisi mantap jalan nasional/provinsi/ kabupaten/kota, tahun 2023 = 93/73/63 persen (pada tahun 2024 97/75/65);
- Waktu tempuh pada jalan lintas utama pulau, tahun 2023 = 2,08 jam/100 km.





PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

No.	Perihal Perubahan	Pemutakhiran RKP Tahun 2023
292	Perubahan Infografis Major Project Jalan Trans Papua Merauke - Sorong dalam halaman IV.93	<p style="text-align: center;">MP Jalan Trans Papua Merauke - Sorong</p> <ul style="list-style-type: none"> Urgensi <ul style="list-style-type: none"> Jaringan konektivitas dan aksesibilitas di wilayah Papua dan Papua Barat yang masih sangat terbatas; Biaya transportasi yang tinggi mengakibatkan harga logistik bahan pokok relatif sangat mahal. Lokasi <ul style="list-style-type: none"> Provinsi Papua Barat dan Papua Terbagi menjadi 2 segmen di Provinsi Papua Barat dan 8 segmen di Provinsi Papua. Impact/ Outcome/ Output <ul style="list-style-type: none"> Meningkatkan Konektivitas mulai terbangunnya jalan sepanjang 47,9 km pada tahun 2023 dan jembatan sepanjang 1.388,8 m; Persentase kondisi mantap jalan nasional/provinsi/ kabupaten/kota, tahun 2023 = 93/73/63 persen; Waktu tempuh pada jalan lintas utama pulau, tahun 2023 = 2,08 jam/100 km. Pelaksana <ul style="list-style-type: none"> Penanggung Jawab Proyek: <ul style="list-style-type: none"> Kemen PUPR. Lintas K/L/D: <ul style="list-style-type: none"> Kemen LHK dan Kemenko Marves. Pendanaan dan Investasi <ul style="list-style-type: none"> Sumber: K/L. Alokasi: Rp2.034,98 M [K/L]. Highlight Proyek <ul style="list-style-type: none"> Pembangunan Jalan <ul style="list-style-type: none"> Pembangunan Jalan Trans Papua Merauke-Sorong (MP) - IWUR - WAROPKO II [K/L]; Pembangunan Jalan Trans Papua Merauke-Sorong (MP) - KWATISORE - KAMP. MURI (BTS. PROVINSI PAPUA BARAT) [K/L]. Pembangunan Jembatan <ul style="list-style-type: none"> Pembangunan Jembatan Trans Papua Merauke-Sorong (MP) - JEMBATAN MAMBERAMO - EELIM II [K/L]; Pembangunan Jembatan Trans Papua Merauke-Sorong (MP) - Mameh - Windesi (Werabur) [K/L]; Pembangunan Jembatan Trans Papua Merauke-Sorong (MP) - JALAN KAMPUNG MURI - KWATISORE (BATAS PROVINSI PAPUA) [K/L]. Preservasi Jalan <ul style="list-style-type: none"> Jalan Trans Papua Merauke-Sorong (MP) - Wanggar - Kwatisore (BTS. PROV. PAPUA BARAT) [K/L]; Jalan Trans Papua Merauke-Sorong (MP) - Getentiri - Bts. Kab. Merauke/Kab. Boven Digoel [K/L]; Jalan Trans Papua Merauke-Sorong (MP) - Waropko - Mindiptana [K/L]. Preservasi Jembatan <ul style="list-style-type: none"> Jalan Trans Papua Merauke-Sorong (MP) - JEMBATAN KALI KOLOP KERING (JALAN DEKAI-SEREDALA) [K/L].
293	Perubahan Infografis Major Project Jembatan Udara 37 Rute di Papua dalam halaman IV.93	<p style="text-align: center;">MP Jembatan Udara 37 Rute di Papua</p> <ul style="list-style-type: none"> Urgensi <ul style="list-style-type: none"> Infrastruktur konektivitas di wilayah Papua yang sangat terbatas dari aspek kapasitas dan kualitas; Sistem jaringan jalan di Papua masih terbatas dan masih sangat tergantung dengan moda udara untuk distribusi barang dan mobilitas manusia; Harga bahan pokok yang sangat mahal akibat terbatasnya jaringan dan layanan infrastruktur transportasi di Wilayah Papua; Kondisi bandara yang ada memerlukan peningkatan kapasitas dan dukungan subsidi perintis baik untuk penumpang maupun kargo. Lokasi <ul style="list-style-type: none"> Wilayah Pegunungan Tengah Papua. Impact/ Outcome/ Output <ul style="list-style-type: none"> Memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar dengan target pertumbuhan ekonomi Provinsi Papua pada tahun 2023 sebesar 8,1-9,3 persen dan target 2024 sebesar 7,5 persen (berdasarkan RPJMN 2020-2024); Menurunkan harga bahan pokok di Wilayah Papua sampai dengan 20-30% pada tahun 2023 hingga 2024; Target Jumlah rute jembatan udara di Wilayah Papua pada tahun 2023 sebanyak 34 rute (dari total 41 rute se-Indonesia); Jumlah bandara pendukung jembatan udara yang dibangun dan dikembangkan pada tahun 2023 sebanyak 8 lokasi. Pelaksana <ul style="list-style-type: none"> Penanggung Jawab Proyek: <ul style="list-style-type: none"> Kemenhub dan Kemendag. Pendanaan dan Investasi <ul style="list-style-type: none"> Sumber: K/L. Alokasi: Rp335,68 M [K/L]. Highlight Proyek <ul style="list-style-type: none"> Pengembangan Infrastruktur <ul style="list-style-type: none"> Pengembangan Bandar Udara Wamena Tahap III [K/L]; Pengembangan Bandar Udara Ilaga [K/L]; Pengembangan Bandar Udara Tanah Merah [K/L]; Pengembangan Bandar Udara Mozes Kilangin - Timika, Papua [K/L]; Pengembangan Bandar Udara Ewer - Asmat, Papua [K/L]; Pengembangan Bandar Udara Mopah - Merauke, Papua [K/L]; Pengembangan Bandar Udara Oksibil [K/L]; Pengembangan Bandar Udara Sobaham [K/L]. Layanan <ul style="list-style-type: none"> Subsidi Operasi Angkutan Udara Kargo [K/L]; Angkutan Kargo Perintis [K/L]; Angkutan BBM untuk Kargo Perintis [K/L].



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

No.	Perihal Perubahan	Pemutakhiran RKP Tahun 2023
294	Perubahan Infografis <i>Major Project</i> Sistem Angkutan Umum Massal Perkotaan di 6 Wilayah Metropolitan: Jakarta, Surabaya, Bandung, Medan, Semarang dan Makassar dalam halaman IV.94	<p style="text-align: center;">MP Sistem Angkutan Umum Massal Perkotaan di 6 Wilayah Metropolitan: Jakarta, Surabaya, Bandung, Medan, Semarang dan Makassar</p> <p>Mengurangi potensi kerugian ekonomi akibat isu kemacetan di wilayah metropolitan antara lain:</p> <ul style="list-style-type: none">Jakarta, Surabaya, dan Bandung termasuk kota termacet di Asia;Pangsa angkutan umum kota-kota di Indonesia masih rendah (di bawah 20%) dan sistem angkutan massal perkotaan masih terbatas;Kemacetan menghambat pertumbuhan ekonomi, (peningkatan 1% urbanisasi hanya menghasilkan peningkatan 1,4% PDB per kapita). <p>Wilayah Metropolitan Jakarta, Bandung, Surabaya, Medan, Semarang, dan Makassar.</p> <p>Sistem angkutan umum massal perkotaan (berbasis rel dan/atau jalan) yang dibangun atau dikembangkan tahun 2023 hingga tahun 2024 di 6 Wilayah Metropolitan.</p> <p>Urgensi</p> <p>Lokasi</p> <p>Impact/ Outcome/ Output</p> <p>Pelaksana</p> <p>Penanggung Jawab Proyek:</p> <ul style="list-style-type: none">Kemenhub. <p>Lintas K/L/D:</p> <ul style="list-style-type: none">Kemen PPN/Bappenas dan Badan Usaha. <p>Sumber:</p> <ul style="list-style-type: none">K/L dan BUMN. <p>Alokasi:</p> <ul style="list-style-type: none">Rp2.222,14 M [K/L];Rp10.390,00 M [BUMN]. <p>Highlight Proyek</p> <p>Pengembangan Angkutan Umum Massal Perkotaan Berbasis Rel</p> <ul style="list-style-type: none">Engineering Services For Jakarta Mass Rapid Transit East-West Line Project Phase I Stage I [K/L]^{a)};Paket A (Pembangunan Fasilitas Perkeretaapian untuk Manggarai s/d Jatinegara) (Tahap II) [K/L];Peningkatan Jalur KA lintas Medan - Belawan Tahap I segmen Medan - Labuan [K/L];Engineering Services Of Jakarta Mass Rapid Transit East - West Line Project Phase I Stage II [K/L]^{a)};Pembangunan Jalur Ganda KA Kiaracondong - Cicalengka Tahap 2 segmen Kiaracondong - Gedebage dan segmen Haurpugur - Cicalengka [K/L];Pembangunan Jalur KA Medan - Binjai [K/L];Surabaya Regional Railway Line (Phase II) [K/L];Peningkatan Fasilitas Operasi Perkeretaapian pada lintas Jatinegara - Bogor dan Manggarai - Jakarta Kota [K/L];Jabodetabek Railway Capacity Enhancement Phase I [K/L];Stasiun Kereta Api Jabodetabek [K/L];Pembangunan LRT Jabodetabek [BUMN]^{a)}. <p>Pengembangan Angkutan Umum Massal Perkotaan Berbasis Jalan</p> <ul style="list-style-type: none">Pembangunan Sistem Angkutan Umum Massal (Prioritas Nasional) [K/L];Area Traffic Control System (ATCS) Terpadu Jabodetabek [K/L];Subsidi Angkutan Penumpang (Buy The Service) Jabodetabek [K/L];Pengembangan dan Pengadaan Transportasi Massal (Armada Bus) Perkotaan di 6 Kota Metropolitan [BUMN]. <p>Keterangan:</p> <ul style="list-style-type: none">a) Proyek Berstatus PSN.
295	Perubahan Infografis <i>Major Project</i> Penyediaan Tenaga Listrik: Pembangkit Listrik 27.000 MW, Transmisi 19.000 kms dan Gardu Induk 38.000 MVA dalam halaman IV.94	<p style="text-align: center;">MP Penyediaan Tenaga Listrik: Pembangkit Listrik 27.000 MW, Transmisi 19.000 kms dan Gardu Induk 38.000 MVA</p> <p>Tingkat layanan tenaga listrik belum optimal;</p> <ul style="list-style-type: none">Tingkat konsumsi listrik per kapita masih rendah jika dibandingkan dengan negara berpendapatan tinggi;Mulai berkembangnya moda transportasi berbasis listrik;Komitmen Pemerintah untuk menurunkan emisi GRK. <p>• Pusat;</p> <p>• Tersebar di seluruh provinsi.</p> <p>Meningkatkan akses, keandalan, dan keberlanjutan penyediaan tenaga listrik dengan:</p> <ul style="list-style-type: none">Meningkatkan rasio elektrifikasi menjadi ~100% pada tahun 2023;Meningkatkan rata-rata pemenuhan kebutuhan (konsumsi) listrik 1.336 kWh/kapita pada tahun 2023;Penurunan emisi CO₂ pembangkit 5,91 juta ton pada tahun 2023. <p>Urgensi</p> <p>Lokasi</p> <p>Impact/ Outcome/ Output</p> <p>Pelaksana</p> <p>Penanggung Jawab Proyek:</p> <ul style="list-style-type: none">Kemen ESDM dan Badan Usaha. <p>Sumber:</p> <ul style="list-style-type: none">K/L dan BUMN. <p>Alokasi:</p> <ul style="list-style-type: none">Rp335,48 M [K/L];Rp81.334,36 M [BUMN]. <p>Highlight Proyek</p> <p>Pembangkit Listrik</p> <ul style="list-style-type: none">Pembangunan Pembangkit Listrik Terbarukan [BUMN dan K/L].Jaringan Interkoneksi BackboneJaringan Backbone Interkoneksi [BUMN]^{a)}.Jaringan Last Mile dan Sambungan ListrikPemasangan Sambungan Baru Listrik Bagi Rumah Tangga Belum Berlistrik yang Tidak Mampu atau Berada di Daerah 3T [K/L].Digitalisasi Penyediaan ListrikAdvance Metering Infrastructure (AMI) [BUMN]. <p>Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan</p> <ul style="list-style-type: none">Rekomendasi Pengendalian Pembangunan Pembangkit Listrik [K/L];Rekomendasi Pengendalian Pembangunan Jaringan Transmisi dan Gardu Induk [K/L];Rekomendasi Penerapan Keselamatan Ketenagalistrikan pada Infrastruktur Pengisian Listrik pada Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai [K/L].Kebijakan Tarif, Harga dan SubsidiRekomendasi Reviu dan Evaluasi Subsidi Listrik Tepat Sasaran [K/L]. <p>Keterangan:</p> <ul style="list-style-type: none">a) Proyek Berstatus PSN.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

No.	Perihal Perubahan	Pemutakhiran RKP Tahun 2023
-----	-------------------	-----------------------------

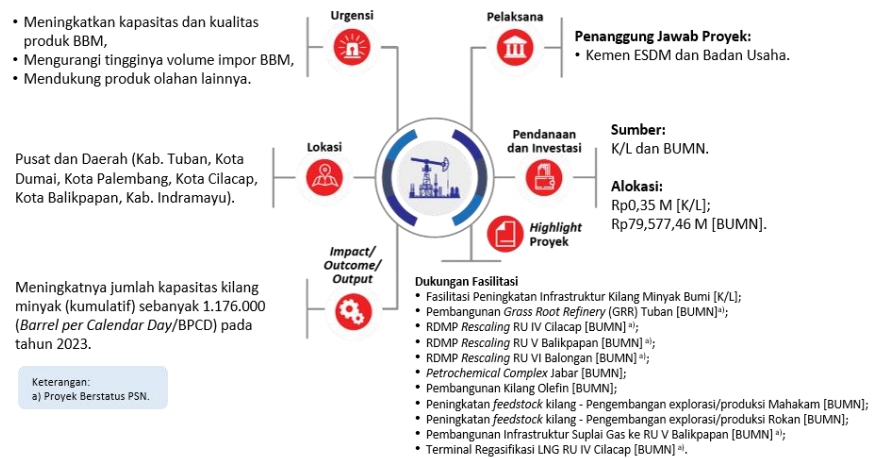
296 Perubahan Infografis *Major Project* Infrastruktur Jaringan Gas Kota untuk 4 Juta Sambungan Rumah dalam halaman IV.95

MP Infrastruktur Jaringan Gas Kota untuk 4 Juta Sambungan Rumah



297 Perubahan Infografis *Major Project* Pembangunan dan Pengembangan Kilang Minyak dalam halaman IV.96

MP Pembangunan dan Pengembangan Kilang Minyak





PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

No.	Perihal Perubahan	Pemutakhiran RKP Tahun 2023
298	Perubahan Infografis Major Project Transformasi Digital dalam halaman IV.96	<p style="text-align: center;">MP Transformasi Digital</p> <div style="display: flex; justify-content: space-between;"><div data-bbox="553 758 829 934"><ul style="list-style-type: none">• Memperluas pemanfaatan platform <i>e-commerce</i> yang efisien untuk meraih potensi ekonomi digital yang optimal;• Meningkatkan, efisiensi, efektivitas kegiatan belajar dan mengajar, serta aksesibilitas pengguna dan fleksibilitas waktu peserta didik dalam proses pembelajaran;• Meningkatkan kualitas, efisiensi, efektivitas kegiatan layanan kesehatan publik, serta aksesibilitas dan fleksibilitas waktu pasien dan tenaga medis.</div><div data-bbox="829 758 1089 1035"><p>Urgensi: Tersebar pada seluruh Provinsi di Indonesia.</p><p>Lokasi: Tersebar pada seluruh Provinsi di Indonesia.</p><p>Impact/Outcome/Output: 99,5% desa berpenduduk yang mendapatkan akses jaringan <i>mobile broadband</i> pada 2023 dan 100% desa berpenduduk yang mendapatkan akses jaringan <i>mobile broadband</i> pada 2024; 90% sekolah terlayani internet dengan tujuan menunjang pembelajaran pada tahun 2024; 100% standardisasi dan integrasi data dan sistem fasilitas pelayanan kesehatan pada Platform Satu Sehat pada tahun 2024; Pembangunan baru 332 BTS USO 4G pada tahun 2023 dan tersedianya 9.568 BTS USO 4G <i>on air</i> pada tahun 2024.</p><p>Pelaksana: ANRI, BIN, BPPT, BSN, Kemenag, Kemendagri, Kemen Desa PDTT, Kemen ESDM, Kemen KP, Kemenkes, Kemnaker, Kemenkeu, Kemenko Polhukam, Kemen KUKM, Kemenparekraf, Kemen PANRB, Kemdikbudristek, Kemendag, Kemenperin, Kemhan, Kemensos, POLRI, Perpusnas RI, Televisi Republik Indonesia, Badan Usaha dan Swasta.</p><p>Pendanaan dan Investasi: Sumber: K/L, KPBU, BUMN dan Swasta. Alokasi: Rp19.146,70 M [K/L dan KPBU]; Rp9.106,18 M [BUMN]; Rp3.426,00 M [Swasta]^{a)}.</p><p>Highlight Proyek: Penyediaan Akses Internet Cepat: BTS 4G/<i>Lastmile</i> [K/L]; Satelit Multifungsi [Konstruksi - Investasi BUP KPBU] [K/L]; Pusat Data Nasional; Data Center Nasional [K/L]; Pembangunan Data Center [Swasta]. Pemanfaatan TIK untuk Peningkatan Kualitas Pengajaran dan Pembelajaran: Platform <i>E-learning</i> Madrasah yang Dikelola [K/L]. Sistem Informasi Kesehatan: Penguatan Ekosistem Digital Kesehatan (TK) [K/L]. Pengembangan Ekosistem Inovasi, Infrastruktur Digital dan Insentif Investasi Teknologi: Investasi Bank Himbara untuk Pengembangan Digital [BUMN].</p></div><div data-bbox="1089 758 1365 1035"><p>Penanggung Jawab Proyek: Kemenkominfo.</p><p>Lintas K/L/D: ANRI, BIN, BPPT, BSN, Kemenag, Kemendagri, Kemen Desa PDTT, Kemen ESDM, Kemen KP, Kemenkes, Kemnaker, Kemenkeu, Kemenko Polhukam, Kemen KUKM, Kemenparekraf, Kemen PANRB, Kemdikbudristek, Kemendag, Kemenperin, Kemhan, Kemensos, POLRI, Perpusnas RI, Televisi Republik Indonesia, Badan Usaha dan Swasta.</p><p>Sumber: K/L, KPBU, BUMN dan Swasta.</p><p>Alokasi: Rp19.146,70 M [K/L dan KPBU]; Rp9.106,18 M [BUMN]; Rp3.426,00 M [Swasta]^{a)}.</p></div></div> <p><small>Keterangan: a) Data Proyek Prioritas Investasi Swasta per 24 November 2022.</small></p>
299	Perubahan alinea pertama dalam halaman IV.97	Kerangka regulasi yang diperlukan dan direncanakan dilaksanakan di tahun 2023 untuk mendukung PN 5 Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar antara lain: <ol style="list-style-type: none">(1) Rancangan Peraturan Menteri PPN/Kepala Bappenas tentang Rencana Aksi Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;(2) Revisi Peraturan Pemerintah No. 34/2006 tentang Jalan;(3) Rancangan Peraturan Presiden tentang Percepatan Pembangunan Angkutan Umum Massal Perkotaan.
300	Perubahan alinea kedua dalam halaman IV.97	Strategi peningkatan kualitas lingkungan hidup akan berfokus pada upaya penanganan beban pencemaran untuk meningkatkan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup, meliputi (1) upaya peningkatan kualitas udara, air, air laut, dan tutupan lahan sebagai penyangga sistem kehidupan masyarakat; (2) penanganan limbah B3 dan sampah spesifik; serta (3) optimalisasi pengelolaan keanekaragaman hayati melalui pengurangan ancaman terhadap keanekaragaman hayati dan peningkatan pemanfaatan keanekaragaman hayati secara berkelanjutan di tingkat ekosistem, spesies, dan genetik yang dicakup dalam Dokumen Strategi dan Rencana Aksi Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Indonesia Pasca 2020 (Indonesia Biodiversity Strategy and Action Plan Post 2020/IBSAP Post 2020).



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

No.	Perihal Perubahan	Pemutakhiran RKP Tahun 2023					
301	Perubahan Tabel 4.17 dalam halaman IV.98	Tabel 4.17 Sasaran, Indikator, dan Target PN 6 Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim					
No.	Sasaran/Indikator	Baseline 2019	Realisasi		Target		
			2020	2021	2022	2023	2024
1	Meningkatnya Indeks Kualitas Lingkungan Hidup						
1.1	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) (nilai)	66,55	70,27	71,45	69,22	69,48	69,74
2	Berkurangnya Kerugian Akibat Dampak Bencana dan Bahaya Iklim						
2.1	Penurunan potensi kehilangan PDB akibat dampak bencana dan iklim terhadap total PDB (%)	N/A ^{a)}	0,37	0,43 ^{b)}	0,91	1,10	1,25
3	Meningkatnya capaian penurunan emisi dan intensitas emisi Gas Rumah Kaca (GRK) terhadap <i>baseline</i>						
3.1	Persentase penurunan emisi GRK (%)						
	a. Kumulatif	24,92	26,44	26,02 ^{b)}	26,87	27,02	27,27
	b. Tahunan	11,01	39,55	22,51 ^{b)}	26,70	26,80	27,30
3.2	Persentase penurunan intensitas emisi GRK (%)	20,75	38,01	20,71 ^{b)}	28,49	29,70	31,64
Sumber: Kementerian PPN/Bappenas, 2022.							
Keterangan: a) belum dilakukan penghitungan; b) angka sementara, November 2022							



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

No.	Perihal Perubahan	Pemutakhiran RKP Tahun 2023					
302	Perubahan Tabel 4.18 dalam halaman IV.100	Tabel 4.18 Sasaran, Indikator, dan Target PP dari PN 6 Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim					
No.	Sasaran/Indikator	Baseline 2019	Realisasi		Target		
			2020	2021	2022	2023	2024
PP 1. Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup							
Meningkatnya kualitas air, kualitas air laut, kualitas udara, serta kualitas tutupan lahan dan ekosistem gambut							
1.1	Indeks Kualitas Air (IKA) (nilai)	52,65	53,53	52,82	55,30	55,40	55,50
1.2	Indeks Kualitas Air Laut (IKAL) (nilai)	N/A ^{a)}	68,94	81,04	59,50	60,00	60,50
1.3	Indeks Kualitas Udara (IKU) (nilai)	86,57	87,21	87,36	84,30	84,40	84,50
1.4	Indeks Kualitas Tutupan Lahan dan Ekosistem Gambut (IKL) (nilai)	62,00	59,54	60,72	63,50	64,50	65,50
PP 2. Peningkatan Ketahanan Bencana dan Iklim							
Berkurangnya potensi kehilangan PDB akibat dampak bencana dan bahaya iklim, serta meningkatnya kecepatan penyampaian informasi peringatan dini bencana kepada masyarakat							
2.1	Persentase penurunan potensi kehilangan PDB akibat dampak bencana (%)	N/A ^{a)}	0,08 ^{b)}	0,09 ^{b)}	0,10	0,10	0,10
2.2	Penurunan potensi kehilangan PDB sektor terdampak bahaya iklim (%)	N/A ^{a)}	0,29 ^{b)}	0,34 ^{b)}	0,81	1,00	1,15
2.3	Kecepatan penyampaian informasi peringatan dini bencana kepada masyarakat (menit)	>5,00	5,00	4,5	4,00	3,50	3,00
PP 3. Pembangunan Rendah Karbon							
Meningkatnya capaian penurunan emisi GRK terhadap <i>baseline</i> pada sektor energi, lahan, limbah, IPPU, serta pesisir dan kelautan (%)							
3.1	Penurunan emisi GRK terhadap <i>baseline</i> pada sektor energi (%)						
	a. Kumulatif	4,29	4,87	5,35 ^{b)}	9,70	9,99	10,15
	b. Tahunan	9,31	9,39	10,88 ^{b)}	13,2	12,8	11,8



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

No. Perihal Perubahan Pemutakhiran RKP Tahun 2023

303 Perubahan Tabel 4.18 dalam halaman IV.101

No.	Sasaran/Indikator	Baseline 2019	Realisasi		Target		
			2020	2021	2022	2023	2024
3.2	Penurunan emisi GRK terhadap <i>baseline</i> pada sektor lahan (%)						
a.	Kumulatif	47,00	50,02	33,25 ^{c)}	34,77	36,36	37,79
b.	Tahunan	13,39	78,80	50,71 ^{c)}	53,1	58,3	57,2
3.3	Penurunan emisi GRK terhadap <i>baseline</i> pada sektor limbah (%)						
a.	Kumulatif	4,03	4,35	5,03 ^{b)}	6,53	6,78	6,99
b.	Tahunan	6,90	7,15	8,93 ^{b)}	9,3	9,4	9,4
3.4	Penurunan emisi GRK terhadap <i>baseline</i> pada sektor IPPU (%)						
a.	Kumulatif	5,44	6,03	6,49 ^{b)}	5,24	4,97	4,77
b.	Tahunan	11,35	10,66	0,16 ^{c)}	2,59	2,45	2,87
3.5	Penurunan emisi GRK terhadap <i>baseline</i> pada sektor pesisir dan kelautan (%)						
a.	Kumulatif	N/A ^{a)}	11,10 ^{c)}	10,80 ^{c)}	6,60	6,80	6,90
b.	Tahunan	6,30	11,10 ^{c)}	10,50 ^{c)}	6,80	7,04	7,30

Sumber: Kementerian PPN/Bappenas, 2022.

Keterangan: a) belum dilakukan penghitungan; b) angka sementara, November 2022; c) angka target 2021

304 Perubahan Infografis *Major Project* Penguatan Sistem Peringatan Dini Bencana dalam halaman IV.102





PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

No.	Perihal Perubahan	Pemutakhiran RKP Tahun 2023
305	Perubahan Infografis <i>Major Project</i> Pembangunan Fasilitas Pengolahan Limbah B3 dalam halaman IV.103	<p style="text-align: center;">MP Pembangunan Fasilitas Pengolahan Limbah B3</p> <ul style="list-style-type: none">Urgensi<ul style="list-style-type: none">Tingginya timbulan limbah B3 di Indonesia;Timbulan limbah B3 medis meningkat selama pandemi;Minimnya fasilitas pengolahan limbah B3.Pelaksana<ul style="list-style-type: none">Penanggung Jawab Proyek:<ul style="list-style-type: none">Kemen LHK.Lintas K/L/D:<ul style="list-style-type: none">Kemenkes dan Kemenperin.Pendahanaan dan Investasi<ul style="list-style-type: none">Sumber: K/L¹⁾.Alokasi: Rp142,46 M [K/L].Highlight Proyek<ul style="list-style-type: none">Pembangunan Fasilitas Pengolahan Limbah B3 Medis<ul style="list-style-type: none">Pembangunan Fasilitas Pengolahan Limbah B3 dari Fasyankes [K/L].Enablers<ul style="list-style-type: none">Fasilitasi dan Pembinaan Pemerintah Daerah dalam rangka penyehatan lingkungan [K/L].Pembangunan Fasilitas Pengolahan Limbah B3 Terpadu<ul style="list-style-type: none">Persiapan Pembangunan Fasilitas Pengelolaan Limbah B3 dan Sampah Spesifik secara Terpadu [K/L].Enablers<ul style="list-style-type: none">Kebijakan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya Beracun (B3) di Sektor Industri [K/L].Lokasi<ul style="list-style-type: none">Tersebar pada 34 Provinsi di Indonesia.Impact/Outcome/Output<ul style="list-style-type: none">Meningkatkan kapasitas terpasang pengolahan limbah B3 sebesar ±4.680 ton pada tahun 2023;Mendukung pencapaian target Indeks Kualitas Lingkungan Hidup menuju 69,48 di tahun 2023 dan 69,74 di tahun 2024;Jumlah pembangunan fasilitas pengolahan limbah B3 dari sumber fasilitas pelayanan kesehatan sebanyak 10 unit pada tahun 2023 dan 11 unit pada tahun 2024;Jumlah pembangunan fasilitas pengolahan limbah B3 terpadu sebanyak 1 unit pada tahun 2023 dan 2 unit pada tahun 2024. <p><small>Keterangan: a) sedang didorong keterlibatan pembiayaan swasta</small></p>
306	Penambahan subbab 4.1.6.5 Kerangka Regulasi setelah infografis <i>Major Project</i> Pembangunan Fasilitas Pengolahan Limbah B3 dalam halaman IV.103	<p>4.1.6.5 Kerangka Regulasi</p> <p>Kerangka regulasi yang dibutuhkan untuk mendukung pencapaian PN Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim pada tahun 2023 adalah</p> <p>(1) Rancangan Peraturan Presiden tentang Strategi dan Rencana Aksi Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Indonesia Pasca 2020 (Indonesia Biodiversity Strategy and Action Plan Post 2020/IBSAP Post 2020).</p>
307	Perubahan alinea kedua dalam halaman IV.104	<p>Untuk menjawab tantangan bidang politik dan komunikasi tersebut, arah kebijakan yang ditetapkan adalah mewujudkan demokrasi yang terkonsolidasi, terpeliharanya kebebasan sipil, menguatnya kapasitas lembaga-lembaga demokrasi, dan terjaganya kesetaraan warga negara secara optimal yang dapat diwujudkan melalui</p> <p>(1) penguatan kapasitas lembaga demokrasi dengan strategi (a) penguatan penyelenggaraan pemilu sebagai persiapan tahapan pemilu serentak tahun 2024; (b) penguatan peraturan perundangan bidang politik; (c) bantuan keuangan kepada partai politik; (d) penguatan demokrasi internal, transparansi, dan akuntabilitas partai politik; serta (e) penguatan demokrasi secara umum yang dapat direfleksikan dengan angka Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) setiap tahunnya;</p> <p>(2) peningkatan kesetaraan dan kebebasan dengan strategi (a) pendidikan politik dan pendidikan pemilih, khususnya kelompok pemilih pemula; (b) peningkatan kualitas penyelenggaraan kepemiluan; dan (c) peningkatan kualitas dan kapasitas OMS; dan</p> <p>(3) peningkatan kualitas komunikasi publik dengan strategi (a) pengintegrasian tata kelola informasi dan komunikasi publik di kementerian/lembaga/daerah; (b) penyediaan konten dan akses informasi publik secara merata dan berkeadilan, terutama di wilayah terdepan, terpencil, dan tertinggal (3T); (c) peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) bidang komunikasi dan informatika;</p>



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

No.	Perihal Perubahan	Pemutakhiran RKP Tahun 2023
		(d) peningkatan literasi Teknologi, Informasi, dan Komunikasi (TIK) masyarakat; (e) peningkatan peran lembaga pers dan jurnalis; serta (f) peningkatan kualitas lembaga penyiaran.
308	Perubahan alinea kedua dalam halaman IV.105	Guna pelaksanaan kebijakan luar negeri yang optimal, arah kebijakan dan strategi di tahun 2023 akan difokuskan pada (1) peningkatan peran kepemimpinan Indonesia di tingkat forum regional dan global; (2) pemutakhiran data WNI (termasuk pemutakhiran data pemilih di luar negeri) dan penguatan Portal Peduli WNI; (3) percepatan penyelesaian perundingan penetapan batas maritim; (4) peningkatan citra positif Indonesia; dan (5) dalam konteks kerja sama pembangunan internasional, pemerintah terus mendorong partisipasi swasta dalam KSST untuk mendukung pembangunan di sektor <i>green economy</i> , <i>blue economy</i> , industri halal, pertanian, dan kesehatan; serta (6) terus berkontribusi terhadap solidaritas, perdamaian, dan pembentukan tata kelola global, baik melalui forum/OI maupun pemberian hibah.
309	Penambahan alinea setelah alinea keempat dalam halaman IV.105	Dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan publik, telah dilakukan berbagai upaya diantaranya pengembangan pelayanan publik digital, penguatan pengawasan masyarakat atas kinerja pelayanan publik melalui Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional – Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat (SP4N-LAPOR!), penguatan pelayanan publik terpadu melalui pembangunan Mal Pelayanan Publik (MPP), serta pembinaan inovasi pelayanan publik. Upaya tersebut berdampak pada peningkatan kualitas pelayanan publik, hal ini ditunjukkan dengan nilai Indeks Pelayanan Publik (IPP) Nasional yang mengalami peningkatan dari 3,38 pada tahun 2018 menjadi 3,79 pada tahun 2021. Di samping itu, dalam hal kepatuhan penyelenggaraan pelayanan publik terhadap standar pelayanan publik (atas dasar UU Nomor 25 tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik) juga menunjukkan perbaikan. Tahun 2021, sebanyak 142 instansi pemerintah memperoleh tingkat kepatuhan pelayanan publik kategori baik.
310	Perubahan alinea kelima dalam halaman IV.105 dan alinea pertama dalam halaman IV.106	Pada bidang aparatur negara, beberapa isu strategis terkait transformasi birokrasi adalah pelaksanaan manajemen ASN yang meliputi sistem informasi manajemen ASN yang belum terintegrasi, belum diimplementasikannya Manajemen Talenta ASN di seluruh instansi pemerintah, perbaikan sistem rekrutmen ASN, penerapan pemberian penghargaan berbasis kinerja, dan pelanggaran netralitas/disiplin ASN. Pada aspek pelayanan publik, yaitu belum terintegrasinya layanan publik prioritas pada portal pelayanan publik nasional, pemanfaatan Jaringan Inovasi Pelayanan Publik (JIPP) sebagai sumber pengetahuan inovasi pelayanan publik dan optimalisasi penyelesaian laporan pengaduan pelayanan publik. Pada aspek kelembagaan dan proses bisnis, tantangan yang dihadapi adalah percepatan pelaksanaan SPBE, penataan proses bisnis berdasarkan isu/tematik dan lintas sektor, serta percepatan implementasi SRIKANDI di seluruh K/L/D. Pada aspek pelaksanaan Reformasi Birokrasi (RB), tantangan yang dihadapi adalah masih rendahnya kualitas pelaksanaan RB di daerah. Dalam mengatasi isu/tantangan tersebut, arah kebijakan yang dilakukan tahun 2023 di antaranya (1) transformasi manajemen SDM aparatur; (2) transformasi pelayanan publik; (3) penataan kelembagaan dan proses bisnis yang efektif, dan (4) penguatan pelaksanaan RB dan akuntabilitas kinerja pembangunan.



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

No.	Perihal Perubahan	Pemutakhiran RKP Tahun 2023						
311	Perubahan Tabel 4.19 dalam halaman IV.106	Tabel 4.19 Sasaran, Indikator, dan Target PN 7 Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik						
No.	Sasaran/Indikator	<i>Baseline</i> 2019	<i>Realisasi</i> 2020 2021		<i>Target</i> 2022 2023 2024			
1	Terwujudnya Demokrasi yang Terkonsolidasi, Terpeliharanya Kebebasan, Menguatnya Kapasitas Lembaga-lembaga Demokrasi, dan Terjaganya Kesetaraan Warga Negara secara Optimal							
1.1	Indeks Demokrasi Indonesia ^{a)} (nilai)	74,92	73,66	78,12	78,92	79,25	79,58	
1.2	Tingkat Kepercayaan Masyarakat terhadap Konten dan Akses Informasi Publik terkait Kebijakan dan Program Prioritas Pemerintah ²⁾ (%)	69,43	70,4	77,23	75	78	79	
2	Optimalnya Kebijakan Luar Negeri							
2.1	Indeks Pengaruh dan Peran Indonesia di Dunia Internasional ³⁾ (nilai)	95,20	96,58	112,06	4,85 ^{b)}	4,88 ^{b)}	4,88 ^{b)}	
3	Meningkatnya Penegakan Hukum Nasional yang Mantap							
3.1	Indeks Pembangunan Hukum (nilai)	0,62	0,54 ^{c)}	0,55 ^{d)}	0,56 ^{e)}	0,57 ^{e)}	0,58 ^{e)}	
312	Perubahan Tabel 4.19 dalam halaman IV.107	Tabel 4.19 Sasaran, Indikator, dan Target PN 7 Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik						
No.	Sasaran/Indikator	<i>Baseline</i> 2019	<i>Realisasi</i> 2020 2021		<i>Target</i> 2022 2023 2024			
4	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik							
4.1	Indeks Pelayanan Publik Nasional (nilai) ⁴⁾	3,63	3,84	3,79	3,80 ⁶⁾	3,90 ⁶⁾	4,00 ⁶⁾	
5	Terjaganya Keutuhan Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia							
5.1	Persentase Luas Wilayah NKRI yang Dapat Dijaga Keutuhannya (%) ⁵⁾	100	100	100	100	100	100	
Sumber: 1) BPS; 2) Kemenkominfo; 3) Kemenlu; 4) KemenPAN-RB; 5) Kemenhan. Keterangan: a) penyesuaian dengan hasil penghitungan IDI menggunakan metode baru per Juni 2022; b) Indeks Peran dan Pengaruh Indonesia tahun 2022-2024 mengalami penyempurnaan formulasi penghitungan dengan konversi indeks berdasarkan skala guna mencerminkan tingkatan peran dan pengaruh dalam indeks; c) penghitungan IPH pada tahun 2020 dan tahun-tahun berikutnya dilakukan dengan menggunakan metode pengumpulan data dan penghitungan, kerangka berpikir melalui pilar, variabel dan indikator yang baru dan berbeda dengan IPH pada tahun 2015-2019 sehingga tidak dapat dibandingkan dengan nilai capaian IPH 2019; d) penghitungan nilai Indeks Pembangunan Hukum (IPH) 2021 dilakukan pada tahun 2022; e) penghitungan nilai IPH dilakukan pada T+1, sehingga penghitungan nilai IPH 2022 akan dilakukan pada tahun 2023, penghitungan nilai IPH 2023 akan dilakukan pada tahun 2024, dan penghitungan nilai IPH 2024 akan dilakukan pada tahun 2025; dan f) akan dikonfirmasi lebih lanjut dengan KemenPAN-RB.								



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

No.	Perihal Perubahan	Pemutakhiran RKP Tahun 2023					
313	Perubahan Tabel 4.20 dalam halaman IV.108	<p style="margin: 0;">Tabel 4.20 Sasaran, Indikator, dan Target PP dari PN 7 Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik</p>					
No.	Sasaran/Indikator	Baseline 2019	Realisasi		Target		
			2020	2021	2022	2023	2024
PP 1. Konsolidasi Demokrasi							
Terwujudnya Stabilitas Politik yang Kondusif serta Komunikasi Publik yang Efektif, Integratif, dan Partisipatif							
1.1	IDI Aspek Kapasitas Lembaga Demokrasi ^{a)} (nilai)	78,73	75,66	75,67	79,31	81,51	83,71
1.2	IDI Aspek Kebebasan ^{a)} (nilai)	77,20	79,40	79,72	75,90	74,21	72,53
1.3	IDI Aspek Kesetaraan ^{a)} (nilai)	70,71	67,85	78,86	81,08	81,51	81,94
1.4	Jumlah Regulasi/Kebijakan Tata Kelola Informasi dan Komunikasi Publik di Pusat dan Daerah yang Terintegrasi Sesuai Asas-asas Keterbukaan Informasi Publik (dokumen)	3	6	2	3	5	2
PP 2. Optimalisasi Kebijakan Luar Negeri							
Meningkatnya Efektivitas Diplomasi dan Pemanfaatan Kerja Sama Pembangunan Internasional							
2.1	Jumlah Forum yang Dipimpin oleh Indonesia pada Tingkat Regional dan Multilateral (forum)	8	20	48	13	14	16
2.2	Indeks Citra Indonesia di Dunia Internasional (nilai)	3,78	3,82	3,98	3,90	3,95	4,00
2.3	Indeks Pelayanan dan Pelindungan WNI di Luar Negeri (nilai)	89,91 ^{b)}	88,35	92,61	90,00	91,00	92,00
PP 3. Penegakan Hukum Nasional							
Meningkatnya Penegakan dan Pelayanan Hukum serta Akses terhadap Keadilan							
3.1	Indeks Perilaku Anti Korupsi (nilai)	3,70	3,84	3,88	4,06	4,09	4,14



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

No.	Perihal Perubahan	Pemutakhiran RKP Tahun 2023						
314	Perubahan Tabel 4.20 dalam halaman IV.109	No.	Sasaran/Indikator	<i>Baseline</i> 2019	<i>Realisasi</i>		<i>Target</i>	
					2020	2021	2022	2023 2024
		PP 4. Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola						
		Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik melalui perbaikan Tata Kelola dan Birokrasi						
		4.1	Indeks Pelayanan Publik (nilai)					
		4.1.1	Kementerian/Lembaga	3,83	4,00	4,00	4,00	4,10 4,20
		4.1.2	Provinsi	3,36	3,70	3,88	3,80	3,90 4,00
		4.1.3	Kabupaten/Kota	3,42	3,65	3,27	3,60	3,70 3,80
		PP 5. Menjaga Stabilitas Keamanan Nasional						
		Terjaganya Stabilitas Pertahanan dan Keamanan						
		5.1	Indeks Kekuatan Militer (nilai)	0,28	0,26	0,22	0,24	0,21 0,20
		5.2	Indeks Terorisme Global (nilai)	5,07	4,63	5,5 ^{e)}	4,34	4,29 4,24
		5.3	Persentase Orang yang Merasa Aman Berjalan Sendirian di Area Tempat Tinggalnya (%) ^{d)}	53,32	62,80	62,80 ^{e)}	>55	>60 >60
		5.4	Indeks Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (nilai)	4,23 ^{h)}	4,23	3,91	3,20	3,30 3,40
		Sumber: Kementerian PPN/Bappenas, 2022.						
		Keterangan: a) penyesuaian dengan hasil penghitungan IDI menggunakan metode baru per Juni 2022; b) data <i>baseline</i> 2019 menggunakan metode perhitungan lama; c) disesuaikan dengan <i>Global Terrorism Index (GTI)</i> 2021 yang dipublikasikan oleh Vision of Humanity pada bulan Maret 2022; d) indikator nasional yang sesuai dengan indikator global untuk SDGs; e) data tahun 2020; dan f) indikator baru tahun 2020.						
315	Perubahan alinea kedua dalam halaman IV.110	Selain itu, kerja sama pembangunan internasional akan terus diperkuat untuk mendorong transformasi ekonomi melalui (1) penguatan pemberian hibah yang efektif; (2) peningkatan partisipasi aktor nonpemerintah dalam kerja sama pembangunan internasional termasuk KSST untuk mendorong sektor ekonomi yang produktif, mitigasi krisis iklim, dan penguatan arsitektur kesehatan global melalui pendekatan kemitraan multi pihak (KMP); (3) penguatan sinergi diplomasi publik untuk diplomasi komoditas berkelanjutan mendukung pemulihan pariwisata dan meningkatkan citra sebagai stabilisator di kawasan; serta (4) penguatan kepemimpinan Indonesia melalui (a) keanggotaan di berbagai forum/organisasi internasional antara lain, (i) Meksiko, Indonesia, Korea Selatan, Turki dan Australia (MIKTA); (ii) United Nation Social Economic and Social Council (ECOSOC); (iii) pencalonan di <i>Executive Board UNESCO (2023-2027)</i> ; (b) peningkatan peran dalam mendorong pemajuan Hak Asasi Manusia (HAM), serta perdamaian dan stabilitas keamanan global, seperti melalui Misi Pemeliharaan Perdamaian Perserikatan Bangsa-Bangsa (MPP PBB) dan penyampaian <i>compliance</i> terhadap pemenuhan HAM; dan (c) pengukuran pemanfaatan partisipasi Indonesia dalam forum/OI.						
316	Perubahan alinea keempat dalam IV.110	Kegiatan-kegiatan penting pada bidang aparatur negara dan transformasi birokrasi, antara lain (1) penerapan platform tunggal digital ekosistem manajemen ASN, (2) integrasi portal pembelajaran dan pelatihan ASN, (3) koordinasi percepatan penerapan manajemen talenta ASN, (4) revitalisasi sistem rekrutmen ASN, (5) penerapan kebijakan manajemen penghargaan ASN berbasis kinerja, (6) penegakan disiplin dan pengawasan atas netralitas						



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

No.	Perihal Perubahan	Pemutakhiran RKP Tahun 2023
	ASN, (7) integrasi layanan pada portal pelayanan publik (<i>e-services</i>), (8) Jaringan Inovasi Pelayanan Publik Nasional, (9) pengaduan pelayanan publik yang diselesaikan, (10) koordinasi percepatan implementasi kebijakan SPBE, (11) koordinasi percepatan reformasi birokrasi dan akuntabilitas kinerja pembangunan nasional (12) pemetaan proses bisnis dan penataan kelembagaan tematik, (13) koordinasi percepatan dan penerapan Sistem Informasi Kearsipan Dinamis Terintegrasi (SRIKANDI) di instansi pusat dan daerah.	
317	Perubahan Infografis <i>Major Project</i> Penguatan NSOC-SOC dan Pembentukan 121 CSIRT dalam halaman IV.111	<p style="text-align: center;">MP Penguatan NSOC-SOC dan Pembentukan 121 CSIRT</p> <ul style="list-style-type: none"> • Digitalisasi telah menjadi gaya hidup serta <i>mainstream</i> kehidupan saat ini dengan pengguna internet 64% di Indonesia; • Tingginya ancaman dan serangan siber ke sektor pemerintah belum diikuti dengan kerja sama keamanan siber yang terintegrasi antara pemerintah pusat dan daerah; • Keterbatasan SDM di bidang teknologi dan keamanan siber; • Belum ada mekanisme integrasi dan <i>sharing data</i> serta informasi terkait serangan siber antara <i>stake holder</i> terkait; • Belum adanya strategi pertahanan dan keamanan nasional dalam menghadapi siber; • Belum ada pusat penanganan keamanan siber terpadu yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat sebagai sumber informasi, aduan keamanan siber, serta <i>platform sharing</i> bagi <i>stakeholder</i> terkait. <p>Urgensi</p> <p>Lokasi Pusat dan Daerah (31 K/L dan 3 Daerah).</p> <p>Pelaksana Penanggung Jawab Proyek: • BSSN. Lintas K/L: • Kemhan, BIN, Polri, Kejaksaan RI.</p> <p>Pendanaan dan Investasi Sumber: K/L. Alokasi: Rp232,66 M [K/L].</p> <p>Highlight Proyek</p> <p>Impact/Outcome/Output</p> <ul style="list-style-type: none"> • Terwujudnya sistem proteksi yang lebih <i>agile</i> melalui pengembangan sistem dan infrastruktur perangkat intelijen siber sebanyak 8 unit; • Terwujudnya kapabilitas bersama (para pemangku kepentingan) yaitu sebanyak 295 orang yang mengikuti pelatihan pengelolaan keamanan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik; • Meningkatnya kemampuan bertahan secara proaktif yang meliputi 1.800 orang lulusan <i>National Cyber Exercise Drill Test</i> dan Program <i>Born to Defense</i> untuk SDM pengelola keamanan siber sektor IKN serta 3 unit prasarana bidang pertahanan dan keamanan siber; • Terwujudnya sistem keamanan siber integratif antara pusat dan daerah yang meliputi 35 lembaga; • Meningkatnya postur keamanan dan ketahanan siber (<i>cyber security and resilience</i>) meliputi 303 operasi, 311 perkara yang ditangani, dan 2 kesepakatan kerja sama bidang keamanan siber. <p>Pembangunan dan Penguatan Tim Cepat Tanggap Keamanan Siber</p> <ul style="list-style-type: none"> • Tim Tanggap Insiden Siber (CSIRT) pada Sektor Pemerintah yang Teregistrasi [K/L]; • Tim Tanggap Insiden Siber (CSIRT) pada Sektor Pemerintah Daerah yang Teregistrasi [K/L]; <p>Penguatan Keamanan dan Ketahanan Siber</p> <ul style="list-style-type: none"> • Penguatan Operasi Intelijen Siber [K/L]; <p>Penyelesaian Kejahatan Siber</p> <ul style="list-style-type: none"> • Penanganan Tindak Pidana Siber (PN) [K/L]; • Penanganan Perkara Siber [K/L]; <p>Pembangunan Pertahanan Siber</p> <ul style="list-style-type: none"> • Siber [K/L]; • Jumlah Pemeliharaan atau perawatan atau peningkatan alat Pertahanan Siber TNI AD [K/L].
318	Perubahan Infografis <i>Major Project</i> Penguatan Keamanan Laut di Natuna dalam halaman IV.111	<p style="text-align: center;">MP Penguatan Keamanan Laut di Natuna</p> <ul style="list-style-type: none"> • Adanya eskalasi ketegangan di Natuna; • Masih adanya risiko perompakan, kekerasan dan tindak kejahatan di laut, <i>Illegal, Unreported, and Unregulated Fishing</i> (IUUF), <i>Transnational Crimes</i> serta lemahnya <i>system</i> pengelolaan pengamanan navigasi. <p>Urgensi</p> <p>Lokasi Provinsi Kepulauan Riau</p> <p>Pelaksana Penanggung Jawab Proyek: • Kemhan dan Bakamla.</p> <p>Pendanaan dan Investasi Sumber: K/L. Alokasi: Rp178, 06 M [K/L].</p> <p>Highlight Proyek</p> <p>Impact/Outcome/Output</p> <ul style="list-style-type: none"> • Tidak adanya pelanggaran yurisdiksi di wilayah laut Natuna; • Meningkatnya kapasitas operasi keamanan laut di wilayah laut Natuna; • Tercapainya jumlah sarpras militer di Pulau Strategis; • Terwujudnya pembangunan Pangkalan Keamanan Laut di Pulau Setokok. <p>Pembangunan Sarana-Prasarana Pertahanan</p> <ul style="list-style-type: none"> • Sarpras Militer Pulau Strategis [K/L]; <p>Penguatan Kapasitas Operasi Keamanan Laut</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pembangunan Pangkalan Setokok [K/L].
319	Perubahan alinea ketiga dalam halaman IV.112	<p>Kebutuhan regulasi pada PN Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik pada tahun 2023 sebagai upaya mendukung penataan regulasi nasional diarahkan untuk mendukung pelaksanaan kerangka regulasi dalam RPJMN 2020-2024, yang meliputi</p> <p>(1) Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas UU No. 37/2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang;</p>



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

No.	Perihal Perubahan	Pemutakhiran RKP Tahun 2023																								
		(2) Rancangan Undang-Undang tentang Jaminan Benda Bergerak; (3) Rancangan Undang-Undang tentang Badan Usaha; (4) Rancangan Undang-Undang tentang Hukum Acara Perdata; (5) Revisi UU No. 16/2011 tentang Bantuan Hukum; (6) Revisi UU No. 39/1999 tentang Hak Asasi Manusia (HAM); (7) Rancangan Undang-Undang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi; (8) Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset Tindak Pidana; dan (9) Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Pemerintah No. 5/2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik.																								
320	Perubahan alinea pertama dalam halaman IV.113	Prioritas Nasional Rencana Kerja Pemerintah (RKP) tahun 2023 mengacu pada pencapaian target RPJMN 2020–2024 dengan ketersediaan anggaran belanja K/L yang diperkirakan lebih ketat dari tahun sebelumnya. Hal ini membuat pemilihan kegiatan/proyek harus lebih selektif dengan mempertimbangkan kesiapan dan penuntasannya. Meskipun pada tahun 2023 masih dibayangi dengan kondisi pandemi dan upaya <i>recovery</i> , penekanan pendanaan juga akan diarahkan pada kebijakan untuk penyelesaian pembangunan infrastruktur, percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem, penanggulangan pengangguran disertai dengan peningkatan <i>decent job</i> , peningkatan kualitas sumber daya manusia (kesehatan dan pendidikan), pemulihan dunia usaha, revitalisasi industri, pembangunan rendah karbon, dan program-program pembangunan yang terkait langsung dengan peningkatan produktivitas termasuk pembangunan Ibu Kota Nusantara.																								
321	Perubahan Tabel 4.21 dalam halaman IV.113	<p style="text-align: center;">Tabel 4.21 Alokasi pada Prioritas Nasional Tahun 2023</p> <table border="1"><thead><tr><th>No.</th><th>Prioritas Nasional</th><th>Alokasi (Rp. Triliun)</th></tr></thead><tbody><tr><td>1.</td><td>Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan</td><td>54,7</td></tr><tr><td>2.</td><td>Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan</td><td>124,9</td></tr><tr><td>3.</td><td>Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing</td><td>255,5</td></tr><tr><td>4.</td><td>Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan</td><td>6,1</td></tr><tr><td>5.</td><td>Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar</td><td>108,0</td></tr><tr><td>6.</td><td>Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim</td><td>8,9</td></tr><tr><td>7.</td><td>Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik</td><td>57,6</td></tr></tbody></table> <p>Sumber: Kementerian PPN/Bappenas, 2022</p> <p>Catatan: a) Sesuai dengan pendekatan THIS, sebuah proyek dapat mendukung lebih dari 1 (satu) Prioritas Nasional; b) Alokasi Prioritas Nasional mencakup rincian belanja K/L, Dana Transfer Khusus Fisik dan KPBU. Belum memperhitungkan Investasi Badan Usaha (BUMN/Swasta).</p>	No.	Prioritas Nasional	Alokasi (Rp. Triliun)	1.	Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan	54,7	2.	Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan	124,9	3.	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing	255,5	4.	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	6,1	5.	Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar	108,0	6.	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim	8,9	7.	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	57,6
No.	Prioritas Nasional	Alokasi (Rp. Triliun)																								
1.	Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan	54,7																								
2.	Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan	124,9																								
3.	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing	255,5																								
4.	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	6,1																								
5.	Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar	108,0																								
6.	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim	8,9																								
7.	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	57,6																								



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

No.	Perihal Perubahan	Pemutakhiran RKP Tahun 2023
322	Perubahan alinea kedua dalam halaman IV.113 dan alinea pertama dalam halaman IV.114	Dalam mendorong peningkatan produktivitas untuk transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan dilakukan beberapa langkah strategis, yaitu percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem, peningkatan kualitas SDM, penanggulangan pengangguran disertai peningkatan <i>decent job</i> , mendorong pemulihan dunia usaha, revitalisasi industri dan penguatan riset terapan, pembangunan rendah karbon dan transmisi energi dan respon terhadap perubahan iklim, dan percepatan pembangunan infrastruktur dasar.
323	Perubahan alinea kedua dalam halaman IV.114	Dalam pelaksanaannya, percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem dilakukan melalui sistem jaminan sosial, modernisasi pertanian, dan pemerataan pembangunan. Untuk penanggulangan pengangguran disertai peningkatan <i>decent job</i> dilakukan melalui penyediaan lapangan usaha. Sedangkan untuk meningkatkan kualitas SDM dilakukan melalui Reformasi Sistem Kesehatan Nasional (Penerima Bantuan Iuran dalam Jaminan Kesehatan Nasional/Kartu Indonesia Sehat) dan perkuatan sistem pendidikan (Program Indonesia Pintar/Kartu Indonesia Pintar).
324	Penambahan alinea setelah alinea kedua dalam halaman IV.114	Selanjutnya, untuk mendorong pemulihan dunia usaha dilakukan melalui revitalisasi pariwisata dan pengembangan UMKM. Untuk percepatan pembangunan infrastruktur dasar dilakukan melalui penyediaan air bersih dan sanitasi, infrastruktur digital dan infrastruktur konektivitas. Dalam konteks pembangunan infrastruktur ini, dilakukan juga pengembangan fasilitas dasar di Ibu Kota Nusantara (IKN), antara lain pembangunan gedung dan penataan kawasan IKN, pembangunan jaringan interkoneksi (listrik), pembangunan jaringan telekomunikasi serta pembangunan infrastruktur ICT.
325	Penambahan alinea setelah alinea ketiga dalam halaman IV.114	Selain penekanan pada 14 <i>Major Project</i> tersebut, RKP 2023 juga mendukung persiapan Pemilihan Umum Presiden dan Pemilihan Kepala Daerah serentak yang akan diselenggarakan pada tahun 2024.
326	Perubahan alinea keempat dalam halaman IV.114	Kondisi ketersediaan anggaran yang terbatas mendorong pemerintah untuk lebih selektif dalam menentukan kegiatan ataupun proyek yang akan dilaksanakan. Selain mempertimbangkan kesiapan dan penuntasannya, integrasi kebijakan merupakan salah satu pilihan strategi yang akan dilaksanakan. Sebagai contoh <i>Major Project</i> yang bersifat lintas sektor atau kewilayahan seperti Destinasi Pariwisata Prioritas dan <i>Food Estate</i> .
327	Perubahan alinea kelima dalam halaman IV.114	Selain integrasi kebijakan, dilakukan juga penguatan integrasi sumber pendanaan, baik dari APBN seperti melalui belanja K/L, belanja non-K/L (subsidi/ <i>Public Service Obligation</i>), dan Transfer ke Daerah (DAK, Hibah Daerah), maupun dari non-APBN seperti swasta dan BUMN. Dengan kondisi APBN yang terbatas, keterlibatan BUMN dan swasta sangat penting untuk didorong agar pelaksanaan pembangunan dapat berjalan lebih optimal.
328	Perubahan alinea pertama dalam halaman V.2	Untuk mendukung pencapaian prioritas nasional, diperlukan kerangka kelembagaan sebagai berikut: Prioritas Nasional 3 “Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing” (1) Pembentukan Gugus Tugas Registrasi Sosial Ekonomi (Regsosek) Usulan KK pada Prioritas Nasional 3 ini sesuai dengan amanat RKP 2023, yakni Penguatan Pelaksanaan Perlindungan Sosial, yang



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

No.	Perihal Perubahan	Pemutakhiran RKP Tahun 2023
		<p>didukung dengan UU No. 6/2014 tentang Desa, serta UU No. 13/2011 tentang Fakir Miskin. Reformasi sistem perlindungan sosial khususnya di masa pascapandemi COVID-19 difokuskan pada penyempurnaan penyelenggaraan program bantuan dan jaminan sosial yang lebih akurat, terintegrasi, dan adaptif. Salah satunya melalui peningkatan keterlibatan aktif serta kapasitas pemerintah pusat dan daerah dalam melakukan pemutakhiran, perluasan, dan transformasi data penduduk miskin dan rentan menjadi registrasi sosial-ekonomi melalui monografi desa/kelurahan digital secara berkala.</p> <p>Terkait hal tersebut, pembentukan Gugus Tugas Registrasi Sosial Ekonomi (Regsosek) dilakukan untuk menguatkan dan mengintegrasikan kelembagaan yang sudah ada terutama dalam pemutakhiran Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS), perencanaan dan penganggaran berbasis data, serta penyelenggaraan layanan sosial dan rujukan bagi kelompok miskin dan rentan. Pemutakhiran DTKS langsung oleh desa/kelurahan menggunakan sistem digitalisasi monografi desa/kelurahan berperan penting untuk membantu ketepatan sasaran program dan memotong rantai birokrasi pemutakhiran data yang berlapis, yang bermuara pada pengalokasian APBN untuk perlindungan sosial yang berdayaguna lebih tinggi untuk mengentaskan kemiskinan.</p> <p>(2) Pembentukan Tim Koordinasi Nasional Revitalisasi Pendidikan Vokasi dan Pelatihan Vokasi (TKNV)</p> <p>Usulan pembentukan Tim Koordinasi Nasional Revitalisasi Pendidikan Vokasi dan Pelatihan Vokasi (TKNV) dan Tim Koordinasi Daerah Revitalisasi Pendidikan Vokasi dan Pelatihan Vokasi (TKDV) pada Prioritas Nasional 3 telah diamanatkan dalam RPJMN 2020-2024 sebagai salah satu prioritas penataan kelembagaan dalam rangka mendukung kebijakan peningkatan akses, mutu, dan relevansi penyelenggaraan pendidikan vokasi dan pelatihan vokasi. Dengan pembentukan TKNV dan TKDV, diharapkan dapat terpenuhi kebutuhan pasar kerja dan terjadi penguatan sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dunia usaha, dunia industri, swasta, dan pemangku kepentingan lainnya.</p> <p>Pembentukan TKNV dan TKDV ini telah diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2022 mengenai Revitalisasi Pendidikan Vokasi dan Pelatihan Vokasi dan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Nomor 5 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Tim Koordinasi Nasional Revitalisasi Pendidikan Vokasi dan Pelatihan Vokasi.</p> <p>Pembentukan Tim Koordinasi ini bertujuan untuk a) mengoordinasikan, mensinergikan, dan mengevaluasi penyelenggaraan revitalisasi pendidikan vokasi dan pelatihan vokasi secara efektif, menyeluruh, dan terintegrasi dengan melibatkan pemangku kepentingan terkait di tingkat pusat dan daerah; dan b) menyusun strategi nasional pendidikan vokasi dan pelatihan vokasi sebagai pedoman revitalisasi pendidikan vokasi dan pelatihan vokasi.</p> <p>Selanjutnya, melalui revitalisasi lembaga pendidikan dan pelatihan vokasi diharapkan akan mengurangi tingkat pengangguran terbuka, khususnya SDM yang berlatar belakang pendidikan vokasi.</p> <p>(3) Pembentukan Tim Koordinasi Daerah Revitalisasi Pendidikan Vokasi dan Pelatihan Vokasi (TKDV)</p> <p>Dalam rangka mendukung proses pemulihan ekonomi di berbagai wilayah Indonesia, salah satu upaya strategis diarahkan pada program</p>



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

No.	Perihal Perubahan	Pemutakhiran RKP Tahun 2023
		<p>peningkatan keahlian tenaga kerja melalui revitalisasi pendidikan vokasi dan pelatihan vokasi. Hal ini diwujudkan dengan penguatan kelembagaan pelatihan vokasi di seluruh Indonesia untuk menjamin keterpaduan berbagai program pelatihan vokasi yang dilakukan baik oleh pemerintah pusat, daerah, lembaga swasta maupun instansi vertikal lainnya. Berdasarkan hal tersebut, maka diperlukan upaya peningkatan koordinasi dan sinkronisasi antar pemangku kepentingan melalui Tim Koordinasi Daerah Revitalisasi Pendidikan Vokasi dan Pelatihan Vokasi (TKDV) untuk memenuhi kebutuhan kerja masa depan.</p> <p>Secara umum pembentukan TKDV bertujuan mewadahi koordinasi dan kolaborasi seluruh pemangku kepentingan agar perencanaan dan pelaksanaan kebijakan, strategi, dan program vokasi nasional dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien baik di tingkat pusat maupun daerah, serta sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan industri. TKDV diharapkan menjadi semacam forum besar yang memayungi berbagai bentuk forum lain yang lebih spesifik dan tematik. Guna mempercepat terbentuknya TKDV, pemangku kepentingan di daerah diharapkan dapat memanfaatkan modalitas dan jejaring yang sudah dimiliki, antara lain Pusat Pembangunan Keahlian (<i>Skill Development Center</i>) yang dapat ditransformasi menjadi TKDV.</p>
329	Penghapusan alinea pertama dalam halaman V.3	(dihapus)
330	Penambahan alinea sebelum alinea pertama dalam halaman V.7	<p>Kerangka regulasi yang bersifat lintas prioritas nasional adalah sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none">(1) Revisi Undang-Undang tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;(2) Rancangan Undang-Undang tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2025 – 2045.
331	Perubahan alinea pertama dalam halaman V.7 sampai alinea pertama dalam halaman V.8	<p>Kerangka regulasi yang mendukung pencapaian prioritas nasional yang memuat analisis urgensi dan target pelaksanaan pada RKP Tahun 2023, disampaikan sebagai berikut</p> <p>Prioritas Nasional 1 “Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan”</p> <p>A. Kebutuhan Kerangka Regulasi yang telah masuk ke dalam Prolegnas dan Progsun sebagai berikut</p> <ol style="list-style-type: none">(1) Rancangan Undang-Undang tentang Perkoperasian <p>Kerangka regulasi dibutuhkan untuk mendukung PP Penguatan Kewirausahaan, Usaha Mikro, Kecil Menengah (UMKM) dan Koperasi, serta KP Peningkatan Kapasitas, Jangkauan, dan Inovasi Koperasi. Kerangka regulasi ini akan menghapus UU No. 25/1992 tentang Perkoperasian dimana UU ini tidak dapat mengakomodir permasalahan koperasi yang terjadi saat ini. Dengan adanya RUU ini dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat untuk melakukan investasi/simpanan di koperasi. Selain itu, kerangka regulasi ini turut mendukung pencapaian beberapa MP Pengelolaan Terpadu UMKM.</p> <ol style="list-style-type: none">(2) Rancangan Peraturan Presiden tentang Strategi Nasional Perlindungan Konsumen



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

No.	Perihal Perubahan	Pemutakhiran RKP Tahun 2023
		<p>Kerangka regulasi dibutuhkan untuk mendukung PP Peningkatan Nilai Tambah, Lapangan Kerja, dan Investasi di Sektor Riil, dan Industrialisasi, serta KP Perbaikan Iklim Usaha dan Peningkatan Investasi, termasuk Reformasi Ketenagakerjaan. Kerangka Regulasi ini bertujuan sebagai penyesuaian atas kerangka pengaturan perlindungan konsumen di Indonesia sebelumnya yang diatur pada UU No. 8 Tahun 1999. Mempertimbangkan sektor perdagangan yang berkembang cepat seiring kemajuan teknologi informasi. Salah satunya ditandai dengan pertumbuhan <i>e-commerce</i> yang sedemikian pesat, maka diperlukan substansi pengaturan yang komprehensif dan akomodatif bagi konsumen maupun penyedia barang dan jasa sebagai bagian dari pelaksanaan kepastian hukum.</p> <p>(3) Rancangan Peraturan Presiden tentang Rencana Induk Pengembangan Industri Digital Indonesia Tahun 2023 – 2045</p> <p>Kerangka regulasi dibutuhkan untuk mendukung PP Peningkatan Nilai Tambah, Lapangan Kerja, dan Investasi di Sektor Riil, dan Industrialisasi dan PP Penguatan Pilar Pertumbuhan dan Daya Saing Ekonomi serta KP Peningkatan Nilai Tambah dan Daya Saing Produk dan Usaha Kreatif dan Digital dan KP Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Digital dan Industri 4.0. Kerangka regulasi ini bertujuan untuk mempermudah pelaksanaan kegiatan pemangku kepentingan terkait yang mendukung pengembangan industri digital nasional. Selain itu, kerangka regulasi ini turut mendukung pencapaian MP Industri 4.0 di Subsektor Prioritas.</p> <p>B. Kebutuhan Kerangka Regulasi yang belum masuk ke dalam Prolegnas dan Progsun sebagai berikut</p> <p>(1) Rancangan Peraturan Presiden tentang Rencana Induk Destinasi Pariwisata Nasional Raja Ampat</p> <p>Kerangka regulasi dibutuhkan untuk mendukung PP Peningkatan Nilai Tambah, Lapangan Kerja dan Investasi di Sektor Riil, dan Industrialisasi serta KP Peningkatan Daya Saing Destinasi dan Industri Pengolahan Pariwisata, termasuk wisata alam, yang didukung penguatan rantai pasok. Kerangka regulasi ini merupakan arahan dari Peraturan Presiden No. 14/2018 Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden No. 64/2014 tentang Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Kepariwisataaan, dan mendukung pelaksanaan Prioritas Nasional Sektor Pariwisata pada Peraturan Presiden No.18/2020 tentang RPJMN 2020-2024. Selain itu, kerangka regulasi ini turut mendukung pencapaian beberapa MP Destinasi Pariwisata Prioritas.</p> <p>(2) Rancangan Peraturan Presiden tentang Rencana Induk Destinasi Pariwisata Nasional Labuan Bajo</p> <p>Kerangka regulasi dibutuhkan untuk mendukung PP Peningkatan Nilai Tambah, Lapangan Kerja dan Investasi di Sektor Riil, dan Industrialisasi serta KP Peningkatan Daya Saing Destinasi dan Industri Pengolahan Pariwisata, termasuk wisata alam, yang didukung penguatan rantai pasok. Kerangka regulasi ini merupakan arahan dari Peraturan Presiden No. 14/2018 Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden No. 64/2014 tentang Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Kepariwisataaan, dan mendukung pelaksanaan Prioritas Nasional Sektor Pariwisata pada Peraturan Presiden No.18/2020 tentang</p>



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

No.	Perihal Perubahan	Pemutakhiran RKP Tahun 2023
		<p>RPJMN 2020-2024. Selain itu, kerangka regulasi ini turut mendukung pencapaian beberapa MP Destinasi Pariwisata Prioritas.</p>
(3)	Rancangan Peraturan Presiden tentang Rencana Induk Destinasi Pariwisata Nasional Bromo-Tengger-Semeru	<p>Kerangka regulasi dibutuhkan untuk mendukung PP Peningkatan Nilai Tambah, Lapangan Kerja dan Investasi di Sektor Rill, dan Industrialisasi serta KP Peningkatan Daya Saing Destinasi dan Industri Pengolahan Pariwisata, termasuk wisata alam, yang didukung penguatan rantai pasok. Kerangka regulasi ini merupakan arahan dari Peraturan Presiden No. 14/2018 Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden No. 64/2014 tentang Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Kepariwisata, dan mendukung pelaksanaan Prioritas Nasional Sektor Pariwisata pada Peraturan Presiden No.18/2020 tentang RPJMN 2020-2024. Selain itu, kerangka regulasi ini turut mendukung pencapaian beberapa MP Destinasi Pariwisata Prioritas.</p>
(4)	Rancangan Peraturan Presiden tentang Rencana Induk Destinasi Pariwisata Nasional Wakatobi	<p>Kerangka regulasi dibutuhkan untuk mendukung PP Peningkatan Nilai Tambah, Lapangan Kerja dan Investasi di Sektor Rill, dan Industrialisasi serta KP Peningkatan Daya Saing Destinasi dan Industri Pengolahan Pariwisata, termasuk wisata alam, yang didukung penguatan rantai pasok. Kerangka regulasi ini merupakan arahan dari Peraturan Presiden No. 14/2018 Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden No. 64/2014 tentang Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Kepariwisata, dan mendukung pelaksanaan Prioritas Nasional Sektor Pariwisata pada Peraturan Presiden No.18/2020 tentang RPJMN 2020-2024. Selain itu, kerangka regulasi ini turut mendukung pencapaian beberapa MP Destinasi Pariwisata Prioritas.</p>
(5)	Rancangan Peraturan Presiden tentang Rencana Induk Destinasi Pariwisata Nasional Toba	<p>Kerangka regulasi dibutuhkan untuk mendukung PP Peningkatan Nilai Tambah, Lapangan Kerja dan Investasi di Sektor Rill, dan Industrialisasi serta KP Peningkatan Daya Saing Destinasi dan Industri Pengolahan Pariwisata, termasuk wisata alam, yang didukung penguatan rantai pasok. Kerangka regulasi ini merupakan arahan dari Peraturan Presiden No. 14/2018 Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden No. 64/2014 tentang Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Kepariwisata, dan mendukung pelaksanaan Prioritas Nasional Sektor Pariwisata pada Peraturan Presiden No.18/2020 tentang RPJMN 2020-2024. Selain itu, kerangka regulasi ini turut mendukung pencapaian beberapa MP Destinasi Pariwisata Prioritas.</p>
(6)	Rancangan Peraturan Presiden tentang Rencana Induk Destinasi Pariwisata Nasional Borobudur-Yogyakarta-Prambanan	<p>Kerangka regulasi dibutuhkan untuk mendukung PP Peningkatan Nilai Tambah, Lapangan Kerja dan Investasi di Sektor Rill, dan Industrialisasi serta KP Peningkatan Daya Saing Destinasi dan Industri Pengolahan Pariwisata, termasuk wisata alam, yang</p>



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

No.	Perihal Perubahan	Pemutakhiran RKP Tahun 2023
		<p>didukung penguatan rantai pasok. Kerangka regulasi ini merupakan arahan dari Peraturan Presiden No. 14/2018 Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden No. 64/2014 tentang Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Kepariwisata, dan mendukung pelaksanaan Prioritas Nasional Sektor Pariwisata pada Peraturan Presiden No.18/2020 tentang RPJMN 2020-2024. Selain itu, kerangka regulasi ini turut mendukung pencapaian beberapa MP Destinasi Pariwisata Prioritas.</p> <p>(7) Rancangan Peraturan Presiden tentang Transformasi Ekonomi Bali</p> <p>Kerangka regulasi dibutuhkan untuk mendukung KP Pengembangan Kawasan Strategis; KP Pengembangan Kawasan Perkotaan; KP Perluasan Akses, serta Penyediaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Dasar, Ekonomi, dan Konektivitas; serta KP Optimalisasi Pemanfaatan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik. Kerangka regulasi ini bertujuan sebagai kerangka pengaturan yang mendorong pengembangan sumber- sumber ekonomi baru dan diversifikasi ekonomi bagi Bali, pertumbuhan penyerapan tenaga kerja, peningkatan aksesibilitas, serta transformasi digital. Selain itu, kerangka regulasi ini turut mendukung pencapaian beberapa MP seperti MP Pengelolaan Terpadu UMKM, MP Industri 4.0 pada 7 (tujuh) Subsektor Industri Prioritas, MP Destinasi Pariwisata Nasional. Dalam kaitannya dengan PN lain, KR juga dibutuhkan untuk mendukung pencapaian PN 2 Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan; PN 3 Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing; serta PN 7 Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik.</p>
332	Perubahan alinea kedua dalam halaman V.8 sampai alinea ketiga dalam halaman V.11	<p>Prioritas Nasional 2 “Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan”</p> <p>A. Kebutuhan Kerangka Regulasi yang telah masuk ke dalam Prolegnas dan Progsun sebagai berikut</p> <p>(1) Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara</p> <p>Kerangka regulasi dibutuhkan untuk mendukung PP Pembangunan Wilayah Kalimantan serta KP Pengembangan Kawasan Perkotaan. Kerangka regulasi ini diperlukan untuk perubahan-perubahan pada Undang-Undang No. 3/2022 tentang Ibu Kota Negara. Kerangka regulasi ini diperlukan dalam rangka pembangunan dan pemindahan Ibu Kota Negara. Selain itu, kerangka regulasi ini turut mendukung pencapaian MP Pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN).</p> <p>(2) Revisi Peraturan Presiden tentang Nomor 58 Tahun 2014 tentang Kawasan Borobudur dan Sekitarnya</p> <p>Kerangka regulasi dibutuhkan untuk mendukung PP Pengembangan Wilayah Jawa-Bali serta KP Pengembangan Kawasan Strategis. Kerangka regulasi ini telah masuk dalam waktu revisi serta muatan perlu disesuaikan dengan muatan UU No. 11/2020 tentang Cipta Kerja dan PP No. 12/2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang. Kerangka regulasi ini juga dilakukan untuk mengakomodasi dinamika pembangunan yang ditetapkan berbagai peraturan perundang-undangan lainnya</p>



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

No.	Perihal Perubahan	Pemutakhiran RKP Tahun 2023
		<p>seperti Perpres No. 18/2020 tentang RPJMN 2020-2024, Perpres No. 79/2019 tentang Percepatan Pembangunan Ekonomi Kawasan Kendal-Semarang-Salatiga-Demak-Grobogan, Kawasan Purworejo-Wonosobo-Magelang-Temanggung, dan Kawasan Brebes-Tegal-Pemalang serta Rencana Induk Destinasi Pariwisata Super Prioritas (DPSP) Borobudur dan sekitarnya. Selain itu, kerangka regulasi ini turut mendukung pencapaian MP Pembangunan Destinasi Pariwisata Prioritas Borobudur dan Sekitarnya.</p>
		<p>(3) Revisi Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Perkotaan Denpasar, Badung, Gianyar, dan Tabanan (Sarbagita)</p> <p>Kerangka regulasi dibutuhkan untuk mendukung PP Pengembangan Wilayah Jawa-Bali serta KP Pengembangan Kawasan Perkotaan. Kerangka regulasi ini telah masuk dalam waktu revisi serta muatan perlu disesuaikan dengan muatan UU No. 11/2020 tentang Cipta Kerja dimana terdapat sinkronisasi regulasi pengaturan pemanfaatan ruang tingkat nasional yang mencakup matra darat dan matra laut. Revisi RTRWN juga dilakukan untuk mengakomodasi dinamika pembangunan yang ditetapkan berbagai peraturan perundang-undangan lainnya seperti: Perpres No. 18/2020 tentang RPJMN 2020-2024 dan Perpres No. 109/2020 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional (PSN). Selain itu, kerangka regulasi ini turut mendukung pencapaian MP Pengembangan Wilayah Metropolitan Denpasar (Sarbagita).</p>
		<p>(4) Peraturan Presiden Republik Indonesia tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Subak-Bali <i>Landscape</i></p> <p>Kerangka regulasi dibutuhkan untuk mendukung PP Pengembangan Wilayah Jawa – Bali serta KP Pengembangan Kawasan Perkotaan. Kerangka regulasi ini merujuk pada Pasal 6 UU No. 11/2020 tentang Cipta Kerja terkait peningkatan ekosistem investasi yang dilakukan melalui penyederhanaan persyaratan dasar perizinan berusaha melalui pemberian Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR) yang didasarkan pada RDTR. Kerangka regulasi ini bertujuan untuk melestarikan Kawasan Subak-Bali <i>Landscape</i> sebagai warisan budaya dunia melalui perwujudan tata ruang Kawasan Subak-Bali <i>Landscape</i> yang berkualitas sebagai daerah irigasi tradisional, kawasan pertanian pangan tradisional, dan kawasan kegiatan adat yang ditetapkan sebagai warisan budaya dunia, serta mengembangkan ekonomi lokal masyarakat dengan mendorong komoditas pertanian dan pariwisata yang berdaya saing serta berbasis pada adat budaya dan kearifan lokal masyarakat sesuai prinsip pembangunan berkelanjutan.</p>
		<p>(5) Peraturan Presiden Republik Indonesia tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Ekosistem Leuser</p> <p>Kerangka regulasi dibutuhkan untuk mendukung PP Pengembangan Wilayah Sumatera serta KP Pengembangan Kawasan Perkotaan. Kerangka regulasi ini merupakan salah satu kawasan yang ditetapkan sebagai Kawasan Strategis Nasional Sudut Kepentingan Fungsi dan Daya Dukung Lingkungan Hidup dalam PP No. 13/2017 tentang Perubahan Atas PP No. 26/2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional. Penyusunan Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Nasional (RTR KSN) dilakukan untuk mengembangkan, melestarikan, melindungi dan/atau mengintegrasikan pembangunan dan pengelolaan</p>



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

No.	Perihal Perubahan	Pemutakhiran RKP Tahun 2023
		<p>kawasan yang bernilai strategis nasional dalam mendukung penataan ruang wilayah nasional sesuai dengan amanat PP No. 21/2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang.</p>
(6)	Revisi Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang RTR Pulau Kalimantan	<p>Kerangka regulasi dibutuhkan untuk mendukung PP Pembangunan Wilayah Kalimantan serta KP Pengembangan Kawasan Perkotaan. Kerangka regulasi ini merupakan rencana rinci tata ruang sebagai penjabaran Rencana Tata Ruang (RTR) Pulau Kalimantan yang bertujuan sebagai acuan bagi penyusunan rencana teknis sektor dan pelaksanaan pengendalian pemanfaatan ruang serta dalam penyusunan Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan (RTBL) di wilayah Kalimantan dan wilayah pemerintahan IKN. Selain itu, kerangka regulasi ini turut mendukung pencapaian MP Pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN).</p>
(7)	Rancangan Peraturan Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara tentang Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) WP IKN Selatan	<p>Kerangka regulasi dibutuhkan untuk mendukung PP Pembangunan Wilayah Kalimantan serta KP Pengembangan Kawasan Perkotaan. Kerangka regulasi ini mengacu pada UU No. 3/2022 tentang Ibu Kota Negara, Peraturan Presiden tentang Perincian Rencana Induk, secara umum penyelenggaraan penataan ruang memiliki tujuan untuk menyeimbangkan aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan sehingga mampu mengembangkan ruang yang terbatas secara produktif dan berkelanjutan. Berdasarkan tujuan tersebut, kepentingan sosial dan masyarakat tentunya menjadi aspek penting dalam penyusunan Peraturan Kepala Badan Otorita tentang RDTR WP IKN Selatan. Selain itu, kerangka regulasi ini turut mendukung pencapaian MP Pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN).</p>
(8)	Peraturan Kepala Otorita tentang Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) WP IKN Simpang Samboja	<p>Kerangka regulasi dibutuhkan untuk mendukung PP Pembangunan Wilayah Kalimantan serta KP Pengembangan Kawasan Perkotaan. Kerangka regulasi ini mengacu pada UU No. 3/2022 tentang Ibu Kota Negara, Peraturan Presiden tentang Perincian Rencana Induk, secara umum penyelenggaraan penataan ruang memiliki tujuan untuk menyeimbangkan aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan sehingga mampu mengembangkan ruang yang terbatas secara produktif dan berkelanjutan. Berdasarkan tujuan tersebut, kepentingan sosial dan masyarakat tentunya menjadi aspek penting dalam penyusunan Peraturan Kepala Badan Otorita tentang RDTR WP IKN Simpang Samboja. Selain itu, kerangka regulasi ini turut mendukung pencapaian MP Pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN).</p>
(9)	Peraturan Kepala Otorita tentang Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) WP IKN Utara	<p>Kerangka regulasi dibutuhkan untuk mendukung PP Pembangunan Wilayah Kalimantan serta KP Pengembangan Kawasan Perkotaan. Kerangka regulasi ini mengacu pada UU No. 3/2022 tentang Ibu Kota Negara, Peraturan Presiden tentang Perincian Rencana Induk, secara umum penyelenggaraan penataan ruang memiliki tujuan untuk menyeimbangkan aspek ekonomi,</p>



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

No.	Perihal Perubahan	Pemutakhiran RKP Tahun 2023
		<p>sosial, dan lingkungan sehingga mampu mengembangkan ruang yang terbatas secara produktif dan berkelanjutan. Berdasarkan tujuan tersebut, kepentingan sosial dan masyarakat tentunya menjadi aspek penting dalam penyusunan Peraturan Kepala Badan Otorita tentang RDTR WP IKN Utara. Selain itu, kerangka regulasi ini turut mendukung pencapaian MP Pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN).</p>
		<p>(10) Peraturan Kepala Otorita tentang Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) WP IKN Kuala Samboja</p> <p>Kerangka regulasi dibutuhkan untuk mendukung PP Pembangunan Wilayah Kalimantan serta KP Pengembangan Kawasan Perkotaan. Kerangka regulasi ini mengacu pada UU No. 3/2022 tentang Ibu Kota Negara, Peraturan Presiden tentang Perincian Rencana Induk, secara umum penyelenggaraan penataan ruang memiliki tujuan untuk menyeimbangkan aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan sehingga mampu mengembangkan ruang yang terbatas secara produktif dan berkelanjutan. Berdasarkan tujuan tersebut, kepentingan sosial dan masyarakat tentunya menjadi aspek penting dalam penyusunan Peraturan Kepala Badan Otorita tentang RDTR WP IKN Kuala Samboja. Selain itu, kerangka regulasi ini turut mendukung pencapaian MP Pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN).</p>
		<p>(11) Peraturan Kepala Otorita tentang Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) WP IKN Muara Jawa</p> <p>Kerangka regulasi dibutuhkan untuk mendukung PP Pembangunan Wilayah Kalimantan serta KP Pengembangan Kawasan Perkotaan. Kerangka regulasi ini mengacu pada UU No. 3/2022 tentang Ibu Kota Negara, Peraturan Presiden tentang Perincian Rencana Induk, secara umum penyelenggaraan penataan ruang memiliki tujuan untuk menyeimbangkan aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan sehingga mampu mengembangkan ruang yang terbatas secara produktif dan berkelanjutan. Berdasarkan tujuan tersebut, kepentingan sosial dan masyarakat tentunya menjadi aspek penting dalam penyusunan Peraturan Kepala Badan Otorita tentang RDTR WP IKN Muara Jawa. Selain itu, kerangka regulasi ini turut mendukung pencapaian MP Pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN).</p>
		<p>B. Kebutuhan Kerangka Regulasi yang belum masuk ke dalam Prolegnas dan Progsun sebagai berikut</p> <p>(1) Rancangan Undang-Undang tentang Perkotaan</p> <p>Kerangka regulasi dibutuhkan untuk mendukung PP Pembangunan Wilayah Sumatera, Jawa-Bali, Nusa Tenggara, Kalimantan, Sulawesi, Maluku, dan Papua, serta KP Pengembangan Kawasan Perkotaan. Kerangka regulasi ini bertujuan sebagai kerangka pengaturan dalam mengatasi berbagai permasalahan dan tantangan perkotaan yang semakin kompleks, serta untuk mewujudkan pembangunan dan pengelolaan perkotaan Indonesia di masa depan yang berkelanjutan secara lingkungan, sosial, dan ekonomi. Selain itu, kerangka regulasi ini turut mendukung pencapaian beberapa MP seperti MP Pengembangan Wilayah Metropolitan (WM): Palembang, Denpasar, Banjarmasin, Makassar; MP Pembangunan Kota Baru: Maja, Tanjung Selor, Sofifi, dan Sorong; dan MP Pembangunan Ibu Kota Negara (IKN). Dalam kaitannya dengan PN lain, KR juga dibutuhkan</p>



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

No.	Perihal Perubahan	Pemutakhiran RKP Tahun 2023
		<p>untuk mendukung pencapaian PN 5 Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar, khususnya terkait pengaturan pembangunan fisik dan infrastruktur perkotaan.</p>
		<p>(2) Rancangan Undang-Undang tentang Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Jakarta, Perubahan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia</p> <p>Kerangka regulasi dibutuhkan untuk mendukung PP Pembangunan Wilayah Jawa-Bali serta KP Pengembangan Kawasan Perkotaan dan KP 5 Kelembagaan dan Keuangan Daerah. Kerangka regulasi ini sesuai dengan Pasal 4 ayat (2) UU No. 3/2022 tentang Ibu Kota Negara bahwa diperlukan penyesuaian substansi bersifat khusus (pengaturan sistem dan kewenangan khusus bagi Jakarta dalam beberapa urusan pemerintahan), serta dalam rangka penanaman modal menjadi salah satu kewenangan khusus yang akan diberikan kepada Jakarta tujuannya untuk kemudahan investasi, akan didiskusikan dengan K/L terkait. Selain itu, kerangka regulasi ini turut mendukung pencapaian MP Pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN).</p>
		<p>(3) Rancangan Peraturan Presiden tentang Pembagian Wilayah Ibu Kota Nusantara</p> <p>Kerangka regulasi dibutuhkan untuk mendukung PP Pembangunan Wilayah Kalimantan serta KP Pengembangan Kawasan Perkotaan. Kerangka regulasi ini mengacu pada UU No. 3/2022 tentang Ibu Kota Negara yang membagi wilayah daratan seluas kurang lebih 256.142 ha, terdiri atas 51 wilayah administratif setingkat desa atau kelurahan; dan wilayah perairan laut seluas kurang lebih 68.189 ha. Kerangka regulasi ini mengatur pembagian wilayah menjadi acuan untuk penyusunan rencana tata ruang dan rencana detail tata ruang yang akan diatur oleh peraturan setingkat Perpres, bukan peraturan dibawahnya. Selain itu, kerangka regulasi ini turut mendukung pencapaian MP Pembangunan Ibu Kota Nusantara.</p>
		<p>(4) Rancangan Peraturan Presiden tentang Pemindahan Lembaga Negara, Aparatur Sipil Negara, Perwakilan Negara Asing, dan Perwakilan Organisasi/Lembaga Internasional</p> <p>Kerangka regulasi dibutuhkan untuk mendukung PP Pembangunan Wilayah Kalimantan serta KP Pengembangan Kawasan Perkotaan. Kerangka regulasi ini mengacu pada UU No. 3/2022 tentang Ibu Kota Negara yang mengatur mengenai skema pemindahan Aparatur Sipil Negara dan Unit Organisasi Kementerian/Lembaga ke Ibu Kota Nusantara. Skema pemindahan Lembaga Negara, Aparatur Sipil Negara (ASN), Perwakilan Negara Asing, dan Perwakilan Organisasi/Lembaga Internasional diperinci dalam peraturan turunan melalui Perpres tentang Pemindahan Lembaga Negara, Aparatur Sipil Negara, Perwakilan Negara Asing, dan Perwakilan Organisasi/Lembaga Internasional ini. Selain itu, kerangka regulasi ini turut mendukung pencapaian MP Pembangunan Ibu Kota Nusantara.</p>



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

No.	Perihal Perubahan	Pemutakhiran RKP Tahun 2023
333	Perubahan alinea keempat dalam halaman V.11 sampai alinea ketiga dalam halaman V.12	<p>Prioritas Nasional 3 “Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing”</p> <p>A. Kebutuhan Kerangka Regulasi yang telah masuk ke dalam Prolegnas dan Progsun sebagai berikut</p> <p>(1) Rancangan Peraturan Menteri PPN tentang Pembentukan Gugus Tugas Registrasi Sosial Ekonomi (Regsosek)</p> <p>Kerangka regulasi dibutuhkan untuk mendukung PP Penguatan Pelaksanaan Perlindungan Sosial, serta KP Bantuan Sosial dan Subsidi Tepat Sasaran. Kerangka Regulasi ini bertujuan untuk mendorong pembentukan Sekretariat Nasional Registrasi Sosial Ekonomi guna mengatur penyelenggaraan tata kelola data Registrasi Sosial Ekonomi antar instansi pusat dan instansi daerah untuk mendukung perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengendalian pembangunan. Kerangka Regulasi ini dibutuhkan juga untuk mendukung MP Reformasi Sistem Perlindungan Sosial.</p> <p>B. Kebutuhan Kerangka Regulasi yang belum masuk ke dalam Prolegnas dan Progsun sebagai berikut</p> <p>(1) Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Pengamanan Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan</p> <p>Kerangka regulasi ini dibutuhkan untuk mendukung PP Peningkatan Akses dan Mutu Pelayanan Kesehatan, serta KP Penguatan Sistem Kesehatan dan Pengawasan Obat dan Makanan. Kerangka regulasi ini bertujuan untuk menyesuaikan sediaan farmasi dan alat kesehatan dengan perkembangan hukum dalam rangka mendukung kebijakan pemerintah dalam memberikan kemudahan berusaha. Kerangka regulasi ini dibutuhkan juga untuk mendukung MP Reformasi Sistem Kesehatan Nasional.</p>
334	Perubahan alinea keempat dalam halaman V.12 sampai alinea pertama dalam halaman V.13	<p>Prioritas Nasional 5 “Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar”</p> <p>A. Kebutuhan Kerangka Regulasi yang telah masuk ke dalam Prolegnas dan Progsun sebagai berikut</p> <p>(1) Rancangan Peraturan Menteri PPN/Kepala Bappenas tentang Rencana Aksi Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan</p> <p>Kerangka regulasi dibutuhkan untuk mendukung PP Infrastruktur Pelayanan Dasar, serta KP Keselamatan dan Keamanan Transportasi. Kerangka regulasi ini bertujuan untuk menjadi acuan dalam penyusunan rencana aksi keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan. Selain itu, Kerangka regulasi ini turut mendukung ProP Pemenuhan Fasilitas Keselamatan dan Keamanan Transportasi dan SAR, ProP Pembinaan dan Pendidikan SDM Keselamatan dan Keamanan Transportasi, Pencarian dan Pertolongan.</p> <p>B. Kebutuhan Kerangka Regulasi yang belum masuk kedalam Prolegnas dan Progsun sebagai berikut</p> <p>(1) Revisi Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan</p> <p>Kerangka regulasi dibutuhkan untuk mendukung PP Infrastruktur Ekonomi, serta KP Konektivitas Jalan. Kerangka regulasi ini merupakan revisi dari PP No. 34/2006 tentang jalan. Selain itu, Kerangka regulasi ini juga turut mendukung pencapaian MP Jalan Tol Trans Sumatera Aceh-Lampung, Jalan Trans pada 18 Pulau</p>



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

No.	Perihal Perubahan	Pemutakhiran RKP Tahun 2023
		<p>Tertinggal, Terluar, dan Terdepan dan Jalan Trans Papua Merauke Sorong.</p> <p>(2) Rancangan Peraturan Presiden tentang Percepatan Pembangunan Angkutan Umum Massal Perkotaan</p> <p>Kerangka regulasi dibutuhkan untuk mendukung PP Infrastruktur Ekonomi, serta KP Konektivitas Jalan. Kerangka regulasi ini merupakan pendelegasian UU No. 22/2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Selain itu, Kerangka regulasi ini diharapkan menjadi dukungan Pemerintah dalam pembangunan angkutan umum massal perkotaan dengan tujuan mendorong peningkatan daya saing kawasan perkotaan dan pembangunan yang berkelanjutan, dan mempercepat penyelenggaraan angkutan umum massal di kawasan perkotaan yang telah mengembangkan atau memiliki kebijakan mobilitas kawasan perkotaan.</p>
335	Penambahan alinea setelah alinea pertama dalam halaman V.13	<p>Prioritas Nasional 6 “Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim”</p> <p>Kebutuhan Kerangka Regulasi yang belum masuk kedalam Prolegnas dan Progsun sebagai berikut</p> <p>(1) Rancangan Peraturan Presiden tentang Strategi dan Rencana Aksi Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Indonesia Pasca 2020 (Indonesia Biodiversity Strategy and Action Plan Post 2020/IBSAP Post 2020)</p> <p>Kerangka regulasi dibutuhkan untuk mendukung PP Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup serta KP Pencegahan Pencemaran dan Kerusakan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup, termasuk aspek pencegahan kehilangan keanekaragaman hayati dan pemanfaatan keanekaragaman hayati secara berkelanjutan. Kerangka regulasi ini merupakan arahan dari UU No. 5/1994 tentang Pengesahan United Nations Convention on Biological Diversity (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa mengenai Keanekaragaman Hayati) serta mandat dari UU No. 17/2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005–2025 yang telah menetapkan kelestarian keanekaragaman hayati sebagai salah satu pilar pembangunan. Dengan adanya kerangka regulasi ini, diharapkan dapat menjadi landasan hukum yang operasional bagi pelaksanaan strategi dan rencana aksi pengelolaan keanekaragaman hayati di berbagai sektor pembangunan. Selain itu, kerangka regulasi ini turut mendukung pencapaian beberapa PN dan MP dalam RPJMN 2020-2024 yang terkait dengan keanekaragaman hayati.</p>
336	Perubahan alinea kedua dalam halaman V.13 sampai alinea pertama dalam halaman V.15	<p>Prioritas Nasional 7 “Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik”</p> <p>A. Kebutuhan Kerangka Regulasi yang telah masuk kedalam Prolegnas dan Progsun sebagai berikut</p> <p>(1) Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset Tindak Pidana</p> <p>Kerangka regulasi dibutuhkan untuk mendukung PP Penegakan Hukum Nasional serta KP Perbaikan Sistem Hukum Pidana dan Perdata. Kerangka regulasi ini dilatarbelakangi karena adanya kebutuhan suatu mekanisme baru terkait penyitaan atau perampasan aset hasil tindak pidana yang dapat dilakukan tanpa harus dikaitkan dengan penghukuman terhadap tersangka atau terdakwa. Mekanisme tersebut dikenal dengan sistem perampasan aset melalui prosedur gugatan perdata terhadap bendanya (<i>in rem</i>)</p>



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

No.	Perihal Perubahan	Pemutakhiran RKP Tahun 2023
		<p><i>forfeiture</i>), sehingga pemulihan atau pengambilan aset hasil tindak pidana dapat dilaksanakan tanpa menunggu putusan pengadilan dalam perkara pidana <i>Non Conviction Based (NCB) asset forfeiture</i>. RUU ini diharapkan dapat mendorong pengelolaan aset yang profesional, transparan, akuntabel, dan terjaga nilai ekonomisnya.</p> <p>B. Kebutuhan Kerangka Regulasi yang belum masuk kedalam Prolegnas dan Progsun sebagai berikut</p> <p>(1) Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas UU No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang</p> <p>Kerangka regulasi dibutuhkan untuk mendukung PP Penegakan Hukum Nasional serta KP Perbaikan Sistem Hukum Pidana dan Perdata. Kerangka regulasi ini merupakan bentuk respons pemerintah terhadap perkembangan dalam bidang perekonomian dan perdagangan, serta kebutuhan masyarakat terhadap perangkat hukum dalam pembiayaan usaha khususnya penyelesaian utang piutang yang tidak efisien dan berbiaya tinggi. Penyelesaian berbagai permasalahan dalam praktik penyelenggaraan kepailitan dan PKPU dapat menjamin kepastian hukum dan perlindungan yang adil bagi pelaku usaha sehingga diharapkan dapat mendorong iklim investasi yang kompetitif.</p> <p>(2) Rancangan Undang-Undang tentang Jaminan Benda Bergerak</p> <p>Kerangka regulasi dibutuhkan untuk mendukung PP Penegakan Hukum Nasional serta KP Perbaikan Sistem Hukum Pidana dan Perdata. Kerangka Regulasi ini dilatarbelakangi adanya kebutuhan perubahan pengaturan mengenai ruang lingkup objek jaminan benda bergerak, termasuk gadai dan jaminan resi gudang yang masih tersebar di berbagai peraturan perundang-undangan. Penyusunan RUU ini juga dibutuhkan untuk mengatur lebih lanjut ketentuan terkait dengan gadai dan jaminan atas kapal dan pesawat (hipotek) yang masih merujuk pada Kitab Undang-undang Hukum Perdata, serta pengaturan lain yang masih tersebar di masing-masing undang-undang. Unifikasi pengaturan mengenai jaminan kebendaan sejalan dengan kebutuhan sistem jaminan kebendaan yang terintegrasi dengan sistem informasi keuangan dan pembiayaan. Kerangka regulasi ini juga dimaksudkan untuk menyambut perkembangan kebutuhan hukum masyarakat dan merespons dunia usaha agar proses pembiayaan dapat dilaksanakan secara cepat, mudah, aman, dan memberikan kepastian hukum.</p> <p>(3) Rancangan Undang-Undang tentang Badan Usaha</p> <p>Kerangka regulasi dibutuhkan untuk mendukung PP Penegakan Hukum Nasional serta KP Perbaikan Sistem Hukum Pidana dan Perdata. Kerangka regulasi ini dibutuhkan untuk memperbaharui berbagai ketentuan peraturan perundang-undangan yang telah berlaku lebih dari 10 tahun. Pembaruan substansi pengaturan badan usaha melalui penyusunan RUU ini diharapkan dapat mengkomodir pengaturan mengenai Persekutuan Perdata, Persekutuan Komanditer Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) dan Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD). RUU Badan Usaha mengupayakan adanya unifikasi ke dalam satu undang-undang. Kerangka regulasi ini bertujuan untuk menciptakan dasar hukum yang mendukung kemudahan berinvestasi dan memperbaiki iklim berusaha di Indonesia.</p>



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

No.	Perihal Perubahan	Pemutakhiran RKP Tahun 2023
(4)	Rancangan Undang-Undang tentang Hukum Acara Perdata Kerangka regulasi dibutuhkan untuk mendukung PP Penegakan Hukum Nasional serta KP Penguatan Tata Kelola dan Pembentukan Lembaga Pengelola Regulasi. Peraturan perundang-undangan terkait hukum acara perdata yang berlaku saat ini, tersebar dalam berbagai peraturan perundang-undangan. Kerangka regulasi ini diharapkan dapat menyelesaikan permasalahan pengaturan hukum acara perdata terkait substansi yang menimbulkan multitafsir, materi muatan yang tidak relevan dengan perkembangan zaman dan tidak optimal dalam mendukung penyelesaian sengketa di bidang perdata.	
(5)	Revisi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum Kerangka regulasi dibutuhkan untuk mendukung PP Penegakan Hukum Nasional serta KP Peningkatan Akses Terhadap Keadilan. Kerangka regulasi ini diharapkan agar adanya perluasan kategori penerima bantuan hukum, sehingga tidak hanya menitikberatkan pada orang atau kelompok orang miskin saja, tetapi termasuk kelompok rentan lain, misalnya anak yang berhadapan dengan hukum, perempuan yang berhadapan dengan hukum, atau lainnya. Fokus perluasan penerima bantuan hukum dalam revisi UU Bantuan Hukum bukan hanya kepada miskin secara ekonomi, namun termasuk tidak mampu dalam hal minim pengetahuan dan akses terhadap keadilan.	
(6)	Revisi Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (HAM) Kerangka regulasi dibutuhkan untuk mendukung PP Penegakan Hukum Nasional serta KP Peningkatan Akses Terhadap Keadilan. Dalam perkembangannya sepanjang tahun 1999 sampai dengan pertengahan tahun 2022, terjadi perkembangan hukum yang cukup signifikan. Poin utama perubahan dikarenakan- dalam dua dekade implementasi UU HAM setelah reformasi, diperlukan evaluasi kembali implementasi UU HAM, termasuk menyesuaikan dengan perkembangan dinamika nasional dan global, serta sinergi antar Lembaga-Lembaga pelaksana HAM.	
(7)	Rancangan Undang-Undang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi Kerangka regulasi dibutuhkan untuk mendukung PP Penegakan Hukum Nasional serta KP Penguatan Tata Kelola dan Pembentukan Lembaga Pengelola Regulasi. Kerangka regulasi ini merupakan tindak lanjut dari amanat putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU/IV/2006 yang membatalkan secara keseluruhan UU No. 27/2004 tentang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi. Sejak tahun 2006 hingga saat ini, belum ada UU baru yang khusus mengatur mengenai Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi sebagai upaya proses pengungkapan kebenaran dan rekonsiliasi, pemberian kompensasi, restitusi dan/atau rehabilitasi kepada korban atau keluarga korban yang merupakan ahli warisnya.	
(8)	Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Pemerintah No. 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik Kerangka regulasi dibutuhkan untuk mendukung PP Konsolidasi Demokrasi serta KP Penguatan Kapasitas Lembaga Demokrasi. Kerangka regulasi ini dimaksudkan untuk mempertajam materi muatan tentang penggunaan dan pertanggungjawaban bantuan	



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

No.	Perihal Perubahan	Pemutakhiran RKP Tahun 2023
		keuangan kepada partai politik. Hal ini merupakan salah satu upaya untuk mewujudkan demokrasi yang lebih berintegritas.
337	Penghapusan sub bab 5.2.2 Hasil Penajaman Kerangka Regulasi dalam halaman V.15 sampai halaman V.16	(dihapus)
338	Perubahan alinea kelima dalam halaman V.17	(4) Mekanisme Evaluasi Pelaksanaan RKP Mekanisme evaluasi pelaksanaan RKP Tahun 2023 terdiri dari dua tahap, yaitu: (a) Evaluasi pelaksanaan RKP Tahun 2023 Tahap I, adalah evaluasi kinerja pembangunan tahun 2023 yang dilaksanakan berdasarkan data capaian pelaksanaan pembangunan hingga triwulan III. Alur Evaluasi RKP Tahun 2023 Tahap I sebagaimana dapat dilihat pada Gambar 5.7 terdiri dari (i) penyusunan kertas kerja evaluasi dan konfirmasi data <i>e-Monev</i> ; (ii) identifikasi data capaian pembangunan melalui Rapat Koordinasi Evaluasi dan Pengendalian (Evadal) per Bidang Kementerian Koordinator (Kemenko) serta Rapat Koordinasi Teknis (Rakortek) bersama penanggung jawab (PJ) PN, PP, KP, ProP, dan MP Kementerian PPN/Bappenas dengan seluruh K/L Pelaksana; (iii) pengumpulan data dan informasi pencapaian PN, PP, KP, ProP, MP, dan RO K/L; (iv) pengolahan dan analisis data; serta (v) perumusan alternatif usulan tema dan sasaran pembangunan tahun 2025. Hasil evaluasi ini sebagai masukan dalam persiapan penyusunan tema dan sasaran pembangunan dalam RKP Tahun 2025.
339	Perubahan alinea pertama dalam halaman V.18	(b) Evaluasi pelaksanaan RKP Tahun 2023 Tahap II, adalah evaluasi kinerja pembangunan tahun 2023 yang dilaksanakan berdasarkan pemutakhiran data capaian pelaksanaan pembangunan hingga triwulan IV. Alur Evaluasi RKP Tahun 2023 Tahap II sebagaimana dapat dilihat pada Gambar 5.8 terdiri dari (i) pemutakhiran data pada kertas kerja evaluasi pelaksanaan RKP oleh para PJ PN, PP, KP, ProP, MP di Kementerian PPN/Bappenas maupun K/L pelaksana; (ii) pertemuan untuk melakukan konfirmasi/finalisasi data dengan para PJ PN, PP, KP, ProP, MP di Kementerian PPN/Bappenas dan K/L pelaksana; (iii) pengolahan data dan penulisan laporan evaluasi RKP Tahun 2023; serta (iv) hasil pemutakhiran yang akan digunakan dalam penyusunan naskah RKP Tahun 2025, yaitu pada Subbab Evaluasi RKP.
340	Perubahan alinea kedua dalam halaman V.18	(5) Metode Evaluasi Pelaksanaan RKP . Metode yang digunakan untuk menganalisis kinerja pencapaian pembangunan pada evaluasi pelaksanaan RKP Tahun 2023 yaitu (a) evaluasi kinerja efektivitas dengan menggunakan metode analisis gap dan rata-rata tertimbang; serta (b) evaluasi kinerja optimalisasi dengan menggunakan metode indeks optimalisasi. Lebih rinci, metodologi evaluasi pelaksanaan RKP untuk mengukur kinerja pencapaian pembangunan dapat dilihat pada Tabel 5.2 berikut.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

No.	Perihal Perubahan	Pemutakhiran RKP Tahun 2023												
341	Perubahan Tabel 5.2 dalam halaman V.20	<table border="1"><thead><tr><th>Aspek</th><th>Uraian</th></tr></thead><tbody><tr><td>(a) Kinerja optimalisasi PN</td><td>Penghitungan dilakukan dengan merata-ratakan angka capaian sasaran PN dan rata-rata kinerja optimalisasi seluruh PP pada PN</td></tr><tr><td>(b) Kinerja optimalisasi PP</td><td>Penghitungan dilakukan dengan merata-ratakan angka capaian sasaran PP dan rata-rata kinerja optimalisasi seluruh KP pada PP</td></tr><tr><td>(c) Kinerja optimalisasi KP</td><td>Penghitungan dilakukan dengan merata-ratakan angka capaian sasaran KP dan rata-rata kinerja optimalisasi seluruh ProP pada KP</td></tr><tr><td>(d) Kinerja optimalisasi ProP</td><td>Penghitungan dilakukan dengan menggunakan bobot tertentu pada kinerja dukungan <i>output</i> (RO) K/L, penyerapan anggaran, dan capaian sasaran ProP</td></tr><tr><td>(e) Kinerja optimalisasi MP</td><td>Penghitungan dilakukan dengan menggunakan bobot tertentu pada kinerja dukungan <i>output</i> (RO) K/L, penyerapan anggaran, dan capaian sasaran MP</td></tr></tbody></table>	Aspek	Uraian	(a) Kinerja optimalisasi PN	Penghitungan dilakukan dengan merata-ratakan angka capaian sasaran PN dan rata-rata kinerja optimalisasi seluruh PP pada PN	(b) Kinerja optimalisasi PP	Penghitungan dilakukan dengan merata-ratakan angka capaian sasaran PP dan rata-rata kinerja optimalisasi seluruh KP pada PP	(c) Kinerja optimalisasi KP	Penghitungan dilakukan dengan merata-ratakan angka capaian sasaran KP dan rata-rata kinerja optimalisasi seluruh ProP pada KP	(d) Kinerja optimalisasi ProP	Penghitungan dilakukan dengan menggunakan bobot tertentu pada kinerja dukungan <i>output</i> (RO) K/L, penyerapan anggaran, dan capaian sasaran ProP	(e) Kinerja optimalisasi MP	Penghitungan dilakukan dengan menggunakan bobot tertentu pada kinerja dukungan <i>output</i> (RO) K/L, penyerapan anggaran, dan capaian sasaran MP
		Aspek	Uraian											
		(a) Kinerja optimalisasi PN	Penghitungan dilakukan dengan merata-ratakan angka capaian sasaran PN dan rata-rata kinerja optimalisasi seluruh PP pada PN											
		(b) Kinerja optimalisasi PP	Penghitungan dilakukan dengan merata-ratakan angka capaian sasaran PP dan rata-rata kinerja optimalisasi seluruh KP pada PP											
		(c) Kinerja optimalisasi KP	Penghitungan dilakukan dengan merata-ratakan angka capaian sasaran KP dan rata-rata kinerja optimalisasi seluruh ProP pada KP											
		(d) Kinerja optimalisasi ProP	Penghitungan dilakukan dengan menggunakan bobot tertentu pada kinerja dukungan <i>output</i> (RO) K/L, penyerapan anggaran, dan capaian sasaran ProP											
(e) Kinerja optimalisasi MP	Penghitungan dilakukan dengan menggunakan bobot tertentu pada kinerja dukungan <i>output</i> (RO) K/L, penyerapan anggaran, dan capaian sasaran MP													
(1) Kategori Kinerja	Kategori kinerja terdiri atas 1. baik, notifikasi hijau, capaian >90 persen. 2. cukup, notifikasi kuning, capaian 60-90 persen. 3. kurang, notifikasi merah, capaian <60 persen. 4. N/A, notifikasi putih, tidak memiliki nilai capaian.													
Sumber: Kementerian PPN/Bappenas, 2022.														
342	Perubahan alinea kedua dalam halaman V.21	(2) Ruang Lingkup Pengendalian Pelaksanaan Pembangunan <p>Ruang lingkup pengendalian pelaksanaan RKP Tahun 2023 berupa rekomendasi tindakan korektif atas pelaksanaan PN/PP/KP/ProP/MP (terpilih). Dalam pengendalian pelaksanaan pembangunan pada RKP Tahun 2023, rekomendasi tindakan korektif terhadap PN/PP/KP/ProP/MP (terpilih) hanya mencakup tindakan konstruktif yaitu <i>refocusing</i> atau penajaman/pemfokusan kembali langkah percepatan pencapaian target PN/PP/KP/ProP/MP (terpilih). Berdasarkan ruang lingkup pengendalian pelaksanaan pembangunan sebagaimana dapat dilihat pada Gambar 5.9, pelaksanaan pengendalian RKP Tahun 2023 dilakukan pada semester kedua tahun 2023.</p>												
343	Perubahan alinea keempat dalam halaman V.21	(4) Mekanisme Pengendalian Pelaksanaan Pembangunan <p>Pengendalian dilakukan melalui penilaian (<i>assessment</i>) atas PN/PP/KP/ProP/MP (terpilih) berdasarkan tiga aspek utama yaitu perencanaan strategis, manajemen pelaksanaan, dan kinerja pembangunan. Proses pengendalian pelaksanaan PN/PP/KP/ProP/MP (terpilih) dilakukan melalui empat tahap, yaitu: (a) penentuan fokus pengendalian; (b) <i>assessment</i> berupa pengisian instrumen pengendalian dan <i>crosscheck</i> lapangan konfirmasi atas pelaksanaan pembangunan; (c) perumusan tindakan konstruktif; serta (d) pengendalian pelaksanaan tindakan konstruktif. Adapun mekanisme pengendalian RKP secara rinci dapat dilihat pada Gambar 5.10.</p>												
344	Penghapusan alinea kelima dalam halaman V.21	(dihapus)												



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

No.	Perihal Perubahan	Pemutakhiran RKP Tahun 2023
345	Perubahan alinea pertama dalam halaman V.22	(5) Instrumen Pengendalian Pelaksanaan Pembangunan Instrumen pengendalian pelaksanaan PN/PP/KP/ProP/MP (terpilih) dalam RKP Tahun 2023 meliputi (a) deskripsi dan <i>logical framework</i> PN/PP/KP/ProP/MP (terpilih); (b) <i>self assessment</i> atas perencanaan strategis, manajemen pelaksanaan, dan kinerja pembangunan PN/PP/KP/ProP/MP (terpilih); serta (c) <i>early warning</i> mitigasi terhadap pelaksanaan PN/PP/KP/ProP/MP (terpilih), utamanya pada ProP terpilih sebagaimana pada Tabel 5.3.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

JOKO WIDODO

Salinan sesuai dengan aslinya

KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA
REPUBLIK INDONESIA

Deputi Bidang Perundang-undangan dan
Administrasi Hukum,



Lydia Silvanna Djaman



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN II
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 134 TAHUN 2022
TENTANG
PEMUTAKHIRAN RENCANA KERJA PEMERINTAH
TAHUN 2023

MATRIKS PEMBANGUNAN



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

MATRIKS PEMBANGUNAN RKP TAHUN 2023

PRIORITAS NASIONAL 1 : MEMPERKUAT KETAHANAN EKONOMI UNTUK PERTUMBUHAN YANG BERKUALITAS DAN BERKEADILAN

PN/PP/KP/ProP	Sasaran	Indikator	Dukungan Terhadap Arahan Presiden	Target	Rp. Juta	Instansi Pelaksana
01 PN: Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan	01 - Meningkatnya daya dukung dan kualitas sumber daya ekonomi sebagai modalitas bagi pembangunan ekonomi yang berkelanjutan	01 - Porsi EBT dalam bauran energi nasional		17,90 %	54.659.691,3	
		02 - Skor Pola Pangan Harapan (PPH)		94,00		
		03 - Pengelolaan dan pemanfaatan Wilayah Pengelolaan Perikanan (WPP) secara berkelanjutan		11 WPP		
	02 - Meningkatnya nilai tambah, lapangan kerja, investasi, ekspor, dan daya saing perekonomian	01 - Rasio kewirausahaan nasional		3,21 %		
		02 - Pertumbuhan PDB pertanian		3,2—3,6 %		
		03 - Pertumbuhan PDB perikanan		5,00—6,00 %		
		04 - Pertumbuhan PDB industri pengolahan		5,30—5,60 %		
		05 - Kontribusi PDB industri pengolahan		20,60 %		
		06 - Nilai devisa pariwisata		2,07—9,05 miliar US\$		
		07 - Kontribusi PDB pariwisata		4,10 %		



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

PN/PP/KP/ProP	Sasaran	Indikator	Dukungan Terhadap Arahan Presiden	Target	Rp. Juta	Instansi Pelaksana
		08 - Penyediaan lapangan kerja per tahun		2,7—3,1 juta orang		
		09 - Pertumbuhan investasi (PMTB)		6,1—6,3 %		
		10 - Pertumbuhan ekspor industri pengolahan		11,18 %		
		11 - Pertumbuhan ekspor riil barang dan jasa		5,3—6,6 %		
		12 - Rasio perpajakan terhadap PDB		9,60 %		
01.01 PP: Pemenuhan Kebutuhan Energi dengan Mengutamakan Peningkatan Energi Baru Terbarukan (EBT)	01 - Meningkatnya pemenuhan kebutuhan energi dengan mengutamakan peningkatan Energi Baru Terbarukan (EBT)	01 - Kapasitas terpasang pembangkit EBT (Kumulatif)	2, 5	14,31 gigawatt	3.980.528,2	
		02 - Pemanfaatan <i>biofuel</i> untuk domestik	2, 5	10,65 juta kilo liter		
01.01.01 KP: Akselerasi Pengembangan Pembangkit Energi Terbarukan	01 - Meningkatnya akselerasi pengembangan pembangkit energi terbarukan	01 - Kapasitas terpasang tambahan pembangkit EBT	2, 5	1.857,7 megawatt	177.742,3	
01.01.01.01 PRO-P: Percepatan Pembangunan Pembangkit Energi Terbarukan	01 - Terlaksananya percepatan pembangunan pembangkit energi terbarukan	01 - Penambahan kapasitas terpasang tambahan PLT Air	2, 5	409,3 megawatt	177.742,3	KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL, KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, KEMENTERIAN PEMUDA DAN OLAHRAGA, DAK
		02 - Penambahan kapasitas terpasang tambahan PLT Panas Bumi	2, 5	20 megawatt		
		03 - Penambahan kapasitas terpasang tambahan PLT Bioenergi	2, 5	87 megawatt		



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

PN/PP/KP/ProP	Sasaran	Indikator	Dukungan Terhadap Arahan Presiden	Target	Rp. Juta	Instansi Pelaksana
		04 - Penambahan kapasitas terpasang tambahan PLTS	2, 5	1.308 megawatt		
		05 - Kapasitas terpasang tambahan PLT Bayu	2, 5	33 megawatt		
01.01.02 KP: Peningkatan Pasokan Bahan Bakar Nabati	01 - Meningkatnya pasokan bahan bakar nabati	01 - Jumlah pemanfaatan <i>biofuel</i> untuk domestik	5	10,65 juta kilo liter	3.784.317,7	
01.01.02.01 PRO-P: Akselerasi Pengembangan BBN	01 - Terlaksananya akselerasi pengembangan BBN	01 - Persentase mandatori pencampuran BBN ke dalam bahan bakar fosil	5	30 %	3.784.317,7	KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL, KEMENTERIAN KEUANGAN, KEMENTERIAN PERTANIAN
01.01.03 KP: Peningkatan Pelaksanaan Konservasi dan Efisiensi Energi	01 - Meningkatnya pelaksanaan konservasi dan efisiensi energi	01 - Intensitas energi primer	2	135,2 SBM/miliar rupiah	13.559,9	
		02 - Penurunan intensitas energi final	2	0,8 SBM/miliar rupiah		
01.01.03.01 PRO-P: Perluasan Penerapan Efisiensi Energi	01 - Terlaksananya perluasan penerapan efisiensi energi	01 - Persentase penyelesaian penyusunan Standar Kinerja Energi Minimum (SKEM)	2	100 %	13.559,9	KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
		02 - Jumlah kendaraan dinas listrik berbasis baterai	5	1.602 Unit		
01.01.04 KP: Peningkatan Pemenuhan Energi Domestik	01 - Meningkatnya pemenuhan energi domestik	01 - Alokasi batu bara untuk Kepentingan dalam Negeri (DMO) yang direncanakan	2, 5	184 juta ton	3.945,5	
		02 - Persentase pemanfaatan gas bumi domestik	2, 5	67 %		



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

PN/PP/KP/ProP	Sasaran	Indikator	Dukungan Terhadap Arahan Presiden	Target	Rp. Juta	Instansi Pelaksana
01.01.04.01 PRO-P: Pemenuhan Energi yang Kompetitif bagi Industri	01 - Terlaksananya pemenuhan energi yang kompetitif	01 - Jumlah laporan pemenuhan energi yang kompetitif bagi industri	2	1 laporan	3.945,5	KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
		02 - Jumlah produksi gas bumi	2, 5	1.199 ribu BOPD		
01.01.05 KP: Pengembangan Industri Pendukung EBT	01 - Meningkatnya pengembangan industri pendukung EBT	01 - TKDN sektor pembangkit EBT	2	44,6 %	962,7	
01.01.05.01 PRO-P: Pengembangan Industri EBT	01 - Terlaksananya pengembangan industri EBT	01 - TKDN Sektor EBT dalam rangka mendukung kemandirian energi nasional	2	55,45 skala 100	962,7	KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
01.02 PP: Peningkatan Kuantitas/Ketahanan Air untuk Mendukung Pertumbuhan Ekonomi	01 - Meningkatnya kuantitas/ketahanan air untuk mendukung pertumbuhan ekonomi	01 - Produktivitas air (<i>water productivity</i>)	2	3,63 kg/m ³	16.901.731,9	
01.02.01 KP: Pemantapan Kawasan Berfungsi Lindung (Kumulatif)	01 - Meningkatnya pemantapan kawasan berfungsi lindung (kumulatif)	01 - Luas minimal kawasan berfungsi lindung (kumulatif)	5	65 juta ha	277.517,3	
01.02.01.01 PRO-P: Inventarisasi Jasa Lingkungan Tinggi	01 - Terlaksananya inventarisasi jasa lingkungan tinggi	01 - Luas area dengan Indeks Jasa Lingkungan Tinggi	5	7 ekoregion	31.018,0	KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
01.02.01.02 PRO-P: Perlindungan dan Pengamanan Kawasan Lindung Nasional secara Partisipatif	01 - Terlaksananya perlindungan dan pengamanan kawasan lindung nasional secara partisipatif	01 - Desa dalam dan sekitar kawasan konservasi	5	3.500 desa	246.499,4	KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

PN/PP/KP/ProP	Sasaran	Indikator	Dukungan Terhadap Arahan Presiden	Target	Rp. Juta	Instansi Pelaksana
01.02.02 KP: Pengelolaan Hutan Berkelanjutan	01 - Meningkatnya pengelolaan hutan berkelanjutan	01 - Luas kawasan hutan produksi	2	34,5 juta ha	337.066,8	
01.02.02.01 PRO-P: Optimalisasi Hasil Hutan dan Jasa Lingkungan	01 - Terlaksananya optimalisasi hasil hutan dan jasa lingkungan	01 - Jumlah unit usaha pemanfaatan hasil hutan dan jasa lingkungan	5	30 juta m ³	15.567,6	KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
01.02.02.02 PRO-P: Penguatan Kesatuan Pengelolaan Hutan	01 - Terlaksananya penguatan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH)	01 - Jumlah KPH yang difasilitasi penguatannya	5	80 KPH	321.499,2	KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
01.02.03 KP: Penyediaan Air untuk Pertanian	01 - Meningkatnya penyediaan air untuk pertanian	01 - Luas lahan beririgasi untuk komoditas padi dan nonpadi	2	6.900 ha	1.833.548,4	
01.02.03.01 PRO-P: Pembangunan dan Rehabilitasi Jaringan Irigasi	01 - Terlaksananya pembangunan dan rehabilitasi jaringan irigasi	01 - Luas jaringan irigasi teknis yang dibangun	5	6.900 ha	1.833.548,4	KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT (Terintegrasi dengan PSN)
		02 - Luas jaringan daerah irigasi teknis yang direhabilitasi	5	98.700 ha		
01.02.04 KP: Penyediaan Air Baku untuk Kawasan Prioritas	01 - Meningkatnya penyediaan air baku untuk kawasan prioritas	01 - Jumlah debit air baku untuk kebutuhan domestik, industri, dan kawasan unggulan	2	2,60 m ³ /detik	1.547.141,5	
01.02.04.01 PRO-P: Penyediaan dan Pengamanan Air Baku dan Air Tanah	01 - Terlaksananya penyediaan dan pengamanan air baku dan air tanah	01 - Tambahan penyediaan air baku	5	2,60 m ³ /detik	1.547.141,5	KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT, KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL (Terintegrasi dengan PSN)



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

PN/PP/KP/ProP	Sasaran	Indikator	Dukungan Terhadap Arahan Presiden	Target	Rp. Juta	Instansi Pelaksana
01.02.05 KP: Pemeliharaan, Pemulihan, dan Konservasi Sumber Daya Air dan Ekosistemnya termasuk Revitalisasi Danau dan Infrastruktur Hijau	01 - Meningkatnya pemeliharaan, pemulihan, dan konservasi sumber daya air dan ekosistemnya termasuk revitalisasi danau dan infrastruktur hijau	01 - Peningkatan tutupan hutan	2	450.000 ha	875.908,6	
01.02.05.01 PRO-P: Rehabilitasi Hutan dan Lahan	01 - Terlaksananya rehabilitasi hutan dan lahan	01 - Luas hutan dan lahan yang terehabilitasi secara nasional	5	475.000 ha	875.908,6	KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
01.02.06 KP: Pengembangan Waduk Multiguna	01 - Berkembangnya pemanfaatan waduk multiguna	01 - Jumlah volume tampungan baru untuk memenuhi kebutuhan air (kumulatif)	2	17,45 miliar m ³	12.030.549,4	
01.02.06.01 PRO-P: Pembangunan dan Rehabilitasi Bendungan	01 - Terlaksananya pembangunan dan rehabilitasi bendungan	01 - Jumlah bendungan multiguna yang selesai	5	13 unit	12.030.549,4	KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT (Terintegrasi dengan PSN)
01.02.06.02 PRO-P: Optimalisasi dan Pemanfaatan Tampungan	01 - Terlaksananya optimalisasi dan pemanfaatan tampungan	01 - Jumlah bendungan yang dimanfaatkan sesuai dengan fungsi rencananya	5	16 unit	0,0 ^(a)	KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT (Terintegrasi dengan PSN)
		02 - Jumlah tampungan alami yang direvitalisasi dan dikembangkan manfaatnya	5	7 unit		
01.03 PP: Peningkatan Ketersediaan, Akses, dan Kualitas Konsumsi Pangan	01 - Meningkatnya ketersediaan, akses, dan kualitas konsumsi pangan	01 - Nilai Tukar Petani (NTP)	5	105,00—107,00	13.377.668,1	
		02 - Angka Kecukupan Energi (AKE)	5	2.100,00 kkal/kapita/hari		
		03 - Angka Kecukupan Protein (AKP)	5	57,00 gram/ kapita/hari		



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

PN/PP/KP/ProP	Sasaran	Indikator	Dukungan Terhadap Arahan Presiden	Target	Rp. Juta	Instansi Pelaksana
		04 - <i>Prevalence of Undernourishment</i> (PoU)	5	5,20 %		
		05 - <i>Food Insecurity Experience Scale</i> (FIES)	5	4,20 %		
01.03.01 KP: Peningkatan Kualitas Konsumsi, Keamanan, Fortifikasi dan Biofortifikasi Pangan	01 - Meningkatnya kualitas konsumsi, keamanan, fortifikasi dan biofortifikasi pangan	01 - Konsumsi daging	5	14,4 kg/kapita/tahun	599.267,9	
		02 - Konsumsi protein asal ternak	5	12,7 gram/kapita/hari		
		03 - Konsumsi sayur dan buah	5	301,3 gram/kapita/hari		
		04 - Konsumsi ikan	5	61,02 kg/kapita/tahun		
		05 - Persentase pangan segar yang memenuhi syarat keamanan pangan	5	90—95 %		
		06 - Luas lahan produksi beras biofortifikasi	5	150.000 ha		
		07 - Akses terhadap beras biofortifikasi dan fortifikasi bagi keluarga yang kurang mampu dan kurang gizi	5	80 % penerima BPNT		
		08 - Persentase pangsa pangan organik	5	15 %		
01.03.01.01 PRO-P: Peningkatan Diversifikasi Konsumsi Pangan	01 - Meningkatnya kualitas konsumsi pangan	01 - Peningkatan konsumsi daging	5	2,1 %	9.798,1	KEMENTERIAN PERTANIAN, KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN, BADAN PANGAN NASIONAL
		02 - Peningkatan konsumsi protein asal ternak	5	0,9 %		



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

PN/PP/KP/ProP	Sasaran	Indikator	Dukungan Terhadap Arahan Presiden	Target	Rp. Juta	Instansi Pelaksana
		03 - Peningkatan konsumsi sayur dan buah	5	5,0 gram/kapita/hari		
		04 - Konsumsi kacang-kacangan	5	29,2 gram/kapita/hari		
01.03.01.02 PRO-P: Peningkatan Keamanan Pangan	01 - Meningkatnya keamanan pangan	01 - Rasio tindak lanjut terhadap temuan OPTK dan HPHK pada komoditas pertanian melalui media pembawa di tempat pemasukan atau pengeluaran yang ditetapkan	5	94 %	353.969,8	KEMENTERIAN PERTANIAN, BADAN PANGAN NASIONAL
		02 - Persentase pangan hewani yang memenuhi syarat keamanan pangan	5	88 %		
01.03.01.03 PRO-P: Pengembangan Fortifikasi dan Biofortifikasi Pangan	01 - Terlaksananya pengembangan fortifikasi dan biofortifikasi pangan	01 - Penelitian dan pengembangan biofortifikasi pangan	5	1 VUB	235.500,0	KEMENTERIAN PERTANIAN
		02 - Produksi padi biofortifikasi	5	840 ribu ton GKG		
01.03.02 KP: Peningkatan ketersediaan pangan hasil pertanian dan pangan hasil laut secara berkelanjutan untuk menjaga stabilitas pasokan dan harga kebutuhan pokok	01 - Meningkatnya ketersediaan pangan hasil pertanian dan pangan hasil laut secara berkelanjutan untuk menjaga stabilitas pasokan dan harga kebutuhan pokok	01 - Penggunaan benih bersertifikat	5	75,0 %	3.979.274,9	
		02 - Ketersediaan beras	5	45,4 juta ton		
		03 - Ketersediaan protein hewani	5	2,78 juta ton		
		04 - Produksi jagung	5	34,12 juta ton		
		05 - Produksi daging	5	4,6 juta ton		
		06 - Produksi umbi-umbian	5	25,2 juta ton		
		07 - Produksi sayuran	5	15,50 juta ton		
		08 - Produksi buah-buahan	5	29,29 juta ton		



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

PN/PP/KP/ProP	Sasaran	Indikator	Dukungan Terhadap Arahan Presiden	Target	Rp. Juta	Instansi Pelaksana
01.03.02.01 PRO-P: Peningkatan Produksi Padi	01 - Meningkatnya produksi padi	01 - Pertumbuhan produktivitas padi	5	3,00 %	749.010,8	KEMENTERIAN PERTANIAN, BADAN PANGAN NASIONAL (Terintegrasi dengan PSN)
		02 - Peningkatan Indeks Pertanaman (IP)	5	5,00 %		
01.03.02.02 PRO-P: Peningkatan Produksi Jagung	01 - Meningkatnya produksi jagung	01 - Pertumbuhan produktivitas jagung	5	1,20 %	312.858,3	KEMENTERIAN PERTANIAN
01.03.02.03 PRO-P: Peningkatan Produksi Kedelai	01 - Meningkatnya produksi kedelai	01 - Pertumbuhan produktivitas kedelai	5	1,10 %	5.188,6	KEMENTERIAN PERTANIAN
01.03.02.04 PRO-P: Peningkatan Produksi Daging	01 - Meningkatnya produksi daging	01 - Peningkatan produksi daging	5	2,0 juta ton	2.440.532,8	KEMENTERIAN PERTANIAN
01.03.02.05 PRO-P: Peningkatan Produksi Hortikultura	01 - Meningkatnya produksi hortikultura	01 - Pertumbuhan produktivitas sayuran	5	5,34 %	448.216,5	KEMENTERIAN PERTANIAN
		02 - Peningkatan produktivitas buah-buahan	5	2,20 %		
01.03.02.06 PRO-P: Peningkatan Produksi Umbi-Umbian	01 - Meningkatnya produksi umbi-umbian	01 - Pertumbuhan produktivitas ubi kayu	5	1,50 %	23.468,0	KEMENTERIAN PERTANIAN
		02 - Pertumbuhan produktivitas ubi jalar	5	3,65 %		



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

PN/PP/KP/ProP	Sasaran	Indikator	Dukungan Terhadap Arahan Presiden	Target	Rp. Juta	Instansi Pelaksana
01.03.03 KP: Peningkatan Produktivitas, Kesejahteraan Sumber Daya Manusia (SDM) Pertanian, Perikanan dan Kepastian Pasar	01 - Meningkatnya produktivitas, kesejahteraan Sumber Daya Manusia (SDM) pertanian, dan kepastian pasar	01 - Teknologi yang diterapkan oleh petani	5	80—90 %	7.091.922,1	
		02 - Nilai tambah per tenaga kerja pertanian	5	57,0 juta rupiah/tenaga kerja/tahun		
01.03.03.01 PRO-P: Asuransi Pertanian	01 - Terlaksananya asuransi pertanian	01 - Luas area yang difasilitasi asuransi usaha tani padi	5	1.000.000 ha	185.590,9	KEMENTERIAN PERTANIAN
		02 - Jumlah ternak yang difasilitasi asuransi usaha peternak sapi/kerbau	5	200.000 ekor		
01.03.03.03 PRO-P: Penyuluhan dan Pendampingan Sekolah Lapang	01 - Terlaksananya penyuluhan dan pendampingan sekolah lapang	01 - Persentase SDM pertanian yang meningkat kapasitasnya	1	100 %	15.927,1	KEMENTERIAN PERTANIAN
		02 - Persentase kelembagaan petani yang meningkat kapasitasnya	5	21 %		
01.03.03.04 PRO-P: Korporasi Petani	01 - Berkembangnya korporasi petani	01 - Jumlah korporasi petani yang dikembangkan	5	150 unit	6.890.404,1	KEMENTERIAN PERTANIAN, KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN, DAK
01.03.04 KP: Peningkatan Keberlanjutan Produktivitas Sumber Daya Pertanian, dan Digitalisasi Pertanian	01 - Meningkatnya produktivitas, keberlanjutan sumber daya pertanian, dan digitalisasi pertanian	01 - Persentase lahan baku sawah yang ditetapkan sebagai Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B)	5	90 %	986.249,9	
		02 - Jumlah varietas unggul tanaman dan hewan untuk pangan yang dilepas	5	30 dan 8 varietas unggul baru dan galur		
01.03.04.01 PRO-P: Pengelolaan Sumber Daya Air Pertanian	01 - Terkelolanya sumber daya air pertanian	01 - Luasan rehabilitasi jaringan irigasi	5	269.884 ha	500.228,9	KEMENTERIAN PERTANIAN



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

PN/PP/KP/ProP	Sasaran	Indikator	Dukungan Terhadap Arahan Presiden	Target	Rp. Juta	Instansi Pelaksana
01.03.04.02 PRO-P: Pengelolaan Sumber Daya Lahan Pertanian	01 - Terkelolanya sumber daya lahan pertanian	01 - Luas lahan sawah yang ditetapkan LP2B tiap tahunnya	5	6.717.553,2 ha	485.771,0	KEMENTERIAN PERTANIAN, KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BPN (Terintegrasi dengan PSN)
01.03.04.03 PRO-P: Peningkatan varietas unggul tanaman dan hewan untuk pangan yang dilepas	01 - Meningkatnya varietas unggul tanaman dan hewan untuk pangan yang dilepas	01 - Jumlah varietas unggul tanaman dan hewan untuk pangan yang dilepas	5	45 varietas unggul baru dan galur	250,0	KEMENTERIAN PERTANIAN
01.03.05 KP: Peningkatan Tata Kelola Sistem Pangan Nasional	01 - Meningkatnya tata kelola sistem pangan nasional	01 - <i>Global food security index</i>	5	68,4	720.953,3	
01.03.05.02 PRO-P: Penanganan Rawan Pangan	01 - Menurunnya daerah rawan pangan	01 - Persentase daerah rentan rawan pangan	5	12 %	3.400,0	BADAN PANGAN NASIONAL
01.03.05.03 PRO-P: Penguatan Cadangan Pangan Nasional	01 - Menguatnya cadangan pangan nasional	01 - Cadangan beras	5	6—10 juta ton	717.553,3	KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI, KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BPN, KEMENTERIAN PERTANIAN, DAK (Terintegrasi dengan PSN)
01.04 PP: Peningkatan Pengelolaan Kemaritiman, Perikanan dan Kelautan	01 - Meningkatnya pengelolaan kemaritiman, perikanan, dan kelautan	01 - Konservasi kawasan kelautan	5	29,10 juta ha	2.771.854,4	
		02 - Proporsi tangkapan jenis ikan yang berada dalam batasan biologis yang aman	5	≤76 %		
		03 - Produksi perikanan	5	30,58 juta ton		
		04 - Produksi garam	5	2,00 juta ton		



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

PN/PP/KP/ProP	Sasaran	Indikator	Dukungan Terhadap Arahan Presiden	Target	Rp. Juta	Instansi Pelaksana
		05 - Nilai tukar nelayan	5	107,00—108,00		
01.04.01 KP: Peningkatan Pengelolaan Wilayah Pengelolaan Perikanan (WPP) dan Penataan Ruang Laut dan Rencana Zonasi Pesisir serta Pengelolaan Ruang Laut	01 - Meningkatnya pengelolaan Wilayah Pengelolaan Perikanan (WPP) dan penataan ruang laut dan rencana zonasi pesisir serta pengelolaan ruang laut	01 - Pengelola WPP	5	11 unit	74.865,0	
		02 - Akurasi pendataan <i>stock</i> dan pemanfaatan WPP	4	11 WPP		
		03 - Penyelesaian penataan ruang laut dan zonasi pesisir	4	30 RZ		
01.04.01.01 PRO-P: Pengelolaan Wilayah Pengelolaan Perikanan (WPP)	01 - Terlaksananya pengelolaan Wilayah Pengelolaan Perikanan (WPP)	01 - Jumlah model percontohan WPP yang melaksanakan penangkapan terukur	4	9 WPP	16.180,0	KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
01.04.01.02 PRO-P: Penataan Ruang Laut dan Rencana Zonasi Pesisir	01 - Terlaksananya penataan ruang laut dan rencana zonasi pesisir	01 - Jumlah KSN dan KSNT yang memiliki rencana zonasi KSN dan rencana zonasi KSNT dan antarwilayah laut	5	23 RZ	37.310,0	KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN, KEMENTERIAN DALAM NEGERI, BADAN INFORMASI GEOSPASIAL (BIG)
01.04.01.03 PRO-P: Pengendalian Pemanfaatan Ruang Laut	01 - Terlaksananya pengendalian pemanfaatan ruang laut	01 - Jumlah lokasi yang dilakukan pengendalian pemanfaatan ruang laut di pusat dan daerah	5	34 lokasi	21.375,0	KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
01.04.02 KP: Peningkatan Ekosistem Kelautan dan Pemanfaatan Jasa Kelautan	01 - Meningkatnya ekosistem kelautan dan pemanfaatan jasa kelautan	01 - Jumlah kawasan konservasi yang dimanfaatkan secara berkelanjutan	5	15.800.000 ha	12.465,0	
01.04.02.01 PRO-P: Pengembangan Wisata Bahari dan Jasa Maritim	01 - Terlaksananya pengembangan wisata bahari dan jasa maritim	01 - Jumlah kawasan wisata bahari dan BMKT yang dikelola	5	10 kawasan	9.750,0	KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN (Terintegrasi dengan PSN)



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

PN/PP/KP/ProP	Sasaran	Indikator	Dukungan Terhadap Arahan Presiden	Target	Rp. Juta	Instansi Pelaksana
01.04.02.02 PRO-P: Pengembangan <i>Marine Bioproduct</i> dan Bioteknologi	01 - Terlaksananya pengembangan <i>marine bioproduct</i> dan bioteknologi	01 - Jumlah bioteknologi dan biofarmakologi yang dikembangkan	5	2 paket	2.715,0	KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
01.04.03 KP: Peningkatan Produksi, Produktivitas, Standardisasi Mutu dan Nilai Tambah Produk Kelautan dan Perikanan	01 - Meningkatnya produksi, produktivitas, standardisasi mutu dan nilai tambah produk kelautan dan perikanan	01 - Produksi ikan	5	18,48 juta ton	2.282.090,0	
		02 - Produksi rumput laut	5	12,10 juta ton		
		03 - Produksi Garam	5	2,00 juta ton		
01.04.03.01 PRO-P: Peningkatan Produksi Perikanan	01 - Meningkatnya produksi perikanan	01 - Produksi ikan tangkap	5	9,00 juta ton	2.144.865,0	KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN, KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL, KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT, DAK, KEMENTERIAN PERDAGANGAN (Terintegrasi dengan PSN)
		02 - Produksi ikan budidaya	5	9,48 juta ton		
01.04.03.02 PRO-P: Peningkatan Produksi Rumput Laut	01 - Meningkatnya produksi rumput laut	01 - Jumlah produksi rumput laut	5	12,10 juta ton	0,0 ^(a)	KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
01.04.03.03 PRO-P: Peningkatan Produksi Garam	01 - Meningkatnya produksi garam	01 - Jumlah produksi garam	5	2,00 juta ton	62.700,0	KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
01.04.03.04 PRO-P: Karantina Ikan dan Jaminan Mutu	01 - Terlaksananya karantina ikan dan jaminan mutu	01 - Rasio pengendalian ekspor, impor, dan antar area jenis ikan yang dilarang, dilindungi, dan dibatasi di <i>exit/entry point</i>	5	100 %	74.525,0	KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

PN/PP/KP/ProP	Sasaran	Indikator	Dukungan Terhadap Arahan Presiden	Target	Rp. Juta	Instansi Pelaksana
01.04.04 KP: Peningkatan Fasilitas Usaha, Pembiayaan, dan Akses Perlindungan Usaha Kelautan dan Perikanan Skala Kecil serta Akses terhadap Pengelolaan Sumber Daya	01 - Meningkatnya fasilitas usaha, pembiayaan, dan akses perlindungan usaha kelautan dan perikanan skala kecil serta akses terhadap pengelolaan sumber daya	01 - Jumlah pendanaan pelaku usaha kelautan dan perikanan skala kecil	5	9,91 triliun rupiah	167.365,4	
		02 - Nilai Tukar Pembudidaya Ikan (NTPi)	5	104		
01.04.04.01 PRO-P: Peningkatan Perlindungan Nelayan dan Pembudidaya Ikan	01 - Meningkatnya perlindungan nelayan dan pembudidaya ikan	01 - Jumlah nelayan dan pembudidaya ikan yang terlindungi	5	155.000 orang	6.500,0	KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
01.04.04.02 PRO-P: Peningkatan Akses Pembiayaan Usaha Perikanan	01 - Terlaksananya peningkatan akses pembiayaan usaha perikanan	01 - Sertifikasi tanah nelayan dan lahan budidaya	5	15.000 bidang	138.643,6	KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN, KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BPN (Terintegrasi dengan PSN)
01.04.04.03 PRO-P: Penataan Perizinan Kelautan dan Perikanan	01 - Terlaksananya penataan perizinan kelautan dan perikanan	01 - Integrasi sistem perizinan pusat-daerah	4	34 provinsi	22.221,8	KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
01.04.05 KP: Peningkatan SDM dan Riset Kemaritiman dan Kelautan Serta Database Kelautan dan Perikanan	01 - Meningkatnya SDM dan inovasi teknologi kemaritiman dan kelautan serta database kelautan	01 - Jumlah model/teknologi kelautan dan perikanan yang layak adopsi	5	5 produk	235.069,0	
01.04.05.01 PRO-P: Peningkatan SDM Kelautan dan Perikanan	01 - Terlaksananya peningkatan SDM kelautan dan perikanan	01 - Jumlah masyarakat yang disuluh	1	44.000 orang	119.173,7	KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN



**PRESIDEN
REPUBLIC INDONESIA**

PN/PP/KP/ProP	Sasaran	Indikator	Dukungan Terhadap Arahan Presiden	Target	Rp. Juta	Instansi Pelaksana
01.04.05.02 PRO-P: Penguatan Inovasi Teknologi dan Riset Kelautan dan Perikanan	01 - Terlaksananya penguatan inovasi teknologi dan riset kelautan dan perikanan	01 - Inovasi teknologi KP yang diadopsi	5	5 Paket	115.895,3	KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
01.05 PP: Penguatan Kewirausahaan, Usaha Mikro, Kecil Menengah (UMKM), dan Koperasi	01 - Menguatnya kewirausahaan, usaha mikro, kecil menengah (UMKM), dan koperasi	01 - Rasio kredit UMKM terhadap total kredit perbankan	5	21,44 %	2.847.956,5	
		02 - Pertumbuhan wirausaha	1	2,74 %		
		03 - Kontribusi koperasi terhadap PDB	1, 5	5,40 %		
01.05.01 KP: Peningkatan Kemitraan Usaha antara Usaha Mikro Kecil dan Usaha Menengah Besar	01 - Meningkatnya kemitraan usaha antara usaha mikro kecil dan usaha menengah besar	01 - Proporsi IMK (Industri Mikro Kecil) yang menjalin kemitraan	1, 5	10,00 %	603.511,8	
		02 - IKM yang melakukan kemitraan dengan industri besar sedang dan sektor sektor ekonomi lainnya	5	160 IKM (kumulatif)		
01.05.01.01 PRO-P: Pengembangan Kapasitas Usaha dan Kualitas Produk	01 - Terlaksananya pengembangan kapasitas usaha dan kualitas produk	01 - Jumlah UMKM yang dikembangkan kapasitas usahanya	1, 5	10.000 UMKM	452.641,8	KEMENTERIAN KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH, KEMENTERIAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF/BADAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF, BADAN STANDARISASI NASIONAL (BSN), KEMENTERIAN PERDAGANGAN, KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN, KEMENTERIAN AGAMA, BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN, KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN, KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT (Terintegrasi dengan PSN)



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

PN/PP/KP/ProP	Sasaran	Indikator	Dukungan Terhadap Arahan Presiden	Target	Rp. Juta	Instansi Pelaksana
01.05.01.02 PRO-P: Perluasan Kemitraan Usaha	01 - Terlaksananya perluasan kemitraan usaha	01 - Jumlah UMKM yang diperluas cakupan kemitraannya	1, 5	350 UMKM	34.187,4	KEMENTERIAN KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH, KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN, KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA (KPPU), KEMENTERIAN INVESTASI/BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
01.05.01.03 PRO-P: Penguatan Kapasitas Kelembagaan untuk Bermitra	01 - Terlaksananya penguatan kapasitas kelembagaan untuk bermitra	01 - Jumlah UMKM yang ditingkatkan kapasitas kelembagaannya	1, 5	8.500 UMKM	116.682,6	KEMENTERIAN KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH, KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN, KEMENTERIAN KEUANGAN, KEMENTERIAN PERDAGANGAN
01.05.02 KP: Peningkatan Kapasitas Usaha dan Akses Pembiayaan Bagi Wirausaha	01 - Meningkatnya kapasitas usaha dan akses pembiayaan bagi wirausaha	01 - Proporsi UMKM yang mengakses kredit lembaga keuangan formal	1, 5	29,27 %	126.014,8	
		02 - Proporsi IKM dengan pinjaman/kredit	5	4,10 %		
		03 - Proporsi penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) sektor produksi	5	75,00 %		
01.05.02.01 PRO-P: Dukungan Pemberian Modal Awal Usaha	01 - Terlaksananya dukungan pemberian modal awal usaha	01 - Jumlah wirausaha pemula yang mendapat modal usaha	5	3.000 orang	107.662,5	KEMENTERIAN KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH, KEMENTERIAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF/BADAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF, KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI
01.05.02.02 PRO-P: Pendampingan UMKM untuk Mengakses Kredit	01 - Terlaksananya pendampingan UMKM untuk mengakses kredit	01 - Jumlah UMKM yang didampingi mengakses kredit/pembiayaan	5	8.500 UMKM	16.226,5	KEMENTERIAN KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

PN/PP/KP/ProP	Sasaran	Indikator	Dukungan Terhadap Arahan Presiden	Target	Rp. Juta	Instansi Pelaksana
01.05.02.03 PRO-P: Pengembangan Skema Pembiayaan bagi Wirausaha dan UMKM	01 - Terlaksananya pengembangan skema pembiayaan bagi wirausaha dan UMKM	01 - Jumlah UMKM yang dikembangkan skema pembiayaannya	5	150 UMKM	2.125,8	KEMENTERIAN KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH
01.05.03 KP: Peningkatan Kapasitas, Jangkauan, dan Inovasi Koperasi	01 - Meningkatnya kapasitas, jangkauan, dan inovasi koperasi	01 - Jumlah koperasi modern yang dikembangkan	5	340 unit (kumulatif)	68.494,5	
01.05.03.01 PRO-P: Peningkatan Kapasitas Pengurus dan Manajer Koperasi	01 - Terlaksananya peningkatan kapasitas bagi koperasi	01 - Jumlah pengurus dan pengelola koperasi yang ditingkatkan kapasitasnya	1, 5	5.000 orang	21.550,0	KEMENTERIAN KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH
01.05.03.02 PRO-P: Pendampingan Kelompok untuk Membentuk Koperasi	01 - Terlaksananya pendampingan kepada masyarakat untuk membentuk koperasi	01 - Jumlah orang/masyarakat yang didampingi membentuk koperasi	1, 5	1.600 kelompok masyarakat/koperasi	8.500,0	KEMENTERIAN KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH
01.05.03.03 PRO-P: Pengembangan Jangkauan dan Cakupan Usaha	01 - Terlaksananya pengembangan jangkauan dan cakupan usaha kepada koperasi	01 - Jumlah koperasi yang dikembangkan jangkauan dan cakupan usahanya	5	430 koperasi	28.014,7	KEMENTERIAN KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH
01.05.03.04 PRO-P: Pengembangan Inovasi Koperasi	01 - Terlaksananya pengembangan inovasi kepada koperasi	01 - Jumlah koperasi yang dikembangkan untuk berinovasi	5	210 koperasi	10.429,8	KEMENTERIAN KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH
01.05.04 KP: Peningkatan Penciptaan <i>Start-Up</i> dan Peluang Usaha	01 - Meningkatnya penciptaan <i>start-up</i> dan peluang usaha	01 - Proporsi nilai tambah IKM terhadap total nilai tambah industri	5	19,6 %	2.027.775,4	
		02 - Penumbuhan <i>start-up</i>	5	2.800 <i>start-up</i> (kumulatif)		
		03 - Jumlah wirausaha baru industri kecil yang tumbuh	5	12.000 WUB		



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

PN/PP/KP/ProP	Sasaran	Indikator	Dukungan Terhadap Arahan Presiden	Target	Rp. Juta	Instansi Pelaksana
01.05.04.01 PRO-P: Pelatihan Kewirausahaan	01 - Terlaksananya pelatihan kepada wirausaha atau calon wirausaha	01 - Jumlah wirausaha yang dilatih	1, 5	65.000 orang	1.027.479,5	KEMENTERIAN KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH, KEMENTERIAN PEMUDA DAN OLAHRAGA, KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN, BADAN PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA (BP2MI), KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI, KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN, KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BPN, KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN (Terintegrasi dengan PSN)
01.05.04.02 PRO-P: Inkubasi Usaha	01 - Terlaksananya inkubasi kepada wirausaha	01 - Jumlah wirausaha yang diinkubasi	1, 5	4.900 wirausaha/ <i>start-up</i> /UMKM	35.700,0	KEMENTERIAN KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH, KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
01.05.04.03 PRO-P: Penguatan Kapasitas Layanan Usaha	01 - Terlaksananya layanan pengembangan Usaha kepada UMKM	01 - Jumlah UMKM yang mendapat layanan usaha	5	1.000 UMKM	505.638,1	KEMENTERIAN KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH, KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI, DAK
01.05.04.04 PRO-P: Pengembangan Sentra Industri Kecil dan Menengah	01 - Terlaksananya pengembangan sentra industri kecil dan menengah	01 - Jumlah sentra industri kecil dan menengah (IKM) di luar Jawa yang beroperasi	5	38 sentra IKM (kumulatif)	452.228,9	KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN, KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN, DAK (Terintegrasi dengan PSN)
	01 - Meningkatnya jumlah wirausaha mapan	01 - Jumlah wirausaha mapan yang terbentuk	1, 5	150 orang	6.728,9	



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

PN/PP/KP/ProP	Sasaran	Indikator	Dukungan Terhadap Arahan Presiden	Target	Rp. Juta	Instansi Pelaksana
01.05.04.05 PRO-P: Pembinaan Wirausaha Mapan	02 - Meningkatnya jumlah wirausaha mapan yang memperoleh dukungan akses pasar	01 - Jumlah wirausaha mapan yang mendapatkan dukungan akses pasar	1, 5	300 UMKM		KEMENTERIAN KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH, KEMENTERIAN PERDAGANGAN
01.05.05 KP: Peningkatan Nilai Tambah Usaha Sosial	01 - Meningkatnya nilai tambah usaha sosial	01 - Kontribusi usaha sosial	5	2,3 %	22.160,0	
01.05.05.01 PRO-P: Pembinaan Wirausaha Sosial	01 - Terlaksananya pembinaan wirausaha sosial	01 - Jumlah lembaga yang membina wirausaha sosial	5	40 lembaga	16.700,0	KEMENTERIAN KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH
01.05.05.02 PRO-P: Pembinaan Usaha Berdampak Sosial dan Lingkungan	01 - Meningkatnya jumlah usaha yang memiliki dampak sosial atau dampak lingkungan	01 - Jumlah usaha yang dibina	1, 5	11.000 orang/wirausaha	5.460,0	KEMENTERIAN KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH, KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN, KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
01.06 PP: Peningkatan Nilai Tambah, Lapangan Kerja, dan Investasi di Sektor Riil, dan Industrialisasi	01 - Meningkatnya nilai tambah, lapangan kerja, dan investasi di sektor riil, dan industrialisasi	01 - Pertumbuhan PDB industri pengolahan nonmigas	5	5,50—5,90 %	7.628.623,2	
		02 - Kontribusi PDB industri pengolahan nonmigas	5	18,80 %		
		03 - Nilai tambah ekonomi kreatif	5	1.279,0 triliun rupiah		
		04 - Jumlah tenaga kerja industri pengolahan	5	21,70 juta orang		
		05 - Kontribusi tenaga kerja di sektor industri terhadap total pekerja	5	15,50 %		



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

PN/PP/KP/ProP	Sasaran	Indikator	Dukungan Terhadap Arahan Presiden	Target	Rp. Juta	Instansi Pelaksana
		06 - Jumlah tenaga kerja pariwisata	5	21,93 juta orang		
		07 - Jumlah tenaga kerja ekonomi kreatif	5	22,59 juta orang		
		08 - Nilai realisasi PMA dan PMDN	5	1.200—1.300 triliun rupiah		
		09 - Nilai realisasi PMA dan PMDN industri pengolahan	5	396—420 triliun rupiah		
		10 - Pertumbuhan PDB pertanian, peternakan, perburuan dan jasa pertanian	5	3,60—3,80 %		
01.06.01 KP: Peningkatan Industri Pengolahan Berbasis Pertanian, Kemaritiman, dan Non Agro yang Terintegrasi Hulu-Hilir	01 - Meningkatnya industri pengolahan berbasis pertanian, kemaritiman, dan nonagro yang terintegrasi hulu-hilir	01 - Pertumbuhan PDB perkebunan	5	5,00 %	1.331.957,2	
		02 - Pertumbuhan PDB hortikultura	5	5,9 %		
		03 - Pertumbuhan PDB subsektor industri makanan dan minuman	5	5,50—5,70 %		
		04 - Pertumbuhan PDB industri alat angkutan	5	8,0—8,4 %		
01.06.01.01 PRO-P: Pengembangan Industri Berbasis Perkebunan	01 - Terlaksananya pengembangan industri berbasis perkebunan	01 - Peningkatan produksi kakao	5	2,6 %	423.368,2	KEMENTERIAN DALAM NEGERI, KEMENTERIAN PERTANIAN, KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN, KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN (Terintegrasi dengan PSN)
		02 - Peningkatan produksi kopi	5	1,50 %		
		03 - Peningkatan produksi kelapa sawit	5	6,00 %		
		04 - Peningkatan produksi kelapa	5	0,9 %		
		05 - Peningkatan produksi karet	5	1,9 %		



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

PN/PP/KP/ProP	Sasaran	Indikator	Dukungan Terhadap Arahan Presiden	Target	Rp. Juta	Instansi Pelaksana
		06 - Peningkatan produksi sagu	5	4,9 %		
		07 - Peningkatan produksi tebu	5	1,5 %		
		08 - Peningkatan produksi lada	5	0,1 %		
		09 - Peningkatan produksi pala	5	0,1 %		
		10 - Peningkatan produksi cengkeh	5	0,1 %		
01.06.01.02 PRO-P: Pengembangan Industri Berbasis Pertanian Pangan	01 - Terlaksananya pengembangan industri berbasis pertanian pangan	01 - Peningkatan produksi sayuran	5	3,0 %	696.305,9	KEMENTERIAN PERTANIAN (Terintegrasi dengan PSN)
		02 - Peningkatan produksi buah-buahan	5	5,2 %		
		03 - Peningkatan produksi florikultura	5	5,4 %		
01.06.01.03 PRO-P: Pengembangan Industri Berbasis Kehutanan	01 - Terlaksananya pengembangan industri berbasis kehutanan	01 - Pertumbuhan PDB industri furnitur	5	6,00—6,90 %	35.900,4	KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN, KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
01.06.01.04 PRO-P: Pengembangan Industri Kemaritiman	01 - Terlaksananya pengembangan industri kemaritiman	01 - Pertumbuhan PDB perikanan	5	5,00—6,00 %	157.632,8	KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
01.06.01.05 PRO-P: Pengembangan Industri Kimia, Farmasi, dan Logam	01 - Terlaksananya pengembangan industri kimia, farmasi, dan logam	01 - Pertumbuhan industri kimia, farmasi, dan obat tradisional	5	4,80—5,00 %	15.500,0	KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN (Terintegrasi dengan PSN)
01.06.01.06 PRO-P: Pengembangan Industri Alat Transportasi	01 - Terlaksananya pengembangan industri alat transportasi	01 - Produksi Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai Roda Empat atau Lebih	5	14.000 unit	3.250,0	KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

PN/PP/KP/ProP	Sasaran	Indikator	Dukungan Terhadap Arahan Presiden	Target	Rp. Juta	Instansi Pelaksana
		02 - Produksi Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai Roda Dua atau Tiga	5	1.000.000 unit		
01.06.02 KP: Peningkatan Industrialisasi Berbasis Hilirisasi Sumber Daya Alam, Termasuk Melalui Pengembangan Smelter dan Kawasan Industri Terutama di Luar Jawa	01 - Meningkatnya industrialisasi berbasis hilirisasi sumber daya alam, termasuk melalui pengembangan smelter dan kawasan industri terutama di luar Jawa	01 - Jumlah Kawasan Industri (KI) yang difasilitasi	5	16 KI-KEK industri	127.842,3	
01.06.02.01 PRO-P: Pengembangan Kawasan Industri dan Smelter secara Terintegrasi	01 - Terlaksananya pengembangan kawasan industri dan smelter secara terintegrasi	01 - Pertumbuhan PDB industri logam dasar	5	12,40—14,60 %	107.274,2	KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN, KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL (Terintegrasi dengan PSN)
01.06.02.02 PRO-P: Pemanfaatan Mineral dan Batu Bara untuk Peningkatan Nilai Tambah	01 - Terlaksananya pemanfaatan mineral dan batu bara untuk peningkatan nilai tambah	01 - Indeks pasokan mineral untuk peningkatan nilai tambah dalam negeri	5	78,86 %	20.568,2	KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN, KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
		02 - Rasio pemanfaatan batu bara untuk peningkatan nilai tambah batu bara	5	50 %		
01.06.03 KP: Peningkatan Daya Saing Destinasi dan Industri Pengolahan Pariwisata, Termasuk Wisata Alam, yang Didukung Penguatan Rantai Pasok	01 - Meningkatnya daya saing destinasi dan industri pariwisata, termasuk wisata alam, yang didukung penguatan rantai pasok	01 - Destinasi pariwisata prioritas yang dipercepat pengembangannya	5	10 destinasi	3.635.867,0	
		02 - Revitalisasi destinasi Bali	5	1 destinasi		
		03 - Destinasi wisata alam berkelanjutan berbasis kawasan hutan prioritas	5	25 unit		



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

PN/PP/KP/ProP	Sasaran	Indikator	Dukungan Terhadap Arahan Presiden	Target	Rp. Juta	Instansi Pelaksana
		04 - Destinasi wisata berbasis <i>geopark</i>	5	16 destinasi		
		05 - Destinasi wisata bahari	5	6 destinasi		
01.06.03.01 PRO-P: Pengembangan 25 Kawasan Hutan untuk Mendukung Destinasi Pariwisata Prioritas	01 - Terlaksananya pengembangan 25 kawasan hutan untuk mendukung destinasi pariwisata prioritas	01 - Jumlah destinasi wisata alam prioritas	5	25 destinasi	65.757,0	KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN (Terintegrasi dengan PSN)
01.06.03.02 PRO-P: Peningkatan Aksesibilitas, Amenitas, dan Atraksi, serta Daya Dukung Destinasi Pariwisata	01 - Terlaksananya peningkatan aksesibilitas, amenitas, dan atraksi serta daya dukung destinasi pariwisata	01 - Jumlah destinasi pariwisata yang ditingkatkan aksesibilitasnya, amenitas, atraksi, serta daya dukungnya	5	10 destinasi	3.288.971,4	KEMENTERIAN DALAM NEGERI, KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT, KEMENTERIAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF/BADAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF, KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI, KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA, KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI, KEMENTERIAN PERHUBUNGAN, KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA, DAK (Terintegrasi dengan PSN)
01.06.03.03 PRO-P: Penguatan Rantai Pasok Industri dan Kapasitas Masyarakat, termasuk Melalui Desa Wisata	01 - Terlaksananya penguatan rantai pasok industri dan kapasitas masyarakat, termasuk melalui desa wisata	01 - Jumlah penguatan rantai pasok industri dan kapasitas masyarakat, termasuk melalui desa wisata	5	13 destinasi/provinsi	22.645,8	KEMENTERIAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF/BADAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF, KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

PN/PP/KP/ProP	Sasaran	Indikator	Dukungan Terhadap Arahan Presiden	Target	Rp. Juta	Instansi Pelaksana
01.06.03.04 PRO-P: Pengelolaan dan Standar Layanan Destinasi Pariwisata	01 - Terlaksananya pengelolaan dan standar layanan destinasi pariwisata	01 - Jumlah pengelolaan dan standar layanan destinasi pariwisata	5	3 destinasi	189.906,4	KEMENTERIAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF/BADAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF, DAK
01.06.03.05 PRO-P: Pengembangan 16 Destinasi Pariwisata <i>Geopark</i>	01 - Terlaksananya pengembangan 16 <i>geopark</i> untuk mendukung destinasi pariwisata prioritas	01 - Jumlah koordinasi pengembangan <i>geopark</i>	5	1 kegiatan	68.586,4	KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL, BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL / BAPPENAS, KEMENTERIAN PEMUDA DAN OLAHRAGA, KEMENTERIAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF/BADAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF, KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI, KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
01.06.04 KP: Peningkatan Nilai Tambah dan Daya Saing Produk dan Usaha Kreatif dan Digital	01 - Meningkatnya nilai tambah dan daya saing produk dan usaha kreatif dan digital	01 - Pertumbuhan PDB ekonomi kreatif	5	5,4—5,9 %	170.123,9	
		02 - Pertumbuhan PDB informasi dan komunikasi	5	7 %		
01.06.04.01 PRO-P: Penyediaan Insentif Inovasi dan Pengembangan Brand	01 - Terlaksananya penyediaan insentif inovasi dan pengembangan <i>brand</i>	01 - Jumlah skema insentif inovasi dan pengembangan <i>brand</i>	4	2 skema	59.446,4	KEMENTERIAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF/BADAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF
01.06.04.02 PRO-P: Penyediaan Insentif Penerapan dan Komersialisasi HKI	01 - Terlaksananya penyediaan insentif penerapan dan komersialisasi HKI	01 - Jumlah penyediaan insentif penerapan dan komersialisasi HKI	5	1.500 kegiatan	5.000,0	KEMENTERIAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF/BADAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

PN/PP/KP/ProP	Sasaran	Indikator	Dukungan Terhadap Arahan Presiden	Target	Rp. Juta	Instansi Pelaksana
01.06.04.03 PRO-P: Fasilitasi Rantai Pasok dan <i>Scale-up</i> Karya dan Platform Kreatif Unggulan	01 - Terlaksananya fasilitasi rantai pasok dan <i>scale-up</i> karya dan platform kreatif unggulan	01 - Jumlah fasilitasi rantai pasok dan <i>scale-up</i> karya dan platform kreatif unggulan	5	200 kerja sama	6.000,0	KEMENTERIAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF/BADAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF
01.06.04.04 PRO-P: Peningkatan Kerja Sama Pengembangan Kota Kreatif	01 - Terlaksananya peningkatan kerja sama pengembangan kota kreatif	01 - Jumlah kerja sama pengembangan kota kreatif	5	5 kawasan	40.250,0	KEMENTERIAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF/BADAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF (Terintegrasi dengan PSN)
01.06.04.05 PRO-P: Pengembangan ' <i>Start-Up Parks</i> ' dan <i>Center of Excellence</i>	01 - Terlaksananya pengembangan ' <i>Start-Up Parks</i> ' dan <i>Center of Excellence</i>	01 - Jumlah ' <i>Start-Up Parks</i> ' dan <i>Center of Excellence</i> yang dikembangkan	5	1 kerja sama	5.409,0	KEMENTERIAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF/BADAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF, KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN
01.06.04.06 PRO-P: Pengembangan Pendampingan dan Inkubasi di Ruang Kreatif	01 - Terlaksananya pengembangan pendampingan dan inkubasi di ruang kreatif	01 - Jumlah pengembangan pendampingan dan inkubasi di ruang kreatif	5	184 kegiatan	27.121,7	KEMENTERIAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF/BADAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF
01.06.04.07 PRO-P: Pengembangan Kawasan <i>Be Creative District</i> (BCD)	01 - Terlaksananya pengembangan kawasan <i>Be Creative District</i> (BCD)	01 - Jumlah kawasan <i>Be Creative District</i> (BCD) yang dikembangkan	5	1 kegiatan	26.896,8	KEMENTERIAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF/BADAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF, KEMENTERIAN INVESTASI/BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
01.06.05 KP: Perbaikan Iklim Usaha dan Peningkatan Investasi, termasuk Reformasi Ketenagakerjaan	01 - Terlaksananya perbaikan iklim usaha dan peningkatan investasi, termasuk reformasi ketenagakerjaan	01 - Kontribusi PMDN terhadap total realisasi PMA dan PMDN 02 - Kontribusi realisasi investasi luar Jawa	5 5	50,3—50,5 % 48,7—49,6 %	1.141.200,8	



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

PN/PP/KP/ProP	Sasaran	Indikator	Dukungan Terhadap Arahan Presiden	Target	Rp. Juta	Instansi Pelaksana
01.06.05.01 PRO-P: Kepastian Hukum Berusaha dan Investasi	01 - Terlaksananya kepastian hukum berusaha dan investasi	01 - Jumlah usulan perubahan regulasi/peraturan yang menghambat investasi	5	1 usulan rekomendasi	69.237,9	KEMENTERIAN INVESTASI/BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL, KEMENTERIAN PERDAGANGAN, KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA (KPPU)
01.06.05.02 PRO-P: Fasilitasi Kemudahan Usaha dan Investasi	01 - Terlaksananya fasilitasi kemudahan usaha dan investasi	01 - Jumlah perusahaan yang difasilitasi penyelesaian masalah penanaman modal di wilayah I,II,III, IV, dan V	5	115 perusahaan	388.133,7	KEMENTERIAN INVESTASI/BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL, KEMENTERIAN DALAM NEGERI, KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN, KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN, KEMENTERIAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF/BADAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF, KEMENTERIAN PERDAGANGAN, KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA (KPPU)
01.06.05.03 PRO-P: Peningkatan Iklim Ketenagakerjaan dan Hubungan Industrial	01 - Meningkatnya jaminan perlindungan hak-hak pekerja dan dialog sosial pada perusahaan	01 - Jumlah pekerja pada perusahaan yang menerapkan perlindungan hak-hak pekerja dan dialog sosial	5	7.056.010 orang	683.829,2	BADAN PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA (BP2MI), KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN, KEMENTERIAN DALAM NEGERI, KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN
01.06.06 KP: Pengembangan Industri Halal	01 - Terlaksananya pengembangan industri halal	01 - Jumlah sektor industri halal yang difasilitasi	5	3 sektor industri	1.221.632,0	
01.06.06.01 PRO-P: Penguatan Regulasi dan Fasilitasi Usaha bagi Industri Halal	01 - Tersedianya Peraturan yang dapat mendukung peningkatan industri halal di Indonesia	01 - Jumlah Peraturan/Kebijakan terkait pengembangan industri halal	5	15 peraturan	687,4	KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN
	02 - Meningkatnya dukungan layanan keuangan syariah bagi pelaku Industri halal	01 - Terbentuknya <i>National Halal Fund</i> yang dinyatakan dalam suatu peraturan/pedoman	5	1 unit		



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

PN/PP/KP/ProP	Sasaran	Indikator	Dukungan Terhadap Arahan Presiden	Target	Rp. Juta	Instansi Pelaksana
		03 - Tersedianya regulasi yang mendukung penguatan integrasi hulu-hilir industri halal di Indonesia	01 - Jumlah peraturan terkait penguatan rantai pasok industri halal	5	1 rekomendasi kebijakan	
01.06.06.02 PRO-P: Penguatan Pelaku Industri Halal	01 - Terdapatnya Sentra I/UKM Pangan halal di seluruh Indonesia	01 - Jumlah Sentra U/IKM Pangan yang ditetapkan sebagai Sentra U/IKM halal	5	8 sentra	0,0 ^(a)	KEMENTERIAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF/BADAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF, KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN, KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
	02 - Meningkatnya kemampuan Unit Usaha dalam mengembangkan kegiatan usaha	01 - Jenis fasilitasi yang dilakukan bagi pelaku usaha Industri halal	5	6 jenis bentuk layanan		
	03 - Pola kemitraan antar pelaku usaha di berbagai jenis skala industri halal	01 - Proporsi IMK dan UMK yang menjalin kemitraan	5	15 %		
01.06.06.03 PRO-P: Pengembangan Infrastruktur Industri Halal	01 - Tersedianya infrastruktur teknologi informasi	01 - Terbentuknya layanan sertifikasi halal dan sistem <i>traceability</i> berbasis digitalisasi	5	1 unit	1.199.849,2	KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN, KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI, KEMENTERIAN PERDAGANGAN, KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN, KEMENTERIAN PERTANIAN, KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	02 - Beroperasinya kawasan industri tematik halal	01 - Jumlah kawasan industri tematik halal yang beroperasi	5	4 lokasi		
	03 - Tersedianya infrastruktur pendukung industri produk halal	01 - Jumlah laboratorium pengujian halal di Indonesia	5	30 unit laboratorium		
01.06.06.04 PRO-P: Kerjasama Internasional Industri Halal	01 - Dikenalnya Indonesia di dunia internasional sebagai negara pusat produsen halal	01 - Jumlah pameran dalam/luar negeri	5	30 kegiatan	21.095,3	KEMENTERIAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF/



**FRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

PN/PP/KP/ProP	Sasaran	Indikator	Dukungan Terhadap Arahan Presiden	Target	Rp. Juta	Instansi Pelaksana
	02 - Disepakatinya transaksi perdagangan regular antara pelaku industri dan UMK produk halal	01 - Jumlah negara yang memiliki perjanjian perdagangan industri halal Indonesia	5	16 negara		BADAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF, KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN
01.06.06.05 PRO-P: Pengembangan Pariwisata Halal	01 - Terbentuknya unit khusus yang menangani pengembangan wisata ramah muslim	01 - Jumlah Struktur/Lembaga Pengembangan Wisata ramah Muslim	5	1 lembaga	0,0 ^(a)	KEMENTERIAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF/BADAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF
	02 - Tersedianya rencana strategis pengembangan wisata ramah muslim	01 - Tersedianya rencana strategis pengembangan wisata ramah muslim	5	1 dokumen		
	03 - Tersedianya peraturan pengembangan wisata ramah muslim yang terintegrasi	01 - Jumlah peraturan pengembangan wisata ramah muslim yang terintegrasi	5	1 peraturan		
01.06.06.06 PRO-P: Penguatan Halal <i>Value Chain</i>	01 - Penguatan klusterisasi dan industrialisasi produk halal dalam proses hilirisasi	01 - Terdapatnya kawasan industri halal yang menerapkan sistem rantai pasok terintegrasi	5	1 proyek	0,0 ^(a)	KEMENTERIAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF/BADAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF
01.07 PP: Peningkatan Ekspor Bernilai Tambah Tinggi dan Penguatan Tingkat Kandungan Dalam Negeri (TKDN)	01 - Meningkatkan ekspor bernilai tambah tinggi dan penguatan Tingkat Kandungan Dalam Negeri (TKDN)	01 - Neraca perdagangan barang	5	40,4—44,9 miliar US\$	2.947.704,3	
		02 - Pertumbuhan ekspor nonmigas	5	1,2—3,7 %		
		03 - Jumlah wisatawan mancanegara	5	3,5—7,4 juta kunjungan		
		04 - Jumlah kunjungan wisatawan nusantara	5	1.200—1.400 juta perjalanan		
		05 - Pertumbuhan ekspor produk industri berteknologi tinggi	5	8,5—10,7 %		



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

PN/PP/KP/ProP	Sasaran	Indikator	Dukungan Terhadap Arah Presiden	Target	Rp. Juta	Instansi Pelaksana
01.07.01 KP: Peningkatan Diversifikasi, Nilai Tambah, dan Daya Saing Produk Ekspor dan Jasa	01 - Meningkatnya diversifikasi, nilai tambah, dan daya saing produk ekspor dan jasa	01 - Nilai ekspor industri pengolahan	5	170,9 miliar US\$	2.245.113,6	
		02 - Kontribusi ekspor industri pengolahan	5	75 %		
		03 - Kontribusi ekspor produk industri berteknologi tinggi (komputer, instrumen ilmiah, mesin listrik, dirgantara)	5	12,5 %		
		04 - Ekspor hasil pertanian (fob)	5	4,7 miliar US\$		
		05 - Pertumbuhan ekspor pertanian	5	9,0—10,0 %		
		06 - Nilai ekspor produk industri kehutanan	5	10,00 miliar US\$		
		07 - Rasio ekspor jasa terhadap PDB	5	1,7 %		
		08 - Nilai ekspor produk rempah-rempah	5	1.785,84 juta US\$		
		09 - Nilai Ekspor Hasil Perikanan	5	7,66 miliar US\$		
01.07.01.01 PRO-P: Peningkatan Diversifikasi Produk Ekspor dan Jasa	01 - Terlaksananya peningkatan diversifikasi produk ekspor dan jasa	01 - Jumlah perusahaan yang difasilitasi bantuan permesinan	5	60 perusahaan	3.927,3	KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN, KEMENTERIAN PERDAGANGAN
01.07.01.02 PRO-P: Peningkatan Nilai Tambah Produk Ekspor dan Jasa	01 - Terlaksananya peningkatan nilai tambah produk ekspor dan jasa	01 - Jumlah produk ekspor yang diberikan fasilitasi pengembangan produk	5	293 produk	95.930,1	KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN, KEMENTERIAN PERDAGANGAN, KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

PN/PP/KP/ProP	Sasaran	Indikator	Dukungan Terhadap Arahan Presiden	Target	Rp. Juta	Instansi Pelaksana
01.07.01.03 PRO-P: Perluasan Ekspor Gastronomi Indonesia <i>Spice Up The World</i>	01 - Terlaksananya peningkatan nilai tambah produk ekspor dan jasa	01 - Jumlah restoran Indonesia di Luar Negeri	5	3.000 unit	2.145.256,2	KEMENTERIAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF/BADAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF, KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI, KEMENTERIAN KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH, KEMENTERIAN PERTANIAN, KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN, BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN, KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI, KEMENTERIAN PERHUBUNGAN, KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN (Terintegrasi dengan PSN)
01.07.02 KP: Peningkatan Akses dan Pendalaman Pasar Ekspor	01 - Meningkatkan akses dan pendalaman pasar ekspor	01 - Jumlah negara tujuan ekspor	5	222 negara	182.430,1	
		02 - Pangsa pasar ekspor produk Indonesia di kawasan Afrika, Amerika Selatan, dan Eropa Timur	5	2,30 %		
		03 - Pangsa pasar ekspor produk Indonesia di pasar tradisional	5	3,90 %		
01.07.02.01 PRO-P: Peningkatan Pangsa Pasar Produk Indonesia	01 - Terlaksananya peningkatan pangsa pasar produk Indonesia	01 - Jumlah kegiatan promosi, pencitraan dan misi dagang	5	26 kegiatan	132.063,1	KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN, KEMENTERIAN KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH, KEMENTERIAN PERDAGANGAN, KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

PN/PP/KP/ProP	Sasaran	Indikator	Dukungan Terhadap Arahan Presiden	Target	Rp. Juta	Instansi Pelaksana
01.07.02.02 PRO-P: Fasilitasi Ekspor	01 - Terlaksananya fasilitasi ekspor	01 - Jumlah pelaku usaha yang mendapatkan fasilitasi ekspor (pelayanan ekspor-impor melalui INATRADE, pelayanan SKA, dan fasilitasi pembiayaan perdagangan)	5	1.009.200 badan usaha	15.672,0	KEMENTERIAN KEUANGAN, KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN, KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN
01.07.02.03 PRO-P: Peningkatan Daya Saing Industri Guna Mendorong Peningkatan Ekspor	01 - Terlaksananya peningkatan daya saing industri guna mendorong peningkatan ekspor	01 - Nilai ekspor produk industri sektor ILMATE	5	46,81 miliar US\$	34.695,0	KEMENTERIAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF/BADAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF, KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN, KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN, BADAN STANDARISASI NASIONAL (BSN)
		02 - Nilai ekspor produk industri sektor agro	5	62,61 miliar US\$		
		03 - Nilai ekspor produk industri IKFT	5	38,85 miliar US\$		
		04 - Nilai ekspor produk industri aneka	5	12,36 miliar US\$		
01.07.03 KP: Pengelolaan Impor	01 - Meningkatnya pengelolaan impor	01 - Tingkat Kandungan Dalam Negeri (TKDN) (Rerata Tertimbang)	5	52,0 %	30.614,7	
01.07.03.01 PRO-P: Penguatan Kebijakan Perlindungan Akses Pasar Dalam Negeri	01 - Terlaksananya penguatan kebijakan perlindungan akses pasar dalam negeri	01 - Jumlah pengawasan <i>post border</i>	5	3.162 produk	30.614,7	KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN, KEMENTERIAN PERDAGANGAN
01.07.04 KP: Peningkatan Kandungan dan Penggunaan Produk Dalam Negeri termasuk Melalui Pengadaan Pemerintah yang Efektif	01 - Meningkatnya kandungan dan penggunaan produk dalam negeri termasuk melalui pengadaan pemerintah yang efektif	01 - Produk tersertifikasi TKDN > 25% yang masih berlaku	5	7.640 produk (kumulatif)	57.911,9	
		02 - Capaian TKDN Industri Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai	5	40 persen (kumulatif)		



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

PN/PP/KP/ProP	Sasaran	Indikator	Dukungan Terhadap Arahan Presiden	Target	Rp. Juta	Instansi Pelaksana
01.07.04.01 PRO-P: Pengembangan Sistem Katalog	01 - Terlaksananya pengembangan sistem katalog	01 - Jumlah Kontrak Katalog Lokal/Sektoral	5	50 katalog	57.911,9	KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN, KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL, LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH (LKPP)
		02 - Jumlah Produk yang Masuk dalam <i>E-Katalog</i>	5	2.000.000 produk		
		03 - Sistem <i>E-Purchasing</i> Terintegrasi	4, 5	1 sistem informasi		
01.07.05 KP: Peningkatan Partisipasi dalam Jaringan Produksi Global	01 - Meningkatnya partisipasi dalam jaringan produksi global	01 - Jumlah kesepakatan industri dalam jaringan produksi global	5	2 kesepakatan	143.000,0	
01.07.05.01 PRO-P: Peningkatan Investasi (<i>Inbound & Outbound</i>) Industri GPN Berbasis Hilirisasi SDA, Teknologi Tinggi	01 - Terlaksananya peningkatan investasi (<i>inbound</i> dan <i>outbound</i>) industri GPN berbasis hilirisasi SDA teknologi tinggi	01 - Jumlah perusahaan yang difasilitasi kemitraan dalam global <i>value chain</i>	5	25 badan usaha	143.000,0	KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN
01.07.06 KP: Peningkatan Citra dan Diversifikasi Pemasaran Destinasi Pariwisata Prioritas dan Destinasi <i>Branding</i> , dan Produk Kreatif	01 - Meningkatnya citra dan diversifikasi pemasaran, destinasi pariwisata prioritas dan destinasi <i>branding</i> , dan produk kreatif	01 - Jumlah <i>branding Wonderful</i> Indonesia	5	10 destinasi <i>branding</i>	143.680,3	
		02 - Nilai ekspor ekonomi kreatif	5	26,46 miliar US\$		
01.07.06.02 PRO-P: Pendalaman Pasar Tradisional dan Diversifikasi Pemasaran ke Pasar Baru	01 - Terlaksananya pendalaman pasar tradisional dan diversifikasi pemasaran ke pasar baru	01 - Jumlah pendalaman pasar tradisional dan diversifikasi pemasaran ke pasar baru	5	48 regional pemasaran	139.680,3	KEMENTERIAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF/BADAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF, KEMENTERIAN PEMUDA DAN OLAHRAGA



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

PN/PP/KP/ProP	Sasaran	Indikator	Dukungan Terhadap Arah Presiden	Target	Rp. Juta	Instansi Pelaksana
01.07.06.04 PRO-P: Perluasan Diklat Manajemen Usaha dan Pemasaran	01 - Terlaksananya perluasan diklat manajemen usaha dan pemasaran	01 - Jumlah diklat manajemen usaha dan pemasaran	1, 5	7.000 orang	4.000,0	KEMENTERIAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF/BADAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF
01.07.07 KP: Peningkatan Efektivitas <i>Preferential Trade Agreement</i> (PTA)/ <i>Free Trade Agreement</i> (FTA)/ <i>Comprehensive Economic Partnership Agreement</i> (CEPA) dan Diplomasi Ekonomi	01 - Meningkatnya efektivitas <i>Preferential Trade Agreement</i> (PTA)/ <i>Free Trade Agreement</i> (FTA)/ <i>Comprehensive Economic Partnership Agreement</i> (CEPA) dan diplomasi ekonomi	01 - Tingkat Efektivitas Diplomasi Ekonomi di Sektor Perdagangan	5	89,90 %	144.953,7	
		02 - Tingkat Efektivitas Diplomasi Ekonomi di Sektor Pariwisata	5	79,34 %		
		03 - Jumlah ratifikasi perjanjian kerja sama ekonomi internasional	5	4 ratifikasi		
		04 - Jumlah promosi <i>Tourism, Trade, and Investment</i> (TTI) terintegrasi	5	4 promosi terintegrasi		
		05 - PTA/FTA/CEPA yang disepakati	5	35 (kumulatif) kesepakatan		
01.07.07.01 PRO-P: Peningkatan Kapasitas dan Kualitas Sumber Daya Manusia (Negosiator) dan Kelembagaan Perwakilan RI di Luar Negeri termasuk FTA Center	01 - Terlaksananya peningkatan kapasitas dan kualitas SDM (negosiator) dan kelembagaan perwakilan RI di luar negeri, termasuk FTA Center	01 - Jumlah kegiatan peningkatan kapasitas negosiator	5	180 orang	1.995,4	KEMENTERIAN PERDAGANGAN
01.07.07.02 PRO-P: Peningkatan Jumlah Kesepakatan dan Penyelesaian Proses Ratifikasi Kerja Sama Ekonomi Internasional	01 - Terlaksananya peningkatan kesepakatan dan penyelesaian proses ratifikasi kerja sama ekonomi internasional	01 - Jumlah kesepakatan dan perjanjian perdagangan yang diikuti	5	107 dokumen kesepakatan/perundingan	113.941,0	KEMENTERIAN PERDAGANGAN



**FRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

PN/PP/KP/ProP	Sasaran	Indikator	Dukungan Terhadap Arahan Presiden	Target	Rp. Juta	Instansi Pelaksana
01.07.07.03 PRO-P: Promosi Terintegrasi	01 - Terlaksananya promosi terintegrasi	01 - Jumlah promosi terintegrasi	5	4 pameran	29.017,3	KEMENTERIAN PERDAGANGAN, KEMENTERIAN INVESTASI/BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
01.08 PP: Penguatan Pilar Pertumbuhan dan Daya Saing Ekonomi	01 - Menguatnya pilar pertumbuhan dan daya saing ekonomi	01 - Kontribusi sektor jasa keuangan/PDB	5	4,15—4,21 %	4.203.624,8	
		02 - <i>Skor logistic performance index</i>	5	3,4 skor		
		03 - Rasio M2/PDB	5	48,2—48,9 %		
		04 - Peringkat <i>travel and tourism development index</i>	5	29—34 peringkat		
		05 - Pembaruan sistem inti administrasi perpajakan (<i>core tax administration system</i>)	5	96 %		
		06 - Imbal hasil (<i>yield</i>) surat berharga negara	5	menurun		
		07 - Rasio TKDD yang berbasis kinerja terhadap TKDD meningkat	5	31,94 %		
		08 - Penyediaan Data Ekonomi dan Sosial yang Berkualitas	5	8 <i>database</i>		
01.08.01 KP: Peningkatan Pendalaman Sektor Keuangan	01 - Meningkatkan pendalaman sektor keuangan	01 - Rasio kredit/PDB	5	33,3—34,0 %	1.308,1	
		02 - Jumlah mesin ATM per 100.000 penduduk dewasa	5	57,1 unit		
		03 - Jumlah kantor layanan bank per 100.000 penduduk dewasa	5	15,3 unit		



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

PN/PP/KP/ProP	Sasaran	Indikator	Dukungan Terhadap Arahan Presiden	Target	Rp. Juta	Instansi Pelaksana
		04 - Skema pembiayaan berbasis HKI	5	1 skema		
01.08.01.01 PRO-P: Peningkatan Inklusi Keuangan, Inovasi Sektor Keuangan, dengan Menjaga Stabilitas dan Integritas Sistem Keuangan	01 - Terlaksananya peningkatan inklusi keuangan, inovasi sektor keuangan, dengan menjaga stabilitas dan integritas sistem keuangan	01 - Indeks inklusi keuangan	5	88 %	408,1	KEMENTERIAN KEUANGAN, KEMENTERIAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF/BADAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF
01.08.01.02 PRO-P: Peningkatan Pengembangan dan Pendalaman Pasar Keuangan Pemerintah	01 - Terlaksananya peningkatan pengembangan dan pendalaman pasar keuangan pemerintah	01 - <i>Turnover</i> rasio SBN	5	5,11 %	900,0	KEMENTERIAN DALAM NEGERI
01.08.02 KP: Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Digital dan Industri 4.0	01 - Meningkatnya optimalisasi pemanfaatan teknologi digital dan industri 4.0	01 - Kontribusi ekonomi digital	5	6,00 %	120.740,3	
		02 - Nilai transaksi <i>e-commerce</i>	5	843,4 triliun rupiah		
01.08.02.01 PRO-P: Penguatan Industri <i>Fintech, e-Commerce, On-Demand Service, dan Internet Of Things</i>	01 - Jumlah fasilitator edukasi perdagangan melalui sistem elektronik yang mendapat pelatihan (fasilitator)	01 - Jumlah fasilitator edukasi perdagangan melalui sistem elektronik yang mendapat pelatihan (fasilitator)	5	200 orang	86.943,2	KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN, KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN, KEMENTERIAN PERDAGANGAN, KEMENTERIAN KEUANGAN
01.08.02.02 PRO-P: Modernisasi Industri Hingga 4.0 Sesuai Karakteristik Industri	01 - Terlaksananya modernisasi industri hingga 4.0 sesuai karakteristik industri	01 - Jumlah perusahaan dengan nilai Indonesia <i>Industry 4.0 Readiness Index</i> (INDI 4.0) > 3.0	5	52 perusahaan	33.797,1	KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN, KEMENTERIAN KEUANGAN
01.08.03 KP: Peningkatan Sistem Logistik dan Stabilitas Harga	01 - Meningkatnya sistem logistik dan stabilitas harga	01 - <i>Skor logistic performance index</i>	5	3,4	251.845,7	
		02 - Tingkat inflasi	5	2,0—4,0 %		



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

PN/PP/KP/ProP	Sasaran	Indikator	Dukungan Terhadap Arahan Presiden	Target	Rp. Juta	Instansi Pelaksana
01.08.03.01 PRO-P: Pembangunan Sarana dan Prasarana Pendukung Efisiensi Sistem Logistik	01 - Terlaksananya pembangunan sarana dan prasarana pendukung efisiensi sistem logistik	01 - Jumlah sarana prasarana pendukung efisiensi distribusi yang dibangun	5	87 unit	233.845,7	KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN, KEMENTERIAN PERDAGANGAN
01.08.03.02 PRO-P: Pengendalian Inflasi	01 - Terjaganya inflasi pangan bergejolak	01 - Tingkat inflasi pangan bergejolak	5	5,9 %	18.000,0	KEMENTERIAN PERDAGANGAN
01.08.04 KP: Peningkatan Penerapan Praktik Berkelanjutan di Industri Pengolahan dan Pariwisata	01 - Meningkatnya penerapan praktik berkelanjutan di industri pengolahan dan pariwisata	01 - Efisiensi perusahaan industri yang menerapkan prinsip industri hijau	5	6 %	69.198,8	KEMENTERIAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF/BADAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF, KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
		02 - Jumlah lokasi penerapan <i>sustainable tourism development</i>	5	11 lokasi		
01.08.04.01 PRO-P: Penerapan Standar Pariwisata Berkelanjutan	01 - Jumlah destinasi dengan penerapan standar pariwisata berkelanjutan (destinasi)	01 - Jumlah destinasi dengan penerapan standar pariwisata berkelanjutan (destinasi)	5	11	59.986,0	KEMENTERIAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF/BADAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF, KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
01.08.04.02 PRO-P: Penerapan Industri Hijau	01 - Perusahaan industri menengah besar yang tersertifikasi Standar Industri Hijau (SIH) berdasarkan SIH yang ditetapkan	01 - Perusahaan industri menengah besar yang tersertifikasi Standar Industri Hijau (SIH) berdasarkan SIH yang ditetapkan	5	61 perusahaan	9.212,8	KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN
01.08.05 KP: Reformasi Fiskal	01 - Terlaksananya reformasi fiskal	01 - Persentase realisasi penerimaan negara	5	100 %	562.895,8	



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

PN/PP/KP/ProP	Sasaran	Indikator	Dukungan Terhadap Arahan Presiden	Target	Rp. Juta	Instansi Pelaksana
01.08.05.01 PRO-P: Pembaruan Sistem Informasi Administrasi Perpajakan yang Andal dan Terintegrasi	01 - Terlaksananya pembaruan sistem informasi administrasi perpajakan yang andal dan terintegrasi	01 - Jumlah Proses Bisnis <i>Core Tax System</i>	5	3 kegiatan (<i>Test, Data Migration, dan Initial Deploy</i>) Proses Bisnis	545.956,8	KEMENTERIAN KEUANGAN
01.08.05.03 PRO-P: Perumusan Kebijakan Terkait Pembiayaan	01 - Terlaksananya rekomendasi pengembangan pembiayaan	01 - Persentase terlaksananya rekomendasi pengembangan pembiayaan	5	100 %	16.605,5	KEMENTERIAN KEUANGAN
01.08.05.05 PRO-P: Pembangunan dan Pengembangan <i>Data Analytic</i>	01 - Terlaksananya pembangunan dan pengembangan <i>data analytic</i>	01 - Persentase pembangunan dan pengembangan <i>data analytic</i>	5	100 %	333,5	KEMENTERIAN KEUANGAN
01.08.06 KP: Peningkatan Ketersediaan dan Kualitas Data dan Informasi Perkembangan Ekonomi, Terutama Pangan, Kemaritiman, Pariwisata, Ekonomi Kreatif, dan Ekonomi Digital	01 - Meningkatkan ketersediaan dan kualitas data dan informasi perkembangan ekonomi, terutama pangan, kemaritiman, pariwisata, ekonomi kreatif, dan ekonomi digital	01 - Ketersediaan data statistik pariwisata dan ekonomi kreatif	5	4 <i>database</i>	3.197.636,2	
		02 - Ketersediaan data dan informasi statistik <i>e-commerce</i>	5	1 <i>database</i>		
		03 - Pelaksanaan sensus pertanian 2023 dan perbaikan data pangan	5	3 <i>database</i>		
		04 - Ketersediaan data statistik disagregasi PMTB	5	1 <i>database</i>		
01.08.06.01 PRO-P: Pengembangan Statistik Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	01 - Terlaksananya pengembangan statistik pariwisata dan ekonomi kreatif	01 - Jumlah publikasi/laporan statistik pariwisata dan ekonomi kreatif yang dikembangkan	5	4 <i>database</i>	170.815,5	BADAN PUSAT STATISTIK, KEMENTERIAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF/BADAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF
01.08.06.02 PRO-P: Pengembangan Statistik <i>e-Commerce</i>	01 - Terlaksanakannya pengembangan statistik <i>e-commerce</i>	01 - Jumlah publikasi/laporan statistik <i>e-commerce</i> yang dikembangkan	5	1 <i>database</i>	10.970,4	BADAN PUSAT STATISTIK



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

PN/PP/KP/ProP	Sasaran	Indikator	Dukungan Terhadap Arahan Presiden	Target	Rp. Juta	Instansi Pelaksana
01.08.06.03 PRO-P: Pelaksanaan Sensus Pertanian 2023 dan Perbaikan Statistik Pangan	01 - Terlaksananya sensus pertanian 2023 dan perbaikan statistik pangan	01 - Jumlah publikasi/laporan sensus pertanian 2023 dan perbaikan statistik pangan	5	3 <i>database</i>	2.990.787,6	BADAN PUSAT STATISTIK
01.08.06.04 PRO-P: Penyediaan Data Disagregasi PMTB	01 - Terlaksananya penyediaan data disagregasi PMTB	01 - Jumlah publikasi/laporan disagregasi PMTB	5	1 <i>database</i>	25.062,7	BADAN PUSAT STATISTIK

CATATAN:

- (1) Sesuai dengan pendekatan THIS, sebuah proyek dapat mendukung lebih dari 1 (satu) Prioritas Nasional;
- (2) Prioritas Nasional mencakup rincian Belanja K/L, Dana Transfer Khusus, dan KPBU, belum mencakup dukungan Badan Usaha (BUMN/Swasta);
- (3) Alokasi DAK merupakan pagu alokasi per subbidang per tematik per daerah berdasarkan Perpres Rincian APBN TA 2023;
- (4) Perubahan rincian dan pendanaan proyek Belanja K/L, DAK Fisik, dan KPBU pada tahun pelaksanaan dapat dilakukan dengan persetujuan Menteri PPN/Kepala Bappenas dan Menteri Keuangan;
- (5) Dukungan Terhadap Arahan Presiden: 1. Pembangunan Sumber Daya Manusia; 2. Pembangunan Infrastruktur; 3. Penyederhanaan Regulasi; 4. Penyederhanaan Birokrasi; dan 5. Transformasi Ekonomi.

KETERANGAN:

- (a) *multitagging*.



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

PRIORITAS NASIONAL 2 : MENGEMBANGKAN WILAYAH UNTUK MENGURANGI KESENJANGAN DAN MENJAMIN PEMERATAAN

PN/PP/KP/ProP	Sasaran	Indikator	Dukungan Terhadap Arahan Presiden	Target	Rp. Juta	Instansi Pelaksana
02 PN: Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan	01 - Meningkatnya pertumbuhan ekonomi dan tingkat kesejahteraan masyarakat di Kawasan Timur Indonesia (KTI)	01 - Laju pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) KTI		6,4—6,9 % per tahun	124.918.845,1	
		02 - IPM KTI		62,54—78,18 nilai minimum—nilai maksimum		
		03 - Persentase penduduk miskin KTI		9,4—10,2 %		
	02 - Terjaganya pertumbuhan ekonomi dan tingkat kesejahteraan masyarakat di Kawasan Barat Indonesia (KBI)	01 - Laju pertumbuhan PDRB KBI		5,0—5,2 % per tahun		
		02 - IPM KBI		70,48—82,43 nilai minimum—nilai maksimum		
		03 - Persentase penduduk miskin KBI		7,3—7,9 %		
02.01 PP: Pembangunan Wilayah Sumatera	01 - Terjaganya pertumbuhan ekonomi dan tingkat kesejahteraan masyarakat di Wilayah Sumatera	01 - Laju pertumbuhan PDRB Wilayah Sumatera	5	4,5—4,8 % per tahun	42.215.093,5	
		02 - IPM Provinsi di Wilayah Sumatera	1	70,48—77,01 nilai minimum—nilai maksimum		
		03 - Persentase penduduk miskin Wilayah Sumatera	1	8,2—8,6 %		



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

PN/PP/KP/ProP	Sasaran	Indikator	Dukungan Terhadap Arahan Presiden	Target	Rp. Juta	Instansi Pelaksana
02.01.01 KP: Pengembangan Kawasan Strategis	01 - Berkembangnya kawasan strategis	01 - Rasio pertumbuhan investasi kawasan (KEK/KI/DPP/KPBPB) terhadap wilayah	5	>1	4.400.706,4	
		02 - Jumlah kawasan pusat pertumbuhan yang difasilitasi dan dikembangkan	5	17 kawasan		
		03 - Destinasi Pariwisata Prioritas (DPP)	5	2 jumlah destinasi		
		04 - Destinasi pariwisata pengembangan dan revitalisasi	5	2 jumlah destinasi		
		05 - KEK berbasis pariwisata dan industri	5	6 kawasan		
		06 - KI prioritas dan KI pengembangan	5	5 jumlah KI		
		07 - Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas (KPBPB)	5	2 jumlah kawasan		
02.01.01.01 PRO-P: Percepatan Peningkatan Investasi KEK Arun Lhokseumawe	01 - Terlaksananya percepatan peningkatan investasi KEK Arun Lhokseumawe	01 - Rasio pertumbuhan investasi kawasan (KEK/KI/DPP/KPBPB) terhadap pertumbuhan investasi Provinsi Aceh	5	>1	50.237,6	KEMENTERIAN PERHUBUNGAN, KEMENTERIAN INVESTASI/BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
02.01.01.02 PRO-P: Fasilitasi Realisasi Investasi dan Pembangunan KI/KEK Sei Mangkei	01 - Terlaksananya fasilitasi realisasi investasi dan pembangunan KI/KEK Sei Mangkei	01 - Rasio pertumbuhan investasi kawasan (KEK/KI/DPP/KPBPB) terhadap pertumbuhan investasi Provinsi Sumatera Utara	5	>1	2.554.499,4	KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN, KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL, KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BPN, KEMENTERIAN PERHUBUNGAN, KEMENTERIAN INVESTASI/BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL,



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

PN/PP/KP/ProP	Sasaran	Indikator	Dukungan Terhadap Arahan Presiden	Target	Rp. Juta	Instansi Pelaksana
						KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
02.01.01.03 PRO-P: Perbaikan Aksesibilitas, Atraksi dan Amenitas Destinasi Pariwisata Prioritas Danau Toba dan sekitarnya	01 - Terlaksananya perbaikan aksesibilitas, atraksi dan amenitas destinasi pariwisata prioritas Danau Toba dan sekitarnya	01 - Rasio pertumbuhan investasi kawasan (KEK/KI/DPP/KPBPB) terhadap pertumbuhan investasi Provinsi Sumatera Utara	5	>1	1.060.279,1	KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT, KEMENTERIAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF/BADAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF, KEMENTERIAN DALAM NEGERI, KEMENTERIAN PERHUBUNGAN, KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI, KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA (Terintegrasi dengan PSN)
02.01.01.04 PRO-P: Pembangunan Destinasi Pariwisata Pengembangan Padang-Bukittinggi	01 - Terlaksananya pembangunan destinasi pariwisata pengembangan Padang-Bukittinggi	01 - Rasio pertumbuhan investasi kawasan (KEK/KI/DPP/KPBPB) terhadap pertumbuhan investasi Provinsi Sumatera Barat	5	>1	0,0 ^(a)	KEMENTERIAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF/BADAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF, KEMENTERIAN DALAM NEGERI
02.01.01.05 PRO-P: Perbaikan Aksesibilitas, Atraksi dan Amenitas Destinasi Pariwisata Prioritas Bangka Belitung/KEK Tanjung Kelayang	01 - Terlaksananya perbaikan aksesibilitas, atraksi dan amenitas destinasi pariwisata prioritas Bangka Belitung/KEK Tanjung Kelayang	01 - Rasio pertumbuhan investasi kawasan (KEK/KI/DPP/KPBPB) terhadap pertumbuhan investasi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	5	>1	2.000,0	KEMENTERIAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF/BADAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF, KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT, KEMENTERIAN DALAM NEGERI, KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI, KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA, KEMENTERIAN INVESTASI/BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
02.01.01.06 PRO-P: Percepatan Peningkatan Investasi KPBPB Batam, Bintan, dan Karimun	01 - Terlaksananya percepatan peningkatan investasi KPBPB Batam, Bintan, dan Karimun	01 - Rasio pertumbuhan investasi kawasan (KEK/KI/DPP/KPBPB) terhadap pertumbuhan investasi Provinsi Kepulauan Riau	5	>1	708.294,3	BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM (BPKPB BATAM)



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

PN/PP/KP/ProP	Sasaran	Indikator	Dukungan Terhadap Arahan Presiden	Target	Rp. Juta	Instansi Pelaksana
02.01.01.07 PRO-P: Fasilitas Realisasi Investasi dan Pembangunan KI/KEK Galang Batang	01 - Terlaksananya fasilitasi realisasi investasi dan pembangunan KI/KEK Galang Batang	01 - Rasio pertumbuhan investasi kawasan (KEK/KI/DPP/KPBPB) terhadap pertumbuhan investasi Provinsi Kepulauan Riau	5	>1	2.619,2	KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN, KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL, KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BPN, KEMENTERIAN INVESTASI/BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
02.01.01.08 PRO-P: Pembangunan Destinasi Pariwisata Pengembangan Batam Bintan	01 - Terlaksananya pembangunan destinasi pariwisata pengembangan Batam Bintan	01 - Rasio pertumbuhan investasi kawasan (KEK/KI/DPP/KPBPB) terhadap pertumbuhan investasi Provinsi Kepulauan Riau	5	>1	10.100,0	KEMENTERIAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF/BADAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF, KEMENTERIAN DALAM NEGERI, KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI
02.01.01.10 PRO-P: Fasilitas Realisasi Investasi dan Pembangunan KI Bintan Aerospace	01 - Terlaksananya percepatan peningkatan investasi KI Bintan Aerospace	01 - Rasio pertumbuhan investasi kawasan (KEK/KI/DPP/KPBPB) terhadap pertumbuhan investasi Provinsi Kepulauan Riau	5	>1	0,0 ^(a)	KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN, KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL, KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BPN
02.01.01.11 PRO-P: Fasilitas Realisasi Investasi dan Pembangunan KI Sadai	01 - Terlaksananya percepatan peningkatan investasi KI Sadai	01 - Rasio pertumbuhan investasi kawasan (KEK/KI/DPP/KPBPB) terhadap pertumbuhan investasi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	5	>1	0,0 ^(a)	KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN, KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL, KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BPN
02.01.01.12 PRO-P: Percepatan Peningkatan Investasi KPBPB Sabang	01 - Terlaksananya percepatan peningkatan investasi KPBPB Sabang	01 - Rasio pertumbuhan investasi kawasan (KEK/KI/DPP/KPBPB) terhadap pertumbuhan investasi Provinsi Aceh	5	>1	12.676,9	BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS SABANG (BPKPB SABANG)
02.01.01.13 PRO-P: Fasilitas Realisasi Investasi dan Pembangunan KI Tenayan	01 - Terlaksananya Fasilitas Realisasi Investasi dan Pembangunan KI Tenayan	01 - Rasio pertumbuhan investasi kawasan (KEK/KI/DPP/KPBPB) terhadap pertumbuhan investasi Provinsi Riau	5	>1	0,0 ^(a)	KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL, KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN, KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BPN



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

PN/PP/KP/ProP	Sasaran	Indikator	Dukungan Terhadap Arahan Presiden	Target	Rp. Juta	Instansi Pelaksana
02.01.01.14 PRO-P: Percepatan Operasionalisasi KEK Batam Aero Technic	01 - Terlaksananya Percepatan Operasionalisasi KEK Batam Aero Technic	01 - Rasio pertumbuhan investasi kawasan (KEK/KI/DPP/KPBPB) terhadap pertumbuhan investasi Provinsi Kepulauan Riau	5	>1	0,0 ^(a)	KEMENTERIAN INVESTASI/BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
02.01.01.15 PRO-P: Percepatan Operasionalisasi KEK Nongsa	01 - Terlaksananya Percepatan Operasionalisasi KEK Nongsa	01 - Rasio pertumbuhan investasi kawasan (KEK/KI/DPP/KPBPB) terhadap pertumbuhan investasi Provinsi Kepulauan Riau	5	>1	0,0 ^(a)	KEMENTERIAN INVESTASI/BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
02.01.02 KP: Pengembangan Sektor Unggulan	01 - Berkembangnya sektor unggulan	01 - Persentase peningkatan produksi komoditas unggulan per tahun - kakao	5	3—5 %	107.485,0	
		02 - Persentase peningkatan produksi komoditas unggulan per tahun - kopi	5	2—4 %		
		03 - Persentase peningkatan produksi komoditas unggulan per tahun - kelapa	5	1—2 %		
		04 - Persentase peningkatan produksi komoditas unggulan per tahun - karet	5	2—3 %		
		05 - Persentase peningkatan produksi komoditas unggulan per tahun - perikanan tangkap	5	2—4 %		
		06 - Persentase peningkatan produksi komoditas unggulan per tahun - perikanan budidaya	5	4—6 %		



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

PN/PP/KP/ProP	Sasaran	Indikator	Dukungan Terhadap Arahan Presiden	Target	Rp. Juta	Instansi Pelaksana
		07 - Persentase peningkatan produksi komoditas unggulan per tahun - lada	5	1—2 %		
		08 - Persentase peningkatan produksi komoditas unggulan per tahun - pala	5	2—4 %		
		09 - Persentase peningkatan produksi komoditas unggulan per tahun - kelapa sawit	5	4—6 %		
		10 - Persentase peningkatan produksi komoditas unggulan per tahun - tebu	5	2—4 %		
		11 - Persentase peningkatan produksi komoditas unggulan per tahun - garam	5	4—6 %		
02.01.02.04 PRO-P: Pengembangan Komoditas Unggulan Lada, Pala, Cengkeh di Provinsi Aceh	01 - Terlaksananya pengembangan komoditas unggulan lada, pala, cengkeh	01 - Persentase peningkatan produksi komoditas unggulan per tahun Provinsi Aceh - pala	5	3—5 %	2.008,6	KEMENTERIAN PERTANIAN
02.01.02.07 PRO-P: Pengembangan Komoditas Unggulan Perikanan Budidaya di Provinsi Aceh	01 - Terlaksananya pengembangan komoditas unggulan perikanan budidaya	01 - Persentase peningkatan produksi komoditas unggulan per tahun per Provinsi Aceh - perikanan budidaya	5	5—7 %	12.745,0	KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
02.01.02.10 PRO-P: Pengembangan Komoditas Unggulan Karet di Provinsi Sumatera Utara	01 - Terlaksananya pengembangan komoditas unggulan karet	01 - Persentase peningkatan produksi komoditas unggulan per tahun Provinsi Sumatera Utara - karet	5	2—3 %	2.165,0	KEMENTERIAN PERTANIAN



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

PN/PP/KP/ProP	Sasaran	Indikator	Dukungan Terhadap Arahan Presiden	Target	Rp. Juta	Instansi Pelaksana
02.01.02.11 PRO-P: Pengembangan Komoditas Unggulan Kopi di Provinsi Sumatera Utara	01 - Terlaksananya pengembangan komoditas unggulan kopi	01 - Persentase peningkatan produksi komoditas unggulan per tahun Provinsi Sumatera Utara - kopi	5	2—4 %	17.115,5	KEMENTERIAN PERTANIAN
02.01.02.15 PRO-P: Pengembangan Komoditas Unggulan Perikanan Budidaya di Provinsi Sumatera Utara	01 - Terlaksananya pengembangan komoditas unggulan perikanan budidaya	01 - Persentase peningkatan produksi komoditas unggulan per tahun Provinsi Sumatera Utara - perikanan budidaya	5	23—25 %	2.025,0	KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
02.01.02.22 PRO-P: Pengembangan Komoditas Unggulan Perikanan Budidaya di Provinsi Sumatera Barat	01 - Terlaksananya pengembangan komoditas unggulan perikanan budidaya	01 - Persentase peningkatan produksi komoditas unggulan per tahun Provinsi Sumatera Barat - perikanan budidaya	5	1—2 %	2.322,5	KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
02.01.02.24 PRO-P: Pengembangan Komoditas Unggulan Karet di Provinsi Riau	01 - Terlaksananya pengembangan komoditas unggulan karet	01 - Persentase peningkatan produksi komoditas unggulan per tahun Provinsi Riau - karet	5	2—3 %	2.891,5	KEMENTERIAN PERTANIAN
02.01.02.25 PRO-P: Pengembangan Komoditas Unggulan Kelapa di Provinsi Riau	01 - Terlaksananya pengembangan komoditas unggulan kelapa	01 - Persentase peningkatan produksi komoditas unggulan per tahun Provinsi Riau - kelapa	5	2—3 %	3.866,0	KEMENTERIAN PERTANIAN
02.01.02.27 PRO-P: Pengembangan Komoditas Unggulan Perikanan Budidaya di Provinsi Riau	01 - Terlaksananya pengembangan komoditas unggulan perikanan budidaya	01 - Persentase peningkatan produksi komoditas unggulan per tahun Provinsi Riau - perikanan budidaya	5	5—7 %	2.022,5	KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

PN/PP/KP/ProP	Sasaran	Indikator	Dukungan Terhadap Arahan Presiden	Target	Rp. Juta	Instansi Pelaksana
02.01.02.31 PRO-P: Pengembangan Komoditas Unggulan Karet di Provinsi Jambi	01 - Terlaksananya pengembangan komoditas unggulan karet	01 - Persentase peningkatan produksi komoditas unggulan per tahun Provinsi Jambi - karet	5	2—3 %	2.420,0	KEMENTERIAN PERTANIAN
02.01.02.35 PRO-P: Pengembangan Komoditas Unggulan Perikanan Budidaya di Provinsi Jambi	01 - Terlaksananya pengembangan komoditas unggulan perikanan budidaya	01 - Persentase peningkatan produksi komoditas unggulan per tahun Provinsi Jambi - perikanan budidaya	5	1—3 %	2.465,3	KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
02.01.02.37 PRO-P: Pengembangan Komoditas Unggulan Karet di Provinsi Sumatera Selatan	01 - Terlaksananya pengembangan komoditas unggulan karet	01 - Persentase peningkatan produksi komoditas unggulan per tahun Provinsi Sumatera Selatan - karet	5	4—6 %	8.752,5	KEMENTERIAN PERTANIAN
02.01.02.38 PRO-P: Pengembangan Komoditas Unggulan Tebu di Provinsi Sumatera Selatan	01 - Terlaksananya pengembangan komoditas unggulan tebu	01 - Persentase peningkatan produksi komoditas unggulan per tahun Provinsi Sumatera Selatan - tebu	5	5—7 %	3.017,7	KEMENTERIAN PERTANIAN
02.01.02.42 PRO-P: Pengembangan Komoditas Unggulan Perikanan Budidaya di Provinsi Sumatera Selatan	01 - Terlaksananya pengembangan komoditas unggulan perikanan budidaya	01 - Persentase peningkatan produksi komoditas unggulan per tahun Provinsi Sumatera Selatan - perikanan budidaya	5	4—6 %	2.022,5	KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
02.01.02.50 PRO-P: Pengembangan Komoditas Unggulan Karet di Provinsi Lampung	01 - Terlaksananya pengembangan komoditas unggulan karet	01 - Persentase peningkatan produksi komoditas unggulan per tahun Provinsi Lampung - karet	5	5—7 %	3.113,4	KEMENTERIAN PERTANIAN



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

PN/PP/KP/ProP	Sasaran	Indikator	Dukungan Terhadap Arahan Presiden	Target	Rp. Juta	Instansi Pelaksana
02.01.02.53 PRO-P: Pengembangan Komoditas Unggulan Tebu di Provinsi Lampung	01 - Terlaksananya pengembangan komoditas unggulan tebu	01 - Persentase peningkatan produksi komoditas unggulan per tahun Provinsi Lampung - tebu	5	2—5 %	3.016,5	KEMENTERIAN PERTANIAN
02.01.02.54 PRO-P: Pengembangan Komoditas Unggulan Perikanan Tangkap di Provinsi Lampung	01 - Terlaksananya pengembangan komoditas unggulan perikanan tangkap	01 - Persentase peningkatan produksi komoditas unggulan per tahun Provinsi Lampung - perikanan tangkap	5	1—2 %	2.000,0	KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
02.01.02.55 PRO-P: Pengembangan Komoditas Unggulan Perikanan Budidaya di Provinsi Lampung	01 - Terlaksananya pengembangan komoditas unggulan perikanan budidaya	01 - Persentase peningkatan produksi komoditas unggulan per tahun Provinsi Lampung - perikanan budidaya	5	5—7 %	14.073,6	KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
02.01.02.56 PRO-P: Pengembangan Komoditas Unggulan Lada, Pala, Cengkeh di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	01 - Terlaksananya pengembangan komoditas unggulan lada, pala, cengkeh	01 - Persentase peningkatan produksi komoditas unggulan per tahun Provinsi Kepulauan Bangka Belitung - lada	5	2—3 %	1.360,2	KEMENTERIAN PERTANIAN
02.01.02.62 PRO-P: Pengembangan Komoditas Unggulan Perikanan Tangkap di Provinsi Kepulauan Riau	01 - Terlaksananya pengembangan komoditas unggulan perikanan tangkap	01 - Persentase peningkatan produksi komoditas unggulan per tahun Provinsi Kepulauan Riau - perikanan tangkap	5	1—2 %	1.185,0	KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
02.01.02.63 PRO-P: Pengembangan Komoditas Unggulan Kopi di Provinsi Riau	01 - Terlaksananya pengembangan komoditas unggulan kopi	01 - Persentase peningkatan produksi komoditas unggulan per tahun Provinsi Riau - kopi	5	4—6 %	3.030,0	KEMENTERIAN PERTANIAN



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

PN/PP/KP/ProP	Sasaran	Indikator	Dukungan Terhadap Arahan Presiden	Target	Rp. Juta	Instansi Pelaksana
02.01.02.65 PRO-P: Pengembangan Komoditas Unggulan Kelapa di Provinsi Aceh	01 - Terlaksananya pengembangan komoditas unggulan kelapa	01 - Persentase peningkatan produksi komoditas unggulan per tahun Provinsi Aceh - kelapa	5	1—2 %	355,0	KEMENTERIAN PERTANIAN
02.01.02.66 PRO-P: Pengembangan Komoditas Unggulan Kelapa di Provinsi Sumatera Utara	01 - Terlaksananya pengembangan komoditas unggulan kelapa	01 - Persentase peningkatan produksi komoditas unggulan per tahun Provinsi Sumatera Utara - kelapa	5	2—3 %	4.351,8	KEMENTERIAN PERTANIAN
02.01.02.70 PRO-P: Pengembangan Komoditas Unggulan Lada, Pala, Cengkeh di Provinsi Sumatera Barat	01 - Terlaksananya pengembangan komoditas unggulan lada, pala, cengkeh	01 - Persentase peningkatan produksi komoditas unggulan per tahun Provinsi Sumatera Barat - pala	5	2—3 %	250,5	KEMENTERIAN PERTANIAN
02.01.02.71 PRO-P: Pengembangan Komoditas Unggulan Lada, Pala, Cengkeh di Provinsi Lampung	01 - Terlaksananya pengembangan komoditas unggulan lada, pala, cengkeh	01 - Persentase peningkatan produksi komoditas unggulan per tahun Provinsi Lampung - pala	5	3—5 %	240,7	KEMENTERIAN PERTANIAN
02.01.02.72 PRO-P: Pengembangan Komoditas Unggulan Perikanan Budidaya di Provinsi Kepulauan Riau	01 - Terlaksananya pengembangan komoditas unggulan perikanan budidaya	01 - Persentase peningkatan produksi komoditas unggulan per tahun Provinsi Kepulauan Riau - perikanan budidaya	5	5—7 %	5.968,3	KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
02.01.02.73 PRO-P: Pengembangan Komoditas Unggulan Perikanan Budidaya di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	01 - Terlaksananya pengembangan komoditas unggulan perikanan budidaya	01 - Persentase peningkatan produksi komoditas unggulan per tahun Provinsi Kepulauan Bangka Belitung - perikanan budidaya	5	1 %	2.022,5	KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

PN/PP/KP/ProP	Sasaran	Indikator	Dukungan Terhadap Arahan Presiden	Target	Rp. Juta	Instansi Pelaksana
02.01.02.75 PRO-P: Pengembangan Komoditas Unggulan Kelapa di Provinsi Jambi	01 - Terlaksananya pengembangan komoditas unggulan kelapa	01 - Persentase peningkatan produksi komoditas unggulan per tahun Provinsi Jambi - kelapa	5	2—3 %	678,0	KEMENTERIAN PERTANIAN
02.01.02.77 PRO-P: Pengembangan Komoditas Unggulan Kakao di Provinsi Sumatera Utara	01 - Terlaksananya Pengembangan Komoditas Unggulan Kakao	01 - Persentase peningkatan produksi komoditas unggulan per tahun Provinsi Sumatera Utara - kakao	5	1—2 %	0,0 ^(a)	KEMENTERIAN PERTANIAN
02.01.03 KP: Pengembangan Kawasan Perkotaan	01 - Berkembangnya kawasan perkotaan	01 - Skor Indeks Kota Berkelanjutan/IKB Kota Banda Aceh (angka perhitungan sementara)	5	48,57	2.681.212,3	
		02 - Skor Indeks Kota Berkelanjutan/IKB Kota Sabang (angka perhitungan sementara)	5	44,88		
		03 - Skor Indeks Kota Berkelanjutan/IKB Kota Lhokseumawe (angka perhitungan sementara)	5	40,82		
		04 - Skor Indeks Kota Berkelanjutan/IKB Kota Langsa (angka perhitungan sementara)	5	40,87		
		05 - Skor Indeks Kota Berkelanjutan/IKB WM Medan (angka perhitungan sementara)	5	58,45		
		06 - Skor Indeks Kota Berkelanjutan/IKB Kota Sibolga (angka perhitungan sementara)	5	61,58		



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

PN/PP/KP/ProP	Sasaran	Indikator	Dukungan Terhadap Arah Presiden	Target	Rp. Juta	Instansi Pelaksana
		07 - Skor Indeks Kota Berkelanjutan/IKB Kota Pematangsiantar (angka perhitungan sementara)	5	56,66		
		08 - Skor Indeks Kota Berkelanjutan/IKB Kota Gunungsitoli (angka perhitungan sementara)	5	38,76		
		09 - Skor Indeks Kota Berkelanjutan/IKB Kota Padang (angka perhitungan sementara)	5	48,54		
		10 - Skor Indeks Kota Berkelanjutan/IKB Kota Solok (angka perhitungan sementara)	5	43,31		
		11 - Skor Indeks Kota Berkelanjutan/IKB Kota Bukittinggi (angka perhitungan sementara)	5	49,54		
		12 - Skor Indeks Kota Berkelanjutan/IKB Kota Dumai (angka perhitungan sementara)	5	59,78		
		13 - Skor Indeks Kota Berkelanjutan/IKB Kota Pekanbaru (angka perhitungan sementara)	5	63,08		
		14 - Skor Indeks Kota Berkelanjutan/IKB Kota Jambi (angka perhitungan sementara)	5	44,62		



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

PN/PP/KP/ProP	Sasaran	Indikator	Dukungan Terhadap Arahan Presiden	Target	Rp. Juta	Instansi Pelaksana
		15 - Skor Indeks Kota Berkelanjutan/IKB WM Palembang (angka perhitungan sementara)	5	49,79		
		16 - Skor Indeks Kota Berkelanjutan/IKB Kota Prabumulih (angka perhitungan sementara)	5	50,33		
		17 - Skor Indeks Kota Berkelanjutan/IKB Kota Lubuklinggau (angka perhitungan sementara)	5	56,81		
		18 - Skor Indeks Kota Berkelanjutan/IKB Kota Bengkulu (angka perhitungan sementara)	5	46,76		
		19 - Skor Indeks Kota Berkelanjutan/IKB Kota Bandar Lampung (angka perhitungan sementara)	5	46,70		
		20 - Skor Indeks Kota Berkelanjutan/IKB Kota Pangkal Pinang (angka perhitungan sementara)	5	47,60		
		21 - Skor Indeks Kota Berkelanjutan/IKB Kota Tanjungpinang (angka perhitungan sementara)	5	48,82		



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

PN/PP/KP/ProP	Sasaran	Indikator	Dukungan Terhadap Arahan Presiden	Target	Rp. Juta	Instansi Pelaksana
		22 - Skor Indeks Kota Berkelanjutan/IKB Kota Batam (angka perhitungan sementara)	5	52,50		
	02 - Berkembangnya kota besar, kota sedang, kota kecil sebagai PKN/PKW	01 - Jumlah kota besar, sedang, kecil yang dikembangkan sebagai PKN/PKW	5	20 kota		
	03 - Terlaksananya penyelesaian RTR untuk WM di luar Jawa	01 - Jumlah WM di luar Jawa yang direncanakan	5	1 WM		
	04 - Berkembangnya wilayah metropolitan di luar Jawa	01 - Jumlah WM di luar Jawa yang dikembangkan	5	2 WM		
02.01.03.01 PRO-P: Pengembangan Kota Besar, Kota Sedang, Kota Kecil di Provinsi Aceh	01 - Berkembangnya kota besar, kota sedang, kota kecil sebagai PKN/PKW	01 - Berkembangnya kota besar, kota sedang, kota kecil sebagai PKN/PKW	5	4 kota	23.063,2	KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
02.01.03.03 PRO-P: Pengembangan Kota Besar, Kota Sedang, Kota Kecil di Provinsi Jambi	01 - Berkembangnya kota besar, kota sedang, kota kecil sebagai PKN/PKW	01 - Jumlah kota besar, sedang, kecil yang dikembangkan sebagai PKN/PKW	5	1 kota	101.032,9	KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT (Terintegrasi dengan PSN)
02.01.03.04 PRO-P: Pengembangan Kota Besar, Kota Sedang, Kota Kecil di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	01 - Berkembangnya kota besar, kota sedang, kota kecil sebagai PKN/PKW	01 - Jumlah kota besar, sedang, kecil yang dikembangkan sebagai PKN/PKW	5	1 kota	50.000,0	KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
02.01.03.05 PRO-P: Pengembangan Kota Besar, Kota Sedang, Kota Kecil di Provinsi Kepulauan Riau	01 - Berkembangnya kota besar, kota sedang, kota kecil sebagai PKN/PKW	01 - Jumlah kota besar, sedang, kecil yang dikembangkan sebagai PKN/PKW	5	2 kota	68.450,2	KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

PN/PP/KP/ProP	Sasaran	Indikator	Dukungan Terhadap Arahan Presiden	Target	Rp. Juta	Instansi Pelaksana
02.01.03.06 PRO-P: Pengembangan Kota Besar, Kota Sedang, Kota Kecil di Provinsi Lampung	01 - Berkembangnya kota besar, kota sedang, kota kecil sebagai PKN/PKW	01 - Jumlah kota besar, sedang, kecil yang dikembangkan sebagai PKN/PKW	5	1 kota	30.000,0	KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
02.01.03.07 PRO-P: Pengembangan Kota Besar, Kota Sedang, Kota Kecil di Provinsi Riau	01 - Berkembangnya kota besar, kota sedang, kota kecil sebagai PKN/PKW	01 - Jumlah kota besar, sedang, kecil yang dikembangkan sebagai PKN/PKW	5	2 kota	175,0	KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT (KPBU), KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
02.01.03.08 PRO-P: Pengembangan Kota Besar, Kota Sedang, Kota Kecil di Provinsi Sumatera Barat	01 - Berkembangnya kota besar, kota sedang, kota kecil sebagai PKN/PKW	01 - Jumlah kota besar, sedang, kecil yang dikembangkan sebagai PKN/PKW	5	3 kota	185.102,9	KEMENTERIAN PERHUBUNGAN, KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
02.01.03.09 PRO-P: Pengembangan Kota Besar, Kota Sedang, Kota Kecil di Provinsi Sumatera Selatan	01 - 01 - Berkembangnya kota besar, kota sedang, kota kecil sebagai PKN/PKW	01 - Jumlah kota besar, sedang, kecil yang dikembangkan sebagai PKN/PKW	5	1 kota	9.175,1	KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
02.01.03.11 PRO-P: Pengembangan Wilayah Metropolitan di Provinsi Sumatera Utara	01 - Berkembangnya wilayah metropolitan di luar Jawa	01 - Jumlah WM di luar Jawa yang dikembangkan	5	1 WM	1.531.489,2	KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT, KEMENTERIAN PERHUBUNGAN (Terintegrasi dengan PSN)
02.01.03.12 PRO-P: Pengembangan Wilayah Metropolitan di Provinsi Sumatera Selatan	01 - Terlaksananya penyelesaian RTR untuk WM di luar Jawa	01 - Jumlah WM di luar Jawa yang direncanakan	5	1 WM	682.723,9	KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT, KEMENTERIAN PERHUBUNGAN, KEMENTERIAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF/BADAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF, KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT (KPBU)
	02 - Berkembangnya wilayah metropolitan di luar Jawa	01 - Jumlah WM di luar Jawa yang dikembangkan	5	1 WM		



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

PN/PP/KP/ProP	Sasaran	Indikator	Dukungan Terhadap Arahan Presiden	Target	Rp. Juta	Instansi Pelaksana
02.01.04 KP: Pengembangan Daerah Tertinggal, Kawasan Perbatasan, Perdesaan, dan Transmigrasi	01 - Terbangunnya desa terpadu, kawasan perdesaan, dan kawasan transmigrasi	01 - Rata-rata Indeks Desa Pulau Sumatera	1, 5	61,30	34.852.329,5	
		02 - Rata-rata nilai Indeks Perkembangan Kawasan Perdesaan Prioritas Nasional	1, 5	61,45		
		03 - Rata-rata nilai Indeks Perkembangan Kawasan Transmigrasi yang Direvitalisasi di Pulau Sumatera	5	61,41		
		04 - Persentase penduduk miskin perdesaan Wilayah Sumatera	1	9,8—10,1 %		
	02 - Berkembangnya Pusat Kegiatan Strategis Nasional (PKSN), lokasi prioritas perbatasan, dan daerah tertinggal	01 - Jumlah daerah tertinggal	5	7 kabupaten		
		02 - Jumlah kecamatan lokasi prioritas perbatasan negara yang ditingkatkan kesejahteraan dan tata kelolanya	5	36 kecamatan		
		03 - Rata-rata nilai Indeks Pengelolaan Kawasan Perbatasan	5	0,52		
02.01.04.07 PRO-P: Pembangunan Desa Terpadu di Provinsi Aceh	01 - Terlaksananya pembangunan desa terpadu Provinsi Aceh	01 - Rata-rata Indeks Desa Provinsi Aceh	1, 5	60,45	5.449.710,7	KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI, KEMENTERIAN DALAM NEGERI, KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN, BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA (BNPB), KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI,



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

PN/PP/KP/ProP	Sasaran	Indikator	Dukungan Terhadap Arahan Presiden	Target	Rp. Juta	Instansi Pelaksana
						BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL (BKKBN), KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
02.01.04.08 PRO-P: Pembangunan Kawasan Perdesaan Prioritas Nasional Aceh Timur	01 - Terlaksananya pembangunan Kawasan Perdesaan Prioritas Nasional Aceh Timur	01 - Indeks Perkembangan Kawasan Perdesaan Kab. Aceh Timur	1, 5	67,69	34.679,4	KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI, KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BPN
02.01.04.09 PRO-P: Revitalisasi Kawasan Transmigrasi Ketapang Nusanantara, Samar Kilang, dan Selaut	01 - Terlaksananya Revitalisasi Kawasan Transmigrasi Ketapang Nusanantara, Samar Kilang, dan Selaut	01 - Rata-rata Nilai Indeks Perkembangan Kawasan Transmigrasi yang direvitalisasi di Provinsi Aceh	5	59,79	2.999,7	KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI, KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BPN
02.01.04.10 PRO-P: Peningkatan Kesejahteraan dan Tata Kelola di Kecamatan Lokasi Prioritas di Provinsi Aceh	01 - Meningkatkan kesejahteraan dan tata kelola di kecamatan lokasi prioritas di Provinsi Aceh	01 - Jumlah kecamatan lokasi prioritas perbatasan negara yang ditingkatkan kesejahteraan dan tata kelolanya di Provinsi Aceh	5	3 kecamatan	0,0 ^(a)	KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI
02.01.04.11 PRO-P: Pusat Kegiatan Strategis Nasional (PKSN) Sabang	01 - Berkembangnya Pusat Kegiatan Strategis Nasional (PKSN) Sabang	01 - Rata-rata nilai Indeks Pengelolaan Kawasan Perbatasan (IPKP) PKSN Sabang	5	0,50	200,0	KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
02.01.04.12 PRO-P: Pembangunan Desa Terpadu di Provinsi Sumatera Utara	01 - Terlaksananya pembangunan desa terpadu Provinsi Sumatera Utara	01 - Peningkatan rata-rata Indeks Desa Provinsi Sumatera Utara	1, 5	55,72	26.890,5	KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI, KEMENTERIAN DALAM NEGERI, BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA (BNPB), KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN, KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI,



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

PN/PP/KP/ProP	Sasaran	Indikator	Dukungan Terhadap Arahan Presiden	Target	Rp. Juta	Instansi Pelaksana
						BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL (BKKBN), KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
02.01.04.13 PRO-P: Pembangunan Kawasan Perdesaan Prioritas Nasional Toba Samosir dan Samosir	01 - Terlaksananya pembangunan Kawasan Perdesaan Prioritas Nasional Toba Samosir dan Samosir	01 - Indeks Perkembangan Kawasan Perdesaan Kab. Toba Samosir dan Samosir	1, 5	67,72	75.963,3	KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BPN, DAK
02.01.04.14 PRO-P: Peningkatan Kesejahteraan dan Tata Kelola di Kecamatan Lokasi Prioritas di Provinsi Sumatera Utara	01 - Meningkatkan kesejahteraan dan tata kelola di kecamatan lokasi prioritas di Provinsi Sumatera Utara	01 - Jumlah kecamatan lokasi prioritas perbatasan negara yang ditingkatkan kesejahteraan dan tata kelolanya di Provinsi Sumatera Utara	5	2 kecamatan	0,0 ^(a)	KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI
02.01.04.15 PRO-P: Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal di Provinsi Sumatera Utara	01 - Meningkatkan kesejahteraan masyarakat pada daerah tertinggal di Provinsi Sumatera Utara	01 - Persentase penduduk miskin di daerah tertinggal di Provinsi Sumatera Utara	1	18,1—18,6 %	94.890,4	KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI, KEMENTERIAN SOSIAL, KEMENTERIAN PERTANIAN, KEMENTERIAN PERHUBUNGAN, DAK
		02 - Rata-rata IPM di daerah tertinggal di Provinsi Sumatera Utara	1	64,1—64,6		
02.01.04.16 PRO-P: Pembangunan Desa Terpadu di Provinsi Sumatera Barat	01 - Terlaksananya pembangunan desa terpadu Provinsi Sumatera Barat	01 - Peningkatan rata-rata Indeks Desa Provinsi Sumatera Barat	1, 5	69,87	5.615,6	KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI, KEMENTERIAN DALAM NEGERI, BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA (BNPB), KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN, KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI, BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL (BKKBN),



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

PN/PP/KP/ProP	Sasaran	Indikator	Dukungan Terhadap Arahan Presiden	Target	Rp. Juta	Instansi Pelaksana
						KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
02.01.04.17 PRO-P: Pembangunan Kawasan Perdesaan Prioritas Nasional Agam	01 - Terlaksananya pembangunan Kawasan Perdesaan Prioritas Nasional Agam	01 - Indeks Perkembangan Kawasan Perdesaan Kab. Agam	1, 5	57,55	38.102,0	KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI, KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BPN, DAK
02.01.04.18 PRO-P: Revitalisasi Kawasan Transmigrasi Lunang Silaut	01 - Terlaksananya Revitalisasi Kawasan Transmigrasi Lunang Silaut	01 - Rata-rata Nilai Indeks Perkembangan Kawasan Transmigrasi yang direvitalisasi di Provinsi Sumatera Barat	5	72,08	992,2	KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI, KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BPN
02.01.04.19 PRO-P: Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal di Provinsi Sumatera Barat	01 - Meningkatkan kesejahteraan masyarakat pada daerah tertinggal di Provinsi Sumatera Barat	01 - Persentase penduduk miskin di daerah tertinggal di Provinsi Sumatera Barat	1	11,3—11,8 %	956,5	KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI, KEMENTERIAN SOSIAL, KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN, DAK
		02 - Rata-rata IPM di daerah tertinggal di Provinsi Sumatera Barat	1	62,3—62,8		
02.01.04.20 PRO-P: Pembangunan Desa Terpadu di Provinsi Riau	01 - Terlaksananya pembangunan desa terpadu Provinsi Riau	01 - Peningkatan rata-rata Indeks Desa Provinsi Riau	1, 5	64,65	6.538,1	KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI, KEMENTERIAN DALAM NEGERI, BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA (BNPB), KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN, KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI, BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL (BKKBN), KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

PN/PP/KP/ProP	Sasaran	Indikator	Dukungan Terhadap Arahan Presiden	Target	Rp. Juta	Instansi Pelaksana
02.01.04.21 PRO-P: Peningkatan Kesejahteraan dan Tata Kelola di Kecamatan Lokasi Prioritas di Provinsi Riau	01 - Meningkatnya kesejahteraan dan tata kelola di kecamatan lokasi prioritas di Provinsi Riau	01 - Jumlah kecamatan lokasi prioritas perbatasan negara yang ditingkatkan kesejahteraan dan tata kelolanya di Provinsi Riau	5	7 kecamatan	9.315,0	KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI, DAK
02.01.04.23 PRO-P: Pembangunan Desa Terpadu di Provinsi Jambi	01 - Terlaksananya pembangunan desa terpadu Provinsi Jambi	01 - Rata-rata Indeks Desa Provinsi Jambi	1, 5	64,00	4.178,9	KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI, KEMENTERIAN DALAM NEGERI, BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA (BNPB), KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN, KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI, BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL (BKKBN), KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
02.01.04.24 PRO-P: Pembangunan Kawasan Perdesaan Prioritas Nasional Muaro Jambi	01 - Terlaksananya pembangunan Kawasan Perdesaan Prioritas Nasional Muaro Jambi	01 - Indeks Perkembangan Kawasan Perdesaan Kab. Muaro Jambi	1, 5	59,20	63.695,3	KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI, KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BPN, KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN, DAK
02.01.04.25 PRO-P: Revitalisasi Kawasan Transmigrasi Bathin III Ulu	01 - Terlaksananya Revitalisasi Kawasan Transmigrasi Bathin III Ulu	01 - Rata-rata nilai Indeks Perkembangan Kawasan Transmigrasi yang direvitalisasi di Provinsi Jambi	5	25,65	31,9	KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI, KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BPN
02.01.04.26 PRO-P: Pembangunan Desa Terpadu di Provinsi Sumatera Selatan	01 - Terlaksananya pembangunan desa terpadu Provinsi Sumatera Selatan	01 - Rata-rata Indeks Desa Provinsi Sumatera Selatan	1, 5	63,85	5.425,7	KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI, KEMENTERIAN DALAM NEGERI, BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA (BNPB), KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN, KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK,



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

PN/PP/KP/ProP	Sasaran	Indikator	Dukungan Terhadap Arahan Presiden	Target	Rp. Juta	Instansi Pelaksana
						KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI, BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL (BKKBN), KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
02.01.04.27 PRO-P: Pembangunan Kawasan Perdesaan Prioritas Nasional Banyuasin	01 - Terlaksananya pembangunan Kawasan Perdesaan Prioritas Nasional Banyuasin	01 - Indeks Perkembangan Kawasan Perdesaan Kab. Banyuasin	1, 5	63,69	61.152,7	KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI, KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BPN, DAK
02.01.04.28 PRO-P: Revitalisasi Kawasan Transmigrasi Parit Rambutan, Telang, dan Kikim	01 - Terlaksananya Revitalisasi Kawasan Transmigrasi Parit Rambutan, Telang, dan Kikim	01 - Rata-rata nilai Indeks Perkembangan Kawasan Transmigrasi yang direvitalisasi di Provinsi Sumatera Selatan	5	62,34	2.838,5	KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI, KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BPN
02.01.04.29 PRO-P: Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal di Provinsi Sumatera Selatan	01 - Meningkatnya kesejahteraan masyarakat pada daerah tertinggal di Provinsi Sumatera Selatan	01 - Persentase penduduk miskin di daerah tertinggal di Provinsi Sumatera Selatan	1	17,8—18,3 %	28.820.871,5	KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI, KEMENTERIAN DALAM NEGERI, KEMENTERIAN SOSIAL, BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA (BNPB), KEMENTERIAN PERTANIAN, DAK
		02 - Rata-rata IPM di daerah tertinggal di Provinsi Sumatera Selatan	1	66,9—67,4		
02.01.04.30 PRO-P: Pembangunan Desa Terpadu di Provinsi Bengkulu	01 - Terlaksananya pembangunan desa terpadu Provinsi Bengkulu	01 - Rata-rata Indeks Desa Provinsi Bengkulu	1, 5	59,85	1.870,7	KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI, KEMENTERIAN DALAM NEGERI, BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA (BNPB), KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN, KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI, BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL (BKKBN),



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

PN/PP/KP/ProP	Sasaran	Indikator	Dukungan Terhadap Arahan Presiden	Target	Rp. Juta	Instansi Pelaksana
						KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
02.01.04.31 PRO-P: Pembangunan Kawasan Perdesaan Prioritas Nasional Bengkulu Tengah	01 - Terlaksananya pembangunan Kawasan Perdesaan Prioritas Nasional Bengkulu Tengah	01 - Indeks Perkembangan Kawasan Perdesaan Kab. Bengkulu Tengah	1, 5	56,84	24.730,5	KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI, KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BPN, KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN, DAK
02.01.04.32 PRO-P: Revitalisasi Kawasan Transmigrasi Lagita	01 - Terlaksananya Revitalisasi Kawasan Transmigrasi Lagita	01 - Rata-rata Nilai Indeks Perkembangan Kawasan Transmigrasi yang Direvitalisasi di Provinsi Bengkulu	5	74,09	2.328,7	KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI, KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BPN
02.01.04.33 PRO-P: Pembangunan Desa Terpadu di Provinsi Lampung	01 - Terlaksananya pembangunan desa terpadu Provinsi Lampung	01 - Rata-rata Indeks Desa Provinsi Lampung	1, 5	65,85	5.069,7	KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI, KEMENTERIAN DALAM NEGERI, BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA (BNPB), KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN, KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI, BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL (BKKBN), KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
02.01.04.34 PRO-P: Pembangunan Kawasan Perdesaan Prioritas Nasional Mesuji dan Tulang Bawang	01 - Terlaksananya pembangunan Kawasan Perdesaan Prioritas Nasional Mesuji dan Tulang Bawang	01 - Indeks Perkembangan Kawasan Perdesaan Kab. Mesuji dan Tulang Bawang	1, 5	62,30	28.618,8	KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI, KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BPN, DAK
02.01.04.35 PRO-P: Revitalisasi Kawasan Transmigrasi Rawa Pitu dan Mesuji	01 - Terlaksananya Revitalisasi Kawasan Transmigrasi Rawa Pitu dan Mesuji	01 - Rata-rata nilai Indeks Perkembangan Kawasan Transmigrasi yang Direvitalisasi di Provinsi Lampung	5	57,40	242,4	KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI, KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BPN



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

PN/PP/KP/ProP	Sasaran	Indikator	Dukungan Terhadap Arahan Presiden	Target	Rp. Juta	Instansi Pelaksana
02.01.04.36 PRO-P: Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal di Provinsi Lampung	01 - Meningkatnya kesejahteraan masyarakat pada daerah tertinggal di Provinsi Lampung	01 - Persentase penduduk miskin di daerah tertinggal di Provinsi Lampung	1	13,6—14,1 %	2.300,4	KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI, KEMENTERIAN SOSIAL, KEMENTERIAN DALAM NEGERI, KEMENTERIAN AGAMA, KEMENTERIAN PERTANIAN
		02 - Rata-rata IPM di daerah tertinggal di Provinsi Lampung	1	66,1—66,6		
02.01.04.37 PRO-P: Pembangunan Desa Terpadu di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	01 - Terlaksananya pembangunan desa terpadu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	01 - Peningkatan rata-rata Indeks Desa Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	1, 5	73,05	3.304,1	KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI, KEMENTERIAN DALAM NEGERI, BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA (BNPB), KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN, KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI, BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL (BKKBN), KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
02.01.04.38 PRO-P: Pembangunan Kawasan Perdesaan Prioritas Nasional Belitung, Belitung Timur, dan Bangka Selatan	01 - Terlaksananya pembangunan Kawasan Perdesaan Prioritas Nasional Belitung, Belitung Timur, dan Bangka Selatan	01 - Indeks Perkembangan Kawasan Perdesaan Kab. Belitung, Belitung Timur, dan Bangka Selatan	1, 5	55,72	18.279,4	KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI, KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BPN, DAK
02.01.04.39 PRO-P: Revitalisasi Kawasan Transmigrasi Batu Betumpang	01 - Terlaksananya Revitalisasi Kawasan Transmigrasi Batu Betumpang	01 - Rata-rata nilai Indeks Perkembangan Kawasan Transmigrasi yang Direvitalisasi di Provinsi Bangka Belitung	5	73,86	32,8	KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI, KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BPN



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

PN/PP/KP/ProP	Sasaran	Indikator	Dukungan Terhadap Arah Presiden	Target	Rp. Juta	Instansi Pelaksana
02.01.04.40 PRO-P: Pembangunan Desa Terpadu di Provinsi Kepulauan Riau	01 - Terlaksananya pembangunan desa terpadu Provinsi Kepulauan Riau	01 - Rata-rata Indeks Desa Provinsi Kepulauan Riau	1, 5	64,80	2.394,1	KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI, KEMENTERIAN DALAM NEGERI, BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA (BNPB), KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN, KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI, BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL (BKKBN), KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
02.01.04.41 PRO-P: Pembangunan Kawasan Perdesaan Prioritas Nasional Bintan dan Karimun	01 - Terlaksananya pembangunan Kawasan Perdesaan Prioritas Nasional Bintan dan Karimun	01 - Indeks Perkembangan Kawasan Perdesaan Kab. Bintan dan Karimun	1, 5	59,65	37.850,0	KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI, KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BPN, DAK
02.01.04.42 PRO-P: Peningkatan Kesejahteraan dan Tata Kelola di Kecamatan Lokasi Prioritas di Provinsi Kepulauan Riau	01 - Meningkatnya kesejahteraan dan tata kelola di kecamatan lokasi prioritas di Provinsi Kepulauan Riau	01 - Jumlah kecamatan lokasi prioritas perbatasan negara yang ditingkatkan kesejahteraan dan tata kelolanya di Provinsi Kepulauan Riau	5	24 kecamatan	11.476,6	KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI, DAK
02.01.04.43 PRO-P: Pusat Kegiatan Strategis Nasional (PKSN) Ranai	01 - Berkembangnya Pusat Kegiatan Strategis Nasional (PKSN) Ranai	01 - Rata-rata nilai Indeks Pengelolaan Kawasan Perbatasan (IPKP) PKSN Ranai	5	0,50	8.783,3	KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN, KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI, DAK
02.01.05 KP: Kelembagaan dan Keuangan Daerah	01 - Meningkatnya Nilai Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EPPD)	01 - Nilai Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EPPD)	4	3,23	173.360,3	
	02 - Meningkatnya persentase daerah dengan indeks inovasi tinggi	01 - Persentase daerah yang mempunyai nilai indeks inovasi tinggi	4	50,30 %		



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

PN/PP/KP/Prop	Sasaran	Indikator	Dukungan Terhadap Arahan Presiden	Target	Rp. Juta	Instansi Pelaksana
	03 - Meningkatnya daerah dengan penerimaan daerah meningkat	01 - Jumlah daerah dengan penerimaan daerah meningkat	4	135 daerah		
	04 - Meningkatnya daerah dengan realisasi belanjanya berkualitas	01 - Jumlah daerah dengan realisasi belanjanya berkualitas	4	130 daerah		
	05 - Meningkatnya reformasi pelayanan perizinan	01 - Jumlah perizinan yang kewenangannya sudah didelegasikan ke PTSP Prima berbasis elektronik	4	16.123 dokumen		
	06 - Meningkatnya daerah yang memiliki PTSP Prima berbasis elektronik	01 - Jumlah daerah yang memiliki PTSP Prima berbasis elektronik	4	22 daerah		
	07 - Meningkatnya tata kelola keuangan daerah yang efektif dan efisien	01 - Jumlah daerah yang melaksanakan tata kelola keuangan yang efektif dan efisien	4	130 daerah		
	08 - Meningkatnya Kesepakatan dan Perjanjian Kerja Sama Daerah	01 - Jumlah daerah yang mengimplementasikan Kesepakatan dan Perjanjian Kerja Sama Daerah	4	9 daerah		
	09 - Meningkatnya persentase capaian SPM di daerah	01 - Persentase capaian SPM di daerah	4	91,58 %		
	10 - Meningkatnya daerah dengan indeks kinerja GWPP kategori baik	01 - Jumlah daerah dengan indeks kinerja GWPP kategori baik	4	34 daerah		



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

PN/PP/KP/ProP	Sasaran	Indikator	Dukungan Terhadap Arahan Presiden	Target	Rp. Juta	Instansi Pelaksana
	11 - Meningkatnya pengelolaan pertanahan dan terselenggarakannya penataan ruang	01 - Luas cakupan bidang tanah bersertipikat yang terdigitasi dan memiliki georeferensi yang baik	5	4.293.338 ha		
		02 - Luas cakupan peta dasar pertanahan	5	2.804.853 ha		
		03 - Jumlah materi teknis dan rancangan peraturan daerah RDTR Kab/Kota	5	24 materi teknis dan Ranperkada RDTR		
		04 - Jumlah persetujuan substansi RDTR Kab/Kota	5	30 persetujuan substansi RDTR		
		05 - Jumlah materi teknis dan rancangan peraturan daerah RTRW Prov/Kab/Kota	5	12 materi teknis dan Ranperda RTRW		
		06 - Jumlah Persetujuan Substansi RTRW Prov/Kab/Kota	5	15 persetujuan substansi RTRW		
		07 - Nilai Kepastian dan Perlindungan Hak atas Tanah	5	5		
		08 - Jumlah Materi Teknis RTR Nasional (Pulau/Kep dan KSN)	5	2 materi teknis dan Raperpres RTR		
		09 - Jumlah Penanganan Perkara Hasil Penyidikan Pelanggaran Pemanfaatan Ruang	5	23 perkara		
	12 - Terlaksananya Peningkatan Penyelenggaraan Informasi Geospasial	01 - Jumlah kesepakatan teknis batas wilayah administrasi desa/kelurahan yang dihasilkan	2	1.000 desa		



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

PN/PP/KP/ProP	Sasaran	Indikator	Dukungan Terhadap Arahan Presiden	Target	Rp. Juta	Instansi Pelaksana
02.01.05.04 PRO-P: Peningkatan Kapasitas Pemerintahan Daerah dan Hubungan Pusat-Daerah di Provinsi Aceh	01 - Mempercepat kemudahan berusaha di daerah termasuk reformasi pelayanan perizinan yang berbasis sistem informasi digital (<i>e-gov</i>)	01 - Jumlah perizinan yang kewenangannya sudah didelegasikan ke PTSP Prima berbasis elektronik	4	1.824 dokumen	18.127,4	KEMENTERIAN DALAM NEGERI
	02 - Meningkatnya kerja sama daerah	01 - Jumlah daerah yang mengimplementasikan kesepakatan dan perjanjian kerja sama	4	1 daerah		
	03 - Meningkatnya persentase capaian SPM di daerah	01 - Persentase capaian SPM di daerah	4	92,39 %		
	04 - Meningkatnya persentase daerah dengan nilai indeks inovasi tinggi	01 - Persentase daerah yang mempunyai nilai indeks inovasi tinggi	4	30,00 %		
	05 - Meningkatnya daerah dengan penerimaan daerah meningkat	01 - Jumlah daerah yang penerimaannya meningkat	4	20 daerah		
	06 - Meningkatnya daerah dengan realisasi belanjanya berkualitas	01 - Jumlah daerah yang realisasi belanjanya berkualitas	4	19 daerah		
	07 - Meningkatnya tata kelola keuangan daerah yang efektif dan efisien	01 - Jumlah daerah yang melaksanakan tata kelola keuangan daerah yang efektif dan efisien	4	19 daerah		
	08 - Peningkatan penataan hubungan pusat daerah	01 - Jumlah tugas dan wewenang yang dilaksanakan oleh Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat dengan kinerja baik	4	22 rekomendasi		



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

PN/PP/KP/ProP	Sasaran	Indikator	Dukungan Terhadap Arahan Presiden	Target	Rp. Juta	Instansi Pelaksana
		09 - Meningkatnya kualitas pelaksanaan kebijakan otonomi (regulasi) pada daerah otonomi khusus, daerah istimewa, dan daerah khusus ibukota negara	01 - Jumlah pelaksanaan kebijakan otonomi (regulasi) pada daerah otonomi khusus, daerah istimewa, dan daerah khusus ibukota negara	4	1 rekomendasi	
02.01.05.05 PRO-P: Pengelolaan dan Pelayanan Pertanahan di Provinsi Aceh	01 - Terlaksananya percepatan sertifikasi tanah	01 - Jumlah Sertipikat Hak Atas Tanah	5	127.294 bidang	5.906,6	KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BPN
	02 - Terlaksananya percepatan peta bidang tanah dan ruang	01 - Jumlah bidang tanah	5	81.815 ha		
02.01.05.06 PRO-P: Penyelenggaraan Penataan Ruang di Provinsi Aceh	01 - Tersedianya rencana tata ruang yang berkualitas	01 - Jumlah materi teknis dan rancangan peraturan daerah RDTR Kab/Kota	5	7 rekomendasi kebijakan	1.413,5	KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BPN
		02 - Jumlah persetujuan substansi RDTR Kab/Kota	5	5 rekomendasi kebijakan		
		03 - Jumlah materi teknis dan rancangan peraturan daerah RTRW Prov/Kab/Kota	5	2 rekomendasi kebijakan		
		04 - Jumlah persetujuan substansi RTRW Prov/Kab/Kota	5	4 rekomendasi kebijakan		
02.01.05.07 PRO-P: Peningkatan Kapasitas Pemerintahan Daerah dan Hubungan Pusat-Daerah di Provinsi Sumatera Utara	01 - Mempercepat kemudahan berusaha di daerah termasuk reformasi pelayanan perizinan yang berbasis sistem informasi digital (<i>e-gov</i>)	01 - Jumlah perizinan yang kewenangannya sudah didelegasikan ke PTSP Prima berbasis elektronik	4	2.440 dokumen	0,0 ^(a)	KEMENTERIAN DALAM NEGERI



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

PN/PP/KP/ProP	Sasaran	Indikator	Dukungan Terhadap Arahan Presiden	Target	Rp. Juta	Instansi Pelaksana
	02 - Meningkatnya kerja sama daerah	01 - Jumlah daerah yang mengimplementasikan kesepakatan dan perjanjian kerja sama	4	1 daerah		
	03 - Meningkatnya persentase capaian SPM di daerah	01 - Persentase capaian SPM di daerah	4	91,45 %		
	04 - Meningkatnya persentase daerah dengan nilai indeks inovasi tinggi	01 - Persentase daerah yang mempunyai nilai indeks inovasi tinggi	4	39 %		
	05 - Meningkatnya daerah dengan penerimaan daerah meningkat	01 - Jumlah daerah yang penerimaan daerahnya meningkat	4	28 daerah		
	06 - Meningkatnya daerah dengan realisasi belanjanya berkualitas	01 - Jumlah daerah yang realisasi belanjanya berkualitas	4	26 daerah		
	07 - Meningkatnya tata kelola keuangan daerah yang efektif dan efisien	01 - Jumlah daerah yang melaksanakan tata kelola keuangan daerah yang efektif dan efisien	4	26 daerah		
	08 - Peningkatan penataan hubungan pusat daerah	01 - Jumlah tugas dan wewenang yang dilaksanakan oleh Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat dengan kinerja baik	4	22 rekomendasi		
02.01.05.08 PRO-P: Pengelolaan dan Pelayanan Pertanahan di Provinsi Sumatera Utara	01 - Terlaksananya percepatan sertifikasi tanah	01 - Jumlah Sertipikat Hak Atas Tanah	5	165.714,0 bidang	18.043,7	KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BPN, KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI, KEMENTERIAN KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH
	02 - Terlaksananya percepatan peta bidang tanah dan ruang	01 - Jumlah bidang tanah	5	113.904 bidang		



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

PN/PP/KP/ProP	Sasaran	Indikator	Dukungan Terhadap Arahan Presiden	Target	Rp. Juta	Instansi Pelaksana
02.01.05.09 PRO-P: Penyelenggaraan Penataan Ruang di Provinsi Sumatera Utara	01 - Tersedianya rencana tata ruang yang berkualitas	01 - Jumlah materi teknis dan rancangan peraturan daerah RDTR Kab/Kota	5	8 rekomendasi kebijakan	3.993,8	KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BPN
		02 - Jumlah persetujuan substansi RDTR Kab/Kota	5	2 rekomendasi kebijakan		
		03 - Jumlah materi teknis dan rancangan peraturan daerah RTRW Prov/Kab/Kota	5	4 rekomendasi kebijakan		
		04 - Jumlah persetujuan substansi RTRW Prov/Kab/Kota	5	1 rekomendasi kebijakan		
		05 - Jumlah materi teknis RTR Nasional (Pulau/Kep dan KSN)	5	1 rekomendasi kebijakan		
02.01.05.10 PRO-P: Peningkatan Kapasitas Pemerintahan Daerah dan Hubungan Pusat-Daerah di Provinsi Sumatera Barat	01 - Mempercepat kemudahan berusaha di daerah termasuk reformasi pelayanan perizinan yang berbasis sistem informasi digital (<i>e-gov</i>)	01 - Jumlah perizinan yang kewenangannya sudah didelegasikan ke PTSP Prima berbasis elektronik	4	2.016 dokumen	216,9	KEMENTERIAN DALAM NEGERI
		02 - Meningkatnya kerja sama daerah	4	1 daerah		
		03 - Meningkatnya persentase capaian SPM di daerah	4	87 %		
		04 - Meningkatnya persentase daerah dengan nilai indeks inovasi tinggi	4	87 %		



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

PN/PP/KP/ProP	Sasaran	Indikator	Dukungan Terhadap Arahan Presiden	Target	Rp. Juta	Instansi Pelaksana
	05 - Meningkatnya daerah dengan penerimaan daerah meningkat	01 - Jumlah daerah yang penerimaan daerahnya meningkat	4	15 daerah		
	06 - Meningkatnya daerah dengan realisasi belanjanya berkualitas	01 - Jumlah daerah yang realisasi belanjanya berkualitas	4	16 daerah		
	07 - Meningkatnya tata kelola keuangan daerah yang efektif dan efisien	01 - Jumlah daerah yang melaksanakan tata kelola keuangan daerah yang efektif dan efisien	4	16 daerah		
	08 - Peningkatan penataan hubungan pusat daerah	01 - Jumlah tugas dan wewenang yang dilaksanakan oleh Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat dengan kinerja baik	4	22 rekomendasi		
02.01.05.11 PRO-P: Pengelolaan dan Pelayanan Pertanahan di Provinsi Sumatera Barat	01 - Terlaksananya percepatan sertifikasi tanah	01 - Jumlah Sertipikat Hak Atas Tanah	5	117.792 bidang	7.689,6	KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BPN
	02 - Terlaksananya percepatan peta bidang tanah dan ruang	01 - Jumlah bidang tanah	5	116.348 bidang		
02.01.05.12 PRO-P: Penyelenggaraan Penataan Ruang di Provinsi Sumatera Barat	01 - Tersedianya rencana tata ruang yang berkualitas	01 - Jumlah materi teknis dan rancangan peraturan daerah RDTR Kab/Kota	5	7 rekomendasi kebijakan	1.123,5	KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BPN
		02 - Jumlah persetujuan substansi RDTR Kab/Kota	5	3 rekomendasi kebijakan		
		03 - Jumlah materi teknis dan rancangan peraturan daerah RTRW Prov/Kab/Kota	5	2 rekomendasi kebijakan		



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

PN/PP/KP/ProP	Sasaran	Indikator	Dukungan Terhadap Arahan Presiden	Target	Rp. Juta	Instansi Pelaksana
		04 - Jumlah persetujuan substansi RTRW Prov/Kab/Kota	5	1 rekomendasi kebijakan		
02.01.05.13 PRO-P: Peningkatan Kapasitas Pemerintahan Daerah dan Hubungan Pusat-Daerah di Provinsi Riau	01 - Mempercepat kemudahan berusaha di daerah termasuk reformasi pelayanan perizinan yang berbasis sistem informasi digital (<i>e-gov</i>)	01 - Jumlah perizinan yang kewenangannya sudah didelegasikan ke PTSP Prima berbasis elektronik	4	1.777 dokumen	0,0 ^(a)	KEMENTERIAN DALAM NEGERI
	02 - Meningkatkan kerja sama daerah	01 - Jumlah daerah yang mengimplementasikan kesepakatan dan perjanjian kerja sama	4	1 daerah		
	03 - Meningkatkan persentase capaian SPM di daerah	01 - Persentase capaian SPM di daerah	4	91,97 %		
	04 - Meningkatkan persentase daerah dengan nilai indeks inovasi tinggi	01 - Persentase daerah yang mempunyai nilai indeks inovasi tinggi	4	45 %		
	05 - Meningkatkan daerah dengan penerimaan daerah meningkat	01 - Jumlah daerah yang penerimaannya meningkat	4	9 daerah		
	06 - Meningkatkan daerah dengan realisasi belanjanya berkualitas	01 - Jumlah daerah yang realisasi belanjanya berkualitas	4	11 daerah		
	07 - Meningkatkan tata kelola keuangan daerah yang efektif dan efisien	01 - Jumlah daerah yang melaksanakan tata kelola keuangan daerah yang efektif dan efisien	4	11 daerah		



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

PN/PP/KP/ProP	Sasaran	Indikator	Dukungan Terhadap Arahan Presiden	Target	Rp. Juta	Instansi Pelaksana
	08 - Peningkatan penataan hubungan pusat daerah	01 - Jumlah tugas dan wewenang yang dilaksanakan oleh Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat dengan kinerja baik	4	22 rekomendasi		
02.01.05.14 PRO-P: Pengelolaan dan Pelayanan Pertanahan di Provinsi Riau	01 - Terlaksananya percepatan sertifikasi tanah	01 - Jumlah Sertipikasi Hak Atas Tanah	5	140.010 bidang	41.423,9	KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BPN
	02 - Terlaksananya percepatan peta bidang tanah dan ruang	01 - Jumlah bidang tanah	5	129.536 bidang		
02.01.05.15 PRO-P: Penyelenggaraan Penataan Ruang di Provinsi Riau	01 - Tersedianya rencana tata ruang yang berkualitas	01 - Jumlah materi teknis dan rancangan peraturan daerah RDTR Kab/Kota	5	4 rekomendasi kebijakan	1.737,8	KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BPN
		02 - Jumlah persetujuan substansi RTRW Kab/Kota	5	2 rekomendasi kebijakan		
02.01.05.16 PRO-P: Peningkatan Kapasitas Pemerintahan Daerah dan Hubungan Pusat-Daerah di Provinsi Kepulauan Riau	01 - Mempercepat kemudahan berusaha di daerah termasuk reformasi pelayanan perizinan yang berbasis sistem informasi digital (<i>e-gov</i>)	01 - Jumlah perizinan yang kewenangannya sudah didelegasikan ke PTSP Prima berbasis elektronik	4	644 dokumen	0,0 ^(a)	KEMENTERIAN DALAM NEGERI
	03 - Meningkatnya persentase capaian SPM di daerah	01 - Persentase capaian SPM di daerah	4	91,47 %		
	04 - Meningkatnya persentase daerah dengan nilai indeks inovasi tinggi	01 - Persentase daerah yang mempunyai nilai indeks inovasi tinggi	4	44 %		
	05 - Meningkatnya daerah dengan penerimaan daerah meningkat	01 - Jumlah daerah yang penerimaan daerahnya meningkat	4	7 daerah		



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

PN/PP/KP/ProP	Sasaran	Indikator	Dukungan Terhadap Arahan Presiden	Target	Rp. Juta	Instansi Pelaksana
	06 - Meningkatnya daerah dengan realisasi belanjanya berkualitas	01 - Jumlah daerah yang realisasi belanjanya berkualitas	4	7 daerah		
	07 - Meningkatnya tata kelola keuangan daerah yang efektif dan efisien	01 - Jumlah daerah yang melaksanakan tata kelola keuangan daerah yang efektif dan efisien	4	7 daerah		
	08 - Peningkatan penataan hubungan pusat daerah	01 - Jumlah tugas dan wewenang yang dilaksanakan oleh Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat dengan kinerja baik	4	22 rekomendasi		
02.01.05.17 PRO-P: Pengelolaan dan Pelayanan Pertanahan di Provinsi Kepulauan Riau	01 - Terlaksananya percepatan sertifikasi tanah	01 - Jumlah Sertipikat Hak Atas Tanah	5	14.036 bidang	3.400,1	KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BPN
	02 - Terlaksananya percepatan peta bidang tanah dan ruang	01 - Jumlah bidang tanah	5	34.524 ha		
02.01.05.18 PRO-P: Penyelenggaraan Penataan Ruang di Provinsi Kepulauan Riau	01 - Tersedianya rencana tata ruang yang berkualitas	01 - Jumlah persetujuan substansi RDTR Kab/Kota	5	1 rekomendasi kebijakan	1.174,3	KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BPN
02.01.05.19 PRO-P: Peningkatan Kapasitas Pemerintahan Daerah dan Hubungan Pusat-Daerah di Provinsi Jambi	01 - Mempercepat kemudahan berusaha di daerah termasuk reformasi pelayanan perizinan yang berbasis sistem informasi digital (<i>e-gov</i>)	01 - Jumlah perizinan yang kewenangannya sudah didelegasikan ke PTSP Prima berbasis elektronik	4	1.204 dokumen	0,0 ^(a)	KEMENTERIAN DALAM NEGERI
	02 - Meningkatnya kerja sama daerah	01 - Jumlah daerah yang mengimplementasikan kesepakatan dan perjanjian kerja sama	4	1 daerah		



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

PN/PP/KP/ProP	Sasaran	Indikator	Dukungan Terhadap Arahan Presiden	Target	Rp. Juta	Instansi Pelaksana
	03 - Meningkatnya persentase capaian SPM di daerah	01 - Persentase capaian SPM di daerah	4	91,33 %		
	04 - Meningkatnya persentase daerah dengan nilai indeks inovasi tinggi	01 - Persentase daerah yang mempunyai nilai indeks inovasi tinggi	4	72 %		
	05 - Meningkatnya daerah dengan penerimaan daerah meningkat	01 - Jumlah daerah yang penerimaan daerahnya meningkat	4	12 daerah		
	06 - Meningkatnya daerah dengan realisasi belanjanya berkualitas	01 - Jumlah daerah yang realisasi belanjanya berkualitas	4	10 daerah		
	07 - Meningkatnya tata kelola keuangan daerah yang efektif dan efisien	01 - Jumlah daerah yang melaksanakan tata kelola keuangan daerah yang efektif dan efisien	4	10 daerah		
	08 - Peningkatan penataan hubungan pusat daerah	01 - Jumlah tugas dan wewenang yang dilaksanakan oleh Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat dengan kinerja baik	4	22 rekomendasi		
02.01.05.20 PRO-P: Pengelolaan dan Pelayanan Pertanahan di Provinsi Jambi	01 - Terlaksananya percepatan sertifikasi tanah	01 - Jumlah Sertipikat Hak Atas Tanah	5	122.520 bidang	36.054,7	KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BPN, KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN, KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI, KEMENTERIAN KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH, KEMENTERIAN PERTANIAN
	02 - Terlaksananya percepatan peta bidang tanah dan ruang	01 - Jumlah bidang tanah	5	175.660 bidang		



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

PN/PP/KP/ProP	Sasaran	Indikator	Dukungan Terhadap Arahan Presiden	Target	Rp. Juta	Instansi Pelaksana	
02.01.05.21 PRO-P: Penyelenggaraan Penataan Ruang di Provinsi Jambi	01 - Tersedianya rencana tata ruang yang berkualitas	01 - Jumlah materi teknis dan rancangan peraturan daerah RDTR Kab/Kota	5	2 rekomendasi kebijakan	1.676,8	KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BPN	
		02 - Jumlah persetujuan substansi RDTR Kab/Kota	5	3 rekomendasi kebijakan			
		03 - Jumlah materi teknis dan rancangan peraturan daerah RTRW Prov/Kab/Kota	5	1 rekomendasi kebijakan			
		04 - Jumlah persetujuan substansi RTRW Prov/Kab/Kota	5	2 rekomendasi kebijakan			
02.01.05.22 PRO-P: Peningkatan Kapasitas Pemerintahan Daerah dan Hubungan Pusat-Daerah di Provinsi Sumatera Selatan	01 - Mempercepat kemudahan berusaha di daerah termasuk reformasi pelayanan perizinan yang berbasis sistem informasi digital (<i>e-gov</i>)	01 - Jumlah tugas dan wewenang yang dilaksanakan oleh Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat dengan kinerja baik	4	2.227 dokumen	800,0	KEMENTERIAN DALAM NEGERI	
		02 - Meningkatnya kerja sama daerah	01 - Jumlah daerah yang mengimplementasikan kesepakatan dan perjanjian kerja sama	4			1 daerah
		03 - Meningkatnya persentase capaian SPM di daerah	01 - Persentase capaian SPM di daerah	4			92,37 %
		04 - Meningkatnya persentase daerah dengan nilai indeks inovasi tinggi	01 - Persentase daerah yang mempunyai nilai indeks inovasi tinggi	4			52 %
		05 - Meningkatnya daerah dengan penerimaan daerah meningkat	01 - Jumlah daerah yang penerimaan daerahnya meningkat	4			15 daerah



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

PN/PP/KP/ProP	Sasaran	Indikator	Dukungan Terhadap Arahan Presiden	Target	Rp. Juta	Instansi Pelaksana
	06 - Meningkatnya daerah dengan realisasi belanjanya berkualitas	01 - Jumlah daerah yang realisasi belanjanya berkualitas	4	13 daerah		
	07 - Meningkatnya tata kelola keuangan daerah yang efektif dan efisien	01 - Jumlah daerah yang melaksanakan tata kelola keuangan daerah yang efektif dan efisien	4	13 daerah		
	08 - Peningkatan penataan hubungan pusat daerah	01 - Jumlah tugas dan wewenang yang dilaksanakan oleh Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat dengan kinerja baik	4	22 rekomendasi		
02.01.05.23 PRO-P: Pengelolaan dan Pelayanan Pertanahan di Provinsi Sumatera Selatan	01 - Terlaksananya percepatan sertifikasi tanah	01 - Jumlah Sertipikat Hak Atas Tanah	5	250.072 bidang	7.432,6	KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BPN
	02 - Terlaksananya percepatan peta bidang tanah dan ruang	01 - Jumlah bidang tanah	5	152.446 bidang		
02.01.05.24 PRO-P: Penyelenggaraan Penataan Ruang di Provinsi Sumatera Selatan	01 - Tersedianya rencana tata ruang yang berkualitas	01 - Jumlah materi teknis dan rancangan peraturan daerah RDTR Kab/Kota	5	4 rekomendasi kebijakan	1.378,3	KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BPN
		02 - Jumlah persetujuan substansi RDTR Kab/Kota	5	7 rekomendasi kebijakan		
		03 - Jumlah materi teknis dan rancangan peraturan daerah RTRW Prov/Kab/Kota	5	4 rekomendasi kebijakan		



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

PN/PP/KP/ProP	Sasaran	Indikator	Dukungan Terhadap Arahan Presiden	Target	Rp. Juta	Instansi Pelaksana
02.01.05.25 PRO-P: Peningkatan Kapasitas Pemerintahan Daerah dan Hubungan Pusat-Daerah di Provinsi Lampung	01 - Mempercepat kemudahan berusaha di daerah termasuk reformasi pelayanan perizinan yang berbasis sistem informasi digital (<i>e-gov</i>)	01 - Jumlah perizinan yang kewenangannya sudah didelegasikan ke PTSP Prima berbasis elektronik	4	969 dokumen	0,0 ^(a)	KEMENTERIAN DALAM NEGERI
	02 - Meningkatnya kerja sama daerah	01 - Jumlah daerah yang mengimplementasikan kesepakatan dan perjanjian kerja sama	4	1 daerah		
	03 - Meningkatnya persentase capaian SPM di daerah	01 - Persentase capaian SPM di daerah	4	91,29 %		
	04 - Meningkatnya persentase daerah dengan nilai indeks inovasi tinggi	01 - Persentase daerah yang mempunyai nilai indeks inovasi tinggi	4	43 %		
	05 - Meningkatnya daerah dengan penerimaan daerah meningkat	01 - Jumlah daerah yang penerimaan daerahnya meningkat	4	12 daerah		
	06 - Meningkatnya daerah dengan realisasi belanjanya berkualitas	01 - Jumlah daerah yang realisasi belanjanya berkualitas	4	12 daerah		
	07 - Meningkatnya tata kelola keuangan daerah yang efektif dan efisien	01 - Jumlah daerah yang melaksanakan tata kelola keuangan daerah yang efektif dan efisien	4	12 daerah		
	08 - Peningkatan penataan hubungan pusat daerah	01 - Jumlah tugas dan wewenang yang dilaksanakan oleh Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat dengan kinerja baik	4	22 rekomendasi		



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

PN/PP/KP/ProP	Sasaran	Indikator	Dukungan Terhadap Arahan Presiden	Target	Rp. Juta	Instansi Pelaksana
02.01.05.26 PRO-P: Pengelolaan dan Pelayanan Pertanahan di Provinsi Lampung	01 - Terlaksananya percepatan sertifikasi tanah	01 - Jumlah Sertipikat Hak Atas Tanah	5	70.555 bidang	5.910,8	KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BPN
	02 - Terlaksananya percepatan peta bidang tanah dan ruang	01 - Jumlah bidang tanah	5	104.488 bidang		
02.01.05.27 PRO-P: Penyelenggaraan Penataan Ruang di Provinsi Lampung	01 - Tersedianya rencana tata ruang yang berkualitas	01 - Jumlah materi teknis dan rancangan peraturan daerah RDTR Kab/Kota	5	2 rekomendasi kebijakan	1.386,0	KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BPN
		02 - Jumlah persetujuan substansi RDTR Kab/Kota	5	2 rekomendasi kebijakan		
		03 - Jumlah penanganan perkara hasil penyidikan pelanggaran pemanfaatan ruang	5	10 perkara		
02.01.05.28 PRO-P: Peningkatan Kapasitas Pemerintahan Daerah dan Hubungan Pusat-Daerah di Provinsi Bengkulu	01 - Mempercepat kemudahan berusaha di daerah termasuk reformasi pelayanan perizinan yang berbasis sistem informasi digital (<i>e-gov</i>)	01 - Jumlah perizinan yang kewenangannya sudah didelegasikan ke PTSP Prima berbasis elektronik	4	2.377 dokumen	0,0 ^(a)	KEMENTERIAN DALAM NEGERI
	02 - Meningkatnya kerja sama daerah	01 - Jumlah daerah yang mengimplementasikan kesepakatan dan perjanjian kerja sama	4	1 daerah		
	03 - Meningkatnya persentase capaian SPM di daerah	01 - Persentase capaian SPM di daerah	4	89,36 %		
	04 - Meningkatnya persentase daerah dengan nilai indeks inovasi tinggi	01 - Persentase daerah yang mempunyai nilai indeks inovasi tinggi	4	48 %		



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

PN/PP/KP/ProP	Sasaran	Indikator	Dukungan Terhadap Arahan Presiden	Target	Rp. Juta	Instansi Pelaksana
	05 - Meningkatnya daerah dengan penerimaan daerah meningkat	01 - Jumlah daerah yang penerimaan daerahnya meningkat	4	9 daerah		
	06 - Meningkatnya daerah dengan realisasi belanjanya berkualitas	01 - Jumlah daerah yang realisasi belanjanya berkualitas	4	9 daerah		
	07 - Meningkatnya tata kelola keuangan daerah yang efektif dan efisien	01 - Jumlah daerah yang melaksanakan tata kelola keuangan daerah yang efektif dan efisien	4	9 daerah		
	08 - Peningkatan penataan hubungan pusat daerah	01 - Jumlah tugas dan wewenang yang dilaksanakan oleh Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat dengan kinerja baik	4	22 rekomendasi		
02.01.05.29 PRO-P: Pengelolaan dan Pelayanan Pertanahan di Provinsi Bengkulu	01 - Terlaksananya percepatan sertifikasi tanah	01 - Jumlah Sertipikat Hak Atas Tanah	5	26.338 bidang	8.288,7	KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BPN, KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI, KEMENTERIAN PERTANIAN
	02 - Terlaksananya percepatan peta bidang tanah dan ruang	01 - Jumlah bidang tanah	5	30.757 ha		
02.01.05.30 PRO-P: Penyelenggaraan Penataan Ruang di Provinsi Bengkulu	01 - Tersedianya rencana tata ruang yang berkualitas	01 - Jumlah materi teknis dan rancangan peraturan daerah RDTR Kab/Kota	5	2 rekomendasi kebijakan	1.261,0	KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BPN
		02 - Jumlah persetujuan substansi RDTR Kab/Kota	5	1 rekomendasi kebijakan		
		03 - Jumlah materi teknis dan rancangan peraturan daerah RTRW Prov/Kab/Kota	5	1 rekomendasi kebijakan		



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

PN/PP/KP/ProP	Sasaran	Indikator	Dukungan Terhadap Arahan Presiden	Target	Rp. Juta	Instansi Pelaksana
		04 - Jumlah persetujuan substansi RTRW Prov/Kab/Kota	5	3 rekomendasi kebijakan		
02.01.05.31 PRO-P: Peningkatan Kapasitas Pemerintahan Daerah dan Hubungan Pusat-Daerah di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	01 - Mempercepat kemudahan berusaha di daerah termasuk reformasi pelayanan perizinan yang berbasis sistem informasi digital (<i>e-gov</i>)	01 - Jumlah perizinan yang kewenangannya sudah didelegasikan ke PTSP Prima berbasis elektronik	4	645 dokumen	0,0 ^(a)	KEMENTERIAN DALAM NEGERI
	02 - Meningkatnya kerja sama daerah	01 - Jumlah daerah yang mengimplementasikan Kesepakatan dan Perjanjian Kerja Sama	4	1 daerah		
	03 - Meningkatnya persentase capaian SPM di daerah	01 - Persentase capaian SPM di daerah	4	93,36 %		
	04 - Meningkatnya persentase daerah dengan nilai indeks inovasi tinggi	01 - Persentase daerah yang mempunyai nilai indeks inovasi tinggi	4	43 %		
	05 - Meningkatnya daerah dengan penerimaan daerah meningkat	01 - Jumlah daerah yang penerimaan daerahnya meningkat	4	8 daerah		
	06 - Meningkatnya daerah dengan realisasi belanjanya berkualitas	01 - Jumlah daerah yang realisasi belanjanya berkualitas	4	7 daerah		
	07 - Meningkatnya tata kelola keuangan daerah yang efektif dan efisien	01 - Jumlah daerah yang melaksanakan tata kelola keuangan daerah yang efektif dan efisien	4	7 daerah		



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

PN/PP/KP/ProP	Sasaran	Indikator	Dukungan Terhadap Arahan Presiden	Target	Rp. Juta	Instansi Pelaksana
	08 - Peningkatan penataan hubungan pusat daerah	01 - Jumlah tugas dan wewenang yang dilaksanakan oleh Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat dengan kinerja baik	4	22 rekomendasi		
02.01.05.32 PRO-P: Pengelolaan dan Pelayanan Pertanahan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	01 - Terlaksananya percepatan sertifikasi tanah	01 - Jumlah Sertipikat Hak Atas Tanah	5	16.534 bidang	2.174,8	KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BPN
	02 - Terlaksananya percepatan peta bidang tanah dan ruang	01 - Jumlah bidang tanah	5	53.268,5 ha		
02.01.05.33 PRO-P: Penyelenggaraan Penataan Ruang di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	01 - Tersedianya rencana tata ruang yang berkualitas	01 - Jumlah materi teknis dan rancangan peraturan daerah RDTR Kab/Kota	5	3 rekomendasi kebijakan	1.212,0	KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BPN
		02 - Jumlah persetujuan substansi RDTR Kab/Kota	5	3 rekomendasi kebijakan		
		03 - Jumlah persetujuan substansi RTRW Prov/Kab/Kota	5	1 rekomendasi kebijakan		
02.01.05.35 PRO-P: Penyelenggaraan Informasi Geospasial di Provinsi Sumatera Barat	01 - Tercapainya jumlah kesepakatan teknis batas wilayah administrasi desa/kelurahan yang dihasilkan	01 - Jumlah kesepakatan teknis batas wilayah administrasi desa/kelurahan yang dihasilkan	2	350 desa	1.533,8	BADAN INFORMASI GEOSPASIAL (BIG)
02.01.05.36 PRO-P: Penyelenggaraan Informasi Geospasial di Provinsi Sumatera Selatan	01 - Tercapainya jumlah kesepakatan teknis batas wilayah administrasi desa/kelurahan yang dihasilkan	01 - Jumlah kesepakatan teknis batas wilayah administrasi desa/kelurahan yang dihasilkan	2	250 desa	0,0 ^(a)	BADAN INFORMASI GEOSPASIAL (BIG)



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

PN/PP/KP/ProP	Sasaran	Indikator	Dukungan Terhadap Arahan Presiden	Target	Rp. Juta	Instansi Pelaksana
02.01.05.37 PRO-P: Penyelenggaraan Informasi Geospasial di Provinsi Lampung	01 - Tercapainya jumlah kesepakatan teknis batas wilayah administrasi desa/kelurahan yang dihasilkan	01 - Jumlah kesepakatan teknis batas wilayah administrasi desa/kelurahan yang dihasilkan	2	300 desa	0,0 ^(a)	BADAN INFORMASI GEOSPASIAL (BIG)
02.01.05.43 PRO-P: Penyelenggaraan Informasi Geospasial di Provinsi Riau	01 - Tercapainya jumlah kesepakatan teknis batas wilayah administrasi desa/kelurahan yang dihasilkan	01 - Jumlah kesepakatan teknis batas wilayah administrasi desa/kelurahan yang dihasilkan	2	100 desa	0,0 ^(a)	BADAN INFORMASI GEOSPASIAL (BIG)
02.02 PP: Pembangunan Wilayah Jawa-Bali	01 - Terjaganya pertumbuhan ekonomi dan tingkat kesejahteraan masyarakat di Wilayah Jawa-Bali	01 - Laju pertumbuhan PDRB Wilayah Jawa-Bali	5	5,2—5,4 % per tahun	47.907.025,1	
		02 - IPM Provinsi di Wilayah Jawa-Bali	1	73,05—82,43 nilai minimum—nilai maksimum		
		03 - Persentase penduduk miskin Wilayah Jawa-Bali	1, 5	6,9—7,6 %		
02.02.01 KP: Pengembangan Kawasan Strategis	01 - Berkembangnya kawasan strategis	01 - Rasio pertumbuhan investasi kawasan (KEK/KI/DPP/KPBPB) terhadap wilayah	5	>1	499.163,4	
		02 - Jumlah kawasan pusat pertumbuhan yang difasilitasi dan dikembangkan	5	12 kawasan		
		03 - Destinasi Pariwisata Prioritas (DPP)	5	2 jumlah destinasi		
		04 - Destinasi pariwisata pengembangan dan revitalisasi	5	3 jumlah destinasi		



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

PN/PP/KP/ProP	Sasaran	Indikator	Dukungan Terhadap Arahan Presiden	Target	Rp. Juta	Instansi Pelaksana
		05 - KEK berbasis pariwisata dan industri	5	5 kawasan		
		06 - KI prioritas dan KI Pengembangan	5	2 jumlah KI		
02.02.01.01 PRO-P: Pembangunan Destinasi Pariwisata Pengembangan Ujung Kulon-Halimun-Bandung-Pangandaran di Provinsi Jawa Barat	01 - Terlaksananya pembangunan Destinasi Pariwisata Pengembangan Ujung Kulon-Halimun-Bandung-Pangandaran	01 - Rasio pertumbuhan investasi kawasan (KEK/KI/DPP/KPBPB) terhadap pertumbuhan investasi Provinsi Jawa Barat	5	>1	6.300,0	KEMENTERIAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF/BADAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF, KEMENTERIAN DALAM NEGERI, KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI
02.02.01.02 PRO-P: Percepatan Peningkatan Investasi KEK Kendal	01 - Terlaksananya percepatan peningkatan investasi KEK Kendal	01 - Rasio pertumbuhan investasi kawasan (KEK/KI/DPP/KPBPB) terhadap pertumbuhan investasi Provinsi Jawa Tengah	5	>1	1.488,4	KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL, KEMENTERIAN INVESTASI/BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL, KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
02.02.01.03 PRO-P: Perbaikan Aksesibilitas, Atraksi, dan Amenitas Destinasi Pariwisata Prioritas Borobudur dan Sekitarnya di Provinsi Jawa Tengah	01 - Terlaksananya perbaikan aksesibilitas, atraksi, dan amenitas Destinasi Pariwisata Prioritas Borobudur dan sekitarnya	01 - Rasio pertumbuhan investasi kawasan (KEK/KI/DPP/KPBPB) terhadap pertumbuhan investasi Provinsi Jawa Tengah	5	>1	32.413,0	KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT, KEMENTERIAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF/BADAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF, KEMENTERIAN DALAM NEGERI, KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA, KEMENTERIAN PERHUBUNGAN, KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI, KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA (Terintegrasi dengan PSN)



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

PN/PP/KP/ProP	Sasaran	Indikator	Dukungan Terhadap Arahan Presiden	Target	Rp. Juta	Instansi Pelaksana
02.02.01.04 PRO-P: Terlaksananya Perbaikan Aksesibilitas, Atraksi, dan Amenitas Destinasi Pariwisata Prioritas Borobudur dan Sekitarnya di Provinsi DI Yogyakarta	01 - Terlaksananya perbaikan aksesibilitas, atraksi, dan amenitas Destinasi Pariwisata Prioritas Borobudur dan sekitarnya	01 - Rasio pertumbuhan investasi kawasan (KEK/KI/DPP/kawasan yang ditetapkan) terhadap pertumbuhan investasi Provinsi DI Yogyakarta	5	>1	315.497,9	KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT, KEMENTERIAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF/BADAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF, KEMENTERIAN DALAM NEGERI, KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI, KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
02.02.01.05 PRO-P: Perbaikan Aksesibilitas, Atraksi, dan Amenitas Destinasi Pariwisata Prioritas Bromo-Tengger-Semeru	01 - Perbaikan aksesibilitas, atraksi, dan amenitas Destinasi Pariwisata Prioritas Bromo-Tengger-Semeru	01 - Rasio pertumbuhan investasi kawasan (KEK/KI/DPP/KPBPB) terhadap pertumbuhan investasi Provinsi Jawa Timur	5	>1	45.413,5	KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT, KEMENTERIAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF/BADAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF, KEMENTERIAN DALAM NEGERI, KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI, KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA (Terintegrasi dengan PSN)
02.02.01.06 PRO-P: Pembangunan Destinasi Pariwisata Pengembangan Banyuwangi	01 - Terlaksananya pembangunan Destinasi Pariwisata Pengembangan Banyuwangi	01 - Rasio pertumbuhan investasi kawasan (KEK/KI/DPP/KPBPB) terhadap pertumbuhan investasi Provinsi Jawa Timur	5	>1	1.200,0	KEMENTERIAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF/BADAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF, KEMENTERIAN DALAM NEGERI, KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI
02.02.01.07 PRO-P: Percepatan Peningkatan Investasi KEK Tanjung Lesung	01 - Terlaksananya percepatan peningkatan investasi KEK Tanjung Lesung	01 - Rasio pertumbuhan investasi kawasan (KEK/KI/DPP/KPBPB) terhadap pertumbuhan investasi Provinsi Banten	5	>1	94.950,5	KEMENTERIAN PERHUBUNGAN, KEMENTERIAN INVESTASI/BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL, KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

PN/PP/KP/ProP	Sasaran	Indikator	Dukungan Terhadap Arahan Presiden	Target	Rp. Juta	Instansi Pelaksana
02.02.01.08 PRO-P: Peningkatan keberlanjutan DPP Revitalisasi Bali	01 - Terlaksananya peningkatan keberlanjutan DPP Revitalisasi Bali	01 - Rasio pertumbuhan investasi kawasan (KEK/KI/DPP/KBPB) terhadap pertumbuhan investasi Provinsi Bali	5	>1	1.200,0	KEMENTERIAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF/BADAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF, KEMENTERIAN DALAM NEGERI, KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI
02.02.01.09 PRO-P: Pembangunan Destinasi Pariwisata Pengembangan Ujung Kulon-Halimun-Bandung-Pangandaran di Provinsi Banten	01 - Terlaksananya pembangunan Destinasi Pariwisata Pengembangan Ujung Kulon-Halimun-Bandung-Pangandaran	01 - Rasio pertumbuhan investasi kawasan (KEK/KI/DPP/KBPB) terhadap pertumbuhan investasi Provinsi Banten	5	>1	700,0	KEMENTERIAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF/BADAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF, KEMENTERIAN DALAM NEGERI, KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI
02.02.01.11 PRO-P: Fasilitasi Realisasi Investasi dan Pembangunan KI Subang	01 - Terlaksananya percepatan peningkatan investasi KI Subang	01 - Rasio pertumbuhan investasi kawasan (KEK/KI/DPP/KBPB) terhadap pertumbuhan investasi Provinsi Jawa Barat	5	>1	0,0 ^(a)	KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN, KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL, KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BPN (Terintegrasi dengan PSN)
02.02.01.12 PRO-P: Fasilitasi Realisasi Investasi dan Pembangunan KI Batang	01 - Terlaksananya percepatan peningkatan investasi KI Batang	01 - Rasio pertumbuhan investasi kawasan (KEK/KI/DPP/kawasan yang ditetapkan) terhadap pertumbuhan investasi Provinsi Jawa Tengah	5	>1	0,0 ^(a)	KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN, KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL, KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BPN (Terintegrasi dengan PSN)
02.02.01.13 PRO-P: Fasilitasi Realisasi Investasi dan Pembangunan KI Pancapuri	01 - Terlaksananya Fasilitasi Realisasi Investasi dan Pembangunan KI Pancapuri	01 - Rasio pertumbuhan investasi kawasan (KEK/KI/DPP/kawasan yang ditetapkan) terhadap pertumbuhan investasi Provinsi Banten	5	>1	0,0 ^(a)	KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL, KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN, KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BPN
02.02.01.14 PRO-P: Percepatan Operasionalisasi KEK Lido	01 - Terlaksananya Percepatan Operasionalisasi KEK Lido	01 - Rasio pertumbuhan investasi kawasan (KEK/KI/DPP/kawasan yang ditetapkan) terhadap pertumbuhan investasi Provinsi Jawa Barat	5	>1	0,0 ^(a)	KEMENTERIAN INVESTASI/BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

PN/PP/KP/ProP	Sasaran	Indikator	Dukungan Terhadap Arahan Presiden	Target	Rp. Juta	Instansi Pelaksana
02.02.01.15 PRO-P: Percepatan Operasionalisasi KEK Gresik	01 - Terlaksananya Percepatan Operasionalisasi KEK Gresik	01 - Rasio pertumbuhan investasi kawasan (KEK/KI/DPP/kawasan yang ditetapkan) terhadap pertumbuhan investasi Provinsi Jawa Timur	5	>1	0,0 ^(a)	KEMENTERIAN INVESTASI/BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL, KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
02.02.01.16 PRO-P: Percepatan Operasionalisasi KEK Singhasari	01 - Terlaksananya Percepatan Operasionalisasi KEK Singhasari	01 - Rasio pertumbuhan investasi kawasan (KEK/KI/DPP/kawasan yang ditetapkan) terhadap pertumbuhan investasi Provinsi Jawa Timur	5	>1	0,0 ^(a)	KEMENTERIAN INVESTASI/BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
02.02.02 KP: Pengembangan Sektor Unggulan	01 - Berkembangnya sektor unggulan	01 - Persentase peningkatan produksi komoditas unggulan per tahun - kakao	5	3—4 %	140.412,9	
		02 - Persentase peningkatan produksi komoditas unggulan per tahun - kopi	5	3—5 %		
		03 - Persentase peningkatan produksi komoditas unggulan per tahun - kelapa	5	1—2 %		
		04 - Persentase peningkatan produksi komoditas unggulan per tahun - tebu	5	2—4 %		
		05 - Persentase peningkatan produksi komoditas unggulan per tahun - cengkeh	5	2—4 %		
		06 - Persentase peningkatan produksi komoditas unggulan per tahun - perikanan tangkap	5	2—4 %		



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

PN/PP/KP/ProP	Sasaran	Indikator	Dukungan Terhadap Arahan Presiden	Target	Rp. Juta	Instansi Pelaksana
		07 - Persentase peningkatan produksi komoditas unggulan per tahun - perikanan budidaya	5	4—6 %		
		08 - Persentase peningkatan produksi komoditas unggulan per tahun - garam	5	8—10 %		
		09 - Persentase peningkatan produksi komoditas unggulan per tahun - pala	5	1—2 %		
		10 - Persentase peningkatan produksi komoditas unggulan per tahun - lada	5	1—2 %		
02.02.02.01 PRO-P: Pengembangan Komoditas Unggulan Lada, Pala, dan Cengkeh di Provinsi Jawa Barat	01 - Terlaksananya pengembangan komoditas unggulan lada, pala, dan cengkeh	01 - Persentase peningkatan produksi komoditas unggulan per tahun Provinsi Jawa Barat - lada	5	1—2 %	5.733,5	KEMENTERIAN PERTANIAN
		02 - Persentase peningkatan produksi komoditas unggulan per tahun Provinsi Jawa Barat - pala	5	1—2 %		
		03 - Persentase peningkatan produksi komoditas unggulan per tahun Provinsi Jawa Barat - cengkeh	5	3—5 %		
02.02.02.02 PRO-P: Pengembangan Komoditas Unggulan Kopi di Provinsi Jawa Barat	01 - Terlaksananya pengembangan komoditas unggulan kopi	01 - Persentase peningkatan produksi komoditas unggulan per tahun Provinsi Jawa Barat - kopi	5	5—6 %	14.596,5	KEMENTERIAN PERTANIAN
02.02.02.03 PRO-P: Pengembangan Komoditas Unggulan Kelapa di Provinsi Jawa Barat	01 - Terlaksananya pengembangan komoditas unggulan kelapa	01 - Persentase peningkatan produksi komoditas unggulan per tahun Provinsi Jawa Barat - kelapa	5	2—3 %	979,4	KEMENTERIAN PERTANIAN



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

PN/PP/KP/ProP	Sasaran	Indikator	Dukungan Terhadap Arahan Presiden	Target	Rp. Juta	Instansi Pelaksana
02.02.02.04 PRO-P: Pengembangan Komoditas Unggulan Tebu di Provinsi Jawa Barat	01 - Terlaksananya pengembangan komoditas unggulan tebu	01 - Persentase peningkatan produksi komoditas unggulan per tahun Provinsi Jawa Barat - tebu	5	4—6 %	4.634,6	KEMENTERIAN PERTANIAN
02.02.02.06 PRO-P: Pengembangan Komoditas Unggulan Garam di Provinsi Jawa Barat	01 - Terlaksananya pengembangan komoditas unggulan garam	01 - Persentase peningkatan produksi komoditas unggulan per tahun Provinsi Jawa Barat - garam	5	10—12 %	4.358,7	KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
02.02.02.07 PRO-P: Peningkatan Komoditas Unggulan Tebu di Provinsi Jawa Tengah	01 - Terlaksananya pengembangan komoditas unggulan tebu	01 - Persentase peningkatan produksi komoditas unggulan per tahun Provinsi Jawa Tengah - tebu	5	2—3 %	5.712,4	KEMENTERIAN PERTANIAN
02.02.02.08 PRO-P: Pengembangan Komoditas Unggulan Kopi di Provinsi Jawa Tengah	01 - Terlaksananya pengembangan komoditas unggulan kopi	01 - Persentase peningkatan produksi komoditas unggulan per tahun Provinsi Jawa Tengah - kopi	5	8—9 %	15.489,8	KEMENTERIAN PERTANIAN
02.02.02.09 PRO-P: Pengembangan Komoditas Unggulan Garam di Provinsi Jawa Tengah	01 - Terlaksananya pengembangan komoditas unggulan garam	01 - Persentase peningkatan produksi komoditas unggulan per tahun Provinsi Jawa Tengah - garam	5	10—12 %	13.948,5	KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
02.02.02.10 PRO-P: Pengembangan Komoditas Unggulan Tebu di Provinsi DI Yogyakarta	01 - Terlaksananya pengembangan komoditas unggulan tebu	01 - Persentase peningkatan produksi komoditas unggulan per tahun Provinsi DI Yogyakarta - tebu	5	4—6 %	351,0	KEMENTERIAN PERTANIAN
02.02.02.11 PRO-P: Peningkatan Komoditas Unggulan Tebu di Provinsi Jawa Timur	01 - Terlaksananya pengembangan komoditas unggulan tebu	01 - Persentase peningkatan produksi komoditas unggulan per tahun Provinsi Jawa Timur - tebu	5	2—3 %	11.581,5	KEMENTERIAN PERTANIAN



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

PN/PP/KP/ProP	Sasaran	Indikator	Dukungan Terhadap Arahan Presiden	Target	Rp. Juta	Instansi Pelaksana
02.02.02.12 PRO-P: Pengembangan Komoditas Unggulan Kopi di Provinsi Jawa Timur	01 - Terlaksananya pengembangan komoditas unggulan kopi	01 - Persentase peningkatan produksi komoditas unggulan per tahun Provinsi Jawa Timur - kopi	5	1—2 %	2.610,0	KEMENTERIAN PERTANIAN
02.02.02.14 PRO-P: Pengembangan Komoditas Unggulan Garam di Provinsi Jawa Timur	01 - Terlaksananya pengembangan komoditas unggulan garam	01 - Persentase peningkatan produksi komoditas unggulan per tahun Provinsi Jawa Timur - garam	5	10—12 %	15.323,8	KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
02.02.02.17 PRO-P: Pengembangan komoditas unggulan kopi di Provinsi Bali	01 - Terlaksananya pengembangan komoditas unggulan kopi	01 - Persentase peningkatan produksi komoditas unggulan per tahun Provinsi Bali - kopi	5	3—4 %	6.270,5	KEMENTERIAN PERTANIAN
02.02.02.18 PRO-P: Pengembangan Komoditas Unggulan Kelapa di Provinsi Bali	01 - Terlaksananya pengembangan komoditas unggulan kelapa	01 - Persentase peningkatan produksi komoditas unggulan per tahun Provinsi Bali - kelapa	5	2—3 %	1.694,4	KEMENTERIAN PERTANIAN
02.02.02.19 PRO-P: Pengembangan Komoditas Unggulan Kakao di Provinsi Bali	01 - Terlaksananya pengembangan komoditas unggulan kakao	01 - Persentase peningkatan produksi komoditas unggulan per tahun Provinsi Bali - kakao	5	1—2 %	0,0 ^(a)	KEMENTERIAN PERTANIAN
02.02.02.22 PRO-P: Pengembangan Komoditas Unggulan Perikanan Tangkap Provinsi Jawa Barat	01 - Terlaksananya pengembangan komoditas unggulan perikanan tangkap	01 - Persentase peningkatan produksi komoditas unggulan per tahun Provinsi Jawa Barat - perikanan tangkap	5	1—2 %	2.370,0	KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
02.02.02.23 PRO-P: Pengembangan Komoditas Unggulan Perikanan Budidaya di Provinsi Jawa Barat	01 - Terlaksananya pengembangan komoditas unggulan perikanan budidaya	01 - Persentase peningkatan produksi komoditas unggulan per tahun Provinsi Jawa Barat - perikanan budidaya	5	3—5 %	9.188,2	KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

PN/PP/KP/ProP	Sasaran	Indikator	Dukungan Terhadap Arahan Presiden	Target	Rp. Juta	Instansi Pelaksana
02.02.02.25 PRO-P: Pengembangan Komoditas Unggulan Perikanan Budidaya di Provinsi Jawa Tengah	01 - Terlaksananya pengembangan komoditas unggulan perikanan budidaya	01 - Persentase peningkatan produksi komoditas unggulan per tahun Provinsi Jawa Tengah - perikanan budidaya	5	4—6 %	1.612,1	KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
02.02.02.26 PRO-P: Pengembangan komoditas Unggulan Perikanan Budidaya Provinsi di DI Yogyakarta	01 - Terlaksananya pengembangan komoditas unggulan perikanan budidaya	01 - Persentase peningkatan produksi komoditas unggulan per tahun Provinsi DI Yogyakarta - perikanan budidaya	5	5—7 %	2.225,0	KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
02.02.02.28 PRO-P: Pengembangan Komoditas Unggulan Perikanan Budidaya di Provinsi Jawa Timur	01 - Terlaksananya pengembangan komoditas unggulan perikanan budidaya	01 - Persentase peningkatan produksi komoditas unggulan per tahun Provinsi Jawa Timur - perikanan budidaya	5	2—4 %	7.803,6	KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
02.02.02.29 PRO-P: Pengembangan Komoditas Unggulan Perikanan Budidaya di Provinsi Banten	01 - Terlaksananya pengembangan komoditas unggulan perikanan budidaya	01 - Persentase peningkatan produksi komoditas unggulan per tahun Provinsi Banten - perikanan budidaya	5	4—6 %	9.022,5	KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
02.02.02.31 PRO-P: Pengembangan Komoditas Unggulan Perikanan Budidaya di Provinsi Bali	01 - Terlaksananya pengembangan komoditas unggulan perikanan budidaya	01 - Persentase peningkatan produksi komoditas unggulan per tahun Provinsi Bali - perikanan budidaya	5	1—2 %	4.906,8	KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
02.02.03 KP: Pengembangan Kawasan Perkotaan	01 - Berkembangnya kawasan perkotaan	01 - Skor Indeks Kota Berkelanjutan/IKB WM Jakarta (angka perhitungan sementara)	5	61,29	45.805.617,1	



**PRESIDEN
REPUBLIC INDONESIA**

PN/PP/KP/ProP	Sasaran	Indikator	Dukungan Terhadap Arahan Presiden	Target	Rp. Juta	Instansi Pelaksana
		02 - Skor Indeks Kota Berkelanjutan/IKB WM Bandung (angka perhitungan sementara)	5	43,03		
		03 - Skor Indeks Kota Berkelanjutan/IKB Kota Sukabumi (angka perhitungan sementara)	5	44,40		
		04 - Skor Indeks Kota Berkelanjutan/IKB Kota Cirebon (angka perhitungan sementara)	5	45,47		
		05 - Skor Indeks Kota Berkelanjutan/IKB WM Semarang (angka perhitungan sementara)	5	45,37		
		06 - Skor Indeks Kota Berkelanjutan/IKB Kota Magelang (angka perhitungan sementara)	5	50,25		
		07 - Skor Indeks Kota Berkelanjutan/IKB Kota Surakarta (angka perhitungan sementara)	5	51,22		
		08 - Skor Indeks Kota Berkelanjutan/IKB Kota Pekalongan (angka perhitungan sementara)	5	46,73		
		09 - Skor Indeks Kota Berkelanjutan/IKB Kota Tegal (angka perhitungan sementara)	5	48,40		



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

PN/PP/KP/ProP	Sasaran	Indikator	Dukungan Terhadap Arahan Presiden	Target	Rp. Juta	Instansi Pelaksana
		10 - Skor Indeks Kota Berkelanjutan/IKB Kota Yogyakarta (angka perhitungan sementara)	5	77,15		
		11 - Skor Indeks Kota Berkelanjutan/IKB WM Surabaya (angka perhitungan sementara)	5	44,66		
		12 - Skor Indeks Kota Berkelanjutan/IKB Kota Kediri (angka perhitungan sementara)	5	52,51		
		13 - Skor Indeks Kota Berkelanjutan/IKB Kota Malang (angka perhitungan sementara)	5	47,00		
		14 - Skor Indeks Kota Berkelanjutan/IKB Kota Probolinggo (angka perhitungan sementara)	5	47,88		
		15 - Skor Indeks Kota Berkelanjutan/IKB Kota Pasuruan (angka perhitungan sementara)	5	45,97		
		16 - Skor Indeks Kota Berkelanjutan/IKB Kota Batu (angka perhitungan sementara)	5	48,95		
		17 - Skor Indeks Kota Berkelanjutan/IKB Kota Baru Maja (angka perhitungan sementara)	5	32,22		



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

PN/PP/KP/ProP	Sasaran	Indikator	Dukungan Terhadap Arahan Presiden	Target	Rp. Juta	Instansi Pelaksana
		18 - Skor Indeks Kota Berkelanjutan/IKB Kota Cilegon (angka perhitungan sementara)	5	64,26		
		19 - Skor Indeks Kota Berkelanjutan/IKB Kota Serang (angka perhitungan sementara)	5	56,47		
		20 - Skor Indeks Kota Berkelanjutan/IKB WM Denpasar (angka perhitungan sementara)	5	68,85		
	02 - Meningkatnya kualitas WM di Jawa	01 - Jumlah WM di Jawa yang ditingkatkan kualitasnya	5	4 WM		
	03 - Berkembangnya kota besar, kota sedang, kota kecil sebagai PKN/PKW	01 - Jumlah kota besar, sedang, kecil yang dikembangkan sebagai PKN/PKW	5	14 kota		
	04 - Terbangunnya kota baru	01 - Jumlah kota baru yang dibangun	5	1 kota		
	05 - Berkembangnya wilayah metropolitan di luar Jawa	01 - Jumlah WM di luar Jawa yang dikembangkan	5	1 WM		
02.02.03.05 PRO-P: Peningkatan Kualitas Wilayah Metropolitan Jakarta di Provinsi DKI Jakarta	01 - Meningkatnya kualitas WM Jakarta di Jawa	01 - Jumlah WM di Jawa yang ditingkatkan kualitasnya	5	1 WM	3.522.159,8	KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT, KEMENTERIAN PERHUBUNGAN, KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT (KPBU) (Terintegrasi dengan PSN)



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

PN/PP/KP/ProP	Sasaran	Indikator	Dukungan Terhadap Arahan Presiden	Target	Rp. Juta	Instansi Pelaksana
02.02.03.06 PRO-P: Peningkatan Kualitas Wilayah Metropolitan Jakarta di Provinsi Jawa Barat	01 - Meningkatnya kualitas WM Jakarta di Jawa	01 - Jumlah WM di Jawa yang ditingkatkan kualitasnya	5	1 WM	2.870.783,3	KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT, KEMENTERIAN PERHUBUNGAN, KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT (KPBU) (Terintegrasi dengan PSN)
02.02.03.07 PRO-P: Peningkatan Kualitas Wilayah Metropolitan di Provinsi Jawa Barat	01 - Meningkatnya kualitas WM di Jawa	01 - Jumlah WM di Jawa yang ditingkatkan kualitasnya	5	1 WM	8.599.393,4	KEMENTERIAN PERHUBUNGAN, KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT (KPBU) (Terintegrasi dengan PSN)
02.02.03.09 PRO-P: Peningkatan Kualitas Wilayah Metropolitan di Provinsi Jawa Tengah	01 - Meningkatnya kualitas WM di Jawa	01 - Jumlah WM di Jawa yang ditingkatkan kualitasnya	5	1 WM	3.446.712,6	KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BPN, KEMENTERIAN PERHUBUNGAN, KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT (KPBU), KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT (Terintegrasi dengan PSN)
02.02.03.10 PRO-P: Pengembangan Kota Besar, Kota Sedang, Kota Kecil di Provinsi Jawa Tengah	01 - Berkembangnya kota besar, kota sedang, kota kecil sebagai PKN/PKW	01 - Jumlah kota besar, sedang, kecil yang dikembangkan sebagai PKN/PKW	5	4 kota	1.168.921,1	KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT, KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
02.02.03.11 PRO-P: Pengembangan Kota Besar, Kota Sedang, Kota Kecil di Provinsi DI Yogyakarta	01 - Berkembangnya kota besar, kota sedang, kota kecil	01 - Jumlah kota besar, sedang, kecil yang dikembangkan sebagai PKN/PKW	5	1 kota	12.513.157,1	KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT (KPBU), KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT, KEMENTERIAN PERHUBUNGAN (Terintegrasi dengan PSN)
02.02.03.12 PRO-P: Peningkatan Kualitas Wilayah Metropolitan di Provinsi Jawa Timur	01 - Meningkatnya kualitas WM di Jawa	01 - Jumlah WM di Jawa yang ditingkatkan kualitasnya	5	1 WM	494.751,4	KEMENTERIAN PERHUBUNGAN, KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT (Terintegrasi dengan PSN)



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

PN/PP/KP/ProP	Sasaran	Indikator	Dukungan Terhadap Arahan Presiden	Target	Rp. Juta	Instansi Pelaksana
02.02.03.13 PRO-P: Pengembangan Kota Besar, Kota Sedang, Kota Kecil di Provinsi Jawa Timur	01 - Berkembangnya kota besar, kota sedang, kota kecil sebagai PKN/PKW	01 - Jumlah kota besar, sedang, kecil yang dikembangkan sebagai PKN/PKW	5	5 kota	6.961.201,3	KEMENTERIAN PERHUBUNGAN (KPBU), KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT (KPBU), KEMENTERIAN PERHUBUNGAN (Terintegrasi dengan PSN)
02.02.03.15 PRO-P: Pembangunan Kota Baru di Provinsi Banten	01 - Terbangunnya kota baru	01 - Jumlah kota baru yang dibangun	5	1 kota	897.576,3	KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT, KEMENTERIAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF, KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT (KPBU) (Terintegrasi dengan PSN)
02.02.03.16 PRO-P: Pengembangan Kota Besar, Kota Sedang, Kota Kecil di Provinsi Banten	01 - Berkembangnya kota besar, kota sedang, kota kecil sebagai PKN/PKW	01 - Jumlah kota besar, sedang, kecil yang dikembangkan sebagai PKN/PKW	5	2 kota	7.864,6	KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT (Terintegrasi dengan PSN)
02.02.03.17 PRO-P: Peningkatan Kualitas Wilayah Metropolitan Jakarta di Provinsi Banten	01 - Meningkatnya kualitas WM Jakarta di Jawa	01 - Jumlah WM di Jawa yang ditingkatkan kualitasnya	5	1 WM	115.437,6	KEMENTERIAN PERHUBUNGAN, KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
02.02.03.18 PRO-P: Pengembangan Wilayah Metropolitan di Provinsi Bali	01 - Berkembangnya wilayah metropolitan di luar Jawa	01 - Jumlah WM di luar Jawa yang dikembangkan	5	1 WM	5.207.658,6	BADAN PUSAT STATISTIK, KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT, KEMENTERIAN PERHUBUNGAN, KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT (KPBU), KEMENTERIAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF/BADAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF (Terintegrasi dengan PSN)



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

PN/PP/KP/ProP	Sasaran	Indikator	Dukungan Terhadap Arahan Presiden	Target	Rp. Juta	Instansi Pelaksana
02.02.04 KP: Pengembangan Daerah Tertinggal, Kawasan Perbatasan, Perdesaan, dan Transmigrasi	01 - Terbangunnya Desa Terpadu dan Kawasan Perdesaan	01 - Rata-rata Indeks Desa Pulau Jawa-Bali	1, 5	70,84	572.055,7	
		02 - Rata-rata nilai Indeks Perkembangan Kawasan Perdesaan Prioritas Nasional	1, 5	66,06		
		03 - Persentase penduduk miskin perdesaan Wilayah Jawa-Bali	1, 5	10,9—11,3 %		
02.02.04.04 PRO-P: Pembangunan Desa Terpadu di Provinsi Jawa Barat	01 - Terlaksananya pembangunan Desa Terpadu Provinsi Jawa Barat	01 - Rata-rata Indeks Desa Provinsi Jawa Barat	1, 5	73,10	84.616,4	KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI, KEMENTERIAN DALAM NEGERI, KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BPN, KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN, BADAN INFORMASI GEOSPASIAL (BIG), BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA (BNPB), KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI, BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL (BKKBN), KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA (Terintegrasi dengan PSN)
02.02.04.05 PRO-P: Pembangunan Desa Terpadu di Provinsi Jawa Tengah	01 - Terlaksananya pembangunan Desa Terpadu Provinsi Jawa Tengah	01 - Rata-rata Indeks Desa Provinsi Jawa Tengah	1, 5	72,15	14.562,9	KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI, KEMENTERIAN DALAM NEGERI, KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN, BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA (BNPB), BADAN INFORMASI GEOSPASIAL (BIG),



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

PN/PP/KP/ProP	Sasaran	Indikator	Dukungan Terhadap Arahan Presiden	Target	Rp. Juta	Instansi Pelaksana
						KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI, BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL (BKKBN), KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA (Terintegrasi dengan PSN)
02.02.04.06 PRO-P: Pembangunan Desa Terpadu di Provinsi DI Yogyakarta	01 - Terlaksananya pembangunan Desa Terpadu Provinsi DI Yogyakarta	01 - Rata-rata Indeks Desa Provinsi DI Yogyakarta	1, 5	79,30	1.676,1	KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI, KEMENTERIAN DALAM NEGERI, BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA (BNPB), BADAN INFORMASI GEOSPASIAL (BIG), KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI, BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL (BKKBN), KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA, KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN (Terintegrasi dengan PSN)
02.02.04.07 PRO-P: Pembangunan Desa Terpadu di Provinsi Jawa Timur	01 - Terlaksananya pembangunan Desa Terpadu Provinsi Jawa Timur	01 - Rata-rata Indeks Desa Provinsi Jawa Timur	1, 5	72,30	25.013,5	KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI, KEMENTERIAN DALAM NEGERI, BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA (BNPB), BADAN INFORMASI GEOSPASIAL (BIG), KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI,



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

PN/PP/KP/ProP	Sasaran	Indikator	Dukungan Terhadap Arahan Presiden	Target	Rp. Juta	Instansi Pelaksana
						BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL (BKKBN), KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA, KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN (Terintegrasi dengan PSN)
02.02.04.08 PRO-P: Pembangunan Desa Terpadu di Provinsi Banten	01 - Terlaksananya pembangunan Desa Terpadu Provinsi Banten	01 - Rata-rata Indeks Desa Provinsi Banten	1, 5	66,00	2.017,3	KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI, KEMENTERIAN DALAM NEGERI, BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA (BNPB), KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN, BADAN INFORMASI GEOSPASIAL (BIG), KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI, BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL (BKKBN), KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA (Terintegrasi dengan PSN)
02.02.04.09 PRO-P: Pembangunan Desa Terpadu di Provinsi Bali	01 - Terlaksananya pembangunan Desa Terpadu Provinsi Bali	01 - Rata-rata Indeks Desa Provinsi Bali	1, 5	76,85	1.727,9	KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI, KEMENTERIAN DALAM NEGERI, BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA (BNPB), KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN, BADAN INFORMASI GEOSPASIAL (BIG), KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI, BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL (BKKBN),



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

PN/PP/KP/ProP	Sasaran	Indikator	Dukungan Terhadap Arahan Presiden	Target	Rp. Juta	Instansi Pelaksana
						KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA (Terintegrasi dengan PSN)
02.02.04.10 PRO-P: Pembangunan Kawasan Perdesaan Prioritas Nasional Sukabumi	01 - Terlaksananya pembangunan Kawasan Perdesaan Prioritas Nasional Sukabumi	01 - Indeks Perkembangan Kawasan Perdesaan Kab. Sukabumi	1, 5	56,48	71.265,2	KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI, KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BPN, DAK
02.02.04.11 PRO-P: Pembangunan Kawasan Perdesaan Prioritas Nasional Magelang dan Kendal	01 - Terlaksananya pembangunan Kawasan Perdesaan Prioritas Nasional Magelang dan Kendal	01 - Indeks Perkembangan Kawasan Perdesaan Kab. Magelang dan Kendal	1, 5	65,85	95.329,4	KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI, KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BPN, DAK
02.02.04.12 PRO-P: Pembangunan Kawasan Perdesaan Prioritas Nasional Pamekasan dan Banyuwangi	01 - Terlaksananya pembangunan Kawasan Perdesaan Prioritas Nasional Pamekasan dan Banyuwangi	01 - Indeks Perkembangan Kawasan Perdesaan Kab. Pamekasan dan Banyuwangi	1, 5	83,75	158.877,7	KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI, KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BPN, DAK
02.02.04.13 PRO-P: Pembangunan Kawasan Perdesaan Prioritas Nasional Pandeglang	01 - Terlaksananya pembangunan Kawasan Perdesaan Prioritas Nasional Pandeglang	01 - Indeks Perkembangan Kawasan Perdesaan Kab. Pandeglang	1, 5	76,08	73.229,7	KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI, KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BPN, DAK
02.02.04.14 PRO-P: Pembangunan Kawasan Perdesaan Prioritas Nasional Buleleng dan Klungkung	01 - Terlaksananya pembangunan Kawasan Perdesaan Prioritas Nasional Buleleng dan Klungkung	01 - Indeks Perkembangan Kawasan Perdesaan Kab. Buleleng dan Klungkung	1, 5	70,56	21.175,8	KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI, KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BPN, DAK
02.02.04.15 PRO-P: Pemulihan Pasca Bencana Daerah Terdampak di Kawasan Pesisir Selat Sunda	01 - Pelayanan publik yang berhasil dipulihkan	01 - Persentase pelayanan publik yang dipulihkan	2	75,00 %	22.563,7	BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA (BNPB), KEMENTERIAN KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH, KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI,



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

PN/PP/KP/ProP	Sasaran	Indikator	Dukungan Terhadap Arahan Presiden	Target	Rp. Juta	Instansi Pelaksana
						KEMENTERIAN SOSIAL, KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
02.02.05 KP: Kelembagaan dan Keuangan Daerah	01 - Meningkatnya Nilai Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EPPD)	01 - Nilai Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EPPD)	4	3,52	889.776,1	
	02 - Meningkatnya persentase daerah dengan indeks inovasi tinggi	01 - Persentase daerah yang mempunyai nilai indeks inovasi tinggi	4	72,9 %		
	03 - Meningkatnya daerah dengan penerimaan daerah meningkat	01 - Jumlah daerah dengan penerimaan daerah meningkat	4	111 daerah		
	04 - Meningkatnya daerah dengan realisasi belanjanya berkualitas	01 - Jumlah daerah dengan realisasi belanjanya berkualitas	4	101 daerah		
	05 - Meningkatnya reformasi pelayanan perizinan	01 - Jumlah perizinan yang kewenangannya sudah didelegasikan ke PTSP Prima berbasis elektronik	4	10.535 dokumen		
	06 - Meningkatnya daerah yang memiliki PTSP Prima berbasis elektronik	01 - Jumlah daerah yang memiliki PTSP Prima berbasis elektronik	4	23 daerah		
	07 - Meningkatnya tata kelola keuangan daerah yang efektif dan efisien	01 - Jumlah daerah yang melaksanakan tata kelola keuangan yang efektif dan efisien	4	101 daerah		
	08 - Meningkatnya Kesepakatan dan Perjanjian Kerja Sama Daerah	01 - Jumlah daerah yang mengimplementasikan Kesepakatan dan Perjanjian Kerja Sama Daerah	4	5 daerah		



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

PN/PP/KP/ProP	Sasaran	Indikator	Dukungan Terhadap Arahan Presiden	Target	Rp. Juta	Instansi Pelaksana
	09 - Meningkatnya persentase capaian SPM di daerah	01 - Persentase capaian SPM di daerah	4	92,96 %		
	10 - Meningkatnya daerah dengan indeks kinerja GWPP kategori baik	01 - Jumlah daerah dengan indeks kinerja GWPP kategori baik	4	34 daerah		
	11 - Meningkatnya pengelolaan pertanahan dan terselenggarakannya penataan ruang	01 - Luas cakupan bidang tanah bersertipikat yang terdigitasi dan memiliki georeferensi yang baik	5	1.836.596 ha		
		02 - Luas cakupan peta dasar pertanahan	5	713.782 ha		
		03 - Jumlah materi teknis dan rancangan peraturan daerah RDTR Kab/Kota	5	31 materi teknis dan Ranperkada RDTR		
		04 - Jumlah persetujuan substansi RDTR Kab/Kota	5	30 persetujuan substansi RDTR		
		05 - Jumlah materi teknis dan rancangan peraturan daerah RTRW Prov/Kab/Kota	5	11 materi teknis dan Ranperda RTRW		
		06 - Jumlah persetujuan substansi RTRW Prov/Kab/Kota	5	14 persetujuan substansi RTRW		
		07 - Jumlah materi teknis RTR Nasional (Pulau/Kep dan KSN)	5	1 materi teknis dan Raperpres RTR		
		08 - Jumlah penanganan perkara hasil penyidikan pelanggaran pemanfaatan ruang	5	10 perkara		



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

PN/PP/KP/ProP	Sasaran	Indikator	Dukungan Terhadap Arahan Presiden	Target	Rp. Juta	Instansi Pelaksana
	12 - Terlaksananya Peningkatan Penyelenggaraan Informasi Geospasial	01 - Jumlah layanan data center jaringan informasi geospasial nasional beroperasi	2	1 layanan		
		02 - Jumlah kesepakatan teknis batas wilayah administrasi desa/kelurahan yang dihasilkan	2	1.000 desa		
02.02.05.05 PRO-P: Peningkatan Kapasitas Pemerintahan Daerah dan Hubungan Pusat-Daerah di Provinsi DKI Jakarta	01 - Mempercepat kemudahan berusaha di daerah termasuk reformasi pelayanan perizinan yang berbasis sistem informasi digital (<i>e-gov</i>)	01 - Jumlah perizinan yang kewenangannya sudah didelegasikan ke PTSP Prima berbasis elektronik	4	334 dokumen	51.566,4	KEMENTERIAN DALAM NEGERI
	02 - Meningkatnya persentase capaian SPM di daerah	01 - Persentase capaian SPM di daerah	4	88,83 %		
	03 - Meningkatnya persentase daerah dengan nilai indeks inovasi tinggi	01 - Persentase daerah yang mempunyai nilai indeks inovasi tinggi	4	100 %		
	04 - Meningkatnya daerah dengan penerimaan daerah meningkat	01 - Jumlah daerah yang penerimaannya meningkat	4	1 daerah		
	05 - Meningkatnya daerah dengan realisasi belanjanya berkualitas	01 - Jumlah daerah yang realisasi belanjanya berkualitas	4	1 daerah		
	06 - Meningkatnya tata kelola keuangan daerah yang efektif dan efisien	01 - Jumlah daerah yang melaksanakan tata kelola keuangan daerah yang efektif dan efisien	4	1 daerah		



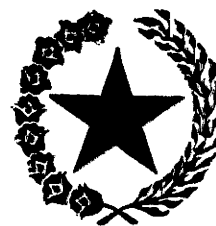
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

PN/PP/KP/ProP	Sasaran	Indikator	Dukungan Terhadap Arahan Presiden	Target	Rp. Juta	Instansi Pelaksana
	07 - Peningkatan penataan hubungan pusat daerah	01 - Jumlah tugas dan wewenang yang dilaksanakan oleh Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat dengan kinerja baik	4	22 rekomendasi		
02.02.05.06 PRO-P: Pengelolaan dan Pelayanan Pertanahan di Provinsi DKI Jakarta	01 - Terlaksananya percepatan peta dasar pertanahan	01 - Luas cakupan peta dasar pertanahan	5	2.524.043 ha	46.272,3	KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA, KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BPN
02.02.05.07 PRO-P: Peningkatan Kapasitas Pemerintahan Daerah dan Hubungan Pusat-Daerah di Provinsi Jawa Barat	01 - Mempercepat kemudahan berusaha di daerah termasuk reformasi pelayanan perizinan yang berbasis sistem informasi digital (<i>e-gov</i>)	01 - Jumlah perizinan yang kewenangannya sudah didelegasikan ke PTSP Prima berbasis elektronik	4	2.751 dokumen	216,9	KEMENTERIAN DALAM NEGERI
	02 - Meningkatkan kerja sama daerah	01 - Jumlah daerah yang mengimplementasikan Kesepakatan dan Perjanjian Kerja Sama	4	1 daerah		
	03 - Meningkatnya persentase capaian SPM di daerah	01 - Persentase capaian SPM di daerah	4	93,70 %		
	04 - Meningkatnya persentase daerah dengan nilai indeks inovasi tinggi	01 - Persentase daerah yang mempunyai nilai indeks inovasi tinggi	4	59,00 %		
	05 - Meningkatnya daerah dengan penerimaan daerah meningkat	01 - Jumlah daerah yang penerimaan daerahnya meningkat	4	25 daerah		
	06 - Meningkatnya daerah dengan realisasi belanjanya berkualitas	01 - Jumlah daerah yang realisasi belanjanya berkualitas	4	22 daerah		



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

PN/PP/KP/ProP	Sasaran	Indikator	Dukungan Terhadap Arahan Presiden	Target	Rp. Juta	Instansi Pelaksana
	07 - Meningkatnya tata kelola keuangan daerah yang efektif dan efisien	01 - Jumlah daerah yang melaksanakan tata kelola keuangan daerah yang efektif dan efisien	4	22 daerah		
	08 - Peningkatan penataan hubungan pusat daerah	01 - Jumlah tugas dan wewenang yang dilaksanakan oleh Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat dengan kinerja baik	4	22 rekomendasi		
02.02.05.08 PRO-P: Pengelolaan dan Pelayanan Pertanahan di Provinsi Jawa Barat	01 - Terlaksananya percepatan sertifikasi tanah	01 - Jumlah Sertipikat Hak Atas Tanah	5	330.795 bidang	216.044,6	KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BPN, KEMENTERIAN KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH, KEMENTERIAN PERTANIAN, KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI
	02 - Terlaksananya percepatan peta bidang tanah dan ruang	01 - Jumlah bidang tanah	5	169.781 ha		
02.02.05.09 PRO-P: Penyelenggaraan Penataan Ruang di Provinsi Jawa Barat	01 - Tersedianya rencana tata ruang yang berkualitas	01 - Jumlah materi teknis dan rancangan peraturan daerah RDTR Kab/Kota	5	7 rekomendasi kebijakan	3.469,3	KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BPN
		02 - Jumlah persetujuan substansi RDTR Kab/Kota	5	7 rekomendasi kebijakan		
		03 - Jumlah materi teknis dan rancangan peraturan daerah RTRW Prov/Kab/Kota	5	7 rekomendasi kebijakan		
		04 - Jumlah persetujuan substansi RTRW Prov/Kab/Kota	5	2 rekomendasi kebijakan		
		05 - Jumlah penanganan perkara hasil penyidikan pelanggaran pemanfaatan ruang	5	20 perkara		



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

PN/PP/KP/ProP	Sasaran	Indikator	Dukungan Terhadap Arahan Presiden	Target	Rp. Juta	Instansi Pelaksana
02.02.05.10 PRO-P: Penyelenggaraan Informasi Geospasial di Provinsi Jawa Barat	01 - Terlaksananya layanan data center	01 - Jumlah layanan data center jaringan informasi geospasial nasional beroperasi	2	1 layanan	85.950,4	BADAN INFORMASI GEOSPASIAL (BIG)
02.02.05.11 PRO-P: Peningkatan Kapasitas Pemerintahan Daerah dan Hubungan Pusat-Daerah di Provinsi Jawa Tengah	01 - Mempercepat kemudahan berusaha di daerah termasuk reformasi pelayanan perizinan yang berbasis sistem informasi digital (<i>e-gov</i>)	01 - Jumlah perizinan yang kewenangannya sudah didelegasikan ke PTSP Prima berbasis elektronik	4	1.766 dokumen	0,0 ^(a)	KEMENTERIAN DALAM NEGERI
	02 - Meningkatkan kera sama daerah	01 - Jumlah daerah yang mengimplementasikan Kesepakatan dan Perjanjian Kerja Sama	4	1 daerah		
	03 - Meningkatkan persentase capaian SPM di daerah	01 - Persentase capaian SPM di daerah	4	93,30 %		
	04 - Meningkatkan persentase daerah dengan nilai indeks inovasi tinggi	01 - Persentase daerah yang mempunyai nilai indeks inovasi tinggi	4	69 %		
	05 - Meningkatkan daerah dengan penerimaan daerah meningkat	01 - Jumlah daerah yang penerimaannya meningkat	4	31 daerah		
	06 - Meningkatkan daerah dengan realisasi belanjanya berkualitas	01 - Jumlah daerah yang realisasi belanjanya berkualitas	4	27 daerah		
	07 - Meningkatkan tata kelola keuangan daerah yang efektif dan efisien	01 - Jumlah daerah yang melaksanakan tata kelola keuangan daerah yang efektif dan efisien	4	27 daerah		



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

PN/PP/KP/ProP	Sasaran	Indikator	Dukungan Terhadap Arahan Presiden	Target	Rp. Juta	Instansi Pelaksana
	08 - Peningkatan penataan hubungan pusat daerah	01 - Jumlah tugas dan wewenang yang dilaksanakan oleh Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat dengan kinerja baik	4	22 rekomendasi		
02.02.05.12 PRO-P: Pengelolaan dan Pelayanan Pertanahan di Provinsi Jawa Tengah	01 - Terlaksananya percepatan sertifikasi tanah	01 - Jumlah Sertipikat Hak Atas Tanah	5	302.082 bidang	216.135,6	KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BPN, KEMENTERIAN KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH, KEMENTERIAN PERTANIAN, KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI
	02 - Terlaksananya percepatan peta bidang tanah dan ruang	01 - Jumlah bidang tanah	5	121.987 ha		
02.02.05.13 PRO-P: Penyelenggaraan Penataan Ruang di Provinsi Jawa Tengah	01 - Tersedianya rencana tata ruang yang berkualitas	01 - Jumlah materi teknis dan rancangan peraturan daerah RDTR Kab/Kota	5	7 rekomendasi kebijakan	3.457,4	KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BPN
		02 - Jumlah persetujuan substansi RDTR Kab/Kota	5	11 rekomendasi kebijakan		
		03 - Jumlah materi teknis dan rancangan peraturan daerah RTRW Prov/Kab/Kota	5	3 rekomendasi kebijakan		
		04 - Jumlah persetujuan substansi RTRW Prov/Kab/Kota	5	3 rekomendasi kebijakan		
		05 - Jumlah materi teknis RTR Nasional (Pulau/Kep dan KSN)	5	1 rekomendasi kebijakan		
02.02.05.14 PRO-P: Penyelenggaraan Informasi Geospasial di Provinsi Jawa Tengah	01 - Tercapainya jumlah kesepakatan teknis batas wilayah administrasi desa/kelurahan yang dihasilkan	01 - Jumlah kesepakatan teknis batas wilayah administrasi desa/kelurahan yang dihasilkan	2	400 desa	0,0 ^(a)	BADAN INFORMASI GEOSPASIAL (BIG)



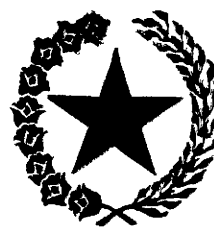
**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

PN/PP/KP/ProP	Sasaran	Indikator	Dukungan Terhadap Arahan Presiden	Target	Rp. Juta	Instansi Pelaksana
02.02.05.15 PRO-P: Peningkatan Kapasitas Pemerintahan Daerah dan Hubungan Pusat-Daerah di Provinsi D.I. Yogyakarta	01 - Mempercepat kemudahan berusaha di daerah termasuk reformasi pelayanan perizinan yang berbasis sistem informasi digital (<i>e-gov</i>)	01 - Jumlah perizinan yang kewenangannya sudah didelegasikan ke PTSP Prima berbasis elektronik	4	675 dokumen	616,9	KEMENTERIAN DALAM NEGERI
	02 - Meningkatnya persentase capaian SPM di daerah	01 - Persentase capaian SPM di daerah	4	96,74 %		
	03 - Meningkatnya persentase daerah dengan nilai indeks inovasi tinggi	01 - Persentase daerah yang mempunyai nilai indeks inovasi tinggi	4	80,00 %		
	04 - Meningkatnya daerah dengan penerimaan daerah meningkat	01 - Jumlah daerah yang penerimaan daerahnya meningkat	4	6 daerah		
	05 - Meningkatnya daerah dengan realisasi belanjanya berkualitas	01 - Jumlah daerah yang realisasi belanjanya berkualitas	4	5 daerah		
	06 - Meningkatnya tata kelola keuangan daerah yang efektif dan efisien	01 - Jumlah daerah yang melaksanakan tata kelola keuangan daerah yang efektif dan efisien	4	5 daerah		
	07 - Peningkatan penataan hubungan pusat daerah	01 - Jumlah tugas dan wewenang yang dilaksanakan oleh Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat dengan kinerja baik	4	22 rekomendasi		



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

PN/PP/KP/ProP	Sasaran	Indikator	Dukungan Terhadap Arahan Presiden	Target	Rp. Juta	Instansi Pelaksana	
	08 - Meningkatnya kualitas pelaksanaan kebijakan otonomi (regulasi) pada daerah otonomi khusus, daerah istimewa, dan daerah khusus ibukota negara.	01 - Jumlah pelaksanaan kebijakan otonomi (regulasi) pada daerah otonomi khusus, daerah istimewa, dan daerah khusus ibukota negara.	4	1 rekomendasi			
02.02.05.16 PRO-P: Pengelolaan dan Pelayanan Pertanahan di Provinsi D.I. Yogyakarta	01 - Terlaksananya percepatan sertifikasi tanah	01 - Jumlah Sertipikat Hak Atas Tanah	5	2.500 bidang	2.710,6	KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BPN	
	02 - Terlaksananya percepatan peta bidang tanah dan ruang	01 - Jumlah bidang tanah	5	345 ha			
02.02.05.17 PRO-P: Penyelenggaraan Penataan Ruang di Provinsi D.I. Yogyakarta	01 - Tersedianya rencana tata ruang yang berkualitas	01 - Jumlah materi teknis dan rancangan peraturan daerah RDTR Kab/Kota	5	4 rekomendasi kebijakan	1.251,4	KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BPN	
		02 - Jumlah persetujuan substansi RDTR Kab/Kota	5	1 rekomendasi kebijakan			
		03 - Jumlah persetujuan substansi RTRW Prov/Kab/Kota	5	2 rekomendasi kebijakan			
02.02.05.18 PRO-P: Peningkatan Kapasitas Pemerintahan Daerah dan Hubungan Pusat-Daerah di Provinsi Jawa Timur	01 - Mempercepat kemudahan berusaha di daerah termasuk reformasi pelayanan perizinan yang berbasis sistem informasi digital (<i>e-gov</i>)	01 - Jumlah perizinan yang kewenangannya sudah didelegasikan ke PTSP Prima berbasis elektronik	4	3.169 dokumen	0,0 ^(a)	KEMENTERIAN DALAM NEGERI	
		02 - Meningkatnya kerja sama daerah	01 - Jumlah daerah yang mengimplementasikan Kesepakatan dan Perjanjian Kerja Sama	4			1 daerah
		03 - Meningkatnya persentase capaian SPM di daerah	01 - Persentase capaian SPM di daerah	4			92,93 %



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

PN/PP/KP/ProP	Sasaran	Indikator	Dukungan Terhadap Arahan Presiden	Target	Rp. Juta	Instansi Pelaksana
	04 - Meningkatnya persentase daerah dengan nilai indeks inovasi tinggi	01 - Persentase daerah yang mempunyai nilai indeks inovasi tinggi	4	86 %		
	05 - Meningkatnya daerah dengan penerimaan daerah meningkat	01 - Jumlah daerah yang penerimaan daerahnya meningkat	4	32 daerah		
	06 - Meningkatnya daerah dengan realisasi belanjanya berkualitas	01 - Jumlah daerah yang realisasi belanjanya berkualitas	4	30 daerah		
	07 - Meningkatnya tata kelola keuangan daerah yang efektif dan efisien	01 - Jumlah daerah yang melaksanakan tata kelola keuangan daerah yang efektif dan efisien	4	30 daerah		
	08 - Peningkatan penataan hubungan pusat daerah	01 - Jumlah tugas dan wewenang yang dilaksanakan oleh Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat dengan kinerja baik	4	22 rekomendasi		
02.02.05.19 PRO-P: Pengelolaan dan Pelayanan Pertanahan di Provinsi Jawa Timur	01 - Terlaksananya percepatan sertifikasi tanah	01 - Jumlah Sertipikat Hak Atas Tanah	5	694.694 bidang	233.015,7	KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BPN, KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI, KEMENTERIAN KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH, KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
	02 - Terlaksananya percepatan peta bidang tanah dan ruang	01 - Jumlah bidang tanah	5	248.957 ha		
02.02.05.20 PRO-P: Penyelenggaraan Penataan Ruang di Provinsi Jawa Timur	01 - Tersedianya rencana tata ruang yang berkualitas	01 - Jumlah materi teknis dan rancangan peraturan daerah RDTR Kab/Kota	5	14 rekomendasi kebijakan	2.958,3	KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BPN
		02 - Jumlah persetujuan substansi RDTR Kab/Kota	5	13 rekomendasi kebijakan		



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

PN/PP/KP/ProP	Sasaran	Indikator	Dukungan Terhadap Arahan Presiden	Target	Rp. Juta	Instansi Pelaksana
		03 - Jumlah materi teknis dan rancangan peraturan daerah RTRW Prov/Kab/Kota	5	2 rekomendasi kebijakan		
		04 - Jumlah persetujuan substansi RTRW Prov/Kab/Kota	5	2 rekomendasi kebijakan		
02.02.05.21 PRO-P: Penyelenggaraan Informasi Geospasial di Provinsi Jawa Timur	01 - Tercapainya jumlah kesepakatan teknis batas wilayah administrasi desa/kelurahan yang dihasilkan	01 - Jumlah kesepakatan teknis batas wilayah administrasi desa/kelurahan yang dihasilkan	2	300 desa	0,0 ^(a)	BADAN INFORMASI GEOSPASIAL (BIG)
02.02.05.22 PRO-P: Peningkatan Kapasitas Pemerintahan Daerah dan Hubungan Pusat-Daerah di Provinsi Banten	01 - Mempercepat kemudahan berusaha di daerah termasuk reformasi pelayanan perizinan yang berbasis sistem informasi digital (<i>e-gov</i>)	01 - Jumlah perizinan yang kewenangannya sudah didelegasikan ke PTSP Prima berbasis elektronik	4	966 dokumen	0,0 ^(a)	KEMENTERIAN DALAM NEGERI
	02 - Meningkatnya kerja sama daerah	01 - Jumlah daerah yang mengimplementasikan Kesepakatan dan Perjanjian Kerja Sama	4	1 daerah		
	03 - Meningkatnya persentase capaian SPM di daerah	01 - Persentase capaian SPM di daerah	4	90,84 %		
	04 - Meningkatnya persentase daerah dengan nilai indeks inovasi tinggi	01 - Persentase daerah yang mempunyai nilai indeks inovasi tinggi	4	52 %		
	05 - Meningkatnya daerah dengan penerimaan daerah meningkat	01 - Jumlah daerah yang penerimaan daerahnya meningkat	4	8 daerah		



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

PN/PP/KP/ProP	Sasaran	Indikator	Dukungan Terhadap Arahan Presiden	Target	Rp. Juta	Instansi Pelaksana
	06 - Meningkatnya daerah dengan realisasi belanjanya berkualitas	01 - Jumlah daerah yang realisasi belanjanya berkualitas	4	8 daerah		
	07 - Meningkatnya tata kelola keuangan daerah yang efektif dan efisien	01 - Jumlah daerah yang melaksanakan tata kelola keuangan daerah yang efektif dan efisien	4	8 daerah		
	08 - Peningkatan penataan hubungan pusat daerah	01 - Jumlah tugas dan wewenang yang dilaksanakan oleh Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat dengan kinerja baik	4	22 rekomendasi		
02.02.05.23 PRO-P: Pengelolaan dan Pelayanan Pertanahan di Provinsi Banten	01 - Terlaksananya percepatan sertifikasi tanah	01 - Jumlah Sertipikat Hak Atas Tanah	5	125.134 bidang	8.599,7	KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BPN, KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI, KEMENTERIAN PERTANIAN
	02 - Terlaksananya percepatan peta bidang tanah dan ruang	01 - Jumlah bidang tanah	5	49.081 ha		
02.02.05.24 PRO-P: Penyelenggaraan Penataan Ruang di Provinsi Banten	01 - Tersedianya rencana tata ruang yang berkualitas	01 - Jumlah materi teknis dan rancangan peraturan daerah RDTR Kab/Kota	5	3 rekomendasi kebijakan	1.945,0	KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BPN
		02 - Jumlah persetujuan substansi RDTR Kab/Kota	5	2 rekomendasi kebijakan		
		03 - Jumlah materi teknis dan rancangan peraturan daerah RTRW Prov/Kab/Kota	5	1 rekomendasi kebijakan		
02.02.05.25 PRO-P: Penyelenggaraan Informasi Geospasial di Provinsi Banten	01 - Tercapainya jumlah kesepakatan teknis batas wilayah administrasi desa/kelurahan yang dihasilkan	01 - Jumlah kesepakatan teknis batas wilayah administrasi desa/kelurahan yang dihasilkan	2	200 desa	0,0 ^(a)	BADAN INFORMASI GEOSPASIAL (BIG)



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

PN/PP/KP/ProP	Sasaran	Indikator	Dukungan Terhadap Arahan Presiden	Target	Rp. Juta	Instansi Pelaksana
02.02.05.26 PRO-P: Peningkatan kapasitas pemerintahan Daerah dan Hubungan Pusat-Daerah di Provinsi Bali	01 - Mempercepat kemudahan berusaha di daerah termasuk reformasi pelayanan perizinan yang berbasis sistem informasi digital (<i>e-gov</i>)	01 - Jumlah perizinan yang kewenangannya sudah didelegasikan ke PTSP Prima berbasis elektronik	4	874 dokumen	0,0 ^(a)	KEMENTERIAN DALAM NEGERI
	02 - Meningkatnya kerja sama daerah	01 - Jumlah daerah yang mengimplementasikan Kesepakatan dan Perjanjian Kerja Sama	4	1 daerah		
	03 - Meningkatnya persentase capaian SPM di daerah	01 - Persentase capaian SPM di daerah	4	94,41 %		
	04 - Meningkatnya persentase daerah dengan nilai indeks inovasi tinggi	01 - Persentase daerah yang mempunyai nilai indeks inovasi tinggi	4	60 %		
	05 - Meningkatnya daerah dengan penerimaan daerah meningkat	01 - Jumlah daerah yang penerimaannya meningkat	4	8 daerah		
	06 - Meningkatnya daerah dengan realisasi belanjanya berkualitas	01 - Jumlah daerah yang realisasi belanjanya berkualitas	4	8 daerah		
	07 - Meningkatnya tata kelola keuangan daerah yang efektif dan efisien	01 - Jumlah daerah yang melaksanakan tata kelola keuangan daerah yang efektif dan efisien	4	8 daerah		
	08 - Peningkatan penataan hubungan pusat daerah	01 - Jumlah tugas dan wewenang yang dilaksanakan oleh Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat dengan kinerja baik	4	22 rekomendasi		



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

PN/PP/KP/ProP	Sasaran	Indikator	Dukungan Terhadap Arahan Presiden	Target	Rp. Juta	Instansi Pelaksana
02.02.05.27 PRO-P: Pengelolaan dan Pelayanan Pertanahan di Provinsi Bali	01 - Terlaksananya percepatan sertifikasi tanah	01 - Jumlah Sertipikat Hak Atas Tanah	5	11.489 bidang	4.454,1	KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BPN, KEMENTERIAN KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH
		02 - Terlaksananya percepatan peta bidang tanah dan ruang	01 - Jumlah bidang tanah	5		
02.02.05.28 PRO-P: Penyelenggaraan Penataan Ruang di Provinsi Bali	01 - Tersedianya rencana tata ruang yang berkualitas	01 - Jumlah materi teknis dan rancangan peraturan daerah RDTR Kab/Kota	5	9 rekomendasi kebijakan	1.376,7	KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BPN
		02 - Jumlah persetujuan substansi RDTR Kab/Kota	5	5 rekomendasi kebijakan		
		03 - Jumlah persetujuan substansi RTRW Prov/Kab/Kota	5	1 rekomendasi kebijakan		
02.02.05.31 PRO-P: Penyelenggaraan Penataan Ruang di Provinsi DKI Jakarta	01 - Tersedianya rencana tata ruang yang berkualitas	01 - Jumlah materi teknis dan rancangan peraturan daerah RDTR Kab/Kota	5	1 rekomendasi kebijakan	9.735,0	KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BPN
		02 - Jumlah persetujuan substansi RTRW Prov/Kab/Kota	5	1 rekomendasi kebijakan		
02.03 PP: Pembangunan Wilayah Nusa Tenggara	01 - Meningkatnya pertumbuhan ekonomi dan tingkat kesejahteraan masyarakat di Wilayah Nusa Tenggara	01 - Laju pertumbuhan PDRB Wilayah Nusa Tenggara	5	5,8—6,2 % per tahun	2.245.143,2	
		02 - IPM Provinsi di Wilayah Nusa Tenggara	1	66,63—69,59 nilai minimum—nilai maksimum		
		03 - Persentase penduduk miskin Wilayah Nusa Tenggara	1	13,8—14,8 %		



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

PN/PP/KP/ProP	Sasaran	Indikator	Dukungan Terhadap Arahan Presiden	Target	Rp. Juta	Instansi Pelaksana
02.03.01 KP: Pengembangan Kawasan Strategis	01 - Berkembangnya kawasan strategis	01 - Rasio pertumbuhan investasi kawasan (KEK/KI/DPP/KPBPB) terhadap wilayah	5	>1	195.904,0	
		02 - Jumlah kawasan pusat pertumbuhan yang difasilitasi dan dikembangkan	5	3 kawasan		
		03 - Destinasi Pariwisata Prioritas (DPP)	5	2 jumlah destinasi		
		04 - KEK berbasis pariwisata dan industri	5	1 kawasan		
02.03.01.01 PRO-P: Perbaikan Aksesibilitas, Atraksi dan Amenitas Destinasi Pariwisata Prioritas Lombok-Mandalika/KEK Mandalika	01 - Terlaksananya perbaikan aksesibilitas, atraksi dan amenitas Destinasi Pariwisata Prioritas Lombok-Mandalika/KEK Mandalika	01 - Rasio pertumbuhan investasi kawasan (KEK/KI/DPP/KPBPB) terhadap pertumbuhan investasi Provinsi Nusa Tenggara Barat	5	>1	195.904,0	KEMENTERIAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF/BADAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF, KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT, KEMENTERIAN DALAM NEGERI, KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI, KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA, KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA, KEMENTERIAN INVESTASI/BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL (Terintegrasi dengan PSN)
02.03.01.02 PRO-P: Perbaikan Aksesibilitas, Atraksi dan Amenitas Destinasi Pariwisata Prioritas Labuan Bajo	01 - Terlaksananya perbaikan aksesibilitas, atraksi dan amenitas Destinasi Pariwisata Prioritas Labuan Bajo	01 - Rasio pertumbuhan investasi kawasan (KEK/KI/DPP/KPBPB) terhadap pertumbuhan investasi Provinsi Nusa Tenggara Timur	5	>1	0,0 ^(a)	KEMENTERIAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF/BADAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF, KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT, KEMENTERIAN DALAM NEGERI, KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI, KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

PN/PP/KP/ProP	Sasaran	Indikator	Dukungan Terhadap Arahan Presiden	Target	Rp. Juta	Instansi Pelaksana
02.03.02 KP: Pengembangan Sektor Unggulan	01 - Berkembangnya sektor unggulan	01 - Persentase peningkatan produksi komoditas unggulan per tahun - kopi	5	1—2 %	34.409,8	
		02 - Persentase peningkatan produksi komoditas unggulan per tahun - kelapa	5	1—2 %		
		03 - Persentase peningkatan produksi komoditas unggulan per tahun - tebu	5	1—2 %		
		04 - Persentase peningkatan produksi komoditas unggulan per tahun - perikanan tangkap	5	1—2 %		
		05 - Persentase peningkatan produksi komoditas unggulan per tahun - perikanan budidaya	5	1—2 %		
		06 - Persentase peningkatan produksi komoditas unggulan per tahun - garam	5	10—12 %		
		07 - Persentase peningkatan produksi komoditas unggulan per tahun - kakao	5	7—9 %		
		08 - Persentase peningkatan produksi komoditas unggulan per tahun - cengkeh	5	4—6 %		
02.03.02.01 PRO-P: Pengembangan Komoditas Unggulan Kelapa di Provinsi Nusa Tenggara Barat	01 - Terlaksananya pengembangan komoditas unggulan kelapa	01 - Persentase peningkatan produksi komoditas unggulan per tahun Provinsi NTB - kelapa	5	1—2 %	876,0	KEMENTERIAN PERTANIAN



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

PN/PP/KP/ProP	Sasaran	Indikator	Dukungan Terhadap Arahan Presiden	Target	Rp. Juta	Instansi Pelaksana
02.03.02.02 PRO-P: Pengembangan Komoditas Unggulan Kopi di Provinsi Nusa Tenggara Barat	01 - Terlaksananya pengembangan komoditas unggulan kopi	01 - Persentase peningkatan produksi komoditas unggulan per tahun Provinsi NTB - kopi	5	2—3 %	2.980,0	KEMENTERIAN PERTANIAN
02.03.02.03 PRO-P: Pengembangan Komoditas Unggulan Tebu di Provinsi Nusa Tenggara Barat	01 - Terlaksananya pengembangan komoditas unggulan tebu	01 - Persentase peningkatan produksi komoditas unggulan per tahun Provinsi NTB - tebu	5	1—3 %	1.508,6	KEMENTERIAN PERTANIAN
02.03.02.08 PRO-P: Pengembangan Komoditas Unggulan Garam di Provinsi Nusa Tenggara Barat	01 - Terlaksananya pengembangan komoditas unggulan garam	01 - Persentase peningkatan produksi komoditas unggulan per tahun Provinsi NTB - garam	5	10—12 %	3.481,5	KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
02.03.02.09 PRO-P: Pengembangan Komoditas Unggulan Kopi di Provinsi Nusa Tenggara Timur	01 - Terlaksananya pengembangan komoditas unggulan kopi	01 - Persentase peningkatan produksi komoditas unggulan per tahun Provinsi NTT - kopi	5	1—2 %	1.169,0	KEMENTERIAN PERTANIAN
02.03.02.10 PRO-P: Pengembangan Komoditas Unggulan Kelapa di Provinsi Nusa Tenggara Timur	01 - Terlaksananya pengembangan komoditas unggulan kelapa	01 - Persentase peningkatan produksi komoditas unggulan per tahun Provinsi NTT - kelapa	5	1—3 %	3.037,0	KEMENTERIAN PERTANIAN (Terintegrasi dengan PSN)
02.03.02.14 PRO-P: Pengembangan Komoditas Unggulan Perikanan Budidaya di Provinsi Nusa Tenggara Timur	01 - Terlaksananya pengembangan komoditas unggulan perikanan budidaya	01 - Persentase peningkatan produksi komoditas unggulan per tahun Provinsi NTT - perikanan budidaya	5	1—2 %	1.822,5	KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

PN/PP/KP/ProP	Sasaran	Indikator	Dukungan Terhadap Arahan Presiden	Target	Rp. Juta	Instansi Pelaksana
02.03.02.16 PRO-P: Pengembangan Komoditas Unggulan Perikanan Budidaya di Provinsi Nusa Tenggara Barat	01 - Terlaksananya pengembangan komoditas unggulan perikanan budidaya	01 - Persentase peningkatan produksi komoditas unggulan per tahun Provinsi NTB - perikanan budidaya	5	1—3 %	19.535,1	KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
02.03.02.17 PRO-P: Pengembangan Komoditas Unggulan Kakao di Provinsi Nusa Tenggara Barat	01 - Terlaksananya pengembangan komoditas unggulan kakao	01 - Persentase peningkatan produksi komoditas unggulan per tahun Provinsi NTB - kakao	5	9—11 %	0,0 ^(a)	KEMENTERIAN PERTANIAN
02.03.02.19 PRO-P: Pengembangan Komoditas Unggulan Kakao di Provinsi Nusa Tenggara Timur	01 - Terlaksananya pengembangan komoditas unggulan kakao	01 - Persentase peningkatan produksi komoditas unggulan per tahun Provinsi NTT - kakao	5	7—9 %	0,0 ^(a)	KEMENTERIAN PERTANIAN
02.03.03 KP: Pengembangan Kawasan Perkotaan	01 - Berkembangnya kawasan perkotaan	01 - Skor Indeks Kota Berkelanjutan/IKB Kota Mataram (Angka perhitungan sementara)	5	46,66	53.763,4	
		02 - Skor Indeks Kota Berkelanjutan/IKB Kota Kupang (Angka perhitungan sementara)	5	46,23		
		02 - Berkembangnya kota besar, kota sedang, kota kecil sebagai PKN/PKW	5	2 kota		
02.03.03.02 PRO-P: Pengembangan Kota Besar, Kota Sedang, Kota Kecil di Provinsi Nusa Tenggara Timur	01 - Berkembangnya kota besar, kota sedang, kota kecil sebagai PKN/PKW	01 - Jumlah kota besar, sedang, kecil yang dikembangkan sebagai PKN/PKW	5	1 kota	53.763,4	KEMENTERIAN PERHUBUNGAN, KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
02.03.04 KP: Pengembangan Daerah Tertinggal, Kawasan Perbatasan, Perdesaan, dan Transmigrasi	01 - Terbangunnya desa terpadu, kawasan perdesaan, dan kawasan transmigrasi	01 - Rata-rata Indeks Desa Wilayah Nusa Tenggara	1, 5	58,58	1.943.218,4	
		02 - Rata-rata nilai Indeks Perkembangan Kawasan Perdesaan Prioritas Nasional	1, 5	58,67		



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

PN/PP/KP/ProP	Sasaran	Indikator	Dukungan Terhadap Arahan Presiden	Target	Rp. Juta	Instansi Pelaksana
		03 - Rata-rata nilai Indeks Perkembangan Kawasan Transmigrasi yang direvitalisasi di Pulau Nusa Tenggara	5	51,28		
		04 - Persentase penduduk miskin perdesaan Wilayah Nusa Tenggara	1	19,5—19,8 %		
	02 - Berkembangnya Pusat Kegiatan Strategis Nasional (PKSN), lokasi prioritas perbatasan, dan daerah tertinggal	01 - Jumlah daerah tertinggal	5	14 kabupaten		
		02 - Jumlah kecamatan lokasi prioritas perbatasan negara yang ditingkatkan kesejahteraan dan tata kelolanya	5	24 kecamatan		
		03 - Rata-rata nilai Indeks Pengelolaan Kawasan Perbatasan	5	0,50		
02.03.04.02 PRO-P: Peningkatan Kesejahteraan dan Tata Kelola di Kecamatan Lokasi Prioritas di Provinsi Nusa Tenggara Timur	01 - Meningkatkan kesejahteraan dan tata kelola di kecamatan lokasi prioritas di Provinsi Nusa Tenggara Timur	01 - Jumlah kecamatan lokasi prioritas perbatasan negara yang ditingkatkan kesejahteraan dan tata kelolanya di Provinsi Nusa Tenggara Timur	5	24 kecamatan	53.210,3	KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI, DAK
02.03.04.11 PRO-P: Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal di Provinsi Nusa Tenggara Barat	01 - Meningkatkan kesejahteraan masyarakat pada daerah tertinggal di Provinsi Nusa Tenggara Barat	01 - Persentase penduduk miskin di daerah tertinggal di Provinsi Nusa Tenggara Barat	1	24,5—25,0 %	3.735,1	KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI, KEMENTERIAN SOSIAL, KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN, KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN, KEMENTERIAN PERTANIAN
		02 - Rata-rata IPM di daerah tertinggal di Provinsi Nusa Tenggara Barat	1	68,7—69,2		



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

PN/PP/KP/ProP	Sasaran	Indikator	Dukungan Terhadap Arahan Presiden	Target	Rp. Juta	Instansi Pelaksana
02.03.04.12 PRO-P: Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal di Provinsi Nusa Tenggara Timur	01 - Meningkatkan kesejahteraan masyarakat pada daerah tertinggal di Provinsi Nusa Tenggara Timur	01 - Persentase penduduk miskin di daerah tertinggal di Provinsi Nusa Tenggara Timur	1	24,7—25,2 %	1.772.099,4	KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI, KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT, KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN, KEMENTERIAN SOSIAL, KEMENTERIAN DALAM NEGERI, KEMENTERIAN PERTANIAN, BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA (BNPB), BADAN NASIONAL PENGELOLA PERBATASAN (BNPP), BADAN PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA (BP2MI), KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN, BADAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI DAN GEOFISIKA, KEMENTERIAN AGAMA, KEMENTERIAN PERHUBUNGAN, DAK (Terintegrasi dengan PSN)
		02 - Rata-rata IPM di daerah tertinggal di Provinsi Nusa Tenggara Timur	1	64,4—64,9		
02.03.04.14 PRO-P: Pusat Kegiatan Strategis Nasional (PKSN) Atambua	01 - Berkembangnya Pusat Kegiatan Strategis Nasional (PKSN) Atambua	01 - Rata-rata nilai Indeks Pengelolaan Kawasan Perbatasan (IPKP) PKSN Atambua	5	0,46	0,0 ^(a)	KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI
02.03.04.15 PRO-P: Pusat Kegiatan Strategis Nasional (PKSN) Kefamenanu	01 - Berkembangnya Pusat Kegiatan Strategis Nasional (PKSN) Kefamenanu	01 - Rata-rata nilai Indeks Pengelolaan Kawasan Perbatasan (IPKP) PKSN Kefamenanu	5	0,54	267,4	KEMENTERIAN PERTANIAN
02.03.04.16 PRO-P: Pembangunan Desa Terpadu di Provinsi Nusa Tenggara Timur	01 - Terlaksananya pembangunan desa terpadu Provinsi Nusa Tenggara Timur	01 - Rata-rata Indeks Desa Provinsi Nusa Tenggara Timur	1, 5	55,70	4.102,2	KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI, KEMENTERIAN DALAM NEGERI, KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN, BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA (BNPB), BADAN INFORMASI GEOSPASIAL (BIG), KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK,



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

PN/PP/KP/ProP	Sasaran	Indikator	Dukungan Terhadap Arah Presiden	Target	Rp. Juta	Instansi Pelaksana
						KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI, BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL (BKKBN), KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA, BADAN NASIONAL PENGELOLA PERBATASAN (BNPP)
02.03.04.17 PRO-P: Pembangunan Desa Terpadu di Provinsi Nusa Tenggara Barat	01 - Terlaksananya pembangunan desa terpadu Provinsi Nusa Tenggara Barat	01 - Rata-rata Indeks Desa Provinsi Nusa Tenggara Barat	1, 5	72,25	5.350,7	KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI, KEMENTERIAN DALAM NEGERI, BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA (BNPB), KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN, BADAN INFORMASI GEOSPASIAL (BIG), KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI, BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL (BKKBN), KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
02.03.04.18 PRO-P: Pembangunan Kawasan Perdesaan Prioritas Nasional Sumbawa, Lombok Timur, Lombok Tengah, dan Dompu	01 - Terlaksananya pembangunan Kawasan Perdesaan Prioritas Nasional Sumbawa, Lombok Timur, Lombok Tengah, dan Dompu	01 - Indeks Perkembangan Kawasan Perdesaan Kab. Sumbawa, Lombok Timur, Lombok Tengah, dan Dompu	1, 5	64,85	62.556,0	KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI, KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BPN, DAK
02.03.04.19 PRO-P: Pembangunan Kawasan Perdesaan Prioritas Nasional Manggarai Barat, Ngada, dan Sumba Timur	01 - Terlaksananya pembangunan Kawasan Perdesaan Prioritas Nasional Manggarai Barat, Ngada, dan Sumba Timur	01 - Indeks Perkembangan Kawasan Perdesaan Kab. Manggarai Barat, Ngada, dan Sumba Timur	1, 5	52,45	40.223,5	KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI, KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BPN, DAK



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

PN/PP/KP/ProP	Sasaran	Indikator	Dukungan Terhadap Arahan Presiden	Target	Rp. Juta	Instansi Pelaksana
02.03.04.20 PRO-P: Pemulihan Pasca Bencana Daerah Terdampak di Pulau Lombok dan Sekitarnya	01 - Pelayanan publik yang berhasil dipulihkan	01 - Persentase pelayanan publik yang dipulihkan	2	75 %	606,2	BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA (BNPB), KEMENTERIAN KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH, KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI, KEMENTERIAN SOSIAL
02.03.04.21 PRO-P: Revitalisasi Kawasan Transmigrasi Tambora dan Labangka	01 - Terlaksananya revitalisasi Kawasan Transmigrasi Tambora dan Labangka	01 - Rata-rata nilai Indeks Perkembangan Kawasan Transmigrasi yang direvitalisasi di Provinsi Nusa Tenggara Barat	5	59,00	80,0	KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BPN, KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI
02.03.04.22 PRO-P: Revitalisasi Kawasan Transmigrasi Kobalima Timur, Ponu, dan Melolo	01 - Terlaksananya revitalisasi Kawasan Transmigrasi Kobalima Timur, Ponu, dan Melolo	01 - Rata-rata nilai Indeks Perkembangan Kawasan Transmigrasi yang direvitalisasi di Provinsi Nusa Tenggara Timur	5	46,14	987,3	KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BPN, KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI
02.03.05 KP: Kelembagaan dan Keuangan Daerah	01 - Meningkatnya nilai Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EPPD)	01 - Nilai Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EPPD)	4	3,21	17.847,7	
	02 - Meningkatnya persentase daerah dengan indeks inovasi tinggi	01 - Persentase daerah yang mempunyai nilai indeks inovasi tinggi	4	36,50 %		
	03 - Meningkatnya daerah dengan penerimaan daerah meningkat	01 - Jumlah daerah dengan penerimaan daerah meningkat	4	28 daerah		
	04 - Meningkatnya daerah dengan realisasi belanjanya berkualitas	01 - Jumlah daerah dengan realisasi belanjanya berkualitas	4	27 daerah		



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

PN/PP/KP/ProP	Sasaran	Indikator	Dukungan Terhadap Arahan Presiden	Target	Rp. Juta	Instansi Pelaksana
	05 - Meningkatnya reformasi pelayanan perizinan	01 - Jumlah perizinan yang kewenangannya sudah didelegasikan ke PTSP Prima berbasis elektronik	4	1.497 dokumen		
	06 - Meningkatnya daerah yang memiliki PTSP Prima berbasis elektronik	01 - Jumlah daerah yang memiliki PTSP Prima berbasis elektronik	4	11 daerah		
	07 - Meningkatnya tata kelola keuangan daerah yang efektif dan efisien	01 - Jumlah daerah yang melaksanakan tata kelola keuangan yang efektif dan efisien	4	27 daerah		
	08 - Meningkatnya Kesepakatan dan Perjanjian Kerja Sama Daerah	01 - Jumlah daerah yang mengimplementasikan Kesepakatan dan Perjanjian Kerja Sama Daerah	4	2 daerah		
	09 - Meningkatnya persentase capaian SPM di daerah	01 - Persentase capaian SPM di daerah	4	89,9 %		
	10 - Meningkatnya daerah dengan indeks kinerja GWPP kategori baik	01 - Jumlah daerah dengan indeks kinerja GWPP kategori baik	4	34 daerah		
	11 - Meningkatnya pengelolaan pertanahan dan terselenggarakannya penataan ruang	01 - Luas cakupan bidang tanah bersertipikat yang terdigitasi dan memiliki georeferensi yang baik	5	1.047.767 ha		
02 - Luas cakupan peta dasar pertanahan		5	79.327 ha			
03 - Jumlah materi teknis dan rancangan peraturan daerah RDTR Kab/Kota		5	8 materi teknis dan Ranperkada			



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

PN/PP/KP/ProP	Sasaran	Indikator	Dukungan Terhadap Arahan Presiden	Target	Rp. Juta	Instansi Pelaksana
		04 - Jumlah persetujuan substansi RDTR Kab/Kota	5	6 persetujuan substansi RDTR		
		05 - Jumlah materi teknis dan rancangan peraturan daerah RTRW Prov/Kab/Kota	5	4 materi teknis dan Ranperda		
		06 - Jumlah persetujuan substansi RTRW Prov/Kab/Kota	5	3 persetujuan substansi RTRW		
		07 - Nilai Kepastian dan Perlindungan Hak atas Tanah	5	5		
		08 - Jumlah Penanganan Perkara Hasil Penyidikan Pelanggaran Pemanfaatan Ruang	5	5 perkara		
	12 - Terlaksananya Peningkatan Penyelenggaraan Informasi Geospasial	01 - Jumlah kesepakatan teknis batas wilayah administrasi desa/kelurahan yang dihasilkan	2	600 desa		
02.03.05.11 PRO-P: Peningkatan Kapasitas Pemerintahan Daerah dan Hubungan Pusat-Daerah di Provinsi Nusa Tenggara Timur	01 - Mempercepat kemudahan berusaha di daerah termasuk reformasi pelayanan perizinan yang berbasis sistem informasi digital (<i>e-gov</i>)	01 - Jumlah perizinan yang kewenangannya sudah didelegasikan ke PTSP Prima berbasis elektronik	4	774 dokumen	0,0 ^(a)	KEMENTERIAN DALAM NEGERI
	02 - Meningkatnya kerja sama daerah	01 - Jumlah daerah yang mengimplementasikan Kesepakatan dan Perjanjian Kerja Sama	4	1 daerah		
	03 - Meningkatnya persentase capaian SPM di daerah	01 - Persentase capaian SPM di daerah	4	87,41 %		



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

PN/PP/KP/ProP	Sasaran	Indikator	Dukungan Terhadap Arahan Presiden	Target	Rp. Juta	Instansi Pelaksana
	04 - Meningkatnya persentase daerah dengan nilai indeks inovasi tinggi	01 - Persentase daerah yang mempunyai nilai indeks inovasi tinggi	4	34 %		
	05 - Meningkatnya daerah dengan penerimaan daerah meningkat	01 - Jumlah daerah yang penerimaan daerahnya meningkat	4	18 daerah		
	06 - Meningkatnya daerah dengan realisasi belanjanya berkualitas	01 - Jumlah daerah yang realisasi belanjanya berkualitas	4	18 daerah		
	07 - Meningkatnya tata kelola keuangan daerah yang efektif dan efisien	01 - Jumlah daerah yang melaksanakan tata kelola keuangan daerah yang efektif dan efisien	4	18 daerah		
	08 - Peningkatan penataan hubungan pusat daerah	01 - Jumlah tugas dan wewenang yang dilaksanakan oleh gubernur sebagai wakil pemerintah pusat dengan kinerja baik	4	22 rekomendasi		
02.03.05.12 PRO-P: Peningkatan Kapasitas Pemerintahan Daerah dan Hubungan Pusat-Daerah di Provinsi Nusa Tenggara Barat	01 - Mempercepat kemudahan berusaha di daerah termasuk reformasi pelayanan perizinan yang berbasis sistem informasi digital (<i>e-gov</i>)	01 - Jumlah perizinan yang kewenangannya sudah didelegasikan ke PTSP Prima berbasis elektronik	4	723 dokumen	0,0 ^(a)	KEMENTERIAN DALAM NEGERI
	02 - Meningkatnya kerja sama daerah	01 - Jumlah daerah yang mengimplementasikan Kesepakatan dan Perjanjian Kerja Sama	4	1 daerah		
	03 - Meningkatnya persentase capaian SPM di daerah	01 - Persentase capaian SPM di daerah	4	92,48 %		



**FRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

PN/PP/KP/ProP	Sasaran	Indikator	Dukungan Terhadap Arahan Presiden	Target	Rp. Juta	Instansi Pelaksana
	04 - Meningkatnya persentase daerah dengan nilai indeks inovasi tinggi	01 - Persentase daerah yang mempunyai nilai indeks inovasi tinggi	4	39 %		
	05 - Meningkatnya daerah dengan penerimaan daerah meningkat	01 - Jumlah daerah yang penerimaan daerahnya meningkat	4	10 daerah		
	06 - Meningkatnya daerah dengan realisasi belanjanya berkualitas	01 - Jumlah daerah yang realisasi belanjanya berkualitas	4	9 daerah		
	07 - Meningkatnya tata kelola keuangan daerah yang efektif dan efisien	01 - Jumlah daerah yang melaksanakan tata kelola keuangan daerah yang efektif dan efisien	4	9 daerah		
	08 - Peningkatan penataan hubungan pusat daerah	01 - Jumlah tugas dan wewenang yang dilaksanakan oleh gubernur sebagai wakil pemerintah pusat dengan kinerja baik	4	22 rekomendasi		
02.03.05.13 PRO-P: Pengelolaan dan Pelayanan Pertanahan di Provinsi Nusa Tenggara Timur	01 - Terlaksananya percepatan sertifikasi tanah	01 - Jumlah Sertipikat Hak Atas Tanah	5	40.099 bidang	7.679,2	KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BPN
	02 - Terlaksananya percepatan peta bidang tanah dan ruang	01 - Jumlah bidang tanah	5	92.247 ha		
02.03.05.14 PRO-P: Pengelolaan dan Pelayanan Pertanahan di Provinsi Nusa Tenggara Barat	01 - Terlaksananya percepatan sertifikasi tanah	01 - Jumlah Sertipikat Hak Atas Tanah	5	71.535 bidang	5.864,5	KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BPN
	02 - Terlaksananya percepatan peta bidang tanah dan ruang	01 - Jumlah bidang tanah	5	62.621 ha		



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

PN/PP/KP/ProP	Sasaran	Indikator	Dukungan Terhadap Arahan Presiden	Target	Rp. Juta	Instansi Pelaksana
02.03.05.15 PRO-P: Penyelenggaraan Penataan Ruang di Provinsi Nusa Tenggara Timur	01 - Tersusunnya rencana tata ruang yang berkualitas	01 - Jumlah materi teknis dan rancangan peraturan daerah RDTR Kab/Kota	5	4 materi teknis dan Ranperkada	1.590,0	KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BPN
		02 - Jumlah persetujuan substansi RDTR Kab/Kota	5	3 persetujuan substansi RDTR		
		03 - Jumlah persetujuan substansi RTRW Prov/Kab/Kota	5	1 persetujuan substansi RTRW		
02.03.05.16 PRO-P: Penyelenggaraan Penataan Ruang di Provinsi Nusa Tenggara Barat	01 - Tersusunnya rencana tata ruang yang berkualitas	01 - Jumlah materi teknis dan rancangan peraturan daerah RDTR Kab/Kota	5	8 materi teknis dan Ranperkada	2.714,0	KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BPN
		02 - Jumlah persetujuan substansi RDTR Kab/Kota	5	3 persetujuan substansi RDTR kab/kota		
		03 - Jumlah materi teknis dan rancangan peraturan daerah RTRW Prov/Kab/Kota	5	2 materi teknis dan Ranperda		
		04 - Jumlah persetujuan substansi RTRW Prov/Kab/Kota	5	1 persetujuan substansi RTRW prov/kab/kota		
02.03.05.18 PRO-P: Penyelenggaraan Informasi Geospasial di Provinsi Nusa Tenggara Barat	01 - Tercapainya jumlah kesepakatan teknis batas wilayah administrasi desa/kelurahan yang dihasilkan	01 - Jumlah kesepakatan teknis batas wilayah administrasi desa/kelurahan yang dihasilkan	2	250 desa	0,0 ^(a)	BADAN INFORMASI GEOSPASIAL (BIG)
02.03.05.19 PRO-P: Penyelenggaraan Informasi Geospasial di Provinsi Nusa Tenggara Timur	01 - Tercapainya jumlah kesepakatan teknis batas wilayah administrasi desa/kelurahan yang dihasilkan	01 - Jumlah kesepakatan teknis batas wilayah administrasi desa/kelurahan yang dihasilkan	2	350 desa	0,0 ^(a)	BADAN INFORMASI GEOSPASIAL (BIG)



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

PN/PP/KP/ProP	Sasaran	Indikator	Dukungan Terhadap Arahan Presiden	Target	Rp. Juta	Instansi Pelaksana
02.04 PP: Pembangunan Wilayah Kalimantan	01 - Meningkatnya pertumbuhan ekonomi dan tingkat kesejahteraan masyarakat di Wilayah Kalimantan	01 - Laju pertumbuhan PDRB Wilayah Kalimantan	5	5,2—5,5 % per tahun	22.322.133,3	
		02 - IPM Provinsi di Wilayah Kalimantan	1	68,91—78,18 nilai minimum—nilai maksimum		
		03 - Persentase penduduk miskin Wilayah Kalimantan	1	4,3—5,1 %		
02.04.01 KP: Pengembangan Kawasan Strategis	01 - Berkembangnya Kawasan Strategis	01 - Rasio pertumbuhan investasi kawasan (KEK/KI/DPP/KPBPB) terhadap wilayah	5	>1	6.409,0	
		02 - Jumlah kawasan pusat pertumbuhan yang difasilitasi dan dikembangkan	5	6 kawasan		
		03 - Destinasi Pariwisata Pengembangan dan revitalisasi	5	2 jumlah destinasi		
		04 - KEK berbasis pariwisata dan industri	5	1 kawasan		
		05 - KI Prioritas dan KI Pengembangan	5	3 jumlah KI		
02.04.01.01 PRO-P: Fasilitasi Realisasi Investasi dan Pembangunan KI Ketapang	01 - Terfasilitasinya realisasi investasi dan pembangunan KI Ketapang	01 - Rasio pertumbuhan investasi kawasan (KEK/KI/DPP/KPBPB) terhadap pertumbuhan investasi Provinsi Kalimantan Barat	5	>1	0,0 ^(a)	KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN, KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL, KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BPN (Terintegrasi dengan PSN)



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

PN/PP/KP/ProP	Sasaran	Indikator	Dukungan Terhadap Arahan Presiden	Target	Rp. Juta	Instansi Pelaksana
02.04.01.02 PRO-P: Pembangunan Destinasi Pariwisata Pengembangan Sambas-Singkawang	01 - Terlaksananya pembangunan Destinasi Pariwisata Pengembangan Sambas-Singkawang	01 - Rasio pertumbuhan investasi kawasan (KEK/KI/DPP/KPBPB) terhadap pertumbuhan investasi Provinsi Kalimantan Barat	5	>1	4.557,0	KEMENTERIAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF/BADAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF, KEMENTERIAN DALAM NEGERI, KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI
02.04.01.03 PRO-P: Fasilitasi Realisasi Investasi dan Pembangunan KI Surya Borneo	01 - Terfasilitasinya realisasi investasi dan pembangunan KI Surya Borneo	01 - Rasio pertumbuhan investasi kawasan (KEK/KI/DPP/KPBPB) terhadap pertumbuhan investasi Provinsi Kalimantan Tengah	5	>1	0,0 ^(a)	KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN, KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL, KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BPN
02.04.01.04 PRO-P: Pembangunan Destinasi Pariwisata Pengembangan Derawan-Berau	01 - Terlaksananya pembangunan Destinasi Pariwisata Pengembangan Derawan-Berau	01 - Rasio pertumbuhan investasi kawasan (KEK/KI/DPP/KPBPB) terhadap pertumbuhan investasi Provinsi	5	>1	1.852,0	KEMENTERIAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF/BADAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF, KEMENTERIAN DALAM NEGERI, KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA, KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI
02.04.01.05 PRO-P: Percepatan Peningkatan Investasi KEK Maloy Batuta Trans Kalimantan	01 - Terlaksananya percepatan peningkatan investasi KEK Maloy Batuta Trans Kalimantan	01 - Rasio pertumbuhan investasi kawasan (KEK/KI/DPP/KPBPB) terhadap pertumbuhan investasi Provinsi Aceh	5	>1	0,0 ^(a)	KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT, KEMENTERIAN INVESTASI/BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
02.04.01.06 PRO-P: Fasilitasi Realisasi Investasi dan Pembangunan KI Tanah Kuning	01 - Terlaksananya Fasilitasi Realisasi Investasi dan Pembangunan KI Tanah Kuning	01 - Rasio pertumbuhan investasi kawasan (KEK/KI/DPP/KPBPB) terhadap pertumbuhan investasi Provinsi Kalimantan Utara	5	>1	0,0 ^(a)	KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL, KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN, KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BPN (Terintegrasi dengan PSN)



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

PN/PP/KP/ProP	Sasaran	Indikator	Dukungan Terhadap Arahan Presiden	Target	Rp. Juta	Instansi Pelaksana
02.04.02 KP: Pengembangan Sektor Unggulan	01 - Berkembangnya sektor unggulan	01 - Persentase peningkatan produksi komoditas unggulan per tahun - kopi	5	1—2 %	27.118,6	
		02 - Persentase peningkatan produksi komoditas unggulan per tahun - karet	5	2—3 %		
		03 - Persentase peningkatan produksi komoditas unggulan per tahun - perikanan tangkap	5	1—2 %		
		04 - Persentase peningkatan produksi komoditas unggulan per tahun - perikanan budidaya	5	4—6 %		
		05 - Persentase peningkatan produksi komoditas unggulan per tahun - lada	5	1—2 %		
		06 - Persentase peningkatan produksi komoditas unggulan per tahun - kelapa sawit	5	4—6 %		
		07 - Persentase peningkatan produksi komoditas unggulan per tahun - kelapa	5	2—4 %		
		08 - Persentase peningkatan produksi komoditas unggulan per tahun - kakao	5	1—3 %		
02.04.02.01 PRO-P: Pengembangan Komoditas Unggulan Karet di Provinsi Kalimantan Barat	01 - Terlaksananya pengembangan komoditas unggulan karet	01 - Persentase peningkatan produksi komoditas unggulan per tahun Provinsi Kalimantan Barat - karet	5	2—3 %	3.000,0	KEMENTERIAN PERTANIAN



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

PN/PP/KP/ProP	Sasaran	Indikator	Dukungan Terhadap Arahan Presiden	Target	Rp. Juta	Instansi Pelaksana
02.04.02.02 PRO-P: Pengembangan Komoditas Unggulan Lada, Pala, dan Cengkeh di Provinsi Kalimantan Barat	01 - Terlaksananya pengembangan komoditas unggulan lada, pala, dan cengkeh	01 - Persentase peningkatan produksi komoditas unggulan per tahun Provinsi Kalimantan Barat - lada	5	2—3 %	1.016,5	KEMENTERIAN PERTANIAN
02.04.02.15 PRO-P: Pengembangan Komoditas Unggulan Karet di Provinsi Kalimantan Selatan	01 - Terlaksananya pengembangan komoditas unggulan karet	01 - Persentase peningkatan produksi komoditas unggulan per tahun Provinsi Kalimantan Selatan - karet	5	4—6 %	2.234,5	KEMENTERIAN PERTANIAN
02.04.02.25 PRO-P: Pengembangan Komoditas Unggulan Lada, Pala, dan Cengkeh di Provinsi Kalimantan Utara	01 - Terlaksananya pengembangan komoditas unggulan lada, pala, dan cengkeh	01 - Persentase peningkatan produksi komoditas unggulan per tahun Provinsi Kalimantan Utara - lada	5	2—5 %	1.980,8	KEMENTERIAN PERTANIAN
02.04.02.28 PRO-P: Pengembangan Komoditas Unggulan Perikanan Budidaya di Provinsi Kalimantan Tengah	01 - Terlaksananya pengembangan komoditas unggulan perikanan budidaya	01 - Persentase peningkatan produksi komoditas unggulan per tahun Provinsi Kalimantan Tengah - perikanan budidaya	5	5—7 %	2.022,5	KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
02.04.02.30 PRO-P: Pengembangan Komoditas Unggulan Perikanan Budidaya Provinsi Kalimantan Selatan	01 - Terlaksananya pengembangan komoditas unggulan perikanan budidaya	01 - Persentase peningkatan produksi komoditas unggulan per tahun Provinsi Kalimantan Selatan - perikanan budidaya	5	5—7 %	3.497,1	KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
02.04.02.32 PRO-P: Pengembangan Komoditas Unggulan Perikanan Budidaya Provinsi Kalimantan Timur	01 - Terlaksananya pengembangan komoditas unggulan perikanan budidaya	01 - Persentase peningkatan produksi komoditas unggulan per tahun Provinsi Kalimantan Timur - perikanan budidaya	5	5—7 %	2.022,5	KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

PN/PP/KP/ProP	Sasaran	Indikator	Dukungan Terhadap Arahan Presiden	Target	Rp. Juta	Instansi Pelaksana
02.04.02.34 PRO-P: Pengembangan Komoditas Unggulan Perikanan Budidaya Provinsi Kalimantan Utara	01 - Terlaksananya pengembangan komoditas unggulan perikanan budidaya	01 - Persentase peningkatan produksi komoditas unggulan per tahun Provinsi Kalimantan Utara - perikanan budidaya	5	5—7 %	1.822,5	KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
02.04.02.35 PRO-P: Pengembangan Komoditas Unggulan Kopi di Provinsi Kalimantan Barat	01 - Terlaksananya pengembangan komoditas unggulan kopi	01 - Persentase peningkatan produksi komoditas unggulan per tahun Provinsi Kalimantan Barat - kopi	5	1—2 %	1.575,0	KEMENTERIAN PERTANIAN
02.04.02.36 PRO-P: Pengembangan Komoditas Unggulan Kakao di Provinsi Kalimantan Barat	01 - Terlaksananya pengembangan komoditas unggulan kakao	01 - Persentase peningkatan produksi komoditas unggulan per tahun Provinsi Kalimantan Barat - kakao	5	1—2 %	0,0 ^(a)	KEMENTERIAN PERTANIAN
02.04.02.37 PRO-P: Pengembangan Komoditas Unggulan Kelapa di Provinsi Kalimantan Barat	01 - Terlaksananya pengembangan komoditas unggulan kelapa	01 - Persentase peningkatan produksi komoditas unggulan per tahun Provinsi Kalimantan Barat - kelapa	5	1—2 %	1.633,5	KEMENTERIAN PERTANIAN
02.04.02.38 PRO-P: Pengembangan Komoditas Unggulan Kelapa di Provinsi Kalimantan Tengah	01 - Terlaksananya pengembangan komoditas unggulan kelapa	01 - Persentase peningkatan produksi komoditas unggulan per tahun Provinsi Kalimantan Tengah - kelapa	5	1—2 %	1.333,2	KEMENTERIAN PERTANIAN
02.04.02.40 PRO-P: Pengembangan Komoditas Unggulan Karet di Provinsi Kalimantan Timur	01 - Terlaksananya pengembangan komoditas unggulan karet	01 - Persentase peningkatan produksi komoditas unggulan per tahun Provinsi Kalimantan Timur - karet	5	4—6 %	1.400,0	KEMENTERIAN PERTANIAN



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

PN/PP/KP/ProP	Sasaran	Indikator	Dukungan Terhadap Arahan Presiden	Target	Rp. Juta	Instansi Pelaksana
02.04.02.41 PRO-P: Pengembangan Komoditas Unggulan Kelapa di Provinsi Kalimantan Timur	01 - Terlaksananya pengembangan komoditas unggulan kelapa	01 - Persentase peningkatan produksi komoditas unggulan per tahun Provinsi Kalimantan Timur - kelapa	5	3—5 %	774,4	KEMENTERIAN PERTANIAN
02.04.02.42 PRO-P: Pengembangan Komoditas Unggulan Perikanan Budidaya di Provinsi Kalimantan Barat	01 - Terlaksananya pengembangan komoditas unggulan perikanan budidaya	01 - Persentase peningkatan produksi komoditas unggulan per tahun Provinsi Kalimantan Barat - perikanan budidaya	5	4—6 %	1.822,5	KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
02.04.02.43 PRO-P: Pengembangan Komoditas Unggulan Kelapa di Provinsi Kalimantan Utara	01 - Terlaksananya pengembangan komoditas unggulan kelapa	01 - Persentase peningkatan produksi komoditas unggulan per tahun Provinsi Kalimantan Utara - kelapa	5	5—7 %	983,6	KEMENTERIAN PERTANIAN
02.04.03 KP: Pengembangan Kawasan Perkotaan	01 - Berkembangnya kawasan perkotaan	01 - Skor Indeks Kota Berkelanjutan/IKB Kota Pontianak (angka perhitungan sementara)	5	47,44	21.644.323,4	
		02 - Skor Indeks Kota Berkelanjutan/IKB Kota Singkawang (angka perhitungan sementara)	5	41,86		
		03 - Skor Indeks Kota Berkelanjutan/IKB Kota Palangkaraya (angka perhitungan sementara)	5	48,97		
		04 - Skor Indeks Kota Berkelanjutan/IKB WM Banjarmasin (angka perhitungan sementara)	5	40,44		



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

PN/PP/KP/ProP	Sasaran	Indikator	Dukungan Terhadap Arah Presiden	Target	Rp. Juta	Instansi Pelaksana
		05 - Skor Indeks Kota Berkelanjutan/IKB Ibu Kota Nusantara (angka perhitungan sementara)	5	40,86		
		06 - Skor Indeks Kota Berkelanjutan/IKB Kota Balikpapan (angka perhitungan sementara)	5	53,20		
		07 - Skor Indeks Kota Berkelanjutan/IKB Kota Samarinda (angka perhitungan sementara)	5	49,68		
		08 - Skor Indeks Kota Berkelanjutan/IKB Kota Baru Tanjung Selor (angka perhitungan sementara)	5	39,34		
		09 - Skor Indeks Kota Berkelanjutan/IKB Kota Tarakan (angka perhitungan sementara)	5	49,92		
	02 - Berkembangnya kota besar, kota sedang, kota kecil sebagai PKN/PKW	01 - Jumlah kota besar, sedang, kecil yang dikembangkan sebagai PKN/PKW	5	6 kota		
	03 - Terlaksananya penyelesaian RTR untuk WM di luar Jawa	01 - Jumlah WM di luar Jawa yang direncanakan	5	1 WM		
	04 - Berkembangnya Wilayah Metropolitan di luar Jawa	01 - Jumlah WM di luar Jawa yang dikembangkan	5	1 WM		
	05 - Terbangunnya Ibu Kota Nusantara	01 - Luas area pembangunan Ibu Kota Nusantara	5	6.671 ha		



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

PN/PP/KP/ProP	Sasaran	Indikator	Dukungan Terhadap Arahan Presiden	Target	Rp. Juta	Instansi Pelaksana
	06 - Terbangunnya kota baru	01 - Jumlah kota baru yang dibangun	5	1 kota		
02.04.03.03 PRO-P: Pengembangan Wilayah Metropolitan di Provinsi Kalimantan Selatan	01 - Terlaksananya penyelesaian RTR untuk WM di luar Jawa	01 - Jumlah WM di luar Jawa yang direncanakan	5	1 WM	28.913,9	BADAN PUSAT STATISTIK, KEMENTERIAN PERHUBUNGAN, KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT, KEMENTERIAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF/BADAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF
	02 - Berkembangnya Wilayah Metropolitan di luar Jawa	01 - Jumlah WM di luar Jawa yang dikembangkan	5	1 WM		
02.04.03.04 PRO-P: Pembangunan Ibu Kota Nusantara	01 - Terbangunnya Ibu Kota Nusantara	01 - Luas area pembangunan Ibu Kota Nusantara	5	6.671 ha	20.989.454,7	KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN, KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA, KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BPN, KEMENTERIAN KEUANGAN, BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA, ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA, KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT, KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA, KEMENTERIAN KESEHATAN, KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN, KEMENTERIAN PERHUBUNGAN, KEMENTERIAN INVESTASI/BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL, KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG POLITIK, HUKUM DAN KEAMANAN (Terintegrasi dengan PSN)
02.04.03.05 PRO-P: Pengembangan Kota Besar, Kota Sedang, Kota Kecil di Provinsi Kalimantan Barat	01 - Berkembangnya kota besar, kota sedang, kota kecil sebagai PKN/PKW	01 - Jumlah kota besar, sedang, kecil yang dikembangkan sebagai PKN/PKW	5	2 kota	161.547,5	KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
02.04.03.06 PRO-P: Pengembangan Kota Besar, Kota Sedang, Kota Kecil di Provinsi Kalimantan Tengah	01 - Berkembangnya kota besar, kota sedang, kota kecil sebagai PKN/PKW	01 - Jumlah kota besar, sedang, kecil yang dikembangkan sebagai PKN/PKW	5	1 kota	96.928,6	KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

PN/PP/KP/ProP	Sasaran	Indikator	Dukungan Terhadap Arahan Presiden	Target	Rp. Juta	Instansi Pelaksana
02.04.03.07 PRO-P: Pengembangan Kota Besar, Kota Sedang, Kota Kecil di Provinsi Kalimantan Timur	01 - Berkembangnya kota besar, kota sedang, kota kecil sebagai PKN/PKW	01 - Jumlah kota besar, sedang, kecil yang dikembangkan sebagai PKN/PKW	5	2 kota	312.197,1	KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT, KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
02.04.03.08 PRO-P: Pengembangan Kota Besar, Kota Sedang, Kota Kecil di Provinsi Kalimantan Utara	01 - Berkembangnya kota besar, kota sedang, kota kecil sebagai PKN/PKW	01 - Jumlah kota besar, sedang, kecil yang dikembangkan sebagai PKN/PKW	5	1 kota	55.281,6	KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
02.04.04 KP: Pengembangan Daerah Tertinggal, Kawasan Perbatasan, Perdesaan, dan Transmigrasi	01 - Terbangunnya Desa Terpadu, Kawasan Perdesaan, dan Kawasan Transmigrasi	01 - Rata-rata Indeks Desa Wilayah Kalimantan	1, 5	57,92	590.259,5	
		02 - Rata-rata nilai Indeks Perkembangan Kawasan Perdesaan Prioritas Nasional	1, 5	54,91		
		03 - Rata-rata nilai Indeks Perkembangan Kawasan Transmigrasi yang Direvitalisasi di Pulau Kalimantan	5	56,70		
		04 - Persentase penduduk miskin Wilayah Kalimantan	1	6,6—6,9 %		
	02 - Berkembangnya Pusat Kegiatan Strategis Nasional (PKSN), Lokasi Prioritas Perbatasan, dan Daerah Tertinggal	01 - Rata-rata Nilai Indeks Pengelolaan Kawasan Perbatasan	5	0,47	35 kecamatan	
		02 - Jumlah kecamatan lokasi prioritas perbatasan negara yang ditingkatkan kesejahteraan dan tata kelolanya	5			
02.04.04.06 PRO-P: Pembangunan Desa Terpadu di Provinsi Kalimantan Barat	01 - Terlaksananya Pembangunan Desa Terpadu Provinsi Kalimantan Barat	01 - Rata-rata Indeks Desa Provinsi Kalimantan Barat	1, 5	56,45	15.933,1	KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI, KEMENTERIAN DALAM NEGERI, BADAN INFORMASI GEOSPASIAL (BIG),



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

PN/PP/KP/ProP	Sasaran	Indikator	Dukungan Terhadap Arahan Presiden	Target	Rp. Juta	Instansi Pelaksana
						BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA (BNPB), KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN, KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI, BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL (BKKBN), KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
02.04.04.07 PRO-P: Pembangunan Kawasan Perdesaan Prioritas Nasional Kubu Raya, Mempawah, Bengkayang, dan Sambas	01 - Terlaksananya pembangunan Kawasan Perdesaan Prioritas Nasional Kubu Raya, Mempawah, Bengkayang, dan Sambas	01 - Indeks Perkembangan Kawasan Perdesaan Kab. Kubu Raya, Mempawah, Bengkayang, dan Sambas	1, 5	60,02	60.688,5	KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI, KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BPN, DAK
02.04.04.08 PRO-P: Revitalisasi Kawasan Transmigrasi Rasau Jaya, Gerbang Mas Perkasa, dan Subah	01 - Terlaksananya revitalisasi Kawasan Transmigrasi Rasau Jaya, Gerbang Mas Perkasa, dan Subah	01 - Rata-rata nilai Indeks Perkembangan Kawasan Transmigrasi yang direvitalisasi di Provinsi Kalimantan Barat	5	62,82	1.153,5	KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BPN, KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI
02.04.04.09 PRO-P: Peningkatan Kesejahteraan dan Tata Kelola di Kecamatan Lokasi Prioritas di Provinsi Kalimantan Barat	01 - Meningkatnya kesejahteraan dan tata kelola di kecamatan lokasi prioritas di Provinsi Kalimantan Barat	01 - Jumlah kecamatan lokasi prioritas perbatasan negara yang ditingkatkan kesejahteraan dan tata kelolanya di Provinsi Kalimantan Barat	5	12 kecamatan	20.668,3	KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI, KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT, DAK
02.04.04.10 PRO-P: Pusat Kegiatan Strategis Nasional (PKSN) Paloh Aruk	01 - Berkembangnya Pusat Kegiatan Strategis Nasional (PKSN) Paloh Aruk	01 - Rata-rata nilai Indeks Pengelolaan Kawasan Perbatasan (IPKP) PKSN Paloh Aruk	5	0,50	31.193,5	BADAN NASIONAL PENGELOLA PERBATASAN (BNPP), KEMENTERIAN PERHUBUNGAN, KEMENTERIAN PERTANIAN, KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI
02.04.04.11 PRO-P: Pusat Kegiatan Strategis Nasional (PKSN) Jagoi Babang	01 - Berkembangnya Pusat Kegiatan Strategis Nasional (PKSN) Jagoi Babang	01 - Rata-rata nilai Indeks Pengelolaan Kawasan Perbatasan (IPKP) PKSN Jagoi Babang	5	0,37	8.378,9	KEMENTERIAN PERTANIAN, KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI,



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

PN/PP/KP/ProP	Sasaran	Indikator	Dukungan Terhadap Arahan Presiden	Target	Rp. Juta	Instansi Pelaksana
						KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT, DAK
02.04.04.12 PRO-P: Pembangunan Desa Terpadu di Provinsi Kalimantan Tengah	01 - Peningkatan rata-rata Indeks Desa Provinsi Kalimantan Tengah	01 - Peningkatan Rata-Rata Indeks Desa Provinsi Kalimantan Tengah	1, 5	59,85	2.509,5	KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI, KEMENTERIAN DALAM NEGERI, BADAN INFORMASI GEOSPASIAL (BIG), KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN, KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI, BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL (BKKBN), KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA, BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA (BNPB)
02.04.04.13 PRO-P: Pembangunan Kawasan Perdesaan Prioritas Nasional Kotawaringin Barat	01 - Terlaksananya pembangunan Kawasan Perdesaan Prioritas Nasional Kotawaringin Barat	01 - Indeks Perkembangan Kawasan Perdesaan Kab. Kotawaringin Barat	1, 5	60,82	58.342,0	KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI, KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BPN, DAK
02.04.04.14 PRO-P: Revitalisasi Kawasan Transmigrasi Belantikan Raya, serta Kawasan Transmigrasi Lamunti-Dadahup yang mendukung Pengembangan Food Estate sesuai Direktif Presiden dalam rangka Penguatan Ketahanan Pangan Nasional	01 - Terlaksananya Revitalisasi Kawasan Transmigrasi Belantikan Raya, serta Kawasan Transmigrasi Lamunti-Dadahup yang Mendukung Pengembangan Food Estate sesuai Direktif Presiden dalam Rangka Penguatan Ketahanan Pangan Nasional	01 - Rata-rata Nilai Indeks Perkembangan Kawasan Transmigrasi yang Direvitalisasi di Provinsi Kalimantan Tengah	5	28,40	11.291,8	KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BPN, KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI
		02 - Rata-rata Nilai Indeks Perkembangan Kawasan Transmigrasi yang Mendukung Food Estate Provinsi Kalimantan Tengah	5	54,39		
02.04.04.15 PRO-P: Pembangunan Desa Terpadu di Provinsi Kalimantan Selatan	01 - Terlaksananya Pembangunan Desa Terpadu Provinsi Kalimantan Selatan	01 - Rata-rata Indeks Desa Provinsi Kalimantan Selatan	1, 5	65,30	1.947,3	KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI, KEMENTERIAN DALAM NEGERI, BADAN INFORMASI GEOSPASIAL (BIG),



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

PN/PP/KP/ProP	Sasaran	Indikator	Dukungan Terhadap Arah Presiden	Target	Rp. Juta	Instansi Pelaksana
						BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA (BNPB), KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN, KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI, BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL (BKKBN), KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
02.04.04.16 PRO-P: Pembangunan Kawasan Perdesaan Prioritas Nasional Barito Kuala dan Banjar	01 - Terlaksananya pembangunan Kawasan Perdesaan Prioritas Nasional Barito Kuala dan Banjar	01 - Indeks Perkembangan Kawasan Perdesaan Kab. Barito Kuala dan Banjar	1, 5	73,60	58.947,5	KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI, KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BPN, DAK
02.04.04.17 PRO-P: Revitalisasi Kawasan Transmigrasi Cahaya Baru	01 - Terlaksananya Revitalisasi Kawasan Transmigrasi Cahaya Baru	01 - Rata-rata nilai Indeks Perkembangan Kawasan Transmigrasi yang Direvitalisasi di Kalimantan Selatan	5	71,54	5.269,6	KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BPN, KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI
02.04.04.18 PRO-P: Pembangunan Desa Terpadu di Provinsi Kalimantan Timur	01 - Terlaksananya Pembangunan Desa Terpadu Provinsi Kalimantan Timur	01 - Rata-rata Indeks Desa Provinsi Kalimantan Timur	1, 5	63,78	3.691,9	KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI, KEMENTERIAN DALAM NEGERI, BADAN INFORMASI GEOSPASIAL (BIG), BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA (BNPB), KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN, KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI, BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL (BKKBN), KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

PN/PP/KP/ProP	Sasaran	Indikator	Dukungan Terhadap Arah Presiden	Target	Rp. Juta	Instansi Pelaksana
02.04.04.19 PRO-P: Pembangunan Kawasan Perdesaan Prioritas Nasional Berau dan Kutai Timur	01 - Terlaksananya pembangunan Kawasan Perdesaan Prioritas Nasional Berau dan Kutai Timur	01 - Indeks Perkembangan Kawasan Perdesaan Kab. Berau dan Kutai Timur	1, 5	60,05	14.498,9	KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI, KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BPN, DAK
02.04.04.20 PRO-P: Revitalisasi Kawasan Transmigrasi Kerang dan Maloy Kaliorang	01 - Terlaksananya Revitalisasi Kawasan Transmigrasi Kerang dan Maloy Kaliorang	01 - Rata-rata nilai Indeks Perkembangan Kawasan Transmigrasi yang direvitalisasi di Provinsi Kalimantan Timur	5	57,25	3.179,6	KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BPN, KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI
02.04.04.21 PRO-P: Pembangunan Desa Terpadu di Provinsi Kalimantan Utara	01 - Terlaksananya Pembangunan Desa Terpadu Provinsi Kalimantan Utara	01 - Rata-rata Indeks Desa Provinsi Kalimantan Utara	1, 5	53,40	1.750,0	KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI, KEMENTERIAN DALAM NEGERI, BADAN INFORMASI GEOSPASIAL (BIG), BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA (BNPB), KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN, KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI, BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL (BKKBN), KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
02.04.04.22 PRO-P: Pembangunan Kawasan Perdesaan Prioritas Nasional Bulungan dan Nunukan	01 - Terlaksananya pembangunan Kawasan Perdesaan Prioritas Nasional Bulungan dan Nunukan	01 - Indeks Perkembangan Kawasan Perdesaan Kab. Bulungan dan Nunukan	1, 5	53,87	35.286,8	KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI, KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BPN, DAK
02.04.04.23 PRO-P: Revitalisasi Kawasan Transmigrasi Salim Batu dan Seimenggaris	01 - Terlaksananya Revitalisasi Kawasan Transmigrasi Salim Batu dan Seimenggaris	01 - Rata-rata nilai Indeks Perkembangan Kawasan Transmigrasi yang Direvitalisasi di Provinsi Kalimantan Utara	5	53,71	1.928,2	KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

PN/PP/KP/ProP	Sasaran	Indikator	Dukungan Terhadap Arahan Presiden	Target	Rp. Juta	Instansi Pelaksana
02.04.04.24 PRO-P: Peningkatan Kesejahteraan dan Tata Kelola di Kecamatan Lokasi Prioritas di Provinsi Kalimantan Utara	01 - Meningkatnya kesejahteraan dan tata kelola di kecamatan lokasi prioritas di Provinsi Kalimantan Utara	01 - Jumlah kecamatan lokasi prioritas perbatasan negara yang ditingkatkan kesejahteraan dan tata kelolanya di Provinsi Kalimantan Utara	5	20 kecamatan	750,0	KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI
02.04.04.25 PRO-P: Pusat Kegiatan Strategis Nasional (PKSN) Nunukan	01 - Berkembangnya Pusat Kegiatan Strategis Nasional (PKSN) Nunukan	01 - Rata-rata nilai Indeks Pengelolaan Kawasan Perbatasan (IPKP) PKSN Nunukan	5	0,42	75.035,8	KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN, KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI, KEMENTERIAN PERHUBUNGAN, DAK
02.04.04.26 PRO-P: Pusat Kegiatan Strategis Nasional (PKSN) Long Midang	01 - Berkembangnya Pusat Kegiatan Strategis Nasional (PKSN) Long Midang	01 - Rata-rata nilai Indeks Pengelolaan Kawasan Perbatasan (IPKP) PKSN Long Midang	5	0,42	0,0 ^(a)	KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT, DAK
02.04.04.27 PRO-P: Pusat Kegiatan Strategis Nasional (PKSN) Tou Lumbis	01 - Berkembangnya Pusat Kegiatan Strategis Nasional (PKSN) Tou Lumbis	01 - Rata-rata nilai Indeks Pengelolaan Kawasan Perbatasan (IPKP) PKSN Tou Lumbis	5	0,42	0,0 ^(a)	DAK
02.04.04.28 PRO-P: Pusat Kegiatan Strategis Nasional (PKSN) Long Nawang	01 - Berkembangnya Pusat Kegiatan Strategis Nasional (PKSN) Long Nawang	01 - Rata-rata nilai Indeks Pengelolaan Kawasan Perbatasan (IPKP) PKSN Long Nawang	5	0,66	170.370,5	KEMENTERIAN PERHUBUNGAN, KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT, DAK
02.04.04.29 PRO-P: Peningkatan Kesejahteraan dan Tata Kelola di Kecamatan Lokasi Prioritas di Provinsi Kalimantan Timur	01 - Meningkatnya kesejahteraan dan tata kelola di kecamatan lokasi prioritas di Provinsi Kalimantan Timur	01 - Jumlah kecamatan lokasi prioritas perbatasan negara yang ditingkatkan kesejahteraan dan tata kelolanya di Provinsi Kalimantan Timur	5	3 kecamatan	7.444,1	KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI, DAK
02.04.05 KP: Kelembagaan dan Keuangan Daerah	01 - Meningkatnya Nilai Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EPPD)	01 - Nilai Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EPPD)	4	3,28	54.022,8	



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

PN/PP/KP/ProP	Sasaran	Indikator	Dukungan Terhadap Arahan Presiden	Target	Rp. Juta	Instansi Pelaksana
	02 - Meningkatnya persentase daerah dengan indeks inovasi tinggi	01 - Persentase daerah yang mempunyai nilai indeks inovasi tinggi	4	36,80 %		
	03 - Meningkatnya daerah dengan penerimaan daerah meningkat	01 - Jumlah daerah dengan penerimaan daerah meningkat	4	54 daerah		
	04 - Meningkatnya daerah dengan realisasi belanjanya berkualitas	01 - Jumlah daerah dengan realisasi belanjanya berkualitas	4	49 daerah		
	05 - Meningkatnya reformasi pelayanan perizinan	01 - Jumlah perizinan yang kewenangannya sudah didelegasikan ke PTSP Prima berbasis elektronik	4	3.964 dokumen		
	06 - Meningkatnya daerah yang memiliki PTSP Prima berbasis elektronik	01 - Jumlah daerah yang memiliki PTSP Prima berbasis elektronik	4	6 daerah		
	07 - Meningkatnya tata kelola keuangan daerah yang efektif dan efisien	01 - Jumlah daerah yang melaksanakan tata kelola keuangan yang efektif dan efisien	4	49 daerah		
	08 - Meningkatnya kesepakatan dan perjanjian kerja sama daerah	01 - Jumlah daerah yang mengimplementasikan Kesepakatan dan Perjanjian Kerja Sama Daerah	4	5 daerah		
	09 - Meningkatnya persentase capaian SPM di daerah	01 - Persentase capaian SPM di daerah	4	90,9 %		
	10 - Meningkatnya daerah dengan indeks kinerja GWPP kategori baik	01 - Jumlah daerah dengan indeks kinerja GWPP kategori baik	4	34 daerah		



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

PN/PP/KP/ProP	Sasaran	Indikator	Dukungan Terhadap Arahan Presiden	Target	Rp. Juta	Instansi Pelaksana
	11 - Meningkatnya pengelolaan pertanahan dan terselenggarakannya penataan ruang	01 - Luas cakupan bidang tanah bersertipikat yang terdigitasi dan memiliki georeferensi yang baik	5	1.699.873 ha		
		02 - Luas cakupan peta dasar pertanahan	5	3.030.071 ha		
		03 - Jumlah materi teknis dan rancangan peraturan daerah RDTR Kab/Kota	5	7 materi teknis dan Ranperkada RDTR		
		04 - Jumlah persetujuan substansi RDTR Kab/Kota	5	12 persetujuan substansi RDTR		
		05 - Jumlah materi teknis dan rancangan peraturan daerah RTRW Prov/Kab/Kota	5	6 materi teknis dan Ranperda RTRW		
		06 - Jumlah persetujuan substansi RTRW Prov/Kab/Kota	5	8 persetujuan substansi RTRW		
		07 - Nilai Kepastian dan Perlindungan Hak atas Tanah	5	5		
		08 - Jumlah materi teknis RDTR Rencana IKN	5	5 materi teknis dan Raperpres		
		09 - Jumlah dokumen harmonisasi Rancangan Peraturan Perundangan RDTR Calon IKN	5	5 Raperpu RDTR IKN		
	12 - Terlaksananya peningkatan penyelenggaraan informasi geospasial	01 - Jumlah kesepakatan teknis batas wilayah administrasi desa/kelurahan yang dihasilkan	2	1.000 desa		



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

PN/PP/KP/ProP	Sasaran	Indikator	Dukungan Terhadap Arahan Presiden	Target	Rp. Juta	Instansi Pelaksana
02.04.05.04 PRO-P: Peningkatan Kapasitas Pemerintahan Daerah dan Hubungan Pusat-Daerah di Provinsi Kalimantan Barat	01 - Mempercepat kemudahan berusaha di daerah termasuk reformasi pelayanan perizinan yang berbasis sistem informasi digital (<i>e-gov</i>)	01 - Jumlah perizinan yang kewenangannya sudah didelegasikan ke PTSP Prima berbasis elektronik	4	1.304 dokumen	0,0 ^(a)	KEMENTERIAN DALAM NEGERI
	02 - Meningkatnya kerja sama daerah	01 - Jumlah daerah yang mengimplementasikan Kesepakatan dan Perjanjian Kerja Sama	4	1 daerah		
	03 - Meningkatnya persentase capaian SPM di daerah	01 - Persentase capaian SPM di daerah	4	89,04 %		
	04 - Meningkatnya persentase daerah dengan Nilai Indeks Inovasi Tinggi	01 - Persentase daerah yang mempunyai Nilai Indeks Inovasi Tinggi	4	30 %		
	05 - Meningkatnya daerah dengan penerimaan daerah meningkat	01 - Jumlah daerah yang penerimaan daerahnya meningkat	4	14 daerah		
	06 - Meningkatnya daerah dengan realisasi belanjanya berkualitas	01 - Jumlah daerah yang realisasi belanjanya berkualitas	4	12 daerah		
	07 - Meningkatnya tata kelola keuangan daerah yang efektif dan efisien	01 - Jumlah daerah yang melaksanakan tata kelola keuangan daerah yang efektif dan efisien	4	12 daerah		
	08 - Peningkatan penataan hubungan pusat daerah	01 - Jumlah tugas dan wewenang yang dilaksanakan oleh Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat dengan kinerja baik	4	22 rekomendasi		



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

PN/PP/KP/ProP	Sasaran	Indikator	Dukungan Terhadap Arahan Presiden	Target	Rp. Juta	Instansi Pelaksana
02.04.05.05 PRO-P: Pengelolaan dan Pelayanan Pertanahan di Provinsi Kalimantan Barat	01 - Terlaksananya percepatan sertifikasi tanah	01 - Jumlah Sertipikat Hak Atas Tanah	5	51.861,0 bidang	4.036,0	KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BPN
	02 - Terlaksananya percepatan peta bidang tanah dan ruang	01 - Jumlah Bidang Tanah	5	83.758 bidang		
02.04.05.06 PRO-P: Penyelenggaraan Penataan Ruang di Provinsi Kalimantan Barat	01 - Tersedianya rencana tata ruang yang berkualitas	01 - Jumlah materi teknis dan rancangan peraturan daerah RDTR Kab/Kota	5	12 rekomendasi kebijakan	3.243,1	KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BPN
		02 - Jumlah persetujuan substansi RDTR Kab/Kota	5	3 rekomendasi kebijakan		
		03 - Jumlah materi teknis dan rancangan peraturan daerah RTRW Prov/Kab/Kota	5	1 rekomendasi kebijakan		
		04 - Jumlah persetujuan substansi RTRW Prov/Kab/Kota	5	1 rekomendasi kebijakan		
02.04.05.07 PRO-P: Peningkatan Kapasitas Pemerintahan Daerah dan Hubungan Pusat-Daerah di Provinsi Kalimantan Tengah	01 - Mempercepat kemudahan berusaha di daerah termasuk reformasi pelayanan perizinan yang berbasis sistem informasi digital (<i>e-gov</i>)	01 - Jumlah perizinan yang kewenangannya sudah didelegasikan ke PTSP Prima berbasis elektronik	4	1.131 dokumen	2.554,2	KEMENTERIAN DALAM NEGERI
	02 - Meningkatnya kerja sama daerah	01 - Jumlah daerah yang mengimplementasikan Kesepakatan dan Perjanjian Kerja Sama	4	1 daerah		
	03 - Meningkatnya persentase capaian SPM di daerah	01 - Persentase capaian SPM di daerah	4	90,26 %		



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

PN/PP/KP/ProP	Sasaran	Indikator	Dukungan Terhadap Arahan Presiden	Target	Rp. Juta	Instansi Pelaksana
	04 - Meningkatnya persentase daerah dengan Nilai Indeks Inovasi Tinggi	01 - Persentase daerah yang mempunyai Nilai Indeks Inovasi Tinggi	4	37 %		
	05 - Meningkatnya daerah dengan penerimaan daerah meningkat	01 - Jumlah daerah yang penerimaan daerahnya meningkat	4	13 daerah		
	06 - Meningkatnya daerah dengan realisasi belanjanya berkualitas	01 - Jumlah daerah yang realisasi belanjanya berkualitas	4	12 daerah		
	07 - Meningkatnya tata kelola keuangan daerah yang efektif dan efisien	01 - Jumlah daerah yang melaksanakan tata kelola keuangan daerah yang efektif dan efisien	4	12 daerah		
	08 - Peningkatan penataan hubungan pusat daerah	01 - Jumlah tugas dan wewenang yang dilaksanakan oleh Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat dengan kinerja baik	4	22 rekomendasi		
02.04.05.08 PRO-P: Pengelolaan dan Pelayanan Pertanahan di Provinsi Kalimantan Tengah	01 - Terlaksananya percepatan sertifikasi tanah	01 - Jumlah sertipikat Hak Atas Tanah	5	13.292 bidang	4.544,5	KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BPN
	02 - Terlaksananya percepatan peta bidang tanah dan ruang	01 - Jumlah bidang tanah	5	56.225 ha		
02.04.05.09 PRO-P: Penyelenggaraan Penataan Ruang di Provinsi Kalimantan Tengah	01 - Tersedianya rencana tata ruang yang berkualitas	01 - Jumlah materi teknis dan rancangan peraturan daerah RDTR Kab/Kota	5	3 rekomendasi kebijakan	1.818,5	KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BPN
		02 - Jumlah persetujuan substansi RDTR Kab/Kota	5	3 rekomendasi kebijakan		
		03 - Jumlah materi teknis dan rancangan peraturan daerah RTRW Prov/Kab/Kota	5	1 rekomendasi kebijakan		



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

PN/PP/KP/ProP	Sasaran	Indikator	Dukungan Terhadap Arahan Presiden	Target	Rp. Juta	Instansi Pelaksana
02.04.05.10 PRO-P: Peningkatan Kapasitas Pemerintahan Daerah dan Hubungan Pusat-Daerah di Provinsi Kalimantan Selatan	01 - Mempercepat kemudahan berusaha di daerah termasuk reformasi pelayanan perizinan yang berbasis sistem informasi digital (<i>e-gov</i>)	01 - Jumlah perizinan yang kewenangannya sudah didelegasikan ke PTSP Prima berbasis elektronik	4	1.115 dokumen	0,0 ^(a)	KEMENTERIAN DALAM NEGERI
	02 - Meningkatnya kerja sama daerah	01 - Jumlah daerah yang mengimplementasikan Kesepakatan dan Perjanjian Kerja Sama	4	1 daerah		
	03 - Meningkatnya persentase capaian SPM di daerah	01 - Persentase capaian SPM di daerah	4	91,04 %		
	04 - Meningkatnya persentase daerah dengan Nilai Indeks Inovasi Tinggi	01 - Persentase daerah yang mempunyai nilai indeks inovasi tinggi	4	30 %		
	05 - Meningkatnya daerah dengan penerimaan daerah meningkat	01 - Jumlah daerah yang penerimaan daerahnya meningkat	4	12 daerah		
	06 - Meningkatnya daerah dengan realisasi belanjanya berkualitas	01 - Jumlah daerah yang realisasi belanjanya berkualitas	4	11 daerah		
	07 - Meningkatnya tata kelola keuangan daerah yang efektif dan efisien	01 - Jumlah daerah yang melaksanakan tata kelola keuangan daerah yang efektif dan efisien	4	11 daerah		
	08 - Peningkatan penataan hubungan pusat daerah	01 - Jumlah tugas dan wewenang yang dilaksanakan oleh Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat dengan kinerja baik	4	22 rekomendasi		



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

PN/PP/KP/ProP	Sasaran	Indikator	Dukungan Terhadap Arahan Presiden	Target	Rp. Juta	Instansi Pelaksana
02.04.05.11 PRO-P: Pengelolaan dan Pelayanan Pertanahan di Provinsi Kalimantan Selatan	01 - Terlaksananya percepatan sertifikasi tanah	01 - Jumlah Sertipikat Hak Atas Tanah	5	47.196 bidang	4.576,9	KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BPN
	02 - Terlaksananya percepatan peta bidang tanah dan ruang	01 - Jumlah bidang tanah	5	30.792 ha		
02.04.05.12 PRO-P: Penyelenggaraan Penataan Ruang di Provinsi Kalimantan Selatan	01 - Tersedianya rencana tata ruang yang berkualitas	01 - Jumlah materi teknis dan rancangan peraturan daerah RDTR Kab/Kota	5	4 rekomendasi kebijakan	1.214,8	KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BPN
		02 - Jumlah persetujuan substansi RDTR Kab/Kota	5	2 rekomendasi kebijakan		
		03 - Jumlah materi teknis dan rancangan peraturan daerah RTRW Prov/Kab/Kota	5	5 rekomendasi kebijakan		
		04 - Jumlah persetujuan substansi RTRW Prov/Kab/Kota	5	3 rekomendasi kebijakan		
02.04.05.13 PRO-P: Peningkatan Kapasitas Pemerintahan Daerah dan Hubungan Pusat-Daerah di Provinsi Kalimantan Timur	01 - Mempercepat kemudahan berusaha di daerah termasuk reformasi pelayanan perizinan yang berbasis sistem informasi digital (<i>e-gov</i>)	01 - Jumlah perizinan yang kewenangannya sudah didelegasikan ke PTSP Prima berbasis elektronik	4	89 dokumen	0,0 ^(a)	KEMENTERIAN DALAM NEGERI
		02 - Meningkatnya kerja sama daerah	4	1 daerah		
		03 - Meningkatnya persentase capaian SPM di daerah	4	93,45 %		



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

PN/PP/KP/ProP	Sasaran	Indikator	Dukungan Terhadap Arahan Presiden	Target	Rp. Juta	Instansi Pelaksana
	04 - Meningkatnya persentase daerah dengan Nilai Indeks Inovasi Tinggi	01 - Persentase daerah yang mempunyai Nilai Indeks Inovasi Tinggi	4	57 %		
	05 - Meningkatnya daerah dengan penerimaan daerah meningkat	01 - Jumlah daerah yang penerimaan daerahnya meningkat	4	9 daerah		
	06 - Meningkatnya daerah dengan realisasi belanjanya berkualitas	01 - Jumlah daerah yang realisasi belanjanya berkualitas	4	9 daerah		
	07 - Meningkatnya tata kelola keuangan daerah yang efektif dan efisien	01 - Jumlah daerah yang melaksanakan tata kelola keuangan daerah yang efektif dan efisien	4	9 daerah		
	08 - Peningkatan penataan hubungan pusat daerah	01 - Jumlah tugas dan wewenang yang dilaksanakan oleh Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat dengan kinerja baik	4	22 rekomendasi		
02.04.05.14 PRO-P: Pengelolaan dan Pelayanan Pertanahan di Provinsi Kalimantan Timur	01 - Terlaksananya percepatan sertifikasi tanah	01 - Jumlah Sertipikat Hak Atas Tanah	5	162.054 bidang	29.462,5	KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BPN
	02 - Terlaksananya percepatan peta bidang tanah dan ruang	01 - Jumlah bidang tanah	5	185.246 ha		
02.04.05.15 PRO-P: Penyelenggaraan Penataan Ruang di Provinsi Kalimantan Timur	01 - Tersedianya rencana tata ruang yang berkualitas	01 - Jumlah materi teknis dan rancangan peraturan daerah RDTR Kab/Kota	5	11 rekomendasi kebijakan	1.957,5	KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BPN
		02 - Jumlah persetujuan substansi RTRW Prov/Kab/Kota	5	2 rekomendasi kebijakan		
		03 - Jumlah materi teknis RDTR Rencana IKN	5	1 rekomendasi kebijakan		



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

PN/PP/KP/ProP	Sasaran	Indikator	Dukungan Terhadap Arahan Presiden	Target	Rp. Juta	Instansi Pelaksana
		04 - Jumlah dokumen harmonisasi Rancangan Peraturan Perundangan RDTR Calon IKN	5	4 rekomendasi kebijakan		
02.04.05.16 PRO-P: Peningkatan Kapasitas Pemerintahan Daerah dan Hubungan Pusat-Daerah di Provinsi Kalimantan Utara	01 - Mempercepat kemudahan berusaha di daerah termasuk reformasi pelayanan perizinan yang berbasis sistem informasi digital (<i>e-gov</i>)	01 - Jumlah perizinan yang kewenangannya sudah didelegasikan ke PTSP Prima berbasis elektronik	4	325 dokumen	0,0 ^(a)	KEMENTERIAN DALAM NEGERI
	02 - Meningkatnya kerja sama daerah	01 - Jumlah daerah yang mengimplementasikan kesepakatan dan perjanjian kerja sama	4	1 daerah		
	03 - Meningkatnya persentase capaian SPM di daerah	01 - Persentase capaian SPM di daerah	4	90,71 %		
	04 - Meningkatnya persentase daerah dengan Nilai Indeks Inovasi Tinggi	01 - Persentase daerah yang mempunyai Nilai Indeks Inovasi Tinggi	4	30 %		
	05 - Meningkatnya daerah dengan penerimaan daerah meningkat	01 - Jumlah daerah yang penerimaannya meningkat	4	6 daerah		
	06 - Meningkatnya daerah dengan realisasi belanjanya berkualitas	01 - Jumlah daerah yang realisasi belanjanya berkualitas	4	5 daerah		
	07 - Meningkatnya tata kelola keuangan daerah yang efektif dan efisien	01 - Jumlah daerah yang melaksanakan tata kelola keuangan daerah yang efektif dan efisien	4	5 daerah		



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

PN/PP/KP/ProP	Sasaran	Indikator	Dukungan Terhadap Arahan Presiden	Target	Rp. Juta	Instansi Pelaksana
	08 - Peningkatan penataan hubungan pusat daerah	01 - Jumlah tugas dan wewenang yang dilaksanakan oleh Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat dengan kinerja baik	4	22 rekomendasi		
02.04.05.18 PRO-P: Penyelenggaraan Penataan Ruang di Provinsi Kalimantan Utara	01 - Tersedianya rencana tata ruang yang berkualitas	01 - Jumlah materi teknis dan rancangan peraturan daerah RTRW Prov/Kab/Kota	5	1 rekomendasi kebijakan	614,8	KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BPN
		02 - Jumlah persetujuan substansi RTRW Prov/Kab/Kota	5	2 rekomendasi kebijakan		
02.04.05.19 PRO-P: Penyelenggaraan Informasi Geospasial di Provinsi Kalimantan Barat	01 - Tercapainya jumlah kesepakatan teknis batas wilayah administrasi desa/kelurahan yang dihasilkan	01 - Jumlah kesepakatan teknis batas wilayah administrasi desa/kelurahan yang dihasilkan	2	400 desa	0,0 ^(a)	BADAN INFORMASI GEOSPASIAL (BIG)
02.04.05.21 PRO-P: Penyelenggaraan Informasi Geospasial di Provinsi Kalimantan Selatan	01 - Tercapainya jumlah kesepakatan teknis batas wilayah administrasi desa/kelurahan yang dihasilkan	01 - Jumlah kesepakatan teknis batas wilayah administrasi desa/kelurahan yang dihasilkan	2	300 desa	0,0 ^(a)	BADAN INFORMASI GEOSPASIAL (BIG)
02.04.05.22 PRO-P: Penyelenggaraan Informasi Geospasial di Provinsi Kalimantan Timur	01 - Tercapainya jumlah kesepakatan teknis batas wilayah administrasi desa/kelurahan yang dihasilkan	01 - Jumlah kesepakatan teknis batas wilayah administrasi desa/kelurahan yang dihasilkan	2	300 desa	0,0 ^(a)	BADAN INFORMASI GEOSPASIAL (BIG)
02.05 PP: Pembangunan Wilayah Sulawesi	01 - Meningkatnya pertumbuhan ekonomi dan tingkat kesejahteraan masyarakat di Wilayah Sulawesi	01 - Laju pertumbuhan PDRB Wilayah Sulawesi	5	7,4—8,0 % per tahun	4.161.616,9	
		02 - IPM Provinsi di Wilayah Sulawesi	1	67,73—74,45 nilai minimum—nilai maksimum		



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

PN/PP/KP/ProP	Sasaran	Indikator	Dukungan Terhadap Arahan Presiden	Target	Rp. Juta	Instansi Pelaksana
		03 - Persentase penduduk miskin Wilayah Sulawesi	1	8,3—8,8 %		
02.05.01 KP: Pengembangan Kawasan Strategis	01 - Berkembangnya kawasan strategis	01 - Rasio pertumbuhan investasi kawasan (KEK/KI/DPP/KPBPB) terhadap wilayah	5	>1	601.606,2	
		02 - Jumlah kawasan pusat pertumbuhan yang difasilitasi dan dikembangkan	5	8 kawasan		
		03 - Destinasi Pariwisata Prioritas (DPP)	5	2 jumlah destinasi		
		04 - Destinasi Pariwisata Pengembangan dan Revitalisasi	5	1 jumlah destinasi		
		05 - KEK berbasis pariwisata dan industri	5	3 kawasan		
		06 - KI Prioritas dan KI Pengembangan	5	2 jumlah KI		
02.05.01.01 PRO-P: Percepatan Peningkatan Investasi KEK Bitung	01 - Terlaksananya percepatan peningkatan investasi KEK Bitung	01 - Rasio pertumbuhan investasi kawasan (KEK/KI/DPP/KPBPB) terhadap pertumbuhan investasi Provinsi Sulawesi Utara	5	>1	0,0 ^(a)	KEMENTERIAN INVESTASI/BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
02.05.01.02 PRO-P: Percepatan Operasionalisasi KEK Likupang/Destinasi Pariwisata Prioritas Manado-Likupang	01 - Terlaksananya percepatan operasionalisasi KEK Likupang/Destinasi Pariwisata Prioritas Manado-Likupang	01 - Rasio pertumbuhan investasi kawasan (KEK/KI/DPP/KPBPB) terhadap pertumbuhan investasi Provinsi Sulawesi Utara	5	>1	428.669,6	KEMENTERIAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF/BADAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF, KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT, KEMENTERIAN DALAM NEGERI,



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

PN/PP/KP/ProP	Sasaran	Indikator	Dukungan Terhadap Arah Presiden	Target	Rp. Juta	Instansi Pelaksana
						KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI, KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA, KEMENTERIAN INVESTASI/BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
02.05.01.03 PRO-P: Fasilitas Realisasi Investasi dan Pembangunan KI/KEK Palu	01 - Terlaksananya fasilitasi realisasi investasi dan pembangunan KI/KEK Palu	01 - Rasio pertumbuhan investasi kawasan (KEK/KI/DPP/KPBPB) terhadap pertumbuhan investasi Provinsi Sulawesi Tengah	5	>1	99.200,0	KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN, KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL, KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BPN, KEMENTERIAN INVESTASI/BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL, KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
02.05.01.04 PRO-P: Pembangunan Destinasi Pariwisata Pengembangan Toraja-Makassar-Selayar	01 - Terlaksananya pembangunan destinasi pariwisata pengembangan Toraja-Makassar-Selayar	01 - Rasio pertumbuhan investasi kawasan (KEK/KI/DPP/KPBPB) terhadap pertumbuhan investasi Provinsi Sulawesi Selatan	5	>1	0,0 ^(a)	KEMENTERIAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF/BADAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF, KEMENTERIAN DALAM NEGERI
02.05.01.05 PRO-P: Perbaikan Aksesibilitas, Atraksi, dan Amenitas Destinasi Pariwisata Prioritas Wakatobi	01 - Terlaksananya perbaikan aksesibilitas, atraksi, dan amenitas Destinasi Pariwisata Prioritas Wakatobi	01 - Rasio pertumbuhan investasi kawasan (KEK/KI/DPP/KPBPB) terhadap pertumbuhan investasi Provinsi Sulawesi Tenggara	5	>1	73.736,6	KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT, KEMENTERIAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF/BADAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF, KEMENTERIAN DALAM NEGERI, KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA, KEMENTERIAN PERHUBUNGAN, KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI
02.05.01.06 PRO-P: Fasilitas Realisasi Investasi dan Pembangunan KI Takalar	01 - Terlaksananya Fasilitas Realisasi Investasi dan Pembangunan KI Takalar	01 - Rasio pertumbuhan investasi kawasan (KEK/KI/DPP/KPBPB) terhadap pertumbuhan investasi Provinsi Sulawesi Selatan	5	>1	0,0 ^(a)	KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL, KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN, KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BPN (Terintegrasi dengan PSN)



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

PN/PP/KP/ProP	Sasaran	Indikator	Dukungan Terhadap Arahan Presiden	Target	Rp. Juta	Instansi Pelaksana
02.05.02 KP: Pengembangan Sektor Unggulan	01 - Berkembangnya sektor unggulan	01 - Persentase peningkatan produksi komoditas unggulan per tahun - kakao	5	1—3 %	117.608,1	
		02 - Persentase peningkatan produksi komoditas unggulan per tahun - kopi	5	2—4 %		
		03 - Persentase peningkatan produksi komoditas unggulan per tahun - kelapa	5	1—2 %		
		04 - Persentase peningkatan produksi komoditas unggulan per tahun - lada	5	1—2 %		
		05 - Persentase peningkatan produksi komoditas unggulan per tahun - pala	5	1—2 %		
		06 - Persentase peningkatan produksi komoditas unggulan per tahun - cengkeh	5	4—6 %		
		07 - Persentase peningkatan produksi komoditas unggulan per tahun - perikanan tangkap	5	2—4 %		
		08 - Persentase peningkatan produksi komoditas unggulan per tahun - perikanan budidaya	5	1—2 %		
		09 - Persentase peningkatan produksi komoditas unggulan per tahun - garam	5	10—12 %		
		10 - Persentase peningkatan produksi komoditas unggulan per tahun - kelapa sawit	5	4—6 %		
		11 - Persentase peningkatan produksi komoditas unggulan per tahun - tebu	5	4—6 %		



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

PN/PP/KP/ProP	Sasaran	Indikator	Dukungan Terhadap Arahan Presiden	Target	Rp. Juta	Instansi Pelaksana
02.05.02.01 PRO-P: Pengembangan Komoditas Unggulan Kelapa di Provinsi Sulawesi Utara	01 - Terlaksananya pengembangan komoditas unggulan kelapa	01 - Persentase peningkatan produksi komoditas unggulan per tahun Provinsi Sulawesi Utara - kelapa	5	4—4 %	3.526,0	KEMENTERIAN PERTANIAN
02.05.02.02 PRO-P: Pengembangan Komoditas Unggulan Lada, Pala, dan Cengkeh di Provinsi Sulawesi Utara	01 - Terlaksananya pengembangan komoditas unggulan lada, pala, dan cengkeh	01 - Persentase peningkatan produksi komoditas unggulan per tahun Provinsi Sulawesi Utara - pala	5	3—4 %	2.557,1	KEMENTERIAN PERTANIAN
		02 - Persentase peningkatan produksi komoditas unggulan per tahun Provinsi Sulawesi Utara - cengkeh	5	5—7 %		
02.05.02.04 PRO-P: Pengembangan Komoditas Unggulan Kakao di Provinsi Sulawesi Utara	01 - Terlaksananya pengembangan komoditas unggulan kakao	01 - Persentase peningkatan produksi komoditas unggulan per tahun Provinsi Sulawesi Utara - kakao	5	4—6 %	0,0 ^(a)	KEMENTERIAN PERTANIAN
02.05.02.05 PRO-P: Pengembangan Komoditas Unggulan Kakao di Provinsi Sulawesi Tengah	01 - Terlaksananya pengembangan komoditas unggulan kakao	01 - Persentase peningkatan produksi komoditas unggulan per tahun Provinsi Sulawesi Tengah - kakao	5	3—4 %	0,0 ^(a)	KEMENTERIAN PERTANIAN
02.05.02.06 PRO-P: Pengembangan Komoditas Unggulan Lada, Pala, dan Cengkeh di Provinsi Sulawesi Tengah	01 - Terlaksananya pengembangan komoditas unggulan lada, pala, dan cengkeh	01 - Persentase peningkatan produksi komoditas unggulan per tahun Provinsi Sulawesi Tengah - cengkeh	5	1—3 %	150,8	KEMENTERIAN PERTANIAN
02.05.02.08 PRO-P: Pengembangan Komoditas Unggulan Kelapa di Provinsi Sulawesi Tengah	01 - Terlaksananya pengembangan komoditas unggulan kelapa	01 - Persentase peningkatan produksi komoditas unggulan per tahun Provinsi Sulawesi Tengah - kelapa	5	2—3 %	1.542,0	KEMENTERIAN PERTANIAN



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

PN/PP/KP/ProP	Sasaran	Indikator	Dukungan Terhadap Arahan Presiden	Target	Rp. Juta	Instansi Pelaksana
02.05.02.09 PRO-P: Pengembangan Komoditas Unggulan Kakao di Provinsi Sulawesi Selatan	01 - Terlaksananya pengembangan komoditas unggulan kakao	01 - Persentase peningkatan produksi komoditas unggulan per tahun Provinsi Sulawesi Selatan - kakao	5	3—4 %	0,0 ^(a)	KEMENTERIAN PERTANIAN
02.05.02.10 PRO-P: Pengembangan Komoditas Unggulan Kopi di Provinsi Sulawesi Selatan	01 - Terlaksananya pengembangan komoditas unggulan kopi	01 - Persentase peningkatan produksi komoditas unggulan per tahun Provinsi Sulawesi Selatan - kopi	5	1—2 %	15.321,3	KEMENTERIAN PERTANIAN
02.05.02.11 PRO-P: Pengembangan Komoditas Unggulan Lada, Pala, dan Cengkeh di Provinsi Sulawesi Selatan	01 - Terlaksananya pengembangan komoditas unggulan lada, pala, dan cengkeh	01 - Persentase peningkatan produksi komoditas unggulan per tahun Provinsi Sulawesi Selatan - lada	5	2—3 %	5.691,3	KEMENTERIAN PERTANIAN
		02 - Persentase peningkatan produksi komoditas unggulan per tahun Provinsi Sulawesi Selatan - pala	5	1—2 %		
02.05.02.12 PRO-P: Pengembangan Komoditas Unggulan Kelapa di Provinsi Sulawesi Selatan	01 - Terlaksananya pengembangan komoditas unggulan kelapa	01 - Persentase peningkatan produksi komoditas unggulan per tahun Provinsi Sulawesi Selatan - kelapa	5	1—2 %	7.799,0	KEMENTERIAN PERTANIAN
02.05.02.14 PRO-P: Pengembangan Komoditas Unggulan Kakao di Provinsi Sulawesi Tenggara	01 - Terlaksananya pengembangan komoditas unggulan kakao	01 - Persentase peningkatan produksi komoditas unggulan per tahun Provinsi Sulawesi Tenggara - kakao	5	2—3 %	0,0 ^(a)	KEMENTERIAN PERTANIAN



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

PN/PP/KP/ProP	Sasaran	Indikator	Dukungan Terhadap Arah Presiden	Target	Rp. Juta	Instansi Pelaksana
02.05.02.15 PRO-P: Pengembangan Komoditas Unggulan Lada, Pala, dan Cengkeh di Provinsi Sulawesi Tenggara	01 - Terlaksananya pengembangan komoditas unggulan lada, pala, dan cengkeh	01 - Persentase peningkatan produksi komoditas unggulan per tahun Provinsi Sulawesi Tenggara - lada	5	2—3 %	1.204,1	KEMENTERIAN PERTANIAN
		02 - Persentase peningkatan produksi komoditas unggulan per tahun Provinsi Sulawesi Tenggara - pala	5	1—2 %		
		03 - Persentase peningkatan produksi komoditas unggulan per tahun Provinsi Sulawesi Tenggara - cengkeh	5	5—7 %		
02.05.02.17 PRO-P: Pengembangan Komoditas Unggulan Kelapa di Provinsi Sulawesi Tenggara	01 - Terlaksananya pengembangan komoditas unggulan kelapa	01 - Persentase peningkatan produksi komoditas unggulan per tahun Provinsi Sulawesi Tenggara - kelapa	5	1—2 %	2.760,8	KEMENTERIAN PERTANIAN
02.05.02.19 PRO-P: Pengembangan Komoditas Unggulan Kelapa di Provinsi Gorontalo	01 - Terlaksananya pengembangan komoditas unggulan kelapa	01 - Persentase peningkatan produksi komoditas unggulan per tahun Provinsi Gorontalo - kelapa	5	1—3 %	876,0	KEMENTERIAN PERTANIAN
02.05.02.21 PRO-P: Pengembangan Komoditas Unggulan Lada, Pala dan Cengkeh di Provinsi Gorontalo	01 - Terlaksananya pengembangan komoditas unggulan lada, pala, dan cengkeh	02 - Persentase peningkatan produksi komoditas unggulan per tahun Provinsi Gorontalo - cengkeh	5	4—6 %	204,6	KEMENTERIAN PERTANIAN
02.05.02.22 PRO-P: Pengembangan Komoditas Unggulan Kopi di Provinsi Sulawesi Barat	01 - Terlaksananya pengembangan komoditas unggulan kopi	01 - Persentase peningkatan produksi komoditas unggulan per tahun Provinsi Sulawesi Barat - kopi	5	9—10 %	3.075,0	KEMENTERIAN PERTANIAN



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

PN/PP/KP/ProP	Sasaran	Indikator	Dukungan Terhadap Arahan Presiden	Target	Rp. Juta	Instansi Pelaksana
02.05.02.23 PRO-P: Pengembangan Komoditas Unggulan Kakao di Provinsi Sulawesi Barat	01 - Terlaksananya pengembangan komoditas unggulan kakao	01 - Persentase peningkatan produksi komoditas unggulan per tahun Provinsi Sulawesi Barat - kakao	5	2—3 %	0,0 ^(a)	KEMENTERIAN PERTANIAN
02.05.02.27 PRO-P: Pengembangan Komoditas Unggulan Perikanan Budidaya di Provinsi Sulawesi Utara	01 - Terlaksananya pengembangan komoditas unggulan perikanan budidaya	01 - Persentase peningkatan produksi komoditas unggulan per tahun Provinsi Sulawesi Utara - perikanan budidaya	5	1—2 %	3.419,6	KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
02.05.02.29 PRO-P: Pengembangan Komoditas Unggulan Perikanan Budidaya di Provinsi Sulawesi Tengah	01 - Terlaksananya pengembangan komoditas unggulan perikanan budidaya	01 - Persentase peningkatan produksi komoditas unggulan per tahun Provinsi Sulawesi Tengah - perikanan budidaya	5	1—2 %	7.000,0	KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
02.05.02.31 PRO-P: Pengembangan Komoditas Unggulan Garam di Provinsi Sulawesi Selatan	01 - Terlaksananya pengembangan komoditas unggulan garam	01 - Persentase peningkatan produksi komoditas unggulan per tahun Provinsi Sulawesi Selatan - garam	5	10—12 %	14.587,4	KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
02.05.02.32 PRO-P: Pengembangan Komoditas Unggulan Perikanan Budidaya di Provinsi Sulawesi Selatan	01 - Terlaksananya pengembangan komoditas unggulan perikanan budidaya	01 - Persentase peningkatan produksi komoditas unggulan per tahun Provinsi Sulawesi Selatan - perikanan budidaya	5	4—6 %	14.758,3	KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
02.05.02.34 PRO-P: Pengembangan Komoditas Unggulan Perikanan Budidaya di Provinsi Sulawesi Tenggara	01 - Terlaksananya pengembangan komoditas unggulan perikanan budidaya	01 - Persentase peningkatan produksi komoditas unggulan per tahun Provinsi Sulawesi Tenggara - perikanan budidaya	5	1—2 %	15.822,5	KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

PN/PP/KP/ProP	Sasaran	Indikator	Dukungan Terhadap Arahan Presiden	Target	Rp. Juta	Instansi Pelaksana
02.05.02.36 PRO-P: Pengembangan Komoditas Unggulan Perikanan Budidaya di Provinsi Gorontalo	01 - Terlaksananya pengembangan komoditas unggulan perikanan budidaya	01 - Persentase peningkatan produksi komoditas unggulan per tahun Provinsi Gorontalo - perikanan budidaya	5	4—6 %	2.022,5	KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
02.05.02.38 PRO-P: Pengembangan Komoditas Unggulan Perikanan Budidaya di Provinsi Sulawesi Barat	01 - Terlaksananya pengembangan komoditas unggulan perikanan budidaya	01 - Persentase peningkatan produksi komoditas unggulan per tahun Provinsi Sulawesi Barat - perikanan budidaya	5	4—6 %	11.022,5	KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
02.05.02.39 PRO-P: Pengembangan Komoditas Unggulan Kelapa di Provinsi Sulawesi Barat	01 - Terlaksananya pengembangan komoditas unggulan kelapa	01 - Persentase peningkatan produksi komoditas unggulan per tahun Provinsi Sulawesi Barat - kelapa	5	1—2 %	1.622,0	KEMENTERIAN PERTANIAN
02.05.02.41 PRO-P: Pengembangan Komoditas Unggulan Tebu di Provinsi Sulawesi Selatan	01 - Terlaksananya pengembangan komoditas unggulan tebu	01 - Persentase peningkatan produksi komoditas unggulan per tahun Provinsi Sulawesi Selatan - tebu	5	5—6 %	2.645,3	KEMENTERIAN PERTANIAN
02.05.03 KP: Pengembangan Kawasan Perkotaan	01 - Berkembangnya kawasan perkotaan	01 - Skor Indeks Kota Berkelanjutan/IKB WM Manado (angka perhitungan sementara)	5	49,55	2.808.840,2	
		02 - Skor Indeks Kota Berkelanjutan/IKB Kota Palu (angka perhitungan sementara)	5	48,31		
		03 - Skor Indeks Kota Berkelanjutan/IKB WM Makassar (angka perhitungan sementara)	5	49,55		



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

PN/PP/KP/ProP	Sasaran	Indikator	Dukungan Terhadap Arahan Presiden	Target	Rp. Juta	Instansi Pelaksana
		04 - Skor Indeks Kota Berkelanjutan/IKB Kota Parepare (angka perhitungan sementara)	5	52,40		
		05 - Skor Indeks Kota Berkelanjutan/IKB Kota Palopo (angka perhitungan sementara)	5	45,88		
		06 - Skor Indeks Kota Berkelanjutan/IKB Kota Kendari (angka perhitungan sementara)	5	46,92		
		07 - Skor Indeks Kota Berkelanjutan/IKB Kota Gorontalo (angka perhitungan sementara)	5	43,99		
		08 - Skor Indeks Kota Berkelanjutan/IKB Mamuju (angka perhitungan sementara)	5	36,20		
	02 - Berkembangnya kota besar, kota sedang, kota kecil sebagai PKN/PKW	01 - Jumlah kota besar, sedang, kecil yang dikembangkan sebagai PKN/PKW	5	6 kota		
	03 - Terlaksananya penyelesaian RTR untuk WM di luar Jawa	01 - Jumlah WM di luar Jawa yang direncanakan	5	1 WM		
	04 - Berkembangnya Wilayah Metropolitan di luar Jawa	01 - Jumlah WM di luar Jawa yang dikembangkan	5	2 WM		



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

PN/PP/KP/ProP	Sasaran	Indikator	Dukungan Terhadap Arahan Presiden	Target	Rp. Juta	Instansi Pelaksana
02.05.03.03 PRO-P: Pengembangan Wilayah Metropolitan di Provinsi Sulawesi Utara	01 - Terlaksananya penyelesaian RTR untuk WM di luar Jawa	01 - Jumlah WM di luar Jawa yang direncanakan	5	1 WM	10.762,5	KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
	02 - Berkembangnya Wilayah Metropolitan di luar Jawa	01 - Jumlah WM di luar Jawa yang dikembangkan	5	1 WM		
02.05.03.04 PRO-P: Pengembangan Kota Besar, Kota Sedang, Kota Kecil di Provinsi Sulawesi Tengah	01 - Berkembangnya kota besar, kota sedang, kota kecil sebagai PKN/PKW	01 - Jumlah kota besar, sedang, kecil yang dikembangkan sebagai PKN/PKW	5	1 kota	100.294,7	KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT, KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
02.05.03.05 PRO-P: Pengembangan Wilayah Metropolitan di Provinsi Sulawesi Selatan	01 - Berkembangnya Wilayah Metropolitan di luar Jawa	01 - Jumlah WM di luar Jawa yang dikembangkan	5	1 WM	1.518.914,0	BADAN PUSAT STATISTIK, KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BPN, KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT, KEMENTERIAN PERHUBUNGAN (Terintegrasi dengan PSN)
02.05.03.06 PRO-P: Pengembangan Kota Besar, Kota Sedang, Kota Kecil di Provinsi Sulawesi Selatan	01 - Berkembangnya kota besar, kota sedang, kota kecil sebagai PKN/PKW	01 - Jumlah kota besar, sedang, kecil yang dikembangkan sebagai PKN/PKW	5	2 kota	9.081,8	KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
02.05.03.07 PRO-P: Pengembangan Kota Besar, Kota Sedang, Kota Kecil di Provinsi Sulawesi Tenggara	01 - Berkembangnya kota besar, kota sedang, kota kecil sebagai PKN/PKW	01 - Jumlah kota besar, sedang, kecil yang dikembangkan sebagai PKN/PKW	5	1 kota	639.047,4	KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT, KEMENTERIAN PERHUBUNGAN (Terintegrasi dengan PSN)
02.05.03.08 PRO-P: Pengembangan Kota Besar, Kota Sedang, Kota Kecil di Provinsi Gorontalo	01 - Berkembangnya kota besar, kota sedang, kota kecil sebagai PKN/PKW	01 - Jumlah kota besar, sedang, kecil yang dikembangkan sebagai PKN/PKW	5	1 kota	472.857,6	KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT, KEMENTERIAN PERHUBUNGAN (Terintegrasi dengan PSN)



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

PN/PP/KP/ProP	Sasaran	Indikator	Dukungan Terhadap Arah Presiden	Target	Rp. Juta	Instansi Pelaksana
02.05.03.09 PRO-P: Pengembangan Kota Besar, Kota Sedang, Kota Kecil di Provinsi Sulawesi Barat	01 - Berkembangnya kota besar, kota sedang, kota kecil sebagai PKN/PKW	01 - Jumlah kota besar, sedang, kecil yang dikembangkan sebagai PKN/PKW	5	1 kota	57.882,2	KEMENTERIAN PERHUBUNGAN, KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
02.05.04 KP: Pengembangan Daerah Tertinggal, Kawasan Perbatasan, Perdesaan, dan Transmigrasi	01 - Terbangunnya Desa Terpadu, Kawasan Perdesaan, dan Kawasan Transmigrasi	01 - Rata-rata Indeks Desa Wilayah Sulawesi	1, 5	62,75	486.703,9	
		02 - Rata-rata nilai Indeks Perkembangan Kawasan Perdesaan Prioritas Nasional	1, 5	55,89		
		03 - Rata-rata nilai Indeks Perkembangan Kawasan Transmigrasi yang Direvitalisasi di Pulau Sulawesi	5	59,60		
		04 - Persentase penduduk miskin perdesaan Wilayah Sulawesi	1	12,6—12,9 %		
	02 - Berkembangnya Pusat Kegiatan Strategis Nasional (PKSN), Lokasi Prioritas Perbatasan, dan Daerah Tertinggal	01 - Jumlah daerah tertinggal	5	3 kabupaten		
		02 - Rata-rata nilai Indeks Pengelolaan Kawasan Perbatasan	5	0,48		
		03 - Jumlah kecamatan lokasi prioritas perbatasan negara yang ditingkatkan kesejahteraan dan tata kelolanya	5	16 kecamatan		



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

PN/PP/KP/ProP	Sasaran	Indikator	Dukungan Terhadap Arahan Presiden	Target	Rp. Juta	Instansi Pelaksana
02.05.04.02 PRO-P: Peningkatan Kesejahteraan dan Tata Kelola di Kecamatan Lokasi Prioritas di Provinsi Sulawesi Utara	01 - Meningkatkan kesejahteraan dan tata kelola di kecamatan lokasi prioritas di Provinsi Sulawesi Utara	01 - Jumlah kecamatan lokasi prioritas perbatasan negara yang ditingkatkan kesejahteraan dan tata kelolanya di Provinsi Sulawesi Utara	5	12 kecamatan	1.125,0	KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI
02.05.04.08 PRO-P: Pembangunan Desa Terpadu di Provinsi Sulawesi Utara	01 - Terlaksananya pembangunan Desa Terpadu Provinsi Sulawesi Utara	01 - Rata-rata Indeks Desa Provinsi Sulawesi Utara	1, 5	64,55	15.768,4	KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI, KEMENTERIAN DALAM NEGERI, BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA (BNPB), KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN, BADAN INFORMASI GEOSPASIAL (BIG), BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL (BKKBN), KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
02.05.04.09 PRO-P: Pembangunan Kawasan Perdesaan Prioritas Nasional Minahasa Utara	01 - Terlaksananya pembangunan Kawasan Perdesaan Prioritas Nasional Minahasa Utara	01 - Indeks Perkembangan Kawasan Perdesaan Kab. Minahasa Utara	1, 5	64,21	19.593,5	KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI, KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BPN
02.05.04.10 PRO-P: Pusat Kegiatan Strategis Nasional (PKSN) Tahuna	01 - Berkembangnya Pusat Kegiatan Strategis Nasional (PKSN) Tahuna	01 - Rata-rata nilai Indeks Pengelolaan Kawasan Perbatasan (IPKP) PKSN Tahuna	5	0,50	722,2	KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI, DAK
02.05.04.11 PRO-P: Pusat Kegiatan Strategis Nasional (PKSN) Melonguane	01 - Berkembangnya Pusat Kegiatan Strategis Nasional (PKSN) Melonguane	01 - Rata-rata nilai Indeks Pengelolaan Kawasan Perbatasan (IPKP) PKSN Melonguane	5	0,46	8.409,1	KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN, KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI, DAK



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

PN/PP/KP/ProP	Sasaran	Indikator	Dukungan Terhadap Arahan Presiden	Target	Rp. Juta	Instansi Pelaksana
02.05.04.12 PRO-P: Pembangunan Desa Terpadu di Provinsi Sulawesi Tengah	01 - Terlaksananya pembangunan Desa Terpadu Provinsi Sulawesi Tengah	01 - Rata-rata Indeks Desa Provinsi Sulawesi Tengah	1, 5	63,45	3.867,3	KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI, KEMENTERIAN DALAM NEGERI, BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA (BNPB), KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN, BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL (BKKBN)
02.05.04.13 PRO-P: Pembangunan Kawasan Perdesaan Prioritas Nasional Morowali, Buol, dan Poso	01 - Terlaksananya pembangunan Kawasan Perdesaan Prioritas Nasional Morowali, Buol, dan Poso	01 - Indeks Perkembangan Kawasan Perdesaan Kab. Morowali, Buol, dan Poso	1, 5	53,85	16.661,6	KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BPN, KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI
02.05.04.14 PRO-P: Revitalisasi Kawasan Transmigrasi Palolo, Bungku, Air Terang, Tampolore, Padauloyo, dan Bahari Tomini Raya	01 - Terlaksananya revitalisasi Kawasan Transmigrasi Palolo, Bungku, Air Terang, Tampolore, Padauloyo, dan Bahari Tomini Raya	01 - Rata-rata nilai Indeks Perkembangan Kawasan Transmigrasi yang Direvitalisasi di Provinsi Sulawesi Tengah	5	57,00	6.746,4	KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BPN, KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI
02.05.04.15 PRO-P: Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal di Provinsi Sulawesi Tengah	01 - Meningkatkan kesejahteraan masyarakat pada daerah tertinggal di Provinsi Sulawesi Tengah	01 - Persentase penduduk miskin di Daerah Tertinggal di Provinsi Sulawesi Tengah	1	14,9—15,4 %	90.099,5	KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI, KEMENTERIAN SOSIAL, KEMENTERIAN DALAM NEGERI, KEMENTERIAN PERTANIAN, KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT, KEMENTERIAN AGAMA, KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN, DAK
		02 - Rata-rata IPM di Daerah Tertinggal di Provinsi Sulawesi Tengah	1	69,0—69,5		
02.05.04.16 PRO-P: Pemulihan Pasca Bencana Daerah Terdampak di Kota Palu dan Sekitarnya	01 - Pelayanan publik yang berhasil dipulihkan	01 - Persentase pelayanan publik yang dipulihkan	2	75 %	164.145,9	BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA (BNPB), KEMENTERIAN KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH, KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI, KEMENTERIAN SOSIAL,



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

PN/PP/KP/ProP	Sasaran	Indikator	Dukungan Terhadap Arahan Presiden	Target	Rp. Juta	Instansi Pelaksana
						KEMENTERIAN PERHUBUNGAN, KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT (Terintegrasi dengan PSN)
02.05.04.17 PRO-P: Pembangunan Desa Terpadu di Provinsi Sulawesi Selatan	01 - Terlaksananya pembangunan Desa Terpadu Provinsi Sulawesi Selatan	01 - Rata-rata Indeks Desa Provinsi Sulawesi Selatan	1	65,60	11.713,1	KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI, KEMENTERIAN DALAM NEGERI, BADAN INFORMASI GEOSPASIAL (BIG), BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA (BNPB), KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN, KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL (BKKBN)
02.05.04.18 PRO-P: Pembangunan Kawasan Perdesaan Prioritas Nasional Barru, Pinrang, Luwu Timur, dan Bone	01 - Terlaksananya pembangunan Kawasan Perdesaan Prioritas Nasional Barru, Pinrang, Luwu Timur, dan Bone	01 - Indeks Perkembangan Kawasan Perdesaan Kab. Barru, Pinrang, Luwu Timur, dan Bone	1, 5	60,33	40.014,8	KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI, KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BPN
02.05.04.19 PRO-P: Revitalisasi Kawasan Transmigrasi Gilireng, Masamba, dan Mahalona	01 - Terlaksananya revitalisasi Kawasan Transmigrasi Gilireng, Masamba, dan Mahalona	01 - Rata-rata nilai Indeks Perkembangan Kawasan Transmigrasi yang Direvitalisasi di Provinsi Sulawesi Selatan	5	55,93	12.072,8	KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BPN, KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI
02.05.04.20 PRO-P: Pembangunan Desa Terpadu di Provinsi Sulawesi Tenggara	01 - Terlaksananya pembangunan Desa Terpadu Provinsi Sulawesi Tenggara	01 - Rata-rata Indeks Desa Provinsi Sulawesi Tenggara	1, 5	60,25	6.335,7	KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI, KEMENTERIAN DALAM NEGERI, BADAN INFORMASI GEOSPASIAL (BIG), BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA (BNPB), KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN, KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK,



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

PN/PP/KP/ProP	Sasaran	Indikator	Dukungan Terhadap Arah Presiden	Target	Rp. Juta	Instansi Pelaksana
						BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL (BKKBN)
02.05.04.21 PRO-P: Pembangunan Kawasan Perdesaan Prioritas Nasional Konawe Selatan, Wakatobi, dan Muna	01 - Terlaksananya pembangunan Kawasan Perdesaan Prioritas Nasional Konawe Selatan, Wakatobi, dan Muna	01 - Indeks Perkembangan Kawasan Perdesaan Kab. Konawe Selatan, Wakatobi, dan Muna	1, 5	52,13	20.684,8	KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI, KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BPN
02.05.04.22 PRO-P: Revitalisasi Kawasan Transmigrasi Tinanggea, Mutiara, dan Asinua/Routa	01 - Terlaksananya Revitalisasi Kawasan Transmigrasi Tinanggea, Mutiara, dan Asinua/Routa	01 - Rata-rata nilai Indeks Perkembangan Kawasan Transmigrasi yang Direvitalisasi di Provinsi Sulawesi Tenggara	5	56,46	20.781,8	KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BPN, KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI
02.05.04.23 PRO-P: Pembangunan Desa Terpadu di Provinsi Gorontalo	01 - Terlaksananya pembangunan Desa Terpadu Provinsi Gorontalo	01 - Rata-rata Indeks Desa Provinsi Gorontalo	1, 5	67,85	1.604,8	KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI, KEMENTERIAN DALAM NEGERI, BADAN INFORMASI GEOSPASIAL (BIG), BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA (BNPB), KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN, KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL (BKKBN)
02.05.04.24 PRO-P: Pembangunan Kawasan Perdesaan Prioritas Nasional Gorontalo, Boalemo, dan Gorontalo Utara	01 - Terlaksananya pembangunan Kawasan Perdesaan Prioritas Nasional Gorontalo, Boalemo, dan Gorontalo Utara	01 - Indeks Perkembangan Kawasan Perdesaan Kab. Gorontalo, Boalemo, dan Gorontalo Utara	1, 5	65,82	15.000,7	KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI, KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BPN, DAK



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

PN/PP/KP/ProP	Sasaran	Indikator	Dukungan Terhadap Arahan Presiden	Target	Rp. Juta	Instansi Pelaksana
02.05.04.25 PRO-P: Revitalisasi Kawasan Transmigrasi Sumalata, Paguyaman Pantai, Pawonsari, dan Pulubala	01 - Terlaksananya revitalisasi Kawasan Transmigrasi Sumalata, Paguyaman Pantai, Pawonsari, dan Pulubala	01 - Rata-rata nilai Indeks Perkembangan Kawasan Transmigrasi yang Direvitalisasi di Provinsi Gorontalo	5	63,54	4.441,5	KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BPN, KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI
02.05.04.26 PRO-P: Pembangunan Desa Terpadu di Provinsi Sulawesi Barat	01 - Terlaksananya pembangunan Desa Terpadu Provinsi Sulawesi Barat	01 - Rata-rata Indeks Desa Provinsi Sulawesi Barat	1, 5	60,50	900,0	KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI, KEMENTERIAN DALAM NEGERI, BADAN INFORMASI GEOSPASIAL (BIG), KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
02.05.04.27 PRO-P: Pembangunan Kawasan Perdesaan Prioritas Nasional Mamuju dan Mamuju Tengah	01 - Terlaksananya pembangunan Kawasan Perdesaan Prioritas Nasional Mamuju dan Mamuju Tengah	01 - Indeks Perkembangan Kawasan Perdesaan Kab. Mamuju dan Mamuju Tengah	1, 5	48,63	4.233,3	KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI, KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BPN
02.05.04.28 PRO-P: Revitalisasi Kawasan Transmigrasi Tobadak dan Sarudu Baras	01 - Terlaksananya revitalisasi Kawasan Transmigrasi Tobadak dan Sarudu Baras	01 - Rata-rata nilai Indeks Perkembangan Kawasan Transmigrasi yang Direvitalisasi di Provinsi Sulawesi Barat	5	69,78	7.720,8	KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BPN, KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI
02.05.04.29 PRO-P: Peningkatan Kesejahteraan dan Tata Kelola di Kecamatan Lokasi Prioritas di Provinsi Sulawesi Tengah	01 - Meningkatkan kesejahteraan dan tata kelola di kecamatan lokasi prioritas di Provinsi Sulawesi Tengah	01 - Jumlah kecamatan lokasi prioritas perbatasan negara yang ditingkatkan kesejahteraan dan tata kelolanya di Provinsi Sulawesi Tengah	5	3 kecamatan	8.750,0	KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI, DAK
02.05.04.30 PRO-P: Peningkatan Kesejahteraan dan Tata Kelola di Kecamatan Lokasi Prioritas di Provinsi Gorontalo	01 - Meningkatkan kesejahteraan dan tata kelola di kecamatan lokasi prioritas di Provinsi Gorontalo	01 - Jumlah kecamatan lokasi prioritas perbatasan negara yang ditingkatkan kesejahteraan dan tata kelolanya di Provinsi Gorontalo	5	1 kecamatan	5.311,0	KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI, DAK



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

PN/PP/KP/ProP	Sasaran	Indikator	Dukungan Terhadap Arah Presiden	Target	Rp. Juta	Instansi Pelaksana
02.05.05 KP: Kelembagaan dan Keuangan Daerah	01 - Meningkatnya Nilai Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EPPD)	01 - Nilai Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EPPD)	4	3,24	146.858,5	
	02 - Meningkatnya persentase daerah dengan indeks inovasi tinggi	01 - Persentase daerah yang mempunyai nilai indeks inovasi tinggi	4	37,50 %		
	03 - Meningkatnya daerah dengan penerimaan daerah meningkat	01 - Jumlah daerah dengan penerimaan daerah meningkat	4	74 daerah		
	04 - Meningkatnya daerah dengan realisasi belanjanya berkualitas	01 - Jumlah daerah dengan realisasi belanjanya berkualitas	4	66 daerah		
	05 - Meningkatnya reformasi pelayanan perizinan	01 - Jumlah perizinan yang kewenangannya sudah didelegasikan ke PTSP Prima berbasis elektronik	4	5.887 dokumen		
	06 - Meningkatnya daerah yang memiliki PTSP Prima berbasis elektronik	01 - Jumlah daerah yang memiliki PTSP Prima berbasis elektronik	4	10 daerah		
	07 - Meningkatnya tata kelola keuangan daerah yang efektif dan efisien	01 - Jumlah daerah yang melaksanakan tata kelola keuangan yang efektif dan efisien	4	66 daerah		
	08 - Meningkatnya Kesepakatan dan Perjanjian Kerja Sama Daerah	01 - Jumlah daerah yang mengimplementasikan Kesepakatan dan Perjanjian Kerja Sama Daerah	4	6 daerah		
	09 - Meningkatnya persentase capaian SPM di daerah	01 - Persentase capaian SPM di daerah	4	91,30 %		



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

PN/PP/KP/ProP	Sasaran	Indikator	Dukungan Terhadap Arahan Presiden	Target	Rp. Juta	Instansi Pelaksana
	10 - Meningkatnya daerah dengan indeks kinerja GWPP kategori baik	01 - Jumlah daerah dengan indeks kinerja GWPP kategori baik	4	34 daerah		
	11 - Meningkatnya pengelolaan pertanahan dan terselenggarakannya penataan ruang	01 - Luas cakupan bidang tanah bersertipikat yang terdigitasi dan memiliki georeferensi yang baik	5	1.559.602 ha		
		02 - Luas cakupan peta dasar pertanahan	5	1.000.725 ha		
		03 - Jumlah materi teknis dan rancangan peraturan daerah RDTR Kab/Kota	5	13 materi teknis dan Ranperkada RDTR		
		04 - Jumlah persetujuan substansi RDTR Kab/Kota	5	12 persetujuan substansi RDTR		
		05 - Jumlah materi teknis dan rancangan peraturan daerah RTRW Prov/Kab/Kota	5	7 materi teknis dan Ranperda RTRW		
		06 - Jumlah persetujuan substansi RTRW Prov/Kab/Kota	5	7 persetujuan substansi RTRW		
		07 - Nilai Kepastian dan Perlindungan Hak atas Tanah	5	5		
		08 - Jumlah materi teknis RTR Nasional (Pulau/Kep dan KSN)	5	1 materi teknis dan Raperpres RTR		
		09 - Jumlah penanganan perkara hasil penyidikan pelanggaran pemanfaatan ruang	5	15 perkara		



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

PN/PP/KP/ProP	Sasaran	Indikator	Dukungan Terhadap Arahan Presiden	Target	Rp. Juta	Instansi Pelaksana
	12 - Terlaksananya Peningkatan Penyelenggaraan Informasi Geospasial	01 - Jumlah kesepakatan teknis batas wilayah administrasi desa/kelurahan yang dihasilkan	2	400 desa		
02.05.05.05 PRO-P: Peningkatan Kapasitas Pemerintahan Daerah dan Hubungan Pusat-Daerah di Provinsi Sulawesi Utara	01 - Mempercepat kemudahan berusaha di daerah termasuk reformasi pelayanan perizinan yang berbasis sistem informasi digital (<i>e-gov</i>)	01 - Jumlah perizinan yang kewenangannya sudah didelegasikan ke PTSP Prima berbasis elektronik	4	1.105 dokumen	0,0 ^(a)	KEMENTERIAN DALAM NEGERI
	02 - Meningkatnya kerja sama daerah	01 - Jumlah daerah yang mengimplementasikan Kesepakatan dan Perjanjian Kerja Sama	4	1 daerah		
	03 - Meningkatnya persentase capaian SPM di daerah	01 - Persentase capaian SPM di daerah	4	92,63 %		
	04 - Meningkatnya persentase daerah dengan nilai indeks inovasi tinggi	01 - Persentase daerah yang mempunyai nilai indeks inovasi tinggi	4	36 %		
	05 - Meningkatnya daerah dengan penerimaan daerah meningkat	01 - Jumlah daerah yang penerimaannya meningkat	4	15 daerah		
	06 - Meningkatnya daerah dengan realisasi belanjanya berkualitas	01 - Jumlah daerah yang realisasi belanjanya berkualitas	4	12 daerah		
	07 - Meningkatnya tata kelola keuangan daerah yang efektif dan efisien	01 - Jumlah daerah yang melaksanakan tata kelola keuangan daerah yang efektif dan efisien	4	12 daerah		



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

PN/PP/KP/ProP	Sasaran	Indikator	Dukungan Terhadap Arahan Presiden	Target	Rp. Juta	Instansi Pelaksana
	08 - Peningkatan penataan hubungan pusat daerah	01 - Jumlah tugas dan wewenang yang dilaksanakan oleh Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat dengan kinerja baik	4	22 rekomendasi		
02.05.05.06 PRO-P: Pengelolaan dan Pelayanan Pertanahan di Provinsi Sulawesi Utara	01 - Terlaksananya percepatan sertifikasi tanah	01 - Jumlah Sertipikat Hak Atas Tanah	5	54.994 bidang	7.537,0	KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BPN, KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI, KEMENTERIAN KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH, KEMENTERIAN PERTANIAN, KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
	02 - Terlaksananya percepatan peta bidang tanah dan ruang	01 - Jumlah bidang tanah	5	63.655 ha		
02.05.05.07 PRO-P: Penyelenggaraan Penataan Ruang di Provinsi Sulawesi Utara	01 - Tersedianya rencana tata ruang yang berkualitas	01 - Jumlah materi teknis dan rancangan peraturan daerah RDTR Kab/Kota	5	3 rekomendasi kebijakan	1.862,3	KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BPN
		02 - Jumlah persetujuan substansi RDTR Kab/Kota	5	4 rekomendasi kebijakan		
		03 - Jumlah materi teknis dan rancangan peraturan daerah RTRW Prov/Kab/Kota	5	3 rekomendasi kebijakan		
		04 - Jumlah persetujuan substansi RTRW Prov/Kab/Kota	5	2 rekomendasi kebijakan		
		05 - Jumlah materi teknis RTR Nasional (Pulau/Kep dan KSN)	5	1 rekomendasi kebijakan		



**FRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

PN/PP/KP/ProP	Sasaran	Indikator	Dukungan Terhadap Arahan Presiden	Target	Rp. Juta	Instansi Pelaksana
02.05.05.09 PRO-P: Peningkatan Kapasitas Pemerintahan Daerah dan Hubungan Pusat-Daerah di Provinsi Sulawesi Tengah	01 - Mempercepat kemudahan berusaha di daerah termasuk reformasi pelayanan perizinan yang berbasis sistem informasi digital (<i>e-gov</i>)	01 - Jumlah perizinan yang kewenangannya sudah didelegasikan ke PTSP Prima berbasis elektronik	4	1.696 dokumen	90.000,0	KEMENTERIAN DALAM NEGERI
	02 - Meningkatnya kerja sama daerah	01 - Jumlah daerah yang mengimplementasikan Kesepakatan dan Perjanjian Kerja Sama	4	1 daerah		
	03 - Meningkatnya persentase capaian SPM di daerah	01 - Persentase capaian SPM di daerah	4	90,17 %		
	04 - Meningkatnya persentase daerah dengan nilai indeks inovasi tinggi	01 - Persentase daerah yang mempunyai nilai indeks inovasi tinggi	4	37 %		
	05 - Meningkatnya daerah dengan penerimaan daerah meningkat	01 - Jumlah daerah yang penerimaan daerahnya meningkat	4	10 daerah		
	06 - Meningkatnya daerah dengan realisasi belanjanya berkualitas	01 - Jumlah daerah yang realisasi belanjanya berkualitas	4	11 daerah		
	07 - Meningkatnya tata kelola keuangan daerah yang efektif dan efisien	01 - Jumlah daerah yang melaksanakan tata kelola keuangan daerah yang efektif dan efisien	4	11 daerah		
	08 - Peningkatan penataan hubungan pusat daerah	01 - Jumlah tugas dan wewenang yang dilaksanakan oleh Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat dengan kinerja baik	4	22 rekomendasi		



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

PN/PP/KP/ProP	Sasaran	Indikator	Dukungan Terhadap Arahan Presiden	Target	Rp. Juta	Instansi Pelaksana
02.05.05.10 PRO-P: Pengelolaan dan Pelayanan Pertanahan di Provinsi Sulawesi Tengah	01 - Terlaksananya percepatan sertifikasi tanah	01 - Jumlah Sertipikat Hak Atas Tanah	5	51.432 bidang	9.440,0	KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BPN, KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI, KEMENTERIAN KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH
	02 - Terlaksananya percepatan peta bidang tanah dan ruang	01 - Jumlah bidang tanah	5	42.837 ha		
02.05.05.11 PRO-P: Penyelenggaraan Penataan Ruang di Provinsi Sulawesi Tengah	01 - Tersedianya rencana tata ruang yang berkualitas	01 - Jumlah materi teknis dan rancangan peraturan daerah RDTR Kab/Kota	5	3 rekomendasi kebijakan	553,0	KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BPN
		02 - Jumlah persetujuan substansi RDTR Kab/Kota	5	1 rekomendasi kebijakan		
		03 - Jumlah materi teknis dan rancangan peraturan daerah RTRW Prov/Kab/Kota	5	1 rekomendasi kebijakan		
		04 - Jumlah persetujuan substansi RTRW Prov/Kab/Kota	5	1 rekomendasi kebijakan		
		05 - Jumlah penanganan perkara hasil penyidikan pelanggaran pemanfaatan ruang	5	10 perkara		
02.05.05.12 PRO-P: Peningkatan Kapasitas Pemerintahan Daerah dan Hubungan Pusat-Daerah di Provinsi Sulawesi Selatan	01 - Mempercepat kemudahan berusaha di daerah termasuk reformasi pelayanan perizinan yang berbasis sistem informasi digital (<i>e-gov</i>)	01 - Jumlah perizinan yang kewenangannya sudah didelegasikan ke PTSP Prima berbasis elektronik	4	1.324 dokumen	216,9	KEMENTERIAN DALAM NEGERI
		02 - Meningkatnya kerja sama daerah	01 - Jumlah daerah yang mengimplementasikan Kesepakatan dan Perjanjian Kerja Sama	4		



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

PN/PP/KP/ProP	Sasaran	Indikator	Dukungan Terhadap Arahan Presiden	Target	Rp. Juta	Instansi Pelaksana
	03 - Meningkatnya persentase capaian SPM di daerah	01 - Persentase capaian SPM di daerah	4	91,03 %		
	04 - Meningkatnya persentase daerah dengan nilai indeks inovasi tinggi	01 - Persentase daerah yang mempunyai nilai indeks inovasi tinggi	4	62 %		
	05 - Meningkatnya daerah dengan penerimaan daerah meningkat	01 - Jumlah daerah yang penerimaan daerahnya meningkat	4	19 daerah		
	06 - Meningkatnya daerah dengan realisasi belanjanya berkualitas	01 - Jumlah daerah yang realisasi belanjanya berkualitas	4	18 daerah		
	07 - Meningkatnya tata kelola keuangan daerah yang efektif dan efisien	01 - Jumlah daerah yang melaksanakan tata kelola keuangan daerah yang efektif dan efisien	4	18 daerah		
	08 - Peningkatan penataan hubungan pusat daerah	01 - Jumlah tugas dan wewenang yang dilaksanakan oleh Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat dengan kinerja baik	4	22 rekomendasi		
02.05.05.13 PRO-P: Pengelolaan dan Pelayanan Pertanahan di Provinsi Sulawesi Selatan	01 - Terlaksananya percepatan sertifikasi tanah	01 - Jumlah Sertipikat Hak Atas Tanah	5	136.575 bidang	17.083,8	KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BPN
	02 - Terlaksananya percepatan peta bidang tanah dan ruang	01 - Jumlah bidang tanah	5	133.915 ha		



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

PN/PP/KP/ProP	Sasaran	Indikator	Dukungan Terhadap Arahan Presiden	Target	Rp. Juta	Instansi Pelaksana	
02.05.05.14 PRO-P: Penyelenggaraan Penataan Ruang di Provinsi Sulawesi Selatan	01 - Tersedianya rencana tata ruang yang berkualitas	01 - Jumlah materi teknis dan rancangan peraturan daerah RDTR Kab/Kota	5	14 rekomendasi kebijakan	3.211,5	KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BPN	
		02 - Jumlah materi teknis dan rancangan peraturan daerah RTRW Prov/Kab/Kota	5	2 rekomendasi kebijakan			
		03 - Jumlah persetujuan substansi RTRW Prov/Kab/Kota	5	2 rekomendasi kebijakan			
02.05.05.16 PRO-P: Peningkatan Kapasitas Pemerintahan Daerah dan Hubungan Pusat-Daerah di Provinsi Sulawesi Tenggara	01 - Mempercepat kemudahan berusaha di daerah termasuk reformasi pelayanan perizinan yang berbasis sistem informasi digital (<i>e-gov</i>)	01 - Jumlah perizinan yang kewenangannya sudah didelegasikan ke PTSP Prima berbasis elektronik	4	748 dokumen	0,0 ^(a)	KEMENTERIAN DALAM NEGERI	
		02 - Meningkatnya kerja sama daerah	01 - Jumlah daerah yang mengimplementasikan Kesepakatan dan Perjanjian Kerja Sama	4			1 daerah
		03 - Meningkatnya persentase capaian SPM di daerah	01 - Persentase capaian SPM di daerah	4			90,98 %
		04 - Meningkatnya persentase daerah dengan nilai indeks inovasi tinggi	01 - Persentase daerah yang mempunyai nilai indeks inovasi tinggi	4			30 %
		05 - Meningkatnya daerah dengan penerimaan daerah meningkat	01 - Jumlah daerah yang penerimaan daerahnya meningkat	4			16 daerah



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

PN/PP/KP/ProP	Sasaran	Indikator	Dukungan Terhadap Arahan Presiden	Target	Rp. Juta	Instansi Pelaksana
	06 - Meningkatnya daerah dengan realisasi belanjanya berkualitas	01 - Jumlah daerah yang realisasi belanjanya berkualitas	4	13 daerah		
	07 - Meningkatnya tata kelola keuangan daerah yang efektif dan efisien	01 - Jumlah daerah yang melaksanakan tata kelola keuangan daerah yang efektif dan efisien	4	13 daerah		
	08 - Peningkatan penataan hubungan pusat daerah	01 - Jumlah tugas dan wewenang yang dilaksanakan oleh Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat dengan kinerja baik	4	22 rekomendasi		
02.05.05.17 PRO-P: Pengelolaan dan Pelayanan Pertanahan di Provinsi Sulawesi Tenggara	01 - Terlaksananya percepatan sertifikasi tanah	01 - Jumlah Sertipikat Hak Atas Tanah	5	62.967 bidang	7.383,5	KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BPN, KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI, KEMENTERIAN KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH
	02 - Terlaksananya percepatan peta bidang tanah dan ruang	01 - Jumlah bidang tanah	5	59.048 ha		
02.05.05.18 PRO-P: Penyelenggaraan Penataan Ruang di Provinsi Sulawesi Tenggara	01 - Tersedianya rencana tata ruang yang berkualitas	01 - Jumlah materi teknis dan rancangan peraturan daerah RDTR Kab/Kota	5	5 rekomendasi kebijakan	1.762,0	KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BPN
		02 - Jumlah materi teknis dan rancangan peraturan daerah RTRW Prov/Kab/Kota	5	1 rekomendasi kebijakan		
02.05.05.20 PRO-P: Peningkatan Kapasitas Pemerintahan Daerah dan Hubungan Pusat-Daerah di Provinsi Gorontalo	01 - Mempercepat kemudahan berusaha di daerah termasuk reformasi pelayanan perizinan yang berbasis sistem informasi digital (<i>e-gov</i>)	01 - Jumlah perizinan yang kewenangannya sudah didelegasikan ke PTSP Prima berbasis elektronik	4	474 dokumen	0,0 ^(a)	KEMENTERIAN DALAM NEGERI



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

PN/PP/KP/ProP	Sasaran	Indikator	Dukungan Terhadap Arahan Presiden	Target	Rp. Juta	Instansi Pelaksana
	02 - Meningkatnya kerja sama daerah	01 - Jumlah daerah yang mengimplementasikan Kesepakatan dan Perjanjian Kerja Sama	4	1 daerah		
	03 - Meningkatnya persentase capaian SPM di daerah	01 - Persentase capaian SPM di daerah	4	92,59 %		
	04 - Meningkatnya persentase daerah dengan nilai indeks inovasi tinggi	01 - Persentase daerah yang mempunyai nilai indeks inovasi tinggi	4	30 %		
	05 - Meningkatnya daerah dengan penerimaan daerah meningkat	01 - Jumlah daerah yang penerimaannya meningkat	4	7 daerah		
	06 - Meningkatnya daerah dengan realisasi belanjanya berkualitas	01 - Jumlah daerah yang realisasi belanjanya berkualitas	4	6 daerah		
	07 - Meningkatnya tata kelola keuangan daerah yang efektif dan efisien	01 - Jumlah daerah yang melaksanakan tata kelola keuangan daerah yang efektif dan efisien	4	6 daerah		
	08 - Peningkatan penataan hubungan pusat daerah	01 - Jumlah tugas dan wewenang yang dilaksanakan oleh Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat dengan kinerja baik	4	22 rekomendasi		
02.05.05.21 PRO-P: Pengelolaan dan Pelayanan Pertanahan di Provinsi Gorontalo	01 - Terlaksananya percepatan sertifikasi tanah	01 - Jumlah Sertipikat Hak Atas Tanah	5	8.097 bidang	4.013,2	KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BPN
	02 - Terlaksananya percepatan peta bidang tanah dan ruang	01 - Jumlah bidang tanah	5	15.698 ha		



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

PN/PP/KP/ProP	Sasaran	Indikator	Dukungan Terhadap Arahan Presiden	Target	Rp. Juta	Instansi Pelaksana	
02.05.05.22 PRO-P: Penyelenggaraan Penataan Ruang di Provinsi Gorontalo	01 - Tersedianya rencana tata ruang yang berkualitas	01 - Jumlah materi teknis dan rancangan peraturan daerah RDTR Kab/Kota	5	2 rekomendasi kebijakan	403,0	KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BPN	
		02 - Jumlah persetujuan substansi RDTR Kab/Kota	5	12 rekomendasi kebijakan			
		03 - Jumlah persetujuan substansi Prov/Kab/Kota	5	1 rekomendasi kebijakan			
		04 - Jumlah persetujuan substansi RTRW Prov/Kab/Kota	5	1 rekomendasi kebijakan			
02.05.05.23 PRO-P: Peningkatan Kapasitas Pemerintahan Daerah dan Hubungan Pusat-Daerah di Provinsi Sulawesi Barat	01 - Mempercepat kemudahan berusaha di daerah termasuk reformasi pelayanan perizinan yang berbasis sistem informasi digital (<i>e-gov</i>)	01 - Jumlah perizinan yang kewenangannya sudah didelegasikan ke PTSP Prima berbasis elektronik	4	540 dokumen	0,0 ^(a)	KEMENTERIAN DALAM NEGERI	
		02 - Meningkatnya kerja sama daerah	01 - Jumlah daerah yang mengimplementasikan Kesepakatan dan Perjanjian Kerja Sama	4			1 daerah
		03 - Meningkatnya persentase capaian SPM di daerah	01 - Persentase capaian SPM di daerah	4			90,48 %
		04 - Meningkatnya persentase daerah dengan nilai indeks inovasi tinggi	01 - Persentase daerah yang mempunyai nilai indeks inovasi tinggi	4			30 %
		05 - Meningkatnya daerah dengan penerimaan daerah meningkat	01 - Jumlah daerah yang penerimaan daerahnya meningkat	4			7 daerah



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

PN/PP/KP/ProP	Sasaran	Indikator	Dukungan Terhadap Arahan Presiden	Target	Rp. Juta	Instansi Pelaksana
	06 - Meningkatnya daerah dengan realisasi belanjanya berkualitas	01 - Jumlah daerah yang realisasi belanjanya berkualitas	4	6 daerah		
	07 - Meningkatnya tata kelola keuangan daerah yang efektif dan efisien	01 - Jumlah daerah yang melaksanakan tata kelola keuangan daerah yang efektif dan efisien	4	6 daerah		
	08 - Peningkatan penataan hubungan pusat daerah	01 - Jumlah tugas dan wewenang yang dilaksanakan oleh Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat dengan kinerja baik	4	22 rekomendasi		
02.05.05.24 PRO-P: Pengelolaan dan Pelayanan Pertanahan di Provinsi Sulawesi Barat	01 - Terlaksananya percepatan sertifikasi tanah	01 - Jumlah Sertipikat Hak Atas Tanah	5	8.311 bidang	2.058,9	KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BPN
	02 - Terlaksananya percepatan peta bidang tanah dan ruang	01 - Jumlah bidang tanah	5	23.873 ha		
02.05.05.25 PRO-P: Penyelenggaraan Penataan Ruang di Provinsi Sulawesi Barat	01 - Tersedianya rencana tata ruang yang berkualitas	01 - Jumlah materi teknis dan rancangan peraturan daerah RDTR Kab/Kota	5	2 rekomendasi kebijakan	575,0	KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BPN
		02 - Jumlah persetujuan substansi RDTR Kab/Kota	5	2 rekomendasi kebijakan		
		03 - Jumlah persetujuan substansi RTRW Prov/Kab/Kota	5	1 rekomendasi kebijakan		
02.05.05.27 PRO-P: Penyelenggaraan Informasi Geospasial di Provinsi Sulawesi Tengah	01 - Tercapainya jumlah kesepakatan teknis batas wilayah administrasi desa/kelurahan yang dihasilkan	01 - Jumlah kesepakatan teknis batas wilayah administrasi desa/kelurahan yang dihasilkan	2	150 desa	758,3	BADAN INFORMASI GEOSPASIAL (BIG)



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

PN/PP/KP/ProP	Sasaran	Indikator	Dukungan Terhadap Arahan Presiden	Target	Rp. Juta	Instansi Pelaksana
02.05.05.28 PRO-P: Penyelenggaraan Informasi Geospasial di Provinsi Sulawesi Selatan	01 - Tercapainya jumlah kesepakatan teknis batas wilayah administrasi desa/kelurahan yang dihasilkan	01 - Jumlah kesepakatan teknis batas wilayah administrasi desa/kelurahan yang dihasilkan	2	250 desa	0,0 ^(a)	BADAN INFORMASI GEOSPASIAL (BIG)
02.06 PP: Pembangunan Wilayah Maluku	01 - Meningkatnya pertumbuhan ekonomi dan tingkat kesejahteraan masyarakat di Wilayah Maluku	01 - Laju pertumbuhan PDRB Wilayah Maluku	5	10,9—11,8 % per tahun	784.382,6	
		02 - IPM Provinsi di Wilayah Maluku	1	70,71—71,18 nilai minimum—nilai maksimum		
		03 - Persentase penduduk miskin Wilayah Maluku	1	10,6—11,4 %		
02.06.01 KP: Pengembangan Kawasan Strategis	01 - Berkembangnya kawasan strategis	01 - Rasio pertumbuhan investasi kawasan (KEK/KI/DPP/KPBPB) terhadap wilayah	5	>1	8.000,0	
		02 - Jumlah kawasan pusat pertumbuhan yang difasilitasi dan dikembangkan	5	3 kawasan		
		03 - Destinasi Pariwisata Prioritas (DPP)	5	1 jumlah destinasi		
		04 - KEK berbasis pariwisata dan industri	5	1 kawasan		
		05 - KI Prioritas dan KI pengembangan	5	1 jumlah KI		



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

PN/PP/KP/ProP	Sasaran	Indikator	Dukungan Terhadap Arahan Presiden	Target	Rp. Juta	Instansi Pelaksana
02.06.01.01 PRO-P: Perbaikan Aksesibilitas, Atraksi, dan Amenitas Destinasi Pariwisata Prioritas Morotai/KEK Morotai	01 - Terlaksananya perbaikan aksesibilitas, atraksi, dan amenitas Destinasi Pariwisata Prioritas Morotai/KEK Morotai	01 - Rasio pertumbuhan investasi kawasan (KEK/KI/DPP/KPBPB) terhadap pertumbuhan investasi Provinsi Maluku Utara	5	>1	8.000,0	KEMENTERIAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF/BADAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF, KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT, KEMENTERIAN DALAM NEGERI, KEMENTERIAN PERHUBUNGAN, KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI, KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA, KEMENTERIAN INVESTASI/BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
02.06.01.02 PRO-P: Fasilitasi Realisasi Investasi dan Pembangunan KI Teluk Weda	01 - Terlaksananya fasilitasi realisasi investasi dan pembangunan KI Teluk Weda	01 - Rasio pertumbuhan investasi kawasan (KEK/KI/DPP/KPBPB) terhadap pertumbuhan investasi Provinsi Maluku Utara	5	>1	0,0 ^(a)	KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN, KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL, KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BPN (Terintegrasi dengan PSN)
02.06.02 KP: Pengembangan Sektor Unggulan	01 - Berkembangnya sektor unggulan	01 - Persentase peningkatan produksi komoditas unggulan per tahun - kelapa	5	4—6 %	49.700,8	
		02 - Persentase peningkatan produksi komoditas unggulan per tahun - pala	5	1—2 %		
		03 - Persentase peningkatan produksi komoditas unggulan per tahun - cengkeh	5	2—4 %		
		04 - Persentase peningkatan produksi komoditas unggulan per tahun - perikanan tangkap	5	2—4 %		



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

PN/PP/KP/ProP	Sasaran	Indikator	Dukungan Terhadap Arahan Presiden	Target	Rp. Juta	Instansi Pelaksana
		05 - Persentase peningkatan produksi komoditas unggulan per tahun - perikanan budidaya	5	4—6 %		
02.06.02.01 PRO-P: Pengembangan Komoditas Unggulan Lada, Pala, dan Cengkeh di Provinsi Maluku	01 - Terlaksananya pengembangan komoditas unggulan lada, pala, dan cengkeh	01 - Persentase peningkatan produksi komoditas unggulan per tahun Provinsi Maluku - pala	5	5—6 %	7.510,0	KEMENTERIAN PERTANIAN
		02 - Persentase peningkatan produksi komoditas unggulan per tahun Provinsi Maluku - cengkeh	5	4—6 %		
02.06.02.02 PRO-P: Pengembangan Komoditas Unggulan Kelapa di Provinsi Maluku	01 - Terlaksananya pengembangan komoditas unggulan kelapa	01 - Persentase peningkatan produksi komoditas unggulan per tahun Provinsi Maluku - kelapa	5	5—6 %	3.064,0	KEMENTERIAN PERTANIAN
02.06.02.03 PRO-P: Pengembangan Komoditas Unggulan Kelapa di Provinsi Maluku Utara	01 - Terlaksananya pengembangan komoditas unggulan kelapa	01 - Persentase peningkatan produksi komoditas unggulan per tahun Provinsi Maluku Utara - kelapa	5	5—7 %	3.046,0	KEMENTERIAN PERTANIAN
02.06.02.04 PRO-P: Pengembangan Komoditas Unggulan Lada, Pala, dan Cengkeh di Provinsi Maluku Utara	01 - Terlaksananya pengembangan komoditas unggulan lada, pala, dan cengkeh	01 - Persentase peningkatan produksi komoditas unggulan per tahun Provinsi Maluku Utara - pala	5	10—12 %	20.172,3	KEMENTERIAN PERTANIAN
		02 - Persentase peningkatan produksi komoditas unggulan per tahun Provinsi Maluku Utara - cengkeh	5	1—2 %		
02.06.02.05 PRO-P: Pengembangan Komoditas Unggulan Perikanan Tangkap di Provinsi Maluku	01 - Terlaksananya pengembangan komoditas unggulan perikanan tangkap	01 - Persentase peningkatan produksi komoditas unggulan per tahun Provinsi Maluku - perikanan tangkap	5	1—2 %	1.185,0	KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

PN/PP/KP/ProP	Sasaran	Indikator	Dukungan Terhadap Arahan Presiden	Target	Rp. Juta	Instansi Pelaksana
02.06.02.06 PRO-P: Pengembangan Komoditas Unggulan Perikanan Budidaya di Provinsi Maluku	01 - Terlaksananya pengembangan komoditas unggulan budidaya perikanan	01 - Persentase peningkatan produksi komoditas unggulan per tahun Provinsi Maluku - perikanan budidaya	5	4—6 %	8.966,1	KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
02.06.02.07 PRO-P: Pengembangan Komoditas Unggulan Perikanan Tangkap di Provinsi Maluku Utara	01 - Terlaksananya pengembangan komoditas unggulan perikanan tangkap	01 - Persentase peningkatan produksi komoditas unggulan per tahun Provinsi Maluku Utara - perikanan tangkap	5	1—2 %	1.185,0	KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
02.06.02.08 PRO-P: Pengembangan Komoditas Unggulan Perikanan Budidaya di Provinsi Maluku Utara	01 - Terlaksananya pengembangan komoditas unggulan budidaya perikanan	01 - Persentase peningkatan produksi komoditas unggulan per tahun Provinsi Maluku Utara - perikanan budidaya	5	5—7 %	4.572,5	KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
02.06.03 KP: Pengembangan Kawasan Perkotaan	01 - Berkembangnya kawasan perkotaan	01 - Skor Indeks Kota Berkelanjutan/IKB Kota Ambon (angka perhitungan sementara)	5	64,59	227.160,2	
		02 - Skor Indeks Kota Berkelanjutan/IKB Kota Tual (angka perhitungan sementara)	5	46,62		
		03 - Skor Indeks Kota Berkelanjutan/IKB Kota Ternate (angka perhitungan sementara)	5	47,02		
		04 - Skor Indeks Kota Berkelanjutan/IKB Kota Baru Sofifi (angka perhitungan sementara)	5	40,23		



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

PN/PP/KP/ProP	Sasaran	Indikator	Dukungan Terhadap Arah Presiden	Target	Rp. Juta	Instansi Pelaksana
	02 - Berkembangnya kota besar, kota sedang, kota kecil sebagai PKN/PKW	01 - Jumlah kota besar, sedang, kecil yang dikembangkan sebagai PKN/PKW	5	3 kota		
	03 - Terbangunnya kota baru	01 - Jumlah kota baru yang dibangun	5	1 kota		
02.06.03.01 PRO-P: Pengembangan Kota Besar, Kota Sedang, Kota Kecil di Provinsi Maluku	01 - Berkembangnya kota besar, kota sedang, kota kecil sebagai PKN/PKW	01 - Jumlah kota besar, sedang, kecil yang dikembangkan sebagai PKN/PKW	5	2 kota	86.835,1	KEMENTERIAN PERHUBUNGAN, KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
02.06.03.02 PRO-P: Pengembangan Kota Besar, Kota Sedang, Kota Kecil di Provinsi Maluku Utara	01 - Berkembangnya kota besar, kota sedang, kota kecil sebagai PKN/PKW	01 - Jumlah kota besar, sedang, kecil yang dikembangkan sebagai PKN/PKW	5	1 kota	75.325,1	KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
02.06.03.03 PRO-P: Pembangunan Kota Baru di Provinsi Maluku Utara	01 - Terbangunnya kota baru	01 - Jumlah kota baru yang dibangun	5	1 kota	65.000,0	KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
02.06.04 KP: Pengembangan Daerah Tertinggal, Kawasan Perbatasan, Perdesaan, dan Transmigrasi	01 - Terbangunnya Desa Terpadu, Kawasan Perdesaan, dan Kawasan Transmigrasi	01 - Rata-rata Indeks Desa Wilayah Maluku	1, 5	54,45	486.194,9	
		02 - Rata-rata nilai indeks perkembangan Kawasan Perdesaan Prioritas Nasional	1, 5	59,57		
		03 - Rata-rata nilai Indeks Perkembangan Kawasan Transmigrasi yang Direvitalisasi di Pulau Maluku	5	36,62		



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

PN/PP/KP/ProP	Sasaran	Indikator	Dukungan Terhadap Arahan Presiden	Target	Rp. Juta	Instansi Pelaksana
		04 - Persentase penduduk miskin perdesaan Wilayah Maluku	1	17,2—17,4 %		
	02 - Berkembangnya Pusat Kegiatan Strategis Nasional (PKSN), Lokasi Prioritas Perbatasan, dan Daerah Tertinggal	01 - Jumlah daerah tertinggal	5	8 kabupaten		
		02 - Rata-rata nilai Indeks Pengelolaan Kawasan Perbatasan	5	0,52		
		03 - Jumlah kecamatan lokasi prioritas perbatasan negara yang ditingkatkan kesejahteraan dan tata kelolanya	5	29 kecamatan		
02.06.04.02 PRO-P: Peningkatan Kesejahteraan dan Tata Kelola di Kecamatan Lokasi Prioritas di Provinsi Maluku	01 - Meningkatnya kesejahteraan dan tata kelola di kecamatan lokasi prioritas di Provinsi Maluku	01 - Jumlah kecamatan lokasi prioritas perbatasan negara yang ditingkatkan kesejahteraan dan tata kelolanya di Provinsi Maluku	5	23 kecamatan	22.688,2	KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI, DAK
02.06.04.11 PRO-P: Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal di Provinsi Maluku	01 - Meningkatnya kesejahteraan masyarakat pada daerah tertinggal di Provinsi Maluku	01 - Persentase penduduk miskin di Daerah Tertinggal di Provinsi Maluku	1	21,7—22,2 %	274.333,5	KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI, KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN, KEMENTERIAN SOSIAL, KEMENTERIAN PERTANIAN, KEMENTERIAN PERHUBUNGAN, BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA (BNPB), KEMENTERIAN AGAMA, KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT, KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN, DAK
		02 - Rata-rata IPM di Daerah Tertinggal di Provinsi Maluku	1	65,6—66,1		



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

PN/PP/KP/ProP	Sasaran	Indikator	Dukungan Terhadap Arahan Presiden	Target	Rp. Juta	Instansi Pelaksana
02.06.04.12 PRO-P: Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal di Provinsi Maluku Utara	01 - Meningkatnya kesejahteraan masyarakat pada daerah tertinggal di Provinsi Maluku Utara	01 - Persentase penduduk miskin di daerah tertinggal di Provinsi Maluku Utara	1	6,7—7,2 %	49.923,5	KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI, KEMENTERIAN SOSIAL, KEMENTERIAN DALAM NEGERI, BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA (BNPB), KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN, KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT, KEMENTERIAN PERTANIAN, DAK
		02 - Rata-rata IPM di Daerah Tertinggal di Provinsi Maluku Utara	1	63,8—64,3		
02.06.04.14 PRO-P: Pusat Kegiatan Strategis Nasional (PKSN) Saumlaki	01 - Berkembangnya Pusat Kegiatan Strategis Nasional (PKSN) Saumlaki	01 - Rata-rata nilai Indeks Pengelolaan Kawasan Perbatasan (IPKP) PKSN Saumlaki	5	0,50	308,4	KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN, KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI, DAK
02.06.04.15 PRO-P: Pusat Kegiatan Strategis Nasional (PKSN) Daruba	01 - Berkembangnya Pusat Kegiatan Strategis Nasional (PKSN) Daruba	01 - Rata-rata nilai Indeks Pengelolaan Kawasan Perbatasan (IPKP) PKSN Daruba	5	0,53	1.000,0	KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN, KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI
02.06.04.16 PRO-P: Pembangunan Desa Terpadu di Provinsi Maluku	01 - Terlaksananya pembangunan Desa Terpadu Provinsi Maluku	01 - Rata-rata Indeks Desa Provinsi Maluku	1, 5	55,75	1.513,9	KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI, KEMENTERIAN DALAM NEGERI, BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA (BNPB), KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN, KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI, BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL (BKKBN), KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

PN/PP/KP/ProP	Sasaran	Indikator	Dukungan Terhadap Arahan Presiden	Target	Rp. Juta	Instansi Pelaksana
02.06.04.17 PRO-P: Pembangunan Desa Terpadu di Provinsi Maluku Utara	01 - Terlaksananya pembangunan Desa Terpadu Provinsi Maluku Utara	01 - Rata-rata Indeks Desa Provinsi Maluku Utara	1	55,85	1.970,7	KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI, KEMENTERIAN DALAM NEGERI, KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN, BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA (BNPB), KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI, BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL (BKKBN), KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
02.06.04.18 PRO-P: Pembangunan Kawasan Perdesaan Prioritas Nasional Maluku Tengah	01 - Terlaksananya pembangunan Kawasan Perdesaan Prioritas Nasional Maluku Tengah	01 - Indeks Perkembangan Kawasan Perdesaan Kab. Maluku Tengah	1, 5	55,77	55.661,7	KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI, KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BPN, DAK
02.06.04.19 PRO-P: Pembangunan Kawasan Perdesaan Prioritas Nasional Morotai	01 - Terlaksananya pembangunan Kawasan Perdesaan Prioritas Nasional Morotai	01 - Indeks Perkembangan Kawasan Perdesaan Kab. Morotai	1, 5	61,25	60.914,1	KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI, KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BPN, DAK
02.06.04.20 PRO-P: Revitalisasi Kawasan Transmigrasi Kobisonta	01 - Terlaksananya revitalisasi Kawasan Transmigrasi Kobisonta	01 - Rata-rata Nilai Indeks Perkembangan Kawasan Transmigrasi yang Direvitalisasi di Provinsi Maluku Utara	5	44,71	35,8	KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BPN, KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI
02.06.04.21 PRO-P: Revitalisasi Kawasan Transmigrasi Pulau Mangoli dan Pulau Morotai	01 - Terlaksananya revitalisasi Kawasan Transmigrasi Pulau Mangoli dan Pulau Morotai	01 - Rata-rata nilai Indeks Perkembangan Kawasan Transmigrasi yang Direvitalisasi di Provinsi Maluku Utara	5	32,58	1.067,1	KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BPN, KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

PN/PP/KP/ProP	Sasaran	Indikator	Dukungan Terhadap Arahan Presiden	Target	Rp. Juta	Instansi Pelaksana
02.06.04.22 PRO-P: Peningkatan Kesejahteraan dan Tata Kelola di Kecamatan Lokasi Prioritas di Provinsi Maluku Utara	01 - Meningkatnya kesejahteraan dan tata kelola di kecamatan lokasi prioritas di Provinsi Maluku Utara	01 - Jumlah kecamatan lokasi prioritas perbatasan negara yang ditingkatkan kesejahteraan dan tata kelolanya di Provinsi Maluku Utara	5	6 kecamatan	16.778,0	KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI, DAK
02.06.05 KP: Kelembagaan dan Keuangan Daerah	01 - Meningkatnya Nilai Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EPPD)	01 - Nilai Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EPPD)	4	3,02	13.326,7	
	02 - Meningkatnya persentase daerah dengan indeks inovasi tinggi	01 - Persentase daerah yang mempunyai nilai indeks inovasi tinggi	4	30 %		
	03 - Meningkatnya daerah dengan penerimaan daerah meningkat	01 - Jumlah daerah dengan penerimaan daerah meningkat	4	20 daerah		
	04 - Meningkatnya daerah dengan realisasi belanjanya berkualitas	01 - Jumlah daerah dengan realisasi belanjanya berkualitas	4	19 daerah		
	05 - Meningkatnya reformasi pelayanan perizinan	01 - Jumlah perizinan yang kewenangannya sudah didelegasikan ke PTSP Prima berbasis elektronik	4	1.596 dokumen		
	06 - Meningkatnya daerah yang memiliki PTSP Prima berbasis elektronik	01 - Jumlah daerah yang memiliki PTSP Prima berbasis elektronik	4	2 daerah		
	07 - Meningkatnya tata kelola keuangan daerah yang efektif dan efisien	01 - Jumlah daerah yang melaksanakan tata kelola keuangan yang efektif dan efisien	4	19 daerah		



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

PN/PP/KP/ProP	Sasaran	Indikator	Dukungan Terhadap Arahan Presiden	Target	Rp. Juta	Instansi Pelaksana
	08 - Meningkatnya Kesepakatan dan Perjanjian Kerja Sama Daerah	01 - Jumlah daerah yang mengimplementasikan Kesepakatan dan Perjanjian Kerja Sama Daerah	4	2 daerah		
	09 - Meningkatnya persentase capaian SPM di daerah	01 - Persentase capaian SPM di daerah	4	90,69 %		
	10 - Meningkatnya daerah dengan indeks kinerja GWPP kategori baik	01 - Jumlah daerah dengan indeks kinerja GWPP kategori baik	4	34 daerah		
	11 - Meningkatnya pengelolaan pertanahan dan terselenggarakannya penataan ruang	01 - Luas cakupan bidang tanah bersertipikat yang terdigitasi dan memiliki georeferensi yang baik	5	225.040 ha		
		02 - Luas cakupan peta dasar pertanahan	5	235.743 ha		
		03 - Jumlah materi teknis dan rancangan peraturan daerah RDTR Kab/Kota	5	4 materi teknis dan Ranperkada RDTR		
		04 - Jumlah persetujuan substansi RDTR Kab/Kota	5	3 persetujuan substansi RDTR		
		05 - Jumlah materi teknis dan rancangan peraturan daerah RTRW Prov/Kab/Kota	5	4 materi teknis dan Ranperda RTRW		
		06 - Jumlah persetujuan substansi RTRW Prov/Kab/Kota	5	4 persetujuan substansi RTRW		
		07 - Nilai Kepastian dan Perlindungan Hak atas Tanah		5	5	



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

PN/PP/KP/ProP	Sasaran	Indikator	Dukungan Terhadap Arahan Presiden	Target	Rp. Juta	Instansi Pelaksana
		08 - Jumlah Penanganan Perkara Hasil Penyidikan Pelanggaran Pemanfaatan Ruang	5	5 perkara		
02.06.05.11 PRO-P: Peningkatan Kapasitas Pemerintahan Daerah dan Hubungan Pusat-Daerah di Provinsi Maluku	01 - Mempercepat kemudahan berusaha di daerah termasuk reformasi pelayanan perizinan yang berbasis sistem informasi digital (<i>e-gov</i>)	01 - Jumlah perizinan yang kewenangannya sudah didelegasikan ke PTSP Prima berbasis elektronik	4	440 dokumen	1.018,1	KEMENTERIAN DALAM NEGERI
	02 - Meningkatnya kerja sama daerah	01 - Jumlah daerah yang mengimplementasikan Kesepakatan dan Perjanjian Kerja Sama	4	1 daerah		
	03 - Meningkatnya persentase capaian SPM di daerah	01 - Persentase capaian SPM di daerah	4	91,01 %		
	04 - Meningkatnya persentase daerah dengan nilai indeks inovasi tinggi	01 - Persentase daerah yang mempunyai nilai indeks inovasi tinggi	4	30 %		
	05 - Meningkatnya daerah dengan penerimaan daerah meningkat	01 - Jumlah daerah yang penerimaannya meningkat	4	10 daerah		
	06 - Meningkatnya daerah dengan realisasi belanjanya berkualitas	01 - Jumlah daerah yang realisasi belanjanya berkualitas	4	10 daerah		
	07 - Meningkatnya tata kelola keuangan daerah yang efektif dan efisien	01 - Jumlah daerah yang melaksanakan tata kelola keuangan daerah yang efektif dan efisien	4	10 daerah		



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

PN/PP/KP/ProP	Sasaran	Indikator	Dukungan Terhadap Arahan Presiden	Target	Rp. Juta	Instansi Pelaksana
	08 - Peningkatan penataan hubungan pusat daerah	01 - Jumlah tugas dan wewenang yang dilaksanakan oleh Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat dengan kinerja baik	4	22 rekomendasi		
02.06.05.12 PRO-P: Peningkatan Kapasitas Pemerintahan Daerah dan Hubungan Pusat-Daerah di Provinsi Maluku Utara	01 - Mempercepat kemudahan berusaha di daerah termasuk reformasi pelayanan perizinan yang berbasis sistem informasi digital (<i>e-gov</i>)	01 - Jumlah perizinan yang kewenangannya sudah didelegasikan ke PTSP Prima berbasis elektronik	4	1.155 dokumen	0,0 ^(a)	KEMENTERIAN DALAM NEGERI
	02 - Meningkatnya kerja sama daerah	01 - Jumlah daerah yang mengimplementasikan Kesepakatan dan Perjanjian Kerja Sama	4	1 daerah		
	03 - Meningkatnya persentase capaian SPM di daerah	01 - Persentase capaian SPM di daerah	4	90,36 %		
	04 - Meningkatnya persentase daerah dengan nilai indeks inovasi tinggi	01 - Persentase daerah yang mempunyai nilai indeks inovasi tinggi	4	30 %		
	05 - Meningkatnya daerah dengan penerimaan daerah meningkat	01 - Jumlah daerah yang penerimaannya meningkat	4	10 daerah		
	06 - Meningkatnya daerah dengan realisasi belanjanya berkualitas	01 - Jumlah daerah yang realisasi belanjanya berkualitas	4	9 daerah		
	07 - Meningkatnya tata kelola keuangan daerah yang efektif dan efisien	01 - Jumlah daerah yang melaksanakan tata kelola keuangan daerah yang efektif dan efisien	4	9 daerah		



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

PN/PP/KP/ProP	Sasaran	Indikator	Dukungan Terhadap Arahan Presiden	Target	Rp. Juta	Instansi Pelaksana
	08 - Peningkatan penataan hubungan pusat daerah	01 - Jumlah tugas dan wewenang yang dilaksanakan oleh Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat dengan kinerja baik	4	22 rekomendasi		
02.06.05.13 PRO-P: Pengelolaan dan Pelayanan Pertanahan di Provinsi Maluku	01 - Terlaksananya percepatan sertifikasi tanah	01 - Jumlah Sertipikat Hak Atas Tanah	5	29.058 bidang	3.100,7	KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BPN
	02 - Terlaksananya percepatan peta bidang tanah dan ruang	01 - Jumlah bidang tanah	5	9.476 ha		
02.06.05.14 PRO-P: Pengelolaan dan Pelayanan Pertanahan di Provinsi Maluku Utara	01 - Terlaksananya percepatan sertifikasi tanah	01 - Jumlah Sertipikat Hak Atas Tanah	5	17.856 bidang	3.775,9	KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BPN
	02 - Terlaksananya percepatan peta bidang tanah dan ruang	01 - Jumlah bidang tanah	5	51.638 ha		
02.06.05.15 PRO-P: Penyelenggaraan Penataan Ruang di Provinsi Maluku	01 - Tersusunnya rencana tata ruang yang berkualitas	01 - Jumlah materi teknis dan rancangan peraturan daerah RDTR Kab/Kota	5	7 materi teknis dan Ranperkada	4.047,6	KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BPN
		02 - Jumlah persetujuan substansi RDTR Kab/Kota	5	3 persetujuan substansi RDTR		
		03 - Jumlah materi teknis dan rancangan peraturan daerah RTRW Prov/Kab/Kota	5	1 materi teknis dan Ranperda		
		04 - Jumlah persetujuan substansi RTRW Prov/Kab/Kota	5	2 persetujuan substansi RTRW		



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

PN/PP/KP/ProP	Sasaran	Indikator	Dukungan Terhadap Arahan Presiden	Target	Rp. Juta	Instansi Pelaksana
02.06.05.16 PRO-P: Penyelenggaraan Penataan Ruang di Provinsi Maluku Utara	01 - Tersusunnya rencana tata ruang yang berkualitas	01 - Jumlah materi teknis dan rancangan peraturan daerah RDTR Kab/Kota	5	8 materi teknis dan Ranperkada RDTR	1.384,5	KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BPN
		02 - Jumlah persetujuan substansi RDTR Kab/Kota	5	2 persetujuan substansi RDTR		
		03 - Jumlah materi teknis dan rancangan peraturan daerah RTRW Prov/Kab/Kota	5	2 materi teknis dan Ranperda		
		04 - Jumlah persetujuan substansi RTRW Prov/Kab/Kota	5	1 persetujuan substansi RTRW		
02.07 PP: Pembangunan Wilayah Papua	01 - Meningkatnya pertumbuhan ekonomi dan tingkat kesejahteraan masyarakat di Wilayah Papua	01 - Laju pertumbuhan PDRB Wilayah Papua	5	7,2—7,8 % per tahun	5.283.450,5	
		02 - IPM Provinsi di Wilayah Papua	1	62,54—66,55 nilai minimum—nilai maksimum		
		03 - Persentase penduduk miskin Wilayah Papua	1	22,0—23,6 %		
02.07.01 KP: Pengembangan Kawasan Strategis	01 - Berkembangnya Kawasan Strategis	01 - Rasio pertumbuhan investasi kawasan (KEK/KI/DPP/KPBPB) terhadap wilayah	5	>1	176.218,1	
		02 - Jumlah kawasan pusat pertumbuhan yang difasilitasi dan dikembangkan	5	4 kawasan		
		03 - Destinasi Pariwisata Prioritas (DPP)	5	1 jumlah destinasi		



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

PN/PP/KP/ProP	Sasaran	Indikator	Dukungan Terhadap Arahan Presiden	Target	Rp. Juta	Instansi Pelaksana
		04 - Destinasi Pariwisata Pengembangan dan Revitalisasi	5	1 jumlah destinasi		
		05 - KEK berbasis pariwisata dan industri	5	1 kawasan		
		06 - KI Prioritas dan KI Pengembangan	5	1 jumlah KI		
02.07.01.01 PRO-P: Pembangunan Destinasi Pariwisata Pengembangan Biak-Teluk Cenderawasih	01 - Terlaksananya pembangunan Destinasi Pariwisata Pengembangan Biak-Teluk Cenderawasih	01 - Rasio pertumbuhan investasi kawasan (KEK/KI/DPP/KPBPB) terhadap pertumbuhan investasi Provinsi Papua	5	>1	8.379,5	KEMENTERIAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF/BADAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF, KEMENTERIAN DALAM NEGERI, KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI, KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA, KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
02.07.01.02 PRO-P: Perbaikan Aksesibilitas, Atraksi, dan Amenitas Destinasi Pariwisata Prioritas Raja Ampat	01 - Terlaksananya perbaikan aksesibilitas, atraksi, dan amenitas Destinasi Pariwisata Prioritas Raja Ampat	01 - Rasio pertumbuhan investasi kawasan (KEK/KI/DPP/KPBPB) terhadap pertumbuhan investasi Provinsi Papua Barat	5	>1	7.993,3	KEMENTERIAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF/BADAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF, KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT, KEMENTERIAN DALAM NEGERI, KEMENTERIAN PERHUBUNGAN, KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI, KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
02.07.01.03 PRO-P: Percepatan Peningkatan Investasi KEK Sorong	01 - Terlaksananya percepatan peningkatan investasi KEK Sorong	01 - Rasio pertumbuhan investasi kawasan (KEK/KI/DPP/KPBPB) terhadap pertumbuhan investasi Provinsi Papua Barat	5	>1	159.045,3	KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT, KEMENTERIAN INVESTASI/BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL, KEMENTERIAN PERHUBUNGAN



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

PN/PP/KP/ProP	Sasaran	Indikator	Dukungan Terhadap Arahan Presiden	Target	Rp. Juta	Instansi Pelaksana
02.07.01.04 PRO-P: Fasilitasi Realisasi Investasi dan Pembangunan KI Teluk Bintuni	01 - Terlaksananya percepatan peningkatan investasi KI Teluk Bintuni	01 - Rasio pertumbuhan investasi kawasan (KEK/KI/DPP/KBPB) terhadap pertumbuhan investasi Provinsi Papua Barat	5	>1	800,0	KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN, KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL, KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BPN (Terintegrasi dengan PSN)
02.07.02 KP: Pengembangan Sektor Unggulan	01 - Berkembangnya sektor unggulan	01 - Persentase peningkatan produksi komoditas unggulan per tahun - kakao	5	1—2 %	157.829,9	
		02 - Persentase peningkatan produksi komoditas unggulan per tahun - kopi	5	2—4 %		
		03 - Persentase peningkatan produksi komoditas unggulan per tahun - kelapa	5	1—2 %		
		04 - Persentase peningkatan produksi komoditas unggulan per tahun - perikanan tangkap	5	2—4 %		
		05 - Persentase peningkatan produksi komoditas unggulan per tahun - pala	5	1—2 %		
		06 - Persentase peningkatan produksi komoditas unggulan per tahun - perikanan budidaya	5	4—6 %		
02.07.02.01 PRO-P: Pengembangan Komoditas Unggulan Kakao di Provinsi Papua	01 - Terlaksananya pengembangan komoditas unggulan kakao	01 - Persentase peningkatan produksi komoditas unggulan per tahun Provinsi Papua - kakao	5	1—2 %	0,0 ^(a)	KEMENTERIAN PERTANIAN



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

PN/PP/KP/ProP	Sasaran	Indikator	Dukungan Terhadap Arahan Presiden	Target	Rp. Juta	Instansi Pelaksana
02.07.02.02 PRO-P: Pengembangan Komoditas Unggulan Kopi di Provinsi Papua	01 - Terlaksananya pengembangan komoditas unggulan kopi	01 - Persentase peningkatan produksi komoditas unggulan per tahun Provinsi Papua - kopi	5	5—7 %	2.499,1	KEMENTERIAN PERTANIAN
02.07.02.06 PRO-P: Pengembangan Komoditas Unggulan Lada, Pala, dan Cengkeh di Provinsi Papua Barat	01 - Terlaksananya pengembangan komoditas unggulan lada, pala, dan cengkeh	01 - Persentase peningkatan produksi komoditas unggulan per tahun Provinsi Papua Barat - pala	5	2—3 %	398,7	KEMENTERIAN PERTANIAN
02.07.02.07 PRO-P: Pengembangan Komoditas Unggulan Kakao di Provinsi Papua Barat	01 - Terlaksananya pengembangan komoditas unggulan kakao	01 - Persentase peningkatan produksi komoditas unggulan per tahun Provinsi Papua Barat - kakao	5	1—2 %	54.212,0	KEMENTERIAN PERTANIAN
02.07.02.12 PRO-P: Transformasi Ekonomi Berbasis Wilayah Adat dari Hulu ke Hilir	01 - Meningkatkan kesejahteraan masyarakat di wilayah Papua	01 - Tingkat Pengangguran Terbuka di wilayah Papua	5	3,4—3,8 %	100.720,1	KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN, KEMENTERIAN PERTANIAN, KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN, KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI, KEMENTERIAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF/BADAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF, KEMENTERIAN KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH, KEMENTERIAN INVESTASI/BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL (Terintegrasi dengan PSN)
		02 - Tingkat Kemiskinan di wilayah Papua	5	22,0—23,6 %		
	02 - Meningkatkan kontribusi sektor unggulan di wilayah Papua	01 - Rata-rata Kontribusi PDRB Sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan di wilayah Papua	5	10,2—10,7 %		
		02 - Rata-rata Kontribusi PDRB Sektor Industri Pengolahan di wilayah Papua	5	7,5—8,0 %		
		03 - Rata-rata Kontribusi PDRB Sektor Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum di wilayah Papua	5	0,4—0,9 %		



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

PN/PP/KP/ProP	Sasaran	Indikator	Dukungan Terhadap Arahan Presiden	Target	Rp. Juta	Instansi Pelaksana
02.07.02.13 PRO-P: Pengembangan Komoditas Unggulan Perikanan Budidaya di Provinsi Papua Barat	01 - Terlaksananya pengembangan komoditas unggulan perikanan budidaya	01 - Persentase peningkatan produksi komoditas unggulan per tahun Provinsi Papua Barat - perikanan budidaya	5	4—6 %	0,0 ^(a)	KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
02.07.02.14 PRO-P: Pengembangan Komoditas Unggulan Perikanan Budidaya di Provinsi Papua	01 - Terlaksananya pengembangan komoditas unggulan perikanan budidaya	01 - Persentase peningkatan produksi komoditas unggulan per tahun Provinsi Papua - perikanan budidaya	5	5—7 %	0,0 ^(a)	KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
02.07.03 KP: Pengembangan Kawasan Perkotaan	01 - Berkembangnya kawasan perkotaan	01 - Skor Indeks Kota Berkelanjutan/IKB Kota Jayapura (angka perhitungan sementara)	5	46,56	123.805,8	
		02 - Skor Indeks Kota Berkelanjutan/IKB Kota Baru Sorong (angka perhitungan sementara)	5	40,14		
	02 - Berkembangnya kota besar, kota sedang, kota kecil sebagai PKN/PKW	01 - Jumlah kota besar, sedang, kecil yang dikembangkan sebagai PKN/PKW	5	1 kota		
	03 - Terbangunnya kota baru	01 - Jumlah kota baru yang dibangun	5	1 kota		
02.07.03.01 PRO-P: Pengembangan Kota Besar, Kota Sedang, Kota Kecil di Provinsi Papua	01 - Berkembangnya kota besar, kota sedang, kota kecil sebagai PKN/PKW	01 - Jumlah kota besar, sedang, kecil yang dikembangkan sebagai PKN/PKW	5	1 kota	24.412,2	KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
02.07.03.02 PRO-P: Pembangunan kota baru di Provinsi Papua Barat	01 - Terbangunnya kota baru	01 - Jumlah kota baru yang dibangun	5	1 kota	99.393,6	KEMENTERIAN PERHUBUNGAN, KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

PN/PP/KP/ProP	Sasaran	Indikator	Dukungan Terhadap Arah Presiden	Target	Rp. Juta	Instansi Pelaksana
02.07.04 KP: Pengembangan Daerah Tertinggal, Kawasan Perbatasan, Perdesaan, dan Transmigrasi	01 - Terbangunnya Desa Terpadu, Kawasan Perdesaan, dan Kawasan Transmigrasi	01 - Rata-rata Indeks Desa Wilayah Papua	1, 5	35,30	4.787.501,0	
		02 - Rata-rata nilai indeks perkembangan Kawasan Perdesaan Prioritas Nasional	1, 5	43,81		
		03 - Rata-rata nilai Indeks Perkembangan Kawasan Transmigrasi yang Direvitalisasi di Pulau Papua	5	37,98		
		04 - Persentase penduduk miskin perdesaan Wilayah Papua	1	34,6—34,8 %		
	02 - Berkembangnya Pusat Kegiatan Strategis Nasional (PKSN), Lokasi Prioritas Perbatasan, dan Daerah Tertinggal	01 - Jumlah Daerah Tertinggal	5	30 kabupaten		
		02 - Rata-rata nilai Indeks Pengelolaan Kawasan Perbatasan	5	0,54		
		03 - Jumlah kecamatan lokasi prioritas perbatasan negara yang ditingkatkan kesejahteraan dan tata kelolanya	5	27 kecamatan		
02.07.04.01 PRO-P: SDM Unggul, Inovatif, Berkarakter dan Kontekstual Papua	01 - Meningkatnya akses dan kualitas pelayanan kesehatan dan pendidikan di wilayah Papua	01 - Rata-rata Umur Harapan Hidup (UHH) di wilayah Papua	1	66,1—66,6 tahun	499.100,8	KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, KEMENTERIAN KESEHATAN, KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI, KEMENTERIAN PERTANIAN, KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN, KEMENTERIAN AGAMA, KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN, KEMENTERIAN SOSIAL, KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI,
		02 - Rerata Rata-rata Lama Sekolah (RLS) di wilayah Papua	1	7,2—7,7 tahun		
		03 - Rata-rata Harapan Lama Sekolah (HLS) di wilayah Papua	1	12,2—12,7 tahun		



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

PN/PP/KP/ProP	Sasaran	Indikator	Dukungan Terhadap Arah Presiden	Target	Rp. Juta	Instansi Pelaksana
						KEMENTERIAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF/BADAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF, KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN, BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL (BKKBN)
02.07.04.02 PRO-P: Peningkatan Kesejahteraan dan Tata Kelola di Kecamatan Lokasi Prioritas di Provinsi Papua	01 - Meningkatnya kesejahteraan dan tata kelola di kecamatan lokasi prioritas di Provinsi Papua	01 - Jumlah kecamatan lokasi prioritas perbatasan negara yang ditingkatkan kesejahteraan dan tata kelolanya di Provinsi Papua	5	24 kecamatan	53.986,2	KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI, KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN, DAK
02.07.04.04 PRO-P: Pembangunan Desa Terpadu di Provinsi Papua	01 - Terlaksananya Pembangunan Desa Terpadu Provinsi Papua	01 - Peningkatan rata-rata Indeks Desa Provinsi Papua-	1, 5	33,45	2.392.808,9	KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI, KEMENTERIAN DALAM NEGERI, BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA (BNPB), KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN, KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI, BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL (BKKBN), KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
02.07.04.07 PRO-P: Infrastruktur Dasar dan Ekonomi	01 - Meningkatnya konektivitas di wilayah Papua	01 - Panjang jalan yang dibangun dan ditingkatkan di wilayah Papua	2	70 km	1.660.194,1	KEMENTERIAN PERHUBUNGAN, KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA, KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL, KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT,
		02 - Jumlah pelabuhan laut yang dibangun dan dikembangkan di wilayah Papua	2	2 lokasi		



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

PN/PP/KP/ProP	Sasaran	Indikator	Dukungan Terhadap Arahan Presiden	Target	Rp. Juta	Instansi Pelaksana
		03 - Jumlah pelabuhan penyeberangan yang dibangun dan dikembangkan di wilayah Papua	2	2 lokasi		KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI, LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK RADIO REPUBLIK INDONESIA, DAK
		04 - Jumlah bandara yang dibangun dan dikembangkan di wilayah Papua	2	7 lokasi		
	02 - Meningkatnya akses infrastruktur dasar di wilayah Papua	01 - Rata-rata Persentase Rumah Tangga dengan Akses Air Minum Layak di wilayah Papua	2	73,0—73,5 %		
		02 - Rata-rata Persentase Rumah Tangga terhadap Sanitasi Layak di wilayah Papua	2	52,2—52,7 %		
		03 - Rata-rata Persentase Rumah Tangga yang Memiliki Akses Terhadap Hunian yang Layak dan Terjangkau di wilayah Papua	2	39,3—39,8 %		
		04 - Rata-rata Rasio Elektrifikasi di wilayah Papua	2	99,7—99,9 %		
		05 - Persentase Desa yang Menerima Sinyal Internet Telepon Seluler 4G di wilayah Papua	2	40,0—40,5 %		
02.07.04.08 PRO-P: Kualitas Lingkungan Hidup dan Ketahanan Bencana	01 - Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup di wilayah Papua	01 - Rata-rata Indeks Kualitas Lingkungan Hidup di wilayah Papua	5	82,8—83,3	66.813,2	KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN, KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT, BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA (BNPb), KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI, BADAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI DAN GEOFISIKA,



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

PN/PP/KP/ProP	Sasaran	Indikator	Dukungan Terhadap Arahan Presiden	Target	Rp. Juta	Instansi Pelaksana
						KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN, KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
02.07.04.26 PRO-P: Pembangunan Kawasan Perdesaan Prioritas Nasional Jayapura dan Merauke	01 - Terlaksananya pembangunan Kawasan Perdesaan Prioritas Nasional Jayapura dan Merauke	01 - Indeks Perkembangan Kawasan Perdesaan Kab. Jayapura dan Merauke	1, 5	44,57	60.748,4	KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BPN, KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI, DAK
02.07.04.27 PRO-P: Revitalisasi Kawasan Transmigrasi Senggi, Salor, dan Muting	01 - Terlaksananya Revitalisasi Kawasan Transmigrasi Senggi, Salor, dan Muting	01 - Rata-rata nilai Indeks Perkembangan Kawasan Transmigrasi yang Direvitalisasi di Provinsi Papua	5	40,62	4.136,2	KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BPN, KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI
02.07.04.29 PRO-P: Pusat Kegiatan Strategis Nasional (PKSN) Jayapura	01 - Berkembangnya Pusat Kegiatan Strategis Nasional (PKSN) Jayapura	01 - Rata-rata nilai Indeks Pengelolaan Kawasan Perbatasan (IPKP) PKSN Jayapura	5	0,43	0,0 ^(a)	KEMENTERIAN PERTANIAN, KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI
02.07.04.30 PRO-P: Pusat Kegiatan Strategis Nasional (PKSN) Merauke	01 - Berkembangnya Pusat Kegiatan Strategis Nasional (PKSN) Merauke	01 - Rata-rata nilai Indeks Pengelolaan Kawasan Perbatasan (IPKP) PKSN Merauke	5	0,64	0,0 ^(a)	KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN, KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI
02.07.04.31 PRO-P: Pusat Kegiatan Strategis Nasional (PKSN) Tanah Merah	01 - Berkembangnya Pusat Kegiatan Strategis Nasional (PKSN) Tanah Merah	01 - Rata-rata nilai Indeks Pengelolaan Kawasan Perbatasan (IPKP) PKSN Tanah Merah	5	0,56	12.142,7	KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT, KEMENTERIAN PERHUBUNGAN, DAK
02.07.04.33 PRO-P: Pembangunan Kawasan Perdesaan Prioritas Nasional Raja Ampat dan Manokwari	01 - Terlaksananya pembangunan Kawasan Perdesaan Prioritas Nasional Raja Ampat dan Manokwari	01 - Indeks Perkembangan Kawasan Perdesaan Kab. Raja Ampat dan Manokwari	1, 5	40,13	31.611,3	KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BPN, KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI, DAK
02.07.04.34 PRO-P: Revitalisasi Kawasan Transmigrasi Werianggi Werabur dan Bomberay - Tomage	01 - Terlaksananya Revitalisasi Kawasan Transmigrasi Werianggi Werabur dan Bomberay - Tomage	01 - Rata-rata nilai Indeks Perkembangan Kawasan Transmigrasi yang Direvitalisasi di Provinsi Papua Barat	5	34,03	4.108,5	KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BPN, KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

PN/PP/KP/ProP	Sasaran	Indikator	Dukungan Terhadap Arahan Presiden	Target	Rp. Juta	Instansi Pelaksana
02.07.04.36 PRO-P: Pembangunan Desa Terpadu di Provinsi Papua Barat	01 - Terlaksananya Pembangunan Desa Terpadu Provinsi Papua Barat	01 - Rata-rata Indeks Desa Provinsi Papua Barat	1, 5	40,85	1.197,3	KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI, KEMENTERIAN DALAM NEGERI, BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA (BNPB), KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN, KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI, BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL (BKKBN), KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
02.07.04.37 PRO-P: Peningkatan Kesejahteraan dan Tata Kelola di Kecamatan Lokasi Prioritas di Provinsi Papua Barat	01 - Meningkatkan kesejahteraan dan tata kelola di kecamatan lokasi prioritas di Provinsi Papua Barat	01 - Jumlah kecamatan lokasi prioritas perbatasan negara yang ditingkatkan kesejahteraan dan tata kelolanya di Provinsi Papua Barat	5	3 kecamatan	0,0 ^(a)	KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI, DAK
02.07.04.38 PRO-P: Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal di Provinsi Papua Barat	01 - Meningkatkan kesejahteraan masyarakat pada daerah tertinggal di Provinsi Papua Barat	01 - Persentase penduduk miskin di daerah tertinggal di Provinsi Papua Barat	1	26,5—27,0 %	0,0 ^(a)	KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI, KEMENTERIAN SOSIAL, KEMENTERIAN PERTANIAN, BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA (BNPB), KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN, KEMENTERIAN PERHUBUNGAN, KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN, KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT, KEMENTERIAN AGAMA, KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL, DAK (Terintegrasi dengan PSN)
		02 - Rata-rata IPM di daerah tertinggal di Provinsi Papua Barat	1	62,2—62,7		



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

PN/PP/KP/ProP	Sasaran	Indikator	Dukungan Terhadap Arahan Presiden	Target	Rp. Juta	Instansi Pelaksana
02.07.04.39 PRO-P: Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal di Provinsi Papua	01 - Meningkatnya kesejahteraan masyarakat pada daerah tertinggal di Provinsi Papua	01 - Persentase penduduk miskin di daerah tertinggal di Provinsi Papua	1	30,6—31,1 %	653,4	KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI, KEMENTERIAN SOSIAL, KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN, KEMENTERIAN PERTANIAN, KEMENTERIAN AGAMA, BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA (BNPB), KEMENTERIAN PERHUBUNGAN, KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT, KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL, LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK RADIO REPUBLIK INDONESIA, DAK
		02 - Rata-rata IPM di daerah tertinggal di Provinsi Papua Barat	1	55,3—55,8		
02.07.05 KP: Kelembagaan dan Keuangan Daerah	01 - Meningkatnya Nilai Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EPPD)	01 - Nilai Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EPPD)	4	2,58	38.095,7	
		02 - Meningkatnya persentase daerah dengan indeks inovasi tinggi	4	30 %		
		03 - Meningkatnya daerah dengan penerimaan daerah meningkat	4	33 daerah		
		04 - Meningkatnya daerah dengan realisasi belanjanya berkualitas	4	34 daerah		
		05 - Meningkatnya reformasi pelayanan perizinan	4	1.227 dokumen		
		01 - Jumlah perizinan yang kewenangannya sudah didelegasikan ke PTSP Prima berbasis elektronik				



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

PN/PP/KP/ProP	Sasaran	Indikator	Dukungan Terhadap Arahan Presiden	Target	Rp. Juta	Instansi Pelaksana
	06 - Meningkatnya daerah yang memiliki PTSP Prima berbasis elektronik	01 - Jumlah daerah yang memiliki PTSP Prima berbasis elektronik	4	2 daerah		
	07 - Meningkatnya tata kelola keuangan daerah yang efektif dan efisien	01 - Jumlah daerah yang melaksanakan tata kelola keuangan yang efektif dan efisien	4	34 daerah		
	08 - Meningkatnya kesepakatan dan perjanjian kerja sama daerah	01 - Jumlah daerah yang mengimplementasikan Kesepakatan dan Perjanjian Kerja Sama Daerah	4	2 daerah		
	09 - Meningkatnya persentase capaian SPM di daerah	01 - Persentase capaian SPM di daerah	4	88,89 %		
	10 - Meningkatnya daerah dengan indeks kinerja GWPP kategori baik	01 - Jumlah daerah dengan indeks kinerja GWPP kategori baik	4	34 daerah		
	11 - Meningkatnya pengelolaan pertanahan dan terselenggarakannya penataan ruang	01 - Luas cakupan bidang tanah bersertipikat yang terdigitasi dan memiliki georeferensi yang baik	5	465.098,60 ha		
		02 - Luas cakupan peta dasar pertanahan	5	678.397 ha		
		03 - Jumlah materi teknis dan rancangan peraturan daerah RDTR Kab/Kota	5	4 materi teknis dan Ranperkada		
		04 - Jumlah persetujuan substansi RDTR Kab/Kota	5	3 persetujuan substansi RDTR		



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

PN/PP/KP/ProP	Sasaran	Indikator	Dukungan Terhadap Arahan Presiden	Target	Rp. Juta	Instansi Pelaksana
		05 - Jumlah materi teknis dan rancangan peraturan daerah RTRW Prov/Kab/Kota	5	3 materi teknis dan Ranperda		
		06 - Jumlah persetujuan substansi RTRW Prov/Kab/Kota	5	3 persetujuan substansi RTRW		
		07 - Nilai Kepastian dan Perlindungan Hak atas Tanah	5	5		
		08 - Jumlah Materi Teknis RTR Nasional (Pulau/Kep dan KSN)	5	1 materi teknis dan Raperpres RTR		
		09 - Jumlah Penanganan Perkara Hasil Penyidikan Pelanggaran Pemanfaatan Ruang	5	5 perkara		
02.07.05.04 PRO-P: Peningkatan Kapasitas Pemerintahan Daerah dan Hubungan Pusat-Daerah di Provinsi Papua Barat	01 - Mempercepat kemudahan berusaha di daerah termasuk reformasi pelayanan perizinan yang berbasis sistem informasi digital (<i>e-gov</i>)	01 - Jumlah perizinan yang kewenangannya sudah didelegasikan ke PTSP Prima berbasis elektronik	4	725 dokumen	3.877,4	KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG POLITIK, HUKUM DAN KEAMANAN, KEMENTERIAN DALAM NEGERI
	02 - Meningkatnya kerja sama daerah	01 - Jumlah daerah yang mengimplementasikan Kesepakatan dan Perjanjian Kerja Sama	4	1 daerah		
	03 - Meningkatnya persentase capaian SPM di daerah	01 - Persentase capaian SPM di daerah	4	89,15 %		
	04 - Meningkatnya persentase daerah dengan Nilai Indeks Inovasi Tinggi	01 - Persentase daerah yang mempunyai Nilai Indeks Inovasi Tinggi	4	30 %		



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

PN/PP/KP/ProP	Sasaran	Indikator	Dukungan Terhadap Arahan Presiden	Target	Rp. Juta	Instansi Pelaksana
	05 - Meningkatnya daerah dengan penerimaan daerah meningkat	01 - Jumlah daerah yang penerimaan daerahnya meningkat	4	11 daerah		
	06 - Meningkatnya daerah dengan realisasi belanjanya berkualitas	01 - Jumlah daerah yang realisasi belanjanya berkualitas	4	11 daerah		
	07 - Meningkatnya tata kelola keuangan daerah yang efektif dan efisien	01 - Jumlah daerah yang melaksanakan tata kelola keuangan daerah yang efektif dan efisien	4	11 daerah		
	08 - Peningkatan penataan hubungan pusat daerah	01 - Jumlah tugas dan wewenang yang dilaksanakan oleh Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat dengan kinerja baik	4	22 rekomendasi		
	09 - Meningkatnya kualitas pelaksanaan kebijakan otonomi (regulasi) pada daerah otonomi khusus, daerah istimewa, dan daerah khusus ibukota negara	01 - Jumlah pelaksanaan kebijakan otonomi (regulasi) pada daerah otonomi khusus, daerah istimewa, dan daerah khusus ibukota negara	4	2 rekomendasi		
02.07.05.05 PRO-P: Pengelolaan dan Pelayanan Pertanahan di Provinsi Papua Barat	01 - Terlaksananya percepatan sertifikasi tanah	01 - Jumlah Sertipikat Hak Atas Tanah	5	6.512 bidang	2.496,9	KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BPN
	02 - Terlaksananya percepatan peta bidang tanah dan ruang	01 - Jumlah bidang tanah	5	25.485 ha		
02.07.05.06 PRO-P: Penyelenggaraan Penataan Ruang di Provinsi Papua Barat	01 - Tersusunnya rencana tata ruang yang berkualitas	01 - Jumlah materi teknis dan rancangan peraturan daerah RDTR Kab/Kota	5	4 materi teknis dan Ranperkada	4.089,6	KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BPN
		02 - Jumlah persetujuan substansi RDTR Kab/Kota	5	22 persetujuan Substansi RDTR		



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

PN/PP/KP/ProP	Sasaran	Indikator	Dukungan Terhadap Arahan Presiden	Target	Rp. Juta	Instansi Pelaksana
		03 - Jumlah materi teknis dan rancangan peraturan daerah RTRW Prov/Kab/Kota	5	2 materi teknis dan Ranperda		
		04 - Jumlah persetujuan substansi RTRW Prov/Kab/Kota	5	2 persetujuan Substansi RTRW		
02.07.05.07 PRO-P: Peningkatan Kapasitas Pemerintahan Daerah dan Hubungan Pusat-Daerah di Provinsi Papua	01 - Mempercepat kemudahan berusaha di daerah termasuk reformasi pelayanan perizinan yang berbasis sistem informasi digital (<i>e-gov</i>)	01 - Jumlah perizinan yang kewenangannya sudah didelegasikan ke PTSP Prima berbasis elektronik	4	502 dokumen	0,0 ^(a)	KEMENTERIAN DALAM NEGERI, KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG POLITIK, HUKUM DAN KEAMANAN
	02 - Meningkatnya kerja sama daerah	01 - Jumlah daerah yang mengimplementasikan Kesepakatan dan Perjanjian Kerja Sama	4	1 daerah		
	03 - Meningkatnya persentase capaian SPM di daerah	01 - Persentase capaian SPM di daerah	4	88,63 %		
	04 - Meningkatnya persentase daerah dengan Nilai Indeks Inovasi Tinggi	01 - Persentase daerah yang mempunyai Nilai Indeks Inovasi Tinggi	4	30 %		
	05 - Meningkatnya daerah dengan penerimaan daerah meningkat	01 - Jumlah daerah yang penerimaannya meningkat	4	22 daerah		
	06 - Meningkatnya daerah dengan realisasi belanjanya berkualitas	01 - Jumlah daerah yang realisasi belanjanya berkualitas	4	23 daerah		



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

PN/PP/KP/ProP	Sasaran	Indikator	Dukungan Terhadap Arahan Presiden	Target	Rp. Juta	Instansi Pelaksana
	07 - Meningkatnya tata kelola keuangan daerah yang efektif dan efisien	01 - Jumlah daerah yang melaksanakan tata kelola keuangan daerah yang efektif dan efisien	4	23 daerah		
	08 - Peningkatan penataan hubungan pusat daerah	01 - Jumlah tugas dan wewenang yang dilaksanakan oleh Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat dengan kinerja baik	4	22 rekomendasi		
	09 - Meningkatnya kualitas pelaksanaan kebijakan otonomi (regulasi) pada daerah otonomi khusus, daerah istimewa, dan daerah khusus ibukota negara	01 - Jumlah pelaksanaan kebijakan otonomi (regulasi) pada daerah otonomi khusus, daerah istimewa, dan daerah khusus ibukota negara	4	2 rekomendasi		
02.07.05.08 PRO-P: Pengelolaan dan Pelayanan Pertanahan di Provinsi Papua	01 - Terlaksananya percepatan sertifikasi tanah	01 - Jumlah Sertipikat Hak Atas Tanah	5	25.614 bidang	4.414,6	KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BPN
	02 - Terlaksananya percepatan peta bidang tanah dan ruang	01 - Jumlah bidang tanah	5	16.773 ha		
02.07.05.09 PRO-P: Penyelenggaraan Penataan Ruang di Provinsi Papua	01 - Tersusunnya rencana tata ruang yang berkualitas	01 - Jumlah materi teknis dan rancangan peraturan daerah RDTR Kab/Kota	5	11 materi teknis dan Ranperkada	2.125,0	KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BPN
		02 - Jumlah persetujuan substansi RDTR Kab/Kota	5	4 persetujuan substansi RDTR		
		03 - Jumlah materi teknis dan rancangan peraturan daerah RTRW Prov/Kab/Kota	5	1 materi teknis dan Ranperda		



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

PN/PP/KP/ProP	Sasaran	Indikator	Dukungan Terhadap Arahan Presiden	Target	Rp. Juta	Instansi Pelaksana
02.07.05.10 PRO-P: Tata Kelola Pemerintahan dan Keamanan dengan Tetap Menghormati HAM	01 - Meningkatnya demokrasi dalam kehidupan bermasyarakat di wilayah Papua	01 - Rata-rata nilai Aspek Kebebasan pada Indeks Demokrasi Indonesia di wilayah Papua	4	80,8—81,3	21.092,1	KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA, KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI, KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BPN, KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG POLITIK, HUKUM DAN KEAMANAN, KEMENTERIAN DALAM NEGERI

CATATAN:

- (1) Sesuai dengan pendekatan THIS, sebuah proyek dapat mendukung lebih dari 1 (satu) Prioritas Nasional;
- (2) Prioritas Nasional mencakup rincian Belanja K/L, Dana Transfer Khusus, dan KPBU, belum mencakup dukungan Badan Usaha (BUMN/Swasta);
- (3) Alokasi DAK merupakan pagu alokasi per subbidang per tematik per daerah berdasarkan Perpres Rincian APBN TA 2023;
- (4) Perubahan rincian dan pendanaan proyek Belanja K/L, DAK Fisik, dan KPBU pada tahun pelaksanaan dapat dilakukan dengan persetujuan Menteri PPN/Kepala Bappenas dan Menteri Keuangan;
- (5) Dukungan Terhadap Arahan Presiden: 1. Pembangunan Sumber Daya Manusia; 2. Pembangunan Infrastruktur; 3. Penyederhanaan Regulasi; 4. Penyederhanaan Birokrasi; dan 5. Transformasi Ekonomi.

KETERANGAN:

(a) *multitagging*.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

PRIORITAS NASIONAL 3 : MENINGKATKAN SUMBER DAYA MANUSIA BERKUALITAS DAN BERDAYA SAING

PN/PP/KP/ProP	Sasaran	Indikator	Dukungan Terhadap Arahan Presiden	Target	Rp. Juta	Instansi Pelaksana	
03 PN: Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing	01 - Terkendalinya pertumbuhan penduduk dan menguatnya tata kelola kependudukan	01 - Angka Kelahiran Total (<i>Total Fertility Rate/TFR</i>)		2,19 per wanita usia subur usia 15—49 tahun	255.529.681,7		
		02 - Persentase cakupan kepemilikan Nomor Induk Kependudukan (NIK)		99,00 %			
		02 - Meningkatnya perlindungan sosial bagi seluruh penduduk	01 - Proporsi penduduk yang tercakup dalam program jaminan sosial				91,00 %
	02 - Proporsi rumah tangga miskin dan rentan yang memperoleh bantuan sosial pemerintah			78,00 %			
	03 - Terpenuhinya layanan dasar bidang kesehatan dan pendidikan		01 - Angka Kematian Ibu (AKI)				194 per 100.000 kelahiran hidup
			02 - Angka Kematian Bayi (AKB)				17,6 per 1.000 kelahiran hidup
			03 - Prevalensi <i>stunting</i> (pendek dan sangat pendek) pada balita				17,50 %
			04 - Insidensi tuberkulosis				211 per 100.000 penduduk
			05 - Jumlah kabupaten/kota yang mencapai eliminasi malaria				385 kabupaten/kota



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

PN/PP/KP/ProP	Sasaran	Indikator	Dukungan Terhadap Arahan Presiden	Target	Rp. Juta	Instansi Pelaksana
		06 - Jumlah kabupaten/kota dengan eliminasi kusta		482 kabupaten/kota		
		07 - Prevalensi obesitas pada penduduk umur > 18 tahun		21,80 %		
		08 - Persentase merokok penduduk usia 10-18 tahun		8,80 %		
		09 - Nilai rata-rata hasil PISA: Membaca		394		
		10 - Nilai rata-rata hasil PISA: Matematika		385		
		11 - Nilai rata-rata hasil PISA: Sains		399		
		12 - Rata-rata lama sekolah penduduk usia 15 tahun ke atas		9,24 tahun		
		13 - Harapan lama sekolah		13,22 tahun		
	04 - Meningkatnya kualitas anak, perempuan, dan pemuda	01 - Indeks Perlindungan Anak (IPA)		71,66		
		02 - Indeks Pembangunan Gender (IPG)		91,17—91,44		
		03 - Indeks Pembangunan Pemuda (IPP)		56,65		
	05 - Meningkatnya aset produktif bagi rumah tangga miskin dan rentan	01 - Persentase rumah tangga miskin dan rentan yang memiliki aset produktif		38,00 %		



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

PN/PP/KP/ProP	Sasaran	Indikator	Dukungan Terhadap Arahan Presiden	Target	Rp. Juta	Instansi Pelaksana
	06 - Meningkatnya produktivitas dan daya saing	01 - Persentase angkatan kerja berpendidikan menengah ke atas		48,00 %		
		02 - Jumlah PT yang masuk ke dalam <i>world class university</i> Top 200		0 PT		
		03 - Jumlah PT yang masuk ke dalam <i>world class university</i> Top 300		1 PT		
		04 - Jumlah PT yang masuk ke dalam <i>world class university</i> Top 500		2 PT		
		05 - Proporsi pekerja yang bekerja pada bidang keahlian menengah dan tinggi		43,00 %		
		06 - Peringkat <i>Global Innovation Index</i>		75—80 peringkat		
03.01 PP: Pengendalian Penduduk dan Penguatan Tata Kelola Kependudukan	01 - Meningkatnya cakupan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil dan menguatnya sistem pemutakhiran data kependudukan	01 - Persentase daerah yang menyelenggarakan layanan terpadu penanggulangan kemiskinan	1	89,00 %	6.146.882,4	
		02 - Persentase provinsi/kabupaten/kota yang memanfaatkan sistem perencanaan, penganggaran dan <i>monitoring</i> evaluasi unit terpadu dalam proses penyusunan program-program penanggulangan kemiskinan	1	80,00 %		
		03 - Persentase daerah yang aktif melakukan pemutakhiran data terpadu penanggulangan kemiskinan	1	90,00 %		



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

PN/PP/KP/ProP	Sasaran	Indikator	Dukungan Terhadap Arahan Presiden	Target	Rp. Juta	Instansi Pelaksana
		04 - Persentase kepemilikan akta kelahiran pada penduduk 0-17 tahun	1	98,00 %		
		05 - Persentase kementerian/lembaga yang mengadopsi kualifikasi standar nasional pendamping pembangunan	1	50 %		
03.01.01 KP: Percepatan Cakupan Administrasi Kependudukan	01 - Meningkatnya percepatan cakupan administrasi kependudukan	01 - Jumlah pedoman/kebijakan/SOP Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan yang disusun	1	50 pedoman/kebijakan/SOP	6.438,6	
03.01.01.01 PRO-P: Perluasan Jangkauan Layanan Administrasi Kependudukan	01 - Terlaksananya perluasan jangkauan layanan administrasi kependudukan	01 - Jumlah inovasi daerah untuk meningkatkan kualitas layanan publik dan reformasi birokrasi di bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil	1	2.056 inovasi	4.438,6	MAHKAMAH AGUNG, KEMENTERIAN DALAM NEGERI
		02 - Persentase cakupan akta kematian dari peristiwa kematian yang dilaporkan	1	100 %		
		03 - Persentase cakupan kepemilikan buku nikah/akta perkawinan pada semua pasangan yang perkawinannya dilaporkan	1	100 %		
		04 - Persentase cakupan kepemilikan akta perceraian pada semua individu yang perceraianya dilaporkan	1	100 %		



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

PN/PP/KP/ProP	Sasaran	Indikator	Dukungan Terhadap Arahan Presiden	Target	Rp. Juta	Instansi Pelaksana
03.01.01.02 PRO-P: Percepatan Kepemilikan Dokumen Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil bagi Kelompok Khusus	01 - Terlaksananya percepatan kepemilikan dokumen pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil bagi kelompok khusus	01 - Jumlah daerah di wilayah 3T yang mendapatkan peningkatan layanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil yang mudah dan inovatif	1	50 daerah	2.000,0	KEMENTERIAN DALAM NEGERI
		02 - Persentase penduduk rentan yang terselesaikan pengurusan dokumennya	1	80 %		
03.01.02 KP: Integrasi Sistem Administrasi Kependudukan	01 - Menguatnya integrasi sistem administrasi kependudukan	01 - Jumlah Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) yang dikembangkan dan diintegrasikan	1	1 sistem	26.583,6	
03.01.02.01 PRO-P: Penguatan Integrasi Data Administrasi Kependudukan	01 - Menguatnya integrasi data administrasi kependudukan	01 - Jumlah lembaga pengguna yang menandatangani kerja sama pemanfaatan data kependudukan nasional untuk pelayanan publik	1	350 lembaga pengguna	4.913,6	KEMENTERIAN DALAM NEGERI
		02 - Jumlah lembaga pengguna yang memanfaatkan data kependudukan nasional untuk pelayanan publik	1	1.250 lembaga pengguna		
03.01.02.02 PRO-P: Pengembangan Data dan Informasi Kependudukan (Statistik Hayati) yang Akurat, Lengkap dan Tepat Waktu	01 - Terlaksananya pengembangan data dan informasi kependudukan (statistik hayati) yang akurat, lengkap, dan tepat waktu	01 - Jumlah <i>database</i> kependudukan yang <i>update</i>	1	1 <i>database</i>	21.670,0	BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL (BKKBN), KEMENTERIAN DALAM NEGERI
03.01.03 KP: Pendampingan dan Layanan Terpadu	01 - Meningkatnya kualitas pendampingan dan layanan terpadu	01 - Persentase daerah yang menyelenggarakan layanan terpadu penanggulangan kemiskinan	1	89 %	5.965.874,0	



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

PN/PP/KP/ProP	Sasaran	Indikator	Dukungan Terhadap Arahan Presiden	Target	Rp. Juta	Instansi Pelaksana
		02 - Persentase provinsi/kabupaten/kota yang memanfaatkan sistem perencanaan, penganggaran, dan <i>monitoring</i> evaluasi unit terpadu dalam proses penyusunan program-program penanggulangan kemiskinan	1	80 %		
		03 - Persentase daerah yang aktif melakukan pemutakhiran data terpadu penanggulangan kemiskinan	1	90 %		
		04 - Persentase pengembangan standar nasional pendamping pembangunan (%)	1	95 %		
		05 - Persentase penyetaraan jenjang kualifikasi pendamping pembangunan yang dikembangkan (%)	1	50 %		
		06 - Persentase kementerian/lembaga yang mengadopsi kualifikasi standar nasional pendamping pembangunan	1	50 %		
03.01.03.01 PRO-P: Penyelenggaraan Sistem Layanan dan Rujukan Terpadu	01 - Terlaksananya dan rujukan bagi penduduk miskin dan rentan	01 - Jumlah kabupaten/ kota yang mengembangkan SLRT (kabupaten/kota)	1	514 kabupaten/kota	4.000.202,2	KEMENTERIAN SOSIAL, KEMENTERIAN DALAM NEGERI, KEMENTERIAN KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH, KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI, KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
		02 - Jumlah desa/kelurahan yang mengembangkan Pusat Kesejahteraan Sosial	1	1.028 desa/kelurahan		



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

PN/PP/KP/ProP	Sasaran	Indikator	Dukungan Terhadap Arahan Presiden	Target	Rp. Juta	Instansi Pelaksana
03.01.03.02 PRO-P: Penguatan Pendampingan Masyarakat	01 - Terlaksananya penguatan kapasitas dan kapabilitas kelembagaan pendamping pembangunan	01 - Jumlah SDM kesejahteraan sosial yang meningkat kapasitas dan kemampuannya	1	18.000 orang	1.965.671,8	KEMENTERIAN SOSIAL, KEMENTERIAN PERTANIAN, BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL (BKKBN), KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI, KEMENTERIAN DALAM NEGERI
		02 - Jumlah lembaga kesejahteraan sosial yang tereakreditasi	1	6.000 lembaga		
	02 - Terlaksananya pendampingan melalui pendamping desa	01 - Jumlah pendamping desa yang diberdayakan	1	36.000 orang		
03.01.04 KP: Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pengendalian Penduduk	01 - Meningkatnya pemaduan dan sinkronisasi kebijakan pengendalian penduduk	01 - Indeks Kepedulian terhadap Isu Kependudukan	1	53	147.986,2	
03.01.04.01 PRO-P: Sinergitas Kebijakan Pengendalian Penduduk dalam Mewujudkan Penduduk Tumbuh Seimbang	01 - Meningkatnya sinergitas kebijakan pengendalian penduduk dalam mewujudkan penduduk tumbuh seimbang	01 - Persentase pemerintah daerah yang mempergunakan <i>Grand Design</i> Pembangunan Kependudukan (GDPK) sebagai salah satu dasar perencanaan pembangunan daerah	1	75 (prov) & 38 (kab/kota) %	1.000,0	BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL (BKKBN)
03.01.04.02 PRO-P: Penguatan Kapasitas dan Kapabilitas Kelembagaan Kependudukan	01 - Menguatnya kapasitas dan kapabilitas kelembagaan kependudukan	01 - Persentase pemerintah daerah yang memiliki kebijakan pembangunan berwawasan kependudukan	4	75 %	1.307,0	BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL (BKKBN)
03.01.04.03 PRO-P: Pemanfaatan Data dan Informasi Kependudukan	01 - Meningkatnya pemanfaatan data dan informasi kependudukan	01 - Indeks Kualitas Data dan Informasi Program Bangsa Kencana	4	66,51	145.679,2	BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL (BKKBN)



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

PN/PP/KP/ProP	Sasaran	Indikator	Dukungan Terhadap Arahan Presiden	Target	Rp. Juta	Instansi Pelaksana
03.02 PP: Penguatan Pelaksanaan Perlindungan Sosial	01 - Menguatnya pelaksanaan perlindungan sosial dalam menjangkau penduduk miskin dan kelompok rentan	01 - Persentase cakupan kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)	1	91,00 %	135.398.904,2	
		02 - Tingkat kemiskinan penduduk penyandang disabilitas	1	12,00 %		
		03 - Tingkat kemiskinan penduduk lanjut usia	1	10,00 %		
		04 - Pemerintah daerah yang menerapkan prinsip-prinsip inklusif	1	15,00 %		
		05 - Persentase cakupan kepesertaan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan Pekerja Formal	1	67,40 %		
		06 - Persentase cakupan kepesertaan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan Pekerja Informal	1	16,93 %		
03.02.01 KP: Sistem Jaminan Sosial Nasional	01 - Terwujudnya sistem jaminan sosial nasional	01 - Jumlah kajian penguatan dan harmonisasi peraturan perundangan terkait jaminan sosial	1	3 dokumen	46.477.800,0	
03.02.01.01 PRO-P: Pengembangan Program Jaminan Sosial	01 - Terlaksananya perluasan pemahaman publik akan JKN dan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan	01 - Jumlah strategi sosialisasi, advokasi, dan edukasi publik terpadu sistem jaminan sosial nasional	1	1 dokumen	46.471.800,0	KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN, KEMENTERIAN KESEHATAN, KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
		02 - Jumlah penyelenggaraan forum komunikasi dan kemitraan SJSN	1	1 dokumen		



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

PN/PP/KP/ProP	Sasaran	Indikator	Dukungan Terhadap Arahan Presiden	Target	Rp. Juta	Instansi Pelaksana
03.02.01.02 PRO-P: Penguatan Kelembagaan Penyelenggara Sistem Jaminan Sosial Nasional	01 - Terlaksananya penguatan penyelenggara sistem jaminan sosial nasional berbasis data	01 - Jumlah <i>monitoring</i> dan evaluasi terpadu jaminan sosial bidang kesehatan dan bidang ketenagakerjaan berbasis digital	1	1 dokumen/sistem	6.000,0	KEMENTERIAN SOSIAL, KEMENTERIAN DALAM NEGERI, KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN
		02 - Persentase peserta BPJS Kesehatan dan BP Jamsostek yang terintegrasi berbasis NIK	1	100 %		
03.02.02 KP: Bantuan Sosial dan Subsidi Tepat Sasaran	01 - Meningkatnya kualitas penyelenggaraan bantuan sosial dan subsidi tepat sasaran bagi masyarakat miskin dan rentan	01 - Akurasi penyaluran bantuan sosial	1	57 %	87.901.690,7	
		02 - Rumah tangga miskin dan rentan dengan akses layanan keuangan	1	70 %		
		03 - Penyaluran bantuan keluarga untuk kesehatan dan pendidikan	1	8.000.000 keluarga		
		04 - Penyaluran bantuan pangan melalui Kartu Sembako Murah	1	15.600.000 keluarga		
		05 - Penyaluran bantuan LPG 3 kg	1	15.600.000 keluarga		
		06 - Penyaluran bantuan listrik daya 450 VA dan 900 VA	1	15.600.000 keluarga		
03.02.02.01 PRO-P: Penyelenggaraan Bantuan dan Subsidi Tepat Sasaran	01 - Terselenggaranya bantuan dan subsidi tepat sasaran	01 - Jumlah keluarga miskin dan rentan yang memperoleh bantuan sosial tepat sasaran	1	8.000.000 keluarga	87.901.690,7	KEMENTERIAN KEUANGAN, KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL, KEMENTERIAN SOSIAL, KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI, KEMENTERIAN AGAMA,



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

PN/PP/KP/ProP	Sasaran	Indikator	Dukungan Terhadap Arahan Presiden	Target	Rp. Juta	Instansi Pelaksana
		02 - Jumlah keluarga miskin dan rentan yang memperoleh bantuan pangan melalui program kartu sembako murah	1	15.600.000 keluarga		KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT, KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA, BADAN PUSAT STATISTIK (Terintegrasi dengan PSN)
		03 - Jumlah keluarga miskin dan rentan yang memperoleh bantuan subsidi listrik	1	15.600.000 keluarga		
	02 - Tersedianya pasokan hilir migas sesuai kebutuhan	01 - Jumlah keluarga miskin dan rentan yang memperoleh bantuan energi LPG 3 kg	1	15.600.000 keluarga		
		02 - Jumlah volume elpiji 3 kg yang tepat sasaran bagi masyarakat, usaha mikro, nelayan, dan petani sasaran	2	8.000 ribu ton		
03.02.03 KP: Perlindungan Sosial Adaptif	01 - Meningkatnya kualitas penyelenggaraan sistem perlindungan sosial yang adaptif	01 - Penduduk yang memperoleh bantuan sosial bencana dan layanan pencegahan dan kesiapsiagaan bencana	1	500.000 jiwa	181.263,8	
03.02.03.01 PRO-P: Pelaksanaan Perlindungan Sosial yang Adaptif	01 - Terlaksananya perlindungan sosial bagi penduduk korban bencana	01 - Jumlah penduduk korban bencana yang memperoleh bantuan perlindungan sosial bencana alam	1	100.000 jiwa	181.263,8	KEMENTERIAN SOSIAL, BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA (BNPB), KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
		02 - Jumlah penduduk korban bencana yang memperoleh bantuan perlindungan sosial bencana sosial	1	15.000 jiwa		
		03 - Jumlah penduduk korban bencana yang memperoleh layanan psikososial	1	2.000 jiwa		



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

PN/PP/KP/ProP	Sasaran	Indikator	Dukungan Terhadap Arahan Presiden	Target	Rp. Juta	Instansi Pelaksana
03.02.04 KP: Kesejahteraan Sosial	01 - Meningkatnya kualitas kesejahteraan sosial penduduk rentan	01 - Persentase lanjut usia yang memperoleh bantuan kesejahteraan sosial	1	24 %	838.149,6	
		02 - Persentase penyandang disabilitas yang memperoleh bantuan kesejahteraan sosial	1	18 %		
		03 - Jumlah kelompok rentan lain yang memperoleh layanan kesejahteraan sosial	1	45.000 jiwa		
03.02.04.01 PRO-P: Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial yang Inklusif	01 - Terlaksananya penguatan kapasitas dan kelembagaan bagi penyandang disabilitas	01 - Jumlah penyandang disabilitas yang memperoleh layanan kesejahteraan sosial	1	50.000 jiwa	294.725,2	KEMENTERIAN SOSIAL, KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
		02 - Jumlah lembaga kesejahteraan sosial penyandang disabilitas yang memperoleh penguatan kapasitas	1	150 lembaga		
		03 - Jumlah SDM penyelenggara layanan kesejahteraan sosial bagi penyandang disabilitas yang memperoleh peningkatan kapasitas	1	300 jiwa		
03.02.04.02 PRO-P: Penguatan Kelembagaan dan Pemberdayaan Kelanjutusiaan (Lansia Aktif dan Produktif)	01 - Terlaksananya penguatan kelembagaan dan pemberdayaan kelanjutusiaan	01 - Jumlah lanjut usia yang memperoleh layanan kesejahteraan sosial	1	28.000 jiwa	164.656,2	KEMENTERIAN SOSIAL, BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL (BKKBN), KEMENTERIAN KESEHATAN
		02 - Jumlah lembaga kesejahteraan sosial lanjut usia yang memperoleh penguatan kapasitas	1	150 lembaga		



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

PN/PP/KP/ProP	Sasaran	Indikator	Dukungan Terhadap Arahan Presiden	Target	Rp. Juta	Instansi Pelaksana
		03 - Jumlah SDM penyelenggara layanan kesejahteraan sosial bagi lanjut usia yang memperoleh peningkatan kapasitas	1	300 jiwa		
03.02.04.03 PRO-P: Pelaksanaan Perawatan Jangka Panjang Berbasis Komunitas yang Terintegrasi (<i>Long-Term Care</i>)	01 - Terlaksananya perawatan jangka panjang berbasis komunitas yang terintegrasi (<i>Long Term Care</i>)	01 - Jumlah lansia yang memperoleh layanan berbasis komunitas (jiwa)	1	600 jiwa	24.300,0	KEMENTERIAN SOSIAL, BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL (BKKBN)
		02 - Jumlah kabupaten/kota yang menyelenggarakan layanan sosial lanjut usia terintegrasi	1	10 kab/kota		
03.02.04.04 PRO-P: Penguatan Pelayanan Sosial Kelompok Rentan Lainnya	01 - Terlaksananya penguatan kelembagaan dan pemberdayaan bagi korban penyalahgunaan napza	01 - Jumlah korban penyalahgunaan napza yang memperoleh layanan kesejahteraan sosial	1	10.000 jiwa	354.468,2	KEMENTERIAN SOSIAL
		02 - Jumlah institusi penerima wajib lapor yang memperoleh penguatan kapasitas	1	150 lembaga		
		03 - Jumlah SDM penyelenggara layanan kesejahteraan sosial bagi korban penyalahgunaan napza yang memperoleh peningkatan kapasitas	1	300 jiwa		
	02 - Terlaksananya pelayanan kesejahteraan sosial bagi anak	01 - Jumlah anak telantar yang memperoleh layanan kesejahteraan sosial	1	24.000 jiwa		
		02 - Jumlah lembaga kesejahteraan sosial anak yang memperoleh penguatan kapasitas	1	200 lembaga		



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

PN/PP/KP/ProP	Sasaran	Indikator	Dukungan Terhadap Arahan Presiden	Target	Rp. Juta	Instansi Pelaksana
		03 - Jumlah SDM penyelenggara layanan kesejahteraan sosial anak yang memperoleh peningkatan kapasitas	1	300 lembaga		
	03 - Terlaksananya penguatan kelembagaan dan pemberdayaan bagi tuna sosial dan korban tindak kekerasan perdagangan orang	01 - Jumlah tuna sosial dan korban tindak kekerasan perdagangan orang yang memperoleh layanan kesejahteraan sosial	1	8.000 jiwa		
		02 - Jumlah lembaga kesejahteraan sosial tuna sosial dan korban tindak kekerasan perdagangan orang yang memperoleh penguatan kapasitas	1	135 lembaga		
		03 - Jumlah SDM penyelenggara layanan kesejahteraan sosial tuna sosial dan korban tindak kekerasan perdagangan orang yang memperoleh peningkatan kapasitas	1	200 jiwa		
	04 - Terlaksananya penguatan kelembagaan dan pemberdayaan bagi orang dengan HIV	01 - Jumlah orang dengan HIV yang memperoleh layanan kesejahteraan sosial	1	2.000 jiwa		
	05 - Terlaksananya penguatan kelembagaan dan pemberdayaan bagi Komunitas Adat Terpencil	01 - Jumlah warga Komunitas Adat Terpencil yang memperoleh pemberdayaan sosial	1	2.800 KK		



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

PN/PP/KP/ProP	Sasaran	Indikator	Dukungan Terhadap Arahan Presiden	Target	Rp. Juta	Instansi Pelaksana
03.03 PP: Peningkatan Akses dan Mutu Pelayanan Kesehatan	01 - Meningkatnya pelayanan kesehatan menuju cakupan kesehatan semesta, melalui peningkatan kapasitas sistem kesehatan di seluruh wilayah	01 - Persentase persalinan di fasyankes	1	93,0 %	31.653.286,8	
		02 - Angka prevalensi kontrasepsi modern/ <i>modern Contraceptive Prevalence Rate (mCPR)</i>	1	62,92 %		
		03 - Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (<i>unmet need</i>)	1	7,70 %		
		04 - Angka kelahiran remaja umur 15-19 tahun/ <i>Age Specific Fertility Rate (ASFR 15-19)</i>	1	20 kelahiran hidup per 1.000 perempuan		
		05 - Persentase imunisasi dasar lengkap pada anak usia 12-23 bulan	1	75 %		
		06 - Prevalensi <i>wasting</i> (kurus dan sangat kurus) pada balita	1	7,30 %		
		07 - Persentase cakupan penemuan dan pengobatan TBC (<i>TBC Treatment Coverage</i>)	1	90 %		
		08 - Jumlah kabupaten/kota dengan intensifikasi upaya eliminasi malaria	1	110 kabupaten/kota		
		09 - Insidensi HIV	1	0,19 per 1.000 penduduk yang tidak terinfeksi HIV		
		10 - Persentase penderita kusta yang menyelesaikan pengobatan kusta tepat waktu	1	90 %		



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

PN/PP/KP/ProP	Sasaran	Indikator	Dukungan Terhadap Arahan Presiden	Target	Rp. Juta	Instansi Pelaksana
		11 - Jumlah kabupaten/kota sehat	1	380 kabupaten/kota		
		12 - Jumlah kabupaten/kota yang menerapkan Kawasan Tanpa Rokok (KTR)	1	474 kabupaten/kota		
		13 - Persentase fasilitas kesehatan tingkat pertama terakreditasi	1	90 %		
		14 - Persentase rumah sakit terakreditasi	1	95 %		
		15 - Persentase puskesmas dengan jenis tenaga kesehatan sesuai standar	1	71 %		
		16 - Persentase RSUD kab/kota memiliki 4 dokter spesialis dasar & 3 dokter spesialis lainnya	1	85 %		
		17 - Persentase obat memenuhi syarat	1	96 %		
		18 - Persentase makanan memenuhi syarat	1	86 %		
03.03.01 KP: Peningkatan Kesehatan Ibu, Anak, Keluarga Berencana (KB), dan Kesehatan Reproduksi	01 - Meningkatnya kesehatan ibu, anak, Keluarga Berencana (KB), dan kesehatan reproduksi	01 - Persentase imunisasi dasar lengkap pada anak usia 12-23 bulan	1	75 %	4.370.642,2	
		02 - Persentase peserta KB aktif Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	1	27,57 %		



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

PN/PP/KP/ProP	Sasaran	Indikator	Dukungan Terhadap Arahan Presiden	Target	Rp. Juta	Instansi Pelaksana
03.03.01.01 PRO-P: Penurunan Kematian Ibu dan Bayi	01 - Terwujudnya penurunan kematian ibu dan bayi	01 - Persentase persalinan di fasilitas pelayanan kesehatan	1	93,0 %	3.365.006,2	KEMENTERIAN KESEHATAN, BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL (BKKBN), KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, DAK
		02 - Jumlah kabupaten/kota yang mencapai 80% imunisasi dasar lengkap anak usia 0-11 bulan	1	471 kab/kota		
03.03.01.02 PRO-P: Peningkatan KB dan Kesehatan Reproduksi	01 - Meningkatnya KB dan Kesehatan Reproduksi	01 - Persentase tingkat putus pakai pemakaian kontrasepsi (<i>Drop Out/DO</i>)	1	21,59 %	1.005.636,0	BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL (BKKBN), KEMENTERIAN DALAM NEGERI, KEMENTERIAN KESEHATAN, DAK
03.03.02 KP: Percepatan Perbaikan Gizi Masyarakat	01 - Terlaksananya percepatan perbaikan gizi masyarakat	01 - Persentase bayi usia kurang dari 6 bulan mendapat ASI eksklusif	1	55 %	2.978.622,9	
		02 - Persentase ibu hamil Kurang Energi Kronis (KEK)	1	11,5 %		
03.03.02.01 PRO-P: Penurunan <i>Stunting</i>	01 - Terwujudnya penurunan <i>stunting</i>	01 - Persentase kabupaten/kota yang melaksanakan surveilans gizi	1	100 %	2.978.622,9	KEMENTERIAN DALAM NEGERI, KEMENTERIAN KESEHATAN, KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN, KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA, BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN, KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI, BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL (BKKBN), BADAN TENAGA NUKLIR NASIONAL (BATAN), BADAN NASIONAL PENGELOLA PERBATASAN (BNPP), KEMENTERIAN SOSIAL,



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

PN/PP/KP/ProP	Sasaran	Indikator	Dukungan Terhadap Arahan Presiden	Target	Rp. Juta	Instansi Pelaksana
						KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
03.03.03 KP: Peningkatan Pengendalian Penyakit	01 - Meningkatnya pengendalian penyakit	01 - Persentase orang dengan HIV-AIDS yang menjalani terapi ARV (ODHA on ART)	1	55 %	5.932.396,1	
		02 - Persentase angka keberhasilan pengobatan TBC (TBC Success Rate)	1	90 %		
		03 - Jumlah kabupaten/kota yang mencapai eliminasi malaria	1	385 kab/kota		
		04 - Persentase kabupaten/kota yang melaksanakan deteksi dini Hepatitis B dan C pada populasi berisiko	1	100 %		
		05 - Jumlah kabupaten/kota dengan eliminasi kusta	1	482 kab/kota		
		06 - Jumlah kabupaten/kota endemis filariasis yang mencapai eliminasi	1	150 kab/kota		
		07 - Jumlah desa endemis schistosomiasis yang mencapai eliminasi	1	24 desa		
		08 - Jumlah kabupaten/kota yang melakukan deteksi dini faktor risiko Penyakit Tidak Menular (PTM)	1	360 kab/kota		



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

PN/PP/KP/ProP	Sasaran	Indikator	Dukungan Terhadap Arahan Presiden	Target	Rp. Juta	Instansi Pelaksana
		09 - Jumlah kabupaten/kota yang menerapkan Kawasan Tanpa Rokok (KTR)	1	474 kab/kota		
03.03.03.01 PRO-P: Pengendalian Penyakit Menular	01 - Terkendalinya penyakit menular	01 - Persentase ODHA baru ditemukan yang memulai pengobatan ARV	1	90 %	4.018.608,0	KEMENTERIAN KESEHATAN, KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI, KEMENTERIAN PERTANIAN, KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT, KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN, DAK
		02 - Persentase cakupan penemuan dan pengobatan TBC (TBC <i>Treatment Coverage</i>)	1	90 %		
		03 - Jumlah kabupaten/kota yang mencapai API <1/1.000 penduduk	1	495 kab/kota		
		04 - Persentase kabupaten/kota yang melaksanakan deteksi dini Hepatitis B dan C pada populasi berisiko	1	100 %		
		05 - Proporsi kasus kusta baru tanpa cacat	1	90 %		
		06 - Jumlah kabupaten/kota endemis filariasis berhasil menurunkan angka mikrofilaria <1%	1	220 kab/kota		
		07 - Jumlah desa endemis schistosomiasis yang mencapai eliminasi	1	24 desa		
03.03.03.02 PRO-P: Pengendalian Penyakit Tidak Menular	01 - Terkendalinya penyakit tidak menular	01 - Jumlah kabupaten/kota yang melakukan pelayanan terpadu (Pandu) PTM di ≥ 80% puskesmas	1	411 kab/kota	1.913.788,1	KEMENTERIAN KESEHATAN, BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN, DAK



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

PN/PP/KP/ProP	Sasaran	Indikator	Dukungan Terhadap Arahan Presiden	Target	Rp. Juta	Instansi Pelaksana
		02 - Jumlah kabupaten/kota yang menerapkan Kawasan Tanpa Rokok (KTR)	1	474 kab/kota		
03.03.04 KP: Penguatan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (Germas)	01 - Terlaksananya penguatan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (Germas)	01 - Jumlah kabupaten/kota sehat	1	380 kab/kota	462.084,8	
03.03.04.01 PRO-P: Pengembangan Lingkungan Sehat	01 - Terlaksananya pengembangan lingkungan sehat	01 - Persentase desa/kelurahan dengan Stop Buang Air Besar Sembarangan (SBS)	1	70 %	214.317,8	BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN, KEMENTERIAN KESEHATAN, KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
		02 - Jumlah kabupaten/kota sehat	1	380 kab/kota		
03.03.04.02 PRO-P: Penguatan Promosi Germas	01 - Terlaksananya penguatan promosi Germas	01 - Persentase kabupaten/kota yang menerapkan kebijakan Germas	1	45 %	247.767,0	KEMENTERIAN KESEHATAN
		02 - Persentase kabupaten/kota dengan minimal 80% posyandu aktif	1	60 %		
03.03.05 KP: Penguatan Sistem Kesehatan dan Pengawasan Obat dan Makanan	01 - Menguatnya sistem kesehatan dan pengawasan obat dan makanan	01 - Persentase puskesmas tanpa dokter	1	0 %	17.909.540,8	
		02 - Persentase puskesmas dengan jenis tenaga kesehatan sesuai standar	1	71 %		
		03 - Persentase RSUD kab/kota memiliki 4 dokter spesialis dasar & 3 dokter spesialis lainnya	1	85 %		
		04 - Persentase fasilitas kesehatan tingkat pertama terakreditasi	1	90 %		



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

PN/PP/KP/ProP	Sasaran	Indikator	Dukungan Terhadap Arahan Presiden	Target	Rp. Juta	Instansi Pelaksana
		05 - Persentase rumah sakit terakreditasi	1	95 %		
		06 - Persentase puskesmas dengan ketersediaan obat esensial	1	94 %		
		07 - Jumlah kabupaten/kota yang telah melakukan perbaikan tata kelola pembangunan kesehatan	1	55 kab/kota		
		08 - Persentase obat memenuhi syarat	1	96 %		
		09 - Persentase makanan memenuhi syarat	1	86 %		
03.03.05.01 PRO-P: Penguatan Pelayanan Kesehatan Dasar dan Rujukan	01 - Terlaksananya penguatan pelayanan kesehatan dasar dan rujukan	01 - Persentase RS milik pemerintah daerah yang memenuhi Sarana Prasarana dan Alat (SPA) sesuai standar	1	95 %	15.536.778,6	KEMENTERIAN KESEHATAN, KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL, KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA, KEMENTERIAN PERHUBUNGAN, KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA, DAK, KEMENTERIAN PERTAHANAN
		02 - Persentase FKTP yang memenuhi Sarana, Prasarana dan Alat (SPA) sesuai standar	1	95 %		
		03 - Jumlah fasilitas pelayanan kesehatan tingkat pertama yang memenuhi persyaratan survei akreditasi	1	6.110 FKTP		
		04 - Jumlah fasilitas pelayanan kesehatan rujukan yang memenuhi persyaratan survei akreditasi	1	1.169 FKRTL		



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

PN/PP/KP/ProP	Sasaran	Indikator	Dukungan Terhadap Arahan Presiden	Target	Rp. Juta	Instansi Pelaksana
03.03.05.02 PRO-P: Pemenuhan dan Peningkatan Kompetensi Tenaga Kesehatan	01 - Terlaksananya pemenuhan dan peningkatan kompetensi tenaga kesehatan	01 - Persentase puskesmas tanpa dokter	1	0 %	653.727,8	KEMENTERIAN KESEHATAN
		02 - Persentase puskesmas dengan jenis tenaga kesehatan sesuai standar	1	71 %		
		03 - Persentase RSUD kab/kota memiliki 4 dokter spesialis dasar & 3 dokter spesialis lainnya	1	85 %		
03.03.05.03 PRO-P: Pemenuhan dan Peningkatan Daya Saing Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan	01 - Terlaksananya pemenuhan dan peningkatan daya saing sediaan farmasi dan alat kesehatan	01 - Persentase puskesmas dengan ketersediaan obat esensial	1	94 %	377.086,0	KEMENTERIAN KESEHATAN, KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN
		02 - Persentase alat kesehatan memenuhi syarat	1	94 %		
03.03.05.04 PRO-P: Penguatan Tata Kelola, Pembiayaan, Penelitian, dan Pengembangan Kesehatan	01 - Terlaksananya penguatan tata kelola, pembiayaan, penelitian, dan pengembangan kesehatan	01 - Jumlah provinsi/kabupaten/kota yang telah melakukan perbaikan tata kelola program kesehatan	1	55 lokasi	868.869,8	KEMENTERIAN KESEHATAN, BADAN RISET DAN INOVASI NASIONAL (BRIN)
		02 - Jumlah bahan kebijakan teknis pengembangan pembiayaan kesehatan dan jaminan kesehatan yang disusun	1	2 dokumen		
		03 - Persentase rekomendasi kebijakan hasil penelitian dan pengembangan kesehatan yang dimanfaatkan untuk perbaikan pelaksanaan prioritas nasional	1	100 %		



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

PN/PP/KP/ProP	Sasaran	Indikator	Dukungan Terhadap Arahan Presiden	Target	Rp. Juta	Instansi Pelaksana
03.03.05.05 PRO-P: Peningkatan Efektivitas Pengawasan Obat dan Makanan	01 - Terlaksananya peningkatan efektivitas pengawasan obat dan makanan	01 - Persentase obat memenuhi syarat	1	96 %	473.078,6	BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
		02 - Persentase makanan memenuhi syarat	1	86 %		
03.04 PP: Peningkatan Pemerataan Layanan Pendidikan Berkualitas	01 - Meningkatnya pemerataan layanan pendidikan berkualitas	01 - Rasio Angka Partisipasi Kasar (APK) 20 persen termiskin dan 20 persen terkaya: SMA/SMK/MA Sederajat	1	0,82	69.546.435,2	
		02 - Rasio Angka Partisipasi Kasar (APK) 20 persen termiskin dan 20 persen terkaya: Pendidikan Tinggi	1	0,31		
		03 - Proporsi anak di atas batas kompetensi minimal dalam tes PISA (%): Membaca	1	33,00 %		
		04 - Proporsi anak di atas batas kompetensi minimal dalam tes PISA (%): Matematika	1	30,00 %		
		05 - Proporsi anak di atas batas kompetensi minimal dalam tes PISA (%): Sains	1	42,60 %		
		06 - Proporsi anak di atas batas kompetensi minimal dalam asesmen kompetensi: Literasi	1	58,31 %		
		07 - Proporsi anak di atas batas kompetensi minimal dalam asesmen kompetensi: Numerasi	1	39,41 %		



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

PN/PP/KP/ProP	Sasaran	Indikator	Dukungan Terhadap Arahan Presiden	Target	Rp. Juta	Instansi Pelaksana
		08 - Tingkat penyelesaian pendidikan SD/MI/ sederajat	1	98,41 %		
		09 - Tingkat penyelesaian pendidikan SMP/MTs/ sederajat	1	91,08 %		
		10 - Tingkat penyelesaian pendidikan SMA/SMK/MA/ sederajat	1	69,68 %		
		11 - Persentase anak kelas 1 SD/MI/SDLB yang pernah mengikuti Pendidikan Anak Usia Dini	1	63,55 %		
		12 - Angka Partisipasi Kasar (APK) Pendidikan Tinggi (PT)	1	31,89 %		
03.04.01 KP: Peningkatan Kualitas Pengajaran dan Pembelajaran	01 - Meningkatnya kualitas pengajaran dan pembelajaran	01 - Persentase satuan pendidikan yang menerapkan kurikulum yang berlaku	1	100 %	5.297.197,1	
		02 - Persentase satuan pendidikan yang menggunakan hasil asesmen yang terstandar untuk perbaikan pembelajaran	1	100 %		
03.04.01.01 PRO-P: Penerapan Kurikulum dan Pola Pembelajaran Inovatif	01 - Terlaksananya penerapan kurikulum dan pola pembelajaran inovatif	01 - Jumlah perangkat kurikulum dan pembelajaran yang bermutu dalam meningkatkan kualitas pembelajaran	1	2.247 perangkat kurikulum dan pembelajaran	962.161,9	KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI, KEMENTERIAN AGAMA, DAK
		02 - Persentase satuan pendidikan yang memanfaatkan perangkat pembelajaran untuk perbaikan kualitas pembelajaran	1	62 %		



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

PN/PP/KP/ProP	Sasaran	Indikator	Dukungan Terhadap Arahan Presiden	Target	Rp. Juta	Instansi Pelaksana
03.04.01.02 PRO-P: Peningkatan Kompetensi Pendidik	01 - Meningkatnya kompetensi pendidik	01 - Jumlah guru dan tenaga kependidikan yang mengikuti peningkatan kompetensi	1	15.048 orang	2.265.407,9	KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI, KEMENTERIAN AGAMA
03.04.01.03 PRO-P: Penguatan Kualitas Penilaian Pendidikan	01 - Menguatnya kualitas penilaian pendidikan	01 - Persentase satuan pendidikan yang melaksanakan Asesmen Nasional	1	90 %	696.485,9	KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI, KEMENTERIAN AGAMA
03.04.01.04 PRO-P: Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi	01 - Terwujudnya pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi di satuan pendidikan	01 - Persentase pemanfaatan dan pembelajaran berbasis TIK	1	23 %	786.123,1	LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK RADIO REPUBLIK INDONESIA, TELEVISI REPUBLIK INDONESIA, KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI, KEMENTERIAN AGAMA
03.04.01.05 PRO-P: Integrasi <i>Softskill</i> dalam Pembelajaran	01 - Terwujudnya integrasi <i>softskill</i> dalam pembelajaran	01 - Kab/kota yang menerapkan ekstrakurikuler pada satuan pendidikan	1	514 kab/kota	587.018,3	KEMENTERIAN AGAMA, KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
03.04.02 KP: Afirmasi Akses dan Percepatan Wajib Belajar 12 Tahun	01 - Terwujudnya pemerataan akses dan Wajib Belajar 12 Tahun	01 - Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI/SDLB/Sederajat	1	105,98 %	46.955.718,5	
		02 - Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs/SMPLB/Sederajat	1	93,01 %		
		03 - Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/SMK/MA/SMLB/Sederajat	1	85,8 %		
		04 - Angka Partisipasi Kasar (APK) PAUD/RA/BA	1	36,55 %		
03.04.02.01 PRO-P: Sarana dan Prasarana Pendidikan	01 - Terwujudnya sarana dan prasarana pendidikan	01 - Jumlah lembaga/satuan pendidikan yang ditingkatkan kualitas sarana prasarananya	1	17.429 lembaga	21.806.260,5	KEMENTERIAN AGAMA, KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT, DAK,



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

PN/PP/KP/ProP	Sasaran	Indikator	Dukungan Terhadap Arahan Presiden	Target	Rp. Juta	Instansi Pelaksana
						KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
03.04.02.02 PRO-P: Bantuan Pendidikan bagi Anak Kurang Mampu, Daerah Afirmasi, dan Berbakat	01 - Terlaksananya bantuan pendidikan bagi anak kurang mampu, daerah afirmasi, dan berbakat	01 - Persentase penerima bantuan pembiayaan pendidikan yang tepat sasaran	1	100 %	24.285.174,1	KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI, KEMENTERIAN AGAMA
03.04.02.03 PRO-P: Penanganan Anak Tidak Sekolah	01 - Terlaksananya penanganan anak tidak sekolah	01 - Jumlah kabupaten/kota dengan APK SD/MI/SDI-B sekurang-kurangnya 100%	1	478 kab/kota	19.920,0	KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI, KEMENTERIAN AGAMA
		02 - Jumlah kabupaten/kota dengan APK SMP/MTs/SMPLB sekurang-kurangnya 100%	1	87 kab/kota		
		03 - Jumlah kabupaten/kota dengan APK SMA/MA/SMLB sekurang-kurangnya 95%	1	149 kab/kota		
03.04.02.04 PRO-P: Penguatan Pelayanan 1 Tahun Prasekolah	01 - Terlaksananya penguatan pelayanan 1 tahun prasekolah	01 - Jumlah kab/kota dengan persentase siswa kelas 1 yang melalui TK/RA/BA di atas 50%	1	363 kab/kota	844.363,9	KEMENTERIAN AGAMA, KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
03.04.03 KP: Peningkatan Pengelolaan dan Penempatan Pendidik dan Tenaga Kependidikan	01 - Meningkatnya pengelolaan dan penempatan pendidik dan tenaga kependidikan	01 - Persentase daerah yang memiliki Indeks pemerataan guru dan ketersediaan tenaga kependidikan baik	1	34,31%	15.751.471,6	
		02 - Persentase guru dan tenaga kependidikan profesional	1	48,83 %		
03.04.03.01 PRO-P: Revitalisasi LPTK	01 - Terlaksananya revitalisasi LPTK	01 - Jumlah LPTK yang direvitalisasi	1	4 lembaga	40.000,0	KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

PN/PP/KP/ProP	Sasaran	Indikator	Dukungan Terhadap Arahan Presiden	Target	Rp. Juta	Instansi Pelaksana
03.04.03.02 PRO-P: Pendidikan Profesi Guru dan Peningkatan Kualifikasi Pendidik	01 - Terlaksananya pendidikan profesi guru dan peningkatan kualifikasi pendidik	01 - Persentase guru dan tenaga kependidikan bersertifikat pendidik	1	91,74 %	1.419.583,2	KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI, KEMENTERIAN AGAMA
		02 - Persentase guru dan tenaga kependidikan berkualifikasi minimal S1	1	89,21 %		
03.04.03.03 PRO-P: Pemenuhan dan Distribusi Tenaga Pendidik Berbasis Kebutuhan	01 - Terlaksananya pemenuhan dan distribusi tenaga pendidik berbasis kebutuhan	01 - Jumlah kabupaten/kota yang memiliki indeks pemerataan guru Dikdas baik	1	45 kab/kota	786.773,9	KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI, KEMENTERIAN AGAMA
		02 - Jumlah kabupaten/kota yang memiliki indeks pemerataan guru PAUD dan Dikmas baik	1	45 kab/kota		
		03 - Jumlah provinsi yang memiliki indeks pemerataan guru Dikmen dan Diksus baik	1	14 provinsi		
03.04.03.04 PRO-P: Peningkatan Kesejahteraan Pendidik Berbasis Kinerja	01 - Terlaksananya peningkatan kesejahteraan pendidik berbasis kinerja	01 - Jumlah guru dan tenaga kependidikan non-PNS yang mendapatkan tunjangan atau insentif tepat waktu	1	758.119 orang	13.505.114,5	KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI, KEMENTERIAN AGAMA
03.04.04 KP: Penjaminan Mutu Pendidikan	01 - Terwujudnya mutu pendidikan	01 - Persentase satuan pendidikan berakreditasi minimal B (SD/MI)	1	83,37 %	1.510.365,1	
		02 - Persentase satuan pendidikan berakreditasi minimal B (SMP/MTS)	1	78,95 %		
		03 - Persentase satuan pendidikan berakreditasi minimal B (SMA/MA)	1	76,29 %		



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

PN/PP/KP/ProP	Sasaran	Indikator	Dukungan Terhadap Arahan Presiden	Target	Rp. Juta	Instansi Pelaksana
		04 - Perguruan Tinggi terakreditasi A (PT)	1	130 PT		
		05 - Persentase satuan pendidikan berakreditasi minimal B (PAUD)	1	68,03 %		
		06 - Persentase satuan pendidikan berakreditasi minimal B (PNF)	1	59.20 %		
03.04.04.01 PRO-P: Penguatan Kapasitas dan Akselerasi Akreditasi	01 - Terlaksananya penguatan kapasitas dan akselerasi akreditasi	01 - Jumlah satuan pendidikan yang diakreditasi sesuai SNP	1	103.533 satuan pendidikan	381.996,7	KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI, KEMENTERIAN AGAMA
03.04.04.02 PRO-P: Perluasan Budaya Mutu Pendidikan	01 - Terwujudnya perluasan budaya mutu pendidikan	01 - Jumlah SNP yang dikembangkan untuk penyusunan kebijakan peningkatan mutu pendidikan	1	10 rekomendasi kebijakan	1.128.368,5	KEMENTERIAN AGAMA, KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
03.04.05 KP: Peningkatan Tata Kelola Pendidikan	01 - Meningkatnya tata kelola pendidikan	01 - Persentase kab/kota memenuhi SPM pendidikan	1	100 %	31.682,9	
03.04.05.01 PRO-P: Penguatan Tata Kelola Pemenuhan SPM Pendidikan	01 - Terlaksananya penguatan tata kelola pemenuhan SPM pendidikan	01 - Jumlah provinsi memenuhi SPM pendidikan	1	34 provinsi	26.528,0	KEMENTERIAN DALAM NEGERI, KEMENTERIAN AGAMA
03.04.05.02 PRO-P: Penguatan Strategi Pembiayaan dan Efektivitas Pemanfaatan Anggaran Pendidikan	01 - Menguatnya Strategi Pembiayaan dan Efektivitas Pemanfaatan Anggaran Pendidikan	01 - Jumlah kab/kota yang difasilitasi dana transfer daerah bidang pendidikan	1	514 kab/kota	0,0 ^(a)	KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

PN/PP/KP/ProP	Sasaran	Indikator	Dukungan Terhadap Arahan Presiden	Target	Rp. Juta	Instansi Pelaksana
03.04.05.03 PRO-P: Peningkatan Sinkronisasi Data Pokok Pendidikan	01 - Meningkatnya sinkronisasi data pokok pendidikan	01 - Persentase pendayagunaan dan pelayanan data pokok pendidikan dan kebudayaan	1	95,33 %	4.057,9	KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI, KEMENTERIAN AGAMA
03.04.05.04 PRO-P: Sinkronisasi Pelaksanaan PAUD-HI	01 - Terwujudnya sinkronisasi pelaksanaan PAUD-HI	01 - Jumlah kab/kota yang menyediakan layanan PAUD-HI	1	100 kab/kota	1.097,1	KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
03.05 PP: Peningkatan Kualitas Anak, Perempuan, dan Pemuda	01 - Menguatnya perlindungan anak dan perempuan dari kekerasan, pemberdayaan perempuan di ekonomi, politik, dan ketenagakerjaan, serta partisipasi pemuda dalam kegiatan sosial kemasyarakatan, organisasi, berwirausaha dan pencegahan perilaku berisiko	01 - Persentase perempuan umur 20-24 tahun yang menikah sebelum 18 tahun	1	9,08 %	770.502,1	
		02 - Prevalensi anak usia 13-17 tahun yang pernah mengalami kekerasan sepanjang hidupnya	1	menurun		
		03 - Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	1	75,60—77,18		
		04 - Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Perempuan	1	54,38 %		
		05 - Prevalensi kekerasan terhadap perempuan usia 15-64 tahun di 12 bulan terakhir	1	menurun		
		06 - Persentase pemuda (16-30 tahun) yang mengikuti kegiatan sosial kemasyarakatan dalam tiga bulan terakhir	1	meningkat		



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

PN/PP/KP/ProP	Sasaran	Indikator	Dukungan Terhadap Arahan Presiden	Target	Rp. Juta	Instansi Pelaksana
		07 - Persentase pemuda berumur 16-30 tahun yang mengikuti kegiatan organisasi dalam tiga bulan terakhir	1	meningkat		
		08 - Persentase pemuda (16-30 tahun) yang bekerja dengan status berusaha sendiri dan dibantu buruh (tetap dan tidak tetap) dalam jenis jabatan <i>white collar</i>	1	0,50 %		
		09 - Proporsi pemuda usia 16-30 tahun yang mengalami masalah kesehatan sehingga mengganggu kegiatan/aktivitas sehari-hari selama satu bulan terakhir dalam kelompok usia 16-30 tahun	1	7,05 %		
03.05.01 KP: Pemenuhan Hak dan Perlindungan Anak	01 - Terpenuhiya hak dan perlindungan anak	01 - Indeks Perlindungan Khusus Anak (IPKA)	1	79,39	54.931,4	
		02 - Indeks Pemenuhan Hak Anak (IPHA)	1	69,44		
03.05.01.01 PRO-P: Penjaminan Pemenuhan Hak Anak secara Universal	01 - Terjaminnya pemenuhan hak anak secara universal	01 - Persentase balita yang mendapatkan pengasuhan tidak layak	1	3,51 %	17.507,9	KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI, KEMENTERIAN DALAM NEGERI
		02 - Jumlah provinsi/kab/kota yang memperoleh peringkat KLA	1	315 provinsi/kab/kota		



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

PN/PP/KP/ProP	Sasaran	Indikator	Dukungan Terhadap Arahan Presiden	Target	Rp. Juta	Instansi Pelaksana
03.05.01.02 PRO-P: Perlindungan Anak dari Tindak Kekerasan, Eksploitasi, Penelantaran, dan Perlakuan Salah Lainnya	01 - Terlaksananya perlindungan anak dari tindak kekerasan, eksploitasi, penelantaran, dan perlakuan salah lainnya	01 - Persentase anak berusia 10-17 tahun yang bekerja	1	4,51 %	37.423,4	KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, MAHKAMAH AGUNG, KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA, KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI
		02 - Persentase anak korban kekerasan yang Memerlukan Perlindungan Khusus (MPK) yang mendapat layanan komprehensif	1	75 %		
03.05.02 KP: Peningkatan Kesetaraan Gender, Pemberdayaan, dan Perlindungan Perempuan	01 - Meningkatnya kesetaraan gender, pemberdayaan, dan perlindungan perempuan	01 - Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Perempuan	1	54,38 %	441.350,8	
03.05.02.01 PRO-P: Peningkatan Kesetaraan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	01 - Meningkatnya kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan	01 - Indeks PUG Nasional	1	74,20	389.420,6	KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, KEMENTERIAN DALAM NEGERI, KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN, KEMENTERIAN SOSIAL, KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI, KOMISI PEMILIHAN UMUM, KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA
		02 - Persentase anggaran responsif gender	1	8,76 %		
03.05.02.02 PRO-P: Perlindungan Perempuan dari Kekerasan	01 - Meningkatnya perlindungan perempuan dari kekerasan	01 - Persentase perempuan korban kekerasan dan TPPO yang mendapat layanan komprehensif	1	90 %	51.930,2	KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, KEMENTERIAN DALAM NEGERI, MAHKAMAH AGUNG, KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA, KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA, BADAN PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA (BP2MI)



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

PN/PP/KP/ProP	Sasaran	Indikator	Dukungan Terhadap Arahan Presiden	Target	Rp. Juta	Instansi Pelaksana
03.05.03 KP: Kualitas Pemuda	01 - Terwujudnya pemuda yang berkarakter dan berdaya saing	01 - Persentase pemuda (16-30 tahun) yang mengikuti kegiatan sosial kemasyarakatan dalam 3 bulan terakhir	1	meningkat	274.220,0	
		02 - Persentase usia pemuda 16-30 tahun yang sedang tidak sekolah, bekerja atau mengikuti pelatihan	1	23,58 %		
03.05.03.01 PRO-P: Penguatan Kapasitas Kelembagaan dan Koordinasi Lintas Sektor Layanan Kepemudaan	01 - Terwujudnya penguatan kapasitas kelembagaan dan koordinasi lintas sektor layanan kepemudaan	01 - Persentase provinsi yang melakukan penyusunan RAD kepemudaan	1	75 %	2.500,0	KEMENTERIAN DALAM NEGERI, KEMENTERIAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
		02 - Persentase tim koordinasi lintas sektor layanan kepemudaan di tingkat pusat dan provinsi yang terbentuk	1	75 %		
03.05.03.02 PRO-P: Pencegahan Perilaku Berisiko	01 - Terlindunginya pemuda dari perilaku berisiko	01 - Persentase pemuda berusia 16-30 tahun yang pernah merokok dalam sebulan terakhir dalam kelompok usia 16-30 tahun	1	24,92 %	20.750,0	KEMENTERIAN KESEHATAN, BADAN NARKOTIKA NASIONAL (BNN), BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL (BKKBN), KEMENTERIAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
03.05.03.03 PRO-P: Partisipasi Aktif Sosial dan Politik Pemuda	01 - Meningkatnya partisipasi sosial dan politik pemuda	01 - Persentase pemuda (16-30 tahun) yang mengikuti kegiatan organisasi dalam 3 bulan terakhir	1	meningkat	250.970,0	KEMENTERIAN PEMUDA DAN OLAHRAGA, KEMENTERIAN KESEHATAN, KEMENTERIAN DALAM NEGERI, BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA, KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN, KEMENTERIAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF/BADAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF, KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

PN/PP/KP/ProP	Sasaran	Indikator	Dukungan Terhadap Arahan Presiden	Target	Rp. Juta	Instansi Pelaksana
03.06 PP: Pengentasan Kemiskinan	01 - Memperluas akses aset produktif bagi rumah tangga miskin dan rentan	01 - Persentase rumah tangga miskin dan rentan yang mengakses pendanaan usaha	1	45 %	495.763,6	
		02 - Jumlah rumah tangga yang memperoleh akses kepemilikan tanah	1	261.136 rumah tangga		
03.06.01 KP: Akselerasi Penguatan Ekonomi Keluarga	01 - Terakselerasinya penguatan ekonomi keluarga miskin	01 - Keluarga miskin dan rentan yang memperoleh modal usaha ultra mikro	1	0,15 %	20.877,4	
03.06.01.01 PRO-P: Fasilitasi Modal Usaha	01 - Terfasilitasinya modal usaha bagi keluarga miskin dan rentan	01 - Jumlah keluarga miskin dan rentan yang memperoleh modal usaha ultra mikro	1	3.500.000 keluarga	20.877,4	KEMENTERIAN KEUANGAN
03.06.02 KP: Keperantaraan Usaha dan Dampak Sosial	01 - Terlaksananya pengembangan keperantaraan usaha dan pemberdayaan sosial	01 - Jumlah lembaga yang mengembangkan keperantaraan usaha (lembaga)	1	4.200 lembaga	84.972,9	
		02 - Jumlah pendamping kelompok masyarakat yang ditingkatkan kapasitasnya (orang)	1	2.500 orang		
03.06.02.01 PRO-P: Fasilitasi Keperantaraan Usaha Produktif	01 - Meningkatnya lembaga yang memperoleh fasilitasi keperantaraan usaha	01 - Jumlah BUMDes yang dikembangkan	1	500 badan usaha	76.611,4	KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI, KEMENTERIAN KEUANGAN
03.06.02.02 PRO-P: Penguatan Pemberdayaan Berdampak Sosial	01 - Menguatnya pemberdayaan berdampak sosial	01 - Jumlah kelompok yang memperoleh layanan kesejahteraan sosial dari dunia usaha (kelompok)	1	200 badan usaha	4.422,9	KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI, KEMENTERIAN SOSIAL



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

PN/PP/KP/ProP	Sasaran	Indikator	Dukungan Terhadap Arahan Presiden	Target	Rp. Juta	Instansi Pelaksana
03.06.02.03 PRO-P: Penyuluhan dan/atau Pendampingan bagi Kelompok Masyarakat Lingkungan Hidup dan Kehutanan	01 - Terlaksananya penyuluhan dan/atau pendampingan bagi kelompok masyarakat lingkungan hidup dan kehutanan	01 - Jumlah KTH mandiri (unit)	1	30 kelompok	3.938,6	KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
		02 - Jumlah lembaga pelatihan pemagangan usaha kehutanan swadaya masyarakat/LP2UKS (pembentukan wanawiyata widyakarya) (unit)	1	20 kelompok masyarakat		
		03 - Jumlah penyuluh dan/atau pendamping yang andal (perhutanan sosial, RHL, KPH, gambut, dan kemitraan konservasi) (orang)	1	1.000 orang		
03.06.03 KP: Reforma Agraria	01 - Terlaksananya reforma agraria	01 - Penurunan Indeks Gini Ketimpangan Pemilikan Tanah	5	0,0047	285.070,6	
		02 - Peningkatan pendapatan per kapita masyarakat penerima reforma agraria	5	20 %		
03.06.03.01 PRO-P: Penataan Penguasaan dan Pemilikan TORA (termasuk Pelepasan Kawasan Hutan)	01 - Terlaksananya penataan penguasaan dan pemilikan TORA (termasuk pelepasan kawasan hutan)	01 - Luas sumber TORA (termasuk pelepasan kawasan hutan) (ha)	5	735.100 ha	18.821,1	KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BPN, KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
03.06.03.02 PRO-P: Peningkatan Kualitas Data Pertanahan dan Legalisasi atas Tora	01 - Terlaksananya legalisasi atas TORA dan meningkatnya kualitas data pertanahan	01 - Jumlah bidang tanah yang didistribusi dan dilegalisasi (bidang)	5	261.136 bidang	109.919,1	KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BPN



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

PN/PP/KP/ProP	Sasaran	Indikator	Dukungan Terhadap Arahan Presiden	Target	Rp. Juta	Instansi Pelaksana
03.06.03.03 PRO-P: Pemberdayaan Masyarakat dalam Penggunaan, Pemanfaatan, dan Produksi atas TORA	01 - Terlaksananya pemberdayaan masyarakat dalam penggunaan, pemanfaatan, dan produksi atas TORA	01 - Jumlah masyarakat yang menerima bantuan pemberdayaan dalam kerangka reforma agraria (KK)	5	114.900 kepala keluarga	156.330,4	KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BPN
03.06.04 KP: Perhutanan Sosial	01 - Terwujudnya kawasan hutan yang dikelola oleh masyarakat	01 - Luas distribusi akses kelola dan manfaat kawasan hutan yang berkeadilan dan berkelanjutan bagi masyarakat (ha)	1	1.750.000 ha	104.842,7	
03.06.04.01 PRO-P: Pengelolaan Kawasan Hutan oleh Masyarakat	01 - Terkelolanya kawasan hutan oleh masyarakat	01 - Luas kawasan hutan yang dikelola oleh masyarakat (ha)	1	1.750.000 ha	104.842,7	KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
03.07 PP: Peningkatan Produktivitas dan Daya Saing	01 - Meningkatkan produktivitas dan daya saing	01 - Jumlah lulusan pelatihan vokasi	1	2,60 juta orang	11.517.907,4	
		02 - Persentase lulusan pendidikan vokasi yang mendapatkan pekerjaan dalam 1 tahun setelah kelulusan	1	36,29 %		
		03 - Persentase lulusan PT yang langsung bekerja dalam jangka waktu 1 tahun setelah kelulusan	1	60,71 %		
		04 - Jumlah prototipe dari perguruan tinggi	5	231 prototipe		
		05 - Jumlah produk inovasi dari tenant Perusahaan Pemula Berbasis Teknologi (PPBT) yang dibina	5	550 produk		
		06 - Jumlah inovasi yang dimanfaatkan industri/ badan usaha	5	180 inovasi		



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

PN/PP/KP/ProP	Sasaran	Indikator	Dukungan Terhadap Arahan Presiden	Target	Rp. Juta	Instansi Pelaksana
		07 - Jumlah permohonan paten yang memenuhi syarat administrasi formalitas KI domestik	5	2.750 paten		
		08 - Jumlah paten <i>granted</i> (domestik)	5	950 paten		
		09 - Persentase sumber daya manusia iptek (dosen, peneliti, perekayasa) berkualifikasi S3	1	17,00 %		
		10 - Jumlah Pusat Unggulan Iptek yang ditetapkan	1	132 PUI		
		11 - Jumlah infrastruktur iptek strategis yang dikembangkan	2	13 infrastruktur		
		12 - Jumlah <i>Science Techno Park</i> yang ada yang dikembangkan berbasis perguruan tinggi	5	5 unit		
		13 - Jumlah <i>Science Techno Park</i> yang ada yang dikembangkan berbasis nonperguruan tinggi	2	3 unit		
		14 - Jumlah produk inovasi dan produk riset Prioritas Riset Nasional yang dihasilkan	5	10 produk		
		15 - Jumlah penerapan teknologi untuk mendukung pembangunan yang berkelanjutan: Penerapan teknologi untuk berkelanjutan pemanfaatan sumber daya alam	5	20 teknologi		



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

PN/PP/KP/ProP	Sasaran	Indikator	Dukungan Terhadap Arahan Presiden	Target	Rp. Juta	Instansi Pelaksana
		16 - Jumlah penerapan teknologi untuk mendukung pembangunan yang berkelanjutan: Penerapan teknologi untuk pencegahan dan mitigasi pascabencana	5	35 teknologi		
		17 - Peringkat pada Asian Games	1	12 peringkat		
		18 - Peringkat pada Asian Para Games	1	8 peringkat		
03.07.01 KP: Pendidikan dan Pelatihan Vokasi Berbasis Kerja Sama Industri	01 - Terlaksananya pendidikan dan pelatihan vokasi berbasis kerja sama industri	01 - Lulusan pendidikan dan pelatihan vokasi bersertifikat kompetensi	1	1.890.345 orang	7.008.947,2	
		02 - PT Vokasi berakreditasi A	1	14 PT Vokasi		
		03 - Jumlah lulusan pendidikan menengah vokasi	1	2.082.084 orang		
		04 - Jumlah lulusan pendidikan tinggi vokasi	1	329.498 orang		
		05 - Jumlah lulusan pelatihan vokasi	1	2,6 juta orang		
		06 - Jumlah pemagangan dalam negeri	1	55.000 orang		
		07 - Jumlah pemagangan luar negeri	1	3.000 orang		
03.07.01.01 PRO-P: Peningkatan Peran dan Kerja Sama Industri dalam Pendidikan dan Pelatihan Vokasi	01 - Meningkatnya peran dan kerja sama industri dalam pendidikan dan pelatihan vokasi	01 - Jumlah kesepakatan kerja sama antara industri/swasta dengan satuan pendidikan vokasi	1	200 kesepakatan	2.144.062,1	KEMENTERIAN PERTANIAN, KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN, KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL, KEMENTERIAN PERHUBUNGAN,



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

PN/PP/KP/ProP	Sasaran	Indikator	Dukungan Terhadap Arahan Presiden	Target	Rp. Juta	Instansi Pelaksana
						KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI, KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN, KEMENTERIAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF/BADAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF, KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI
03.07.01.02 PRO-P: Reformasi Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Vokasi	01 - Terlaksananya reformasi dalam penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan vokasi	01 - Jumlah SMK yang mendapatkan pembinaan untuk meningkatkan kualitas pembelajaran	1	1.101 SMK	3.441.404,7	KEMENTERIAN PERTANIAN, KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN, KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI, KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN, KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN, KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN, KEMENTERIAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF/BADAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF, KEMENTERIAN PERDAGANGAN, KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA, KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI, DAK
03.07.01.03 PRO-P: Peningkatan Kualitas Pendidik Vokasi	01 - Meningkatnya kualitas pendidik vokasi	01 - Jumlah SDM SMK, PT Vokasi, dan kursus/pelatihan yang mendapatkan pelatihan bidang pendidikan	1	8.700 orang	346.295,0	KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI, KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN, KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI
03.07.01.04 PRO-P: Penguatan Tata Kelola Pendidikan dan Pelatihan Vokasi	01 - Menguatnya tata kelola pendidikan dan pelatihan vokasi	01 - Jumlah lembaga pelatihan kerja dan produktivitas yang ditingkatkan kualitas mutu dan lembaga	1	676 lembaga	911.454,1	KEMENTERIAN DALAM NEGERI, KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI, KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

PN/PP/KP/ProP	Sasaran	Indikator	Dukungan Terhadap Arahan Presiden	Target	Rp. Juta	Instansi Pelaksana
03.07.01.05 PRO-P: Penguatan Sistem Sertifikasi Kompetensi	01 - Menguatnya sistem sertifikasi kompetensi	01 - Jumlah tenaga kerja yang mendapatkan sertifikat kompetensi	1	1.890.345 orang	165.731,4	KEMENTERIAN PERTANIAN, KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL, KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN, KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA, KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI, KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN, KEMENTERIAN KESEHATAN, KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI
03.07.02 KP: Penguatan Pendidikan Tinggi Berkualitas	01 - Menguatnya pendidikan tinggi berkualitas	01 - Jumlah publikasi ilmiah di jurnal internasional	1	27.846 artikel	1.214.405,5	
		02 - Jumlah sitasi di jurnal internasional	1	55.526 sitasi		
03.07.02.03 PRO-P: Peningkatan Kualitas Lulusan PT	01 - Meningkatnya kualitas lulusan PT	01 - Jumlah lulusan yang bekerja dalam jangka waktu 1 tahun	1	266.200 orang	1.214.405,5	KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI, KEMENTERIAN KEUANGAN (Terintegrasi dengan PSN)
03.07.03 KP: Peningkatan Kapabilitas Iptek dan Penciptaan Inovasi	01 - Meningkatnya kapabilitas iptek dan penciptaan inovasi	01 - Jumlah paten <i>granted</i> (domestik)	5	950 paten	1.331.294,4	
03.07.03.01 PRO-P: Pemanfaatan Iptek dan Penciptaan Inovasi di Bidang-Bidang Fokus Rencana Induk Riset Nasional 2017-2045 untuk Pembangunan yang Berkelanjutan	01 - Terlaksananya pemanfaatan iptek dan penciptaan inovasi di bidang-bidang Fokus Rencana Induk Riset Nasional 2017-2045 untuk pembangunan yang berkelanjutan	01 - Jumlah hasil inovasi <i>Flagship</i> PRN	1	10 produk	232.132,5	BADAN RISET DAN INOVASI NASIONAL, BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR (BAPETEN)



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

PN/PP/KP/ProP	Sasaran	Indikator	Dukungan Terhadap Arahan Presiden	Target	Rp. Juta	Instansi Pelaksana
03.07.03.02 PRO-P: Pengembangan <i>Research Power-House</i>	01 - Terlaksananya pengembangan <i>Research Power-House</i>	01 - Jumlah SDM iptek yang ditingkatkan kualitasnya	1	350 orang	240.425,0	BADAN RISET DAN INOVASI NASIONAL
03.07.03.03 PRO-P: Penciptaan Ekosistem Inovasi	01 - Terlaksananya penciptaan ekosistem inovasi	01 - Jumlah STP yang ditingkatkan kualitasnya	1	6 lembaga	858.736,9	BADAN RISET DAN INOVASI NASIONAL
03.07.04 KP: Prestasi Olahraga	01 - Meningkatnya prestasi olahraga Indonesia di tingkat internasional	01 - Jumlah perolehan medali pada SEA Games	1	69 medali emas, 92 medali perak, 80 medali perunggu	1.963.260,3	
		02 - Jumlah perolehan medali pada ASEAN Para Games	1	126 medali emas 75 medali perak 50 medali perunggu		
		03 - Jumlah perolehan medali pada Asian Games	1	8 medali emas		
		04 - Jumlah perolehan medali pada Asian Para Games	1	20 medali emas		
		05 - Peringkat pada SEA Games	1	4 peringkat		
		06 - Peringkat pada ASEAN Para Games	1	1 peringkat		
03.07.04.01 PRO-P: Penguatan dan Penataan Regulasi Keolahragaan	01 - Terlaksananya penguatan dan penataan regulasi keolahragaan	01 - Kebijakan turunan UU Keolahragaan, Desain Besar Olahraga Nasional dan terkait Manajemen Talenta Nasional yang Disusun dan Dimanfaatkan	1	6 kebijakan	16.877,5	KEMENTERIAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
03.07.04.02 PRO-P: Pengembangan Budaya Olahraga	01 - Terlaksananya pengembangan budaya olahraga di masyarakat	01 - Persentase penduduk usia 10 tahun ke atas yang berolahraga dalam seminggu terakhir	1	38,46 %	55.084,7	KEMENTERIAN PEMUDA DAN OLAHRAGA



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

PN/PP/KP/ProP	Sasaran	Indikator	Dukungan Terhadap Arahan Presiden	Target	Rp. Juta	Instansi Pelaksana
03.07.04.03 PRO-P: Penataan Sistem Pembinaan Olahraga Berbasis Cabang Olahraga Olimpiade/Paralimpiade dan Potensi Daerah	01 - Terlaksananya penataan sistem pembinaan olahraga berbasis cabang olahraga Olimpiade, Paralimpiade, dan potensi daerah	01 - Persentase olahragawan andalan nasional pada cabang olahraga Olimpik yang merupakan alumni PPLP dan Sekolah Khusus/Keberbakatan Olahraga (SKO)	1	15 %	1.472.961,9	KEMENTERIAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
		02 - Persentase olahragawan andalan nasional pada cabang olahraga Olimpik yang merupakan alumni PPLM	1	5 %		
		03 - Persentase olahragawan andalan nasional pada cabang olahragawan Paralimpik yang merupakan alumni Sekolah Khusus Olahraga Disabilitas Indonesia (SKODI)	1	20 %		
		04 - Persentase sekolah khusus/keberbakatan olahraga yang telah terstandarisasi dan fokus membina cabang olahraga prioritas sesuai Desain Besar Olahraga Nasional	1	36,84 %		
		05 - Persentase PPLPD di tingkat kabupaten/kota yang telah terstandarisasi dan fokus membina cabang olahraga prioritas sesuai Desain Besar Olahraga Nasional	1	4,28 %		
		06 - Persentase olahragawan muda cabang olahraga Olimpik pada olahragawan andalan nasional	1	30 %		



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

PN/PP/KP/ProP	Sasaran	Indikator	Dukungan Terhadap Arahan Presiden	Target	Rp. Juta	Instansi Pelaksana
		07 - Persentase olahragawan muda cabang olahraga Paralimpik pada olahragawan andalan nasional	1	15 %		
		08 - Jumlah pusat pelatihan nasional yang telah beroperasi di daerah sesuai Desain Besar Olahraga	1	10 provinsi		
		09 - Jumlah atlet elit nasional	1	250 orang		
		10 - Jumlah atlet elit junior nasional	1	500 orang		
		11 - Jumlah atlet talenta muda	1	2.850 orang		
03.07.04.04 PRO-P: Penataan Kelembagaan Olahraga	01 - Terlaksananya penataan kelembagaan olahraga	01 - Organisasi keolahragaan berbasis Olimpik yang memenuhi standar minimal keolahragaan	1	21 lembaga	14.165,1	KEMENTERIAN PEMUDA DAN OLARAGA
03.07.04.05 PRO-P: Peningkatan Ketersediaan Tenaga Keolahragaan Berstandar Internasional	01 - Terlaksananya peningkatan ketersediaan tenaga keolahragaan berstandar internasional	01 - Jumlah tenaga keolahragaan Olimpik/Paralimpik yang bersertifikat internasional	1	220 orang	10.598,7	KEMENTERIAN PEMUDA DAN OLARAGA
		02 - Jumlah tenaga keolahragaan Olimpik/Paralimpik yang bersertifikat nasional	1	750 orang		
		03 - Jumlah pelatih olahraga yang bersertifikat internasional	1	30 orang		
		04 - Jumlah pelatih olahraga yang bersertifikat nasional	1	200 orang		



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

PN/PP/KP/ProP	Sasaran	Indikator	Dukungan Terhadap Arahan Presiden	Target	Rp. Juta	Instansi Pelaksana
03.07.04.06 PRO-P: Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga Berstandar Internasional	01 - Peningkatan sarana dan prasarana olahraga berstandar internasional	01 - Jumlah prasarana olahraga berbasis cabang olahraga Olimpiade dan Paralimpiade ramah difabel yang dibangun, direhabilitasi, dan/atau direnovasi	1	4 unit	390.301,8	KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT, KEMENTERIAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
		02 - Jumlah fasilitasi sarana olahraga prestasi berbasis cabang olahraga Olimpik	1	4 lembaga		
03.07.04.07 PRO-P: Pengembangan Peran Dunia Usaha dalam Pendampingan dan Pembiayaan Keolahragaan	01 - Terlaksananya pengembangan peran dunia usaha dalam pendampingan dan pembiayaan keolahragaan	01 - Jumlah pengelola industri olahraga yang terfasilitasi dalam pelatihan SDM industri dan promosi olahraga	1	500 orang	3.270,6	KEMENTERIAN PEMUDA DAN OLAHRAGA

CATATAN:

- (1) Sesuai dengan pendekatan THIS, sebuah proyek dapat mendukung lebih dari 1 (satu) Prioritas Nasional;
- (2) Prioritas Nasional mencakup rincian Belanja K/L, Dana Transfer Khusus, dan KPBU, belum mencakup dukungan Badan Usaha (BUMN/Swasta);
- (3) Alokasi DAK merupakan pagu alokasi per subbidang per tematik per daerah berdasarkan Perpres Rincian APBN TA 2023;
- (4) Perubahan rincian dan pendanaan proyek Belanja K/L, DAK Fisik, dan KPBU pada tahun pelaksanaan dapat dilakukan dengan persetujuan Menteri PPN/Kepala Bappenas dan Menteri Keuangan;
- (5) Dukungan Terhadap Arahan Presiden: 1. Pembangunan Sumber Daya Manusia; 2. Pembangunan Infrastruktur; 3. Penyederhanaan Regulasi; 4. Penyederhanaan Birokrasi; dan 5. Transformasi Ekonomi.

KETERANGAN:

(a) *multitagging*.



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

PRIORITAS NASIONAL 4 : REVOLUSI MENTAL DAN PEMBANGUNAN KEBUDAYAAN

PN/PP/KP/ProP	Sasaran	Indikator	Dukungan Terhadap Arahan Presiden	Target	Rp. Juta	Instansi Pelaksana
04 PN: Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	01 - Menguatnya revolusi mental dan pembinaan ideologi Pancasila untuk memantapkan ketahanan budaya	01 - Indeks Capaian Revolusi Mental		73,13	6.091.100,6	
		02 - Indeks Aktualisasi Nilai Pancasila		79,08		
	02 - Meningkatnya pemajuan kebudayaan untuk meningkatkan peran kebudayaan dalam pembangunan	01 - Indeks Pembangunan Kebudayaan		61,20		
		03 - Meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dan daya rekat sosial	01 - Indeks Pembangunan Masyarakat			
	04 - Menguatnya moderasi beragama untuk mewujudkan kerukunan umat dan membangun harmoni sosial dalam kehidupan masyarakat	01 - Indeks Kerukunan Umat Beragama		75,00		
	05 - Meningkatnya ketahanan keluarga untuk memperkuat karakter bangsa	01 - Indeks Pembangunan Keluarga		59,00		
02 - Median Usia Kawin Pertama Perempuan			22,10 tahun			
06 - Meningkatnya budaya literasi untuk mewujudkan masyarakat berpengetahuan, inovatif, dan kreatif	01 - Nilai Budaya Literasi		68,37			



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

PN/PP/KP/ProP	Sasaran	Indikator	Dukungan Terhadap Arahan Presiden	Target	Rp. Juta	Instansi Pelaksana
04.01 PP: Revolusi Mental dan Pembinaan Ideologi Pancasila untuk Memperkuat Ketahanan Budaya Bangsa dan Membentuk Mentalitas Bangsa yang Maju, Modern, dan Berkarakter	01 - Terwujudnya Indonesia Melayani, Indonesia Bersih, Indonesia Tertib, Indonesia Mandiri, dan Indonesia Bersatu	01 - Nilai Dimensi Gerakan Indonesia Melayani	1	79,30	556.399,7	
		02 - Nilai Dimensi Gerakan Indonesia Bersih	1	72,95		
		03 - Nilai Dimensi Gerakan Indonesia Tertib	1	77,88		
		04 - Nilai Dimensi Gerakan Indonesia Mandiri	1	63,16		
		05 - Nilai Dimensi Gerakan Indonesia Bersatu	1	72,36		
	02 - Terwujudnya aktualisasi nilai-nilai Pancasila	06 - Nilai Dimensi Ketuhanan Yang Maha Esa	1	85,08		
		07 - Nilai Dimensi Kemanusiaan yang Adil dan Beradab	1	78,94		
		08 - Nilai Dimensi Persatuan Indonesia	1	90,02		
		09 - Nilai Dimensi Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/ Perwakilan	1	77,18		
	03 - Meningkatnya peran dan ketahanan keluarga dalam rangka pembentukan karakter	10 - Nilai Dimensi Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia	1	64,19		
		11 - Indeks Kerentanan Keluarga	1	10,50		
		12 - Indeks Karakter Remaja	1	69,42		



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

PN/PP/KP/ProP	Sasaran	Indikator	Dukungan Terhadap Arahan Presiden	Target	Rp. Juta	Instansi Pelaksana
04.01.01 KP: Revolusi Mental dalam Sistem Pendidikan untuk Memperkuat Nilai Integritas, Etos Kerja, Gotong Royong, dan Budi Pekerti	01 - Menguatnya nilai integritas, etos kerja, gotong royong, dan budi pekerti	01 - Persentase satuan pendidikan yang memiliki lingkungan kondusif dalam pembangunan karakter	1	45 %	149.199,0	
04.01.01.01 PRO-P: Pengembangan Budaya Belajar dan Lingkungan Sekolah yang Menyenangkan dan Bebas dari Kekerasan (<i>Bullying Free School Environment</i>)	01 - Berkembangnya budaya belajar dan lingkungan sekolah yang menyenangkan dan bebas dari kekerasan	01 - Persentase provinsi/kabupaten/kota yang mengimplementasikan materi untuk menuntaskan perundungan, kekerasan seksual, dan intoleransi pada satuan Pendidikan	1	65 %	58.381,3	KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI, KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI (KPK)
04.01.01.02 PRO-P: Penguatan Pendidikan Agama, Nilai Toleransi Beragama, dan Budi Pekerti dalam Sistem Pendidikan	01 - Menguatnya pendidikan agama, nilai toleransi beragama, dan budi pekerti dalam sistem pendidikan	01 - Persentase guru pendidikan agama di sekolah keagamaan dan sekolah umum yang dibina dan ditingkatkan kualitasnya	1	64 %	14.222,2	KEMENTERIAN AGAMA
04.01.01.03 PRO-P: Peningkatan Kepeloporan dan Kesukarelawanan Pemuda, serta Pengembangan Pendidikan Kepramukaan	01 - Meningkatkan kepemimpinan, kepeloporan dan kesukarelawanan pemuda dan berkembangnya pendidikan kepramukaan	01 - Jumlah pemuda kader yang difasilitasi dalam pengembangan kepemimpinan dan kepeloporan	1	3.600 orang	76.595,6	KEMENTERIAN PEMUDA DAN OLAHRAGA, KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
04.01.02 KP: Revolusi Mental dalam Tata Kelola Pemerintahan untuk Penguatan Budaya Birokrasi yang Bersih, Melayani, dan Responsif	01 - Menguatnya budaya birokrasi yang bersih, melayani, dan responsif	01 - Skor rata-rata nilai SKM secara nasional	4	84,00	5.200,0	



**PRESIDEN
REPUBLIC INDONESIA**

PN/PP/KP/ProP	Sasaran	Indikator	Dukungan Terhadap Arahan Presiden	Target	Rp. Juta	Instansi Pelaksana
04.01.02.01 PRO-P: Peningkatan Budaya Kerja Pelayanan Publik yang Ramah, Cepat, Efektif, Efisien, dan Terpercaya	01 - Terlaksananya peningkatan budaya kerja pelayanan publik yang ramah, cepat, efektif, efisien, dan terpercaya	01 - Jumlah instansi dengan nilai SKM "Baik"	4	150 instansi	1.000,0	KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI
04.01.02.02 PRO-P: Penerapan Disiplin, <i>Reward</i> dan <i>Punishment</i> dalam Birokrasi	01 - Terlaksananya penerapan disiplin, <i>reward</i> dan <i>punishment</i> dalam birokrasi	01 - Jumlah laporan tindaklanjut permasalahan kepegawaian di bidang kode etik, disiplin, pemberhentian dan pensiun PNS	4	25 laporan	4.200,0	BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA, KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI
04.01.03 KP: Revolusi Mental dalam Sistem Sosial untuk Memperkuat Ketahanan, Kualitas dan Peran Keluarga dan Masyarakat dalam Pembentukan Karakter	01 - Menguatnya sistem sosial untuk memperkuat ketahanan, kualitas dan peran keluarga dan masyarakat dalam pembentukan karakter	01 - Indeks pengasuhan keluarga yang memiliki remaja 02 - Indeks Kemandirian Ekonomi Keluarga	1 1	77,22 35	166.935,7	
04.01.03.01 PRO-P: Penyiapan Kehidupan Berkeluarga dan Kecakapan Hidup	01 - Terlaksananya kehidupan berkeluarga dan kecakapan hidup	01 - Persentase keluarga ikut pembinaan Bina Keluarga Remaja (BKR)	1	35,46 %	146.856,6	BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL (BKKBN), KEMENTERIAN AGAMA
04.01.03.02 PRO-P: Peningkatan Ketahanan Keluarga Berdasarkan Siklus Hidup dengan Memperhatikan Kesenambungan Antargenerasi, Sebagai Upaya Penguatan Fungsi dan Nilai Keluarga	01 - Terlaksananya peningkatan ketahanan keluarga berdasarkan siklus hidup dengan memperhatikan kesinambungan antargenerasi, sebagai upaya penguatan fungsi dan nilai keluarga	01 - Persentase keluarga balita dan anak yang ikut BKB	1	60,00 %	14.500,0	BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL (BKKBN)



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

PN/PP/KP/ProP	Sasaran	Indikator	Dukungan Terhadap Arahan Presiden	Target	Rp. Juta	Instansi Pelaksana
04.01.03.03 PRO-P: Pewujudan Lingkungan yang Kondusif melalui Penguatan Masyarakat, Kelembagaan, Regulasi, Penyediaan Sarana dan Prasarana, serta Partisipasi Dunia Usaha	01 - Terwujudnya lingkungan yang kondusif melalui penguatan masyarakat, kelembagaan, regulasi, penyediaan sarana dan prasarana, serta partisipasi dunia usaha	01 - Persentase Lembaga Masyarakat yang berpartisipasi dalam KG, PHP, dan PA	1	70 %	5.579,1	KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
04.01.04 KP: Penguatan Pusat-Pusat Perubahan Gerakan Revolusi Mental	01 - Terwujudnya penguatan pusat-pusat perubahan dan Gugus Tugas Gerakan Nasional Revolusi Mental	01 - Jumlah pusat perubahan dan Gugus Tugas Gerakan Nasional Revolusi Mental yang memperoleh penguatan	1	100 lembaga	31.863,0	
04.01.04.01 PRO-P: Pemantapan Pelaksanaan Lima Program Gerakan Nasional Revolusi Mental untuk Mewujudkan Indonesia Melayani, Indonesia Bersih, Indonesia Tertib, Indonesia Mandiri, dan Indonesia Bersatu	01 - Terwujudnya penguatan Gugus Tugas GNRM dalam rangka pemantapan pelaksanaan lima program GNRM untuk mewujudkan Indonesia Melayani, Indonesia Bersih, Indonesia Tertib, Indonesia Mandiri, dan Indonesia Bersatu	01 - Jumlah Gugus Tugas Gerakan Nasional Revolusi Mental yang memperoleh penguatan	1	73 lembaga	18.957,5	KEMENTERIAN DALAM NEGERI, KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG POLITIK, HUKUM DAN KEAMANAN, KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN
04.01.04.02 PRO-P: Penguatan Pusat-Pusat Perubahan Gerakan Revolusi Mental di Daerah	01 - Terlaksananya penguatan pusat-pusat perubahan di tingkat daerah	01 - Jumlah pusat perubahan di tingkat daerah yang memperoleh penguatan	1	27 lembaga	12.905,5	KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN
04.01.05 KP: Pembangunan dan Pembudayaan Sistem Ekonomi Kerakyatan Berlandaskan Pancasila	01 - Meningkatnya kualitas koperasi dan kewirausahaan	01 - Jumlah koperasi modern yang dikembangkan 02 - Jumlah wirausaha baru industri kecil yang tumbuh	5 5	340 unit (kumulatif) 16.000 WUB	50.000,0	



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

PN/PP/KP/ProP	Sasaran	Indikator	Dukungan Terhadap Arahan Presiden	Target	Rp. Juta	Instansi Pelaksana
04.01.05.01 PRO-P: Membangun Budaya Ekonomi Nasional dengan Platform Koperasi dalam Kegiatan Usaha Produktif	01 - Terlaksananya pembinaan kepada koperasi	01 - Jumlah koperasi yang menerima pembinaan	5	300 koperasi	9.000,0	KEMENTERIAN KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH
04.01.05.02 PRO-P: Peningkatan Etos Kerja dan Kewirausahaan Berlandaskan Semangat Gotong Royong	01 - Terlaksananya pemyarakatan kewirausahaan	01 - Jumlah masyarakat yang menerima sosialisasi kewirausahaan	5	1.200 orang	18.500,0	KEMENTERIAN KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH
04.01.05.03 PRO-P: Penumbuhan Budaya Konsumen Cerdas dan Cinta Produk Dalam Negeri	01 - Terlaksananya edukasi cinta produk dalam negeri	01 - Jumlah konsumen yang diedukasi cinta produk dalam negeri	5	10.000 orang	22.500,0	KEMENTERIAN PERDAGANGAN
04.01.06 KP: Pembinaan Ideologi Pancasila, Pendidikan Kewarganegaraan, Wawasan Kebangsaan dan Bela Negara untuk Menumbuhkan Jiwa Nasionalisme dan Patriotisme	01 - Terwujudnya jiwa nasionalisme dan patriotisme pada setiap warga negara	01 - Persentase capaian proyek prioritas pada kegiatan prioritas pembinaan ideologi Pancasila, pendidikan kewarganegaraan, wawasan kebangsaan, dan bela negara untuk menumbuhkan jiwa nasionalisme dan patriotisme	1	100 %	153.201,9	
04.01.06.01 PRO-P: Pembinaan Ideologi Pancasila, Penguatan Pendidikan Kewargaan, Nilai-Nilai Kebangsaan dan Bela Negara	01 - Menguatnya pembinaan ideologi Pancasila, pendidikan kewargaan, nilai-nilai kebangsaan dan bela negara	01 - Persentase capaian proyek pada proyek prioritas pembinaan ideologi Pancasila, penguatan pendidikan kewargaan, nilai-nilai kebangsaan dan bela negara	1	100 %	73.840,2	KEMENTERIAN DALAM NEGERI, KEMENTERIAN AGAMA, LEMBAGA KETAHANAN NASIONAL, KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG POLITIK, HUKUM DAN KEAMANAN, BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

PN/PP/KP/ProP	Sasaran	Indikator	Dukungan Terhadap Arahan Presiden	Target	Rp. Juta	Instansi Pelaksana
04.01.06.02 PRO-P: Peningkatkan Peran dan Fungsi Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP)	01 - Terwujudnya peningkatan peran dan fungsi Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP)	01 - Persentase capaian proyek pada proyek prioritas peningkatan peran dan fungsi BPIP	1	100 %	72.007,8	BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA
04.01.06.03 PRO-P: Harmonisasi dan Evaluasi Peraturan Perundang-Undangan yang Bertentangan dengan Ideologi Pancasila.	01 - Terwujudnya harmonisasi dan evaluasi peraturan perundang-undangan yang bertentangan dengan ideologi Pancasila	01 - Jumlah rekomendasi rancangan produk hukum yang bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila	1	3 dokumen	3.926,6	BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA
04.01.06.04 PRO-P: Membersihkan Unsur-Unsur yang Mengancam Ideologi Negara	01 - Terwujudnya pembersihan unsur-unsur yang mengancam ideologi negara	01 - Jumlah rekomendasi hasil evaluasi pendidik dan tenaga kependidikan, penyelenggara negara dan ASN, ormas, organisasi asing, serta media yang terindikasi menentang ideologi negara	1	3 dokumen	3.427,3	BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA
04.02 PP: Meningkatkan Pemajuan dan Pelestarian Kebudayaan untuk Memperkuat Karakter dan Memperteguh Jati Diri Bangsa, Meningkatkan Kesejahteraan Rakyat, dan Memengaruhi Arah Perkembangan Peradaban Dunia	01 - Terbangunnya ekosistem kebudayaan untuk mendukung pemajuan kebudayaan	01 - Nilai Dimensi Warisan Budaya	1	54,85	1.045.990,5	
		02 - Nilai Dimensi Ekspresi Budaya	1	38,60		
		03 - Nilai Dimensi Ekonomi Budaya	1	46,76		
04.02.01 KP: Revitalisasi dan Aktualisasi Nilai Budaya dan Kearifan Lokal	01 - Terwujudnya revitalisasi dan aktualisasi nilai budaya dan kearifan lokal	01 - Persentase cagar budaya dan warisan budaya takbenda yang ditetapkan	1	30 %	253.690,9	



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

PN/PP/KP/ProP	Sasaran	Indikator	Dukungan Terhadap Arahan Presiden	Target	Rp. Juta	Instansi Pelaksana
04.02.01.01 PRO-P: Pelindungan, Pengembangan, dan Pemanfaatan Nilai Budaya, Tradisi, Sejarah dan Kearifan Lokal	01 - Terwujudnya pelindungan, pengembangan, dan pemanfaatan nilai budaya, tradisi, sejarah dan kearifan lokal	01 - Persentase satuan pendidikan yang mempunyai guru yang mengajar muatan lokal dan ekstrakurikuler kesenian	1	34 %	89.843,2	KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
04.02.01.02 PRO-P: Peningkatan Akses dan Kualitas Pelayanan Museum dan Arsip	01 - Terwujudnya peningkatan akses dan kualitas pelayanan museum dan arsip	01 - Jumlah museum milik pemerintah daerah yang ditingkatkan kualitas program publiknya	1	115 unit	123.254,5	KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
04.02.01.03 PRO-P: Pelestarian, Pengembangan dan Pemanfaatan Manuskrip dan Arsip Sebagai Sumber Nilai Budaya, Sejarah, dan Memori Kolektif Bangsa	01 - Terwujudnya pelestarian, pengembangan dan pemanfaatan manuskrip dan arsip sebagai sumber nilai budaya, sejarah, dan memori kolektif bangsa	01 - Persentase peningkatan pelestarian bahan pustaka dan naskah kuno	1	21,18 %	40.593,2	PERPUSTAKAAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA, ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA
04.02.02 KP: Pengembangan dan Pemanfaatan Kekayaan Budaya untuk Memperkuat Karakter Bangsa dan Kesejahteraan Rakyat	01 - Terwujudnya pengembangan dan pemanfaatan kekayaan budaya untuk memperkuat karakter bangsa dan kesejahteraan rakyat	01 - Persentase penduduk yang memiliki sumber penghasilan sebagai pelaku/pendukung kegiatan seni	1	0,50 %	614.105,4	
		02 - Persentase penduduk usia 10 tahun ke atas yang menonton secara langsung pertunjukan kesenian	1	36 %		
04.02.02.01 PRO-P: Pengembangan Produk Seni, Budaya, dan Film	01 - Terwujudnya pengembangan produk seni, budaya, dan film	01 - Jumlah produksi film, musik dan media baru	1	40 produksi	283.504,2	KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
04.02.02.02 PRO-P: Penyelenggaraan Festival Budaya dan Membangun Opera Berkelas Internasional	01 - Terwujudnya penyelenggaraan festival budaya dan membangun opera berkelas internasional	01 - Jumlah <i>event</i> prioritas bidang kebudayaan yang dilaksanakan	1	3 event	158.353,7	KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

PN/PP/KP/ProP	Sasaran	Indikator	Dukungan Terhadap Arahan Presiden	Target	Rp. Juta	Instansi Pelaksana
04.02.02.03 PRO-P: Pengelolaan Cagar Budaya untuk Meningkatkan Kesejahteraan Rakyat	01 - Terwujudnya pengelolaan cagar budaya untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat	01 - Persentase kabupaten/kota yang memiliki Tim Ahli Cagar Budaya dan Tim Ahli Warisan Budaya Takbenda	1	65 %	170.247,6	KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
04.02.02.04 PRO-P: Pengembangan Budaya Bahari dan Sumber Daya Maritim	01 - Terwujudnya pengembangan budaya bahari dan sumber daya maritim	01 - Jumlah komunitas masyarakat hukum adat, tradisional dan lokal di pesisir dan pulau-pulau kecil yang terfasilitasi dalam rangka penguatan dan perlindungannya	1	3 komunitas	2.000,0	KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
04.02.03 KP: Pelindungan Hak Kebudayaan dan Ekspresi Budaya untuk Memperkuat Kebudayaan yang Inklusif	01 - Terwujudnya pelindungan hak kebudayaan dan ekspresi budaya untuk memperkuat kebudayaan yang inklusif	01 - Persentase rumah tangga yang menyelenggarakan upacara adat	1	22,82 %	36.032,8	
04.02.03.01 PRO-P: Pengembangan Wilayah Adat sebagai Pusat Pelestarian Budaya dan Lingkungan Hidup	01 - Terwujudnya pengembangan wilayah adat sebagai pusat pelestarian budaya dan lingkungan hidup	01 - Jumlah wilayah adat yang dikembangkan menjadi ruang interaksi pemajuan kebudayaan	1	10 wilayah adat	21.332,8	KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI, KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BPN
04.02.03.02 PRO-P: Pemberdayaan Masyarakat Adat dan Komunitas Budaya	01 - Terwujudnya pemberdayaan masyarakat adat dan komunitas budaya	01 - Jumlah lembaga kepercayaan dan lembaga adat yang difasilitasi untuk penguatan lembaga	1	40 lembaga	13.700,0	KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
04.02.03.03 PRO-P: Pelindungan Kekayaan Budaya Komunal dan Hak Cipta	01 - Terwujudnya pelindungan kekayaan budaya komunal dan hak cipta	01 - Jumlah data dan informasi KI Komunal yang memiliki nilai ekonomi	1	120 data	1.000,0	KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI, KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

PN/PP/KP/ProP	Sasaran	Indikator	Dukungan Terhadap Arahan Presiden	Target	Rp. Juta	Instansi Pelaksana
04.02.04 KP: Pengembangan Diplomasi Budaya untuk Memperkuat Pengaruh Indonesia dalam Perkembangan Peradaban Dunia	01 - Terlaksananya pengembangan diplomasi budaya untuk memperkuat pengaruh Indonesia dalam perkembangan peradaban dunia	01 - Jumlah festival skala internasional (<i>Mega Events</i>) dengan pengunjung minimal 50.000 orang dan 15 persen di antaranya pengunjung internasional yang dilaksanakan	1	12 festival	17.987,0	
04.02.04.01 PRO-P: Pengembangan Diplomasi Budaya melalui Pengembangan Bahasa Indonesia sebagai Bahasa Internasional, Muhibah Seni Budaya, dan Kuliner Nusantara	01 - Pengembangan diplomasi budaya melalui pengembangan bahasa Indonesia sebagai bahasa internasional, muhibah seni budaya, dan kuliner nusantara	01 - Jumlah negara yang mengajarkan bahasa Indonesia	1	50 negara	17.987,0	KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
04.02.04.02 PRO-P: Penguatan Pusat Studi dan Rumah Budaya Indonesia di Luar Negeri	01 - Meningkatnya partisipasi Indonesia dalam forum internasional bidang kebudayaan	01 - Jumlah partisipasi pada misi dan karavan budaya tingkat dunia	1	2 event	0,0 ^(a)	KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
04.02.05 KP: Pengembangan Tata Kelola Pembangunan Kebudayaan	01 - Terwujudnya pengembangan tata kelola pembangunan kebudayaan	01 - Persentase lembaga kebudayaan pemerintah memperoleh layanan pembinaan museum dan taman budaya	1	80 %	124.174,4	
04.02.05.01 PRO-P: Pengelolaan Dana Perwalian Kebudayaan	01 - Terlaksananya pengelolaan dana perwalian kebudayaan	01 - Jumlah layanan pemanfaatan hasil pengembangan Dana Abadi Kebudayaan	1	1 layanan	0,0 ^(a)	KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
04.02.05.02 PRO-P: Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Kebudayaan	01 - Terwujudnya peningkatan kualitas sumber daya manusia kebudayaan	01 - Jumlah tenaga kebudayaan yang memperoleh peningkatan kapasitas dan sertifikasi	1	980 orang	46.337,8	KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

PN/PP/KP/ProP	Sasaran	Indikator	Dukungan Terhadap Arahan Presiden	Target	Rp. Juta	Instansi Pelaksana
04.02.05.03 PRO-P: Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebudayaan	01 - Terlaksananya peningkatan sarana dan prasarana kebudayaan	01 - Jumlah fasilitasi dan pembinaan kelompok masyarakat	1	150 kelompok masyarakat	70.164,3	KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
04.02.05.04 PRO-P: Pengembangan Sistem Pendataan Kebudayaan Terpadu	01 - Terlaksananya pengembangan sistem pendataan kebudayaan terpadu	01 - Jumlah layanan data dan statistik kebudayaan	1	1 layanan	0,0 ^(a)	KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
04.02.05.05 PRO-P: Pengembangan Kerja Sama dan Kemitraan dalam Pemajuan Kebudayaan	01 - Terlaksananya pengembangan kerja sama dan kemitraan dalam pemajuan kebudayaan	01 - Jumlah layanan umum, kerja sama dan kehumasan bidang kebudayaan	1	1 layanan	7.672,3	KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
04.03 PP: Memperkuat Moderasi Beragama untuk Mengukuhkan Toleransi, Kerukunan, dan Harmoni Sosial	01 - Menguatnya pemahaman dan pengamalan nilai ajaran agama yang toleran, inklusif, dan moderat di kalangan umat beragama	01 - Indeks Kepuasan Layanan Haji	1	85,99	3.813.018,3	
		02 - Indeks Kepuasan Layanan KUA	1	83,00		
		03 - Nilai Dimensi Toleransi	1	72,59		
		04 - Nilai Dimensi Kesetaraan	1	76,53		
		05 - Nilai Dimensi Kerja Sama	1	76,16		
04.03.01 KP: Penguatan Cara Pandang, Sikap, dan Praktik Beragama dalam Perspektif Jalan Tengah untuk Memantapkan Persaudaraan dan Kebersamaan di Kalangan Umat Beragama	01 - Menguatnya cara pandang, sikap, dan praktik beragama dalam perspektif jalan tengah untuk memantapkan persaudaraan dan kebersamaan di kalangan umat beragama	01 - Tingkat moderasi beragama kelompok sasaran penyuluhan agama (persen)	1	90,80 %	1.252.087,0	



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

PN/PP/KP/ProP	Sasaran	Indikator	Dukungan Terhadap Arahan Presiden	Target	Rp. Juta	Instansi Pelaksana
04.03.01.01 PRO-P: Pengembangan Penyiaran Agama untuk Perdamaian dan Kemaslahatan Umat	01 - Terwujudnya pengembangan penyiaran agama untuk perdamaian dan kemaslahatan umat	01 - Rasio penyuluh agama dengan kelompok sasaran yang mendapatkan bimbingan agama	1	1:5	841.640,9	KEMENTERIAN AGAMA, TELEVISI REPUBLIK INDONESIA
04.03.01.02 PRO-P: Penguatan Sistem Pendidikan yang Berperspektif Moderat Mencakup Pengembangan Kurikulum, Materi dan Proses Pengajaran, Pendidikan Guru dan Tenaga Kependidikan, dan Rekrutmen Guru	01 - Menguatnya penguatan sistem pendidikan yang berperspektif moderat mencakup pengembangan kurikulum, materi dan proses pengajaran, pendidikan guru dan tenaga kependidikan, dan rekrutmen guru	01 - Persentase guru pendidikan agama yang dibina dalam moderasi beragama (persen)	1	71,60 %	238.389,1	KEMENTERIAN AGAMA
04.03.01.03 PRO-P: Penguatan Peran Pesantren dalam Mengembangkan Moderasi Beragama melalui Peningkatan Pemahaman dan Pengamalan Ajaran Agama untuk Kemaslahatan	01 - Menguatnya penguatan peran pesantren dalam mengembangkan moderasi beragama melalui peningkatan pemahaman dan pengamalan ajaran agama untuk kemaslahatan	01 - Persentase pesantren yang berwawasan moderat (persen)	1	97,00 %	13.000,0	KEMENTERIAN AGAMA
04.03.01.04 PRO-P: Pengelolaan Rumah Ibadah sebagai Pusat Syiar Agama yang Toleran	01 - Terwujudnya pengelolaan rumah ibadah sebagai pusat syiar agama yang toleran	01 - Persentase rumah ibadah yang ramah (persen)	1	70 %	146.457,6	KEMENTERIAN AGAMA



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

PN/PP/KP/ProP	Sasaran	Indikator	Dukungan Terhadap Arahan Presiden	Target	Rp. Juta	Instansi Pelaksana
04.03.01.05 PRO-P: Pemanfaatan Ruang Publik untuk Pertukaran Ide dan Gagasan di Kalangan Pelajar, Mahasiswa, dan Pemuda Lintas Budaya, Lintas Agama, dan Lintas Suku Bangsa	01 - Terlaksananya pemanfaatan ruang publik untuk pertukaran ide dan gagasan di kalangan pelajar, mahasiswa, dan pemuda lintas budaya, lintas agama, dan lintas suku	01 - Jumlah aktor-aktor kerukunan umat beragama (orang)	1	5.886 orang	12.599,4	KEMENTERIAN AGAMA
04.03.02 KP: Penguatan Harmoni dan Kerukunan Umat Beragama	01 - Terwujudnya penguatan harmoni dan kerukunan umat beragama	01 - Persentase konflik antar umat beragama yang diselesaikan (persen)	1	74 %	353.571,1	.
04.03.02.01 PRO-P: Pelindungan Umat Beragama untuk Menjamin Hak-Hak Sipil dan Beragama	01 - Terwujudnya pelindungan umat beragama untuk menjamin hak-hak sipil dan beragama	01 - Persentase kasus konflik intra umat beragama yang diselesaikan	1	5 %	66.768,5	KEMENTERIAN AGAMA, KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG POLITIK, HUKUM DAN KEAMANAN
04.03.02.02 PRO-P: Penguatan Peran Lembaga Agama, Organisasi Sosial Keagamaan, Tokoh Agama, Tokoh Masyarakat, ASN, TNI, dan Polri sebagai Perikat Persatuan dan Kesatuan Bangsa	01 - Terwujudnya penguatan peran lembaga agama, organisasi sosial keagamaan, tokoh agama, tokoh masyarakat, ASN, TNI, dan Polri sebagai perekat persatuan dan kesatuan bangsa	01 - Persentase lembaga agama dan lembaga keagamaan yang difasilitasi (persen)	1	15 %	225.108,9	KEMENTERIAN AGAMA
04.03.02.03 PRO-P: Penguatan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) untuk Membangun Solidaritas Sosial, Toleransi, dan Gotong Royong	01 - Terwujudnya penguatan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) untuk membangun solidaritas sosial, toleransi, dan gotong royong	01 - Persentase Sekber FKUB yang ditingkatkan layanannya melalui BOP (persen)	1	100 %	61.693,7	KEMENTERIAN DALAM NEGERI, KEMENTERIAN AGAMA



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

PN/PP/KP/ProP	Sasaran	Indikator	Dukungan Terhadap Arahan Presiden	Target	Rp. Juta	Instansi Pelaksana
04.03.03 KP: Penyelarasan Relasi Agama dan Budaya	01 - Terwujudnya penyelarasan relasi agama dan budaya	01 - Persentase kasus konflik budaya dan agama yang diselesaikan (persen)	1	96,25 %	167.183,7	
04.03.03.01 PRO-P: Penghargaan atas Ekspresi Budaya Berbasis Nilai-Nilai Agama	01 - Terwujudnya penghargaan atas ekspresi budaya berbasis nilai-nilai agama	01 - Budaya keagamaan yang dibina dan dikembangkan (kegiatan)	1	100 kegiatan	8.720,6	KEMENTERIAN AGAMA
04.03.03.02 PRO-P: Pengembangan Literasi Khazanah Budaya Bernafas Agama	01 - Terwujudnya pengembangan literasi khazanah budaya bernafas agama	01 - Persentase literasi khazanah budaya bernafas agama yang dihasilkan dan mudah diakses (persen)	1	30 %	102.186,1	KEMENTERIAN AGAMA
04.03.03.03 PRO-P: Pelestarian Situs Keagamaan dan Pemanfaatan Perayaan Keagamaan dan Budaya untuk Memperkuat Toleransi	01 - Terwujudnya pelestarian situs keagamaan dan pemanfaatan perayaan keagamaan dan budaya untuk memperkuat toleransi	01 - Jumlah <i>event</i> keagamaan dan budaya yang menumbuh kembangkan sikap toleran yang difasilitasi	1	131 event	56.277,1	KEMENTERIAN AGAMA
04.03.04 KP: Peningkatan Kualitas Pelayanan Kehidupan Beragama	01 - Terwujudnya peningkatan fasilitasi pelayanan keagamaan	01 - Persentase layanan keagamaan yang memenuhi standar pelayanan (persen)	1	70,33 %	1.923.078,2	
04.03.04.01 PRO-P: Peningkatan Fasilitasi Pelayanan Keagamaan	01 - Terwujudnya fasilitasi pelayanan keagamaan	01 - Jumlah kitab suci dan sarana peribadatan yang difasilitasi (unit)	1	265.000 unit	750.050,5	KEMENTERIAN AGAMA
04.03.04.02 PRO-P: Peningkatan Pelayanan Bimbingan Perkawinan dan Keluarga	01 - Terwujudnya pelayanan bimbingan perkawinan dan keluarga	01 - Jumlah keluarga yang memperoleh bimbingan dan layanan pusaka sakinah/kristiani/bahagia/ <i>sukinah/hittaya sukhaya</i> (keluarga)	1	1.715.500 keluarga	25.507,3	KEMENTERIAN AGAMA



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

PN/PP/KP/ProP	Sasaran	Indikator	Dukungan Terhadap Arahan Presiden	Target	Rp. Juta	Instansi Pelaksana
04.03.04.03 PRO-P: Penguatan Penyelenggaraan Jaminan Produk Halal	01 - Terwujudnya penguatan penyelenggaraan jaminan produk halal	01 - Persentase produk yang tersertifikasi halal (persen)	1	66 %	275.289,8	KEMENTERIAN AGAMA
04.03.04.04 PRO-P: Peningkatan Kualitas Penyelenggaraan Haji dan Umrah	01 - Terwujudnya peningkatan kualitas penyelenggaraan haji dan umrah	01 - Persentase jemaah haji yang mendapatkan pelayanan haji sesuai standar (persen)	1	86,50 %	872.230,5	KEMENTERIAN AGAMA, KEMENTERIAN KESEHATAN
		02 - Petugas haji profesional (persen)	1	87,55 %		
04.03.05 KP: Pengembangan Ekonomi dan Sumber Daya Keagamaan	01 - Terwujudnya pengembangan ekonomi dan sumber daya keagamaan	01 - Persentase penggunaan dana sosial keagamaan untuk mendukung layanan pendidikan dan keagamaan (persen)	1	54 %	117.098,4	
04.03.05.01 PRO-P: Pemberdayaan Dana Sosial Keagamaan	01 - Terwujudnya pemberdayaan dana sosial keagamaan	01 - Persentase partisipasi umat beragama dalam dana sosial keagamaan (persen)	1	29,73 %	32.964,2	KEMENTERIAN AGAMA
04.03.05.02 PRO-P: Pengembangan Kelembagaan Ekonomi Umat	01 - Terwujudnya pengembangan kelembagaan ekonomi umat	01 - Persentase lembaga ekonomi umat berbasis zakat dan wakaf yang mendapat pembinaan (persen)	1	55 %	57.022,4	KEMENTERIAN AGAMA
04.03.05.03 PRO-P: Pengelolaan Dana Haji secara Profesional, Transparan, dan Akuntabel	01 - Terwujudnya pengelolaan dana haji secara profesional, transparan, dan akuntabel	01 - Persentase realisasi pelaksanaan dana operasional haji (persen)	1	98,60 %	27.111,8	KEMENTERIAN AGAMA
04.04 PP: Peningkatan Budaya Literasi, Inovasi, dan Kreativitas Bagi Terwujudnya Masyarakat Berpengetahuan dan Berkarakter	01 - Meningkatnya akses dan kualitas infrastruktur literasi untuk mewujudkan masyarakat berpengetahuan, inovatif, dan kreatif	01 - Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	1	15,00	675.692,1	



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

PN/PP/KP/ProP	Sasaran	Indikator	Dukungan Terhadap Arahan Presiden	Target	Rp. Juta	Instansi Pelaksana
04.04.01 KP: Peningkatan Budaya Literasi	01 - Terwujudnya peningkatan budaya literasi	01 - Rasio ketercukupan koleksi perpustakaan dengan penduduk	1	1:13	367.437,7	
		02 - Rasio ketercukupan tenaga perpustakaan dengan penduduk	1	1:17.000		
		03 - Persentase peningkatan perpustakaan sesuai standar	1	22,39 %		
04.04.01.01 PRO-P: Pengembangan Budaya Kegemaran Membaca	01 - Terwujudnya pengembangan budaya kegemaran membaca	01 - Jumlah peserta yang mengikuti pembudayaan kegemaran membaca dan literasi	1	60.000 orang	73.728,2	KEMENTERIAN DALAM NEGERI, PERPUSTAKAAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA
04.04.01.02 PRO-P: Pengembangan Sistem Perbukuan dan Penguatan Konten Literasi	01 - Terwujudnya pengembangan sistem perbukuan dan penguatan konten literasi	01 - Jumlah SDM perbukuan yang tersertifikasi	1	112 orang	155.273,0	PERPUSTAKAAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA, KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
04.04.01.03 PRO-P: Peningkatan Akses dan Kualitas Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial	01 - Terwujudnya peningkatan akses dan kualitas perpustakaan berbasis inklusi sosial	01 - Jumlah perpustakaan berbasis inklusi sosial	1	1.837 perpustakaan	138.436,5	PERPUSTAKAAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA, KEMENTERIAN SOSIAL
04.04.02 KP: Pengembangan, Pembinaan, dan Pelindungan Bahasa Indonesia, Bahasa dan Aksara Daerah, serta Sastra	01 - Terwujudnya pengembangan, pembinaan, dan pelindungan bahasa Indonesia, bahasa dan aksara daerah, serta sastra	01 - Persentase penutur bahasa Indonesia terbina yang meningkat kualitas berbahasanya	1	70 %	125.448,5	
		02 - Indeks pemanfaatan bahasa daerah oleh penuturnya	1	19,67		
04.04.02.01 PRO-P: Peningkatan Fungsi Bahasa Indonesia menjadi Bahasa Internasional	01 - Terwujudnya peningkatan fungsi bahasa Indonesia menjadi bahasa internasional	01 - Jumlah pemelajar BIPA	1	166.045 orang	30.567,6	KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

PN/PP/KP/ProP	Sasaran	Indikator	Dukungan Terhadap Arahan Presiden	Target	Rp. Juta	Instansi Pelaksana
04.04.02.02 PRO-P: Pengembangan Pendidikan Sastra di Satuan Pendidikan dan Komunitas	01 - Terwujudnya pengembangan pendidikan sastra di satuan pendidikan dan komunitas	01 - Jumlah kosakata bahasa Indonesia	1	182.506 kosakata	51.409,6	KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
		02 - Jumlah orang mahir teruji kemahiran berbahasa Indonesia	1	6.552 orang		
04.04.02.03 PRO-P: Revitalisasi Bahasa dan Aksara Daerah sebagai Khazanah Budaya Bangsa	01 - Terlindunginya bahasa dan sastra daerah yang kritis dan terancam punah	01 - Jumlah partisipan perlindungan bahasa dan sastra daerah	1	15.405 orang	43.471,3	KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
04.04.03 KP: Pengembangan Budaya Iptek, Inovasi, Kreativitas, dan Daya Cipta	01 - Terwujudnya pengembangan budaya iptek, inovasi, kreativitas, dan daya cipta	01 - Jumlah Peserta Program Mobilitas Talenta Riset dan Inovasi	1	10.500 orang	145.588,3	
04.04.03.01 PRO-P: Peningkatan Budaya Riset dan Eksperimentasi Ilmiah Sejak Usia Dini	01 - Meningkatnya kuantitas dan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK)	01 - Jumlah Talenta Muda Riset dan Inovasi yang Dibina	1	9.070 orang	116.884,8	BADAN RISET DAN INOVASI NASIONAL
04.04.03.02 PRO-P: Pengembangan Budaya Produksi dan Kreativitas Berbasis Inovasi	01 - Terfasilitasinya hasil riset dan inovasi	01 - Jumlah mitra terfasilitasi	1	3.000 mitra	28.703,5	BADAN RISET DAN INOVASI NASIONAL
04.04.04 KP: Penguatan Institusi Sosial Penggerak Literasi dan Inovasi	01 - Terwujudnya penguatan institusi sosial penggerak literasi dan inovasi	01 - Persentase peningkatan perpustakaan yang tergabung dalam jejaring nasional perpustakaan	1	4,5 %	37.217,6	
04.04.04.01 PRO-P: Pengembangan Mitra Perpustakaan (<i>Library Supporter</i>)	01 - Terwujudnya pengembangan mitra perpustakaan (<i>library supporter</i>)	01 - Jumlah perpustakaan yang tergabung dalam jejaring nasional perpustakaan	1	781 perpustakaan	12.217,6	PERPUSTAKAAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

PN/PP/KP/ProP	Sasaran	Indikator	Dukungan Terhadap Arahan Presiden	Target	Rp. Juta	Instansi Pelaksana
04.04.04.02 PRO-P: Pengembangan Inovasi Sosial yang Didukung dari Pendanaan Filantropi	01 - Terwujudnya pengembangan inovasi sosial yang didukung dari pendanaan filantropi	01 - Jumlah Pojok Baca Digital di daerah	1	211 lokasi	25.000,0	PERPUSTAKAAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA

CATATAN:

- (1) Sesuai dengan pendekatan THIS, sebuah proyek dapat mendukung lebih dari 1 (satu) Prioritas Nasional;
- (2) Prioritas Nasional mencakup rincian Belanja K/L, Dana Transfer Khusus, dan KPBU, belum mencakup dukungan Badan Usaha (BUMN/Swasta);
- (3) Alokasi DAK merupakan pagu alokasi per subbidang per tematik per daerah berdasarkan Perpres Rincian APBN TA 2023;
- (4) Perubahan rincian dan pendanaan proyek Belanja K/L, DAK Fisik, dan KPBU pada tahun pelaksanaan dapat dilakukan dengan persetujuan Menteri PPN/Kepala Bappenas dan Menteri Keuangan;
- (5) Dukungan Terhadap Arahan Presiden: 1. Pembangunan Sumber Daya Manusia; 2. Pembangunan Infrastruktur; 3. Penyederhanaan Regulasi; 4. Penyederhanaan Birokrasi; dan 5. Transformasi Ekonomi.

KETERANGAN:

- (a) *multitagging*.



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

PRIORITAS NASIONAL 5 : MEMPERKUAT INFRASTRUKTUR UNTUK MENDUKUNG PENGEMBANGAN EKONOMI DAN PELAYANAN DASAR

PN/PP/KP/ProP	Sasaran	Indikator	Dukungan Terhadap Arahan Presiden	Target	Rp. Juta	Instansi Pelaksana
05 PN: Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar	01 - Meningkatnya penyediaan infrastruktur layanan dasar	01 - Rumah tangga yang menempati hunian layak dan terjangkau		67,88 %	108.023.551,5	
		02 - Penurunan rasio fatalitas kecelakaan jalan per 10.000 kendaraan terhadap angka dasar tahun 2010		63 %		
		03 - Persentase luas daerah irigasi yang dimodernisasi (kumulatif)		0,5 %		
		04 - Persentase pemenuhan kebutuhan air baku (kumulatif)		68,50 %		
	02 - Meningkatnya konektivitas untuk mendukung kegiatan ekonomi dan akses menuju pelayanan dasar	01 - Waktu tempuh pada jalan lintas utama pulau		2,08 jam/ 100 km		
		02 - Persentase rute pelayaran yang saling terhubung (<i>loop</i>)		26 %		
		03 - Kondisi jalur KA sesuai standar <i>Track Quality Index</i> (TQI) kategori 1 dan 2		91,16 %		
		04 - Persentase capaian <i>On Time Performance</i> (OTP) transportasi udara		89 %		



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

PN/PP/KP/ProP	Sasaran	Indikator	Dukungan Terhadap Arahan Presiden	Target	Rp. Juta	Instansi Pelaksana
	03 - Meningkatnya layanan infrastruktur perkotaan	01 - Jumlah kota metropolitan dengan sistem angkutan umum massal perkotaan yang dibangun dan dikembangkan		6 (berlanjut) kota		
		02 - Persentase rumah tangga yang menempati hunian layak dan terjangkau di perkotaan		70,77 %		
	04 - Meningkatnya layanan energi dan ketenagalistrikan	01 - Rasio elektrifikasi		~ 100		
		02 - Rata-rata pemenuhan kebutuhan (konsumsi) listrik		1.336 kWh/kapita		
		03 - Penurunan emisi GRK sektor energi		116 juta ton		
	05 - Meningkatnya layanan infrastruktur TIK	01 - Persentase populasi yang dijangkau oleh jaringan bergerak pitalebar (4G)		99 %		
05.01 PP: Infrastruktur Pelayanan Dasar	01 - Meningkatnya akses masyarakat terhadap perumahan dan permukiman layak, aman, dan terjangkau	01 - Rasio <i>outstanding</i> KPR terhadap PDB	2	3,60	47.992.501,6	
		02 - Persentase rumah tangga yang menempati hunian dengan kecukupan luas lantai per kapita	2	94,63 %		
		03 - Persentase rumah tangga yang menempati hunian dengan ketahanan bangunan (atap, lantai, dinding)	2	86,00 %		



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

PN/PP/KP/ProP	Sasaran	Indikator	Dukungan Terhadap Arahan Presiden	Target	Rp. Juta	Instansi Pelaksana
		04 - Persentase rumah tangga yang memiliki sertifikat hak atas tanah untuk perumahan	2	64,20 %		
	02 - Meningkatnya akses masyarakat terhadap air minum dan sanitasi yang layak dan aman	01 - Persentase rumah tangga yang menempati hunian dengan akses air minum layak (%)	2	97,55 %		
		02 - Persentase rumah tangga yang menempati hunian dengan akses air minum aman (%)	2	14,22 %		
		03 - Persentase rumah tangga dengan akses air minum jaringan perpipaan (%)	2	28,01 %		
		04 - Persentase rumah tangga dengan akses air minum bukan jaringan perpipaan (%)	2	69,54 %		
		05 - Persentase PDAM dengan kinerja sehat	2	91,80 %		
		06 - Persentase rumah tangga yang menempati hunian dengan akses sanitasi (air limbah domestik) layak dan aman	2	86,03 akses layak termasuk 13 akses aman %		
		07 - Persentase rumah tangga yang masih mempraktikkan Buang Air Besar Sembarangan (BABS) di tempat terbuka	2	1,49 %		



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

PN/PP/KP/ProP	Sasaran	Indikator	Dukungan Terhadap Arahan Presiden	Target	Rp. Juta	Instansi Pelaksana
		08 - Persentase rumah tangga yang menempati hunian dengan akses sampah yang terkelola dengan baik di perkotaan	2	77,64 penanganan; 14,57 pengurangan %		
	03 - Meningkatnya layanan keselamatan dan keamanan transportasi	01 - Rata-rata waktu tanggap pencarian dan pertolongan	2	25,50 menit		
	04 - Meningkatnya layanan pengelolaan air tanah dan air baku berkelanjutan	01 - Jumlah kabupaten/kota yang terpenuhi kebutuhan air bakunya secara berkelanjutan	2	96 kab/kota		
	05 - Meningkatnya optimalisasi waduk multiguna dan modernisasi irigasi	01 - Volume tampungan air per kapita	2	61,98 m ³ /kapita		
		02 - Persentase luas sawah beririgasi	2	43,57 %		
		03 - Luas daerah irigasi yang dimodernisasi	2	11.956 ha		
05.01.01 KP: Penyediaan Akses Perumahan dan Permukiman Layak, Aman, dan Terjangkau	01 - Tersedianya akses perumahan dan permukiman layak, aman, dan terjangkau	01 - Jumlah hunian baru layak huni yang terbangun melalui peran pemerintah	2	4.988 unit	5.859.512,8	
		02 - Jumlah rumah tangga yang menerima fasilitas pembiayaan perumahan termasuk SMF dan TAPERA	2	20.000 rumah tangga		



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

PN/PP/KP/ProP	Sasaran	Indikator	Dukungan Terhadap Arahan Presiden	Target	Rp. Juta	Instansi Pelaksana
		03 - Jumlah rumah tangga berpendapatan rendah yang menerima bantuan/subsidi pembiayaan perumahan berupa bantuan uang muka dan Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP)	2	220.000 rumah tangga		
		04 - Jumlah peningkatan kualitas hunian melalui peran pemerintah	2	124.750 unit		
		05 - Jumlah luas kawasan permukiman kumuh yang ditangani secara terpadu	2	275 ha		
		06 - Jumlah kabupaten/kota yang mengembangkan iklim kondusif perumahan melalui reformasi perizinan dan administrasi pertanahan	2	48 kab/kota		
		07 - Jumlah kabupaten/kota yang mengimplementasikan pemenuhan standar keandalan bangunan	2	48 kab/kota		
05.01.01.01 PRO-P: Peningkatan Fasilitas Penyediaan Hunian Baru	01 - Terlaksananya peningkatan fasilitas penyediaan hunian baru	01 - Jumlah hunian baru layak yang terbangun melalui fasilitas pemerintah	2	4.988 unit	2.056.465,7	KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT, DAK
05.01.01.02 PRO-P: Peningkatan Fasilitas Pembiayaan Perumahan	01 - Terlaksananya peningkatan fasilitas pembiayaan perumahan	01 - Jumlah rumah tangga berpendapatan rendah yang menerima bantuan/subsidi pembiayaan perumahan berupa bantuan uang muka dan Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP)	2	220.000 rumah tangga	12.500,0	KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

PN/PP/KP/ProP	Sasaran	Indikator	Dukungan Terhadap Arahan Presiden	Target	Rp. Juta	Instansi Pelaksana
		02 - Jumlah rumah tangga yang mendapatkan fasilitas pembiayaan dari lembaga keuangan	2	20.000 rumah tangga		
05.01.01.03 PRO-P: Pengembangan Fasilitas Peningkatan Kualitas Rumah	01 - Terlaksananya pengembangan fasilitas peningkatan kualitas rumah	01 - Jumlah rumah tangga yang mendapatkan bantuan peningkatan kualitas	2	124.750 rumah tangga	3.184.824,0	KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT, DAK (Terintegrasi dengan PSN)
05.01.01.04 PRO-P: Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Perumahan dan Permukiman	01 - Terlaksananya Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Perumahan dan Permukiman	01 - Jumlah rumah yang dilayani bantuan PSU pada perumahan termasuk PSU kawasan skala besar	2	27.825 unit	369.790,0	KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
05.01.01.05 PRO-P: Fasilitas Peningkatan Standar Keandalan Bangunan dan Keamanan Bermukim (IMB dan SLF)	01 - Terlaksananya fasilitas peningkatan standar keandalan bangunan dan keamanan bermukim (IMB dan SLF)	01 - Jumlah kabupaten/kota yang menerbitkan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi (SLF)	2	48 kab/kota	51.431,6	KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT, KEMENTERIAN DALAM NEGERI
05.01.01.06 PRO-P: Fasilitas Penanganan Permukiman Kumuh	01 - Terlaksananya fasilitas penanganan permukiman kumuh	01 - Jumlah luasan permukiman kumuh yang ditangani secara terpadu	2	275 ha	184.501,5	KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT, DAK (Terintegrasi dengan PSN)
05.01.02 KP: Penyediaan Akses Air Minum dan Sanitasi Layak dan Aman	01 - Tersedianya akses air minum dan sanitasi layak dan aman	01 - Jumlah rumah tangga dengan akses air minum jaringan perpipaan	2	19.185.621 sambungan rumah	11.223.177,0	
		02 - Jumlah rumah tangga dengan akses air minum bukan jaringan perpipaan	2	47.631.849 rumah tangga		
		03 - Jumlah rumah tangga dengan akses air minum aman	2	9.740.076 rumah tangga		



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

PN/PP/KP/ProP	Sasaran	Indikator	Dukungan Terhadap Arahan Presiden	Target	Rp. Juta	Instansi Pelaksana
		04 - Persentase PDAM dengan kinerja sehat	2	91,8 %		
		05 - Jumlah sambungan rumah yang terlayani SPALD-T skala kota/regional (SR)	2	62.352 sambungan rumah		
		06 - Jumlah sambungan rumah yang terlayani SPALD-T skala permukiman (SR)	2	284.145 sambungan rumah		
		07 - Jumlah rumah tangga yang terlayani IPLT (RT)	2	1.730.314 rumah tangga		
		08 - Jumlah rumah tangga yang terlayani TPA dengan standar <i>sanitary landfill</i> (RT)	2	4.470.423 rumah tangga		
		09 - Jumlah rumah tangga yang terlayani TPS3R (RT)	2	376.144 rumah tangga		
		10 - Jumlah rumah tangga yang terlayani TPST (RT)	2	473.562 rumah tangga		
		11 - Jumlah kabupaten/kota yang memiliki sistem pengelolaan air limbah, termasuk layanan lumpur tinja (Kab/Kota)	2	88 kab/kota		
		12 - Jumlah kabupaten/kota yang memiliki sistem pengelolaan sampah domestik (Kab/Kota)	2	84 kab/kota		



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

PN/PP/KP/ProP	Sasaran	Indikator	Dukungan Terhadap Arahan Presiden	Target	Rp. Juta	Instansi Pelaksana
		13 - Persentase angka BABS di tempat terbuka (%)	2	1,49 %		
05.01.02.01 PRO-P: Pengembangan Sistem Penyelenggaraan Air Minum dan Sanitasi Layak dan Aman	01 - Terlaksananya pengembangan sistem penyelenggaraan air minum dan sanitasi layak dan aman	01 - Jumlah pengembangan kapasitas SPAM regional	2	2.030 liter/detik	10.971.325,9	KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT, KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT (KPBU), DAK (Terintegrasi dengan PSN)
		02 - Jumlah pembangunan dan peningkatan kapasitas SPAM	2	10.104 liter/detik		
		03 - Jumlah sambungan rumah yang mendapatkan perluasan SPAM	2	721.779 sambungan rumah		
		04 - Persentase <i>Non-Revenue Water</i> (NRW) PDAM	2	27 %		
		05 - Jumlah kabupaten/kota yang memiliki pembangunan baru dan perluasan layanan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat (SPALD-T) skala kota/regional (kab/kota)	2	28 kab/kota		
		06 - Jumlah kabupaten/kota yang memiliki pembangunan baru dan perluasan layanan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat (SPALD-T) skala permukiman (kab/kota)	2	168 kab/kota		
		07 - Jumlah kabupaten/kota yang memiliki pembangunan baru dan rehabilitasi Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT) (kab/kota)	2	113 kab/kota		



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

PN/PP/KP/ProP	Sasaran	Indikator	Dukungan Terhadap Arahan Presiden	Target	Rp. Juta	Instansi Pelaksana
		08 - Jumlah kabupaten/kota yang memiliki pembangunan TPA baru (kab/kota)	2	74 kab/kota		
		09 - Jumlah kabupaten/kota yang memiliki TPS3R (kab/kota)	2	116 kab/kota		
		10 - Jumlah kabupaten/kota yang memiliki TPST (kab/kota)	2	37 kab/kota		
05.01.02.02 PRO-P: Pembinaan Penyelenggaraan Air Minum dan Sanitasi Layak dan Aman	01 - Terlaksananya pembinaan penyelenggaraan air minum dan sanitasi layak dan aman	01 - Persentase PDAM yang memiliki <i>business plan</i> menuju akses 100% aman yang berlaku hingga tahun 2024	2	65 %	250.921,1	KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT, KEMENTERIAN DALAM NEGERI
		02 - Persentase PDAM dengan tarif <i>Full Cost Recovery</i>	2	88 %		
		03 - Persentase pengelola/operator air minum berkinerja sehat (PDAM, UPTD, KPSPAMS dll)	2	80 %		
		04 - Jumlah provinsi yang terfasilitasi pendampingan implementasi dokumen strategi sanitasi kabupaten/kota	2	33 provinsi		
		05 - Jumlah provinsi yang terfasilitasi penguatan kapasitas daerah dalam pengelolaan sampah dan air limbah domestik	2	33 provinsi		



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

PN/PP/KP/ProP	Sasaran	Indikator	Dukungan Terhadap Arahan Presiden	Target	Rp. Juta	Instansi Pelaksana
		06 - Persentase desa/kelurahan dengan Stop Buang Air Besar Sembarangan (SBS)	2	85 %		
05.01.02.03 PRO-P: Pengaturan Penyelenggaraan Air Minum dan Sanitasi Layak dan Aman	01 - Terlaksananya pengaturan penyelenggaraan air minum dan sanitasi layak dan aman	01 - Jumlah provinsi yang terfasilitasi penyiapan pengaturan bidang sanitasi	2	34 provinsi	680,0	KEMENTERIAN DALAM NEGERI
		02 - Jumlah NSPK terkait sanitasi yang tersusun	2	4 NSPK		
		03 - Jumlah NSPK terkait air minum yang tersusun	2	3 NSPK		
		04 - Jumlah kabupaten/kota yang memiliki Jakstrada air minum	2	102 kab/kota		
		05 - Jumlah kabupaten/kota yang memiliki RISPAM	2	102 kab/kota		
05.01.02.04 PRO-P: Pengawasan Kualitas Air Minum dan Sanitasi	01 - Terlaksananya pengawasan kualitas air minum dan sanitasi	01 - Jumlah kabupaten/kota dengan penyelenggara SPAM yang memiliki dokumen Rencana Pengamanan Air Minum (RPAM)	2	102 kab/kota	250,0	KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
		02 - Jumlah kabupaten/kota yang melakukan pengawasan kualitas air minum	2	514 kab/kota		
		03 - Jumlah kabupaten/kota yang memiliki <i>effluent</i> IPAL, IPLT, dan <i>leachate</i> TPA yang memenuhi syarat	2	60 kab/kota		



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

PN/PP/KP/ProP	Sasaran	Indikator	Dukungan Terhadap Arahan Presiden	Target	Rp. Juta	Instansi Pelaksana
05.01.03 KP: Pengelolaan Air Tanah dan Air Baku Berkelanjutan	01 - Terkelolanya air tanah dan air baku berkelanjutan	01 - Jumlah debit air baku untuk kebutuhan domestik, industri, dan kawasan unggulan	2	43,06 m ³ /detik	1.531.304,6	
05.01.03.01 PRO-P: Penyediaan dan Pengamanan Air Baku dan Air Tanah	01 - Terlaksananya penyediaan dan pengamanan air baku dan air tanah	01 - Tambahan debit air baku	2	2,6 m ³ /detik	1.530.604,6	KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT (Terintegrasi dengan PSN)
05.01.03.02 PRO-P: Penataan Regulasi serta Perkuatan Kelembagaan SDA	01 - Terlaksananya penataan regulasi serta perkuatan kelembagaan SDA	01 - Jumlah dokumen kebijakan PSDA terpadu pada wilayah sungai kewenangan pusat yang disusun dan/atau diperbaharui	2	36 rekomendasi kebijakan	700,0	KEMENTERIAN DALAM NEGERI
		02 - Provinsi yang mengalami penguatan kelembagaan dan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sumber daya air	2	24 Daerah		
05.01.04 KP: Keselamatan dan Keamanan Transportasi	01 - Terlaksananya pemenuhan fasilitas keselamatan dan keamanan transportasi & SAR	01 - Rasio kejadian kecelakaan pelayaran laut per 10.000 pelayaran	1	0,97	3.101.871,5	
		02 - Rasio kejadian kecelakaan penerbangan per 1 juta penerbangan	2	2,15		
		03 - Rasio kejadian kecelakaan KA per 1 juta km perjalanan KA	2	0,23		
		04 - Rasio kejadian kecelakaan transportasi SDP per 10.000 Pelayaran	2	0,08		



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

PN/PP/KP/ProP	Sasaran	Indikator	Dukungan Terhadap Arahan Presiden	Target	Rp. Juta	Instansi Pelaksana
05.01.04.01 PRO-P: Pemenuhan Fasilitas Keselamatan dan Keamanan Transportasi dan SAR	01 - Terciptanya keselamatan dan keamanan transportasi	01 - Jumlah peralatan SAR yang disediakan	2	341 unit	2.850.257,9	KEMENTERIAN PERHUBUNGAN, BADAN SAR NASIONAL (Terintegrasi dengan PSN)
		02 - Jumlah fasilitas keselamatan jalan yang dibangun	2	33 Provinsi		
		03 - Jumlah UPPKB yang dibangun dan ditingkatkan	2	8 unit		
		04 - Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Keselamatan Pelayaran	2	8 unit		
		05 - Jumlah kapal negara KPLP yang dibangun	2	10 unit		
		06 - Jumlah Sarana, prasarana dan sistem navigasi pendukung keselamatan penerbangan	2	3 Lokasi		
05.01.04.02 PRO-P: Pembinaan dan Pendidikan SDM Keselamatan dan Keamanan Transportasi, Pencarian, dan Pertolongan	01 - Terlaksananya pembinaan dan pendidikan SDM keselamatan dan keamanan transportasi, pencarian, dan pertolongan	01 - Jumlah SDM pencarian dan pertolongan yang berkompeten	1	3.000 orang	251.613,6	KEMENTERIAN DALAM NEGERI, KEMENTERIAN PERHUBUNGAN, BADAN SAR NASIONAL
		02 - Jumlah Lulusan Diklat Pemberdayaan Masyarakat Keselamatan <i>Safety and Security</i> SDM Transportasi	1	93.412 orang		
	02 - Terlaksananya Promosi Keselamatan Jalan Nasional	01 - Promosi Keselamatan Jalan Nasional	1	34 promosi		
	03 - Terlaksananya penyusunan Rencana Aksi Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan	01 - Jumlah daerah yang menyusun Rencana Aksi Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan	1	8 Daerah (Prov/Kab/Kota)		



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

PN/PP/KP/ProP	Sasaran	Indikator	Dukungan Terhadap Arahan Presiden	Target	Rp. Juta	Instansi Pelaksana
05.01.05 KP: Ketahanan Kebencanaan Infrastruktur	01 - Terwujudnya ketahanan kebencanaan infrastruktur	01 - Persentase Peningkatan Perlindungan Banjir di WS Kewenangan Pusat	2	61,85 %	9.512.606,4	
05.01.05.01 PRO-P: Pengembangan Kebijakan Wilayah untuk Ketahanan Bencana dan Penguatan Infrastruktur Vital Tahan Bencana	01 - Terlaksananya pengembangan kebijakan wilayah untuk ketahanan bencana dan penguatan infrastruktur vital tahan bencana	01 - Jumlah wilayah sungai yang menetapkan peta risiko dan rencana induk peningkatan ketahanan wilayah dan infrastruktur vital terhadap bencana hidrometeorologi dan hidrogeologi	2	8 wilayah sungai	1.000,0	KEMENTERIAN DALAM NEGERI
		02 - Provinsi yang melaksanakan penguatan kelembagaan dan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan risiko bencana hidrometeorologi, geologi, dan lingkungan	2	34 Daerah		
05.01.05.02 PRO-P: Pembangunan dan Rehabilitasi Infrastruktur Ketahanan Bencana	01 - Terlaksananya pembangunan dan rehabilitasi infrastruktur ketahanan bencana	01 - Jumlah wilayah sungai dengan pembangunan dan peningkatan infrastruktur pencegahan banjir	2	9 wilayah sungai	9.054.582,9	KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT, KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT (KPBU) (Terintegrasi dengan PSN)
		02 - Jumlah provinsi dengan pembangunan dan peningkatan infrastruktur pengendali bencana lumpur dan sedimen	2	3 provinsi		
		03 - Jumlah kawasan pesisir dengan pembangunan dan peningkatan infrastruktur ketahanan bencana wilayah pesisir	2	17 kawasan pesisir		



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

PN/PP/KP/ProP	Sasaran	Indikator	Dukungan Terhadap Arahan Presiden	Target	Rp. Juta	Instansi Pelaksana
05.01.05.03 PRO-P: Penyediaan Sistem Terpadu Peringatan Dini dan Tanggap Darurat Bencana	01 - Terlaksananya penyediaan sistem terpadu peringatan dini dan tanggap darurat bencana	01 - Jumlah kabupaten/kota dengan pemasangan alat pemantauan penurunan tanah dan kegiatan pemantauan penurunan tanah	2	5 kab/kota	10.207,7	KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
		02 - Jumlah cekungan air tanah dengan pemantauan penggunaan air tanah	2	15 CAT		
		03 - Jumlah wilayah sungai dengan pengembangan peringatan dini bencana banjir	2	2 wilayah sungai		
		04 - Jumlah kegiatan tanggap darurat akibat bencana	2	55 kegiatan		
05.01.05.04 PRO-P: Restorasi dan Konservasi Infrastruktur Alami	01 - Terlaksananya restorasi dan konservasi infrastruktur alami	01 - Jumlah danau/situ yang direstorasi dan dikonservasi	2	7 unit	446.815,9	KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
05.01.06 KP: Waduk <i>Multipurpose</i> dan Modernisasi Irigasi	01 - Terbangunnya waduk <i>multipurpose</i> dan modernisasi irigasi	01 - Jumlah volume tampungan baru untuk memenuhi kebutuhan air	2	17,45 miliar m ³	16.764.029,2	
		02 - Jumlah bendungan dengan peningkatan kinerja dan penurunan indeks risiko	2	66 unit		
		03 - Jumlah daerah irigasi yang melakukan modernisasi	2	2 daerah irigasi		
		04 - Luas lahan beririgasi untuk komoditas padi dan nonpadi	2	6.900 ha		



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

PN/PP/KP/ProP	Sasaran	Indikator	Dukungan Terhadap Arah Presiden	Target	Rp. Juta	Instansi Pelaksana
05.01.06.01 PRO-P: Perencanaan Pengembangan Bendungan Multiguna dan Pemanfaatan Tampungan Alami	01 - Terlaksananya perencanaan pengembangan bendungan multiguna dan pemanfaatan tampungan alami	01 - Jumlah dokumen perencanaan pembangunan bendungan baru multiguna dan pemanfaatan tampungan alami	2	4 dokumen	23.343,3	KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
05.01.06.02 PRO-P: Pembangunan dan Rehabilitasi Bendungan	01 - Terlaksananya pembangunan dan rehabilitasi bendungan	01 - Jumlah bendungan multiguna yang selesai dibangun	2	13 unit	12.553.482,7	KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT (Terintegrasi dengan PSN)
05.01.06.03 PRO-P: Optimalisasi dan Pemanfaatan Tampungan	01 - Terlaksananya optimalisasi dan pemanfaatan tampungan	01 - Jumlah bendungan yang dimanfaatkan sesuai fungsi rencananya	2	16 unit	1.073.294,3	KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT (Terintegrasi dengan PSN)
		02 - Jumlah potensi tenaga listrik dari infrastruktur SDA	2	43,05 MW		
05.01.06.05 PRO-P: Pembangunan dan Rehabilitasi Jaringan Irigasi	01 - Terlaksananya pembangunan dan rehabilitasi jaringan irigasi	01 - Luas jaringan irigasi teknis yang dibangun	2	6.900 ha	759.298,5	KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT (Terintegrasi dengan PSN)
		02 - Luas jaringan daerah irigasi teknis yang direhabilitasi	2	98.700 ha		
05.01.06.06 PRO-P: Peningkatan Pengelolaan Alokasi Air dan Kapasitas Kelembagaan Irigasi	01 - Terlaksananya peningkatan pengelolaan alokasi air dan kapasitas kelembagaan irigasi	01 - Jumlah daerah irigasi yang melakukan modernisasi	2	2 dokumen	2.354.610,4	KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
05.02 PP: Infrastruktur Ekonomi	01 - Meningkatnya konektivitas wilayah	01 - Persentase kondisi mantap jalan nasional/provinsi/kabupaten/kota	2	93/73/63 %	37.120.555,4	
		02 - Panjang jalan tol baru yang terbangun dan/atau beroperasi	2	415 km		



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

PN/PP/KP/ProP	Sasaran	Indikator	Dukungan Terhadap Arahkan Presiden	Target	Rp. Juta	Instansi Pelaksana
		03 - Panjang jalan baru yang terbangun	2	490 km		
		04 - Panjang jaringan KA yang terbangun (kumulatif)	2	6.724 km		
		05 - Jumlah pelabuhan utama yang memenuhi standar	2	4 (berlanjut) lokasi		
		06 - Jumlah rute subsidi tol laut	2	35 rute		
		07 - Jumlah pelabuhan penyeberangan baru yang dibangun	2	4 (4 berlanjut) lokasi		
		08 - Jumlah bandara baru yang dibangun (kumulatif)	2	12 (berlanjut) lokasi		
		09 - Jumlah rute jembatan udara	2	41 rute		
05.02.01 KP: Konektivitas Jalan	01 - Terwujudnya konektivitas jalan	01 - Jumlah lokasi jalan tol baru yang terbangun dan/atau disiapkan	2	7 lokasi	25.360.537,3	
		02 - Panjang Jalan Prioritas Nasional yang dibangun	2	482,93 km		
		03 - Panjang Jembatan Prioritas Nasional yang dibangun	2	7418,99 m		
05.02.01.01 PRO-P: Pembangunan Jalan Strategis	01 - Terlaksananya pembangunan jalan strategis	01 - Panjang jalan lintas utama pulau dibangun	2	338,75 km	4.900.927,8	KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT (Terintegrasi dengan PSN)
		02 - Panjang jembatan lintas utama pulau dibangun	2	3.276,45 m		



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

PN/PP/KP/ProP	Sasaran	Indikator	Dukungan Terhadap Arahan Presiden	Target	Rp. Juta	Instansi Pelaksana
05.02.01.02 PRO-P: Pembangunan Jalan Tol	01 - Terlaksananya pembangunan jalan tol	01 - Panjang jalan tol yang ditangani dengan APBN	2	6,5 km	1.008.869,1	KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT (Terintegrasi dengan PSN)
05.02.01.03 PRO-P: Pembangunan Jalan Mendukung Kawasan Prioritas (KI, KEK, Food Estate dan KSPN)	01 - Terlaksananya pembangunan jalan mendukung kawasan prioritas (KI, KEK, Food Estate dan KSPN)	01 - Panjang jalan dan jembatan mendukung kawasan prioritas (KI, KEK, KSPN dan IKN) yang ditangani	2	84,8 km	8.365.947,5	KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
05.02.01.04 PRO-P: Pembangunan Jalan Akses Simpul Transportasi (Pelabuhan, Bandara, dan Terminal)	01 - Terlaksananya pembangunan jalan akses simpul transportasi (pelabuhan, bandara, dan terminal) yang dibangun	01 - Panjang jalan dan jembatan akses simpul transportasi (pelabuhan, bandara, terminal) yang dibangun	2	48,14 km	346.920,3	KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
05.02.01.05 PRO-P: Preservasi Jalan Nasional (termasuk Peningkatan/Pelebaran)	01 - Terlaksananya preservasi jalan nasional (termasuk peningkatan/pelebaran)	01 - Panjang jalan nasional yang di preservasi (termasuk peningkatan/pelebaran)	2	19.644,26 km	10.737.872,5	KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
05.02.02 KP: Konektivitas Kereta Api	01 - Terwujudnya konektivitas kereta api	01 - Panjang jalur kereta api yang dibangun (termasuk jalur ganda dan reaktivasi)	2	50 (berlanjut) km	4.093.061,0	
		02 - Panjang jalur kereta api yang ditingkatkan	2	344 (berlanjut) km		
05.02.02.01 PRO-P: Pembangunan Jalur Kereta Api Antarkota	01 - Terlaksananya pembangunan jalur kereta api antarkota	01 - Jumlah kegiatan pembangunan prasarana kereta api	2	8 lokasi	2.034.794,1	KEMENTERIAN PERHUBUNGAN (Terintegrasi dengan PSN)



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

PN/PP/KP/ProP	Sasaran	Indikator	Dukungan Terhadap Arahan Presiden	Target	Rp. Juta	Instansi Pelaksana
05.02.02.02 PRO-P: Peningkatan, Pemeliharaan, Perawatan, dan Pengoperasian Jaringan Prasarana Kereta Api	01 - Terlaksananya peningkatan, pemeliharaan, perawatan, dan pengoperasian jaringan prasarana kereta api	01 - Jumlah kegiatan pemeliharaan, perawatan, dan pengoperasian jaringan prasarana kereta api	2	12 lokasi	1.813.958,4	KEMENTERIAN PERHUBUNGAN (Terintegrasi dengan PSN)
		02 - Pemeliharaan, perawatan, dan pengoperasian jaringan prasarana Kereta Api (IMO)	2	1 paket		
05.02.02.03 PRO-P: Pembangunan KA Akses Pelabuhan dan Bandara	01 - Terlaksananya penanganan kereta api akses Pelabuhan/Bandara	01 - Jumlah penanganan kereta api akses simpul transportasi	2	2 lokasi	68.370,4	KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
05.02.02.04 PRO-P: Penyediaan PSO dan Subsidi	01 - Terlaksananya penyediaan PSO dan Subsidi	01 - Jumlah layanan subsidi perkeretaapian yang tersedia	2	7 layanan	175.938,0	KEMENTERIAN PERHUBUNGAN (Terintegrasi dengan PSN)
		02 - Tersedianya dana PSO perkeretaapian	2	1 paket (APBN non-Kemenhub)		
05.02.03 KP: Konektivitas Laut	01 - Terwujudnya konektivitas laut	01 - Jumlah lokasi pengembangan/pembangunan pelabuhan pendukung konektivitas laut	2	26 lokasi	2.968.267,0	
		02 - Jumlah layanan subsidi Tol Laut, perintis angkutan laut, dan angkutan ternak yang tetap dan teratur	2	158 rute		
05.02.03.01 PRO-P: Pengembangan Pelabuhan Utama (Hub)	01 - Terlaksananya pembangunan dan pengembangan pelabuhan laut utama	01 - Jumlah pelabuhan yang dibangun dan dikembangkan	2	1 lokasi	133.057,7	KEMENTERIAN PERHUBUNGAN (Terintegrasi dengan PSN)



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

PN/PP/KP/ProP	Sasaran	Indikator	Dukungan Terhadap Arahkan Presiden	Target	Rp. Juta	Instansi Pelaksana
05.02.03.02 PRO-P: Pembangunan dan Pengembangan Pelabuhan Laut	01 - Terlaksananya pembangunan dan pengembangan pelabuhan laut	01 - Jumlah pelabuhan yang dibangun dan dikembangkan	2	20 lokasi	1.150.267,3	KEMENTERIAN PERHUBUNGAN (Terintegrasi dengan PSN)
05.02.03.03 PRO-P: Pelabuhan Mendukung Kawasan Strategis Prioritas Nasional	01 - Pelabuhan mendukung kawasan strategis prioritas nasional	01 - Jumlah Pelabuhan Pendukung Kawasan Strategis Prioritas Nasional	2	5 lokasi	258.191,4	KEMENTERIAN PERHUBUNGAN (Terintegrasi dengan PSN)
05.02.03.04 PRO-P: Penyelenggaraan Layanan Subsidi Tol Laut dan Perintis Angkutan Laut	01 - Terlaksananya Penyelenggaraan layanan subsidi Tol Laut dan perintis angkutan laut	01 - Jumlah layanan angkutan tol laut tetap dan teratur	2	35 rute	1.426.750,6	KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
		02 - Jumlah layanan angkutan laut perintis	2	117 rute		
		03 - Jumlah layanan angkutan ternak	2	6 rute		
05.02.04 KP: Konektivitas Udara	01 - Terwujudnya konektivitas udara	01 - Jumlah layanan angkutan udara dan Angkutan BBM untuk Kargo Perintis	2	41 rute	3.155.573,7	
		02 - Jumlah bandara yang dibangun dan dikembangkan	2	45 lokasi		
		03 - Jumlah layanan angkutan udara perintis	2	220 layanan		
05.02.04.01 PRO-P: Jembatan Udara	01 - Jumlah bandara pendukung jembatan udara yang dikembangkan	01 - Jumlah bandara pendukung jembatan udara yang dikembangkan	2	7 lokasi	347.540,8	KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
		02 - Jumlah layanan kargo perintis mendukung jembatan udara	2	41 rute		



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

PN/PP/KP/ProP	Sasaran	Indikator	Dukungan Terhadap Arah-an Presiden	Target	Rp. Juta	Instansi Pelaksana
05.02.04.02 PRO-P: Pembangunan Bandara Baru	01 - Terlaksananya pembangunan bandara baru	01 - Jumlah bandara yang dibangun	2	7 lokasi	1.117.332,9	KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
05.02.04.03 PRO-P: Pengembangan Bandara Hub Primer	01 - Terlaksananya pengembangan bandara <i>hub</i> primer	01 - Jumlah bandara <i>hub</i> primer yang direhabilitasi/dikembangkan	2	31 lokasi	1.283.525,8	KEMENTERIAN PERHUBUNGAN (Terintegrasi dengan PSN)
05.02.04.04 PRO-P: Pembangunan Bandara Perairan (<i>Waterbased Airport</i>) untuk Mendukung Destinasi Pariwisata	01 - Terlaksananya penyusunan kajian penyiapan pembangunan perairan (<i>waterbased airport</i>) untuk mendukung destinasi pariwisata	01 - Jumlah kajian penyiapan bandara perairan	2	1 lokasi	4.950,6	KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
05.02.04.05 PRO-P: Layanan Subsidi Angkutan Udara	01 - Terlaksananya layanan angkutan udara perintis	01 - Jumlah layanan angkutan udara perintis	2	220 layanan	402.223,4	KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
		02 - Angkutan BBM angkutan udara perintis	2	7.183 layanan		
05.02.05 KP: Konektivitas Darat	01 - Terwujudnya konektivitas darat	01 - Jumlah pelabuhan penyeberangan, danau dan sungai yang dibangun dan dikembangkan	2	23 lokasi	1.543.116,5	
		02 - Jumlah terminal penumpang dan barang antarnegara serta terminal tipe A yang dibangun	2	14 lokasi		
		03 - Jumlah layanan perintis angkutan jalan	2	328 layanan		
		04 - Jumlah layanan perintis angkutan penyeberangan	2	274 layanan		



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

PN/PP/KP/ProP	Sasaran	Indikator	Dukungan Terhadap Arahan Presiden	Target	Rp. Juta	Instansi Pelaksana
05.02.05.01 PRO-P: Pembangunan Pelabuhan Penyeberangan Baru	01 - Terlaksananya pembangunan pelabuhan penyeberangan baru	01 - Jumlah pelabuhan penyeberangan, danau dan sungai pada jalur logistik yang dibangun	2	12 (berlanjut) lokasi	271.659,0	KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
05.02.05.02 PRO-P: Pembangunan/Pengembangan Pelabuhan Angkutan Sungai Danau	01 - Terlaksananya Pembangunan/Pengembangan Pelabuhan Angkutan Sungai Danau	01 - Pelabuhan angkutan sungai danau yang dibangun/dikembangkan	2	11 (berlanjut) lokasi	248.271,3	KEMENTERIAN PERHUBUNGAN (Terintegrasi dengan PSN)
05.02.05.03 PRO-P: Pembangunan Terminal Penumpang dan Barang Antarnegara	01 - Terlaksananya pembangunan terminal penumpang dan barang antarnegara	01 - Jumlah terminal antarnegara yang dibangun/ditingkatkan	2	1 (berlanjut) lokasi	25.000,0	KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
05.02.05.05 PRO-P: Penyediaan Layanan Perintis Angkutan Darat untuk Penumpang dan Barang	01 - Terlaksananya penyediaan layanan perintis angkutan darat untuk penumpang dan barang	01 - Jumlah trayek perintis angkutan penyeberangan yang dilayani	2	274 layanan	813.440,4	KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
		02 - Jumlah trayek perintis angkutan jalan yang dilayani	2	328 layanan		
		03 - Jumlah trayek angkutan multimoda yang dilayani	2	10 layanan		
		04 - Jumlah trayek angkutan barang yang dilayani	2	6 layanan		
05.02.05.06 PRO-P: Peningkatan/Revitalisasi Terminal Penumpang Tipe A	01 - Terlaksananya peningkatan/revitalisasi terminal penumpang Tipe A	01 - Jumlah terminal penumpang Tipe A yang ditingkatkan/direvitalisasi	2	13 lokasi	184.745,7	KEMENTERIAN PERHUBUNGAN



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

PN/PP/KP/ProP	Sasaran	Indikator	Dukungan Terhadap Arahan Presiden	Target	Rp. Juta	Instansi Pelaksana
05.03 PP: Infrastruktur Perkotaan	01 - Meningkatnya layanan infrastruktur perkotaan	01 - Jumlah kota yang dibangun perlintasan tidak sebidang kereta api/ <i>flyover/underpass</i> (kota)	2	7 (berlanjut) lokasi	2.617.004,2	
		02 - Jumlah sistem angkutan umum massal di perkotaan besar lainnya yang dikembangkan (kota)	2	6 (berlanjut) kota		
		03 - Jumlah kawasan di permukiman kumuh perkotaan yang ditangani melalui peremajaan kota	2	6 kawasan		
05.03.01 KP: Transportasi Perkotaan	01 - Terwujudnya layanan angkutan umum massal perkotaan	01 - Jumlah angkutan massal berbasis rel yang dibangun/dikembangkan (kota)	2	4 Kota	2.556.342,4	
		02 - Jumlah angkutan umum perkotaan berbasis jalan yang dibangun/dikembangkan (kota)	2	10 Kota		
05.03.01.01 PRO-P: Pengembangan Sistem Angkutan Umum Massal Perkotaan di 6 Wilayah Metropolitan (Jakarta, Surabaya, Medan, Bandung, Makassar, Semarang)	01 - Terwujudnya layanan angkutan umum massal di 6 (enam) kota metropolitan	01 - Jumlah kota yang dibangun/dikembangkan angkutan massal berbasis rel	2	4 kota	1.995.842,6	KEMENTERIAN PERHUBUNGAN (Terintegrasi dengan PSN)
		02 - Jumlah kota yang dibangun/dikembangkan angkutan massal berbasis jalan	2	2 kota		
		03 - Jumlah pengadaan dan pemasangan ATCS dan ITS	2	63 paket		



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

PN/PP/KP/ProP	Sasaran	Indikator	Dukungan Terhadap Arahan Presiden	Target	Rp. Juta	Instansi Pelaksana
05.03.01.03 PRO-P: Pengembangan Sistem Angkutan Umum Massal di Perkotaan Besar Lainnya	01 - Terwujudnya layanan angkutan umum massal di perkotaan besar lainnya	01 - Jumlah sistem angkutan umum massal yang dikembangkan di perkotaan lainnya	2	2 kota	11.735,6	KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
05.03.01.04 PRO-P: Pembangunan Perlintasan Tidak Sebidang antara Jalan dan KA di Perkotaan	01 - Terlaksananya pembangunan perlintasan tidak sebidang antara jalan dan KA di perkotaan	01 - Jumlah perlintasan tidak sebidang antara jalan dan KA di perkotaan yang dibangun	2	3 lokasi	0,0 ^(a)	KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
05.03.01.05 PRO-P: Pembangunan Jalan Perkotaan	01 - Terlaksananya pembangunan jalan perkotaan	01 - Panjang jalan perkotaan yang ditangani (termasuk jalan lingkar)	2	5,18 km	0,0 ^(a)	KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
		02 - Jumlah lokasi <i>flyover/underpass</i> di perkotaan yang dibangun	2	1 lokasi		
05.03.01.06 PRO-P: Penyediaan Subsidi Angkutan Umum Massal Perkotaan	01 - Terselenggaranya penyediaan subsidi angkutan umum massal perkotaan	01 - Subsidi angkutan umum massal perkotaan	2	12 Layanan	548.764,1	KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
05.03.02 KP: Infrastruktur dan Ekosistem TIK Perkotaan	01 - Terbangunnya infrastruktur dan ekosistem TIK perkotaan	01 - Persentase rumah tangga terlayani jaringan internet akses tetap pitalebar terhadap total rumah tangga	2	25,4 % (kumulatif)	34.573,8	
05.03.02.01 PRO-P: Pengembangan TIK Perkotaan	01 - Terlaksananya pengembangan TIK perkotaan	01 - Jumlah rumah tangga terlayani jaringan internet akses tetap pitalebar	2	16.000.000 rumah tangga (kumulatif)	34.573,8	KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

PN/PP/KP/ProP	Sasaran	Indikator	Dukungan Terhadap Arahan Presiden	Target	Rp. Juta	Instansi Pelaksana
		02 - Jumlah Kab/Kota yang mendapatkan pendampingan dalam penyusunan masterplan <i>smart city</i>	5	150 kab/kota (kumulatif)		
05.03.03 KP: Penyediaan Akses Air Minum dan Sanitasi Layak dan Aman di Perkotaan	01 - Terlaksananya penyediaan akses air minum dan sanitasi layak dan aman di perkotaan	01 - Jumlah kawasan perkotaan prioritas dengan penyediaan dan penyelenggaraan akses air minum dan air limbah yang aman dan andal	2	7 kab/kota	0,0 ^(a)	
05.03.03.01 PRO-P: Penyediaan dan Penyelenggaraan Air Minum dan Sanitasi yang Andal dan Terintegrasi	01 - Terlaksananya penyediaan dan penyelenggaraan air minum dan sanitasi yang handal dan terintegrasi	01 - Jumlah PDAM dengan layanan Zona Air Minum Prima (ZAMP)	2	7 BUMD air minum	0,0 ^(a)	KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
		02 - Jumlah PDAM yang menerapkan <i>Smart Grid Water Management</i>	2	3 BUMD air minum		
05.03.04 KP: Penyediaan Akses Perumahan dan Permukiman Layak, Aman, dan Terjangkau di Perkotaan	01 - Terlaksananya Penyediaan Akses Perumahan dan Permukiman Layak, Aman dan Terjangkau di Perkotaan	01 - Jumlah kawasan di permukiman kumuh perkotaan yang ditangani melalui peremajaan	2	1 kawasan	26.088,0	
05.03.04.01 PRO-P: Fasilitas Penanganan Permukiman Kumuh Perkotaan	01 - Terlaksananya Fasilitas Penanganan Permukiman Kumuh Perkotaan	01 - Jumlah kawasan di permukiman kumuh perkotaan yang ditangani melalui peremajaan kota	2	1 kawasan	26.088,0	DAK, KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
05.04 PP: Energi dan Ketenagalistrikan	01 - Meningkatnya akses dan pasokan energi dan tenaga listrik yang merata, andal, dan efisien	01 - Jumlah produksi tenaga listrik	2	406.325 GWh	1.410.536,1	
		02 - Penurunan emisi CO2 pembangkit	2	5,91 juta ton		
		03 - Jumlah pengguna listrik	2	83.219 ribu rumah tangga-kumulatif		



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

PN/PP/KP/ProP	Sasaran	Indikator	Dukungan Terhadap Arahan Presiden	Target	Rp. Juta	Instansi Pelaksana
		04 - Jumlah sambungan rumah jaringan gas kota	2	1.688.874 kumulatif, sambungan rumah		
		05 - Jumlah kapasitas kilang minyak-kumulatif	2	1.176.000 Barrel per Calendar Day/BPCD		
05.04.01 KP: Keberlanjutan Penyediaan Energi dan Ketenagalistrikan	01 - Terlaksananya keberlanjutan penyediaan energi dan ketenagalistrikan	01 - Susut jaringan	2	8,78 %	73.765,6	
		02 - Porsi kapasitas terpasang pembangkit EBT terhadap total pembangkit	2	17 %		
05.04.01.01 PRO-P: Perbaikan Efisiensi dan Emisi Energi dan Ketenagalistrikan	01 - Terlaksananya perbaikan efisiensi dan emisi energi dan ketenagalistrikan	01 - Kapasitas terpasang EBT tambahan	2	2.099 MW	73.765,6	KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
		02 - Jumlah penambahan sistem transmisi	2	3.519,50/3.900 kms/MVA		
		03 - Jumlah penambahan sistem distribusi	2	43.065/3.206 kms/MVA		
05.04.02 KP: Akses dan Keterjangkauan Energi dan Ketenagalistrikan	01 - Meningkatnya akses dan keterjangkauan energi dan ketenagalistrikan	01 - Penambahan pelanggan baru	2	2.002 ribu pelanggan	1.323.206,2	
		02 - Jumlah penyediaan gas	2	204.680 Setara Barel Minyak (SBM)		
05.04.02.02 PRO-P: Perluasan Akses dan Keterjangkauan Energi dan Ketenagalistrikan	01 - Terlaksananya perluasan akses dan keterjangkauan energi dan ketenagalistrikan	01 - Jumlah penambahan sistem distribusi	2	43.065/3.206 kms/MVA	1.323.206,2	KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL (Terintegrasi dengan PSN)
		02 - Jumlah penambahan penyalur BBM satu harga	2	89 penyalur		



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

PN/PP/KP/ProP	Sasaran	Indikator	Dukungan Terhadap Arahan Presiden	Target	Rp. Juta	Instansi Pelaksana
		03 - Tahapan pembangunan pipa transmisi gas bumi ruas Cirebon - Semarang	2	1 ruas		
05.04.03 KP: Kecukupan Penyediaan Energi dan Tenaga Listrik	01 - Tersedianya pasokan energi dan tenaga listrik yang cukup	01 - Jumlah cadangan operasional BBM	2	23 hari	13.564,3	
		02 - <i>System Average Interruption Duration Index (SAIDI)</i>	2	3 jam/pelanggan/tahun		
	02 - Terlaksananya pembangunan pipa gas bumi	01 - Panjang ruas pipa transmisi dan distribusi gas bumi yang difasilitasi (kumulatif)	2	19.800 km		
05.04.03.01 PRO-P: Peningkatan Keandalan Infrastruktur Energi dan Ketenagalistrikan	01 - Terlaksananya peningkatan keandalan infrastruktur energi	01 - Jumlah rekomendasi keprospekkan migas	2	4 rekomendasi kebijakan	13.217,6	KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
	02 - Terlaksananya peningkatan keandalan infrastruktur ketenagalistrikan	01 - Jumlah penambahan kapasitas pembangkit	2	6.209 MW		
		02 - Jumlah penambahan sistem transmisi	2	3.519,50/3.900 kms/MVA		
05.04.03.02 PRO-P: Pembangunan Kilang Minyak Bumi	01 - Terlaksananya pembangunan kilang minyak bumi	01 - Jumlah peningkatan infrastruktur kilang minyak bumi (kumulatif)	2	1.176 ribu BOPD	346,7	KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
05.05 PP: Transformasi Digital	01 - Meningkatkan pembangunan dan pemanfaatan infrastruktur TIK, serta kontribusi sektor informasi dan komunikasi dalam pertumbuhan ekonomi	01 - Persentase rata-rata pertumbuhan sektor TIK (%)	1, 2, 5	8,80 %	18.882.954,3	
		02 - Persentase pengguna internet	2	80,70 %		
		03 - Proporsi individu yang menguasai/memiliki telepon genggam	2	74 %		



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

PN/PP/KP/ProP	Sasaran	Indikator	Dukungan Terhadap Arahan Presiden	Target	Rp. Juta	Instansi Pelaksana
05.05.01 KP: Penuntasan Infrastruktur TIK	01 - Terlaksananya penuntasan infrastruktur TIK	01 - Persentase desa berpenduduk yang mendapatkan akses jaringan <i>mobile broadband</i>	2	99,5 % (kumulatif)	15.395.158,1	
		02 - Persentase kecamatan yang terjangkau infrastruktur jaringan serat optik	2	60 % (kumulatif)		
		03 - Persentase rasio harga layanan <i>fixed broadband</i> terhadap pendapatan per kapita (pada kecepatan up to 30 Mbps)	5	8 %		
		04 - Persentase rasio harga layanan <i>mobile broadband</i> terhadap pendapatan per kapita (dilihat dari rata-rata kuota 1 GB)	5	0,3 %		
		05 - Persentase populasi yang terlayani penyiaran radio publik	2	94 %		
		06 - Persentase jangkauan populasi penyiaran TV digital	2, 5	75 %		
05.05.01.01 PRO-P: Pengembangan Infrastruktur Pitalebar	01 - Terlaksananya pengembangan infrastruktur pitalebar	01 - Jumlah desa di wilayah 3T yang mendapatkan akses seluler 4G	2	6.764 desa (kumulatif)	12.464.736,7	KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA, KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA (KPBU), KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG POLITIK, HUKUM DAN KEAMANAN, KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL (Terintegrasi dengan PSN)
05.05.01.02 PRO-P: Pengembangan Infrastruktur Penyiaran	01 - Terlaksananya pengembangan infrastruktur penyiaran	01 - Jumlah infrastruktur digital <i>broadcasting system</i>	2	45 unit	1.633.304,8	KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA, TELEVISI REPUBLIK INDONESIA, LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK RADIO REPUBLIK INDONESIA



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

PN/PP/KP/ProP	Sasaran	Indikator	Dukungan Terhadap Arahan Presiden	Target	Rp. Juta	Instansi Pelaksana
05.05.01.03 PRO-P: Pengembangan Infrastruktur TIK Pemerintahan	01 - Terlaksananya pengembangan infrastruktur TIK pemerintahan	01 - Persentase K/L yang menggunakan/terhubung Jaringan Intra Pemerintah (JIP/ <i>Governemnt Network</i>)	2	50 %	1.297.116,6	KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA, KEMENTERIAN KESEHATAN
05.05.02 KP: Pemanfaatan Infrastruktur TIK	01 - Terwujudnya pemanfaatan infrastruktur TIK	01 - Persentase kontribusi sektor TIK terhadap PDB	5	4,5-5,7 %	1.790.585,0	
		02 - Persentase K/L/D yang memanfaatkan <i>cloud</i> pemerintah (kumulatif)	5	35 %		
05.05.02.01 PRO-P: Pemanfaatan TIK Layanan Pemerintah	01 - Terlaksananya pemanfaatan TIK layanan pemerintah	01 - Jumlah aplikasi generik yang dikembangkan secara multi platform	5	35 Aplikasi (kumulatif)	258.972,5	KEMENTERIAN DALAM NEGERI, ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA, KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN, KEMENTERIAN SOSIAL, KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA, KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI, KEMENTERIAN KESEHATAN, BADAN PENGAJIAN DAN PENERAPAN TEKNOLOGI (BPPT), KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI
05.05.02.02 PRO-P: Pemanfaatan TIK Layanan Masyarakat dan Dunia Usaha	01 - Terlaksananya pemanfaatan TIK layanan masyarakat dan dunia usaha	01 - Jumlah <i>start-up</i> aktif yang terbentuk	5	35 <i>start-up</i>	1.531.612,5	KEMENTERIAN AGAMA, KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA, KEMENTERIAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF/BADAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF, KEMENTERIAN KEUANGAN, KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN,



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

PN/PP/KP/ProP	Sasaran	Indikator	Dukungan Terhadap Arah Presiden	Target	Rp. Juta	Instansi Pelaksana
						KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI, KEMENTERIAN PERDAGANGAN, KEMENTERIAN KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH, KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI, PERPUSTAKAAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA, KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN, TELEVISI REPUBLIK INDONESIA (Terintegrasi dengan PSN)
05.05.03 KP: Fasilitas Pendukung Transformasi Digital	01 - Tersedianya fasilitas pendukung transformasi digital	01 - Jumlah peserta pelatihan digital skill untuk menuju ekonomi digital	1	15.700 peserta	1.697.211,2	
05.05.03.01 PRO-P: Pengelolaan Informasi secara Aman dan Terintegrasi	01 - Terlaksananya pengelolaan informasi secara aman dan terintegrasi	01 - Jumlah konten negatif yang diblokir	1, 5	210.000 konten negatif	266.804,4	BADAN SIBER DAN SANDI NEGARA, KEMENTERIAN PERTAHANAN, KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA, BADAN INTELIJEN NEGARA, KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
05.05.03.02 PRO-P: Pengembangan Literasi dan Keahlian TIK	01 - Terlaksananya pengembangan literasi dan keahlian TIK	01 - Jumlah masyarakat yang mendapatkan literasi di bidang digital	1	5.000.000 orang	826.239,2	KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA, KEMENTERIAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF/BADAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF, KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN, BADAN SIBER DAN SANDI NEGARA, KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN, KEMENTERIAN PERDAGANGAN



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

PN/PP/KP/ProP	Sasaran	Indikator	Dukungan Terhadap Arahan Presiden	Target	Rp. Juta	Instansi Pelaksana
05.05.03.03 PRO-P: Pengembangan dan Fasilitasi Industri TIK	01 - Terlaksananya pengembangan dan fasilitasi industri TIK	01 - Persentase pengembangan laboratorium BBPPT sebagai pusat TIK	1	80 %	604.167,7	KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

CATATAN:

- (1) Sesuai dengan pendekatan THIS, sebuah proyek dapat mendukung lebih dari 1 (satu) Prioritas Nasional;
- (2) Prioritas Nasional mencakup rincian Belanja K/L, Dana Transfer Khusus, dan KPBU, belum mencakup dukungan Badan Usaha (BUMN/Swasta);
- (3) Alokasi DAK merupakan pagu alokasi per subbidang per tematik per daerah berdasarkan Perpres Rincian APBN TA 2023;
- (4) Perubahan rincian dan pendanaan proyek Belanja K/L, DAK Fisik, dan KPBU pada tahun pelaksanaan dapat dilakukan dengan persetujuan Menteri PPN/Kepala Bappenas dan Menteri Keuangan;
- (5) Dukungan Terhadap Arahan Presiden: 1. Pembangunan Sumber Daya Manusia; 2. Pembangunan Infrastruktur; 3. Penyederhanaan Regulasi; 4. Penyederhanaan Birokrasi; dan 5. Transformasi Ekonomi.

KETERANGAN:

- (a) *multitagging*.



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

PRIORITAS NASIONAL 6 : MEMBANGUN LINGKUNGAN HIDUP, MENINGKATKAN KETAHANAN BENCANA, DAN PERUBAHAN IKLIM

PN/PP/KP/ProP	Sasaran	Indikator	Dukungan Terhadap Arahan Presiden	Target	Rp. Juta	Instansi Pelaksana
06 PN: Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim	01 - Meningkatnya Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	01 - Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)		69,48	8.886.639,1	
		02 - Berkurangnya kerugian akibat dampak bencana dan bahaya iklim	01 - Penurunan potensi kehilangan PDB akibat dampak bencana dan iklim terhadap total PDB	1,10 %		
		03 - Meningkatnya capaian penurunan emisi dan intensitas emisi Gas Rumah Kaca (GRK) terhadap <i>baseline</i>	01 - Persentase penurunan emisi GRK - kumulatif	27,02 %		
			02 - Persentase penurunan emisi GRK - tahunan	26,80 %		
	03 - Persentase penurunan intensitas emisi GRK	29,70 %				
06.01 PP: Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup	01 - Meningkatnya kualitas air, kualitas air laut, kualitas udara, serta kualitas tutupan lahan dan ekosistem gambut	01 - Indeks Kualitas Air (IKA)	5	55,4	1.934.249,7	
		02 - Indeks Kualitas Air Laut (IKAL)	5	60		
		03 - Indeks Kualitas Udara (IKU)	5	84,4		
		04 - Indeks Kualitas Tutupan Lahan dan Ekosistem Gambut (IKL)	5	64,5		
06.01.01 KP: Pencegahan Pencemaran dan Kerusakan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup	01 - Menurunnya potensi kejadian pencemaran dan kerusakan SDA dan LH	01 - Jumlah lokasi pemantauan kualitas lingkungan	5	1.141 lokasi	1.091.241,3	
		02 - Jumlah usaha dan/atau kegiatan yang terpantau memenuhi baku mutu lingkungan hidup	5	3.375 perusahaan		



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

PN/PP/KP/ProP	Sasaran	Indikator	Dukungan Terhadap Arahan Presiden	Target	Rp. Juta	Instansi Pelaksana
		03 - Luas area dengan nilai konservasi tinggi yang dipertahankan secara nasional	5	70 juta ha		
		04 - Persentase penurunan luas kebakaran hutan dan lahan di provinsi rawan kebakaran hutan dan lahan dari <i>baseline</i>	5	2,00 %		
		05 - Luas kawasan konservasi	5	27 juta ha		
		06 - Luas kawasan konservasi perairan	5	29,10 juta ha		
		07 - Akurasi informasi meteorologi	5	92 %		
		08 - Akurasi informasi klimatologi	5	83 %		
06.01.01.01 PRO-P: Pemantauan Kualitas Udara, Air, dan Air Laut	01 - Tersedianya data kualitas air, air laut, dan udara	01 - Jumlah penambahan alat pemantauan kualitas air sungai dan danau secara otomatis	5	250 unit	451.515,6	BADAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI DAN GEOFISIKA, KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN, DAK
		02 - Jumlah penambahan alat pemantauan kualitas udara ambien secara otomatis	5	30 unit		
		03 - Jumlah lokasi pemantauan kualitas air laut secara manual	5	34 provinsi		
06.01.01.02 PRO-P: Pemantauan Kinerja Pengelolaan Lingkungan pada Usaha dan/atau Kegiatan	01 - Pemantauan kinerja pengelolaan lingkungan pada usaha dan/atau kegiatan	01 - Jumlah badan usaha yang terpantau memenuhi baku mutu emisi	5	3.375 badan usaha	13.700,0	KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
		02 - Jumlah badan usaha yang terpantau memenuhi baku mutu air limbah	5	3.375 badan usaha		



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

PN/PP/KP/ProP	Sasaran	Indikator	Dukungan Terhadap Arahan Presiden	Target	Rp. Juta	Instansi Pelaksana
		03 - Jumlah pelabuhan yang terpantau melaksanakan pengendalian pencemaran pesisir dan laut	5	35 pelabuhan		
		04 - Jumlah badan usaha tambang yang meningkat kinerja pengelolaan lingkungannya	5	100 badan usaha		
		05 - Jumlah badan usaha yang memenuhi persyaratan pemulihan ekosistem gambut	5	450 badan usaha		
06.01.01.03 PRO-P: Penyediaan Informasi Cuaca dan Iklim	01 - Tersedianya informasi cuaca dan iklim	01 - Akurasi informasi Meteorologi Publik	5	89 %	89.489,1	BADAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI DAN GEOFISIKA
		02 - Akurasi informasi Meteorologi Penerbangan	5	100 %		
		03 - Akurasi informasi Meteorologi Maritim	5	87 %		
		04 - Akurasi Informasi Iklim	5	83 %		
06.01.01.04 PRO-P: Pencegahan Kebakaran Lahan dan Hutan	01 - Menurunnya angka kejadian kebakaran lahan dan hutan	01 - Jumlah desa yang dicegah dari kebakaran hutan dan lahan	5	1.330 desa	400.603,1	KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
		02 - Jumlah kawasan hidrologi gambut yang memiliki infrastruktur tata air adaptif kekeringan/neraca air yang semakin membaik dalam suatu KHG	5	200 KHG		



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

PN/PP/KP/ProP	Sasaran	Indikator	Dukungan Terhadap Arahan Presiden	Target	Rp. Juta	Instansi Pelaksana
06.01.01.05 PRO-P: Peningkatan Kesadaran dan Kapasitas Pemerintah, Swasta, dan Masyarakat terhadap Lingkungan Hidup	01 - Meningkatnya kesadaran dan kapasitas pemerintah, swasta, dan masyarakat terhadap lingkungan hidup	01 - Jumlah lembaga/komunitas serta generasi peduli dan berbudaya lingkungan hidup	1	300 unit	5.645,0	KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
		02 - Jumlah produk ramah lingkungan yang teregister dan masuk dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah	5	20 produk		
06.01.01.06 PRO-P: Pencegahan Kehilangan Keanekaragaman Hayati dan Kerusakan Ekosistem	01 - Terlaksananya pencegahan kehilangan keanekaragaman hayati dan kerusakan ekosistem	01 - Luas hutan dengan Indeks Jasa Lingkungan tinggi	5	65 juta ha	87.379,5	KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN, KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL, KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
		02 - Luas kawasan konservasi perairan, pesisir, dan pulau-pulau kecil yang operasional	5	15,80 juta ha		
		03 - Jumlah keanekaragaman hayati perairan yang dilindungi, dilestarikan, dan/atau dimanfaatkan	5	18 jenis		
		04 - Jumlah unit perlindungan kehati di luar kawasan konservasi yang dibentuk dalam rangka pencegahan kehilangan kehati dan kerusakan ekosistem	5	17 unit		
		05 - Jumlah kebun raya daerah yang dikembangkan	5	2 unit		
06.01.01.07 PRO-P: Penyediaan Data dan Informasi Keanekaragaman Hayati dan Ekosistem	01 - Tersedianya data dan informasi keanekaragaman hayati dan ekosistem	01 - Luas kawasan yang diinventarisasi dan diverifikasi dengan nilai keanekaragaman hayati tinggi secara partisipatif di luar kawasan konservasi	5	10 juta ha	42.909,0	KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL, KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN, BADAN RISET DAN INOVASI NASIONAL



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

PN/PP/KP/ProP	Sasaran	Indikator	Dukungan Terhadap Arahan Presiden	Target	Rp. Juta	Instansi Pelaksana
		02 - Jumlah Layanan Balai Kliring Keanekaragaman Hayati	5	1 layanan		
		03 - Luas kawasan yang diinventarisasi dan diverifikasi dengan nilai keanekaragaman hayati tinggi di dalam kawasan konservasi	5	7,55 juta ha		
06.01.02 KP: Penanggulangan Pencemaran dan Kerusakan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup	01 - Meningkatnya respons cepat dalam mengurangi intensitas kerusakan SDA dan LH	01 - Jumlah sampah yang terkelola secara nasional	5	69,20 juta ton	438.461,2	
		02 - Persentase penurunan sampah yang terbangun ke laut dari <i>baseline</i>	5	50 %		
		03 - Jumlah limbah B3 yang terkelola	5	117,22 juta ton		
		04 - Persentase penurunan beban pencemaran yang dibuang ke badan air pada 15 DAS prioritas dari <i>baseline</i> 4.546.946,30 kg BOD/hari	5	0,046 %		
06.01.02.01 PRO-P: Penanganan Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan	01 - Tertanganinya pencemaran dan kerusakan lingkungan	01 - Jumlah lokasi pengendalian pencemaran pesisir dan laut dari tumpahan minyak dan sumber pencemar lainnya	5	34 lokasi	95.442,3	KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN, KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
		02 - Jumlah fasilitas pengolahan air limbah terbangun	5	77 unit		



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

PN/PP/KP/ProP	Sasaran	Indikator	Dukungan Terhadap Arahan Presiden	Target	Rp. Juta	Instansi Pelaksana
06.01.02.02 PRO-P: Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Plastik	01 - Terkelolanya timbulan sampah rumah tangga dan sampah plastik melalui pengurangan dan penanganan timbulan sampah	01 - Jumlah pengurangan timbulan sampah secara nasional	5	18,90 juta ton	196.606,5	KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT, KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
		02 - Jumlah penanganan timbulan sampah secara nasional	5	50,30 juta ton		
06.01.02.03 PRO-P: Pengurangan dan Penghapusan Merkuri	01 - Meningkatnya kualitas lingkungan melalui pengurangan dan penghapusan penggunaan merkuri	01 - Persentase penghapusan merkuri dari <i>baseline</i> tahun 2019 sebanyak 50 ton di 180 kab/kota di 30 provinsi	5	20 %	3.950,0	KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
		02 - Jumlah pembangunan fasilitas pengolahan emas tanpa merkuri di PESK yang berizin	5	7 unit		
06.01.02.04 PRO-P: Pembangunan Fasilitas Pengolahan Limbah B3 Medis dan Limbah B3 Terpadu	01 - Meningkatnya jumlah fasilitas pengolahan limbah B3 dan limbah medis	01 - Jumlah fasilitas pengolahan limbah B3 secara terpadu yang terbangun	5	1 unit	142.462,4	KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN, KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN, KEMENTERIAN KESEHATAN
		02 - Jumlah fasilitas pengolahan limbah B3 dari sumber fasilitas pelayanan kesehatan	5	10 unit		
06.01.03 KP: Pemulihan Pencemaran dan Kerusakan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup	01 - Meningkatnya upaya pemulihan pencemaran dan kerusakan sumber daya alam dan lingkungan hidup	01 - Luas lahan gambut terdegradasi yang dipulihkan dan difasilitasi restorasi gambut	5	330.000 ha	209.192,5	
		02 - Jumlah lahan terkontaminasi limbah B3 yang dipulihkan secara nasional	5	285.000 ton		



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

PN/PP/KP/ProP	Sasaran	Indikator	Dukungan Terhadap Arahan Presiden	Target	Rp. Juta	Instansi Pelaksana
		03 - Jumlah kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil rusak yang dipulihkan	5	40 lokasi		
		04 - Jumlah spesies TSL terancam punah yang ditingkatkan populasinya	5	25 jenis		
06.01.03.01 PRO-P: Restorasi dan Pemulihan Lahan Gambut	01 - Terlaksananya restorasi dan pemulihan lahan gambut	01 - Luas ekosistem gambut yang terkoordinasi dan difasilitasi restorasi gambut pada 7 provinsi rawan kebakaran hutan	5	300.000 ha	5.500,0	KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
		02 - Luas lahan gambut terdegradasi yang dipulihkan di areal penggunaan lainnya	5	30.000 ha		
06.01.03.02 PRO-P: Pemulihan Lahan Bekas Tambang dan Lahan Terkontaminasi Limbah B3	01 - Terlaksananya pemulihan lahan bekas tambang dan lahan terkontaminasi limbah B3	01 - Luas lahan bekas tambang yang dipulihkan dan direklamasi secara nasional	5	7.211 ha	34.298,5	KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL, KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
		02 - Jumlah lahan terkontaminasi limbah B3 akibat kegiatan institusi yang terpulihkan	5	250.000 ton		
		03 - Jumlah lahan terkontaminasi limbah B3 akibat kegiatan non-institusi yang dipulihkan	5	35.000 ton		
06.01.03.03 PRO-P: Pemulihan Kerusakan Lingkungan Pesisir dan Laut	01 - Terlaksananya pemulihan kerusakan lingkungan pesisir dan laut	01 - Jumlah kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil rusak yang dipulihkan	5	40 lokasi	3.200,0	KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN, KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

PN/PP/KP/ProP	Sasaran	Indikator	Dukungan Terhadap Arahan Presiden	Target	Rp. Juta	Instansi Pelaksana
06.01.03.04 PRO-P: Pemulihan Habitat Spesies Terancam Punah	01 - Terlaksananya pemulihan habitat spesies terancam punah	01 - Luas konflik tenurial di kawasan konservasi yang ditangani	5	620.000 ha	45.175,0	LEMBAGA ILMU PENGETAHUAN INDONESIA (LIPI), KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
		02 - Luas pemulihan ekosistem di kawasan konservasi	5	45.000 ha		
06.01.03.05 PRO-P: Peningkatan Populasi Spesies Tumbuhan dan Satwa Liar Terancam Punah	01 - Terlaksananya peningkatan populasi spesies tumbuhan dan satwa liar terancam punah	01 - Jumlah luas Kawasan Perlindungan Keanekaragaman Spesies dan Genetik TSL	5	14.100.000 ha	121.019,0	LEMBAGA ILMU PENGETAHUAN INDONESIA (LIPI), BADAN RISET DAN INOVASI NASIONAL, KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
06.01.04 KP: Penguatan Kelembagaan dan Penegakan Hukum di Bidang Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup	01 - Terlaksananya penguatan kelembagaan dan penegakan hukum di bidang sumber daya alam dan lingkungan hidup	01 - Persentase pemegang izin yang taat terhadap peraturan terkait bidang lingkungan hidup dan kehutanan	5	68 %	195.354,7	
		02 - Jumlah kasus pidana dan perdata lingkungan hidup dan kehutanan yang ditangani	5	610 kasus		
		03 - Jumlah luas hutan yang diamankan dari gangguan dan ancaman	5	2.150.000 ha		
		04 - Jumlah daerah yang memiliki perencanaan, perlindungan, dan pengelolaan lingkungan hidup	5	7 daerah		
06.01.04.01 PRO-P: Penguatan Regulasi dan Kelembagaan Bidang Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup di Pusat dan Daerah	01 - Terlaksananya penguatan regulasi dan kelembagaan bidang sumber daya alam dan lingkungan hidup di pusat dan daerah	01 - Jumlah Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) yang tervalidasi kelayakannya dan terjamin kualitasnya berbasis dokumen daya dukung daya tampung	5	30 kajian	18.779,8	KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

PN/PP/KP/ProP	Sasaran	Indikator	Dukungan Terhadap Arahan Presiden	Target	Rp. Juta	Instansi Pelaksana
06.01.04.02 PRO-P: Penguatan Sistem Perizinan, Pengawasan, dan Pengamanan Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup	01 - Terlaksananya penguatan sistem perizinan, pengawasan, dan pengamanan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup	01 - Jumlah usaha dan/atau kegiatan yang diawasi ketaatannya terhadap izin lingkungan dan peraturan perundang-undangan terkait bidang LHK	5	2.000 badan usaha	103.060,0	KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN, KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BPN, KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL, KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
		02 - Jumlah sistem kajian dampak lingkungan dan sistem informasi dokumen lingkungan hidup	5	1 sistem		
		03 - Jumlah operasi pengamanan kawasan hutan dan peredaran hasil hutan ilegal	5	85 operasi		
		04 - Jumlah Layanan Permohonan Penilaian dan Pemeriksaan Dokumen Lingkungan	5	170 layanan		
06.01.04.03 PRO-P: Penguatan Mekanisme Pidana, Perdata, dan Mediasi dalam Proses Penegakan Hukum Bidang Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup	01 - Terlaksananya penguatan mekanisme pidana, perdata, dan mediasi dalam proses penegakan hukum bidang sumber daya alam dan lingkungan hidup	01 - Jumlah kasus pidana LHK yang terselesaikan sampai dengan P21/berkas perkara dinyatakan lengkap	5	500 perkara	73.514,9	MAHKAMAH AGUNG, KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
		02 - Jumlah sengketa lingkungan hidup yang diselesaikan melalui pengadilan dan di luar pengadilan	5	110 perkara		
06.02 PP: Peningkatan Ketahanan Bencana dan Iklim	01 - Berkurangnya potensi kehilangan PDB akibat dampak bencana dan bahaya iklim, serta meningkatnya kecepatan penyampaian informasi peringatan dini bencana kepada masyarakat	01 - Persentase penurunan potensi kehilangan PDB akibat dampak bencana	5	0,10 %	6.359.144,4	
		02 - Penurunan potensi kehilangan PDB sektor terdampak bahaya iklim	5	1,00 %		
		03 - Kecepatan penyampaian informasi peringatan dini bencana kepada masyarakat	5	3,50 menit		



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

PN/PP/KP/ProP	Sasaran	Indikator	Dukungan Terhadap Arahan Presiden	Target	Rp. Juta	Instansi Pelaksana
06.02.01 KP: Penanggulangan Bencana	01 - Meningkatnya sistem dan respons peringatan dini yang didukung oleh upaya kesiapsiagaan dan pengurangan risiko bencana serta peningkatan kapasitas dan koordinasi kelembagaan dalam penanggulangan bencana	01 - Rasio investasi PRB terhadap APBN	5	1,06	2.895.085,8	
		02 - Persentase kelengkapan sistem peringatan dini bencana hidrometeorologis dan tektonis	2	96 %		
		03 - Indeks Risiko Bencana Indonesia	5	132,5		
06.02.01.01 PRO-P: Penguatan Data, Informasi, dan Literasi Bencana	01 - Terlaksananya penguatan data, informasi, dan literasi bencana	01 - Jumlah layanan data dan informasi bencana yang akurat	4	5 layanan	258.376,0	KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL, BADAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI DAN GEOFISIKA, BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA (BNPB), BADAN INFORMASI GEOSPASIAL (BIG)
		02 - Jumlah forum konsolidasi data, informasi, dan pengetahuan	4	15 kegiatan		
		03 - Jumlah sosialisasi pengurangan risiko bencana	1	100 kegiatan		
06.02.01.02 PRO-P: Penguatan Sistem, Regulasi, dan Tata Kelola Bencana	01 - Meningkatnya kualitas sistem, regulasi, dan tata kelola bencana yang saling bersinergi	01 - Jumlah penyusunan kajian untuk regulasi dan tata kelola bencana	4	14 kajian	6.563,9	BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA (BNPB), KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
		02 - Jumlah sistem kebencanaan yang dikembangkan	2	3 sistem		
06.02.01.03 PRO-P: Peningkatan Sarana Prasarana Kebencanaan	01 - Meningkatnya kualitas sarana prasarana kebencanaan	01 - Jumlah kab/kota yang memiliki standar minimal peralatan dan logistik kebencanaan	3	275 kab/kota	1.400.886,6	BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA (BNPB), KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT (Terintegrasi dengan PSN)
		02 - Persentase daerah yang memiliki logistik dan peralatan penanggulangan bencana yang memadai	2	80 %		



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

PN/PP/KP/ProP	Sasaran	Indikator	Dukungan Terhadap Arahan Presiden	Target	Rp. Juta	Instansi Pelaksana
06.02.01.04 PRO-P: Integrasi Kerja Sama Kebijakan dan Penataan Ruang Berbasis Risiko Bencana	01 - Terlaksananya integrasi kerja sama kebijakan dan penataan ruang berbasis risiko bencana	01 - Jumlah penyusunan kajian untuk kebijakan dan regulasi penanggulangan bencana	1	50 kajian	1.500,0	KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL, BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA (BNPB)
		02 - Jumlah dokumen kajian risiko dan tata ruang di kawasan rawan bencana dan pascabencana	5	55 dokumen		
06.02.01.05 PRO-P: Penguatan Penanganan Darurat Bencana	01 - Terlaksananya penguatan penanganan darurat bencana	01 - Rata-rata korban akibat bencana di daerah rawan bencana per 100.000 jiwa	1	0,20 jiwa	479.444,5	KEMENTERIAN SOSIAL, BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA (BNPB), KEMENTERIAN KESEHATAN, KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
		02 - Persentase waktu respons penanganan darurat kurang dari 24 jam	1	100 %		
06.02.01.06 PRO-P: Pelaksanaan Rehabilitasi dan Rekonstruksi di Daerah Terdampak Bencana	01 - Terlaksananya rehabilitasi dan rekonstruksi di daerah terdampak bencana	01 - Persentase pelayanan publik yang berhasil dipulihkan	2	90 %	7.800,0	KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI, BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA (BNPB), KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
		02 - Kenaikan ketahanan di daerah pascabencana	1	5 %		
06.02.01.07 PRO-P: Penguatan Sistem Mitigasi Multiancamanan Bencana Terpadu	01 - Menguatnya sistem mitigasi multiancamanan bencana terpadu	01 - Jumlah Sistem Mitigasi Multiancamanan Bencana (MHEWS) terpadu	2	1 sistem	740.514,8	KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL, BADAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI DAN GEOFISIKA, BADAN INFORMASI GEOSPASIAL (BIG), BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA (BNPB), LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK RADIO REPUBLIK INDONESIA, KEMENTERIAN DALAM NEGERI
		02 - Jumlah kelompok masyarakat tangguh bencana	1	200 kelompok		
		03 - Jumlah daerah pelaksana kegiatan mitigasi multiancamanan bencana	1	514 kab/kota		
		04 - Kenaikan Indeks Kesiapsiagaan Bencana	1	0,0053		



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

PN/PP/KP/ProP	Sasaran	Indikator	Dukungan Terhadap Arahan Presiden	Target	Rp. Juta	Instansi Pelaksana
06.02.02 KP: Peningkatan Ketahanan Iklim	01 - Menurunnya potensi dampak kerugian yang ditimbulkan oleh perubahan iklim pada sektor-sektor prioritas	01 - Persentase penurunan potensi kehilangan PDB akibat bahaya iklim di sektor kelautan dan pesisir	5	0,650 %	3.464.058,6	
		02 - Persentase penurunan potensi kehilangan PDB akibat bahaya iklim di sektor air	5	0,060 %		
		03 - Persentase penurunan potensi kehilangan PDB akibat bahaya iklim di sektor pertanian	5	0,207 %		
		04 - Persentase penurunan potensi kehilangan PDB akibat bahaya iklim di sektor kesehatan	5	0,078 %		
06.02.02.01 PRO-P: Perlindungan Kerentanan Pesisir dan Sektor Kelautan	01 - Meningkatnya ketahanan sektor kelautan dan pesisir terhadap dampak yang ditimbulkan oleh perubahan iklim	01 - Jumlah kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil yang meningkat ketangguhannya terhadap bencana dan dampak perubahan iklim	5	12 kawasan	691.637,8	KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN, BADAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI DAN GEOFISIKA, KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT, KEMENTERIAN PERHUBUNGAN, KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI, KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
		02 - Jumlah pelabuhan yang memperoleh layanan informasi cuaca maritim dan prakiraan tinggi gelombang dengan akurasi lebih dari 80 persen	5	20 pelabuhan		
		03 - Panjang tanggul laut dan bangunan pengamanan pantai lainnya yang dibangun atau ditingkatkan	2	23 km		



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

PN/PP/KP/ProP	Sasaran	Indikator	Dukungan Terhadap Arahan Presiden	Target	Rp. Juta	Instansi Pelaksana
06.02.02.02 PRO-P: Perlindungan Ketahanan Air pada Wilayah Berisiko Iklim	01 - Meningkatnya ketahanan sektor air terhadap dampak yang ditimbulkan oleh perubahan iklim	01 - Tambahan debit air baku di kawasan rawan air	2	5,18 m ³ /detik	1.751.474,6	KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT, KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN (Terintegrasi dengan PSN)
		02 - Jumlah wilayah sungai yang menetapkan peta risiko dan rencana induk peningkatan ketahanan wilayah dan infrastruktur vital terhadap bencana hidrometeorologi dan hidrogeologi	2	10 wilayah sungai		
		03 - Luas hutan dan lahan yang direhabilitasi dalam rangka konservasi sumber daya air	5	25.000 ha		
06.02.02.03 PRO-P: Perlindungan Ketahanan Pangan terhadap Perubahan Iklim	01 - Meningkatnya ketahanan sektor pertanian terhadap dampak yang ditimbulkan oleh perubahan iklim	01 - Jumlah unit bangunan konservasi air dan lingkungan hidup untuk penambahan areal pertanian	2	200 unit	1.011.641,4	BADAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI DAN GEOFISIKA, KEMENTERIAN PERTANIAN, KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT, KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN (Terintegrasi dengan PSN)
		02 - Jumlah penyuluh pertanian dan petani yang meningkat pemahaman iklim melalui sekolah lapang iklim	5	2.400 orang		
06.02.02.04 PRO-P: Perlindungan Kesehatan Masyarakat dan Lingkungan dari Dampak Perubahan Iklim	01 - Meningkatnya ketahanan sektor kesehatan terhadap dampak yang ditimbulkan oleh perubahan iklim	01 - Jumlah kab/kota yang difasilitasi dan dibina dalam Pelaksanaan Lingkungan Sehat	1	514 daerah (prov/kab/kota)	9.304,8	KEMENTERIAN KESEHATAN



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

PN/PP/KP/ProP	Sasaran	Indikator	Dukungan Terhadap Arahan Presiden	Target	Rp. Juta	Instansi Pelaksana
06.03 PP: Pembangunan Rendah Karbon	01 - Meningkatnya capaian penurunan emisi GRK terhadap <i>baseline</i> pada sektor energi, lahan, limbah, IPPU, serta pesisir dan kelautan	01 - Penurunan emisi GRK terhadap <i>baseline</i> pada sektor energi - kumulatif	5	9,99 %	593.245,0	
		02 - Penurunan emisi GRK terhadap <i>baseline</i> pada sektor energi - tahunan	5	12,8 %		
		03 - Penurunan emisi GRK terhadap <i>baseline</i> pada sektor lahan - kumulatif	5	36,36 %		
		04 - Penurunan emisi GRK terhadap <i>baseline</i> pada sektor lahan - tahunan	5	58,3 %		
		05 - Penurunan emisi GRK terhadap <i>baseline</i> pada sektor limbah - kumulatif	5	6,78 %		
		06 - Penurunan emisi GRK terhadap <i>baseline</i> pada sektor limbah - tahunan	5	9,4 %		
		07 - Penurunan emisi GRK terhadap <i>baseline</i> pada sektor IPPU - kumulatif	5	4,97 %		
		08 - Penurunan emisi GRK terhadap <i>baseline</i> pada sektor IPPU - tahunan	5	2,45 %		
		09 - Penurunan emisi GRK terhadap <i>baseline</i> pada sektor pesisir dan kelautan - kumulatif	5	6,80 %		



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

PN/PP/KP/ProP	Sasaran	Indikator	Dukungan Terhadap Arahan Presiden	Target	Rp. Juta	Instansi Pelaksana
		10 - Penurunan emisi GRK terhadap <i>baseline</i> pada sektor pesisir dan kelautan - tahunan	5	7,04 %		
06.03.01 KP: Pembangunan Energi Berkelanjutan	01 - Meningkatnya keberlanjutan pengelolaan energi	01 - Porsi Energi Baru Terbarukan dalam bauran energi nasional	5	17,90 %	94.470,9	
		02 - Intensitas energi primer	5	135,2 SBM/miliar rupiah		
		03 - Penurunan intensitas energi final	5	0,8 SBM/miliar rupiah		
06.03.01.01 PRO-P: Pengelolaan Energi Baru Terbarukan	01 - Meningkatnya pembangunan pembangkit dan penggunaan Energi Baru Terbarukan	01 - Kapasitas tambahan terpasang pembangkit EBT	2	2.099 megawatt	73.303,7	KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
		02 - Pemanfaatan <i>biofuel</i> untuk domestik	5	14,60 juta kilo liter		
06.03.01.02 PRO-P: Efisiensi dan Konservasi Energi	01 - Meningkatnya efisiensi dan konservasi energi	01 - Persentase penyelesaian penyusunan Standar Kinerja Energi Minimum (SKEM)	5	100 %	21.167,2	KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL, KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
06.03.02 KP: Pemulihan Lahan Berkelanjutan	01 - Meningkatnya keberlanjutan pemulihan lahan	01 - Luas lahan gambut terdegradasi yang dipulihkan dan difasilitasi restorasi gambut	5	330.000 ha	267.328,1	
		02 - Luas tutupan hutan yang ditingkatkan secara nasional	5	450.000 ha		
		03 - Persentase lahan baku sawah yang ditetapkan sebagai Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B)	5	90 %		



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

PN/PP/KP/ProP	Sasaran	Indikator	Dukungan Terhadap Arahan Presiden	Target	Rp. Juta	Instansi Pelaksana
06.03.02.01 PRO-P: Restorasi dan Pengelolaan Lahan Gambut	01 - Meningkatnya upaya restorasi dan pemulihan lahan gambut	01 - Luas ekosistem gambut yang terkoordinasi dan difasilitasi restorasi gambut pada 7 provinsi rawan kebakaran hutan	5	300.000 ha	0,0 ^(a)	KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
		02 - Luas lahan gambut terdegradasi yang dipulihkan di areal penggunaan lainnya	5	30.000 ha		
06.03.02.02 PRO-P: Rehabilitasi Hutan Lahan dan Reforestasi	01 - Meningkatnya upaya rehabilitasi hutan lahan dan reforestasi	01 - Luas rehabilitasi hutan dan lahan secara vegetatif	5	25.000 ha	23.950,0	KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
		02 - Luas Penanaman pada Hutan Produksi	5	425.000 ha		
06.03.02.03 PRO-P: Pengurangan Laju Deforestasi	01 - Berkurangnya laju deforestasi	01 - Penurunan laju deforestasi	5	200.000 ha/tahun	8.942,8	KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
06.03.02.04 PRO-P: Peningkatan Produktivitas dan Efisiensi Pertanian	01 - Terlaksananya optimasi lahan pertanian	01 - Jumlah optimasi lahan pertanian	5	100.000 ha	234.435,3	KEMENTERIAN PERTANIAN (Terintegrasi dengan PSN)
06.03.03 KP: Pengelolaan Limbah	01 - Meningkatnya pengelolaan limbah	01 - Jumlah sampah yang dikelola secara nasional	5	69,20 juta ton	220.456,6	
06.03.03.01 PRO-P: Pengelolaan Sampah Rumah Tangga	01 - Meningkatnya pengelolaan sampah rumah tangga	01 - Jumlah pengurangan timbulan sampah secara nasional	5	18,90 juta ton	220.456,6	KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT (Terintegrasi dengan PSN)
		02 - Jumlah penanganan timbulan sampah secara nasional	5	50,30 juta ton		



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

PN/PP/KP/ProP	Sasaran	Indikator	Dukungan Terhadap Arahan Presiden	Target	Rp. Juta	Instansi Pelaksana
06.03.04 KP: Pengembangan Industri Hijau	01 - Meningkatnya keberlanjutan industri	01 - Perusahaan industri menengah besar yang tersertifikasi Standar Industri Hijau (SIH) berdasarkan SIH yang ditetapkan	5	50 perusahaan	8.450,0	
06.03.04.01 PRO-P: Penerapan Modifikasi Proses dan Teknologi	01 - Meningkatnya penerapan proses dan teknologi industri yang lebih berkelanjutan	01 - Jumlah Rancangan Standar Industri Hijau	5	5 NSPK	8.450,0	KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN
06.03.05 KP: Rendah Karbon Pesisir dan Laut	01 - Meningkatnya pemulihan ekosistem pesisir dan kelautan	01 - Jumlah luas rehabilitasi hutan mangrove	5	6.872 ha	2.539,3	
06.03.05.01 PRO-P: Inventarisasi dan Rehabilitasi Ekosistem Pesisir dan Kelautan	01 - Meningkatnya upaya inventarisasi dan rehabilitasi ekosistem pesisir dan kelautan	01 - Jumlah lokasi pemulihan kerusakan pesisir, laut, dan pulau-pulau kecil	5	40 lokasi	2.539,3	KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN, KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI, KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN

CATATAN:

- (1) Sesuai dengan pendekatan THIS, sebuah proyek dapat mendukung lebih dari 1 (satu) Prioritas Nasional;
- (2) Prioritas Nasional mencakup rincian Belanja K/L, Dana Transfer Khusus, dan KPBU, belum mencakup dukungan Badan Usaha (BUMN/Swasta);
- (3) Alokasi DAK merupakan pagu alokasi per subbidang per tematik per daerah berdasarkan Perpres Rincian APBN TA 2023;
- (4) Perubahan rincian dan pendanaan proyek Belanja K/L, DAK Fisik, dan KPBU pada tahun pelaksanaan dapat dilakukan dengan persetujuan Menteri PPN/Kepala Bappenas dan Menteri Keuangan;
- (5) Dukungan Terhadap Arahan Presiden: 1. Pembangunan Sumber Daya Manusia; 2. Pembangunan Infrastruktur; 3. Penyederhanaan Regulasi; 4. Penyederhanaan Birokrasi; dan 5. Transformasi Ekonomi.

KETERANGAN:

- (a) *multitagging*.



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

PRIORITAS NASIONAL 7 : MEMPERKUAT STABILITAS POLHUKHANKAM DAN TRANSFORMASI PELAYANAN PUBLIK

PN/PP/KP/ProP	Sasaran	Indikator	Dukungan Terhadap Arahan Presiden	Target	Rp. Juta	Instansi Pelaksana
07 PN: Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	01 - Terwujudnya demokrasi yang terkonsolidasi, terpeliharanya kebebasan, menguatnya kapasitas lembaga demokrasi dan terjaganya kesetaraan warga negara secara optimal	01 - Indeks Demokrasi Indonesia		79,25	57.624.572,5	
		02 - Tingkat kepercayaan masyarakat terhadap konten dan akses informasi publik terkait kebijakan dan program prioritas pemerintah		78 %		
		02 - Optimalnya kebijakan luar negeri	01 - Indeks Pengaruh dan Peran Indonesia di Dunia Internasional	4,88		
		03 - Meningkatnya penegakan hukum nasional yang mantap	01 - Indeks Pembangunan Hukum	0,57		
		04 - Meningkatnya kualitas pelayanan publik	01 - Indeks Pelayanan Publik Nasional	3,90		
05 - Terjaganya keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia	01 - Persentase Luas Wilayah NKRI yang Dapat Dijaga Keutuhannya	100 %				
07.01 PP: Konsolidasi Demokrasi	01 - Terwujudnya stabilitas politik yang kondusif serta komunikasi publik yang efektif, integratif, dan partisipatif	01 - IDI Aspek Kapasitas Lembaga Demokrasi	4	81,51	20.660.449,4	
		02 - IDI Aspek Kebebasan	4	74,21		
		03 - IDI Aspek Kesetaraan	4	81,51		



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

PN/PP/KP/ProP	Sasaran	Indikator	Dukungan Terhadap Arahan Presiden	Target	Rp. Juta	Instansi Pelaksana
		04 - Jumlah regulasi/kebijakan tata kelola informasi dan komunikasi publik di pusat dan daerah yang terintegrasi sesuai asas-asas keterbukaan informasi publik (dokumen)	3	5 dokumen		
07.01.01 KP: Penguatan Kapasitas Lembaga Demokrasi	01 - Terwujudnya stabilitas politik yang kondusif melalui penguatan kapasitas lembaga demokrasi	01 - Kaderisasi oleh partai politik peserta pemilu	4	76,1	19.638.391,8	
07.01.01.01 PRO-P: Penguatan Penyelenggara Pemilu	01 - Terwujudnya penguatan penyelenggara pemilu	01 - Jumlah satker yang difasilitasi dalam penguatan penyelenggara pemilu	4	549 satker	19.499.935,3	KOMISI PEMILIHAN UMUM, BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM, KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG POLITIK, HUKUM DAN KEAMANAN, MAHKAMAH KONSTITUSI RI, KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI
07.01.01.02 PRO-P: Penguatan Peraturan Perundangan Bidang Politik	01 - Menguatnya peraturan perundangan bidang politik	01 - Jumlah rekomendasi peraturan perundang-undangan dan pedoman bidang politik	3	2 rekomendasi kebijakan	1.000,0	KEMENTERIAN DALAM NEGERI
07.01.01.03 PRO-P: Peningkatan Bantuan Keuangan Partai Politik	01 - Meningkatkan bantuan keuangan partai politik	01 - Jumlah bantuan keuangan yang tersalurkan kepada partai politik yang mendapatkan kursi di DPR	1	126.376.418 suara sah	126.376,4	KEMENTERIAN DALAM NEGERI
07.01.01.04 PRO-P: Penguatan Demokrasi Internal, Transparansi, dan Akuntabilitas Partai Politik	01 - Menguatnya demokrasi internal, transparansi, dan akuntabilitas partai politik	01 - Jumlah pengurus parpol yang mendapatkan pendidikan politik dan penguatan ideologi pancasila	1	400 orang	5.780,1	KEMENTERIAN DALAM NEGERI, KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG POLITIK, HUKUM DAN KEAMANAN



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

PN/PP/KP/ProP	Sasaran	Indikator	Dukungan Terhadap Arahan Presiden	Target	Rp. Juta	Instansi Pelaksana
07.01.01.05 PRO-P: Penguatan Demokrasi di Daerah	01 - Terlaksananya penguatan demokrasi di daerah	01 - Jumlah provinsi yang mendapatkan penguatan demokrasi	1	15 (prov/kab/kota)	5.300,0	KEMENTERIAN DALAM NEGERI, KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG POLITIK, HUKUM DAN KEAMANAN
07.01.02 KP: Penguatan Kesenjangan dan Kebebasan	01 - Terwujudnya stabilitas politik yang kondusif melalui penguatan kesetaraan dan kebebasan	01 - Terbebas dari ancaman dan/penggunaan kekerasan yang menghambat kebebasan berkeyakinan	4	95,35	630.270,7	
		02 - Keterwakilan perempuan di legislatif, eksekutif, dan yudikatif	4	61,30		
07.01.02.01 PRO-P: Pendidikan Politik dan Pendidikan Pemilih	01 - Terselenggaranya pendidikan politik dan pendidikan pemilih yang tepat sasaran dan berkelanjutan	01 - Terjaminnya hak memilih dan dipilih dalam pemilu untuk seluruh kelompok masyarakat	4	94,80	5.850,0	KEMENTERIAN DALAM NEGERI, KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
07.01.02.02 PRO-P: Peningkatan Kualitas Penyelenggaraan Kepemiluan	01 - Terselenggaranya penguatan pengawasan netralitas ASN	01 - Netralitas penyelenggara pemilu	4	81,55	622.920,7	KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA, KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG POLITIK, HUKUM DAN KEAMANAN, TELEVISI REPUBLIK INDONESIA, KEMENTERIAN PERTAHANAN, DEWAN KETAHANAN NASIONAL, KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
07.01.02.03 PRO-P: Peningkatan Kapasitas Organisasi Kemasyarakatan	01 - Meningkatnya kapasitas organisasi kemasyarakatan	01 - Jumlah pengurus ormas yang mendapat penguatan Ideologi kebangsaan dan wawasan kebangsaan	1	1200 orang	1.500,0	KEMENTERIAN DALAM NEGERI
07.01.03 KP: Peningkatan Kualitas Komunikasi Publik	01 - Terwujudnya komunikasi publik yang efektif, integratif, dan partisipatif	01 - Persentase kepuasan masyarakat terhadap informasi publik terkait kebijakan dan program prioritas pemerintah	1	79 %	391.786,9	



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

PN/PP/KP/ProP	Sasaran	Indikator	Dukungan Terhadap Arahan Presiden	Target	Rp. Juta	Instansi Pelaksana
		02 - Persentase konten informasi publik yang berkualitas	1	90 %		
		03 - Jumlah SDM bidang komunikasi dan informatika yang kompeten dan profesional	1	50.000 orang		
07.01.03.01 PRO-P: Penguatan Tata Kelola Informasi dan Komunikasi Publik di Pusat dan Daerah	01 - Terlaksananya penguatan tata kelola informasi dan komunikasi publik di pusat dan daerah	01 - Tata kelola informasi dan komunikasi publik di pusat dan daerah yang terintegrasi sesuai asas-asas keterbukaan informasi publik	3	5 dokumen	24.608,6	KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA, KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG POLITIK, HUKUM DAN KEAMANAN, KEMENTERIAN DALAM NEGERI
07.01.03.02 PRO-P: Penyediaan Konten dan Akses Informasi Publik secara Merata dan Berkeadilan terutama di Wilayah 3T	01 - Tersedianya konten dan akses informasi publik secara merata dan berkeadilan terutama di wilayah 3T	01 - Persentase tingkat kepuasan masyarakat di wilayah 3T terhadap informasi publik	1	77 %	141.502,5	KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
07.01.03.03 PRO-P: Peningkatan Kualitas SDM Bidang Komunikasi dan Informatika	01 - Terlaksananya peningkatan kualitas SDM bidang komunikasi dan informatika	01 - Jumlah SDM bidang komunikasi dan informatika yang kompeten dan profesional	1	50.000 orang	181.598,3	KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
07.01.03.04 PRO-P: Peningkatan Literasi TIK Masyarakat	01 - Terlaksananya peningkatan literasi TIK masyarakat	01 - Jumlah masyarakat yang mendapat pengenalan TIK	1	1.000 orang	693,1	KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
07.01.03.06 PRO-P: Penguatan Peran Lembaga Pers dan Jurnalis	01 - Terlaksananya penguatan peran lembaga pers dan jurnalis	01 - Indeks Kemerdekaan Pers	1	77,00	19.489,6	KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

PN/PP/KP/ProP	Sasaran	Indikator	Dukungan Terhadap Arahan Presiden	Target	Rp. Juta	Instansi Pelaksana
07.01.03.07 PRO-P: Peningkatan Kualitas Lembaga Penyiaran	01 - Terlaksananya peningkatan kualitas lembaga penyiaran	01 - Jumlah lembaga penyiaran yang berkualitas	1	59 lembaga penyiaran	23.894,8	KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
07.02 PP: Optimalisasi Kebijakan Luar Negeri	01 - Meningkatnya efektivitas diplomasi dan pemanfaatan kerja sama pembangunan internasional	01 - Jumlah forum yang dipimpin oleh Indonesia pada tingkat regional dan multilateral	5	14 forum	378.179,9	
		02 - Indeks Citra Indonesia di Dunia Internasional	1	3,95		
		03 - Indeks Pelayanan dan Pelindungan WNI di Luar Negeri	1	91,00		
07.02.01 KP: Penguatan Integritas NKRI dan Pelindungan WNI di Luar Negeri	01 - Menguatnya integritas NKRI dan pelindungan WNI di luar negeri	01 - Persentase kasus WNI di luar negeri yang diselesaikan	1	81 %	266.990,4	
		02 - Indeks Kemajuan Perundingan Penyelesaian Perbatasan Maritim	2	47,99		
07.02.01.01 PRO-P: Peningkatan dan Intensifikasi Efektivitas Penyelesaian Perbatasan dan Percepatan Pemetaan Batas Negara	01 - Terlaksananya penyelesaian perbatasan dan percepatan pemetaan batas negara	01 - Persentase kemajuan hukum dan perjanjian internasional di bidang perundingan penegasan batas darat, peningkatan kerja sama perbatasan dan peningkatan kerja sama kelautan yang diselesaikan	2	100 %	23.766,8	KEMENTERIAN LUAR NEGERI, BADAN INFORMASI GEOSPASIAL (BIG), KEMENTERIAN DALAM NEGERI
07.02.01.02 PRO-P: Penguatan Pelindungan WNI dan BHI di Tingkat Bilateral, Regional, Multilateral	01 - Terlaksananya penguatan pelindungan WNI dan BHI di tingkat bilateral, regional, multilateral	01 - Indeks Pemanfaatan dan Pengembangan Sistem Informasi Pelayanan dan Pelindungan Terpadu bagi WNI di Luar Negeri	1	97,50	243.223,6	KEMENTERIAN LUAR NEGERI, KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN, BADAN PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA (BP2MI)



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

PN/PP/KP/ProP	Sasaran	Indikator	Dukungan Terhadap Arahan Presiden	Target	Rp. Juta	Instansi Pelaksana
		02 - Indeks Penguatan Sistem Kelembagaan Pelayanan dan Pelindungan WNI di Luar Negeri	1	97,49		
		03 - Indeks Diplomasi Pelindungan WNI di Luar Negeri	1	98,00		
07.02.02 KP: Penguatan Kerjasama Pembangunan Internasional	01 - Terlaksananya penguatan kerja sama pembangunan internasional	01 - Jumlah program/kegiatan Kerja Sama Selatan-Selatan Triangular	5	133 program/kegiatan	52.184,3	
07.02.02.01 PRO-P: Peningkatan Penggunaan Sumber-Sumber dan Mekanisme Pendanaan Baru Kerja Sama Pembangunan Internasional	01 - Terlaksananya peningkatan penggunaan sumber-sumber dan mekanisme pendanaan baru kerja sama pembangunan internasional	01 - Jumlah pendanaan kegiatan kerja sama pembangunan internasional termasuk KSST	5	171,00 Rp miliar	48.884,3	KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN, SEKRETARIAT NEGARA, KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI, BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN, BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL (BKKBN)
07.02.02.02 PRO-P: Penciptaan Lingkungan yang Mendukung (<i>Enabling Environment</i>) Peningkatan Keterlibatan Swasta dalam Kerja Sama Pembangunan Internasional	01 - Terciptanya lingkungan yang mendukung (<i>enabling environment</i>) peningkatan keterlibatan swasta dalam kerja sama pembangunan internasional	01 - Tingkat partisipasi aktor nonpemerintah dalam kegiatan kerja sama pembangunan internasional	5	2,82—2,96 %	3.300,0	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL / BAPPENAS
07.02.03 KP: Peningkatan Citra Positif di Dunia Internasional	01 - Meningkatnya citra positif di dunia internasional	01 - Persentase pemberitaan positif media massa internasional terhadap kebijakan hubungan luar negeri RI	5	86 %	1.591,4	



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

PN/PP/KP/ProP	Sasaran	Indikator	Dukungan Terhadap Arahan Presiden	Target	Rp. Juta	Instansi Pelaksana
07.02.03.01 PRO-P: Penyusunan Kebijakan Diplomasi Publik dan Turunannya	01 - Tersusunnya kebijakan diplomasi publik dan turunannya	01 - Persentase dukungan konstituen internasional terhadap promosi aset-aset diplomasi publik Indonesia	5	99 %	1.591,4	LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK RADIO REPUBLIK INDONESIA
07.02.04 KP: Peningkatan Peran Indonesia di Tingkat Regional dan Global	01 - Meningkatnya peran Indonesia di tingkat regional dan global	01 - Presentase prakarsa dan rekomendasi Indonesia yang diterima dalam pertemuan tingkat tinggi dan tingkat menteri multilateral	5	98 %	57.413,8	
		02 - Presentase rekomendasi dan prakarsa Indonesia yang diterima dalam pertemuan tingkat tinggi dan tingkat menteri ASEAN	5	98 %		
		03 - Presentase Kesepakatan Kerjasama Bilateral di Kawasan Asia Pasifik dan Afrika yang ditindak lanjuti oleh Stakeholder dalam Negeri	5	91,11 %		
		04 - Presentase Kesepakatan Kerjasama Bilateral di Kawasan Amerika dan Eropa yang Ditindaklanjuti oleh Stakeholder Dalam Negeri	5	95 %		
07.02.04.01 PRO-P: Peningkatan Inisiatif/Posisi Indonesia yang di terima	01 - Meningkatnya inisiatif/posisi Indonesia yang di terima	01 - Jumlah rekomendasi dan prakarsa yang disampaikan dalam forum kerja sama multilateral	5	290 rekomendasi/prakarsa	54.730,0	KEMENTERIAN LUAR NEGERI, KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG POLITIK, HUKUM DAN KEAMANAN
		02 - Jumlah rekomendasi dan prakarsa yang disampaikan dalam pertemuan ASEAN	5	247 rekomendasi/prakarsa		



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

PN/PP/KP/ProP	Sasaran	Indikator	Dukungan Terhadap Arahan Presiden	Target	Rp. Juta	Instansi Pelaksana
07.02.04.02 PRO-P: Optimalisasi Kontribusi Indonesia dalam Jajaran 10 Besar Negara Kontributor MPP PBB	01 - Terlaksananya optimalisasi kontribusi Indonesia dalam jajaran 10 besar negara kontributor MPP PBB	01 - Peringkat jumlah pasukan perdamaian (PKO) yang dikirim Pemerintah Indonesia	5	10 peringkat	2.683,8	KEMENTERIAN LUAR NEGERI
07.03 PP: Penegakan Hukum Nasional	01 - Meningkatnya penegakan dan pelayanan hukum serta akses terhadap keadilan	01 - Indeks Perilaku Anti Korupsi (nilai)	4	4,09	499.027,0	
07.03.01 KP: Penataan Regulasi	01 - Terlaksananya penataan regulasi	01 - Persentase <i>judicial review</i> yang dikabulkan MK dan MA	3	9,15% dan 7,05%	5.765,9	
07.03.01.01 PRO-P: Penguatan Tata Kelola dan Pembentukan Lembaga Pengelola Regulasi	01 - Terbentuknya lembaga pengelola regulasi	01 - Persentase peraturan perundang-undangan yang diharmonisasi	3	0,20 %	1.000,0	KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA
07.03.01.02 PRO-P: Pembaruan Substansi Hukum	01 - Terlaksananya pembaruan substansi hukum	01 - Jumlah pengundangan rancangan undang-undang jangka menengah	3	1 UU	4.765,9	KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI
07.03.02 KP: Perbaikan Sistem Hukum Pidana dan Perdata	01 - Terlaksananya perbaikan sistem hukum pidana dan perdata	01 - Persentase penyelesaian perkara gugatan sederhana sesuai dengan peraturan yang berlaku	5	95%	159.781,7	
		02 - Pemanfaatan <i>e-filing</i> di lingkungan Pengadilan Negeri	5	94%		
		03 - Pemanfaatan <i>e-filing</i> di lingkungan Pengadilan Agama	5	30%		
		04 - Pemanfaatan <i>e-litigasi</i> di lingkungan Pengadilan Negeri	5	13%		



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

PN/PP/KP/ProP	Sasaran	Indikator	Dukungan Terhadap Arahan Presiden	Target	Rp. Juta	Instansi Pelaksana
		05 - Pemanfaatan <i>e-litigasi</i> di lingkungan Pengadilan Agama	5	7%		
		06 - Pemanfaatan SIP untuk penanganan perkara kepailitan dan PKPU	5	10%		
		07 - Peningkatan pendaftaran jaminan Fidusia	5	Naik 1% dari <i>baseline</i> T-1		
		08 - Persentase pelaku residivis	5	7.06 %		
07.03.02.01 PRO-P: Penyempurnaan Hukum Ekonomi untuk Mendukung Kemudahan Berusaha	01 - Terlaksananya penyempurnaan hukum ekonomi untuk mendukung kemudahan berusaha	01 - Persentase eksekusi putusan perdata	5	15 %	9.067,4	MAHKAMAH AGUNG, KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI, KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA
07.03.02.02 PRO-P: Penerapan Pendekatan Keadilan Restoratif	01 - Terlaksananya penerapan pendekatan keadilan restoratif	01 - Persentase pengenaan alternatif pemidanaan	1	15 %	90.429,0	MAHKAMAH AGUNG, KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI, KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA, KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA, BADAN NARKOTIKA NASIONAL (BNN), KEMENTERIAN SOSIAL, KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG POLITIK, HUKUM DAN KEAMANAN, KEMENTERIAN KESEHATAN
07.03.02.03 PRO-P: Dukungan TI di Bidang Hukum dan Peradilan	01 - Terwujudnya dukungan TI di bidang hukum dan peradilan	01 - Jumlah wilayah kerja instansi penegak hukum yang mengimplementasikan SPPT TI	5	212 wilayah kerja	37.220,8	BADAN NARKOTIKA NASIONAL (BNN), MAHKAMAH AGUNG, KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA, KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI, KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG POLITIK, HUKUM DAN KEAMANAN, KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI (KPK),



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

PN/PP/KP/ProP	Sasaran	Indikator	Dukungan Terhadap Arahan Presiden	Target	Rp. Juta	Instansi Pelaksana
						KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
07.03.02.04 PRO-P: Peningkatan Integritas dan Pengawasan Hakim	01 - Terlaksananya peningkatan integritas dan pengawasan hakim	01 - Indeks Integritas Hakim	1	7,68	23.064,6	KOMISI YUDISIAL REPUBLIK INDONESIA
07.03.03 KP: Penguatan Sistem Anti Korupsi	01 - Terwujudnya penguatan sistem anti korupsi	01 - Survei penilaian integritas	5	74,00	148.755,8	
07.03.03.01 PRO-P: Penguatan Implementasi Strategi Nasional Pencegahan Korupsi	01 - Terlaksananya penguatan implementasi Strategi Nasional Pencegahan Korupsi	01 - Persentase capaian aksi Stranas PK	5	37,5 %	43.454,1	KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI (KPK), KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA
07.03.03.02 PRO-P: Optimalisasi Mekanisme Pemulihan dan Pengelolaan Aset	01 - Terlaksananya optimalisasi mekanisme pemulihan dan pengelolaan aset	01 - Jumlah aparat penegak hukum yang mengikuti diklat pemulihan aset	1	160 orang	105.301,7	KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI, KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI (KPK), KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA, KEMENTERIAN KEUANGAN, PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN (PPATK)
07.03.04 KP: Peningkatan Akses terhadap Keadilan	01 - Terlaksananya peningkatan akses terhadap keadilan	01 - Indeks Akses Terhadap Keadilan (persen)	5	71—80 %	184.723,5	
07.03.04.01 PRO-P: Penguatan Layanan Keadilan	01 - Terlaksananya penguatan layanan keadilan	01 - Aspek bantuan hukum pada Indeks Akses terhadap Keadilan (persen)	5	71—80 %	167.960,1	MAHKAMAH AGUNG, KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI, KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA, LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN, KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

PN/PP/KP/ProP	Sasaran	Indikator	Dukungan Terhadap Arahan Presiden	Target	Rp. Juta	Instansi Pelaksana
07.03.04.02 PRO-P: Pemberdayaan Hukum bagi Masyarakat	01 - Terlaksananya pemberdayaan hukum bagi masyarakat	01 - Aspek kemampuan masyarakat pada Indeks Akses terhadap Keadilan	5	71—80 %	16.763,4	KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA
07.04 PP: Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola	01 - Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik melalui perbaikan Tata Kelola dan Birokrasi	01 - Indeks Pelayanan Publik Kementerian/Lembaga	4	4,10	1.466.446,6	
		02 - Indeks Pelayanan Publik Pemerintah Provinsi	4	3,90		
		03 - Indeks Pelayanan Publik Pemerintah Kabupaten/Kota	4	3,70		
07.04.01 KP: Transformasi Manajemen SDM Aparatur	01 - Meningkatnya skor <i>employee engagement</i> dan <i>employee branding</i>	01 - Skor <i>Employee Engagement</i>	1	10,5	33.226,5	
		02 - Skor <i>Employee Branding</i>	1	10,5		
07.04.01.01 PRO-P: Penguatan Budaya Kerja dan <i>Employer Branding</i>	01 - Terwujudnya pelaksanaan <i>core values</i> ASN BerAKHLAK	01 - Hasil Pengukuran Indeks BerAKHLAK	1	30 %	3.000,0	BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA, KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI
07.04.01.02 PRO-P: Percepatan Peningkatan Kapasitas SDMA	01 - Terwujudnya peningkatan kapasitas ASN melalui penggunaan fitur <i>learning</i> pada <i>platform</i> tunggal	01 - Persentase pegawai ASN yang aktif menggunakan fitur <i>learning</i> pada <i>platform</i> tunggal	1	20 % pegawai ASN	3.950,0	LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA, KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI
07.04.01.03 PRO-P: Peningkatan Kinerja dan Sistem Penghargaan	01 - Terlaksananya piloting kebijakan manajemen kesejahteraan di Instansi Pemerintah	01 - Jumlah IP yang dilakukan piloting terkait kebijakan manajemen kesejahteraan	4	7 K/L	5.200,0	BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA, KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

PN/PP/KP/ProP	Sasaran	Indikator	Dukungan Terhadap Arahan Presiden	Target	Rp. Juta	Instansi Pelaksana
07.04.01.04 PRO-P: Pengembangan Talenta dan Karir	01 - Terwujudnya manajemen talenta di Instansi Pemerintah	01 - Persentase IP yang telah menerapkan kebijakan manajemen talenta ASN	1	100 % K/L	11.956,4	KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI, LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA, BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
07.04.01.05 PRO-P: Percepatan Transformasi Digital Manajemen ASN	01 - Terwujudnya platform tunggal digital ekosistem manajemen ASN	01 - Persentase IP yang menggunakan platform tunggal digital ekosistem manajemen ASN	1	100 % K/L	6.520,1	LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA, BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA, KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI
07.04.01.06 PRO-P: Perancangan Jabatan, Perencanaan dan Pengadaan SDM Aparatur	01 - Terlaksananya piloting kebijakan perancangan jabatan, perencanaan dan pengadaan ASN yang fleksibel	01 - Jumlah IP yang dilakukan piloting kebijakan perancangan jabatan, perencanaan dan pengadaan ASN yang fleksibel	1	7 K/L	2.600,0	BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA, KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI
07.04.02 KP: Transformasi Pelayanan Publik	01 - Terwujudnya pelayanan publik yang berkualitas	01 - Skor Rata-rata Penilaian Kepatuhan K/L terhadap Pelaksanaan UU Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik oleh Ombudsman RI Pusat	4	82,5	40.623,3	
		02 - Skor Rata-rata Penilaian Kepatuhan Pemerintah Daerah terhadap Pelaksanaan UU Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik oleh Ombudsman RI Perwakilan	4	72,5		
		03 - Skor Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) atas Kinerja Pelayanan Publik	4	84,00		



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

PN/PP/KP/ProP	Sasaran	Indikator	Dukungan Terhadap Arahan Presiden	Target	Rp. Juta	Instansi Pelaksana
07.04.02.01 PRO-P: Pelayanan Publik Berbasis Elektronik (<i>E-Services</i>) yang Terintegrasi	01 - Terlaksananya pelayanan publik berbasis elektronik (<i>e-services</i>) yang terintegrasi	01 - Skor Indeks pada Domain Layanan pada SPBE	4	3,14	8.020,5	KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI, KEMENTERIAN KESEHATAN
07.04.02.02 PRO-P: Penguatan Pengawasan Masyarakat atas Kinerja Pelayanan Publik	01 - Terlaksananya penguatan pengawasan masyarakat atas kinerja pelayanan publik	01 - Jumlah laporan/pengaduan masyarakat ke Ombudsman RI pusat yang diselesaikan	4	737 orang	30.602,8	OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA, KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI
		02 - Jumlah laporan/pengaduan masyarakat ke Ombudsman RI perwakilan yang diselesaikan	4	8.935 orang		
07.04.02.03 PRO-P: Penguatan Ekosistem Inovasi	01 - Terlaksananya penguatan ekosistem inovasi	01 - Persentase inovasi yang memenuhi standar inovasi pelayanan publik	4	82 %	2.000,0	KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI, LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA
07.04.03 KP: Penataan Kelembagaan dan Proses Bisnis	01 - Terlaksananya penataan kelembagaan dan proses bisnis yang efektif dan berorientasi pada pencapaian tujuan pembangunan nasional	01 - Skor Peringkat Komposit Efektivitas Kelembagaan	4	56	1.275.239,5	
07.04.03.01 PRO-P: Penataan Kelembagaan dan Proses Bisnis yang Efektif	01 - Terlaksananya penataan kelembagaan	01 - Jumlah instansi yang ditata kelembagaannya	4	21 K/L	2.500,0	KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI
07.04.03.02 PRO-P: Penerapan SPBE Terintegrasi	01 - Meningkatnya nilai Indeks SPBE Nasional	01 - Nilai Indeks SPBE Nasional	4	2,40	1.272.739,5	ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA, LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH (LKPP), KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI, BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL / BAPPENAS,



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

PN/PP/KP/ProP	Sasaran	Indikator	Dukungan Terhadap Arahan Presiden	Target	Rp. Juta	Instansi Pelaksana
						KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA, KEMENTERIAN DALAM NEGERI
07.04.04 KP: Reformasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Pembangunan	01 - Terwujudnya birokrasi pemerintah yang efektif dan efisien	01 - Nilai Indeks Reformasi Birokrasi Nasional (K/L)	4	78	117.357,3	
		02 - Nilai Indeks Reformasi Birokrasi Nasional (Provinsi)	4	70		
		03 - Nilai Indeks Reformasi Birokrasi Nasional (Kabupaten/Kota)	4	58,11		
07.04.04.01 PRO-P: Penguatan Pengelolaan Reformasi Birokrasi	01 - Meningkatnya kualitas kebijakan Reformasi Birokrasi Nasional	01 - Persentase rekomendasi RB nasional yang ditindaklanjuti	4	70 %	6.351,4	KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI, KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG POLITIK, HUKUM DAN KEAMANAN
07.04.04.02 PRO-P: Penguatan Akuntabilitas Kinerja Pembangunan	01 - Meningkatnya sistem akuntabilitas kinerja pembangunan	01 - Rekomendasi hasil pengawasan manajemen risiko atas kualitas pengendalian intern K/L	4	24 laporan	111.005,9	BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN (BPKP), LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH (LKPP)
		02 - Rekomendasi hasil pengawasan manajemen risiko atas kualitas pengendalian intern pemerintah daerah	4	72 laporan		
		03 - Rekomendasi hasil pengawasan manajemen risiko atas kualitas pengendalian intern badan usaha	4	78 laporan		
		04 - Jumlah laporan rekomendasi hasil pengawasan kinerja pembangunan	4	730 laporan		



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

PN/PP/KP/ProP	Sasaran	Indikator	Dukungan Terhadap Arahan Presiden	Target	Rp. Juta	Instansi Pelaksana
07.05 PP: Menjaga Stabilitas Keamanan Nasional	01 - Terjaganya stabilitas pertahanan dan keamanan	01 - Indeks Kekuatan Militer	2	0,21	34.620.469,6	
		02 - Indeks Terorisme Global	5	4,29		
		03 - Persentase orang yang merasa aman berjalan sendirian di area tempat tinggalnya	3	>60 %		
		04 - Indeks Keamanan dan Ketertiban Masyarakat	3	3,30		
07.05.01 KP: Penguatan Keamanan Dalam Negeri	01 - Menguatnya keamanan dalam negeri	01 - Indeks Risiko Terorisme (Pelaku)	4	37,90	668.470,1	
		02 - Indeks Risiko Terorisme (Target)	4	54,16		
		03 - Angka pelanggaran lintas batas negara	4	<200 pelanggaran		
		04 - Angka kejadian konflik	4	40 kejadian		
		05 - Angka korban pengungsi internal	4	≤14.500 orang		
07.05.01.01 PRO-P: Peningkatan Deradikalisasi dan Penanganan Terorisme	01 - Meningkatnya deradikalisasi dan penanganan terorisme	01 - Clearance rate terorisme	5	79 %	172.157,5	BADAN INTELIJEN NEGARA, BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN TERORISME (BNPT), KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA, KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA
		02 - Jumlah deradikalisasi terhadap tersangka, terdakwa, terpidana, narapidana terorisme, mantan narapidana terorisme, serta orang atau kelompok orang terpapar paham radikal terorisme	5	125 orang		



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

PN/PP/KP/ProP	Sasaran	Indikator	Dukungan Terhadap Arahan Presiden	Target	Rp. Juta	Instansi Pelaksana
		03 - Jumlah kegiatan pencegahan tindak pidana terorisme	5	128 kegiatan		
		04 - Jumlah instansi yang berpartisipasi aktif dalam sinergisitas penanggulangan terorisme	5	48 institusi		
07.05.01.02 PRO-P: Pengamanan Objek Vital dan Target Rentan	01 - Terlaksananya pengamanan objek vital dan target rentan	01 - Jumlah objek vital dan target rentan yang mendapat pengamanan	5	2.129 objek vital dan target rentan	23.000,0	KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
07.05.01.03 PRO-P: Penguatan Pertahanan dan Keamanan di Perbatasan dan Pulau Terluar	01 - Terlaksananya penguatan pertahanan dan keamanan di perbatasan dan pulau terluar	01 - Jumlah pos pamtas, posal, pospol subsektor, dan PLBN yang di bangun	2	56 m ²	453.586,1	KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA, KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI, BADAN NASIONAL PENGELOLA PERBATASAN (BNPP), KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT, KEMENTERIAN PERTAHANAN (Terintegrasi dengan PSN)
		02 - Panjang jalan inspeksi patroli perbatasan	2	200 km		
		03 - Jumlah penduduk perbatasan yang diberdayakan dalam sistem hankamor	1	180 orang		
		04 - Jumlah Pulau-Pulau Kecil Terluar (PPKT) yang ditingkatkan sarana prasarana pertahanan dan keamanannya	2	49 PPKT		
07.05.01.04 PRO-P: Penanganan Konflik secara Humanis	01 - Tertanganinya konflik secara humanis	01 - Tertanggulangnya potensi konflik sosial di tingkat kabupaten	5	21 kasus	18.565,0	KEMENTERIAN DALAM NEGERI, KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA, DEWAN KETAHANAN NASIONAL
		02 - Jumlah anggota satuan yang mendapatkan pelatihan penanganan konflik secara humanis	1	900 orang		



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

PN/PP/KP/ProP	Sasaran	Indikator	Dukungan Terhadap Arahan Presiden	Target	Rp. Juta	Instansi Pelaksana
07.05.01.05 PRO-P: Keselamatan dan Reintegrasi di Wilayah Rawan dan Bencana	01 - Terwujudnya keselamatan dan reintegrasi di wilayah rawan dan bencana	01 - Jumlah korban bencana yang diselamatkan	4	120.000 orang	1.161,4	KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
07.05.02 KP: Penguatan Kemampuan Pertahanan Dibarengi <i>Confidence Building Measures</i> (CBM)	01 - Terwujudnya kemampuan pertahanan yang kuat dibarengi <i>Confidence Building Measures</i> (CBM)	01 - Pemenuhan MEF	4	93 %	28.085.941,0	
		02 - Persentase kontribusi industri pertahanan	5	≥50 %		
07.05.02.01 PRO-P: Pengadaan Alutsista	01 - Terlaksananya pengadaan alutsista	01 - Jenis alutsista yang diadakan	4	15 jenis	15.705.132,0	KEMENTERIAN PERTAHANAN
07.05.02.02 PRO-P: Pemeliharaan dan Perawatan Alutsista	01 - Terlaksananya pemeliharaan dan perawatan alutsista	01 - Jenis alutsista yang diharwat	4	17 jenis	6.446.758,5	KEMENTERIAN PERTAHANAN
07.05.02.03 PRO-P: Pembangunan Sarana-Prasarana Pertahanan	01 - Terlaksananya pembangunan sarana-prasarana pertahanan	01 - Jumlah sarpras pertahanan yang dibangun	2	4 jenis	252.206,0	KEMENTERIAN PERTAHANAN
07.05.02.04 PRO-P: Peningkatan Profesionalisme dan Kesejahteraan Prajurit	01 - Terwujudnya profesionalisme dan kesejahteraan prajurit yang meningkat	01 - Jumlah sarpras profesionalisme dan kesejahteraan prajurit yang dibangun	2	5 jenis	2.429.151,0	KEMENTERIAN PERTAHANAN
07.05.02.05 PRO-P: Pembangunan Pertahanan Siber	01 - Terlaksananya pembangunan pertahanan siber	01 - Jumlah sistem siber pertahanan yang dibangun	4	2 sistem	62.335,0	KEMENTERIAN PERTAHANAN
07.05.02.06 PRO-P: Pembangunan dan Pengembangan Industri Pertahanan	01 - Jenis alpalhankam industri pertahanan yang diadakan	01 - Jenis alpalhankam industri pertahanan yang diadakan	5	1 jenis	3.190.358,4	KEMENTERIAN PERTAHANAN



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

PN/PP/KP/ProP	Sasaran	Indikator	Dukungan Terhadap Arahan Presiden	Target	Rp. Juta	Instansi Pelaksana
07.05.03 KP: Penguatan Keamanan Laut	01 - Terwujudnya penguatan keamanan laut	01 - Angka pelanggaran hukum dan gangguan keamanan di laut	4	224 jumlah	1.538.197,3	
07.05.03.02 PRO-P: Penguatan Kapasitas Operasi Keamanan Laut	01 - Terlaksananya operasi keamanan laut yang kuat	01 - Persentase cakupan WPP NRI yang dipantau dari kegiatan Pemanfaatan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan	4	100 %	1.537.193,5	KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN, KEMENTERIAN PERTAHANAN, BADAN KEAMANAN LAUT
07.05.03.03 PRO-P: Peningkatan Penyelesaian Kasus Keamanan Laut	01 - Terwujudnya penyelesaian kasus keamanan laut yang meningkat	01 - <i>Clearance rate</i> tindak pidana laut	4	80 %	1.003,9	KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
07.05.04 KP: Penguatan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat	01 - Terwujudnya penguatan keamanan dan ketertiban masyarakat	01 - Angka prevalensi penyalahguna narkotika	1	1,69 %	4.157.537,4	
		02 - <i>Crime rate</i>	4	111 / 100.000 penduduk		
		03 - Pelayanan publik Polri yang prima	4	9 %		
07.05.04.01 PRO-P: Pencegahan dan Pemberantasan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika	001 - Meningkatnya Pencegahan dan Pemberantasan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika	01 - <i>Clearance rate</i> tindak pidana narkotika	1	88 %	63.134,0	KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA, BADAN NARKOTIKA NASIONAL (BNN), KEMENTERIAN DALAM NEGERI
		02 - Jumlah kawasan yang pulih dari tanaman terlarang	5	3 kawasan		
07.05.04.02 PRO-P: Peningkatan Pencegahan Penyalahgunaan dan Rehabilitasi Penyalahguna Narkotika	01 - Meningkatnya pencegahan penyalahgunaan dan rehabilitasi penyalahguna narkotika	01 - Indeks Ketahanan Diri Remaja	1	53,00	91.033,5	BADAN NARKOTIKA NASIONAL (BNN), KEMENTERIAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
		02 - Persentase perubahan kualitas hidup pecandu/penyalahguna/korban penyalahgunaan narkotika aspek fisik	1	7,5 %		



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

PN/PP/KP/ProP	Sasaran	Indikator	Dukungan Terhadap Arahan Presiden	Target	Rp. Juta	Instansi Pelaksana
		03 - Persentase perubahan kualitas hidup pecandu/penyalahguna/korban penyalahgunaan narkotika aspek psikologis	1	7,5 %		
		04 - Persentase perubahan kualitas hidup pecandu/penyalahguna/korban penyalahgunaan narkotika aspek hubungan sosial	1	6,5 %		
		05 - Persentase perubahan kualitas hidup pecandu/penyalahguna/korban penyalahgunaan narkotika aspek sumber daya lingkungan	1	5,5 %		
		06 - Indeks Kepuasan Layanan Rehabilitasi	4	3,16		
07.05.04.03 PRO-P: Penanganan Kasus TPPO, serta Kejahatan terhadap Perempuan, Anak, dan Kelompok Rentan Lainnya	01 - Tertanganinya kasus TPPO, serta kejahatan terhadap perempuan, anak, dan kelompok rentan lainnya	01 - <i>Clearance rate</i> tindak pidana TPPO serta kejahatan terhadap perempuan, anak, dan kelompok rentan	4	84 %	9.772,3	KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
07.05.04.04 PRO-P: Peningkatan Layanan Kepolisian yang Presisi sebagai Kelanjutan Promoter	01 - Terlaksananya peningkatan layanan kepolisian yang Presisi sebagai kelanjutan promoter	01 - Indeks Kepuasan Layanan Kepolisian	4	8,4	86.824,5	KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
		02 - <i>Clearance rate</i>	4	66 %		
		03 - <i>Clearance rate</i> tindak pidana kejahatan perbankan dan TPPU	4	59 %		



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

PN/PP/KP/ProP	Sasaran	Indikator	Dukungan Terhadap Arahan Presiden	Target	Rp. Juta	Instansi Pelaksana
07.05.04.05 PRO-P: Pengadaan Almatsus dan Alpalkam Dukungan Layanan Kepolisian	01 - Terlaksananya pengadaan almatsus dan alpalkam dukungan layanan kepolisian	01 - Jumlah almatsus dan alpalkam kepolisian	2	6 paket	3.308.260,8	KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
		02 - Persentase almatsus dan alpalkam kontribusi industri pertahanan	5	35 %		
07.05.04.06 PRO-P: Peningkatan Profesionalisme dan Kesejahteraan Anggota Polri	01 - Meningkatnya profesionalisme dan kesejahteraan anggota Polri	01 - Jumlah personel yang tersertifikasi diklat profesional	1	4.500 personel	598.512,3	KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
		02 - Jumlah unit pemenuhan rumah negara	2	603 unit		
		03 - Jumlah rumah sakit yang dibangun/meningkat akreditasinya	2	1 unit		
		04 - Persentase penyelesaian pengaduan masyarakat	4	79 %		
07.05.05 KP: Penguatan Keamanan dan Ketahanan Siber	01 - Terwujudnya ketahanan dan keamanan siber yang kuat	01 - Skor <i>Global Cyber Security Index</i>	1, 2	88,54	170.323,8	
07.05.05.01 PRO-P: Pembangunan dan Penguatan Tim Cepat Tanggap Keamanan Siber	01 - Terlaksananya pembangunan tim cepat tanggap keamanan siber yang kuat	01 - Skor Pilar <i>Technical</i> pada <i>Global Cybersecurity Index (GCI)</i>	2	17,1	10.901,0	BADAN INTELIJEN NEGARA, BADAN SIBER DAN SANDI NEGARA
07.05.05.02 PRO-P: Penguatan Infrastruktur, SDM, dan Regulasi Keamanan Siber	01 - Terlaksananya pembangunan infrastruktur, SDM, dan regulasi keamanan siber yang kuat	01 - Skor Pilar <i>Organizational</i> pada <i>Global Cybersecurity Index (GCI)</i>	4	13,3	123.952,8	KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA, KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA, BADAN SIBER DAN SANDI NEGARA, BADAN INTELIJEN NEGARA
		02 - Skor Pilar <i>Technical</i> pada <i>Global Cybersecurity Index (GCI)</i>	2	17,1		
		03 - Skor Pilar <i>Capacity Development</i> pada <i>Global Cybersecurity Index (GCI)</i>	1	18,90		



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

PN/PP/KP/ProP	Sasaran	Indikator	Dukungan Terhadap Arahan Presiden	Target	Rp. Juta	Instansi Pelaksana
07.05.05.03 PRO-P: Penyelesaian Kejahatan Siber	01 - Terlaksananya penyelesaian kejahatan bidang siber	01 - <i>Clearance rate</i> tindak pidana siber	5	64 %	19.378,9	KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA, KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA
07.05.05.04 PRO-P: Pencegahan Kejahatan Siber dan Peningkatan Kerja Sama Internasional Bidang Siber	01 - Terwujudnya pencegahan kejahatan siber melalui peningkatan kerja sama internasional bidang siber	01 - Skor Pilar <i>Cooperation</i> pada <i>Global Cybersecurity Index</i> (GCI)	1, 5	13,9	16.091,1	BADAN INTELIJEN NEGARA, BADAN SIBER DAN SANDI NEGARA

CATATAN:

- (1) Sesuai dengan pendekatan THIS, sebuah proyek dapat mendukung lebih dari 1 (satu) Prioritas Nasional;
- (2) Prioritas Nasional mencakup rincian Belanja K/L, Dana Transfer Khusus, dan KPBU, belum mencakup dukungan Badan Usaha (BUMN/Swasta);
- (3) Alokasi DAK merupakan pagu alokasi per subbidang per tematik per daerah berdasarkan Perpres Rincian APBN TA 2023;
- (4) Perubahan rincian dan pendanaan proyek Belanja K/L, DAK Fisik, dan KPBU pada tahun pelaksanaan dapat dilakukan dengan persetujuan Menteri PPN/Kepala Bappenas dan Menteri Keuangan;
- (5) Dukungan Terhadap Arahan Presiden: 1. Pembangunan Sumber Daya Manusia; 2. Pembangunan Infrastruktur; 3. Penyederhanaan Regulasi; 4. Penyederhanaan Birokrasi; dan 5. Transformasi Ekonomi.

KETERANGAN:

- (a) *multitagging*.

Salinan sesuai dengan aslinya

KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA
REPUBLIK INDONESIA
Deputi Bidang Perundang-undangan dan
Administrasi Hukum,



Lydia Silvanna Djaman

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

JOKO WIDODO



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

LAMPIRAN III

**PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 134 TAHUN 2022**

TENTANG

**PEMUTAKHIRAN RENCANA KERJA PEMERINTAH
TAHUN 2023**

MATRIKS PROYEK PRIORITAS STRATEGIS / *MAJOR PROJECT*



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

**PEMUTAKHIRAN MATRIKS PROYEK PRIORITAS STRATEGIS/ MAJOR PROJECT
RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2023**

Prioritas Nasional/ Major Project	Alokasi (Rp. Juta)	Instansi Pelaksana
PN 1: MEMPERKUAT KETAHANAN EKONOMI UNTUK PERTUMBUHAN YANG BERKUALITAS DAN BERKEADILAN		
1) MP: Industri 4.0 pada 7 Subsektor Industri Prioritas		
Dukungan Belanja K/L	356.415,8	
<i>Sub: Perbaikan Alur Aliran Material</i>		
<i>Aspek: Fasilitasi Standardisasi</i>		
Sertifikat Kelayakan Pengolahan (SKP) / Sertifikat <i>Good Manufacturing Practices</i> (GMP) yang diterbitkan	2.000,0	KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
<i>Aspek: Pemetaan dan ketersediaan data bahan baku/penolong</i>		
Sistem Telusur dan Logistik ikan Nasional (STELINA) yang diimplementasikan	2.000,0	KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
Perbaikan Rantai Pasok di Industri Minuman, Hasil Tembakau dan Bahan Penyegar	4.500,0	KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN
<i>Aspek: Peningkatan produksi dan pasokan dalam negeri</i>		
Sentra IKM dan UPT Pangan, Furnitur dan Bahan Bangunan Yang Mendapat Fasilitasi	3.926,6	KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN (Terintegrasi dengan PSN)
<i>Aspek: Peningkatan Standar dan Kualitas Produk</i>		
Rancangan SNI, ST dan/atau PTC	5.764,4	KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN
<i>Sub: Peningkatan Investasi dan Promosi Ekspor</i>		
<i>Aspek: Kerjasama Perdagangan Internasional</i>		
Sosialisasi Pemanfaatan Hasil Perundingan Perdagangan Internasional	2.497,5	KEMENTERIAN PERDAGANGAN
Kerja Sama Akses Perdagangan dan Investasi Forum APEC	1.227,3	KEMENTERIAN PERDAGANGAN
Kerja Sama Fasilitasi Perdagangan dan Investasi Forum APEC	1.560,0	KEMENTERIAN PERDAGANGAN
Kerja Sama Perdagangan ASEAN-Canada	1.261,0	KEMENTERIAN PERDAGANGAN
Kerja Sama Perdagangan dalam RCEP	1.022,1	KEMENTERIAN PERDAGANGAN
Kerja Sama Perdagangan ASEAN dan Mitra ASEAN Lainnya	1.448,3	KEMENTERIAN PERDAGANGAN
<i>Aspek: Pendampingan investasi prioritas</i>		
Investor yang terfasilitasi dalam rangka pengembangan Industri Permesinan dan Alat Mesin Pertanian	1.500,0	KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN
<i>Aspek: Pengembangan dan Promosi Produk Ekspor</i>		
Promosi Produk Kelautan dan Perikanan Skala Internasional	10.750,0	KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
<i>Aspek: Peningkatan partisipasi industri nasional pada GPN dan GVC</i>		
Partisipasi Aktif pada Konferensi Tingkat Menteri, Pertemuan Informal Tingkat Menteri, Sidang Isu Spesifik dan Sidang Reguler terkait Organisasi Perdagangan Dunia	2.042,8	KEMENTERIAN PERDAGANGAN



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

Prioritas Nasional/ Major Project	Alokasi (Rp. Juta)	Instansi Pelaksana
<i>Aspek: Penyusunan Fasilitas dan Insentif Ekspor</i>		
Fasilitasi FTA Center Jakarta	4.102,8	KEMENTERIAN PERDAGANGAN
Fasilitasi FTA Center Bandung	3.069,3	KEMENTERIAN PERDAGANGAN
Fasilitasi FTA Center Semarang	1.940,0	KEMENTERIAN PERDAGANGAN
<i>Sub: Peningkatan Investasi dan Promosi Ekspor</i>		
<i>Aspek: Penyusunan Profil Investasi</i>		
<i>Investment Project Ready to Offer (IPRO) di bidang Industri Manufaktur</i>	1.200,0	KEMENTERIAN INVESTASI/BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
<i>Sub: Pemberdayaan UMKM</i>		
<i>Aspek: Inkubasi teknologi dan usaha</i>		
UMKM yang Difasilitasi dalam Inkubator Bisnis	3.500,0	KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
<i>Aspek: Skema insentif untuk transfer teknologi</i>		
Produk Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Yang Mendapat Fasilitasi Pendaftaran Kekayaan Intelektual	2.000,0	KEMENTERIAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF/BADAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF
Pelaku Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif Yang Mendapat Fasilitasi Konsultasi Hak Kekayaan Intelektual	3.000,0	KEMENTERIAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF/BADAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF
<i>Aspek: Pembinaan UMKM dan pelaku usaha</i>		
SDM Ekonomi Kreatif yang difasilitasi Sertifikasi	3.000,0	KEMENTERIAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF/BADAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF
Wirasaha Industri Pangan, Furnitur dan Bahan Bangunan yang Mendapatkan Pelatihan Kewirausahaan dan Teknis Produksi serta Fasilitasi Mesin/Peralatan	168.166,3	KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN
IKM Pangan, Furnitur dan Bahan Bangunan yang Mendapatkan Pendampingan, Penerapan Sertifikasi Produk dan Penguatan Mesin/Peralatan	6.223,4	KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN
IKM Pangan, Furnitur dan Bahan Bangunan yang Mengikuti Program Restrukturisasi Mesin/Peralatan	4.250,0	KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN
Pemberdayaan Industri Kecil dan Menengah Dalam Rangka Penerapan <i>Making Indonesia 4.0</i>	5.878,2	KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN
<i>Aspek: Dorongan P3DN Produk UKM</i>		
Sertifikasi Produk	40.000,0	KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN
<i>Sub: Pembentukan Ekosistem Inovasi dan Adopsi Teknologi</i>		
<i>Aspek: Pendampingan industri</i>		
Pendampingan Penerapan Industri 4.0 di Sektor Industri Makanan, Hasil Laut dan Perikanan	2.000,0	KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN
Memfasilitasi Implementasi Industri 4.0 Sektor Tekstil dan <i>Apparel</i>	1.580,0	KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN
<i>Aspek: Pemetaan teknologi industri 4.0 dan mengidentifikasi kekosongan teknologi</i>		
Layanan Perencanaan dan Penganggaran	1.000,0	KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN
<i>Sub: Harmonisasi Peraturan dan Kebijakan</i>		
<i>Aspek: Penyusunan Kebijakan Sektoral dan teknis</i>		
Kebijakan Penurunan Hambatan Akses Pasar	19.594,3	KEMENTERIAN PERDAGANGAN
Kebijakan Sektor Jasa	1.297,3	KEMENTERIAN PERDAGANGAN



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

Prioritas Nasional/ <i>Major Project</i>	Alokasi (Rp. Juta)	Instansi Pelaksana
Industrial <i>Intelligence</i> dan Peluang Kerja Sama Industri di Luar Negeri	7.000,0	KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN
Penelitian Pengawasan Persaingan Usaha	1.263,9	KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA (KPPU)
Dukungan BUMN	5.086.960,0	
Optimalisasi dan Efisiensi Pabrik NPK		BUMN
Optimalisasi dan Efisiensi Pabrik Pusri-IIIB		BUMN
Pembangunan Fasilitas Produksi Kimia Dasar <i>Intermediate</i> dan Bahan Baku Obat (BBO)		BUMN
Pembangunan Pabrik Methanol Papua Barat		BUMN (Terintegrasi dengan PSN)
Pabrik Soda Ash PKG		BUMN
Pabrik Soda Ash PKT		BUMN
Pembangunan Pabrik Nitrobenzene dan PAP di Cilacap		BUMN
Pembangunan Pabrik Minyak Goreng Kapasitas 2.500-ton CPO/hari di KEK Sei Mangkei		BUMN
Pengembangan Fasilitas Pilot <i>Scale</i> Untuk Pengembangan <i>Platform</i> Vaksin mRNA dan Viral Vector		BUMN
Pendirian Pabrik untuk Peningkatan Fasilitas <i>Natural Extract</i> Alat Kesehatan Domestik		BUMN
Dukungan Swasta	12.889.300,0^{a)}	
Pembangunan Pabrik Petrokimia		Swasta
Pembangunan Pabrik Pengolahan Kelapa Sawit		Swasta
Pembangunan Pabrik Semikonduktor		Swasta
Pembangunan Pabrik Kendaraan Listrik		Swasta
Pembangunan Pabrik Baterai Kendaraan Listrik		Swasta
Pembangunan Industri Gula Terintegrasi		Swasta
Penerapan Program <i>Environment, Social and Governance</i> (ESG) Industri Kosmetik		Swasta
Pengembangan Industri Pengolahan Daging		Swasta
2) MP: Destinasi Pariwisata Prioritas		
Dukungan Belanja K/L dan DAK	3.520.144,3	
<i>Sub: Pembangunan dalam Wilayah dan Kawasan</i>		
<i>Aspek: Peningkatan Kapasitas SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif</i>		
Sertifikasi Kompetensi Tenaga Kerja	142.398,1	KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN
PBK UPTP	319.275,1	KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN
PBK Provinsi Jawa Tengah	36.388,8	KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN
PBK Provinsi Sumatera Utara	6.240,0	KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN
PBK Provinsi Sulawesi Utara	2.155,4	KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN
PBK Provinsi Nusa Tenggara Barat	9.680,0	KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN
PBK Provinsi Nusa Tenggara Timur	3.600,0	KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN
Pengembangan Kapasitas Kelompok Masyarakat dalam Rangka Ekowisata (Wisata Alam, <i>SAVE</i> , dan Bahari)	11.300,0	KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN (Terintegrasi dengan PSN)



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

Prioritas Nasional/ <i>Major Project</i>	Alokasi (Rp. Juta)	Instansi Pelaksana
SDM dan Industri Pariwisata yang memperoleh fasilitas Pengembangan Kompetensi dari Badan Otorita Danau Toba	1.000,0	KEMENTERIAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF/BADAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF
SDM dan Industri Pariwisata yang memperoleh fasilitas Pengembangan Kompetensi dari Badan Otorita Borobudur	2.250,0	KEMENTERIAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF/BADAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF
SDM dan Industri Pariwisata yang memperoleh Fasilitas Pengembangan Kompetensi dari Badan Otorita Labuan Bajo Flores	1.500,0	KEMENTERIAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF/BADAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF
Standardisasi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Anak dalam PHAPL yang Ramah Anak	336,0	KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
Daerah yang diberikan bimtek dan supervisi tentang pelaksanaan kebijakan PKAK	800,0	KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
<i>Aspek: Penguatan Kelembagaan, Regulasi, Investasi dan Pemasaran</i>		
<i>Investment Project Ready to Offer (IPRO)</i> pada Destinasi Pariwisata Prioritas - Pusat	1.050,0	KEMENTERIAN INVESTASI/BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
Promosi Terpadu	11.000,0	KEMENTERIAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF/BADAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF
Promosi Terpadu (Pameran, Misi Penjualan, Perjalanan Wisata Pengenalan dan Kerjasama dengan Maskapai dan Wholesaler)	18.980,2	KEMENTERIAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF/BADAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF
Publikasi	134.000,0	KEMENTERIAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF/BADAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF
Potensial investor yang difasilitasi Badan Otorita Danau Toba	2.200,0	KEMENTERIAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF/BADAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF
Potensial investor yang difasilitasi Badan Otorita Borobudur	5.000,0	KEMENTERIAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF/BADAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF
Rencana Induk Destinasi Pariwisata Prioritas (ITMP)	6.000,0	KEMENTERIAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF/BADAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF
Potensial investor yang difasilitasi Badan Otorita Labuan Bajo Flores	500,0	KEMENTERIAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF/BADAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF
<i>Aspek: Pengembangan Usaha Pariwisata dan Ekonomi Kreatif</i>		
Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) - Tematik Penguatan Destinasi Pariwisata Prioritas (1215 - Kab. Humbang Hasundutan)	7.749,8	DAK
Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) - Tematik Penguatan Destinasi Pariwisata Prioritas (3374 - Kota Semarang)	8.148,8	DAK
Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) - Tematik Penguatan Destinasi Pariwisata Prioritas (3576 - Kota Mojokerto)	8.148,8	DAK
Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) - Tematik Penguatan Destinasi Pariwisata Prioritas (5202 - Kab. Lombok Tengah)	7.648,8	DAK
Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) - Tematik Penguatan Destinasi Pariwisata Prioritas (5312 - Kab. Ngada)	8.113,3	DAK
Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) - Tematik Penguatan Destinasi Pariwisata Prioritas (8272 - Kota Tidore Kepulauan)	7.141,4	DAK



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

Prioritas Nasional/ <i>Major Project</i>	Alokasi (Rp. Juta)	Instansi Pelaksana
Industri Kecil dan Menengah - Tematik Penguatan Destinasi Pariwisata Prioritas (1205 - Kab. Tapanuli Utara)	995,4	DAK
Industri Kecil dan Menengah - Tematik Penguatan Destinasi Pariwisata Prioritas (1209 - Kab. Simalungun)	6.249,5	DAK
Industri Kecil dan Menengah - Tematik Penguatan Destinasi Pariwisata Prioritas (1210 - Kab. Dairi)	4.925,5	DAK
Industri Kecil dan Menengah - Tematik Penguatan Destinasi Pariwisata Prioritas (1211 - Kab. Karo)	2.986,2	DAK
Industri Kecil dan Menengah - Tematik Penguatan Destinasi Pariwisata Prioritas (1215 - Kab. Humbang Hasundutan)	777,7	DAK
Industri Kecil dan Menengah - Tematik Penguatan Destinasi Pariwisata Prioritas (1216 - Kab. Pakpak Bharat)	3.888,6	DAK
Industri Kecil dan Menengah - Tematik Penguatan Destinasi Pariwisata Prioritas (1217 - Kab. Samosir)	20.739,1	DAK
Industri Kecil dan Menengah - Tematik Penguatan Destinasi Pariwisata Prioritas (1903 - Kab. Bangka Barat)	9.953,9	DAK
Industri Kecil dan Menengah - Tematik Penguatan Destinasi Pariwisata Prioritas (1905 - Kab. Bangka Selatan)	2.020,6	DAK
Industri Kecil dan Menengah - Tematik Penguatan Destinasi Pariwisata Prioritas (1906 - Kab. Belitung Timur)	500,0	DAK
Industri Kecil dan Menengah - Tematik Penguatan Destinasi Pariwisata Prioritas (3306 - Kab. Purworejo)	7.465,4	DAK
Industri Kecil dan Menengah - Tematik Penguatan Destinasi Pariwisata Prioritas (3307 - Kab. Wonosobo)	4.777,9	DAK
Industri Kecil dan Menengah - Tematik Penguatan Destinasi Pariwisata Prioritas (3308 - Kab. Magelang)	572,1	DAK
Industri Kecil dan Menengah - Tematik Penguatan Destinasi Pariwisata Prioritas (3309 - Kab. Boyolali)	1.990,8	DAK
Industri Kecil dan Menengah - Tematik Penguatan Destinasi Pariwisata Prioritas (3310 - Kab. Klaten)	1.095,2	DAK
Industri Kecil dan Menengah - Tematik Penguatan Destinasi Pariwisata Prioritas (3312 - Kab. Wonogiri)	831,0	DAK
Industri Kecil dan Menengah - Tematik Penguatan Destinasi Pariwisata Prioritas (3314 - Kab. Sragen)	16.009,9	DAK
Industri Kecil dan Menengah - Tematik Penguatan Destinasi Pariwisata Prioritas (3322 - Kab. Semarang)	9.456,2	DAK
Industri Kecil dan Menengah - Tematik Penguatan Destinasi Pariwisata Prioritas (3374 - Kota Semarang)	6.619,3	DAK
Industri Kecil dan Menengah - Tematik Penguatan Destinasi Pariwisata Prioritas (3401 - Kab. Kulon Progo)	905,8	DAK
Industri Kecil dan Menengah - Tematik Penguatan Destinasi Pariwisata Prioritas (3508 - Kab. Lumajang)	2.364,1	DAK



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

Prioritas Nasional/ Major Project	Alokasi (Rp. Juta)	Instansi Pelaksana
Industri Kecil dan Menengah - Tematik Penguatan Destinasi Pariwisata Prioritas (3514 - Kab. Pasuruan)	500,0	DAK
Industri Kecil dan Menengah - Tematik Penguatan Destinasi Pariwisata Prioritas (3575 - Kota Pasuruan)	12.691,2	DAK
Industri Kecil dan Menengah - Tematik Penguatan Destinasi Pariwisata Prioritas (3576 - Kota Mojokerto)	18.790,4	DAK
Industri Kecil dan Menengah - Tematik Penguatan Destinasi Pariwisata Prioritas (5202 - Kab. Lombok Tengah)	12.243,3	DAK
Industri Kecil dan Menengah - Tematik Penguatan Destinasi Pariwisata Prioritas (5208 - Kab. Lombok Utara)	10.639,1	DAK
Industri Kecil dan Menengah - Tematik Penguatan Destinasi Pariwisata Prioritas (5271 - Kota Mataram)	4.414,9	DAK
Industri Kecil dan Menengah - Tematik Penguatan Destinasi Pariwisata Prioritas (5312 - Kab. Ngada)	2.082,0	DAK
Industri Kecil dan Menengah - Tematik Penguatan Destinasi Pariwisata Prioritas (5315 - Kab. Manggarai Barat)	11.944,7	DAK
Industri Kecil dan Menengah - Tematik Penguatan Destinasi Pariwisata Prioritas (7105 - Kab. Minahasa Selatan)	6.400,4	DAK
Industri Kecil dan Menengah - Tematik Penguatan Destinasi Pariwisata Prioritas (7171 - Kota Manado)	14.184,3	DAK
Industri Kecil dan Menengah - Tematik Penguatan Destinasi Pariwisata Prioritas (7407 - Kab. Wakatobi)	5.184,8	DAK
Industri Kecil dan Menengah - Tematik Penguatan Destinasi Pariwisata Prioritas (7471 - Kota Kendari)	8.510,6	DAK
Industri Kecil dan Menengah - Tematik Penguatan Destinasi Pariwisata Prioritas (7472 - Kota Bau Bau)	3.981,6	DAK
Industri Kecil dan Menengah - Tematik Penguatan Destinasi Pariwisata Prioritas (8207 - Kab. Pulau Morotai)	10.369,6	DAK
Industri Kecil dan Menengah - Tematik Penguatan Destinasi Pariwisata Prioritas (8272 - Kota Tidore Kepulauan)	8.407,6	DAK
Industri Kecil dan Menengah - Tematik Penguatan Destinasi Pariwisata Prioritas (9107 - Kab. Sorong)	9.175,0	DAK
Industri Kecil dan Menengah - Tematik Penguatan Destinasi Pariwisata Prioritas (9108 - Kab. Raja Ampat)	4.977,0	DAK
Industri Kecil dan Menengah - Tematik Penguatan Destinasi Pariwisata Prioritas (9171 - Kota Sorong)	1.393,5	DAK
Pelatihan Penguatan Kelembagaan dan Tata kelola Koperasi Modern	5.586,0	KEMENTERIAN KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH
Usaha Mikro yang difasilitasi Pendampingan untuk Peningkatan Usaha (KUR, SHAT)	4.180,1	KEMENTERIAN KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH
Bahan rumusan skema insentif bagi industri kreatif Kuliner, Kriya , Desain Interior, Arsitektur, Desain Komunikasi Visual, Desain Produk dan Fesyen	840,8	KEMENTERIAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF/BADAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

Prioritas Nasional/ Major Project	Alokasi (Rp. Juta)	Instansi Pelaksana
Produk kreatif subsektor Kuliner, Kriya, Desain Interior, Arsitektur, Desain Komunikasi Visual, Desain Produk dan Fesyen yang mendapat pendampingan dan inkubasi	18.130,0	KEMENTERIAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF/BADAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF
Produk kreatif subsektor Seni Musik, Film, Animasi, Video, Fotografi, Periklanan, Penerbitan, Seni Pertunjukan, Seni Rupa yang mendapat pendampingan dan inkubasi	5.531,7	KEMENTERIAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF/BADAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF
Produk Wisata dan Kegiatan (<i>Events</i>) di Kawasan Badan Otorita Danau Toba yang di promosi dan di publikasikan	2.600,0	KEMENTERIAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF/BADAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF
Produk Wisata dan Kegiatan (<i>Events</i>) di Kawasan Badan Otorita Borobudur yang di promosi dan di publikasikan	3.500,0	KEMENTERIAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF/BADAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF
Produk Wisata dan Kegiatan (<i>Events</i>) di Kawasan Badan Otorita Labuan Bajo Flores yang di Publikasikan	4.389,4	KEMENTERIAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF/BADAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF
<i>Aspek: Pengembangan Infrastruktur Wilayah</i>		
Lingkungan Hidup - Tematik Penguatan Destinasi Pariwisata Prioritas (1206 - Kab. Toba)	1.856,7	DAK
Lingkungan Hidup - Tematik Penguatan Destinasi Pariwisata Prioritas (1210 - Kab. Dairi)	1.779,0	DAK
Lingkungan Hidup - Tematik Penguatan Destinasi Pariwisata Prioritas (1217 - Kab. Samosir)	1.407,7	DAK
Lingkungan Hidup - Tematik Penguatan Destinasi Pariwisata Prioritas (1902 - Kab. Belitung)	2.758,0	DAK
Lingkungan Hidup - Tematik Penguatan Destinasi Pariwisata Prioritas (1903 - Kab. Bangka Barat)	1.864,9	DAK
Lingkungan Hidup - Tematik Penguatan Destinasi Pariwisata Prioritas (1905 - Kab. Bangka Selatan)	4.068,6	DAK
Lingkungan Hidup - Tematik Penguatan Destinasi Pariwisata Prioritas (3304 - Kab. Banjarnegara)	3.052,3	DAK
Lingkungan Hidup - Tematik Penguatan Destinasi Pariwisata Prioritas (3306 - Kab. Purworejo)	1.108,4	DAK
Lingkungan Hidup - Tematik Penguatan Destinasi Pariwisata Prioritas (3307 - Kab. Wonosobo)	1.634,7	DAK
Lingkungan Hidup - Tematik Penguatan Destinasi Pariwisata Prioritas (3309 - Kab. Boyolali)	4.068,6	DAK
Lingkungan Hidup - Tematik Penguatan Destinasi Pariwisata Prioritas (3310 - Kab. Klaten)	1.108,4	DAK
Lingkungan Hidup - Tematik Penguatan Destinasi Pariwisata Prioritas (3314 - Kab. Sragen)	1.634,7	DAK
Lingkungan Hidup - Tematik Penguatan Destinasi Pariwisata Prioritas (3322 - Kab. Semarang)	1.927,9	DAK
Lingkungan Hidup - Tematik Penguatan Destinasi Pariwisata Prioritas (3374 - Kota Semarang)	1.927,9	DAK
Lingkungan Hidup - Tematik Penguatan Destinasi Pariwisata Prioritas (3401 - Kab. Kulon Progo)	2.029,4	DAK
Lingkungan Hidup - Tematik Penguatan Destinasi Pariwisata Prioritas (3508 - Kab. Lumajang)	2.128,1	DAK
Lingkungan Hidup - Tematik Penguatan Destinasi Pariwisata Prioritas (3514 - Kab. Pasuruan)	4.658,9	DAK
Lingkungan Hidup - Tematik Penguatan Destinasi Pariwisata Prioritas (3575 - Kota Pasuruan)	1.137,6	DAK
Lingkungan Hidup - Tematik Penguatan Destinasi Pariwisata Prioritas (5208 - Kab. Lombok Utara)	2.082,8	DAK



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

Prioritas Nasional/ <i>Major Project</i>	Alokasi (Rp. Juta)	Instansi Pelaksana
Lingkungan Hidup - Tematik Penguatan Destinasi Pariwisata Prioritas (5271 - Kota Mataram)	1.108,4	DAK
Lingkungan Hidup - Tematik Penguatan Destinasi Pariwisata Prioritas (5312 - Kab. Ngada)	2.687,2	DAK
Lingkungan Hidup - Tematik Penguatan Destinasi Pariwisata Prioritas (5315 - Kab. Manggarai Barat)	1.766,3	DAK
Lingkungan Hidup - Tematik Penguatan Destinasi Pariwisata Prioritas (7105 - Kab. Minahasa Selatan)	4.594,9	DAK
Lingkungan Hidup - Tematik Penguatan Destinasi Pariwisata Prioritas (7171 - Kota Manado)	1.053,0	DAK
Lingkungan Hidup - Tematik Penguatan Destinasi Pariwisata Prioritas (7172 - Kota Bitung)	2.197,1	DAK
Lingkungan Hidup - Tematik Penguatan Destinasi Pariwisata Prioritas (7407 - Kab. Wakatobi)	1.914,0	DAK
Lingkungan Hidup - Tematik Penguatan Destinasi Pariwisata Prioritas (7471 - Kota Kendari)	1.634,7	DAK
Lingkungan Hidup - Tematik Penguatan Destinasi Pariwisata Prioritas (7472 - Kota Bau Bau)	1.766,3	DAK
Lingkungan Hidup - Tematik Penguatan Destinasi Pariwisata Prioritas (9107 - Kab. Sorong)	2.368,2	DAK
Lingkungan Hidup - Tematik Penguatan Destinasi Pariwisata Prioritas (9108 - Kab. Raja Ampat)	3.420,7	DAK
Lingkungan Hidup - Tematik Penguatan Destinasi Pariwisata Prioritas (9109 - Kab. Tambrau)	1.355,1	DAK
Lingkungan Hidup - Tematik Penguatan Destinasi Pariwisata Prioritas (8272 - Kota Tidore Kepulauan)	1.789,3	DAK
Pusat Informasi Geologi	7.251,5	KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
Warisan Geologi dan Geopark Nasional yang Ditetapkan	3.000,0	KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
Akses Internet	422.320,0	KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
Kabupaten/Kota Kreatif yang Dikembangkan	21.000,0	KEMENTERIAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF/BADAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF
Sarana Ruang Kreatif yang Difasilitasi	17.500,0	KEMENTERIAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF/BADAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF
Ruang Kreatif untuk Pendukung Pengembangan Destinasi Pariwisata Super Prioritas	1.000,0	KEMENTERIAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF/BADAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF (Terintegrasi dengan PSN)
Amenitas dan Aksesibilitas yang dikembangkan di Kawasan Otoritatif Badan Otorita Danau Toba	2.660,0	KEMENTERIAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF/BADAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF
Amenitas dan Aksesibilitas yang dikembangkan di Kawasan Otoritatif Badan Otorita Borobudur	6.351,0	KEMENTERIAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF/BADAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF
<i>Be Creative District</i> (BCD) yang Dikembangkan	750,0	KEMENTERIAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF/BADAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF
Amenitas, dan Aksesibilitas yang dikembangkan di Kawasan Otoritatif Badan Otorita Labuan Bajo Flores	1.000,0	KEMENTERIAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF/BADAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

Prioritas Nasional/ Major Project	Alokasi (Rp. Juta)	Instansi Pelaksana
Rehabilitasi Bangunan Cagar Budaya dan Istana	103.776,0	KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
Penataan Bangunan Kawasan Destinasi Wisata	100.674,4	KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
Penataan Bangunan Kawasan Cagar Budaya dan Permukiman Tradisional	62.818,4	KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
Penataan Kawasan Destinasi Wisata Danau Toba	81.287,8	KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
Penataan Kawasan Destinasi Wisata Borobudur	200,0	KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
Penataan Kawasan Destinasi Wisata Wakatobi	67.891,7	KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
Penataan Kawasan Destinasi Wisata Bromo - Tengger - Semeru	44.413,5	KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
Pembangunan Polsek (PN)	15.814,3	KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
<i>Sub: Pembangunan Desa Wisata dan Fasilitas BUMDes</i>		
<i>Aspek: Pengembangan Desa dan BUMDes Berbasis Pariwisata</i>		
Sarana Prasarana Desa Wisata yang Dibangun untuk Mendukung Destinasi Pariwisata	68.914,2	KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI (Terintegrasi dengan PSN)
Masyarakat Pelaku Wisata yang Ditingkatkan Kapasitasnya untuk Mendukung Desa Wisata	1.500,0	KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI (Terintegrasi dengan PSN)
Desa Wisata di Destinasi Pariwisata di Wilayah Destinasi I yang dikembangkan	11.000,0	KEMENTERIAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF/BADAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF (Terintegrasi dengan PSN)
Desa Wisata di Wilayah Destinasi II yang Dikembangkan	1.100,0	KEMENTERIAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF/BADAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF
<i>Sub: Perintisan Destinasi Pariwisata</i>		
<i>Aspek: Pengembangan Atraksi (Alam, Budaya, Buatan)</i>		
Destinasi Wisata Alam Prioritas yang Dikembangkan	14.300,0	KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN (Terintegrasi dengan PSN)
Destinasi Wisata Alam <i>Science, Academic, Voluntary, Education</i> yang Dikembangkan	33.150,0	KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN (Terintegrasi dengan PSN)
Destinasi Wisata Alam Bahari yang Dikembangkan	4.307,0	KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN (Terintegrasi dengan PSN)
Kejuaraan Multi <i>event</i> olahraga prestasi di tingkat regional dan internasional yang terfasilitasi	89.000,1	KEMENTERIAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
Warisan Budaya yang Dilindungi	28.362,1	KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
Pariwisata - Tematik Penguatan Destinasi Pariwisata Prioritas (3320 - Kab. Jepara)	3.859,1	DAK
Pariwisata - Tematik Penguatan Destinasi Pariwisata Prioritas (3322 - Kab. Semarang)	2.438,4	DAK
Pariwisata - Tematik Penguatan Destinasi Pariwisata Prioritas (3374 - Kota Semarang)	3.698,4	DAK
Pariwisata - Tematik Penguatan Destinasi Pariwisata Prioritas (3401 - Kab. Kulon Progo)	1.775,6	DAK



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

Prioritas Nasional/ <i>Major Project</i>	Alokasi (Rp. Juta)	Instansi Pelaksana
Pariwisata - Tematik Penguatan Destinasi Pariwisata Prioritas (3501 - Kab. Pacitan)	7.379,2	DAK
Pariwisata - Tematik Penguatan Destinasi Pariwisata Prioritas (3508 - Kab. Lumajang)	1.806,2	DAK
Pariwisata - Tematik Penguatan Destinasi Pariwisata Prioritas (3513 - Kab. Probolinggo)	2.379,7	DAK
Pariwisata - Tematik Penguatan Destinasi Pariwisata Prioritas (3514 - Kab. Pasuruan)	13.562,6	DAK
Pariwisata - Tematik Penguatan Destinasi Pariwisata Prioritas (3575 - Kota Pasuruan)	5.939,4	DAK
Pariwisata - Tematik Penguatan Destinasi Pariwisata Prioritas (3576 - Kota Mojokerto)	18.589,4	DAK
Pariwisata - Tematik Penguatan Destinasi Pariwisata Prioritas (5202 - Kab. Lombok Tengah)	5.036,8	DAK
Pariwisata - Tematik Penguatan Destinasi Pariwisata Prioritas (5208 - Kab. Lombok Utara)	15.574,9	DAK
Pariwisata - Tematik Penguatan Destinasi Pariwisata Prioritas (5271 - Kota Mataram)	10.739,8	DAK
Pariwisata - Tematik Penguatan Destinasi Pariwisata Prioritas (5312 - Kab. Ngada)	2.218,8	DAK
Pariwisata - Tematik Penguatan Destinasi Pariwisata Prioritas (5315 - Kab. Manggarai Barat)	7.590,0	DAK
Pariwisata - Tematik Penguatan Destinasi Pariwisata Prioritas (7105 - Kab. Minahasa Selatan)	8.259,0	DAK
Pariwisata - Tematik Penguatan Destinasi Pariwisata Prioritas (7171 - Kota Manado)	2.545,8	DAK
Pariwisata - Tematik Penguatan Destinasi Pariwisata Prioritas (7172 - Kota Bitung)	7.284,4	DAK
Pariwisata - Tematik Penguatan Destinasi Pariwisata Prioritas (7407 - Kab. Wakatobi)	13.900,8	DAK
Pariwisata - Tematik Penguatan Destinasi Pariwisata Prioritas (7471 - Kota Kendari)	2.246,2	DAK
Pariwisata - Tematik Penguatan Destinasi Pariwisata Prioritas (7472 - Kota Bau Bau)	7.235,6	DAK
Pariwisata - Tematik Penguatan Destinasi Pariwisata Prioritas (8207 - Kab. Pulau Morotai)	6.312,5	DAK
Pariwisata - Tematik Penguatan Destinasi Pariwisata Prioritas (8272 - Kota Tidore Kepulauan)	2.591,9	DAK
Pariwisata - Tematik Penguatan Destinasi Pariwisata Prioritas (9107 - Kab. Sorong)	2.402,2	DAK
Pariwisata - Tematik Penguatan Destinasi Pariwisata Prioritas (9108 - Kab. Raja Ampat)	4.461,9	DAK
Pariwisata - Tematik Penguatan Destinasi Pariwisata Prioritas (9109 - Kab. Tambrauw)	3.449,4	DAK
Pariwisata - Tematik Penguatan Destinasi Pariwisata Prioritas (9171 - Kota Sorong)	4.787,6	DAK
Pariwisata - Tematik Penguatan Destinasi Pariwisata Prioritas (1205 - Kab. Tapanuli Utara)	16.998,5	DAK
Pariwisata - Tematik Penguatan Destinasi Pariwisata Prioritas (1206 - Kab. Toba)	16.145,1	DAK
Pariwisata - Tematik Penguatan Destinasi Pariwisata Prioritas (1209 - Kab. Simalungun)	8.089,8	DAK



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

Prioritas Nasional/ <i>Major Project</i>	Alokasi (Rp. Juta)	Instansi Pelaksana
Pariwisata - Tematik Penguatan Destinasi Pariwisata Prioritas (1210 - Kab. Dairi)	2.360,3	DAK
Pariwisata - Tematik Penguatan Destinasi Pariwisata Prioritas (1211 - Kab. Karo)	7.531,8	DAK
Pariwisata - Tematik Penguatan Destinasi Pariwisata Prioritas (1215 - Kab. Humbang Hasundutan)	2.115,5	DAK
Pariwisata - Tematik Penguatan Destinasi Pariwisata Prioritas (1216 - Kab. Pakpak Bharat)	3.350,4	DAK
Pariwisata - Tematik Penguatan Destinasi Pariwisata Prioritas (1217 - Kab. Samosir)	15.140,8	DAK
Pariwisata - Tematik Penguatan Destinasi Pariwisata Prioritas (1902 - Kab. Belitung)	1.126,3	DAK
Pariwisata - Tematik Penguatan Destinasi Pariwisata Prioritas (1903 - Kab. Bangka Barat)	2.306,0	DAK
Pariwisata - Tematik Penguatan Destinasi Pariwisata Prioritas (1905 - Kab. Bangka Selatan)	15.315,4	DAK
Pariwisata - Tematik Penguatan Destinasi Pariwisata Prioritas (1906 - Kab. Belitung Timur)	4.781,0	DAK
Pariwisata - Tematik Penguatan Destinasi Pariwisata Prioritas (3304 - Kab. Banjarnegara)	5.458,7	DAK
Pariwisata - Tematik Penguatan Destinasi Pariwisata Prioritas (3306 - Kab. Purworejo)	5.066,1	DAK
Pariwisata - Tematik Penguatan Destinasi Pariwisata Prioritas (3307 - Kab. Wonosobo)	9.738,4	DAK
Pariwisata - Tematik Penguatan Destinasi Pariwisata Prioritas (3308 - Kab. Magelang)	11.182,9	DAK
Pariwisata - Tematik Penguatan Destinasi Pariwisata Prioritas (3310 - Kab. Klaten)	6.027,0	DAK
Pariwisata - Tematik Penguatan Destinasi Pariwisata Prioritas (3312 - Kab. Wonogiri)	5.110,4	DAK
Pariwisata - Tematik Penguatan Destinasi Pariwisata Prioritas (3314 - Kab. Sragen)	1.097,2	DAK
Sarana prasarana Wisata Bahari	7.300,0	KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN (Terintegrasi dengan PSN)
Pembangunan Pusat Jajanan Kuliner dan Cenderamata (PJKC) (P3DN)	6.000,0	KEMENTERIAN PERDAGANGAN
<i>Sub: Pembangunan Amenitas Kawasan Pariwisata</i>		
<i>Aspek: Pengembangan Amenitas Pariwisata</i>		
Amenitas Wisata yang dibangun/dikembangkan	4.557,0	KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI
Atraksi, Aksesibilitas, dan Amenitas Pariwisata di Destinasi Pariwisata Prioritas Regional II yang Dikembangkan	1.500,0	KEMENTERIAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF/BADAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF (Terintegrasi dengan PSN)
Atraksi, Aksesibilitas dan Amenitas Pariwisata di Destinasi Pariwisata Prioritas di Wilayah Destinasi I yang Dikembangkan	2.300,0	KEMENTERIAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF/BADAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF
<i>Sub: Pembangunan Bandara dan Pelabuhan</i>		
<i>Aspek: Pembangunan Sarpras Konektivitas Udara</i>		
Pengembangan Bandar Udara Matahora - PN	4.063,6	KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
Pengembangan Bandar Udara DEO-Sorong, Papua Barat	60.000,0	KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
Pengembangan Bandar Udara Morotai - PN	2.000,0	KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
Pengembangan Bandar Udara Sibisa - PN	9.433,2	KEMENTERIAN PERHUBUNGAN



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

Prioritas Nasional/ Major Project	Alokasi (Rp. Juta)	Instansi Pelaksana
<i>Aspek: Pembangunan Sarpras Konektivitas Laut</i>		
Pembangunan Pelabuhan Penyeberangan Salawati Kab. Raja Ampat Tahap II - SBSN	5.493,3	KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
Pembangunan Pelabuhan Penyeberangan Batanta Kab. Raja Ampat Tahap II - SBSN	2.500,0	KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
Pembangunan Pelabuhan Penyeberangan Teluk Dalam Tahap V	14.948,7	KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
Pembangunan Pelabuhan Onan Rungu Tahap III - Provinsi Sumatera Utara	17.165,5	KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
Pembangunan Pelabuhan Sipinggah Tahap IV - Provinsi Sumatera Utara	22.807,8	KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
Pemenuhan Kapal Pemburu Cepat (PN)	23.000,0	KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
<i>Sub: Pembangunan Jalan di DPP</i>		
<i>Aspek: Pembangunan Sarpras Konektivitas Jalan, Darat, dan KA</i>		
Jalan - Tematik Penguatan Destinasi Pariwisata Prioritas (1205 - Kab. Tapanuli Utara)	11.055,8	DAK
Jalan - Tematik Penguatan Destinasi Pariwisata Prioritas (1206 - Kab. Toba)	10.946,0	DAK
Jalan - Tematik Penguatan Destinasi Pariwisata Prioritas (1210 - Kab. Dairi)	1.819,3	DAK
Jalan - Tematik Penguatan Destinasi Pariwisata Prioritas (1211 - Kab. Karo)	6.745,0	DAK
Jalan - Tematik Penguatan Destinasi Pariwisata Prioritas (1215 - Kab. Humbang Hasundutan)	10.783,9	DAK
Jalan - Tematik Penguatan Destinasi Pariwisata Prioritas (1216 - Kab. Pakpak Bharat)	13.452,8	DAK
Jalan - Tematik Penguatan Destinasi Pariwisata Prioritas (1217 - Kab. Samosir)	11.323,7	DAK
Jalan - Tematik Penguatan Destinasi Pariwisata Prioritas (1902 - Kab. Belitung)	10.576,8	DAK
Jalan - Tematik Penguatan Destinasi Pariwisata Prioritas (1903 - Kab. Bangka Barat)	10.408,5	DAK
Jalan - Tematik Penguatan Destinasi Pariwisata Prioritas (1905 - Kab. Bangka Selatan)	10.521,9	DAK
Jalan - Tematik Penguatan Destinasi Pariwisata Prioritas (1906 - Kab. Belitung Timur)	10.032,7	DAK
Jalan - Tematik Penguatan Destinasi Pariwisata Prioritas (3307 - Kab. Wonosobo)	10.520,7	DAK
Jalan - Tematik Penguatan Destinasi Pariwisata Prioritas (3310 - Kab. Klaten)	9.259,7	DAK
Jalan - Tematik Penguatan Destinasi Pariwisata Prioritas (3312 - Kab. Wonogiri)	8.455,2	DAK
Jalan - Tematik Penguatan Destinasi Pariwisata Prioritas (3314 - Kab. Sragen)	12.995,0	DAK
Jalan - Tematik Penguatan Destinasi Pariwisata Prioritas (3401 - Kab. Kulon Progo)	12.075,7	DAK
Jalan - Tematik Penguatan Destinasi Pariwisata Prioritas (3501 - Kab. Pacitan)	10.559,6	DAK
Jalan - Tematik Penguatan Destinasi Pariwisata Prioritas (3575 - Kota Pasuruan)	7.181,7	DAK
Jalan - Tematik Penguatan Destinasi Pariwisata Prioritas (3576 - Kota Mojokerto)	11.042,4	DAK



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

Prioritas Nasional/ <i>Major Project</i>	Alokasi (Rp. Juta)	Instansi Pelaksana
Jalan - Tematik Penguatan Destinasi Pariwisata Prioritas (5202 - Kab. Lombok Tengah)	8.302,1	DAK
Jalan - Tematik Penguatan Destinasi Pariwisata Prioritas (5208 - Kab. Lombok Utara)	8.568,5	DAK
Jalan - Tematik Penguatan Destinasi Pariwisata Prioritas (5312 - Kab. Ngada)	12.978,4	DAK
Jalan - Tematik Penguatan Destinasi Pariwisata Prioritas (5315 - Kab. Manggarai Barat)	11.585,1	DAK
Jalan - Tematik Penguatan Destinasi Pariwisata Prioritas (7105 - Kab. Minahasa Selatan)	8.179,6	DAK
Jalan - Tematik Penguatan Destinasi Pariwisata Prioritas (7172 - Kota Bitung)	8.792,8	DAK
Jalan - Tematik Penguatan Destinasi Pariwisata Prioritas (7407 - Kab. Wakatobi)	12.592,0	DAK
Jalan - Tematik Penguatan Destinasi Pariwisata Prioritas (7472 - Kota Bau Bau)	14.643,4	DAK
Jalan - Tematik Penguatan Destinasi Pariwisata Prioritas (8207 - Kab. Pulau Morotai)	10.409,5	DAK
Jalan - Tematik Penguatan Destinasi Pariwisata Prioritas (8272 - Kota Tidore Kepulauan)	8.990,0	DAK
Jalan - Tematik Penguatan Destinasi Pariwisata Prioritas (9107 - Kab. Sorong)	15.587,5	DAK
Jalan - Tematik Penguatan Destinasi Pariwisata Prioritas (9108 - Kab. Raja Ampat)	12.311,7	DAK
Jalan - Tematik Penguatan Destinasi Pariwisata Prioritas (9109 - Kab. Tambrauw)	15.771,9	DAK
Jalan - Tematik Penguatan Destinasi Pariwisata Prioritas (9171 - Kota Sorong)	13.490,7	DAK
Jalan - Tematik Penguatan Destinasi Pariwisata Prioritas (12 - Provinsi Sumatera Utara)	10.932,3	DAK
Jalan - Tematik Penguatan Destinasi Pariwisata Prioritas (19 - Provinsi Kepulauan Bangka Belitung)	10.017,3	DAK
Jalan - Tematik Penguatan Destinasi Pariwisata Prioritas (33 - Provinsi Jawa Tengah)	9.950,0	DAK
Jalan - Tematik Penguatan Destinasi Pariwisata Prioritas (34 - Provinsi DI Yogyakarta)	14.655,5	DAK
Jalan - Tematik Penguatan Destinasi Pariwisata Prioritas (35 - Provinsi Jawa Timur)	9.744,0	DAK
Jalan - Tematik Penguatan Destinasi Pariwisata Prioritas (52 - Provinsi Nusa Tenggara Barat)	10.042,1	DAK
Jalan - Tematik Penguatan Destinasi Pariwisata Prioritas (53 - Provinsi Nusa Tenggara Timur)	12.987,0	DAK
Jalan - Tematik Penguatan Destinasi Pariwisata Prioritas (71 - Provinsi Sulawesi Utara)	7.752,5	DAK
Jalan - Tematik Penguatan Destinasi Pariwisata Prioritas (74 - Provinsi Sulawesi Tenggara)	10.006,0	DAK
Jalan - Tematik Penguatan Destinasi Pariwisata Prioritas (82 - Provinsi Maluku Utara)	12.204,5	DAK
Jalan - Tematik Penguatan Destinasi Pariwisata Prioritas (91 - Provinsi Papua Barat)	13.987,7	DAK
Peningkatan Jalur KA Lintas Kisaran - Rantauprapat Tahap I Segmen Kisaran - Mambangmuda	170.103,6	KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
Reaktivasi Jalur Kereta Api Antara Stasiun Semarang Tawang - Pelabuhan Tanjung Mas	23.311,5	KEMENTERIAN PERHUBUNGAN



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

Prioritas Nasional/ <i>Major Project</i>	Alokasi (Rp. Juta)	Instansi Pelaksana
Dukungan BUMN	24.736.816,3	
Pembangunan Jalan Tol Solo - Yogyakarta - Kulonprogo		BUMN (Terintegrasi dengan PSN)
Pembangunan Jalan Tol Yogyakarta -Bawen		BUMN (Terintegrasi dengan PSN)
Mandalika Urban & Tourism Project		BUMN
Penambahan Lingkup Jalan Tol Ngawi - Kertosono - Kediri		BUMN (Terintegrasi dengan PSN)
Roadmap HIG sesuai dengan 7 pilar strategi untuk mewujudkan visi pembentukan holding hotel BUMN		BUMN
Kerja sama BOT Hotel Bintang 3 dengan PT Hotel Karya Indonesia		BUMN
Revitalisasi Kawasan Grand Inna Bali Beach seluas 41.3 Ha menuju KEK Pariwisata Kesehatan		BUMN
Pembangunan RS bertaraf Internasional bekerjasama dengan Mayo clinic		BUMN
Pembangunan Hotel Bintang 4 untuk Infrastruktur Dasar dan Fasilitas Penunjang Kawasan Pariwisata Tana Mori di Labuan Bajo		BUMN (Terintegrasi dengan PSN)
KEK Kesehatan GIBB Sanur		BUMN (Terintegrasi dengan PSN)
<i>TMI The Ultimate Showcase of Indonesia</i>		BUMN
Zone 2 DPSP Borobudur - Development		BUMN (Terintegrasi dengan PSN)
Pengembangan Bali <i>Maritime Tourism Hub</i> (BMTH)		BUMN (Terintegrasi dengan PSN)
Dukungan Swasta	209.300,0 ^{ai}	
Pengembangan Kawasan Pariwisata Tana Mori		Swasta
Pembangunan Hotel dan Resort		Swasta
3) MP: Kawasan Industri Prioritas dan Smelter		
Dukungan Belanja K/L	173.399,3	
<i>Sub: Fasilitas Kemitraan Usaha dan Penyediaan SDM</i>		
<i>Aspek: Penyediaan SDM</i>		
Mahasiswa dan Lulusan Program DII, DIII dan DIV Reguler	76.017,6	KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN
Mahasiswa dan Lulusan Program DI Kerjasama Industri	3.486,3	KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN
<i>Sub: Peningkatan Investasi dan Promosi Ekspor</i>		
<i>Aspek: Peningkatan Investasi</i>		
Hasil Monitoring Pembangunan Fasilitas Pengolahan Pemurnian Mineral dalam Negeri	2.619,2	KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
Fasilitas Penyelesaian Masalah Investasi Wilayah IV - Pusat	1.873,5	KEMENTERIAN INVESTASI/BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
Eksekusi Realisasi Investasi Proyek-Proyek Mangkrak Di Wilayah Timur - Pusat	1.000,0	KEMENTERIAN INVESTASI/BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
Fasilitas Penyelesaian Masalah Investasi Wilayah II - Pusat	1.879,5	KEMENTERIAN INVESTASI/BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
Pengembangan Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (OSS) - Pusat	34.000,0	KEMENTERIAN INVESTASI/BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
Fasilitas Penyelesaian Masalah Investasi Wilayah III	1.374,3	KEMENTERIAN INVESTASI/BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

Prioritas Nasional/ Major Project	Alokasi (Rp. Juta)	Instansi Pelaksana
Analisis Negara Target dan Negara Pesaing	4.100,0	KEMENTERIAN INVESTASI/BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
Layanan Pendampingan Keberlanjutan Investasi	3.631,4	KEMENTERIAN INVESTASI/BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
Website Penanaman Modal	1.500,0	KEMENTERIAN INVESTASI/BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
Kawasan Industri (KI) prioritas di luar Jawa yang beroperasi dan meningkatkan investasi	2.300,0	KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN (Terintegrasi dengan PSN)
Kawasan Industri (KI) yang dikembangkan	1.250,0	KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN (Terintegrasi dengan PSN)
Industri logam yang terfasilitasi dalam rangka peningkatan daya saing dan produktivitas	1.000,0	KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN
<i>Aspek: Promosi Ekspor</i>		
Rekomendasi Kebijakan terkait Tindak Lanjut Pelaksanaan Perundingan	1.989,8	KEMENTERIAN PERDAGANGAN
<i>Sub: Pembangunan Infrastruktur KI dan Smelter</i>		
<i>Aspek: Infrastruktur Dalam Kawasan</i>		
Rehabilitasi Kawasan Industri Palu dan Pirnas	14.200,0	KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN
<i>Sub: Harmonisasi Regulasi dan Lainnya</i>		
<i>Aspek: Harmonisasi Regulasi</i>		
Draft Kebijakan Rencana Produksi dan Pemanfaatan Batubara Untuk Kebutuhan Dalam Negeri Mineral Logam dan Batubara	1.250,0	KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
Tingkat Implementasi P3DN dan Peningkatan TKDN pada Subsektor Pertambangan Mineral	3.451,1	KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
Rekomendasi Kebijakan Ekspor Produk Industri dan Pertambangan	1.150,0	KEMENTERIAN PERDAGANGAN
Industri Smelter Logam Bukan Besi yang termonitor dan terevaluasi perkembangannya	1.500,0	KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN
Dukungan BUMN	31.639.690,0	
Pekerjaan Infrastruktur Kawasan Industri Batang		BUMN (Terintegrasi dengan PSN)
Kawasan Industri Subang/Rebana Technopolis Subang		BUMN
Pembangunan Smelter Grade Alumina Refinery (SGAR)		BUMN
Pembangunan Smelter Pengolahan Tembaga dan Anode Slime		BUMN
Pengembangan Industri EV Battery Terintegrasi		BUMN (Terintegrasi dengan PSN)
Revitalisasi Tanki LNG Arun		BUMN
Pembangunan Kawasan Industri Takalar		BUMN (Terintegrasi dengan PSN)
Dukungan Swasta	1.025.802.080,0 ^{a)}	
Pengembangan dan Pengelolaan KI Tanah Kuning		Swasta (Terintegrasi dengan PSN)
Pembangunan KI Weda Bay		Swasta
Pembangunan KI Ketapang		Swasta (Terintegrasi dengan PSN)
Pembangunan Industri Petrokimia Terintegrasi		Swasta
Pembangunan Infrastruktur KI Sadai		Swasta
Pembangunan Smelter Alumina		Swasta



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

Prioritas Nasional/ Major Project	Alokasi (Rp. Juta)	Instansi Pelaksana
Pembangunan Smelter Nikel		Swasta
Pembangunan Pabrik Petrokimia		Swasta
Pembangunan Pabrik <i>Rotary Kiln Electric Furnace</i> (RKEF) & <i>High-Pressure Acid Leach</i> (HPAL)		Swasta (Terintegrasi dengan PSN)
Pembangunan Pabrik Penambangan Nikel		Swasta
Pembangunan Pabrik Perakitan <i>Server</i>		Swasta
4) MP: Penguatan Jaminan Usaha Serta 350 Korporasi Petani dan Nelayan		
Dukungan Belanja K/L dan DAK	7.518.116,3	
<i>Aspek: Penguatan Kelembagaan Petani dan Nelayan</i>		
Kelembagaan Usaha Pembudidaya Ikan yang dikembangkan (MP Korporasi)	3.000,0	KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
Kelompok Usaha Bersama (KUB) yang Meningkatkan Kapasitas Kelembagaannya (MP Korporasi)	1.250,0	KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
Lembaga yang tereduksi akses pembiayaan, investasi, jaringan pemasaran dan ekspor - Provinsi Jawa Barat	380,0	KEMENTERIAN PERTANIAN
Alat dan Mesin Pertanian Pra Panen Sub Sektor Tanaman Pangan	129.896,4	KEMENTERIAN PERTANIAN
Lembaga yang tereduksi akses pembiayaan, investasi, jaringan pemasaran dan ekspor - Provinsi Aceh	125,0	KEMENTERIAN PERTANIAN
Lembaga yang tereduksi akses pembiayaan, investasi, jaringan pemasaran dan ekspor - Provinsi Sumatera Barat	295,0	KEMENTERIAN PERTANIAN
Lembaga yang tereduksi akses pembiayaan, investasi, jaringan pemasaran dan ekspor - Provinsi Sumatera Selatan	225,0	KEMENTERIAN PERTANIAN
Lembaga yang tereduksi akses pembiayaan, investasi, jaringan pemasaran dan ekspor - Provinsi Bengkulu	205,0	KEMENTERIAN PERTANIAN
Lembaga yang tereduksi akses pembiayaan, investasi, jaringan pemasaran dan ekspor - Provinsi Lampung	420,0	KEMENTERIAN PERTANIAN
Lembaga yang tereduksi akses pembiayaan, investasi, jaringan pemasaran dan ekspor - Provinsi Jawa Tengah	430,0	KEMENTERIAN PERTANIAN
Lembaga yang tereduksi akses pembiayaan, investasi, jaringan pemasaran dan ekspor - Provinsi Jawa Timur	500,0	KEMENTERIAN PERTANIAN
Lembaga yang tereduksi akses pembiayaan, investasi, jaringan pemasaran dan ekspor - Provinsi Nusa Tenggara Barat	535,0	KEMENTERIAN PERTANIAN
Lembaga yang tereduksi akses pembiayaan, investasi, jaringan pemasaran dan ekspor - Provinsi Kalimantan Timur	385,0	KEMENTERIAN PERTANIAN
Lembaga yang tereduksi akses pembiayaan, investasi, jaringan pemasaran dan ekspor - Provinsi Sulawesi Tengah	200,0	KEMENTERIAN PERTANIAN
Lembaga yang tereduksi akses pembiayaan, investasi, jaringan pemasaran dan ekspor - Provinsi Sulawesi Selatan	435,0	KEMENTERIAN PERTANIAN
<i>Aspek: Penerapan Good Agricultural Practices dan Precision Farming/ Agro Maritim 4.0</i>		
Irigasi - Tematik Penguatan Kawasan Sentra Produksi Pangan (Pertanian, Perikanan, dan Hewani) (11 - Provinsi Aceh)	20.285,4	DAK



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

Prioritas Nasional/ <i>Major Project</i>	Alokasi (Rp. Juta)	Instansi Pelaksana
Irigasi - Tematik Penguatan Kawasan Sentra Produksi Pangan (Pertanian, Perikanan, dan Hewani) (1104 - Kab. Aceh Tenggara)	2.218,8 DAK	
Irigasi - Tematik Penguatan Kawasan Sentra Produksi Pangan (Pertanian, Perikanan, dan Hewani) (1111 - Kab. Aceh Utara)	6.621,8 DAK	
Irigasi - Tematik Penguatan Kawasan Sentra Produksi Pangan (Pertanian, Perikanan, dan Hewani) (1218 - Kab. Serdang Bedagai)	10.399,6 DAK	
Irigasi - Tematik Penguatan Kawasan Sentra Produksi Pangan (Pertanian, Perikanan, dan Hewani) (1220 - Kab. Padang Lawas Utara)	5.096,3 DAK	
Irigasi - Tematik Penguatan Kawasan Sentra Produksi Pangan (Pertanian, Perikanan, dan Hewani) (1224 - Kab. Nias Utara)	7.404,9 DAK	
Irigasi - Tematik Penguatan Kawasan Sentra Produksi Pangan (Pertanian, Perikanan, dan Hewani) (13 - Provinsi Sumatera Barat)	20.650,1 DAK	
Irigasi - Tematik Penguatan Kawasan Sentra Produksi Pangan (Pertanian, Perikanan, dan Hewani) (1302 - Kab. Pesisir Selatan)	5.994,0 DAK	
Irigasi - Tematik Penguatan Kawasan Sentra Produksi Pangan (Pertanian, Perikanan, dan Hewani) (1306 - Kab. Padang Pariaman)	7.678,6 DAK	
Irigasi - Tematik Penguatan Kawasan Sentra Produksi Pangan (Pertanian, Perikanan, dan Hewani) (1309 - Kab. Pasaman)	7.994,1 DAK	
Irigasi - Tematik Penguatan Kawasan Sentra Produksi Pangan (Pertanian, Perikanan, dan Hewani) (14 - Provinsi Riau)	10.293,2 DAK	
Irigasi - Tematik Penguatan Kawasan Sentra Produksi Pangan (Pertanian, Perikanan, dan Hewani) (1403 - Kab. Indragiri Hilir)	1.133,7 DAK	
Irigasi - Tematik Penguatan Kawasan Sentra Produksi Pangan (Pertanian, Perikanan, dan Hewani) (1409 - Kab. Rokan Hilir)	2.905,4 DAK	
Irigasi - Tematik Penguatan Kawasan Sentra Produksi Pangan (Pertanian, Perikanan, dan Hewani) (15 - Provinsi Jambi)	13.299,2 DAK	
Irigasi - Tematik Penguatan Kawasan Sentra Produksi Pangan (Pertanian, Perikanan, dan Hewani) (1504 - Kab. Batanghari)	1.604,0 DAK	
Irigasi - Tematik Penguatan Kawasan Sentra Produksi Pangan (Pertanian, Perikanan, dan Hewani) (1506 - Kab. Tanjung Jabung Timur)	16.438,1 DAK	
Irigasi - Tematik Penguatan Kawasan Sentra Produksi Pangan (Pertanian, Perikanan, dan Hewani) (1609 - Kab. Ogan Komering Ulu Timur)	5.352,9 DAK	
Irigasi - Tematik Penguatan Kawasan Sentra Produksi Pangan (Pertanian, Perikanan, dan Hewani) (17 - Provinsi Bengkulu)	9.193,0 DAK	
Irigasi - Tematik Penguatan Kawasan Sentra Produksi Pangan (Pertanian, Perikanan, dan Hewani) (1704 - Kab. Kaur)	4.344,2 DAK	
Irigasi - Tematik Penguatan Kawasan Sentra Produksi Pangan (Pertanian, Perikanan, dan Hewani) (18 - Provinsi Lampung)	18.612,6 DAK	
Irigasi - Tematik Penguatan Kawasan Sentra Produksi Pangan (Pertanian, Perikanan, dan Hewani) (1803 - Kab. Lampung Selatan)	4.944,9 DAK	



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

Prioritas Nasional/ <i>Major Project</i>	Alokasi (Rp. Juta)	Instansi Pelaksana
Irigasi - Tematik Penguatan Kawasan Sentra Produksi Pangan (Pertanian, Perikanan, dan Hewani) (1805 - Kab. Lampung Tengah)	4.461,3 DAK	
Irigasi - Tematik Penguatan Kawasan Sentra Produksi Pangan (Pertanian, Perikanan, dan Hewani) (1808 - Kab. Tulang Bawang)	11.691,9 DAK	
Irigasi - Tematik Penguatan Kawasan Sentra Produksi Pangan (Pertanian, Perikanan, dan Hewani) (19 - Provinsi Kepulauan Bangka Belitung)	22.947,2 DAK	
Irigasi - Tematik Penguatan Kawasan Sentra Produksi Pangan (Pertanian, Perikanan, dan Hewani) (1905 - Kab. Bangka Selatan)	6.847,5 DAK	
Irigasi - Tematik Penguatan Kawasan Sentra Produksi Pangan (Pertanian, Perikanan, dan Hewani) (32 - Provinsi Jawa Barat)	96.028,8 DAK	
Irigasi - Tematik Penguatan Kawasan Sentra Produksi Pangan (Pertanian, Perikanan, dan Hewani) (3202 - Kab. Sukabumi)	22.032,7 DAK	
Irigasi - Tematik Penguatan Kawasan Sentra Produksi Pangan (Pertanian, Perikanan, dan Hewani) (3205 - Kab. Garut)	6.987,4 DAK	
Irigasi - Tematik Penguatan Kawasan Sentra Produksi Pangan (Pertanian, Perikanan, dan Hewani) (3206 - Kab. Tasikmalaya)	1.917,4 DAK	
Irigasi - Tematik Penguatan Kawasan Sentra Produksi Pangan (Pertanian, Perikanan, dan Hewani) (3207 - Kab. Ciamis)	1.914,0 DAK	
Irigasi - Tematik Penguatan Kawasan Sentra Produksi Pangan (Pertanian, Perikanan, dan Hewani) (3209 - Kab. Cirebon)	16.292,8 DAK	
Irigasi - Tematik Penguatan Kawasan Sentra Produksi Pangan (Pertanian, Perikanan, dan Hewani) (3212 - Kab. Indramayu)	3.499,6 DAK	
Irigasi - Tematik Penguatan Kawasan Sentra Produksi Pangan (Pertanian, Perikanan, dan Hewani) (3213 - Kab. Subang)	8.838,7 DAK	
Irigasi - Tematik Penguatan Kawasan Sentra Produksi Pangan (Pertanian, Perikanan, dan Hewani) (3214 - Kab. Purwakarta)	5.062,4 DAK	
Irigasi - Tematik Penguatan Kawasan Sentra Produksi Pangan (Pertanian, Perikanan, dan Hewani) (3215 - Kab. Karawang)	3.092,4 DAK	
Irigasi - Tematik Penguatan Kawasan Sentra Produksi Pangan (Pertanian, Perikanan, dan Hewani) (33 - Provinsi Jawa Tengah)	14.058,4 DAK	
Irigasi - Tematik Penguatan Kawasan Sentra Produksi Pangan (Pertanian, Perikanan, dan Hewani) (3301 - Kab. Cilacap)	11.045,3 DAK	
Irigasi - Tematik Penguatan Kawasan Sentra Produksi Pangan (Pertanian, Perikanan, dan Hewani) (3307 - Kab. Wonosobo)	7.361,7 DAK	
Irigasi - Tematik Penguatan Kawasan Sentra Produksi Pangan (Pertanian, Perikanan, dan Hewani) (3311 - Kab. Sukoharjo)	1.933,0 DAK	
Irigasi - Tematik Penguatan Kawasan Sentra Produksi Pangan (Pertanian, Perikanan, dan Hewani) (3313 - Kab. Karanganyar)	5.321,0 DAK	
Irigasi - Tematik Penguatan Kawasan Sentra Produksi Pangan (Pertanian, Perikanan, dan Hewani) (3315 - Kab. Grobogan)	5.864,2 DAK	



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

Prioritas Nasional/ <i>Major Project</i>	Alokasi (Rp. Juta)	Instansi Pelaksana
Irigasi - Tematik Penguatan Kawasan Sentra Produksi Pangan (Pertanian, Perikanan, dan Hewani) (3317 - Kab. Rembang)	12.721,5 DAK	
Irigasi - Tematik Penguatan Kawasan Sentra Produksi Pangan (Pertanian, Perikanan, dan Hewani) (3320 - Kab. Jepara)	10.296,8 DAK	
Irigasi - Tematik Penguatan Kawasan Sentra Produksi Pangan (Pertanian, Perikanan, dan Hewani) (3322 - Kab. Semarang)	10.798,4 DAK	
Irigasi - Tematik Penguatan Kawasan Sentra Produksi Pangan (Pertanian, Perikanan, dan Hewani) (3323 - Kab. Temanggung)	14.544,0 DAK	
Irigasi - Tematik Penguatan Kawasan Sentra Produksi Pangan (Pertanian, Perikanan, dan Hewani) (3324 - Kab. Kendal)	4.622,9 DAK	
Irigasi - Tematik Penguatan Kawasan Sentra Produksi Pangan (Pertanian, Perikanan, dan Hewani) (3326 - Kab. Pekalongan)	4.828,7 DAK	
Irigasi - Tematik Penguatan Kawasan Sentra Produksi Pangan (Pertanian, Perikanan, dan Hewani) (34 - Provinsi DI Yogyakarta)	8.825,0 DAK	
Irigasi - Tematik Penguatan Kawasan Sentra Produksi Pangan (Pertanian, Perikanan, dan Hewani) (3404 - Kab. Sleman)	2.271,7 DAK	
Irigasi - Tematik Penguatan Kawasan Sentra Produksi Pangan (Pertanian, Perikanan, dan Hewani) (35 - Provinsi Jawa Timur)	82.238,0 DAK	
Irigasi - Tematik Penguatan Kawasan Sentra Produksi Pangan (Pertanian, Perikanan, dan Hewani) (3510 - Kab. Banyuwangi)	9.668,8 DAK	
Irigasi - Tematik Penguatan Kawasan Sentra Produksi Pangan (Pertanian, Perikanan, dan Hewani) (3518 - Kab. Nganjuk)	1.000,0 DAK	
Irigasi - Tematik Penguatan Kawasan Sentra Produksi Pangan (Pertanian, Perikanan, dan Hewani) (3520 - Kab. Magetan)	1.765,6 DAK	
Irigasi - Tematik Penguatan Kawasan Sentra Produksi Pangan (Pertanian, Perikanan, dan Hewani) (3521 - Kab. Ngawi)	14.832,3 DAK	
Irigasi - Tematik Penguatan Kawasan Sentra Produksi Pangan (Pertanian, Perikanan, dan Hewani) (3523 - Kab. Tuban)	1.502,7 DAK	
Irigasi - Tematik Penguatan Kawasan Sentra Produksi Pangan (Pertanian, Perikanan, dan Hewani) (3524 - Kab. Lamongan)	1.966,9 DAK	
Irigasi - Tematik Penguatan Kawasan Sentra Produksi Pangan (Pertanian, Perikanan, dan Hewani) (3526 - Kab. Bangkalan)	2.867,7 DAK	
Irigasi - Tematik Penguatan Kawasan Sentra Produksi Pangan (Pertanian, Perikanan, dan Hewani) (3529 - Kab. Sumenep)	5.449,8 DAK	
Irigasi - Tematik Penguatan Kawasan Sentra Produksi Pangan (Pertanian, Perikanan, dan Hewani) (36 - Provinsi Banten)	2.499,7 DAK	
Irigasi - Tematik Penguatan Kawasan Sentra Produksi Pangan (Pertanian, Perikanan, dan Hewani) (3601 - Kab. Pandeglang)	10.391,1 DAK	
Irigasi - Tematik Penguatan Kawasan Sentra Produksi Pangan (Pertanian, Perikanan, dan Hewani) (3604 - Kab. Serang)	5.281,7 DAK	



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

Prioritas Nasional/ <i>Major Project</i>	Alokasi (Rp. Juta)	Instansi Pelaksana
Irigasi - Tematik Penguatan Kawasan Sentra Produksi Pangan (Pertanian, Perikanan, dan Hewani) (51 - Provinsi Bali)	21.254,2	DAK
Irigasi - Tematik Penguatan Kawasan Sentra Produksi Pangan (Pertanian, Perikanan, dan Hewani) (5108 - Kab. Buleleng)	2.818,1	DAK
Irigasi - Tematik Penguatan Kawasan Sentra Produksi Pangan (Pertanian, Perikanan, dan Hewani) (52 - Provinsi Nusa Tenggara Barat)	37.001,9	DAK
Irigasi - Tematik Penguatan Kawasan Sentra Produksi Pangan (Pertanian, Perikanan, dan Hewani) (5203 - Kab. Lombok Timur)	21.331,8	DAK
Irigasi - Tematik Penguatan Kawasan Sentra Produksi Pangan (Pertanian, Perikanan, dan Hewani) (5204 - Kab. Sumbawa)	15.925,7	DAK
Irigasi - Tematik Penguatan Kawasan Sentra Produksi Pangan (Pertanian, Perikanan, dan Hewani) (5206 - Kab. Bima)	8.532,8	DAK
Irigasi - Tematik Penguatan Kawasan Sentra Produksi Pangan (Pertanian, Perikanan, dan Hewani) (5314 - Kab. Rote Ndao)	6.016,2	DAK
Irigasi - Tematik Penguatan Kawasan Sentra Produksi Pangan (Pertanian, Perikanan, dan Hewani) (61 - Provinsi Kalimantan Barat)	20.280,8	DAK
Irigasi - Tematik Penguatan Kawasan Sentra Produksi Pangan (Pertanian, Perikanan, dan Hewani) (6103 - Kab. Landak)	3.176,6	DAK
Irigasi - Tematik Penguatan Kawasan Sentra Produksi Pangan (Pertanian, Perikanan, dan Hewani) (6112 - Kab. Kubu Raya)	5.925,4	DAK
Irigasi - Tematik Penguatan Kawasan Sentra Produksi Pangan (Pertanian, Perikanan, dan Hewani) (63 - Provinsi Kalimantan Selatan)	47.726,6	DAK
Irigasi - Tematik Penguatan Kawasan Sentra Produksi Pangan (Pertanian, Perikanan, dan Hewani) (6306 - Kab. Hulu Sungai Selatan)	9.338,4	DAK
Irigasi - Tematik Penguatan Kawasan Sentra Produksi Pangan (Pertanian, Perikanan, dan Hewani) (64 - Provinsi Kalimantan Timur)	1.974,8	DAK
Irigasi - Tematik Penguatan Kawasan Sentra Produksi Pangan (Pertanian, Perikanan, dan Hewani) (6403 - Kab. Kutai Kartanegara)	2.840,7	DAK
Irigasi - Tematik Penguatan Kawasan Sentra Produksi Pangan (Pertanian, Perikanan, dan Hewani) (71 - Provinsi Sulawesi Utara)	13.287,4	DAK
Irigasi - Tematik Penguatan Kawasan Sentra Produksi Pangan (Pertanian, Perikanan, dan Hewani) (7101 - Kab. Bolaang Mongondow)	1.809,7	DAK
Irigasi - Tematik Penguatan Kawasan Sentra Produksi Pangan (Pertanian, Perikanan, dan Hewani) (7106 - Kab. Minahasa Utara)	1.670,2	DAK
Irigasi - Tematik Penguatan Kawasan Sentra Produksi Pangan (Pertanian, Perikanan, dan Hewani) (7107 - Kab. Bolaang Mongondow Utara)	2.414,3	DAK
Irigasi - Tematik Penguatan Kawasan Sentra Produksi Pangan (Pertanian, Perikanan, dan Hewani) (72 - Provinsi Sulawesi Tengah)	33.473,3	DAK
Irigasi - Tematik Penguatan Kawasan Sentra Produksi Pangan (Pertanian, Perikanan, dan Hewani) (7203 - Kab. Morowali)	9.828,0	DAK



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

Prioritas Nasional/ <i>Major Project</i>	Alokasi (Rp. Juta)	Instansi Pelaksana
Irigasi - Tematik Penguatan Kawasan Sentra Produksi Pangan (Pertanian, Perikanan, dan Hewani) (7204 - Kab. Poso)	8.874,7 DAK	
Irigasi - Tematik Penguatan Kawasan Sentra Produksi Pangan (Pertanian, Perikanan, dan Hewani) (7205 - Kab. Donggala)	9.224,2 DAK	
Irigasi - Tematik Penguatan Kawasan Sentra Produksi Pangan (Pertanian, Perikanan, dan Hewani) (7208 - Kab. Parigi Moutong)	2.325,7 DAK	
Irigasi - Tematik Penguatan Kawasan Sentra Produksi Pangan (Pertanian, Perikanan, dan Hewani) (7209 - Kab. Tojo Una Una)	2.350,5 DAK	
Irigasi - Tematik Penguatan Kawasan Sentra Produksi Pangan (Pertanian, Perikanan, dan Hewani) (7210 - Kab. Sigi)	12.975,1 DAK	
Irigasi - Tematik Penguatan Kawasan Sentra Produksi Pangan (Pertanian, Perikanan, dan Hewani) (73 - Provinsi Sulawesi Selatan)	35.391,5 DAK	
Irigasi - Tematik Penguatan Kawasan Sentra Produksi Pangan (Pertanian, Perikanan, dan Hewani) (7302 - Kab. Bulukumba)	29.344,3 DAK	
Irigasi - Tematik Penguatan Kawasan Sentra Produksi Pangan (Pertanian, Perikanan, dan Hewani) (7305 - Kab. Takalar)	2.110,2 DAK	
Irigasi - Tematik Penguatan Kawasan Sentra Produksi Pangan (Pertanian, Perikanan, dan Hewani) (7306 - Kab. Gowa)	8.989,2 DAK	
Irigasi - Tematik Penguatan Kawasan Sentra Produksi Pangan (Pertanian, Perikanan, dan Hewani) (7307 - Kab. Sinjai)	15.114,3 DAK	
Irigasi - Tematik Penguatan Kawasan Sentra Produksi Pangan (Pertanian, Perikanan, dan Hewani) (7308 - Kab. Maros)	1.699,8 DAK	
Irigasi - Tematik Penguatan Kawasan Sentra Produksi Pangan (Pertanian, Perikanan, dan Hewani) (7309 - Kab. Pangkajene dan Kepulauan)	2.825,3 DAK	
Irigasi - Tematik Penguatan Kawasan Sentra Produksi Pangan (Pertanian, Perikanan, dan Hewani) (7311 - Kab. Bone)	13.750,3 DAK	
Irigasi - Tematik Penguatan Kawasan Sentra Produksi Pangan (Pertanian, Perikanan, dan Hewani) (7312 - Kab. Soppeng)	18.097,0 DAK	
Irigasi - Tematik Penguatan Kawasan Sentra Produksi Pangan (Pertanian, Perikanan, dan Hewani) (7313 - Kab. Wajo)	6.841,3 DAK	
Irigasi - Tematik Penguatan Kawasan Sentra Produksi Pangan (Pertanian, Perikanan, dan Hewani) (7316 - Kab. Enrekang)	7.355,7 DAK	
Irigasi - Tematik Penguatan Kawasan Sentra Produksi Pangan (Pertanian, Perikanan, dan Hewani) (7317 - Kab. Luwu)	13.985,9 DAK	
Irigasi - Tematik Penguatan Kawasan Sentra Produksi Pangan (Pertanian, Perikanan, dan Hewani) (74 - Provinsi Sulawesi Tenggara)	8.288,9 DAK	
Irigasi - Tematik Penguatan Kawasan Sentra Produksi Pangan (Pertanian, Perikanan, dan Hewani) (7403 - Kab. Konawe)	11.768,7 DAK	
Irigasi - Tematik Penguatan Kawasan Sentra Produksi Pangan (Pertanian, Perikanan, dan Hewani) (7406 - Kab. Bombana)	3.622,3 DAK	



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

Prioritas Nasional/ <i>Major Project</i>	Alokasi (Rp. Juta)	Instansi Pelaksana
Irigasi - Tematik Penguatan Kawasan Sentra Produksi Pangan (Pertanian, Perikanan, dan Hewani) (7414 - Kab. Buton Tengah)	7.150,5 DAK	
Irigasi - Tematik Penguatan Kawasan Sentra Produksi Pangan (Pertanian, Perikanan, dan Hewani) (75 - Provinsi Gorontalo)	23.753,3 DAK	
Irigasi - Tematik Penguatan Kawasan Sentra Produksi Pangan (Pertanian, Perikanan, dan Hewani) (7503 - Kab. Pohuwato)	21.381,3 DAK	
Irigasi - Tematik Penguatan Kawasan Sentra Produksi Pangan (Pertanian, Perikanan, dan Hewani) (76 - Provinsi Sulawesi Barat)	3.274,1 DAK	
Irigasi - Tematik Penguatan Kawasan Sentra Produksi Pangan (Pertanian, Perikanan, dan Hewani) (7602 - Kab. Polewali Mandar)	3.542,9 DAK	
Irigasi - Tematik Penguatan Kawasan Sentra Produksi Pangan (Pertanian, Perikanan, dan Hewani) (7603 - Kab. Mamasa)	6.933,8 DAK	
Irigasi - Tematik Penguatan Kawasan Sentra Produksi Pangan (Pertanian, Perikanan, dan Hewani) (81 - Provinsi Maluku)	41.381,9 DAK	
Irigasi - Tematik Penguatan Kawasan Sentra Produksi Pangan (Pertanian, Perikanan, dan Hewani) (8102 - Kab. Maluku Tenggara)	4.996,3 DAK	
Irigasi - Tematik Penguatan Kawasan Sentra Produksi Pangan (Pertanian, Perikanan, dan Hewani) (8103 - Kab. Maluku Tengah)	7.499,1 DAK	
Irigasi - Tematik Penguatan Kawasan Sentra Produksi Pangan (Pertanian, Perikanan, dan Hewani) (82 - Provinsi Maluku Utara)	32.818,0 DAK	
Irigasi - Tematik Penguatan Kawasan Sentra Produksi Pangan (Pertanian, Perikanan, dan Hewani) (8272 - Kota Tidore Kepulauan)	19.600,0 DAK	
Irigasi - Tematik Penguatan Kawasan Sentra Produksi Pangan (Pertanian, Perikanan, dan Hewani) (91 - Provinsi Papua Barat)	30.899,5 DAK	
Irigasi - Tematik Penguatan Kawasan Sentra Produksi Pangan (Pertanian, Perikanan, dan Hewani) (9107 - Kab. Sorong)	5.721,3 DAK	
Irigasi - Tematik Penguatan Kawasan Sentra Produksi Pangan (Pertanian, Perikanan, dan Hewani) (9108 - Kab. Raja Ampat)	4.284,5 DAK	
Jalan - Tematik Penguatan Kawasan Sentra Produksi Pangan (Pertanian, Perikanan, dan Hewani) (11 - Provinsi Aceh)	16.837,5 DAK	
Jalan - Tematik Penguatan Kawasan Sentra Produksi Pangan (Pertanian, Perikanan, dan Hewani) (1111 - Kab. Aceh Utara)	21.736,2 DAK	
Jalan - Tematik Penguatan Kawasan Sentra Produksi Pangan (Pertanian, Perikanan, dan Hewani) (12 - Provinsi Sumatera Utara)	22.762,3 DAK	
Jalan - Tematik Penguatan Kawasan Sentra Produksi Pangan (Pertanian, Perikanan, dan Hewani) (1218 - Kab. Serdang Bedagai)	27.383,4 DAK	
Jalan - Tematik Penguatan Kawasan Sentra Produksi Pangan (Pertanian, Perikanan, dan Hewani) (1224 - Kab. Nias Utara)	29.664,5 DAK	
Jalan - Tematik Penguatan Kawasan Sentra Produksi Pangan (Pertanian, Perikanan, dan Hewani) (13 - Provinsi Sumatera Barat)	17.454,2 DAK	



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

Prioritas Nasional/ <i>Major Project</i>	Alokasi (Rp. Juta)	Instansi Pelaksana
Jalan - Tematik Penguatan Kawasan Sentra Produksi Pangan (Pertanian, Perikanan, dan Hewani) (1302 - Kab. Pesisir Selatan)	26.014,9 DAK	
Jalan - Tematik Penguatan Kawasan Sentra Produksi Pangan (Pertanian, Perikanan, dan Hewani) (1306 - Kab. Padang Pariaman)	35.013,6 DAK	
Jalan - Tematik Penguatan Kawasan Sentra Produksi Pangan (Pertanian, Perikanan, dan Hewani) (1309 - Kab. Pasaman)	27.631,8 DAK	
Jalan - Tematik Penguatan Kawasan Sentra Produksi Pangan (Pertanian, Perikanan, dan Hewani) (14 - Provinsi Riau)	23.127,8 DAK	
Jalan - Tematik Penguatan Kawasan Sentra Produksi Pangan (Pertanian, Perikanan, dan Hewani) (1403 - Kab. Indragiri Hilir)	23.116,7 DAK	
Jalan - Tematik Penguatan Kawasan Sentra Produksi Pangan (Pertanian, Perikanan, dan Hewani) (15 - Provinsi Jambi)	20.343,9 DAK	
Jalan - Tematik Penguatan Kawasan Sentra Produksi Pangan (Pertanian, Perikanan, dan Hewani) (1504 - Kab. Batanghari)	21.929,9 DAK	
Jalan - Tematik Penguatan Kawasan Sentra Produksi Pangan (Pertanian, Perikanan, dan Hewani) (1506 - Kab. Tanjung Jabung Timur)	18.933,8 DAK	
Jalan - Tematik Penguatan Kawasan Sentra Produksi Pangan (Pertanian, Perikanan, dan Hewani) (16 - Provinsi Sumatera Selatan)	21.345,7 DAK	
Jalan - Tematik Penguatan Kawasan Sentra Produksi Pangan (Pertanian, Perikanan, dan Hewani) (1609 - Kab. Ogan Komering Ulu Timur)	15.692,5 DAK	
Jalan - Tematik Penguatan Kawasan Sentra Produksi Pangan (Pertanian, Perikanan, dan Hewani) (1610 - Kab. Ogan Ilir)	23.911,6 DAK	
Jalan - Tematik Penguatan Kawasan Sentra Produksi Pangan (Pertanian, Perikanan, dan Hewani) (17 - Provinsi Bengkulu)	20.260,6 DAK	
Jalan - Tematik Penguatan Kawasan Sentra Produksi Pangan (Pertanian, Perikanan, dan Hewani) (1704 - Kab. Kaur)	25.742,1 DAK	
Jalan - Tematik Penguatan Kawasan Sentra Produksi Pangan (Pertanian, Perikanan, dan Hewani) (18 - Provinsi Lampung)	37.122,2 DAK	
Jalan - Tematik Penguatan Kawasan Sentra Produksi Pangan (Pertanian, Perikanan, dan Hewani) (1803 - Kab. Lampung Selatan)	18.420,2 DAK	
Jalan - Tematik Penguatan Kawasan Sentra Produksi Pangan (Pertanian, Perikanan, dan Hewani) (1804 - Kab. Lampung Timur)	21.712,0 DAK	
Jalan - Tematik Penguatan Kawasan Sentra Produksi Pangan (Pertanian, Perikanan, dan Hewani) (1808 - Kab. Tulang Bawang)	33.093,6 DAK	
Jalan - Tematik Penguatan Kawasan Sentra Produksi Pangan (Pertanian, Perikanan, dan Hewani) (19 - Provinsi Kepulauan Bangka Belitung)	19.232,7 DAK	
Jalan - Tematik Penguatan Kawasan Sentra Produksi Pangan (Pertanian, Perikanan, dan Hewani) (1902 - Kab. Belitung)	19.159,9 DAK	
Jalan - Tematik Penguatan Kawasan Sentra Produksi Pangan (Pertanian, Perikanan, dan Hewani) (1905 - Kab. Bangka Selatan)	24.983,1 DAK	



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

Prioritas Nasional/ <i>Major Project</i>	Alokasi (Rp. Juta)	Instansi Pelaksana
Jalan - Tematik Penguatan Kawasan Sentra Produksi Pangan (Pertanian, Perikanan, dan Hewani) (21 - Provinsi Kepulauan Riau)	25.512,9 DAK	
Jalan - Tematik Penguatan Kawasan Sentra Produksi Pangan (Pertanian, Perikanan, dan Hewani) (2105 - Kab. Kepulauan Anambas)	23.196,8 DAK	
Jalan - Tematik Penguatan Kawasan Sentra Produksi Pangan (Pertanian, Perikanan, dan Hewani) (33 - Provinsi Jawa Tengah)	17.954,2 DAK	
Jalan - Tematik Penguatan Kawasan Sentra Produksi Pangan (Pertanian, Perikanan, dan Hewani) (3307 - Kab. Wonosobo)	23.365,0 DAK	
Jalan - Tematik Penguatan Kawasan Sentra Produksi Pangan (Pertanian, Perikanan, dan Hewani) (3312 - Kab. Wonogiri)	30.725,0 DAK	
Jalan - Tematik Penguatan Kawasan Sentra Produksi Pangan (Pertanian, Perikanan, dan Hewani) (3317 - Kab. Rembang)	35.367,4 DAK	
Jalan - Tematik Penguatan Kawasan Sentra Produksi Pangan (Pertanian, Perikanan, dan Hewani) (3320 - Kab. Jepara)	10.700,0 DAK	
Jalan - Tematik Penguatan Kawasan Sentra Produksi Pangan (Pertanian, Perikanan, dan Hewani) (3323 - Kab. Temanggung)	17.306,3 DAK	
Jalan - Tematik Penguatan Kawasan Sentra Produksi Pangan (Pertanian, Perikanan, dan Hewani) (3324 - Kab. Kendal)	15.203,7 DAK	
Jalan - Tematik Penguatan Kawasan Sentra Produksi Pangan (Pertanian, Perikanan, dan Hewani) (3327 - Kab. Pemalang)	25.200,0 DAK	
Jalan - Tematik Penguatan Kawasan Sentra Produksi Pangan (Pertanian, Perikanan, dan Hewani) (35 - Provinsi Jawa Timur)	16.761,0 DAK	
Jalan - Tematik Penguatan Kawasan Sentra Produksi Pangan (Pertanian, Perikanan, dan Hewani) (3515 - Kab. Sidoarjo)	16.200,0 DAK	
Jalan - Tematik Penguatan Kawasan Sentra Produksi Pangan (Pertanian, Perikanan, dan Hewani) (3520 - Kab. Magetan)	2.400,0 DAK	
Jalan - Tematik Penguatan Kawasan Sentra Produksi Pangan (Pertanian, Perikanan, dan Hewani) (3521 - Kab. Ngawi)	18.027,9 DAK	
Jalan - Tematik Penguatan Kawasan Sentra Produksi Pangan (Pertanian, Perikanan, dan Hewani) (3529 - Kab. Sumenep)	25.914,6 DAK	
Jalan - Tematik Penguatan Kawasan Sentra Produksi Pangan (Pertanian, Perikanan, dan Hewani) (3601 - Kab. Pandeglang)	21.568,0 DAK	
Jalan - Tematik Penguatan Kawasan Sentra Produksi Pangan (Pertanian, Perikanan, dan Hewani) (52 - Provinsi Nusa Tenggara Barat)	21.448,6 DAK	
Jalan - Tematik Penguatan Kawasan Sentra Produksi Pangan (Pertanian, Perikanan, dan Hewani) (5204 - Kab. Sumbawa)	18.980,2 DAK	
Jalan - Tematik Penguatan Kawasan Sentra Produksi Pangan (Pertanian, Perikanan, dan Hewani) (5205 - Kab. Dompu)	18.150,1 DAK	
Jalan - Tematik Penguatan Kawasan Sentra Produksi Pangan (Pertanian, Perikanan, dan Hewani) (5206 - Kab. Bima)	18.761,9 DAK	



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

Prioritas Nasional/ <i>Major Project</i>	Alokasi (Rp. Juta)	Instansi Pelaksana
Jalan - Tematik Penguatan Kawasan Sentra Produksi Pangan (Pertanian, Perikanan, dan Hewani) (53 - Provinsi Nusa Tenggara Timur)	7.564,3	DAK
Jalan - Tematik Penguatan Kawasan Sentra Produksi Pangan (Pertanian, Perikanan, dan Hewani) (5314 - Kab. Rote Ndao)	16.087,2	DAK
Jalan - Tematik Penguatan Kawasan Sentra Produksi Pangan (Pertanian, Perikanan, dan Hewani) (61 - Provinsi Kalimantan Barat)	26.841,5	DAK
Jalan - Tematik Penguatan Kawasan Sentra Produksi Pangan (Pertanian, Perikanan, dan Hewani) (6112 - Kab. Kubu Raya)	24.776,8	DAK
Jalan - Tematik Penguatan Kawasan Sentra Produksi Pangan (Pertanian, Perikanan, dan Hewani) (63 - Provinsi Kalimantan Selatan)	25.299,1	DAK
Jalan - Tematik Penguatan Kawasan Sentra Produksi Pangan (Pertanian, Perikanan, dan Hewani) (6306 - Kab. Hulu Sungai Selatan)	2.136,8	DAK
Jalan - Tematik Penguatan Kawasan Sentra Produksi Pangan (Pertanian, Perikanan, dan Hewani) (65 - Provinsi Kalimantan Utara)	27.017,8	DAK
Jalan - Tematik Penguatan Kawasan Sentra Produksi Pangan (Pertanian, Perikanan, dan Hewani) (6504 - Kab. Nunukan)	19.480,3	DAK
Jalan - Tematik Penguatan Kawasan Sentra Produksi Pangan (Pertanian, Perikanan, dan Hewani) (71 - Provinsi Sulawesi Utara)	19.632,9	DAK
Jalan - Tematik Penguatan Kawasan Sentra Produksi Pangan (Pertanian, Perikanan, dan Hewani) (7101 - Kab. Bolaang Mongondow)	26.553,6	DAK
Jalan - Tematik Penguatan Kawasan Sentra Produksi Pangan (Pertanian, Perikanan, dan Hewani) (7106 - Kab. Minahasa Utara)	23.384,6	DAK
Jalan - Tematik Penguatan Kawasan Sentra Produksi Pangan (Pertanian, Perikanan, dan Hewani) (7107 - Kab. Bolaang Mongondow Utara)	16.399,9	DAK
Jalan - Tematik Penguatan Kawasan Sentra Produksi Pangan (Pertanian, Perikanan, dan Hewani) (72 - Provinsi Sulawesi Tengah)	14.378,0	DAK
Jalan - Tematik Penguatan Kawasan Sentra Produksi Pangan (Pertanian, Perikanan, dan Hewani) (7205 - Kab. Donggala)	24.492,5	DAK
Jalan - Tematik Penguatan Kawasan Sentra Produksi Pangan (Pertanian, Perikanan, dan Hewani) (7208 - Kab. Parigi Moutong)	34.229,3	DAK
Jalan - Tematik Penguatan Kawasan Sentra Produksi Pangan (Pertanian, Perikanan, dan Hewani) (7210 - Kab. Sigi)	20.119,4	DAK
Jalan - Tematik Penguatan Kawasan Sentra Produksi Pangan (Pertanian, Perikanan, dan Hewani) (73 - Provinsi Sulawesi Selatan)	17.012,8	DAK
Jalan - Tematik Penguatan Kawasan Sentra Produksi Pangan (Pertanian, Perikanan, dan Hewani) (7302 - Kab. Bulukumba)	21.618,7	DAK
Jalan - Tematik Penguatan Kawasan Sentra Produksi Pangan (Pertanian, Perikanan, dan Hewani) (7303 - Kab. Bantaeng)	15.500,0	DAK
Jalan - Tematik Penguatan Kawasan Sentra Produksi Pangan (Pertanian, Perikanan, dan Hewani) (7305 - Kab. Takalar)	23.775,3	DAK



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

Prioritas Nasional/ <i>Major Project</i>	Alokasi (Rp. Juta)	Instansi Pelaksana
Jalan - Tematik Penguatan Kawasan Sentra Produksi Pangan (Pertanian, Perikanan, dan Hewani) (7306 - Kab. Gowa)	47.464,1 DAK	
Jalan - Tematik Penguatan Kawasan Sentra Produksi Pangan (Pertanian, Perikanan, dan Hewani) (7307 - Kab. Sinjai)	50.107,8 DAK	
Jalan - Tematik Penguatan Kawasan Sentra Produksi Pangan (Pertanian, Perikanan, dan Hewani) (7308 - Kab. Maros)	48.881,4 DAK	
Jalan - Tematik Penguatan Kawasan Sentra Produksi Pangan (Pertanian, Perikanan, dan Hewani) (7309 - Kab. Pangkajene dan Kepulauan)	18.455,2 DAK	
Jalan - Tematik Penguatan Kawasan Sentra Produksi Pangan (Pertanian, Perikanan, dan Hewani) (7312 - Kab. Soppeng)	26.575,7 DAK	
Jalan - Tematik Penguatan Kawasan Sentra Produksi Pangan (Pertanian, Perikanan, dan Hewani) (7313 - Kab. Wajo)	25.718,8 DAK	
Jalan - Tematik Penguatan Kawasan Sentra Produksi Pangan (Pertanian, Perikanan, dan Hewani) (7316 - Kab. Enrekang)	17.869,0 DAK	
Jalan - Tematik Penguatan Kawasan Sentra Produksi Pangan (Pertanian, Perikanan, dan Hewani) (7317 - Kab. Luwu)	23.648,9 DAK	
Jalan - Tematik Penguatan Kawasan Sentra Produksi Pangan (Pertanian, Perikanan, dan Hewani) (74 - Provinsi Sulawesi Tenggara)	18.832,0 DAK	
Jalan - Tematik Penguatan Kawasan Sentra Produksi Pangan (Pertanian, Perikanan, dan Hewani) (7403 - Kab. Konawe)	21.528,4 DAK	
Jalan - Tematik Penguatan Kawasan Sentra Produksi Pangan (Pertanian, Perikanan, dan Hewani) (7414 - Kab. Buton Tengah)	23.825,1 DAK	
Jalan - Tematik Penguatan Kawasan Sentra Produksi Pangan (Pertanian, Perikanan, dan Hewani) (75 - Provinsi Gorontalo)	25.777,1 DAK	
Jalan - Tematik Penguatan Kawasan Sentra Produksi Pangan (Pertanian, Perikanan, dan Hewani) (7501 - Kab. Boalemo)	19.724,6 DAK	
Jalan - Tematik Penguatan Kawasan Sentra Produksi Pangan (Pertanian, Perikanan, dan Hewani) (7503 - Kab. Pohuwato)	18.725,2 DAK	
Jalan - Tematik Penguatan Kawasan Sentra Produksi Pangan (Pertanian, Perikanan, dan Hewani) (76 - Provinsi Sulawesi Barat)	20.370,6 DAK	
Jalan - Tematik Penguatan Kawasan Sentra Produksi Pangan (Pertanian, Perikanan, dan Hewani) (7602 - Kab. Polewali Mandar)	17.560,7 DAK	
Jalan - Tematik Penguatan Kawasan Sentra Produksi Pangan (Pertanian, Perikanan, dan Hewani) (7603 - Kab. Mamasa)	20.465,9 DAK	
Jalan - Tematik Penguatan Kawasan Sentra Produksi Pangan (Pertanian, Perikanan, dan Hewani) (81 - Provinsi Maluku)	24.637,5 DAK	
Jalan - Tematik Penguatan Kawasan Sentra Produksi Pangan (Pertanian, Perikanan, dan Hewani) (8102 - Kab. Maluku Tenggara)	25.701,5 DAK	
Jalan - Tematik Penguatan Kawasan Sentra Produksi Pangan (Pertanian, Perikanan, dan Hewani) (8103 - Kab. Maluku Tengah)	17.160,2 DAK	



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

Prioritas Nasional/ <i>Major Project</i>	Alokasi (Rp. Juta)	Instansi Pelaksana
Jalan - Tematik Penguatan Kawasan Sentra Produksi Pangan (Pertanian, Perikanan, dan Hewani) (8105 - Kab. Kepulauan Aru)	19.312,9	DAK
Jalan - Tematik Penguatan Kawasan Sentra Produksi Pangan (Pertanian, Perikanan, dan Hewani) (82 - Provinsi Maluku Utara)	15.428,3	DAK
Jalan - Tematik Penguatan Kawasan Sentra Produksi Pangan (Pertanian, Perikanan, dan Hewani) (8204 - Kab. Halmahera Selatan)	22.409,2	DAK
Jalan - Tematik Penguatan Kawasan Sentra Produksi Pangan (Pertanian, Perikanan, dan Hewani) (8207 - Kab. Pulau Morotai)	21.274,1	DAK
Jalan - Tematik Penguatan Kawasan Sentra Produksi Pangan (Pertanian, Perikanan, dan Hewani) (8271 - Kota Ternate)	19.506,9	DAK
Jalan - Tematik Penguatan Kawasan Sentra Produksi Pangan (Pertanian, Perikanan, dan Hewani) (8272 - Kota Tidore Kepulauan)	22.697,4	DAK
Jalan - Tematik Penguatan Kawasan Sentra Produksi Pangan (Pertanian, Perikanan, dan Hewani) (91 - Provinsi Papua Barat)	23.287,9	DAK
Jalan - Tematik Penguatan Kawasan Sentra Produksi Pangan (Pertanian, Perikanan, dan Hewani) (9107 - Kab. Sorong)	26.457,3	DAK
Jalan - Tematik Penguatan Kawasan Sentra Produksi Pangan (Pertanian, Perikanan, dan Hewani) (9108 - Kab. Raja Ampat)	23.674,3	DAK
Jalan - Tematik Penguatan Kawasan Sentra Produksi Pangan (Pertanian, Perikanan, dan Hewani) (94 - Provinsi Papua)	26.368,1	DAK
Jalan - Tematik Penguatan Kawasan Sentra Produksi Pangan (Pertanian, Perikanan, dan Hewani) (9408 - Kab. Kepulauan Yapen)	27.065,6	DAK
Jalan - Tematik Penguatan Kawasan Sentra Produksi Pangan (Pertanian, Perikanan, dan Hewani) (9427 - Kab. Supiori)	20.861,1	DAK
Kelautan dan Perikanan - Tematik Penguatan Kawasan Sentra Produksi Pangan (Pertanian, Perikanan, dan Hewani) (1309 - Kab. Pasaman)	6.501,8	DAK
Kelautan dan Perikanan - Tematik Penguatan Kawasan Sentra Produksi Pangan (Pertanian, Perikanan, dan Hewani) (1609 - Kab. Ogan Komering Ulu Timur)	4.360,9	DAK
Kelautan dan Perikanan - Tematik Penguatan Kawasan Sentra Produksi Pangan (Pertanian, Perikanan, dan Hewani) (3212 - Kab. Indramayu)	5.701,0	DAK
Kelautan dan Perikanan - Tematik Penguatan Kawasan Sentra Produksi Pangan (Pertanian, Perikanan, dan Hewani) (3301 - Kab. Cilacap)	3.344,6	DAK
Kelautan dan Perikanan - Tematik Penguatan Kawasan Sentra Produksi Pangan (Pertanian, Perikanan, dan Hewani) (5203 - Kab. Lombok Timur)	10.281,1	DAK
Kelautan dan Perikanan - Tematik Penguatan Kawasan Sentra Produksi Pangan (Pertanian, Perikanan, dan Hewani) (8103 - Kab. Maluku Tengah)	12.773,8	DAK
Kelautan dan Perikanan - Tematik Penguatan Kawasan Sentra Produksi Pangan (Pertanian, Perikanan, dan Hewani) (8271 - Kota Ternate)	12.748,0	DAK
Pertanian - Tematik Penguatan Kawasan Sentra Produksi Pangan (Pertanian, Perikanan, dan Hewani) (11 - Provinsi Aceh)	16.213,4	DAK



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

Prioritas Nasional/ <i>Major Project</i>	Alokasi (Rp. Juta)	Instansi Pelaksana
Pertanian - Tematik Penguatan Kawasan Sentra Produksi Pangan (Pertanian, Perikanan, dan Hewani) (1104 - Kab. Aceh Tenggara)	6.300,0 DAK	
Pertanian - Tematik Penguatan Kawasan Sentra Produksi Pangan (Pertanian, Perikanan, dan Hewani) (1110 - Kab. Bireuen)	6.400,0 DAK	
Pertanian - Tematik Penguatan Kawasan Sentra Produksi Pangan (Pertanian, Perikanan, dan Hewani) (1111 - Kab. Aceh Utara)	3.281,2 DAK	
Pertanian - Tematik Penguatan Kawasan Sentra Produksi Pangan (Pertanian, Perikanan, dan Hewani) (1118 - Kab. Pidie Jaya)	8.800,0 DAK	
Pertanian - Tematik Penguatan Kawasan Sentra Produksi Pangan (Pertanian, Perikanan, dan Hewani) (1175 - Kota Subulussalam)	7.900,0 DAK	
Pertanian - Tematik Penguatan Kawasan Sentra Produksi Pangan (Pertanian, Perikanan, dan Hewani) (12 - Provinsi Sumatera Utara)	24.492,2 DAK	
Pertanian - Tematik Penguatan Kawasan Sentra Produksi Pangan (Pertanian, Perikanan, dan Hewani) (1218 - Kab. Serdang Bedagai)	22.502,7 DAK	
Pertanian - Tematik Penguatan Kawasan Sentra Produksi Pangan (Pertanian, Perikanan, dan Hewani) (1220 - Kab. Padang Lawas Utara)	3.143,0 DAK	
Pertanian - Tematik Penguatan Kawasan Sentra Produksi Pangan (Pertanian, Perikanan, dan Hewani) (1222 - Kab. Labuhanbatu Selatan)	1.170,0 DAK	
Pertanian - Tematik Penguatan Kawasan Sentra Produksi Pangan (Pertanian, Perikanan, dan Hewani) (1224 - Kab. Nias Utara)	7.881,6 DAK	
Pertanian - Tematik Penguatan Kawasan Sentra Produksi Pangan (Pertanian, Perikanan, dan Hewani) (13 - Provinsi Sumatera Barat)	14.720,4 DAK	
Pertanian - Tematik Penguatan Kawasan Sentra Produksi Pangan (Pertanian, Perikanan, dan Hewani) (1302 - Kab. Pesisir Selatan)	22.258,6 DAK	
Pertanian - Tematik Penguatan Kawasan Sentra Produksi Pangan (Pertanian, Perikanan, dan Hewani) (1306 - Kab. Padang Pariaman)	13.286,5 DAK	
Pertanian - Tematik Penguatan Kawasan Sentra Produksi Pangan (Pertanian, Perikanan, dan Hewani) (1307 - Kab. Agam)	3.190,0 DAK	
Pertanian - Tematik Penguatan Kawasan Sentra Produksi Pangan (Pertanian, Perikanan, dan Hewani) (1308 - Kab. Lima Puluh Kota)	1.900,0 DAK	
Pertanian - Tematik Penguatan Kawasan Sentra Produksi Pangan (Pertanian, Perikanan, dan Hewani) (1309 - Kab. Pasaman)	7.791,2 DAK	
Pertanian - Tematik Penguatan Kawasan Sentra Produksi Pangan (Pertanian, Perikanan, dan Hewani) (1312 - Kab. Pasaman Barat)	3.600,0 DAK	
Pertanian - Tematik Penguatan Kawasan Sentra Produksi Pangan (Pertanian, Perikanan, dan Hewani) (1375 - Kota Bukit Tinggi)	1.100,0 DAK	
Pertanian - Tematik Penguatan Kawasan Sentra Produksi Pangan (Pertanian, Perikanan, dan Hewani) (1376 - Kota Payakumbuh)	5.200,0 DAK	
Pertanian - Tematik Penguatan Kawasan Sentra Produksi Pangan (Pertanian, Perikanan, dan Hewani) (1377 - Kota Pariaman)	1.120,0 DAK	



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

Prioritas Nasional/ <i>Major Project</i>	Alokasi (Rp. Juta)	Instansi Pelaksana
Pertanian - Tematik Penguatan Kawasan Sentra Produksi Pangan (Pertanian, Perikanan, dan Hewani) (14 - Provinsi Riau)	15.862,5 DAK	
Pertanian - Tematik Penguatan Kawasan Sentra Produksi Pangan (Pertanian, Perikanan, dan Hewani) (1403 - Kab. Indragiri Hilir)	13.298,1 DAK	
Pertanian - Tematik Penguatan Kawasan Sentra Produksi Pangan (Pertanian, Perikanan, dan Hewani) (1404 - Kab. Pelalawan)	2.400,0 DAK	
Pertanian - Tematik Penguatan Kawasan Sentra Produksi Pangan (Pertanian, Perikanan, dan Hewani) (1409 - Kab. Rokan Hilir)	2.943,7 DAK	
Pertanian - Tematik Penguatan Kawasan Sentra Produksi Pangan (Pertanian, Perikanan, dan Hewani) (15 - Provinsi Jambi)	23.564,6 DAK	
Pertanian - Tematik Penguatan Kawasan Sentra Produksi Pangan (Pertanian, Perikanan, dan Hewani) (1504 - Kab. Batanghari)	9.852,8 DAK	
Pertanian - Tematik Penguatan Kawasan Sentra Produksi Pangan (Pertanian, Perikanan, dan Hewani) (1506 - Kab. Tanjung Jabung Timur)	4.331,2 DAK	
Pertanian - Tematik Penguatan Kawasan Sentra Produksi Pangan (Pertanian, Perikanan, dan Hewani) (16 - Provinsi Sumatera Selatan)	18.975,8 DAK	
Pertanian - Tematik Penguatan Kawasan Sentra Produksi Pangan (Pertanian, Perikanan, dan Hewani) (1609 - Kab. Ogan Komering Ulu Timur)	20.234,4 DAK	
Pertanian - Tematik Penguatan Kawasan Sentra Produksi Pangan (Pertanian, Perikanan, dan Hewani) (1610 - Kab. Ogan Ilir)	4.401,0 DAK	
Pertanian - Tematik Penguatan Kawasan Sentra Produksi Pangan (Pertanian, Perikanan, dan Hewani) (17 - Provinsi Bengkulu)	5.779,0 DAK	
Pertanian - Tematik Penguatan Kawasan Sentra Produksi Pangan (Pertanian, Perikanan, dan Hewani) (1701 - Kab. Bengkulu Selatan)	6.200,0 DAK	
Pertanian - Tematik Penguatan Kawasan Sentra Produksi Pangan (Pertanian, Perikanan, dan Hewani) (1704 - Kab. Kaur)	26.320,7 DAK	
Pertanian - Tematik Penguatan Kawasan Sentra Produksi Pangan (Pertanian, Perikanan, dan Hewani) (18 - Provinsi Lampung)	13.852,5 DAK	
Pertanian - Tematik Penguatan Kawasan Sentra Produksi Pangan (Pertanian, Perikanan, dan Hewani) (1803 - Kab. Lampung Selatan)	6.799,1 DAK	
Pertanian - Tematik Penguatan Kawasan Sentra Produksi Pangan (Pertanian, Perikanan, dan Hewani) (1804 - Kab. Lampung Timur)	8.221,6 DAK	
Pertanian - Tematik Penguatan Kawasan Sentra Produksi Pangan (Pertanian, Perikanan, dan Hewani) (1805 - Kab. Lampung Tengah)	3.234,3 DAK	
Pertanian - Tematik Penguatan Kawasan Sentra Produksi Pangan (Pertanian, Perikanan, dan Hewani) (1806 - Kab. Lampung Utara)	7.180,0 DAK	
Pertanian - Tematik Penguatan Kawasan Sentra Produksi Pangan (Pertanian, Perikanan, dan Hewani) (1808 - Kab. Tulang Bawang)	2.763,1 DAK	
Pertanian - Tematik Penguatan Kawasan Sentra Produksi Pangan (Pertanian, Perikanan, dan Hewani) (19 - Provinsi Kepulauan Bangka Belitung)	4.783,2 DAK	



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

Prioritas Nasional/ <i>Major Project</i>	Alokasi (Rp. Juta)	Instansi Pelaksana
Pertanian - Tematik Penguatan Kawasan Sentra Produksi Pangan (Pertanian, Perikanan, dan Hewani) (1902 - Kab. Belitung)	5.096,7 DAK	
Pertanian - Tematik Penguatan Kawasan Sentra Produksi Pangan (Pertanian, Perikanan, dan Hewani) (1905 - Kab. Bangka Selatan)	36.405,1 DAK	
Pertanian - Tematik Penguatan Kawasan Sentra Produksi Pangan (Pertanian, Perikanan, dan Hewani) (21 - Provinsi Kepulauan Riau)	4.837,3 DAK	
Pertanian - Tematik Penguatan Kawasan Sentra Produksi Pangan (Pertanian, Perikanan, dan Hewani) (2105 - Kab. Kepulauan Anambas)	2.165,6 DAK	
Pertanian - Tematik Penguatan Kawasan Sentra Produksi Pangan (Pertanian, Perikanan, dan Hewani) (32 - Provinsi Jawa Barat)	35.760,4 DAK	
Pertanian - Tematik Penguatan Kawasan Sentra Produksi Pangan (Pertanian, Perikanan, dan Hewani) (3202 - Kab. Sukabumi)	18.505,7 DAK	
Pertanian - Tematik Penguatan Kawasan Sentra Produksi Pangan (Pertanian, Perikanan, dan Hewani) (3203 - Kab. Cianjur)	6.600,0 DAK	
Pertanian - Tematik Penguatan Kawasan Sentra Produksi Pangan (Pertanian, Perikanan, dan Hewani) (3204 - Kab. Bandung)	33.117,2 DAK	
Pertanian - Tematik Penguatan Kawasan Sentra Produksi Pangan (Pertanian, Perikanan, dan Hewani) (3205 - Kab. Garut)	21.186,9 DAK	
Pertanian - Tematik Penguatan Kawasan Sentra Produksi Pangan (Pertanian, Perikanan, dan Hewani) (3206 - Kab. Tasikmalaya)	15.926,3 DAK	
Pertanian - Tematik Penguatan Kawasan Sentra Produksi Pangan (Pertanian, Perikanan, dan Hewani) (3207 - Kab. Ciamis)	11.700,0 DAK	
Pertanian - Tematik Penguatan Kawasan Sentra Produksi Pangan (Pertanian, Perikanan, dan Hewani) (3209 - Kab. Cirebon)	8.068,2 DAK	
Pertanian - Tematik Penguatan Kawasan Sentra Produksi Pangan (Pertanian, Perikanan, dan Hewani) (3211 - Kab. Sumedang)	6.270,0 DAK	
Pertanian - Tematik Penguatan Kawasan Sentra Produksi Pangan (Pertanian, Perikanan, dan Hewani) (3212 - Kab. Indramayu)	24.505,5 DAK	
Pertanian - Tematik Penguatan Kawasan Sentra Produksi Pangan (Pertanian, Perikanan, dan Hewani) (3213 - Kab. Subang)	23.858,7 DAK	
Pertanian - Tematik Penguatan Kawasan Sentra Produksi Pangan (Pertanian, Perikanan, dan Hewani) (3214 - Kab. Purwakarta)	8.362,3 DAK	
Pertanian - Tematik Penguatan Kawasan Sentra Produksi Pangan (Pertanian, Perikanan, dan Hewani) (3215 - Kab. Karawang)	15.983,9 DAK	
Pertanian - Tematik Penguatan Kawasan Sentra Produksi Pangan (Pertanian, Perikanan, dan Hewani) (3216 - Kab. Bekasi)	10.400,0 DAK	
Pertanian - Tematik Penguatan Kawasan Sentra Produksi Pangan (Pertanian, Perikanan, dan Hewani) (3217 - Kab. Bandung Barat)	10.085,1 DAK	
Pertanian - Tematik Penguatan Kawasan Sentra Produksi Pangan (Pertanian, Perikanan, dan Hewani) (3273 - Kota Bandung)	1.060,0 DAK	



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

Prioritas Nasional/ <i>Major Project</i>	Alokasi (Rp. Juta)	Instansi Pelaksana
Pertanian - Tematik Penguatan Kawasan Sentra Produksi Pangan (Pertanian, Perikanan, dan Hewani) (33 - Provinsi Jawa Tengah)	30.771,7 DAK	
Pertanian - Tematik Penguatan Kawasan Sentra Produksi Pangan (Pertanian, Perikanan, dan Hewani) (3301 - Kab. Cilacap)	27.137,3 DAK	
Pertanian - Tematik Penguatan Kawasan Sentra Produksi Pangan (Pertanian, Perikanan, dan Hewani) (3302 - Kab. Banyumas)	10.400,0 DAK	
Pertanian - Tematik Penguatan Kawasan Sentra Produksi Pangan (Pertanian, Perikanan, dan Hewani) (3307 - Kab. Wonosobo)	16.173,6 DAK	
Pertanian - Tematik Penguatan Kawasan Sentra Produksi Pangan (Pertanian, Perikanan, dan Hewani) (3311 - Kab. Sukoharjo)	1.617,1 DAK	
Pertanian - Tematik Penguatan Kawasan Sentra Produksi Pangan (Pertanian, Perikanan, dan Hewani) (3312 - Kab. Wonogiri)	8.840,0 DAK	
Pertanian - Tematik Penguatan Kawasan Sentra Produksi Pangan (Pertanian, Perikanan, dan Hewani) (3313 - Kab. Karanganyar)	7.800,0 DAK	
Pertanian - Tematik Penguatan Kawasan Sentra Produksi Pangan (Pertanian, Perikanan, dan Hewani) (3315 - Kab. Grobogan)	18.776,8 DAK	
Pertanian - Tematik Penguatan Kawasan Sentra Produksi Pangan (Pertanian, Perikanan, dan Hewani) (3317 - Kab. Rembang)	6.932,4 DAK	
Pertanian - Tematik Penguatan Kawasan Sentra Produksi Pangan (Pertanian, Perikanan, dan Hewani) (3319 - Kab. Kudus)	5.400,0 DAK	
Pertanian - Tematik Penguatan Kawasan Sentra Produksi Pangan (Pertanian, Perikanan, dan Hewani) (3320 - Kab. Jepara)	4.401,4 DAK	
Pertanian - Tematik Penguatan Kawasan Sentra Produksi Pangan (Pertanian, Perikanan, dan Hewani) (3321 - Kab. Demak)	1.200,0 DAK	
Pertanian - Tematik Penguatan Kawasan Sentra Produksi Pangan (Pertanian, Perikanan, dan Hewani) (3322 - Kab. Semarang)	10.603,1 DAK	
Pertanian - Tematik Penguatan Kawasan Sentra Produksi Pangan (Pertanian, Perikanan, dan Hewani) (3323 - Kab. Temanggung)	13.094,5 DAK	
Pertanian - Tematik Penguatan Kawasan Sentra Produksi Pangan (Pertanian, Perikanan, dan Hewani) (3324 - Kab. Kendal)	5.831,1 DAK	
Pertanian - Tematik Penguatan Kawasan Sentra Produksi Pangan (Pertanian, Perikanan, dan Hewani) (3326 - Kab. Pekalongan)	5.747,2 DAK	
Pertanian - Tematik Penguatan Kawasan Sentra Produksi Pangan (Pertanian, Perikanan, dan Hewani) (3327 - Kab. Pematang)	11.671,5 DAK	
Pertanian - Tematik Penguatan Kawasan Sentra Produksi Pangan (Pertanian, Perikanan, dan Hewani) (3374 - Kota Semarang)	8.924,5 DAK	
Pertanian - Tematik Penguatan Kawasan Sentra Produksi Pangan (Pertanian, Perikanan, dan Hewani) (34 - Provinsi DI Yogyakarta)	20.048,9 DAK	
Pertanian - Tematik Penguatan Kawasan Sentra Produksi Pangan (Pertanian, Perikanan, dan Hewani) (3402 - Kab. Bantul)	11.090,0 DAK	



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

Prioritas Nasional/ <i>Major Project</i>	Alokasi (Rp. Juta)	Instansi Pelaksana
Pertanian - Tematik Penguatan Kawasan Sentra Produksi Pangan (Pertanian, Perikanan, dan Hewani) (3403 - Kab. Gunungkidul)	4.200,0 DAK	
Pertanian - Tematik Penguatan Kawasan Sentra Produksi Pangan (Pertanian, Perikanan, dan Hewani) (3404 - Kab. Sleman)	11.325,1 DAK	
Pertanian - Tematik Penguatan Kawasan Sentra Produksi Pangan (Pertanian, Perikanan, dan Hewani) (35 - Provinsi Jawa Timur)	29.428,9 DAK	
Pertanian - Tematik Penguatan Kawasan Sentra Produksi Pangan (Pertanian, Perikanan, dan Hewani) (3505 - Kab. Blitar)	9.150,0 DAK	
Pertanian - Tematik Penguatan Kawasan Sentra Produksi Pangan (Pertanian, Perikanan, dan Hewani) (3506 - Kab. Kediri)	5.600,0 DAK	
Pertanian - Tematik Penguatan Kawasan Sentra Produksi Pangan (Pertanian, Perikanan, dan Hewani) (3507 - Kab. Malang)	5.100,0 DAK	
Pertanian - Tematik Penguatan Kawasan Sentra Produksi Pangan (Pertanian, Perikanan, dan Hewani) (3508 - Kab. Lumajang)	5.970,0 DAK	
Pertanian - Tematik Penguatan Kawasan Sentra Produksi Pangan (Pertanian, Perikanan, dan Hewani) (3510 - Kab. Banyuwangi)	6.524,8 DAK	
Pertanian - Tematik Penguatan Kawasan Sentra Produksi Pangan (Pertanian, Perikanan, dan Hewani) (3515 - Kab. Sidoarjo)	6.555,3 DAK	
Pertanian - Tematik Penguatan Kawasan Sentra Produksi Pangan (Pertanian, Perikanan, dan Hewani) (3517 - Kab. Jombang)	1.800,0 DAK	
Pertanian - Tematik Penguatan Kawasan Sentra Produksi Pangan (Pertanian, Perikanan, dan Hewani) (3520 - Kab. Magetan)	2.465,0 DAK	
Pertanian - Tematik Penguatan Kawasan Sentra Produksi Pangan (Pertanian, Perikanan, dan Hewani) (3521 - Kab. Ngawi)	22.686,8 DAK	
Pertanian - Tematik Penguatan Kawasan Sentra Produksi Pangan (Pertanian, Perikanan, dan Hewani) (3523 - Kab. Tuban)	12.609,0 DAK	
Pertanian - Tematik Penguatan Kawasan Sentra Produksi Pangan (Pertanian, Perikanan, dan Hewani) (3524 - Kab. Lamongan)	23.337,5 DAK	
Pertanian - Tematik Penguatan Kawasan Sentra Produksi Pangan (Pertanian, Perikanan, dan Hewani) (3526 - Kab. Bangkalan)	1.332,2 DAK	
Pertanian - Tematik Penguatan Kawasan Sentra Produksi Pangan (Pertanian, Perikanan, dan Hewani) (3529 - Kab. Sumenep)	50.888,5 DAK	
Pertanian - Tematik Penguatan Kawasan Sentra Produksi Pangan (Pertanian, Perikanan, dan Hewani) (3575 - Kota Pasuruan)	1.600,0 DAK	
Pertanian - Tematik Penguatan Kawasan Sentra Produksi Pangan (Pertanian, Perikanan, dan Hewani) (3601 - Kab. Pandeglang)	13.874,6 DAK	
Pertanian - Tematik Penguatan Kawasan Sentra Produksi Pangan (Pertanian, Perikanan, dan Hewani) (3604 - Kab. Serang)	7.968,5 DAK	
Pertanian - Tematik Penguatan Kawasan Sentra Produksi Pangan (Pertanian, Perikanan, dan Hewani) (51 - Provinsi Bali)	4.302,7 DAK	



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

Prioritas Nasional/ <i>Major Project</i>	Alokasi (Rp. Juta)	Instansi Pelaksana
Pertanian - Tematik Penguatan Kawasan Sentra Produksi Pangan (Pertanian, Perikanan, dan Hewani) (5108 - Kab. Buleleng)	12.248,1 DAK	
Pertanian - Tematik Penguatan Kawasan Sentra Produksi Pangan (Pertanian, Perikanan, dan Hewani) (5171 - Kota Denpasar)	400,0 DAK	
Pertanian - Tematik Penguatan Kawasan Sentra Produksi Pangan (Pertanian, Perikanan, dan Hewani) (52 - Provinsi Nusa Tenggara Barat)	23.209,6 DAK	
Pertanian - Tematik Penguatan Kawasan Sentra Produksi Pangan (Pertanian, Perikanan, dan Hewani) (5201 - Kab. Lombok Barat)	2.170,0 DAK	
Pertanian - Tematik Penguatan Kawasan Sentra Produksi Pangan (Pertanian, Perikanan, dan Hewani) (5202 - Kab. Lombok Tengah)	4.251,0 DAK	
Pertanian - Tematik Penguatan Kawasan Sentra Produksi Pangan (Pertanian, Perikanan, dan Hewani) (5203 - Kab. Lombok Timur)	19.075,0 DAK	
Pertanian - Tematik Penguatan Kawasan Sentra Produksi Pangan (Pertanian, Perikanan, dan Hewani) (5204 - Kab. Sumbawa)	21.334,9 DAK	
Pertanian - Tematik Penguatan Kawasan Sentra Produksi Pangan (Pertanian, Perikanan, dan Hewani) (5205 - Kab. Dompu)	20.693,5 DAK	
Pertanian - Tematik Penguatan Kawasan Sentra Produksi Pangan (Pertanian, Perikanan, dan Hewani) (5206 - Kab. Bima)	22.908,9 DAK	
Pertanian - Tematik Penguatan Kawasan Sentra Produksi Pangan (Pertanian, Perikanan, dan Hewani) (5271 - Kota Mataram)	1.395,0 DAK	
Pertanian - Tematik Penguatan Kawasan Sentra Produksi Pangan (Pertanian, Perikanan, dan Hewani) (53 - Provinsi Nusa Tenggara Timur)	17.015,8 DAK	
Pertanian - Tematik Penguatan Kawasan Sentra Produksi Pangan (Pertanian, Perikanan, dan Hewani) (5309 - Kab. Flores Timur)	15.600,0 DAK	
Pertanian - Tematik Penguatan Kawasan Sentra Produksi Pangan (Pertanian, Perikanan, dan Hewani) (5313 - Kab. Manggarai)	1.400,0 DAK	
Pertanian - Tematik Penguatan Kawasan Sentra Produksi Pangan (Pertanian, Perikanan, dan Hewani) (5314 - Kab. Rote Ndao)	18.330,1 DAK	
Pertanian - Tematik Penguatan Kawasan Sentra Produksi Pangan (Pertanian, Perikanan, dan Hewani) (61 - Provinsi Kalimantan Barat)	3.241,9 DAK	
Pertanian - Tematik Penguatan Kawasan Sentra Produksi Pangan (Pertanian, Perikanan, dan Hewani) (6101 - Kab. Sambas)	3.600,0 DAK	
Pertanian - Tematik Penguatan Kawasan Sentra Produksi Pangan (Pertanian, Perikanan, dan Hewani) (6103 - Kab. Landak)	15.800,0 DAK	
Pertanian - Tematik Penguatan Kawasan Sentra Produksi Pangan (Pertanian, Perikanan, dan Hewani) (6106 - Kab. Ketapang)	3.000,0 DAK	
Pertanian - Tematik Penguatan Kawasan Sentra Produksi Pangan (Pertanian, Perikanan, dan Hewani) (6112 - Kab. Kubu Raya)	2.910,0 DAK	
Pertanian - Tematik Penguatan Kawasan Sentra Produksi Pangan (Pertanian, Perikanan, dan Hewani) (6202 - Kab. Kotawaringin Timur)	2.900,0 DAK	



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

Prioritas Nasional/ <i>Major Project</i>	Alokasi (Rp. Juta)	Instansi Pelaksana
Pertanian - Tematik Penguatan Kawasan Sentra Produksi Pangan (Pertanian, Perikanan, dan Hewani) (6207 - Kab. Lamandau)	1.020,0	DAK
Pertanian - Tematik Penguatan Kawasan Sentra Produksi Pangan (Pertanian, Perikanan, dan Hewani) (63 - Provinsi Kalimantan Selatan)	20.417,2	DAK
Pertanian - Tematik Penguatan Kawasan Sentra Produksi Pangan (Pertanian, Perikanan, dan Hewani) (6306 - Kab. Hulu Sungai Selatan)	3.197,7	DAK
Pertanian - Tematik Penguatan Kawasan Sentra Produksi Pangan (Pertanian, Perikanan, dan Hewani) (64 - Provinsi Kalimantan Timur)	8.037,6	DAK
Pertanian - Tematik Penguatan Kawasan Sentra Produksi Pangan (Pertanian, Perikanan, dan Hewani) (6403 - Kab. Kutai Kartanegara)	8.001,3	DAK
Pertanian - Tematik Penguatan Kawasan Sentra Produksi Pangan (Pertanian, Perikanan, dan Hewani) (6504 - Kab. Nunukan)	4.534,4	DAK
Pertanian - Tematik Penguatan Kawasan Sentra Produksi Pangan (Pertanian, Perikanan, dan Hewani) (71 - Provinsi Sulawesi Utara)	23.064,8	DAK
Pertanian - Tematik Penguatan Kawasan Sentra Produksi Pangan (Pertanian, Perikanan, dan Hewani) (7101 - Kab. Bolaang Mongondow)	8.978,0	DAK
Pertanian - Tematik Penguatan Kawasan Sentra Produksi Pangan (Pertanian, Perikanan, dan Hewani) (7106 - Kab. Minahasa Utara)	15.169,5	DAK
Pertanian - Tematik Penguatan Kawasan Sentra Produksi Pangan (Pertanian, Perikanan, dan Hewani) (7107 - Kab. Bolaang Mongondow Utara)	11.894,1	DAK
Pertanian - Tematik Penguatan Kawasan Sentra Produksi Pangan (Pertanian, Perikanan, dan Hewani) (72 - Provinsi Sulawesi Tengah)	14.547,4	DAK
Pertanian - Tematik Penguatan Kawasan Sentra Produksi Pangan (Pertanian, Perikanan, dan Hewani) (7203 - Kab. Morowali)	11.034,1	DAK
Pertanian - Tematik Penguatan Kawasan Sentra Produksi Pangan (Pertanian, Perikanan, dan Hewani) (7204 - Kab. Poso)	5.000,0	DAK
Pertanian - Tematik Penguatan Kawasan Sentra Produksi Pangan (Pertanian, Perikanan, dan Hewani) (7205 - Kab. Donggala)	8.151,1	DAK
Pertanian - Tematik Penguatan Kawasan Sentra Produksi Pangan (Pertanian, Perikanan, dan Hewani) (7206 - Kab. Toli Toli)	3.230,0	DAK
Pertanian - Tematik Penguatan Kawasan Sentra Produksi Pangan (Pertanian, Perikanan, dan Hewani) (7208 - Kab. Parigi Moutong)	30.655,4	DAK
Pertanian - Tematik Penguatan Kawasan Sentra Produksi Pangan (Pertanian, Perikanan, dan Hewani) (7209 - Kab. Tojo Una Una)	9.300,0	DAK
Pertanian - Tematik Penguatan Kawasan Sentra Produksi Pangan (Pertanian, Perikanan, dan Hewani) (7210 - Kab. Sigi)	44.658,7	DAK
Pertanian - Tematik Penguatan Kawasan Sentra Produksi Pangan (Pertanian, Perikanan, dan Hewani) (73 - Provinsi Sulawesi Selatan)	6.118,2	DAK
Pertanian - Tematik Penguatan Kawasan Sentra Produksi Pangan (Pertanian, Perikanan, dan Hewani) (7302 - Kab. Bulukumba)	23.599,6	DAK



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

Prioritas Nasional/ <i>Major Project</i>	Alokasi (Rp. Juta)	Instansi Pelaksana
Pertanian - Tematik Penguatan Kawasan Sentra Produksi Pangan (Pertanian, Perikanan, dan Hewani) (7305 - Kab. Takalar)	11.872,0	DAK
Pertanian - Tematik Penguatan Kawasan Sentra Produksi Pangan (Pertanian, Perikanan, dan Hewani) (7306 - Kab. Gowa)	10.840,1	DAK
Pertanian - Tematik Penguatan Kawasan Sentra Produksi Pangan (Pertanian, Perikanan, dan Hewani) (7307 - Kab. Sinjai)	17.129,0	DAK
Pertanian - Tematik Penguatan Kawasan Sentra Produksi Pangan (Pertanian, Perikanan, dan Hewani) (7308 - Kab. Maros)	7.619,2	DAK
Pertanian - Tematik Penguatan Kawasan Sentra Produksi Pangan (Pertanian, Perikanan, dan Hewani) (7309 - Kab. Pangkajene dan Kepulauan)	13.102,9	DAK
Pertanian - Tematik Penguatan Kawasan Sentra Produksi Pangan (Pertanian, Perikanan, dan Hewani) (7311 - Kab. Bone)	15.655,8	DAK
Pertanian - Tematik Penguatan Kawasan Sentra Produksi Pangan (Pertanian, Perikanan, dan Hewani) (7312 - Kab. Soppeng)	16.385,2	DAK
Pertanian - Tematik Penguatan Kawasan Sentra Produksi Pangan (Pertanian, Perikanan, dan Hewani) (7313 - Kab. Wajo)	29.471,2	DAK
Pertanian - Tematik Penguatan Kawasan Sentra Produksi Pangan (Pertanian, Perikanan, dan Hewani) (7316 - Kab. Enrekang)	21.835,5	DAK
Pertanian - Tematik Penguatan Kawasan Sentra Produksi Pangan (Pertanian, Perikanan, dan Hewani) (7317 - Kab. Luwu)	6.093,6	DAK
Pertanian - Tematik Penguatan Kawasan Sentra Produksi Pangan (Pertanian, Perikanan, dan Hewani) (74 - Provinsi Sulawesi Tenggara)	19.175,8	DAK
Pertanian - Tematik Penguatan Kawasan Sentra Produksi Pangan (Pertanian, Perikanan, dan Hewani) (7403 - Kab. Konawe)	19.450,1	DAK
Pertanian - Tematik Penguatan Kawasan Sentra Produksi Pangan (Pertanian, Perikanan, dan Hewani) (7406 - Kab. Bombana)	5.190,6	DAK
Pertanian - Tematik Penguatan Kawasan Sentra Produksi Pangan (Pertanian, Perikanan, dan Hewani) (7414 - Kab. Buton Tengah)	5.803,6	DAK
Pertanian - Tematik Penguatan Kawasan Sentra Produksi Pangan (Pertanian, Perikanan, dan Hewani) (75 - Provinsi Gorontalo)	9.077,5	DAK
Pertanian - Tematik Penguatan Kawasan Sentra Produksi Pangan (Pertanian, Perikanan, dan Hewani) (7501 - Kab. Boalemo)	4.198,5	DAK
Pertanian - Tematik Penguatan Kawasan Sentra Produksi Pangan (Pertanian, Perikanan, dan Hewani) (7503 - Kab. Pohuwato)	19.584,3	DAK
Pertanian - Tematik Penguatan Kawasan Sentra Produksi Pangan (Pertanian, Perikanan, dan Hewani) (76 - Provinsi Sulawesi Barat)	12.343,9	DAK
Pertanian - Tematik Penguatan Kawasan Sentra Produksi Pangan (Pertanian, Perikanan, dan Hewani) (7602 - Kab. Polewali Mandar)	20.117,4	DAK
Pertanian - Tematik Penguatan Kawasan Sentra Produksi Pangan (Pertanian, Perikanan, dan Hewani) (7603 - Kab. Mamasa)	22.002,0	DAK



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

Prioritas Nasional/ <i>Major Project</i>	Alokasi (Rp. Juta)	Instansi Pelaksana
Pertanian - Tematik Penguatan Kawasan Sentra Produksi Pangan (Pertanian, Perikanan, dan Hewani) (81 - Provinsi Maluku)	7.805,7 DAK	
Pertanian - Tematik Penguatan Kawasan Sentra Produksi Pangan (Pertanian, Perikanan, dan Hewani) (8102 - Kab. Maluku Tenggara)	4.187,9 DAK	
Pertanian - Tematik Penguatan Kawasan Sentra Produksi Pangan (Pertanian, Perikanan, dan Hewani) (8103 - Kab. Maluku Tengah)	9.577,0 DAK	
Pertanian - Tematik Penguatan Kawasan Sentra Produksi Pangan (Pertanian, Perikanan, dan Hewani) (8105 - Kab. Kepulauan Aru)	6.478,4 DAK	
Pertanian - Tematik Penguatan Kawasan Sentra Produksi Pangan (Pertanian, Perikanan, dan Hewani) (8108 - Kab. Maluku Barat Daya)	800,0 DAK	
Pertanian - Tematik Penguatan Kawasan Sentra Produksi Pangan (Pertanian, Perikanan, dan Hewani) (82 - Provinsi Maluku Utara)	15.493,0 DAK	
Pertanian - Tematik Penguatan Kawasan Sentra Produksi Pangan (Pertanian, Perikanan, dan Hewani) (8204 - Kab. Halmahera Selatan)	22.657,2 DAK	
Pertanian - Tematik Penguatan Kawasan Sentra Produksi Pangan (Pertanian, Perikanan, dan Hewani) (8207 - Kab. Pulau Morotai)	20.992,7 DAK	
Pertanian - Tematik Penguatan Kawasan Sentra Produksi Pangan (Pertanian, Perikanan, dan Hewani) (8271 - Kota Ternate)	1.238,5 DAK	
Pertanian - Tematik Penguatan Kawasan Sentra Produksi Pangan (Pertanian, Perikanan, dan Hewani) (8272 - Kota Tidore Kepulauan)	13.376,9 DAK	
Pertanian - Tematik Penguatan Kawasan Sentra Produksi Pangan (Pertanian, Perikanan, dan Hewani) (91 - Provinsi Papua Barat)	17.812,0 DAK	
Pertanian - Tematik Penguatan Kawasan Sentra Produksi Pangan (Pertanian, Perikanan, dan Hewani) (9107 - Kab. Sorong)	513,1 DAK	
Pertanian - Tematik Penguatan Kawasan Sentra Produksi Pangan (Pertanian, Perikanan, dan Hewani) (94 - Provinsi Papua)	7.995,9 DAK	
Pertanian - Tematik Penguatan Kawasan Sentra Produksi Pangan (Pertanian, Perikanan, dan Hewani) (9408 - Kab. Kepulauan Yapen)	2.689,1 DAK	
Pertanian - Tematik Penguatan Kawasan Sentra Produksi Pangan (Pertanian, Perikanan, dan Hewani) (9427 - Kab. Supiori)	5.314,6 DAK	
Sarana produksi dan usaha di Kampung Perikanan Budidaya yang dikembangkan (MP Korporasi)	10.000,0	KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
Bantuan sarana pengembangan usaha nelayan (MP Korporasi)	5.925,0	KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
Model Pertanian Modern	3.000,0	KEMENTERIAN PERTANIAN
Kawasan Kopi	91.978,0	KEMENTERIAN PERTANIAN
Desa Pertanian Organik Berbasis Komoditas Perkebunan	6.059,9	KEMENTERIAN PERTANIAN
Area Penanganan Dampak Perubahan Iklim dan Pencegahan Kebakaran Lahan dan Kebun	6.032,5	KEMENTERIAN PERTANIAN
Kawasan Lada	8.820,5	KEMENTERIAN PERTANIAN
Jaringan Irigasi Tersier	240.975,0	KEMENTERIAN PERTANIAN



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

Prioritas Nasional/ <i>Major Project</i>	Alokasi (Rp. Juta)	Instansi Pelaksana
Unit Pengolah Pupuk Organik (UPPO)	240.500,0	KEMENTERIAN PERTANIAN
Asuransi Pertanian	158.735,9	KEMENTERIAN PERTANIAN
Kawasan Kakao	54.212,0	KEMENTERIAN PERTANIAN
Kawasan Pala	26.202,6	KEMENTERIAN PERTANIAN
Optimasi Lahan	210.486,6	KEMENTERIAN PERTANIAN
Alat dan Mesin Pertanian Pra Panen Sub Sektor Hortikultura	20.520,0	KEMENTERIAN PERTANIAN
Asuransi Usaha Ternak	26.855,0	KEMENTERIAN PERTANIAN
Kawasan Cengkeh	25.440,2	KEMENTERIAN PERTANIAN
Alat dan Mesin Pertanian Pra Panen Sub Sektor Perkebunan	4.858,0	KEMENTERIAN PERTANIAN
Kawasan Karet	29.005,7	KEMENTERIAN PERTANIAN
Kawasan Tebu	33.827,0	KEMENTERIAN PERTANIAN
Alat dan Mesin Pertanian Pra Panen Sub Sektor Peternakan	4.858,0	KEMENTERIAN PERTANIAN
Kawasan Kelapa	56.435,3	KEMENTERIAN PERTANIAN
Kawasan Vanili	6.275,0	KEMENTERIAN PERTANIAN
Perbengkelan Alsintan	11.130,0	KEMENTERIAN PERTANIAN
Kawasan Sagu	5.150,0	KEMENTERIAN PERTANIAN
Kawasan Jambu Mete	12.760,0	KEMENTERIAN PERTANIAN
Kawasan Ubi Kayu	10.841,5	KEMENTERIAN PERTANIAN
Kawasan Ubi Jalar	5.326,5	KEMENTERIAN PERTANIAN
Kawasan Aneka Umbi Lainnya	6.675,0	KEMENTERIAN PERTANIAN
Kawasan Padi	287.519,0	KEMENTERIAN PERTANIAN
Kawasan Jagung	91.292,5	KEMENTERIAN PERTANIAN
Kawasan Kakao - Kab. Kolaka Utara	1.335,0	KEMENTERIAN PERTANIAN
<i>Aspek: Fasilitasi Pengolahan</i>		
Sarana Pasca Panen (MP Korporasi)	1.609,0	KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
Mobil refrigerasi (MP korporasi)	1.742,7	KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
Prasarana Pengolahan Tanaman Perkebunan - Kab. Bandung	34.996,8	KEMENTERIAN PERTANIAN
Dukungan BUMN	213.140,0	
Pengembangan Ekosistem Pertanian Berbasis Digital (<i>Agriculture Ecosystem 4.0</i>)		BUMN
<i>Prototype Integrated Commodity Chain</i> Telur		BUMN
Pembangunan Pabrik Tepung Sagu/Tapioca di Kunawe Selatan, Sulawesi Tenggara		BUMN
5) MP: Akselerasi Pengembangan Energi Terbarukan dan Konservasi Energi		
Dukungan Belanja K/L dan DAK	3.976.582,6	
<i>Sub: Konservasi Energi</i>		
<i>Aspek: Standar/regulasi</i>		
Reduksi Gas Rumah Kaca (GRK) Sektor ESDM	500,1	KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
Standar Kinerja Energi Minimum (SKEM) dan Label Hemat Energi pada Peralatan Pemanfaat Energi	436,2	KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

Prioritas Nasional/ Major Project	Alokasi (Rp. Juta)	Instansi Pelaksana
Penurunan Intensitas Energi Final	3.466,4	KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
Kendaraan Listrik Hasil Konversi	9.157,2	KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
<i>Sub: Pembangunan Panas Bumi</i>		
<i>Aspek: Peningkatan Kualitas Data Panas Bumi</i>		
Rekomendasi Keprospekan Sumber Daya dan Cadangan Panas Bumi	4.501,1	KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
<i>Sub: Pembangunan Aneka Energi Terbarukan</i>		
<i>Aspek: Pengembangan Riset dan Inovasi</i>		
Peta Potensi EBT dalam Rangka Percepatan Investasi PLT Bayu, Hidro, Biomassa dan Surya	3.532,3	KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
Diklat Masyarakat Bidang KEBTKE	2.712,9	KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
Diklat Industri Bidang KEBTKE	2.852,0	KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
Sertifikasi Kompetensi Tenaga Teknik Sektor Ketenagalistrikan dan EBTKE	3.982,8	KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
<i>Aspek: Pembangunan PLT Surya</i>		
Infrastruktur Energi Terbarukan - Tematik Peningkatan Konektivitas dan Elektrifikasi di Daerah Afiriasi (53 - Provinsi Nusa Tenggara Timur)	88.000,0	DAK
PLTS Terpadu	51.961,1	KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
PLTS Atap K/L	300,0	KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
Pembangkit Listrik Tenaga Surya Atap Kementerian/Lembaga	1.000,0	KEMENTERIAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
<i>Aspek: Pembangunan PLT Panas Bumi</i>		
Penawaran Wilayah Panas Bumi	500,0	KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
Penetapan Wilayah Panas Bumi	1.000,0	KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
<i>Aspek: Pembangunan PLT Bayu</i>		
Monitoring TKDN PLT Bayu	47,6	KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
<i>Aspek: Pembangunan PLT Air</i>		
PLTMH	17.400,0	KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
<i>Sub: Pembangunan Panas Bumi</i>		
<i>Aspek: Pembangunan PLT Panas Bumi</i>		
Monitoring TKDN Bidang Panas Bumi	400,0	KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
<i>Sub: Pembangunan Bioenergi</i>		
<i>Aspek: Pembangunan PLT Bioenergi</i>		
Monitoring TKDN Bidang Bioenergi	321,1	KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
<i>Aspek: Pembangunan Greenfuel</i>		
Volume Biofuel untuk Domestik	1.942,4	KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

Prioritas Nasional/ <i>Major Project</i>	Alokasi (Rp. Juta)	Instansi Pelaksana
Pendanaan untuk Volume Penyaluran Selisih Harga Biodiesel (PN)	3.768.375,3	KEMENTERIAN KEUANGAN
Surat Tanda Daftar Budidaya (STDB) Sawit Rakyat	14.000,0	KEMENTERIAN PERTANIAN
Dukungan BUMN	939.100,0	
Green Diesel Bio Refinery Revamping RU IV Cilacap		BUMN (Terintegrasi dengan PSN)
Pengembangan Pabrik Katalis Merah Putih PT Katalis Sinergi Indonesia		BUMN
Pembangunan Pembangkit Listrik Terbarukan: Pembangunan PLT Air		BUMN
Pembangunan Pembangkit Listrik Terbarukan: Pembangunan PLT Surya		BUMN
Pembangunan Pembangkit Listrik Terbarukan: Pembangunan PLT Bayu		BUMN
Pembangunan Pembangkit Listrik Terbarukan: Pembangunan PLTBm		BUMN
Pembangunan Pembangkit Listrik Terbarukan: Pembangunan PLT Panas Bumi		BUMN
Pembangunan Pembangkit Listrik Terbarukan: Pembangunan PLT Minihidro		BUMN
Pembangunan Pabrik Biodiesel Kapasitas 1.500-ton RBDPO/hari di KEK Sei Mangkei		BUMN
Pembangunan Pabrik BioCNG Kapasitas 210 mmBTU/hari di PKS Mayang PTPN IV		BUMN
Penanaman Biomassa untuk mendukung Rencana Proyek Strategis: <i>New Factory</i> dan Komersialisasi Produk Biomassa		BUMN
Pembangunan Pabrik Serbuk Kayu (<i>Cofiring</i>) Jabar		BUMN
Pembangunan Pabrik Serbuk Kayu (<i>Cofiring</i>) Jateng		BUMN
Dukungan Swasta	5.360.230,0 ^{a)}	
Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi		Swasta
Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Surya		Swasta
Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Air		Swasta
Pembangunan Fasilitas Pengolahan Limbah menjadi Bahan Bakar		Swasta
6) MP: Revitalisasi Tambak di Kawasan Sentra Produksi Udang dan Bandeng		
Dukungan Belanja K/L dan DAK	396.546,4	
<i>Aspek: Penguatan perizinan dan pemasaran</i>		
SHAT Non Sistematis Kategori 4 - Provinsi Lampung	629,2	KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BPN
PBT Non Sistematis Kategori 4 - Provinsi Lampung	806,9	KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BPN
PBT Non Sistematis Kategori 5 - Provinsi Jawa Barat	2.383,4	KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BPN
SHAT Non Sistematis Kategori 5 - Provinsi Jawa Barat	2.038,6	KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BPN
PBT Non Sistematis Kategori 5 - Provinsi Jawa Tengah	1.083,7	KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BPN



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

Prioritas Nasional/ Major Project	Alokasi (Rp. Juta)	Instansi Pelaksana
SHAT Non Sistematis Kategori 5 - Provinsi Jawa Tengah	927,0	KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BPN
PBT Non Sistematis Kategori 5 - Provinsi Jawa Timur	2.701,1	KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BPN
SHAT Non Sistematis Kategori 5 - Provinsi Jawa Timur	2.310,4	KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BPN
PBT Non Sistematis Kategori 5 - Provinsi Banten	216,9	KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BPN
SHAT Non Sistematis Kategori 5 - Provinsi Banten	185,5	KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BPN
Promosi Produk Kelautan dan Perikanan Skala Internasional	10.750,0	KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
<i>Aspek: Pengembangan benih dan induk berkualitas tinggi</i>		
Benih Ikan Air Payau yang disalurkan ke masyarakat - Kab. Karawang	200,6	KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
Benih Udang yang disalurkan ke masyarakat - Kab. Jepara	989,9	KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
Benih Ikan Air Payau yang disalurkan ke masyarakat - Kab. Jepara	374,5	KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
Benih Udang yang disalurkan ke masyarakat - Kab. Situbondo	544,8	KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
Benih Ikan Air Payau yang disalurkan ke masyarakat - Kab. Situbondo	194,8	KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
Benih Udang yang disalurkan ke masyarakat - Kab. Takalar	924,8	KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
Benih Ikan Air Payau yang disalurkan ke masyarakat - Kab. Takalar	476,8	KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
<i>Aspek: Pembangunan infrastruktur kolam dan saluran irigasi tambak</i>		
Kelautan dan Perikanan - Tematik Penguatan Kawasan Sentra Produksi Pangan (Pertanian, Perikanan, dan Hewani) (1803 - Kab. Lampung Selatan)	4.211,2	DAK
Kelautan dan Perikanan - Tematik Penguatan Kawasan Sentra Produksi Pangan (Pertanian, Perikanan, dan Hewani) (1804 - Kab. Lampung Timur)	2.238,6	DAK
Kelautan dan Perikanan - Tematik Penguatan Kawasan Sentra Produksi Pangan (Pertanian, Perikanan, dan Hewani) (3209 - Kab. Cirebon)	5.719,6	DAK
Kelautan dan Perikanan - Tematik Penguatan Kawasan Sentra Produksi Pangan (Pertanian, Perikanan, dan Hewani) (3213 - Kab. Subang)	7.455,5	DAK
Kelautan dan Perikanan - Tematik Penguatan Kawasan Sentra Produksi Pangan (Pertanian, Perikanan, dan Hewani) (3274 - Kota Cirebon)	1.273,2	DAK
Kelautan dan Perikanan - Tematik Penguatan Kawasan Sentra Produksi Pangan (Pertanian, Perikanan, dan Hewani) (3317 - Kab. Rembang)	1.704,5	DAK
Kelautan dan Perikanan - Tematik Penguatan Kawasan Sentra Produksi Pangan (Pertanian, Perikanan, dan Hewani) (3320 - Kab. Jepara)	5.681,7	DAK
Kelautan dan Perikanan - Tematik Penguatan Kawasan Sentra Produksi Pangan (Pertanian, Perikanan, dan Hewani) (3324 - Kab. Kendal)	2.898,7	DAK
Kelautan dan Perikanan - Tematik Penguatan Kawasan Sentra Produksi Pangan (Pertanian, Perikanan, dan Hewani) (3326 - Kab. Pekalongan)	3.635,3	DAK



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

Prioritas Nasional/ <i>Major Project</i>	Alokasi (Rp. Juta)	Instansi Pelaksana
Kelautan dan Perikanan - Tematik Penguatan Kawasan Sentra Produksi Pangan (Pertanian, Perikanan, dan Hewani) (3327 - Kab. Pematang)	6.002,0	DAK
Kelautan dan Perikanan - Tematik Penguatan Kawasan Sentra Produksi Pangan (Pertanian, Perikanan, dan Hewani) (3375 - Kota Pekalongan)	750,0	DAK
Kelautan dan Perikanan - Tematik Penguatan Kawasan Sentra Produksi Pangan (Pertanian, Perikanan, dan Hewani) (3523 - Kab. Tuban)	5.922,6	DAK
Kelautan dan Perikanan - Tematik Penguatan Kawasan Sentra Produksi Pangan (Pertanian, Perikanan, dan Hewani) (3524 - Kab. Lamongan)	6.631,3	DAK
Kelautan dan Perikanan - Tematik Penguatan Kawasan Sentra Produksi Pangan (Pertanian, Perikanan, dan Hewani) (3604 - Kab. Serang)	6.234,7	DAK
Kelautan dan Perikanan - Tematik Penguatan Kawasan Sentra Produksi Pangan (Pertanian, Perikanan, dan Hewani) (5202 - Kab. Lombok Tengah)	1.880,0	DAK
Kelautan dan Perikanan - Tematik Penguatan Kawasan Sentra Produksi Pangan (Pertanian, Perikanan, dan Hewani) (5203 - Kab. Lombok Timur)	10.281,1	DAK
Kelautan dan Perikanan - Tematik Penguatan Kawasan Sentra Produksi Pangan (Pertanian, Perikanan, dan Hewani) (5204 - Kab. Sumbawa)	8.719,1	DAK
Kelautan dan Perikanan - Tematik Penguatan Kawasan Sentra Produksi Pangan (Pertanian, Perikanan, dan Hewani) (5205 - Kab. Dompu)	7.610,7	DAK
Kelautan dan Perikanan - Tematik Penguatan Kawasan Sentra Produksi Pangan (Pertanian, Perikanan, dan Hewani) (5206 - Kab. Bima)	14.124,5	DAK
Kelautan dan Perikanan - Tematik Penguatan Kawasan Sentra Produksi Pangan (Pertanian, Perikanan, dan Hewani) (7302 - Kab. Bulukumba)	8.969,1	DAK
Kelautan dan Perikanan - Tematik Penguatan Kawasan Sentra Produksi Pangan (Pertanian, Perikanan, dan Hewani) (7305 - Kab. Takalar)	9.430,6	DAK
Kelautan dan Perikanan - Tematik Penguatan Kawasan Sentra Produksi Pangan (Pertanian, Perikanan, dan Hewani) (7307 - Kab. Sinjai)	6.256,9	DAK
Kelautan dan Perikanan - Tematik Penguatan Kawasan Sentra Produksi Pangan (Pertanian, Perikanan, dan Hewani) (7308 - Kab. Maros)	10.209,1	DAK
Kelautan dan Perikanan - Tematik Penguatan Kawasan Sentra Produksi Pangan (Pertanian, Perikanan, dan Hewani) (7309 - Kab. Pangkajene dan Kepulauan)	9.044,9	DAK
Kelautan dan Perikanan - Tematik Penguatan Kawasan Sentra Produksi Pangan (Pertanian, Perikanan, dan Hewani) (7311 - Kab. Bone)	12.039,5	DAK
Kelautan dan Perikanan - Tematik Penguatan Kawasan Sentra Produksi Pangan (Pertanian, Perikanan, dan Hewani) (7313 - Kab. Wajo)	9.286,6	DAK
Kelautan dan Perikanan - Tematik Penguatan Kawasan Sentra Produksi Pangan (Pertanian, Perikanan, dan Hewani) (7317 - Kab. Luwu)	11.068,0	DAK
Kluster kawasan di Lokasi <i>Major Project</i> Revitalisasi Tambak Udang dan Bandeng	41.000,0	KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
Infrastruktur budidaya udang berkelanjutan yang ditingkatkan	60.448,9	KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

Prioritas Nasional/ Major Project	Alokasi (Rp. Juta)	Instansi Pelaksana
Sarana Pasca Panen mendukung revitalisasi tambak	1.609,0	KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
Mobil refrigerasi (berpendingin) mendukung revitalisasi tambak	2.613,6	KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
Irigasi perikanan yang dikelola secara partisipatif (PITAP) - Provinsi Lampung	1.200,0	KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
Sarana Kawasan dan Kesehatan Ikan yang disalurkan ke masyarakat - Provinsi Lampung	6.200,0	KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
Sarana Kawasan dan Kesehatan Ikan yang disalurkan ke masyarakat - Provinsi Jawa Barat	6.200,0	KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
Irigasi perikanan yang dikelola secara partisipatif (PITAP) - Provinsi Jawa Barat	1.200,0	KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
Prasarana produksi perikanan budidaya di UPT - Kab. Karawang	2.500,0	KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
Irigasi perikanan yang dikelola secara partisipatif (PITAP) - Provinsi Jawa Tengah	1.200,0	KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
Sarana Kawasan dan Kesehatan Ikan yang disalurkan ke masyarakat - Provinsi Jawa Tengah	6.200,0	KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
Irigasi perikanan yang dikelola secara partisipatif (PITAP) - Provinsi Jawa Timur	1.200,0	KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
Sarana Kawasan dan Kesehatan Ikan yang disalurkan ke masyarakat - Provinsi Jawa Timur	6.200,0	KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
Irigasi perikanan yang dikelola secara partisipatif (PITAP) - Provinsi Banten	1.200,0	KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
Sarana Kawasan dan Kesehatan Ikan yang disalurkan ke masyarakat - Provinsi Banten	6.200,0	KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
Sarana Kawasan dan Kesehatan Ikan yang disalurkan ke masyarakat - Provinsi Nusa Tenggara Barat	6.150,0	KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
Irigasi perikanan yang dikelola secara partisipatif (PITAP) - Provinsi Nusa Tenggara Barat	1.200,0	KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
Irigasi perikanan yang dikelola secara partisipatif (PITAP) - Provinsi Sulawesi Selatan	1.200,0	KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
Sarana Kawasan dan Kesehatan Ikan yang disalurkan ke masyarakat - Provinsi Sulawesi Selatan	6.200,0	KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
Daerah irigasi Glapan yang direhabilitasi	28.814,0	KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT (Terintegrasi dengan PSN)
7) MP: Integrasi Pelabuhan Perikanan dan Fish Market Bertaraf Internasional		
Dukungan Belanja K/L dan DAK	81.002,2	
<i>Aspek: Penguatan data stok perikanan</i>		
Lembaga Pengelola Perikanan Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPPNRI) yang operasional	2.700,0	KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
<i>Aspek: Penguatan armada kapal, sistem logistik dan industri pengolahan</i>		
Kelautan dan Perikanan - Tematik Penguatan Kawasan Sentra Produksi Pangan (Pertanian, Perikanan, dan Hewani) (1409 - Kab. Rokan Hilir)	5.700,6	DAK
Kelautan dan Perikanan - Tematik Penguatan Kawasan Sentra Produksi Pangan (Pertanian, Perikanan, dan Hewani) (7106 - Kab. Minahasa Utara)	9.967,9	DAK



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

Prioritas Nasional/ Major Project	Alokasi (Rp. Juta)	Instansi Pelaksana
Kelautan dan Perikanan - Tematik Penguatan Kawasan Sentra Produksi Pangan (Pertanian, Perikanan, dan Hewani) (8103 - Kab. Maluku Tengah)	12.773,8	DAK
Alat penangkapan ikan dan/atau alat bantu penangkapan ikan bantuan yang tersalurkan - Pusat	18.750,0	KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
Sarana penangkapan ikan yang tersalurkan	22.990,0	KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
<i>Aspek: Pembangunan pelabuhan perikanan dan pasar ikan</i>		
Rekomendasi Kebijakan Pendampingan Major Project Pelabuhan Perikanan yang Terintegrasi dengan Pasar Ikan Bertaraf Internasional	1.000,0	KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
Pelabuhan Perikanan yang terintegrasi dan bertaraf internasional yang dikembangkan	5.500,0	KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
<i>Aspek: Pembangunan infrastruktur pendukung (jalan, air, listrik)</i>		
Data Lokasi Indikatif Pengadaan Tanah - Provinsi Maluku	131,4	KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BPN
Rekomendasi Pengendalian Pembangunan Jaringan Transmisi dan Gardu Induk	1.488,4	KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
8) MP: <i>Food Estate</i> (Kawasan Sentra Produksi Pangan)		
Dukungan Belanja K/L dan DAK	1.551.531,5	
<i>Sub: Kalimantan Tengah; Sumatera Utara; Sumatera Selatan; Nusa Tenggara Timur; Papua</i>		
<i>Aspek: On Farm</i>		
Area pengendalian OPT Hortikultura - Pusat	6.800,0	KEMENTERIAN PERTANIAN
Kawasan Padi - Pusat	260.902,0	KEMENTERIAN PERTANIAN
Kawasan Jagung - Pusat	91.292,5	KEMENTERIAN PERTANIAN
Areal Pengendalian OPT Tanaman Pangan	168.345,5	KEMENTERIAN PERTANIAN (Terintegrasi dengan PSN)
Benih sumber padi yang dihasilkan - Provinsi Sumatera Selatan	224,0	KEMENTERIAN PERTANIAN
Benih sumber padi yang dihasilkan - Provinsi Kalimantan Tengah	168,0	KEMENTERIAN PERTANIAN
Areal Penanganan DPI	3.973,8	KEMENTERIAN PERTANIAN
Benih sumber padi yang dihasilkan - Provinsi Nusa Tenggara Timur	432,5	KEMENTERIAN PERTANIAN
Benih sumber padi yang dihasilkan - Provinsi Papua	168,0	KEMENTERIAN PERTANIAN
Lahan Pertanian Pangan Produktif (<i>Food Estate</i>)	73.013,4	KEMENTERIAN PERTANIAN
Optimasi Lahan - Kab. Humbang Hasundutan	580,5	KEMENTERIAN PERTANIAN (Terintegrasi dengan PSN)
Benih sumber jagung yang dihasilkan - Provinsi Nusa Tenggara Timur	318,8	KEMENTERIAN PERTANIAN
Kawasan Kelapa - Kab. Belu	977,0	KEMENTERIAN PERTANIAN (Terintegrasi dengan PSN)
Kawasan Kelapa - Kab. Sumba Tengah	1.338,0	KEMENTERIAN PERTANIAN
Optimasi Lahan - Kab. Pulang Pisau	291,1	KEMENTERIAN PERTANIAN (Terintegrasi dengan PSN)
Kawasan Kelapa - Kab. Merauke	585,5	KEMENTERIAN PERTANIAN
Optimasi Lahan - Kab. Merauke	1.741,1	KEMENTERIAN PERTANIAN (Terintegrasi dengan PSN)



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

Prioritas Nasional/ <i>Major Project</i>	Alokasi (Rp. Juta)	Instansi Pelaksana
<i>Aspek: Off Farm</i>		
Sarana Pascapanen Tanaman Pangan - Pusat	394.873,2	KEMENTERIAN PERTANIAN
Sarana Pascapanen Tanaman Perkebunan - Kab. Pulang Pisau	30,0	KEMENTERIAN PERTANIAN
Prasarana Pascapanen Tanaman Perkebunan - Kab. Pulang Pisau	205,4	KEMENTERIAN PERTANIAN
<i>Aspek: Geospasial</i>		
Irigasi - Tematik Pengembangan <i>Food Estate</i> (12 - Provinsi Sumatera Utara)	21.929,0	DAK
Irigasi - Tematik Pengembangan <i>Food Estate</i> (1215 - Kab. Humbang Hasundutan)	3.678,6	DAK
Irigasi - Tematik Pengembangan <i>Food Estate</i> (16 - Provinsi Sumatera Selatan)	18.880,0	DAK
Irigasi - Tematik Pengembangan <i>Food Estate</i> (1607 - Kab. Banyuasin)	3.264,5	DAK
Irigasi - Tematik Pengembangan <i>Food Estate</i> (53 - Provinsi Nusa Tenggara Timur)	4.784,8	DAK
Irigasi - Tematik Pengembangan <i>Food Estate</i> (5306 - Kab. Belu)	4.516,7	DAK
Irigasi - Tematik Pengembangan <i>Food Estate</i> (5316 - Kab. Sumba Tengah)	5.628,8	DAK
Irigasi - Tematik Pengembangan <i>Food Estate</i> (62 - Provinsi Kalimantan Tengah)	18.597,2	DAK
Irigasi - Tematik Pengembangan <i>Food Estate</i> (6203 - Kab. Kapuas)	6.372,3	DAK
Irigasi - Tematik Pengembangan <i>Food Estate</i> (6210 - Kab. Pulang Pisau)	10.036,0	DAK
Irigasi - Tematik Pengembangan <i>Food Estate</i> (9401 - Kab. Merauke)	5.498,3	DAK
Pertanian - Tematik Pengembangan <i>Food Estate</i> (1215 - Kab. Humbang Hasundutan)	8.419,2	DAK
Pertanian - Tematik Pengembangan <i>Food Estate</i> (1607 - Kab. Banyuasin)	3.833,1	DAK
Pertanian - Tematik Pengembangan <i>Food Estate</i> (5306 - Kab. Belu)	5.241,7	DAK
Pertanian - Tematik Pengembangan <i>Food Estate</i> (5316 - Kab. Sumba Tengah)	2.542,0	DAK
Pertanian - Tematik Pengembangan <i>Food Estate</i> (62 - Provinsi Kalimantan Tengah)	12.227,2	DAK
Pertanian - Tematik Pengembangan <i>Food Estate</i> (6203 - Kab. Kapuas)	17.496,8	DAK
Pertanian - Tematik Pengembangan <i>Food Estate</i> (6210 - Kab. Pulang Pisau)	15.686,4	DAK
Pertanian - Tematik Pengembangan <i>Food Estate</i> (9401 - Kab. Merauke)	18.198,0	DAK
Kehutanan - Tematik Pengembangan <i>Food Estate</i> (12 - Provinsi Sumatera Utara)	3.829,8	DAK
Kehutanan - Tematik Pengembangan <i>Food Estate</i> (53 - Provinsi Nusa Tenggara Timur)	17.708,3	DAK
Kehutanan - Tematik Pengembangan <i>Food Estate</i> (62 - Provinsi Kalimantan Tengah)	2.500,2	DAK
Kehutanan - Tematik Pengembangan <i>Food Estate</i> (94 - Provinsi Papua)	1.136,5	DAK



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

Prioritas Nasional/ <i>Major Project</i>	Alokasi (Rp. Juta)	Instansi Pelaksana
Jalan - Tematik Pengembangan <i>Food Estate</i> (12 - Provinsi Sumatera Utara)	27.529,0	DAK
Jalan - Tematik Pengembangan <i>Food Estate</i> (1215 - Kab. Humbang Hasundutan)	16.018,2	DAK
Jalan - Tematik Pengembangan <i>Food Estate</i> (16 - Provinsi Sumatera Selatan)	25.096,8	DAK
Jalan - Tematik Pengembangan <i>Food Estate</i> (1607 - Kab. Banyuasin)	27.166,9	DAK
Jalan - Tematik Pengembangan <i>Food Estate</i> (53 - Provinsi Nusa Tenggara Timur)	24.261,1	DAK
Jalan - Tematik Pengembangan <i>Food Estate</i> (5306 - Kab. Belu)	27.886,7	DAK
Jalan - Tematik Pengembangan <i>Food Estate</i> (5316 - Kab. Sumba Tengah)	24.726,5	DAK
Jalan - Tematik Pengembangan <i>Food Estate</i> (62 - Provinsi Kalimantan Tengah)	28.646,8	DAK
Jalan - Tematik Pengembangan <i>Food Estate</i> (6203 - Kab. Kapuas)	29.470,2	DAK
Jalan - Tematik Pengembangan <i>Food Estate</i> (6210 - Kab. Pulang Pisau)	32.206,8	DAK
Jalan - Tematik Pengembangan <i>Food Estate</i> (94 - Provinsi Papua)	13.189,6	DAK
Jalan - Tematik Pengembangan <i>Food Estate</i> (9401 - Kab. Merauke)	29.168,9	DAK
Peta Tematik Pertanahan dan Ruang - Pusat	15.000,0	KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BPN
PBT Non Sistematis Kategori 3 - Provinsi Sumatera Utara	1.669,3	KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BPN
SHAT Non Sistematis Kategori 3 - Provinsi Sumatera Utara	1.231,3	KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BPN
SHAT Non Sistematis Kategori 1 - Provinsi Nusa Tenggara Timur	280,6	KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BPN
PBT Non Sistematis Kategori 1 - Provinsi Nusa Tenggara Timur	405,5	KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BPN
SHAT Non Sistematis Kategori 3 - Provinsi Kalimantan Tengah	442,9	KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BPN
PBT Non Sistematis Kategori 3 - Provinsi Kalimantan Tengah	600,5	KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BPN
Jembatan yang dikembangkan di Kawasan Transmigrasi Mendukung Ketahanan Pangan - Kab. Kapuas	2.209,7	KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI
Lahan yang dibuka untuk Pembangunan Kawasan Transmigrasi Mendukung Ketahanan Pangan - Kab. Kapuas	1.083,3	KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI
Jalan Non-Status yang Dikembangkan di Kawasan Transmigrasi Mendukung Ketahanan Pangan - Kab. Kapuas	2.613,5	KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI
Bantuan Catu Pangan untuk Transmigran dalam Mendukung Ketahanan Pangan (<i>Food Estate</i>) - Kab. Kapuas	638,0	KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI (Terintegrasi dengan PSN)
Bantuan Sarana Produksi Pertanian di Satuan Permukiman dan Pusat SKP Pada Kawasan Transmigrasi Yang Mendukung <i>Food Estate</i> - Kab. Kapuas	348,5	KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI (Terintegrasi dengan PSN)
Jembatan yang dibangun di Kawasan Transmigrasi Mendukung Ketahanan Pangan - Kab. Kapuas	1.338,1	KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

Prioritas Nasional/ Major Project	Alokasi (Rp. Juta)	Instansi Pelaksana
9) MP: Pengelolaan Terpadu UMKM		
Dukungan Belanja K/L	1.397.337,9	
<i>Sub: Aceh; Jawa Tengah; Nusa Tenggara Timur; Kalimantan Timur; Sulawesi Utara; Sumatera Utara; DI Yogyakarta; Bali; Kalimantan Selatan; Sulawesi Selatan</i>		
<i>Aspek: Regulasi dan Pendataan UMKM</i>		
Sistem Informasi Terintegrasi Data Tunggal UMKM	7.162,9	KEMENTERIAN KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH
Pendataan Lengkap KUMKM	370.034,0	KEMENTERIAN KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH
Pengembangan Sektor Industri Aneka	3.300,0	KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN
<i>Aspek: Perluasan Akses Pasar dan Kemitrausahaan</i>		
Pengembangan Usaha dan Fasilitas Akses Pemasaran (Akses RA Tahun ke 3) - Provinsi Nusa Tenggara Timur	1.081,6	KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BPN
Pengembangan Usaha dan Fasilitas Akses Pemasaran (Akses RA Tahun ke 3) - Provinsi Sulawesi Selatan	1.360,8	KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BPN
Kemitraan Usaha Nasional	10.000,0	KEMENTERIAN INVESTASI/BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
Mendorong Investasi Besar Bermitra dengan UMKM	27.000,0	KEMENTERIAN INVESTASI/BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
Adopsi teknologi digital UMKM	21.700,0	KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
Dukungan Fasilitas <i>Factory Sharing</i> - Provinsi Aceh	833,3	KEMENTERIAN KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH
Dukungan Fasilitas <i>Factory Sharing</i> - Provinsi Sumatera Utara	833,3	KEMENTERIAN KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH
Usaha Mikro yang mendapat Pembinaan - Provinsi Jawa Tengah	2.261,4	KEMENTERIAN KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH
Dukungan Fasilitas <i>Factory Sharing</i> - Provinsi Jawa Tengah	833,3	KEMENTERIAN KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH
Dukungan Fasilitas <i>Factory Sharing</i> - Provinsi DI Yogyakarta	833,3	KEMENTERIAN KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH
Dukungan Fasilitas <i>Factory Sharing</i> - Kab. Jembrana	833,3	KEMENTERIAN KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH
Usaha Mikro yang mendapat Pembinaan - Provinsi Nusa Tenggara Timur	2.261,4	KEMENTERIAN KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH
Dukungan Fasilitas <i>Factory Sharing</i> - Provinsi Nusa Tenggara Timur	833,3	KEMENTERIAN KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH
Dukungan Fasilitas <i>Factory Sharing</i> - Provinsi Kalimantan Selatan	833,3	KEMENTERIAN KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH
Dukungan Fasilitas <i>Factory Sharing</i> - Kab. Kutai Kartanegara	833,3	KEMENTERIAN KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH
Usaha Mikro yang mendapat Pembinaan - Provinsi Sulawesi Utara	2.261,4	KEMENTERIAN KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH
Dukungan Fasilitas <i>Factory Sharing</i> - Kab. Minahasa Selatan	833,3	KEMENTERIAN KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH
Dukungan Fasilitas <i>Factory Sharing</i> - Provinsi Sulawesi Selatan	833,3	KEMENTERIAN KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH
UKM/Sentra yang difasilitasi Peningkatan Digitalisasi - Kab. Pangkajene dan Kepulauan	75,0	KEMENTERIAN KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

Prioritas Nasional/ <i>Major Project</i>	Alokasi (Rp. Juta)	Instansi Pelaksana
Jalan Strategis (ProPN) - ANABANUA - TARUMPAKKAE	39.781,6	KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
<i>Export Coaching Program</i>	6.728,9	KEMENTERIAN PERDAGANGAN
Fasilitasi Kapasitas Pemasaran Produk	5.000,0	KEMENTERIAN PERDAGANGAN
Fasilitasi Pembinaan UMKM Pusat Jajan Kuliner dan Cinderamata (PJKC)	4.400,0	KEMENTERIAN PERDAGANGAN
IKM Pangan, Furnitur dan Bahan Bangunan yang Mendapatkan Fasilitasi Promosi dan Pameran	1.300,0	KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN
Industri Aneka dan IKM Kimia, Sandang, dan Kerajinan yang Mendapatkan Fasilitasi Promosi dan Pameran	4.100,0	KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN
Advokasi Kemitraan ke Badan Usaha	322,1	KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA (KPPU)
<i>Aspek: Penyediaan Akses Pembiayaan</i>		
Fasilitasi Pengembangan Kelembagaan Ekonomi dan Investasi Desa, Daerah Tertinggal dan Transmigrasi	4.600,0	KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI
Fasilitasi Pengembangan BUMDesa - Provinsi Aceh	1.950,0	KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI
Fasilitasi Pengembangan BUMDesa - Provinsi Sumatera Utara	3.300,0	KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI
Fasilitasi Pengembangan BUMDesa - Provinsi Jawa Tengah	7.350,0	KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI
Fasilitasi Pengembangan BUMDesa - Provinsi DI Yogyakarta	1.125,0	KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI
Fasilitasi Pengembangan BUMDesa - Provinsi Nusa Tenggara Timur	1.500,0	KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI
Fasilitasi Pengembangan BUMDesa - Provinsi Sulawesi Utara	1.125,0	KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI
Fasilitasi Pengembangan BUMDesa - Provinsi Sulawesi Selatan	2.250,0	KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI
Koperasi Penerima Dana Bergulir dan Fasilitasi Inkubator Wirausaha	3.617,4	KEMENTERIAN KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH
<i>Aspek: Penyediaan Akses Bahan Baku dan Ruang/ Alat Produksi Bersama</i>		
Lahan Garam yang difasilitasi - Kab. Pangkajene dan Kepulauan	3.111,4	KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
Sarana niaga Garam Rakyat yang dibangun - Kab. Pangkajene dan Kepulauan	11.476,0	KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
UKM/Sentra Yang difasilitasi Pengembangan <i>Factory Sharing</i> - Kab. Batu Bara	13.446,4	KEMENTERIAN KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH
UKM/Sentra Yang difasilitasi Pengembangan <i>Factory Sharing</i> - Kab. Sleman	13.446,4	KEMENTERIAN KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH
UKM/Sentra Yang difasilitasi Pengembangan <i>Factory Sharing</i> - Kab. Jembrana	13.446,4	KEMENTERIAN KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH
UKM/Sentra Yang difasilitasi Pengembangan <i>Factory Sharing</i> - Kab. Tanah Laut	13.446,4	KEMENTERIAN KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH
UKM/Sentra Yang difasilitasi Pengembangan <i>Factory Sharing</i> - Kab. Pangkajene dan Kepulauan	13.446,4	KEMENTERIAN KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH
Fasilitasi Pengembangan Produk Kemasan	6.000,0	KEMENTERIAN PERDAGANGAN
Fasilitasi pendaftaran HKI	1.000,0	KEMENTERIAN PERDAGANGAN
Sentra IKM dan UPT Pangan, Furnitur dan Bahan Bangunan Yang Mendapat Fasilitasi	3.926,6	KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN (Terintegrasi dengan PSN)



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

Prioritas Nasional/ <i>Major Project</i>	Alokasi (Rp. Juta)	Instansi Pelaksana
Sentra IKM dan UPT Industri Aneka dan IKM Kimia, Sandang, dan Kerajinan yang mendapat Fasilitasi	2.500,0	KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN
IKM Pangan, Furnitur dan Bahan Bangunan yang Mendapatkan Pendampingan, Penerapan Sertifikasi Produk dan Penguatan Mesin/Peralatan	6.223,4	KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN
IKM Pangan, Furnitur dan Bahan Bangunan yang Mengikuti Program Restrukturisasi Mesin/Peralatan	4.250,0	KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN
Industri Aneka dan IKM Kimia, Sandang, dan Kerajinan yang Mendapatkan Pendampingan, Penerapan Sertifikasi Produk dan Penguatan Mesin/Peralatan	7.000,0	KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN
Industri Aneka dan IKM Kimia, Sandang, dan Kerajinan yang Mengikuti Program Restrukturisasi Mesin/Peralatan	2.500,0	KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN
Layanan Hak Kekayaan Intelektual (HKI)	2.000,0	KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN
Layanan Desain dan Kemasan	2.000,0	KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN
Sarana Pascapanen Tanaman Perkebunan - Kab. Jembrana	310,4	KEMENTERIAN PERTANIAN
Sarana Pengolahan Tanaman Perkebunan - Kab. Jembrana	1.419,9	KEMENTERIAN PERTANIAN
Prasarana Pascapanen Tanaman Perkebunan - Kab. Minahasa Selatan	184,4	KEMENTERIAN PERTANIAN
<i>Aspek: Pendampingan SDM UMKM</i>		
Usaha Mikro Sektor Prioritas yang menerima Pelatihan	10.863,6	KEMENTERIAN KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH
Fasilitator yang dibina untuk melakukan pendampingan kepada UMK Pangan Olahan	3.756,8	BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
Bimbingan Teknis Penerapan SNI kepada UMKM	700,0	BADAN Standardisasi NASIONAL (BSN)
Penataan Kelembagaan Penerima Akses Reforma Agraria (Akses RA Tahun ke 2) - Provinsi Jawa Tengah	1.455,3	KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BPN
Fasilitasi Pengembangan Kewirausahaan desa dan Perdesaan, Daerah Tertinggal dan Transmigrasi	750,0	KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI
Fasilitasi dan Pembinaan Masyarakat TKM Lanjutan	45.000,0	KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN
Tenaga Kerja Mandiri Pemula	220.000,0	KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN
Usaha Mikro Sektor Prioritas yang menerima Pelatihan - Provinsi Aceh	319,5	KEMENTERIAN KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH
Usaha Mikro Sektor Prioritas yang menerima Pelatihan - Provinsi Sumatera Utara	319,5	KEMENTERIAN KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH
Usaha Mikro Sektor Prioritas yang menerima Pelatihan - Provinsi Jawa Tengah	319,5	KEMENTERIAN KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH
Usaha Mikro Sektor Prioritas yang menerima Pelatihan - Provinsi DI Yogyakarta	319,5	KEMENTERIAN KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH
Jumlah <i>Start-Up</i> yang dikembangkan - Provinsi DI Yogyakarta	1.700,0	KEMENTERIAN KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH
Usaha Mikro Sektor Prioritas yang menerima Pelatihan - Provinsi Bali	319,5	KEMENTERIAN KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH
Jumlah <i>Start-Up</i> yang dikembangkan - Provinsi Bali	1.400,0	KEMENTERIAN KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH
Usaha Mikro Sektor Prioritas yang menerima Pelatihan - Provinsi Nusa Tenggara Timur	319,5	KEMENTERIAN KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

Prioritas Nasional/ <i>Major Project</i>	Alokasi (Rp. Juta)	Instansi Pelaksana
Usaha Mikro Sektor Prioritas yang menerima Pelatihan - Provinsi Kalimantan Selatan	319,5	KEMENTERIAN KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH
Usaha Mikro Sektor Prioritas yang menerima Pelatihan - Provinsi Kalimantan Timur	319,5	KEMENTERIAN KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH
UKM/ <i>Start-Up</i> yang dilatih Peningkatan Kapasitas Bisnis - Provinsi Sulawesi Utara	1.250,0	KEMENTERIAN KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH
Usaha Mikro Sektor Prioritas yang menerima Pelatihan - Provinsi Sulawesi Utara	319,5	KEMENTERIAN KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH
Usaha Mikro Sektor Prioritas yang menerima Pelatihan - Provinsi Sulawesi Selatan	319,5	KEMENTERIAN KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH
Perempuan Rentan yang dilatih tentang kewirausahaan - Provinsi Bali	456,8	KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
Perempuan Rentan yang dilatih tentang kewirausahaan - Provinsi Nusa Tenggara Timur	456,8	KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
Mahasiswa Mengembangkan Inovasi Wirausaha	40.000,0	KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
SMK yang Mengembangkan Proyek Kreatif dan Kewirausahaan	14.090,0	KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
Anak Usia Sekolah tidak Sekolah memperoleh Pendidikan Kecakapan Wirausaha	49.487,2	KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Pelaku Usaha	4.000,0	KEMENTERIAN PERDAGANGAN
IKM Pangan, Furnitur dan Bahan Bangunan yang Mendapatkan Fasilitasi <i>e-smart</i> IKM	1.000,0	KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN
Industri Aneka dan IKM Kimia, Sandang, dan Kerajinan yang Mendapatkan Fasilitasi <i>e-smart</i> IKM	1.000,0	KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN
Wirausaha Industri yang Mendapatkan Pelatihan Kewirausahaan Dan Teknis Produksi Melalui Dana Dekonsentrasi - Provinsi Kalimantan Selatan	1.354,6	KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN
<i>Aspek: Kurasi dan Standardisasi Produk</i>		
Layanan Pembinaan kepada UMK Produk Unggulan Daerah	2.197,0	BADAN Standardisasi NASIONAL (BSN)
Pendampingan Pemenuhan dan Sertifikasi SNI kepada UMK	2.500,0	BADAN Standardisasi NASIONAL (BSN)
Sertifikat Halal Non UMK	5.000,0	KEMENTERIAN AGAMA
Sertifikat Halal UMK	223.000,0	KEMENTERIAN AGAMA
Usaha Mikro yang mendapat Fasilitasi dan Pembinaan Standardisasi dan Sertifikasi Produk - Provinsi Aceh	777,7	KEMENTERIAN KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH
Usaha Mikro yang mendapat Fasilitasi dan Pembinaan Standardisasi dan Sertifikasi Produk - Provinsi Sumatera Utara	777,7	KEMENTERIAN KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH
Usaha Mikro yang mendapat Fasilitasi dan Pembinaan Standardisasi dan Sertifikasi Produk - Provinsi Jawa Tengah	777,7	KEMENTERIAN KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH
Usaha Mikro yang mendapat Fasilitasi dan Pembinaan Standardisasi dan Sertifikasi Produk - Provinsi DI Yogyakarta	777,7	KEMENTERIAN KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH
Usaha Mikro yang mendapat Fasilitasi dan Pembinaan Standardisasi dan Sertifikasi Produk - Provinsi Bali	777,7	KEMENTERIAN KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH
Usaha Mikro yang mendapat Fasilitasi dan Pembinaan Standardisasi dan Sertifikasi Produk - Provinsi Nusa Tenggara Timur	777,7	KEMENTERIAN KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

Prioritas Nasional/ Major Project	Alokasi (Rp. Juta)	Instansi Pelaksana
Usaha Mikro yang mendapat Fasilitas dan Pembinaan Standardisasi dan Sertifikasi Produk - Provinsi Kalimantan Selatan	777,7	KEMENTERIAN KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH
Usaha Mikro yang mendapat Fasilitas dan Pembinaan Standardisasi dan Sertifikasi Produk - Provinsi Kalimantan Timur	777,7	KEMENTERIAN KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH
Usaha Mikro yang mendapat Fasilitas dan Pembinaan Standardisasi dan Sertifikasi Produk - Provinsi Sulawesi Utara	777,7	KEMENTERIAN KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH
Usaha Mikro yang mendapat Fasilitas dan Pembinaan Standardisasi dan Sertifikasi Produk - Provinsi Sulawesi Selatan	777,7	KEMENTERIAN KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH
Fasilitas Sertifikasi Produk Primer	1.000,0	KEMENTERIAN PERDAGANGAN
Fasilitas Sertifikasi Produk Manufaktur	1.750,0	KEMENTERIAN PERDAGANGAN
PN 2: MENGEMBANGKAN WILAYAH UNTUK MENGURANGI KESENJANGAN DAN MENJAMIN PEMERATAAN		
10) MP: Pembangunan Wilayah Batam-Bintan		
Dukungan Belanja K/L	730.544,3	
<i>Aspek: Kawasan Pariwisata</i>		
Fasilitas Pengembangan BUMDesa Bersama	10.100,0	KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI
Jejaring Destinasi Pariwisata di Wilayah Destinasi I yang dikembangkan	3.200,0	KEMENTERIAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF/BADAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF
SDM Pengelola Destinasi Pariwisata di Wilayah Destinasi I yang ditingkatkan kapasitasnya	3.900,0	KEMENTERIAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF/BADAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF
<i>Aspek: Kawasan Industri</i>		
Kawasan Industri (KI) prioritas di luar Jawa yang beroperasi dan meningkatkan investasi	2.300,0	KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN
Kawasan Industri (KI) yang dikembangkan	1.250,0	KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN
Industri Smelter Logam Bukan Besi yang termonitor dan terevaluasi perkembangannya	1.500,0	KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN
<i>Aspek: Infrastruktur Strategis</i>		
Water Treatment Plant (WTP) Kapasitas 350 liter/detik - Kota Batam	46.294,3	BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM (BPKPB BATAM)
Kolam Dermaga Baru Terminal Curah Cair Kabil - Kota Batam	88.000,0	BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM (BPKPB BATAM)
<i>Aspek: Infrastruktur Pendukung</i>		
Jalan Koridor Utama Pelabuhan - Bandara (Ruas Simp. Lalan Madani - Bundaran Punggur) - Kota Batam	286.000,0	BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM (BPKPB BATAM)
Jalan Koridor Utama Pelabuhan - Bandara (Ruas Bundaran Punggur - Simp. Bandara) - Kota Batam	70.380,0	BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM (BPKPB BATAM)
Bundaran Punggur - Kota Batam	74.470,0	BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM (BPKPB BATAM)
Bundaran Bandara - Kota Batam	69.150,0	BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM (BPKPB BATAM)
Jalan Yos Sudarso Tahap 3 (Ruas Simpang Bengkong - Underpass Pelita) - Kota Batam	74.000,0	BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM (BPKPB BATAM)



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

Prioritas Nasional/ <i>Major Project</i>	Alokasi (Rp. Juta)	Instansi Pelaksana
Dukungan BUMN	2.647.000,0	
Pengembangan Bandara Hang Nadim		BUMN
11) MP: Pengembangan Wilayah Metropolitan (WM): Palembang, Denpasar, Banjarmasin, Makassar		
Dukungan Belanja K/L dan KPBU	7.442.110,4	
<i>Aspek: Sosial</i>		
SDM Pengelola Destinasi Pariwisata di Wilayah Destinasi I yang ditingkatkan kapasitasnya - Pusat	3.900,0	KEMENTERIAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF/BADAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF
Bendungan Sidan yang dibangun - Provinsi Bali	802.173,4	KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT (Terintegrasi dengan PSN)
Rumah Khusus - Kab. Banjar	6.019,4	KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
Bendungan Pamukkulu yang dibangun - Provinsi Sulawesi Selatan	1.228.567,0	KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT (Terintegrasi dengan PSN)
<i>Aspek: Lingkungan</i>		
Pengendalian banjir Sungai Lambidaro-Sekanak yang dibangun - Provinsi Sumatera Selatan	50.000,0	KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
<i>Aspek: Ekonomi</i>		
Publikasi/Laporan Metropolitan Statistical Area - Pusat	6.896,0	BADAN PUSAT STATISTIK
Publikasi/Laporan Metropolitan Statistical Area - Provinsi Sulawesi Selatan	134,8	BADAN PUSAT STATISTIK
Publikasi/Laporan Metropolitan Statistical Area - Kab. Gowa	1.012,0	BADAN PUSAT STATISTIK
Materi Teknis RTR Nasional (Pulau/Kep dan KSN) di Pulau Sulawesi	863,8	KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BPN
Pembangunan Jalan Strategis (ProPN) - BTS. Kota Singaraja - Mengwitani	29.325,5	KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
Jalan Tol Gilimanuk - Mengwi (<i>Unsolicited</i>) (Konstruksi - Investasi BUP KPBU)	4.104.000,0	KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT (Terintegrasi dengan PSN)
Preservasi Jalan Lintas Timur Provinsi Sumatera Selatan (Konstruksi - Investasi BUP KPBU)	491.000,0	KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT(KPBU)
Penyelenggaraan Layanan Perintis LRT Sumatera Selatan - Kota Palembang	76.533,5	KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
Pembelian Layanan (<i>Buy The Services</i>) Angkutan Massal Berbasis Jalan Di Kota Palembang (Prioritas Nasional) - Provinsi Sumatera Selatan	63.912,9	KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
Pembelian Layanan (<i>Buy The Services</i>) Angkutan Massal Berbasis Jalan Di Kawasan Perkotaan Denpasar (Prioritas Nasional) - Provinsi Bali	91.469,8	KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
Pembangunan Dermaga Kenavigasian Benoa - Kota Denpasar	35.421,3	KEMENTERIAN PERHUBUNGAN (Terintegrasi dengan PSN)
Pembangunan Sisi Darat Dermaga Kenavigasian Benoa - Kota Denpasar	13.022,6	KEMENTERIAN PERHUBUNGAN (Terintegrasi dengan PSN)
Pembangunan Fasilitas Pelabuhan Sanur - Kota Denpasar	129.991,4	KEMENTERIAN PERHUBUNGAN (Terintegrasi dengan PSN)
Pengembangan Angkutan Massal Berbasis Jalan di Kawasan Perkotaan dengan Skema Pembelian Layanan BTS (<i>Buy The Service</i>) di Kota Banjarmasin (Prioritas Nasional) - Provinsi Kalimantan Selatan	15.752,4	KEMENTERIAN PERHUBUNGAN



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

Prioritas Nasional/ <i>Major Project</i>	Alokasi (Rp. Juta)	Instansi Pelaksana
Pengembangan Angkutan Massal Berbasis Jalan di Kawasan Perkotaan dengan Skema Pembelian Layanan BTS (<i>Buy The Service</i>) di Kota Makassar (Prioritas Nasional) - Provinsi Sulawesi Selatan	18.636,8	KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
Kewajiban Pembayaran atas Ketersediaan Layanan (<i>Availability Payment</i>) (Dukungan/Pendamping KPBU) - Kota Makassar	267.490,0	KEMENTERIAN PERHUBUNGAN (Terintegrasi dengan PSN)
12) MP: Pembangunan Ibu Kota Nusantara		
Dukungan Belanja K/L	20.989.454,7	
<i>Sub: Pengembangan Kawasan dan SDM</i>		
<i>Aspek: SDM</i>		
Instansi Pemerintah yang Menerima Pendampingan Penataan Arsip Persiapan Pemindahan IKN	15.630,0	ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA
Pemetaan / Penilaian Potensi dan Kompetensi ASN	5.500,0	BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
PBK Provinsi Kalimantan Timur	5.202,1	KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN
PBK UPTP - Kota Samarinda	11.561,3	KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN
<i>Sub: Penyiapan Regulasi dan Kebijakan</i>		
<i>Aspek: Regulasi dan Kebijakan</i>		
Fasilitasi Legislasi Rancangan Peraturan Kepala Otorita IKN	1.173,4	KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BPN
Sanksi Administratif Pelanggaran Pemanfaatan Ruang di IKN	1.200,0	KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BPN
Rekomendasi Penataan Ulang Penggunaan BMN oleh K/L (Asset Rearrangement) di Jakarta (PN)	196,5	KEMENTERIAN KEUANGAN
Rekomendasi Transaksi Pemanfaatan Barang Milik Negara Pada Ibu Kota Negara Lama (PN)	2.363,6	KEMENTERIAN KEUANGAN
Rekomendasi kebijakan untuk mendukung penyelenggaraan telekomunikasi di IKN	1.672,6	KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
Rekomendasi Kebijakan Pengawasan/Pengendalian Desain Sistem Keamanan Ibu Kota Negara Baru	4.000,0	KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG POLITIK, HUKUM DAN KEAMANAN
Rekomendasi Kebijakan Pengawasan/Pengendalian Pembangunan Infrastruktur Teknologi, Informasi dan Komunikasi di Ibukota Negara Baru	7.000,0	KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG POLITIK, HUKUM DAN KEAMANAN
Rekomendasi Kebijakan Pengawasan/Pengendalian Desain Sistem Pertahanan Ibukota Negara Baru	3.000,0	KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG POLITIK, HUKUM DAN KEAMANAN
Standar Instrumen Pengelolaan Hutan Berkelanjutan (IKN)	3.440,0	KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
<i>Sub: Perencanaan dan Penyiapan Lahan</i>		
<i>Aspek: Perencanaan Kawasan dan Infrastruktur</i>		
Penyusunan OBC Rencana Penyelenggaraan KA Antarkota Trans Kalimantan Segmen Simpang Petung - Balikpapan - Samarinda	4.500,0	KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
Studi Desain Kapal Berbahan Bakar Ramah Lingkungan	1.000,0	KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
Sistem Transportasi Ibukota Nusantara - Provinsi Kalimantan Timur	4.802,9	KEMENTERIAN PERHUBUNGAN



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

Prioritas Nasional/ <i>Major Project</i>	Alokasi (Rp. Juta)	Instansi Pelaksana
Promosi Kegiatan di Kawasan Nasional IKN di Wilayah Amerika dan Eropa	3.000,0	KEMENTERIAN INVESTASI/BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
Promosi Kegiatan di Kawasan Nasional Ibu Kota Negara (IKN) di Wilayah Asia Timur, Asia Selatan, Timur Tengah dan Afrika	1.000,0	KEMENTERIAN INVESTASI/BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
Promosi Kegiatan di Kawasan Nasional Ibu Kota Negara (IKN) di Wilayah Asia Tenggara, Australia, Selandia Baru dan Pasifik	1.000,0	KEMENTERIAN INVESTASI/BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
Peta Peluang Investasi Proyek Prioritas Strategis yang Siap Ditawarkan di Ibu Kota Negara (IKN) Bidang Infrastruktur	16.400,0	KEMENTERIAN INVESTASI/BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
Peta Peluang Investasi Proyek Prioritas Strategis yang Siap Ditawarkan di Ibu Kota Negara (IKN) Bidang Sumber Daya Alam	16.400,0	KEMENTERIAN INVESTASI/BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
Peta Peluang Investasi Proyek Prioritas Strategis yang Siap Ditawarkan di Ibu Kota Negara (IKN) Bidang Manufaktur	20.800,0	KEMENTERIAN INVESTASI/BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
Peta Peluang Investasi Proyek Prioritas Strategis yang Siap Ditawarkan di Ibu Kota Negara (IKN) Bidang Jasa Kawasan	16.400,0	KEMENTERIAN INVESTASI/BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
Koordinasi penyiapan Analisis dan konsep fasilitas pelayanan Kesehatan di IKN	1.000,0	KEMENTERIAN KESEHATAN
Materi Teknis dan Ranperda (PK/Revisi) RTRW Prov/Kab/Kota Hasil Bimbingan Teknis di Pulau Kalimantan	1.190,0	KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BPN
Dokumen Perencanaan Teknis Bidang Sarana dan Prasarana (Dukungan IKN) (Prioritas Nasional) - Pusat	9.774,0	KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
Studi Penyesuaian KA Bandara Sultan Aji Muhammad Sepinggang Balikpapan - KIPP dengan Rencana Pengembangan Kawasan Strategis Nasional IKN	4.804,9	KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
Penyusunan OBC rencana penyelenggaraan KA Bandara Sepinggang - KPIP dan Pengembangan KA perkotaan Balikpapan - IKN Phase 2	2.500,0	KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
<i>Aspek: Penyiapan lahan</i>		
SHAT PTSL ASN Kategori 3 - Provinsi Kalimantan Timur	31.600,5	KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BPN
Area IKN yang dilakukan pemulihan ekosistem	4.559,0	KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
Rehabilitasi Hutan dan Lahan di IKN dan DAS sekitarnya	23.950,0	KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
Luas Kawasan Hutan yang dilepaskan untuk IKN	1.000,0	KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
Kawasan Ibu Kota Negara (IKN) dengan nilai keanekaragaman hayati tinggi	1.358,0	KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
<i>Sub: Pengembangan Kawasan dan SDM</i>		
<i>Aspek: Pengamanan</i>		
Pengamanan Ibu Kota Negara (IKN) (PN)	9.605,7	KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
<i>Aspek: Infrastruktur</i>		
Dukungan Infrastruktur IKN - Dermaga Logistik Ibu Kota Negara (IKN)	152.103,6	KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
Dukungan Infrastruktur IKN - Jembatan Pulau Balang Bentang Pendek	328.620,0	KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

Prioritas Nasional/ <i>Major Project</i>	Alokasi (Rp. Juta)	Instansi Pelaksana
Pengendalian Penyelenggaraan Pembangunan Infrastruktur Bidang Bangunan Gedung dan Penataan Kawasan IKN - Provinsi Kalimantan Timur	20.120,0	KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
Pembangunan Penanggulangan Pencemaran Terminal Marine Pollution - Kota Balikpapan	54.033,6	KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
Pengembangan Bandar Udara APT Pranoto Samarinda (Tambahkan IKN SBPA) - Kota Samarinda	64.674,0	KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
Pusat Konservasi Plasma Nutfah di IKN	1.800,0	KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
Koridor Satwa dan Pengembangan WRU di IKN	10.000,0	KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
Pengendalian Penyelenggaraan Pembangunan Infrastruktur Bidang Bangunan Gedung dan Penataan Kawasan IKN - Pusat	90.950,0	KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
Bendungan Sepaku Semoi yang dibangun	202.790,9	KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT (Terintegrasi dengan PSN)
Hunian Pekerja Konstruksi (IKN)	200.000,0	KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
Rumah Tapak Jabatan Menteri (IKN)	337.110,0	KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
Dukungan Infrastruktur IKN - Jln. Soekarno-Hatta (Balikpapan)	4.880.216,0	KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
Layanan Penyiapan dan Pengendalian Pelaksanaan (IKN) - Provinsi DKI Jakarta	10.820,0	KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
Bangunan pendukung pengendali banjir IKN yang dibangun/ditingkatkan	279.420,8	KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
Bangunan pengendali banjir IKN yang dibangun/ditingkatkan	296.330,0	KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
Dukungan teknis bidang bendungan dan danau yang disusun (IKN)	8.000,0	KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
Prasarana air baku IKN yang dibangun	185.500,0	KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
Persiapan OP Prasarana Air Baku IKN	2.000,0	KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
Intake dan Jaringan Pipa Transmisi Sungai Sepaku Kabupaten Penajam Paser Utara yang dibangun (IKN)	95.805,3	KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
Pembinaan dan Pengawasan Pengembangan SPAM - Provinsi Kalimantan Timur	1.235,0	KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
Dukungan Infrastruktur IKN - Jalan <i>Bypass</i> Pasar Sepaku: Paket Jalan <i>Shortcut</i> Pasar Sepaku (IKN)	3.126.680,0	KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
Dukungan Infrastruktur IKN - Provinsi Kalimantan Timur	127.298,5	KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
Sistem Pengelolaan Sanitasi IKN - Provinsi Kalimantan Timur	816.482,8	KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
Pembangunan SPAM IKN - Provinsi Kalimantan Timur	622.553,0	KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
Pembangunan IKN - Kab. Penajam Paser Utara	1.261.247,0	KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
Pembangunan Bangunan Gedung dan Penataan Kawasan IKN - Kab. Penajam Paser Utara	7.559.681,0	KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

Prioritas Nasional/ <i>Major Project</i>	Alokasi (Rp. Juta)	Instansi Pelaksana
Pengendalian Penyelenggaraan Pembangunan Infrastruktur Bidang Bangunan Gedung dan Penataan Kawasan IKN - Kab. Penajam Paser Utara	15.400,0	KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
Dukungan BUMN	2.517.282,0	
Jaringan Interkoneksi		BUMN
Jaringan Transmisi Tegangan Tinggi		BUMN
Pembangunan Infrastruktur ICT di Kawasan Ibu Kota Negara		BUMN
Pembangunan Jaringan Telekomunikasi di Ibu Kota Negara		BUMN
Pendirian BRI KCP Sepaku		BUMN
Program BRI Peduli		BUMN
Pembangunan Kantor Wilayah		BUMN
Tol Balikpapan - Samarinda		BUMN
Dukungan Pertamina Group dalam Penyediaan Infrastruktur Gas Bumi di IKN		BUMN
13) MP: Pembangunan Kota Baru: Maja, Tanjung Selor, Sofifi, dan Sorong		
Dukungan Belanja K/L dan KPBU	1.125.869,9	
<i>Aspek: Sosial</i>		
Sarana Ruang Kreatif yang Difasilitasi - Pusat	17.500,0	KEMENTERIAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF/BADAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF
SDM Pengelola Destinasi Pariwisata di Wilayah Destinasi I yang ditingkatkan kapasitasnya - Pusat	3.900,0	KEMENTERIAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF/BADAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF
KSCS - Pipa Cabang WTP Rangkas Bitung yang dibangun - Provinsi Banten	69.326,3	KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
SPAM Karian - Serpong (Sisi Hulu) (<i>Unsolicited</i>) (Konstruksi - Investasi BUP KPBU)	810.000,0	KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT(KPBU) (Terintegrasi dengan PSN)
<i>Aspek: Ekonomi</i>		
<i>Be Creative District</i> (BCD) yang Dikembangkan - Pusat	750,0	KEMENTERIAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF/BADAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF
Pembangunan Jalan Strategis (ProPN) - Jalan Lingkar Sorong	40.000,0	KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
Replacement Fasilitas Pelabuhan Laut Sofifi - Kota Tidore Kepulauan	65.000,0	KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
Angkutan Udara Perintis - Kota Sorong	8.279,6	KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
Pengembangan Bandar Udara DEO - Sorong, Papua Barat - PN - Kota Sorong	60.000,0	KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
Layanan Angkutan Laut Perintis Prioritas Nasional (PEN) - Kota Sorong	51.114,0	KEMENTERIAN PERHUBUNGAN



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

Prioritas Nasional/ Major Project	Alokasi (Rp. Juta)	Instansi Pelaksana
14) MP: Wilayah Adat Papua: Wilayah Adat Laa Pago dan Wilayah Adat Domberay		
Dukungan Belanja K/L dan DAK	3.739.816,3	
<i>Sub: Pendidikan</i>		
<i>Aspek: Tenaga Pendidik</i>		
Lembaga Pendidikan Agama dan Keagamaan Kristen Yang Ditingkatkan Mutunya - Kab. Sorong	138,8	KEMENTERIAN AGAMA
Guru dan tenaga kependidikan yang mendapat pendampingan pembelajaran - Provinsi Papua Barat	6.958,2	KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
Guru dan tenaga kependidikan yang mendapat pendampingan pembelajaran - Provinsi Papua	12.474,0	KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
<i>Aspek: Pendidikan dan Pelatihan Vokasi</i>		
Tenaga Kerja Bidang Kesehatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya - Kab. Sorong	374,7	KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI
Peserta Pendidikan Vokasi Kelautan dan Perikanan Yang Kompeten - Kota Sorong	7.967,3	KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
Pelatihan Peningkatan Produktivitas - Kota Sorong	338,6	KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN
PBK di BLK Komunitas - Kota Sorong	2.592,0	KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN
PBK UPTP - Kota Sorong	14.462,0	KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN
Sertifikasi Kompetensi Tenaga Kerja - Kota Sorong	2.156,8	KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN
Pendidikan Tinggi Vokasi Pertanian Sarjana Terapan (D-IV) - Kab. Manokwari	12.189,0	KEMENTERIAN PERTANIAN
<i>Aspek: Beasiswa Peserta Didik</i>		
Siswa Penerima Afiriasi Pendidikan Menengah (ADEM) - Pusat	107.501,9	KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
Mahasiswa Yang mendapatkan Beasiswa Afiriasi Pendidikan Tinggi (ADIK) - Pusat	153.000,0	KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
<i>Sub: Kesehatan</i>		
<i>Aspek: Tenaga Medis</i>		
Penugasan Khusus Tenaga Kesehatan di Papua dan Papua Barat (SDM) - Provinsi Papua	4.793,8	KEMENTERIAN KESEHATAN
Pendayagunaan Dokter Spesialis di Wilayah Papua dan Papua Barat (SDM) - Provinsi Papua	650,0	KEMENTERIAN KESEHATAN
<i>Aspek: Beasiswa</i>		
Bantuan pendidikan Program Pendidikan Dokter Spesialis (PPDS)/Program Pendidikan Dokter Gigi Spesialis (PDGS) Papua dan Papua Barat (SDM) - Pusat	7.049,5	KEMENTERIAN KESEHATAN
<i>Sub: Pengembangan Kawasan</i>		
<i>Aspek: Produksi Komoditas</i>		
Sarana Pasca Panen yang Disediakan di Daerah Khusus dalam rangka Mendukung Green Economy Growth - Kab. Sorong	389,1	KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI
Kawasan Sagu - Kab. Sorong Selatan	833,8	KEMENTERIAN PERTANIAN
Kawasan Sagu - Kab. Sorong	833,8	KEMENTERIAN PERTANIAN
Kawasan Kelapa - Kab. Tambrau	642,5	KEMENTERIAN PERTANIAN (Terintegrasi dengan PSN)
Kawasan Kakao - Kab. Manokwari Selatan	615,0	KEMENTERIAN PERTANIAN
Kawasan Kopi - Kab. Lanny Jaya	2.499,1	KEMENTERIAN PERTANIAN



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

Prioritas Nasional/ Major Project	Alokasi (Rp. Juta)	Instansi Pelaksana
<i>Aspek: Pariwisata</i>		
Sarana Prasarana Desa Wisata yang Dibangun untuk Mendukung Destinasi Pariwisata - Kab. Pegunungan Arfak	400,0	KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI
Sarana Prasarana Desa Wisata yang Dibangun untuk Mendukung Destinasi Pariwisata - Kab. Sorong Selatan	400,0	KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI
<i>Aspek: Kampung Terpadu</i>		
Kelompok Masyarakat yang ditingkatkan kapasitasnya melalui Transformasi Ekonomi Kampung Terpadu (TEKAD) - Provinsi Papua Barat	13.297,1	KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI
Sarana Pengelolaan Kawasan Pesisir yang Diberikan Kepada Masyarakat di Daerah Tertinggal - Kab. Manokwari Selatan	1.050,0	KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI
Kelompok Masyarakat yang ditingkatkan kapasitasnya melalui Transformasi Ekonomi Kampung Terpadu (TEKAD) - Provinsi Papua	19.466,8	KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI
<i>Aspek: Infrastruktur Kawasan</i>		
Jalan Non-Status yang Dibangun di Kawasan Transmigrasi - Kab. Teluk Wondama	154,5	KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI
Sarana Perumahan yang dibangun di Kawasan Transmigrasi - Kab. Teluk Wondama	1.781,9	KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI
Sarana dan Prasarana Rumah Produksi Hasil Prukades yang disediakan di Daerah Tertinggal - Kab. Teluk Bintuni	1.000,0	KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI
Air Baku KEK Sorong yang dibangun - Provinsi Papua Barat	99.045,3	KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
<i>Aspek: Industri</i>		
Fasilitasi Investor Dalam Rangka Penumbuhan dan Pengembangan Industri Petrokimia di Teluk Bintuni - Pusat	800,0	KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN
Wirausaha Industri yang Mendapatkan Pelatihan Kewirausahaan Dan Teknis Produksi Melalui Dana Dekonsentrasi - Provinsi Papua	1.415,5	KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN
Wirausaha Industri yang Mendapatkan Pelatihan Kewirausahaan Dan Teknis Produksi Melalui Dana Dekonsentrasi - Provinsi Papua Barat	1.482,3	KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN
IKM yang Mendapatkan Pendampingan, Penerapan Sertifikasi, dan Pengembangan Produk Melalui Dana Dekonsentrasi - Provinsi Papua Barat	183,6	KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN
IKM yang Mendapatkan Pendampingan, Penerapan Sertifikasi, dan Pengembangan Produk Melalui Dana Dekonsentrasi - Provinsi Papua	304,5	KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN
<i>Sub: Infrastruktur Dasar</i>		
<i>Aspek: Infrastruktur Permukiman</i>		
Penyediaan Air Baku di Kabupaten Lanny Jaya yang dibangun - Kab. Lanny Jaya	35.000,0	KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
<i>Sub: Infrastruktur Pendukung</i>		
<i>Aspek: Pendidikan dan Pelatihan Vokasi</i>		
PBK Kerjasama Dengan Dunia Industri - Kota Sorong	480,0	KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

Prioritas Nasional/ <i>Major Project</i>	Alokasi (Rp. Juta)	Instansi Pelaksana
<i>Aspek: Infrastruktur Pelabuhan</i>		
Pembangunan Pelabuhan Penyeberangan Batanta Kab. Raja Ampat Tahap II - SBSN - Provinsi Papua Barat	2.500,0	KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
Pembangunan Pelabuhan Penyeberangan Salawati Kab. Raja Ampat Tahap II - SBSN - Provinsi Papua Barat	5.493,3	KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
<i>Aspek: Infrastruktur Jalan</i>		
Transportasi Perdesaan - Tematik Peningkatan Konektivitas dan Elektrifikasi di Daerah Afirmasi (9103 - Kab. Teluk Wondama)	12.999,2	DAK
Transportasi Perdesaan - Tematik Peningkatan Konektivitas dan Elektrifikasi di Daerah Afirmasi (9106 - Kab. Sorong Selatan)	6.630,8	DAK
Transportasi Perdesaan - Tematik Peningkatan Konektivitas dan Elektrifikasi di Daerah Afirmasi (9107 - Kab. Sorong)	9.307,4	DAK
Transportasi Perdesaan - Tematik Peningkatan Konektivitas dan Elektrifikasi di Daerah Afirmasi (9109 - Kab. Tambrauw)	11.400,0	DAK
Transportasi Perdesaan - Tematik Peningkatan Konektivitas dan Elektrifikasi di Daerah Afirmasi (9110 - Kab. Maybrat)	10.316,8	DAK
Transportasi Perdesaan - Tematik Peningkatan Konektivitas dan Elektrifikasi di Daerah Afirmasi (9111 - Kab. Manokwari Selatan)	12.502,9	DAK
Transportasi Perdesaan - Tematik Peningkatan Konektivitas dan Elektrifikasi di Daerah Afirmasi (9112 - Kab. Pegunungan Arfak)	10.946,7	DAK
Transportasi Perdesaan - Tematik Peningkatan Konektivitas dan Elektrifikasi di Daerah Afirmasi (9411 - Kab. Puncak Jaya)	10.983,1	DAK
Transportasi Perdesaan - Tematik Peningkatan Konektivitas dan Elektrifikasi di Daerah Afirmasi (9433 - Kab. Puncak)	10.261,7	DAK
Transportasi Perdesaan - Tematik Peningkatan Konektivitas dan Elektrifikasi di Daerah Afirmasi (9105 - Kab. Manokwari)	7.100,0	DAK
Transportasi Perdesaan - Tematik Peningkatan Konektivitas dan Elektrifikasi di Daerah Afirmasi (9108 - Kab. Raja Ampat)	9.992,7	DAK
Jalan Trans Papua Merauke-Sorong (MP) - ELELIM - PASVALEY - BTS. KOTA WAMENA	17.797,7	KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
Pembangunan Jembatan Trans Papua Merauke-Sorong (MP) - Jembatan Ruas Elelim - Mamberamo	13.000,0	KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
Pembangunan Jembatan Trans Papua Merauke-Sorong (MP) - Mameh - WINDESI (WERABUR)	60.000,0	KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
Jalan Trans Papua Merauke-Sorong (MP) - KUMURKEH - AYAMASI - SNOPI	2.232,0	KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
Pembangunan Jalan Trans Papua Merauke-Sorong (MP) - Jalan Ambuni - Karuan	67.500,0	KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
Pembangunan Jalan Trans Papua Merauke-Sorong (MP) - Jalan Mameh - Karuan	25.750,0	KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
Pembangunan Jalan Trans Papua Merauke-Sorong (MP) - Jalan Sp. Goro - Kp. Muri (BTS. Provinsi Papua)	57.984,0	KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

Prioritas Nasional/ <i>Major Project</i>	Alokasi (Rp. Juta)	Instansi Pelaksana
Pembangunan Jalan Trans Papua Merauke-Sorong (MP) - Jembatan Gunung Pasir	27.000,0	KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
Jalan Trans Papua Merauke-Sorong (MP) - Kab. Puncak Jaya	28.150,0	KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
<i>Aspek: Infrastruktur Bandar Udara</i>		
Pengembangan Bandar Udara Ilaga - PN - Kab. Puncak	10.000,0	KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
Pengembangan Bandar Udara Wamena Tahap III - PN - Kab. Jayawijaya	10.000,0	KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
Pengembangan Bandar Udara Babo - PN - Kab. Teluk Bintuni	7.163,6	KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
Pengembangan Bandar Udara Rendani - PN - Kab. Manokwari	208.170,8	KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
Pengembangan Bandar Udara Anggi - PN - Kab. Pegunungan Arfak	5.000,0	KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
Pengembangan Bandar Udara DEO - Sorong, Papua Barat - PN - Kota Sorong	60.000,0	KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
Pengembangan Bandar udara Sobaham - PN - Kab. Yahukimo	5.000,0	KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
Pengembangan Bandar Udara Oksibil - PN - Kab. Pegunungan Bintang	5.000,0	KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
<i>Aspek: Energi dan TIK</i>		
Pemasangan Sambungan Baru Listrik bagi Rumah Tangga Belum Berlistrik yang Tidak Mampu atau Berada di Daerah 3T - Provinsi Papua Barat	2.751,5	KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
APDAL - Kab. Maybrat	2.401,1	KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
Pemasangan Sambungan Baru Listrik bagi Rumah Tangga Belum Berlistrik yang Tidak Mampu atau Berada di Daerah 3T - Provinsi Papua	8.254,6	KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
APDAL - Kab. Puncak Jaya	2.277,2	KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
APDAL - Kab. Pegunungan Bintang	5.259,3	KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
APDAL - Kab. Puncak	40.610,3	KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
BTS 4G / <i>Lastmile</i> Papua dan Papua Barat - Pusat	568.573,2	KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
OM BTS 4G / <i>Lastmile</i> Papua dan Papua Barat - Pusat	1.702.600,0	KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
Pengadaan Sarana Pendukung Teknologi dan Media Baru Siaran Radio Prioritas Nasional (PN) - Kab. Nduga	600,0	LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK RADIO REPUBLIK INDONESIA
<i>Aspek: Angkutan Udara Perintis</i>		
Angkutan Udara Perintis - Kab. Manokwari	18.312,6	KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
Angkutan Udara Perintis - Kota Sorong	8.279,6	KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
Angkutan Udara Perintis - Kab. Jayawijaya	17.136,3	KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
Angkutan BBM Angkutan Udara Perintis - Kab. Jayawijaya	5.203,0	KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
Angkutan Kargo Perintis (MP) - Kab. Yahukimo	7.456,6	KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
Angkutan Udara Perintis - Kab. Yahukimo	23.257,2	KEMENTERIAN PERHUBUNGAN



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

Prioritas Nasional/ <i>Major Project</i>	Alokasi (Rp. Juta)	Instansi Pelaksana
Angkutan BBM Angkutan Udara Perintis - Kab. Yahukimo	2.916,1	KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
Angkutan Kargo Perintis (MP) - Kab. Pegunungan Bintang	27.220,6	KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
Angkutan BBM untuk Kargo Perintis (MP) - Kab. Pegunungan Bintang	3.843,9	KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
Angkutan Udara Perintis - Kab. Yalimo	32.337,2	KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
15) MP: Pemulihan Pascabencana: Kota Palu dan Sekitarnya, Pulau Lombok dan Sekitarnya, serta Kawasan Pesisir Selat Sunda		
Dukungan Belanja K/L	334.886,7	
<i>Aspek: Non Fisik</i>		
Layanan Fasilitas Pemulihan dan Peningkatan Sosial Ekonomi dan Sumber Daya Alam Pascabencana - Kab. Pandeglang	430,8	BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA (BNPB)
Masyarakat yang ditingkatkan kapasitasnya dalam pemulihan ekonomi pasca bencana - Pusat	2.000,0	KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI
Bantuan Permodalan bagi Usaha Mikro yang Terdampak Bencana - Provinsi Banten	306,7	KEMENTERIAN KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH
Bantuan Permodalan bagi Usaha Mikro yang Terdampak Bencana - Provinsi Nusa Tenggara Barat	306,7	KEMENTERIAN KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH
Bantuan Permodalan bagi Usaha Mikro yang Terdampak Bencana - Provinsi Sulawesi Tengah	306,7	KEMENTERIAN KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH
Korban bencana alam yang mendapatkan bantuan pemulihan sosial dan layanan dukungan psikososial - Pusat	21.526,7	KEMENTERIAN SOSIAL
<i>Aspek: Fisik</i>		
Pembangunan dan Rehabilitasi Bangunan Gedung Pasca Bencana - Kota Palu	60.570,9	KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
Rehabilitasi dan Renovasi Sekolah Dasar dan Menengah - Provinsi Sulawesi Tengah	63.539,6	KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
<i>Emergency Assistance Loan For Rehabilitation and Reconstruction</i> Pelabuhan Pantoloan, Pelabuhan Donggala dan Pelabuhan Wani - Provinsi Sulawesi Tengah	100.000,0	KEMENTERIAN PERHUBUNGAN (Terintegrasi dengan PSN)
Rekonstruksi dan Rehabilitasi Bandara Bandar Udara Mutiara SIS Al-Jufrie Palu - Kota Palu	85.000,0	KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
Dukungan BUMN		
Pembangunan Jalan Tol Gedebage - Tasikmalaya - Cilacap	205.000,0	BUMN
16) MP: PKSN Kawasan Perbatasan Negara		
Dukungan Belanja K/L dan DAK	112.569,8	
<i>Aspek: Simpul Utama Transportasi</i>		
Transportasi Perdesaan - Tematik Peningkatan Konektivitas dan Elektrifikasi di Daerah Afirmasi (6504 - Kab. Nunukan)	8.165,3	DAK
Jalan Desa Strategis yang Ditingkatkan di Kawasan Perbatasan - Kab. Sambas	4.154,5	KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI
Jalan untuk mendukung Prukades dan kegiatan ekonomi yang dibangun - Kab. Sambas	1.000,0	KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI
Pelabuhan perikanan di lokasi SKPT yang dikelola dan operasional sesuai standar - Kab. Nunukan	1.000,0	KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

Prioritas Nasional/ Major Project	Alokasi (Rp. Juta)	Instansi Pelaksana
Pelabuhan perikanan di lokasi SKPT yang dikelola dan operasional sesuai standar - Kab. Merauke	1.000,0	KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
Pembangunan Terminal Barang Internasional Aruk Kalbar Tahap V (Termasuk Supervisi)	25.000,0	KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
Pengembangan Bandar Udara Nunukan - PN - Kab. Nunukan	8.722,1	KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
Pengembangan Pelabuhan Sungai Nyamuk - Kab. Nunukan	57.148,5	KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
<i>Aspek: Pusat Pertumbuhan Ekonomi</i>		
Fasilitasi Pelaksanaan dan Koordinasi MP PKS N Perbatasan Negara	1.000,0	BADAN NASIONAL PENGELOLA PERBATASAN (BNPP)
Embung yang Dibangun di Kawasan Perbatasan - Kab. Belu	3.344,4	KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI
Kawasan Kelapa - Kab. Sambas	330,0	KEMENTERIAN PERTANIAN
17) MP: Manajemen Aset Lahan dalam Pemberdayaan Masyarakat (Reforma Agraria)		
Dukungan Belanja K/L	116.455,6	
<i>Aspek: Redistribusi tanah</i>		
SHAT Redistribusi Tanah - Provinsi Sumatera Utara	210,0	KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BPN
SHAT Redistribusi Tanah - Provinsi Jawa Barat	163,1	KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BPN
SHAT Redistribusi Tanah - Provinsi Sulawesi Tengah	140,0	KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BPN
<i>Aspek: Penyusunan Peta Bidang Tanah</i>		
PBT Redistribusi Tanah Kategori 3 - Provinsi Sumatera Utara	2.277,0	KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BPN
PBT Redistribusi Tanah Kategori 5 - Provinsi Jawa Barat	996,1	KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BPN
PBT Redistribusi Tanah Kategori 5 - Provinsi Jawa Timur	513,0	KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BPN
PBT Redistribusi Tanah Kategori 2 - Provinsi Sulawesi Tengah	1.827,0	KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BPN
<i>Aspek: Penyelesaian sengketa dan konflik tanah</i>		
Surat Keputusan Penyelesaian Konflik Pertanahan - Provinsi Sumatera Utara	164,5	KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BPN
<i>Aspek: Pendidikan, Pelatihan dan Pendampingan Usaha</i>		
Masyarakat Kelautan dan Perikanan yang dilatih	27.989,2	KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
Usaha Mikro yang difasilitasi Pendampingan untuk Peningkatan Usaha (KUR, SHAT) - Provinsi Sumatera Utara	250,9	KEMENTERIAN KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH
Usaha Mikro yang difasilitasi Pendampingan untuk Peningkatan Usaha (KUR, SHAT) - Provinsi Jambi	138,7	KEMENTERIAN KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH
Usaha Mikro yang difasilitasi Pendampingan untuk Peningkatan Usaha (KUR, SHAT) - Provinsi Jawa Barat	389,6	KEMENTERIAN KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH
Usaha Mikro yang difasilitasi Pendampingan untuk Peningkatan Usaha (KUR, SHAT) - Provinsi Jawa Tengah	389,6	KEMENTERIAN KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH
Usaha Mikro yang difasilitasi Pendampingan untuk Peningkatan Usaha (KUR, SHAT) - Provinsi Jawa Timur	250,9	KEMENTERIAN KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

Prioritas Nasional/ Major Project	Alokasi (Rp. Juta)	Instansi Pelaksana
Usaha Mikro yang difasilitasi Pendampingan untuk Peningkatan Usaha (KUR, SHAT) - Provinsi Bali	250,9	KEMENTERIAN KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH
Usaha Mikro yang difasilitasi Pendampingan untuk Peningkatan Usaha (KUR, SHAT) - Provinsi Sulawesi Utara	250,9	KEMENTERIAN KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH
Usaha Mikro yang difasilitasi Pendampingan untuk Peningkatan Usaha (KUR, SHAT) - Provinsi Sulawesi Tenggara	250,9	KEMENTERIAN KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH
<i>Aspek: Pemasaran dan interkoneksi dengan dunia usaha</i>		
Fasilitasi Pengembangan BUMDesa - Provinsi Sumatera Utara	3.300,0	KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI
Fasilitasi Pengembangan BUMDesa - Provinsi Jambi	2.250,0	KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI
Fasilitasi Pengembangan BUMDesa - Provinsi Bengkulu	1.125,0	KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI
Fasilitasi Pengembangan BUMDesa - Provinsi Jawa Barat	8.025,0	KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI
Fasilitasi Pengembangan BUMDesa - Provinsi Jawa Tengah	7.350,0	KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI
Fasilitasi Pengembangan BUMDesa - Provinsi Jawa Timur	7.350,0	KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI
Fasilitasi Pengembangan BUMDesa - Provinsi Banten	1.125,0	KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI
Fasilitasi Pengembangan BUMDesa - Provinsi Sulawesi Utara	1.125,0	KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI
Fasilitasi Pengembangan BUMDesa - Provinsi Sulawesi Tengah	1.500,0	KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI
Fasilitasi Pengembangan BUMDesa - Provinsi Sulawesi Tenggara	1.500,0	KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI
Pembentukan/Pengembangan Koperasi Berbasis Komoditas di Kalangan Kelompok Strategis - Provinsi Sulawesi Tengah	590,9	KEMENTERIAN KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH
<i>Aspek: Pemanfaatan dan Penggunaan Aset</i>		
Akses Reforma Agraria Kategori III - Provinsi Sumatera Utara	1.831,5	KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BPN
Penataan Kelembagaan Penerima Akses Reforma Agraria (Akses RA Tahun ke 2) - Provinsi Bengkulu	291,6	KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BPN
Akses Reforma Agraria Kategori V - Provinsi Jawa Barat	4.029,3	KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BPN
Akses Reforma Agraria Kategori V - Provinsi Jawa Timur	2.032,8	KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BPN
Akses Reforma Agraria Kategori II - Provinsi Sulawesi Tengah	2.351,1	KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BPN
<i>Aspek: Koordinasi kelembagaan melalui GTRA</i>		
Data GTRA Provinsi - Provinsi Jawa Tengah	1.108,6	KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BPN
Data GTRA Provinsi - Provinsi Sulawesi Tenggara	1.085,1	KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BPN
Data GTRA Provinsi - Provinsi Jawa Barat	1.187,9	KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BPN
Data GTRA Provinsi - Provinsi Jawa Timur	1.315,7	KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BPN



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

Prioritas Nasional/ Major Project	Alokasi (Rp. Juta)	Instansi Pelaksana
Data GTRA Provinsi - Provinsi Sumatera Utara	1.111,7	KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BPN
Data GTRA Provinsi - Provinsi Jambi	968,6	KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BPN
Data GTRA Provinsi - Provinsi Sulawesi Utara	1.112,8	KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BPN
Data GTRA Provinsi - Provinsi Sulawesi Tengah	1.033,6	KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BPN
Data GTRA Provinsi - Provinsi Bali	1.044,9	KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BPN
Data GTRA Provinsi - Provinsi Bengkulu	1.053,6	KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BPN
Data GTRA Provinsi - Provinsi Banten	977,5	KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BPN
<i>Aspek: Dukungan modal/ keuangan mikro, infrastruktur, dan teknologi tepat guna</i>		
Sarana perbenihan ikan yang disalurkan ke masyarakat - Provinsi Jawa Timur	2.495,0	KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
Optimalisasi Reproduksi - Provinsi Jambi	2.707,8	KEMENTERIAN PERTANIAN
Kawasan Kopi - Kab. Semarang	8.830,0	KEMENTERIAN PERTANIAN
Prasarana Pascapanen Tanaman Perkebunan - Kab. Minahasa Selatan	184,4	KEMENTERIAN PERTANIAN
PN 3: MENINGKATKAN SUMBER DAYA MANUSIA BERKUALITAS DAN BERDAYA SAING		
18) MP: Percepatan Penurunan Kematian Ibu dan Stunting		
Dukungan Belanja K/L dan DAK	81.404.313,4	
<i>Aspek: Penguatan Kapasitas Pelayanan Kesehatan Maternal</i>		
Faskes yang mendapatkan Intensifikasi pelayanan KB dalam percepatan penurunan Stunting dan mendukung penurunan AKI	9.753,8	BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL (BKKBN)
Provinsi yang mendapatkan bimbingan teknis dalam Peningkatan pelayanan KB pasca persalinan	1.160,0	BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL (BKKBN)
PIK Remaja dan BKR yang mendapat fasilitasi dan pembinaan Edukasi Kespro dan Gizi bagi Remaja Putri sebagai Calon Ibu (Pro PN Provinsi DKI Jakarta)	1.000,0	BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL (BKKBN)
PIK Remaja dan BKR yang mendapat fasilitasi dan pembinaan Edukasi Kespro dan Gizi bagi Remaja Putri sebagai Calon Ibu	43.500,0	BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL (BKKBN)
Faskes yang mendapat pemenuhan ketersediaan alokon (DKI Jakarta)	14.439,1	BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL (BKKBN)
Faskes yang terpenuhi ketersediaan Alat/Obat Kontrasepsi (Alokon)	507.079,5	BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL (BKKBN)
Pemerintah daerah yang mendapatkan fasilitasi dan pembinaan pendampingan ibu hamil dan ibu pascapersalinan	9.855,2	BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL (BKKBN)
Penguatan Penurunan Angka Kematian Ibu, Bayi, dan Intervensi Stunting (3529 - Kab. Sumenep)	17.091,8	DAK
Penguatan Penurunan Angka Kematian Ibu, Bayi, dan Intervensi Stunting (3571 - Kota Kediri)	10.397,8	DAK
Penguatan Penurunan Angka Kematian Ibu, Bayi, dan Intervensi Stunting (3573 - Kota Malang)	6.388,0	DAK



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

Prioritas Nasional/ <i>Major Project</i>	Alokasi (Rp. Juta)	Instansi Pelaksana
Penguatan Penurunan Angka Kematian Ibu, Bayi, dan Intervensi <i>Stunting</i> (3574 - Kota Probolinggo)	8.128,5	DAK
Penguatan Penurunan Angka Kematian Ibu, Bayi, dan Intervensi <i>Stunting</i> (3575 - Kota Pasuruan)	12.445,4	DAK
Penguatan Penurunan Angka Kematian Ibu, Bayi, dan Intervensi <i>Stunting</i> (3576 - Kota Mojokerto)	985,2	DAK
Penguatan Penurunan Angka Kematian Ibu, Bayi, dan Intervensi <i>Stunting</i> (3577 - Kota Madiun)	1.723,5	DAK
Penguatan Penurunan Angka Kematian Ibu, Bayi, dan Intervensi <i>Stunting</i> (3603 - Kab. Tangerang)	24.102,3	DAK
Penguatan Penurunan Angka Kematian Ibu, Bayi, dan Intervensi <i>Stunting</i> (3604 - Kab. Serang)	15.447,1	DAK
Penguatan Penurunan Angka Kematian Ibu, Bayi, dan Intervensi <i>Stunting</i> (5103 - Kab. Badung)	842,7	DAK
Penguatan Penurunan Angka Kematian Ibu, Bayi, dan Intervensi <i>Stunting</i> (5171 - Kota Denpasar)	7.747,3	DAK
Penguatan Penurunan Angka Kematian Ibu, Bayi, dan Intervensi <i>Stunting</i> (5205 - Kab. Dompus)	9.109,2	DAK
Penguatan Penurunan Angka Kematian Ibu, Bayi, dan Intervensi <i>Stunting</i> (5206 - Kab. Bima)	13.199,2	DAK
Penguatan Penurunan Angka Kematian Ibu, Bayi, dan Intervensi <i>Stunting</i> (5271 - Kota Mataram)	9.561,7	DAK
Penguatan Penurunan Angka Kematian Ibu, Bayi, dan Intervensi <i>Stunting</i> (5301 - Kab. Sumba Barat)	14.881,1	DAK
Penguatan Penurunan Angka Kematian Ibu, Bayi, dan Intervensi <i>Stunting</i> (5306 - Kab. Belu)	5.168,1	DAK
Penguatan Penurunan Angka Kematian Ibu, Bayi, dan Intervensi <i>Stunting</i> (5307 - Kab. Alor)	7.983,4	DAK
Penguatan Penurunan Angka Kematian Ibu, Bayi, dan Intervensi <i>Stunting</i> (5309 - Kab. Flores Timur)	10.207,7	DAK
Penguatan Penurunan Angka Kematian Ibu, Bayi, dan Intervensi <i>Stunting</i> (5310 - Kab. Sikka)	11.973,0	DAK
Penguatan Penurunan Angka Kematian Ibu, Bayi, dan Intervensi <i>Stunting</i> (5311 - Kab. Ende)	15.295,5	DAK
Penguatan Penurunan Angka Kematian Ibu, Bayi, dan Intervensi <i>Stunting</i> (5312 - Kab. Ngada)	6.056,7	DAK
Penguatan Penurunan Angka Kematian Ibu, Bayi, dan Intervensi <i>Stunting</i> (5313 - Kab. Manggarai)	14.764,9	DAK
Penguatan Penurunan Angka Kematian Ibu, Bayi, dan Intervensi <i>Stunting</i> (5314 - Kab. Rote Ndao)	9.155,6	DAK
Penguatan Penurunan Angka Kematian Ibu, Bayi, dan Intervensi <i>Stunting</i> (5316 - Kab. Sumba Tengah)	2.693,0	DAK
Penguatan Penurunan Angka Kematian Ibu, Bayi, dan Intervensi <i>Stunting</i> (5317 - Kab. Sumba Barat Daya)	11.042,7	DAK
Penguatan Penurunan Angka Kematian Ibu, Bayi, dan Intervensi <i>Stunting</i> (5319 - Kab. Manggarai Timur)	10.779,3	DAK
Penguatan Penurunan Angka Kematian Ibu, Bayi, dan Intervensi <i>Stunting</i> (5320 - Kab. Sabu Raijua)	2.031,8	DAK
Penguatan Penurunan Angka Kematian Ibu, Bayi, dan Intervensi <i>Stunting</i> (5321 - Kab. Malaka)	6.822,2	DAK
Penguatan Penurunan Angka Kematian Ibu, Bayi, dan Intervensi <i>Stunting</i> (5371 - Kota Kupang)	3.991,8	DAK



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

Prioritas Nasional/ Major Project	Alokasi (Rp. Juta)	Instansi Pelaksana
Penguatan Penurunan Angka Kematian Ibu, Bayi, dan Intervensi <i>Stunting</i> (6103 - Kab. Landak)	10.760,6	DAK
Penguatan Penurunan Angka Kematian Ibu, Bayi, dan Intervensi <i>Stunting</i> (6104 - Kab. Mempawah)	4.501,8	DAK
Penguatan Penurunan Angka Kematian Ibu, Bayi, dan Intervensi <i>Stunting</i> (6111 - Kab. Kayong Utara)	5.469,5	DAK
Penguatan Penurunan Angka Kematian Ibu, Bayi, dan Intervensi <i>Stunting</i> (6112 - Kab. Kubu Raya)	8.248,0	DAK
Penguatan Penurunan Angka Kematian Ibu, Bayi, dan Intervensi <i>Stunting</i> (6171 - Kota Pontianak)	11.919,2	DAK
Penguatan Penurunan Angka Kematian Ibu, Bayi, dan Intervensi <i>Stunting</i> (6172 - Kota Singkawang)	2.262,2	DAK
Penguatan Penurunan Angka Kematian Ibu, Bayi, dan Intervensi <i>Stunting</i> (6203 - Kab. Kapuas)	9.360,2	DAK
Penguatan Penurunan Angka Kematian Ibu, Bayi, dan Intervensi <i>Stunting</i> (6204 - Kab. Barito Selatan)	2.391,5	DAK
Penguatan Penurunan Angka Kematian Ibu, Bayi, dan Intervensi <i>Stunting</i> (6205 - Kab. Barito Utara)	1.369,7	DAK
Penguatan Penurunan Angka Kematian Ibu, Bayi, dan Intervensi <i>Stunting</i> (6208 - Kab. Seruyan)	2.256,5	DAK
Penguatan Penurunan Angka Kematian Ibu, Bayi, dan Intervensi <i>Stunting</i> (6209 - Kab. Katingan)	2.918,8	DAK
Penguatan Penurunan Angka Kematian Ibu, Bayi, dan Intervensi <i>Stunting</i> (6210 - Kab. Pulang Pisau)	2.030,1	DAK
Penguatan Penurunan Angka Kematian Ibu, Bayi, dan Intervensi <i>Stunting</i> (6211 - Kab. Gunung Mas)	3.502,6	DAK
Penguatan Penurunan Angka Kematian Ibu, Bayi, dan Intervensi <i>Stunting</i> (6212 - Kab. Barito Timur)	3.155,8	DAK
Penguatan Penurunan Angka Kematian Ibu, Bayi, dan Intervensi <i>Stunting</i> (6271 - Kota Palangkaraya)	1.375,8	DAK
Penguatan Penurunan Angka Kematian Ibu, Bayi, dan Intervensi <i>Stunting</i> (6303 - Kab. Banjar)	4.469,6	DAK
Penguatan Penurunan Angka Kematian Ibu, Bayi, dan Intervensi <i>Stunting</i> (6304 - Kab. Barito Kuala)	4.136,7	DAK
Penguatan Penurunan Angka Kematian Ibu, Bayi, dan Intervensi <i>Stunting</i> (6306 - Kab. Hulu Sungai Selatan)	6.519,8	DAK
Penguatan Penurunan Angka Kematian Ibu, Bayi, dan Intervensi <i>Stunting</i> (6309 - Kab. Tabalong)	6.904,0	DAK
Penguatan Penurunan Angka Kematian Ibu, Bayi, dan Intervensi <i>Stunting</i> (6310 - Kab. Tanah Bumbu)	6.753,9	DAK
Penguatan Penurunan Angka Kematian Ibu, Bayi, dan Intervensi <i>Stunting</i> (6371 - Kota Banjarmasin)	9.991,0	DAK
Penguatan Penurunan Angka Kematian Ibu, Bayi, dan Intervensi <i>Stunting</i> (6372 - Kota Banjarbaru)	7.020,0	DAK
Penguatan Penurunan Angka Kematian Ibu, Bayi, dan Intervensi <i>Stunting</i> (6404 - Kab. Kutai Timur)	6.884,5	DAK
Penguatan Penurunan Angka Kematian Ibu, Bayi, dan Intervensi <i>Stunting</i> (6409 - Kab. Penajam Paser Utara)	604,8	DAK



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

Prioritas Nasional/ <i>Major Project</i>	Alokasi (Rp. Juta)	Instansi Pelaksana
Penguatan Penurunan Angka Kematian Ibu, Bayi, dan Intervensi <i>Stunting</i> (6411 - Kab. Mahakam Ulu)	5.794,4 DAK	
Penguatan Penurunan Angka Kematian Ibu, Bayi, dan Intervensi <i>Stunting</i> (6472 - Kota Samarinda)	10.606,0 DAK	
Penguatan Penurunan Angka Kematian Ibu, Bayi, dan Intervensi <i>Stunting</i> (6474 - Kota Bontang)	883,7 DAK	
Penguatan Penurunan Angka Kematian Ibu, Bayi, dan Intervensi <i>Stunting</i> (6503 - Kab. Tana Tidung)	5.980,6 DAK	
Penguatan Penurunan Angka Kematian Ibu, Bayi, dan Intervensi <i>Stunting</i> (7101 - Kab. Bolaang Mongondow)	7.117,4 DAK	
Penguatan Penurunan Angka Kematian Ibu, Bayi, dan Intervensi <i>Stunting</i> (7102 - Kab. Minahasa)	12.787,0 DAK	
Penguatan Penurunan Angka Kematian Ibu, Bayi, dan Intervensi <i>Stunting</i> (7103 - Kab. Kepulauan Sangihe)	11.268,2 DAK	
Penguatan Penurunan Angka Kematian Ibu, Bayi, dan Intervensi <i>Stunting</i> (7106 - Kab. Minahasa Utara)	7.992,6 DAK	
Penguatan Penurunan Angka Kematian Ibu, Bayi, dan Intervensi <i>Stunting</i> (7107 - Kab. Bolaang Mongondow Utara)	7.273,6 DAK	
Penguatan Penurunan Angka Kematian Ibu, Bayi, dan Intervensi <i>Stunting</i> (7108 - Kab. Kep. Siau Tagulandang Biaro)	416,9 DAK	
Penguatan Penurunan Angka Kematian Ibu, Bayi, dan Intervensi <i>Stunting</i> (7109 - Kab. Minahasa Tenggara)	1.004,0 DAK	
Penguatan Penurunan Angka Kematian Ibu, Bayi, dan Intervensi <i>Stunting</i> (7110 - Kab. Bolaang Mongondow Selatan)	405,4 DAK	
Penguatan Penurunan Angka Kematian Ibu, Bayi, dan Intervensi <i>Stunting</i> (7111 - Kab. Bolaang Mongondow Timur)	6.796,7 DAK	
Penguatan Penurunan Angka Kematian Ibu, Bayi, dan Intervensi <i>Stunting</i> (7171 - Kota Manado)	3.365,7 DAK	
Penguatan Penurunan Angka Kematian Ibu, Bayi, dan Intervensi <i>Stunting</i> (7172 - Kota Bitung)	1.548,1 DAK	
Penguatan Penurunan Angka Kematian Ibu, Bayi, dan Intervensi <i>Stunting</i> (7173 - Kota Tomohon)	1.026,6 DAK	
Penguatan Penurunan Angka Kematian Ibu, Bayi, dan Intervensi <i>Stunting</i> (7174 - Kota Kotamobagu)	5.441,8 DAK	
Penguatan Penurunan Angka Kematian Ibu, Bayi, dan Intervensi <i>Stunting</i> (7202 - Kab. Banggai)	6.693,2 DAK	
Penguatan Penurunan Angka Kematian Ibu, Bayi, dan Intervensi <i>Stunting</i> (7208 - Kab. Parigi Moutong)	7.045,5 DAK	
Penguatan Penurunan Angka Kematian Ibu, Bayi, dan Intervensi <i>Stunting</i> (7271 - Kota Palu)	7.045,5 DAK	
Penguatan Penurunan Angka Kematian Ibu, Bayi, dan Intervensi <i>Stunting</i> (7303 - Kab. Bantaeng)	1.686,7 DAK	
Penguatan Penurunan Angka Kematian Ibu, Bayi, dan Intervensi <i>Stunting</i> (7305 - Kab. Takalar)	3.342,2 DAK	
Penguatan Penurunan Angka Kematian Ibu, Bayi, dan Intervensi <i>Stunting</i> (7308 - Kab. Maros)	6.688,3 DAK	



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

Prioritas Nasional/ <i>Major Project</i>	Alokasi (Rp. Juta)	Instansi Pelaksana
Penguatan Penurunan Angka Kematian Ibu, Bayi, dan Intervensi <i>Stunting</i> (7310 - Kab. Barru)	273,8	DAK
Penguatan Penurunan Angka Kematian Ibu, Bayi, dan Intervensi <i>Stunting</i> (7311 - Kab. Bone)	4.710,4	DAK
Penguatan Penurunan Angka Kematian Ibu, Bayi, dan Intervensi <i>Stunting</i> (7312 - Kab. Soppeng)	3.434,1	DAK
Penguatan Penurunan Angka Kematian Ibu, Bayi, dan Intervensi <i>Stunting</i> (7313 - Kab. Wajo)	3.935,4	DAK
Penguatan Penurunan Angka Kematian Ibu, Bayi, dan Intervensi <i>Stunting</i> (7315 - Kab. Pinrang)	2.908,8	DAK
Penguatan Penurunan Angka Kematian Ibu, Bayi, dan Intervensi <i>Stunting</i> (7318 - Kab. Tana Toraja)	2.062,3	DAK
Penguatan Penurunan Angka Kematian Ibu, Bayi, dan Intervensi <i>Stunting</i> (7326 - Kab. Toraja Utara)	3.120,1	DAK
Penguatan Penurunan Angka Kematian Ibu, Bayi, dan Intervensi <i>Stunting</i> (7371 - Kota Makassar)	12.447,9	DAK
Penguatan Penurunan Angka Kematian Ibu, Bayi, dan Intervensi <i>Stunting</i> (7372 - Kota Pare Pare)	6.440,6	DAK
Penguatan Penurunan Angka Kematian Ibu, Bayi, dan Intervensi <i>Stunting</i> (7373 - Kota Palopo)	2.848,6	DAK
Penguatan Penurunan Angka Kematian Ibu, Bayi, dan Intervensi <i>Stunting</i> (7402 - Kab. Muna)	16.112,4	DAK
Penguatan Penurunan Angka Kematian Ibu, Bayi, dan Intervensi <i>Stunting</i> (7403 - Kab. Konawe)	11.192,6	DAK
Penguatan Penurunan Angka Kematian Ibu, Bayi, dan Intervensi <i>Stunting</i> (7407 - Kab. Wakatobi)	6.161,1	DAK
Penguatan Penurunan Angka Kematian Ibu, Bayi, dan Intervensi <i>Stunting</i> (7408 - Kab. Kolaka Utara)	5.220,8	DAK
Penguatan Penurunan Angka Kematian Ibu, Bayi, dan Intervensi <i>Stunting</i> (7412 - Kab. Konawe Kepulauan)	3.732,2	DAK
Penguatan Penurunan Angka Kematian Ibu, Bayi, dan Intervensi <i>Stunting</i> (7414 - Kab. Buton Tengah)	2.766,4	DAK
Penguatan Penurunan Angka Kematian Ibu, Bayi, dan Intervensi <i>Stunting</i> (7471 - Kota Kendari)	11.311,4	DAK
Penguatan Penurunan Angka Kematian Ibu, Bayi, dan Intervensi <i>Stunting</i> (7472 - Kota Bau Bau)	17.355,9	DAK
Penguatan Penurunan Angka Kematian Ibu, Bayi, dan Intervensi <i>Stunting</i> (7571 - Kota Gorontalo)	7.900,0	DAK
Penguatan Penurunan Angka Kematian Ibu, Bayi, dan Intervensi <i>Stunting</i> (7602 - Kab. Polewali Mandar)	11.179,1	DAK
Penguatan Penurunan Angka Kematian Ibu, Bayi, dan Intervensi <i>Stunting</i> (7603 - Kab. Mamasa)	4.800,1	DAK
Penguatan Penurunan Angka Kematian Ibu, Bayi, dan Intervensi <i>Stunting</i> (7606 - Kab. Mamuju Tengah)	577,9	DAK
Penguatan Penurunan Angka Kematian Ibu, Bayi, dan Intervensi <i>Stunting</i> (8106 - Kab. Seram Bagian Barat)	4.798,2	DAK
Penguatan Penurunan Angka Kematian Ibu, Bayi, dan Intervensi <i>Stunting</i> (8171 - Kota Ambon)	5.429,1	DAK
Penguatan Penurunan Angka Kematian Ibu, Bayi, dan Intervensi <i>Stunting</i> (8202 - Kab. Halmahera Tengah)	714,3	DAK



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

Prioritas Nasional/ <i>Major Project</i>	Alokasi (Rp. Juta)	Instansi Pelaksana
Penguatan Penurunan Angka Kematian Ibu, Bayi, dan Intervensi <i>Stunting</i> (8208 - Kab. Pulau Taliabu)	1.201,9 DAK	
Penguatan Penurunan Angka Kematian Ibu, Bayi, dan Intervensi <i>Stunting</i> (8271 - Kota Ternate)	2.103,6 DAK	
Penguatan Penurunan Angka Kematian Ibu, Bayi, dan Intervensi <i>Stunting</i> (8272 - Kota Tidore Kepulauan)	3.308,9 DAK	
Penguatan Penurunan Angka Kematian Ibu, Bayi, dan Intervensi <i>Stunting</i> (9102 - Kab. Kaimana)	1.806,4 DAK	
Penguatan Penurunan Angka Kematian Ibu, Bayi, dan Intervensi <i>Stunting</i> (9103 - Kab. Teluk Wondama)	491,9 DAK	
Penguatan Penurunan Angka Kematian Ibu, Bayi, dan Intervensi <i>Stunting</i> (9108 - Kab. Raja Ampat)	5.718,9 DAK	
Penguatan Penurunan Angka Kematian Ibu, Bayi, dan Intervensi <i>Stunting</i> (9109 - Kab. Tambrauw)	325,1 DAK	
Penguatan Penurunan Angka Kematian Ibu, Bayi, dan Intervensi <i>Stunting</i> (9110 - Kab. Maybrat)	3.368,2 DAK	
Penguatan Penurunan Angka Kematian Ibu, Bayi, dan Intervensi <i>Stunting</i> (9111 - Kab. Manokwari Selatan)	655,8 DAK	
Penguatan Penurunan Angka Kematian Ibu, Bayi, dan Intervensi <i>Stunting</i> (9112 - Kab. Pegunungan Arfak)	1.475,6 DAK	
Penguatan Penurunan Angka Kematian Ibu, Bayi, dan Intervensi <i>Stunting</i> (9171 - Kota Sorong)	7.521,1 DAK	
Penguatan Penurunan Angka Kematian Ibu, Bayi, dan Intervensi <i>Stunting</i> (9401 - Kab. Merauke)	7.246,8 DAK	
Penguatan Penurunan Angka Kematian Ibu, Bayi, dan Intervensi <i>Stunting</i> (9402 - Kab. Jayawijaya)	5.491,1 DAK	
Penguatan Penurunan Angka Kematian Ibu, Bayi, dan Intervensi <i>Stunting</i> (9403 - Kab. Jayapura)	1.761,4 DAK	
Penguatan Penurunan Angka Kematian Ibu, Bayi, dan Intervensi <i>Stunting</i> (9409 - Kab. Biak Numfor)	12.661,2 DAK	
Penguatan Penurunan Angka Kematian Ibu, Bayi, dan Intervensi <i>Stunting</i> (9410 - Kab. Paniai)	8.346,8 DAK	
Penguatan Penurunan Angka Kematian Ibu, Bayi, dan Intervensi <i>Stunting</i> (9414 - Kab. Mappi)	6.884,7 DAK	
Penguatan Penurunan Angka Kematian Ibu, Bayi, dan Intervensi <i>Stunting</i> (9417 - Kab. Pegunungan Bintang)	11.571,2 DAK	
Penguatan Penurunan Angka Kematian Ibu, Bayi, dan Intervensi <i>Stunting</i> (9419 - Kab. Sarmi)	5.998,0 DAK	
Penguatan Penurunan Angka Kematian Ibu, Bayi, dan Intervensi <i>Stunting</i> (9426 - Kab. Waropen)	448,3 DAK	
Penguatan Penurunan Angka Kematian Ibu, Bayi, dan Intervensi <i>Stunting</i> (9427 - Kab. Supiori)	5.723,0 DAK	
Penguatan Penurunan Angka Kematian Ibu, Bayi, dan Intervensi <i>Stunting</i> (9428 - Kab. Mamberamo Raya)	830,4 DAK	
Penguatan Penurunan Angka Kematian Ibu, Bayi, dan Intervensi <i>Stunting</i> (9431 - Kab. Mamberamo Tengah)	634,1 DAK	
Penguatan Penurunan Angka Kematian Ibu, Bayi, dan Intervensi <i>Stunting</i> (9432 - Kab. Yalimo)	1.428,0 DAK	



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

Prioritas Nasional/ <i>Major Project</i>	Alokasi (Rp. Juta)	Instansi Pelaksana
Penguatan Penurunan Angka Kematian Ibu, Bayi, dan Intervensi <i>Stunting</i> (9433 - Kab. Puncak)	1.690,1	DAK
Penguatan Penurunan Angka Kematian Ibu, Bayi, dan Intervensi <i>Stunting</i> (9434 - Kab. Dogiyai)	1.913,3	DAK
Penguatan Penurunan Angka Kematian Ibu, Bayi, dan Intervensi <i>Stunting</i> (9435 - Kab. Intan Jaya)	1.932,5	DAK
Penguatan Penurunan Angka Kematian Ibu, Bayi, dan Intervensi <i>Stunting</i> (9436 - Kab. Deiyai)	1.788,6	DAK
Penguatan Penurunan Angka Kematian Ibu, Bayi, dan Intervensi <i>Stunting</i> (9471 - Kota Jayapura)	3.490,9	DAK
Penguatan Penurunan Angka Kematian Ibu, Bayi, dan Intervensi <i>Stunting</i> (1102 - Kab. Aceh Singkil)	7.044,3	DAK
Penguatan Penurunan Angka Kematian Ibu, Bayi, dan Intervensi <i>Stunting</i> (1105 - Kab. Aceh Timur)	8.052,0	DAK
Penguatan Penurunan Angka Kematian Ibu, Bayi, dan Intervensi <i>Stunting</i> (1106 - Kab. Aceh Tengah)	9.445,0	DAK
Penguatan Penurunan Angka Kematian Ibu, Bayi, dan Intervensi <i>Stunting</i> (1107 - Kab. Aceh Barat)	11.852,7	DAK
Penguatan Penurunan Angka Kematian Ibu, Bayi, dan Intervensi <i>Stunting</i> (1112 - Kab. Aceh Barat Daya)	11.977,4	DAK
Penguatan Penurunan Angka Kematian Ibu, Bayi, dan Intervensi <i>Stunting</i> (1113 - Kab. Gayo Lues)	10.120,0	DAK
Penguatan Penurunan Angka Kematian Ibu, Bayi, dan Intervensi <i>Stunting</i> (1114 - Kab. Aceh Tamiang)	12.631,6	DAK
Penguatan Penurunan Angka Kematian Ibu, Bayi, dan Intervensi <i>Stunting</i> (1116 - Kab. Aceh Jaya)	3.829,1	DAK
Penguatan Penurunan Angka Kematian Ibu, Bayi, dan Intervensi <i>Stunting</i> (1117 - Kab. Bener Meriah)	5.924,0	DAK
Penguatan Penurunan Angka Kematian Ibu, Bayi, dan Intervensi <i>Stunting</i> (1118 - Kab. Pidie Jaya)	2.667,8	DAK
Penguatan Penurunan Angka Kematian Ibu, Bayi, dan Intervensi <i>Stunting</i> (1171 - Kota Banda Aceh)	2.174,3	DAK
Penguatan Penurunan Angka Kematian Ibu, Bayi, dan Intervensi <i>Stunting</i> (1172 - Kota Sabang)	1.535,8	DAK
Penguatan Penurunan Angka Kematian Ibu, Bayi, dan Intervensi <i>Stunting</i> (1173 - Kota Langsa)	7.208,4	DAK
Penguatan Penurunan Angka Kematian Ibu, Bayi, dan Intervensi <i>Stunting</i> (1174 - Kota Lhokseumawe)	2.256,5	DAK
Penguatan Penurunan Angka Kematian Ibu, Bayi, dan Intervensi <i>Stunting</i> (1175 - Kota Subulussalam)	2.256,1	DAK
Penguatan Penurunan Angka Kematian Ibu, Bayi, dan Intervensi <i>Stunting</i> (1201 - Kab. Nias)	12.299,8	DAK
Penguatan Penurunan Angka Kematian Ibu, Bayi, dan Intervensi <i>Stunting</i> (1203 - Kab. Tapanuli Selatan)	15.967,5	DAK
Penguatan Penurunan Angka Kematian Ibu, Bayi, dan Intervensi <i>Stunting</i> (1204 - Kab. Tapanuli Tengah)	4.902,9	DAK
Penguatan Penurunan Angka Kematian Ibu, Bayi, dan Intervensi <i>Stunting</i> (1205 - Kab. Tapanuli Utara)	11.186,3	DAK



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

Prioritas Nasional/ <i>Major Project</i>	Alokasi (Rp. Juta)	Instansi Pelaksana
Penguatan Penurunan Angka Kematian Ibu, Bayi, dan Intervensi <i>Stunting</i> (1206 - Kab. Toba)	13.554,4	DAK
Penguatan Penurunan Angka Kematian Ibu, Bayi, dan Intervensi <i>Stunting</i> (1207 - Kab. Labuhanbatu)	4.658,3	DAK
Penguatan Penurunan Angka Kematian Ibu, Bayi, dan Intervensi <i>Stunting</i> (1208 - Kab. Asahan)	11.212,8	DAK
Penguatan Penurunan Angka Kematian Ibu, Bayi, dan Intervensi <i>Stunting</i> (1209 - Kab. Simalungun)	8.317,8	DAK
Penguatan Penurunan Angka Kematian Ibu, Bayi, dan Intervensi <i>Stunting</i> (1210 - Kab. Dairi)	13.927,7	DAK
Penguatan Penurunan Angka Kematian Ibu, Bayi, dan Intervensi <i>Stunting</i> (1211 - Kab. Karo)	6.479,1	DAK
Penguatan Penurunan Angka Kematian Ibu, Bayi, dan Intervensi <i>Stunting</i> (1217 - Kab. Samosir)	7.427,3	DAK
Penguatan Penurunan Angka Kematian Ibu, Bayi, dan Intervensi <i>Stunting</i> (1218 - Kab. Serdang Bedagai)	8.001,0	DAK
Penguatan Penurunan Angka Kematian Ibu, Bayi, dan Intervensi <i>Stunting</i> (1219 - Kab. Batu Bara)	11.118,5	DAK
Penguatan Penurunan Angka Kematian Ibu, Bayi, dan Intervensi <i>Stunting</i> (1220 - Kab. Padang Lawas Utara)	6.879,5	DAK
Penguatan Penurunan Angka Kematian Ibu, Bayi, dan Intervensi <i>Stunting</i> (1221 - Kab. Padang Lawas)	4.549,4	DAK
Penguatan Penurunan Angka Kematian Ibu, Bayi, dan Intervensi <i>Stunting</i> (1222 - Kab. Labuhanbatu Selatan)	9.152,8	DAK
Penguatan Penurunan Angka Kematian Ibu, Bayi, dan Intervensi <i>Stunting</i> (1223 - Kab. Labuhanbatu Utara)	7.790,9	DAK
Penguatan Penurunan Angka Kematian Ibu, Bayi, dan Intervensi <i>Stunting</i> (1224 - Kab. Nias Utara)	819,8	DAK
Penguatan Penurunan Angka Kematian Ibu, Bayi, dan Intervensi <i>Stunting</i> (1225 - Kab. Nias Barat)	6.370,7	DAK
Penguatan Penurunan Angka Kematian Ibu, Bayi, dan Intervensi <i>Stunting</i> (1271 - Kota Sibolga)	8.081,5	DAK
Penguatan Penurunan Angka Kematian Ibu, Bayi, dan Intervensi <i>Stunting</i> (1272 - Kota Tanjung Balai)	1.989,4	DAK
Penguatan Penurunan Angka Kematian Ibu, Bayi, dan Intervensi <i>Stunting</i> (1274 - Kota Tebing Tinggi)	8.521,3	DAK
Penguatan Penurunan Angka Kematian Ibu, Bayi, dan Intervensi <i>Stunting</i> (1275 - Kota Medan)	18.904,6	DAK
Penguatan Penurunan Angka Kematian Ibu, Bayi, dan Intervensi <i>Stunting</i> (1276 - Kota Binjai)	9.739,5	DAK
Penguatan Penurunan Angka Kematian Ibu, Bayi, dan Intervensi <i>Stunting</i> (1301 - Kab. Kepulauan Mentawai)	1.663,4	DAK
Penguatan Penurunan Angka Kematian Ibu, Bayi, dan Intervensi <i>Stunting</i> (1305 - Kab. Tanah Datar)	9.342,3	DAK
Penguatan Penurunan Angka Kematian Ibu, Bayi, dan Intervensi <i>Stunting</i> (1306 - Kab. Padang Pariaman)	4.078,9	DAK



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

Prioritas Nasional/ <i>Major Project</i>	Alokasi (Rp. Juta)	Instansi Pelaksana
Penguatan Penurunan Angka Kematian Ibu, Bayi, dan Intervensi <i>Stunting</i> (1309 - Kab. Pasaman)	2.424,3	DAK
Penguatan Penurunan Angka Kematian Ibu, Bayi, dan Intervensi <i>Stunting</i> (1310 - Kab. Solok Selatan)	7.236,3	DAK
Penguatan Penurunan Angka Kematian Ibu, Bayi, dan Intervensi <i>Stunting</i> (1311 - Kab. Dharmasraya)	1.430,9	DAK
Penguatan Penurunan Angka Kematian Ibu, Bayi, dan Intervensi <i>Stunting</i> (1371 - Kota Padang)	5.589,0	DAK
Penguatan Penurunan Angka Kematian Ibu, Bayi, dan Intervensi <i>Stunting</i> (1374 - Kota Padang Panjang)	715,4	DAK
Penguatan Penurunan Angka Kematian Ibu, Bayi, dan Intervensi <i>Stunting</i> (1375 - Kota Bukit Tinggi)	592,7	DAK
Penguatan Penurunan Angka Kematian Ibu, Bayi, dan Intervensi <i>Stunting</i> (1376 - Kota Payakumbuh)	7.311,4	DAK
Penguatan Penurunan Angka Kematian Ibu, Bayi, dan Intervensi <i>Stunting</i> (1377 - Kota Pariaman)	2.062,9	DAK
Penguatan Penurunan Angka Kematian Ibu, Bayi, dan Intervensi <i>Stunting</i> (1401 - Kab. Kuantan Singingi)	7.039,8	DAK
Penguatan Penurunan Angka Kematian Ibu, Bayi, dan Intervensi <i>Stunting</i> (1402 - Kab. Indragiri Hulu)	3.580,2	DAK
Penguatan Penurunan Angka Kematian Ibu, Bayi, dan Intervensi <i>Stunting</i> (1403 - Kab. Indragiri Hilir)	13.563,6	DAK
Penguatan Penurunan Angka Kematian Ibu, Bayi, dan Intervensi <i>Stunting</i> (1405 - Kab. Siak)	5.200,4	DAK
Penguatan Penurunan Angka Kematian Ibu, Bayi, dan Intervensi <i>Stunting</i> (1406 - Kab. Kampar)	6.693,2	DAK
Penguatan Penurunan Angka Kematian Ibu, Bayi, dan Intervensi <i>Stunting</i> (1407 - Kab. Rokan Hulu)	11.682,0	DAK
Penguatan Penurunan Angka Kematian Ibu, Bayi, dan Intervensi <i>Stunting</i> (1471 - Kota Pekanbaru)	6.525,9	DAK
Penguatan Penurunan Angka Kematian Ibu, Bayi, dan Intervensi <i>Stunting</i> (1504 - Kab. Batanghari)	9.360,4	DAK
Penguatan Penurunan Angka Kematian Ibu, Bayi, dan Intervensi <i>Stunting</i> (1505 - Kab. Muaro Jambi)	5.460,0	DAK
Penguatan Penurunan Angka Kematian Ibu, Bayi, dan Intervensi <i>Stunting</i> (1507 - Kab. Tanjung Jabung Barat)	3.312,5	DAK
Penguatan Penurunan Angka Kematian Ibu, Bayi, dan Intervensi <i>Stunting</i> (1509 - Kab. Bungo)	10.280,7	DAK
Penguatan Penurunan Angka Kematian Ibu, Bayi, dan Intervensi <i>Stunting</i> (1571 - Kota Jambi)	11.093,7	DAK
Penguatan Penurunan Angka Kematian Ibu, Bayi, dan Intervensi <i>Stunting</i> (1572 - Kota Sungai Penuh)	10.562,0	DAK
Penguatan Penurunan Angka Kematian Ibu, Bayi, dan Intervensi <i>Stunting</i> (1602 - Kab. Ogan Komering Ilir)	10.265,6	DAK
Penguatan Penurunan Angka Kematian Ibu, Bayi, dan Intervensi <i>Stunting</i> (1603 - Kab. Muara Enim)	3.301,5	DAK



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

Prioritas Nasional/ <i>Major Project</i>	Alokasi (Rp. Juta)	Instansi Pelaksana
Penguatan Penurunan Angka Kematian Ibu, Bayi, dan Intervensi <i>Stunting</i> (1605 - Kab. Musi Rawas)	10.527,7	DAK
Penguatan Penurunan Angka Kematian Ibu, Bayi, dan Intervensi <i>Stunting</i> (1609 - Kab. Ogan Komering Ulu Timur)	12.300,3	DAK
Penguatan Penurunan Angka Kematian Ibu, Bayi, dan Intervensi <i>Stunting</i> (1610 - Kab. Ogan Ilir)	16.101,4	DAK
Penguatan Penurunan Angka Kematian Ibu, Bayi, dan Intervensi <i>Stunting</i> (1611 - Kab. Empat Lawang)	2.087,9	DAK
Penguatan Penurunan Angka Kematian Ibu, Bayi, dan Intervensi <i>Stunting</i> (1612 - Kab. Penukal Abab Lematang Ilir)	1.348,2	DAK
Penguatan Penurunan Angka Kematian Ibu, Bayi, dan Intervensi <i>Stunting</i> (1671 - Kota Palembang)	5.851,8	DAK
Penguatan Penurunan Angka Kematian Ibu, Bayi, dan Intervensi <i>Stunting</i> (1672 - Kota Prabumulih)	14.382,6	DAK
Penguatan Penurunan Angka Kematian Ibu, Bayi, dan Intervensi <i>Stunting</i> (1673 - Kota Pagar Alam)	11.920,5	DAK
Penguatan Penurunan Angka Kematian Ibu, Bayi, dan Intervensi <i>Stunting</i> (1674 - Kota Lubuk Linggau)	11.427,1	DAK
Penguatan Penurunan Angka Kematian Ibu, Bayi, dan Intervensi <i>Stunting</i> (1701 - Kab. Bengkulu Selatan)	6.203,2	DAK
Penguatan Penurunan Angka Kematian Ibu, Bayi, dan Intervensi <i>Stunting</i> (1702 - Kab. Rejang Lebong)	1.395,1	DAK
Penguatan Penurunan Angka Kematian Ibu, Bayi, dan Intervensi <i>Stunting</i> (1704 - Kab. Kaur)	4.949,9	DAK
Penguatan Penurunan Angka Kematian Ibu, Bayi, dan Intervensi <i>Stunting</i> (1706 - Kab. Mukomuko)	4.825,8	DAK
Penguatan Penurunan Angka Kematian Ibu, Bayi, dan Intervensi <i>Stunting</i> (1709 - Kab. Bengkulu Tengah)	3.946,8	DAK
Penguatan Penurunan Angka Kematian Ibu, Bayi, dan Intervensi <i>Stunting</i> (1771 - Kota Bengkulu)	6.196,5	DAK
Penguatan Penurunan Angka Kematian Ibu, Bayi, dan Intervensi <i>Stunting</i> (1803 - Kab. Lampung Selatan)	10.433,3	DAK
Penguatan Penurunan Angka Kematian Ibu, Bayi, dan Intervensi <i>Stunting</i> (1805 - Kab. Lampung Tengah)	7.353,3	DAK
Penguatan Penurunan Angka Kematian Ibu, Bayi, dan Intervensi <i>Stunting</i> (1806 - Kab. Lampung Utara)	5.145,3	DAK
Penguatan Penurunan Angka Kematian Ibu, Bayi, dan Intervensi <i>Stunting</i> (1807 - Kab. Way Kanan)	905,8	DAK
Penguatan Penurunan Angka Kematian Ibu, Bayi, dan Intervensi <i>Stunting</i> (1808 - Kab. Tulang Bawang)	10.205,9	DAK
Penguatan Penurunan Angka Kematian Ibu, Bayi, dan Intervensi <i>Stunting</i> (1809 - Kab. Pesawaran)	2.518,2	DAK
Penguatan Penurunan Angka Kematian Ibu, Bayi, dan Intervensi <i>Stunting</i> (1813 - Kab. Pesisir Barat)	2.637,0	DAK
Penguatan Penurunan Angka Kematian Ibu, Bayi, dan Intervensi <i>Stunting</i> (1872 - Kota Metro)	9.034,3	DAK



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

Prioritas Nasional/ <i>Major Project</i>	Alokasi (Rp. Juta)	Instansi Pelaksana
Penguatan Penurunan Angka Kematian Ibu, Bayi, dan Intervensi <i>Stunting</i> (1901 - Kab. Bangka)	8.504,4 DAK	
Penguatan Penurunan Angka Kematian Ibu, Bayi, dan Intervensi <i>Stunting</i> (1905 - Kab. Bangka Selatan)	6.985,8 DAK	
Penguatan Penurunan Angka Kematian Ibu, Bayi, dan Intervensi <i>Stunting</i> (1971 - Kota Pangkal Pinang)	8.328,5 DAK	
Penguatan Penurunan Angka Kematian Ibu, Bayi, dan Intervensi <i>Stunting</i> (2105 - Kab. Kepulauan Anambas)	1.553,5 DAK	
Penguatan Penurunan Angka Kematian Ibu, Bayi, dan Intervensi <i>Stunting</i> (2171 - Kota Batam)	1.144,1 DAK	
Penguatan Penurunan Angka Kematian Ibu, Bayi, dan Intervensi <i>Stunting</i> (31 - Provinsi DKI Jakarta)	2.993,9 DAK	
Penguatan Penurunan Angka Kematian Ibu, Bayi, dan Intervensi <i>Stunting</i> (3201 - Kab. Bogor)	4.461,4 DAK	
Penguatan Penurunan Angka Kematian Ibu, Bayi, dan Intervensi <i>Stunting</i> (3202 - Kab. Sukabumi)	34.086,1 DAK	
Penguatan Penurunan Angka Kematian Ibu, Bayi, dan Intervensi <i>Stunting</i> (3204 - Kab. Bandung)	42.585,0 DAK	
Penguatan Penurunan Angka Kematian Ibu, Bayi, dan Intervensi <i>Stunting</i> (3207 - Kab. Ciamis)	13.145,0 DAK	
Penguatan Penurunan Angka Kematian Ibu, Bayi, dan Intervensi <i>Stunting</i> (3209 - Kab. Cirebon)	22.652,7 DAK	
Penguatan Penurunan Angka Kematian Ibu, Bayi, dan Intervensi <i>Stunting</i> (3213 - Kab. Subang)	20.559,4 DAK	
Penguatan Penurunan Angka Kematian Ibu, Bayi, dan Intervensi <i>Stunting</i> (3215 - Kab. Karawang)	6.264,5 DAK	
Penguatan Penurunan Angka Kematian Ibu, Bayi, dan Intervensi <i>Stunting</i> (3217 - Kab. Bandung Barat)	24.118,5 DAK	
Penguatan Penurunan Angka Kematian Ibu, Bayi, dan Intervensi <i>Stunting</i> (3274 - Kota Cirebon)	14.476,5 DAK	
Penguatan Penurunan Angka Kematian Ibu, Bayi, dan Intervensi <i>Stunting</i> (3275 - Kota Bekasi)	19.915,2 DAK	
Penguatan Penurunan Angka Kematian Ibu, Bayi, dan Intervensi <i>Stunting</i> (3276 - Kota Depok)	11.506,5 DAK	
Penguatan Penurunan Angka Kematian Ibu, Bayi, dan Intervensi <i>Stunting</i> (3278 - Kota Tasikmalaya)	8.001,1 DAK	
Penguatan Penurunan Angka Kematian Ibu, Bayi, dan Intervensi <i>Stunting</i> (3279 - Kota Banjar)	5.908,3 DAK	
Penguatan Penurunan Angka Kematian Ibu, Bayi, dan Intervensi <i>Stunting</i> (3304 - Kab. Banjarnegara)	19.004,9 DAK	
Penguatan Penurunan Angka Kematian Ibu, Bayi, dan Intervensi <i>Stunting</i> (3311 - Kab. Sukoharjo)	20.078,4 DAK	
Penguatan Penurunan Angka Kematian Ibu, Bayi, dan Intervensi <i>Stunting</i> (3315 - Kab. Grobogan)	11.907,9 DAK	
Penguatan Penurunan Angka Kematian Ibu, Bayi, dan Intervensi <i>Stunting</i> (3320 - Kab. Jepara)	13.701,1 DAK	
Penguatan Penurunan Angka Kematian Ibu, Bayi, dan Intervensi <i>Stunting</i> (3329 - Kab. Brebes)	18.915,0 DAK	
Penguatan Penurunan Angka Kematian Ibu, Bayi, dan Intervensi <i>Stunting</i> (3371 - Kota Magelang)	10.455,5 DAK	



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

Prioritas Nasional/ <i>Major Project</i>	Alokasi (Rp. Juta)	Instansi Pelaksana
Penguatan Penurunan Angka Kematian Ibu, Bayi, dan Intervensi <i>Stunting</i> (3373 - Kota Salatiga)	8.270,7	DAK
Penguatan Penurunan Angka Kematian Ibu, Bayi, dan Intervensi <i>Stunting</i> (3375 - Kota Pekalongan)	7.837,2	DAK
Penguatan Penurunan Angka Kematian Ibu, Bayi, dan Intervensi <i>Stunting</i> (3376 - Kota Tegal)	12.159,9	DAK
Penguatan Penurunan Angka Kematian Ibu, Bayi, dan Intervensi <i>Stunting</i> (3401 - Kab. Kulon Progo)	10.789,7	DAK
Penguatan Penurunan Angka Kematian Ibu, Bayi, dan Intervensi <i>Stunting</i> (3471 - Kota Yogyakarta)	7.458,2	DAK
Penguatan Penurunan Angka Kematian Ibu, Bayi, dan Intervensi <i>Stunting</i> (3503 - Kab. Trenggalek)	14.226,6	DAK
Penguatan Penurunan Angka Kematian Ibu, Bayi, dan Intervensi <i>Stunting</i> (3505 - Kab. Blitar)	20.444,8	DAK
Penguatan Penurunan Angka Kematian Ibu, Bayi, dan Intervensi <i>Stunting</i> (3509 - Kab. Jember)	3.704,4	DAK
Penguatan Penurunan Angka Kematian Ibu, Bayi, dan Intervensi <i>Stunting</i> (3510 - Kab. Banyuwangi)	30.519,9	DAK
Penguatan Penurunan Angka Kematian Ibu, Bayi, dan Intervensi <i>Stunting</i> (3515 - Kab. Sidoarjo)	27.017,7	DAK
Penguatan Penurunan Angka Kematian Ibu, Bayi, dan Intervensi <i>Stunting</i> (3516 - Kab. Mojokerto)	17.067,1	DAK
Penguatan Penurunan Angka Kematian Ibu, Bayi, dan Intervensi <i>Stunting</i> (3519 - Kab. Madiun)	12.015,3	DAK
Penguatan Penurunan Angka Kematian Ibu, Bayi, dan Intervensi <i>Stunting</i> (3525 - Kab. Gresik)	9.720,3	DAK
Penguatan Penurunan Angka Kematian Ibu, Bayi, dan Intervensi <i>Stunting</i> (3526 - Kab. Bangkalan)	10.010,4	DAK
Keluarga Berencana (1101 - Kab. Simeulue)	1.112,2	DAK
Keluarga Berencana (1103 - Kab. Aceh Selatan)	1.531,9	DAK
Keluarga Berencana (1104 - Kab. Aceh Tenggara)	1.531,9	DAK
Keluarga Berencana (1105 - Kab. Aceh Timur)	1.531,9	DAK
Keluarga Berencana (1108 - Kab. Aceh Besar)	1.455,3	DAK
Keluarga Berencana (1109 - Kab. Pidie)	1.531,9	DAK
Keluarga Berencana (1110 - Kab. Bireuen)	2.166,8	DAK
Keluarga Berencana (1112 - Kab. Aceh Barat Daya)	1.625,5	DAK
Keluarga Berencana (1113 - Kab. Gayo Lues)	1.531,9	DAK
Keluarga Berencana (1114 - Kab. Aceh Tamiang)	1.531,9	DAK
Keluarga Berencana (1115 - Kab. Nagan Raya)	1.048,1	DAK
Keluarga Berencana (1116 - Kab. Aceh Jaya)	1.625,5	DAK
Keluarga Berencana (1117 - Kab. Bener Meriah)	1.625,5	DAK
Keluarga Berencana (1118 - Kab. Pidie Jaya)	1.414,6	DAK
Keluarga Berencana (1172 - Kota Sabang)	1.144,2	DAK
Keluarga Berencana (1173 - Kota Langsa)	1.531,9	DAK
Keluarga Berencana (1175 - Kota Subulussalam)	1.531,9	DAK
Keluarga Berencana (1201 - Kab. Nias)	1.882,1	DAK
Keluarga Berencana (1202 - Kab. Mandailing Natal)	2.015,6	DAK



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

Prioritas Nasional/ <i>Major Project</i>	Alokasi (Rp. Juta)	Instansi Pelaksana
Keluarga Berencana (1203 - Kab. Tapanuli Selatan)	1.909,8 DAK	
Keluarga Berencana (1204 - Kab. Tapanuli Tengah)	2.015,6 DAK	
Keluarga Berencana (1206 - Kab. Toba)	1.625,5 DAK	
Keluarga Berencana (1207 - Kab. Labuhanbatu)	1.209,4 DAK	
Keluarga Berencana (1208 - Kab. Asahan)	1.030,3 DAK	
Keluarga Berencana (1209 - Kab. Simalungun)	1.685,1 DAK	
Keluarga Berencana (1210 - Kab. Dairi)	1.431,1 DAK	
Keluarga Berencana (1212 - Kab. Deli Serdang)	1.091,5 DAK	
Keluarga Berencana (1213 - Kab. Langkat)	1.620,0 DAK	
Keluarga Berencana (1214 - Kab. Nias Selatan)	2.138,8 DAK	
Keluarga Berencana (1216 - Kab. Pakpak Bharat)	2.138,8 DAK	
Keluarga Berencana (1218 - Kab. Serdang Bedagai)	1.241,6 DAK	
Keluarga Berencana (1219 - Kab. Batu Bara)	1.641,4 DAK	
Keluarga Berencana (1220 - Kab. Padang Lawas Utara)	2.064,0 DAK	
Keluarga Berencana (1221 - Kab. Padang Lawas)	1.279,8 DAK	
Keluarga Berencana (1224 - Kab. Nias Utara)	1.882,1 DAK	
Keluarga Berencana (1225 - Kab. Nias Barat)	2.138,8 DAK	
Keluarga Berencana (1271 - Kota Sibolga)	1.882,1 DAK	
Keluarga Berencana (1275 - Kota Medan)	1.388,3 DAK	
Keluarga Berencana (1276 - Kota Binjai)	1.526,8 DAK	
Keluarga Berencana (1278 - Kota Gunungsitoli)	1.283,3 DAK	
Keluarga Berencana (1305 - Kab. Tanah Datar)	1.007,8 DAK	
Keluarga Berencana (1306 - Kab. Padang Pariaman)	1.069,0 DAK	
Keluarga Berencana (1375 - Kota Bukit Tinggi)	1.431,1 DAK	
Keluarga Berencana (1671 - Kota Palembang)	1.364,7 DAK	
Keluarga Berencana (1771 - Kota Bengkulu)	1.618,4 DAK	
Keluarga Berencana (3201 - Kab. Bogor)	1.685,1 DAK	
Keluarga Berencana (3202 - Kab. Sukabumi)	1.436,1 DAK	
Keluarga Berencana (3203 - Kab. Cianjur)	1.428,4 DAK	
Keluarga Berencana (3204 - Kab. Bandung)	1.914,8 DAK	
Keluarga Berencana (3205 - Kab. Garut)	1.867,0 DAK	
Keluarga Berencana (3206 - Kab. Tasikmalaya)	1.685,1 DAK	
Keluarga Berencana (3207 - Kab. Ciamis)	1.914,8 DAK	
Keluarga Berencana (3208 - Kab. Kuningan)	1.914,8 DAK	
Keluarga Berencana (3209 - Kab. Cirebon)	1.914,8 DAK	
Keluarga Berencana (3210 - Kab. Majalengka)	1.622,8 DAK	
Keluarga Berencana (3211 - Kab. Sumedang)	1.877,5 DAK	
Keluarga Berencana (3212 - Kab. Indramayu)	2.867,5 DAK	
Keluarga Berencana (3213 - Kab. Subang)	1.905,3 DAK	
Keluarga Berencana (3216 - Kab. Bekasi)	1.148,9 DAK	



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

Prioritas Nasional/ <i>Major Project</i>	Alokasi (Rp. Juta)	Instansi Pelaksana
Keluarga Berencana (3217 - Kab. Bandung Barat)	1.148,9	DAK
Keluarga Berencana (3273 - Kota Bandung)	1.914,8	DAK
Keluarga Berencana (3275 - Kota Bekasi)	1.685,1	DAK
Keluarga Berencana (3276 - Kota Depok)	1.914,8	DAK
Keluarga Berencana (3278 - Kota Tasikmalaya)	1.914,8	DAK
Keluarga Berencana (3279 - Kota Banjar)	2.138,8	DAK
Keluarga Berencana (3301 - Kab. Cilacap)	1.627,6	DAK
Keluarga Berencana (3303 - Kab. Purbalingga)	2.015,6	DAK
Keluarga Berencana (3304 - Kab. Banjarnegara)	1.058,2	DAK
Keluarga Berencana (3305 - Kab. Kebumen)	1.914,8	DAK
Keluarga Berencana (3306 - Kab. Purworejo)	3.023,4	DAK
Keluarga Berencana (3307 - Kab. Wonosobo)	1.058,2	DAK
Keluarga Berencana (3308 - Kab. Magelang)	1.851,6	DAK
Keluarga Berencana (3309 - Kab. Boyolali)	1.240,2	DAK
Keluarga Berencana (3310 - Kab. Klaten)	1.215,9	DAK
Keluarga Berencana (3311 - Kab. Sukoharjo)	1.582,3	DAK
Keluarga Berencana (3312 - Kab. Wonogiri)	1.874,5	DAK
Keluarga Berencana (3313 - Kab. Karanganyar)	1.935,0	DAK
Keluarga Berencana (3315 - Kab. Grobogan)	1.309,8	DAK
Keluarga Berencana (3316 - Kab. Blora)	1.360,5	DAK
Keluarga Berencana (3317 - Kab. Rembang)	2.015,6	DAK
Keluarga Berencana (3322 - Kab. Semarang)	1.914,8	DAK
Keluarga Berencana (3323 - Kab. Temanggung)	1.511,7	DAK
Keluarga Berencana (3324 - Kab. Kendal)	2.015,6	DAK
Keluarga Berencana (3325 - Kab. Batang)	2.015,6	DAK
Keluarga Berencana (3326 - Kab. Pekalongan)	1.914,8	DAK
Keluarga Berencana (3327 - Kab. Pemasang)	1.464,9	DAK
Keluarga Berencana (3328 - Kab. Tegal)	1.914,8	DAK
Keluarga Berencana (3329 - Kab. Brebes)	1.579,7	DAK
Keluarga Berencana (3371 - Kota Magelang)	1.068,3	DAK
Keluarga Berencana (3372 - Kota Surakarta)	1.953,6	DAK
Keluarga Berencana (3373 - Kota Salatiga)	1.662,9	DAK
Keluarga Berencana (3375 - Kota Pekalongan)	1.901,7	DAK
Keluarga Berencana (3501 - Kab. Pacitan)	1.310,2	DAK
Keluarga Berencana (3502 - Kab. Ponorogo)	1.386,7	DAK
Keluarga Berencana (3505 - Kab. Blitar)	1.647,7	DAK
Keluarga Berencana (3507 - Kab. Malang)	1.672,7	DAK
Keluarga Berencana (3509 - Kab. Jember)	1.914,8	DAK
Keluarga Berencana (3512 - Kab. Situbondo)	2.015,6	DAK
Keluarga Berencana (3514 - Kab. Pasuruan)	1.503,1	DAK
Keluarga Berencana (3515 - Kab. Sidoarjo)	1.252,1	DAK
Keluarga Berencana (3516 - Kab. Mojokerto)	1.436,1	DAK



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

Prioritas Nasional/ <i>Major Project</i>	Alokasi (Rp. Juta)	Instansi Pelaksana
Keluarga Berencana (3517 - Kab. Jombang)	1.570,2	DAK
Keluarga Berencana (3518 - Kab. Nganjuk)	2.015,6	DAK
Keluarga Berencana (3519 - Kab. Madiun)	1.360,5	DAK
Keluarga Berencana (3520 - Kab. Magetan)	1.995,5	DAK
Keluarga Berencana (3524 - Kab. Lamongan)	1.914,8	DAK
Keluarga Berencana (3525 - Kab. Gresik)	1.327,7	DAK
Keluarga Berencana (3526 - Kab. Bangkalan)	1.914,8	DAK
Keluarga Berencana (3527 - Kab. Sampang)	3.023,4	DAK
Keluarga Berencana (3528 - Kab. Pamekasan)	1.390,8	DAK
Keluarga Berencana (3529 - Kab. Sumenep)	1.380,7	DAK
Keluarga Berencana (3571 - Kota Kediri)	2.318,0	DAK
Keluarga Berencana (3576 - Kota Mojokerto)	1.426,1	DAK
Keluarga Berencana (3577 - Kota Madiun)	1.159,0	DAK
Keluarga Berencana (3601 - Kab. Pandeglang)	2.015,6	DAK
Keluarga Berencana (3602 - Kab. Lebak)	1.914,8	DAK
Keluarga Berencana (3673 - Kota Serang)	1.148,9	DAK
Keluarga Berencana (3674 - Kota Tangerang Selatan)	1.531,9	DAK
Keluarga Berencana (5201 - Kab. Lombok Barat)	1.955,2	DAK
Keluarga Berencana (5202 - Kab. Lombok Tengah)	2.015,6	DAK
Keluarga Berencana (5203 - Kab. Lombok Timur)	1.914,8	DAK
Keluarga Berencana (5204 - Kab. Sumbawa)	2.015,6	DAK
Keluarga Berencana (5205 - Kab. Dompu)	1.924,9	DAK
Keluarga Berencana (5206 - Kab. Bima)	1.894,7	DAK
Keluarga Berencana (5207 - Kab. Sumbawa Barat)	3.023,4	DAK
Keluarga Berencana (5208 - Kab. Lombok Utara)	1.534,2	DAK
Keluarga Berencana (5271 - Kota Mataram)	1.239,6	DAK
Keluarga Berencana (5272 - Kota Bima)	2.138,8	DAK
Keluarga Berencana (5302 - Kab. Sumba Timur)	2.015,6	DAK
Keluarga Berencana (5303 - Kab. Kupang)	2.138,8	DAK
Keluarga Berencana (5304 - Kab. Timor Tengah Selatan)	2.015,6	DAK
Keluarga Berencana (5305 - Kab. Timor Tengah Utara)	2.138,8	DAK
Keluarga Berencana (5306 - Kab. Belu)	1.689,6	DAK
Keluarga Berencana (5308 - Kab. Lembata)	2.138,8	DAK
Keluarga Berencana (5309 - Kab. Flores Timur)	1.433,0	DAK
Keluarga Berencana (5310 - Kab. Sikka)	1.264,3	DAK
Keluarga Berencana (5311 - Kab. Ende)	1.208,7	DAK
Keluarga Berencana (5312 - Kab. Ngada)	2.138,8	DAK
Keluarga Berencana (5313 - Kab. Manggarai)	2.058,6	DAK
Keluarga Berencana (5314 - Kab. Rote Ndao)	2.078,3	DAK
Keluarga Berencana (5315 - Kab. Manggarai Barat)	2.015,6	DAK



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

Prioritas Nasional/ Major Project	Alokasi (Rp. Juta)	Instansi Pelaksana
Keluarga Berencana (5316 - Kab. Sumba Tengah)	1.208,4 DAK	
Keluarga Berencana (5317 - Kab. Sumba Barat Daya)	2.015,6 DAK	
Keluarga Berencana (5319 - Kab. Manggarai Timur)	2.138,8 DAK	
Keluarga Berencana (5321 - Kab. Malaka)	2.138,8 DAK	
Keluarga Berencana (5371 - Kota Kupang)	1.285,0 DAK	
Keluarga Berencana (6101 - Kab. Sambas)	2.015,6 DAK	
Keluarga Berencana (6102 - Kab. Bengkayang)	1.200,3 DAK	
Keluarga Berencana (6103 - Kab. Landak)	1.640,9 DAK	
Keluarga Berencana (6104 - Kab. Mempawah)	1.221,6 DAK	
Keluarga Berencana (6107 - Kab. Sintang)	1.005,3 DAK	
Keluarga Berencana (6108 - Kab. Kapuas Hulu)	1.160,5 DAK	
Keluarga Berencana (6110 - Kab. Melawi)	2.015,6 DAK	
Keluarga Berencana (6111 - Kab. Kayong Utara)	2.138,8 DAK	
Keluarga Berencana (6171 - Kota Pontianak)	2.489,3 DAK	
Keluarga Berencana (6172 - Kota Singkawang)	1.585,1 DAK	
Keluarga Berencana (6301 - Kab. Tanah Laut)	1.511,7 DAK	
Keluarga Berencana (6303 - Kab. Banjar)	2.015,6 DAK	
Keluarga Berencana (6304 - Kab. Barito Kuala)	1.537,3 DAK	
Keluarga Berencana (6305 - Kab. Tapin)	2.015,6 DAK	
Keluarga Berencana (6306 - Kab. Hulu Sungai Selatan)	1.748,6 DAK	
Keluarga Berencana (6309 - Kab. Tabalong)	2.015,6 DAK	
Keluarga Berencana (6310 - Kab. Tanah Bumbu)	1.723,4 DAK	
Keluarga Berencana (6372 - Kota Banjarbaru)	2.015,6 DAK	
Keluarga Berencana (6472 - Kota Samarinda)	1.805,4 DAK	
Keluarga Berencana (7104 - Kab. Kepulauan Talaud)	1.038,0 DAK	
Keluarga Berencana (7208 - Kab. Parigi Moutong)	2.138,8 DAK	
Keluarga Berencana (7311 - Kab. Bone)	1.756,9 DAK	
Keluarga Berencana (7316 - Kab. Enrekang)	1.785,9 DAK	
Keluarga Berencana (7402 - Kab. Muna)	2.015,6 DAK	
Keluarga Berencana (7403 - Kab. Konawe)	2.015,6 DAK	
Keluarga Berencana (7404 - Kab. Kolaka)	2.015,6 DAK	
Keluarga Berencana (7405 - Kab. Konawe Selatan)	2.015,6 DAK	
Keluarga Berencana (7406 - Kab. Bombana)	1.642,7 DAK	
Keluarga Berencana (7407 - Kab. Wakatobi)	3.021,4 DAK	
Keluarga Berencana (7408 - Kab. Kolaka Utara)	2.138,8 DAK	
Keluarga Berencana (7409 - Kab. Buton Utara)	1.898,2 DAK	
Keluarga Berencana (7410 - Kab. Konawe Utara)	2.066,0 DAK	
Keluarga Berencana (7412 - Kab. Konawe Kepulauan)	1.074,7 DAK	
Keluarga Berencana (7413 - Kab. Muna Barat)	2.206,2 DAK	
Keluarga Berencana (7414 - Kab. Buton Tengah)	1.379,5 DAK	



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

Prioritas Nasional/ Major Project	Alokasi (Rp. Juta)	Instansi Pelaksana
Keluarga Berencana (7415 - Kab. Buton Selatan)	2.054,3	DAK
Keluarga Berencana (7471 - Kota Kendari)	1.914,8	DAK
Keluarga Berencana (7504 - Kab. Bone Bolango)	1.951,6	DAK
Keluarga Berencana (7601 - Kab. Majene)	2.138,8	DAK
Keluarga Berencana (7602 - Kab. Polewali Mandar)	1.864,4	DAK
Keluarga Berencana (7603 - Kab. Mamasa)	2.138,8	DAK
Keluarga Berencana (7604 - Kab. Mamuju)	2.015,6	DAK
Keluarga Berencana (7605 - Kab. Pasangkayu)	2.138,8	DAK
Keluarga Berencana (7606 - Kab. Mamuju Tengah)	1.390,2	DAK
Keluarga Berencana (8204 - Kab. Halmahera Selatan)	2.015,6	DAK
Keluarga Berencana (8206 - Kab. Halmahera Timur)	1.007,8	DAK
Keluarga Berencana (8271 - Kota Ternate)	1.552,0	DAK
Keluarga Berencana (9105 - Kab. Manokwari)	1.773,7	DAK
Keluarga Berencana (9107 - Kab. Sorong)	1.069,4	DAK
Keluarga Berencana (9402 - Kab. Jayawijaya)	1.007,8	DAK
Keluarga Berencana (9404 - Kab. Nabire)	1.007,8	DAK
Keluarga Berencana (9408 - Kab. Kepulauan Yapen)	1.026,6	DAK
Keluarga Berencana (9409 - Kab. Biak Numfor)	1.007,8	DAK
Keluarga Berencana (9410 - Kab. Paniai)	2.138,8	DAK
Keluarga Berencana (9415 - Kab. Asmat)	1.007,8	DAK
Keluarga Berencana (9416 - Kab. Yahukimo)	2.015,6	DAK
Keluarga Berencana (9418 - Kab. Tolikara)	1.007,8	DAK
Keluarga Berencana (9419 - Kab. Sarmi)	1.007,8	DAK
Keluarga Berencana (9420 - Kab. Keerom)	1.737,7	DAK
Keluarga Berencana (9427 - Kab. Supiori)	1.069,4	DAK
Keluarga Berencana (9432 - Kab. Yalimo)	1.007,8	DAK
Keluarga Berencana (9436 - Kab. Deiyai)	2.138,8	DAK
Daerah yang mengintegrasikan dan mempunyai rencana aksi daerah program kesehatan ibu dan KB berbasis Hak	576,0	KEMENTERIAN DALAM NEGERI
Kegiatan Koordinasi/Advokasi Terkait Perbaikan Status Gizi dan Peningkatan Pelayanan Kesehatan Ibu dan Bayi Baru Lahir	4.146,4	KEMENTERIAN KESEHATAN
Buku/Media KIE Terkait Upaya Perbaikan Status Gizi dan Peningkatan Pelayanan Ibu dan Bayi Baru Lahir	20.063,2	KEMENTERIAN KESEHATAN
Tenaga Kesehatan/ non-kesehatan yang ditingkatkan kapasitasnya Terkait Upaya Perbaikan Status Gizi dan Peningkatan Pelayanan Kesehatan Ibu dan Bayi Baru Lahir (LP)	11.279,5	KEMENTERIAN KESEHATAN
Laporan Pemantauan dan Evaluasi Terkait Upaya Perbaikan Status Gizi dan Peningkatan Pelayanan Kesehatan Ibu dan Baru Lahir	1.780,6	KEMENTERIAN KESEHATAN



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

Prioritas Nasional/ <i>Major Project</i>	Alokasi (Rp. Juta)	Instansi Pelaksana
Provinsi/ Kab/ Kota yang mendapatkan fasilitasi/ pembinaan Terkait Upaya Perbaikan Status Gizi dan Peningkatan Pelayanan Kesehatan Ibu dan Bayi Baru Lahir	26.876,8	KEMENTERIAN KESEHATAN
Alat Non Medik (IsDB) - LR	44.991,4	KEMENTERIAN KESEHATAN
Tenaga Kesehatan yang Ditingkatkan Kapasitas Pelayanan Kesehatan Reproduksi Catin Dan KB (LP)	1.884,9	KEMENTERIAN KESEHATAN
Kab/ Kota yang Melaksanakan Implementasi <i>Skriming</i> Layak Hamil Bagi PUS di Kab/ Kota Lokus AKI AKB (LP)	130,9	KEMENTERIAN KESEHATAN
Gedung Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak (IsDB) - LR	892.871,8	KEMENTERIAN KESEHATAN
Alat Kesehatan Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak (IsDB) - LR	205.904,2	KEMENTERIAN KESEHATAN
Pembinaan RS PONEK serta Pelayanan ibu dan Anak	500,0	KEMENTERIAN KESEHATAN
Tenaga Kesehatan Terlatih Pelayanan Kesehatan Bagi Korban Ktp/A Dan TPPO dan Aborsi Atas Indikasi (LP)	1.639,4	KEMENTERIAN KESEHATAN
Rumah Sakit yang Diberikan Pembinaan Dalam Implementasi Operasi <i>Sectio Caesaria</i> Darurat dalam Waktu Kurang Atau Sama Dengan 30 Menit	500,0	KEMENTERIAN KESEHATAN
Tenaga Kesehatan/ non kesehatan yang ditingkatkan kapasitasnya terkait Surveilans gizi dan KIA	1.461,9	KEMENTERIAN KESEHATAN
Provinsi/ Kab/ Kota yang mendapatkan fasilitasi/ pembinaan Terkait Upaya Perbaikan Status Gizi dan Peningkatan Pelayanan Kesehatan Ibu dan Bayi Baru Lahir	6.040,6	KEMENTERIAN KESEHATAN
Tenaga Kesehatan/ non-kesehatan yang ditingkatkan kapasitasnya Terkait Upaya Perbaikan Status Gizi dan Peningkatan Pelayanan Kesehatan Ibu dan Bayi Baru Lahir	12.729,9	KEMENTERIAN KESEHATAN
Tenaga Kesehatan/ non kesehatan yang ditingkatkan kapasitasnya terkait Surveilans gizi dan KIA (LP)	3.364,1	KEMENTERIAN KESEHATAN
Workshop Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi Catin dan KB (LP)	12.951,7	KEMENTERIAN KESEHATAN
Penduduk yang mendapatkan Jampersal	67.500,0	KEMENTERIAN KESEHATAN
Daerah yang Diberikan Bimtek dan Supervisi tentang Pelaksanaan Kebijakan Pencegahan Perkawinan Anak	600,0	KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
<i>Aspek: Pemenuhan Intervensi Spesifik Stunting</i>		
Paket Penyediaan Vaksin Imunisasi Rutin Dasar dan Lanjutan (LP)	1.252.021,0	KEMENTERIAN KESEHATAN
Ibu Hamil KEK yang mendapat makanan tambahan dari <i>Buffer Stock</i>	60.184,9	KEMENTERIAN KESEHATAN
Monitoring dan Supervisi Imunisasi	8.386,6	KEMENTERIAN KESEHATAN
Sosialisasi Pelaksanaan Imunisasi	6.112,8	KEMENTERIAN KESEHATAN
Koordinasi Pelaksanaan Imunisasi	7.259,9	KEMENTERIAN KESEHATAN
Media Komunikasi, Informasi, Edukasi Imunisasi	19.842,1	KEMENTERIAN KESEHATAN
Peningkatan Kapasitas Bidang Imunisasi	8.286,6	KEMENTERIAN KESEHATAN
Kampanye Pencegahan <i>Stunting</i> Melalui Berbagai Media (LP)	18.353,7	KEMENTERIAN KESEHATAN



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

Prioritas Nasional/ <i>Major Project</i>	Alokasi (Rp. Juta)	Instansi Pelaksana
Kegiatan Koordinasi dan Advokasi Terkait Perbaikan Gizi dan Peningkatan Pelayanan Kesehatan Bayi dan Balita	1.157,6	KEMENTERIAN KESEHATAN
Balita Kurus yang mendapat makanan tambahan dari Buffer Stock	26.175,0	KEMENTERIAN KESEHATAN
Terlaksananya Uji Laboratorium MT Bumil KEK dan Balita Gizi Kurang	1.360,0	KEMENTERIAN KESEHATAN
Buku/Media KIE Terkait Upaya Perbaikan Status Gizi dan Peningkatan Pelayanan Kesehatan Bayi dan Balita	7.157,2	KEMENTERIAN KESEHATAN
Tenaga Kesehatan/ non-kesehatan yang ditingkatkan kapasitasnya Terkait Upaya Perbaikan Status Gizi dan Peningkatan Pelayanan Kesehatan Bayi dan Balita	6.509,1	KEMENTERIAN KESEHATAN
Laporan Pemantauan dan Evaluasi Terkait Upaya Perbaikan Status Gizi dan Peningkatan Pelayanan Kesehatan Balita	4.926,2	KEMENTERIAN KESEHATAN
Provinsi/Kab/kota yang mendapatkan fasilitasi dan pembinaan Terkait Upaya Perbaikan Status Gizi dan Peningkatan Pelayanan Kesehatan Bayi dan Balita	1.454,5	KEMENTERIAN KESEHATAN
Alat dan Bahan Kesehatan Pendukung Imunisasi	20.512,8	KEMENTERIAN KESEHATAN
Anak balita yang mendapat Suplementasi Gizi Mikro	13.838,4	KEMENTERIAN KESEHATAN
Buku/Media KIE Terkait Upaya Perbaikan Status Gizi dan Pembinaan Anak Usia Sekolah dan Remaja	1.370,6	KEMENTERIAN KESEHATAN
Laporan Pemantauan dan Evaluasi Terkait Upaya Perbaikan Status Gizi dan Pembinaan Anak Usia Sekolah dan Remaja	2.742,1	KEMENTERIAN KESEHATAN
Bayi baru lahir yang mendapat <i>skrining</i> hipotiroid kongenital (SHK)	11.161,6	KEMENTERIAN KESEHATAN
Provinsi/Kab/kota yang dilakukan fasilitasi Terkait Upaya Perbaikan Status Gizi dan Pemberian TTD Bagi Remaja	5.522,4	KEMENTERIAN KESEHATAN
Bimtek, monev, Pembinaan Pelaksanaan Imunisasi	6.573,0	KEMENTERIAN KESEHATAN
Kegiatan Surveilans Gizi dan KIA	2.257,0	KEMENTERIAN KESEHATAN
Tenaga Kesehatan/ non-kesehatan yang ditingkatkan kapasitasnya Terkait Upaya Perbaikan Status Gizi dan Peningkatan Pelayanan Kesehatan Bayi dan Balita	34.859,6	KEMENTERIAN KESEHATAN
Tenaga Kesehatan/ non-kesehatan yang ditingkatkan kapasitasnya Terkait Upaya Perbaikan Status Gizi dan Pemberian TTD Bagi Remaja (LP)	6.320,1	KEMENTERIAN KESEHATAN
Alat dan bahan kesehatan pencegahan dan pengendalian penyakit Filariasis dan Kecacingan (LP)	18.063,3	KEMENTERIAN KESEHATAN
Layanan survei faktor risiko penyakit diare (HS)	1.174,4	KEMENTERIAN KESEHATAN
<i>Aspek: Pemenuhan Intervensi Sensitif Stunting pada Sasaran Prioritas</i>		
Remaja usia 15-19 tahun yang mendapatkan edukasi gizi dan anemia dalam mendukung percepatan penurunan <i>Stunting</i>	10.000,0	BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL (BKKBN)
Pelatihan dan Refreshing dalam rangka percepatan penurunan <i>Stunting</i>	6.683,4	BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL (BKKBN)



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

Prioritas Nasional/ <i>Major Project</i>	Alokasi (Rp. Juta)	Instansi Pelaksana
Kampanye Percepatan Penurunan <i>Stunting</i> tingkat nasional	58.682,8	BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL (BKKBN)
Layanan Pusat Pengendali data <i>Stunting</i>	2.000,0	BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL (BKKBN)
Kebijakan Konvergensi Percepatan Penurunan <i>Stunting</i> bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Kota	1.000,0	BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL (BKKBN)
Sistem Informasi dan Sarana TI <i>Stunting</i>	15.000,0	BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL (BKKBN)
Rekomendasi kebijakan hasil Studi Kasus <i>Stunting</i> provinsi	4.800,0	BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL (BKKBN)
Penyelenggaraan koordinasi satgas Percepatan Penurunan <i>Stunting</i> Provinsi dan kab/kota	76.680,0	BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL (BKKBN)
Keluarga dengan baduta yang mendapatkan fasilitas dan pembinaan 1000 HPK	41.596,9	BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL (BKKBN)
Kampanye Percepatan Penurunan <i>Stunting</i> tingkat Provinsi dan kab/kota	135.000,0	BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL (BKKBN)
Pelatihan dan Refreshing dalam rangka percepatan penurunan <i>Stunting</i>	220.013,3	BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL (BKKBN)
Laporan Monitoring dan evaluasi TPKTTPS SATGAS percepatan penurunan <i>Stunting</i> provinsi kab/kota	6.600,0	BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL (BKKBN)
Kegiatan penyelenggaraan Sekretariat Percepatan Penurunan <i>Stunting</i> Pusat	11.000,0	BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL (BKKBN)
Layanan Humas Percepatan Penurunan <i>Stunting</i> tingkat Pusat	1.000,0	BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL (BKKBN)
Kegiatan penyelenggaraan Sekretariat Percepatan Penurunan <i>Stunting</i> Provinsi	24.945,4	BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL (BKKBN)
Layanan Humas Percepatan Penurunan <i>Stunting</i> tingkat Provinsi	4.200,0	BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL (BKKBN)
Layanan Pengawasan Kegiatan Percepatan Penurunan <i>Stunting</i> tk provinsi	2.288,2	BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL (BKKBN)
Provinsi yang mendapatkan fasilitas pengelolaan SDM Lini lapangan	1.100,0	BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL (BKKBN)
Penyelenggaraan koordinasi intensifikasi satgas Percepatan Penurunan <i>Stunting</i> Provinsi dan kab/kota pada 12 Provinsi prioritas	12.200,0	BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL (BKKBN)
Penguatan kualitas dan sistem data keluarga sasaran konvergensi percepatan penurunan <i>Stunting</i>	25.000,0	BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL (BKKBN)
Pelatihan bagi pelaksana PPKS dalam percepatan penurunan <i>Stunting</i>	21.581,9	BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL (BKKBN)
Pemberdayaan kampung KB dalam rangka penurunan <i>Stunting</i>	22.000,0	BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL (BKKBN)
Verifikasi dan validasi data keluarga sasaran konvergensi di 12 provinsi	16.800,0	BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL (BKKBN)
Pemerintah daerah yang mendapatkan fasilitas pengembangan DASHAT di Kampung KB pada 12 provinsi prioritas	6.000,0	BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL (BKKBN)
Fasilitasi dan koordinasi pendampingan perguruan tinggi/mahasiswa kepada pemda pemprov kab/kota	10.200,0	BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL (BKKBN)
Pelaksanaan pelatihan penanggulangan <i>Stunting</i> dan gerakan masyarakat sehat di kawasan perbatasan	700,0	BADAN NASIONAL PENGELOLA PERBATASAN (BNPP)
Laporan Koordinasi pengawasan pangan fortifikasi	2.321,0	BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

Prioritas Nasional/ <i>Major Project</i>	Alokasi (Rp. Juta)	Instansi Pelaksana
KIE Obat dan Makanan Aman oleh UPT	183.881,5	BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
Desa Pangan Aman	34.330,1	BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
Sampel pangan fortifikasi yang di periksa oleh UPT	1.791,3	BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
Rekomendasi Kebijakan Penanganan <i>Stunting</i> Berdasarkan Hasil Asesmen Komposisi Tubuh dengan Menggunakan Teknik Perunut Isotop Stabil	1.400,0	BADAN TENAGA NUKLIR NASIONAL (BATAN)
Bantuan Pengembangan Peningkatan Mutu UKS/M	6.500,0	KEMENTERIAN AGAMA
Daerah yang meningkat kapasitas aparaturnya dalam penilaian kinerja penanganan <i>Stunting</i>	800,0	KEMENTERIAN DALAM NEGERI
Desa yang Mendapatkan Penanganan Konvergensi <i>Stunting</i>	11.384,4	KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI
Kampanye Gerakan Memasyarakatkan Makan Ikan (Gemarikan)	33.300,0	KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
Promosi Produk Kelautan dan Perikanan di Dalam Negeri oleh daerah	3.400,0	KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
Pelatihan Keterampilan dan Kompetensi Lainnya pada Proyek Penguatan Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak (IsDB)	4.039,5	KEMENTERIAN KESEHATAN
Fasilitasi Pengelolaan Manajemen Proyek Penguatan Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak (IsDB)	31.859,0	KEMENTERIAN KESEHATAN
Pelaksanaan Pendidikan Formal Tenaga RS pada Proyek Penguatan Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak (IsDB)	4.324,1	KEMENTERIAN KESEHATAN
Kampanye Posyandu Aktif (LP)	17.081,5	KEMENTERIAN KESEHATAN
Workshop Pelayanan Kesehatan Reproduksi bagi Korban KtPA/TPPO dan Penyandang Disabilitas	2.189,6	KEMENTERIAN KESEHATAN
Pelatihan <i>Stunting</i> (SDM)	5.573,4	KEMENTERIAN KESEHATAN
Diseminasi Informasi mengenai <i>Stunting</i>	15.700,0	KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
Infrastruktur Air Minum Berbasis Masyarakat	491.110,0	KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
Daerah yang Diberikan Bimtek dan Supervisi tentang Pelaksanaan Kebijakan PHA atas Kesehatan (<i>Stunting</i>)	840,0	KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
Kajian dan Pengembangan Model Bidang Pendidikan Anak Usia Dini dan Parenting di Kawasan Asia Tenggara	1.097,1	KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
SMK yang Melaksanakan Program UKS	3.705,8	KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
Satuan PAUD Menyelenggarakan Pendekatan Holistik Integratif	31.666,4	KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
Satuan PAUD yang melaksanakan program UKS	9.080,3	KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
SD yang Melaksanakan Program UKS	14.529,7	KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
SMP yang Melaksanakan Program UKS	4.691,6	KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
SMA yang melaksanakan program UKS	3.705,8	KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
Lembaga Pendidikan Masyarakat dan Pendidikan Khusus yang Melaksanakan Program UKS	7.285,0	KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

Prioritas Nasional/ Major Project	Alokasi (Rp. Juta)	Instansi Pelaksana
KPM Yang Memperoleh Bantuan Sosial Sembako	45.120.000,0	KEMENTERIAN SOSIAL
Keluarga Yang Mendapat Bantuan Sosial Bersyarat	28.735.328,0	KEMENTERIAN SOSIAL
19) MP: Pembangunan Science Techno Park (Optimalisasi Triple Helix di 4 Major Universitas)		
Dukungan Belanja K/L	456.691,6	
<i>Aspek: Penyediaan Sarana</i>		
Sarana Perguruan Tinggi Yang Direvitalisasi (SBSN) - Kota Bandung	42.246,0	KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
Sarana Perguruan Tinggi Yang Direvitalisasi (SBSN) - Kota Depok	31.152,3	KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
Sarana Perguruan Tinggi Yang Direvitalisasi (PHLN) - Kab. Sleman	55.433,5	KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
<i>Aspek: Pengembangan Prasarana</i>		
Prasarana Perguruan Tinggi Yang Dibangun (PHLN) - Pusat	100,0	KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
Prasarana Perguruan Tinggi Yang Dibangun (SBSN) - Kota Bandung	292.393,0	KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
Prasarana Perguruan Tinggi Yang Dibangun (SBSN) - Kota Depok	31.860,7	KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
Prasarana Perguruan Tinggi Yang Dibangun (PHLN) - Kab. Sleman	3.506,1	KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
20) MP: Pendidikan dan Pelatihan Vokasi untuk Industri 4.0		
Dukungan Belanja K/L	635.688,1	
<i>Sub: Revitalisasi SMK yang mendukung Industri 4.0</i>		
<i>Aspek: Revitalisasi SMK yang Mendukung Industri 4.0</i>		
SMK yang Dikembangkan Berbasis Industri 4.0	72.212,5	KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
<i>Sub: Sistem Informasi Pasar Kerja</i>		
<i>Aspek: Revitalisasi Sistem Informasi Pasar Kerja</i>		
Layanan Job Matching	9.900,0	KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN
Layanan Analisis Pasar Kerja Dalam Negeri dan Luar Negeri	1.583,7	KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN
Pembangunan dan Pengembangan Aplikasi SIAP Kerja	15.270,0	KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN
Layanan Analisis Kebutuhan Pelatihan Kerja Dalam Negeri/Luar Negeri	2.007,1	KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN
<i>Sub: Transformasi Balai Latihan Kerja (BLK)</i>		
<i>Aspek: Reformasi Kelembagaan</i>		
Transformasi BLK Baru	83.747,8	KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN
<i>Aspek: Peningkatan Kualitas Pelatihan</i>		
Lembaga Pelatihan Kerja dan Produktivitas yang Ditingkatkan Kualitas Mutu dan Lembaga	28.711,3	KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN
Sarana dan Prasarana Bidang Pelatihan dan Produktivitas	316.192,2	KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

Prioritas Nasional/ Major Project	Alokasi (Rp. Juta)	Instansi Pelaksana
<i>Sub: Revitalisasi Pendidikan Tinggi Vokasi</i>		
<i>Aspek: Peningkatan Kompetensi dan Keahlian Mahasiswa Pendidikan Tinggi Vokasi</i>		
Mahasiswa Pendidikan Tinggi Vokasi Yang Mengikuti Uji Kompetensi Profesi	4.743,5	KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
<i>Aspek: Peningkatan Kapasitas Tenaga Pendidik</i>		
SDM Pendidikan Tinggi Vokasi yang mengikuti Peningkatan Kompetensi	17.820,2	KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
<i>Aspek: Penguatan Kelembagaan Pendidikan Tinggi Vokasi</i>		
Pendidikan Tinggi Vokasi yang menerapkan Penguatan Mutu Berstandar Industri	83.500,0	KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
21) MP: Reformasi Sistem Perlindungan Sosial		
Dukungan Belanja K/L	141.402.613,0	
<i>Sub: Pengembangan Registrasi Sosial Ekonomi</i>		
<i>Aspek: Sinkronisasi dan Integrasi Data untuk Penargetan Perlindungan Sosial</i>		
Rancang Bangun Sistem PB	1.210,0	BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA (BNPB)
Sistem Informasi Bidang Kebencanaan	1.500,0	BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA (BNPB)
Pemenuhan Kebutuhan Logistik PB	5.000,0	BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA (BNPB)
Daerah yang Menerapkan Sistem Informasi Keuangan Daerah dalam SIPD Bidang Perencanaan Anggaran	1.450,0	KEMENTERIAN DALAM NEGERI
Data Center Nasional	1.189.085,0	KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
Standar Instrumen Ketahanan Bencana dan Perubahan Iklim	3.500,0	KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
Warga masyarakat dilokasi rawan bencana yang difasilitasi kampung siaga bencana	20.879,2	KEMENTERIAN SOSIAL
Tagana yang ditingkatkan kompetensinya dan ditugaskan dalam penanganan bencana	10.255,3	KEMENTERIAN SOSIAL
Tagana yang mendapatkan kelengkapan siaga bencana	92.606,6	KEMENTERIAN SOSIAL
Sistem Asesmen dan Layanan Sosial Anak yang Terintegrasi	5.500,0	KEMENTERIAN SOSIAL
<i>Aspek: Peningkatan Cakupan Data dari Desa/Kelurahan</i>		
Publikasi/Laporan Pendataan Awal Registrasi Sosial Ekonomi	872.266,5	BADAN PUSAT STATISTIK
Pelatihan Aparat Pemerintahan Desa dan Pengurus Lembaga Kemasyarakatan Desa Lingkup Regional	11.558,7	KEMENTERIAN DALAM NEGERI
Pendampingan Desa	1.542.999,0	KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI
Sistem Informasi Terintegrasi Data Tunggal UMKM	7.162,9	KEMENTERIAN KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH
Sistem dan Teknologi Informasi Kesejahteraan Sosial	11.928,1	KEMENTERIAN SOSIAL



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

Prioritas Nasional/ Major Project	Alokasi (Rp. Juta)	Instansi Pelaksana
<i>Aspek: Pengelolaan Data</i>		
Provinsi yang Melaksanakan Upaya Kesehatan Produktif dan Lansia (LP)	4.693,5	KEMENTERIAN KESEHATAN
Kabupaten/Kota yang menyelenggarakan layanan pengaduan penanggulangan kemiskinan terintegrasi dengan Command Center	17.487,4	KEMENTERIAN SOSIAL
Desa/ Kelurahan yang menyelenggarakan layanan pengaduan penanggulangan kemiskinan terintegrasi dengan Command Center	1.268,8	KEMENTERIAN SOSIAL
Kabupaten /Kota yang mengembangkan SLRT	17.487,4	KEMENTERIAN SOSIAL
Desa/ Kelurahan yang menyelenggarakan Puskesmas	1.268,8	KEMENTERIAN SOSIAL
PSKS Perorangan yang Meningkatkan Peran Aktifnya dalam Pelayanan Sosial	103.964,6	KEMENTERIAN SOSIAL
<i>Sub: Penguatan Bantuan Sosial</i>		
<i>Aspek: Perluasan Pilihan KPM dan Pengembangan Skema Penyaluran</i>		
Rekomendasi Pengembangan Desa Digital melalui <i>Smart Village</i>	43.210,0	KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI
Implementasi Digitalisasi Penyaluran Bantuan Sosial (PN)	304,1	KEMENTERIAN KEUANGAN
Literasi Digital	550.000,0	KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
Data Terpadu Kesejahteraan Sosial	11.547,4	KEMENTERIAN SOSIAL
Pengasuhan Alternatif (adopsi <i>single parent</i> dan <i>Inter country</i>)	1.710,0	KEMENTERIAN SOSIAL
<i>Aspek: Penguatan Sistem Pendukung</i>		
Pedoman terkait Peningkatan kualitas hidup lansia melalui pendampingan keluarga	200,0	BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL (BKKBN)
Tenaga Pendamping Profesional (TPP) yang ditingkatkan kapasitasnya	52.580,0	KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI
Fasilitasi Pengembangan BUMDesa Bersama	10.100,0	KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI
Fasilitasi Pengembangan BUMDesa	64.507,5	KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI
Pengembangan Pemberdayaan Masyarakat Desa DTT	1.277,0	KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI
Kelompok Masyarakat yang Difasilitasi dan Dibina Kebugaran Jasmani (LP)	1.683,9	KEMENTERIAN KESEHATAN
Tenaga Kesehatan yang ditingkatkan kapasitas Kesehatan Lansia Dan Implementasi Standar Pelayanan Geriatri Yang Berkualitas (LP)	1.017,0	KEMENTERIAN KESEHATAN
Solusi Ekosistem	137.684,0	KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
Akses Internet	422.320,0	KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
Akses Internet Papua dan Papua Barat	137.878,4	KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
Kapasitas Penyuluh dan/atau pendamping yang handal	2.538,6	KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
Insentif Kinerja Penyuluh Pertanian	212.363,0	KEMENTERIAN PERTANIAN
Pelatihan Pertanian bagi Non Aparatur	39.461,6	KEMENTERIAN PERTANIAN
Jaringan Komunikasi Data	51.029,1	KEMENTERIAN SOSIAL



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

Prioritas Nasional/ <i>Major Project</i>	Alokasi (Rp. Juta)	Instansi Pelaksana
Pendamping yang mendapatkan pengembangan kapasitas (Penyandang Disabilitas)	3.480,0	KEMENTERIAN SOSIAL
Pendamping yang mendapatkan pengembangan kapasitas (Anak)	2.625,2	KEMENTERIAN SOSIAL
Pendamping yang mendapatkan pengembangan kapasitas (Lanjut Usia)	2.630,0	KEMENTERIAN SOSIAL
Pendamping yang mendapatkan pengembangan kapasitas	3.200,0	KEMENTERIAN SOSIAL
Anak sekolah yang mendapatkan edukasi bencana	1.159,3	KEMENTERIAN SOSIAL
Literasi Khusus bagi Penyandang Disabilitas Netra	3.642,0	KEMENTERIAN SOSIAL
Pendamping yang mendapatkan pengembangan kapasitas (KP NAPZA)	3.200,0	KEMENTERIAN SOSIAL
Sumber Daya Manusia yang dikelola	1.420.467,0	KEMENTERIAN SOSIAL
Pendamping Rehabilitasi Sosial yang Mendapatkan Honorarium	88.188,0	KEMENTERIAN SOSIAL
<i>Aspek: Integrasi dan Transformasi Program Bantuan Sosial</i>		
Santri PPS Ula/ Paket A/ Hanya Mengaji/ Muadalah Penerima PIP	10.569,2	KEMENTERIAN AGAMA
Siswa Madrasah MI Penerima PIP	423.123,2	KEMENTERIAN AGAMA
Siswa SMTK/ SMAK Penerima PIP	11.147,0	KEMENTERIAN AGAMA
Santri PPS Wustha/ Paket B/ Hanya Mengaji/ Muadalah Terima PIP	69.399,8	KEMENTERIAN AGAMA
Siswa Madrasah MTs Penerima PIP	558.814,5	KEMENTERIAN AGAMA
Siswa SMPK Penerima PIP	3.736,5	KEMENTERIAN AGAMA
Siswa Madrasah MA Penerima PIP	320.372,0	KEMENTERIAN AGAMA
Siswa SDTK Penerima PIP	1.087,7	KEMENTERIAN AGAMA
Santri PPS Ulya/ Paket C/ Hanya Mengaji/ Muadalah Penerima PIP	45.571,0	KEMENTERIAN AGAMA
Siswa SMAK Penerima PIP	2.078,0	KEMENTERIAN AGAMA
Penyediaan Elpiji 3 kg yang tepat sasaran bagi Masyarakat, Usaha Mikro, Nelayan, dan Petani Sasaran	3.090,1	KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya	3.184.824,0	KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT (Terintegrasi dengan PSN)
Siswa SD/ Paket A Yang Mendapatkan Program Indonesia Pintar	2.830.650,0	KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
Siswa SMP/ Paket B Yang Mendapatkan Program Indonesia Pintar	2.726.502,0	KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
Siswa SMA/ Paket C Yang Mendapatkan Program Indonesia Pintar	1.183.707,0	KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
Siswa SMK Yang Mendapatkan Program Indonesia Pintar	1.538.461,0	KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
Warga Masyarakat Rawan Bencana Sosial yang Mendapat Bantuan	19.642,0	KEMENTERIAN SOSIAL
Korban bencana alam yang mendapatkan bantuan logistik tanggap darurat	128.885,1	KEMENTERIAN SOSIAL
Rekomendasi Penanganan Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas	8.000,0	KEMENTERIAN SOSIAL



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

Prioritas Nasional/ Major Project	Alokasi (Rp. Juta)	Instansi Pelaksana
Penyandang Disabilitas yang Mendapatkan Asistensi Rehabilitasi Sosial	171.582,9	KEMENTERIAN SOSIAL
Lembaga yang Mendapatkan Pengembangan Kapasitas (Penyandang Disabilitas)	6.960,0	KEMENTERIAN SOSIAL
Rekomendasi Penanganan Rehabilitasi Sosial Lanjut Usia	1.645,0	KEMENTERIAN SOSIAL
Lanjut Usia yang Mendapatkan Asistensi Rehabilitasi Sosial	142.566,0	KEMENTERIAN SOSIAL
Lembaga yang Mendapatkan Pengembangan Kapasitas (Lanjut Usia)	5.400,0	KEMENTERIAN SOSIAL
Warga KAT Yang Mendapat Pemberdayaan Tahun I	72.270,5	KEMENTERIAN SOSIAL
Rekomendasi Penanganan Rehabilitasi Sosial Korban Penyalahgunaan NAPZA	1.900,0	KEMENTERIAN SOSIAL
Korban Penyalahgunaan NAPZA yang Mendapatkan Asistensi Rehabilitasi Sosial	39.138,3	KEMENTERIAN SOSIAL
Lembaga yang Mendapatkan Pengembangan Kapasitas (KP NAPZA)	6.320,0	KEMENTERIAN SOSIAL
Rekomendasi Penanganan Rehabilitasi Sosial Anak yang Membutuhkan Perlindungan Khusus	1.929,4	KEMENTERIAN SOSIAL
Anak yang Membutuhkan Perlindungan Khusus yang Mendapatkan Asistensi Rehabilitasi Sosial	109.580,5	KEMENTERIAN SOSIAL
Lembaga yang Mendapatkan Pengembangan Kapasitas (Anak)	6.350,0	KEMENTERIAN SOSIAL
Layanan Penyelenggaraan Program Kartu Sembako	122.063,2	KEMENTERIAN SOSIAL
KPM Yang Memperoleh Bantuan Sosial Sembako	45.120.000,0	KEMENTERIAN SOSIAL
Sistem Assesmen dan Layanan Sosial Penyandang Disabilitas yang Terintegrasi	5.500,0	KEMENTERIAN SOSIAL
Alat Bantu Aksesibilitas Penyandang Disabilitas	55.600,0	KEMENTERIAN SOSIAL
Sistem Assesmen dan Layanan Sosial Lanjut Usia yang Terintegrasi	5.500,0	KEMENTERIAN SOSIAL
Korban bencana alam yang mendapatkan bantuan pemulihan sosial dan layanan dukungan psikososial	21.526,7	KEMENTERIAN SOSIAL
Korban Penyalahgunaan Napza dan Orang Dengan HIV Yang Mendapatkan Asistensi Rehabilitasi Sosial	24.000,0	KEMENTERIAN SOSIAL
Anak Berhadapan dengan Hukum yang mendapatkan Asistensi Rehabilitasi Sosial	1.621,6	KEMENTERIAN SOSIAL
Keluarga Yang Mendapat Bantuan Sosial Bersyarat	28.735.328,0	KEMENTERIAN SOSIAL
<i>Sub: Penguatan Integrasi Kepesertaan dan Informasi Jaminan Sosial</i>		
<i>Aspek: Integrasi Data Jaminan Sosial</i>		
Pelayanan koneksitas warehouse berbasis NIK Nasional	4.913,6	KEMENTERIAN DALAM NEGERI
Nelayan yang diidentifikasi identitasnya dalam rangka perlindungan nelayan	2.000,0	KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
Cakupan penduduk yang menjadi Penerima Bantuan Iuran (PBI) dalam JKN/KIS (PK)	46.464.000,0	KEMENTERIAN KESEHATAN
<i>Aspek: Integrasi dan Perluasan Kepesertaan</i>		
Instansi Pengguna Pegawai Non PNS dan Wadah/Kelompok Pekerja Bukan Penerima Upah yang Mendapatkan Pemahaman Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja	1.800,0	KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

Prioritas Nasional/ Major Project	Alokasi (Rp. Juta)	Instansi Pelaksana
Kajian dan Telaahan Penyelenggaraan SJSN	6.000,0	KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN
22) MP: Reformasi Sistem Kesehatan Nasional		
Dukungan Belanja K/L dan DAK	23.277.528,8	
<i>Aspek: Peningkatan Kapasitas RS dan Pelayanan Kesehatan di Daerah Tertinggal, Perbatasan, dan Kepulauan</i>		
Penguatan Sistem Kesehatan (91 - Provinsi Papua Barat)	34.051,8	DAK
Penguatan Sistem Kesehatan (94 - Provinsi Papua)	119.903,2	DAK
Penguatan Sistem Kesehatan (11 - Provinsi Aceh)	36.301,2	DAK
Penguatan Sistem Kesehatan (12 - Provinsi Sumatera Utara)	77.228,2	DAK
Penguatan Sistem Kesehatan (1201 - Kab. Nias)	13.341,9	DAK
Penguatan Sistem Kesehatan (13 - Provinsi Sumatera Barat)	142.793,0	DAK
Penguatan Sistem Kesehatan (1302 - Kab. Pesisir Selatan)	8.052,0	DAK
Penguatan Sistem Kesehatan (1309 - Kab. Pasaman)	27.161,7	DAK
Penguatan Sistem Kesehatan (1311 - Kab. Dharmasraya)	19.576,7	DAK
Penguatan Sistem Kesehatan (1372 - Kota Solok)	3.231,0	DAK
Penguatan Sistem Kesehatan (14 - Provinsi Riau)	102.093,4	DAK
Penguatan Sistem Kesehatan (1408 - Kab. Bengkalis)	62.253,5	DAK
Penguatan Sistem Kesehatan (1473 - Kota Dumai)	17.346,5	DAK
Penguatan Sistem Kesehatan (15 - Provinsi Jambi)	106.685,6	DAK
Penguatan Sistem Kesehatan (16 - Provinsi Sumatera Selatan)	3.379,2	DAK
Penguatan Sistem Kesehatan (17 - Provinsi Bengkulu)	112.699,0	DAK
Penguatan Sistem Kesehatan (1701 - Kab. Bengkulu Selatan)	11.525,1	DAK
Penguatan Sistem Kesehatan (1704 - Kab. Kaur)	2.711,0	DAK
Penguatan Sistem Kesehatan (1706 - Kab. Mukomuko)	61.488,4	DAK
Penguatan Sistem Kesehatan (1709 - Kab. Bengkulu Tengah)	4.271,0	DAK
Penguatan Sistem Kesehatan (1810 - Kab. Pringsewu)	3.674,1	DAK
Penguatan Sistem Kesehatan (19 - Provinsi Kepulauan Bangka Belitung)	23.931,6	DAK
Penguatan Sistem Kesehatan (1902 - Kab. Belitung)	24.065,4	DAK
Penguatan Sistem Kesehatan (21 - Provinsi Kepulauan Riau)	107.990,9	DAK
Penguatan Sistem Kesehatan (32 - Provinsi Jawa Barat)	15.093,0	DAK



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

Prioritas Nasional/ Major Project	Alokasi (Rp. Juta)	Instansi Pelaksana
Penguatan Sistem Kesehatan (3309 - Kab. Boyolali)	41.742,6	DAK
Penguatan Sistem Kesehatan (3323 - Kab. Temanggung)	5.442,0	DAK
Penguatan Sistem Kesehatan (3402 - Kab. Bantul)	15.535,5	DAK
Penguatan Sistem Kesehatan (35 - Provinsi Jawa Timur)	7.593,9	DAK
Penguatan Sistem Kesehatan (3510 - Kab. Banyuwangi)	16.924,3	DAK
Penguatan Sistem Kesehatan (3515 - Kab. Sidoarjo)	13.335,6	DAK
Penguatan Sistem Kesehatan (3527 - Kab. Sampang)	22.504,6	DAK
Penguatan Sistem Kesehatan (36 - Provinsi Banten)	25.092,6	DAK
Penguatan Sistem Kesehatan (51 - Provinsi Bali)	31.653,1	DAK
Penguatan Sistem Kesehatan (5102 - Kab. Tabanan)	18.925,1	DAK
Penguatan Sistem Kesehatan (5106 - Kab. Bangli)	8.886,5	DAK
Penguatan Sistem Kesehatan (52 - Provinsi Nusa Tenggara Barat)	32.808,0	DAK
Penguatan Sistem Kesehatan (53 - Provinsi Nusa Tenggara Timur)	22.289,6	DAK
Penguatan Sistem Kesehatan (61 - Provinsi Kalimantan Barat)	70.424,0	DAK
Penguatan Sistem Kesehatan (62 - Provinsi Kalimantan Tengah)	91.961,1	DAK
Penguatan Sistem Kesehatan (6207 - Kab. Lamandau)	17.284,5	DAK
Penguatan Sistem Kesehatan (63 - Provinsi Kalimantan Selatan)	51.550,4	DAK
Penguatan Sistem Kesehatan (65 - Provinsi Kalimantan Utara)	7.551,0	DAK
Penguatan Sistem Kesehatan (71 - Provinsi Sulawesi Utara)	87.844,7	DAK
Penguatan Sistem Kesehatan (72 - Provinsi Sulawesi Tengah)	75.096,5	DAK
Penguatan Sistem Kesehatan (73 - Provinsi Sulawesi Selatan)	19.123,5	DAK
Penguatan Sistem Kesehatan (74 - Provinsi Sulawesi Tenggara)	50.978,8	DAK
Penguatan Sistem Kesehatan (76 - Provinsi Sulawesi Barat)	90.282,4	DAK
Penguatan Sistem Kesehatan (82 - Provinsi Maluku Utara)	50.511,2	DAK
Peningkatan Pasokan Tenaga Listrik 24 Jam/Hari	250,0	KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
Pengembangan fasilitas rujukan Kawasan Indonesia Timur	400.000,0	KEMENTERIAN KESEHATAN
Peningkatan Mutu melalui Akreditasi dan Pengukuran Indikator Mutu Pelayanan Kesehatan di FKRTL (LR)	4.294,9	KEMENTERIAN KESEHATAN
Rekomendasi Kebijakan Pengembangan RS di Bidang Klinis (IsDB) - LR	6.596,4	KEMENTERIAN KESEHATAN



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

Prioritas Nasional/ <i>Major Project</i>	Alokasi (Rp. Juta)	Instansi Pelaksana
Peningkatan Sistem Teknologi Informasi dan Komunikasi Proyek IsDB - LR	3.147,2	KEMENTERIAN KESEHATAN
Fasilitasi Pengelolaan Proyek Penguatan RS Rujukan Nasional dan UPT Vertikal (IsDB) (LR)	97.280,0	KEMENTERIAN KESEHATAN
Rekam Medis Elektronik di Rumah Sakit Rujukan Nasional, Provinsi, Regional dan RS Kelas A dan B	3.028,9	KEMENTERIAN KESEHATAN
Rekomendasi Kebijakan Pengembangan RS dalam meningkatkan sistem rujukan (IsDB) - LR	2.410,7	KEMENTERIAN KESEHATAN
Fasilitasi Pengelolaan Manajemen Proyek Penguatan Pusat Pelayanan Kanker Terpadu (IsDB) - LR	26.769,2	KEMENTERIAN KESEHATAN
Pembinaan, Pendampingan dan Bimbingan Teknis Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Bergerak (LP)	2.316,3	KEMENTERIAN KESEHATAN
Pedoman dalam rangka pemenuhan SP fasyankes lainnya	1.500,0	KEMENTERIAN KESEHATAN
Alat Kesehatan Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak (IsDB) - LR	205.904,2	KEMENTERIAN KESEHATAN
Pelatihan Keterampilan dan Kompetensi Lainnya pada Proyek Penguatan Pelayanan Kanker Terpadu (IsDB) - LR	15.561,1	KEMENTERIAN KESEHATAN
Pembangunan dan Pengembangan RS UPT Vertikal Surabaya	815.851,8	KEMENTERIAN KESEHATAN
Pembangunan dan Pengembangan RS UPT Vertikal Makassar	909.753,5	KEMENTERIAN KESEHATAN
Pelatihan Gangguan Indera dan Fungsional (LP)	1.645,6	KEMENTERIAN KESEHATAN
Dukungan peningkatan Mutu, Akreditasi, Keselamatan pasien di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Dekonsentrasi) (LR)	41.236,1	KEMENTERIAN KESEHATAN
OM Akses Internet	1.850.097,0	KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
OM Akses Internet Papua dan Papua Barat	119.045,6	KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
Angkutan Udara Perintis	381.352,9	KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
Peningkatan Kapasitas RS Kemhan-TNI	920.885,9	KEMENTERIAN PERTAHANAN
Pemenuhan Rumah Sakit Polri (PN)	100.000,0	KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
<i>Aspek: Penguatan Keamanan dan Ketahanan Kesehatan</i>		
Laboratorium pengawasan Obat dan Makanan yang sesuai Good Laboratory Practice	74.925,2	BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
Sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) aman	25.717,7	BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
Sampel Makanan yang Diperiksa oleh UPT	19.563,2	BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
Sarana Produksi Obat dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT	7.998,8	BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
Alat Laboratorium pengawasan Obat dan Makanan yang sesuai Good Laboratory Practice	100.000,0	BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
Industri Pangan Olahan yang Menerapkan Program Manajemen Risiko	5.066,6	BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
Kab/kota yang melaksanakan pengawasan produksi pangan olahan industri rumah tangga sesuai standar	3.438,0	BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
Keputusan Penilaian Sarana Distribusi Obat yang Diselesaikan Sesuai Standar	1.025,8	BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

Prioritas Nasional/ <i>Major Project</i>	Alokasi (Rp. Juta)	Instansi Pelaksana
Keputusan Hasil Pengawasan Sarana Distribusi Obat dan Sarana Pelayanan Kefarmasian yang Diselesaikan	8.736,4	BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
Surat Keterangan Ekspor Impor Obat, Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor yang Diselesaikan Tepat Waktu	1.063,1	BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
Kabupaten/Kota yang melaksanakan pengawasan post market pangan olahan sesuai standar	4.074,9	BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
Fasilitas produksi produk JKN dan produk high risk lainnya serta bahan baku obat yang diawasi sesuai standar	2.983,9	BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
Jejaring Laboratorium Pengujian Obat dan Makanan yang Berpartisipasi Aktif	1.867,5	BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
Sistem laboratorium pengawasan Obat dan Makanan yang sesuai dengan <i>Grand Design</i>	5.657,0	BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
Berkas Perkara yang diselesaikan hingga Tahap I	8.089,3	BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
Rekomendasi Kebijakan Pengawasan Obat dan Makanan yang dimanfaatkan	15.738,6	BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
Pengawas Obat dan Makanan yang tersertifikasi sesuai standar	18.470,0	BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
Sistem Informasi Pengawasan Obat dan Makanan yang Real time, dikembangkan dan terintegrasi	24.991,4	BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
KIE Obat dan Makanan Aman oleh UPT	183.881,5	BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
Laboratorium BB/BPOM yang meningkat kapasitasnya untuk memenuhi standar Good Laboratory Practices (GLP)	2.666,6	BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
Sarana Distribusi Obat, Obat Tradisional, Kosmetik, Suplemen Kesehatan dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT	48.382,5	BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
Sampel Obat, Obat Tradisional, Kosmetik dan Suplemen Kesehatan yang Diperiksa Sesuai Standar oleh UPT	34.319,0	BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
Pengembangan dan Penerapan Teknologi BSL-3 (<i>BIOSAFETY LEVEL 3</i>)	239,1	BADAN RISET DAN INOVASI NASIONAL (BRIN)
Penguatan Sistem Kesehatan (1403 - Kab. Indragiri Hilir)	6.469,5	DAK
Penguatan Sistem Kesehatan (3302 - Kab. Banyumas)	4.949,5	DAK
Penguatan Sistem Kesehatan (3305 - Kab. Kebumen)	5.796,3	DAK
Penguatan Sistem Kesehatan (3310 - Kab. Klaten)	5.595,7	DAK
Penguatan Sistem Kesehatan (3319 - Kab. Kudus)	3.120,2	DAK
Penguatan Sistem Kesehatan (3325 - Kab. Batang)	6.837,8	DAK
Penguatan Sistem Kesehatan (3328 - Kab. Tegal)	35.603,0	DAK
Penguatan Sistem Kesehatan (3502 - Kab. Ponorogo)	5.655,8	DAK
Penguatan Sistem Kesehatan (3508 - Kab. Lumajang)	5.696,6	DAK
Penguatan Sistem Kesehatan (3524 - Kab. Lamongan)	5.509,5	DAK
Penguatan Sistem Kesehatan (3572 - Kota Blitar)	2.376,8	DAK
Penguatan Sistem Kesehatan (6208 - Kab. Seruyan)	7.850,7	DAK



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

Prioritas Nasional/ <i>Major Project</i>	Alokasi (Rp. Juta)	Instansi Pelaksana
Sosialisasi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Potensial KLB/Wabah (HS)	7.809,1	KEMENTERIAN KESEHATAN
NSPK Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Potensial KLB/Wabah (HS)	1.015,3	KEMENTERIAN KESEHATAN
Koordinasi Pelaksanaan Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Potensial KLB/Wabah (HS)	4.330,6	KEMENTERIAN KESEHATAN
Monitoring dan Supervisi Surveilans dan Respon KLB/Wabah (HS)	5.021,6	KEMENTERIAN KESEHATAN
Koordinasi Pelayanan Kekarantinaan di Pintu Masuk Negara dan Wilayah (HS)	17.083,7	KEMENTERIAN KESEHATAN
Sosialisasi dan Diseminasi (HS)	1.814,8	KEMENTERIAN KESEHATAN
Pengadaan alat dan bahan kekarantinaan kesehatan di pintu masuk (HS)	56.596,7	KEMENTERIAN KESEHATAN
Koordinasi pelaksanaan Surveilans dan Laboratorium Kesehatan Masyarakat untuk Pencegahan dan Pengendalian Penyakit (HS)	1.830,6	KEMENTERIAN KESEHATAN
Kalibrasi alat laboratorium (HS)	3.262,5	KEMENTERIAN KESEHATAN
Pemeriksaan sampel penyakit dan lingkungan (HS)	5.774,2	KEMENTERIAN KESEHATAN
Pengadaan alat dan bahan laboratorium (HS)	32.487,8	KEMENTERIAN KESEHATAN
Pemeliharaan alat kesehatan (HS)	4.954,0	KEMENTERIAN KESEHATAN
Tenaga Kesehatan yang dilatih terkait Manajemen Laboratorium Kesehatan Masyarakat (LP)	1.498,3	KEMENTERIAN KESEHATAN
Tenaga Kesehatan yang dilatih terkait Manajemen Laboratorium Kesehatan Masyarakat (LP)	9.599,0	KEMENTERIAN KESEHATAN
Pengadaan Alat dan Bahan Kesehatan Kekarantinaan Kesehatan (HS)	97.993,3	KEMENTERIAN KESEHATAN
Pendidikan dan Pelatihan Kekarantinaan Kesehatan di Pintu Masuk (HS)	7.657,4	KEMENTERIAN KESEHATAN
Pelatihan Surveilans dan Respon KLB/ Wabah	5.911,2	KEMENTERIAN KESEHATAN
Fasilitasi, Monitoring Surveilans dan Respon KLB/Wabah	5.349,5	KEMENTERIAN KESEHATAN
Layanan deteksi dini dan respon kejadian penyakit menular (HS)	32.724,1	KEMENTERIAN KESEHATAN
Pemantauan dan Monev Penyelenggaraan Laboratorium Kesehatan Masyarakat (LP)	1.725,3	KEMENTERIAN KESEHATAN
Pengadaan Alat dan Bahan Kesehatan Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Infeksi Emerging (HS)	1.769,1	KEMENTERIAN KESEHATAN
Surveilans dan Deteksi Dini Penyakit Infeksi Emerging (HS)	672,5	KEMENTERIAN KESEHATAN
Monitoring dan Supervisi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Infeksi Emerging (HS)	1.489,2	KEMENTERIAN KESEHATAN
Kab/kota yang dibina dalam pemenuhan kualitas kesehatan lingkungan	8.473,5	KEMENTERIAN KESEHATAN
Rekomendasi Kebijakan Pembaharuan Sistem Kesehatan Nasional (LP)	1.124,8	KEMENTERIAN KESEHATAN
Surveilans dan Deteksi Dini Penyakit Potensial KLB/Wabah (HS)	2.001,8	KEMENTERIAN KESEHATAN
Pengadaan Alat dan Bahan Kesehatan Pengendalian Vektor (HS)	17.743,0	KEMENTERIAN KESEHATAN
Media Komunikasi, Informasi, Edukasi Pengendalian Vektor dan Binatang Pembawa Penyakit (HS)	1.449,3	KEMENTERIAN KESEHATAN



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

Prioritas Nasional/ Major Project	Alokasi (Rp. Juta)	Instansi Pelaksana
Pengadaan Sarana, Prasarana, Alat dan Bahan Kesehatan Surveilans Berbasis Laboratorium (HS)	1.882,8	KEMENTERIAN KESEHATAN
Respon Kedaruratan Kesehatan Masyarakat (HS)	1.071,9	KEMENTERIAN KESEHATAN
Monitoring dan Supervisi Surveilans Berbasis Laboratorium (HS)	2.293,3	KEMENTERIAN KESEHATAN
Rencana Kontinjensi dan Simulasi Kedaruratan Kesehatan Masyarakat (KKM) (HS)	4.164,0	KEMENTERIAN KESEHATAN
Surveilans dan Pengendalian Vektor dan Binatang Pembawa Penyakit (HS)	4.607,7	KEMENTERIAN KESEHATAN
Pengamatan dan Identifikasi Penyakit Hewan	71.620,2	KEMENTERIAN PERTANIAN
Pelayanan Kesehatan Hewan	1.321.111,0	KEMENTERIAN PERTANIAN
<i>Aspek: Penguatan Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP)</i>		
Penguatan Sistem Kesehatan (8207 - Kab. Pulau Morotai)	41.047,4	DAK
Penguatan Sistem Kesehatan (8208 - Kab. Pulau Taliabu)	899,6	DAK
Penguatan Sistem Kesehatan (8271 - Kota Ternate)	2.250,0	DAK
Penguatan Sistem Kesehatan (8272 - Kota Tidore Kepulauan)	4.723,7	DAK
Penguatan Sistem Kesehatan (9101 - Kab. Fak Fak)	53.310,3	DAK
Penguatan Sistem Kesehatan (9102 - Kab. Kaimana)	3.284,9	DAK
Penguatan Sistem Kesehatan (9103 - Kab. Teluk Wondama)	95.214,7	DAK
Penguatan Sistem Kesehatan (9104 - Kab. Teluk Bintuni)	77.249,4	DAK
Penguatan Sistem Kesehatan (9105 - Kab. Manokwari)	15.845,4	DAK
Penguatan Sistem Kesehatan (9106 - Kab. Sorong Selatan)	67.975,2	DAK
Penguatan Sistem Kesehatan (9107 - Kab. Sorong)	94.697,6	DAK
Penguatan Sistem Kesehatan (9108 - Kab. Raja Ampat)	19.713,2	DAK
Penguatan Sistem Kesehatan (9109 - Kab. Tambrauw)	67.745,1	DAK
Penguatan Sistem Kesehatan (9110 - Kab. Maybrat)	95.274,4	DAK
Penguatan Sistem Kesehatan (9111 - Kab. Manokwari Selatan)	622,7	DAK
Penguatan Sistem Kesehatan (9112 - Kab. Pegunungan Arfak)	16.752,8	DAK
Penguatan Sistem Kesehatan (9171 - Kota Sorong)	2.107,7	DAK
Penguatan Sistem Kesehatan (9401 - Kab. Merauke)	45.837,3	DAK
Penguatan Sistem Kesehatan (9402 - Kab. Jayawijaya)	123.615,0	DAK
Penguatan Sistem Kesehatan (9403 - Kab. Jayapura)	19.865,1	DAK
Penguatan Sistem Kesehatan (9404 - Kab. Nabire)	30.849,3	DAK



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

Prioritas Nasional/ <i>Major Project</i>	Alokasi (Rp. Juta)	Instansi Pelaksana
Penguatan Sistem Kesehatan (9408 - Kab. Kepulauan Yapen)	10.540,3	DAK
Penguatan Sistem Kesehatan (9409 - Kab. Biak Numfor)	48.568,6	DAK
Penguatan Sistem Kesehatan (9410 - Kab. Paniai)	3.565,7	DAK
Penguatan Sistem Kesehatan (9411 - Kab. Puncak Jaya)	155.163,0	DAK
Penguatan Sistem Kesehatan (9412 - Kab. Mimika)	34.788,3	DAK
Penguatan Sistem Kesehatan (9413 - Kab. Boven Digoel)	7.713,0	DAK
Penguatan Sistem Kesehatan (9414 - Kab. Mappi)	10.523,6	DAK
Penguatan Sistem Kesehatan (9415 - Kab. Asmat)	49.670,1	DAK
Penguatan Sistem Kesehatan (9416 - Kab. Yahukimo)	168.469,7	DAK
Penguatan Sistem Kesehatan (9417 - Kab. Pegunungan Bintang)	8.894,6	DAK
Penguatan Sistem Kesehatan (9418 - Kab. Tolikara)	126.245,6	DAK
Penguatan Sistem Kesehatan (9419 - Kab. Sarmi)	5.851,1	DAK
Penguatan Sistem Kesehatan (9420 - Kab. Keerom)	1.560,5	DAK
Penguatan Sistem Kesehatan (9426 - Kab. Waropen)	27.112,5	DAK
Penguatan Sistem Kesehatan (9427 - Kab. Supiori)	5.261,6	DAK
Penguatan Sistem Kesehatan (9428 - Kab. Mamberamo Raya)	4.491,3	DAK
Penguatan Sistem Kesehatan (9429 - Kab. Nduga)	83.801,3	DAK
Penguatan Sistem Kesehatan (9430 - Kab. Lanny Jaya)	130.449,2	DAK
Penguatan Sistem Kesehatan (9431 - Kab. Mamberamo Tengah)	3.307,6	DAK
Penguatan Sistem Kesehatan (9432 - Kab. Yalimo)	3.364,2	DAK
Penguatan Sistem Kesehatan (9433 - Kab. Puncak)	109.421,5	DAK
Penguatan Sistem Kesehatan (9434 - Kab. Dogiyai)	3.111,1	DAK
Penguatan Sistem Kesehatan (9435 - Kab. Intan Jaya)	5.944,8	DAK
Penguatan Sistem Kesehatan (9436 - Kab. Deiyai)	14.796,2	DAK
Penguatan Sistem Kesehatan (9471 - Kota Jayapura)	1.178,6	DAK
Penguatan Sistem Kesehatan (3218 - Kab. Pangandaran)	3.782,0	DAK
Penguatan Sistem Kesehatan (1101 - Kab. Simeulue)	9.542,9	DAK
Penguatan Sistem Kesehatan (1102 - Kab. Aceh Singkil)	3.766,5	DAK
Penguatan Sistem Kesehatan (1103 - Kab. Aceh Selatan)	134.916,6	DAK
Penguatan Sistem Kesehatan (1104 - Kab. Aceh Tenggara)	4.384,0	DAK



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

Prioritas Nasional/ <i>Major Project</i>	Alokasi (Rp. Juta)	Instansi Pelaksana
Penguatan Sistem Kesehatan (1105 - Kab. Aceh Timur)	3.721,7 DAK	
Penguatan Sistem Kesehatan (1106 - Kab. Aceh Tengah)	6.885,1 DAK	
Penguatan Sistem Kesehatan (1107 - Kab. Aceh Barat)	1.727,5 DAK	
Penguatan Sistem Kesehatan (1108 - Kab. Aceh Besar)	2.778,5 DAK	
Penguatan Sistem Kesehatan (1109 - Kab. Pidie)	55.098,1 DAK	
Penguatan Sistem Kesehatan (1110 - Kab. Bireuen)	13.774,6 DAK	
Penguatan Sistem Kesehatan (1111 - Kab. Aceh Utara)	36.391,9 DAK	
Penguatan Sistem Kesehatan (1112 - Kab. Aceh Barat Daya)	3.545,5 DAK	
Penguatan Sistem Kesehatan (1113 - Kab. Gayo Lues)	17.546,4 DAK	
Penguatan Sistem Kesehatan (1114 - Kab. Aceh Tamiang)	1.648,8 DAK	
Penguatan Sistem Kesehatan (1115 - Kab. Nagan Raya)	8.226,6 DAK	
Penguatan Sistem Kesehatan (1116 - Kab. Aceh Jaya)	4.362,1 DAK	
Penguatan Sistem Kesehatan (1117 - Kab. Bener Meriah)	3.648,0 DAK	
Penguatan Sistem Kesehatan (1118 - Kab. Pidie Jaya)	1.453,8 DAK	
Penguatan Sistem Kesehatan (1171 - Kota Banda Aceh)	555,7 DAK	
Penguatan Sistem Kesehatan (1172 - Kota Sabang)	2.481,0 DAK	
Penguatan Sistem Kesehatan (1173 - Kota Langsa)	3.972,5 DAK	
Penguatan Sistem Kesehatan (1174 - Kota Lhokseumawe)	1.538,0 DAK	
Penguatan Sistem Kesehatan (1175 - Kota Subulussalam)	1.126,2 DAK	
Penguatan Sistem Kesehatan (1203 - Kab. Tapanuli Selatan)	4.249,7 DAK	
Penguatan Sistem Kesehatan (1204 - Kab. Tapanuli Tengah)	18.007,5 DAK	
Penguatan Sistem Kesehatan (1205 - Kab. Tapanuli Utara)	5.229,1 DAK	
Penguatan Sistem Kesehatan (1207 - Kab. Labuhanbatu)	44.310,0 DAK	
Penguatan Sistem Kesehatan (1208 - Kab. Asahan)	5.419,0 DAK	
Penguatan Sistem Kesehatan (1209 - Kab. Simalungun)	1.095,9 DAK	
Penguatan Sistem Kesehatan (1210 - Kab. Dairi)	2.759,2 DAK	
Penguatan Sistem Kesehatan (1212 - Kab. Deli Serdang)	395,2 DAK	
Penguatan Sistem Kesehatan (1213 - Kab. Langkat)	20.137,1 DAK	



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

Prioritas Nasional/ Major Project	Alokasi (Rp. Juta)	Instansi Pelaksana
Penguatan Sistem Kesehatan (1214 - Kab. Nias Selatan)	38.910,2	DAK
Penguatan Sistem Kesehatan (1217 - Kab. Samosir)	2.119,2	DAK
Penguatan Sistem Kesehatan (1218 - Kab. Serdang Bedagai)	31.577,6	DAK
Penguatan Sistem Kesehatan (1220 - Kab. Padang Lawas Utara)	3.308,1	DAK
Penguatan Sistem Kesehatan (1221 - Kab. Padang Lawas)	6.390,3	DAK
Penguatan Sistem Kesehatan (1222 - Kab. Labuhanbatu Selatan)	8.193,6	DAK
Penguatan Sistem Kesehatan (1224 - Kab. Nias Utara)	78.772,8	DAK
Penguatan Sistem Kesehatan (1271 - Kota Sibolga)	527,9	DAK
Penguatan Sistem Kesehatan (1272 - Kota Tanjung Balai)	548,1	DAK
Penguatan Sistem Kesehatan (1273 - Kota Pematang Siantar)	4.135,3	DAK
Penguatan Sistem Kesehatan (1275 - Kota Medan)	2.527,7	DAK
Penguatan Sistem Kesehatan (1276 - Kota Binjai)	3.469,9	DAK
Penguatan Sistem Kesehatan (1301 - Kab. Kepulauan Mentawai)	9.881,9	DAK
Penguatan Sistem Kesehatan (1303 - Kab. Solok)	21.565,7	DAK
Penguatan Sistem Kesehatan (1304 - Kab. Sijunjung)	30.151,7	DAK
Penguatan Sistem Kesehatan (1305 - Kab. Tanah Datar)	31.094,9	DAK
Penguatan Sistem Kesehatan (1306 - Kab. Padang Pariaman)	12.017,2	DAK
Penguatan Sistem Kesehatan (1307 - Kab. Agam)	4.846,7	DAK
Penguatan Sistem Kesehatan (1310 - Kab. Solok Selatan)	260,0	DAK
Penguatan Sistem Kesehatan (1371 - Kota Padang)	3.893,2	DAK
Penguatan Sistem Kesehatan (1373 - Kota Sawahlunto)	11.600,6	DAK
Penguatan Sistem Kesehatan (1374 - Kota Padang Panjang)	485,6	DAK
Penguatan Sistem Kesehatan (1375 - Kota Bukit Tinggi)	4.003,0	DAK
Penguatan Sistem Kesehatan (1376 - Kota Payakumbuh)	2.069,2	DAK
Penguatan Sistem Kesehatan (1404 - Kab. Pelalawan)	21.081,8	DAK
Penguatan Sistem Kesehatan (1405 - Kab. Siak)	6.602,5	DAK
Penguatan Sistem Kesehatan (1407 - Kab. Rokan Hulu)	9.117,7	DAK
Penguatan Sistem Kesehatan (1409 - Kab. Rokan Hilir)	2.978,6	DAK
Penguatan Sistem Kesehatan (1471 - Kota Pekanbaru)	1.474,6	DAK



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

Prioritas Nasional/ <i>Major Project</i>	Alokasi (Rp. Juta)	Instansi Pelaksana
Penguatan Sistem Kesehatan (1501 - Kab. Kerinci)	69.454,6	DAK
Penguatan Sistem Kesehatan (1502 - Kab. Merangin)	5.684,8	DAK
Penguatan Sistem Kesehatan (1503 - Kab. Sarolangun)	1.956,1	DAK
Penguatan Sistem Kesehatan (1504 - Kab. Batanghari)	13.188,8	DAK
Penguatan Sistem Kesehatan (1505 - Kab. Muaro Jambi)	4.054,5	DAK
Penguatan Sistem Kesehatan (1506 - Kab. Tanjung Jabung Timur)	68.893,1	DAK
Penguatan Sistem Kesehatan (1507 - Kab. Tanjung Jabung Barat)	13.764,9	DAK
Penguatan Sistem Kesehatan (1508 - Kab. Tebo)	3.872,0	DAK
Penguatan Sistem Kesehatan (1509 - Kab. Bungo)	26.071,7	DAK
Penguatan Sistem Kesehatan (1571 - Kota Jambi)	24.603,7	DAK
Penguatan Sistem Kesehatan (1572 - Kota Sungai Penuh)	3.694,1	DAK
Penguatan Sistem Kesehatan (1601 - Kab. Ogan Komering Ulu)	5.622,9	DAK
Penguatan Sistem Kesehatan (1602 - Kab. Ogan Komering Ilir)	444,1	DAK
Penguatan Sistem Kesehatan (1603 - Kab. Muara Enim)	8.428,6	DAK
Penguatan Sistem Kesehatan (1604 - Kab. Lahat)	2.543,3	DAK
Penguatan Sistem Kesehatan (1605 - Kab. Musi Rawas)	818,3	DAK
Penguatan Sistem Kesehatan (1606 - Kab. Musi Banyuasin)	20.115,1	DAK
Penguatan Sistem Kesehatan (1607 - Kab. Banyuasin)	13.086,6	DAK
Penguatan Sistem Kesehatan (1608 - Kab. Ogan Komering Ulu Selatan)	5.374,7	DAK
Penguatan Sistem Kesehatan (1609 - Kab. Ogan Komering Ulu Timur)	4.218,9	DAK
Penguatan Sistem Kesehatan (1610 - Kab. Ogan Ilir)	318,0	DAK
Penguatan Sistem Kesehatan (1611 - Kab. Empat Lawang)	35.428,3	DAK
Penguatan Sistem Kesehatan (1612 - Kab. Penukal Abab Lematang Ilir)	10.239,8	DAK
Penguatan Sistem Kesehatan (1613 - Kab. Musi Rawas Utara)	20.852,8	DAK
Penguatan Sistem Kesehatan (1671 - Kota Palembang)	5.739,1	DAK
Penguatan Sistem Kesehatan (1672 - Kota Prabumulih)	13.910,8	DAK
Penguatan Sistem Kesehatan (1673 - Kota Pagar Alam)	25.565,7	DAK
Penguatan Sistem Kesehatan (1674 - Kota Lubuk Linggau)	803,9	DAK



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

Prioritas Nasional/ <i>Major Project</i>	Alokasi (Rp. Juta)	Instansi Pelaksana
Penguatan Sistem Kesehatan (1702 - Kab. Rejang Lebong)	364,2	DAK
Penguatan Sistem Kesehatan (1705 - Kab. Seluma)	6.492,3	DAK
Penguatan Sistem Kesehatan (1707 - Kab. Lebong)	3.211,7	DAK
Penguatan Sistem Kesehatan (1771 - Kota Bengkulu)	20.379,9	DAK
Penguatan Sistem Kesehatan (1802 - Kab. Tanggamus)	16.530,6	DAK
Penguatan Sistem Kesehatan (1803 - Kab. Lampung Selatan)	4.819,5	DAK
Penguatan Sistem Kesehatan (1806 - Kab. Lampung Utara)	16.497,2	DAK
Penguatan Sistem Kesehatan (1807 - Kab. Way Kanan)	7.985,6	DAK
Penguatan Sistem Kesehatan (1808 - Kab. Tulang Bawang)	4.842,4	DAK
Penguatan Sistem Kesehatan (1811 - Kab. Mesuji)	2.971,5	DAK
Penguatan Sistem Kesehatan (1812 - Kab. Tulang Bawang Barat)	3.019,5	DAK
Penguatan Sistem Kesehatan (1871 - Kota Bandar Lampung)	32.972,4	DAK
Penguatan Sistem Kesehatan (1872 - Kota Metro)	1.515,8	DAK
Penguatan Sistem Kesehatan (1901 - Kab. Bangka)	3.228,8	DAK
Penguatan Sistem Kesehatan (1903 - Kab. Bangka Barat)	16.535,2	DAK
Penguatan Sistem Kesehatan (1905 - Kab. Bangka Selatan)	31.281,6	DAK
Penguatan Sistem Kesehatan (1906 - Kab. Belitung Timur)	604,6	DAK
Penguatan Sistem Kesehatan (1971 - Kota Pangkal Pinang)	74.281,2	DAK
Penguatan Sistem Kesehatan (2101 - Kab. Karimun)	18.177,2	DAK
Penguatan Sistem Kesehatan (2102 - Kab. Bintan)	433,8	DAK
Penguatan Sistem Kesehatan (2103 - Kab. Natuna)	34.883,5	DAK
Penguatan Sistem Kesehatan (2104 - Kab. Lingga)	3.507,6	DAK
Penguatan Sistem Kesehatan (2105 - Kab. Kepulauan Anambas)	42.924,0	DAK
Penguatan Sistem Kesehatan (2171 - Kota Batam)	2.702,4	DAK
Penguatan Sistem Kesehatan (2172 - Kota Tanjung Pinang)	610,6	DAK
Penguatan Sistem Kesehatan (3201 - Kab. Bogor)	8.030,9	DAK
Penguatan Sistem Kesehatan (3202 - Kab. Sukabumi)	5.187,1	DAK
Penguatan Sistem Kesehatan (3203 - Kab. Cianjur)	6.367,9	DAK
Penguatan Sistem Kesehatan (3204 - Kab. Bandung)	7.492,7	DAK
Penguatan Sistem Kesehatan (3205 - Kab. Garut)	12.844,4	DAK



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

Prioritas Nasional/ Major Project	Alokasi (Rp. Juta)	Instansi Pelaksana
Penguatan Sistem Kesehatan (3206 - Kab. Tasikmalaya)	4.885,1	DAK
Penguatan Sistem Kesehatan (3208 - Kab. Kuningan)	435,1	DAK
Penguatan Sistem Kesehatan (3209 - Kab. Cirebon)	4.197,9	DAK
Penguatan Sistem Kesehatan (3210 - Kab. Majalengka)	18.397,7	DAK
Penguatan Sistem Kesehatan (3211 - Kab. Sumedang)	5.470,1	DAK
Penguatan Sistem Kesehatan (3212 - Kab. Indramayu)	3.364,8	DAK
Penguatan Sistem Kesehatan (3213 - Kab. Subang)	4.962,6	DAK
Penguatan Sistem Kesehatan (3214 - Kab. Purwakarta)	3.301,2	DAK
Penguatan Sistem Kesehatan (3215 - Kab. Karawang)	1.470,5	DAK
Penguatan Sistem Kesehatan (3216 - Kab. Bekasi)	32.177,3	DAK
Penguatan Sistem Kesehatan (3217 - Kab. Bandung Barat)	3.718,7	DAK
Penguatan Sistem Kesehatan (3271 - Kota Bogor)	37.445,6	DAK
Penguatan Sistem Kesehatan (3272 - Kota Sukabumi)	8.395,8	DAK
Penguatan Sistem Kesehatan (3273 - Kota Bandung)	2.466,4	DAK
Penguatan Sistem Kesehatan (3274 - Kota Cirebon)	817,5	DAK
Penguatan Sistem Kesehatan (3276 - Kota Depok)	9.427,1	DAK
Penguatan Sistem Kesehatan (3278 - Kota Tasikmalaya)	5.766,5	DAK
Penguatan Sistem Kesehatan (33 - Provinsi Jawa Tengah)	38.961,3	DAK
Penguatan Sistem Kesehatan (3303 - Kab. Purbalingga)	2.004,7	DAK
Penguatan Sistem Kesehatan (3306 - Kab. Purworejo)	2.246,8	DAK
Penguatan Sistem Kesehatan (3307 - Kab. Wonosobo)	19.070,0	DAK
Penguatan Sistem Kesehatan (3311 - Kab. Sukoharjo)	3.596,8	DAK
Penguatan Sistem Kesehatan (3312 - Kab. Wonogiri)	8.883,2	DAK
Penguatan Sistem Kesehatan (3314 - Kab. Sragen)	1.229,4	DAK
Penguatan Sistem Kesehatan (3315 - Kab. Grobogan)	33.108,8	DAK
Penguatan Sistem Kesehatan (3316 - Kab. Blora)	14.552,0	DAK
Penguatan Sistem Kesehatan (3318 - Kab. Pati)	39.124,8	DAK
Penguatan Sistem Kesehatan (3324 - Kab. Kendal)	36.199,7	DAK
Penguatan Sistem Kesehatan (3326 - Kab. Pekalongan)	49.971,1	DAK
Penguatan Sistem Kesehatan (3327 - Kab. Pemalang)	20.950,4	DAK



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

Prioritas Nasional/ <i>Major Project</i>	Alokasi (Rp. Juta)	Instansi Pelaksana
Penguatan Sistem Kesehatan (3329 - Kab. Brebes)	6.853,7	DAK
Penguatan Sistem Kesehatan (3371 - Kota Magelang)	20.189,5	DAK
Penguatan Sistem Kesehatan (3373 - Kota Salatiga)	833,5	DAK
Penguatan Sistem Kesehatan (3374 - Kota Semarang)	17.557,1	DAK
Penguatan Sistem Kesehatan (3375 - Kota Pekalongan)	23.638,5	DAK
Penguatan Sistem Kesehatan (3376 - Kota Tegal)	653,5	DAK
Penguatan Sistem Kesehatan (3401 - Kab. Kulon Progo)	31.780,1	DAK
Penguatan Sistem Kesehatan (3403 - Kab. Gunungkidul)	35.774,0	DAK
Penguatan Sistem Kesehatan (3404 - Kab. Sleman)	1.338,9	DAK
Penguatan Sistem Kesehatan (3471 - Kota Yogyakarta)	655,2	DAK
Penguatan Sistem Kesehatan (3503 - Kab. Trenggalek)	15.097,5	DAK
Penguatan Sistem Kesehatan (3504 - Kab. Tulungagung)	22.864,0	DAK
Penguatan Sistem Kesehatan (3507 - Kab. Malang)	17.920,2	DAK
Penguatan Sistem Kesehatan (3511 - Kab. Bondowoso)	27.018,9	DAK
Penguatan Sistem Kesehatan (3512 - Kab. Situbondo)	2.502,0	DAK
Penguatan Sistem Kesehatan (3518 - Kab. Nganjuk)	4.755,0	DAK
Penguatan Sistem Kesehatan (3519 - Kab. Madiun)	1.888,2	DAK
Penguatan Sistem Kesehatan (3523 - Kab. Tuban)	17.695,0	DAK
Penguatan Sistem Kesehatan (3525 - Kab. Gresik)	54.232,6	DAK
Penguatan Sistem Kesehatan (3526 - Kab. Bangkalan)	1.984,4	DAK
Penguatan Sistem Kesehatan (3529 - Kab. Sumenep)	2.008,6	DAK
Penguatan Sistem Kesehatan (3571 - Kota Kediri)	1.283,4	DAK
Penguatan Sistem Kesehatan (3573 - Kota Malang)	333,8	DAK
Penguatan Sistem Kesehatan (3575 - Kota Pasuruan)	628,2	DAK
Penguatan Sistem Kesehatan (3576 - Kota Mojokerto)	7.200,1	DAK
Penguatan Sistem Kesehatan (3601 - Kab. Pandeanglang)	4.214,1	DAK
Penguatan Sistem Kesehatan (3603 - Kab. Tangerang)	4.265,8	DAK
Penguatan Sistem Kesehatan (3604 - Kab. Serang)	2.100,4	DAK
Penguatan Sistem Kesehatan (3671 - Kota Tangerang)	725,2	DAK



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

Prioritas Nasional/ <i>Major Project</i>	Alokasi (Rp. Juta)	Instansi Pelaksana
Penguatan Sistem Kesehatan (3672 - Kota Cilegon)	17.140,9	DAK
Penguatan Sistem Kesehatan (3673 - Kota Serang)	10.531,9	DAK
Penguatan Sistem Kesehatan (3674 - Kota Tangerang Selatan)	3.966,8	DAK
Penguatan Sistem Kesehatan (5108 - Kab. Buleleng)	20.484,8	DAK
Penguatan Sistem Kesehatan (5171 - Kota Denpasar)	1.998,2	DAK
Penguatan Sistem Kesehatan (5201 - Kab. Lombok Barat)	11.545,6	DAK
Penguatan Sistem Kesehatan (5202 - Kab. Lombok Tengah)	45.144,2	DAK
Penguatan Sistem Kesehatan (5203 - Kab. Lombok Timur)	46.333,0	DAK
Penguatan Sistem Kesehatan (5204 - Kab. Sumbawa)	18.450,9	DAK
Penguatan Sistem Kesehatan (5205 - Kab. Dompu)	25.266,2	DAK
Penguatan Sistem Kesehatan (5206 - Kab. Bima)	44.856,0	DAK
Penguatan Sistem Kesehatan (5207 - Kab. Sumbawa Barat)	9.566,0	DAK
Penguatan Sistem Kesehatan (5208 - Kab. Lombok Utara)	2.469,8	DAK
Penguatan Sistem Kesehatan (5271 - Kota Mataram)	34.825,9	DAK
Penguatan Sistem Kesehatan (5272 - Kota Bima)	5.641,1	DAK
Penguatan Sistem Kesehatan (5301 - Kab. Sumba Barat)	794,1	DAK
Penguatan Sistem Kesehatan (5302 - Kab. Sumba Timur)	10.104,8	DAK
Penguatan Sistem Kesehatan (5303 - Kab. Kupang)	6.437,7	DAK
Penguatan Sistem Kesehatan (5304 - Kab. Timor Tengah Selatan)	122.707,3	DAK
Penguatan Sistem Kesehatan (5305 - Kab. Timor Tengah Utara)	8.714,2	DAK
Penguatan Sistem Kesehatan (5306 - Kab. Belu)	3.273,6	DAK
Penguatan Sistem Kesehatan (5307 - Kab. Alor)	10.097,7	DAK
Penguatan Sistem Kesehatan (5308 - Kab. Lembata)	4.869,9	DAK
Penguatan Sistem Kesehatan (5309 - Kab. Flores Timur)	15.079,1	DAK
Penguatan Sistem Kesehatan (5310 - Kab. Sikka)	38.788,1	DAK
Penguatan Sistem Kesehatan (5311 - Kab. Ende)	4.861,5	DAK
Penguatan Sistem Kesehatan (5312 - Kab. Ngada)	8.901,8	DAK
Penguatan Sistem Kesehatan (5313 - Kab. Manggarai)	14.995,0	DAK
Penguatan Sistem Kesehatan (5314 - Kab. Rote Ndao)	26.489,7	DAK
Penguatan Sistem Kesehatan (5315 - Kab. Manggarai Barat)	192.019,0	DAK



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

Prioritas Nasional/ Major Project	Alokasi (Rp. Juta)	Instansi Pelaksana
Penguatan Sistem Kesehatan (5316 - Kab. Sumba Tengah)	4.831,7	DAK
Penguatan Sistem Kesehatan (5317 - Kab. Sumba Barat Daya)	6.713,4	DAK
Penguatan Sistem Kesehatan (5318 - Kab. Nagekeo)	646,3	DAK
Penguatan Sistem Kesehatan (5319 - Kab. Manggarai Timur)	69.719,5	DAK
Penguatan Sistem Kesehatan (5320 - Kab. Sabu Raijua)	11.915,6	DAK
Penguatan Sistem Kesehatan (5321 - Kab. Malaka)	85.635,5	DAK
Penguatan Sistem Kesehatan (5371 - Kota Kupang)	1.842,8	DAK
Penguatan Sistem Kesehatan (6101 - Kab. Sambas)	8.202,9	DAK
Penguatan Sistem Kesehatan (6102 - Kab. Bengkayang)	94.665,4	DAK
Penguatan Sistem Kesehatan (6103 - Kab. Landak)	3.299,2	DAK
Penguatan Sistem Kesehatan (6104 - Kab. Mempawah)	2.773,6	DAK
Penguatan Sistem Kesehatan (6105 - Kab. Sanggau)	19.212,3	DAK
Penguatan Sistem Kesehatan (6106 - Kab. Ketapang)	16.979,7	DAK
Penguatan Sistem Kesehatan (6107 - Kab. Sintang)	8.826,5	DAK
Penguatan Sistem Kesehatan (6108 - Kab. Kapuas Hulu)	3.915,4	DAK
Penguatan Sistem Kesehatan (6109 - Kab. Sekadau)	2.762,1	DAK
Penguatan Sistem Kesehatan (6110 - Kab. Melawi)	21.040,5	DAK
Penguatan Sistem Kesehatan (6111 - Kab. Kayong Utara)	3.371,8	DAK
Penguatan Sistem Kesehatan (6112 - Kab. Kubu Raya)	1.766,7	DAK
Penguatan Sistem Kesehatan (6171 - Kota Pontianak)	882,3	DAK
Penguatan Sistem Kesehatan (6172 - Kota Singkawang)	1.398,4	DAK
Penguatan Sistem Kesehatan (6201 - Kab. Kotawaringin Barat)	21.153,3	DAK
Penguatan Sistem Kesehatan (6202 - Kab. Kotawaringin Timur)	5.597,2	DAK
Penguatan Sistem Kesehatan (6203 - Kab. Kapuas)	75.881,0	DAK
Penguatan Sistem Kesehatan (6204 - Kab. Barito Selatan)	19.105,7	DAK
Penguatan Sistem Kesehatan (6205 - Kab. Barito Utara)	1.664,0	DAK
Penguatan Sistem Kesehatan (6206 - Kab. Sukamara)	802,9	DAK



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

Prioritas Nasional/ <i>Major Project</i>	Alokasi (Rp. Juta)	Instansi Pelaksana
Penguatan Sistem Kesehatan (6209 - Kab. Katingan)	72.483,8	DAK
Penguatan Sistem Kesehatan (6210 - Kab. Pulang Pisau)	468,0	DAK
Penguatan Sistem Kesehatan (6211 - Kab. Gunung Mas)	952,2	DAK
Penguatan Sistem Kesehatan (6212 - Kab. Barito Timur)	4.007,3	DAK
Penguatan Sistem Kesehatan (6213 - Kab. Murung Raya)	463,3	DAK
Penguatan Sistem Kesehatan (6271 - Kota Palangkaraya)	7.714,3	DAK
Penguatan Sistem Kesehatan (6301 - Kab. Tanah Laut)	14.514,5	DAK
Penguatan Sistem Kesehatan (6302 - Kab. Kotabaru)	8.989,4	DAK
Penguatan Sistem Kesehatan (6303 - Kab. Banjar)	54.375,0	DAK
Penguatan Sistem Kesehatan (6304 - Kab. Barito Kuala)	19.382,2	DAK
Penguatan Sistem Kesehatan (6305 - Kab. Tapin)	5.351,7	DAK
Penguatan Sistem Kesehatan (6306 - Kab. Hulu Sungai Selatan)	17.401,7	DAK
Penguatan Sistem Kesehatan (6307 - Kab. Hulu Sungai Tengah)	5.883,7	DAK
Penguatan Sistem Kesehatan (6308 - Kab. Hulu Sungai Utara)	4.194,1	DAK
Penguatan Sistem Kesehatan (6309 - Kab. Tabalong)	9.632,7	DAK
Penguatan Sistem Kesehatan (6310 - Kab. Tanah Bumbu)	14.624,3	DAK
Penguatan Sistem Kesehatan (6311 - Kab. Balangan)	6.309,3	DAK
Penguatan Sistem Kesehatan (6371 - Kota Banjarmasin)	3.901,6	DAK
Penguatan Sistem Kesehatan (6372 - Kota Banjarbaru)	2.280,5	DAK
Penguatan Sistem Kesehatan (6401 - Kab. Paser)	28.876,8	DAK
Penguatan Sistem Kesehatan (6403 - Kab. Kutai Kartanegara)	40.513,4	DAK
Penguatan Sistem Kesehatan (6404 - Kab. Kutai Timur)	9.038,7	DAK
Penguatan Sistem Kesehatan (6405 - Kab. Berau)	9.366,3	DAK
Penguatan Sistem Kesehatan (6409 - Kab. Penajam Paser Utara)	33.646,8	DAK
Penguatan Sistem Kesehatan (6411 - Kab. Mahakam Ulu)	2.487,7	DAK
Penguatan Sistem Kesehatan (6471 - Kota Balikpapan)	3.650,2	DAK
Penguatan Sistem Kesehatan (6472 - Kota Samarinda)	1.982,2	DAK
Penguatan Sistem Kesehatan (6474 - Kota Bontang)	512,2	DAK



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

Prioritas Nasional/ <i>Major Project</i>	Alokasi (Rp. Juta)	Instansi Pelaksana
Penguatan Sistem Kesehatan (6501 - Kab. Malinau)	12.588,5	DAK
Penguatan Sistem Kesehatan (6502 - Kab. Bulungan)	20.243,7	DAK
Penguatan Sistem Kesehatan (6504 - Kab. Nunukan)	41.569,1	DAK
Penguatan Sistem Kesehatan (6571 - Kota Tarakan)	518,0	DAK
Penguatan Sistem Kesehatan (7101 - Kab. Bolaang Mongondow)	16.638,0	DAK
Penguatan Sistem Kesehatan (7103 - Kab. Kepulauan Sangihe)	19.138,4	DAK
Penguatan Sistem Kesehatan (7104 - Kab. Kepulauan Talaud)	21.330,6	DAK
Penguatan Sistem Kesehatan (7105 - Kab. Minahasa Selatan)	1.307,1	DAK
Penguatan Sistem Kesehatan (7106 - Kab. Minahasa Utara)	51.057,4	DAK
Penguatan Sistem Kesehatan (7109 - Kab. Minahasa Tenggara)	2.038,4	DAK
Penguatan Sistem Kesehatan (7111 - Kab. Bolaang Mongondow Timur)	10.674,3	DAK
Penguatan Sistem Kesehatan (7171 - Kota Manado)	8.238,4	DAK
Penguatan Sistem Kesehatan (7172 - Kota Bitung)	1.207,8	DAK
Penguatan Sistem Kesehatan (7173 - Kota Tomohon)	14.816,7	DAK
Penguatan Sistem Kesehatan (7201 - Kab. Banggai Kepulauan)	5.002,9	DAK
Penguatan Sistem Kesehatan (7202 - Kab. Banggai)	12.694,2	DAK
Penguatan Sistem Kesehatan (7203 - Kab. Morowali)	1.627,2	DAK
Penguatan Sistem Kesehatan (7204 - Kab. Poso)	3.073,9	DAK
Penguatan Sistem Kesehatan (7205 - Kab. Donggala)	12.636,2	DAK
Penguatan Sistem Kesehatan (7206 - Kab. Toli Toli)	34.641,7	DAK
Penguatan Sistem Kesehatan (7208 - Kab. Parigi Moutong)	36.696,2	DAK
Penguatan Sistem Kesehatan (7209 - Kab. Tojo Una Una)	6.366,2	DAK
Penguatan Sistem Kesehatan (7210 - Kab. Sigi)	1.502,2	DAK
Penguatan Sistem Kesehatan (7211 - Kab. Banggai Laut)	2.903,2	DAK
Penguatan Sistem Kesehatan (7271 - Kota Palu)	15.830,3	DAK
Penguatan Sistem Kesehatan (7301 - Kab. Kepulauan Selayar)	68.474,5	DAK
Penguatan Sistem Kesehatan (7302 - Kab. Bulukumba)	16.847,4	DAK
Penguatan Sistem Kesehatan (7303 - Kab. Bantaeng)	1.667,5	DAK



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

Prioritas Nasional/ Major Project	Alokasi (Rp. Juta)	Instansi Pelaksana
Penguatan Sistem Kesehatan (7304 - Kab. Jeneponto)	222,7	DAK
Penguatan Sistem Kesehatan (7305 - Kab. Takalar)	8.980,9	DAK
Penguatan Sistem Kesehatan (7306 - Kab. Gowa)	34.603,8	DAK
Penguatan Sistem Kesehatan (7307 - Kab. Sinjai)	12.716,4	DAK
Penguatan Sistem Kesehatan (7308 - Kab. Maros)	11.141,1	DAK
Penguatan Sistem Kesehatan (7309 - Kab. Pangkajene dan Kepulauan)	13.822,9	DAK
Penguatan Sistem Kesehatan (7310 - Kab. Barru)	11.425,6	DAK
Penguatan Sistem Kesehatan (7311 - Kab. Bone)	31.653,2	DAK
Penguatan Sistem Kesehatan (7312 - Kab. Soppeng)	2.661,8	DAK
Penguatan Sistem Kesehatan (7313 - Kab. Wajo)	287,8	DAK
Penguatan Sistem Kesehatan (7314 - Kab. Sidenreng Rappang)	4.609,9	DAK
Penguatan Sistem Kesehatan (7315 - Kab. Pinrang)	5.723,5	DAK
Penguatan Sistem Kesehatan (7316 - Kab. Enrekang)	43.625,3	DAK
Penguatan Sistem Kesehatan (7317 - Kab. Luwu)	1.116,3	DAK
Penguatan Sistem Kesehatan (7318 - Kab. Tana Toraja)	26.617,7	DAK
Penguatan Sistem Kesehatan (7322 - Kab. Luwu Utara)	18.893,4	DAK
Penguatan Sistem Kesehatan (7325 - Kab. Luwu Timur)	2.501,9	DAK
Penguatan Sistem Kesehatan (7326 - Kab. Toraja Utara)	2.919,3	DAK
Penguatan Sistem Kesehatan (7371 - Kota Makassar)	3.559,0	DAK
Penguatan Sistem Kesehatan (7372 - Kota Pare Pare)	9.984,1	DAK
Penguatan Sistem Kesehatan (7373 - Kota Palopo)	9.260,5	DAK
Penguatan Sistem Kesehatan (7401 - Kab. Buton)	6.058,1	DAK
Penguatan Sistem Kesehatan (7402 - Kab. Muna)	32.553,4	DAK
Penguatan Sistem Kesehatan (7403 - Kab. Konawe)	21.064,1	DAK
Penguatan Sistem Kesehatan (7404 - Kab. Kolaka)	25.646,0	DAK
Penguatan Sistem Kesehatan (7405 - Kab. Konawe Selatan)	60.899,9	DAK
Penguatan Sistem Kesehatan (7406 - Kab. Bombana)	9.163,6	DAK
Penguatan Sistem Kesehatan (7407 - Kab. Wakatobi)	16.444,4	DAK
Penguatan Sistem Kesehatan (7408 - Kab. Kolaka Utara)	12.060,4	DAK
Penguatan Sistem Kesehatan (7409 - Kab. Buton Utara)	22.139,9	DAK
Penguatan Sistem Kesehatan (7410 - Kab. Konawe Utara)	6.807,8	DAK



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

Prioritas Nasional/ <i>Major Project</i>	Alokasi (Rp. Juta)	Instansi Pelaksana
Penguatan Sistem Kesehatan (7411 - Kab. Kolaka Timur)	2.129,1	DAK
Penguatan Sistem Kesehatan (7412 - Kab. Konawe Kepulauan)	15.333,5	DAK
Penguatan Sistem Kesehatan (7413 - Kab. Muna Barat)	15.464,7	DAK
Penguatan Sistem Kesehatan (7414 - Kab. Buton Tengah)	5.123,0	DAK
Penguatan Sistem Kesehatan (7415 - Kab. Buton Selatan)	14.739,0	DAK
Penguatan Sistem Kesehatan (7471 - Kota Kendari)	34.495,4	DAK
Penguatan Sistem Kesehatan (7472 - Kota Bau Bau)	27.052,4	DAK
Penguatan Sistem Kesehatan (7501 - Kab. Boalemo)	2.080,0	DAK
Penguatan Sistem Kesehatan (7502 - Kab. Gorontalo)	47.589,3	DAK
Penguatan Sistem Kesehatan (7503 - Kab. Pohuwato)	829,9	DAK
Penguatan Sistem Kesehatan (7504 - Kab. Bone Bolango)	3.893,6	DAK
Penguatan Sistem Kesehatan (7571 - Kota Gorontalo)	25.291,9	DAK
Penguatan Sistem Kesehatan (7601 - Kab. Majene)	27.064,0	DAK
Penguatan Sistem Kesehatan (7602 - Kab. Polewali Mandar)	38.274,0	DAK
Penguatan Sistem Kesehatan (7603 - Kab. Mamasa)	23.089,1	DAK
Penguatan Sistem Kesehatan (7604 - Kab. Mamuju)	55.822,5	DAK
Penguatan Sistem Kesehatan (7605 - Kab. Pasangkayu)	22.713,9	DAK
Penguatan Sistem Kesehatan (7606 - Kab. Mamuju Tengah)	25.111,2	DAK
Penguatan Sistem Kesehatan (81 - Provinsi Maluku)	24.021,1	DAK
Penguatan Sistem Kesehatan (8101 - Kab. Kepulauan Tanimbar)	6.187,7	DAK
Penguatan Sistem Kesehatan (8102 - Kab. Maluku Tenggara)	74.632,6	DAK
Penguatan Sistem Kesehatan (8103 - Kab. Maluku Tengah)	11.964,7	DAK
Penguatan Sistem Kesehatan (8104 - Kab. Buru)	14.079,3	DAK
Penguatan Sistem Kesehatan (8105 - Kab. Kepulauan Aru)	7.799,3	DAK
Penguatan Sistem Kesehatan (8106 - Kab. Seram Bagian Barat)	4.101,4	DAK
Penguatan Sistem Kesehatan (8107 - Kab. Seram Bagian Timur)	13.958,7	DAK
Penguatan Sistem Kesehatan (8108 - Kab. Maluku Barat Daya)	17.367,6	DAK



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

Prioritas Nasional/ Major Project	Alokasi (Rp. Juta)	Instansi Pelaksana
Penguatan Sistem Kesehatan (8109 - Kab. Buru Selatan)	2.385,9	DAK
Penguatan Sistem Kesehatan (8171 - Kota Ambon)	11.658,6	DAK
Penguatan Sistem Kesehatan (8172 - Kota Tual)	6.844,1	DAK
Penguatan Sistem Kesehatan (8201 - Kab. Halmahera Barat)	2.903,3	DAK
Penguatan Sistem Kesehatan (8202 - Kab. Halmahera Tengah)	3.300,6	DAK
Penguatan Sistem Kesehatan (8203 - Kab. Kepulauan Sula)	73.530,3	DAK
Penguatan Sistem Kesehatan (8204 - Kab. Halmahera Selatan)	90.983,6	DAK
Penguatan Sistem Kesehatan (8205 - Kab. Halmahera Utara)	38.713,9	DAK
Penguatan Sistem Kesehatan (8206 - Kab. Halmahera Timur)	52.852,4	DAK
Rekomendasi Kebijakan Penguatan Posyandu Prima (LP)	1.800,0	KEMENTERIAN KESEHATAN
Kesepakatan pemenuhan peningkatan standar SPA Puskesmas	1.138,2	KEMENTERIAN KESEHATAN
Pukesmas prioritas pariwisata dan kecamatan tanpa puskesmas yang diberikan pembinaan dan pengawalan dalam rangka pembangunan infrastruktur prototipe modern Puskesmas	1.495,3	KEMENTERIAN KESEHATAN
Koordinasi Manajemen Puskesmas dalam Penguatan Integrasi Layanan Primer (LP)	2.390,1	KEMENTERIAN KESEHATAN
Pemantauan dan Monev Pelaksanaan Kegiatan Integrasi Layanan Primer (LP)	2.012,5	KEMENTERIAN KESEHATAN
Pemantauan dan Monev Pelaksanaan Kegiatan Integrasi Layanan Primer (LP)	1.759,5	KEMENTERIAN KESEHATAN
Tenaga Kesehatan yang diorientasi terkait Integrasi Layanan Primer (LP)	12.214,7	KEMENTERIAN KESEHATAN
Tenaga Kesehatan yang diorientasi terkait Integrasi Layanan Primer (LP)	1.756,0	KEMENTERIAN KESEHATAN
Fasilitasi dan pembinaan Dinkes Kab/Kota terkait BLUD Puskesmas	13.911,5	KEMENTERIAN KESEHATAN
Akreditasi Puskesmas dan FKTP swasta	2.968,9	KEMENTERIAN KESEHATAN
<i>Aspek: Pengendalian Penyakit dan Perluasan Imunisasi</i>		
Label dan Iklan Produk Tembakau yang Diawasi yang Memenuhi Ketentuan	1.517,2	BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
Pelatihan Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular	34.499,8	KEMENTERIAN KESEHATAN
Pembuatan model teknologi tepat guna pencegahan dan pengendalian penyakit (HS)	1.419,5	KEMENTERIAN KESEHATAN
Pelatihan Konseling Upaya Berhenti Merokok (LP)	2.470,0	KEMENTERIAN KESEHATAN
Instalasi Farmasi Kab/Kota yang Menerapkan Manajemen Pengelolaan Obat dan Vaksin Sesuai Standar (LP)	22.685,1	KEMENTERIAN KESEHATAN
Pembinaan Pemerintah Daerah dalam rangka germas diberbagai tatanan (LP)	9.862,3	KEMENTERIAN KESEHATAN
Pemeliharaan Sistim Informasi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Potensial KLB/Wabah (HS)	1.028,0	KEMENTERIAN KESEHATAN



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

Prioritas Nasional/ <i>Major Project</i>	Alokasi (Rp. Juta)	Instansi Pelaksana
Pelatihan Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular	34.261,3	KEMENTERIAN KESEHATAN
Fasilitasi, monitoring pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular	2.666,6	KEMENTERIAN KESEHATAN
Alat dan Bahan Kesehatan Tindak Lanjut Lesi Prakanker Leher Rahim (LP)	10.550,0	KEMENTERIAN KESEHATAN
Pelatihan Pencegahan dan Pengendalian Diabetes Melitus dan Gangguan Metabolik (LP)	3.546,8	KEMENTERIAN KESEHATAN
Monev Supervisi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Diabetes Melitus dan Gangguan Metabolik (LP)	1.578,5	KEMENTERIAN KESEHATAN
Sosialisasi Faktor Fisiko PTM (LP)	10.715,2	KEMENTERIAN KESEHATAN
Alat dan Bahan Kesehatan Pendukung Imunisasi	20.512,8	KEMENTERIAN KESEHATAN
Rekomendasi kebijakan pengendalian faktor risiko PTM (LP)	11.900,0	KEMENTERIAN KESEHATAN
Pelatihan Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Jantung dan Pembuluh Darah (LP)	3.298,9	KEMENTERIAN KESEHATAN
Pelatihan Imunisasi	7.465,7	KEMENTERIAN KESEHATAN
Layanan Konseling Upaya Berhenti Merokok (LP)	6.085,0	KEMENTERIAN KESEHATAN
Pelatihan Pencegahan dan Pengendalian Kanker dan Kelainan Darah (LP)	2.015,1	KEMENTERIAN KESEHATAN
Media Komunikasi, Informasi, Edukasi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Kanker dan Kelainan Darah (LP)	1.418,3	KEMENTERIAN KESEHATAN
Monev Supervisi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Kanker dan Kelainan Darah (LP)	1.337,2	KEMENTERIAN KESEHATAN
Pelaksanaan Operasional Vaksinasi Covid-19	1.590,0	KEMENTERIAN KESEHATAN
Deteksi Dini PTM Prioritas (LP)	3.079,3	KEMENTERIAN KESEHATAN
Fasilitasi, <i>Monitoring</i> Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular	16.288,5	KEMENTERIAN KESEHATAN
Monev Supervisi Implementasi Kawasan Tanpa Rokok (LP)	2.117,3	KEMENTERIAN KESEHATAN
Koordinasi Pelaksanaan Integrasi Program PTM Prioritas (LP)	2.555,1	KEMENTERIAN KESEHATAN
Pelatihan Deteksi Dini PPOK (LP)	2.639,2	KEMENTERIAN KESEHATAN
Rumah Sakit Layanan Prioritas/Unggulan yang Dilakukan Pembinaan (PN)	22.299,1	KEMENTERIAN KESEHATAN
Alat dan bahan kesehatan pencegahan dan pengendalian malaria (LP)	28.590,0	KEMENTERIAN KESEHATAN
Pelatihan SDM Malaria	4.638,2	KEMENTERIAN KESEHATAN
Monitoring Evaluasi dan Supervisi Pencegahan dan Pengendalian Malaria (LP)	1.448,7	KEMENTERIAN KESEHATAN
Intensifikasi Penemuan Kasus Baru dalam Rangka Eliminasi Malaria (LP)	2.456,6	KEMENTERIAN KESEHATAN
Pelayanan kesehatan di pelabuhan/bandara/lintas batas (HS)	25.907,0	KEMENTERIAN KESEHATAN
Layanan pengendalian faktor risiko lingkungan (HS)	16.354,1	KEMENTERIAN KESEHATAN
layanan pemeriksaan orang, barang, alat angkut (HS)	34.441,3	KEMENTERIAN KESEHATAN
Koordinasi pelaksanaan pencegahan dan pengendalian penyakit DBD dan Arbovirosis Lainnya (LP)	1.027,3	KEMENTERIAN KESEHATAN



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

Prioritas Nasional/ <i>Major Project</i>	Alokasi (Rp. Juta)	Instansi Pelaksana
Investigasi Peningkatan Kasus dan Kejadian Luar Biasa penyakit DBD dan arbovirosis lain (LP)	7.854,2	KEMENTERIAN KESEHATAN
Alat dan bahan kesehatan pencegahan dan pengendalian penyakit DBD dan Arbovirosis lainnya (LP)	46.638,0	KEMENTERIAN KESEHATAN
Peningkatan Kapasitas Petugas dan Pengelola Program DBD dan Arbovirosis lainnya (LP)	9.843,9	KEMENTERIAN KESEHATAN
Monitoring Evaluasi dan Supervisi <i>Surveilans</i> DBD dan penyakit Arbovirosis lainnya (LP)	2.149,1	KEMENTERIAN KESEHATAN
Koordinasi pencapaian eliminasi eradikasi penyakit tropis terabaikan (LP)	1.764,2	KEMENTERIAN KESEHATAN
<i>Surveilans</i> dan deteksi dini penyakit Tropis Terabaikan (LP)	7.351,3	KEMENTERIAN KESEHATAN
Pemenuhan RDT dan RPR untuk Evaluasi Endemisitas dan <i>Surveilans</i> Aktif Frambusia (LP)	1.228,0	KEMENTERIAN KESEHATAN
Assessment Eliminasi Kusta dan Eradikasi Frambusia	5.775,5	KEMENTERIAN KESEHATAN
Koordinasi pelaksanaan pencegahan dan pengendalian Penyakit Zoonosis dan Penyakit Akibat Gigitan Hewan Berbisa dan Tanaman Beracun (LP)	1.025,3	KEMENTERIAN KESEHATAN
<i>Surveilans</i> Pencegahan dan Pengendalian Zoonosis dan Pengendalian Zoonosis dan Penyakit Akibat Gigitan Hewan Berbisa dan Tanaman Beracun (LP)	2.472,8	KEMENTERIAN KESEHATAN
Workshop Pencegahan dan Pengendalian penyakit Zoonosis (LP)	1.825,3	KEMENTERIAN KESEHATAN
Monev dan Supervisi pencegahan dan pengendalian penyakit zoonosis dan Pengendalian Zoonosis dan Penyakit Akibat Gigitan Hewan Berbisa dan Tanaman Beracun (LP)	2.192,8	KEMENTERIAN KESEHATAN
Pemenuhan Alat, Reagen untuk <i>Skrining</i> , Diagnostik dan Pemantauan Pengobatan HIV AIDS dan PIMS (LP)	215.136,4	KEMENTERIAN KESEHATAN
Pendampingan/Fasilitatif Program HIV dan IMS (LP)	1.635,4	KEMENTERIAN KESEHATAN
Penanganan Kasus ODHIV (LP)	3.391,8	KEMENTERIAN KESEHATAN
<i>Surveilans</i> Faktor risiko Terkait HIV dan IMS (LP)	5.070,0	KEMENTERIAN KESEHATAN
Alat dan Bahan Kesehatan Pencegahan dan Pengendalian Penyakit IMS (LP)	37.250,0	KEMENTERIAN KESEHATAN
Workshop Kader dalam Penemuan Kasus HIV dan Pendampingan Pengobatan (PL)	4.413,7	KEMENTERIAN KESEHATAN
Workshop Pedoman IMS kepada Tenaga Kesehatan (LP)	1.348,3	KEMENTERIAN KESEHATAN
Media KIE P2 TBC (LP)	4.271,3	KEMENTERIAN KESEHATAN
Sarana dan Prasarana P2 TBC (LP)	18.087,5	KEMENTERIAN KESEHATAN
Workshop <i>Skrining</i> dan Deteksi Dini Pada Kelompok Berisiko untuk Pengendalian TBC dalam Pelaksanaan SPM TBC (LP)	3.200,0	KEMENTERIAN KESEHATAN
Koordinasi Program Pencegahan dan Pengendalian TBC (LP)	1.763,0	KEMENTERIAN KESEHATAN
Distribusi Logistik dalam Pengendalian TBC (LP)	1.200,0	KEMENTERIAN KESEHATAN
<i>Surveilans</i> Aktif P2 TBC (LP)	2.083,9	KEMENTERIAN KESEHATAN
Pemenuhan alat dan bahan untuk <i>Skrining</i> , Diagnostik P2 Hepatitis (LP)	148.576,3	KEMENTERIAN KESEHATAN



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

Prioritas Nasional/ <i>Major Project</i>	Alokasi (Rp. Juta)	Instansi Pelaksana
Peningkatan Kapasitas SDM P2 Hepatitis (LP)	1.366,5	KEMENTERIAN KESEHATAN
Renkon Pandemi Influenza (LP)	1.463,0	KEMENTERIAN KESEHATAN
Alat dan bahan kesehatan untuk Deteksi Dini dan Pencegahan Pneumonia (LP)	13.470,8	KEMENTERIAN KESEHATAN
Pelatihan Surveilans Epidemiology (SDM)	12.352,5	KEMENTERIAN KESEHATAN
Pelatihan 9 Penyakit Prioritas (SDM)	31.324,7	KEMENTERIAN KESEHATAN
Pelatihan Surveilans Epidemiology (SDM)	50.731,0	KEMENTERIAN KESEHATAN
Pelatihan 9 Penyakit Prioritas (SDM)	24.750,4	KEMENTERIAN KESEHATAN
Fasilitasi Pembinaan Negara OQ Dalam Rangka Produksi Vaksin (RF)	1.500,0	KEMENTERIAN KESEHATAN
Paket Penyediaan Obat dan Perbekalan Kesehatan program Penyakit Tropis Terabaikan (LP)	65.989,4	KEMENTERIAN KESEHATAN
Paket Penyediaan Obat dan Perbekalan Kesehatan Program Pencegahan dan Pengendalian TB (LP)	288.893,1	KEMENTERIAN KESEHATAN
Paket Penyediaan Obat dan Perbekalan Kesehatan program Pengendalian Malaria (LP)	23.282,7	KEMENTERIAN KESEHATAN
Paket Penyediaan Obat dan Perbekalan Kesehatan Program Pencegahan dan Pengendalian HIV/AIDS (LP)	370.924,8	KEMENTERIAN KESEHATAN
Paket Penyediaan Vaksin Lainnya dan Logistik Penunjang Vaksinasi (LP)	202.350,1	KEMENTERIAN KESEHATAN
Paket Penyediaan Buffer Obat dan Perbekalan Kesehatan (LP)	50.872,7	KEMENTERIAN KESEHATAN
Paket Penyediaan Vaksin Imunisasi Rutin Dasar dan Lanjutan (LP)	1.252.021,0	KEMENTERIAN KESEHATAN
Paket Penyediaan Obat dan Perbekalan Kesehatan untuk Pelayanan Kesehatan Lainnya (LP)	97.153,7	KEMENTERIAN KESEHATAN
Paket Penyediaan Obat dan Perbekkes Haji (LP)	87.484,5	KEMENTERIAN KESEHATAN
Paket Penyediaan Obat Hepatitis (LP)	15.011,1	KEMENTERIAN KESEHATAN
Layanan pengendalian faktor risiko penyakit di pelabuhan penyeberangan (HS)	3.764,1	KEMENTERIAN KESEHATAN
Layanan pengendalian faktor risiko penyakit di bandar udara (HS)	4.309,2	KEMENTERIAN KESEHATAN
Layanan pengendalian faktor risiko penyakit pada situasi khusus (HS)	6.972,7	KEMENTERIAN KESEHATAN
Layanan pengendalian faktor risiko penyakit di Bandar Udara Soekarno Hatta Terminal Internasional (HS))	3.820,6	KEMENTERIAN KESEHATAN
Layanan pengendalian faktor risiko penyakit DBD (HS)	3.026,3	KEMENTERIAN KESEHATAN
Layanan survei faktor risiko penyakit pes (HS)	8.977,3	KEMENTERIAN KESEHATAN
Layanan survei faktor risiko penyakit DBD (HS)	2.793,7	KEMENTERIAN KESEHATAN
Layanan survei faktor risiko penyakit malaria (HS)	2.054,4	KEMENTERIAN KESEHATAN
Layanan survei faktor risiko penyakit HIV AIDS (HS)	1.146,4	KEMENTERIAN KESEHATAN
Layanan survei faktor risiko penyakit TB (HS)	2.365,4	KEMENTERIAN KESEHATAN
Layanan pengendalian faktor risiko penyakit di pelabuhan (HS)	2.462,0	KEMENTERIAN KESEHATAN
Perusahaan yang menerapkan SMK3	3.463,0	KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN
Pemugaran Permukiman Kumuh	184.501,5	KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

Prioritas Nasional/ Major Project	Alokasi (Rp. Juta)	Instansi Pelaksana
<i>Aspek: Pendidikan dan Penempatan Tenaga Kesehatan</i>		
Pelatihan kesehatan (HS)	24.446,2	KEMENTERIAN KESEHATAN
Pelatihan kesehatan (HS)	4.291,7	KEMENTERIAN KESEHATAN
Penugasan Khusus Tenaga Kesehatan Secara Tim (SDM)	50.288,5	KEMENTERIAN KESEHATAN
Registrasi Tenaga Kesehatan (SDM)	16.770,0	KEMENTERIAN KESEHATAN
Akselerasi Produksi Dokter dan Dokter Spesialis (SDM)	1.354,2	KEMENTERIAN KESEHATAN
Prodi dan Lembaga Pendidikan SDM Kesehatan Yang Disesuaikan Dengan Kebutuhan Program Pembangunan Kesehatan (SDM)	2.241,9	KEMENTERIAN KESEHATAN
Bantuan Pendidikan Program Pendidikan Dokter Spesialis (PPDS)/Program Pendidikan Dokter Gigi Spesialis (PPDGS) (SDM)	186.872,5	KEMENTERIAN KESEHATAN
Tenaga Kesehatan Lulusan Poltekkes Kemenkes Yang Didayagunakan di Fasyankes Pemerintah (SDM)	1.294,7	KEMENTERIAN KESEHATAN
Prodi dan Institusi Poltekkes Kemenkes Yang Meningkatkan Status Akreditasinya (SDM)	2.234,0	KEMENTERIAN KESEHATAN
Bantuan pendidikan Program Pendidikan Dokter Spesialis (PPDS)/Program Pendidikan Dokter Gigi Spesialis (PDGS) Papua dan Papua Barat (SDM)	7.049,5	KEMENTERIAN KESEHATAN
Penugasan Khusus Tenaga Kesehatan di Papua dan Papua Barat (SDM)	4.793,8	KEMENTERIAN KESEHATAN
Penugasan Khusus Tenaga Kesehatan Secara Individu (SDM)	40.427,1	KEMENTERIAN KESEHATAN
Bantuan Pendidikan SDM Kesehatan (SDM)	77.125,4	KEMENTERIAN KESEHATAN
Pendayagunaan Dokter Spesialis (SDM)	11.033,7	KEMENTERIAN KESEHATAN
Afirmasi Bantuan Biaya Pendidikan Dokter pada DTPK dan Daerah Bermasalah Kesehatan (SDM)	86.799,1	KEMENTERIAN KESEHATAN
Pelaksanaan Pendidikan Formal Tenaga RS pada Proyek Penguatan Pelayanan Kanker Terpadu (IsDB)	7.281,8	KEMENTERIAN KESEHATAN
Program Bantuan Pendidikan Partial Funding PPDS/PPDGS (SDM)	13.093,9	KEMENTERIAN KESEHATAN
Pendayagunaan Dokter Pasca Internsip (SDM)	14.202,1	KEMENTERIAN KESEHATAN
Pendayagunaan Tenaga Kesehatan WNI Lulusan Luar Negeri (SDM)	23.237,8	KEMENTERIAN KESEHATAN
Bantuan Fellowship bagi Tenaga Kesehatan (SDM)	9.900,9	KEMENTERIAN KESEHATAN
Pelatihan Sistem Kesehatan Nasional (SDM)	22.841,2	KEMENTERIAN KESEHATAN
<i>Aspek: Kemandirian Farmasi dan Alat Kesehatan</i>		
Keputusan Registrasi Pangan Olahan yang Diselesaikan sesuai standar	9.612,0	BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
Keputusan Registrasi Obat yang Diselesaikan Sesuai Standar	12.501,3	BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
Keputusan Registrasi Obat Tradisional dan suplemen kesehatan serta notifikasi kosmetika yang Diselesaikan sesuai standar	11.904,1	BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
Pengawasan Produk Alat Kesehatan dan PKRT (RF)	8.142,9	KEMENTERIAN KESEHATAN
Dinas Kesehatan sebagai Pembina Mutu FKTP dan Wilayah (LP)	1.324,3	KEMENTERIAN KESEHATAN
Rekomendasi Kebijakan Pengembangan Vaksin Covid-19 (RF)	9.000,0	KEMENTERIAN KESEHATAN



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

Prioritas Nasional/ Major Project	Alokasi (Rp. Juta)	Instansi Pelaksana
Lembaga yang dibina dalam pengembangan BBO produksi dalam negeri (RF)	20.395,0	KEMENTERIAN KESEHATAN
Penggunaan OHT dan Fitofarmaka pada fasilitas pelayanan kesehatan (RF)	2.732,5	KEMENTERIAN KESEHATAN
Implementasi perencanaan kebutuhan obat di rumah sakit (RF)	1.239,0	KEMENTERIAN KESEHATAN
Promosi Pemanfaatan Alat Kesehatan Dalam Negeri (RF)	14.635,3	KEMENTERIAN KESEHATAN
Industri alkes yang didampingi dalam pelaksanaan riset dan uji klinik (RF)	1.246,9	KEMENTERIAN KESEHATAN
Tersedianya Industri Alkes Dalam Negeri Yang Memproduksi 10 Alkes Tertinggi <i>by Value</i> dan/ atau <i>by Volume</i>	2.273,9	KEMENTERIAN KESEHATAN
Industri alkes yang didampingi dalam pelaksanaan riset dan uji klinik	1.114,8	KEMENTERIAN KESEHATAN
Pembinaan Industri Farmasi dalam pemenuhan ketersediaan 40 obat esensial dalam JKN	2.062,6	KEMENTERIAN KESEHATAN
Industri bahan baku obat yang memproduksi 10 Molekul obat sesuai kebutuhan dalam negeri	3.330,9	KEMENTERIAN KESEHATAN
Industri farmasi yang dibina dalam percepatan pengembangan dan produksi vaksin dalam negeri serta penguasaan teknologi vaksin platform baru (RF)	3.048,6	KEMENTERIAN KESEHATAN
Industri yang dibina dalam rangka hilirisasi sediaan farmasi (RF)	1.500,0	KEMENTERIAN KESEHATAN
Pembinaan Industri vaksin dalam rangka peningkatan penggunaan produk biologi dalam negeri (RF)	1.500,0	KEMENTERIAN KESEHATAN
Lembaga yang dibina dalam pengembangan obat fitofarmaka (RF)	3.161,9	KEMENTERIAN KESEHATAN
Lembaga Pengembangan vaksin Program Imunisasi rutin (14 antigen) dan Vaksin Lainnya produksi dalam Negeri yang dibina (RF)	7.212,4	KEMENTERIAN KESEHATAN
Lembaga yang dilakukan pembinaan pengembangan inovasi alkes dalam negeri (RF)	4.536,1	KEMENTERIAN KESEHATAN
Pendampingan Implementasi Industri 4.0 sektor Industri Kimia Hilir dan Farmasi	2.700,0	KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN
Komersialisasi Bahan Aktif Obat Produksi Dalam Negeri	1.300,0	KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN
Roadmap Penetapan Ambang Batas Nilai TKDN Produk Farmasi	1.400,0	KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN
<i>Aspek: Inovasi Pembiayaan Kesehatan</i>		
Rekomendasi Kebijakan Sinergisme Kerjasama Pemerintah dan Swasta dalam Mendukung Pelayanan dan Pembiayaan Kesehatan (PK)	650,7	KEMENTERIAN KESEHATAN
Rekomendasi Kebijakan Utilization Review dalam Pengendalian Kuratif dalam JKN (PK)	700,7	KEMENTERIAN KESEHATAN
Rekomendasi Kebijakan Annual Review dan Evaluasi Tarif INA CBG dan Kapitasi pada Program JKN (PK)	137,2	KEMENTERIAN KESEHATAN
<i>Aspek: Digitalisasi dan Pemberdayaan Masyarakat</i>		
Pengadaan Prasarana Data Center (TK)	215.009,3	KEMENTERIAN KESEHATAN
Pendampingan Tata Kelola Program Kesehatan di Dinkes Prov/Kab/Kota - PK	22.314,1	KEMENTERIAN KESEHATAN
Peningkatan kualitas data rutin kesehatan (TK)	3.123,6	KEMENTERIAN KESEHATAN
Pengadaan Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi (TK)	5.611,6	KEMENTERIAN KESEHATAN



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

Prioritas Nasional/ <i>Major Project</i>	Alokasi (Rp. Juta)	Instansi Pelaksana
Rekomendasi kebijakan dari Evaluasi Dampak Pembangunan Kesehatan di tingkat Nasional, Provinsi, dan Kabupaten/Kota (LP)	341.097,1	KEMENTERIAN KESEHATAN
Pengadaan Perangkat Data Center (TK)	46.709,7	KEMENTERIAN KESEHATAN
Integrasi dan Pengembangan Sistem Data Kesehatan (TK)	5.420,5	KEMENTERIAN KESEHATAN
Pemberdayaan masyarakat germas di berbagai tatanan (LP)	14.582,3	KEMENTERIAN KESEHATAN
Pembinaan Pemerintah Daerah dalam rangka Revitalisasi Posyandu (LP)	15.446,1	KEMENTERIAN KESEHATAN
Kebijakan Tata Kelola Produk Teknologi Kesehatan (TK)	2.511,2	KEMENTERIAN KESEHATAN
Pengadaan Sistem Keamanan Jaringan dan Data Center (TK)	15.231,5	KEMENTERIAN KESEHATAN
Pengadaan Perangkat Jaringan Komunikasi (TK)	4.692,6	KEMENTERIAN KESEHATAN
Integrasi dan Pengembangan Sistem Aplikasi Kesehatan (TK)	16.780,0	KEMENTERIAN KESEHATAN
Revitalasi Posyandu (LP)	1.317,4	KEMENTERIAN KESEHATAN
Pengadaan <i>Software</i> Lisensi Pengolah Data dan Komunikasi (TK)	10.682,1	KEMENTERIAN KESEHATAN
Penguatan Ekosistem Digital Kesehatan (TK)	15.412,0	KEMENTERIAN KESEHATAN
Workshop Pengelola Program dalam Penggunaan Aplikasi SIHA 2.0 (LP)	2.184,3	KEMENTERIAN KESEHATAN
Dukungan BUMN	2.161.250,0	
Pengembangan Fasilitas RnD dan Produksi Untuk Vaksin non-EPI		BUMN
Peningkatan kualitas pelayanan RS <i> Holding</i> BUMN		BUMN
Proyek Pengembangan Vaksin Covid-19		BUMN
<i>Integrated Digital Health Care Super Apps</i>		BUMN
PN 5: MEMPERKUAT INFRASTRUKTUR UNTUK MENDUKUNG PENGEMBANGAN EKONOMI DAN PELAYANAN DASAR		
23) MP: Rumah Susun Perkotaan (1 Juta)		
Dukungan Belanja K/L	1.012.528,0	
<i>Aspek: Pembangunan Rumah Susun</i>		
Rumah Susun Hunian ASN/TNI/POLRI	632.610,9	KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
Rumah Susun Hunian MBR/Pekerja	179.917,0	KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
Hunian Pekerja Konstruksi (IKN)	200.000,0	KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
Dukungan BUMN	1.197.030,0	
Revitalisasi Rusun Klender		BUMN (Terintegrasi dengan PSN)
Revitalisasi Rusun Kemayoran		BUMN (Terintegrasi dengan PSN)
Revitalisasi Rusun Tanah Abang		BUMN (Terintegrasi dengan PSN)



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

Prioritas Nasional/ Major Project	Alokasi (Rp. Juta)	Instansi Pelaksana
Revitalisasi Rusun Kebon Kacang		BUMN (Terintegrasi dengan PSN)
24) MP: Akses Air Minum Perpipaan (10 Juta Sambungan Rumah)		
Dukungan Belanja K/L, KPBU, dan DAK	7.568.923,0	
<i>Aspek: Pengembangan SPAM Regional</i>		
Pembangunan SPAM Regional	579.573,2	KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT (Terintegrasi dengan PSN)
Peningkatan SPAM Regional	100.768,0	KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
Perluasan SPAM Regional	797.523,3	KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT (Terintegrasi dengan PSN)
SPAM Jatiluhur I (Unsolicited) (Hulu) (Konstruksi - Investasi BUP KPBU)	560.000,0	KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT(KPBU) (Terintegrasi dengan PSN)
SPAM Karian - Serpong (Sisi Hulu) (Unsolicited) (Konstruksi - Investasi BUP KPBU)	810.000,0	KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT(KPBU) (Terintegrasi dengan PSN)
<i>Aspek: Pengembangan SPAM Kab/ Kota</i>		
Air Minum - Tematik Pengentasan Permukiman Kumuh Terpadu (1173 - Kota Langsa)	943,6	DAK
Air Minum - Tematik Pengentasan Permukiman Kumuh Terpadu (2104 - Kab. Lingga)	6.359,4	DAK
Air Minum - Tematik Pengentasan Permukiman Kumuh Terpadu (3322 - Kab. Semarang)	472,6	DAK
Air Minum - Tematik Pengentasan Permukiman Kumuh Terpadu (3327 - Kab. Pematang)	615,0	DAK
Air Minum - Tematik Pengentasan Permukiman Kumuh Terpadu (3372 - Kota Surakarta)	1.757,9	DAK
Air Minum - Tematik Pengentasan Permukiman Kumuh Terpadu (3517 - Kab. Jombang)	11.395,3	DAK
Air Minum - Tematik Pengentasan Permukiman Kumuh Terpadu (6472 - Kota Samarinda)	550,0	DAK
Air Minum - Tematik Pengentasan Permukiman Kumuh Terpadu (7371 - Kota Makassar)	545,0	DAK
Air Minum - Tematik Pengentasan Permukiman Kumuh Terpadu (7372 - Kota Pare Pare)	4.067,2	DAK
Air Minum - Tematik Pengentasan Permukiman Kumuh Terpadu (7404 - Kab. Kolaka)	2.364,5	DAK
Air Minum - Tematik Pengentasan Permukiman Kumuh Terpadu (8271 - Kota Ternate)	415,0	DAK
Air Minum (1101 - Kab. Simeulue)	4.003,4	DAK
Air Minum (1102 - Kab. Aceh Singkil)	3.676,8	DAK
Air Minum (1103 - Kab. Aceh Selatan)	9.646,6	DAK
Air Minum (1104 - Kab. Aceh Tenggara)	6.717,7	DAK
Air Minum (1105 - Kab. Aceh Timur)	10.257,3	DAK
Air Minum (1106 - Kab. Aceh Tengah)	5.688,4	DAK
Air Minum (1107 - Kab. Aceh Barat)	6.278,3	DAK
Air Minum (1108 - Kab. Aceh Besar)	9.441,0	DAK
Air Minum (1109 - Kab. Pidie)	9.161,9	DAK



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

Prioritas Nasional/ <i>Major Project</i>	Alokasi (Rp. Juta)	Instansi Pelaksana
Air Minum (1110 - Kab. Bireuen)	6.177,3	DAK
Air Minum (1111 - Kab. Aceh Utara)	10.127,7	DAK
Air Minum (1112 - Kab. Aceh Barat Daya)	6.001,8	DAK
Air Minum (1113 - Kab. Gayo Lues)	6.191,5	DAK
Air Minum (1114 - Kab. Aceh Tamiang)	5.563,5	DAK
Air Minum (1115 - Kab. Nagan Raya)	5.461,3	DAK
Air Minum (1116 - Kab. Aceh Jaya)	6.515,9	DAK
Air Minum (1117 - Kab. Bener Meriah)	8.737,0	DAK
Air Minum (1118 - Kab. Pidie Jaya)	8.029,6	DAK
Air Minum (3604 - Kab. Serang)	14.192,1	DAK
Air Minum (3672 - Kota Cilegon)	3.884,2	DAK
Air Minum (3673 - Kota Serang)	15.000,0	DAK
Air Minum (5201 - Kab. Lombok Barat)	11.882,8	DAK
Air Minum (5202 - Kab. Lombok Tengah)	9.411,6	DAK
Air Minum (5203 - Kab. Lombok Timur)	9.065,5	DAK
Air Minum (5204 - Kab. Sumbawa)	9.417,5	DAK
Air Minum (5205 - Kab. Dompu)	5.658,1	DAK
Air Minum (5206 - Kab. Bima)	9.274,7	DAK
Air Minum (5207 - Kab. Sumbawa Barat)	7.489,6	DAK
Air Minum (5208 - Kab. Lombok Utara)	5.731,4	DAK
Air Minum (5272 - Kota Bima)	6.488,4	DAK
Air Minum (5301 - Kab. Sumba Barat)	8.582,8	DAK
Air Minum (5302 - Kab. Sumba Timur)	10.899,5	DAK
Air Minum (5303 - Kab. Kupang)	11.891,6	DAK
Air Minum (5304 - Kab. Timor Tengah Selatan)	11.339,6	DAK
Air Minum (5306 - Kab. Belu)	9.299,1	DAK
Air Minum (5307 - Kab. Alor)	12.171,7	DAK
Air Minum (5308 - Kab. Lembata)	2.676,5	DAK
Air Minum (5309 - Kab. Flores Timur)	8.435,7	DAK
Air Minum (5310 - Kab. Sikka)	5.987,6	DAK
Air Minum (5311 - Kab. Ende)	5.566,4	DAK
Air Minum (5312 - Kab. Ngada)	6.023,9	DAK
Air Minum (5313 - Kab. Manggarai)	6.222,3	DAK
Air Minum (5314 - Kab. Rote Ndao)	2.797,7	DAK
Air Minum (5315 - Kab. Manggarai Barat)	6.422,5	DAK
Air Minum (5316 - Kab. Sumba Tengah)	8.188,1	DAK
Air Minum (5317 - Kab. Sumba Barat Daya)	11.806,5	DAK
Air Minum (5318 - Kab. Nagekeo)	8.521,6	DAK
Air Minum (5319 - Kab. Manggarai Timur)	10.939,2	DAK
Air Minum (5320 - Kab. Sabu Raijua)	3.701,0	DAK
Air Minum (5321 - Kab. Malaka)	8.781,0	DAK
Air Minum (6101 - Kab. Sambas)	8.181,6	DAK



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

Prioritas Nasional/ <i>Major Project</i>	Alokasi (Rp. Juta)	Instansi Pelaksana
Air Minum (6102 - Kab. Bengkayang)	13.951,1	DAK
Air Minum (6103 - Kab. Landak)	14.143,8	DAK
Air Minum (6104 - Kab. Mempawah)	9.983,7	DAK
Air Minum (6105 - Kab. Sanggau)	13.312,6	DAK
Air Minum (6106 - Kab. Ketapang)	6.171,6	DAK
Air Minum (6107 - Kab. Sintang)	12.668,3	DAK
Air Minum (6108 - Kab. Kapuas Hulu)	8.045,8	DAK
Air Minum (6109 - Kab. Sekadau)	13.041,0	DAK
Air Minum (6110 - Kab. Melawi)	10.698,0	DAK
Air Minum (6111 - Kab. Kayong Utara)	9.054,0	DAK
Air Minum (6112 - Kab. Kubu Raya)	10.370,1	DAK
Air Minum (6171 - Kota Pontianak)	3.216,3	DAK
Air Minum (6172 - Kota Singkawang)	4.718,6	DAK
Air Minum (63 - Provinsi Kalimantan Selatan)	39.743,1	DAK
Air Minum (6301 - Kab. Tanah Laut)	15.000,0	DAK
Air Minum (6302 - Kab. Kotabaru)	4.556,4	DAK
Air Minum (6303 - Kab. Banjar)	14.171,8	DAK
Air Minum (6304 - Kab. Barito Kuala)	14.914,2	DAK
Air Minum (6305 - Kab. Tapin)	11.262,9	DAK
Air Minum (6306 - Kab. Hulu Sungai Selatan)	12.948,5	DAK
Air Minum (6308 - Kab. Hulu Sungai Utara)	7.215,6	DAK
Air Minum (6309 - Kab. Tabalong)	13.080,4	DAK
Air Minum (6310 - Kab. Tanah Bumbu)	14.097,5	DAK
Air Minum (6311 - Kab. Balangan)	7.383,1	DAK
Air Minum (6372 - Kota Banjarbaru)	5.009,6	DAK
Air Minum (7401 - Kab. Buton)	9.098,8	DAK
Air Minum (7402 - Kab. Muna)	9.319,9	DAK
Air Minum (7404 - Kab. Kolaka)	7.070,5	DAK
Air Minum (7405 - Kab. Konawe Selatan)	10.671,5	DAK
Air Minum (7406 - Kab. Bombana)	9.123,8	DAK
Air Minum (7407 - Kab. Wakatobi)	4.301,8	DAK
Air Minum (7409 - Kab. Buton Utara)	9.376,6	DAK
Air Minum (7410 - Kab. Konawe Utara)	9.078,8	DAK
Air Minum (7411 - Kab. Kolaka Timur)	9.535,6	DAK
Air Minum (7412 - Kab. Konawe Kepulauan)	8.452,7	DAK
Air Minum (7413 - Kab. Muna Barat)	2.471,2	DAK
Air Minum (7414 - Kab. Buton Tengah)	9.666,7	DAK
Air Minum (7415 - Kab. Buton Selatan)	1.206,7	DAK
Air Minum (7471 - Kota Kendari)	3.750,0	DAK
Air Minum (7472 - Kota Bau Bau)	3.280,0	DAK
Air Minum (7601 - Kab. Majene)	6.202,1	DAK
Air Minum (7602 - Kab. Polewali Mandar)	10.326,6	DAK



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

Prioritas Nasional/ <i>Major Project</i>	Alokasi (Rp. Juta)	Instansi Pelaksana
Air Minum (7603 - Kab. Mamasa)	14.570,8	DAK
Air Minum (7604 - Kab. Mamuju)	9.668,9	DAK
Air Minum (7605 - Kab. Pasangkayu)	7.376,7	DAK
Air Minum (7606 - Kab. Mamuju Tengah)	7.964,3	DAK
Air Minum (1171 - Kota Banda Aceh)	5.189,6	DAK
Air Minum (1172 - Kota Sabang)	1.622,1	DAK
Air Minum (1173 - Kota Langsa)	5.284,3	DAK
Air Minum (1175 - Kota Subulussalam)	8.365,9	DAK
Air Minum (12 - Provinsi Sumatera Utara)	54.187,5	DAK
Air Minum (1201 - Kab. Nias)	15.149,7	DAK
Air Minum (1202 - Kab. Mandailing Natal)	13.779,5	DAK
Air Minum (1203 - Kab. Tapanuli Selatan)	11.043,6	DAK
Air Minum (1204 - Kab. Tapanuli Tengah)	12.748,0	DAK
Air Minum (1205 - Kab. Tapanuli Utara)	1.450,1	DAK
Air Minum (1206 - Kab. Toba)	3.417,0	DAK
Air Minum (1207 - Kab. Labuhanbatu)	1.493,9	DAK
Air Minum (1208 - Kab. Asahan)	4.500,0	DAK
Air Minum (1209 - Kab. Simalungun)	4.940,6	DAK
Air Minum (1210 - Kab. Dairi)	6.472,4	DAK
Air Minum (1211 - Kab. Karo)	7.755,4	DAK
Air Minum (1212 - Kab. Deli Serdang)	6.379,5	DAK
Air Minum (1213 - Kab. Langkat)	2.223,4	DAK
Air Minum (1214 - Kab. Nias Selatan)	14.935,1	DAK
Air Minum (1215 - Kab. Humbang Hasundutan)	9.649,9	DAK
Air Minum (1216 - Kab. Pakpak Bharat)	4.960,5	DAK
Air Minum (1217 - Kab. Samosir)	7.597,0	DAK
Air Minum (1218 - Kab. Serdang Bedagai)	6.659,7	DAK
Air Minum (1219 - Kab. Batu Bara)	5.716,4	DAK
Air Minum (1220 - Kab. Padang Lawas Utara)	10.605,1	DAK
Air Minum (1221 - Kab. Padang Lawas)	9.094,1	DAK
Air Minum (1222 - Kab. Labuhanbatu Selatan)	6.404,9	DAK
Air Minum (1223 - Kab. Labuhanbatu Utara)	6.062,3	DAK
Air Minum (1224 - Kab. Nias Utara)	13.936,9	DAK
Air Minum (1225 - Kab. Nias Barat)	10.884,6	DAK
Air Minum (1272 - Kota Tanjung Balai)	4.325,6	DAK
Air Minum (1274 - Kota Tebing Tinggi)	6.194,7	DAK
Air Minum (1275 - Kota Medan)	3.330,4	DAK
Air Minum (1278 - Kota Gunungsitoli)	9.354,8	DAK
Air Minum (3201 - Kab. Bogor)	5.205,7	DAK
Air Minum (3202 - Kab. Sukabumi)	2.730,8	DAK
Air Minum (3203 - Kab. Cianjur)	7.754,6	DAK
Air Minum (3204 - Kab. Bandung)	12.497,5	DAK



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

Prioritas Nasional/ <i>Major Project</i>	Alokasi (Rp. Juta)	Instansi Pelaksana
Air Minum (3205 - Kab. Garut)	10.527,5	DAK
Air Minum (3206 - Kab. Tasikmalaya)	11.732,2	DAK
Air Minum (3207 - Kab. Ciamis)	13.021,3	DAK
Air Minum (3208 - Kab. Kuningan)	7.320,1	DAK
Air Minum (3209 - Kab. Cirebon)	11.392,8	DAK
Air Minum (3210 - Kab. Majalengka)	10.330,3	DAK
Air Minum (3211 - Kab. Sumedang)	9.461,4	DAK
Air Minum (3212 - Kab. Indramayu)	4.111,0	DAK
Air Minum (3213 - Kab. Subang)	6.761,1	DAK
Air Minum (3214 - Kab. Purwakarta)	9.414,1	DAK
Air Minum (3215 - Kab. Karawang)	6.362,8	DAK
Air Minum (3216 - Kab. Bekasi)	5.977,1	DAK
Air Minum (3218 - Kab. Pangandaran)	7.685,6	DAK
Air Minum (3272 - Kota Sukabumi)	1.600,0	DAK
Air Minum (3275 - Kota Bekasi)	4.967,2	DAK
Air Minum (3278 - Kota Tasikmalaya)	6.225,6	DAK
Air Minum (3279 - Kota Banjar)	6.137,0	DAK
Air Minum (33 - Provinsi Jawa Tengah)	56.336,0	DAK
Air Minum (3301 - Kab. Cilacap)	4.429,1	DAK
Air Minum (3302 - Kab. Banyumas)	12.545,8	DAK
Air Minum (3303 - Kab. Purbalingga)	14.713,0	DAK
Air Minum (3304 - Kab. Banjarnegara)	8.669,5	DAK
Air Minum (3305 - Kab. Kebumen)	8.257,0	DAK
Air Minum (3306 - Kab. Purworejo)	11.000,6	DAK
Air Minum (3307 - Kab. Wonosobo)	11.096,9	DAK
Air Minum (3308 - Kab. Magelang)	11.217,2	DAK
Air Minum (3309 - Kab. Boyolali)	4.541,5	DAK
Air Minum (3311 - Kab. Sukoharjo)	3.351,5	DAK
Air Minum (3312 - Kab. Wonogiri)	8.963,4	DAK
Air Minum (3313 - Kab. Karanganyar)	8.109,5	DAK
Air Minum (3314 - Kab. Sragen)	9.362,4	DAK
Air Minum (3315 - Kab. Grobogan)	5.953,1	DAK
Air Minum (3316 - Kab. Blora)	9.002,3	DAK
Air Minum (3317 - Kab. Rembang)	8.346,3	DAK
Air Minum (3318 - Kab. Pati)	4.273,9	DAK
Air Minum (3319 - Kab. Kudus)	5.562,6	DAK
Air Minum (3320 - Kab. Jepara)	9.419,5	DAK
Air Minum (3321 - Kab. Demak)	7.994,9	DAK
Air Minum (3322 - Kab. Semarang)	5.367,0	DAK
Air Minum (3323 - Kab. Temanggung)	9.809,8	DAK
Air Minum (3324 - Kab. Kendal)	6.037,5	DAK
Air Minum (3325 - Kab. Batang)	6.432,5	DAK



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

Prioritas Nasional/ <i>Major Project</i>	Alokasi (Rp. Juta)	Instansi Pelaksana
Air Minum (3326 - Kab. Pekalongan)	7.566,1	DAK
Air Minum (3327 - Kab. Pematang)	8.222,0	DAK
Air Minum (3328 - Kab. Tegal)	2.045,8	DAK
Air Minum (3329 - Kab. Brebes)	14.192,1	DAK
Air Minum (3373 - Kota Salatiga)	8.139,7	DAK
Air Minum (3374 - Kota Semarang)	8.515,3	DAK
Air Minum (3501 - Kab. Pacitan)	14.801,8	DAK
Air Minum (3502 - Kab. Ponorogo)	5.227,4	DAK
Air Minum (3503 - Kab. Trenggalek)	6.528,0	DAK
Air Minum (3504 - Kab. Tulungagung)	3.846,9	DAK
Air Minum (3505 - Kab. Blitar)	13.608,1	DAK
Air Minum (3506 - Kab. Kediri)	3.264,2	DAK
Air Minum (3507 - Kab. Malang)	2.365,4	DAK
Air Minum (3508 - Kab. Lumajang)	11.212,2	DAK
Air Minum (3509 - Kab. Jember)	2.152,5	DAK
Air Minum (3510 - Kab. Banyuwangi)	2.128,8	DAK
Air Minum (3511 - Kab. Bondowoso)	10.963,3	DAK
Air Minum (3512 - Kab. Situbondo)	7.743,5	DAK
Air Minum (3513 - Kab. Probolinggo)	1.842,5	DAK
Air Minum (3514 - Kab. Pasuruan)	24.200,0	DAK
Air Minum (3515 - Kab. Sidoarjo)	35.000,0	DAK
Air Minum (3516 - Kab. Mojokerto)	9.116,1	DAK
Air Minum (3517 - Kab. Jombang)	6.906,8	DAK
Air Minum (3518 - Kab. Nganjuk)	6.913,2	DAK
Air Minum (3519 - Kab. Madiun)	10.720,3	DAK
Air Minum (3520 - Kab. Magetan)	3.585,4	DAK
Air Minum (3521 - Kab. Ngawi)	7.198,7	DAK
Air Minum (3522 - Kab. Bojonegoro)	4.496,1	DAK
Air Minum (3523 - Kab. Tuban)	10.879,6	DAK
Air Minum (3524 - Kab. Lamongan)	8.191,7	DAK
Air Minum (3525 - Kab. Gresik)	40.327,8	DAK
Air Minum (3526 - Kab. Bangkalan)	7.078,3	DAK
Air Minum (3527 - Kab. Sampang)	6.476,6	DAK
Air Minum (3528 - Kab. Pamekasan)	4.603,0	DAK
Air Minum (3529 - Kab. Sumenep)	5.589,2	DAK
Air Minum (3574 - Kota Probolinggo)	1.227,7	DAK
Air Minum (3575 - Kota Pasuruan)	1.169,8	DAK
Air Minum (3601 - Kab. Pandeglang)	7.910,7	DAK
Air Minum (3602 - Kab. Lebak)	13.314,6	DAK
Air Minum (3603 - Kab. Tangerang)	1.655,7	DAK
Pembangunan SPAM Kabupaten/Kota	408.112,6	KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT (Terintegrasi dengan PSN)



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

Prioritas Nasional/ <i>Major Project</i>	Alokasi (Rp. Juta)	Instansi Pelaksana
Pembinaan dan Pengawasan Pengembangan SPAM	83.573,1	KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
Peningkatan SPAM Kabupaten/Kota	231.660,6	KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
Perluasan SPAM Kabupaten/Kota	358.437,3	KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
Infrastruktur Air Minum Berbasis Masyarakat	491.110,0	KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
<i>Aspek: Pengembangan Air Baku</i>		
Prasarana Air Baku Penempat yang dibangun	20.709,7	KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
Embung Gumelem yang dibangun	20.000,0	KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
Embung di Kabupaten Cilacap yang di bangun	22.145,0	KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
Embung Jaro di Kabupaten Tabalong yang dibangun	32.975,0	KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
Air Baku di Kabupaten Banyumas yang dibangun	72.000,0	KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
Air Baku Bendungan Gongseng yang dibangun	68.470,7	KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
Air Baku Bendungan Lolak yang dibangun	50.000,0	KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
Air Baku Bendungan Paselloreng yang dibangun	73.500,0	KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
Air Baku Bendungan Tukul yang dibangun	57.127,6	KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
Air Baku KEK Sorong yang dibangun	99.045,3	KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
Air Baku Bendungan Kuningan yang dibangun	97.679,1	KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
Air Baku Bendungan Bendo yang dibangun	52.805,1	KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
Air Baku Bendungan Pidekso yang dibangun	28.315,3	KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
Jaringan Transmisi Air Baku dari Bendungan Ladongi Kabupaten Kolaka Timur yang dibangun (Tahap II)	80.000,0	KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
Penyediaan Air Baku Sidikalang - Siempat Nempu Hulu yang dibangun	29.000,0	KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
Intake dan Jaringan Pipa Transmisi Penyediaan Air Baku di Wonosari Bengkalis yang dibangun	35.000,0	KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
Intake dan Jaringan Pipa Transmisi Kampung Merancang Kab. Berau yang dibangun	34.999,4	KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
KSCS - Pipa Cabang WTP Rangkas Bitung yang dibangun	69.326,3	KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
Siphon Cikarang yang dibangun	30.000,0	KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
Penyediaan Air Baku Berbah Taman Kalasan Pendukung KSPN Borobudur yang dibangun	12.000,0	KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
Air Baku Raja Ampat yang dibangun	50.429,0	KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

Prioritas Nasional/ <i>Major Project</i>	Alokasi (Rp. Juta)	Instansi Pelaksana
Jaringan dan Reservoir Mendukung Embung Konservasi Nakamura Pulau Morotal yang dibangun	25.000,0	KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
Air Baku Sistem Payaman Tahap 2 di Kab. Magelang yang dibangun	16.000,0	KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
Jaringan Pipa Transmisi Penyediaan Air Baku Tuk Ulang Kab. Brebes yang direhabilitasi	34.837,0	KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
Penyediaan Air Baku Nusa Penida Di Kabupaten Klungkung Tahap II yang dibangun	50.000,0	KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
Penyediaan Air Baku di Kabupaten Lanny Jaya yang dibangun	35.000,0	KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
Dukungan BUMN	6.267.320,0	
SPAM Regional Jatiluhur I		BUMN (Terintegrasi dengan PSN)
SPAM Regional Juanda		BUMN (Terintegrasi dengan PSN)
SPAM Regional Karian Serpong		BUMN (Terintegrasi dengan PSN)
Pekanbaru Water Supply		BUMN
25) MP: Akses Sanitasi (air limbah domestik) Layak dan Aman (90 persen Rumah Tangga)		
Dukungan Belanja K/L dan DAK	4.103.193,0	
<i>Aspek: SPALD-T</i>		
Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat Skala Kota	1.551.674,3	KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT (Terintegrasi dengan PSN)
Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat Skala Permukiman	39.200,0	KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
<i>Aspek: SPALD-S</i>		
Sanitasi - Tematik Pengentasan Permukiman Kumuh Terpadu (1171 - Kota Banda Aceh)	1.795,5	DAK
Sanitasi - Tematik Pengentasan Permukiman Kumuh Terpadu (1173 - Kota Langsa)	2.992,5	DAK
Sanitasi - Tematik Pengentasan Permukiman Kumuh Terpadu (2104 - Kab. Lingga)	1.493,3	DAK
Sanitasi - Tematik Pengentasan Permukiman Kumuh Terpadu (3322 - Kab. Semarang)	678,3	DAK
Sanitasi - Tematik Pengentasan Permukiman Kumuh Terpadu (3327 - Kab. Pemalang)	818,0	DAK
Sanitasi - Tematik Pengentasan Permukiman Kumuh Terpadu (3372 - Kota Surakarta)	2.023,0	DAK
Sanitasi - Tematik Pengentasan Permukiman Kumuh Terpadu (3517 - Kab. Jombang)	6.474,9	DAK
Sanitasi - Tematik Pengentasan Permukiman Kumuh Terpadu (3525 - Kab. Gresik)	1.520,0	DAK
Sanitasi - Tematik Pengentasan Permukiman Kumuh Terpadu (6472 - Kota Samarinda)	1.197,0	DAK
Sanitasi - Tematik Pengentasan Permukiman Kumuh Terpadu (7371 - Kota Makassar)	2.005,1	DAK
Sanitasi - Tematik Pengentasan Permukiman Kumuh Terpadu (7372 - Kota Pare Pare)	1.150,0	DAK
Sanitasi - Tematik Pengentasan Permukiman Kumuh Terpadu (7404 - Kab. Kolaka)	2.756,0	DAK



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

Prioritas Nasional/ <i>Major Project</i>	Alokasi (Rp. Juta)	Instansi Pelaksana
Sanitasi - Tematik Pengentasan Permukiman Kumuh Terpadu (8102 - Kab. Maluku Tenggara)	1.369,0	DAK
Sanitasi - Tematik Pengentasan Permukiman Kumuh Terpadu (8271 - Kota Ternate)	1.040,0	DAK
Sanitasi (1101 - Kab. Simeulue)	5.615,6	DAK
Sanitasi (1102 - Kab. Aceh Singkil)	4.066,4	DAK
Sanitasi (1103 - Kab. Aceh Selatan)	2.401,1	DAK
Sanitasi (1104 - Kab. Aceh Tenggara)	6.653,2	DAK
Sanitasi (1105 - Kab. Aceh Timur)	9.463,9	DAK
Sanitasi (1106 - Kab. Aceh Tengah)	6.841,0	DAK
Sanitasi (1107 - Kab. Aceh Barat)	6.035,7	DAK
Sanitasi (1108 - Kab. Aceh Besar)	6.330,3	DAK
Sanitasi (1109 - Kab. Pidie)	10.695,8	DAK
Sanitasi (1110 - Kab. Bireuen)	4.902,3	DAK
Sanitasi (1111 - Kab. Aceh Utara)	12.895,9	DAK
Sanitasi (1112 - Kab. Aceh Barat Daya)	6.695,2	DAK
Sanitasi (1113 - Kab. Gayo Lues)	3.651,7	DAK
Sanitasi (1114 - Kab. Aceh Tamiang)	7.246,8	DAK
Sanitasi (1115 - Kab. Nagan Raya)	7.153,4	DAK
Sanitasi (1116 - Kab. Aceh Jaya)	6.668,9	DAK
Sanitasi (1117 - Kab. Bener Meriah)	4.417,8	DAK
Sanitasi (1118 - Kab. Pidie Jaya)	3.901,8	DAK
Sanitasi (1171 - Kota Banda Aceh)	6.082,9	DAK
Sanitasi (1172 - Kota Sabang)	1.252,5	DAK
Sanitasi (1173 - Kota Langsa)	8.805,4	DAK
Sanitasi (1174 - Kota Lhokseumawe)	8.686,1	DAK
Sanitasi (1175 - Kota Subulussalam)	5.639,1	DAK
Sanitasi (1201 - Kab. Nias)	8.173,3	DAK
Sanitasi (1202 - Kab. Mandailing Natal)	11.549,5	DAK
Sanitasi (1203 - Kab. Tapanuli Selatan)	7.143,4	DAK
Sanitasi (1204 - Kab. Tapanuli Tengah)	6.021,3	DAK
Sanitasi (1205 - Kab. Tapanuli Utara)	7.003,3	DAK
Sanitasi (1206 - Kab. Toba)	4.030,6	DAK
Sanitasi (1207 - Kab. Labuhanbatu)	2.451,2	DAK
Sanitasi (1209 - Kab. Simalungun)	3.326,6	DAK
Sanitasi (1210 - Kab. Dairi)	5.727,3	DAK
Sanitasi (1211 - Kab. Karo)	6.202,9	DAK
Sanitasi (1212 - Kab. Deli Serdang)	4.989,9	DAK
Sanitasi (1213 - Kab. Langkat)	3.781,8	DAK
Sanitasi (1214 - Kab. Nias Selatan)	12.921,8	DAK
Sanitasi (1215 - Kab. Humbang Hasundutan)	7.280,4	DAK
Sanitasi (1216 - Kab. Pakpak Bharat)	4.933,9	DAK
Sanitasi (1217 - Kab. Samosir)	3.036,3	DAK



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

Prioritas Nasional/ Major Project	Alokasi (Rp. Juta)	Instansi Pelaksana
Sanitasi (1218 - Kab. Serdang Bedagai)	6.414,1	DAK
Sanitasi (1219 - Kab. Batu Bara)	6.142,9	DAK
Sanitasi (1220 - Kab. Padang Lawas Utara)	6.047,2	DAK
Sanitasi (1221 - Kab. Padang Lawas)	2.451,2	DAK
Sanitasi (1222 - Kab. Labuhanbatu Selatan)	4.762,3	DAK
Sanitasi (1224 - Kab. Nias Utara)	8.457,0	DAK
Sanitasi (1225 - Kab. Nias Barat)	6.212,3	DAK
Sanitasi (1271 - Kota Sibolga)	2.049,5	DAK
Sanitasi (1272 - Kota Tanjung Balai)	4.749,6	DAK
Sanitasi (1273 - Kota Pematang Siantar)	3.993,8	DAK
Sanitasi (1274 - Kota Tebing Tinggi)	3.431,6	DAK
Sanitasi (1275 - Kota Medan)	2.687,9	DAK
Sanitasi (1276 - Kota Binjai)	3.501,7	DAK
Sanitasi (1277 - Kota Padangsidempuan)	8.775,1	DAK
Sanitasi (1278 - Kota Gunungsitoli)	6.831,6	DAK
Sanitasi (3201 - Kab. Bogor)	14.066,7	DAK
Sanitasi (3202 - Kab. Sukabumi)	6.120,9	DAK
Sanitasi (3203 - Kab. Cianjur)	11.758,8	DAK
Sanitasi (3204 - Kab. Bandung)	8.544,7	DAK
Sanitasi (3205 - Kab. Garut)	5.417,6	DAK
Sanitasi (3206 - Kab. Tasikmalaya)	13.781,5	DAK
Sanitasi (3207 - Kab. Ciamis)	7.746,2	DAK
Sanitasi (3208 - Kab. Kuningan)	9.747,2	DAK
Sanitasi (3209 - Kab. Cirebon)	12.945,1	DAK
Sanitasi (3210 - Kab. Majalengka)	2.281,1	DAK
Sanitasi (3211 - Kab. Sumedang)	8.162,3	DAK
Sanitasi (3212 - Kab. Indramayu)	5.588,6	DAK
Sanitasi (3214 - Kab. Purwakarta)	10.687,4	DAK
Sanitasi (3215 - Kab. Karawang)	6.938,3	DAK
Sanitasi (3216 - Kab. Bekasi)	7.886,8	DAK
Sanitasi (3218 - Kab. Pangandaran)	7.424,9	DAK
Sanitasi (3271 - Kota Bogor)	10.455,0	DAK
Sanitasi (3272 - Kota Sukabumi)	2.701,3	DAK
Sanitasi (3273 - Kota Bandung)	1.710,8	DAK
Sanitasi (3275 - Kota Bekasi)	5.655,2	DAK
Sanitasi (3276 - Kota Depok)	2.129,0	DAK
Sanitasi (3277 - Kota Cimahi)	4.192,0	DAK
Sanitasi (3278 - Kota Tasikmalaya)	11.818,5	DAK
Sanitasi (3301 - Kab. Cilacap)	13.074,7	DAK
Sanitasi (3302 - Kab. Banyumas)	14.147,5	DAK
Sanitasi (3303 - Kab. Purbalingga)	11.882,4	DAK
Sanitasi (3304 - Kab. Banjarnegara)	6.581,9	DAK



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

Prioritas Nasional / Major Project	Alokasi (Rp. Juta)	Instansi Pelaksana
Sanitasi (3305 - Kab. Kebumen)	9.816,0	DAK
Sanitasi (3306 - Kab. Purworejo)	4.324,5	DAK
Sanitasi (3307 - Kab. Wonosobo)	14.115,5	DAK
Sanitasi (3308 - Kab. Magelang)	10.289,6	DAK
Sanitasi (3309 - Kab. Boyolali)	2.238,3	DAK
Sanitasi (3310 - Kab. Klaten)	4.202,0	DAK
Sanitasi (3312 - Kab. Wonogiri)	7.276,8	DAK
Sanitasi (3313 - Kab. Karanganyar)	3.201,5	DAK
Sanitasi (3314 - Kab. Sragen)	4.792,3	DAK
Sanitasi (3315 - Kab. Grobogan)	8.316,4	DAK
Sanitasi (3316 - Kab. Blora)	3.564,2	DAK
Sanitasi (3317 - Kab. Rembang)	1.818,9	DAK
Sanitasi (3318 - Kab. Pati)	2.299,1	DAK
Sanitasi (3320 - Kab. Jepara)	7.684,4	DAK
Sanitasi (3321 - Kab. Demak)	7.708,2	DAK
Sanitasi (3322 - Kab. Semarang)	3.516,7	DAK
Sanitasi (3323 - Kab. Temanggung)	10.787,0	DAK
Sanitasi (3324 - Kab. Kendal)	4.152,0	DAK
Sanitasi (3325 - Kab. Batang)	5.548,6	DAK
Sanitasi (3326 - Kab. Pekalongan)	8.345,0	DAK
Sanitasi (3327 - Kab. Pemalang)	5.940,3	DAK
Sanitasi (3328 - Kab. Tegal)	12.433,8	DAK
Sanitasi (3329 - Kab. Brebes)	8.996,0	DAK
Sanitasi (3371 - Kota Magelang)	2.975,4	DAK
Sanitasi (3372 - Kota Surakarta)	2.301,7	DAK
Sanitasi (3373 - Kota Salatiga)	2.201,0	DAK
Sanitasi (3374 - Kota Semarang)	6.320,5	DAK
Sanitasi (3376 - Kota Tegal)	2.751,3	DAK
Sanitasi (3501 - Kab. Pacitan)	10.632,9	DAK
Sanitasi (3502 - Kab. Ponorogo)	9.308,3	DAK
Sanitasi (3503 - Kab. Trenggalek)	9.143,7	DAK
Sanitasi (3504 - Kab. Tulungagung)	6.629,4	DAK
Sanitasi (3505 - Kab. Blitar)	11.282,6	DAK
Sanitasi (3506 - Kab. Kediri)	6.748,2	DAK
Sanitasi (3507 - Kab. Malang)	7.413,5	DAK
Sanitasi (3508 - Kab. Lumajang)	11.237,3	DAK
Sanitasi (3509 - Kab. Jember)	3.877,8	DAK
Sanitasi (3511 - Kab. Bondowoso)	11.355,4	DAK
Sanitasi (3512 - Kab. Situbondo)	5.742,7	DAK
Sanitasi (3513 - Kab. Probolinggo)	2.761,3	DAK
Sanitasi (3514 - Kab. Pasuruan)	3.326,6	DAK
Sanitasi (3515 - Kab. Sidoarjo)	1.097,8	DAK



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

Prioritas Nasional/ Major Project	Alokasi (Rp. Juta)	Instansi Pelaksana
Sanitasi (3516 - Kab. Mojokerto)	5.869,3	DAK
Sanitasi (3517 - Kab. Jombang)	6.711,8	DAK
Sanitasi (3518 - Kab. Nganjuk)	9.307,8	DAK
Sanitasi (3519 - Kab. Madiun)	8.411,8	DAK
Sanitasi (3520 - Kab. Magetan)	13.406,4	DAK
Sanitasi (3521 - Kab. Ngawi)	10.315,6	DAK
Sanitasi (3522 - Kab. Bojonegoro)	4.324,5	DAK
Sanitasi (3523 - Kab. Tuban)	10.062,9	DAK
Sanitasi (3524 - Kab. Lamongan)	4.300,8	DAK
Sanitasi (3525 - Kab. Gresik)	3.326,6	DAK
Sanitasi (3526 - Kab. Bangkalan)	14.251,1	DAK
Sanitasi (3527 - Kab. Sampang)	7.503,6	DAK
Sanitasi (3528 - Kab. Pamekasan)	10.627,1	DAK
Sanitasi (3529 - Kab. Sumenep)	9.780,0	DAK
Sanitasi (3571 - Kota Kediri)	2.000,9	DAK
Sanitasi (3572 - Kota Blitar)	1.300,6	DAK
Sanitasi (3573 - Kota Malang)	6.177,9	DAK
Sanitasi (3575 - Kota Pasuruan)	4.556,0	DAK
Sanitasi (3576 - Kota Mojokerto)	1.189,1	DAK
Sanitasi (3578 - Kota Surabaya)	1.601,0	DAK
Sanitasi (3601 - Kab. Pandeglang)	7.003,3	DAK
Sanitasi (3602 - Kab. Lebak)	6.653,2	DAK
Sanitasi (3603 - Kab. Tangerang)	1.520,7	DAK
Sanitasi (3604 - Kab. Serang)	6.757,7	DAK
Sanitasi (3673 - Kota Serang)	4.937,3	DAK
Sanitasi (5201 - Kab. Lombok Barat)	6.373,0	DAK
Sanitasi (5202 - Kab. Lombok Tengah)	10.136,0	DAK
Sanitasi (5203 - Kab. Lombok Timur)	10.790,9	DAK
Sanitasi (5204 - Kab. Sumbawa)	14.980,6	DAK
Sanitasi (5205 - Kab. Dompu)	7.250,5	DAK
Sanitasi (5206 - Kab. Bima)	8.654,1	DAK
Sanitasi (5207 - Kab. Sumbawa Barat)	5.077,4	DAK
Sanitasi (5208 - Kab. Lombok Utara)	8.114,3	DAK
Sanitasi (5271 - Kota Mataram)	6.962,8	DAK
Sanitasi (5272 - Kota Bima)	7.260,3	DAK
Sanitasi (5301 - Kab. Sumba Barat)	6.828,6	DAK
Sanitasi (5302 - Kab. Sumba Timur)	4.051,9	DAK
Sanitasi (5303 - Kab. Kupang)	7.254,2	DAK
Sanitasi (5304 - Kab. Timor Tengah Selatan)	10.124,3	DAK
Sanitasi (5305 - Kab. Timor Tengah Utara)	7.406,7	DAK
Sanitasi (5306 - Kab. Belu)	8.378,9	DAK
Sanitasi (5307 - Kab. Alor)	6.448,3	DAK



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

Prioritas Nasional/ Major Project	Alokasi (Rp. Juta)	Instansi Pelaksana
Sanitasi (5308 - Kab. Lembata)	5.781,7	DAK
Sanitasi (5309 - Kab. Flores Timur)	7.535,5	DAK
Sanitasi (5310 - Kab. Sikka)	5.701,7	DAK
Sanitasi (5311 - Kab. Ende)	7.908,3	DAK
Sanitasi (5312 - Kab. Ngada)	5.378,5	DAK
Sanitasi (5313 - Kab. Manggarai)	7.907,0	DAK
Sanitasi (5314 - Kab. Rote Ndao)	3.453,7	DAK
Sanitasi (5315 - Kab. Manggarai Barat)	6.692,6	DAK
Sanitasi (5316 - Kab. Sumba Tengah)	6.429,0	DAK
Sanitasi (5317 - Kab. Sumba Barat Daya)	10.952,2	DAK
Sanitasi (5318 - Kab. Nagekeo)	3.036,3	DAK
Sanitasi (5319 - Kab. Manggarai Timur)	8.462,9	DAK
Sanitasi (5320 - Kab. Sabu Raijua)	3.188,1	DAK
Sanitasi (5321 - Kab. Malaka)	6.810,9	DAK
Sanitasi (5371 - Kota Kupang)	4.001,9	DAK
Sanitasi (6101 - Kab. Sambas)	7.147,7	DAK
Sanitasi (6102 - Kab. Bengkayang)	7.097,2	DAK
Sanitasi (6103 - Kab. Landak)	9.558,0	DAK
Sanitasi (6104 - Kab. Mempawah)	3.361,6	DAK
Sanitasi (6105 - Kab. Sanggau)	8.244,2	DAK
Sanitasi (6106 - Kab. Ketapang)	7.784,3	DAK
Sanitasi (6107 - Kab. Sintang)	8.333,9	DAK
Sanitasi (6108 - Kab. Kapuas Hulu)	4.926,7	DAK
Sanitasi (6109 - Kab. Sekadau)	6.454,4	DAK
Sanitasi (6110 - Kab. Melawi)	7.755,2	DAK
Sanitasi (6111 - Kab. Kayong Utara)	13.580,0	DAK
Sanitasi (6112 - Kab. Kubu Raya)	15.099,4	DAK
Sanitasi (6171 - Kota Pontianak)	2.393,2	DAK
Sanitasi (6172 - Kota Singkawang)	2.101,0	DAK
Sanitasi (6301 - Kab. Tanah Laut)	4.051,9	DAK
Sanitasi (6302 - Kab. Kotabaru)	5.002,4	DAK
Sanitasi (6303 - Kab. Banjar)	8.322,3	DAK
Sanitasi (6304 - Kab. Barito Kuala)	9.234,4	DAK
Sanitasi (6305 - Kab. Tapin)	5.851,1	DAK
Sanitasi (6306 - Kab. Hulu Sungai Selatan)	7.143,7	DAK
Sanitasi (6307 - Kab. Hulu Sungai Tengah)	2.891,4	DAK
Sanitasi (6308 - Kab. Hulu Sungai Utara)	5.158,5	DAK
Sanitasi (6309 - Kab. Tabalong)	5.095,9	DAK
Sanitasi (6310 - Kab. Tanah Bumbu)	2.984,4	DAK
Sanitasi (6311 - Kab. Balangan)	6.625,9	DAK
Sanitasi (6371 - Kota Banjarmasin)	2.780,4	DAK
Sanitasi (6372 - Kota Banjarbaru)	6.955,5	DAK



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

Prioritas Nasional/ <i>Major Project</i>	Alokasi (Rp. Juta)	Instansi Pelaksana
Sanitasi (7401 - Kab. Buton)	5.693,0	DAK
Sanitasi (7402 - Kab. Muna)	5.966,1	DAK
Sanitasi (7403 - Kab. Konawe)	6.134,9	DAK
Sanitasi (7404 - Kab. Kolaka)	7.049,1	DAK
Sanitasi (7405 - Kab. Konawe Selatan)	12.215,7	DAK
Sanitasi (7406 - Kab. Bombana)	8.924,7	DAK
Sanitasi (7407 - Kab. Wakatobi)	5.889,6	DAK
Sanitasi (7408 - Kab. Kolaka Utara)	7.126,6	DAK
Sanitasi (7409 - Kab. Buton Utara)	5.890,5	DAK
Sanitasi (7410 - Kab. Konawe Utara)	1.368,6	DAK
Sanitasi (7411 - Kab. Kolaka Timur)	5.421,9	DAK
Sanitasi (7412 - Kab. Konawe Kepulauan)	1.626,6	DAK
Sanitasi (7413 - Kab. Muna Barat)	4.933,9	DAK
Sanitasi (7414 - Kab. Buton Tengah)	5.850,8	DAK
Sanitasi (7415 - Kab. Buton Selatan)	7.152,7	DAK
Sanitasi (7471 - Kota Kendari)	5.987,8	DAK
Sanitasi (7472 - Kota Bau Bau)	6.494,0	DAK
Sanitasi (7601 - Kab. Majene)	7.722,9	DAK
Sanitasi (7602 - Kab. Polewali Mandar)	6.193,1	DAK
Sanitasi (7603 - Kab. Mamasa)	8.274,1	DAK
Sanitasi (7604 - Kab. Mamuju)	7.479,0	DAK
Sanitasi (7605 - Kab. Pasangkayu)	10.198,0	DAK
Sanitasi (7606 - Kab. Mamuju Tengah)	13.791,4	DAK
Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Setempat Skala Kota	18.156,4	KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Setempat Skala Individu	759.722,3	KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
<i>Aspek: Kelembagaan</i>		
Provinsi yang mengalami penguatan kapasitas daerah dalam pengelolaan sanitasi (Kab/Kota)	1.500,0	KEMENTERIAN DALAM NEGERI
Pembinaan dan Pengawasan Pengembangan Sanitasi	163.440,0	KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
26) MP: Pemulihan 4 DAS Kritis		
Dukungan Belanja K/L	1.239.922,0	
<i>Aspek: Pengendalian Banjir</i>		
Pengendalian banjir Sungai Ciliwung yang dibangun	20.000,0	KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
Sudetan Ciliwung-KBT yang dibangun	467.157,3	KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
Pengendali Banjir Sungai Binanga Siguluan, Aek Sigumbang, dan Aek Limbong yang dibangun	55.000,0	KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
Pengendalian banjir Sungai Aek Silang yang dibangun	20.000,0	KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

Prioritas Nasional/ Major Project	Alokasi (Rp. Juta)	Instansi Pelaksana
<i>Aspek: Pemeliharaan</i>		
Kegiatan Citarum Harum yang dilaksanakan	168.336,2	KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
<i>Aspek: Bangunan Pengendali Banjir</i>		
Pompa Ancol Sentiong yang dibangun	141.928,8	KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
Groundsill Cipamingkis yang dibangun (Tahap II)	367.500,0	KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
27) MP: 18 Waduk Multiguna		
Dukungan Belanja K/L	3.105.598,0	
<i>Aspek: Perencanaan/Persiapan</i>		
Matenggeng Multipurpose Dam Development Sub Project (ESP KOICA)	23.343,3	KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
<i>Aspek: Pendukung</i>		
Pendukung IPDMIP	255,5	KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
Pendukung SIMURP	650,0	KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
<i>Aspek: Konstruksi</i>		
Bendungan Mbay yang dibangun	125.450,0	KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT (Terintegrasi dengan PSN)
Daerah irigasi Komerling yang dibangun	15.750,0	KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
Daerah Irigasi Komerling yang direhabilitasi	63.561,4	KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
Jenelata Dam Construction Project yang dilaksanakan	348.606,2	KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
Riam Kiwa Multipurpose Dam Construction Project yang dilaksanakan	173.127,1	KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
Pelosika Multipurpose Dam Construction Project yang dilaksanakan	1.200,0	KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
<i>Aspek: Infrastruktur Irigasi</i>		
Integrated Participatory Development and Management of Irrigation Program (IPDMIP) yang dilaksanakan	174.537,2	KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
Strategic Irrigation Modernization and Urgent Rehabilitation Project (SIMURP) yang dilaksanakan	970.436,9	KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
Rentang Irrigation Modernization Project (RIMP) yang dilaksanakan	1.027.963,0	KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
Komerling Irrigation Project (KIP) yang dilaksanakan	180.717,5	KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
28) MP: Pengamanan Pesisir 5 Perkotaan Pantura Jawa		
Dukungan Belanja K/L	5.819.025,0	
<i>Aspek: Pengendalian Banjir</i>		
Pengendalian banjir Kali Bekasi yang dibangun	123.089,3	KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
Pengendalian banjir Kali Lamong yang dibangun	25.000,0	KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

Prioritas Nasional/ Major Project	Alokasi (Rp. Juta)	Instansi Pelaksana
Pengendalian banjir rob Sungai Loji Banger yang dibangun	122.778,6	KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT (Terintegrasi dengan PSN)
Peningkatan Kapasitas Sudetan Floodway (Plangwot - Sedayu Lawas) yang dibangun (Tahap II)	87.000,0	KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
<i>Aspek: Pengaman Pantai</i>		
Pengamanan Pantai Eretan yang dibangun	30.000,0	KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
Pengamanan Pantai di Jakarta yang dibangun (Tahap II)	607.259,2	KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT (Terintegrasi dengan PSN)
Pengaman Pantai Kabupaten Cirebon yang dibangun	40.000,0	KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
Pembangunan Jalan Bebas Hambatan - TOL SEMARANG - DEMAK 1A	508.392,9	KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
Pembangunan Jalan Bebas Hambatan - TOL SEMARANG - DEMAK 1B	673.809,2	KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
Pembangunan Jalan Bebas Hambatan - TOL SEMARANG - DEMAK 1C	307.016,7	KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
Jalan Tol Semarang - Demak (Konstruksi - Investasi BUP KPBU)	3.284.471,0	KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT(KPBU)
<i>Aspek: Pemantauan Penurunan Muka Tanah</i>		
Jaringan Pemantauan Air Tanah Berbasis Cekungan Air Tanah	3.600,0	KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
Rekomendasi Geologi Penurunan Muka Tanah di Kawasan Pesisir Pantai Utara Pulau Jawa (PATGTL)	5.976,6	KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
Rekomendasi Geologi Hasil Pemantauan Penurunan Muka Tanah (BKAT)	631,1	KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
Dukungan BUMN	337.000,0	
Jalan Tol Semarang - Demak		BUMN (Terintegrasi dengan PSN)
29) MP: Jaringan Pelabuhan Utama Terpadu		
Dukungan Belanja K/L	133.107,7	
<i>Sub: Pelabuhan Patimban</i>		
<i>Aspek: Standardisasi Pelabuhan</i>		
Pembangunan Pelabuhan Patimban (I)	32.957,7	KEMENTERIAN PERHUBUNGAN (Terintegrasi dengan PSN)
Patimban Port Development Project Phase (I-2)	100.000,0	KEMENTERIAN PERHUBUNGAN (Terintegrasi dengan PSN)
Patimban Port Development Project II	100,0	KEMENTERIAN PERHUBUNGAN (Terintegrasi dengan PSN)
<i>Aspek: Konektivitas Integrasi dengan Hinterland</i>		
Pembangunan Jalan Bebas Hambatan - AKSES TOL PATIMBAN	50,0	KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
Dukungan BUMN	4.454.000,0	
Pembangunan Jalan Akses Timur Pelabuhan Kalibaru/New Priok Eastern Access (NPEA)		BUMN (Terintegrasi dengan PSN)
Pembangunan dan Pengembangan Pelabuhan Terminal Kijing		BUMN (Terintegrasi dengan PSN)
Pembangunan Makassar New Port Tahap IB dan Tahap IC		BUMN (Terintegrasi dengan PSN)



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

Prioritas Nasional/ Major Project	Alokasi (Rp. Juta)	Instansi Pelaksana
Pengembangan Terminal Petikemas Pelabuhan Tanjung Priok		BUMN
Jalan Tol Akses Pelabuhan Patimban		BUMN (Terintegrasi dengan PSN)
30) MP: Kereta Api Makassar-Pare Pare		
Dukungan Belanja K/L	520.108,9	
<i>Aspek: Operasional dan Pemeliharaan</i>		
Penyelenggaraan Layanan Kereta Api Perintis lintas Makassar - Parepare	25.927,5	KEMENTERIAN PERHUBUNGAN (Terintegrasi dengan PSN)
Kewajiban Pembayaran atas Ketersediaan Layanan (<i>Availability Payment</i>) (Dukungan/Pendamping KPBU)	267.490,0	KEMENTERIAN PERHUBUNGAN (Terintegrasi dengan PSN)
<i>Aspek: Konstruksi</i>		
Pembangunan Prasarana Perkeretaapian untuk Mendukung Pengoperasian Kereta Api Makassar - Pare Pare antara Mandai - Palanro	226.691,4	KEMENTERIAN PERHUBUNGAN (Terintegrasi dengan PSN)
31) MP: KA Kecepatan Tinggi Pulau Jawa (Jakarta - Semarang dan Jakarta - Bandung)		
Dukungan BUMN	884.000,0	
Pembangunan <i>High Speed Railway</i> Jakarta - Bandung		BUMN (Terintegrasi dengan PSN)
32) MP: Jalan Tol Trans Sumatera Aceh-Lampung		
Dukungan Belanja K/L	400,0	
<i>Aspek: Pembangunan Jalan</i>		
Pembangunan Jalan Bebas Hambatan - DEVELOPMENT OF NEW TUNNEL PAYAKUMBUH - PANGKALAN	100,0	KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
Pembangunan Jalan Bebas Hambatan - BTS. KOTA JAMBI - TEMPINO	100,0	KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
Pembangunan Jalan Bebas Hambatan - TOL BETUNG - JAMBI	200,0	KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
Dukungan BUMN	11.294.000,0	
Jalan Tol Trans Sumatera		BUMN (Terintegrasi dengan PSN)
33) MP: Jalan Trans pada 18 Pulau Tertinggal, Terluar, dan Terdepan		
Dukungan Belanja K/L	1.527.400,0	
<i>Aspek: Preservasi Jalan</i>		
Jalan Trans pada 18 Pulau Tertinggal, Terluar, dan Terdepan (MP) - Provinsi Aceh	4.016,0	KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
Jalan Trans pada 18 Pulau Tertinggal, Terluar, dan Terdepan (MP) - Provinsi Aceh	14.878,3	KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
Jalan Trans pada 18 Pulau Tertinggal, Terluar, dan Terdepan (MP) (Padat Karya) - Provinsi Aceh	2.989,1	KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
Jalan Trans pada 18 Pulau Tertinggal, Terluar, dan Terdepan (MP) - Kab. Kepulauan Mentawai	28.019,0	KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
Jalan Trans pada 18 Pulau Tertinggal, Terluar, dan Terdepan (MP) - MODANMOHE - NAMROLE	4.115,8	KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
Jalan Trans pada 18 Pulau Tertinggal, Terluar, dan Terdepan (MP) - Provinsi Nusa Tenggara Timur	33.915,0	KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

Prioritas Nasional/ Major Project	Alokasi (Rp. Juta)	Instansi Pelaksana
Jalan Trans pada 18 Pulau Tertinggal, Terluar, dan Terdepan (MP) (Padat Karya) - Provinsi Nusa Tenggara Timur	5.985,0	KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
Jalan Trans pada 18 Pulau Tertinggal, Terluar, dan Terdepan (MP) - Provinsi Sulawesi Utara	83.995,8	KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
Jalan Trans pada 18 Pulau Tertinggal, Terluar, dan Terdepan (MP) - Provinsi Sulawesi Utara	171.325,6	KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
Jalan Trans pada 18 Pulau Tertinggal, Terluar, dan Terdepan (MP) (Padat Karya) - Provinsi Sulawesi Utara	4.210,0	KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
Jalan Trans pada 18 Pulau Tertinggal, Terluar, dan Terdepan (MP) - Provinsi Sulawesi Tenggara	38.684,5	KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
Jalan Trans pada 18 Pulau Tertinggal, Terluar, dan Terdepan (MP) (Padat Karya) - Provinsi Sulawesi Tenggara	1.306,7	KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
Jalan Trans pada 18 Pulau Tertinggal, Terluar, dan Terdepan (MP) (Padat Karya) - Provinsi Sulawesi Tenggara	6.842,0	KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
Jalan Trans pada 18 Pulau Tertinggal, Terluar, dan Terdepan (MP) - Provinsi Maluku	14.765,0	KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
Jalan Trans pada 18 Pulau Tertinggal, Terluar, dan Terdepan (MP) - Provinsi Maluku	348.581,4	KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
Jalan Trans pada 18 Pulau Tertinggal, Terluar, dan Terdepan (MP) (Padat Karya) - Provinsi Maluku	7.240,3	KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
Jalan Trans pada 18 Pulau Tertinggal, Terluar, dan Terdepan (MP) - SALEMAN - BESI (KM. 50)	4.743,0	KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
Jalan Trans pada 18 Pulau Tertinggal, Terluar, dan Terdepan (MP) - SP. WAIPIA - SALEMAN	2.939,9	KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
Jalan Trans pada 18 Pulau Tertinggal, Terluar, dan Terdepan (MP) - BANGGOI - BULA	6.330,5	KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
Jalan Trans pada 18 Pulau Tertinggal, Terluar, dan Terdepan (MP) - LAIMU - WERINAMA	1.763,9	KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
<i>Aspek: Pembangunan Jembatan</i>		
Pembangunan Jembatan Trans pada 18 Pulau Tertinggal, Terluar, dan Terdepan - BANJAR SARI - MALAKONI - KAYU APUH (P. ENGGANO)	40.919,4	KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
Pembangunan Jembatan Trans pada 18 Pulau Tertinggal, Terluar, dan Terdepan - Provinsi Kepulauan Riau	39.297,5	KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
Pembangunan Jembatan Trans pada 18 Pulau Tertinggal, Terluar, dan Terdepan - Provinsi Maluku	176.519,9	KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
Pembangunan Jembatan Trans pada 18 Pulau Tertinggal, Terluar, dan Terdepan - Provinsi Maluku Utara	10.022,4	KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
<i>Aspek: Pembangunan Jalan</i>		
Pembangunan Jalan Trans pada 18 Pulau Tertinggal, Terluar, dan Terdepan (MP) - Jalan Trans Mentawai Ruas Sigapokna - Labuhan Bajau (Mentawai)	42.682,3	KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
Pembangunan Jalan Trans pada 18 Pulau Tertinggal, Terluar, dan Terdepan (MP) - SIOBAN - KATIET	72.297,0	KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
Pembangunan Jalan Trans pada 18 Pulau Tertinggal, Terluar, dan Terdepan (MP) - Jalan trans Pulau Enggano (Banjarsari - Malakoni - Kahyapu)	19.817,7	KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

Prioritas Nasional/ Major Project	Alokasi (Rp. Juta)	Instansi Pelaksana
Pembangunan Jalan Trans pada 18 Pulau Tertinggal, Terluar, dan Terdepan (MP) - Jalan Teluk Buton - Klarik	100.561,6	KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
Pembangunan Jalan Trans pada 18 Pulau Tertinggal, Terluar, dan Terdepan (MP) - SP. SEKUNYAM - DESA CEMAGA	46.324,0	KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
Pembangunan Jalan Trans pada 18 Pulau Tertinggal, Terluar, dan Terdepan (MP) - PENINTING - PAYALAMAN	27.000,0	KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
Pembangunan Jalan Trans pada 18 Pulau Tertinggal, Terluar, dan Terdepan (MP) - BIAK - JUNCTION - KOREM	40.000,0	KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
Pembangunan Jalan Trans pada 18 Pulau Tertinggal, Terluar, dan Terdepan (MP) - Jalan Elat - Sp. Ngurdu - Fako - Holat - Ohoiraut (P. Key Besar)	36.000,0	KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
Pembangunan Jalan Trans pada 18 Pulau Tertinggal, Terluar, dan Terdepan (MP) - Provinsi Maluku	88.932,0	KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
34) MP: Jalan Trans Papua Merauke - Sorong		
Dukungan Belanja K/L	2.034.975,0	
<i>Aspek: Preservasi Jembatan</i>		
Jalan Trans Papua Merauke-Sorong (MP) - JEMBATAN RUAS YETTI - SENGGI - MAMBERAMO	185.921,6	KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
Jalan Trans Papua Merauke-Sorong (MP) - ELELIM - PASVALEY - BTS. KOTA WAMENA	17.797,7	KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
Jalan Trans Papua Merauke-Sorong (MP) - SEREDALA - DEKAI	2.093,9	KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
Jalan Trans Papua Merauke-Sorong (MP) - USILIMO - KARUBAGA	7.101,0	KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
Jalan Trans Papua Merauke-Sorong (MP) - TIMIKA - SP. PELRA - POMAKO	15.932,7	KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
Jalan Trans Papua Merauke-Sorong (MP) - JEMBATAN KALI KOLOP KERING (JALAN DEKAI-SEREDALA)	28.500,0	KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
Jalan Trans Papua Merauke-Sorong (MP) - Provinsi Papua Barat	32.012,0	KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
Jalan Trans Papua Merauke-Sorong (MP) - KUMURKEH - AYAMASI - SNOPI	2.232,0	KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
Jalan Trans Papua Merauke-Sorong (MP) - Provinsi Papua	21.231,0	KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
Jalan Trans Papua Merauke-Sorong (MP) - MAYON - SIMPANG KAPIRAYA	8.072,6	KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
Jalan Trans Papua Merauke-Sorong (MP) - Kab. Merauke	1.000,0	KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
Jalan Trans Papua Merauke-Sorong (MP) - Kab. Boven Digoel	9.356,1	KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
Jalan Trans Papua Merauke-Sorong (MP) - Kab. Yalimo	3.184,5	KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
<i>Aspek: Preservasi Jalan</i>		
Jalan Trans Papua Merauke-Sorong (MP) - WANGGAR - KWATISORE (BTS. PROV. PAPUA BARAT)	1.606,1	KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
Jalan Trans Papua Merauke-Sorong (MP) - Provinsi Papua Barat	199.715,5	KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

Prioritas Nasional/ Major Project	Alokasi (Rp. Juta)	Instansi Pelaksana
Jalan Trans Papua Merauke-Sorong (MP) - Provinsi Papua	108.383,0	KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
Jalan Trans Papua Merauke-Sorong (MP) - MINDIPTANA - TANAH MERAH	12.203,0	KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
Jalan Trans Papua Merauke-Sorong (MP) - Kab. Merauke	12.528,0	KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
Jalan Trans Papua Merauke-Sorong (MP) - TANAH MERAH - GENTENTIRI	25.185,8	KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
Jalan Trans Papua Merauke-Sorong (MP) - GENTENTIRI - BTS. KAB. MERAUKE / BOVEN DIGOEL	41.712,8	KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
Jalan Trans Papua Merauke-Sorong (MP) - ELELIM - PASVALEY - BTS. KOTA WAMENA	43.991,5	KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
Jalan Trans Papua Merauke-Sorong (MP) - WAROPKO - MINDIPTANA	26.400,0	KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
Jalan Trans Papua Merauke-Sorong (MP) - USILIMO - KARUBAGA	42.000,0	KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
Jalan Trans Papua Merauke-Sorong (MP) - KARUBAGA - ILU - MULIA	31.500,0	KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
Jalan Trans Papua Merauke-Sorong (MP) - Kab. Puncak Jaya	28.150,0	KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
Jalan Trans Papua Merauke-Sorong (MP) - Kab. Boven Digoel	91.204,6	KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
Jalan Trans Papua Merauke-Sorong (MP) - Getentiri - Bts. Kab. Merauke/Kab. Boven Digoel	57.352,6	KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
Jalan Trans Papua Merauke-Sorong (MP) - Kab. Tolikara	19.970,0	KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
Jalan Trans Papua Merauke-Sorong (MP) - Kab. Keerom	3.800,0	KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
Jalan Trans Papua Merauke-Sorong (MP) - Kab. Nduga	52.914,0	KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
Jalan Trans Papua Merauke-Sorong (MP) - Kab. Yalimo	135.646,9	KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
<i>Aspek: Pembangunan Jembatan</i>		
Pembangunan Jembatan Trans Papua Merauke-Sorong (MP) - Getentiri - Bts. Kab. Merauke/Kab. Boven Digoel	21.537,3	KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
Pembangunan Jembatan Trans Papua Merauke-Sorong (MP) - JALAN KAMPUNG MURI - KWATISORE (BATAS PROVINSI PAPUA)	140.000,0	KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
Pembangunan Jembatan Trans Papua Merauke-Sorong (MP) - JEMBATAN RUAS ELELIM - MAMBERAMO	13.000,0	KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
Pembangunan Jembatan Trans Papua Merauke-Sorong (MP) - JALAN IWUR - WAROPKO	63.758,0	KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
Pembangunan Jembatan Trans Papua Merauke-Sorong (MP) - MAMEH - WINDESI (WERABUR)	60.000,0	KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
Pembangunan Jembatan Trans Papua Merauke-Sorong (MP) - JEMBATAN MAMBERAMO - ELELIM II	38.974,0	KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
Pembangunan Jembatan Trans Papua Merauke-Sorong (MP) - Kab. Nabire	8.584,5	KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

Prioritas Nasional/ Major Project	Alokasi (Rp. Juta)	Instansi Pelaksana
<i>Aspek: Pembangunan Jalan</i>		
Pembangunan Jalan Trans Papua Merauke-Sorong (MP) - JALAN AMBUNI - KARUAN	67.500,0	KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
Pembangunan Jalan Trans Papua Merauke-Sorong (MP) - JEMBATAN KAMP. MURI - KWATISORE (BTS. PROVINSI PAPUA) I	60.000,0	KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
Pembangunan Jalan Trans Papua Merauke-Sorong (MP) - JEMBATAN KAMP. MURI - KWATISORE (BTS. PROVINSI PAPUA) II	38.000,0	KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
Pembangunan Jalan Trans Papua Merauke-Sorong (MP) - JALAN MAMEH - KARUAN	25.750,0	KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
Pembangunan Jalan Trans Papua Merauke-Sorong (MP) - JALAN SP. GORO - KP. MURI (BTS. PROVINSI PAPUA)	57.984,0	KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
Pembangunan Jalan Trans Papua Merauke-Sorong (MP) - JEMBATAN GUNUNG PASIR	27.000,0	KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
Pembangunan Jalan Trans Papua Merauke-Sorong (MP) - IWUR - WAROPKO II	44.637,2	KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
Pembangunan Jalan Trans Papua Merauke-Sorong (MP) - KWATISORE - KAMP. MURI (BTS. PROVINSI PAPUA BARAT)	97.006,3	KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
35) MP: Jembatan Udara 37 Rute di Papua		
Dukungan Belanja K/L	335.678,0	
<i>Aspek: Pengembangan Infrastruktur</i>		
Pengembangan Bandar Udara Wamena Tahap III - PN	10.000,0	KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
Pengembangan Bandar Udara Ilaga - PN	10.000,0	KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
Pengembangan Bandar Udara Tanah Merah - PN	1.808,0	KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
Pengembangan Bandar Udara Mozes Kilangin-Timika, Papua	75.900,0	KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
Pengembangan Bandar Udara Oksibil - PN	5.000,0	KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
Pengembangan Bandar Udara Ewer-Asmat, Papua	80.000,0	KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
Pengembangan Bandar udara Sobaham - PN	5.000,0	KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
Pengembangan Bandar Udara Mopah-Merauke, Papua	66.918,8	KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
<i>Aspek: Layanan</i>		
Subsidi Operasi Angkutan Udara Kargo (MP)	12.115,2	KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
Angkutan Kargo Perintis (MP)	63.566,2	KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
Angkutan BBM untuk Kargo Perintis (MP)	5.369,9	KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
36) MP: Sistem Angkutan Umum Massal Perkotaan di 6 Wilayah Metropolitan: Jakarta, Surabaya, Bandung, Medan, Semarang dan Makassar		
Dukungan Belanja K/L	2.222.140,0	
<i>Aspek: Pengembangan Angkutan Umum Massal Perkotaan Berbasis Rel</i>		
Engineering Services For Jakarta Mass Rapid Transit East-West Line Project Phase I Stage I	36.996,0	KEMENTERIAN PERHUBUNGAN (Terintegrasi dengan PSN)
Paket A (Pembangunan Fasilitas Perkeretaapian untuk Manggarai s/d Jatinegara) (Tahap II)	226.654,0	KEMENTERIAN PERHUBUNGAN



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

Prioritas Nasional/ <i>Major Project</i>	Alokasi (Rp. Juta)	Instansi Pelaksana
Peningkatan Jalur KA lintas Medan - Belawan Tahap I segmen Medan - Labuan	112.079,7	KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
<i>Engineering Services Of Jakarta Mass Rapid Transit East - West Line Project Phase I Stage II</i>	100,0	KEMENTERIAN PERHUBUNGAN (Terintegrasi dengan PSN)
Stasiun Kereta Api Jabodetabek	452,0	KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
Pembangunan Jalur Ganda KA Kiaracondong - Cicalengka Tahap 2 segmen Kiaracondong - Gedebage dan segmen Haurpugur - Cicalengka	297.539,0	KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
Stasiun Kereta Api Jabodetabek (PEN)	14.551,7	KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
Pembangunan Jalur KA Medan - Binjai	517.923,2	KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
Surabaya Regional Railway Line (Phase I)	100,0	KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
Peningkatan Fasilitas Operasi Perkeretaapian pada lintas Jatinegara - Bogor dan Manggarai - Jakarta Kota	210.000,0	KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
Jabodetabek Railway Capacity Enhancement Phase I	13.476,4	KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
Pembangunan Prasarana Perkeretaapian Pada Jalur Ganda KA antara Padalarang - Bandung Lintas Bogor - Yogyakarta	238.100,5	KEMENTERIAN PERHUBUNGAN (Terintegrasi dengan PSN)
Pekerjaan Peningkatan Sistem Elektrifikasi Perkeretaapian Jabodetabek	186.530,2	KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
Reaktivasi Angkutan <i>Commuter Line</i> Kemayoran-Tanjung Priuk	67.680,0	KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
Pembelian Layanan (<i>Buy The Services</i>) Angkutan Massal Berbasis Jalan Di Kota Medan (Prioritas Nasional)	70.365,2	KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
<i>Aspek: Pengembangan Angkutan Umum Massal Perkotaan Berbasis Jalan</i>		
Subsidi Angkutan Penumpang (<i>Buy The Service</i>) Jabodetabek	48.764,1	KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
<i>Area Traffic Control System</i> (ATCS) Terpadu Jabodetabek	11.660,0	KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
<i>Area Traffic Control System</i> (ATCS) Terpadu Jabodetabek (PEN)	12.000,0	KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
Pembangunan Sistem Angkutan Umum Massal (Prioritas Nasional)	50.000,0	KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
Pengembangan Angkutan Massal Berbasis Jalan di Kawasan Perkotaan dengan Skema Pembelian Layanan BTS (<i>Buy The Service</i>) di Kota Bandung (Prioritas Nasional)	35.182,9	KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
Pengembangan Angkutan Massal Berbasis Jalan di Kawasan Perkotaan dengan Skema Pembelian Layanan BTS (<i>Buy The Service</i>) di Kota Surabaya (Prioritas Nasional)	53.348,0	KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
Pengembangan Angkutan Massal Berbasis Jalan di Kawasan Perkotaan dengan Skema Pembelian Layanan BTS (<i>Buy The Service</i>) di Kota Makassar (Prioritas Nasional)	18.636,8	KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
Dukungan BUMN	10.390.000,0	
Pengembangan dan Pengadaan Transportasi Massal (Armada Bus) Perkotaan di 6 Kota Metropolitan		BUMN
Pembangunan LRT Jabodebek		BUMN (Terintegrasi dengan PSN)



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

Prioritas Nasional/ Major Project	Alokasi (Rp. Juta)	Instansi Pelaksana
37) MP: Penyediaan Tenaga Listrik: Pembangkit Listrik 27.000 MW, Transmisi 19.000 kms dan Gardu Induk 38.000 MVA		
Dukungan Belanja K/L	335.480,0	
<i>Aspek: Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan</i>		
Rekomendasi Pengendalian Pembangunan Pembangkit Listrik	1.587,8	KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
Rekomendasi Pengendalian Pembangunan Jaringan Transmisi dan Gardu Induk	1.488,4	KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
Rekomendasi Pengendalian Pembangunan Jaringan Distribusi dan Gardu Distribusi	1.017,1	KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
Rekomendasi Penerapan Keselamatan Ketenagalistrikan pada Infrastruktur Pengisian Listrik pada Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai	172,1	KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
<i>Aspek: Pembangkit Listrik</i>		
PLTMH	17.400,0	KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
PLTS Terpadu	51.961,1	KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
<i>Aspek: Kebijakan tarif, harga dan subsidi</i>		
Rekomendasi Reviu dan Evaluasi Subsidi Listrik Tepat Sasaran	549,3	KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
<i>Aspek: Jaringan last mile dan sambungan listrik</i>		
Pemasangan Sambungan Baru Listrik bagi Rumah Tangga Belum Berlistrik yang Tidak Mampu atau Berada di Daerah 3T	201.646,0	KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
APDAL	58.092,2	KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
Dukungan BUMN	81.334.360,0	
Advance Metering Infrastructure (AMI)		BUMN
Infrastruktur Pengisian Listrik untuk Kendaraan Bermotor Listrik		BUMN
Maintenance Capex, Rutin UIP, dan IDC		BUMN
Pembangunan Jaringan Distribusi dan Gardu Distribusi: Penuntasan dan Perbaikan Akses Tenaga Listrik		BUMN
Pembangunan Jaringan Transmisi dan Gardu Induk: Backbone Interkoneksi Kalimantan		BUMN (Terintegrasi dengan PSN)
Pembangunan Jaringan Transmisi dan Gardu Induk: Backbone Interkoneksi Nusa Tenggara		BUMN (Terintegrasi dengan PSN)
Pembangunan Jaringan Transmisi dan Gardu Induk: Backbone Interkoneksi Sulawesi		BUMN (Terintegrasi dengan PSN)
Pembangunan Jaringan Transmisi dan Gardu Induk: Backbone Interkoneksi Sumatera		BUMN (Terintegrasi dengan PSN)
Pembangunan Jaringan Transmisi dan Gardu Induk: Pemasaran		BUMN
Pembangunan Jaringan Transmisi dan Gardu Induk: Sistem JMB		BUMN
Pembangunan Jaringan Transmisi dan Gardu Induk: Sistem Maluku dan Papua		BUMN



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

Prioritas Nasional/ <i>Major Project</i>	Alokasi (Rp. Juta)	Instansi Pelaksana
Pembangunan Pembangkit Listrik: Non-EBT		BUMN
Pembangunan Pembangkit Listrik Terbarukan		BUMN
38) MP: Infrastruktur Jaringan Gas Kota untuk 4 Juta Sambungan Rumah		
Dukungan BUMN	1.240.000,0	
Pembangunan Jaringan Gas Kota:		
1. DKI Jakarta		
2. Tangerang		
3. Bekasi		
4. Karawang		
5. Cirebon		
6. Cilegon		
7. Bogor		
8. Semarang		BUMN
9. Bojonegoro		(Terintegrasi dengan PSN)
10. Surabaya		
11. Sidoarjo		
12. Pasuruan		
13. Medan		
14. Dumai		
15. Batam		
16. Palembang		
17. Lampung		
39) MP: Pipa Gas Bumi Trans Kalimantan (2.219 km)	(akan dibiayai dengan investasi badan usaha)	BADAN USAHA
40) MP: Pembangunan dan Pengembangan Kilang Minyak		
Dukungan Belanja K/L	346,7	
<i>Aspek: Dukungan Fasilitas</i>		
Fasilitas Peningkatan Infrastruktur Kilang Minyak Bumi	346,7	KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
Dukungan BUMN	79.577.460,0	
Pembangunan <i>Grass Root Refinery</i> (GRR) Tuban		BUMN (Terintegrasi dengan PSN)
Pembangunan Kilang Olefin		BUMN
Peningkatan feedstock kilang - Pengembangan eksplorasi/produksi Mahakam		BUMN
Peningkatan feedstock kilang - Pengembangan eksplorasi/produksi Rokan		BUMN
RDMP Rescaling RU V Balikpapan		BUMN (Terintegrasi dengan PSN)
RDMP Rescaling RU VI Balongan		BUMN (Terintegrasi dengan PSN)
RDMP Cilacap		BUMN (Terintegrasi dengan PSN)
Pembangunan Infrastruktur Suplai Gas ke RU V Balikpapan		BUMN
Terminal Regasifikasi LNG RU IV Cilacap		BUMN
<i>Petrochemical Complex</i> Jabar		BUMN (Terintegrasi dengan PSN)
41) MP: Transformasi Digital		
Dukungan Belanja K/L	19.146.696,0	
<i>Sub: SDM Digital Indonesia</i>		
<i>Aspek: Vokasi untuk Industri 4.0</i>		
Transformasi BLK Baru	83.747,8	KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

Prioritas Nasional/ Major Project	Alokasi (Rp. Juta)	Instansi Pelaksana
Pelatihan Bidang Komunikasi dan Informatika	2.320,3	KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
Pelatihan Bidang Komunikasi dan Informatika Di Wilayah BBPSDMP Makassar	5.449,6	KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
Pelatihan Bidang Komunikasi dan Informatika Di Wilayah BBPSDMP Medan	5.341,3	KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
Pelatihan Bidang Komunikasi dan Informatika Di Wilayah BPSDMP Jakarta	2.308,9	KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
Pelatihan Bidang Komunikasi dan Informatika Di Wilayah BPSDMP Bandung	2.244,8	KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
Pelatihan Bidang Komunikasi dan Informatika Di Wilayah BPSDMP Yogyakarta	2.276,0	KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
Pelatihan Bidang Komunikasi dan Informatika Di Wilayah BPSDMP Surabaya	2.321,5	KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
Pelatihan Bidang Komunikasi dan Informatika Di Wilayah BPSDMP Banjarmasin	2.315,4	KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
Pelatihan Bidang Komunikasi dan Informatika Di Wilayah BPSDMP Manado	2.345,3	KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
Pelatihan Bidang Komunikasi dan Informatika BPPTIK	5.272,8	KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
Tenaga Kerja Industri 4.0	6.000,0	KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN
<i>Aspek: Peningkatan kompetensi SDM pada bidang TIK</i>		
Digital Talent Scholarship	57.399,0	KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
Beasiswa S2/S3 Bidang Komunikasi dan Informatika	58.100,0	KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
Digital Talent Scholarship di Pusdiklat	4.221,0	KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
Digital Talent Scholarship di Wilayah Kerja BBPSDMP Medan	4.375,9	KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
Digital Talent Scholarship di Wilayah Kerja BBPSDMP Makassar	4.375,9	KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
Digital Talent Scholarship di Wilayah Kerja BPSDMP Jakarta	2.554,4	KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
Digital Talent Scholarship di Wilayah Kerja BPSDMP Bandung	2.554,4	KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
Digital Talent Scholarship di Wilayah Kerja BPSDMP Yogyakarta	2.554,4	KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
Digital Talent Scholarship di Wilayah Kerja BPSDMP Surabaya	2.554,4	KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
Digital Talent Scholarship di Wilayah Kerja BPSDMP Banjarmasin	2.554,4	KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
Digital Talent Scholarship di Wilayah Kerja BPSDMP Manado	2.554,4	KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
Digital Talent Scholarship di BPPTIK	4.896,9	KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
Tenaga Fasilitator Edukasi Perdagangan Melalui Sistem Elektronik Yang Mendapat Pelatihan	1.200,0	KEMENTERIAN PERDAGANGAN
<i>Aspek: Kebijakan dan Standardisasi Kompetensi pada Bidang TIK</i>		
Sertifikasi berbasis SKKNI Bidang Kominfo	707,0	KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
SDM Ekonomi Kreatif yang difasilitasi Sertifikasi	3.000,0	KEMENTERIAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF/BADAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

Prioritas Nasional/ Major Project	Alokasi (Rp. Juta)	Instansi Pelaksana
<i>Sub: Perdagangan, Perdesaan, Koperasi dan UMKM</i>		
<i>Aspek: Start Up Digital</i>		
Start Up Millennial	1.000,0	KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
Business Matchmaking Start Up Digital	19.200,0	KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
Digital Technopreneur	57.870,0	KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
Start Up Digital yang dikembangkan	1.960,0	KEMENTERIAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF/BADAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF
<i>Aspek: E-Commerce</i>		
Adopsi Teknologi Digital Sektor Strategis Pertanian	5.700,0	KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
Adopsi Teknologi Digital Sektor Strategis Pariwisata	4.000,0	KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
Adopsi Teknologi Digital Sektor Strategis Logistik	3.800,0	KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
Layanan Publik Bidang Pos	2.203,2	KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
Rekomendasi Kebijakan untuk Revisi Peraturan Menteri Kominfo Nomor 1 Tahun 2012 dan Peraturan Menteri Kominfo Nomor 4 Tahun 2021	5.096,3	KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
Pendukung Kegiatan Pemasaran Bagi Pelaku Ekonomi Kreatif	18.000,0	KEMENTERIAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF/BADAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF
Kebijakan terkait Perundingan di Organisasi Perdagangan Dunia dalam Sektor Non Pertanian dan Perdagangan Digital	650,0	KEMENTERIAN PERDAGANGAN
<i>Aspek: Digitalisasi UMKM</i>		
Adopsi Teknologi Digital UMKM	21.700,0	KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
UKM/Sentra yang difasilitasi Peningkatan Digitalisasi	750,0	KEMENTERIAN KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH
Pelaku Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif Yang Mendapat Fasilitas Konsultasi Hak Kekayaan Intelektual	3.000,0	KEMENTERIAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF/BADAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF
Produk Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Yang Mendapat Fasilitas Pendaftaran Kekayaan Intelektual	2.000,0	KEMENTERIAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF/BADAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF
Sentra IKM dan UPT Pangan, Furnitur dan Bahan Bangunan Yang Mendapat Fasilitas	3.926,6	KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN (Terintegrasi dengan PSN)
Sentra IKM dan UPT Industri Aneka dan IKM Kimia, Sandang, dan Kerajinan yang mendapat Fasilitas	2.500,0	KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN
Sentra IKM dan UPT Logam, Mesin, Elektronika, dan Alat Angkut yang Mendapat Fasilitas	2.228,9	KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN (Terintegrasi dengan PSN)
<i>Aspek: Desa Digital</i>		
Rekomendasi Pengembangan Desa Digital melalui <i>Smart Village</i>	43.210,0	KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI
Desa Digital yang dikembangkan melalui <i>Platform Akademi Desa 4.0</i>	19.950,0	KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

Prioritas Nasional/ Major Project	Alokasi (Rp. Juta)	Instansi Pelaksana
<i>Sub: Digitalisasi Bantuan Sosial</i>		
<i>Aspek: Digitalisasi dan integrasi Pelaksanaan bantuan sosial secara bertahap</i>		
Data Terpadu Kesejahteraan Sosial	11.547,4	KEMENTERIAN SOSIAL
Sistem dan Teknologi Informasi Kesejahteraan Sosial	11.928,1	KEMENTERIAN SOSIAL
<i>Sub: Kesehatan</i>		
<i>Aspek: Sistem Informasi Kesehatan</i>		
Implementasi Sistem Rujukan Terintegrasi (SISRUTE) (LR)	3.450,0	KEMENTERIAN KESEHATAN
Integrasi dan Pengembangan Sistem Data Kesehatan (TK)	5.420,5	KEMENTERIAN KESEHATAN
Integrasi dan Pengembangan Sistem Aplikasi Kesehatan (TK)	16.780,0	KEMENTERIAN KESEHATAN
Penguatan Ekosistem Digital Kesehatan (TK)	15.412,0	KEMENTERIAN KESEHATAN
Transformasi Digital (TK)	94.577,4	KEMENTERIAN KESEHATAN
Adopsi Teknologi Digital Sektor Strategis Kesehatan	4.500,0	KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
<i>Sub: Layanan Pemerintahan</i>		
<i>Aspek: Pusat Data Nasional</i>		
Pengadaan Perangkat Data Center (TK)	46.709,7	KEMENTERIAN KESEHATAN
Pengadaan Prasarana Jaringan Komunikasi Data (TK)	36.096,0	KEMENTERIAN KESEHATAN
Pemeliharaan Prasarana Teknologi Informasi dan Komunikasi (TK)	7.400,0	KEMENTERIAN KESEHATAN
Pemeliharaan Sarana Teknologi Informasi dan Komunikasi (TK)	16.152,9	KEMENTERIAN KESEHATAN
Data Center Nasional	1.189.085,0	KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
<i>Sub: Akses dan Infrastruktur</i>		
<i>Aspek: Penyediaan Akses Internet Cepat</i>		
Rekomendasi Penguatan Pemenuhan Akses dan Konsumsi Listrik pada Masyarakat	615,9	KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
Layanan Publik Bidang Telekomunikasi	6.248,3	KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
Akses Internet Tetap Pita lebar	17.909,1	KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
BTS 4G / Lastmile	389.379,7	KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
OM Palapa Ring	1.953.889,0	KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
Kerjasama Badan Usaha	121.000,0	KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
Palapa Ring Integrasi	52.141,9	KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA (Terintegrasi dengan PSN)
Rekomendasi kebijakan untuk mendukung penyelenggaraan telekomunikasi di IKN	1.672,6	KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
BTS 4G / Lastmile Papua dan Papua Barat	568.573,2	KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

Prioritas Nasional/ <i>Major Project</i>	Alokasi (Rp. Juta)	Instansi Pelaksana
OM Akses Internet	1.850.096,8	KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
OM BTS 4G / <i>Lastmile</i>	1.163.037,0	KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
Pilot Project Penyediaan Fiber Optik di Kabupaten/Kota DPSP	2.373,8	KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
OM BTS 4G / <i>Lastmile</i> Papua dan Papua Barat	1.702.600,0	KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
OM Akses Internet Papua dan Papua Barat	119.045,6	KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
OM Penyediaan Kapasitas Satelit	2.502.762,0	KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
SATRIA 2	2.000,0	KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
Akses Internet	422.320,0	KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
Akses Internet Papua dan Papua Barat	137.878,4	KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
Satelit Multifungsi (Konstruksi - Investasi BUP KPBU)	1.605.250,0	KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA(KPBU)
Rekomendasi Kebijakan Bidang Telekomunikasi dan Informatika	2.726,0	KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG POLITIK, HUKUM DAN KEAMANAN
<i>Aspek: Pengembangan Penyiaran Digital</i>		
Rekomendasi Kebijakan Terkait Penyiaran Digital	14.136,6	KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
Pengembangan Pusat Monitoring Telekomunikasi, Pos dan Penyiaran	24.942,4	KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
OM Pusat Monitoring Telekomunikasi, Pos dan Penyiaran	90.688,4	KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
<i>Digital Broadcasting System</i> (DBS)	1.098.110,0	KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
Layanan Publik Bidang Penyiaran	15.729,6	KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
Dukungan Ekosistem Siaran Layanan TV Digital	28.030,9	KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
Sistem Infrastruktur Penyiaran Digital	307.940,0	TELEVISI REPUBLIK INDONESIA
<i>Aspek: Frekuensi dan Perangkat TIK</i>		
Penerimaan serta penanganan piutang dan akuntabilitas PNPB BHP Frekrad dan SOR	2.039,0	KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
Pembangunan Sistem Monitoring Frekuensi Radio (SMFR)	76.729,5	KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
Pengembangan Infrastruktur SIMS	31.175,0	KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
Rekomendasi Kebijakan yang Mendukung Optimalisasi Penyediaan Spektrum Frekuensi Radio untuk Broadband	21.810,0	KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
Rekomendasi kebijakan yang mendukung optimalisasi spektrum frekuensi radio untuk digitalisasi penyiaran	4.393,9	KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
Koordinasi Nasional Identifikasi, Implementasi dan Pengendalian IMEI	2.128,6	KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
Pengembangan Laboratorium BBPPT dan Sarana Pendukung	600.000,0	KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

Prioritas Nasional/ <i>Major Project</i>	Alokasi (Rp. Juta)	Instansi Pelaksana
<i>Sub: Literasi Digital Masyarakat</i>		
<i>Aspek: Peningkatan Literasi Masyarakat</i>		
Literasi Digital	550.000,0	KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
<i>Sub: Keamanan Siber</i>		
<i>Aspek: penguatan Infrastruktur, SDM, dan Regulasi Keamanan Siber</i>		
Peningkatan Kompetensi SDM Intelijen Siber	2.500,0	BADAN INTELIJEN NEGARA
<i>Integrasi Cyber Intelligent Analytics (CIA)</i>	50.000,0	BADAN INTELIJEN NEGARA
Penguatan Operasi Intelijen Siber	12.500,0	BADAN INTELIJEN NEGARA
Peningkatan Kerjasama Intelijen Siber Antar Lembaga Intelijen Dunia	2.000,0	BADAN INTELIJEN NEGARA
Kerja Sama Regional, Bilateral, dan Multilateral Bidang Keamanan Siber (RKP 2023)	1.591,1	BADAN SIBER DAN SANDI NEGARA
Lulusan Pengembangan SDM di Bidang Keamanan Siber K/L/D (RKP 2023)	2.236,6	BADAN SIBER DAN SANDI NEGARA
Peningkatan Kompetensi SDM pengelola keamanan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) pada K/L/D (RKP 2023)	1.067,8	BADAN SIBER DAN SANDI NEGARA
Pengendalian Tata Kelola PSE dan Transaksi PSE	16.523,4	KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
Pengembangan dan Penerapan Data <i>Protection Officer</i>	4.503,6	KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
Penanganan dan Penanggulangan Konten Negatif	70.480,4	KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
Rekomendasi Kebijakan Pelaksanaan Pelindungan Data Pribadi	6.100,0	KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
Penyelenggaraan Sertifikasi Elektronik Induk (PSrE Induk)	16.141,6	KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
Peningkatan Kapasitas SDM Siber melalui Sertifikasi CEH dan CHFI (PN)	148,5	KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
<i>Aspek: Penyelesaian Kejahatan Siber</i>		
Penanganan Tindak Pidana Siber (PN)	14.831,7	KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
<i>Aspek: Pembangunan Pertahanan Siber</i>		
Siber	54.835,0	KEMENTERIAN PERTAHANAN
<i>Aspek: Pembangunan dan Penguatan Tim Cepat Tanggap Keamanan Siber</i>		
Pembentukan tim Respon Ancaman Intelijen Siber	3.500,0	BADAN INTELIJEN NEGARA
Tim Tanggap Insiden Siber (CSIRT) pada Sektor Pemerintah Daerah yang teregistrasi (RKP 2023)	2.506,3	BADAN SIBER DAN SANDI NEGARA
Tim Tanggap Insiden Siber (CSIRT) pada Sektor Pemerintah yang teregistrasi (RKP 2023)	4.894,7	BADAN SIBER DAN SANDI NEGARA
<i>Sub: industri 4.0</i>		
<i>Aspek: Pengembangan ekosistem inovasi, infrastruktur digital dan insentif investasi teknologi</i>		
Adopsi Teknologi Digital Sektor Strategis Maritim	5.000,0	KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
Lembaga/Komunitas/Asosiasi yang mendapat fasilitasi dalam rangka pengembangan ekosistem ekonomi digital	1.500,0	KEMENTERIAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF/BADAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF
Pendampingan Penerapan Industri 4.0 di Sektor Industri Makanan, Hasil Laut dan Perikanan	2.000,0	KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

Prioritas Nasional/ <i>Major Project</i>	Alokasi (Rp. Juta)	Instansi Pelaksana
Industri Sektor Elektronika yang terfasilitasi menuju Industri 4.0 melalui Pendampingan	2.400,0	KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN
Pendampingan Implementasi Industri 4.0 sektor Industri Kimia Hilir dan Farmasi	2.700,0	KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN
Pendampingan Implementasi Industri 4.0 sektor Industri Semen Keramik dan Pengolahan Bahan Galian Nonlogam	2.800,0	KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN
Industri Sektor Otomotif yang terfasilitasi menuju Industri 4.0 melalui Pendampingan	2.500,0	KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN
Pendampingan Penerapan Industri 4.0 di Sektor Industri Minuman, Hasil Tembakau, dan Bahan Penyegar	2.000,0	KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN
Memfasilitasi Implementasi Industri 4.0 Sektor Tekstil dan <i>Apparel</i>	1.580,0	KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN
Industri Sektor Permesinan dan Alat Mesin Pertanian yang terfasilitasi menuju Industri 4.0 melalui Pendampingan	3.000,0	KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN
Pendampingan Implementasi 4.0 Sektor Industri Kimia Hulu	1.000,0	KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN
Pemberdayaan Industri Kecil dan Menengah Dalam Rangka Penerapan <i>Making Indonesia 4.0</i>	5.878,2	KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN
<i>Sub: Layanan Pemerintahan</i>		
<i>Aspek: Penerapan SPBE Terintegrasi</i>		
Instansi Pemerintah Daerah Wilayah Timur yang menerapkan Aplikasi Kearsipan Berbagi Pakai Berbasis Elektronik (Srikandi)	2.100,0	ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA
Instansi Pusat yang menerapkan Aplikasi Kearsipan Berbagi Pakai Berbasis Elektronik (Srikandi)	1.000,0	ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA
Instansi Pemerintah Daerah Wilayah Barat yang menerapkan Aplikasi Kearsipan Berbagi Pakai Berbasis Elektronik (Srikandi)	2.345,0	ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA
<i>Prototipe Cloud Services SPBE</i>	3.600,0	BADAN PENGKAJIAN DAN PENERAPAN TEKNOLOGI (BPPT)
Penyelenggaraan Aplikasi Generik Berbasis <i>Cloud</i> Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) (baru, pengembangan, operasional dan pemeliharaan)	31.700,0	KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
Penyelenggaraan Sistem Peradilan Pidana Terpadu berbasis Teknologi Informasi	1.000,0	KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
<i>Aspek: Pelayanan Publik Berbasis Elektronik (E-Services) yang Terintegrasi</i>		
Sistem informasi pembangunan daerah (data pembangunan daerah, profil dan analisis daerah, e-rakortek, monev bangda) yang dikembangkan	1.000,0	KEMENTERIAN DALAM NEGERI
Fasilitasi Pembentukan Data Kelahiran dan Kematian yang Terintegrasi Antar Lembaga	2.500,0	KEMENTERIAN DALAM NEGERI
Daerah yang Menerapkan Sistem Informasi Keuangan Daerah dalam SIPD Bidang Perencanaan Anggaran	1.450,0	KEMENTERIAN DALAM NEGERI
Penerapan PTSP Prima berbasis elektronik	2.036,1	KEMENTERIAN DALAM NEGERI
Sistem perizinan pusat-daerah yang terintegrasi	4.200,0	KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
Pengembangan <i>National Logistic Ecosystem</i> (PN)	1.055,4	KEMENTERIAN KEUANGAN
<i>Core Tax System</i> (PN)	545.256,8	KEMENTERIAN KEUANGAN
<i>Masterplan Smart City</i>	31.000,0	KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
Rancangan Portal Pelayanan Publik	2.600,0	KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

Prioritas Nasional/ Major Project	Alokasi (Rp. Juta)	Instansi Pelaksana
<i>Sub: Pendidikan</i>		
<i>Aspek: Pemanfaatan TIK untuk Peningkatan Kualitas Pengajaran dan Pembelajaran</i>		
<i>Platform E-learning</i> Madrasah yang Dikelola	9.250,0	KEMENTERIAN AGAMA
Adopsi Teknologi Digital Sektor Staregis Pendidikan	6.800,0	KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
Program Studi dengan Inovasi Pembelajaran Digital dan Berkualitas	68.863,4	KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
<i>Platform</i> Digital Pendidikan Merdeka Belajar	601.500,0	KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
<i>E-Journal</i> yang Dilanggan	40.560,4	PERPUSTAKAAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA
Pojok Baca Digital di Daerah	25.000,0	PERPUSTAKAAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA
Bahan Perpustakaan dan Naskah Kuno yang Dialih mediakan	8.904,3	PERPUSTAKAAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA
Kanal Pendidikan dan Budaya	5.778,5	TELEVISI REPUBLIK INDONESIA
Dukungan BUMN	9.106.180,0	
Percepatan Pengembangan Digital PLN		BUMN
Investasi Bank Himbara untuk Pengembangan Digital (IT)		BUMN
Dukungan Swasta	3.426.000,0 ^{a)}	
Pembangunan Data Center		Swasta
PN 6 : MEMBANGUN LINGKUNGAN HIDUP, MENINGKATKAN KETAHANAN BENCANA, DAN PERUBAHAN IKLIM		
42) MP: Pembangunan Fasilitas Pengolahan Limbah B3		
Dukungan Belanja K/L	142.462,4	
<i>Sub: Fasilitas Pengolahan Limbah B3 Terpadu</i>		
<i>Aspek: Pembangunan Fasilitas Pengolahan Limbah B3 Terpadu</i>		
Persiapan Pembangunan Fasilitas Pengelolaan Limbah B3 dan Sampah Spesifik secara Terpadu	2.859,9	KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
<i>Aspek: Enablers</i>		
Kebijakan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya Beracun (B3) di sektor industri	450,0	KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN
<i>Sub: Fasilitas Pengolahan Limbah B3 Medis dari Fasyankes</i>		
<i>Aspek: Pembangunan Fasilitas Pengolahan Limbah B3 Medis</i>		
Pembangunan Fasilitas Pengolahan Limbah B3 dari Fasyankes	122.100,0	KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
<i>Aspek: Enablers</i>		
Bantuan Peralatan/Sarana Penyehatan Lingkungan (01)	325,0	KEMENTERIAN KESEHATAN
Data dan Informasi Publik Penyehatan Lingkungan (01)	483,4	KEMENTERIAN KESEHATAN



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

Prioritas Nasional/ Major Project	Alokasi (Rp. Juta)	Instansi Pelaksana
Fasilitasi dan Pembinaan Pemerintah Daerah dalam rangka penyehatan lingkungan (01)	16.244,1	KEMENTERIAN KESEHATAN
43) MP: Penguatan Sistem Peringatan Dini Bencana		
Dukungan Belanja K/L dan DAK	1.493.404,2	
<i>Aspek: Penguatan Tata Kelola EWS Bencana</i>		
Pemeliharaan operasional Jaringan informasi dan komunikasi MKG	139.294,1	BADAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI DAN GEOFISIKA
Pengembangan sistem big data dan HPC melalui IDRIP	60.636,0	BADAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI DAN GEOFISIKA
Jaringan komunikasi dan informasi MKG	1.000,0	BADAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI DAN GEOFISIKA
Jaringan informasi dan komunikasi MKG melalui IDRIP	9.485,4	BADAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI DAN GEOFISIKA
Pemeliharaan operasional aloptama MKG didaerah	79.619,7	BADAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI DAN GEOFISIKA
Prasarana pengelolaan database dan teknologi informasi kebencanaan	3.000,0	BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA (BNPB)
Analisis Pengembangan Strategi Penanggulangan Bencana	2.150,0	BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA (BNPB)
Rancang Bangun Sistem PB	1.210,0	BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA (BNPB)
Pembuatan dan Pemasangan Rambu, Papan Evakuasi dan Informasi Bencana (IDRIP)	4.456,0	BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA (BNPB)
Fasilitasi Penguatan Respon Sistem Peringatan Dini Bencana	1.900,0	BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA (BNPB)
Fasilitasi Penguatan Ketangguhan Masyarakat Berbasis Komunitas dan Keluarga	85.850,5	BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA (BNPB)
Geladi Penanggulangan Bencana Internasional	6.000,0	BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA (BNPB)
Penerapan Pengintegrasian dan pengarusutamaan pengurangan risiko bencana di Daerah	1.320,0	KEMENTERIAN DALAM NEGERI
Program Produksi Siaran Tanggap Bencana Prioritas Nasional	3.919,7	LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK RADIO REPUBLIK INDONESIA
<i>Aspek: Penguatan EWS Bencana Lingkungan</i>		
Pemeliharaan peralatan operasional informasi iklim terapan dan kualitas udara	8.330,0	BADAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI DAN GEOFISIKA
Sistem operasional informasi kualitas Udara	24.243,0	BADAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI DAN GEOFISIKA
Lingkungan Hidup - Tematik Penguatan Destinasi Pariwisata Prioritas (1301 - Kab. Kepulauan Mentawai)	1.634,7	DAK
Lingkungan Hidup - Tematik Penguatan Destinasi Pariwisata Prioritas (1605 - Kab. Musi Rawas)	1.634,7	DAK
Lingkungan Hidup - Tematik Penguatan Destinasi Pariwisata Prioritas (1902 - Kab. Belitung)	2.758,0	DAK
Lingkungan Hidup - Tematik Penguatan Destinasi Pariwisata Prioritas (3304 - Kab. Banjarnegara)	3.052,3	DAK
Lingkungan Hidup - Tematik Penguatan Destinasi Pariwisata Prioritas (3307 - Kab. Wonosobo)	1.634,7	DAK
Lingkungan Hidup - Tematik Penguatan Destinasi Pariwisata Prioritas (3322 - Kab. Semarang)	1.927,9	DAK
Lingkungan Hidup - Tematik Penguatan Destinasi Pariwisata Prioritas (3374 - Kota Semarang)	1.927,9	DAK



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

Prioritas Nasional/ <i>Major Project</i>	Alokasi (Rp. Juta)	Instansi Pelaksana
Lingkungan Hidup - Tematik Penguatan Destinasi Pariwisata Prioritas (3401 - Kab. Kulon Progo)	2.029,4	DAK
Lingkungan Hidup - Tematik Penguatan Destinasi Pariwisata Prioritas (3508 - Kab. Lumajang)	2.128,1	DAK
Lingkungan Hidup - Tematik Penguatan Destinasi Pariwisata Prioritas (3602 - Kab. Lebak)	1.400,0	DAK
Lingkungan Hidup - Tematik Penguatan Destinasi Pariwisata Prioritas (5105 - Kab. Klungkung)	1.634,7	DAK
Lingkungan Hidup - Tematik Penguatan Destinasi Pariwisata Prioritas (5106 - Kab. Bangli)	1.634,7	DAK
Lingkungan Hidup - Tematik Penguatan Destinasi Pariwisata Prioritas (6306 - Kab. Hulu Sungai Selatan)	4.693,6	DAK
Lingkungan Hidup - Tematik Penguatan Destinasi Pariwisata Prioritas (7302 - Kab. Bulukumba)	6.963,1	DAK
Lingkungan Hidup - Tematik Penguatan Destinasi Pariwisata Prioritas (7471 - Kota Kendari)	1.634,7	DAK
Lingkungan Hidup - Tematik Penguatan Destinasi Pariwisata Prioritas (9103 - Kab. Teluk Wondama)	2.970,7	DAK
Lingkungan Hidup - Tematik Penguatan Destinasi Pariwisata Prioritas (9107 - Kab. Sorong)	2.368,2	DAK
Alat Pemantauan Kualitas Air Otomatis	274.000,0	KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
Perawatan Alat Pemantauan Kualitas Air Otomatis	15.000,0	KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
Alat Pemantauan Kualitas Udara Otomatis	53.481,0	KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
Perawatan Alat Pemantauan Kualitas Udara Otomatis	9.000,0	KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
<i>Aspek: Penguatan EWS Bencana Hidrometeorologi</i>		
Layanan informasi meteorologi publik	50.000,0	BADAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI DAN GEOFISIKA
Layanan Peringatan Dini Cuaca dengan <i>Scaling Up Weather Capacity II</i>	38.489,1	BADAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI DAN GEOFISIKA
peralatan Penguatan <i>Strengthening climate and weather service capacity Phase II (SIMM 2)</i>	50.000,0	BADAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI DAN GEOFISIKA
Layanan Informasi meteorologi maritim (<i>Strengthening of Marine Meteorology</i>)	150.000,0	BADAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI DAN GEOFISIKA
Layanan Informasi iklim terapan melalui Sekolah lapang Iklim (SLI)	5.991,6	BADAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI DAN GEOFISIKA
Pengadaan perangkat pengolah data informasi sistem operasional diseminasi informasi iklim terapan	2.377,8	BADAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI DAN GEOFISIKA
Pembangunan Alat Pendeteksi Geser Angin (<i>Windshear</i>) melalui FIR	1.000,0	BADAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI DAN GEOFISIKA
Layanan Informasi meteorologi maritim melalui Sekolah Lapang Cuaca Nelayan (SLCN) Wilayah Barat	3.453,6	BADAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI DAN GEOFISIKA
Layanan Informasi meteorologi maritim melalui Sekolah Lapang Cuaca Nelayan (SLCN) Wilayah Tengah	1.864,5	BADAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI DAN GEOFISIKA
Layanan Informasi meteorologi maritim melalui Sekolah Lapang Cuaca Nelayan (SLCN) Wilayah Timur	1.003,8	BADAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI DAN GEOFISIKA



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

Prioritas Nasional/ Major Project	Alokasi (Rp. Juta)	Instansi Pelaksana
<i>Aspek: Penguatan EWS Bencana Geofisika, Tsunami, dan Gunung Api</i>		
Stasiun Ina-CORS yang dibangun guna mendukung SRGI di Pulau Sumatera	4.266,8	BADAN INFORMASI GEOSPASIAL (BIG)
Stasiun Ina-CORS yang dibangun guna mendukung SRGI di Pulau Jawa	3.405,2	BADAN INFORMASI GEOSPASIAL (BIG)
Stasiun Ina-CORS yang dibangun guna mendukung SRGI di Pulau Papua	2.007,7	BADAN INFORMASI GEOSPASIAL (BIG)
Stasiun Ina-CORS yang dibangun guna mendukung SRGI di Kepulauan Maluku	1.289,5	BADAN INFORMASI GEOSPASIAL (BIG)
Stasiun Ina-CORS yang dibangun guna mendukung Ina-TEWS di Pulau Sulawesi	1.837,7	BADAN INFORMASI GEOSPASIAL (BIG)
Stasiun Ina-CORS yang dibangun guna mendukung Ina-TEWS di Pulau Sumatera	1.242,3	BADAN INFORMASI GEOSPASIAL (BIG)
Stasiun Ina-Cors yang dibangun guna mendukung Ina-TEWS di Pulau Jawa	2.264,6	BADAN INFORMASI GEOSPASIAL (BIG)
Stasiun Ina-CORS yang dibangun guna mendukung Ina-TEWS di Pulau Bali	1.275,8	BADAN INFORMASI GEOSPASIAL (BIG)
Stasiun Ina-CORS yang dibangun guna mendukung Ina-TEWS di Kepulauan Maluku	1.286,3	BADAN INFORMASI GEOSPASIAL (BIG)
Stasiun Pasang Surut Permanen Ina-TEWS yang dibangun di Pulau Sulawesi	10.374,4	BADAN INFORMASI GEOSPASIAL (BIG)
Stasiun Pasang Surut Permanen Ina-Tews yang dibangun Kepulauan Maluku	1.820,7	BADAN INFORMASI GEOSPASIAL (BIG)
Stasiun Pasang Surut Permanen Ina-Tews yang dibangun di Pulau Nusa Tenggara	2.987,3	BADAN INFORMASI GEOSPASIAL (BIG)
Stasiun Ina-CORS yang dibangun guna mendukung SRGI di Pulau Sulawesi	2.499,1	BADAN INFORMASI GEOSPASIAL (BIG)
Stasiun Pasang Surut Permanen Ina-Tews Yang Dibangun Pulau Jawa	2.094,9	BADAN INFORMASI GEOSPASIAL (BIG)
Stasiun Ina-CORS yang dibangun Guna Mendukung SRGI di Pulau Nusa Tenggara	1.845,7	BADAN INFORMASI GEOSPASIAL (BIG)
Pemeliharaan operasional layanan informasi gempa bumi dan peringatan dini tsunami yang berkualitas	81.049,6	BADAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI DAN GEOFISIKA
Peralatan seismograf untuk Informasi gempa bumi dan tsunami	23.026,0	BADAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI DAN GEOFISIKA
Pengadaan perangkat pengolah data informasi geofisika potensial	6.960,0	BADAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI DAN GEOFISIKA
Layanan Informasi Gempa bumi dan Peringatan Dini Tsunami yang berkualitas	26.925,5	BADAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI DAN GEOFISIKA
Layanan Informasi kerentanan seismik di kota besar	1.600,0	BADAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI DAN GEOFISIKA
Peralatan monitoring dampak akibat gempa bumi dengan peralatan intensimeter dan accelerograph melalui IDRIP	3.101,5	BADAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI DAN GEOFISIKA
Peralatan monitoring gempa bumi dan tsunami melalui Indonesia Disaster Resillience Initiatives Project (IDRIP)	76.777,1	BADAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI DAN GEOFISIKA
Pengadaan perangkat pengolah data informasi tanda waktu	1.972,0	BADAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI DAN GEOFISIKA
Layanan Informasi gempa bumi dan tsunami melalui Sekolah Lapang gempa bumi (SLG) Wilayah Barat	1.337,8	BADAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI DAN GEOFISIKA



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

Prioritas Nasional/ Major Project	Alokasi (Rp. Juta)	Instansi Pelaksana
Layanan Informasi gempa bumi dan tsunami melalui Sekolah Lapang gempa bumi (SLG) Wilayah Tengah	1.966,0	BADAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI DAN GEOFISIKA
Layanan Informasi gempa bumi dan tsunami melalui Sekolah Lapang gempa bumi (SLG) Wilayah Timur	3.729,0	BADAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI DAN GEOFISIKA
Penguatan Instrumen Peringatan Dini Bencana Gunung Api	1.890,0	BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA (BNPB)
Sistem Mitigasi Bencana Geologi Yang Dikembangkan	57.552,7	KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
Pos Pengamatan Gunung api yang Dikembangkan	27.017,3	KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
Peta Kawasan Rawan Bencana Geologi	1.286,6	KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
Peta Zona Kerentanan Likuifaksi	1.198,5	KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
PN 7: MEMPERKUAT STABILITAS POLHUKHANKAM DAN TRANSFORMASI PELAYANAN PUBLIK		
44) MP: Penguatan NSOC-SOC dan Pembentukan 121 CSIRT		
Dukungan Belanja K/L	232.658,8	
<i>Aspek: Penyelesaian Kejahatan Siber</i>		
Penanganan Perkara Siber	4.547,2	KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA
Penanganan Tindak Pidana Siber (PN)	14.831,7	KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
<i>Aspek: Penguatan Keamanan dan Ketahanan Siber</i>		
Penguatan Operasi Intelijen Siber	12.500,0	BADAN INTELIJEN NEGARA
Peningkatan Kerjasama Intelijen Siber Antar Lembaga Intelijen Dunia	2.000,0	BADAN INTELIJEN NEGARA
<i>Aspek: Penguatan Infrastruktur, SDM, dan Regulasi Keamanan Siber</i>		
Peningkatan Kompetensi SDM Intelijen Siber	2.500,0	BADAN INTELIJEN NEGARA
Integrasi Cyber Intelligent Analytics (CIA)	50.000,0	BADAN INTELIJEN NEGARA
Lulusan Pengembangan SDM di Bidang Keamanan Siber K/L/D (RKP 2023)	2.236,6	BADAN SIBER DAN SANDI NEGARA
Penguatan Ekosistem Keamanan Siber di Indonesia	2.000,0	BADAN SIBER DAN SANDI NEGARA
Peningkatan Kompetensi SDM pengelola keamanan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) pada K/L/D (RKP 2023)	1.067,8	BADAN SIBER DAN SANDI NEGARA
Pengembangan Perangkat Intelijen Pemantauan Serangan Siber dan Pusat Data SOC	66.000,0	KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA
Peningkatan Kapasitas SDM Siber melalui Sertifikasi CEH dan CHFI (PN)	148,5	KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
<i>Aspek: Pencegahan Kejahatan Siber dan Peningkatan Kerja Sama Internasional Bidang Siber</i>		
Kerja Sama Regional, Bilateral, dan Multilateral Bidang Keamanan Siber (RKP 2023)	1.591,1	BADAN SIBER DAN SANDI NEGARA
<i>Aspek: Pembangunan Pertahanan Siber</i>		
Jumlah Pemeliharaan atau Perawatan atau Peningkatan Pertahanan Siber TNI AD	7.500,0	KEMENTERIAN PERTAHANAN
Siber	54.835,0	KEMENTERIAN PERTAHANAN



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

Prioritas Nasional / Major Project	Alokasi (Rp. Juta)	Instansi Pelaksana
<i>Aspek: Pembangunan dan Penguatan Tim Cepat Tanggap Keamanan Siber</i>		
Pembentukan tim Respon Ancaman Intelijen Siber	3.500,0	BADAN INTELIJEN NEGARA
Tim Tanggap Insiden Siber (CSIRT) pada Sektor Pemerintah Daerah yang teregistrasi (RKP 2023)	2.506,3	BADAN SIBER DAN SANDI NEGARA
Tim Tanggap Insiden Siber (CSIRT) pada Sektor Pemerintah yang teregistrasi (RKP 2023)	4.894,7	BADAN SIBER DAN SANDI NEGARA
45) MP: Penguatan Keamanan Laut di Natuna		
Dukungan Belanja K/L	178.058,7	
<i>Aspek: Penguatan Kapasitas Operasi Keamanan Laut</i>		
Pembangunan Pangkalan Setokok	155.737,1	BADAN KEAMANAN LAUT
<i>Aspek: Pembangunan Sarana-Prasarana Pertahanan</i>		
Sarpras Militer Pulau Strategis	22.321,6	KEMENTERIAN PERTAHANAN

KETERANGAN:

a) Data Proyek Prioritas Investasi Swasta per 24 November 2022.

CATATAN:

1. Sesuai dengan pendekatan THIS, sebuah proyek dapat mendukung lebih dari 1 (satu) *Major Project*;
2. Tidak seluruh RO/proyek pendukung *Major Project* ditampilkan;
3. Pada beberapa *Major Project* dilaksanakan melalui dukungan pendanaan dari BUMN/Swasta/Daerah sehingga belanja K/L hanya sebagai fasilitator contoh Pipa Gas Bumi Trans Kalimantan (2.219 km);
4. *Major Project* didukung oleh pendanaan dan investasi yang bersumber dari Belanja K/L, Dana Transfer Khusus Fisik, KPBU, dan Badan Usaha (BUMN/Swasta);
5. Proyek DAK merupakan pagu alokasi DAK Fisik per subbidang per tematik per daerah berdasarkan Perpres Rincian APBN TA 2023;
6. Alokasi pendanaan/investasi KPBU bersifat indikatif;
7. Perubahan rincian dan pendanaan proyek Belanja K/L, DAK Fisik, dan KPBU pada tahun pelaksanaan dapat dilakukan dengan persetujuan Menteri PPN/Kepala Bappenas dan Menteri Keuangan.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

JOKO WIDODO

Salinan sesuai dengan aslinya
KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA
REPUBLIK INDONESIA

Deputi Bidang Perundang-undangan dan
Administrasi Hukum,



Lydia Silvanna Djaman